NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT

Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur

Pengantar

KH. Miftahul Achyar Abdul Ghoni (Rais Syuriah PWNU Jatim)
KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH. MM (Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim)

Pengantar

KH. Miftahul Achyar Abdul Ghoni
(Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur)

KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH. MM
(Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur)

NU Menjawab

PROBLEMATIKA UMAT

Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur

Jilid 2

2009 - 2014

Penerbit:

PW LBM NU
JAWA TIMUR

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tim PW LBM NU Jawa Timur
NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014
-- Pustaka Gerbang Lama dan PW LBM NU Jawa Timur, 2015
xxii + 850 hlm; 16,5 x 24 cm

ISBN Lengkap : 978-602-97112-9-5
ISBN Jilid 2 : 978-602-97112-8-8

1. Buku Hukum Islam Aktual I. Judul
II. Tim PW LBM NU Jawa Timur

NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014

Penyusun
Tim PW LBM NU Jawa Timur

Editor
Ahmad Muntaha AM

Layout
Aziz Irsyad

Perwajahan
Muhammad Fathan

Penerbit
PW LBM NU Jawa Timur
Lantai 2 Sayap Kiri Kantor PWNU Jawa Timur
Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 9 Surabaya
Email: timmanajerialnmpu@gmail.com
Hand Phone 0856-4537-7399
WhatsApp 0896-3807-5625

Cetakan I, Agustus 2015

ISBN Lengkap : 978-602-97112-9-5
ISBN Jilid 1 : 978-602-97112-8-8

Pengantar Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً وَهِدَايَةً لِلْعَالَمِيْنَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. وَبَعْدُ:

Nahdhatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan Islam (*jam'iyyah diniyyah Islamiyyah*) yang sangat besar dengan basis massa yang tersebar luas di seluruh penjuru tanah air. Karena itu, tidak mengherankan jika NU oleh banyak kalangan dianggap sebagai organisasi massa keagamaan terbesar di Indonesia. Basis massa NU memiliki tipologi yang unik dan berbeda dengan pengikut organisi keagamaan pada umumnya, dimana para pengikut NU atau yang biasa disebut "Warga NU" mempunyai ikatan yang sangat kokoh.

Bahsul Masail yang menjadi agenda setengah tahunan PWNU Jawa Timur telah dilaksanakan dengan sangat baik, nyaris sempurna oleh PW LBM NU Jawa Timur periode 2013-2018. Keputusan-keputusan sejak 1979-2009 siap disebarluaskan untuk lebih membumikan hasil Bahtsul Masail dan hadir dipangkuan warga Nahdliyyin sebagai bekal untuk memaksimalkan hidup dan kehidupan yang prima, sekaligus menjadi mitra kehidupan dalam beribadah dan ber*mu'amalah* yang selalu menghadapi tantangan keabsahan dan kebenarannya dari berbagai pihak. Buku ini akan memandu warga Nahdliyyin, para pembaca dan pemerhati menuju hidup mulia dunia dan akhirat.

Alur Pembentukan Hukum Fikih

1. Sumber Hukum Islam: Al Quran dan Al Hadits.
2. Kemudian lahir *Ushul Fiqh* sebagai metodologi dalam melahirkan hukum menggunakan pola pikir deduktif (*istinbath*).
3. Selanjutnya menghasilkan Hukum Fikih dengan materi beragam dalam kitab yang sangat banyak, baik yang *mu'tabarah* ditunjang kitab lain serta analisis pada pakar disiplin ilmu dalam permasalahan-permasalahan baru yang membutuhkan kepastian hukum *syar'i*. Setelah diteliti persamaan hukum fikih menggunakan pola pikir induktif (*istiqra'*), lalu masalah-masalah yang serupa dikelompokkan.

4. Akhirnya melahirkan *Qawaid Fiqhiyah* yang memudahkan ulama dalam menentukan hukum fikih terhadap persoalan baru.
5. Setelah melalui pengujian dan dengan dukungan *Ushul Fiqh*, maka konklusinya adalah terbentuknya hukum fikih baru, *Aqalliyat, Medis, Waqi', Maratib al-A'mal*, dan *Aulawiyah* maupun *Fatwa-fatwa* untuk permasalahan kontemporer menyambut kebutuhan masa kini sekaligus menghidupkan *Sunnah at-Tadarruj at-Tasyri'i*.

Sumber Hukum Penetapan dalam Bahtsul Masail: Al Quran dan Al Hadits, *Ushul al-Fiqh* (*ijma'*, *qiyas*, kaidah *ushul*), Fikih (hasil dari *istinbath al-ahkam*), *Qawaid Fiqhiyah*, dan sejenisnya).

Fikih secara etimologi berarti pemahaman. Allah ﷻ berfirman:

قَالُوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ. (هود: ٩١)

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami". (QS. Hud: 91)

Al-Masail al-Fiqhiyah

Secara terminologi Fikih berarti pengetahuan hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan dan digali dari dalilnya secara terperinci.

Adalah *Sumber Tujuan* setiap perbuatan *mukallaf* yang memiliki nilai perbuatan dan telah ditetapkan hukumnya. Nilai perbuatan itu bisa berbentuk wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh.

Fikih berkaitan dengan masalah *amaliyah mukallaf*. Sebagai sumber atau landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fikih yang disepakati ulama (*al-mashadir al-asasiyah*) yaitu: Al Quran, as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Masail merupakan jamak dari kata *Masalah* yang berarti persoalan. Sedangkan kata *Fiqhiyah* dari kata *Fiqh* yang berarti pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam hasil dari suatu *ijtihad*.

Jadi, *al-Masail al-Fiqhiyah* berarti persoalan hukum Islam yang selalu dihadapi umat Islam, sehingga mereka beraktifitas dalam sehari-hari selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam.

Al-Masail al-Fiqhiyah disebut pula *Masail al-Fiqhiyah al-Haditsah*

(persoalan hukum Islam baru), atau *al-Masail al-Fiqhiyah al-'Ashriyah*. Fokus kajiannya tidak hanya membahas persoalan fikih, namun juga akidah dan persoalan akhlak, maka disebut *al-Masail al-Diniyah al-Haditsah / al-'Ashriyah* (*al-Waqi'iyah*).

Keniscayaan Menepis Kejumudan

NU memandang bahwa penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional adalah suatu keniscayaan, karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam yang NU. Masalah *fiqhiyah* niscaya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pemahaman fikih yang *jumud* dan *konservatif* jelas bertentangan dengan semangat *ijtihad* demi membangun tatanan kehidupan beragama yang lebih baik dan beradab dengan tetap berpegang teguh pada prinsip beragama yang *hanif*. Al-Imam al-Qarafi menyatakan:

اَلْجُمُودُ عَلَى الْمَنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِيْنَ (الفروق، جـ ١ صـ ١٧٦)

Tidak bisa dipungkiri bahwa Bahtsul Masail merupakan tradisi akademis yang khas dimiliki NU dan Pesantren yang di satu sisi mampu menggambarkan dinamika intelektual dalam tubuh NU, namun pada sisi lain menjadi sasaran kritik tajam dari pihak dalam maupun luar NU karena 'dituduh' melembagakan stagnasi pemikiran para ahli fikih.

Dalam tradisi Bahtsul Masail beragam dalil (argumentasi) yang digunakan untuk memperkuat pendapat para pengkajinya bersumber dari literatur klasik kitab-kitab kuning, khususnya yang bersinggungan dengan fikih. Kenyataan ini sangat mungkin mereka lakukan, karena deskripsi masalah yang dikaji dalam Bahtsul Masail terlebih dahulu telah diinformasikan kepada para peserta beberapa waktu sebelumnya. Karena itu, para peserta mempunyai waktu mengumpulkan bahan-bahan sebelum mengikuti Bahtsul Masail.

Dari sekian ilmu pengetahuan agama, Fikih menjadi disiplin yang dianggap paling penting di lingkungan NU. Fikih diposisikan sebagai ratu ilmu pengetahuan. Sebab, Fikih merupakan petunjuk bagi seluruh perilaku dan penjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Fikih merupakan tuntunan praktis mempraktekkan agama dalam berbagai bidang kehidupan, dari soal beribadah hingga berpolitik. Sehingga bisa dikatakan, merah hitamnya masyarakat NU, baik dalam kehidupan kegamaan, sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik tergantung pada fikih yang dianutnya. Kedudukan fikih sebagai unsur penting dalam

membentuk struktur nilai dan pranata sosial, menempatkannya pada posisi strategis bagi upaya perubahan. Untuk melakukan transformasi di lingkungan NU mesti dibarengi dengan transformasi tradisi pemikiran fikih baik kerangka teoritis *(ushul fiqh)* maupun kaidah-kaidah fikih *(qawaid al-fiqhiyah)*.

Cita-cita suci Mazhab Empat sebagai *founding father* disiplin ilmu fikih yang berdasar atas *istinbath*, bukan atas otak-atik rekayasa pemikiran dapat direaktualisasikan. Sebutlah lebah, mazhab empat adalah sosok yang menyarikan bunga yang berupa teks menjadi madu-madu yang manis. Artinya; mereka mengonsep fikih dan mengontekstualisasikan teks tanpa mengobrak-abrik substansi atau prinsip dasar keberfikihan, meski konsep keberfikihan dalam pandangan sebagaian kalangan masih bersifat abu-abu atau lebih ekstrim harus hitam di atas putih, padahal sebenarnya konsep tersebut bersifat tidak baku di satu sisi, namu baku di sisi lain.

Dengan kata lain, formulasi fikih yang bersifat vertikal merupakan rumusan nilai-nilai yang kekal, namun rumusan horizontal merupakan norma-norma yang sering berubah *(mutaghayirat)*.

Sinkronisasi antara cita-cita fikih ala Mazhab Empat dan realita reformulasi fikih kontemporer selayaknya perlu mendapat perhatian lebih. Sebab, jika fikih tidak lagi akrab terhadap tantangan, niscaya akan segera dikucilkan atau bahkan tergilas oleh seleksi alam.

Upaya ini sebenarnya telah dilakukan para pembaharu di dalam NU sendiri. Yang paling fenomenal adalah keputusan Munas NU di Lampung tahun 1992 yang menegaskan keabsahan bermazhab secara *manhaji* (metodologis).

Fatwa-fatwa *fardiyah* (perorangan) pada masa yang akan datang akan banyak menimbulkan berbagai problema baru di tengah masyarakat dengan bebasnya arus globalisasi dan faham trans nasional, apalagi terdapat kelemahan dalam merespon kebutuhan masa kini dari sisi *tashawwur masalik illah*nya.

Rasa ketakutan dan segan merealisasikan hasil Munas Lampung akan berdampak antara lain kosongnya aktifitas umat Islam di negara kita dari kontrol hukum *fiqhiyah* (syari'ah), sedangkan hidup dan gerak kehidupan tidak pernah berhenti. Tidak mungkin menghentikan dinamika kehidupan sosial ekonomi, politik, kemasyarakan berinteraksi dan lainnya hanya karena masih belum diturunkan suatu *Fatwa*. Bagaimana nanti tanggung jawab kita?

Ada kaidah fikih yang patut dipertimbangkan:

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ. تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ. (تَجْدِيْدُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي لدكتور وهبة الزحيلي)

قَالَ شِهَابُ الْقَرَافِي: وَلَا تَجْمُدْ عَلَى الْمَسْطُوْرِ فِي الْكُتُبِ طُوْلَ عُمْرِكَ بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ إِقْلِيْمِكَ يَسْتَفْتِيْكَ لَا تُجْرِهِ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ فَهٰذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ

Tantangan hidup dan kehidupan menjadi taruhan masa depan. Di buku inilah dan di sinilah tuntunan, keselamatan Anda dapatkan.

Semoga amal jariyah berupa terbitnya buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** ini menjadi solusi mantap dan kokoh bagi seluruh kaum muslimin dan khususnya bagi warga *Nahdliyyin*.

Apresiasi setulus-tulusnya kami haturkan kepada **PW LBM NU Jawa Timur**. Semoga istikomah berkarya dan bermanfaat bagi umat.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Surabaya, 08 Mei 2015

KH. Miftahul Achyar Abdul Ghoni

Pengantar Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah ﷻ atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ beserta seluruh sahabat dan pengikutnya.

Sebagai *jam'iyah diniyah ijtimaiyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan), Nahdlatul Ulama sejak awal mencita-citakan terwujudnya kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan untuk kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan terciptanya rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'âlamin*).

Untuk memberikan panduan terkait problematika yang sedang dihadapi warga *nahdliyin* dan umat Islam pada umumnya, Nahdlatul Ulama memiliki forum Bahtsul Masail yang dikoordinir oleh lembaga Syuriah, dan bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, *masa'il fiqhiyah*, maupun masalah-masalah tasawuf.

Secara historis, forum ini telah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Menurut catatan Rais Am PBNU Dr. KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, dahulu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan Kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin *Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama* (LINO). Selain memuat hasil Bahtsul Masail, Buletin LINO juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antarkiai pesantren.

Dalam kaitan itu, **Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur** menyambut baik upaya **Pimpinan Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Jawa Timur** dalam menerbitkan kumpulan keputusan Bahtsul

Masail yang terangkum dalam buku ini. Besar harapan kami, penerbitan buku ini akan membantu upaya pelestarian khazanah pemikiran NU dari waktu ke waktu. Di sisi lain, semoga menjadi indikasi meningkatnya tradisi penulisan dan dokumentasi kegiatan maupun pemikiran dalam lingkungan NU.

Buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** ini sekaligus menjadi bukti, Nahdlatul Ulama senantiasa berupaya memberikan panduan terkait masalah sosial-keagamaan yang dihadapi masyarakat sesuai kecenderungan zaman. Dokumentasi ini sekaligus menjadi saksi atas potret perjalanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia dan dinamika pemikiran keagamaan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama.

Mengutip catatan Rais Am PBNU Dr. KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, dinamika itu antara lain tergambar dari operasionalitas forum Bahtsul Masail yang sangat dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Dikatakan dinamis sebab persoalan-persoalan yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai dan santri, baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang terkuat, itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas", sebab di forum Bahtsul Masa'il tidak ada dominasi mazhab dan selalu *sepakat dalam khilaf*.

Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena *sepakat dalam khilaf* adalah mengenai status hukum bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini, tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram atau *syubhat*. Itu terjadi sampai Muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram atau *syubhat*. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari bank.

Ilustrasi lain, jika beberapa tahun lalu kita sempat dihebohkan kasus shalat dalam Bahasa Indonesia di Lawang, Malang, forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo (1980) ternyata telah membahas masalah doa Bahasa Indonesia dalam shalat. Di tempat yang sama, enam tahun kemudian, forum Bahtsul Masail antara lain juga membahas masalah Pemberian Uang 'Semir' Calon PNS dan kwitansi yang tidak sesuai dengan akad jual beli. Fakta itu menunjukkan, bahwa praktik suap pada proses rekrutmen calon PNS dan korupsi dalam bentuk manipulasi bukti administrasi keuangan telah berlangsung lama. Dan, Nahdlatul

Ulama melalui forum Bahtsul Masail telah berusaha memberi panduan terkait problematika tersebut.

Ketika umat Islam banyak disorot terkait kasus bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad, Nahdlatul Ulama juga menegaskan sikapnya dalam forum Bahtsul Masail yang diselenggarakan di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang pada 2006. Keputusan Bahtsul Masail menegaskan garis moderat (*tawassuth*) yang dianut NU dan garis ekstrem (*tatharruf yamani*) yang dianut para pelaku bom bunuh diri.

Terakhir, terkait proses demokratisasi dan merebaknya politik uang dalam proses pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah juga tidak luput dari perhatian Nahdlatul Ulama. Dalam forum Bahtsul Masail yang berlangsung di Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat (14-15 November 2012), persoalan tersebut menjadi topik bahasan yang cukup hangat. Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di Tulungagung, 8 Februari 2013.

Hal lain yang patut dicatat, forum Bahtsul Masail di kalangan NU telah mengalami kemajuan cukup berarti dalam dua dekade terakhir. Terutama sejak adanya keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada 21-25 Juli 1992 di Bandar Lampung, yang mengadopsi *metode manhaji* dalam prosedur operasional pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU.

Yang menjadi tantangan terkini forum Bahtsul Masail NU adalah bagaimana menjawab permasalahan sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat secara tanggap waktu atau *real time*. Tanpa kecepatan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk memberikan arahan dan jawaban kepada masyarakat, maka forum Bahtsul Masail hanya akan berisi 'timbunan masalah' yang justru berpotensi menjadi masalah baru.
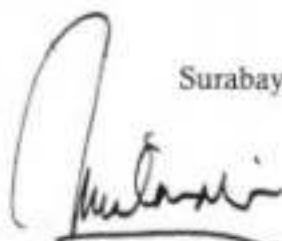
Berangkat dari inspirasi Buletin LINO yang telah menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh di zamannya, maka proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam forum Bahtsul Masail bisa dibuat lebih efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di tengah masyarakat yang terus berubah dalam skala cukup massif, kemampuan adaptasi semacam ini juga diperlukan para ahli fikih dan ulama yang tergabung dalam forum Bahtsul Masail.

Semoga langkah mulia ini dapat dilanjutkan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah serupa yang lebih baik di masa depan. Semoga buku ini bisa menjadi referensi dan pedoman warga Nahdlatul Ulama

dan kaum muslimin pada umumnya, serta menjadi amal jariyah bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyusunannya.

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيقِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Surabaya, 08 Mei 2015

KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM

Pengantar Ketua PW LBM NU Jawa Timur

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

Al-hamdulillah, buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** terbitan ke tiga yang dilengkapi harakat dan terjemah bisa diselesaikan sesuai rencana. Semoga kehadirannya bisa memenuhi harapan berbagai pihak sekaligus sebagai dokumentasi Hukum Islam Aktual ala Ahlissunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah yang senantiasa manfaat dan barakah, amin.

Sebelumnya kumpulan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur telah terbit 2 kali, yaitu:

1. **NU Menjawab Problematika Ummat** (Buku Ke Satu) yang terbit pada 1431 H/2010 M, mencakup Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur mulai 1979-1990, memuat 210 masalah, dilengkapi harakat dan terjemah, ukuran 16,5 x 24 cm, 420 halaman, dan diterbitkan PW LBM NU Jawa Timur periode 2008-2013 bekerjasama dengan penerbit AL MABA Mojokerto dan Khalista Surabaya.
2. **NU Menjawab Problematika Umat** (Buku Ke Dua) yang terbit pada Rajab 1434 H/ Mei 2013 M, mencakup Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur mulai 1991-2013, memuat 267 masalah, tanpa harakat dan terjemah, ukuran 16,5 x 24 cm, xxviii + 613 halaman, dan diterbitkan oleh PW LBM NU Jawa Timur periode 2008-2013 bekerjasama dengan penerbit Bina Aswaja Surabaya.

Sementara itu, dalam buku terbitan ke tiga terdapat tiga spesifikasi yang membedakannya dengan terbitan sebelumnya, yaitu:

1. Buku ini terdiri dari dua jilid:
   a. Jilid 1 mencakup Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, sejak 1979-2009, memuat 369 masalah dalam 37 keputusan, dilengkapi harakat dan terjemah, ukuran 16,5 x 24 cm, xxx + 936 halaman.
   b. Jilid 2 mencakup Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, sejak 2009-2014, memuat 111 masalah dalam 17 keputusan,

dilengkapi harakat dan terjemah, ukuran 16,5 x 24 cm, xxii + 850 halaman.

Jadi dari segi fisik, buku terbitan ke tiga ini berukuran lebih tebal masing-masing jilidnya.

2. Untuk lebih memudahkan pencarian konten, dalam buku terbitan ke tiga dibuatkan **Daftar Isi Kronologis** yang berdasarkan urutan pembahasan dari tahun ke tahun, dan **Daftar Isi Tematik** berdasarkan tema-tema khusus yang dalam **Jilid 2** terbagi dalam 18 tema, yaitu:
   1) Akidah dan Fikih Mazhab
   2) Fikih *Thaharah*
   3) Fikih Shalat
   4) Bacaan
   5) Fikih Jenazah
   6) Fikih Zakat
   7) Fikih Haji dan Umrah
   8) Fikih *Mu'amalah* (Jual Beli dan Selainnya).
   9) Fikih Wakaf dan Fasilitas Umum
   10) Fikih *Munakahat* (Pernikahan dan Seputarnya)
   11) Akhlak dan Fikih *Tarbiyah* (Pendidikan)
   12) Fikih Makanan
   13) Fikih Medis
   14) Fikih Wasiat
   15) Fikih Sosial
   16) Fikih Seni Budaya
   17) Fikih Yustisi (Peradilan)
   18) Fikih *Siyasah* (Politik, Kenegaraan, dan Kebangsaan)
3. Buku terbitan ke tiga ini sudah melalui tahap perbaikan dan pen*tashih*an yang mencakup sinkronisasi antara pertanyaan dan jawabannya, penyempurnaan *ibarat maraji'* (Dasar Pengambilan Hukum) dan urutan peletakannya, serta harakat dan terjemahnya. Namun *maraji'* masih belum keseluruhannya dilakukan penyempurnaan khususnya dari sisi pencantuman penerbit, tahun penerbitan, dan penulisnya. Hal ini disebabkan faktor 'kejar tayang' pada Muktamar NU ke 33 di Jombang 2015, agar buku ini menjadi bagian penting dari kehadiran Muktamirin dan Nahdliyyin secara keseluruhan pada even akbar itu.

Buku terbitan ke tiga memuat Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yang secara rutin diselenggarakan bersama PCNU se-Jawa Timur dan beberapa Pondok Pesantren di Jawa Timur dengan materi masail yang juga berasal dari Jawa Timur.

Untuk Keputusan Bahtsul Masail dengan materi Konbes, Munas,

dan Muktamar NU yang juga dibahas PWNU Jawa Timur sengaja tidak dimuat karenakan pertimbangan waktu dan juga masih harus dicarikan formula pemuatannya yang pas, bila dijumpai rumusan PWNU Jawa Timur berbeda dengan keputusan Konbes, Munas, dan Muktamar NU.

Buku **Jilid 2** ini selain memuat kategori Keputusan Bahtsul Masail *Waqi'iyah*–keputusan permasalahan yang terkait kasus riil di tengah masyarakat–, juga memuat kategori Keputusan Bahtsul Masail *Maudhu'iyah*–keputusan permasalahan tematik yang rumusannya berbentuk konsep yang utuh dan komprehensip dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya–dan Keputusan Bahtsul Masail *Qanuniyah*–keputusan permasalahan terkait peraturan perundangan yang di sana dijumpai hal-hal krusial yang perlu diperbaiki dan diluruskan menurut perspektif hukum Islam –.

Kehadiran buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** ini semoga menjadi obat kerinduan semua pihak terhadap dokumen rumusan Hukum Islam Aktual yang benar-benar akurat dan *mu'tamad* ala Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah, sehingga diketahui dengan jelas bagaimana sebenarnya *manhaj* Nahdlatul Ulama memutuskan persoalan hukum Islam sekaligus perbedaannya dengan *manhaj* penetapan hukum di luarnya.
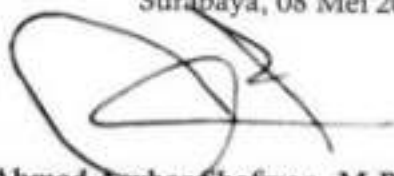
Selanjutnya kami sangat berterima kasih teriring doa *jazakumullah khairan*, atas dukungan dan partisipasi, bahkan keterlibatan langsung berbagai pihak dalam penerbitan buku ini, terutama *al-Mukarram* KH. Miftahul Achyar, dan *al-Mukarram* KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM, selaku Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur masa khidmah 2013-2018, para *Masyayikh* yang berkenan mengawal pada setiap even Bahtsul Masail sebagai *Mushahih*, para senior PW LBM NU Jawa Timur, seluruh jajaran intern PW LBM NU Jawa Timur masa khidmah 2013-2018, Tim Pembukuan dan Tim Manejerial, serta tidak lupa Panitia Daerah Muktamar NU ke 33 di Jombang, yang semuanya berandil besar dengan tenaga, fikiran, materi, dan selainnya dalam penerbitan buku ini. Selain itu, kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada PCNU dan Pondok Pesantren yang telah berkenan menjadi tuan rumah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, para *mubahits*, yaitu para utusan PCNU dan Pondok Pesantren se Jawa Timur, para pemateri untuk beberapa persoalan yang memerlukan penjelasan ahlinya, baik dari instansi pemerintah, akademisi maupun selainnya, yang semuanya memiliki andil intelektual cukup besar hingga terlahir keputusan-keputuasan Hukum Islam Aktual sebagaimana kita

baca pada buku ini. Sekali lagi, tiada ungkapan yang pantas kami haturkan kecuali *jazakumullah ahsanal jaza' fid darain*, amin.

Memang buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** ini telah melalui proses perbaikan dan penyempurnaan, namun tidak berarti tanpa ada kekurangan dan kekhilafan. Karena itu, kepada para pembaca khususnya *Masyayikh* dan Kiai, Aktivis Bahtsul Masail terutama yang ikut terlibat langsung sebagai pembahas, dan juga pihak mana saja yang menjumpai adanya kekurangan bahkan kekeliruan di dalamnya, kami harap berkenan memberi masukan dan koreksi, semata-mata demi kesetiaan pada Nahdlatul Ulama dan kebenaran hukum Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah sebagai upaya dakwah bagi keberlakuan syariat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian, semoga buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** bermanfaat dan berkah. Atas semua kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya.

Surabaya, 08 Mei 2015

KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I

Daftar Isi Kronologis

Pengantar Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur
KH. Miftahul Achyar Abdul Ghoni iii
Pengantar Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur
KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH. MM ix
Pengantar Ketua PW LBM NU Jawa Timur
KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I.................................. xiii
Daftar Isi Kronologis xvii

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL WAQI'IYAH.................. 1

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep 10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M 3
370. Penafsiran Analogi 4
371. Imunisasi Dalam Pandangan Fikih 7
372. Menyewakan Menara Masjid.. 9
373. Dilema Wali Nikah Anak Zina 19
374. Perpindahan Janin Secara Misterius 22
375. *Software* Windows.. 24
376. Memanfaatkan Lahan Wakaf 30
377. Sistem Pengadilan Berjenjang 34
378. Fatwa Yoga di Malaysia 38
379. Penertiban PKL dan Pemanfaatan Barang Sitaan 41
380. Kasus Salah Tangkap 46
381. SP3 dan Gradasi Penyidikan ke Penyelidikan..................... 52
382. Legitimasi Pemerintahan 66
383. Sistem *Khilafah* dan Demokrasi 70
384. Memproses Qurban Menggunakan Fasilitas Masjid............ 74
385. Anggapan Mengamen Lebih Baik daripada Meminta-minta. 79
386. Penggunaan Dana Masjid.. 82
387. Pembagian Daging Qurban.. 87
388. Ibu Nyai Menjadi *Muballighah* 93
389. Hak atas Bonus/Diskon Belanja 95
390. Nuklir 98

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Al-Hikam Tonjung Burneh Bangkalan 30 Syawwal 1431 H/ 09 Oktober 2010 M 105
391. Pembuktian Terbalik Bagi Pejabat Negara........................ 107
392. Pergesaran Arah Kiblat.. 107
393. Jasa Orang Pintar 113

394. Berbakti Kepada Orang Tua, Guru dan Mertua 121
395. Menghindari *Dam Tamattu'* 125
396. Operasi Caesar Karena Ingin Menepatkan Tanggal Lahir 128
397. Perbedaan Pemahaman tentang Makna *Sabilillah* dalam Zakat 133
398. Bekas Sujud di Jidat 139
399. *Qadha'* Shalat 152
400. Program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah 171
401. Alokasi Dana Pendidikan yang Tidak Merata 175

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Ar-Rosyid Dander Bojonegoro 30 April - 01 Mei 2011 M 179
402. Penjualan Zakat Fitrah 181
403. Memperjelas Keputusan Pemasangan Tower di Menara Masjid 184
404. Utang Bagi Hasil dan Zakatnya 189
405. Pinjaman Bersyarat 197
406. Dilema Talak Tiga 201
407. Membunuh Hewan untuk Umpan 204
408. Solat Pasien yang Memakai Kateter 207
409. Menggambar Berdasarkan Imajinasi 211
410. Konversi BBM Menjadi Gas Elpiji 215
411. Membunuh Karena Mencari Selamat dan Kadar *Diyat* Uang 218
412. Kebohongan Publik 223
413. Problem Jenazah dalam Peti 226
414. Belanja via Sales dan Zakatnya 231
415. Perayaan Ulang Tahun 236
416. Pengembangan *'Illat Ta'addud al-Jum'ah* 240
417. Aturan *Shaf* Jamaah Wanita 246
418. *Murabahah* ala BMT 249
419. Pembunuhan Karakter 253
420. Dampak Perbedaan Idul Adha pada Ibadah Qurban 262
421. Mencari Untung Melalui Akad Gadai 267
422. Air Sedikit di Toilet 270

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP As-Sunniyyah Kencong Jember 09-10 Jumadil Ula 1433 H/ 31 Maret-01 April 2012 M 273
423. Penggabungan Panen dalam Zakat 275
424. Madrasah di Atas Tanah Masjid 281
425. Pemberian Calon Pejabat untuk Memilih 287
426. Zakat Tanaman Karet dan Kelapa Sawit 303
427. Dana Talangan Haji 308

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Ma'had Ilmi Wal 'Amal Tulungagung 27-28 Rabi'ul Awwal 1434 H/08-09 Februari 2013 M 317
428. Penceraian oleh Hakim 319
429. *Muhakkam* dalam Nikah dan *Fasakh* 333
430. Harga Jual Barang Bersubsidi 338
431. Galian Tanah Masjid untuk Perataan Jalan 343
432. Tasaruf Kekayaan Masjid yang Berkecukupan 350
433. Nikah *Misyar* 352
434. *Takfir* dan Munafik 371
435. Jasa Pelayanan Lembaga Pengadilan 384
436. HAKI (Hak Cipta Karya Ilmiah) dan Kitab Karya Ulama *Salaf*. 394
437. Validitas Data Kitab 400
438. Demokrasi dan Pemilu Secara Langsung 403

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KONFERENSI WILAYAH PWNU JAWA TIMUR di PP Bumi Solawat Lebo Sidoarjo 31 Mei-02 Juni 2013 409
439. *Money Laundry* 411
440. Perasa pada Makanan/Minuman 416
441. Jual Beli Galon Air Mineral 421
442. Mempertegas Perbedaan *Amil* dan Panitia Zakat 425
443. Azan Saat Bencana 427
444. Perilaku dan Tindakan Orang Gila 432
445. Menyebar Uang Saat Pembacaan Solawat 437
446. Kriteria *Balad al-Jum'ah* dan *Balad az-Zakah* 443
447. Calon Suami Pilihan Orang Tua 445

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Modern Hidayatul Hasan Blukon Lumajang 17-18 Januari 2014 451
448. Status Bangunan Masjid di Atas Lahan Pengairan 453
449. Hukum Renovasi Masjid yang Kondisinya Masih Baik 467
450. Tukar Guling Tanah Wakaf Aset Masjid dan Perluasan Masjid. 472
451. Hibah Ayah kepada Anaknya (1) 482

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MUSYAWARAH KERJA di PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 25 - 27 Februari 2014 . 485
452. Hibah Ayah kepada Anaknya (2) 487
453. Antara Umrah dan Haji 487
454. Peralihan *Nazhir* Wakaf 501

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP. Tremas Pacitan 09-10 November 2014 509

455. Penetapan Awal Dzul Hijjah 511
456. Mushalla Seperti Masjid 516
457. Menghutangkan Kas Masjid dan Madrasah 527

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MAUDHU'IYAH 539

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP As-Sunniyyah Kencong Jember 09-10 Jumadil Ula 1433 H/31 Maret-01 April 2012 M 541
1. Kriteria Faham Keagamaan Sempalan 543
2. Kekerasan Atas Nama Agama 552

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Ma'had Ilmi Wal 'Amal Tulungagung 27-28 Rabi'ul Awwal 1434 H/08-09 Februari 2013 M 555
3. Pemilukada Langsung 557

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KONFERENSI WILAYAH PWNU JAWA TIMUR di PP Bumi Solawat Lebo Sidoarjo 31 Mei-02 Juni 2013 571
4. Status Nasab Anak 573
5. Operasionalisasi *Maqashid asy-Syari'ah* 579
6. Prinsip Jam'iyah NU: الأخذ بالجديد الأصلح 583
7. Kekebalan Jurnalistik 584
8. Baiat dalam Pengamalan Agama 593
9. Dasar Memilih Alternatif Kebijakan 600

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Modern Hidayatul Hasan Blukon Lumajang 17-18 Januari 2014 609
10. Tukar Guling Tanah Wakaf 611
11. Legalitas Wirausaha DAUM (Dana Umum) Harta Wakaf (1). 631

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MUSYAWARAH KERJA di PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 25 - 27 Februari 2014 . 637
12. Legalitas Wirausaha DAUM (Dana Umum) Harta Wakaf (2). 639
13. Penyadapan dalam Konteks Penegakan Hukum dan Hubungan Antarnegara Konteks Penegakan 661

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP. Tremas Pacitan 09-10 November 2014 673
14. Ketentuan Amil Zakat 675

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL QANUNIYAH 707

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KONFERENSI WILAYAH

PWNU JAWA TIMUR di PP Bumi Solawat Lebo Sidoarjo 31 Mei-02 Juni 2013 709
1. Wasiat *Wajibah* 711
2. Memperjelas Status *Dar* dan *Daulah* Indonesia 739
3. Penyitaan Aset sebagai Sanksi Tindak Pidana 754
4. Pakta Integritas Anti Poligami 760

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Modern Hidayatul Hasan Blukon Lumajang 17-18 Januari 2014 767
5. Nikah Sirri Masuk Penjara 769
6. *Shighat Taukil* (Mewakilkan) Akad Nikah 779

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MUSYAWARAH KERJA di PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 25 - 27 Februari 2014 . 785
7. Tidak Tercatatnya Rujuk Nikah 787
8. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam 790
9. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) .. 807

Daftar Pustaka 833
Lampiran Tim Pembukuan 845
Daftar Isi Tematik 847

KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL
WAQI'IYAH

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep 10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M

370. Penafsiran Analogi
371. Imunisasi Dalam Pandangan Fikih
372. Menyewakan Menara Masjid
373. Dilema Wali Nikah Anak Zina
374. Perpindahan Janin Secara Misterius
375. *Software* Windows
376. Memanfaatkan Lahan Wakaf
377. Sistem Pengadilan Berjenjang
378. Fatwa Yoga di Malaysia
379. Penertiban PKL dan Pemanfaatan Barang Sitaan
380. Kasus Salah Tangkap
381. SP3 dan Gradasi Penyidikan ke Penyelidikan
382. Legitimasi Pemerintahan
383. Sistem *Khilafah* dan Demokrasi
384. Memproses Qurban Menggunakan Fasilitas Masjid
385. Anggapan Mengamen Lebih Baik daripada Meminta-Minta
386. Penggunaan Dana Masjid
387. Pembagian Daging Qurban
388. Ibu Nyai Menjadi *Muballighah*
389. Hak atas Bonus/Diskon Belanja
390. Nuklir

370. Penafsiran Analogi

Deskripsi Masalah

Perluasan *mas'a* (tempat *sa'i*) di*ilhaq*kan dengan perluasan *mathaf* (tempat *thawaf*) disekitar Ka'bah. Perluasan areal *mabit* di Mina *ilhaq* dengan *tawsi'ah shufufi al-shalat* untuk shalat Jumat sepanjang terjadi persambungan antara perkemahan jamaah haji. Demikian pula pelebaran *'amud al-marma* di areal *jamarat* dan pembesaran *haudh* untuk *majma' al-hasha*. Praktek *istidlal* tersebut bermuara pada *ilhaq* atau pengembangan hukum setara *qiyas* (analogi).

Polemik terjadi ketika orang meng*qiyas*kan adzan di liang lahad pada azan di telinga bayi pasca kelahiran. Penolakan *qiyas* disektor ibadah berargumentasi akan membuka lebar penciptaan model bid'ah dalam amaliah ibadah.

Penafsiran analogi untuk sektor sanksi pidana pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan sepengetahuan sahabat lain perihal sanksi orang mabuk karena minum *khamr* di*qiyas*kan dengan pelaku *qadzaf* zina. Penafsiran analogi dalam disiplin ilmu hukum pidana tetap jadi polemik oleh ahlinya.

Pertanyaan

a. Apakah penafsiran analogi (*qiyas*) boleh diaplikasikan untuk perkara yang dirasa tergolong *ta'abbudi*, bukan *ta'aqquli* dengan pendekatan "*maqashid al-syari'ah*"?

b. Mungkinkah dilakukan perluasan terhadap tindak pidana yang sering terjadi pada masa sekarang untuk dianalogikan sebagai *hudud*? Contoh: kejahatan *hacker*, transaksi lewat *cybernet* dan ternyata penipuan semata, penyadapan pembicaraan telephone/ handphone, pemasangan kamera tersembunyi untuk tujuan menjebak seseorang, penggunaan angket guna menjembatani *impeachment* terhadap pimpinan negara, dan lain sebagainya?

c. Badan hukum sebagai شخصيا معنويا cukup luas penggunaannya untuk menerima hak, dapatkah dilakukan penafsiran analogi padanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum?

Jawaban

a. Penafsiran analogi (*qiyas*) tidak bisa diaplikasikan untuk urusan yang tergolong *ta'abbudi*.

b. Analogi (*qiyas*) dalam urusan tindak pidana (*hudud*) terdapat perbedaan pendapat, menurut ulama madzhab Hanafi tidak boleh, sedangkan menurut yang lain boleh.

c. Badan hukum dapat disebut *syakhshiyyah ma'nawiyyah*, sehingga jika pengurusnya bertindak atas nama badan hukum secara prosedural, maka konsekwensi dari tindakannya menjadi tanggungjawab badan hukum atas dasar analogi.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Syarh al-Kawakib al-Munir*, IV/223:

وَ (لَا) يَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الْأَحْكَامِ (بِالْقِيَاسِ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ، وَلِأَنَّ فِي الْأَحْكَامِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، كَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. فَإِجْرَاءُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِهِ مُتَعَذِّرٌ، لِمَا عُلِمَ أَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعُ تَعَقُّلِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ فَلَا يَجْرِي فِيهِ. وَقِيلَ: بَلَى. كَمَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهَا كُلِّهَا بِالنَّصِّ يَجُوزُ إِثْبَاتُهَا كُلِّهَا بِالْقِيَاسِ.

Menurut mayoritas ulama menerapkan hukum dengan metode analogi itu tidak dibolehkan. Karena analogi harus terdapat asal, sedangkan hukum ada sesuatu yang tidak masuk akal, seperti wajibnya membayar *diyat* sehingga memberlakukan analogi dalam hal ini sangatlah sulit, karena seperti yang telah diketahui bahwa analogi adalah cabangan yang mengandung makna yang ada dalam asal, sementara hukum bermacam-macam dan berbeda-beda. Akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan menetapkan hukum dengan metode analogi itu dibolehkan sebagaimana dibolehkan menetapkan hukum dengan adanya *nash*.

b. *Ushul al-Fikih al-Islami*, I/671:

الْقِيَاسُ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ. اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِيهَا فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْقِيَاسَ يَجْرِيْ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ كَمَا يَجْرِيْ فِيْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالْقِيَاسِ فِيْ إِثْبَاتِ كُلِّ حُكْمٍ مِنَ الْحُدُوْدِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالرُّخَصِ وَالتَّقْدِيْرَاتِ إِذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ الْقِيَاسِ فِيْهَا، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِيْ هٰذِهِ الْأُمُوْرِ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمٌ وَاحِدٌ مِنْهَا بِالْقِيَاسِ وَلَا يَكُوْنُ الْقِيَاسُ فِيْهَا حُجَّةً كَمَا لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِيْ أُصُوْلِ الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ اهـ

Analogi dalam *hudud* dan *kafarat* diperkhilafkan oleh ulama ushul. Mayoritas ulama mengatakan analogi bisa diberlakukan dalam *hudud* dan *kafarat* sebagaimana dalam *Ahkam asy-Syar'iyah* dengan arti ketika syarat analogi sudah terpenuhi, maka boleh memakai analogi dalam penetapan hukum yang ada dalam *hudud*, *kafarat*, *rukhsah*, dan ukuran-

ukuran. Ulama madzhab Hanafi mengatakan *"Analogi tidak boleh dipakai dalam empat hal tadi sehingga hukum masing-masing dari empat perkara tadi tidak bisa ditetapkan dengan metode analogi. Dan analogi itu tidak bisa dijadikan dalil sebagaimana analogi tidak bisa diberlakukan dalam beberapa aqidah dan ibadah".*

c. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* VII/100:

إِذَا كَانَ الْعَامِلُ فِي الْمُضَارَبَةِ شَرِكَةً (شَخْصِيَّةً مَعْنَوِيَّةً) فَهَلْ تُعْتَبَرُ جَمِيعُ رَوَاتِبِ الْمُوَظَّفِيْنَ وَالْإِدَارَةِ مِنْ ضِمْنِ التَّكَالِيفِ؟ تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهُ يَصْعُبُ الْإِفْتَاءُ بِمِثْلِ هٰذَا فَلَا يَجُوْزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ رَوَاتِبِ الْمُوَظَّفِيْنَ وَالْإِدَارَةِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ هٰؤُلَاءِ مُقِيْمُوْنَ فِي مَرَاكِزِ تِجَارِيَّةٍ وَهُمْ ذَوُوْ كِفَاءَاتٍ عَالِيَةٍ لِتَحْسِيْنِ مُسْتَوَى الْخِدْمَةِ وَالْأَدَاءِ وَلِكَسْبِ الْعُمَلَاءِ وَزِيَادَةِ حَجْمِ الْعَمَلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ

Apabila *amil* dalam *akad mudharabah* itu *syirkah* (*syakhsiyah ma'nawiyah*) apakah semua tugas bisa dimasukkan dalam tuntutan? sudah jelas dari apa yang disebutkan bahwa terdapat kesulitan untuk menfatwakan hal ini. Sehingga tidak boleh menggunakan tugas-tugas yang ada dengan mengambil harta *mudharabah*, sebab mereka berada di pusat perdagangan dan mereka mempunyai kecukupan yang tinggi untuk memperbaiki bantuan dan pelaksanan, juga untuk pekerjaan para amil serta menambah pekerjaan untuk masa mendatang.

d. *Al-Mushtashfa,* II/333:

مَسْأَلَةٌ: نُقِلَ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَجْرِي فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْحُدُوْدِ

Ada golongan mengatakan analogi tidak boleh diberlakukan di dalam *kafarat* dan *hudud.*

e. *Al-Fushul fi al-Ushul,* II/291:

فَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْاِجْتِهَادِ فِي شَيْءٍ قَدْ وَرَدَ فِيهِ التَّوْقِيفُ، فَيُتَحَرَّى فِيهِ مَعْنَى التَّوْقِيفِ، فَهٰذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا، وَاسْتِعْمَالُ اجْتِهَادِ السَّلَفِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ مِنْ هٰذَا الْقَبِيلِ، وَذٰلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ (النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَدْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ). وَرُوِيَ: أَنَّهُ (ضَرَبَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، كُلُّ رَجُلٍ بِنَعْلِهِ ضَرْبَتَيْنِ إِنَّمَا تَحَرَّوْا فِي) اجْتِهَادِهِمْ مُوَافَقَةَ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَجَعَلُوهُ ثَمَانِينَ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ، وَنَقَلُوا ضَرْبَهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ إِلَى السَّوْطِ، كَمَا يَجْتَهِدُ الْجَلَّادُ فِي الضَّرْبِ، وَكَمَا يَخْتَارُ السَّوْطَ الَّذِي يَصْلُحُ لِلْجَلْدِ اجْتِهَادًا، فَالْاِجْتِهَادُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ شَائِعٌ فِيمَا وَصَفْنَا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَا يَجُوزُ

وَقُوعُ الاجْتِهَادِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، لأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ، وَلاَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَا أَجْمَعُوا (عَلَيْهِ) هُوَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

Melakukan ijtihad dalam suatu hal kadang perlu adanya *tauqif* (pelajaran dari Nabi) dan hal ini dibolehkan menurut madzhab Syafi'i sedangkan ijtihad yang dilakukan ulama salaf tentang meminum *khamr* itu termasuk dalam pembahasan ini, sebagaimana yang dijelaskan bahwa Nabi pernah memukul dalam pelaksanan *had* minum *khamr* dengan menggunakan pelepah kurma dan sandal. Di riwayat lain dijelaskan bahwa peminum *khamr* dipukul oleh 40 orang laki-laki dan masing-masing memukul dengan sandalnya sebanyak dua kali, ulama salaf melakukan penelitian dalam ijtihadnya karena mengikuti perintah Nabi sehingga mereka menetapkan bahwa peminum *khamr* dicambuk sebanyak 20 kali dan mereka menggunakan alat yang dipakai untuk memukul yang asalnya sandal dan pelepah kurma diubah menjadi cambuk sebagaimana hasil ijtihad tukang *jilid*.

Apabila ada orang berkata ijtihad tidak boleh terjadi dengan metode analogi karena para ulama masih memperkhilafkan tentang penggunan analogi dan tidak dibolehkan sepakat atas suatu hal yang diperkhilafkan.

f. Referensi lain:
   1) *Al-Bahr al-Muhith*, VI/234
   2) *Al-Muwafaqat*, II/214-215
   3) *Irsyad al-Fuhul*, I/330

371. Imunisasi dalam Pandangan Fikih

Deskripsi Masalah

Program pemerintah berupa Imunisasi balita dan vaksin haji yang disinyalir oleh masyarakat ada bahan yang mengandung unsur babi (kami juga belum mengetahui secara medis). Imunisasi bayi dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi agar tidak rentan penyakit dan dibutuhkan oleh jama'ah haji untuk melindungi dari virus yang mungkin dapat tertular.

Pertanyaan

Bagaimana hukum Imunisasi bagi balita dan vaksin bagi jamaah haji sebagaimana deskripsi di atas?

Jawaban

Sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia terhadap vaksin Mencevax ACWY nomor bets A73CA24SA (produk lama) dan nomor bets

A83CA063B56 (produk baru) yang menyatakan bahwa DNA babi tidak terdeteksi pada kedua contoh vaksin tersebut, maka hukum penggunaan vaksin bagi jamah haji adalah boleh.

Catatan

Tentang kecurigaan adanya keterlibatan enzim babi dalam salah satu bagian dari bahan pembuatan vaksin, mengharap kepada pemerintah agar dapat memproduksi vaksin sendiri, dari bahan yang tidak menimbulkan keresahan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, IX/37:

(الثَّالِثَةُ) كُلُّ طَاهِرٍ لَا ضَرَرَ فِيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ وَذَلِكَ كَالْخُبْزِ وَالْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْحُبُوْبِ وَاللُّحُوْمِ الطَّاهِرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْإِجْمَاعُ (وَأَمَّا) الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ (فَأَحَدُهَا) الْمُسْتَقْذَرَاتُ كَالْمُخَاطِ وَالْمَنِيِّ وَنَحْوِهِمَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الصَّحِيْحِ الْمَشْهُوْرِ وَفِيْهِ وَجْهٌ ضَعِيْفٌ حَكَاهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا حَلَالٌ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ فِي الْمَنِيِّ أَبُوْ زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَحُكْمُ الْعِرْقِ حُكْمُ الْمَنِيِّ وَالْمُخَاطِ وَقَدْ جَزَمَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ فِي تَعْلِيْقِهِ اهـ

Setiap perkara yang tidak membahayakan bagi tubuh hukumnya halal, seperti roti, susu, buah-buahan, daging yang suci dan lain-lain, kecuali tiga macam. Pertama: sesuatu yang menjijikan seperti ingus, mani dan lain-lain, maka hukumnya haram menurut *qaul masyhur*. Sedangkan menurut *qaul dla'if* yang diriwayatkan Imam Haramain dan lainnya termasuk Ibnu Zaid, perkara tadi hukumnya halal. Dan untuk keringat hukumnya sama seperti mani dan ingus.

b. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, IX/42:

وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْأَكْلِ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ جُوْعٍ أَوْ ضَعْفٍ عَلَى الْمَشْيِ أَوْ عَنِ الرُّكُوْبِ وَيَنْقَطِعُ عَنْ رُفْقَتِهِ وَيَضِيْعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَلَوْ خَافَ حُدُوْثَ مَرَضٍ مَخُوْفٍ فِي جِنْسِهِ فَهُوَ كَخَوْفِ الْمَوْتِ، وَإِنْ خَافَ طُوْلَ الْمَرَضِ فَكَذَلِكَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَقِيْلَ: إِنَّهُمَا قَوْلَانِ، وَلَوْ عِيْلَ صَبْرُهُ وَأَجْهَدَهُ الْجُوْعُ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ وَنَحْوُهَا؟ أَمْ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَصِلَ إِلَى أَدْنَى الرَّمَقِ؟ فِيْهِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ (أَصَحُّهُمَا) الْحِلُّ، قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْمَا يَخَافُهُ تَيَقُّنُ

وُقُوعِهِ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ، بَلْ يَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ، قَالُوا: كَمَا أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهَا إِذَا ظَنَّ وُقُوعَ مَا خُوِّفَ بِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَى الْغَيْبِ، وَجُمْلَةُ جِهَاتِ الظَّنِّ مُسْتَنَدُهَا الظَّنُّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

Ulama sepakat atas dibolehkannya memakan segala sesuatu yang najis kalau memang orang tersebut khawatir akan terjadinya bahaya apabila tidak memakannya, seperti sangat lapar, tidak dapat berjalan dan lain-lain. Bila khawatir akan sakit maka sama seperti khawatir akan mati, dan apabila khawatir akan sakit yang lama juga sama seperti diatas. Dikatakan bahwa keduanya adalah dua *qaul*. Jika telah hilang kesabaran seseorang dan berada dalam kondisi yang sangat lapar, apakah halal baginya memakan bangkai dan selainnya? Ataukah harus menunggu sampai kondisi hampir mati? ada dua *qaul* seperti yang dituturkan oleh al-Baghawi dan ulama yang lain, dan yang paling shahih adalah halal hukumnya.

Imam Haramain dan ulama lain mengatakan bahwa tidak disyaratkan harus meyakini akan terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan, tapi cukup dengan dugaan akan hal itu saja. Sebagaimana seseorang yang dipaksa memakan bangkai akan dibolehkan baginya memakannya bila ia punya dugaan kuat akan terjadinya bahaya bila ia tidak memakannya. Tolak ukur akan terjadinya bahaya adalah prasangka orang itu sendiri.

372. Menyewakan Menara Masjid

Deskripsi Masalah

Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, di mana-mana kita jumpai tempat ibadah umat Islam (masjid) dengan bentuk bangunannya yang bermacam-macam, ada yang memakai menara, ada juga yang tidak memakai menara. Terhadap masjid yang memiliki menara, ternyata menarik perhatian pada perusahaan khususnya telekomunikasi (Indosat, dan lain-lain) untuk menyewa menara masjid untuk digunakan sebagai tower, karena dinilai lebih hemat daripada harus membuat tower sendiri. Pada sebagian takmir, hal ini disambut dengan baik, hingga mereka menyewakan menara masjidnya yang hasil sewaannya untuk keperluan kemashlahatan masjid.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum menyewakan menara masjid sebagaimana dalam deskripsi di atas?
b. Bagaimana hukum menggunakan uang hasil sewaan menara masjid untuk kemashlahatan umum, seperti rumah sakit, jembatan menuju

masjid, dan lain-lain?

c. Sekiranya tidak boleh, bagaimana solusi yang terbaik terhadap uang yang terlanjur digunakan untuk keperluan kemashlahatan umum?

Jawaban

a. Hukum menyewakan menara masjid untuk pemasangan antena/tower tidak diperbolehkan, baik menara tersebut dibangun di atas bangunan masjid atau di luar, dengan alasan:
   1) Manfaat barang wakaf bukan milik perorangan, sehingga siapa pun tidak bisa menyewakan/*mu'awadlah* yang lain.
   2) Merusak kehormatan masjid, sebab antena/tower sebagai alat yang dapat digunakan apa saja, baik ibadah atau maksiat.

b. Mempertimbangkan jawaban (a), maka akad tersebut secara otomatis terhenti dengan sendirinya. Konsekwensinya adalah ongkos sewa yang telah diterima harus dikembalikan. Adapun masa sewa yang telah dijalani, maka dikembalikan pada konsep *ujrah mitsil*. Sedangkan pen*tasharrufan* uang kompensasi *tafwit* manfaat (*ujrah mitsil*) adalah untuk kemashlahatan masjid bukan untuk kepentingan umum.

c. Untuk dana yang sudah terlanjur digunakan untuk keperluan kemashlahatan umum, maka pengurus tidak wajib bertanggung-jawab kecuali dia bertindak ceroboh/tidak prosedural.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Bahr ar-Ra`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq*, V/252:

(قَوْلُهُ وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَهُ إلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ أَوْ اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَالسِّرْدَابُ بَيْتٌ يُتَّخَذُ تَحْتَ الْأَرْضِ لِغَرَضِ تَبْرِيدِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّرْدَابُ الْمَكَانُ الضَّيِّقُ يُدْخَلُ فِيهِ وَالْجَمْعُ سَرَادِيبُ. اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا أَنْ يَكُونَ سُفْلُهُ وَعُلُوُّهُ مَسْجِدًا لِيَنْقَطِعَ حَقُّ الْعَبْدِ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ السِّرْدَابُ أَوْ الْعُلُوُّ مَوْقُوفًا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذْ لَا مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَتْمِيمِ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَسِرْدَابِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُنَاكَ رِوَايَاتٌ ضَعِيفَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْهِدَايَةِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَنَى بَيْتًا عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ لِسُكْنَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي كَوْنِهِ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ مِنْ

الْمَصَالِحِ فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ جَعَلَ مَسْجِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ: قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ إِذَا بَنَى مَسْجِدًا وَبَنَى غُرْفَةً وَهُوَ فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حِينَ بَنَاهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْنِي لَا يَتْرُكُهُ وَفِي جَامِعِ الْفَتْوَى إِذَا قَالَ عَنَيْتُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ. اهـ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاقِفِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ فَمَنْ بَنَى بَيْتًا عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَجَبَ هَدْمُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ مُسْتَغَلًّا وَلَا مَسْكَنًا.

(Ungkapan penulis: *"Orang yang menjadikan terowongan dibawah masjid atau rumah diatasnya dan menjadikan pintunya ke jalan dan melepasnya atau mengambil tengah rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan masuk orang, maka ia boleh menjualnya dan mewariskannya"*) karena ia tidak murni *lillahi ta'ala*, sebab tetapnya hak hamba yang berkaitan dengannya. *Sirdab* ialah ruangan yang dijadikan dibawah tanah untuk tujuan mendinginkan air dan selainnya, begitulah penjelasan di *Fath al-Qadir*. Dalam *al-Mishbah*, *sirdab* ialah ruangan sempit yang bisa dimasuki, jamaknya *sirdab*, *saradib*. Kesimpulan sungguh syarat menjadi masjid di bawah dan di atasnya sebagai masjid agar hak hamba terputus darinya, karena firman Allah ﷻ: *"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah."* Lain halnya apabila terdapat terowongan atau di atasnya diwakafkan untuk *mashalih* masjid, maka demikian itu boleh karena tidak ada kepemilikan bagi seseorang, tetapi itu merupakan penyempurnaan *mashalih* masjid, maka seperti terowongan masjid Bait al-Muqaddas. Ini menurut *dhahir al-madzhab*, dan di sana ada beberapa riwayat lemah yang disebutkan dalam *al-Hidayah*. Dari apa yang kita paparkan, bisa diketahui bahwa jika seseorang membangun rumah di atas permukaan masjid sebagai tempat tinggal imam, maka tidak masalah menjadikannya masjid sebab termasuk *mashalih*. Jika kamu berkata: Apabila seseorang menjadikan masjid dan menghendaki membangun rumah imam atau lainnya di atas masjid, apa ia boleh mengerjakannya? Saya berkata: Pengarang berkata dalam *at-Tatarkhaniyah*: *"Jika seseorang membangun masjid dan membuat kamar yang berada dalam kuasanya, maka ia boleh mengerjakannya, maski ketika membangun ia merasa tenang di antara manusia, lalu ia membangun tidak meninggalkannya"*. Dalam *Jami' al-Fatwa*: *"Apabila ia berkata saya bermaksud demikian maka tidak dibenarkan. Apabila ini terjadi pada wakif, maka bagaimana dengan orang lain. Orang yang membangun ruangan di atas tembok masjid maka wajib merobohkannya, dan tidak boleh memungut upah"*. Dalam *al-Bazaziyah*, *"Tidak boleh bagi pendiri menjadikan bagian masjid sebagai investasi maupun rumah."*

b. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, VI/507:

وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ لِلْمَنَارَةِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ (إِحْدَاهَا) أَنْ تَكُونَ مَبْنِيَّةً دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَيُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ فِيهَا لِأَنَّهُ طَاعَةٌ (الثَّانِيَةُ) أَنْ تَكُونَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَّهَا فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ لَوْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ (الثَّالِثَةُ) أَنْ تَكُونَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَيْسَتْ فِي رَحْبَتِهِ إِلَّا أَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَلَهَا بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِيهَا لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْمَسْجِدِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ (وَالرَّابِعَةُ) أَنْ تَكُونَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَّصِلَةٍ بِهِ فَفِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ هَذَا كَلَامُ الْمَحَامِلِيِّ بِحُرُوفِهِ وَفِيهِ فَوَائِدُ وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ أَبِي حَامِدٍ فِي التَّعْلِيقِ نَحْوُ هَذَا وَكَلَامُ غَيْرِهِمَا نَحْوُهُ وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْمَنَارَةِ الْمُتَّصِلِ بَابُهَا بِالْمَسْجِدِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ قَرِيبًا وَوَعَدْنَا بِذِكْرِ التَّصْرِيحِ بِنَقْلِ خِلَافِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ

Al-Mahamili berkata dalam *al-Majmu'*: *"Menara memiliki empat perihal; (Pertama) menara dibangun di dalam masjid, maka disunnahkan adzan di dalamnya, karena adzan merupakan ketaatan. (Kedua) menara berada di luar masjid kecuali menara itu berada di serambi masjid, maka hukumnya seperti hukum jika menara berada di dalam masjid, karena serambi masjid itu bagian dari masjid, apabila i'tikaf di serambi maka sah i'tikafnya. (Ketiga) menara berada di luar masjid dan tidak berada di serambi masjid kecuali menara itu bertemu dengan bangunan masjid dan menara memiliki pintu menuju ke masjid, maka boleh adzan di menara itu karena menara tersebut bertemu dengan masjid dan dari jumlahnya. (Keempat) menara berada di luar masjid yang tidak bertemu dengan masjid, terkait menara ini ada perselisihan pendapat seperti yang terdahulu"*. Ini adalah kalam al-Mahamili dengan huruf-hurufnya dan terdapat beberapa faidah. Ungkapan *syaikhihi* Abu Hamid dalam *at-Ta'liq* sesama ini dan kalam selain keduanya itu sesamanya, dan di dalamnya ada penjelasan dengan perbedaan perkara yang dibuat *istidlal* oleh Imam Haramain dalam menara yang pintunya bertemu dengan masjid sebagaimana kita telah mendahulukannya darinya secara dekat, dan kita telah menjanjikan dengan menyebutkan penjelasannya dengan mengutip perselisihannya, *wallahu a'lam*.

c. *Al-Mausu'ah al-Fikihiyah al-Kuwaitiyah*, V/224:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الِاعْتِكَافُ، مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا

لِلصَّلَاةِ فِيهِ. أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ، وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا، فَالَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ، وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابُهَا فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

Fuqaha sepakat bahwa maksud masjid yang sah digunakan *i'tikaf* ialah bangunan yang disiapkan untuk shalat di dalamnya. Adapun *Rahbah al-masjid* yaitu halaman yang ada di dekat masjid yang ditambahkan untuk perluasan masjid dan dibekukan untuknya, maka rumusan yang dipahami dari ungkapan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah dalam pendapat *ash-Shahih* dalam madzhab, adalah tempat itu tidak termasuk dari masjid; sedangkan pendapat *Muqabil ash-Shahih* menurut mereka menyatakan bahwa tempat tersebut termasuk masjid. Abu Ya'la men*jami*'kan dua riwayat tersebut dengan konteks bahwa *rahbah* yang dipagari dan ada pintunya itu yang termasuk masjid. Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahbah al-masjid* termasuk masjid, sehingga andai orang *i'tikaf* di dalamnya maka sah. Adapun loteng masjid, maka Ibn Qudamah mengatakan: *"Bagi orang yang sedang i'tikaf boleh naik ke loteng masjid"*, dan kami tidak mengetahui *khilaf* ulama tentangnya. Adapun menara, bila berada di dalam masjid atau pintunya di masjid maka termasuk masjid menurut ulama Hanafiyah, asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah.

d. *Hasyiyah Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, XIV/202:

وَإِضَافَةُ الْمَنَارَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ كَأَنْ خَرِبَ مَسْجِدٌ وَبَقِيَتْ مَنَارَتُهُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا لَهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إِنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي مَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ لَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ شَرْحُ م ر

Penyandaran menara pada masjid merupakan kekhususan, meskipun menara tidak dibangun untuknya. Sebagaimana apabila suatu masjid

rusak total dan menyisakan menaranya, kemudian dibangun masjid baru didekatnya dan biasa adzan di atas masjid baru tersebut, maka hukum menara itu sebagaimana hukum menara yang dibangun untuk masjid, seperti menurut *zhahir*. Ungkapan *al-Majmu'* yang menyatakan bahwa konteks masalah ini adalah pada menara yang dibangun untuk masjid, berlaku secara umum, sehingga tidak ada makna yang *mafhum* baginya. Demikian dalam *Syarh ar-Ramli*.

e. *Nihayah al-Muhtaj*, X/110:

أَمَّا مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الَّتِيْ بَابُهَا فِيْهِ أَوْ فِيْ رَحْبَتِهِ فَلَا يَضُرُّ صُعُوْدُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْأَذَانِ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ كَمَا رَجَّحَاهُ وَتَرْبِيْعِهِ إِذْ هِيَ فِيْ حُكْمِ الْمَسْجِدِ كَمَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ فِيْهِ مَالَتْ إِلَى الشَّارِعِ فَيَصِحُّ الْاِعْتِكَافُ فِيْهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ فِيْ هَوَاءِ الشَّارِعِ، وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَوِ اتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جَنَاحٌ إِلَى الشَّارِعِ فَاعْتَكَفَ فِيْهِ صَحَّ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ صَحِيْحٌ اهـ

Menara masjid yang pintunya di dalam masjid atau di serambi masjid, maka tidak masalah menaikinya (bagi orang yang sedang *i'tikaf*), meski tidak untuk adzan, dan walau menara itu keluar dari batas bangunan masjid sebagaimana diunggulkan ar-Rafi'i dan an-Nawawi dan keluar dari persegi empatnya, karena menara itu dalam hukum masjid, seperti menara yang dibangun di dalamnya yang condong ke jalan, sehingga sah *i'tikaf* di dalamnya, meski *mu'takif* berada di atas jalan. Dari itu az-Zarkasyi mengambil kesimpulan sungguh jika dibuat bangunan sayap untuk masjid yang mengarah ke jalan kemudian seseorang *i'tikaf* di dalamnya, maka sah, karena bangunan sayap tersebut berstatus sebagai bangunan yang mengikut pada masjid yang shahih.

f. *Bughyah al-Mustarsyidin*, I/360:

(مَسْأَلَةُ ب) وَظِيْفَةُ الْوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتَعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فِيْ مَصَارِفِهِ هٰذَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ فَقَدْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيْ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلِ الْأَوْلِيَاءِ، وَحِيْنَئِذٍ فَإِذَا أَعْطَى جُنْدِيٌّ مَثَلًا وَلِيَّ الْمَسْجِدِ مَالًا لِلْمَسْجِدِ مَلَكَهُ إِيَّاهُ فَرَدَّهُ، فَإِنْ عُدَّ مُقَصِّرًا بِرَدِّ الْمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُوْجِبٌ لِرَدِّهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ طَلَبُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَهُ الْجُنْدِيُّ لَزِمَهُ طَلَبُ يَمِيْنِ الْإِنْكَارِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِطَلَبِهَا لَعَلَّهُ يُقِرُّ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَتَجُوْزُ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْمُعَاوَضَةُ فِيْ مِلْكِ الْمَسْجِدِ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ، كَأَنْ كَانَتْ أَرْضُ الْمَسْجِدِ لَا تُحْرَثُ

أَوْ تُحْرَثُ نَادِرًا، فَرَغِبَ فِيهَا شَخْصٌ بِأَرْضٍ تُحْرَثُ دَائِمًا، وَيَكُوْنُ بِصِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ أَوْلَى فَيَكْتُبُ فِي الصِّيغَةِ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ صَارَ الزَّبْرُ الْفُلَانِيُّ الْمُحَدَّدُ بِكَذَا لِمَسْجِدِ كَذَا مِنْ فُلَانٍ بِالْمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَكْمِلَةِ لِلشُّرُوْطِ وَالْأَرْكَانِ، فَصَارَ الزَّبْرُ الْمَذْكُوْرُ مِلْكًا مِنْ أَمْلَاكِ الْمَسْجِدِ قَطْعًا قَلَاطًا، وَتَعَوَّضَ فُلَانٌ الْمَذْكُوْرُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ مِلْكُ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَهُوَ الزَّبْرُ الْفُلَانِيُّ بِحُدُوْدِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى لِسَانِ الْقَيِّمِ وَالْوَالِي شَرْعًا عَلَى الْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُوْرِ الْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَلَهُ أَنْ يُقَايِسَ عَنِ الْمَسْجِدِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ

(Masalah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih) Tugas wali di dalam urusan yang ia kuasai adalah menjaga, merawat, mengawasi keuntungan dan kemaslahatan dan mengawasi tempatnya, ini secara utuh. Sedangkan secara terperinci maka hukum itu berbeda-beda dalam sebagian sub masalah perwalian. Dengan demikian, apabila tentara misalkan memberikan harta pada penguasa masjid untuk masjid maka ia memiliki harta itu lalu mengembalikannya, maka jika menganggap gegabah dengan mengembalikan harta, dengan gambaran tidak ada hal yang mewajibkan mengembalikan harta itu maka ia berdosa dan wajib baginya untuk menuntutnya. Jika tentara mengingkarinya maka wajib bagi penguasa untuk menuntut sumpah pengingkaran jika bahaya tidak menemuinya dengan menuntut sumpah, agar tentara mengakui dan mengembalikan harta yang ia ambil atau sebagiannya, dan boleh baginya menukar kepemilikan masjid jika melihat kemaslahatan, sebagaimana ada tanah masjid yang tidak dibajak atau tidak dibajak secara langka, maka seseorang merasa senang di dalamnya dengan tanah yang dibajak selamanya, dan dengan *sighat* penukaran itu lebih utama maka menulis dalam *shighat*: adapun setelah sepi maka gumpalan fulan yang dipastikan dengan demikian untuk masjid demikian dari fulan dengan penukaran syariat yang menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun, maka gumpalan tersebut menjadi gumpalan fulan dengan batasan-batasan empat atas lisan penghulu dan wali menurut *syara'* pada masjid tersebut Fulan bin Fulan, hal itu setelah tampak keuntungan dan kemaslahatan, dan baginya membagi dari masjid seperti sisa-sisa pengalokasian.

g. *Is'ad ar-Rafiq*, II/143:

(أَوْ تَبِعَةٌ لِآدَمِيٍّ) مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا مِنْهُ مَعَ مَا مَرَّ إِسْقَاطُ ذَلِكَ الْحَقِّ فَإِنْ كَانَ مَالًا (قَضَاهُ) أَيْ رَدَّهُ إِنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلَهُ لِمَالِكِهِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ لِوَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَوِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ دَفَعَهُ لِلْإِمَامِ لِيَجْعَلَهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ إِلَى الْحَاكِمِ الْمَأْذُوْنِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيْ مَالِ الْمَصَالِحِ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَالَ الْعُبَّادِيُّ وَالْغَزَالِيُّ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الْغُرْمِ وَأَلْحَقَ الرَّافِعِيُّ بِالصَّدَقَةِ سَائِرَ وُجُوْهِ الْمَصَالِحِ فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ قَاضٍ بِشَرْطِهِ صَرَفَهُ الْأَمِيْنُ بِنَفْسِهِ فِيْ مَالِ الْمَصَالِحِ اهـ

(*Atau mengikuti anak Adam*) Mengungkit-ungkit hal selain itu, sehingga dalam keabsahannya darinya di samping yang telah lewat disyaratkan menggugurkan hak. Jika berupa harta (harus menggantinya), maksudnya mengembalikannya apabila masih utuh dan jika tidak, maka harus mengganti pada pemiliknya, pengganti *malik* atau ahli warisnya setelah *malik* meninggal. Jika tidak ada ahli waris *malik* atau terputus kabarnya maka harus menyerahkan pada imam agar imam menempatkannya di *baitul mal* atau kepada hakim yang diizini dalam pengalokasian harta *mashalih*. Jika sulit, al-Ubbadi dan al-Ghazali berkata: *"Menghindarinya dengan niat sengaja"*. Ar-Rafi'i menyamakan bentuk-bentuk *mashalih* dengan sedekah, bila tidak ditemukan *Qadli* dengan syaratnya maka orang yang bisa dipercaya menyerahkannya dalam harta *mashalih*.

h. *Syarh al-Bahjah*, III/252:

(بَلْ غَيْرُهُمَا) أَيْ: غَيْرُ الْبُضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤْجَرُ (فَبِالْفَوَاتِ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيْتِ لِأَنَّهَا مَضْمُوْنَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ بِالْغَصْبِ كَالْأَعْيَانِ، فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلَاهَا أُجْرَةً لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ أَمَّا مَا لَا تُؤْجَرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ وَعَرَفَةَ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيْتِ لَا بِالْفَوَاتِ

(قَوْلُهُ: كَمَسْجِدٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَمَنْ شَغَلَ بَعْضَ الْمَسْجِدِ بِمَتَاعٍ فَإِنْ أَغْلَقَهُ وَجَبَ أُجْرَةُ كُلِّ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَمَوْضِعِ الْمَتَاعِ فَقَطْ وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ نَقَلَهُ فِي تَجْرِيْدِهِ عَنِ الْمُتَوَلِّيْ وَالْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِيْ فَتَاوِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ: وَأَفْتَى ابْنُ رَزِيْنٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ: مِنْ مَصَالِحِهِمْ، وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ إِلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِنْ بَابِ التَّحْرِيْرِ كَالْعِتْقِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ، أَوِ الْمُسْلِمُوْنَ يَمْلِكُوْنَ مَنْفَعَتَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ وَيَنْبَغِيْ أَنَّ نَحْوَ الرِّبَاطِ وَالْمَقْبَرَةِ كَالْمَسْجِدِ وَأَنَّ نَحْوَ الشَّارِعِ وَعَرَفَةَ تُصْرَفُ أُجْرَتُهُ

لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَهَا فِيْ مَصَالِحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ

(Bahkan selain keduanya), maksudnya selain vagina dan orang merdeka dari perkara yang memiliki manfaat persewaan, (maka sebab hilang dengan sendirinya) ditanggung manfaatnya, semisal harus ditanggung sebab dihilangkan, karena perkara tersebut ditanggung dengan akad yang rusak, sehingga ditanggung sebab *ghasab* seperti berbagai benda. Apabila seseorang meng*ghasab* budak atau sesuatu yang kegunaannya dicium seperti minyak *misik* dan ia menahannya dalam suatu masa maka ia wajib membayar ongkosnya. Jika budak pandai mengerjakan berbagai pekerjaan maka ia harus membayar upahnya yang tertinggi, bukan upah seluruhnya. Sedangkan hal-hal yang manfaatnya tidak bisa disewakan seperti masjid, jalan raya, pemakaman, dan Padang Arafah maka harus ditanggung sebab menghilangkannya, bukan sebab hilang dengan sendirinya.

(Ungkapan Pengarang: *seperti masjid*), Pengarang berkata dalam al-Ubab: *"Orang yang menyibukkan sebagian masjid dengan harta benda"*, jika ia menguncinya maka wajib membayar upah seluruh masjid. Jika tidak, maka tempat harta saja dan tempat alokasinya untuk *mashalih* masjid. (Ungkapan Pengarang: *"Tempat alokasinya untuk mashalih masjid"*) beliau menukil dalam *Tajrid*nya dari al-Mutawalli; al-Ghazali dan an-Nawawi dalam *fatawa* mereka. Lalu beliau berkata: Ibn Razin berfatwa bahwa upah itu untuk kepentingan muslimin, dan mungkin mengembalikan yang pertama padanya, karena itu termasuk bagian *mashalih* muslimin. *Khilaf* itu kembali pada *wakaf* masjid dan semisalnya itu bagian dari bab memerdekakan dan seperti memerdekakan, menurut al-Imam dan al-Ghazali. Atau kaum muslim dapat memiliki manfaatnya, menurut pilihan *jamaah*. Sebaiknya semisal pesantren dan pemakaman seperti masjid. Sungguh sesama jalan dan Arafah upahnya dialokasikan untuk kepentingan muslimin kecuali dibutuhkan untuk *mashalih*nya, maka angan-anganlah.

i. *Nihayah al-Muhtaj*, V/171:

وَمَنْفَعَةُ الْمَسْجِدِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ كَمَنْفَعَةِ الْحُرِّ فَلَوْ وَضَعَ فِيْهِ مَتَاعًا وَأَغْلَقَهُ ضَمِنَ أُجْرَةَ جَمِيْعِهِ تُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ وَإِنْ لَمْ يُغْلِقْهُ ضَمِنَ أُجْرَةَ مَوْضِعِ مَتَاعِهِ فَقَطْ وَإِنْ أُبِيْحَ لَهُ وَضْعُهُ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَضْيِيْقٌ عَلَى الْمُصَلِّيْنَ أَوْ كَانَ مَهْجُوْرًا لَا يُصَلِّيْ أَحَدٌ فِيْهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ وَكَذَا الشَّوَارِعُ وَمِنًى وَمُزْدَلِفَةُ وَعَرَفَةُ وَأَرْضٌ وُقِفَتْ لِدَفْنِ الْمَوْتَى كَمَا فِي التَّتِمَّةِ. أَمَّا إِغْلَاقُهُ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ مَتَاعٍ فِيْهِ وَمَنْعِ النَّاسِ

مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ يَدٌ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْبُقْعَةِ هَذَا. وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ مَا ذُكِرَ فِي نَحْوِ الْمَسْجِدِ بِمَا إِذَا شَغَلَهُ بِمَتَاعٍ لَا يَعْتَادُ الْجَالِسُ فِيهِ وَضْعَهُ فِيهِ وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمَسْجِدِ فِي وَضْعِهِ فِيهِ زَمَنًا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ بِخِلَافِ مَتَاعٍ يَحْتَاجُ نَحْوُ الْمُصَلِّي أَوِ الْمُعْتَكِفِ لِوَضْعِهِ اهـ

Pemanfaataan masjid, madrasah, dan pemondokan itu seperti manfaat orang merdeka. Apabila seseorang meletakkan harta di dalamnya dan menguncinya maka ia harus menanggung upah seluruhnya yang dipakai untuk *mashalih*nya. Jika tidak menguncinya, maka menanggung upah tempatnya saja meski diperbolehkan menempatkan sesuatu atau tidak sampai menyempitkan *mushalli* atau ia *mahjur* tidak ada seorang pun yang shalat di dalamnya menurut tuntutan kemutlakan mereka. Begitu pula jalan, Mina, Muzdalifah, Arafah, dan lahan yang diwakafkan untuk mengubur mayat, sebagaimana dalam *at-Titimmah*. Sedangkan menguncinya tanpa meletakkan barang dan mencegah manusia dari shalat maka tidak ada tanggungan baginya sebab ia tidak menetapkan kekuasaan, dan semisal tempat tersebut ialah tempat ini. Menurut *aujah*, *qayyid* perkara itu dalam semisal masjid dengan persoalan apabila ia menyibukkannya dengan harta yang tidak biasa diletakkan orang yang duduk di dalam masjid dan tidak ada kemaslahatan bagi masjid ketika meletakkannya dalam masa yang sebanding upah. Lain halnya harta yang perlu diletakkan sesama *mushalli* atau *mu'takif*.

j. *Ihya' 'Ulumiddin*, II/129-130:

النَّظَرُ الثَّانِي فِي الْمَصْرِفِ، فَإِذَا أَخْرَجَ الْحَرَامَ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ فَيَجِبُ الصَّرْفُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَارِثِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَيَنْتَظِرُ حُضُورَهُ أَوِ الْإِيصَالَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زِيَادَةٌ وَمَنْفَعَةٌ فَلْتَجْمَعْ فَوَائِدَهُ إِلَى وَقْتِ حُضُورِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِمَالِكٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنَ الْوُقُوفِ عَلَى عَيْنِهِ وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ مَاتَ عَنْ وَارِثٍ أَمْ لَا فَهَذَا لَا يُمْكِنُ الرَّدُّ فِيهِ لِلْمَالِكِ وَيُوقَفُ حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ وَرُبَّمَا لَا يُمْكِنُ الرَّدُّ لِكَثْرَةِ الْمُلَّاكِ كَغُلُولِ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهَا بَعْدَ تَفَرُّقِ الْغُزَاةِ كَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى جَمْعِهِمْ وَإِنْ قَدَرَ فَكَيْفَ يُفَرِّقُ دِينَارًا وَاحِدًا مَثَلًا عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ... فَإِنْ قِيلَ: مَا دَلِيلُ جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِمَا هُوَ حَرَامٌ؟ وَكَيْفَ يَتَصَدَّقُ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ؟ وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَحُكِيَ

عَنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ وَقَعَ فِيْ يَدِهِ دِرْهَمَانِ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُمَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِمَا رَمَاهُمَا بَيْنَ الْحِجَارَةِ وَقَالَ لَا أَتَصَدَّقُ إِلَّا بِالطَّيِّبِ وَلَا أَرْضَى لِغَيْرِيْ مَا لَا أَرْضَاهُ لِنَفْسِيْ اهـ

Pandangan kedua terkait tempat alokasi; jika seseorang mengeluarkan harta haram, maka ia memiliki tiga hal; adakala harta itu dimiliki orang tertentu, maka wajib menyerahkan padanya atau pada ahli warisnya. Apabila ia gaib, maka harus ditunggu atau menyampaikan padanya. Bila bertambah dan bermanfaat maka sebaiknya mengumpulkan faidah-faidahnya sampai waktu hadirnya. Adakala dimiliki orang yang tidak tertentu, yang sudah putus asa menunggu kabarnya dan tidak tahu sungguh ia telah mati meninggalkan ahli waris atau tidak. Ini tidak mungkin mengembalikannya kepada *malik* dan ditunda sampai jelas perihalnya. Kadang tidak mungkin mengembalikan karena banyaknya *malik*, seperti halnya harta rampasan yang dikorupsi, maka setelah para pejuang berpisah bagaimana mampu mengumpulkan mereka, dan jika mampu maka bagaimana memisahkan satu dinar misalkan atas seribu atau dua ribu, maka ini sebaiknya disedekahkan ... Jika dikatakan: Apa dalil diperbolehkan menyedekahkan harta haram? Bagaimana sedekah dengan harta yang tidak dimiliki? Jamaah berpendapat bahwa itu tidak boleh, karena harta itu haram. Diriwayatkan dari al-Fudhail sungguh terjadi pada beliau di tangannya ada dua dirham, tatkala ia mengetahui kedua dirham itu tidak diperoleh dengan cara yang halal maka beliau melemparnya di antara bebatuan dan berkata saya tidak bersedekah kecuali dengan harta yang baik dan saya tidak rela orang lain melakukan tindakan yang aku tidak rela.

373. Dilema Wali Nikah Anak Zina

Deskripsi Masalah

Hamil di luar nikah akhir-akhir ini nampaknya telah menjadi hal biasa. Sebut saja Anton dan Tini, pasangan tersebut sudah telanjur melakukan hubungan seks di luar nikah. Demi menutupi aib keluarga, keduanya melangsungkan pernikahan setelah kandungan membesar. Sebelum enam bulan dari pernikahan, anak hasil hubungan gelap itu lahir. Masalah muncul, tatkala 20 tahun kemudian, sang anak yang ternyata perempuan, sebut saja Bunga beranjak dewasa dan hendak melangsungkan pernikahan. Entah karena awam tentang ilmu agama atau demi menutup rapat aibnya, Anton yang merasa sebagai bapak "biologis" Bunga serta suami sah Tini, merasa berhak menjadi wali nikah. Dan sebagaimana tradisi yang berlaku, Anton mewakilkan ijab Si Bunga pada seorang *Naib*. Akhirnya, *Naib* pun menikahkan Bunga,

tentunya dalam akad nikahnya menyebutkan *sighat taukil* (misalnya: ... *muwakkili*).

Pertimbangan

a. Menyembunyikan aib perbuatan zina adalah anjuran.

b. Jika Bunga anak zina, seharusnya yang berhak menikahkan adalah Wali Hakim.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum wakalahnya?

b. Bagaimana status pernikahan Bunga baik ketika *shighat* yang di gunakan seperti di atas atau tidak?

Jawaban

a. Hukum *wakalah* dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i *wakalah* tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi hukumnya sah.

b. Jika hakim ketika menikahkan bertindak sebagai wakil (bukan sebagai *wali 'am*), maka akadnya tidak sah. Adapun hubungan suami istri (persetubuhan *wathi*) yang sudah terjadi hukumnya *syubhat* (tanpa menunggu masa *'iddah*) kemudian bisa langsung dinikahkan lagi secara benar.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tuhfah al-Muhtaj*, V/111:

(وَشَرْطُ الْمُوَكِّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ) وَقْتَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَأْذَنُ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ النَّاشِئُ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ تَارَةً وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ أُخْرَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ وَلَا يُنَافِيهِ التَّفْرِيعُ الْآتِي لِأَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى مِلْكِ التَّصَرُّفِ أَيْضًا فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا أَيْ الْمَتْنُ فِيمَنْ يُوَكِّلُ فِي مَالِهِ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْوَلِيِّ وَكُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ مَحِلِّ التَّصَرُّفِ أَوْ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْغَزِّيَّ اعْتَرَضَهُ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ بِأَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لَا الْعَيْنِ وَمُرَادُهُ مَا قَرَّرْتُهُ أَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَحِلِّ تَارَةً وَالْوِلَايَةَ عَلَيْهِ أُخْرَى وَرَدَّ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْغَزِّيِّ بِمَا لَا يَصِحُّ ... وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الشَّرِيكَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكِّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ التَّصَرُّفَ فِيهِ حِينَ التَّوْكِيلِ أَوْ يَذْكُرَهُ تَبَعًا لِذَلِكَ أَوْ يَمْلِكَ أَصْلَهُ.

(Syarat *muwakkal fih* adalah dimiliki *muwakkil*) saat mewakilkan, bila tidak maka bagaimana ia mengizinkannya. Maksudnya kepemilikan *tasharuf* yang muncul dari kepemilikan barang, dan terkadang dari kepemilikan *wilayah* dengan dalil pernyataan an-Nawawi di awal bab: *"Sebab memiliki atau wilayah"*, cabang persoalan yang akan datang tidak menafikannya, sebab *taukil* juga sah atas kepemilikan *tasharuf*, sehingga pendapat al-Adzra'i ini, maksudnya *matn*, bagi orang yang mewakilkan hartanya, bila tidak maka semisal wali mewakilkan kepada orang yang boleh mewakilkan harta orang lain yang tidak dimilikinya, itu tidak benar; karena alasan yang diketahui dari *matn*, yaitu bahwa syaratnya adalah memiliki tempat *tasharuf* atau memiliki *tasharruf* di dalamnya, yang mana al-Ghazi menentangnya, maksudnya menentang al-Adzra'i dengan menyatakan bahwa syaratnya adalah memiliki *tasharuf*, bukan memiliki barangnya. Maksudnya apa yang telah aku tetapkan, bahwa kepemilikan *tasharuf* sesekali memberi pemahaman kepemilikan barang, dan terkadang memberikan pemahaman kepemilikan *wilayah* padanya. Sebagian ulama menolak pernyataan al-Ghazi dengan pernyataan yang tidak benar… Al-Adzra'i menyamakan *al-Muqaridh* dengan *asy-Syarik*. Dari rumusan yang telah ditetapkan, diketahui bahwa syarat *muwakkal fih* adalah *muwakkil* memiliki *tasharuf* padanya saat mewakilkan, atau menyebutkannya karena mengikutkannya pada kepemilikan *tasharuf*, atau memiliki asalnya.

b. *Al-Hawi al-Kabir*, X/357-358;

فَأَمَّا إِنْ كَانَ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْوَلَدَ لَايَلْحَقُ بِالزَّانِيْ وَإِنِ ادَّعَاهُ ..... وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ اهـ

Adapun apabila wanita yang berzina itu masih gadis belum bersuami, menurut *madzhab* asy-Syafi'i dan *jumhur fuqaha* sungguh anak tersebut tidak ditemukan hubungan nasabnya pada orang yang berzina meski ia mengakuinya ... Abu Hanifah berkata: *"Jika ia menikahinya sebelum wanita itu melahirkan meskipun jarak sehari, maka anak tersebut bertemu nasab dengannya. Jika orang itu tidak menikahi wanita tersebut maka si anak tidak ditemukan (hubungan nasab) padanya."*

c. Referensi lain:
   1) *Tuhfah al-Muhtaj*, V/238-241
   2) *Al-Anwar*, II/441

374. Perpindahan Janin Secara Misterius

Deskripsi Masalah

Ada seorang wanita berinisial A yang tengah hamil 9 bulan, tanpa sepengetahuannya tiba-tiba janin yang berada di dalam kandungan sang ibu menghilang. Dan disinyalir, kandungan tersebut pindah ke dalam rahim orang lain (si B) yang masih ada hubungan kekerabatan dengan si A. setelah 10 hari, si B melahirkan janin yang ada di dalam perutnya. Kemudian terjadilah sengketa pengakuan hak anak antara si A yang telah mengandung selama 9 bulan dan si B yang telah melahirkan dari janin yang tiba-tiba ada di dalam perutnya. Setelah dilakukan tes DNA dinyatakan bahwa anak tersebut secara genetika (gen keturunan) adalah anak dari si A.

Pertanyaan

a. Siapakah ibu dari anak tersebut?
b. Siapakah yang berhak menjadi wali dari anak tersebut ketika akan melangsungkan pernikahan?

Jawaban

a. Ibu dari anak tersebut adalah perempuan yang melahirkan.
b. Yang berhak menjadi wali dari anak tersebut adalah suami dari ibunya, selama jarak antara kelahiran anak dan pernikahan ibunya adalah mencapai batas minimal usia kandungan (*imkan aqal al-haml*).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Shahih Muslim*, II/257:

أُمُّكَ الَّتِيْ وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ.

Ibumu ialah seorang wanita yang telah melahirkanmu, maka sungguh aku adalah ibumu.

b. *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' ash-Shaghir*, VI/489:

(الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ). (ق د ن ه) عَنْ عَائِشَةَ (حم ق ت ن ه) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ (ن) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ (صح) يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ (لِلْفِرَاشِ) أَيْ هُوَ تَابِعٌ لِلْفِرَاشِ أَوْ مَحْكُوْمٌ بِهِ لِلْفِرَاشِ أَيْ لِصَاحِبِهِ زَوْجًا كَانَ أَوْ سَيِّدًا لِأَنَّهُمَا يَفْتَرِشَانِ الْمَرْأَةَ بِالْاِسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُفْتَرِشَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَخَصَّهُ الْحَنَفِيَّةُ بِالْحُرَّةِ وَقَالُوْا وَلَدُ الْأَمَةِ لَا يَلْحَقُ

سَيِّدَهَا مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ اهـ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ تَابِعًا لِلْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ بِمَا شُرِعَ لَهُ كَاللِّعَانِ وَإِلَّا انْتَفَى وَمِثْلُ الزَّوْجِ أَوِ السَّيِّدِ هُنَا وَاطِئٌ بِشُبْهَةٍ وَلَيْسَ لِزَانٍ فِي نَسَبِهِ حَظٌّ إِنَّمَا حَظُّهُ مِنْهُ اسْتِحْقَاقُ الْحَدِّ كَمَا قَالَ (وَلِلْعَاهِرِ) الزَّانِي يُقَالُ عَهَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَتَاهَا لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا وَالْعَهَرُ بِفَتْحَتَيْنِ الزِّنَا (الْحَجَرُ) أَيْ حَظُّهُ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْخَيْبَةِ وَالْحِرْمَانِ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنَ النَّسَبِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ دَعْوَاهُ مَعَ وُجُودِ الْفِرَاشِ لِلْآخَرِ قَالَ الطِّيبِيُّ تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ: وَأَخْطَأَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ الرَّجْمُ بِالْحَجَرِ لِأَنَّ الرَّجْمَ خَاصٌّ بِالْمُحْصَنِ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الرَّجْمِ نَفْيُ الْوَلَدِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ: التَّعْوِيلُ عَلَى الْأَوَّلِ لِتَعُمَّ الْخَيْبَةُ كُلَّ زَانٍ وَدَلِيلُ الرَّجْمِ مَأْخُوذٌ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّخْصِيصِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ثُمَّ الْفِرَاشُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ إِنَّمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَمَعَ تَمَكُّنٍ اهـ

Seorang anak dinisbatkan pada suami dari wanita yang melahirkannya, bagi orang yang melakukan zina, tidak boleh menisbatkan anak hasil zinanya pada dirinya. Seorang anak dinisbatkan pada suami/tuan dari wanita yang melahirkannya, karena ia menggauli wanita tersebut atas hak yang ia miliki, baik wanita itu hamba sahaya atau wanita merdeka, ini pendapat imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah lebih menspesifikasikan permasalahan ini hanya pada wanita yang merdeka saja, sedangkan ulama lain mengatakan bahwa anak dari hamba sahaya tidak dapat dinisbatkan kepada tuannya kecuali ada pengakuan dari tuannya. Penisbatan anak pada suami dari wanita yang melahirkannya ketika tidak ada hal yang menafikannya, seperti telah terjadinya sumpah *li'an* (sumpah tidak akan menggauli istri), dalam hal ini seseorang yang *wathi syubhat*, penisbatan anak hasil zina tidak dapat diarahkan pada orang yang zina, ia hanya mendapat konsekuensi hukum atas apa yang telah ia perbuat dan tidak mendapat harta warisan dari anak hasil zinanya.

c. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 236:

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَوْلُودَ عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِ لَاحِقٌ بِهِ مُطْلَقًا إِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إِلَّا بِاللِّعَانِ وَالنَّفْيِ تَارَةً يَجِبُ وَتَارَةً يَحْرُمُ وَتَارَةً يَجُوزُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِقْرَارِ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا وَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ اهـ

Kesimpulan, sungguh anak yang dilahirkan atas dasar hubungan yang sah, maka anak yang dilahirkan bisa dinisbatkan pada suami apabila

mungkin darinya, dan suami tidak menafikannya kecuali dengan *li'an*. Penafian kadang wajib, haram dan boleh. Tidak ada pertimbangan atas pengakuan wanita terhadap zina meski laki-laki tadi membenarkannya dan jelas tanda-tandanya.

375. *Software* Windows

Deskripsi Masalah

Windows adalah *software* produksi perusahaan raksasa Microsoft yang saat ini banyak digunakan oleh *user* (pengguna) baik dari instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Sayangnya sebagian besar dari mereka menggunakan *software* yang tidak *original* (bajakan).

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum memakai *software* non original tersebut untuk pribadi saja mengingat harganya terlalu mahal?
b. Bagaimana jika *software* itu tidak dikomersilkan/digandakan tetapi dipakai untuk sarana komersial lain, seperti warnet, rental pengetikan, dan lain-lain?
c. Jika tidak boleh, maka bagaimana solusinya mengingat harga *software* yang original terbilang mahal?

Jawaban

a. Hukum menggandakan, *software* original secara ilegal dan menggunakan hasil bajakannya menurut fatwa sebagian ulama *mu'ashirin* hukumnya adalah haram karena tergolong menggunakan hak orang lain secara tidak sah (*ghasab*). Sedangkan pendapat ulama salaf perbuatan tersebut tidak tergolong *ghasab* (menggunakan hak orang lain secara tidak sah), sebab pemilik barang memilki hak secara penuh atas penggunaan barang yang dimiliki. Namun demikian, jika perundang-undangan Indonesia melarang penggunaan *software* bajakan, maka perundang-undangan tersebut wajib ditaati secara *dhahir* yakni tidak berdosa jika dilanggar.
b. Sama dengan jawaban (a).
c. Sudah tercakup dalam jawaban (a).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, VII/5160:

إِنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُنْعَقِدِ فِي دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الْخَامِسِ بِالْكُوَيْتِ مِنْ ١-٦ جُمَادَى الْأُوْلَى ١٤٠٩هـ/ ١٠-١٥ كَانُوْنَ الْأَوَّلِ (دِيْسَمْبِرْ) ١٩٨٨ م بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى

الْبُحُوثِ الْمُقَدَّمَةِ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَالْخُبَرَاءِ فِي مَوْضُوعِ (الْحُقُوقِ الْمَعْنَوِيَّةِ) وَاسْتِمَاعِهِ لِلْمُنَاقَشَاتِ الَّتِي دَارَتْ حَوْلَهُ، قَرَّرَ: (أَوَّلًا) الْاِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيفُ وَالْاِخْتِرَاعُ أَوِ الْاِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لِتَمَوُّلِ النَّاسِ بِهَا وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا فَلَا يَجُوزُ الْاِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا. (ثَانِيًا) يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْاِسْمِ التِّجَارِيِّ أَوِ الْعُنْوَانِ التِّجَارِيِّ أَوِ الْعَلَامَةِ التِّجَارِيَّةِ وَنَقْلُ أَيٍّ مِنْهَا بِعِوَضٍ مَالِيٍّ إِذَا انْتَفَى الْغَرَرُ وَالتَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ بِاعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِيًّا. (ثَالِثًا) حُقُوقُ التَّأْلِيفِ وَالْاِخْتِرَاعِ أَوِ الْاِبْتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا وَلِأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَلَا يَجُوزُ الْاِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا اهـ

Sungguh *majlis* perkumpulan *fikih Islami* yang dilaksanakan pada *Daurah Muktamar* kelima di Kuwait sejak 1-6 Jumadil Ula 1409 H. bertepatan pada tanggal 10-15 *Kanun Awal* (Desember) 1988 M. Setelah anggota dan *khubara* mengadakan pembahasan awal dengan tema (hak *maknawi*) dan mendengarkan diskusi-diskusi yang berkisar seputarnya, menetapkan: (*Pertama*) nama, alamat, dan tanda perdagangan, susunan, ciptaan dan inovasi merupakan hak khusus bagi pelaku menurut *urf* pada masanya yang berharga, karena manusia bisa menjadikannya harta. Hak ini diperhitungkan secara syara' sehingga tidak boleh diganggu gugat. (*Kedua*) boleh men*tasharruf*kan atas nama, alamat atau tanda dagang dan memindah, maksudnya mengalihkannya dengan *iwadl* harta bila tidak terdapat *gharar*, tipuan dan rayuan dengan *i'tibar* sungguh itu menjadi hak harta. (*Ketiga*) hak susunan, hasil karya, atau hak cipta dilindungi oleh *syara'* dan pelakunya memiliki hak *tasharruf* dan tidak boleh diganggu gugat.

b. *Kanz ar-Raghibin* pada *Hasyiyatan Qulyubi wa 'Umairah*, III/91 [Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabi]:

(وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنَ الْمُلَّاكِ (فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ) وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ أَفْضَى إِلَى تَلَفٍ (فَإِنْ تَعَدَّى) الْعَادَةَ (ضَمِنَ) مَا تَعَدَّى فِيهِ اهـ

(Setiap orang men*tasharruf*kan) maksudnya orang yang memiliki (dari kepemilikannya menurut *adat*), tidak ada tanggungan baginya apabila mendatangkan kerusakan. (Apabila melanggar) menurut *adat* (maka bertanggung jawab) atas pelanggarannya.

c. *Al-Faruq aw Anwar al-Buruq ma'a al-Hawamisy*, III/216-217 [Bairut: 'Alam al-Kutub]:

إِنَّ الْمِلْكَ إِبَاحَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ تَقْتَضِي تَمَكُّنَ صَاحِبِهَا مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْعَيْنِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْهُمَا مِنْ حَيْثُ هِيَ كَذَلِكَ وَتَسْتَقِيمُ الْحَدُّ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْضًا وَيَكُونُ الْمِلْكُ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ لِأَنَّ الْاِصْطِلَاحَ إِنَّ خِطَابَ التَّكْلِيفِ هُوَ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الْمَشْهُورَةُ وَخِطَابَ الْوَضْعِ هُوَ نَصْبُ الْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَالتَّقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا بَلْ هُوَ إِبَاحَةٌ خَاصَّةٌ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّهُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ ... قَالَ الْمَازِرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ يَحْصُلُ فِي الْأَعْيَانِ وَفِي الْإِجَارَاتِ يَحْصُلُ فِي الْمَنَافِعِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ بَلِ الْأَعْيَانُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْمِلْكَ هُوَ التَّصَرُّفُ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي الْأَعْيَانِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى بِالْإِيجَادِ وَالْإِعْدَامِ وَالْإِمَاتَةِ وَالْإِحْيَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَتَصَرُّفُ الْخَلْقِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَنَافِعِ فَقَطْ بِأَفْعَالِهِمْ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمُحَاوَلَاتِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ قَالَ وَتَحْقِيقُ الْمِلْكِ أَنَّهُ إِنْ وَرَدَ عَلَى الْمَنَافِعِ مَعَ رَدِّ الْعَيْنِ فَهُوَ الْإِجَارَةُ وَفُرُوعُهَا مِنَ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُجَاعَلَةِ وَالْقِرَاضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ وَرَدَ عَلَى الْمَنَافِعِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْعَيْنَ بَلْ يَبْذُلُهَا لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَهُوَ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالْعَقْدُ فِي الْجَمِيعِ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمَنْفَعَةَ فَقَدْ ظَهَرَ بِهَذِهِ الْمَبَاحِثِ وَهَذِهِ الْأَسْئِلَةِ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّصَرُّفَاتِ وَمَا يُتَوَهَّمُ الْتِبَاسُهُ بِهِ اهـ

Sungguh kepemilikan harta benda atau manfaat yang bisa digunakan atau diambil *iwadl*nya itu diperkenankan oleh *syara'*. *Had* tersebut tegak dengan lafadz ini juga, sementara harta milik merupakan *khitab taklif*. Karena menurut istilah, sungguh *khitab taklif* ialah lima hukum yang *masyhur*. Sedangkan *khitab wadl'i* ialah mengangkat sebab, syarat, *mani'*, dan kadar *syariat*. Terkait harta milik ini bukan bagian dari *khitab wadl'i*, akan tetapi boleh secara khusus. Ungkapan sebagian ulama sungguh itu merupakan *khitab wadl'i*... Al-Maruzi ﵀ berkata dalam *syarah Talqin*: ungkapan *fuqaha* terkait kepemilikan harta dagangan itu hasil dalam harta-benda, sementara dalam persewaan hasil dalam kemanfaatan tidak pada *zhahir*nya, akan tetapi benda-benda tersebut tidak dimiliki kecuali oleh Allah ﷻ; karena kepemilikan itu bentuk *tasharruf* dan tidak ada *tasharruf* dalam benda-benda kecuali Allah ﷻ yang mewujudkan,

meniadakan, amanat, menghidupkan dan lain sebagainya. *Tasharruf* makhluk hanyalah dalam manfaatnya saja dengan melakukan makan, minum, berpindah tempat, bergerak dan diam. Kata beliau: *"Pernyataan kepemilikan ialah sungguh apabila berupa kemanfaatan-kemanfaatan serta mengembalikan barang maka dinamakan persewaan dan cabang-cabangnya yaitu musaqah, jualah, qiradl dan sesamanya. Apabila berupa kemanfaatan-kemanfaatan serta benda tidak dikembalikan, bahkan menyerahkannya pada orang lain dengan iwadl atau tanpa iwadl maka dinamakan penjualan dan pemberian. Akad dalam semuanya memperoleh kemanfaatan, sehingga jelas pembahasan ini dan pertanyaan ini tentang hakikat kepemilikan, perbedaan diantaranya dan diantara tasharruf-tasharruf lain, dan perkara yang disalah pahami keserupaan dengannya."*

d. *Al-Faruq aw Anwar al-Buruq ma'a al-Hawamisy*, III/275-276 [Bairut: 'Alam al-Kutub]:

اعْلَمْ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلِوَرَثَتِهِ وَهَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ عَلَى عُمُوْمِهِ بَلْ مِنَ الْحُقُوْقِ مَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَارِثِ وَمِنْهَا مَا لَا يَنْتَقِلُ .... وَمِنْ حَقِّهِ مَا فُوِّضَ إِلَيْهِ مِنَ الْوِلَايَاتِ وَالْمَنَاصِبِ كَالْقِصَاصِ وَالْإِمَامَةِ وَالْخِطَابَةِ وَغَيْرِهِمَا وَكَالْأَمَانَةِ وَالْوَكَالَةِ فَجَمِيْعُ هَذِهِ الْحُقُوْقِ لَا يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوَرِّثِ بَلِ الضَّابِطُ لِمَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرًا عَنِ الْوَارِثِ فِي عِرْضِهِ بِتَخْفِيْفِ أَلَمِهِ وَمَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِنَفْسِ الْمُوَرِّثِ وَعَقْلِهِ وَشَهَوَاتِهِ لَا يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ وَالسِّرُّ فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْوَرَثَةَ يَرِثُوْنَ الْمَالَ فَيَرِثُوْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَبَعًا لَهُ وَلَا يَرِثُوْنَ عَقْلَهُ وَلَا شَهْوَتَهُ وَلَا نَفْسَهُ فَلَا يَرِثُوْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَمَا لَا يُوْرَثُ لَا يَرِثُوْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اهـ

Ketahuilah sungguh diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ sungguh beliau bersabda: "*Orang yang mati meninggalkan hak maka bagi ahli warisnya.*" Lafadz ini tidak pada umumnya, tetapi di antara hak terdapat perkara yang beralih pada ahli waris, dan perkara yang tidak berpindah... di antara haknya ialah perkara yang diserahkan padanya dari *wilayah* dan *manashib* seperti *qishash*, *imamah*, *khatabah* dan selain keduanya dan seperti *amanah* dan *wakalah*, maka seluruh hak ini tidak berpindah pada ahli waris sedikitpun meski tetap bagi *muwarrits*. Bahkan batasannya bagi perkara yang berpindah padanya ialah sesuatu yang berhubungan dengan harta atau menolak bahaya dari ahli waris dalam harga dirinya dengan meringankan sakitnya; dan perkara yang berhubungan dengan

diri *muwarris*, akal dan syahwatnya tidak berpindah pada ahli waris. Rahasia perbedaannya adalah sungguh ahli waris itu mewarisi harta, sehingga mereka mewarisi sesuatu yang berhubungan dengannya sebab mengikutinya dan tidak mewarisi akal, syahwat dan nafsunya sehingga mereka tidak mewarisi perkara yang berhubungan dengan itu; Perkara yang tidak diwariskan, maka mereka tidak mewarisi perkara yang ada hubungan dengannya karena mengikut padanya.

e. *'Umdah al-Mufti al-Mustafti*, II/152:

مَسْأَلَةٌ: لَا يَجُوْزُ أَخْذُ كِتَابِ الْغَيْرِ لِيَنْتَقِلَ مِنْهُ مَسْأَلَةً إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْ مَالِكِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَمِنَهُ إِنْ تَلِفَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَأْخُذْهُ وَنَقَلَ مِنْهُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ غَيْرِ الْاِسْتِيْلَاءِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُهَا كَاقْتِبَاسِ النَّارِ وَالْحَدِيْثُ الْوَارِدُ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّظَرِ عَنْ كِتَابِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مَحْمُوْلٌ عَلَى كِتَابٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى مَا لَا يَرْضَى صَاحِبُهُ بِالْاِطِّلَاعِ عَلَيْهِ كَالرَّسَائِلِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِخَبَرٍ لَا يَرْضَى صَاحِبُهُ بِالْعِلْمِ بِمَا فِيْهِ بِخِلَافِ كُتُبِ الْعِلْمِ اهـ

Masalah: Tidak boleh mengambil kitab orang lain untuk memindah masalah darinya kecuali atas izin pemiliknya. Jika mengambil tanpa izin maka ia harus bertanggung jawab Apabila rusak. Sedangkan bila tidak mengambilnya dan menukil masalah darinya tanpa menguasai maka dibolehkan meskipun pemiliknya tidak rela, seperti kutipan *nar* dan hadits yang *warid* terkait larangan melihat kitab orang lain tanpa seizinnya itu diarahkan pada kitab yang mengandung maksud bahwa pemiliknya tidak rela kitab/bukunya dilihat seperti surat-surat yang menyimpan *khabar* yang mana pemiliknya tidak rela apabila diketahui isinya, lain halnya dengan kitab-kitab ilmu.

f. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 91 [Dar al-Fikr]:

(مَسْأَلَةُ ك) يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِيْ كُلِّ مَا لَهُ فِيْهِ وِلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيْهِ وِلَايَةٌ وَهُوَ مِنَ الْحُقُوْقِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْمَنْدُوْبَةِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالْاِسْتِقْلَالُ بِصَرْفِهِ فِيْ مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُوْرُ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوْهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبْ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيْهِ كَمَا قَالَهُ م ر وَتَرَدَّدَ فِيْهِ فِي التُّحْفَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوْبِ فِيْ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ مُحَرَّمًا لَكِنْ ظَاهِرًا فَقَطْ وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ أَيْضًا وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَنْدُوْبِ وَالْمُبَاحِ بِعَقِيْدَةِ

الْمَأْمُورِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِعَدَمِ الْاِمْتِثَالِ وَمَعْنَى بَاطِنًا أَنَّهُ يَأْثَمُ اهـ قُلْتُ وَقَالَ ش ق وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَالْمَنْدُوبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ التُّنْبَاكِ إِذَا قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ خِسَّةً بِذَوِي الْهَيْئَاتِ وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَمَرَ نَائِبَهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِعَدَمِ شُرْبِ النَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْقَهَاوِي فَخَالَفُوهُ وَشَرِبُوا فَهُمُ الْعُصَاةُ وَيَحْرُمُ شُرْبُهُ الْآنَ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ وَلَوْ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْوُجُوبُ اهـ

(Masalah dari Muhammad bin Sulaiman al-Kurdy al-Madani) Wajib melaksanakan perintah imam terkait perkara yang berhubungan dengan *wilayah*, seperti menyerahkan *zakat mal*. Ketika perintah tersebut tidak berhubungan dengan *wilayah*, yaitu hak-hak yang bersifat wajib atau sunnah, maka dibolehkan menyerahkan hak tersebut pada imam dan bebas mengalokasikan sesuai tempatnya. Apabila yang diperintahkan berupa hal-hal yang bersifat mubah, makruh, atau haram maka tidak wajib memenuhi perintahnya, sebagaimana penuturan Muhammad Ar-Ramli. Sedangkan Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* masih ragu terkait masalah ini, akan tetapi beliau condong pada kewajiban patuh kepada imam dalam semua perintahnya meski diharamkan, tapi yang bersifat dhahir saja. Selain itu, ketika terdapat *maslahat* umum dalam perintah haram tersebut maka wajib dilakukan secara dhahir dan bathin. Jika perintahnya tidak terdapat kemaslahatan maka yang wajib dilakukan hanya haram yang bersifat dhahir. Barometer dalam perkara sunnah atau mubah ialah keyakinan dari orang yang diperintah. Arti dhahir adalah tidak ada dosa setelah menjalankan perintah dan arti bathin ada dosa setelah menjalankannya. Abdullah ibn Hijazi ibn Ibrahim asy-Syarqawi berkata: Pada kesimpulannya, wajib taat pada imam terhadap apa yang telah diperintahkannya, baik secara jelas atau tidak jelas selama hal itu bukan perintah yang haram atau makruh. Perkara wajib menjadi *muakkad* dan sunnah diwajibkan; begitu pula perkara mubah bila terdapat maslahat, seperti meninggalkan rokok yang hukumnya makruh, sebab mengkonsumsi tembakau dipandang sebagai perbuatan rendah bagi orang yang memiliki *hai'ah*. Ada sebuah peristiwa dimana seorang penguasa memerintahkan wakilnya untuk memanggil orang-orang agar tidak merokok dan meminum kopi di pasar. Akan tetapi orang yang dipanggil itu tidak mengindahkan panggilan imam. Bahkan mereka tetap asyik merokok dan minum kopi, maka mereka

termasuk orang-orang yang bermaksiat. Kini mengkonsumsi tembakau diharamkan, karena hal itu merupakan larangan imam. Seandainya imam tersebut memerintahkan sesuatu lantas mencabut pernyataannya meskipun yang diperintahkan belum melaksanakan perintahnya, maka kewajiban melaksanakan perintahnya belum gugur.

376. Memanfaatkan Lahan Wakaf

Deskripsi Masalah

Ada seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah masjid. Masyarakat kemudian membentuk panitia penggalangan dana untuk merealisasi pembangunan tersebut. Panitia yang ditunjuk, selanjutnya berencana mengelola dana yang terkumpul yang hasilnya digunakan untuk pembangunan masjid. Sambil menunggu terkumpulnya dana yang cukup, panitia memanfaatkan lahan wakaf tersebut sebagai lahan produktif dengan menyewakan atau menjadikannya sebagai sawah atau kebun yang hasilnya dialokasikan untuk mewujudkan pembangunan masjid.

Pertanyaan

a. Bolehkah pemanfaatan lahan wakaf tersebut dengan disewakan atau dijadikan perkebunan atau lahan pertanian dengan tujuan seperti di atas?
b. Bolehkah mengelola dana sumbangan yang terkumpul dalam berbagai bentuk investasi yang hasilnya juga digunakan untuk pembangunan masjid?

Jawaban

a. Tidak boleh/haram sebab menyalahi syarat wakif (orang yang mewakafkan).
b. Tidak boleh, karena dana tersebut dihimpun untuk pembangunan masjid.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, III/253 [Dar al-Fikr]:

(وَهُوَ) أَيِ الْوَقْفُ (عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ) سَوَاءٌ أَقُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ أَمْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، أَمْ يَنْتَقِلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْفَكُّ عَنِ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّينَ كَمَا هُوَ الْأَظْهَرُ، إِذْ مَبْنَى الْوَقْفِ عَلَى اتِّبَاعِ شَرْطِ الْوَاقِفِ (مِنْ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ وَتَسْوِيَةٍ وَتَفْضِيلٍ) وَجَمْعٍ وَتَرْتِيبٍ وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ وَإِخْرَاجِهِ بِصِفَةٍ اهـ

Adapun wakaf itu menurut apa yang *wakif* (orang yang mewakafkan)

syaratkan, baik aku katakan kepemilikan itu ada ditangannya ataupun berpindah kepada Allah, dalam artian kepemilikan tersebut terpisah dari ketertentuan manusia, karena dasar dari *wakaf* itu mengikuti syarat *wakif* mulai dari mendahulukan, mengakhirkan, menyamakan, mengumpulkan dan lain-lain.

b. *Al-Anshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf 'ala Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, VII/57:

يَتَعَيَّنُ مَصْرَفُ الْوَقْفِ إِلَى الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ اهـ

Menurut *qaul shahih* dari madzhab dan golongan ulama, bahwa tempat perbelanjaan harta *wakaf* itu tertentu pada arah yang sudah ditentukan bagi perwakafan.

c. *Fatawa asy-Syaikh Husain Ibrahim al-Maghrabi al-Maliki fiy Dhamman Kitab Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain*, 265-266:

مَا قَوْلُكُمْ فِي مَسْجِدٍ خَرِبَ وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ فَأَخَذَ نَاظِرُ الْمَسْجِدِ قِطْعَةً مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْحَوَانِيتِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ (الْجَوَابُ) سُئِلَ الْأَجْهُورِي عَنْ مَسْجِدٍ لَهُ مَرَاحِيضُ خَرِبَتْ حَتَّى صَارَتْ عَدَمًا مَحْضًا وَأَرَادُوا أَنْ يَبْدِلُوهَا بِحَوَانِيتَ تُكْرَى وَتُصْرَفُ غَلَّتُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْوَقْفِ عَلَى حَالَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَمِثْلُهُ مَا فِي الْبَرْزَلِي مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْوَقْفِ بِاللَّفْظِ لَا بِالْمَنْفَعَةِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى هُنَا مِنْ أَخْذِهِمْ مِنَ الْمَسْجِدِ شَيْئًا وَجَعْلِهِ حَوَانِيتَ إِذْ هُوَ أَحْرَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ

Apa komentar anda tentang masjid yang sudah rusak dan tidak ada hasil bumi yang dimiliki; kemudian *nadzir* mengambil sebagian masjid untuk dijadikan toko, apakah tindakan itu diperbolehkan ? (Jawab) Imam al-Ajhuri ditanyai tentang masalah masjid yang memiliki beberapa kamar mandi yang telah rusak dan beberapa orang menginginkannya untuk dijadikan toko yang disewakan dan hasilnya dibelanjakan untuk kemaslahatan masjid; apakah itu diperbolehkan? imam al-Ajhuri menjawab: Bahwa itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk mengeluarkan harta *wakaf* dari keadaan aslinya.

d. *I'lam as-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, 283 [Dar al-Kutb al-'Ilmiyah]:

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِي فِي كِتَابِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ: لَوْ سَأَلَ وَاحِدٌ مِنْ

أَهْلِ الْعِلْمِ النَّاسَ مَالًا وَاسْتَجْدَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّمَا أَطْلُبُ ذَلِكَ لِبِنَاءِ مَدْرَسَةٍ فَبَذَلُوا لَهُ مَالًا فَاشْتَرَى بُقْعَةً وَجَعَلَهَا مَدْرَسَةً وَوَزَنَ ثَمَنَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ثُمَّ زَعَمَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الْبُقْعَةَ لِنَفْسِي وَصَارَتْ لِي فَأَتَصَرَّفُ فِيهَا حَيْثُ شِئْتُ فَأَجْعَلُهَا مَسْجِدًا أَوْ أَسْتَدِيمُ مِلْكِي عَلَيْهَا فَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ وَلَاسَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ وَالْوَاجِبُ صَرْفُ تِلْكَ الْبُقْعَةِ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي بَذَلُوا الْمَالَ لَهَا وَإِنْ جَعَلَهَا هَذَا الْعَالِمُ مَسْجِدًا لَمْ تَصِرْ مَسْجِدًا وَصَارَتْ بِتَعَيُّنِ الشِّرَاءِ مَدْرَسَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبَيَانِ وَالتَّقْيِيدِ السَّابِقِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْجَوَابَ عَلَى أَصْلٍ مَنْصُوصٍ لِلشَّافِعِيِّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ، وَلَوْ لَمْ يُصَيِّرْهَا مَصْرُوفَةً إِلَى الْجِهَةِ الْمَوْصُوفَةِ لَأَوْجَبْنَا عَلَى هَذَا الْعَالِمِ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ عَلَى النَّاسِ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ لِأَنَّهَا مَبْذُولَةٌ لِجِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهَا فِي تِلْكَ الْجِهَةِ. وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ سَلَكَهَا أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ سُرَيْجٍ وَفَرَّعَ عَلَيْهَا مَسَائِلَ وَفِيهَا مَصَالِحُ لِأَمْوَالِ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ غَيْرَهَا، انتهى لفظه.

Syekh Abu Muhammad al-Juwaini berkata dalam kitab *Mauqif Imam wal Makmum*: Apabila seorang ahli ilmu meminta harta pada manusia secara serius, seraya mengatakan: *"Sungguh saya mencari harta untuk membangun madrasah lalu mereka menyerahkan hartanya, kemudian dia membelikan tanah dan membangun madrasah, dan menimbang harganya dari harta tersebut. Kemudian timbul perasaan sungguh saya membeli tanah untuk saya sendiri maka saya bisa mengurusnya sesuai kehendak saya; saya akan menjadikannya masjid atau menjadikan hak milik."* Tindakan ini merupakan kesalahan besar yang tidak bisa dihindari. Kewajiban baginya adalah membelanjakan harta itu sesuai tujuan yang telah ditentukan. Apabila dia menjadikannya masjid maka tidak akan menjadi masjid, namun tetap menjadi madrasah karena suatu penjelasan dan *qayyid* yang telah lalu; saya menuturkan ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan asy-Syafi'i dalam sebagian kitabnya. Apabila dia tidak membelanjakannya sesuai perjanjian maka dia wajib mengembalikan harta tersebut. Karena harta itu diserahkan untuk tujuan khusus dan tidak digunakan untuk tujuan lain. Ini adalah jalan yang ditempuh Abu al-Abbas ibn Suraij dan beliau mengembangkan masalah yang terdapat *mashalih* bagi harta manusia, meskipun *qiyas* selainnya.

e. *Ath-Thabaqat asy-Syafi'iyah al-Kubra,* V/90-91:

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ (فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ): إِنَّ الْوَاحِدَ مِنْ أَهْلِ

الْعِلْمِ إِذَا سَأَلَ النَّاسَ مَالًا وَاسْتَجْدَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّمَا أَطْلُبُ ذَلِكَ لِبِنَاءِ مَدْرَسَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا أَنْ يَجْعَلَهَا مَسْجِدًا وَلَا أَنْ يَجْعَلَهَا مِلْكًا لَهُ قَالَ: بَلِ الْوَاجِبُ الصَّرْفُ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ وَإِنْ جَعَلَهَا مَسْجِدًا لَمْ تَصِرْ مَسْجِدًا وَصَارَتْ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ مَدْرَسَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ النِّيَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالتَّقْيِيدِ السَّابِقِ. قَالَ: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْجَوَابَ عَنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ لِلشَّافِعِيِّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ ... وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ سُرَيْجٍ. انتهى ملخصا. وَالْحُكْمُ بِصَيْرُورَتِهَا مَدْرَسَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِإِيقَافِهَا كَذَلِكَ إِعْتِمَادًا عَلَى النِّيَاتِ السَّابِقَةِ غَرِيبٌ. وَأَمَّا تَعَيُّنُ صَرْفِ الْمَالِ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ فَهُوَ مَسْأَلَةُ أَبِي زَيْدٍ فِيمَنْ أُعْطِيَ دِرْهَمًا وَقِيلَ لَهُ: اغْسِلْ ثَوْبَكَ بِهِ اهـ

Syekh Abu Muhammad mengatakan dalam kitab *Mauqiful Imam wal Ma'mum* sesungguhnya ada salah seorang 'alim ketika meminta harta pada orang lain, dan dia berkata sesungguhnya saya meminta ini untuk membangun madrasah, maka ia tidak dibolehkan melakukan yang lain kecuali membangun madrasah. As-Syekh berkata: *"Yang wajib adalah membelanjakannya pada arah yang telah ditentukan, bila menjadikan masjid maka harta tersebut tidak bisa menjadi masjid dan harta tersebut tetap menjadi madrasah karena adanya penjelasan yang lalu, sesungguhnya saya menuturkan ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan as-Syafi'i ... ini adalah thariqah Ibnu Suraij."* Adapun menjadikan harta tersebut sebagai madrasah tanpa adanya pelafalan dengan mewakafkannya sebagai madrasah dengan berpedoman niat yang telah lalu itu terbilang aneh.

f. *Al-Fatawa al-Hindiyyah li Jama'ah min 'Ulama al-Hindi,* II/480 [Dar al-Fikr]:

فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رَجُلٌ جَمَعَ مَالًا مِنَ النَّاسِ لِيُنْفِقَهُ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَنْفَقَ مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ رَدَّ بَدَلَهَا فِي نَفَقَةِ الْمَسْجِدِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنْ عَرَفَ صَاحِبَ ذَلِكَ الْمَالِ رَدَّ عَلَيْهِ أَوْ سَأَلَهُ تَجْدِيدَ الْإِذْنِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَ الْمَالِ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ فِيمَا يَسْتَعْمِلُهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ رَجَوْتُ لَهُ فِي الْاِسْتِحْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ لَكِنْ هَذَا وَاسْتِئْمَارُ الْحَاكِمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي رَفْعِ الْوَبَالِ أَمَّا الضَّمَانُ فَوَاجِبٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ اهـ

Dalam *Fatawa* Abi Laits: *"Seorang laki-laki mengumpulkan dana dari warga untuk membangun masjid, tapi dia menggunakan uang itu untuk kebutuhan pribadinya, lalu mengembalikan gantinya untuk biaya masjid, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan. Bila terlanjur melakukannya kalau pemilik harta diketahui, maka wajib mengembalikannya padanya atau meminta pembaharuan izin untuk tasharrufnya tadi. Bila pemilik harta tidak diketahui, maka ia wajib meminta izin ke hakim untuk tasharufnya tadi. Kalau tidak memungkinkan, maka aku berharap menurut istihsan ia hendaknya membelanjakan harta miliknya seukuran harta tadi untuk masjid, sehingga hal itu boleh. Namun hal ini dan permintaan izin ke hakim itu menjadi wajib untuk menghilangkan dosa. Adapun tanggungan maka tetap menjadi kewajivbannya. Begitu dalam adz-Dzakhirah."*

377. Sistem Pengadilan Berjenjang

Deskripsi Masalah

Merujuk pada *"Code Pannel"* sebagai Kitab Induk Peradilan Internasional yang diterapkan di seluruh Negara, termasuk Indonesia, ditemukan istilah upaya hukum Banding. Banding adalah upaya pemeriksaan kembali perkara yang telah diputuskan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. Bila salah satu pihak masih tidak bisa menerima keputusan Banding, maka pihak yang merasa belum mendapat keadilan boleh mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan Banding. Setelah diputuskan oleh MA tetapi ia tetap merasa dirugikan, maka ia berhak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA dengan membawa bukti-bukti baru (*novum*). Upaya terakhir bagi pihak yang merasa terdzalimi ini adalah mengajukan *Grasi* (ampunan) kepada pemimpin negara (presiden). Di Indonesia sistem itu juga diterapkan dalam Pengadilan Agama yang menyangkut urusan hukum perceraian, hak asuh anak, waris, wakaf dan sebagainya.

Pertanyaan

a. Apakah istilah pengadilan berjenjang tersebut (upaya peninjauan kembali keputusan hukum yang ditetapkan oleh peradilan pada tingkat lebih tinggi) dikenal dalam sistem peradilan Islam?

b. Adakah dasar yang memperbolehkan pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan keputusan hukum oleh pengadilan di bawahnya?

c. Dalam kasus seorang suami mentalak tiga (*bain*) istrinya, kemudian di Pengadilan Tinggi Agama hakim memenangkan gugatan banding oleh istrinya, bolehkah keduanya berkumpul kembali menjadi pasangan sah tanpa *Muhallil*?

Jawaban

a. Di dalam hukum Islam, keputusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan harus dianulir apabila:
   1) Keputusan pengadilan pertama didasarkan pada kesaksian palsu.
   2) Saksi pada yang menjadi sandaran hukum pengadilan pertama terbukti tidak memenuhi syarat.
   3) *Mudda'i* tidak dapat mengajukan saksi pada sidang pertama karena alasan yang dapat terima.
b. Proses pengajuan kembali keputusan pengadilan, dapat diajukan kepada lembaga pengadilan pada tingkatan yang lebih tinggi atau melalui lembaga pengadilan pertama yang memutuskan.
c. Tidak boleh, karena hukum yang dipakai adalah hukum yang sesuai dengan ketentuan agama.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Asybah wa an-Nadhair*, I/193:

وَإِنَّمَا يَنْقُضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ وَالْخَطَأُ قَدْ يَكُوْنُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ خَالَفَ نَصًّا أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ، وَقَدْ يَكُوْنُ الْخَطَأُ فِي السَّبَبِ كَأَنْ يَحْكُمَ بِبَيِّنَةٍ مَزُوْرَةٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافُهُ فَيَكُوْنُ الْخَطَأُ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ وَقَدْ يَكُوْنُ الْخَطَأُ فِي الطَّرِيْقِ كَمَا إِذَا حَكَمَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ بَانَ فِسْقُهَا. وَفِيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَنْقُضُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى أَنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ، فَلَوْ لَمْ يَتَعَيَّنِ الْخَطَأُ، بَلْ حَصَلَ مُجَرَّدُ التَّعَارُضِ: كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الَّتِيْ تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا، فَلَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَالَّذِيْ يَتَرَجَّحُ: أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ، لِعَدَمِ تَبَيُّنِ الْخَطَإِ اهـ

Bahwa keputusan hakim akan batal karena terdapat kesalahan darinya; kesalahan terkadang pada pemutusan sebab tidak sesuai dengan *nash* dan hukum-hukum yang sudah lampau. Adakalanya kesalahan terjadi pada sebab, seperti membuat keputusan dengan saksi palsu lalu tampak kedustaannya, maka kesalahan terletak pada sebab bukan pada hukum. Adakalanya kesalahan terjadi pada metode putusan, seperti membuat keputusan dengan menggunakan saksi lalu tampak kefasikan dari saksi. Pada tiga kesalahan ini rusaklah keputusan/hukum dari hakim. Maka jika kesalahan tidak tertentu akan tetapi hasil dari pertikaian semata seperti mengajukan saksi setelah ada keputusan, beda halnya dengan kesaksian yang masih ada keterkaitan. Dengan keputusan, maka tidak ada penyalinan hukum, dan menurut *qaul* yang diunggulkan ialah tidak adanya kerusakan pada hukum itu karena tidak tampak kesalahan.

b. *Fatawa as-Subki,* I/313:

(وَمِنْهَا) مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِيمَا إِذَا أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً فَقُضِيَ بِهَا ثُمَّ أَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً مُعَارِضَةً لَهَا، فَالْأَصَحُّ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّهُ يُقْضَى لِلدَّاخِلِ، وَتُرَدُّ الْعَيْنُ إِلَيْهِ، وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ لِلْخَارِجِ.

Keterangan yang diungkapkan *al-Ashhah* pada kasus ketika pendakwa mengajukan saksi dan dibuat keputusan dengan adanya saksi tersebut lalu orang yang didakwa juga mengajukan saksi untuk menolaknya, maka menurut *qaul ashah* yang dipastikan oleh kalangan ulama Irak bahwa keputusan dimenangkan terdakwa dan barang dikembalikan padanya.

c. *Tuhfah al-Muhtaj bi Hamisy asy-Syirwani,* X/144:

(إِذَا حَكَمَ بِاجْتِهَادٍ) وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ بِاجْتِهَادِ مُقَلِّدِهِ (ثُمَّ بَانَ) أَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ (خِلَافُ نَصِّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ) الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْآحَادِ (أَوْ) بَانَ خِلَافُ (الْإِجْمَاعِ) وَمِنْهُ مَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ (أَوْ) خِلَافُ (قِيَاسٍ جَلِيٍّ) وَهُوَ مَا يَعُمُّ الْأَوْلَى وَالْمُسَاوِيَ قَالَ الْقَرَافِيُّ الْمُخَالِفُ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ أَوْ كَانَ حُكْمًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ أَيْ قَطْعًا فَلَا نَظَرَ لِمَا بَنَوْهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ النَّقْضِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ قَالَ بِهَا غَيْرُهُمْ لِأَدِلَّةٍ عِنْدَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ أَوْ خَالَفَ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ لِأَنَّهُ كَالْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ أَيْ لِمَا يَأْتِي عَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ (نَقَضَهُ) أَيْ أَظْهَرَ بُطْلَانَهُ وُجُوبًا وَإِنْ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ (هُوَ وَغَيْرُهُ) بِنَحْوِ نَقَضْتُهُ أَوْ أَبْطَلْتُهُ أَوْ فَسَخْتُهُ إِجْمَاعًا فِي مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَقِيَاسًا فِي غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ بِالنَّصِّ هُنَا الظَّاهِرُ عَلَى مَا فِي الْمَطْلَبِ عَنِ النَّصِّ لَا مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السُّبْكِيِّ فَمَتَى بَانَ الْخَطَأُ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا نَقَضَ الْحُكْمَ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ) وَعَلَيْهِ إِعْلَامُ الْخَصْمَيْنِ بِانْتِقَاضِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ رَوْضٌ وَمُغْنِي اهـ

(Apabila menghukumi dengan *ijtihad*) dan ia merupakan ahlinya atau dengan *ijtihad* pengikutnya (kemudian tampak) sungguh perkara yang dihukumi (menyelisihi *nash* al-Kitab atau sunnah) yang *mutawatir* atau *ahad* (atau) jelas-jelas menyelisihi (*ijma'*). Di antaranya perkara yang menyelisihi syarat *waqif* (atau) menyelisihi (*qiyas jali*) yaitu perkara yang mencakup *aula* dan *musawa*. Kata al-Qarafi: *"Perkara yang menyelisihi*

qaidah kulliyah," al-Hanafiyah berkata: *"Atau hukum yang tak ada dalilnya, maksudnya secara pasti maka tidak ada pandangan pada hal yang dibangun dari kerusakan dalam berbagai macam permasalahan. Selain mereka berkata dengannya sebab ada dalil menurutnya."* As-Subki berkata: *"Atau menyelisihi madzhab empat, karena ia menyelisihi ijma'."* Maksudnya penjelasan yang akan datang dari ibn Shalah. (maka harus merusaknya) maksudnya wajib menampakkan kebatalannya meskipun tidak menghilangkannya (ia dan selainnya) semisal merusak atau membatalkan atau merusak pada *ijma'* dalam menyelisihi *ijma'* dan menyamakan pada lainnya. Maksud *nash* di sini ialah penjelasan dalam *al-Mathlab* dari *nash*, bukan maknanya secara hakiki; yaitu hal yang tidak *ihtimal* pada lainnya, dan dikuatkan ungkapan as-Subki. Ketika tampak kesalahan, dugaan atau dugaan pasti rusaklah hukum. (Ungkapan Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf ad-Din an-Nawawi: *"Meski tidak menghilangkannya"*) dan wajib baginya memberitahukan dua orang yang bertikai dengan rusaknya dalam *nafsul amri*. Demikian penjelasan dalam *ar-Raudl* dan *Mughni*.

d. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, 231-232:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا التَّكَافُؤِ فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ وَمَا تَتَحَامَاهُ النُّفُوسُ مِنْ هَذَا وَتَأْبَاهُ قَدْ مَنَعَ الْقَائِلِينَ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ عَلَيْهِ. حُكِيَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا فَحَكَمَ عَلَيْهِ الْقَوَدَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِرُقْعَةٍ فَأَلْقَاهَا إِلَيْهِ فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ (مِنَ السَّرِيعِ) يَا قَاتِلَ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ جُرْتَ وَمَا الْعَادِلُ كَالْجَائِرِ يَا مَنْ بِبَغْدَادَ وَأَطْرَافِهَا مِنْ عُلَمَاءِ النَّاسِ أَوْ شَاعِرِ اسْتَرْجِعُوا وَابْكُوا عَلَى دِينِكُمْ وَاصْطَبِرُوا فَالْأَجْرُ لِلصَّابِرِ جَارَ عَلَى الدِّينِ أَبُو يُوسُفٍ بِقَتْلِهِ الْمُؤْمِنَ بِالْكَافِرِ فَدَخَلَ أَبُو يُوسُفَ عَلَى الرَّشِيدِ وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَقْرَأَهُ الرُّقْعَةَ فَقَالَ لَهُ الرَّشِيدُ: تَدَارَكْ هَذَا الْأَمْرَ بِحِيلَةٍ لِئَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَخَرَجَ أَبُو يُوسُفَ وَطَالَبَ أَصْحَابَ الدَّمِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى صِحَّةِ الذِّمَّةِ وَثُبُوتِهَا فَلَمْ يَأْتُوا بِهَا فَأَسْقَطَ الْقَوَدَ، وَالتَّوَصُّلُ إِلَى مِثْلِ هَذَا سَائِغٌ عِنْدَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَإِنْ فَضَلَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ عَلَى الْمَقْتُولِ اهـ

Tak ada pertimbangan terkait status sosial, maka orang merdeka di*qishas* sebab membunuh budak dan muslim di*qishas* sebab membunuh kafir, seperti halnya budak di*qishas* karena membunuh orang merdeka dan

kafir sebab membunuh muslim. Diceritakan bahwa telah dilaporkan kepada Abi Yusuf (seorang *qadli*) ada seorang muslim membunuh kafir dan beliau memutuskan untuk men*qishas* orang muslimnya. Lalu datang seorang pria membawa secarik kertas berbunyi: *"Hai muslim pembunuh yang membunuh orang kafir, orang yang adil tidaklah seperti orang yang menyimpang. Hai orang-orang yang ada di Baghdad dan segala penjurunya dari kalangan ulama atau penyair. Bacalah istirja' dan tangisilah agama kalian dan bersabarlah maka pahala diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar."* Abu Yusuf telah menyimpang karena membunuh orang mukmin yang membunuh orang kafir. Lalu Abu Yusuf berkunjung ke orang pintar lalu menceritakan permasalahannya dan membacakan surat tersebut. Orang pintar tersebut mengatakan ikutilah kasus ini dengan rekayasa agar tidak timbul fitnah. Maka keluarlah Abu Yusuf dan meminta ke *ashab ad-dam* untuk mendatangkan saksi atas keabsahan tanggungan dan ketetapan tetapi mereka tidak sanggup mendatangkan saksi maka gugurlah *qishas*. Diambil dari kisah ini dibolehkan pengguguran tersebut selagi ada *maslahat*. Dan budak di*qishas* sebab membunuh budak walau harga budak pembunuh jauh lebih tinggi dari yang dibunuh.

378. Fatwa Yoga Di Malaysia

Deskripsi Masalah

Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia, Sabtu (22/11) lalu mengumumkan bahwa yoga itu haram bagi seorang muslim bila dilakukan secara sistematik yang terdiri dari gerakan fisik, baca *mantera* (doa-doa) Hindu, dan meditasi yang menyatukan diri manusia dengan Tuhan.

Secara realitas, Yoga digunakan untuk senam kesehatan di berbagai *gym* atau tempat *fitness*, disana jarang sekali ada yang menyuruh doa atau perkara yang merusak akidah karena Yoga hanya digunakan untuk senam kesehatan. Bahkan instrukturnya dari berbagai lintas agama. Kalaupun ada *gym* yang menginstruksikan untuk melakukan doa yang haram, hal itu hanya bersifat kasuistik dan tidak merepresentasikan keseluruhan tempat *fitness*.

Pertanyaan

Bagaimana hukum senam yoga sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban

Hukum yoga sebagaimana dalam deskripsi diatas adalah haram karena menyerupai kegiatan ritual non muslim (Hindu).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fatawa 'Ashriyah Fadhilah asy-Syaikh 'Ali Jum'ah*, 453:

سُؤَالٌ: مَا حُكْمُ الشَّرْعِ فِيْ رِيَاضَةِ الْيُوْجَا وَهَلْ مُمَارَسَتُهَا تُخَالِفُ الشَّرِيْعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ أَمْ لَا؟ جَوَابٌ: تُعَدُّ الْيُوْجَا مِنْ طُرُوْقِ التَّمَسُّكِ الْهِنْدُوْكِيَّةِ فَلَا يَجُوْزُ اتِّخَاذُهَا طَرِيْقًا لِلْعِبَادَةِ ..... فَاتِّخَاذُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ التَّعَبُّدِيَّةِ ضَلَالٌ قَطْعًا. أَمَّا مَنْ يَقُوْمُ بِحَرَكَاتٍ تُشْبِهُهَا وَلَمْ تَخْطُرْ بِبَالِهِ ارْتِبَاطُهَا بِتَمَسُّكِ الْهِنْدُوْكِ فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّشَبُّهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا وَالْأَصْلُ فِيْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ أَحَادِيْثِهِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ مَلْبَسِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ فَهَذَا التَّشَبُّهُ مِنْ بَابِ الْحَرَامِ اهـ

Soal: Bagaimana *syara'* menghukumi senam yoga? Dan apakah senam yoga itu sesuai dengan syari'at islam?

Jawab: Yoga dianggap sebagai salah satu cara yang digunakan orang-orang Hindu, maka tidak dibolehkan melakukan senam yoga sebagai cara beribadah; karena itu adalah kesesatan yang jelas. Adapun orang-orang yang melakukan gerakan yang sama seperti yoga dan dihatinya tak terbesit gerakan itu adalah cara orang Hindu, maka itu termasuk penyerupaan yang dilarang *syara'*, dalil larangan tersebut adalah hadits Nabi ﷺ bahwa di kebanyakan hadits beliau, ada larangan melakukan keserupaan terhadap selain orang Islam, dalam berdandan, makanan, dan minumannya. Keserupaan ini merupakan bab haram.

b. *Tafsir Ibnu Katsir*, I/162-163 [Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi]:

نَهَى اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَتَشَبَّهُوْا بِالْكَافِرِيْنَ فِيْ مَقَالِهِمْ وَفِعَالِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا يُعَانُوْنَ مِنَ الْكَلَامِ مَافِيْهِ تَوْرِيَةٌ لِمَا يَقْصِدُوْنَهُ مِنَ التَّنْقِيْصِ، عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ فَإِذَا أَرَادُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا اسْمَعْ لَنَا يَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَيُوَرُّوْنَ بِالرُّعُوْنَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا. وَكَذَلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيْثُ بِالْأَخْبَارِ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَلَّمُوْا إِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَالسَّامُ هُوَ الْمَوْتُ وَلِهَذَا أَمَرَنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِوَعَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا يُسْتَجَابُ لَنَا فِيْهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيْنَا، وَالْغَرَضُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى نَهَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ مُشَابَهَةِ الْكَافِرِيْنَ قَوْلًا وَفِعْلًا فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ

عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ هَاشِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بِهِ "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" فَفِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى النَّهْيِ الشَّدِيدِ وَالتَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ عَلَى التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَلِبَاسِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أُمُورِهِمُ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ لَنَا وَلَا نُقَرُّ عَلَيْهَا اهـ

وَذٰلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يُعَانُونَ مِنَ الْكَلَامِ مَا فِيهِ تَوْرِيَةٌ لِمَا يَقْصِدُونَهُ مِنَ التَّنْقِيصِ، عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا اسْمَعْ لَنَا يَقُولُوا رَاعِنَا وَيُوَرُّونَ بِالرُّعُونَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. وَكَذٰلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ بِالْأَخْبَارِ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَلَّمُوا إِنَّمَا يَقُولُونَ

Allah melarang hambanya yang beriman untuk melakukan keserupaan dengan orang-orang kafir dalam ucapan dan pekerjaan. Hal itu dilatar belakangi karena sesungguhnya orang yahudi selalu membuat ungkapan yang mereka tujukan untuk mengurangi-*semoga Allah melaknati mereka*-ketika mereka menginginkan: Dengarlah kami maka mereka berkata "*ra'ina*" dan mereka membuat-buat dengan *ru'unah*. Sebagaimana firman Allah: "*Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. mereka berkata: "Kami mendengar", akan tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan): "Dengarlah" sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): "Raa'ina", dengan menutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.*" Begitu pula beberapa hadits memberitakan mereka bahwa ketika mereka mengucapkan salam sebenarnya mereka mengatakan

assamu 'alaikum yang artinya adalah *maut* bagi kalian. Karena itu kita diperintahkan untuk menjawab dengan "*wa'alaikum*" saja, karena kita dikabulkan bagi mereka dan mereka tidak. Tujuannya adalah bahwa Allah mencegah orang mukmin untuk menyerupai orang kafir, baik ucapan atau perbuatan, Allah berfirman *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan "jagalah kami" dan ucapkanlah "lihatlah kami" dan "dengarlah" bagi mereka ialah siksa yang menyakitkan."* Imam Ahmad mengatakan: dari Ibnu umar dikabarkan pada Abi Munib pada Hasan bin Athiyah pada Abdurrahman bin Tsabit pada Abu Nadzir bahwa Rasulullah bersabda: *"aku diutus di antara dua masa, dengan memakai pedang sampai Allah disembah dan tidak ada sekutu baginya, serta rizqiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku, serta kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan perintahku. Barangsiapa menyerupai segolongan maka dia adalah sebagian dari mereka."* Abu Daud meriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abi Nadhir Hasyim, Ibnu Abi Qosim mengatakan padanya: *"Barangsiapa menyerupai kaum maka dia adalah sebagian dari mereka."* Dalam hadits itu menunjukkan larangan keras, dan ancaman untuk menyerupai orang kafir dalam segi ucapan, pekerjaan, pakaian, hari raya, ibadah dan selainnya dari urusan-urusan mereka yang tidak disyari'atkan bagi kita dan kita juga tidak menetapkan hal tersebut.

379. Penertiban PKL dan Pemanfaatan Barang Sitaan

Deskripsi Masalah

Sebagai imbas dari keterpurukan ekonomi dan banyaknya pengangguran ditingkat lapisan masyarakat bawah, serta kebutuhan untuk menyambung hidup dan menafkahi keluarga sudah semakin mendesak, mau tidak mau mereka harus berusaha keras untuk meraih sesuap nasi dengan jalan apapun, termasuk dengan cara melanggar aturan.

Di lain pihak, pemerintah memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban dan keindahan kota. Untuk mengawal undang-undang di atas pemerintah melalui departemen dalam negeri telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang secara legal dan resmi diberi tugas untuk menertibkan para pelanggar yang merusak keindahan tata kota dengan cara operasi penertiban.

Dalam operasi penertiban tidak jarang terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat Satpol PP terhadap PKL, karena keengganan mereka untuk angkat kaki dari tempat terlarang berjualan.

Menurut para petugas, mereka telah mengingatkan kepada para PKL untuk segera meninggalkan tempat tersebut jauh hari sebelum

pelaksanaan penertiban, namun mereka tetap saja memilih bertahan di tempat mangkalnya. Selain itu juga sering ditemukan perampasan dan penyitaan barang-barang milik PKL, seperti lapak, untuk diangkut ke mobil Satpol PP dan dibawa ke kantor dinas mereka. Jalan tengah sebagai sebuah solusi pun telah disiapkan oleh pihak pemerintah, yaitu dengan cara relokasi ke tempat baru yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka. Tetapi mereka tetap bersikukuh dan tidak mau direlokasi dengan alasan bahwa lahan baru tersebut tidak strategis, alias sepi dari pengunjung.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum Satpol PP yang menertibkan PKL dengan cara merusak/mengambil barang yang pada akhirnya tidak dikembalikan?
b. Apa status barang sitaan tersebut?
c. Bagaimana hukum oknum-oknum memanfaatkan barang hasil sitaan dengan tanpa seizin pemiliknya?
d. Bagaimana hukum berjualan di tempat yang menurut Perda tidak diperbolehkan?
e. Bagaimana solusi terbaik atas hal ini dalam perspektif Islam?

Jawaban

a. Dalam upaya penertiban bangunan permanen liar yang berdiri diatas tanah bahu jalan, bantaran sungai, atau lahan milik pemerintah, petugas yang berwenang dibolehkan membongkar bangunan tersebut setelah upaya damai tidak tercapai. Sedangkan memanfaatkan bahu jalan atau bantaran sebagai tempat berjualan tanpa mendirikan bangunan permanen, hukumnya dibolehkan selama tidak mengganggu pada fungsi jalan atau bantaran sungai, untuk itu pemerintah berhak mengaturnya atau melarang jika mengganggu pada fungsi jalan atau bantaran sungai. Adapun mengambil/merampas barang milik pedagang, hukumnya haram.
b. Termasuk barang yang di*ghasab*.
c. Hukumnya haram.
d. Hukumnya haram karena tergolong *ghasab*.
e. Solusinya adalah pemerintah menyediakan lahan demi terciptanya kemaslahatan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Hawiy lil Fatawa*, I/153-154 [Dar al-Fikr]:

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: أَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ

الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ. وَفِي حُكْمِ نَظَرِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنِ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنَ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا، وَيَكُونُ السَّابِقُ إِلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْمَسْبُوقِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا مِنْ إِجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا. وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إِلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْمَسْبُوقِ انتهى وَالْوَجْهُ الثَّانِي الَّذِي ذُكِرَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ فَانْظُرْ كَيْفَ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّ السَّابِقَ لَا يَجْعَلُ أَحَقَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَقْدِيمًا لِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ اهـ

Imam Mawardi berkata tentang hukum-hukum pemerintahan: Adapun bagian ketiga berupa tanah yang dikhususkan untuk trotoar yaitu khusus pada keputusan pemerintah dan hal itu dibagi menjadi dua: Pengaturan pemerintah yang tertentu berlebihan dan mencegah masyarakat berbuat kerusuhan dan berbuat maslahat ketika bermusyawaroh. Tidak boleh bagi pemerintah mengusir orang yang teleh menempati dan tidak boleh mendahulukan orang yang datang terakhir, dan orang yang sudah menempati suatu tempat itu lebih berhak dari orang lain. Pengaturan dengan ketat pada jalan yang di anggap baik untuk ditempati dan yang tidak, dan mendahulukan orang yang datang lebih dahulu seperti tanah *baitul mal* dan tanah kosong yang disengketakan untuk suatu kepentingan. Orang yang baru datang tidak berhak mengambil. Lalu untuk bentuk tanah yang nomer dua ini, tidak boleh ditarik pajak ke penghuninya. Seandainya penghuninya meninggalkan dengan rela, maka orang yang behak adalah orang yang datang setelahnya. Keterangan ini seperti yang ada di Kitab *Raudhah* dan ini pendapat *ashah*. Tapi telitilah bagaimana bisa Imam Mawardi menjelaskan bahwa orang yang datang terlebih dahulu bukanlah orang yang paling berhak sebab disengketa oleh Imam.

b. *Asna al-Mathalib,* V/395 [Dar al-Kutb al-'Ilmiyah]:

وَلَوْ أَقْطَعَهُ إِيَّاهُ الْإِمَامُ ارْتِفَاقًا جَازَ أَيْ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ بُقْعَةً مِنَ الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ فِيهَا بِالْمُعَامَلَةِ لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا وَاجْتِهَادًا فِي أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ مُضِرٌّ أَوْ لَا وَلِهَذَا

يُزْعِجُ مَنْ رَأَى جُلُوسَهُ مُضِرًّا لَا إِنْ أَقْطَعَهُ بِعِوَضٍ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ وَلَا إِنْ أَقْطَعَهُ تَمْلِيكًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الطُّرُوقِ وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ وَمَا يَفْعَلُهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ بَيْعِ مَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ اهـ

(Jika telah disediakan Imam untuknya) karena kasihan. (maka tidak boleh), artinya boleh bagi pemerintah untuk menyediakan sebagian jalan raya untuk berdagang sebab pemerintah berasumsi bahwa duduk-duduk di jalan raya tanpa transaksi itu berbahaya (merugikan orang lain), atau tidak berbahaya pun tetap tidak boleh. Karena itu pendapat ini mengesampingkan pendapat ulama yang mengatakan merugikan orang lain adalah sebab utama. (tidak boleh apabila seandainya imam menyediakan tanah (dengan tarikan biaya). Ungkapan kitab *Raudhah*: *"Tidak boleh bagi imam dan lainnya menarik biaya untuk orang yang duduk, berjualan dan sebagainya di jalan raya dengan kesepakatan ulama, (dan tidak boleh) jika menyediakan (untuk dimiliki) walaupun diluar kebutuhan di jalan, oleh karena itu tidak boleh berjualan di jalan. Kemudian apa yang dilakukan oleh petugas berupa penjualan tanah yang dianggap bukan kebutuhan jalan itu halal karena penjualan itu menuntut untuk dimiliki dan hal itu tidak boleh. Seandainya boleh maka menjual tanah kosong itu boleh. Tapi tidak ada yang berpendapat demikian, menurut imam Subki."*

c. *Hasyiyah 'Umairah*, III/90:

فَرْعٌ: حَرِيمُ النَّهْرِ كَالنِّيلِ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَإِلْقَاءِ الْأَمْتِعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ عِنْدَ حَفْرِهِ أَوْ تَنْظِيفِهِ، فَيُهْدَمُ مَا يُبْنَى فِيهِ وَلَوْ مَسْجِدًا كَمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ النَّهْرُ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْقَرْيَةِ وَغَيْرِهَا، وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُ مَنْ يَتَعَاطَى بِنَاءً أَوْ نَحْوَهُ بِجَانِبِ النِّيلِ أَوْ الْخَلِيجِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَوَارِدِ الْمَاءِ وَمُصَلَّى الْأَعْيَادِ فِي الصَّحْرَاءِ وَنَحْوِهَا.

(*Far'un*) kawasan sungai yang dilarang untuk ditempati seperti sungai Nil; yaitu tempat yang ada untuk kepentingan sungai dan sesuatu yang keluar dari sungai ketika penggalian sungai atau pembersihan. Maka apa-apa yang dibangun diatasnya harus dirobohkan walaupun berupa masjid menurut pendapat empat madzhab walaupun sangat jauh dari

sungai, sekiranya tidak dibutuhkan. Hal ini juga berlaku bagi desa dan sebagainya. Wajib bagi imam untuk mencegah orang yang membangun disekitar sungai Nil dan selainnya seperti saluran air.

d. *Hasyiyah asy-Syirwani*, VI/207:

(فَرْعٌ) الِانْتِفَاعُ بِحَرِيمِ الْأَنْهَارِ كَحَافَّاتِهَا بِوَضْعِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَجَعْلِ زَرِيبَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَنَحْوِهِ لِحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ فِيهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْيَوْمَ فِي سَاحِلِ بُولَاقَ وَمِصْرَ الْقَدِيمِ وَنَحْوِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ فَعَلَهُ لِلِارْتِفَاقِ بِهِ وَلَمْ يَضُرَّ بِانْتِفَاعِ غَيْرِهِ وَلَا ضَيَّقَ عَلَى الْمَارَّةِ وَنَحْوِهِمْ وَلَا عَطَّلَ أَوْ نَقَصَ مَنْفَعَةَ النَّهْرِ كَانَ جَائِزًا وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ انْتَفَعَ بِمَحَلِّ الْمُنْكَشِفِ عَنْهُ النَّهْرُ فِي زَرْعٍ وَنَحْوِهِ اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَإِنْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْ أَرْضِهِ وَصَارَتْ مَكْشُوفَةً لَمْ تَخْرُجْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهَا مِنْ حُقُوقِ النَّهْرِ مُسْتَحَقَّةً لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ تَمْلِيكُهَا وَلَا تَمْلِيكُ شَيْءٍ مِنْ النَّهْرِ أَوْ حَرِيمِهِ لِأَحَدٍ وَإِنْ انْكَشَفَ الْمَاءُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ نَعَمْ لَهُ دَفْعُهَا لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهَا حَيْثُ لَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ كَذَا حَرَّرَ مَعَ م ر فِي دَرْسِهِ بِالْمُبَاحَثَةِ فِي ذَلِكَ انْتَهَى سم اهـ

(*Far'un*) Pemanfaatan area sungai seperti tepi sungai dengan meletakkan muatan dan membuat kandang untuk menjaga harta seperti yang terjadi sekarang di tepi laut di Mesir, bila dilakukan karena ada kemanfaatan dan tidak merugikan orang lain, tidak mempersempit orang lewat juga tidak mengurangi kemanfaatan sungai, maka hal tersebut boleh. Tidak boleh dipungut biaya kalaupun iya maka hukumnya haram dan wajib memberikan ongkos untuk kemaslahatan orang-orang Islam, Begitu juga tanah yang dimanfaatkan di kawasan sungai yang airnya surut untuk sawah dan sebagainya. Ungkapan Bujairami: *"Seandainya air sungai itu surut dan menjadi terbuka maka tidak keluar hak-hak sungai dengan menjadi hak-haknya orang Islam dan tidak boleh bagi pemerintah untuk memilikinya dan memberikan sesuatu dari sungai atau kawasannya pada seorang pun meski air sungai surut karena kawasan sungai ada tujuan untuk kembali, tetapi boleh bagi pemerintah untuk menyerahkan bagian sungai pada orang yang susah sekiranya tidak membahayakan orang muslim, itulah hasil penelitian imam Ramli pada pembahasan tersebut."*

e. *Al-Bahr ar-Ra'iq*, V/44:

وَأَفَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مُدَّةٍ لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إِذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ اهـ

Penulis dalam *al-Bazzaziyah* memberi *faidah* sungguh makna *ta'zir* sebab mengambil harta menurut *qaul* adalah menahan sesuatu dari hartanya dalam satu masa agar tercegah. Kemudian hakim mengulangi padanya tidak mengambil untuk dirinya atau untuk *baitul mal*; seperti orang *zhalim* menyangkanya. Karena tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab *syar'i*.

380. Kasus Salah Tangkap

Deskripsi Masalah

Untuk kesekian kali terjadi salah tangkap terhadap orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Terakhir kasus korban yang dihabisi oleh Ryan Jombang. Beberapa orang telah diputus bersalah dan harus menjalani hukuman pidana di LP. Belakangan Ryan mengaku sebagai pembunuh yang sebenarnya.

Pertanyaan

a. Bagaimana *ahkam al-murafa'at* Islam menyikapi kejadian putusan pengadilan yang ternyata salah tangkap terkait tuduhan tindak pidana?
b. Adakah hak yang bisa dituntut oleh pribadi yang menjadi korban salah tangkap berikut kerugian materiil dan upaya merehabilitasi kehormatan individu yang bersangkutan?
c. Konsep hukum apa yang tepat dibebankan kepada Penyidik, Jaksa, Majelis Hakim yang mengadili mereka dan ternyata salah tangkap?

Jawaban

a. Bila putusan yang pertama itu berdasar bukti dan saksi (*qarinan dzanniyah*) maka putusan tersebut dibenarkan namun bila ternyata putusan yang ternyata salah tangkap berdasar harus dibatalkan. Harus memberitahukan kepada kedua belah pihak tentang duduk persoalannya agar mengajukan kepada pengadilan untuk diproses ulang.
b. Korban salah tangkap bisa menuntut tanggung jawab apabila terjadi perusakan terhadap harta yang bernilai atau nyawa akibat putusan hukum yang salah. Adapun kerugian sebab oleh hilangnya manfaat kebebasan akibat putusan yang salah seperti hilangnya penghasilan

tersebab penahanan menurut pendapat *ashah* dari Syafiiyah tidak bisa dituntut. Namun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, korban bisa menuntut. Terkait masalah kehormatan, maka harus *istihlal*.

c. Konsep hukum bagi mereka yang salah menentukan, ditentukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang ada.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Asybah wa an-Nazh`air*, 105:

(خَاتِمَةٌ) يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا. قَالَ الْقَرَافِيُّ: أَوْ خَالَفَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ.

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: أَوْ كَانَ حُكْمًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ. قَالَ: وَمَا خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ. وَهُوَ حُكْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ نَصُّهُ فِي الْوَقْفِ نَصًّا أَوْ ظَاهِرًا. قَالَ: وَمَا خَالَفَ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ فَهُوَ كَالْمُخَالِفِ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ: وَإِنَّمَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْحَاكِمِ لِتَبَيُّنِ خَطَئِهِ، وَالْخَطَأُ قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ خَالَفَ نَصًّا أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ. وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي السَّبَبِ كَأَنْ يَحْكُمَ بِبَيِّنَةٍ مُزَوَّرَةٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ خِلَافُهُ فَيَكُونُ الْخَطَأُ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ فِي الطَّرِيقِ كَمَا إِذَا حَكَمَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ بَانَ فِسْقُهَا. وَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى أَنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ فَلَوْ لَمْ يَتَعَيَّنِ الْخَطَأُ بَلْ حَصَلَ مُجَرَّدُ التَّعَارُضِ: كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهَا فَلَا تَقُلْ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ: أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ لِعَدَمِ تَبَيُّنِ الْخَطَإِ اهـ

(*Khatimah*) Putusan *qadli* dirusak bila menyalahi *nash*, *ijma'* atau *qiyas jali*. Al-Qarafy berkata: atau menyalahi *kaidah kulliyah*. Al-Hanafiyah berkata: atau hukum yang tidak ada dalilnya, as-Subki menukil dalam *Fatawi*nya. Ia berkata: Perkara yang menyalahi syarat *waqif* berarti menyalahi *nash*. Yaitu hukum yang tidak ada dalilnya, baik *nash* dalam *wakaf* jelas atau *zhahir*. Beliau berkata: Perkara yang menyalahi *madzhab* empat berarti menyalahi *ijma'*. Beliau berkata: Sungguh rusak putusan hakim karena jelas salahnya, kesalahan itu kadang berada dalam diri hukum dengan menyalahi *nash* atau hukum-hukum lampau. Terkadang kesalahan dalam sebab seperti menghukumi dengan saksi palsu lantas menjadi jelas salahnya, maka kesalahan ini ada di dalam sebab tidak

dalam hukum. Dan kadang kesalahan itu dalam jalan, sebagaimana apabila menghukumi dengan saksi kemudian tampak *fasik*nya. Ketiga-tiganya ini merusak hukum dalam arti kita menjelaskan batalnya. Jika kesalahan tidak tertentu, tetapi murni pertikaian: seperti menegakkan saksi setelah putusan, beda dengan saksi yang berkonsekuensi terhadap putusan, maka tidak ada nukilan dalam masalah ini. Pendapat yang unggul sungguh tidak dirusak karena tidak ada kesalahan.

b. *Asna al-Mathalib*, 303-304:

(فَإِنْ بَانَ لِلْقَاضِي الْخَطَأُ فِي حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ غَيْرِهِ نَظَرْتَ فَإِنْ خَالَفَ) فِيهِ (قَطْعِيًّا كَنَصِّ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ وَإِجْمَاعٍ أَوْ ظَنِّيًّا مُحْكَمًا) أَيْ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ (كَخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ نَقَضَ) وُجُوبًا (حُكْمَهُ) أَيْ حُكْمَ الْمُخْطِئِ بِالْإِجْمَاعِ فِي مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الْبَقِيَّةِ (وَعَلَيْهِ إعْلَامُ الْخَصْمَيْنِ بِانْتِقَاضِهِ) فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَحَاصِلُ كَلَامِ أَصْلِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَقْضُ حُكْمِهِ وَإِعْلَامُ الْخَصْمَيْنِ بِصُورَةِ الْحَالِ لِيَتَرَافَعَا إلَيْهِ فَيَنْقُضَهُ سَوَاءٌ أَعَلِمَا أَنَّهُ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ أَمْ لَا ; لِأَنَّهُمَا قَدْ يَتَوَهَّمَانِ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْحُكْمَ وَإِنْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ لَكِنْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَنْقُضُهُ وَإِنْ لَمْ يُرْفَعْ إلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْكِتَابِ وَتَأْوِيلُهَا مُتَعَيِّنٌ انْتَهَى.

Ketika kesalahan seorang *Qadli* dalam memberikan hukum itu sudah jelas. Maka diperinci ketika bertentangan dengan *dalil qathiy* seperti: al-Qur'an, hadits *mutawatir, ijma'*, atau dalil yang jelas, seperti hadits *wahid* atau *qiyas jali* maka keputusan *Qadli* harus memberitahukan ke kedua belah pihak mengenai pembatalan ini. Kesimpulannya. Seorang *Qadli* harus membatalkan keputusannya dan memberitahukan kepada kedua belah pihak mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Agar kedua pihak ini datang dihadapan *Qadli* dan *Qadli* membatalkan keputusannya di depan mereka, baik mereka tahu kesalahan *Qadli* yang sebenarnya ataupun tidak. Karena mereka menduga bahwa keputusannya tidak akan dibatalkan sekalipun mereka mengetahui kesalahan *Qadli*. Imam al-Ghazali di dalam kitab *al-Wasith* serta Imam Mawardi dan yang lain berpendapat bahwa sang *Qadli* diharuskan membatalkan keputusannya. Meskipun tidak dihadapkan kedua pihak. Pendapat ini didukung oleh al-Asnawi yang mengatakan pendapat ini dapat dipakai pegangan dari pada yang lain.

c. *Al-Mushannaf,* V/233:

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَايَرَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ مَالِهِ مَا يَصُوْنُ بِهِ عِرْضَهُ اهـ

Abu Bakar ﷺ menceritakan kepadaku: Hasyim berkata kepadaku dari Yunus dari Hasan: *"Bahwa seseorang tidak (perlu) mengeluarkan sesuatu dari hartanya untuk menjaga atau memperbaiki nama baik orang lain."*

d. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah,* XIII/38:

وَمِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي نَصُّوا عَلَى ضَمَانِهَا تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْحُرِّ فَإِنَّ مَنْ قَهَرَ حُرًّا وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ. وَأَمَّا لَوْ حَبَسَهُ وَعَطَّلَ مَنَافِعَهُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُ ضَامِنٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ. وَأَمَّا مَنَافِعُ الْمَغْصُوبِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِهَا: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى ضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ تَعْوِيضًا عَمَّا فَاتَهُ سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْغَاصِبُ الْمَنَافِعَ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: يَضْمَنُ الْغَاصِبُ غَلَّةَ مَغْصُوبٍ مُسْتَعْمَلٍ دُوْنَ غَيْرِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَيَضْمَنُ غَلَّةَ مَا عَطَّلَ مِنْ دَارٍ أَغْلَقَهَا وَأَرْضٍ بَوَّرَهَا وَدَابَّةٍ حَبَسَهَا. وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ (غَصْبٌ وَضَمَانٌ) اهـ

Termasuk manfaat yang harus dijaga ialah kemanfaatan orang merdeka. Bila ada orang yang dipaksa untuk bekerja maka ia harus diberi upah. Jika seseorang dikurung tanpa diperas tenaganya, maka ia tetap diberi ganti rugi menurut Malikiyah dan Hanabilah, akan tetapi tidak menurut Syafi'iyah. Adapun kemanfaatan barang *maghshub*, ulama masih silang pendapat, apa wajib diganti rugi atau tidak. Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan wajib, maka harus memberi *ujrah mitsl*, baik itu si *Ghasib* memanfaatkan *maghshub* ataupun tidak. Malikiyah berpendapat bahwa yang diganti rugi adalah *magshub* yang digunakan saja atau rumah yang dikunci secara paksa, atau binatang yang dikurung.

e. *Hawasyi asy-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj,* VII/335:

قَوْلُهُ (كَمَنْفَعَةِ الْحُرِّ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا وَأَغْلَقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَتُهُ كَمَا لَوْ حَبَسَ الْحُرَّ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ اهـ سم أي كما صرح به النهاية والمغني.

Ungkapan Ibn Hajar (*seperti manfaat orang merdeka*) ini bisa dipahami, bila tidak meletakkan sesuatu di masjid lalu menguncinya maka tidak wajib membayar upah, seperti mengurung orang yang merdeka dan

tidak mempekerjakannya.

f. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 272-273:

(مَسْأَلَةٌ: ي) إِذَا صَحَّتْ وِلَايَةُ الْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ عَزْلُهُ إِلَّا لِظُهُوْرِ خَلَلٍ كَكَثْرَةِ الشَّكْوَى مِنْهُ أَوْ ظَنِّ ضَعْفِهِ أَوْ زَوَالِ هَيْبَتِهِ مِنَ الْقُلُوْبِ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ كَوُجُوْدِ أَفْضَلَ مِنْهُ وَكَذَا مُسَاوِيْهِ وَدُوْنَهُ وَفِيْ تَوْلِيَتِهِ تَسْكِيْنُ فِتْنَةٍ أَوْ جَمْعُ كَلِمَةٍ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ لِلْإِمَامِ كَذِي الشَّوْكَةِ وَأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَزْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلَلٌ وَلَا مَصْلَحَةٌ حَرُمَ وَنَفَذَ مِنَ الْإِمَامِ وَذِي الشَّوْكَةِ لَا مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، لِأَنَّ مَا أُبِيْحَ لِضَرُوْرَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا اهـ

(Masalah Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya) pada waktu kepemimpinan seorang hakim itu sudah benar (sesuai syariat). Tidak diperbolehkan menurunkan jabatannya, kecuali ketika terdapat suatu cacat di dalam dirinya. Misal sering sakit, kelemahan itu hanya sebuah dugaan, atau karena ada suatu kemaslahatan. Misal ada orang yang lebih unggul atau sama-sama unggul. Bahkan yang derajatnya ada di bawahnya dan dalam kepemimpinannya itu bisa menghentikan fitnah dan sebagainya. Maka ketika ada hal-hal tersebut, seorang imam boleh menurunkan jabatannya. Dan ketika tidak terdapat hal-hal tersebut, haram hukumnya untuk menurunkan jabatan seorang hakim.

g. *Al-Mughni*, IV/321:

فَصْلٌ: وَلَوْ صَالَحَ شَاهِدًا عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ. لِأَنَّهُ لَا يَخْلُوْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ تَلْزَمُ الشَّهَادَةُ بِهِ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ أَوْ حَقٍّ لِلّٰهِ تَعَالَى لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ كَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا. فَلَا يَجُوْزُ كِتْمَانُهُ وَلَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ ذٰلِكَ، كَمَا لَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ. الثَّانِي: أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالزُّوْرِ. فَهٰذَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ذٰلِكَ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ. فَلَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَمَا لَا يَجُوْزُ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ وَلَا يَغْصِبَ مَالَهُ. الثَّالِثُ: أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا يُوْجِبُ حَدًّا كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ فَلَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ. لِأَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِحَقٍّ لَهُ. فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ عِوَضِهِ كَسَائِرِ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ لَهُ. وَلَوْ صَالَحَ السَّارِقَ وَالزَّانِيَ وَالشَّارِبَ بِمَالٍ عَلَى أَنْ لَا يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِذٰلِكَ. وَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ، وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْ حَدِّ

الْقَذْفِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَهُ، لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِحَقٍّ لَهُ. فَأَشْبَهَ حَدَّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ. وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَهُ لَمْ يَجُزْ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ حَقًّا لَيْسَ بِمَالِيٍّ وَلِهَذَا لَا يَسْقُطُ إِلَى بَدَلٍ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ. وَلِأَنَّهُ شُرِعَ لِتَنْزِيهِ الْعِرْضِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَاضَ عَنْ عِرْضِهِ بِمَالٍ. وَهَلْ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالصُّلْحِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقًّا لِآدَمِيٍّ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقًّا لِآدَمِيٍّ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَسْقُطْ بِصُلْحِ الْآدَمِيِّ وَلَا إِسْقَاطِهِ. كَحَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِآدَمِيٍّ سَقَطَ بِصُلْحِهِ وَإِسْقَاطِهِ مِثْلُ الْقِصَاصِ فَإِنْ صَالَحَ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ. لِأَنَّهُ حَقٌّ شُرِعَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا رَضِيَ بِالْتِزَامِ الضَّرَرِ سَقَطَ الْحَقُّ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ كَحَدِّ الْقَذْفِ، إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ هَهُنَا وَجْهًا وَاحِدًا. لِكَوْنِهِ حَقًّا لِآدَمِيٍّ اهـ

(Pasal) bila seorang saksi diminta damai (*shuluh*) untuk tidak bersaksi, maka baginya tetap tidak boleh meninggalkan persaksian tersebut. Dan dalam hal ini, tidak lepas dari 3 hal:

Saksi diminta damai untuk tidak bersaksi pada hak yang *luzum* dengan persaksian seperti hutang dan *haq* Allah yang tidak gugur, sebab *syubhat* seperti zakat. Maka ia dilarang *kitman*, dan tidak boleh meminta bayaran. Seperti tidak boleh meminta bayaran untuk tidak meminum arak dan meninggalkan shalat. Saksi diminta damai untuk tidak bersaksi dusta. Maka wajib baginya meninggalkan persaksian dan tidak boleh meminta bayaran untuk meninggalkannya seperti tidak boleh meminta bayaran untuk tidak membunuh atau meng*ghasab*. Saksi diminta damai untuk tidak bersaksi atas hak yang mewajibkan *had* seperti zina atau mencuri, maka tidak boleh meminta bayaran karena itu bukan haknya. Apabila seorang pelaku zina, pencuri, atau peminum arak meminta damai pada saksi untuk tidak dilaporkan pada hakim, maka tidak sah permintaan tersebut, dan tidak boleh menerima bayaran, juga tidak boleh pada *had al-qadzaf*. Karena jika hubungannya dengan *haq* Allah maka tidak boleh menerima bayaran, karena dia tidak punya hak. Lalu disamakan dengan *had* zina dan *had* mencuri. Bila hal tersebut merupakan hak baginya, maka juga tidak boleh meminta bayaran karena itu bukan haknya, maka juga tidak boleh meminta bayaran karena itu bukan hak yang berupa harta. Karena itu hak tersebut bisa gugur dengan *badal*. Berbeda dengan *qishash*. Karena *syara'* membersihkan kehormatan maka tidak boleh

meminta bayaran harta dari sebuah kehormatan. Apakah *had* bisa gugur dengan cara damai (*shuluh*)? Ada 2 pendapat yang muncul dari anggapan, "*had itu haq Allah atau hak adami*". Apabila hak itu berupa *haq* Allah atau dengan *suluh* (damai) seperti *had* zina dan *had* mencuri, apabila hak berupa hak *adami* maka bisa di*shuluh*, seperti *qhisos.* Apabila yang di*shuluh* adalah *haq syuf'ah* maka tidak boleh. Karena *haq syuf'ah* itu dilegalkan untuk mencegah bahaya *syirkah.* Apabila sudah ridha dengan adanya *dharar* maka gugurlah haknya tanpa ada *badal* seperti halnya *had qadzaf,* tetapi pada *qadzaf* tidak ada *khilaf,* karena itu merupakan hak adami.

381. SP3 dan Gradasi Penyidikan ke Penyelidikan

Deskripsi Masalah

Langkah awal untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana disebut "penyelidikan" (KUHP pasal 1 ayat 5). Langkah berikutnya adalah mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya (KUHP pasal 1 ayat 2), disebut "penyidikan". Selanjutnya jaksa penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan (KUHP pasal 1 ayat 7).

Pada kasus penggelembungan DPT, manipulasi DPT, kecurangan pelaksanaan PILGUB Jawa Timur terjadi penurunan (degradasi) status perkara penyidikan (oleh KAPOLDA Jatim) saat itu menjadi penyelidikan. Lebih parah lagi ketika perkara sudah jadi/berlangsung penyidikan keluar lah SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan), bahkan terbuka kemungkinan "deponir" oleh Jaksa Agung terkait perkara pidana demi kepentingan umum.

Dalam sistem peradilan Islam popular sekali hadits yang berintikan:

تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

"Saling memaafkanlah kalian terkait perkara yang dikategorikan hudud (bukan qishash) selama perkara itu masih berada disekitar kamu, karena bila perkara itu telah sampai kepada saya (Rasulullah ﷺ selaku pemegang kekuasaan yudikatif) maka perkara hadd itu menjadi menjadi keharusan untuk diproses hukumnya".

Pertanyaan

a. Otoritas terkait perkara *qishash* menjadi hak korban/ *waliyyu al-dammi*, untuk perkara *hudud* hak menghukum atau tidak ada pada hakim syar'i. Bolehkah bila aparat kepolisian negara menurunkan proses penyidikan menjadi penyelidikan?

b. Apakah kriteria kepentingan publik dikenal dalam hukum Islam untuk mendeponirkan perkara?
c. Apa sajakah rincian *"Justa Causa"* atau alasan yang benar, alasan hak yang sah, alasan yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai dakwaan menurut system hukum peradilan Islam?
d. Sejauh mana perlakuan khusus bagi kalangan elite sosial muslim diperlakukan sesuai hadits: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم?

Jawaban

a. Penurunan proses penyidikan menjadi penyelidikan hukumnya boleh bila ada dasar-dasar yang menunjukkan ketidak-validan peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan pada proses yang pertama dan digunakan untuk mempertajam masalah.
b. Dikenal namun hanya dalam koridor *ta'zir* dan tidak berlaku untuk *hudud, qishas, diyat* atau yang berkaitan dengan *haqqul adami*.
c. Yaitu tuntutan yang *muayan*, jelas, *muktabar syar'an* dan tidak bertentangan dengan *'adah*.
d. Perlakuan khusus hanya pada masalah *ta'zir*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, 221:

الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها
بحد أو تعزير ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ولها عند ثبوتها
وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية. فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها
وصحتها فمعتبر بحال النظر فيها فإن كان حاكما رفع إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا
لم يكن للتهمة بها تأثير عنده ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استبراء ولا أن يأخذه
بأسباب الإقرار إجبارا ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما
قرف وراعى ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى
عليه إلا بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف ما فعله بها بما يكون زنا موجبا
للحد فإن أقر حده بموجب إقراره وإن أنكر وكانت بينة سمعها عليه وإن لم تكن
أحلفه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، إذا طلب الخصم اليمين. وإن كان
الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا أو من ولاة الأحداث والمعاون كان له مع

هَذَا الْمُتَّهَمِ مِنْ أَسْبَابِ الْكَشْفِ وَالِاسْتِبْرَاءِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَذَلِكَ مِنْ تِسْعَةِ أَوْجُهٍ يَخْتَلِفُ بِهَا حُكْمُ النَّاظِرَيْنِ. أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَسْمَعَ قَرْفَ الْمُتَّهَمِ مِنْ أَعْوَانِ الْإِمَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ لِلدَّعْوَى الْمُقَرَّرَةِ وَيَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمْ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ حَالِ الْمُتَّهَمِ وَهَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الرِّيَبِ؟ وَهَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِمِثْلِ مَا قُرِفَ بِهِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ بَرَّءُوهُ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ خَفَّتْ التُّهْمَةُ وَوُضِعَتْ وَعُجِّلَ إطْلَاقُهُ وَلَمْ يُغْلَظْ عَلَيْهِ وَإِنْ قَرَفُوهُ بِأَمْثَالِهِ وَعَرَّفُوهُ بِأَشْبَاهِهِ غَلُظَتْ التُّهْمَةُ وَقَوِيَتْ وَاسْتُعْمِلَ فِيهَا مِنْ حَالِ الْكَشْفِ مَا سَنَذْكُرُهُ وَلَيْسَ هَذَا لِلْقُضَاةِ. وَالثَّانِي: أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُرَاعِيَ شَوَاهِدَ الْحَالِ وَأَوْصَافَ الْمُتَّهَمِ فِي قُوَّةِ التُّهْمَةِ وَضَعْفِهَا فَإِنْ كَانَتْ التُّهْمَةُ زِنًا وَكَانَ الْمُتَّهَمُ مُطِيعًا لِلنِّسَاءِ ذَا فُكَاهَةٍ وَخِلَابَةٍ قَوِيَتْ التُّهْمَةُ وَإِنْ كَانَ بِضِدِّهِ ضَعُفَتْ وَإِنْ كَانَتْ التُّهْمَةُ بِسَرِقَةٍ وَكَانَ الْمُتَّهَمُ بِهَا ذَا عِيَارَةٍ أَوْ فِي بَدَنِهِ آثَارُ ضَرْبٍ أَوْ كَانَ مَعَهُ حِينَ أُخِذَ مِنْقَبٌ قَوِيَتْ التُّهْمَةُ وَإِنْ كَانَ بِضِدِّهِ ضَعُفَتْ وَلَيْسَ هَذَا لِلْقُضَاةِ أَيْضًا. وَالثَّالِثُ: أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يُعَجِّلَ حَبْسَ الْمُتَّهَمِ لِلْكَشْفِ وَالِاسْتِبْرَاءِ. وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ لِذَلِكَ فَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ حَبْسَهُ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْكَشْفِ مُقَدَّرٌ بِشَهْرٍ وَاحِدٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ وَهَذَا أَشْبَهُ وَلَيْسَ لِلْقُضَاةِ أَنْ يَحْبِسُوا أَحَدًا إلَّا بِحَقٍّ وَجَبَ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ مَعَ قُوَّةِ التُّهْمَةِ أَنْ يَضْرِبَ الْمُتَّهَمَ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ لَا ضَرْبَ الْحَدِّ لِيَأْخُذَهُ بِالصِّدْقِ عَنْ حَالِهِ فِيمَا قُرِفَ بِهِ وَاتُّهِمَ فَإِنْ أَقَرَّ وَهُوَ مَضْرُوبٌ اُعْتُبِرَتْ حَالُهُ فِيمَا ضُرِبَ عَلَيْهِ فَإِنْ ضُرِبَ لَمْ يَكُنْ لِإِقْرَارِهِ تَحْتَ الضَّرْبِ حُكْمٌ وَإِنْ ضُرِبَ لِيَصْدُقَ عَنْ حَالِهِ وَأَقَرَّ تَحْتَ الضَّرْبِ قُطِعَ ضَرْبُهُ وَاسْتُعِيدَ إقْرَارُهُ فَإِذَا أَعَادَهُ كَانَ مَأْخُوذًا بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَسْتَعِدْهُ لَمْ يُضَيَّقْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَرِهْنَاهُ. وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ فِيمَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الْجَرَائِمُ وَلَمْ يَنْزَجِرْ عَنْهَا بِالْحُدُودِ أَنْ يَسْتَدِيمَ حَبْسَهُ إذَا اسْتَضَرَّ النَّاسُ بِجَرَائِمِهِ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ بِقُوتِهِ وَكِسْوَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيَدْفَعَ ضَرَرَهُ عَنْ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْقُضَاةِ. وَالسَّادِسُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ إحْلَافُ الْمُتَّهَمِ اسْتِبْرَاءً لِحَالِهِ وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ فِي الْكَشْفِ عَنْ أَمْرِهِ فِي

التُّهْمَةِ بِحُقُوقِ اللهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالصَّدَقَةِ كَالْإِيمَانِ بِاللهِ فِي الْبَيْعَةِ السُّلْطَانِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْقُضَاةِ إِحْلَافُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِ حَقٍّ وَلَا أَنْ يُجَاوِزَ الْإِيمَانَ بِاللهِ إِلَى الطَّلَاقِ أَوِ الْعِتْقِ. وَالسَّابِعُ: أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَأْخُذَ أَهْلَ الْجَرَائِمِ بِالتَّوْبَةِ إِجْبَارًا وَيُظْهِرَ مِنَ الْوَعِيدِ عَلَيْهِمْ مَا يَقُودُهُمْ إِلَيْهَا طَوْعًا، وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِمُ الْوَعِيدَ بِالْقَتْلِ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ لِأَنَّهُ وَعِيدُ إِرْهَابٍ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْكَذِبِ إِلَى حَيِّزِ التَّعْزِيرِ وَالْأَدَبِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَقِّقَ وَعِيدَهُ بِالْقَتْلِ فَيَقْتُلَ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ. وَالثَّامِنُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَسْمَعَ شَهَادَاتِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ الْقُضَاةُ إِذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ اهـ

(Bab: 19) Hukum-hukum kriminal. Kriminal itu dilarang syariat; Allah ﷻ melarangnya dengan *had* atau *ta'zir*. Ketika ada sangkaan dalam kondisi *istibra'* dimana politik agama menuntutnya, ketika tetap dan sah dalam kondisi memenuhi yang ditetapkan hukum syariat. Adapun kondisinya setelah sangkaan, sebelum tetap dan sah maka dianggap dengan kondisi melihatnya. Jika seorang hakim maka seorang laki-laki yang benar-benar diduga mencuri atau berzina dilaporkan padanya yang tidak dipengaruhi oleh sangkaan di sisinya. Tidak boleh menahannya untuk membuka, tidak membebaskan dan tidak mengambilnya dengan sebab-sebab pengakuan atau paksaan. Tidak mendengar pengakuan mencuri kecuali dari musuh yang berhak, sebab kebencian dan menjaga hal yang tampak dari pengakuan orang yang disangka, atau ingkarnya jika ia disangka berzina tidak mendengar pengakuannya kecuali setelah menyebutkan wanita yang diajak berzina dan mensifati perkara yang dilakukannya dari perzinaan yang menetapkan *had*. Jika ia mengakui maka ia di*had* dengan konsekuensi *iqrar*nya meskipun mengingkari dan ada saksi yang mendengarnya, meskipun tidak menyumpahnya dalam hak *Adami* bukan hak Allah ﷻ, apabila musuh menuntut sumpah. Jika orang yang melihat dimana orang yang disangka ini dilaporkan pada Amir atau dari anak-anak baru dan orang yang menolong, maka ia bersama orang yang disangka ini dari sebab-sebab membuka dan *istibra'* perkara yang tidak bagi para *qadli* dan hakim. Hal itu bagian dari 9 *wajah* yang hukum orang-orang yang melihat berbeda-beda. Pertama, sungguh Amir tidak boleh mendengar kebencian orang yang disangka tanda-tanda pendukung tanpa menyatakan pada dakwa yang ditetapkan dan kembali pada ungkapan mereka dalam mengabarkan kondisi orang yang disangka, apakah termasuk ahli keraguan? Apakah ia dikenal

dengan semisal kebencian atau tidak? Jika mereka membebaskannya dari semisal itu maka sangkaannya ringan, diletakkan, disegerakan kemutlakannya dan tidak diberatkan. Apabila mereka membencinya semisalnya dan mengenalnya sesamanya maka diberatkan sangkaan, kuat, dan ketika terbuka digunakan perkara yang akan kami sebutkan, dan ini bukan untuk putusan. Kedua: sungguh Amir harus menjaga kondisi saksi-saksi dan sifat-sifat orang yang disangka dalam kuat dan lemahnya sangkaan. Apabila sangkaan zina dan orang yang disangka mengikuti wanita yang memiliki paras elok dan pandai memikat maka dugaannya kuat. Apabila sebaliknya maka dugaannya lemah. Apabila diduga mencuri dan orang yang disangka memiliki cela, badannya ada bekas-bekas pukulan atau bersamanya sejak perbuatan berani dikerjakan, maka dugaannya kuat, dan jika sebaliknya maka dugaannya lemah. Ini juga bukan untuk putusan. Ketiga: sungguh amir menahan terdakwa agar membuka dan meminta bebas. Masa penahanan dibedakan-bedakan, Abdullah bin Zubair dari *ashab* asy-Syafi'i menyebutkan penahanan untuk pembebasan dan membuka dikira-kirakan tidak melewati sebulan. Ulama lain berkata: "*Tidak dikira-kirakan itu dimauqufkan pada pendapat imam dan ijtihadnya, dan ini menyerupai.*" *Qadhi* tidak boleh menahan seseorang kecuali karena hak yang wajib. Keempat: Amir boleh memukul *ta'zir* bukan pukulan *had* serta kuat dugaan untuk mengintrogasi secara jujur terkait kondisinya dalam perkara yang ia kerjakan dan diduga. Jika ia mengakui karena ia dipukul maka kondisinya dianggap dalam perkara yang ia dipukul. Apabila ia dipukul, maka tidak ada hukum terkait pengakuannya di bawah pukulan. Apabila ia dipukul supaya membenarkan kondisi dan mengakui di bawah pukulan maka pukulannya dipastikan dan pengakuannya disediakan. Apabila ia mengulanginya maka diambil pengakuan yang kedua bukan yang pertama. Apabila ia meringkas pengakuan pertama dan tidak menyiapkannya maka tidak dipersempit melakukan pengakuan pertama meski kita memakruhkan. Kelima: Sungguh Amir boleh terus menahan orang yang mengulangi tindak kriminal dan tidak jera dengan *had*, apabila masyarakat merasa terancam atas kriminalnya hingga mati, setelah mendirikan kekuatan dan pakaiannya dari *baitul mal* untuk menolak *dlarar*nya dari manusia, meskipun itu bukan untuk putusan.

وَالسَّابِعُ: أَنَّ لِلْأَمِيرِ أَنْ يَأْخُذَ أَهْلَ الْجَرَائِمِ بِالتَّوْبَةِ إِجْبَارًا وَيُظْهِرَ مِنَ الْوَعِيدِ عَلَيْهِمْ مَا يَقُودُهُمْ إِلَيْهَا طَوْعًا، وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِمُ الْوَعِيدَ بِالْقَتْلِ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ لِأَنَّهُ وَعِيدُ إِرْهَابٍ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْكَذِبِ إِلَى حَيِّزِ التَّعْزِيرِ وَالْأَدَبِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَقِّقَ وَعِيدَهُ بِالْقَتْلِ فَيَقْتُلَ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَتْلُ. وَالثَّامِنُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَمِيرِ أَنْ

يَسْمَعَ شَهَادَاتِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ الْقُضَاةُ إِذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ اهـ

Keenam: Sungguh amir boleh menyumpah orang yang diduga karena tidak meliahat kondisinya dan karena memberatkannya agar membuka perkaranya yang masih samar terkait dugaan hak Allah dan hak *adami*. Amir tidak boleh mendesaknya menjatuhkan *thalak*, memerdekakan, dan sedekah, seperti iman kepada Allah dalam *baiat sulthaniyah*. Para *Qadhi* tak boleh menyumpah seseorang tanpa hak dan menyumpahnya agar melampaui Iman pada Allah sampai ke talak atau memerdekakan budak. Ketujuh: Sungguh Amir boleh memaksa pelaku kriminal agar bertobat dan mengancam mereka dengan ancaman yang bisa menuntun mereka agar patuh. Amir tidak diperbolehkan mendesak mereka dengan ancaman pembunuhan dalam kasus yang tidak wajib hukum bunuh, karena itu merupakan ancaman gertakan yang keluar dari batasan dusta pada area *ta'zir* dan *adab*. Amir tidak boleh menyatakan ancaman dengan pembunuhan, hingga membunuh dalam kasus yang tidak wajib hukum bunuh. Kedelapan: Sungguh amir tidak boleh mendengar persaksian pemeluk berbagai agama (selain Islam) dan orang yang tidak boleh didengar oleh *qadhi*, apabila mereka banyak.

b. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, 105:

وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَظَرِ الْمَظَالِمِ وَنَظَرِ الْقُضَاةِ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنَّ لِنَاظِرِ الْمَظَالِمِ مِنْ فَضْلِ الْهَيْبَةِ وَقُوَّةِ الْيَدِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ فِي كَفِّ الْخُصُومِ عَنِ التَّجَاحُدِ وَمَنْعِ الظَّلَمَةِ مِنَ التَّغَالُبِ وَالتَّجَاذُبِ. وَالثَّانِي: أَنَّ نَظَرَ الْمَظَالِمِ يَخْرُجُ مِنْ ضِيقِ الْوُجُوبِ إِلَى سِعَةِ الْجَوَازِ فَيَكُونُ النَّاظِرُ فِيهِ أَفْسَحَ مَجَالًا وَأَوْسَعَ مَقَالًا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ مِنْ فَضْلِ الْإِرْهَابِ وَكَشْفِ الْأَسْبَابِ بِالْأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ اللَّائِحَةِ مَا يَضِيقُ عَلَى الْحُكَّامِ فَيَصِلُ بِهِ إِلَى ظُهُورِ الْحَقِّ وَمَعْرِفَةِ الْمُبْطِلِ مِنَ الْمُحِقِّ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يُقَابِلَ مَنْ ظَهَرَ ظُلْمُهُ بِالتَّأْدِيبِ وَيَأْخُذَ مَنْ بَانَ عُدْوَانُهُ بِالتَّقْوِيمِ وَالتَّهْذِيبِ. وَالْخَامِسُ: أَنَّ لَهُ مِنَ التَّأَنِّي فِي تَرْدَادِ الْخُصُومِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ أُمُورِهِمْ وَاسْتِبْهَامِ حُقُوقِهِمْ لِيُمْعِنَ فِي الْكَشْفِ عَنْ أَسْبَابِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ لِلْحُكَّامِ إِذَا سَأَلَهُمْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ فَصْلَ الْحُكْمِ فَلَا يَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ الْحَاكِمُ وَيَسُوغُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَالِي الْمَظَالِمِ. وَالسَّادِسُ: أَنَّ لَهُ رَدَّ الْخُصُومِ إِذَا أَعْضَلُوا وَسَاطَةَ الْأُمَنَاءِ لِيَفْصِلُوا التَّنَازُعَ بَيْنَهُمْ صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رِضَى الْخَصْمَيْنِ بِالرَّدِّ. وَالسَّابِعُ: أَنْ يُفْسِحَ فِي مُلَازَمَةِ الْخَصْمَيْنِ إِذَا

وَضَحَتْ أَمَارَاتُ التَّجَاحُدِ وَيَأْذَنُ فِي إِلْزَامِ الْكَفَالَةِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ التَّكَفُّلُ لِيَنْقَادَ الْخُصُومُ إِلَى التَّنَاصُفِ وَيَعْدِلُوا عَنِ التَّجَاحُدِ وَالتَّكَاذُبِ. وَالثَّامِنُ: أَنَّهُ يَسْمَعُ مِنْ شَهَادَاتِ الْمَسْتُورِينَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عُرْفِ الْقُضَاةِ فِي شَهَادَةِ الْمُعَدَّلِينَ. وَالتَّاسِعُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِحْلَافُ الشُّهُودِ عِنْدَ ارْتِيَابِهِ بِهِمْ إِذَا بَذَلُوا أَيْمَانَهُمْ طَوْعًا وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ عَدَدِهِمْ لِيَزُولَ عَنْهُ الشَّكُّ وَيَنْفِيَ عَنْهُ الْاِرْتِيَابَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ. وَالْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِاسْتِدْعَاءِ الشُّهُودِ وَيَسْأَلَهُمْ عَمَّا عِنْدَهُمْ فِي تَنَازُعِ الْخُصُومِ وَعَادَةُ الْقُضَاةِ تَكْلِيفُ الْمُدَّعِي إِحْضَارَ بَيِّنَةٍ وَلَا يَسْمَعُونَهَا إِلَّا بَعْدَ مَسْأَلَتِهِ فَهَذِهِ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ يَقَعُ بِهَا الْفَرْقُ بَيْنَ نَظَرِ الْمَظَالِمِ وَنَظَرِ الْقَضَاءِ فِي التَّشَاجُرِ وَالتَّنَازُعِ وَهُمَا فِيمَا عَدَاهُمَا مُتَسَاوِيَانِ، وَسَنُوَضِّحُ مِنْ تَفْصِيلِهِمَا مَا تُبَيِّنُ بِهِ إِطْلَاقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْفُرُوقِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى اهـ

Perbedaan antara pandangan zhalim dan *qadli* ada sepuluh *wajah*, *Pertama*: Sungguh orang yang melihat kezhaliman memiliki keutamaan wibawa dan kekuatan tangan yang tidak dimiliki *qadli* dalam mencegah musuh dari pertikaian, mencegah kezhaliman dari kemenangan dan saling tarik-menarik. *Kedua*: pandangan zhalim keluar dari kewajiban sempit pada keluasan *jawaz*, maka orang yang melihatnya lebih luas tempatnya dan lebih luas ungkapannya. *Ketiga*: Menggunakan keutamaan gertakan dan membuka sebab-sebab dengan tanda-tanda yang menunjukkan dan saksi kondisi yang menginformasikan perkara yang sempit bagi para hakim, sehingga dapat mengantarkan pada kejelasan hak dan mengetahui hal yang membatalkan dari perkara yang hak. *Keempat*: Membandingi orang yang tampak kezhalimannya dengan mengajarkan budi pekerti serta menghadapi orang yang jelas-jelas memusuhi dengan menetapkan dan kehalusan budi bahasa. *Kelima*: Sungguh dia lamban dalam menolak musuh ketika terjadi keserupaan urusan dan kesamaran hak mereka, agar menggegerkan dalam membuka sebab-sebab dan kondisi-kondisi mereka yang tidak dimiliki para hakim, apabila salah seorang musuh meminta mereka memutuskan hukum maka hakim dan wali zhalim tidak boleh mengakhirkannya. *Keenam*: Sungguh ia bisa menolak musuh apabila mereka membingungkan perdamaian orang-orang terpercaya agar meleraikan pertikaian di antara mereka dengan damai dan saling rela. *Qadli* tidak bisa berbuat demikian kecuali atas kerelaan dua musuh dengan menolak. *Ketujuh*: Meluaskan dalam menetapi dua musuh bila sudah jelas tanda-tanda pertikaian dan mengizinkan dalam menetapi

tanggungan dalam suatu perkara yang boleh ditanggung, agar musuh mengikuti tengah-tengah dan membandingi kejahatan dan saling dusta. *Kedelapan*: Sungguh ia bisa mendengar perkara yang keluar dari *urf qadli* dari saksi-saksi yang menutup dalam persaksian orang-orang adil. *Kesembilan*: Sungguh ia boleh menyumpah para saksi saat ragu kepada mereka, bila mereka mengganti sumpah sepenuh hati dan memperbanyak jumlah mereka agar keraguan dan kebimbangan lenyap yang tidak di miliki oleh hakim. *Kesepuluh*: Sungguh ia boleh mulai mengajak para saksi dan menanyai mereka tentang hal yang ada di samping mereka di dalam perselisihan musuh, sementara kebiasaan para *qadli* adalah membebani *mudda'i* agar menghadirkan saksi dan tidak mendengarnya kecuali setelah persoalannya selesai. Inilah sepuluh *wajah* perbedaan di antara pandangan zhalim dan pandangan *qadli* dalam pertikaian dan perselisihan. Sementara keduanya dalam perkara lain sama, dan kita akan menjelaskan perincian keduanya, sebagaimana kita menjelaskan kemutlakan perbedaan di antara keduanya; *Insya Allah* ﷻ.

c. *At-Tasyri' al-Jana'i*, 1/197:

مَرْكَزُ الْقَوَانِيْنِ وَاللَّوَائِحِ وَالْقَرَارَاتِ مِنَ التَّشْرِيْعِ الْإِسْلَامِيِّ: تُعْتَبَرُ الْقَوَانِيْنُ وَالْقَرَارَاتُ وَاللَّوَائِحُ مُكَمِّلَةً لِلتَّشْرِيْعِ الْإِسْلَامِيِّ لِأَنَّ الشَّرِيْعَةَ تُعْطِيْ لِأُوْلِي الْأَمْرِ حَقَّ التَّشْرِيْعِ فِيْمَا يَمَسُّ مَصْلَحَةَ الْأَفْرَادِ وَمَصْلَحَةَ الْجَمَاعَةِ، وَفِيْمَا يَعُوْدُ عَلَى الْأَفْرَادِ وَالْجَمَاعَةِ بِالنَّفْعِ، فَلِلسُّلْطَةِ التَّشْرِيْعِيَّةِ فِيْ أَيِّ بَلَدٍ إِسْلَامِيٍّ أَنْ تُعَاقِبَ عَلَى أَيِّ فِعْلٍ مُبَاحٍ إِذَا اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ ذٰلِكَ، وَلَهَا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ الْجَرِيْمَةِ أَوْ عَنِ الْعُقُوْبَةِ إِذَا كَانَتِ الْجَرِيْمَةُ مِنْ جَرَائِمِ التَّعَازِيْرِ وَاقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ الْعَفْوَ عَنِ الْجَرِيْمَةِ، أَوِ الْعَفْوَ عَنِ الْعُقُوْبَةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا، وَلَهَا أَنْ تُضَيِّقَ مِنْ سُلْطَانِ الْقَاضِيْ فِيْ أَيِّ جَرِيْمَةٍ مِنْ جَرَائِمِ التَّعَازِيْرِ وَأَنْ تَتْرُكَهُ وَاسِعًا مَا دَامَتِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ تَقْتَضِيْ هٰذَا. وَالْقَوَانِيْنُ وَالْقَرَارَاتُ وَاللَّوَائِحُ الَّتِيْ تُصْدِرُهَا السُّلْطَةُ التَّشْرِيْعِيَّةُ تَكُوْنُ نَافِذَةً وَاجِبَةَ الطَّاعَةِ شَرْعًا، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُوْنَ فِيْهَا مَا يُخَالِفُ نُصُوْصَ الشَّرِيْعَةِ الصَّرِيْحَةِ أَوْ يَخْرُجُ عَلَى مَبَادِئِهَا الْعَامَّةِ وَرُوْحِ التَّشْرِيْعِ فِيْهَا، وَإِلَّا فَهِيَ بَاطِلَةٌ بُطْلَانًا مُطْلَقًا، كَمَا سَنُبَيِّنُ فِيْمَا بَعْدُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى النَّسْخِ اهـ

Tempat undang-undang, regulasi dan ketetapan syariat Islam, undang-undang, regulasi dan ketetapan mengungkap syariat Islam, karena syariat memberikan hak syariat pada *ulil amri* dalam hal mengenai maslahat

individu dan jamaah, dan penegak keadilan yang manfaatnya kembali pada individu dan jamaah, maka pemerintah memiliki kebijakan syariat di negara Islam manapun untuk mengatur regulasi yang pro terhadap kepentingan umum. Sehingga kepentingan sosial itu bisa mengampuni kriminal atau hukuman apabila berupa *ta'zir* dan kepentingan umum menuntut ampunannya, ampunan hukum seluruh atau sebagiannya, dan kepentingan sosial itu bisa mempersempit ruang *sultan qadli* dari bentuk *ta'zir* terkait tindak kriminal apa pun, bahkan meninggalkannya karena ampunan yang luas selama kepentingan umum menuntutnya. Undang-undang, regulasi dan peraturan yang timbul dari kuasa syariat berlaku dan wajib dipatuhi menurut *syara'*; dan dengan syarat tidak ada hal-hal yang bertentangan pada *nash-nash* syariat yang sudah jelas atau mengeluarkan hukum umum lampau dan ruh syariat. Jika tidak maka undang-undang itu batal secara mutlak, seperti penjelasan selanjutnya ketika pembahasan *nash*.

d. *At-Tasyri' al-Jana'i*, 1/324:

وَأَسَاسُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ جَرَائِمِ الْحُدُوْدِ وَجَرَائِمِ الْقِصَاصِ مِنْ جِهَةٍ وَبَيْنَ جَرَائِمِ التَّعَازِيْرِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، أَنَّ إِقَامَةَ الْعُقُوْبَةِ فِي جَرَائِمِ الْحُدُوْدِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَا يَصِحُّ تَأْخِيْرُهَا، وَلَا يَجُوْزُ الْعَفْوُ عَنْهَا، وَأَنَّ عُقُوْبَاتِ جَرَائِمِ الْقِصَاصِ وَاجِبَةٌ مَا لَمْ يُعْفَ عَنْهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ أَوْلِي دَمِهِ، فَإِذَا لَمْ تَقُمْ حُكُوْمَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ عُقُوْبَاتِ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَجَبَتْ إِقَامَتُهَا عَلَى الْحُكُوْمَاتِ الْأُخْرَى، وَإِنْ لَمْ تُقِمْهَا الْحُكُوْمَاتُ وَجَبَتْ عَلَى الْأَفْرَادِ، أَمَّا عُقُوْبَاتُ التَّعَازِيْرِ فَيَجُوْزُ إِيْقَافُ تَنْفِيْذِهَا وَالْعَفْوُ عَنْهَا اهـ

Dasar perbedaan di antara kriminal *had* dan *qishahs* dari satu sisi, dan di antara *ta'zir* dari sisi lain. Sungguh menegakkan hukum kriminal dengan *had* itu wajib bagi setiap muslim, tidak sah mengakhirkan dan dilarang mengampuninya. Sungguh hukum kriminal *qishash* diwajibkan selama pelaku kriminal atau orang yang memiliki tanggungan darah belum diampuni. Bila *hukumah Islamiyah*, dari hukum *had* dan *qishash* tidak ditegakkan maka wajib menegakkan pada *hukumah* yang lain, dan jika *hukumah* tersebut tidak ditegakkan maka wajib bagi individu. Adapun hukum *ta'zir* maka boleh dibatalkan dan mengampuninya.

e. *At-Tasyri' al-Jana'i*, I/90-91:

أَهَمِّيَّةُ هَذَا التَّقْسِيْمِ: تَظْهَرُ أَهَمِّيَّةُ تَقْسِيْمِ الْجَرَائِمِ إِلَى حُدُوْدٍ وَقِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ وَتَعَازِيْرَ مِنْ عِدَّةِ وُجُوْهٍ سَنُبَيِّنُهَا فِيْمَا يَلِي: أَوَّلًا: مِنْ حَيْثُ الْعَفْوُ: جَرَائِمُ الْحُدُوْدِ لَا يَجُوْزُ فِيْهَا

الْعَفْوُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَيِ الرَّئِيسِ الْأَعْلَى لِلدَّوْلَةِ، فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا كَانَ عَفْوُهُ لَغْوًا لَا أَثَرَ لَهُ عَلَى الْجَرِيمَةِ وَلَا عَلَى الْعُقُوبَةِ. أَمَّا فِي جَرَائِمِ الْقِصَاصِ فَالْعَفْوُ جَائِزٌ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَفَا تَرَتَّبَ عَلَى الْعَفْوِ أَثَرُهُ، فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْقِصَاصِ مُقَابِلَ الدِّيَةِ، وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الدِّيَةِ أَيْضًا، فَإِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمَا أُعْفِيَ مِنْهُ الْجَانِي. وَلَيْسَ لِرَئِيسِ الدَّوْلَةِ الْأَعْلَى أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْعُقُوبَةِ فِي جَرَائِمِ الْقِصَاصِ بِصِفَتِهِ هَذِهِ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْجَرَائِمِ مُقَرَّرٌ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَاصِرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَوْلِيَاءُ كَانَ الرَّئِيسُ الْأَعْلَى لِلدَّوْلَةِ وَلِيَّهُ، إِذِ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجُوزُ لِرَئِيسِ الدَّوْلَةِ الْعَفْوُ بِصِفَتِهِ وَلِيَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، لَا بِأَيِّ صِفَةٍ أُخْرَى، وَبِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ الْعَفْوُ مَجَّانًا. وَفِي جَرَائِمِ التَّعَازِيرِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ - أَيْ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ الْأَعْلَى - حَقُّ الْعَفْوِ عَنِ الْجَرِيمَةِ، وَحَقُّ الْعَفْوِ عَنِ الْعُقُوبَةِ، فَإِذَا عَفَا كَانَ لِعَفْوِهِ أَثَرُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَمَسَّ عَفْوُهُ حُقُوقَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الشَّخْصِيَّةَ. وَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْفُوَ فِي التَّعَازِيرِ إِلَّا عَمَّا يَمَسُّ حُقُوقَهُ الشَّخْصِيَّةَ الْمَحْضَةَ. وَلَمَّا كَانَتِ الْجَرَائِمُ تَمَسُّ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ عَفْوَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ أَوِ الْجَرِيمَةِ لَا يَكُونُ نَافِذًا وَإِنْ أَدَّى فِي الْوَاقِعِ إِلَى تَخْفِيفِ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْجَانِي، لِأَنَّ لِلْقَاضِي سُلْطَةً وَاسِعَةً فِي جَرَائِمِ التَّعَازِيرِ مِنْ حَيْثُ تَقْدِيرُ الظُّرُوفِ الْمُخَفِّفَةِ، وَتَخْفِيفُ الْعُقُوبَةِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ عَفْوَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ يُعْتَبَرُ ظَرْفًا مُخَفِّفًا. ثَانِيًا: مِنْ حَيْثُ سُلْطَةُ الْقَاضِي: فِي جَرَائِمِ الْحُدُودِ إِذَا ثَبَتَتِ الْجَرِيمَةُ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعُقُوبَتِهَا الْمُقَرَّرَةِ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئًا وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا شَيْئًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِالْعُقُوبَةِ الْمُقَرَّرَةِ عُقُوبَةً أُخْرَى، وَلَا أَنْ يُوقِفَ تَنْفِيذَ الْعُقُوبَةِ، فَسُلْطَةُ الْقَاضِي فِي جَرَائِمِ الْحُدُودِ قَاصِرَةٌ عَلَى النُّطْقِ بِالْعُقُوبَةِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْجَرِيمَةِ. وَفِي جَرَائِمِ الْقِصَاصِ سُلْطَةُ الْقَاضِي قَاصِرَةٌ عَلَى تَوْقِيعِ الْعُقُوبَةِ الْمُقَرَّرَةِ إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ ثَابِتَةً قِبَلَ الْجَانِي، فَإِذَا كَانَتِ الْعُقُوبَةُ الْقِصَاصَ وَعَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنِ الْقِصَاصِ أَوْ تَعَذَّرَ الْحُكْمُ بِهِ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِالدِّيَةِ مَا لَمْ يَعْفُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْهَا، فَإِذَا عَفَا كَانَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعُقُوبَةٍ تَعْزِيرِيَّةٍ. وَلَهُ

فِي التَّعَازِيْرِ -كَمَا سَنُبَيِّنُ- سُلْطَةٌ وَاسِعَةٌ. أَمَّا جَرَائِمُ التَّعَازِيْرِ فَلِلْقَاضِي فِيْهَا سُلْطَةٌ وَاسِعَةٌ فِي اخْتِيَارِ نَوْعِ الْعُقُوْبَةِ وَمِقْدَارِهَا، فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ عُقُوْبَةً شَدِيْدَةً أَوْ خَفِيْفَةً بِحَسَبِ ظُرُوْفِ الْجَرِيْمَةِ وَالْمُجْرِمِ، وَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ بِالْعُقُوْبَةِ إِلَى أَدْنَى دَرَجَاتِهَا، وَلَهُ أَنْ يَرْتَفِعَ بِهَا إِلَى حَدِّهَا الْأَقْصَى، وَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِتَنْفِيْذِ الْعُقُوْبَةِ أَوْ إِيْقَافِ تَنْفِيْذِهَا اهـ

Pembagian penting: pembagian penting kriminal jelas pada *had*, *qishas* atau *diyat* dan *ta'zir* dari beberapa *wajah* yang akan kita jelaskan dalam masalah berikut. *Pertama*: dari sisi ampunan, kriminal *had* tidak boleh terjadi ampunan secara mutlak, baik korban kriminal atau penguasa maksudnya pimpinan tinggi negara. Bila salah satunya mengampuni maka ampunannya sia-sia, tidak berpengaruh bagi kriminal dan tidak bagi hukum. Sedangkan dalam kriminal *qishash* maka ampunan itu boleh terjadi dari pihak korban, bila korban mengampuni maka ampunannya dapat berpengaruh. Sehingga korban kriminal boleh mengampuni dari *qishash* yang membandingi *diyat*, dan korban juga boleh mengampuni dari *diyat*. Apabila mengampuni salah satunya maka pelaku diampuni darinya. Pemimpin negara tertinggi tidak boleh mengampuni hukum kriminal *qishash* dengan sifat ini, sebab ampunan seperti ini ditetapkan bagi korban atau walinya, akan tetapi apabila korban gegabah dan ia tidak memiliki wali, maka pimpinan tertinggi negara boleh menjadi wali. Karena kaidah syariat, sungguh *sulthan* menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali. Kondisi ini memperbolehkan pimpinan negara mengampuni sebagai wali korban, tidak sebagai yang lain, serta dengan syarat ampunan tersebut tidak cuma-cuma. Sementara terkait kriminal *ta'zir*, *waliyul amri* maksudnya pimpinan tinggi negara memiliki hak ampunan dari tindak kriminal dan ampunan dari hukum. Apabila ia mengampuninya maka bisa berpengaruh dengan ketentuan ampunannya tidak mengenai hak individu korban. Serta korban tidak mengampuni *ta'zir* kecuali dari perkara yang mengenai hak murni seseorang. Ketika tindak kriminal tersebut mengenai jamaah, maka sungguh ampunan dari hukum atau tindak kriminal tidak berlaku, meskipun pada realisasinya meringankan hukuman bagi pelaku. Karena *Qadli* memiliki kuasa yang luas dalam kriminal *ta'zir* dari sisi mengira-ngirakan batas keringanan, dan meringankan hukum. Tidak ada keraguan bahwa ampunan korban dinilai sebagai batas ringan. *Kedua*: dari sisi kuasa *Qadli*, terkait kriminal *had* bila tetap maka *Qadli* wajib memutuskan hukum yang ditetapkan, tidak mengurangi atau menambah sedikitpun. Tidak boleh mengganti hukum yang telah ditetapkan dengan hukum lain, dan juga tidak boleh menggantungkan pelaksanaan hukuman, sehingga kuasa *Qadli* terkait

tindak kriminal *had* terangkum dalam ucapan dengan hukuman yang ditetapkan bagi tindak kriminal. Terkait kriminal *qishahs*, kuasa *Qadli* terangkum pada menjatuhkan hukum yang ditetapkan apabila bentuk kriminal tetap di sisi pelaku. Apabila hukum berupa *qishash* dan korban mengampuni dari *qishash* atau hukum menjadi sulit karena sebab *syar'i*, maka wajib bagi *Qadli* menghukumi dengan *diyat* selama korban tidak mengampuninya. Apabila *Qadli* korban mengampuninya, maka *Qadli* menghukumi perkara dengan *ta'zir*. Dan ia terkait *ta'zir* -sebagaimana keterangan berikut- memiliki kuasa yang luas. Sementara kriminal *ta'zir*, maka *Qadli* memiliki kuasa yang luas dalam memilih cabang hukum dan kadarnya, ia memiliki pilihan hukuman berat atau ringan sesuai tingkat hukum dan pelaku. *Qadli* boleh menempatkan hukuman sampai batas terendah, boleh meninggikan sampai batas tertinggi, dan boleh mengutus pelaksanaan hukuman atau menghentikan pelaksanaannya.

f. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, 295:

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْحَدَّ وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَا الشَّفَاعَةُ فِيهِ فَيَجُوزُ فِي التَّعْزِيرِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَتَسُوغُ الشَّفَاعَةُ فِيهِ فَإِنْ تَفَرَّدَ التَّعْزِيرُ بِحَقِّ السَّلْطَنَةِ وَحُكْمِ التَّقْوِيمِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ جَازَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُرَاعِيَ الْأَصْلَحَ فِي الْعَفْوِ أَوْ التَّعْزِيرِ وَجَازَ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ مَنْ سَأَلَ الْعَفْوَ عَنِ الذَّنْبِ اهـ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اشْفَعُوا إِلَيَّ وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ. وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالتَّعْزِيرِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ كَالتَّعْزِيرِ فِي الشَّتْمِ وَالْمُوَاثَبَةِ فَفِيهِ حَقُّ الْمَشْتُومِ وَالْمَضْرُوبِ وَحَقُّ السَّلْطَنَةِ لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّهْذِيبِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُسْقِطَ بِعَفْوِهِ حَقَّ الْمَشْتُومِ وَالْمَضْرُوبِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لَهُ حَقَّهُ مِنْ تَعْزِيرِ الشَّاتِمِ وَالضَّارِبِ فَإِنْ عَفَا الْمَضْرُوبُ وَالْمَشْتُومُ كَانَ وَلِيُّ الْأَمْرِ بَعْدَ عَفْوِهِمَا عَلَى خِيَارِهِ فِي فِعْلِ الْأَصْلَحِ مِنَ التَّعْزِيرِ تَقْوِيمًا وَالصَّفْحِ عَنْهُ عَفْوًا فَإِنْ تَعَافَوْا عَنِ الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ قَبْلَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ سَقَطَ التَّعْزِيرُ الْآدَمِيُّ. وَاخْتُلِفَ فِي سُقُوطِ حَقِّ السَّلْطَنَةِ عَنْهُ وَالتَّقْوِيمِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيِّ أَنَّهُ يَسْقُطُ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُعَزِّرَ فِيهِ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ أَغْلَظُ وَيَسْقُطُ حُكْمُهُ بِالْعَفْوِ فَكَانَ حُكْمُ التَّعْزِيرِ بِالسَّلْطَنَةِ أَسْقَطَ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي هُوَ الْأَظْهَرُ أَنَّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُعَزِّرَ فِيهِ مَعَ الْعَفْوِ قَبْلَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُعَزِّرَ فِيهِ مَعَ الْعَفْوِ بَعْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ مُخَالَفَةً لِلْعَفْوِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ

مِنْ حُقُوقِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَلَوْ تَشَاتَمَ وَتَوَاثَبَ وَالِدٌ مَعَ وَلَدٍ سَقَطَ تَعْزِيرُ الْوَالِدِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ وَلَمْ يَسْقُطْ تَعْزِيرُ الْوَلَدِ فِي حَقِّ الْوَالِدِ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَكَانَ تَعْزِيرُ الْأَبِ مُخْتَصًّا بِحَقِّ السَّلْطَنَةِ، وَالتَّقْوِيمُ لَا حَقَّ فِيهِ لِلْوَلَدِ. وَيَجُوزُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ، وَكَانَ تَعْزِيرُ الْوَلَدِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ حَقِّ الْوَلَدِ وَحُقُوقِ السَّلْطَنَةِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ مَعَ مُطَالَبَةِ الْوَالِدِ بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ لَهُ وَهَذَا الْكَلَامُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ اهـ

Wajah kedua: Sungguh *had* meskipun tidak ada ampunan dan syafaat, namun dalam *ta'zir* ada ampunan dan syafaat, sehingga apabila *ta'zir* terpisah dari hak kuasa dan hukum penegakan dan tidak berhubungan dengan hak *Adami* maka *waliyul amri* boleh menjaga yang lebih *maslahat* dalam ampunan atau *ta'zir* dan boleh mensyafaati orang yang meminta ampunan dari dosa. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ sungguh beliau bersabda: *Mintalah syafaat padaku dan Allah yang akan memutuskanperkara yang ia kehendaki melalui lisan Nabi-Nya.* Jika hak Adami berkaitan dengan *ta'zir* seperti *ta'zir* ketika mencaci dan meloncat, karena terdapat hak orang yang dicaci dan dipukul, sementara hak kuasa untuk menegakkan dan membersihkan, sehingga *waliyul amri* tidak boleh menggugurkan hak orang yang dicaci dan dipukul dengan ampunan. *Waliyul amri* harus memenuhi haknya dengan men*ta'zir* orang yang mencaci dan memukul. Jika orang yang dipukul dan dicaci mengampuni maka *waliyul amri* dapat memilih mana yang terbaik dari *ta'zir* untuk menegakkan dan mengampuninya setelah ampunan mereka. Jika mereka mengampuni cacian dan pukulan sebelum melaporkan padanya maka *ta'zir* Adami gugur. Ada perbedaan pengguguran hak kuasa dan penegakan dalam dua *wajah*. *Pertama*: menurut *qaul* Abi Abdillah az-Zubairi sungguh bisa gugur dan *waliyul amri* tidak boleh men*ta'zir*nya, karena *had qadzaf* lebih berat dan hukumnya bisa gugur dengan ampunan, sehingga hukum *ta'zir* dengan kuasa lebih menggugurkan. *Wajah* kedua menurut *azhar* sungguh *waliyul amri* boleh men*ta'zir*nya bersama ampunan sebelum ada laporan padanya, seperti boleh men*ta'zir*nya dengan ampunan orang tua tidak dibunuh sebab membunuh anaknya, sementara anak dibunuh sebab setelah ada laporan padanya seraya menyelisihi pada ampunan dari *had qadzaf* dalam dua tempat, karena penegakan hak-hak *maslahat* umum. Jika orang tua mencaci dan memukul anak maka *ta'zir* orang tua gugur dalam hak anak dan *ta'zir* anak tidak gugur dalam hak orang tua, sebagaimana membunuh orang tuanya. *Ta'zir* ayah dikhususkan dengan hak kuasa, sementara penegakan tidak ada hak bagi anak. Dan

waliyul amri boleh mengampuninya sendiri, dan pen*ta'zir*an anak yang berserikat di antara hak anak dan hak kuasa, maka tidak boleh bagi *waliyul amri* sendiri dengan mengampuninya serta menuntut orang tua dengannya, sehingga memenuhinya; kalam ini dalam *wajah* kedua yang berbeda-beda antara *had* dan *ta'zir*.

g. *Anwar al-Buruq*, IV/73:

(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَقَاعِدَةِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ) فَضَابِطُ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ أَنَّهَا طَلَبُ مُعَيَّنٍ أَوْ مَا فِي ذِمَّةِ مُعَيَّنٍ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا لَا تُكَذِّبُهَا الْعَادَةُ فَالْأَوَّلُ كَدَعْوَى أَنَّ السِّلْعَةَ الْمُعَيَّنَةَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَوْ غُصِبَتْ مِنْهُ، وَالثَّانِي كَالدُّيُونِ وَالسَّلَمِ ثُمَّ الْمُعَيَّنُ الَّذِي يَدَّعِي فِي ذِمَّتِهِ قَدْ يَكُونُ مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ كَزَيْدٍ أَوْ بِالصِّفَةِ كَدَعْوَى الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْقَتْلِ عَلَى جَمَاعَةٍ أَوْ أَنَّهُمْ أَتْلَفُوا مُتَمَوَّلًا، وَالثَّالِثُ كَدَعْوَى الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ أَوْ الرِّدَّةَ عَلَى زَوْجِهَا فَيَتَرَتَّبُ لَهَا حَوْزُ نَفْسِهَا، وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ أَوْ الْوَارِثُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فَيَتَرَتَّبُ لَهُ الْمِيرَاثُ الْمُعَيَّنُ فَهِيَ مَقَاصِدُ صَحِيحَةٌ، وَقَوْلُنَا مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا احْتِرَازٌ مِنْ دَعْوَى عُشْرِ سِمْسِمَةٍ فَإِنَّ الْحَاكِمَ لَا يَسْمَعُ مِثْلَ هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نَفْعٌ شَرْعِيٌّ، وَلِهَذِهِ الدَّعْوَى أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً مُحَقَّقَةً لَا تُكَذِّبُهَا الْعَادَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ.

(Perbedaan ke-231 di antara kaidah *dakwa shahih dan kaidah dakwa batil*), batasan *dakwa shahih* sungguh *dakwa* adalah tuntutan tertentu, perkara dalam tanggungan tertentu atau runtutan salah satunya yang dianggap secara *syara'* dan tidak didustakan adat. *Pertama*: seperti *dakwa* harta tertentu yang dibeli itu miliknya atau harta yang di*ghasab* itu miliknya. *Kedua*: seperti hutang dan *salam* (pesan), kemudian perkara tertentu yang di*dakwa* dalam tanggungannya kadang tertentu pada seseorang seperti Zaid atau pada sifat seperti *dakwa diyat aqilah* dan pembunuhan pada jamaah atau mereka merusak harta. *Ketiga*: seperti *dakwa* wanita atas *thalak* atau murtad pada suaminya, maka berkonsekuensi menutup diri, dan *dakwa* ini khusus atau *dakwa ahli waris*, ayahnya meninggal dalam kondisi muslim atau kafir maka berkonsekuensi mendapatkan warisan tertentu, *dakwa* ini merupakan tujuan-tujuan yang sah. (Ungkapan kita: *"dianggap secara syara'"*), mengecualikan *dakwa* 1/10 *simsim*, sungguh hakim tidak boleh mendengar *dakwa* semacam ini karena ia tidak ada

manfaat syar'i dan *dakwa* ini memiliki empat syarat, yaitu diketahui, dinyatakan, tidak didustakan adat yang berhubungan dengan tujuan yang benar.

382. Legitimasi Pemerintahan

Deskripsi Masalah

Penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif (DPR, DPRD dan DPD) diwarnai gugatan atas DPT, kecurangan sistematis dan protes terhadap rekapitulasi hasil. Kejadian serupa mewarnai pelaksanaan Pilgub di Jawa Timur. Fenomena penggelembungan DPT dan manipulasi rekap suara serupa saja, bahkan dalam pemilu legislatif terjadi transaksi jual beli suara di bawah tangan.

Pertanyaan

a. Apakah hasil pelaksanaan PILKADA/pemilu anggota legislatif yang penuh dengan kecurangan berhak memperoleh legitimasi syar'i?
b. Layakkah kecurangan sistematis dalam pilgub dan pemilu legislatif dikategorikan *munkarat* yang harus direspon?
c. Sekira kecurangan sistematis dalam pelaksanaan pilgub dan pemilu anggota legislatif tidak ditindaklanjuti dan kecacatan hukum berjalan terus, bagaimana umat harus memandang pemerintahan yang ada?

Jawaban

a. Menurut hukum syari'ah sah karena *dharuri bi asy-syaukah*, namun tetap dengan hukum haram pada kecurangan itu.
b. Bahkan sangat layak untuk dikatakan sebagai *munkarat*.
c. Seperti sebagaimana jawaban (a).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 247:

(مَسْأَلَةٌ ك) تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ إِمَّا بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِيْنَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ أَوْ بِاسْتِخْلَافِ إِمَامٍ قَبْلَهُ أَوْ بِاسْتِيْلَاءِ ذِي الشَّوْكَةِ وَإِنِ اخْتَلَّتْ فِيْهِ الشُّرُوْطُ فَحِيْنَئِذٍ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ الشُّرُوْطُ الَّذِيْ ذَكَرُوْهَا فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَهُوَ إِمَامٌ أَعْظَمُ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَوَلٍّ بِالشَّوْكَةِ فَلَهُ حُكْمُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِيْ عَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْفِسْقِ. اهـ (مَسْأَلَةٌ ي) لَا تَزُوْلُ وِلَايَةُ السُّلْطَانِ الَّذِيْ انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ بِبَيْعَةٍ أَوْ عَهْدٍ مُتَّصِلٍ بِمَنِ انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ بِزَوَالِ شَوْكَتِهِ حَتَّى يَخْلَعَ نَفْسَهُ أَوْ يُخْلَعَ بِسَبَبٍ أَوْ بِأَسْرَةِ الْكُفَّارِ وَيَئَاسِ مِنْ خَلَاصِهِ أَمَّا مَنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ بِتَغَلُّبٍ أَوْ عَهْدٍ

مُتَّصِلٍ بِمُتَغَلِّبٍ كَغَالِبِ وُلَاةِ الزَّمَانِ فَنُفُوذُ وِلَايَتِهِ مُدَّةَ بَقَاءِ شَوْكَتِهِ وَلَوْ ضَعِيفَةً لَا بَعْدَ زَوَالِهَا فَلَوْ بَقِيَتْ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ نَفَذَتْ فِيمَا بَقِيَتْ فِيهِ فَقَطْ وَحَيْثُ قُلْنَا بِنُفُوذِ وِلَايَتِهِ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا بَلْ لَا تَنْفُذُ تَوْلِيَتُهُمْ نَحْوَ الْقَضَاءِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا إِنْ تَعَذَّرَ فَتَنْفُذُ مُدَّةَ التَّعَذُّرِ وَمَعْنَى ذِى الشَّوْكَةِ انْقِيَادُ النَّاسِ وَطَاعَتِهِمْ وَإِذْعَانِهِمْ لِأَمْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ وَالْجُنْدِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا تَقَعُ بِهِ الرَّهْبَةُ كَرُؤَسَاءِ الْبَلَدِ وَرَئِيسِ الْجَمَاعَةِ وَصَاحِبِ الْحُوطَةِ الْمُطَاعِ عَلَى الْوَجْهِ الْاعْتِقَادِ وَالْاحْتِشَامِ اهـ

(Masalah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani) Pemerintah bisa dikatakan legal adakalanya ketika dilantik oleh *ahlul ahli wal 'aqdi* (ulama, kepala, dan pemimpin golongan yang mudah untuk kumpul) atau dengan menggantikan imam sebelumnya atau dengan berkuasanya *dzus syaukah* meski tidak memenuhi persyaratan. Maka ketika ada orang yang memenuhi syarat sebagai *Imam A'zham* yang telah dituturkan oleh ulama maka dia termasuk *"Imam A'zham"*. Jika tidak, maka dia menjabat sebagai pemerintah dengan *syaukah*. Sedangkan ia dihukumi seperti halnya *Imam A'zham* yang tidak bisa dilengserkan dengan sebab *fasiq*. (Masalah Yahya) Pemerintahan seorang raja yang legal dengan cara dilantik atau dengan perjanjian yang *muttasil* tidak bisa hilang dengan adanya orang yang legal pemerintahannya dengan hilangnya kekuasaan (*syaukah*) raja tersebut, sehingga dia mengundurkan dirinya sendiri, mundur dengan adanya suatu sebab, atau ditawan oleh orang kafir dan dia merasa putus asa untuk membebaskan diri. Adapun orang yang pemerintahannya (dengan sebab menang atau perjanjian *muttasil* dengan orang yang menang) seperti umumnya pemimpin suatu zaman, Maka pemerintahannya terus berlanjut selama kekuasaannya masih tetap ada walau lemah, tidak setelah hilangnya kekuasaan (*syaukah*). Apabila kekuasaan tersebut masih ada pada sebagian daerah, maka pemerintahannya terus berlanjut pada daerah itu saja. Sekiranya kita mengatakan *"pemerintahannya masih berlanjut"*, maka dia didahulukan daripada *ahlul halli wal 'aqdi* apabila dia seorang yang muslim. Bahkan pemerintahan *ahlul halli wal 'aqdi* tidak berlanjut pada masalah *qadla* (keputusan suatu hukum) misalnya tanpa izinnya kecuali sulit untuk mendapatkan izin. Jika demikian, maka putusannya bisa *nufudz*. Makna *dzus syaukah* ialah patuh, taat, dan tunduknya rakyat pada perintahnya walau dia tidak memiliki sesuatu seperti raja, misalnya peralatan perang, tentara dan sebagainya dari suatu hal yang mendatangkan rasa takut/

sifat wibawa, seperti kepala Negara (Presiden), pemimpin golongan, dan orang yang memiliki pengaruh untuk ditaati dengan suatu kepercayaan dan derajat yang luhur.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 272-273:

(مَسْأَلَةُ ب) فَإِنْ وَلَّى السُّلْطَانُ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ ذُو الشَّوْكَةِ شَخْصًا غَيْرَ أَهْلٍ لِلْقَضَاءِ كَمُقَلِّدٍ جَاهِلٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ لَكِنْ مَعَ عِلْمِهِ بِفِسْقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْفَرْقِ نَفَذَتْ تَوْلِيَتُهُ لِلضَّرُورَةِ إِنْ وَافَقَ الصَّوَابَ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُجْتَهِدٌ عَدْلٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ مَصَالِحُ الْعِبَادِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ صَالِحٌ بِأَنْ تَعَذَّرَ أَوْ تَعَسَّرَ نَفَذَتْ تَوْلِيَةُ الْمُقَلِّدِ وَالْفَاسِقِ قَطْعًا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ذِي الشَّوْكَةِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ وَلَا يَنْعَزِلَانِ حِينَئِذٍ بِزَوَالِ الشَّوْكَةِ اهـ (مَسْأَلَةُ ش) الْقُضَاةُ الْمَنْصُوبُونَ مِنْ وُلَاةِ الشَّوْكَةِ إِنْ تَأَهَّلُوا لِلْقَضَاءِ فَذَاكَ وَإِلَّا نَفَذَ حُكْمُهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ فَسَقَةً نَعَمْ يَجِبُ عَلَى ذِي الشَّوْكَةِ مُرَاعَاةُ الْأَقَلِّ فِسْقًا عِنْدَ عُمُومِهِ كَنَظِيرِهِ مِنَ الشُّهُودِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ حَكَمَ بِمُوجَبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَهُوَ عَاصٍ مِنْ حَيْثُ فَقْدُ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَهُوَ الْعَدَالَةُ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ تَعْطِيلُ الْأَحْكَامِ وَإِنْ حَكَمَ بِمَا يَنْقُضُ فِيهِ قَضَاءَ الْقَاضِي فَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ نُفُوذِهِ وَزِيَادَةِ فِسْقِهِ لَاسِيَّمَا إِنْ أَكَلَ الرِّشْوَةَ وَانْهَمَكَ فِي الْمَظَالِمِ وَلَا يَكْفُرُ إِلَّا إِنِ اسْتَحَلَّ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ اهـ

(Masalah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih) Apabila ada seorang raja walaupun kafir atau *dzus syaukah* menjadikan pemimpin seseorang yang tidak ahli dalam bidang *qadla* (memutuskan sebuah hukum) seperti orang yang *taqlid* pada orang bodoh, hamba sahaya (budak), seorang perempuan, dan orang *fasiq*, akan tetapi telah diketahui ke*fasiq*annya maka menurut keterangan yang jelas dari pendapat Ibnu Hajar, beliau yakin tidak ada perbedaan. Sedangkan pemerintahannya sah/berlanjut dikarenakan darurat apabila sesuai dengan hukum yang benar walau disana terdapat seorang *mujtahid* yang adil menurut *qaul mu'tamad* agar urusan kemaslahatan umat tidak sampai kosong. Adapun apabila disana tidak ada orang yang patut dengan gambaran sulit untuk menemukannya, maka pemerintahan *muqallid* dan orang yang *fasiq* sah dengan pasti walaupun tidak mempunyai *syaukah* (kekuatan). Tetapi harus mendahulukan orang yang lebih utama dan sebagainya. Dalam

kondisi sulit mereka tak bisa dilengserkan sebab hilangnya *syaukah*.

(Masalah Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhar al-Yamani) Para *Qadhi* (Hakim) yang didirikan dari pemerintahan *dzus syaukah* jika mereka ahli dalam bidang hukum maka sudah jelas. Namun jika tidak ahli, maka putusan hukum mereka *nufudz* (dianggap) dengan terpaksa (*dharurat*) walaupun orang *fasiq*. Meskipun demikian wajib bagi *dzus syaukah* untuk memilih orang yang lebih sedikit tingkat ke*fasiq*annya ketika sifat *fasiq* ini sudah merajalela, seperti halnya *qadli* adalah saksi. Maka ketika demikian keadaannya, jika ditinjau dari hukum al-Qur'an, as-sunnah, dan *ijma'* ulama maka *Qadhi* tersebut termasuk orang yang maksiat dari sisi sebab tidak memenuhi persyaratan, yaitu adil. Sesungguhnya ulama menganggap sahnya putusan hukum walaupun tidak memenuhi syarat karena *dharurat* tidak adanya hukum. Jika *qadli* memutuskan hukum tidak sesuai dengan *qadla'ul qadli* (Allah ﷻ) maka tidak diragukan lagi bahwa putusan hukumnya tidak sah dan *fasiq*nya semakin bertambah apalagi jika dia makan uang suap dan tergiur dalam kedzaliman. Tapi dia tidak kufur kecuali jika menghalalkan sesuatu yang telah disepakati keharamannya oleh agama secara *ma'lum dharuri*.

c. *Ta'liqat at-Tadzhib*, VII/271-275:

قَالَ السَّعْدُ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِطُرُقٍ أَحَدُهَا بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ ... وَالثَّالِثُ الْقَهْرُ وَالْإِسْتِيلَاءُ فَإِذَا مَاتَ الْإِمَامُ وَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ مَنْ يَسْتَجْمِعُ شَرَائِطَهَا مِنْ غَيْرِ بَيْعَةٍ وَاسْتِخْلَافٍ وَقَهْرِ النَّاسِ بِشَوْكَتِهِ انْعَقَدَتِ الْخِلَافَةُ لَهُ إِذَا كَانَ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا عَلَى الْأَظْهَرِ إِلَّا أَنَّهُ يَعْصِي بِمَا فَعَلَ وَتَلْزَمُ الْمُسْلِمِينَ طَاعَةُ هَذَا الْمُتَغَلِّبِ لِلضَّرُورَةِ وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ سُلْطَةَ التَّغَلُّبِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ تَنْفُذُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَتَكُونُ أَقَلَّ حَالًا مِنَ الْفَوْضَى وَأَدْنَى مِنَ الْهَمَجِيَّةِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ السَّعْيُ لِإِزَالَتِهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَإِنْ كَانَ خَلْعُ الْمُتَغَلِّبِ سَهْلًا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفَاسِدُ وَلَا يَنْجُمُ عَنْهُ فِتَنٌ خُلِعَ بِلَا تَأْجِيلٍ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ خَلْعُهُ يَسْتَوْجِبُ الْفِتَنَ وَيَسْتَلْزِمُ الْفُرْقَةَ وَتَزِيدُ بِسَبَبِهِ الْمَفْسَدَةُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فَالْوَاجِبُ الصَّبْرُ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ اهـ

Syaikh as-Sa'ad berkata dalam *Syarh Kitab al-Maqasid*: "*Pemerintahan bisa sah dengan beberapa metode: 1. Dilantik oleh ahlul halli wal 'aqdi (ulama, kepala, dan pimpinan golongan) ... 4. Dipaksa dan mempunyai kekuasaan*

ketika imam meninggal dunia dan sulit mencari orang yang memenuhi syarat tanpa adanya pelantikan, pergantian pemimpin, dan paksaan manusia sebab kekuasaannya (syaukah), maka pergantian (khilafah) tersebut sah baginya ketika dia fasiq atau tidak mengerti menurut qaul adzhar, tetapi dia maksiat dengan apa yang dia telah lakukan, dan bagi kaum muslimin wajib taat pada orang yang menang ini karena dlarurat. Ini artinya pemerintahan dengan cara kemenangan disamakan dengan makan bangkai yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, mafsadahnya lebih sedikit daripada chaos (kekacaubalauan) dan kebiadapan tanpa pemerintahan. Konsekuensinya adalah wajib berusaha menghilangkannya ketika situasi memungkinkan. Sehingga bila melengserkan orang yang menang itu mudah dan tidak menimbulkan berbagai mafsadah dan fitnah sebab pelengserannya, dia harus dilengserkan tanpa menunda-nunda. Adapun apabila pelengseran itu berimbas pada fitnah, perpecahan, dan sebab pelengseran tersebut mafsadahnya lebih besar dari maslahahnya, maka wajib bersabar, dan kondisi darurat bisa membolehkan hal-hal yang diharamkan."

383. Sistem *Khilafah* dan Demokrasi

Deskripsi Masalah

Faham keagamaan Islam bertipe *ekstren* menunjuk sistem *khilafah* sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang Islami dan *kaffah*, sedang demokrasi yang cenderung menawarkan pilihan sikap dipandang tak dikenal dalam Islam, karena hal itu mengurangi loyalitas pada syari'ah.

Pertanyaan

a. Apakah sistem *khilafah* dalam pemerintahan yang Islami merupakan konsep baku dan tunggal?
b. Tidak bijakkah demokrasi diintregasikan untuk membangun suasana kondusif pada struktur masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika?

Jawaban

a. Sistem *khilafah* merupakan masalah *ijtihadiyah* sebagaimana hasil keputusan hukum yang pada Konferwil Genggong tahun 2007.
b. Termasuk bijaksana selama tidak bertentangan dengan *ruh asy-syar'i* sebagai bentuk *akhlaqul karimah.*

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Ghaits al-Hami' 'ala Syarh Jam'u al-Jawami'*, 790:

قُلْتُ: مُرَادُهُ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ نَصًّا أَوْ تَصْرِيحًا كَمَا قَدَّمْتُهُ وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنُصَّ عَلَى خَلِيفَةٍ وَهُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ اهـ

Saya berkata: *"Maksudnya Nabi ﷺ tidak mengganti nash atau penjelasan, sebagaimana aku dahulukan."* Dan sungguh an-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*: *"Di situ ada dalil bahwa Nabi ﷺ tidak menegaskan pada khalifah, yaitu menurut versi ijma' Ahlussunnah dan selain mereka."*

b. *Al-Mashdar as-Sabiq*, 17:

لَقَدْ قَرَّرَ الْقُرْآنُ تَشْرِيْعًا وَحُدُوْدًا وَحَلَّلَ وَحَرَّمَ وَفَرَضَ فَرَائِضَ مِنْهَا مَا يَقُوْمُ بِهِ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ عَمَلٌ جَمَاعِيٌّ وَمِنْهَا مَا يَحْتَاجُ فِيْ تَنْفِيْذِهِ إِلَى مَنْ يَتَوَلَّى الْأَمْرَ فِيْهِ وَقَدْ نَصَّ الْقُرْآنُ بِصَرِيْحِ الْعِبَارَةِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى طَاعَةِ هَؤُلَاءِ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ... كَمَا نَدَّدَ الْقُرْآنُ بِالْاِسْتِبْدَادِ وَالْاِسْتِكْبَارِ وَأَثْنَى عَلَى الشُّوْرَى وَالْإِحْسَانِ وَالْعَدْلِ ... وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنُصَّ لَا عَلَى أُمَّةِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ أَنْ يَتَطَابَقَ مَعَهَا مِلْكُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَوْلَةُ الْإِسْلَامِ وَلَا عَلَى مَنْ يَخْلُفُ الرَّسُوْلَ فِيْ تَدْبِيْرِ شُؤُوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا حَتَّى عَلَى ضَرُوْرَةِ أَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ مَنْ يَخْلُفُهُ فِيْ ذَلِكَ بَلْ تَرَكَ الْمَسْأَلَةَ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَكَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتُمْ أَدْرَى بِشُؤُوْنِ دُنْيَاكُمْ اهـ

Dalam al-Qur'an telah ditetapkan *syari'at*, batasan-batasan, halal-haram, dan beberapa kewajiban; baik yang bersifat individual, kelompok, atau kewajiban yang realisasinya membutuhkan orang yang menangani. Al-Qur'an telah menjelaskan kewajiban menaati mereka *"Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada allah dan taatlah kalian kepada rasul dan pada orang-orang yang menangani urusan kalian"*. Sebagaimana al-Qur'an mencela perbuatan keras kepala, sombong, serta memuji musyawarah, perbuatan baik dan adil. Tapi, al-Qur'an tidak menetapkan kewajiban bagi umat Islam melakukan hal tersebut dalam lingkup kerajaan Islam ataupun pemerintahan Islam dan tidak pula mewajibkan pengangkatan *khalifah* yang mengatur urusan umat walaupun dalam keadaan darurat. Semua masalah umat diserahkan pada umat Islam itu sendiri. Seakan-akan hal ini sudah tercakup dalam sabda Nabi ﷺ: *"Kamu sekalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"*.

c. *Ad-Din wa as-Daulah wa Tathbiq asy-Syari'ah li Muhammad Abid al-Jabiri*, 69:

وَأَمَّا الْعُنْصُرُ الثَّالِثُ فَهُوَ أَنَّ الْخِلَافَةَ بِحَسَبِ رَأْيِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنَّمَا تَكُوْنُ بِالْاِخْتِيَارِ وَلَيْسَ بِالنَّصِّ، ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا دَامَ الصَّحَابَةُ قَدْ تَدَاوَلُوْا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ،

وَاخْتَلَفُوْا ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَتَابَعُوْا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَعْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يَعْهَدْ إِلَى أَحَدٍ بِالْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِهِ غَيْرَ أَنَّ الْإِخْتِيَارَ فِيْ نَظَرِيَّةِ الْخِلَافَةِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا يَتَجَاوَزُ تَقْرِيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنُصَّ لِأَيِّ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. أَمَّا كَيْفِيَّةُ اخْتِيَارِ الْخَلِيْفَةِ فَهَذَا مَوْضُوْعٌ تَقَرَّرَ فِيْهِ مَوَازِيْنُ الْقُوَى. فَمَنْ قَامَ يَطْلُبُ الْخِلَافَةَ لِنَفْسِهِ وَغَلَبَ بِشَوْكَتِهِ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ حَوْلَهُ رَاضِيْنَ أَوْ مُكْرَهِيْنَ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ اهـ

Unsur ketiga yaitu bahwa *khalifah* menurut *Ahlussunnah* merupakan sebuah pilihan, bukan *nash*. Karena pada zaman para sahabat telah terjadi beberapa pergantian kekuasaan setelah Rasulullah ﷺ wafat. Mereka berselisih kemudian sepakat dan mem*baiat* sahabat Abu Bakar as-Shiddiq. Sebab hal tersebut (yakni Rasulullah ﷺ tidak menetapkan kekhalifahan pada seseorang setelah beliau wafat) bukan pilihan sistem *khilafah* menurut *Ahlussunnah wal jama'ah* tidak sampai menetapkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengangkat seseorang setelahnya. Adapun metode pemilihan *khalifah* harus ditetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, orang yang sanggup menguasai dan sanggup membuat masyarakat menaatinya, baik rela maupun terpaksa maka dia adalah seorang *khalifah*.

d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VI/661-662:

الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى أَوِ الْخِلَافَةُ أَوْ إِمَارَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ كُلُّهَا تُؤَدِّيْ مَعْنًى وَاحِدًا وَتَدُلُّ عَلَى وَظِيْفَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ السُّلْطَةُ الْحُكُوْمِيَّةُ الْعُلْيَا وَقَدْ عَرَّفَهَا عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ بِتَعَارِيْفَ مُتَقَارِبَةٍ فِيْ أَلْفَاظِهَا مُتَّحِدَةٍ فِيْ مَعَانِيْهَا تَقْرِيْبًا عِلْمًا بِأَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ صِفَةُ الْخِلَافَةِ وَإِنَّمَا الْمُهِمُّ وُجُوْدُ الدَّوْلَةِ مُمَثَّلَةً بِمَنْ يَتَوَلَّى أُمُوْرَهَا وَيُدِيْرُ شُؤُوْنَهَا وَيَدْفَعُ غَائِلَةَ الْأَعْدَاءِ عَنْهَا اهـ

Imamatul 'Udzma, khilafah, dan *imamatul mukminin* memiliki makna yang sama dan memiliki tujuan yang sama pula yaitu *sulthanah hukumiyah 'ulya*. Para ulama mendefinisikan dengan definisi yang berbeda-beda redaksinya namun substansinya sama, yaitu kekhalifahan bukan suatu syarat. Yang paling vital ialah wujudnya sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang mampu menguasai dan mengurusi urusan pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara dari serangan musuh.

e. *Al-Jihad fi al-Islam*, 81:

يُلَاحَظُ مِنْ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ أَنَّ تَطْبِيْقَ أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَيْسَ شَرْطًا

لاعْتِبَارِ الدَّارِ دَارَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنَّهُ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ دَارِ الْإِسْلَامِ فِيْ أَعْنَاقِ الْمُسْلِمِيْنَ. فَإِذَا قَصَّرَ الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ إِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِهَا فِيْ دَارِهِمْ الَّتِيْ أَوْرَثَهُمُ اللهُ إِيَّاهَا فَإِنَّ هَذَا التَّقْصِيْرَ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا دَارَ الْإِسْلَامِ وَلَكِنَّهُ يُحَمِّلُ الْمُقَصِّرِيْنَ ذُنُوْبًا وَأَوْزَارًا اهـ

Dapat diketahui dari hukum-hukum ini bahwa perealisasian hukum-hukum syari'at Islam bukanlah syarat distatuskannya suatu negara sebagai *Darul Islam*. Namun hal tersebut merupakan hak *Darul Islam* yang ditetapkan kepada kaum muslim. Ketika kaum muslim gegabah dengan tidak menerapkan hukum-hukum Islam yang telah diwariskan Allah di negara mereka. Maka kecerobohan ini tidak sampai mengubah status *Darul Islam*. Akan tetapi kaum muslim menanggung dosa atas kecerobohannya.

f. *Syarh Sullam Taufiq:*

مَا الْمُرَادُ بِخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ قَالَ الْمُوَافَقَةُ لِلنَّاسِ مَا عَدَا الْمَعَاصِيَ اهـ

Apa maksud pergauilah manusia dengan budi pekerti yang baik? Ali berkata: *"Yaitu menyesuaikan pada manusia selain urusan maksiat."*

g. *At-Tasyri' al-Jana'i*, I/223:

إِذَا الْقَوَانِيْنُ وَاللَّوَائِحُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى نُصُوْصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَوْ مُتَمَشِّيَةٌ مَعَ مَبَادِئِ الشَّرِيْعَةِ الْعَامَّةِ وَرُوْحِهَا التَّشْرِيْعِيَّةِ وَجَبَتِ الطَّاعَةُ لَهَا وَحَقَّتِ الْعُقُوْبَةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا أَمَّا إِذَا جَاءَتِ الْقَوَانِيْنُ وَاللَّوَائِحُ خَارِجَةً عَلَى نُصُوْصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَوْ خَارِجَةً عَلَى مَبَادِئِ الشَّرِيْعَةِ الْعَامَّةِ وَرُوْحِهَا التَّشْرِيْعِيَّةِ فَهِيَ قَوَانِيْنُ وَلَوَائِحُ بَاطِلَةٌ بُطْلَانًا مُطْلَقَةً وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُطِيْعَهَا بَلْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُحَارِبَهَا وَسَنُبَيِّنُ فِيْمَا يَلِيْ أَسْبَابَ هَذَا الْبُطْلَانِ بَعْدَ أَنْ نَتَكَلَّمَ عَنْ نَظَرِيَّةِ الْبُطْلَانِ ذَاتِهَا اهـ

Undang-undang yang sesuai dengan *nash* al-Qur'an dan sunnah atau sesuai dengan pokok-pokok syari'at umum yang luhur wajib ditaati dan orang yang melanggar syari'at berhak untuk dihukum. Undang-undang yang keluar dari *nash* al-Qur'an dan sunnah atau keluar dari pokok ajaran syari'at umum dan seluruhnya maka undang-undang itu merupakan undang-undang yang bathil. Tidak diwajibkan bagi seorang pun untuk menaatinya. Bahkan diwajibkan bagi setiap muslim untuk menentangnya dan mencela sisi kebathilannya.

384. Memproses Qurban Menggunakan Fasilitas Masjid

Deskripsi Masalah

Sering kita jumpai di masyarakat orang menyerahkan hewan kurban ke masjid dan atau kepada takmir masjidnya. Di antara *sighat* yang disampaikan oleh orang yang akan berkurban *"Hewan kurban ini saya serahkan ke masjid, atau hewan kurban ini saya serahkan ke takmir masjid"*. Hewan yang sudah diterima terkadang ditempatkan di halaman masjid, begitu pula penyembelihannya, pembolengannya dan proses pembagiannya. Orang-orang yang terkait dengan penyembelihan kurban tersebut biasanya tak lepas dari pemanfaatan fasilitas barang-barang masjid seperti air jeding masjid, alas dan lain-lain.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum menyembelih, menempatkan, memboleng dan membagi-bagikan daging kurban di halaman masjid sebagaimana deskripsi di atas?
b. Bagaimana hukum menggunakan fasilitas masjid seperti peralatan milik masjid, jeding dan lain-lain?
c. Siapakah yang menjadi wakil dalam kasus di atas?

Jawaban

a. Boleh selama ada *qarinah* yang membolehkan seperti tidak adanya protes dari jamaah.
b. Diperbolehkan selama tidak memindah peralatannya pada tempat yang tidak tergolong masjid dan mempertimbangkan *'urf* (kebiasaan)nya.
c. Orang yang mengurusi proses penyembelihan dan pembagiannya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 63:

(مَسْأَلَةٌ ب) لَيْسَتِ الْجَوَابِيُّ الْمَعْرُوْفَةُ وَزَوَايَاهَا مِنْ رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ وَلَا حَرِيْمِهِ بَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ لِمَا وُضِعَتْ لَهُ وَيَسْتَعْمِلُ كُلٌّ عَلَى مَا عُهِدَ فِيْهِ بِلَا نَكِيْرٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْبَوْلُ فِيْ مَطَارِيْهَا وَمُكْثُ الْجُنُبِ فِيْهِمَا، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ نَصِّ مَنْ وَاقَفَهَا إِذِ الْعُرْفُ كَافٍ فِيْ ذَلِكَ، وَيَجُوْزُ الْاِسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ الْخَفِيْفَةِ مِنْهَا وَأَمَّا الْمَمَرُّ مِنَ الْمَطَاهِرِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَا اتَّصَلَ بِالْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ وَمَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيْقٍ مُعْتَرِضَةٍ فَلَا وَأَطْلَقَ ابْنُ مَرْزُوْعٍ عَدَمَ الْمَسْجِدِيَّةِ فِيْهِ مُطْلَقًا لِلْعُرْفِ اهـ

(Masalah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih) Beberapa tempat air yang telah dikenal dan sudut-sudutnya itu bukan termasuk bagian serambi masjid dan halamannya, akan tetapi tempat tersendiri saat dibangun. Dan masing-masing dipakai sesuai apa yang diketahui tanpa diingkari, maka boleh pipis di ruangan tempat air. Dan diamnya orang *junub* di beberapa tempat air dan sudut-sudutnya. Masalah status tempat air termasuk masjid atau bukan, hal itu tanpa membutuhkan kejelasan dari pihak yang mewakafkan, karena kebiasaan itu sudah dianggap cukup. Dan juga *istinja'* dan membasuh *najis mukhafafah* dari tempat air. Sedangkan tempat lewat menuju masjid yang suci, yaitu tempat yang bersambung dari masjid itu termasuk masjid, sedangkan tempat yang terpisah dengan jalan yang melintang itu bukan termasuk masjid. Ibnu Mazruq berpendapat bahwa tempat yang bersambung dan yang terpisah dari masjid itu semuanya bukan masjid karena *'Urf*.

b. *Ghayah Talkhish al-Murad*, 94-95 [Dar al-Fikr]:

(مَسْئَلَةٌ) مَسْجِدٌ بِجَانِبِهِ مَوْضِعٌ فِي طَرَفِهِ دَاخِلٌ فِي حَدِّهِ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ حُدُوْثُهُ أَوْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ مُرْتَفِقَاتِهِ بِأَنْ كَانَتْ فِيْهِ زِيَادَةُ نَفْعٍ لَهُ كَمَنْ مَرِضَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ أَوِ اسْتَمْطَرَدَ وَهُوَ بِالْبِرْكَةِ أَوِ الْمُسْتَحِمِ يَجْلِسُ فِيْهِ وَيُسْرِجُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْاِرْتِفَاقَاتِ لَمْ يَجُزْ لِلنَّاظِرِ وَلَا لِغَيْرِهِ تَغْيِيْرُهَا وَجَعْلُهَا بِرْكَةَ الْمَسْجِدِ وَلَا غَرْسُ شَجَرٍ فِيْهَا لِأَنَّ مَنَافِعَ الْمَوْضِعِ الْمَذْكُوْرِ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْاِنْتِفَاعِ الْمَذْكُوْرِ ...وَإِذَا وُجِدَ مَكَانٌ غَيْرُ مَسْجِدٍ يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعًا خَاصًّا وَدَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَعْنٍ وَلَا إِنْكَارٍ حُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ اهـ

(Masalah) Sebuah masjid di sampingnya ada tempat yang ujungnya masuk batasan masjid, sementara berbagai *qarinah* menunjukkan bahwa tempat itu termasuk bagian dari masjid, sekiranya pembangunannya tidak diketahui, atau berbagai *qarinah* itu menunjukkan bahwa tempat tersebut termasuk fasilitas pendukung masjid, yakni ada kemanfaatan yang lebih baginya, seperti orang sakit dari sekolah atau yang mencari kesegaran di kolam, atau orang sakit panas duduk di tempat itu dan menyalakan lampu di malam hari, dan lainnya dari berbagai fasilitas pendukung, maka bagi *Nazhir* dan lainnya tidak boleh mengubahnya menjadi kolam masjid, dan tidak boleh menanam pohon di situ, sebab berbagai manfaat tempat tersebut menjadi hak dimanfaatkan seperti itu ... Jika ditemukan suatu tempat selain masjid yang dimanfaatkan secara khusus, sementara *qarinah* menunjukkan begitu tanpa ada cela dan pengingkaran, maka tempat itu dihukumi untuk hal seperti itu.

c. *Hasyiyah I'anah ath-Thalibin*, 1/69:

(قَوْلُهُ يَحْرُمُ التَّطَهُّرُ بِالْمُسَبَّلِ لِلشُّرْبِ) أَيْ أَوْ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَمَعَ الْحُرْمَةِ يَصِحُّ الْوُضُوءُ. (قَوْلُهُ وَكَذَا بِمَاءٍ جُهِلَ حَالُهُ) أَيْ وَكَذَلِكَ حَرُمَ التَّطَهُّرُ بِمَاءٍ لَمْ يُدْرَ هَلْ هُوَ مُسَبَّلٌ عَنِ الشُّرْبِ أَوْ لِلتَّطَهُّرِ. وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْوَقْفِ أَنَّهُ حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ قَالَ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلُ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ ثُمَّ قَالَ وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الطَّنْبَدَاوِيُّ عَنِ الْجَوَابِي وَالْجِرَارِ الَّتِي عِنْدَ الْمَسَاجِدِ فِيهَا الْمَاءُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ لِلشُّرْبِ أَوْ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ أَوِ الْمَسْنُونِ أَوْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ فَأَجَابَ أَنَّهُ إِذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ مَوْضُوعٌ لِتَعْمِيمِ الْاِنْتِفَاعِ جَازَ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرْبِ وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا وَمِثَالُ الْقَرِينَةِ جَرَيَانُ النَّاسِ عَلَى تَعْمِيمِ الْاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ فَقِيهٍ وَغَيْرِهِ إِذِ الظَّاهِرُ مِنْ عَدَمِ النَّكِيرِ أَنَّهُمْ أَقْدَمُوا عَلَى تَعْمِيمِ الْاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ بِغُسْلٍ وَشُرْبٍ وَوُضُوءٍ وَغَسْلِ نَجَاسَةٍ فَمِثْلُ هَذَا إِيقَاعٌ يُقَالُ بِالْجَوَازِ وَقَالَ إِنَّ فَتْوَى الْعَلَّامَةِ عَبْدِ اللهِ بَامَخْرَمَةَ يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ اهـ

(Haram bersuci dengan air yang disediakan untuk diminum) maksudnya atau dengan air yang di*ghasab*. Hukum haram ini tetap sah wudlunya (begitu juga air yang tidak diketahui statusnya) yakni begitu juga haram bersuci menggunakan air yang tidak diketahui statusnya, apakah air itu disediakan untuk minum atau untuk bersuci. *Syarih* akan menjelaskan di *Bab Wakaf* yang isinya bahwa ketika pihak *waqif* menjadikan umum (global) pada syaratnya maka harus mengikuti *'Urf* (kebiasaan) yang berlaku di masanya pihak *waqif*. Dengan begitu tidak dibolehkan selain meminum di dalam wakafan bejana air yang disediakan untuk minum dan tidak boleh memindah air dari bejana walau untuk meminumnya. *Syeikh al-Allamah* ath-Thandawi pernah ditanya tentang permasalahan air yang ada di tempat air dan bejana air yang ada di samping masjid jika tidak diketahui statusnya apakah termasuk barang wakafan untuk diminum, wudlu, mandi wajib, mandi sunah atau digunakan untuk membasuh masjid; maka dijawab oleh beliau: *"Sekiranya ada indikasi (qarinah) air itu digunakan keumuman untuk di ambil kemanfaatanya maka dibolehkan segala sesuatu yang telah disebutkan baik untuk minum, membasuh*

najis, mandi junub dan lain-lain." Contoh *qarinah* atas keumumannya yaitu berlakunya masyarakat atas keumuman memanfaatkan air tanpa ada protes (ingkar) baik dari orang yang faham ilmu fikih (*faqih*) atau yang lainnya karena hukum *dlahir* tidak adanya protes, ulama ahli fikih lebih mengutamakan keumuman mengambil manfaat air untuk mandi, minum, wudlu, dan membasuh najis. Maka contoh yang terjadi ini hukumnya boleh dan beliau berkata: *"Bahwa fatwa al-Alamah Abdullah Ba Makhramah sinkron atau sesuai dengan itu semua."*

d. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/266:

وَسُئِلَ عَنِ الْمَاءِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ لِلطُّهْرِ فِي الْمَسَاجِدِ عِنْدَنَا هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ نَقْلُهُ إِلَى خَلْوَتِهِ وَادِّخَارُهُ فِيهَا لِلطُّهْرِ بِهِ مَعَ مَنْعِ النَّاسِ مِنْهُ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَهَلْ يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَاءٍ أَوْ وَقَفَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الطُّهُورُ بِمَسْجِدٍ كَذَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ مِنْهُ لِطَهَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا مُنِعَ النَّاسُ مِنْهُ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسَبَّلَ يَحْرُمُ نَقْلُهُ عَنْهُ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ كَالْخَلْوَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّ الْوَاقِفَ أَرَادَ ذَلِكَ تَكْثِيرًا لِثَوَابِهِ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْصُرُ عَمَّا يُفْهِمُ ذَلِكَ هَذَا كُلُّهُ إِنْ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيَعْلَمْهُ وَإِلَّا نَزَلَ وَقْفُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ اهـ

Penulis ditanya tentang air yang disedekahkan untuk bersuci di masjid; menurut kita (*asy-Syafi'iyyah*) apakah boleh bagi seseorang, memindah air ke tempat sembunyinya (bilik) dan menyimpannya untuk bersuci dan melarang orang lain menggunakannya, dan hajat air itu di masjid. Apakah boleh, apabila tidak ada air atau tidak. Maka ia menjawab: sungguh orang yang bersedekah air, atau mewakafkan perkara untuk digunakan bersuci di masjid. Demikian itu, tidak boleh memindah air darinya, untuk bersuci dan tidak untuk selainnya. Baik melarang orang lain menggunakan air atau tidak, karena air yang disediakan itu haram dipindahkan ke tempat lain yang tidak layak, seperti tempat sembunyi dalam pertanyaan. Ya, orang yang masuk masjid, dan berwudlu dari airnya, tidak wajib menjalankan shalat di dalam masjid itu, meskipun mungkin *waqif* menghendaki begitu, untuk memperbanyak pahalanya. Karena lafalnya itu ringkas dari sesuatu yang memahamkan hal itu. Semua ini, jika *urf* di zaman *waqif* tidak berlaku, dan ia mengetahuinya. Jika tidak, maka waqafnya menempati padanya, karena *urf* ditempatkan di tempat syaratnya.

e. *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, 420:

شُرُوْطُ الْوَكِيْلِ اثْنَانِ أَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحَ التَّصَرُّفِ فِيْمَا وُكِّلَ فِيْهِ فَلَا يَجُوْزُ تَوْكِيْلُ الصَّبِيِّ إِلَّا فِي الْأُمُوْرِ الْبَسِيْطَةِ كَالْإِذْنِ فِي دُخُوْلِ الدَّارِ وَإِيْصَالِ الْهَدِيَّةِ وَكَذَا الْمَجْنُوْنُ أَيْضًا لَا يَجُوْزُ تَوْكِيْلُهُ. الشَّرْطُ الثَّانِيْ تَعْيِيْنُهُ فَلَوْ قَالَ لِشَخْصَيْنِ وَكَّلْتُ أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَمَّا تَوَكُّلُ شَخْصَيْنِ وَأَكْثَرَ فَجَائِزٌ فَيَقُوْلُ لَهُمَا وَكَّلْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا فِيْ كَذَا وَكَذَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ عِنْدَ غَيْبِ الْآخَرِ أَوْ قِيَامِ عُذْرٍ بِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ تَعَيُّنًا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمَ وَلَوْ تَصَرَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ فِي الْبَيْعِ إِذَا وَكَّلَهُمَا فِيْ بَيْعِ شَيْءٍ انْعَقَدَ بَيْعُ الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَتَّضِحْ أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ انْعَقَدَ بَيْعُ الْأَكْثَرِ ثَمَنًا لِأَنَّ مِنْ شُرُوْطِ الْوَكِيْلِ أَنْ لَا يَبِيْعَ إِلَّا بِمَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بَطَلَ بَيْعُهُ وَإِنْ تَسَاوَتِ الْقِيْمَةُ وَلَمْ يَتَّضِحِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْبُغْيَةِ لِمَنْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدٍ أُوْقِفَ حَتَّى يَصْطَلِحَا وَنُقِلَ فِيْ نَظِيْرَتِهَا عَنِ التُّحْفَةِ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ هُوَ الْبُطْلَانُ اهـ

Syarat-syarat *wakil* ada dua, yaitu: sah pen*tasharrufan* dalam perkara yang diserahkan padanya. Maka tidak boleh mewakilkan kepada anak kecil kecuali dalam beberapa kasus sederhana seperti izin masuk rumah dan menyampaikan pemberian. Begitu pula orang gila, tidak boleh mewakilkan padanya. Syarat kedua: menentukan wakil, jika seseorang berkata pada dua orang *"Saya mewakilkan kepada salah satunya"* maka sungguh tidak boleh. Adapun mewakilkan kepada dua orang bahkan lebih itu boleh, maka berkata pada keduanya *"Saya mewakilkan kepada fulan dan fulan dalam urusan begini dan begitu"*. Bagi masing-masing keduanya mengalokasian ketika yang lain gaib atau ada *udzur* dengan lafal ini karena menjadi tertentu, dan ia boleh beramal pada hari itu. Apabila masing-masing mengalokasikan sendiri dalam penjualan maka sah penjualan pertama. Bila tidak jelas yang lebih awal dari keduanya maka sah penjualan yang lebih banyak harganya, karena syarat wakil adalah tidak menjual kecuali dengan sesuatu yang ada maslahat bagi *muwakkil*nya. Jika ia menjual kurang dari harga standar atau dengan kerugian yang besar maka batal penjualannya. Jika harganya sama dan tidak jelas penjual pertama, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi berkata dalam *al-Bughyah*: *"Hal itu bagi orang yang harta ada ditangannya, jika tidak ada dalam genggaman seseorang maka dimauqufkan hingga keduanya beristhilah."* Kasus serupa dinukil dari *at-*

Tuhfah: "Sungguh yang lebih cepat ialah batal."

f. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 151:

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ لِآخَرَ بِعْ هَذَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكَ مِنْ رِبْحِهِ الرُّبْعُ مَثَلًا فَسَدَتِ الْوَكَالَةُ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِجَهَالَةِ الْجُعْلِ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ رَبِحَ أَمْ لَا وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِمَكَانِ كَذَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ كَذَا صَحَّ وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ كَامِلًا بِإِتْيَانِهِ بِجَمِيعِ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَشْتَرِ مَا أُمِرَ بِهِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ قِسْطَهُ كَالْأَجِيرِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْعَمَلِ أَمْ لَا؟ كَالْجُعْلِ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ مَحَلُّ نَظَرٍ نَعَمْ قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا حَكَاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيهِ عَنِ الْعِمْرَانِيِّ أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِحَمْلِ كِتَابٍ إِلَى آخَرَ وَرَدِّ جَوَابِهِ فَأَوْصَلَهُ وَلَمْ يَرُدَّ جَوَابَهُ فَلَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ ذَهَابِهِ اهـ

(Masalah) Seseorang mengatakan pada orang lain *"Jualah barang ini di tempat ini dan kamu mendapatkan ¼ keuntungan dari penjualan ini"* maka akad *wakalah*nya batal karena tidak sahnya *shighat* sebab tidak pastinya upah dan *tasaruf*nya dianggap sah karena keumuman izin dari orang yang mewakilkan. Dan orang yang menjual mendapat upah standar, baik hasil penjualannya untung atau tidak. Jika seseorang mewakilkan pada orang lain untuk menjual barang di suatu tempat dan membeli dengan *tsaman*nya maka sah dan berhak memperoleh upah sempurna dengan melakukan seluruh perintahnya dari menjual dan membeli. Jika seseorang menjual dan tidak membeli perkara yang diperintahkan maka apakah ia berhak atau tidak, mendapat bagiannya seperti buruh sulit melaksanakan sebagian dari tugas-tugasnya? Jawab: masalah ini masih dipertimbangkan menurut Ibnu Hajar dalam kitab *Fatawi*-nya, *"Jika seseorang menyewa atau mengontrak orang lain untuk mengirimkan surat dan mengirim jawabannya, tetapi orang yang dikontrak tadi hanya mengirim surat saja tanpa mengirim jawabannya maka ia mendapatkan upah sesuai nilai ia mengirim surat."*

385. Anggapan Mengamen Lebih Baik Daripada Meminta-Minta

Deskripsi Masalah

Di kalangan masyarakat tersebut anggapan bahwa meminta-minta dengan cara mengamen lebih mulia dari pada pengemis, padahal tidak jarang para pengamen menggunakan alat-alat musik yang diharamkan

oleh syara'. Di suatu daerah ada Perda yang mengatur larangan mengamen dan mengemis serta memberi kepada mereka di jalanan.

Pertanyaan

a. Betulkah anggapan masyarakat tersebut?
b. Bagaimana pandangan fikih tentang Perda di atas?
c. Bagaimana hukum melanggar Perda tersebut menurut pandangan fikih?

Jawaban

a. Tidak benar karena sebagaimana Bahtsul Masail Syuriah NU 1996 telah memutuskan bahwa pengamen dihukumi sama dengan pengemis. Kecuali pengamen yang memenuhi beberapa ketentuan berikut:
   1) Dikontrak dengan waktu yang ditentukan.
   2) Bayaran yang disepakati.
   3) Tidak menggunakan alat *malahi muharramah* (alat musik yang diharamkan).
   4) Syair yang dinyanyikan menumbuhkan semangat kebaikan.
b. Boleh dengan berpijak pada *maslahah* (kemaslahatan umum).
c. Hukumnya haram, karena kebijakan yang mengandung kemaslahatan umum harus ditaati *dhahiran wa bathinan* (lahir batin).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Kifayah al-Akhyar*, I/298:

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ ... وَقَوْلُنَا قَابِلَةٌ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ فِيْهِ احْتِرَازٌ عَنِ اسْتِئْجَارِ آلَةِ اللَّهْوِ كَالطُّنْبُوْرِ وَالْمِزْمَارِ وَالرَّبَابِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ اسْتِئْجَارَهَا حَرَامٌ، وَيَحْرُمُ بَذْلُ الْأُجْرَةِ فِيْ مُقَابَلَتِهَا وَيَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيْلِ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ، وَكَذَا لَا يَجُوْزُ اسْتِئْجَارُ الْمَغَانِيْ اهـ

Batasan akad sewa adalah "*akad manfaat*", yang dimaksud, diketahui, menerima penyerahan dan boleh dengan tukar ganti yang diketahui... (Ungkapan kita: "*menerima penyerahan dan boleh*"), ini mengecualikan persewaan alat-alat musik seperti drum, suling, rebab dan sejenisnya. Sesungguhnya persewaan alat-alat musik itu diharamkan. Haram juga penyerahan upah sebagai imbalan dan haram mengambilnya, karena termasuk makan harta secara bathil, begitu pula persewaan alat-alat musik lain.

b. *Hasyiyah al-Bajuri*, II/34:

وَمِنْهَا أَنَّ الْمُحْتَسِبَ يَمْنَعُ مَنْ يَكْتَسِبُ بِاللَّهْوِ وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ الْآخِذُ وَالْمُعْطِي. وَظَاهِرُهُ تَنَاوُلُ اللَّهْوِ الْمُبَاحِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ اهـ

Di antaranya, sungguh *muhtasib* harus mencegah orang yang bermain musik; *akhidz* dan *mu'thi* mendidiknya. Dhahirnya bermain musik yang diperbolehkan serta sungguh tidak termasuk perbuatan maksiat.

c. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, 162:

وَالتَّاسِعُ: أَنَّ لَهُ اجْتِهَادُ رَأْيِهِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِالْعُرْفِ دُونَ الشَّرْعِ كَالْمَقَاعِدِ فِي الْأَسْوَاقِ وَإِخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِ فِيهِ فَيُقِرُّ وَيُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ اهـ

Kesembilan: Sungguh boleh *ijtihad* dalam urusan yang berkaitan dengan *urf* bukan syara' seperti duduk-duduk di pasar dan mengeluarkan sirine kemudian mengakui dan mengingkari hasil *ijtihad* yang dilakukan.

d. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 91 [Dar al-Fikr]:

(مَسْأَلَةُ ك) يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ وَهُوَ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْمَنْدُوبَةِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالْاِسْتِقْلَالُ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبْ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيهِ كَمَا قَالَهُ م ر وَتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التُّحْفَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ مُحَرَّمًا لَكِنْ ظَاهِرًا فَقَطْ وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ أَيْضًا وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُورِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِعَدَمِ الْاِمْتِثَالِ وَمَعْنَى بَاطِنًا أَنَّهُ يَأْثَمُ اهـ قُلْتُ وَقَالَ ش ق وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَالْمَنْدُوبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ التُّنْبَاكِ إِذَا قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ خِسَّةً بِذَوِي الْهَيْآتِ وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَمَرَ نَائِبَهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِعَدَمِ شُرْبِ النَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْقَهَاوِي فَخَالَفُوهُ وَشَرِبُوا فَهُمُ الْعُصَاةُ وَيَحْرُمُ شُرْبُهُ الْآنَ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ وَلَوْ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْوُجُوبُ اهـ

(Masalah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani) Diwajibkan

melaksanakan perintah imam atas sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan seperti menyerahkan *zakat mal.* Ketika perintah tersebut tidak berhubungan dengan kekuasaan yaitu yang berupa hak-hak yang bersifat wajib atau sunnah, maka diperbolehkan menyerahkan hak tersebut pada imam dan bebas mengalokasikan sesuai dengan tempatnya dan segala yang diperintahkan (hal-hal yang bersifat mubah, makruh, haram) maka tidak wajib untuk dilaksanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh ar-Ramli. Sedangkan Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* masih ragu terhadap masalah ini, akan tetapi beliau condong pada wajibnya taat kepada imam dalam semua perintahnya meski itu haram, namun yang bersifat *dlohir* saja. Selain itu, ketika ada *maslahat* dalam perintah haram itu, yang wajib dilakukan adalah haram yang bersifat *dhohir* dan *bathin.* Jika perintahnya tidak terdapat *maslahat* maka yang wajib dilakukan hanya haram yang bersifat *dhahir.* Barometer perkara sunnah atau mubah ialah keyakinan orang yang diperintah. Arti *dhahir* adalah tidak ada dosa setelah menjalankan perintah dan arti *bathin* ada dosa setelah menjalankan perintah. Pada kesimpulannya, wajib taat kepada imam atas apa yang telah diperintahkan baik secara jelas atau tidak selama bukan perintah haram atau makruh. Perintah wajib menjadi *muakkad* dan sunnah menjadi wajib, begitu pula mubah jika terdapat *maslahat,* seperti meninggalkan rokok yang hukumnya makruh, karena mengkonsumsi tembakau dipandang rendah. Ada sebuah peristiwa di mana seorang penguasa memerintahkan wakilnya untuk memanggil orang-orang yang tidak merokok dan minum kopi di pasar. Tetapi orang yang dipanggil tersebut tidak mengindahkan panggilan imam. Bahkan mereka tetap asyik merokok dan minum kopi, maka mereka termasuk orang-orang yang bermaksiat. Pada saat ini mengkonsumsi tembakau diharamkan karena merupakan larangan imam. Seandainya imam memerintahkan sesuatu kemudian mencabut pernyataannya meskipun yang diperintahkan belum melaksanakan, maka kewajiban melaksanakan perintahnya belum gugur.

386. Penggunaan Dana Masjid

Deskripsi Masalah

Dalam kepengurusan masjid di tempat kami, pengurus masjid punya program yang disebut "Tabungan Akhirat". Tabungan akhirat ini adalah dana infaq masyarakat yang dipungut setiap bulannya oleh pengurus masjid ke rumah-rumah masyarakat. Kebanyakan anggapan masyarakat/warga dana itu adalah untuk kepentingan masjid. Tapi dalam pelaksanaannya pengurus masjid banyak memakai dana tersebut untuk membiayai kematian anggota masyarakat. Mulai dari kain kafan

hingga biaya liang kubur dan ambulance. Hingga timbul anggapan di masyarakat bahwa setiap ada kematian maka semua biaya ditanggung masjid.

Pertanyaan

a. Bolehkah biaya kematian warga ditanggung masjid dengan uang dari hasil pungutan tersebut. Padahal kebanyakan dari warga yang meninggal atau ahli keluarganya tergolong orang mampu?
b. Apabila tidak boleh bagaimana solusi terbaik, karena masyarakat terlanjur punya anggapan bahwa setiap ada kematian, masjid yang menanggung biayanya?
c. Bolehkah Imam rawatib, Khatib, Muadzin, dan lain-lain yang diangkat oleh pengurus masjid menerima *bisyarah* dari kas masjid?

Jawaban

a. Boleh karena sudah sesuai dengan tujuan pengumpulan dana dan pendistribusiannya. Sedangkan pengurus masjid itu hanya sebagai panitia. Dan bukan mengumpulkan dana atas nama masjid atau untuk masjid.
b. Bukan masjid yang menanggung biayanya, tetapi pengurus masjid yang bertanggung jawab, karena mereka sudah menghimpun dana dari masyarakat untuk kematian dimaksud.
c. Boleh karena hal itu termasuk *"Targhiban Lil-Mushalliin"* (menyemangatkan orang shalat di masjid) dan sesuai batas kemaslahatan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin,* II/183:

(فَرْعٌ) الْهَدَايَا الْمَحْمُوْلَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ مِلْكٌ لِلْأَبِ، وَقَالَ جَمْعٌ: لِلْاِبْنِ، فَعَلَيْهِ يَلْزَمُ الْأَبَ قَبُوْلُهَا، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا أَطْلَقَ الْمُهْدِيْ فَلَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَإِلَّا فَهِيَ لِمَنْ قَصَدَهُ اتِّفَاقًا، وَيَجْرِيْ ذَلِكَ فِيْمَا يُعْطَاهُ خَادِمُ الصُّوْفِيَّةِ فَهُوَ لَهُ فَقَطْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، أَوْ قَصْدِهِ، وَلَهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمْ وَلَهُ وَلَهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمَا، أَيْ يَكُوْنُ لَهُ النِّصْفُ فِيْمَا يَظْهَرُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا اعْتِيْدَ فِيْ بَعْضِ النَّوَاحِيْ مِنْ وَضْعِ طَاسَةٍ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْفَرَحِ لِيَضَعَ النَّاسُ فِيْهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى الْحَالِقِ أَوِ الْخَاتِنِ أَوْ نَحْوِهِمَا، يَجْرِيْ فِيْهِ ذَلِكَ التَّفْصِيْلُ، فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ نُظَرَائِهِ الْمُعَاوِنِيْنَ لَهُ، عَمِلَ بِالْقَصْدِ، وَإِنْ أَطْلَقَ، كَانَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْفَرَحِ، يُعْطِيْهِ لِمَنْ يَشَاءُ. وَبِهَذَا يُعْلَمُ

أَنَّهُ لَا نَظَرَ هُنَا لِلْعُرْفِ، أَمَّا مَعَ قَصْدِ خِلَافِهِ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا مَعَ الْإِطْلَاقِ فَلِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ مِنَ الْأَبِ وَالْخَادِمِ وَصَاحِبِ الْفَرَحِ، نَظَرًا لِلْغَالِبِ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ هُوَ الْمَقْصُودُ هُوَ عُرْفُ الشَّرْعِ، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْعُرْفِ الْمُخَالِفِ لَهُ، بِخِلَافِ مَا لَيْسَ لِلشَّرْعِ فِيهِ عُرْفٌ، فَإِنَّهُ تُحَكَّمُ فِيهِ الْعَادَةُ. وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَحَالَةِ الْقَصْدِ وَالْمُرَادُ يَجْرِي بَعْضُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هُنَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لِلْخَادِمِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ كَوْنِهِ لِلْأَبِ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ بَعْدَهُ اهـ

(*Sub-sub*) Hadiah yang dibawa ketika anak khitan itu milik sang ayah, tetapi sekelompok ulama berpendapat bahwa hadiah tersebut milik si anak. Letak perbedaan pendapat ialah ketika seseorang memberi hadiah tidak menentukannya untuk anak atau ayah. Apabila pemberi hadiah bertujuan kepada salah satunya maka hadiah tersebut untuk orang yang ditujunya menurut kesepakatan ulama. Hukum ini berlaku juga pada hadiah yang diserahkan kepada pelayan seorang sufi, maka hadiah itu untuk pelayan tersebut ketika tidak ada tujuan dari *muhdi* (pemberi hadiah) atau *muhdi* bertujuan memberi kepada pelayan tersebut, dan hadiah itu milik sufi ketika *muhdi* bertujuan untuk mereka. Hadiah itu untuk pelayan dan sufi jika *muhdi* bertujuan untuk keduanya, yakni separuhnya untuk pelayan menurut pendapat dzahir. Konsekuensi hukum itu, kebiasaan yang berlaku di sebagian daerah yaitu menaruh wadah yang terbuat dari tembaga di depan orang yang berpesta dengan tujuan supaya orang-orang menaruh uang ke dalamnya, kemudian uang tersebut dibagikan kepada orang yang cukur, anak yang dikhitan atau sesamanya, perincian hukum tersebut berlaku pada masalah ini. Jika *muhdi* bertujuan memberikan kepada mereka (orang cukur, anak khitan dan lain-lain) saja atau untuk teman-teman mereka yang membantu maka diberikan sesuai tujuan *muhdi*, dan jika *muhdi* tidak mempunyai tujuan secara mutlak maka uang tersebut untuk orang yang sedang berpesta, dan orang tersebut bebas memberikannya pada orang yang ia kehendaki. Dan dari sebagian keterangan di atas bisa diketahui bahwa *'urf* (adat istiadat) tidak dipandang dalam permasalahan ini, adat tidak dilihat ketika bertujuan sebaliknya. Maka hal ini sudah jelas, sedangkan adat juga tidak dipandang/dianggap ketika *muhdi* tidak bertujuan pada salah satu dari mereka secara mutlak, karena menentukan hadiah pada orang-orang yang telah disebutkan (ayah, pelayan, orang yang sedang berpesta) itu dikarenakan melihat kebiasaan bahwa merekalah yang dituju dan hal ini adalah adat menurut syara'. Maka adat syara' harus didahulukan daripada adat yang berbeda dengan syara'. Berbeda ketika

dalam masalah ini adat dijadikan pijakan hukum dalam rincian hukum ini berlaku dalam kedaan *muhdi* tidak memiliki tujuan secara mutlak ataupun dalam keadaan *muhdi* memiliki tujuan. Maksudnya sebagian hukum ini berlaku, karena dalam permasalahan ini ketika *muhdi* tidak memiliki tujuan tidak ada perbedaan pendapat hadiah tersebut milik pelayan. Berbeda dalam kasus khitan maka ada perbedaan pendapat tentang hadiah itu milik sang ayah dengan bukti penjelasan setelahnya.

b. *Fath al-Ilah al-Manan Fatawa asy-Syaikh al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Fiqhiyah Salim Sa'id Bakir Baghitsan asy-Syafi'iy at-Tarimi al-Hadhrami*, 150:

سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ أَمْوَالًا كَثِيْرَةً عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ وَهُوَ الْآنَ مَعْمُوْرٌ وَفِيْ خَزَانَةِ الْمَسْجِدِ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ الشَّيْءُ الْكَثِيْرُ فَهَلْ يَجُوْزُ إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ لِإِقَامَةِ وَلِيْمَةٍ مَثَلًا يَوْمَ الزِّيْنَةِ تَرْغِيْبًا لِلْمُصَلِّيْنَ الْمُوَاظِبِيْنَ؟ فَأَجَابَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ الْمَوْقُوْفُ عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِيْ مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ يَجُوْزُ الصَّرْفُ فِيْهِ فِي الْبِنَاءِ وَالتَّجْصِيْصِ الْمُحْكَمِ وَفِيْ أُجْرَةِ الْقَيِّمِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْإِمَامِ وَالْحُصْرِ وَالدُّهْنِ وَكَذَا فِيْمَا يُرَغِّبُ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ نَحْوِ قَهْوَةٍ وَبَخُوْرٍ يُقَدَّمُ مِنْ ذَلِكَ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ وَعَلَيْهِ فَيَجُوْزُ الصَّرْفُ فِيْ مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ لِمَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ إِذَا فَضَلَ عَنْ عِمَارَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ

Syeikh Salim bin Sa'id-*rahimahullah* pernah ditanya tentang masalah seorang lelaki yang mewakafkan harta yang banyak untuk maslahat sebuah masjid. Dan masjid itu sekarang dibangun dan di dalam modal masjid terdapat harta yang banyak dari pewakafan ini, apa dibolehkan membelanjakan harta wakafan itu untuk digunakan walimah semisal pada hari berhias supaya menyenangkan orang yang membiasakan diri shalat disitu? Kemudian beliau menjawab: *"Segala puji bagi Allah semoga Allah menunjukkan pada kebenaran, harta yang diwakafkan untuk maslahat masjid seperti dalam pertanyaan boleh dibelanjakan untuk pembangunan dan mengkapur yang tepat dan gaji orang yang mengurusi, pengajar, imam, alas masjid, dan pengharum. Begitu juga untuk menyenangkan orang-orang yang shalat misalnya kopi, wangi-wangian yang dibakar, dan dari perkara-perkara tersebut yang lebih penting harus didahulukan kemudian barulah perkara yang agak penting,"* maka mengikuti pendapat ini boleh membelanjakan untuk perkara yang tertulis di soal yang telah disebutkan oleh orang yang bertanya jika memang harta wakafan itu telah lebih dari biaya *imarah* (meramaikan/membangun) dan tidak ada kebaikan masjid yang lebih

penting dari *walimah* tersebut.

c. *Rawa'i' al-Bayan,* I/573:

ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ هُوَ بِنَاؤُهَا وَتَشْيِيْدُهَا وَتَرْمِيْمُ مَا تَهَدَّمَ مِنْهَا وَهَذِهِ هِيَ الْعِمَارَةُ الْحِسِّيَّةُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِعِمَارَتِهَا الصَّلَاةُ وَالْعِبَادَةُ وَأَنْوَاعُ الْقُرُبَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَهَذِهِ هِيَ الْعِمَارَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِيْ هِيَ الْغَرَضُ الْأَسْمَى مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ النَّوْعَيْنِ الْحِسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَالْمَقَامُ يَقْتَضِيْهِ اهـ

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *imaratul masjid* adalah membangun masjid, mengokohkan masjid,, dan memperbaiki masjid yang rusak. Dan inilah yang disebut *imarah* dalam segi fisiknya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah ﷺ yang artinya: *"Barangsiapa membangun masjid meskipun sebesar sarang burung belibis, maka Allah akan membangun sebuah rumah untuknya di surga".* Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan yang dimaksud *imaratul masjid* adalah shalat, ibadah, dan macam-macam ibadah dalam bentuk mendekatkan diri pada Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya: *"Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya".* Dan *imarah* ini adalah *imarah* non fisik (*ma'nawiyah*) yang merupakan tujuan yang lebih luhur daripada membangun masjid dan tak ada penghalang untuk mengartikan ayat tersebut bahwa *imarah* itu ada dua macam: *imarah* fisik dan non fisik. Pendapat ini ialah pilihan mayoritas ulama. Sebab lafal *imarah* itu sudah menunjukkan maksud ini, dan keadaan juga menuntut untuk memberikan makna tersebut.

d. *I'anah ath-Thalibin,* III/215:

(قَوْلُهُ: وَفِي التَّجْصِيْصِ) مَعْطُوْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْبِنَاءِ، أَيْ وَيَصْرِفُ فِي التَّجْصِيْصِ، وَمِنْهُ الْبَيَاضُ الْمَعْرُوْفُ (قَوْلُهُ: وَالسُّلَّمِ) أَيْ وَفِي السُّلَّمِ، أَيِ الَّذِيْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ (وَقَوْلُهُ: وَفِي أُجْرَةِ الْقَيِّمِ) أَيْ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ الْعِمَارَةَ (قَوْلُهُ: لَا الْمُؤَذِّنِ الخ) أَيْ لَا يَصْرِفُ لِهَذِهِ الْمَذْكُوْرَاتِ (قَوْلُهُ: إِلَّا إِنْ كَانَ الْوَقْفُ لِمَصَالِحِهِ) أَيْ إِلَّا إِنْ كَانَ الْوَقْفُ كَائِنًا عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، وَالْاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ، إِذِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ رِيْعٌ

الْمَوْقُوفِ عَلَى الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، أَوْ مُقَيَّدًا بِالْعِمَارَةِ، وَالْمُسْتَثْنَى الْوَقْفُ عَلَى الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: فَيُصْرَفُ) أَيْ رَيْعُهُ (وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِ وَالْإِمَامِ وَالْحُصْرِ وَالدُّهْنِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: لَا فِي التَّزْوِيقِ وَالنَّقْشِ) أَيْ لَا يُصْرَفُ فِيهِمَا، بَلْ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمَا مَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْتُهُ) مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ قَوْلُهُ هُوَ مُقْتَضَى الخ .وَقَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ) بَيَانٌ لِمَا، وَضَمِيرُ أَنَّهُ يَعُوْدُ عَلَى الرَّبِيعِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيِ النَّوَوِيّ (قَوْلُهُ: نَقَلَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنِ الْبَغَوِيِّ (قَوْلُهُ: إِنَّهُ يُصْرَفُ لَهُمَا) أَيِ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِمَامُ اهـ

(Ungkapan Zain ad-Din bin Abdil Aziz al-Malibari: "*Dalam pelepohan*"), di*athaf*kan pada ucapannya dalam bangunan, maksudnya diarahkan dalam pelepohan, dan di antaranya plamir yang dikenal. (Dan *salam*), maksudnya dalam pesanan, yakni yang butuh padanya di masjid. (Dan dalam upah *qayyim*), yakni karena ia menjaga *imarah*. (Bukan muadzin), maksudnya tidak dialokasikan untuk hal-hal itu. (Kecuali jika wakaf untuk kemaslahatannya), maksudnya kecuali jika wakaf itu tetap pada maslahat masjid, dan pengecualian itu terputus sebab *mustatsna minhu* itu *rai'ul mauquf* (laba wakaf) pada masjid secara mutlak atau di*qayyidi* dengan *imaratul masjid* dan *mustatsna*nya waqaf pada *mashalih*. (maka dialokasikan), yakni hasilnya. (Dalam hal itu), maksudnya yang disebut dari muadzin dan imam dan tikar dan minyak, itu karena termasuk *mashalih*. (Tidak dalam penghiasan dan pengukiran), maksudnya tidak dialokasikan untuk keduanya, bahkan jika mewakafkan pada keduanya maka tidak sah, sebab itu dilarang. (Dan perkara yang aku sebutkan), *mubtada'* dan *khabar*-nya, Yaitu tuntutan... (Dari sungguh), penjelasan pada *ma* dan *dlamir* sungguh itu kembali pada *Rabi'* (akan tetapi ia), an-Nawawi (Memindah setelahnya), yakni setelah memindah dari al-Baghawi. (Sungguh dialokasikan untuk keduanya) muadzin dan imam.

387. Pembagian Daging Qurban

Deskripsi Masalah

Setiap kali Hari Raya Idul Adha, umat Islam yang mampu, dianjurkan menyembelih hewan qurban. Di sebagian Negara, pada hari raya qurban, hewan qurban yang disembelih terlampau banyak sehingga pen*tasharruf*annya sampai ke luar negeri. Bahkan baru-baru ini, untuk menghindari agar daging qurban tidak busuk ketika dikirim keluar negeri, daging tersebut dibekukan. Konsekwensi hukum yang

terjadi dengan hal tersebut adalah pembagian daging qurban tidak tepat waktunya (setelah Hari *Tasyriq*).

Pertanyaan

a. Bagaimana pandangan fikih terhadap pembagian daging qurban di luar Hari Tasyriq?
b. Bagaimana hukum pengolahan daging qurban dalam bentuk kemasan (kornet)?
c. Bagaimana apabila daging qurban tersebut diberikan kepada non muslim?
d. Apakah ada perbedaan antara harta zakat dan qurban dalam pen-*tasharuf*-annya?

Jawaban

a. Boleh
b. Boleh dengan syarat:
   1) Ada sebagian yang mentah telah diberikan kepada fuqara
   2) Bukan *mandzurah*.
c. Tidak boleh karena syarat penerima harus muslim.
d. Jelas berbeda dalam sisi *tasharuf*nya. Antara lain; Zakat tidak boleh diberikan pada orang kaya, sedangkan Qurban Boleh. Zakat bagi *muzakki* tidak boleh makan dari zakatnya, sedangkan qurban boleh.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Mughni*, IX/359-360:

فَصْلٌ: إِذَا فَاتَ وَقْتُ الذَّبْحِ ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً وَصَنَعَ بِهِ مَا يَصْنَعُ بِالْمَذْبُوحِ فِي وَقْتِهِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ فَرَّقَ لَحْمَهَا كَانَتِ الْقُرْبَةُ بِذَلِكَ دُونَ الذَّبْحِ لِأَنَّهَا شَاةُ لَحْمٍ وَلَيْسَتْ أُضْحِيَّةً وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُسَلِّمُهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ وَلَا يَذْبَحُهَا فَإِنْ ذَبَحَهَا فَرَّقَ لَحْمَهَا وَعَلَيْهِ أَرْشُ مَا نَقَصَهَا الذَّبْحُ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ سَقَطَ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ وَلَنَا أَنَّ الذَّبْحَ أَحَدُ مَقْصُودَيِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ كَتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَهَا فِي الْأَيَّامِ ثُمَّ خَرَجَتْ قَبْلَ تَفْرِيقِهَا فَرَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَيُفَارِقُ الْوُقُوفَ وَالرَّمْيَ وَلِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَا تَسْقُطُ بِفَوَاتِهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ اهـ

Pasal: Apabila habis waktu penyembelihan, maka wajib menyembelih secara *qadla'* dan mengerjakan sesuatu sebagaimana menyembelih pada waktunya, ia diberi pilihan dalam kesunahan, apabila ia memisahkan dagingnya maka hal itu adalah bentuk ibadah, bukan penyembelihan,

karena binatang itu adalah kambing daging bukan kurban. Dengan ini, asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: *"Diserahkan pada fuqara dan tidak disembelih, jika disembelih maka harus memisahkan dagingnya dan ia harus menanggung perkara yang kurangi oleh penyembelihan, karena menyembelih itu sungguh menggugurkan dengan habisnya waktu dan menyembelih itu ada salah satu maksud korban bagi kita, sehingga tidak gugur dengan habisnya waktu seperti memisahkan daging"*. Hal itu jika seseorang menyembelihnya pada hari-hari itu kemudian keluar sebelum memisahkannya, maka ia harus memisahkan dagingnya setelah itu serta memisahkan *wukuf* dan melempar *jumrah* dan karena qurban tidak bisa gugur dengan habisnya waktu berbeda dengan hal itu.

b. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, IV/339:

(وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى سَبِيلِ التَّصَدُّقِ مِنْ أُضْحِيَةِ التَّطَوُّعِ بَعْضَهَا وُجُوبًا وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا مِنْ لَحْمِهَا بِحَيْثُ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الْاِسْمُ وَيَكْفِي الصَّرْفُ لِوَاحِدٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ. (قوله: عَلَى سَبِيلِ التَّصَدُّقِ) أَيْ لَا عَلَى سَبِيلِ الْهَدَايَةِ فَلَا يَكْفِي وَالْفَرْقُ أَنَّ مَا كَانَ لِأَجْلِ الْهَدَايَةِ يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْهُ الْإِكْرَامُ بِخِلَافِ مَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ الصَّدَاقَةَ فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الثَّوَابُ اهـ

(Memberi makan *fuqara* dan *masakin*) yang muslim, atas jalan sedekah dari kurban sunnah, sebagiannya wajib meski sedikit dari dagingnya, sekira namanya hilang dan cukup menyerahkan pada satu orang fakir atau miskin. (Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib: *"Atas jalan sedekah"*), yakni tidak atas jalan hadiah, maka tidak cukup. Bedanya tujuan dari hidayah untuk memuliakan, berbeda dengan perkara yang tujuannya sedekah maka sungguh tujuannya ialah pahala.

c. *Hasyiyah al-Bajuri*, II/301:

فَلَوْ أَخَّرَهَا فَتَلِفَتْ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ (وَيَأْكُلُ مِنَ الْأُضْحِيَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا) ثُلُثًا عَلَى الْجَدِيدِ وَأَمَّا الثُّلُثَانِ فَقِيلَ يَتَصَدَّقُ بِهِمَا، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ، وَقِيلَ يُهْدِي ثُلُثًا لِلْمُسْلِمِينَ الْأَغْنِيَاءِ وَيَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ لَحْمِهَا. وَلَمْ يُرَجِّحِ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا شَيْئًا مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ. (وَلَا يَبِيعُ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُضَحِّي بَيْعُ شَيْءٍ (مِنَ الْأُضْحِيَةِ) أَيْ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ شَعْرِهَا أَوْ جِلْدِهَا وَيَحْرُمُ أَيْضًا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ وَلَوْ كَانَتِ الْأُضْحِيَةُ تَطَوُّعًا. (وَيُطْعِمُ) حَتْمًا مِنَ الْأُضْحِيَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا (الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ) وَالْأَفْضَلُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا إِلَّا لُقْمَةً أَوْ لُقَمًا يَتَبَرَّكُ الْمُضَحِّي

بِأَكْلِهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا أَكَلَ الْبَعْضَ وَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ التَّضْحِيَةِ بِالْجَمِيعِ وَالتَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَّرَهَا فَتَلِفَتْ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ) أَيِ الْمَنْذُورِ. وَالْأَوْلَى ضَمَانُهَا كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ. وَلَا يُعْذَرُ التَّأْخِيرُ لَوْ عَدِمَتِ الْفُقَرَاءُ أَوِ امْتَنَعُوا مِنْ أَخْذِ لَحْمِهَا لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ فِي أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ...

Apabila seseorang menunda qurban, kemudian rusak, maka ia wajib menanggungnya. (Orang yang berqurban sunnah boleh memakannya), 1\3-nya menurut *qaul jadid*. Adapun 2/3-nya menurut suatu pendapat disedekahkan, dan Imam Nawawi mengunggulkannya dalam *Tashih at-Tanbih*, menurut pendapat lain 1/3 dihadiahkan kepada kaum muslim yang kaya dan 1/3 disedekahkan kepada *fuqara'*, dan an-Nawawi tidak mengunggulkan salah satu *wajah* ini dalam *ar-Raudhah wa Ashliha*. (Haram menjual), maksudnya orang yang berkorban dilarang menjual sesuatu dari korban, yakni daging, rambut atau kulitnya. Haram juga menjadikannya sebagai upah bagi penjagal meskipun korban sunnah. (Dan wajib memberi sedekah makanan) dari qurban sunnah (pada kaum fakir miskin). Yang lebih utama menyedekahkan seluruhnya meski satu suap atau beberapa, dimana *Mudhahhi* ber*tabarruk* dengan memakannya, karena demikian itu disunnahkan baginya. Jika ia memakan sebagian lantas menyedekahkan sisanya, maka ia mendapatkan pahala qurban seluruhnya dan pahala sedekah dari sebagiannya.

(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: *"Bila orang menunda qurban kemudian rusak, maka ia wajib menanggungnya"*), maksudnya qurban yang dinazari. Yang lebih utama dengan redaksi ضَمَانُهَا sebagaimana dalam beberapa naskah. Tidak bisa dijadikan alasan mengakhirkan qurban meski tidak ada kaum *fuqara'* atau mereka enggan mengambil dagingnya karena banyaknya daging pada hari qurban ...

d. *I'anah ath-Thalibin*, II/334-335:

(تَنْبِيهٌ) جَزَمَ فِي النِّهَايَةِ بِحُرْمَةِ نَقْلِ الْأُضْحِيَّةِ، وَعِبَارَتُهَا: وَيَمْتَنِعُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْأُضْحِيَّةِ كَالزَّكَاةِ. اهـ كتب ع ش: قوله: وَيَمْتَنِعُ نَقْلُهَا أَيِ الْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ الْمَنْدُوبَةُ وَالْوَاجِبَةُ. وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَنْدُوبَةِ: حُرْمَةُ نَقْلِ مَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ مِنْهَا. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ كَالزَّكَاةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ النَّقْلُ مِنْ دَاخِلِ السُّورِ إِلَى خَارِجِهِ، وَعَكْسُهُ. اهـ وَذَكَرَ فِي الْأَسْنَى خِلَافًا فِي جَوَازِ النَّقْلِ، وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْأَصْلِ: وَنَقْلُهَا عَنْ بَلَدٍ أَيْ

بَلَدِ الْأُضْحِيَةِ إِلَى آخَرَ كَنَقْلِ الزَّكَاةِ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهٰذَا يُشْعِرُ تَرْجِيحَ مَنْعِ نَقْلِهَا، لٰكِنِ الصَّحِيحُ الْجَوَازُ، فَقَدْ صَحَّحُوْا فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ جَوَازَ نَقْلِ الْمَنْذُوْرَةِ، وَالْأُضْحِيَةُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهَا. وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْعِمَادِ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْأُضْحِيَةَ تَمْتَدُّ إِلَيْهَا أَطْمَاعُ الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ كَالزَّكَاةِ، بِخِلَافِ الْمَنْذُوْرَةِ وَالْكَفَّارَاتِ، لَا شُعُوْرَ لِلْفُقَرَاءِ بِهَا حَتَّى تَمْتَدَّ أَطْمَاعُهُمْ إِلَيْهَا. اهـ. ثُمَّ إِنَّهُ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَمْنُوْعَ نَقْلُهُ هُوَ مَا عَيَّنَ لِلْأُضْحِيَةِ بِنَذْرٍ أَوْ جُعْلٍ، أَوِ الْقَدْرِ الَّذِيْ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ مِنَ اللَّحْمِ فِي الْأُضْحِيَةِ الْمَنْدُوْبَةِ. وَأَمَّا نَقْلُ دَرَاهِمَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أُخْرَى لِيَشْتَرِيَ بِهَا أُضْحِيَةً فِيْهَا فَهُوَ جَائِزٌ.وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى سُؤَالٍ وَجَوَابٍ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِمُفْتِي السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، بِمَكَّةَ الْمَحْمِيَّةِ، فَرِيْدِ الْعَصْرِ وَالْأَوَانِ، مَوْلَانَا السَّيِّدِ أَحْمَدَ بْنِ زَيْنِيْ دَحْلَانٍ. (وَصُوْرَةُ السُّؤَالِ) مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ هَلْ يَجُوْزُ نَقْلُ الْأُضْحِيَةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْجَوَازِ فَهَلْ هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ وَالرَّمْلِيْ أَمْ لَا؟ وَهَلْ مِنْ نَقْلِ الْأُضْحِيَةِ إِرْسَالُ دَرَاهِمَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ بِهَا أُضْحِيَةً وَتُذْبَحُ فِي الْبَلَدِ الْآخَرِ أَمْ لَا؟. وَهَلِ الْعَقِيْقَةُ كَالْأُضْحِيَةِ أَمْ لَا؟ بَيِّنُوْا لَنَا ذٰلِكَ بِالنَّصِّ وَالنَّقْلِ، فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ وَاقِعٌ فِيْهَا اخْتِلَافٌ كَثِيْرٌ، وَلَكُمُ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ. (وَصُوْرَةُ الْجَوَابِ) الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. اللّٰهُمَّ هِدَايَةً لِلصَّوَابِ: فِيْ فَتَاوِي الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُرْدِيِّ مُحَشِّيْ شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ عَلَى الْمُخْتَصَرِ مَا نَصُّهُ: (سُئِلَ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِ جَاوَى عَلَى تَوْكِيْلِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهُمُ النَّعَمَ فِيْ مَكَّةَ لِلْعَقِيْقَةِ أَوِ الْأُضْحِيَةِ وَيَذْبَحُهُ فِيْ مَكَّةَ، وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ يَعِقُّ أَوْ يُضَحِّيْ عَنْهُ فِيْ بَلَدِ جَاوَى فَهَلْ يَصِحُّ ذٰلِكَ أَوْ لَا؟ أَفْتُوْنَا. (الْجَوَابُ) نَعَمْ، يَصِحُّ ذٰلِكَ، وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ فِيْ شِرَاءِ الْأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَفِيْ ذَبْحِهَا، وَلَوْ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْمُضَحِّيْ وَالْعَاقِّ كَمَا أَطْلَقُوْهُ؛ فَقَدْ صَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِجَوَازِ تَوْكِيْلِ مَنْ تَحِلُّ ذَبِيْحَتُهُ فِيْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَةِ، وَصَرَّحُوْا بِجَوَازِ التَّوْكِيْلِ أَوِ الْوَصِيَّةِ فِيْ شِرَاءِ النَّعَمِ وَذَبْحِهَا، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حُضُوْرُ الْمُضَحِّيْ أُضْحِيَتَهُ. وَلَا يَجِبُ. وَأَلْحَقُوا الْعَقِيْقَةَ فِي الْأَحْكَامِ بِالْأُضْحِيَةِ، إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ، وَلَيْسَ هٰذَا مِمَّا اسْتَثْنَوْهُ، فَيَكُوْنُ حُكْمُهُ حُكْمَ

الْأُضْحِيَّةِ فِيْ ذَلِكَ. وَبَيَّنُوْا تَفَارِيْعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيْ كُلٍّ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ اهـ

(Peringatan) Dalam kitab *Nihayah* telah ditetapkan tentang keharaman pemindahan daging kurban. Larangan seperti itu karena statusnya seperti zakat. Menurut imam Syibramulisi *"Larangan tersebut sifatnya mutlak, baik kurban yang wajib ataupun yang sunnah"*. Maksud dari kurban yang sunnah adalah keharaman memindah daging kurban yang wajib untuk disedekahkan. Orientasinya seperti zakat, dan mengenai keharaman pemindahan daging kurban mulai dari perbatasan daerah daging kurban sampai keluar perbatasan ataupun sebaliknya. Di dalam kitab *Asna al-Mathalib* ada perkhilafan mengenai bolehnya memindah daging kurban dimana dalam referensi dasarnya berupa pemindahan daging kurban dari daerah kurban ke daerah lain, seperti pemindahan zakat sementara. Dalam kitab *Muhimmat* bahwa pendapat demikian ialah *tarjih* tentang larangan daging kurban dari daerahnya, meskipun menurut *qaul shahih* boleh. Para ulama hanya menjelaskan tentang kebolehan sementara pembagian shadaqah yang di*nadzari*, padahal kurban itu sendiri sudah terpisah dari rangkaian shadaqah pada umumnya, sebab kurban itu hanya mengarahkan kepada orang faqir dan juga dibatasi waktu, dalam pembagian dan juga pelaksanaannya, berbeda dengan shadaqah, *nadzar* dan *kafarat*. Perlu diketahui bahwa ketetapan larangan memindah daging itu sebatas hal-hal yang telah ditentukan pada binatang kurban melalui *nadzar*, ongkos atau kadar yang wajib disedekahkan dari dagingnya itu. Sedangkan transfer uang ke daerah lain dalam rangka membeli hewan kurban dibolehkan. Sementara saya telah membuat dan mencantumkan soal dan jawaban: Jawaban yang diadopsi dan diperkuat oleh pembesar Syafi'iyyah di Makkah mahmiyyah yaitu Farid al-A'shr dan Ahmad bin Zaini Dahlan: (Soal) *"Apakah diperbolehkan pemindahan kurban dari satu daerah ke daerah yang lain atau tidak? Apakah ada kesepakatan antara Imam ibnu Hajar dan imam Ramli dalam hal itu? Apakah dari pemindahan kurban itu meliputi transfer uang dari daerahnya ke daerah lain? Apakah aqiqah sama seperti kurban? Para ahli fikih menjelaskan hal tersebut kepada kami melalui nash dan nukilan dari kitab-kitab, karena permasalahan seperti ini banyak terjadi perselisihan dan kalian akan mendapat pahala atas semuanya ini (jika kalian melakukan hal tersebut. red).* (Deskripsi jawaban) segala puji bagi Allah dan limpahan rahmat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat beliau, semoga Allah menunjukan kebenaran. Dalam kitab *Fatawi* Syekh Muhammad Bin Sulaiman Al-Kurdi beliau menukil pendapat Ibnu Hajar di dalam kitab *Muhtashar*nya yang bertuliskan: (Pertanyaan) *Adat yang berlaku di penduduk Jawa mengenai perwakilan dalam urusan membeli binatang yang*

ada di Makkah untuk aqiqah ataupun kurban dan disembelih di Makkah, padahal orang yang berkurban atau yang diaqiqahi berada di tanah Jawa. Apakah hal seperti ini bisa dilegalkan atau tidak? (Jawab) *Bisa dilegalkan dan boleh untuk diwakilkan dalam membeli binatang kurban dan aqiqah serta penyembelihannya di kota Makkah meskipun orang yeng berkurban atau yang diaqiqahi ada di tanah Jawa, seperti keterangan yang telah dimutlakkan oleh para ulama.* Dan menurut para ulama Syafi'iyyah menjelaskan tentang keabsahan mewakilkan penyembelihan hewan kurban. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama mengenai dibolehkan atau berwasiat dalam pembelian dan penyembelihan binatang itu, karena kehadiran orang yang berkurban terhadap binatang yang dikurbankan itu sunnah. Dan para ulama menyamakan hukum aqiqah dengan kurban, sehingga hukum aqiqah sama seperti kurban. Para ulama menjelaskan cabang masalah demikian dalam bab *wakalah*.

388. Ibu Nyai Menjadi *Muballighah*

Deskripsi Masalah

Seorang Bu Nyai yang kesehariannya menjadi pengasuh pondok pesantren putra putri dan *Mubalighah*, seringkali bepergian antar kota hingga luar propinsi meski tidak disertai sang suami tercinta untuk melayani umat.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum Bu Nyai menjadi pengasuh pesantren putra putri yang konsekwensinya sering berinteraksi dengan santri putra?
b. Bagaimana hukum dia menjadi *Mubalighah* yang konsekuensinya sering bepergian tanpa disertai suami atau mahram?

Jawaban

a. Boleh selama tidak membuka aurat, dapat dipercaya (*tsiqah*) dan tidak *khalwah* (selama ada wanita lain).
b. Jadi *muballighah* hukumnya boleh dengan syarat *muslimah, 'aqilah, balighah, 'alimah* serta *'adilah*. Dan hukum bepergiannya boleh menurut madzhab Imam Abu Hanifah selama tidak melebihi *masafatil qashri* (perjalanan yang diperbolehkan *jama' qashar* shalat).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Hawasyi al-Madaniyah*, II/219:

وَالْخَنْقُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ وُجُوْدُ مَحْرَمٍ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ نِسَاءٍ أَجْنَبِيَّاتٍ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ جَوَازِ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ اهـ

Disyaratkan pada *khuntsa* adanya *mahram* seorang lelaki atau wanita, atau beberapa wanita lain berdasarkan *qaul ashah* yang memperbolehkan seorang laki-laki *khalwat* dengan dua orang perempuan.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 199:

(مَسْئَلَةٌ) فَعُلِمَ أَنَّهَا تَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ ثِقَةٍ بِأَجْنَبِيَّتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا لَا رَجُلَيْنِ بِأَجْنَبِيَّةٍ مُطْلَقًا اه فتاوى ابن حجر.

(Masalah) Jadi di ketahui, sungguh boleh seorang laki-laki yang dapat dipercaya *khalwat* dengan dua wanita *non-mahram* yang bisa dipercaya, yang laki-laki itu mempunyai rasa malu terhadap keduanya. Tidak boleh *khalwat* dua orang laki-laki dengan seorang wanita lain secara mutlak. Sekian dari *Fatawa Ibn Hajar*.

c. *I'anah ath-Thalibin*, III/306:

(قوله: وَيَجُوزُ نَظَرُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ) قال سم: أَيْ بِلَا شَهْوَةٍ وَلَا خَوْفِ فِتْنَةٍ. وَخَرَجَ الْوَجْهُ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ، أَيْ كَرَهْنٍ وَحَوَالَةٍ وَقِرَاضٍ، فَإِذَا بَاعَ مَثَلًا لِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْهَا نَظَرَ لِوَجْهِهَا خَاصَّةً. وَيَجُوزُ أَيْضًا لَهَا أَنْ تَنْظُرَ لِوَجْهِهِ. وَقَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهَا: عِلَّةٌ لِلْجَوَازِ أَيْ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِلْاحْتِيَاجِ إِلَى مَعْرِفَتِهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِي الْمَبِيعِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَيْضًا تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِي الثَّمَنِ فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ (قوله: وَتَعْلِيمٌ الخ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُعَامَلَةِ: أَيْ وَيَجُوزُ نَظَرُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ تَعْلِيمِهَا مَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ كَالْفَاتِحَةِ، وَأَقَلِّ التَّشَهُّدِ، وَمَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ ذَلِكَ مِنَ الصَّنَائِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ جِنْسٍ وَمَحْرَمٍ صَالِحٍ وَتَعَذُّرِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَوُجُودِ مَانِعِ خَلْوَةٍ، أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعِلَاجِ اه

(Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dan boleh melihat wajah perempuan"*). Ibn Qasim al-'Ubbadi berkata: *"Maksudnya tanpa syahwat dan tidak takut fitnah"*. Dikecualikan dari wajah yaitu selainnya. Maka tidak dibolehkan selainnya (selain wajah) ketika transaksi atau lainnya, seperti pegadaian, perpindahan hak otoritas, dan investasi. Jika seseorang menjual sesuatu pada wanita sedangkan ia belum mengenalinya, maka ia dibolehkan melihat wajahnya saja dan si wanita juga diperkenankan melihatnya. Perkataan beliau sebab ada hajat untuk mengenalinya merupakan suatu alasan kewenangan untuk melihat. Maksudnya, hal itu hanya boleh

karena dibutuhkan untuk mengenali si wanita (lawan transaksi) karena terkadang terlihat (ada) suatu aib dalam barang transaksi. Sedangkan lelaki itu bermaksud untuk mengembalikan pada pemilik sebelumnya dan si perempuan pun juga kadang melihat ada suatu cacat pada alat pembayaran dan ia bermaksud mengembalikan (meminta barangnya).

(قَوْلُهُ وَلِلتَّعْلِيمِ الخ) di*athof*kan pada مُعَامَلَةٍ. Maksudnya, diperbolehkan melihat wajah wanita ketika mengajar ilmu yang wajib baginya seperti membaca al-Fatihah, sedikitnya *tasyahhud*, dan suatu ilmu yang hanya tertentu di dalam pengajaran tersebut yang berupa perbuatan yang dibutuhkan. Di dalam kitab *Nihayah* dijelaskan bahwa tempat diperbolehkannya hal tersebut itu ketika tidak adanya sesama jenis dan mahram yang sholeh dan sulitnya (penglihatan laki-laki) dari hijab dan adanya hal-hal yang mencegah untuk *khalwat*. Dikutip dari bab yang telah lalu pada masalah pengobatan.

d. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XX/329-330:

يُشْتَرَطُ فِي الدَّاعِيَةِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا (أَيْ مُسْلِمًا عَاقِلاً بَالِغًا) وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا عَادِلاً، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ مُكَلَّفَةٌ بِالدَّعْوَةِ، مُشَارِكَةٌ لِلرَّجُلِ فِيهَا.

Syarat *daiyah* adalah *mukallaf* (muslim, berakal, *baligh*), alim serta adil. Tidak ada perbedaan dalam masalah perempuan dituntut berdakwah, sama halnya bagi laki-laki.

e. *Tuhfah al-Ahwadzi*, III/249:

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ.

Ulama Hanafiyah berkata: "*Wanita dibolehkan bepergian (tanpa mahram) selama tidak melebihi jarak masafatil qashri* ".

389. Hak Atas Bonus/Diskon Belanja

Deskripsi Masalah

Barang kali tidak berlebihan jika kita menambahkan satu butir lagi ke dalam hukum ekonomi, yaitu apabila konsumen telah menjadi pelanggan tetap atau pembelian dilakukan dalam jumlah besar, maka ia berhak mendapatkan harga miring, diskon, bonus atau bentuk-bentuk kemurahan lainnya. Kenyataan ini kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan lebih, seperti yang terjadi di bengkel-bengkel kendaraan. Biasanya ketika komponen kendaraan ada yang harus diganti, maka pihak bengkel yang membelikan suku cadang, kemudian meminta ganti uang kepada pemilik kendaraan sesuai nota pembelian.

Meskipun harga suku cadang yang tertera dalam nota pembelian masih sesuai dengan harga standar, namun karena pihak bengkel telah menjadi pelanggan, atau pembelian dilakukan dalam jumlah besar, ia pun bisa membeli suku cadang dengan harga miring (diskon) dan bahkan terkadang mendapat bonus. Sehingga secara tidak langsung, ia juga mendapat keuntungan dari pemilik kendaraaan yang mengganti uang sesuai harga tertera dalam nota.

Pertanyaan

a. Siapakah yang berhak mendapatkan diskon atau bonus tersebut?
b. Berapakah yang harus dibayar pemilik kendaraan dalam mengganti suku cadang? Sesuai diskon atau nota?

Jawaban

a. Bonus menjadi hak bengkel karena dia menjadi orang yang diberi.
b. Sesuai dengan diskon apabila bengkel menjadi wakil dari konsumen, apabila pihak bengkel menjadi penjual maka sesuai dengan harga nota yang disepakati.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tuhfah al-Muhtaj*, III/11:

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ اخْتِيَارِ شَخْصٍ حَاذِقٍ لِشِرَاءِ مَتَاعٍ فَيَشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِحِذْقِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ تَمَامَ الْقِيمَةِ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّرَهُ لِحِذْقِهِ وَبِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْضًا زَمَنًا كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ إِمْكَانِ مُرَاجَعَتِهِ إلخ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا.

Dari ketidak-bolehan wakil mengambil harta *muwakkil* sebagaimana kebolehan wali mengambil harta *muwalla*nya, dapat disimpulkan bahwa tercegahnya (ketidakbolehan) kasus yang sering terjadi yaitu kehendak orang pandai untuk membeli suatu barang, lalu ia membeli dengan harga di bawah standarnya karena kecerdikan dan pengalamannya, sementara ia mengambil harga penuh untuk dirinya karena beralasan bahwa ia membeli dengan penuh karena kecerdikannya dan ia habiskan waktunya yang semestinya dapat digunakan untuk bekerja; sehingga ia wajib mengembalikan sisa harta kepada pemiliknya karena alasan yang telah disebutkan, yaitu mungkin merujuk (bermusyawarah) ke pemiliknya … ingatlah kasus tersebut yang sering terjadi.

b. *I'anah ath-Thalibin*, II/183:

(فُرُوعٌ) الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ مِلْكٌ لِلْأَبِ، وَقَالَ جَمْعٌ: لِلِابْنِ. فَعَلَيْهِ يَلْزَمُ

الْأَبِ قَبُولُهَا، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا أَطْلَقَ الْمُهْدِي فَلَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَإِلَّا فَهِيَ لِمَنْ قَصَدَهُ اتِّفَاقًا، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا يُعْطَاهُ خَادِمُ الصُّوفِيَّةِ فَهُوَ لَهُ فَقَطْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، أَوْ قَصَدَهُ. وَلَهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمْ وَلَهُ وَلَهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمَا، أَيْ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا اعْتِيدَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي مِنْ وَضْعِ طَاسَةٍ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْفَرَحِ لِيَضَعَ النَّاسُ فِيهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى الْحَالِقِ أَوِ الْخَاتِنِ أَوْ نَحْوِهِمَا يَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ نُظَرَائِهِ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ، عَمِلَ بِالْقَصْدِ، وَإِنْ أَطْلَقَ، كَانَ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْفَرَحِ يُعْطِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ. وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ هُنَا لِلْعُرْفِ، أَمَّا مَعَ قَصْدِ خِلَافِهِ، فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا مَعَ الْإِطْلَاقِ فَلِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ، مِنَ الْأَبِ وَالْخَادِمِ وَصَاحِبِ الْفَرَحِ، نَظَرًا لِلْغَالِبِ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ هُوَ الْمَقْصُودُ هُوَ عُرْفُ الشَّرْعِ، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْعُرْفِ الْمُخَالِفِ لَهُ، بِخِلَافِ مَا لَيْسَ لِلشَّرْعِ فِيهِ عُرْفٌ فَإِنَّهُ تُحَكَّمُ فِيهِ الْعَادَةُ. وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَحَالَةِ الْقَصْدِ وَالْمُرَادُ يَجْرِي بَعْضُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هُنَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لِلْخَادِمِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ كَوْنِهِ لِلْأَبِ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ بَعْدَهُ اهـ

(Sub-sub) Hadiah yang dibawa saat anak khitan itu milik sang ayah, tetapi sekelompok ulama berpendapat bahwa hadiah tersebut milik si anak. Letak perbedaan pendapat ialah ketika seseorang memberi hadiah tidak menentukannya untuk anak ataukah ayah. Bila pemberi hadiah bertujuan kepada salah satunya maka hadiah tersebut untuk orang yang ditujunya menurut kesepakatan ulama. Hukum ini berlaku juga pada hadiah yang diserahkan kepada pelayan seorang sufi, maka hadiah itu untuk pelayan tersebut ketika tidak ada tujuan dari *muhdi* (pemberi hadiah) atau *muhdi* bertujuan memberi kepada pelayan tersebut, dan hadiah itu milik sufi ketika *muhdi* bertujuan untuk mereka. Hadiah tersebut untuk pelayan dan sufi jika *muhdi* bertujuan untuk keduanya, yakni separuhnya untuk pelayan menurut pendapat dzahir. Konsekuensi hukum itu, kebiasaan yang berlaku di sebagian daerah yaitu menaruh wadah yang terbuat dari tembaga di depan orang yang berpesta dengan tujuan supaya orang-orang menaruh uang ke dalamnya, kemudian uang tersebut dibagikan ke orang yang cukur, anak khitan atau sesamanya, perincian hukum itu berlaku pada masalah ini. Jika *muhdi* bertujuan memberikan kepada mereka (orang cukur, anak khitan dan lain-lain)

saja atau untuk teman-teman mereka yang membantu maka diberikan sesuai tujuan *muhdi*, dan jika *muhdi* tidak memiliki tujuan mutlak maka uang tersebut untuk orang yang sedang berpesta, dan orang itu bebas memberikannya ke orang yang ia kehendaki. Dari sebagian keterangan di atas bisa diketahui bahwa *'urf* (adat istiadat) tidak dipandang dalam permasalahan ini, adat tidak dipandang ketika bertujuan sebaliknya. Maka hal ini sudah jelas, sedang adat juga tidak dipandang/dianggap ketika *muhdi* tidak bertujuan ke salah satu dari mereka secara mutlak, karena menentukan hadiah kepada orang-orang yang telah disebutkan (ayah, pelayan, orang yang sedang berpesta) itu dikarenakan melihat kebiasaan bahwa merekalah yang dituju dan hal ini ialah adat menurut *syara'*. Maka adat *syara'* harus didahulukan daripada adat yang berbeda dengan syara'. Berbeda ketika dalam permasalahan ini adat dijadikan pijakan hukum dalam perincian hukum ini berlaku saat keadaan *muhdi* tidak punya tujuan secara mutlak atau dalam keadaan *muhdi* memiliki tujuan. Yakni sebagian hukum ini berlaku, karena dalam permasalahan ini ketika *muhdi* tidak memiliki tujuan tidak ada perbedaan pendapat hadiah tersebut milik pelayan. Berbeda dalam kasus khitan maka ada perbedaan pendapat mengenai hadiah tersebut milik sang ayah dengan bukti penjelasan setelahnya.

390. Nuklir

Deskripsi Masalah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan atas kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat, maka Pemerintah berencana membangun instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Madura (isunya di daerah Kecamatan Pasongsongan Kab. Sumenep). Reaktor yang direncanakan untuk dibangun di Madura menggunakan sistem SMART (*System Modular Advanced Reactor*) dengan proses *desalinasi*. Proyeksinya, reaktor tersebut akan menghasilkan 200 MW listrik dan 4.000 m³ air bersih perhari. Hasil studi Kementerian Ristek dan LIPI, Riset Unggulan Terpadu Tahun 2002 menyebutkan mengikuti pembangunan jembatan Suramadu dan industrialisasi, kebutuhan listrik dan air bersih di Madura akan meningkat 4% pertahun (Djokolelono, 2002:1). Untuk jangka panjang, PLTN jenis SMART dengan *desalinasi* dapat menjawab kebutuhan itu.

Rencana ini mengundang respon pro-kontra, sebagaimana terjadi pada rencana pembangunan instalasi yang sama di Muria Jawa Tengah. Bagi yang mendukung, pembangunan PLTN di Madura bukan saja penting demi penyediaan energi listrik dan air bersih, akan tetapi juga untuk kebanggaan bahwa Indonesia mampu menggunakan teknologi

tinggi. Masalahnya, demikian menurut yang menolak, PLTN termasuk jenis teknologi yang berisiko amat tinggi. Dan Indonesia, meski belum terbukti mampu menjamin keamanannya, hanya bisa menjadi pemakai saja. Adapun teknologi dan uranium sebagai bahan dasarnya harus diimpor dari negara lain (Korea Selatan atau Jepang, tergantung siapa yang nanti jadi investornya).

Nah, selain menciptakan ketergantungan, PLTN juga sangat mahal (Studi MIT: biaya pembangkitan PLTN 6,7 c/kWh, PLTU batu bara 4,2 c/kWh, sedangkan PLTGU 3,8 c/kWh [pada harga gas 3,7 dollar AS/MCF]. Studi University of Chicago [2004]: PLTN 6,5-7,2 c/kWh, sementara PLTU batu bara 4,3-4,9 c/kWh) dan berumur pendek (antara 25-35 tahun, lalu musti ditutup dengan biaya yang juga sangat besar). Sementara itu, Indonesia sendiri sangat kaya akan sumber-sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, angin, air, matahari, *mikrohidro* dan *biomassa*. Pemanfaatan sumber-sumber tersebut secara optimal akan mampu mencukupi kebutuhan energi seluruh negeri.

Pertanyaan

Bagaimana hukum membangun PLTN bagi pemerintah Indonesia? Dan apa yang harus dilakukan warga negara menyikapi rencana pembangunan PLTN tersebut?

Jawaban

Masalah PLTN ini tidak hanya menyangkut masalah energi, tapi juga melibatkan aspek lingkungan, ekologi, sosial, politik dan ekonomi. Sebagai agama yang *syamil* (meliputi berbagai aspek kehidupan) dan *kamil* (sempurna secara keseluruhan), Islam diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai PLTN melalui penelusuran norma-norma Islam, baik dalam bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam *nash* maupun pengalaman historis masyarakat Islam, agar penanganan masalah PLTN tetap mengacu kepada fitrah kemanusiaan.

Untuk meneropong masalah PLTN dengan kompleksitas persoalannya, prinsip yang menjadi acuan adalah menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan. Dari prinsip ini, maka kebijakan yang menyangkut tentang hajat hidup umat, baik yang *dlaruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) maupun *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier atau kemewahan) harus mengakomodir tiga aspek utama, yakni:

a. Aspek tata kehidupan.
b. Aspek pemenuhan kebutuhan.
c. Aspek kesesuaian dengan syari'ah.

Maslahat dan mafsadah dalam konteks ini, yang menjadi acuan hukum adalah yang *muhaqqaqah* atau nyata, bukan yang *mauhumah*

atau hanya praduga. Setelah mempertimbangkan berbagai argumentasi dari para pakar, baik yang pro maupun kontra, dan dengan berpegang teguh pada ajaran Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, prinsip *tawassuth, i'tidal, tasamuh, tawazun, al-shidqu, al-amanah* dan *al-wafa-u bil al-'ahd*, maka forum *mubahasah* memutuskan bahwa Pembangunan PLTN hukumnya haram dengan pertimbangan:

a. Proyek PLTN mengandung aspek maslahah sekaligus mafsadah. Kemaslahatan PLTN diperkirakan mampu mensupply kebutuhan energi nasional sebesar 2-4 %. Sedangkan aspek mafsadahnya karena proyek PLTN pasti menghasilkaan limbah radioaktif yang diyakini mafsadahnya dan diragukan kemampuan pengamanannya. Dengan demikian, maka prinsip menghindari mafsadah harus didahulukan, sesuai dengan kaidah: دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

b. Kewajiban pemerintah adalah menjamin ketenteraman warganya dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang membawa kemaslahatan sesuai dengan derajat kepentingan yang dihadapi warganya, sesuai dengan kaidah: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

c. Proyek PLTN nyata-nyata memiliki efek samping yang menurut penelitian belum ada solusi yang 100% *save* atas akibat yang di timbulkan. Di antara efek samping itu di antaranya adalah:
   1) PLTN menghasilkan limbah radioaktif yang sangat berbahaya, sementara masih diragukan kemampuan pengamanannya. Sampai saat ini, Belum ditemukan teknologi untuk mengolah limbah bahan bakar PLTN yang telah terpakai untuk dibuang selamanya.
   2) PLTN menimbulkan dampak merusak lingkungan seperti naiknya suhu air laut sehingga mengakibatkan matinya biota laut dan mengurangi sumber penghasilan nelayan.
   3) Ketergantungan terhadap asing, baik dari segi desain dan teknologi PLTN, operasi PLTN maupun perawatan PLTN, semua dikerjakan oleh asing. Dari segi bahan baku energi PLTN yaitu uranium, Indonesia hanya memiliki tambang uranium dengan deposit kecil dan berkadar rendah, sehingga perlu proses pengayaan uranium. Sebagai negara berkembang, Indonesia akan dihalangi oleh pihak barat untuk memperkaya uranium (non-proliferasi) seperti Iran, agar selalu tergantung kepada produsen uranium asing.
   4) Timbunan limbah nuklir beradiasi yang dihasilkan PLTN diperkirakan akan bertahan lebih dari 24.000 tahun, mengharuskan Negara bertanggung jawab menjaganya dengan biaya tinggi.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Asybah wa an-Nadha`ir*, 97:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ. فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنِ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ وَلِذَلِكَ قَالَ ﷺ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَمِنْ ثَمَّ سُومِحَ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ بِأَدْنَى مَشَقَّةٍ كَالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ وَالطَّهَارَةِ وَلَمْ يُسَامَحْ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَنْهِيَّاتِ وَخُصُوصًا الْكَبَائِرِ. وَفِي الْفَوَائِدِ إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَتِ الضَّرُورَةُ اهـ

Menolak mafsadah itu lebih utama daripada menarik maslahah. Bila mafsadah dan maslahah bertentangan maka yang didahulukan menolak mafsadah secara umum karena perhatian syari' terhadap larangan itu lebih dahsyat daripada perhatiannya dengan perintah. Karena itu Nabi ﷺ bersabda: *"Apabila aku memerintah sesuatu pada kalian maka penuhilah apa yang kalian mampu dan bila aku melarang kalian dari melakukan sesuatu maka jauhilah hal itu."* Dengan begitu, di*rukhshah* meninggalkan sebagian kewajiban sebab kesulitan yang ringan seperti berdiri ketika shalat, buka puasa dan bersuci. Tidak di*rukhshah* dalam mendahulukan larangan, lebih-lebih dosa besar. Pernyataan dalam *al-Fawaid*: *"Kecuali apabila ada bahaya yang nyata."*

b. *Fatawa ar-Ramli*, III/13-14:

سُئِلَ عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجَ الْبَلَدِ لِأَنَّ نَارَهُ يُوقَدُ بِالرَّوْثِ وَالْكِلْسِ فَإِذَا شَمَّتِ الْأَطْفَالُ دُخَانَهُ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فِي الْغَالِبِ وَرُبَّمَا مَاتَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ فَعَمِلَ شَخْصٌ مَعْمَلَ نَشَادِرَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَشَمَّ دُخَانَهُ طِفْلٌ رَضِيعٌ فَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَهَلِ الْإِيقَادُ حَرَامٌ فَيَأْثَمُ بِهِ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ، فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِيقَادُ الْمَذْكُورُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَضَرُّرُ الْغَيْرِ بِهِ فَيَأْثَمُ بِهِ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُهُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَمَنْعُهُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ مُطْلَقًا اهـ

Imam Ramli ditanya tentang sesuatu yang sudah jadi yaitu pembuahan *amaniah* di luar kota, karena apinya dihidupkan dengan kotoran sapi/ unta dan kapur, maka ketika anak kecil menghirup asapnya mereka terkena bahaya yang besar secara umum, dan tidak sedikit yang mati

terkena dampaknya kemudian ada orang yang bekerja membuat *zat amoniak* di tengah kota yang bahannya seperti di atas, kemudian ada anak yang menghirup asapnya dan sakit keras, apakah pekerjaan itu haram, sehingga dia berdosa, di*ta'zir*, harus diingkari, dan dicegah dari melakukannya dan wajib ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan? Beliau menjawab: Bahwa hal tersebut haram ketika kemungkinan besar (*ghalbabah adz-dzon*) dapat membahayakan orang lain, maka dia berdosa dan hakim harus men*ta'zir*nya (menghukum) dan wajib mengingkari perbuatannya, melarangnya, dan wajib mengganti rugi kerusakan yang disebabkan ulahnya secara mutlak.

c. *Mathalib Auli an-Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha*, III/357-358:

(فَصْلٌ) (وَحَرُمَ) عَلَى مَالِكٍ (أَنْ يُحْدِثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ) لِخَبَرِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ (كَحَمَّامٍ) يَتَأَذَّى جَارُهُ بِدُخَانِهِ أَوْ يَنْضُرُّ حَائِطُهُ بِمَائِهِ وَمِثْلُهُ مَطْبَخُ سُكَّرٍ (وَكَنِيفٍ مُلَاصِقٍ لِحَائِطِ جَارِهِ) يَتَأَذَّى بِرِيحِهِ أَوْ يَصِلُ إِلَى بِئْرِهِ (وَرَحًى) يَهْتَزُّ بِهَا حِيطَانُهُ (وَتَنُّورٍ) يَتَعَدَّى دُخَانُهُ إِلَيْهِ (وَعَمَلِ دُكَّانِ قِصَارَةٍ أَوْ حِدَادَةٍ يَتَأَذَّى بِكَثْرَةِ دَقٍّ وَيَهْتَزُّ الْحِيطَانُ) لِلْخَبَرِ. (وَ) يَحْرُمُ (غَرْسُ شَجَرٍ نَحْوِ تِينٍ) كَجُمَّيْزٍ (تَسْرِي عُرُوقُهُ) أَيْ أُصُولُهُ (فَتَشُقُّ مَصْنَعَ غَيْرِهِ) أَيْ جَارِهِ (وَحَفْرُ بِئْرٍ يَقْطَعُ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ وَسَقْيٌ وَإِشْعَالُ نَارٍ يَتَعَدَّيَانِ) إِلَى جَارِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ. (وَيَضْمَنُ) مَنْ أَحْدَثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ (مَا تَلِفَ بِذَلِكَ) بِسَبَبِ الْإِحْدَاثِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ (وَلِجَارِهِ مَنْعُهُ إِنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ كَابْتِدَاءِ إِحْيَائِهِ) أَيْ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إِحْيَاءِ مَا بِجِوَارِهِ لِتَعَلُّقِ مَصَالِحِهِ بِهِ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ دَقٍّ وَسَقْيٍ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ (بِخِلَافِ طَبْخِهِ وَخَبْزِهِ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَمْنَعُ) مِنْهُ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَ (لِيُسْرِ ضَرَرِهِ) لَا سِيَّمَا بِالْقُرَى. وَإِنِ ادَّعَى فَسَادَ بِئْرِهِ بِكَنِيفِ جَارِهِ أَوْ بِالْوَعَتِهِ اخْتُبِرَ بِالنِّفْطِ يُلْقَى فِيهَا فَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِالْمَاءِ نُقِلَتْ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِصْلَاحُهَا بِنَحْوِ بِنَاءٍ يَمْنَعُ وُصُولَهُ إِلَى الْبِئْرِ (وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ) الْمُضِرِّ بِالْجَارِ (سَابِقٌ بِضَرَرٍ لَاحِقٍ كَمَنْ لَهُ فِي مِلْكِهِ نَحْوُ مَدْبَغَةٍ) كَرَحًى وَتَنُّورٍ (فَأَحْيَا) إِنْسَانٌ (آخَرُ بِجَانِبِهَا مَوَاتًا) أَوْ بَنَى دَارًا أَوِ اشْتَرَى دَارًا بِجَانِبِهِ بِحَيْثُ يَتَضَرَّرُ صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُحْدَثِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ نَحْوِ الْمَدْبَغَةِ لَمْ يَلْزَمْ صَاحِبَ الْمَدْبَغَةِ وَنَحْوِهَا إِزَالَةُ الضَّرَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ. (وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ) (مَنْ كَانَتْ

لَهُ سَاحَةٌ يَلْقِي فِيهَا التُّرَابَ وَالْحَيَوَانَ) الْمَيِّتَ (وَيَتَضَرَّرُ الْجِيرَانُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا دَفْعُ تَضَرُّرِ الْجِيرَانِ إِمَّا بِإِعْمَارِهَا أَوْ إِعْطَائِهَا لِمَنْ يَعْمُرُهَا أَوْ مَنْعِ مَنْ يَلْقِي فِيهَا) مَا يَضُرُّ بِالْجِيرَانِ اهـ

(Pasal) (Haram) bagi *malik* (melakukan perkara yang membahayakan tetangganya) karena *khabar*, *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*. Ahmad menjadikan ini sebagai *hujjah* (seperti pemandian) yang kepulannya mengganggu tetangga atau merendahkan tembok dengan dampak airnya dan semisal produksi gula (dan toilet yang berhimpitan dengan tembok tetangga) yang terganggu atau tersambung dengan sumurnya, (dan penggilingan) yang membuat getar temboknya (dan tungku) yang asapnya mengepul ke tetangga, (kegiatan penyembelihan dan pandai besi yang menganggu tetangga sebab memukul-mukul dan menggetarkan tembok) karena hadits. Dan haram (menanam misal:pohon *tin*) seperti pohon *sycamore* (yang akarnya merambat), maksudnya akar tumbuhan (sehingga mengganggu tempat kerja orang lain), maksudnya tetangganya, (dan menggali sumur yang memutus aliran air sumur tetangga, menyiram, dan menyalakan api yang berkobar) ke tetangga dan semisalnya, yaitu setiap perkara yang mengganggu. (maka ia harus tanggung jawab), maksudnya orang yang melakukan aktifitas yang mengganggu tetangga. (Dan kerusakan yang ditimbulkannya), sebab melakukan perkara karena ceroboh (dan tetangga boleh mencegah apabila ia melakukannya sebagaimana kronologi awal) maksudnya sebagaimana perkara yang boleh dicegah sejak awal mula tindakan yang mengganggu tetangganya, karena *mashalih*nya berkaitan dengan tetangga, sebagaimana boleh melarang memukul-mukul dan menyiramkan air yang mengalir padanya, (berbeda dengan memasak dan membuat roti di dapurnya, maka tetangga tidak boleh melarang) karena adanya *hajat*, dan (bahayanya ringan), apalagi di desa. Apabila seseorang mengaku rusaknya sumur disebabkan toilet tetangganya atau dengan bak cucinya yang diuji dengan sebidang tanah yang sambung dengannya. Jika rasa dan baunya tampak pada air maka dipindah, jika tidak mungkin memperbaiki dengan semisal bangunan yang tidak sampai ke sumur (dan tidak boleh melarangnya) yakni orang yang mengganggu tetangga (bahaya yang dahulu dengan bahaya berikutnya seperti orang yang memiliki semacam pengulitan) seperti penggilingan manual dan tungku (kemudian orang lain *babat alas* disisinya), membangun rumah, atau membeli rumah di sampingnya, sekiranya pemilik lahan baru bisa mengganggu dengan tindakan tersebut yaitu semisal pengulitan, maka pemilik pengulitan tidak wajib menghilangkan bahaya karena ia tidak

melakukan gangguan pada tetangganya. (Syaikh Taqiy ad-Din berkata: "*Barangsiapa memiliki halaman rumah diamana debu dan bangkai bertemu dan membahayakan tetangga maka sungguh pemiliknya wajib menolak bahaya tetangga, adakala dengan membangunnya, memberikannya pada orang yang membangunnya atau mencegah orang yang menimbulkan bahaya pada para tetangga.*")

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR
di PP Al-Hikam Tonjung Burneh Bangkalan
30 Syawwal 1431 H/09 Oktober 2010 M

391. Pembuktian Terbalik Bagi Pejabat Negara
392. Pergesaran Arah Kiblat
393. Jasa Orang Pintar
394. Berbakti Kepada Orang Tua, Guru dan Mertua
395. Menghindari *Dam Tamattu'*
396. Operasi Caesar Karena Ingin Menepatkan Tanggal Lahir
397. Perbedaan Pemahaman tentang Makna *Sabilillah* dalam Zakat
398. Bekas Sujud di Jidat
399. *Qadha`* Shalat
400. Program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah
401. Alokasi Dana Pendidikan yang Tidak Merata

KOMISI A

MUSHAHIH

KH. Miftahul Akhyar
KH. Nurunddin Abdurrahman

PERUMUS

Drs. KH. Romadlon Khothib
KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I
KH. Achmad Shampton Masduqie

MODERATOR

KH. Azizi Hasbulloh

NOTULEN

Ust. M. Ma'ruf Khozin

391. Pembuktian Terbalik bagi Pejabat Negara

Deskripsi

Pemerintah telah menilai dua institusi penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, tidak mampu menangani korupsi-korupsi besar di Indonesia, utamanya korupsi-korupsi yang merugikan keuangan Negara. Oleh karena itu pemerintah membentuk lembaga "*superbody*" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini memiliki kewenangan besar untuk menjerat koruptor-koruptor kelas atas, seperti kewenangan menangkap, memeriksa, mengadili, menyadap dan sebagainya. Untuk semakin meminimalisir korupsi, KPK mewacanakan sistem peradilan terbalik bagi pejabat Negara. Sistem ini mengharuskan bagi pihak penyelenggara Negara yang tertuduh melakukan korupsi untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa harta yang telah ia miliki bukan hasil dari korupsi. Sistem tersebut telah diterapkan di beberapa Negara dan dinilai efektif dalam memberantas korupsi. Sementara dalam konsep peradilan Islam sistem yang digunakan adalah *Mudda'i* (jaksa penuntut umum) yang mengajukan bukti, dan *Mudda'a 'alaih* (tertuduh) mengingkari dengan sumpah.

Pertanyaan

a. Adakah hal-hal yang substansial yang membedakan antara dua jenis sistem peradilan di atas, sehingga peradilan yang menggunakan sistem pembuktian terbalik tidak dibenarkan dalam pandangan Islam?
b. Dalam sistem pembuktian terbalik, jika pihak tertuduh tidak mampu menunjukkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa harta yang telah ia miliki bukan hasil dari korupsi, bolehkah orang tersebut secara langsung dijadikan sebagai terdakwa pelaku korupsi?

Jawaban

Mengikuti Putusan Munas NU Tahun 2006 di Surabaya[1]

392. Pergesaran Arah Kiblat

Deskripsi Masalah

Gempa bumi di samping menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, ditengarai juga berdampak pada pergeseran arah kiblat pada beberapa bangunan masjid dan mushalla. Hal ini dikarenakan pengaruh pergeseran lempengan dalam perut bumi yang berdampak pada lapisan permukaan

[1] Hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik dalam kedudukan sebagai *qarinah* (indikasi). Baca, LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* (Surabaya: Khalista, 2010), 669-676.

bumi. Isu pergeseran arah kiblat ini cukup menggelisahkan umat Islam secara luas, bahkan MUI untuk sekian kalinya sampai menerbitkan fatwanya yaitu fatwa nomor 3 kemudian disusul fatwa nomor 5. Secara umum sikap umat Islam terhadap isu ini terbelah menjadi tiga, yaitu:

a. Menerimanya begitu saja, sehingga mereka serentak melakukan penggeseran *shaf* shalatnya di masjid dan mushalla mereka tanpa melakukan pengukuran ulang arah kiblat terlebih dahulu.
b. Menolak secara *apriori*, sehingga mereka tidak bersedia melakukan pengukuran ulang (cek ulang) arah kiblat pada masjid dan mushalla mereka.
c. Bersikap dengan bijaksana, yaitu dengan melakukan pengukuran kembali arah kiblat pada masjid dan mushalla mereka.

Untuk kelompok ketiga yang melakukan pengukuran ulang ini ternyata mereka menemukan hasil yang beragam, ada bangunan masjid yang arah kiblatnya benar yaitu 240 01' (*Markaz* Surabaya) dan ada pula bangunan masjid dan mushalla yang arah kiblatnya tidak benar serta bervariasi. Ada yang menghadap lurus ke arah barat dan ada pula yang condong ke utara 100 140 200 dan lain sebagainya.

Pertanyaan

a. Terhadap isu pergeseran arah kiblat ini, sikap dan tindakan apa yang mesti diambil oleh umat Islam?
b. Terlepas ada issu pergeseran atau tidak, adakah kewajiban secara berkala atas umat Islam melakukan pengukuran ulang arah kiblat pada bangunan masjid dan mushalla?
c. Bagaimana hukum shalat bagi orang yang melakukannya di masjid dan mushalla yang ternyata keliru arah kiblatnya?
d. Bagaimana pendapat NU sebagai penganut salah satu madzhab empat mengenai menghadap kiblat?

Jawaban

a. Issue pergeseran kiblat pada masjid/musholla akibat gempa bumi, realitanya sangat sedikit sekali berdasar keterangan ahli dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), pergeseran lempeng bumi yang terjadi di berbagai tempat, misalnya:
   1) Kasus gempa Aceh 2004, pergeserannya hanya 7 cm dimana sudutnya bergeser 2,32 mili detik busur = 0,00000064 derajat.
   2) Kasus gempa Chile 2010, pergeserannya sekitar 8 cm dimana sudutnya bergeser 2,7 mili detik busur = 0,00000075 derajat.

   Maka dari keterangan di atas pergeseran lempeng bumi yang terjadi tidak merubah arah kiblat. (Jakarta, ANTARA News) Oleh karena

itu umat Islam dalam menyikapi issue ini harus tetap berhati-hati. Sehingga apabila tidak terbukti memang salah dengan didukung bukti yang akurat dalam jarak geser yang tidak dapat ditoleransi, tidak wajib melakukan pengukuran ulang arah kiblat.

Adapun masjid atau musholla yang sejak pendiriannya keliru, yang kekeliruan itu baru diketahui akhir-akhir ini, maka wajib dilakukan pembenaran arah kiblat.

b. Gugur

c. Bila kekeliruan itu hanya sekedar ke arah kiri atau arah kanan dengan batas toleransi 2 derajat tidak sampai merubah *jihat* (arah kiblat) atau saat menghadap kiblat sudah didahului atas *ijtihad* maka tidak harus mengulang shalat. Bila kekeliruan itu pada *jihat* kiblat (melebihi 2 derajat) atau saat menghadap kiblat tidak berdasarkan *ijtihad* maka shalatnya harus diulang.

d. menghadap kiblat bagi NU dalam shalat mengacu pada salah satu dari madzhab empat.

   1) Madzhab Syafi'i. Menghadap kiblat menurut madzhab Syafi'i adalah menghadap *'ain al-ka'bah* dengan yaqin, jika *mushalli* berada di tempat yang dapat melihat Ka'bah dan dengan secara *zhanny* (*ijtihady*) jika *mushalli* berada di tempat yang tidak dapat melihat ka'bah.

   2) Madzhab Malik bin Anas. Menurut Imam Malik menghadap kiblat memiliki tiga kategori. Pertama, kiblat bagi orang yang berada di dalam Masjid al-Haram adalah Ka'bah, kedua, kiblat bagi orang yang berada di wilayah Tanah Haram adalah Masjid al-Haram dan ketiga, kiblat bagi orang berada di luar Tanah Haram adalah Tanah Haram.

   3) Madzhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Menurut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, bagi orang yang dapat melihat Ka'bah maka harus (*ishabah 'ain al-ka'bah*) yaitu menghadap *'ain al-ka'bah* dan bagi orang yang jauh dari Ka'bah, maka menghadap dengan cara (*ishabah jihah al-ka'bah*) yaitu menghadap arah Ka'bah, hal yang demikian ini jika tidak memungkinkan menghadap *'ain al-ka'bah*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Hasyiyah al-Jamal*, I/324, [Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi]:

اَلْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْبِرَ عَنْ عِلْمٍ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ رُؤْيَةُ الْمَحَارِيبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَفِي مَرْتَبَتِهَا بَيْتُ الْإِبْرَةِ الْمَعْرُوفُ لِعَارِفٍ بِهِ، ثُمَّ إِخْبَارُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ، ثُمَّ رُؤْيَةُ الْقُطْبِ، ثُمَّ

إِخْبَارُ شَخْصٍ أَنَّهُ رَأَى الْجَمَّ الْغَفِيرَ يُصَلُّونَ إِلَى هَذِهِ الْجِهَةِ، ثُمَّ الاجْتِهَادُ اهـ بَرْمَاوِيٌّ

Kesimpulan media penentu arah kiblat adalah, bahwa informan yang berdasarkan pengetahuan diprioritaskan daripada selainnya; lalu melihat *mihrab-mihrab* yang dapat dipedomani, dan yang setingkat dengannya adalah kompas bagi orang yang bisa menggunakannya; lalu orang yang mencapai batas *mutawatir*, melihat bintang *Quth*; lalu berita dari orang yang melihat jamaah besar shalat menghadap arah tertentu; kemudian *ijtihad*. Demikian kata Muhammad bin Abd ad-Daim al-Barmawi.

b. *'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti*, I/37:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ: وَحَرُمَ الاجْتِهَادُ بِمَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ الْمَوْثُوقَةِ بِأَنْ شَاهَدَهَا قُرُونٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَلِمَتْ مِنَ الطَّعْنِ لِأَنَّ الْغَالِبَ نَصْبُهَا بِحَضْرَةِ جَمْعٍ عَارِفِينَ وَمُرُورَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ بِهَا يُصَيِّرُهَا كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا. فَمَا هُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ لَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَّا أَنَّهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ بِإِخْبَارِ عَدَدٍ كَثِيرٍ عَارِفِينَ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ، وَإِذَا تَيَقَّنَّا ذَلِكَ وَجَبَ قَضَاءُ مَا صَلَّى فِيهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.... إِذَا خَالَفَ عَارِفٌ بِفَنِّ الْفَلَكِ مِحْرَابًا نَشَأَ بِهِ قُرُونُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ طَرَقَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَسَلِمَتْ مِنَ الطَّعْنِ، فَالْمُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ الْمِحْرَابُ.

(Persoalan) Ibn Hajar dalam *Fath al-Jawad* berkata: *"Dan haram ijtihad untuk menentukan arah kiblat, sebab adanya mihrab-mihrab kaum muslimin yang terpercaya, yakni telah disaksikan oleh beberapa generasi kaum muslimin dan terhindar dari celaan, sebab pada umumnya pembangunannya dilakukan di depan segolongan orang yang mengetahui dasar-dasar penentuan arah kiblat, dan banyaknya orang yang melewati menjadikannya seperti telah disepakati kebenarannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak boleh menggeser arah kiblat kecuali kita yakin bahwa arahnya tidak tepat berdasarkan pemberitahuan orang banyak yang mengetahui dasar-dasar penentuan arah kiblat. Apabila kita meyakini demikian, maka wajib menggadha shalat yang telah dilakukan tanpa menghadap ke arah kiblat."*..... Bila orang yang menguasai disiplin ilmu *falak* menentang *mihrab* yang dibangun oleh beberapa generasi kaum muslimin atau yang dilalui oleh mayoritas kaum muslimin dan selamat dari celaan, maka yang dijadikan pedoman arah kiblat dalam kondisi semacam ini adalah *mihrab*.

c. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 39, [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةُ ك) الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْقِبْلَةِ، وَلَوْ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ مَكَّةَ فَلَا

بُدَّ مِنِ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ مَعَ طُوْلِ الصَّفِّ، بِحَيْثُ يَرَى نَفْسَهُ مُسَامِتًا لَهَا ظَنًّا مَعَ الْبُعْدِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَكْفِي اسْتِقْبَالُ الْجِهَةِ، أَيْ إِحْدَى الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي فِيهَا الْكَعْبَةُ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا. وَهُوَ قَوِيٌّ، اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَابْنُ كج وَابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ الْجَدِيْدُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لِأَنَّ جِرْمَهَا صَغِيرٌ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَهْلُ الدُّنْيَا، فَيَكْتَفِي بِالْجِهَةِ. وَلِهَذَا صَحَّتْ صَلَاةُ الصَّفِّ الطَّوِيلِ إِذَا بَعُدُوا عَنِ الْكَعْبَةِ، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَارِجُوْنَ مِنْ مُحَاذَاةِ الْعَيْنِ، وَهَذَا الْقَوْلُ يُوَافِقُ الْمَنْقُوْلَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَشْرِقَ قِبْلَةُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ وَبِالْعَكْسِ، وَالْجَنُوْبَ قِبْلَةُ أَهْلِ الشَّمَالِ وَبِالْعَكْسِ، وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَكَّةُ قِبْلَةُ أَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الدُّنْيَا. هَذَا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، إِذِ التَّفْصِيلُ الْوَاقِعُ فِي الْقَوْلِ بِالْجِهَةِ وَاقِعٌ فِي الْقَوْلِ بِالْعَيْنِ إِلَّا فِي صُوْرَةٍ يَبْعُدُ وُقُوْعُهَا، وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ الْخَطَأُ فِي التَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ، فَإِنْ كَانَ ظُهُوْرُهُ بِالْاجْتِهَادِ لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعًا، سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا، بَلْ يَنْحَرِفُ وَيُتِمُّهَا، أَوْ بِالْيَقِيْنِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا إِنْ قُلْنَا بِالْجِهَةِ لَا إِنْ قُلْنَا بِالْعَيْنِ، بَلْ تَجِبُ الْإِعَادَةُ أَوِ الْاسْتِئْنَافُ. وَتَبَيُّنُ الْخَطَأِ إِمَّا بِمُشَاهَدَةِ الْكَعْبَةِ وَلَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا مَعَ الْقُرْبِ، أَوْ إِخْبَارِ عَدْلٍ، وَكَذَا رُؤْيَةُ الْمَحَارِيْبِ الْمُعْتَمَدَةِ السَّالِمَةِ مِنَ الطَّعْنِ. قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ. وَيُحْمَلُ عَلَى الْمَحَارِيْبِ الَّتِي ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَيْهَا وَمِثْلُهَا مُحَاذِيْهَا لَا غَيْرُهُمَا.

(Masalah dari Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi) Pendapat yang *rajih* menyatakan *shalat* harus menghadap *'ain al-qiblah-Ka'bah-*, meskipun bagi orang yang ada di luar Makkah, sehingga harus serong sedikit ketika *shaf*nya panjang, sekira orang yang shalat melihat dirinya lurus dengan Ka'bah berdasarkan dugaan kuatnya dari jarak yang jauh. Pendapat kedua menyatakan cukup menghadap arah kiblat, maksudnya salah satu dari empat arah yang menjadi tempat Ka'bah bagi orang yang jauh darinya. Pendapat ini yang kuat, dan dipilih oleh al-Ghazali, dan dishahihkan oleh al-Jurjani, Ibn Kaj, dan Ibn Abi 'Ushrun; dan al-Mahalli yakin dengannya. Al-Adzra'i berkata: *"Sebagian Ashab menyebutkan bahwa pendapat tersebut adalah qaul jadid."* Pendapat itu merupakan pendapat yang dipilih, sebab ukuran fisik Ka'bah kecil yang mustahil orang di seluruh dunia menghadap padanya, maka cukup menghadap arahnya

saja. Karena itu, sah shalat suatu jamaah dengan *shaf* panjang ketika jauh dari Ka'bah, dan telah maklum bahwa sebagian dari jamaah tidak sejajar dengan Ka'bah. Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah, yaitu arah timur menjadi kiblat orang yang ada di barat dan sebaliknya, dan arah selatan menjadi kiblat orang yang ada di utara; serta sesuai dengan pendapat yang dinukil dari Malik yang menyatakan bahwa Ka'bah menjadi kiblat orang yang ada di Masjidil Haram, dan Masjidil Haram menjadi kiblat bagi penduduk Makkah, Makkah menjadi kiblat penduduk Tanah Haram, dan Tanah Haram menjadi kiblat bagi penduduk seluruh dunia. Demikian ini, sebenarnya *tahqiq*nya tidak ada perbedaan antara kedua pendapat tersebut, sebab perincian yang ada pada pendapat yang mencukupkan menghadap arah kiblat ada juga dalam pendapat yang mengharuskan menghadap wujud fisiknya, kecuali dalam kasus yang kemungkinan kecil terjadi. Yaitu andaikan terbukti adanya kesalahan dalam serong ke kanan atau ke kiri. Bila terbukti kesalahan itu berdasarkan *ijtihad*, maka tidak berpengaruh secara pasti, baik terjadi setelah maupun di saat shalat, tapi pelakunya harus berpindah arah dan menyempurnakan shalatnya; atau bila terbukti meyakinkan, maka hukumnya juga seperti itu jika kita berpedoman pada pendapat yang mencukupkan arah kiblat, tidak demikian bila kita berpedoman pada pendapat yang mengharuskan menghadap bentuk fisik kiblat, akan tetapi harus *i'adah* atau mengulangi shalat dari awal. Kesalahan itu bisa dibuktikan, adakala dengan melihat Ka'bah secara langsung yang tidak akan terjadi kecuali dekat dengannya, atau dengan informasi dari orang adil. Begitu pula dengan melihat *mihrab-mihrab* yang dapat dijadikan pedoman dan selamat dari celaan. Demikian kata Ibn Hajar dalam *at-Tuhfah*. *Mihrab* yang dimaksud diarahkan kepada *mihrab* yang telah menjadi pedoman arah kiblat, begitu pula yang sejajar dengannya, bukan selain keduanya.

d. *Mawahib al-Jalil*, II/199, [Dar 'Alam al-Kutub]:

حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: الْكَعْبَةُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الدُّنْيَا.

Diriwayatkan dari Malik, sungguh beliau berkata: *"Ka'bah menjadi kiblat bagi jamaah masjidil haram, masjidil haram menjadi kiblat bagi penduduk Makkah, dan Tanah Haram menjadi kiblat bagi penduduk di penjuru dunia."*

e. *Tabyin al-Haqa`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq*, I/100-101, [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ (وَلِغَيْرِهِ إِصَابَةُ جِهَتِهَا) أَيْ لِغَيْرِ الْمَكِّيِّ فَرْضُهُ إِصَابَةُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ

قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ... قَالَ بَعْضُهُمْ الْبَيْتُ قِبْلَةُ مَنْ يُصَلِّي فِي مَكَّةَ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي الْبَطْحَاءِ، وَمَكَّةُ قِبْلَةُ أَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ الْآفَاقِ.

Abdullah bin Ahmad an-Nasafi-*rahimahullah*- berkata: *"Dan bagi selain orang Makkah menghadap arah Ka'bah secara benar."* Yakni bagi selain orang Makkah kewajibannya adalah menghadap arah Ka'bah secara benar. Itu pendapat mayoritas *masyayikh*, dan itu pendapat *shahih* ... Sebagian ulama berkata: *"Ka'bah menjadi kiblat bagi orang yang shalat di Makkah, di rumahnya atau di dataran, Makkah jadi kiblat bagi penduduk Tanah Haram, dan Tanah Haram menjadi kiblat bagi orang yang berada di luarnya."*

f. *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, III/256 [Dar al-Fikr, 1994]:

وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ إِلَّا بِمَكَّةَ عِنْدَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ إِنْ زَالَ عَنْهُ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ فَقَدْ تَرَكَ الْقِبْلَةَ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا الْمَشْرِقُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذَا الْمَغْرِبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ. قُلْتُ لَهُ: فَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى الْوَسَطَ.

Al-Atsram berkata: *"Aku bertanya pada Ahmad bin Hanbal mengenai makna hadits* مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ, lalu beliau menjawab: *"Ini untuk orang di setiap negeri kecuali Makkah di sisi Baitullah. Karena apabila penduduk Makkah menyerong meski sedikit, berarti ia telah meninggalkan kiblat."* Kemudian beliau berkata: *"Ini timur"*, beliau memberi isyarat dengan tangannya, *"Dan ini barat"*, beliau memberi isyarat dengan tangannya, *"Dan di antara keduanya merupakan kiblat."* Aku bertanya padanya: *"Apakah shalat orang yang berada di antara keduanya hukumnya boleh?"* Beliau menjawab: *"Ya, dan hendaknya ia harus memperhatikan tengah-tengahnya."*

g. Referensi lain:
   1) *Al-Ghurar al-Bahiyah*, I/281-282, [Jami' al-Fiqh al-Islami]
   2) *Al-Umm*, I/114, [Jami' al-Fiqh al-Islami]
   3) *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, I/101 [Jami' al-Fiqh al-Islami]

393. Jasa Orang Pintar

Deskripsi Masalah

Dengan bermacam persoalan yang menimpa, wajar jika kita bergerak mencoba mencari solusinya. Namun dari berbagai upaya tersebut, ada beberapa yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya adalah

adanya aktivitas "*klenik*" dikalangan sebagian masyarakat, yaitu mencari solusi atas berbagai masalah kehidupannya dengan mendatangi seseorang yang dianggap "*orang pintar*", baik dia dikenal sebagai "*kyai*" atau dia yang masyhur sebagai "*dukun*", baik untuk meminta petunjuk padanya atau sekedar berkonsultasi. Juga, ada yang menempuh upaya mencari solusi tersebut dengan ramalan *horroskop*/perbintangan yang banyak ditemui di berbagai media massa, atau dengan mengaksesnya via layanan pesan singkat (*Short Message Service*/SMS) di nomor-nomor tertentu.

Dilain pihak, ada beberapa hadits yang menegaskan larangan *"Mendatangi 'Arraf dan Kahin"*, walaupun redaksinya berbeda-beda. Misal:

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. (رواه أحمد)

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (رواه مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. (رواه الحاكم)

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ﷺ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا يُؤْمِنُ بِمَا يَقُولُ، كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. (رواه الطبراني)

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. (رواه أبو يعلى الموصلي)

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا صَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ.

Sementara itu, ada beberapa pihak dengan berdasar pada beberapa hadits di atas, langsung memvonis bahwa pelaku/pengguna jasa dan layanan sebagaimana tersebut di atas adalah kafir.

Pertanyaan

a. Siapakah yang dimaksud dengan سَاحِرٌ/كَاهِنٌ/عَرَّافٌ dalam hadits tersebut?
b. Apa maksud sebenarnya dari hadits-hadits di atas?

c. Apakah tidak ada pertentangan di antara hadits-hadits tersebut mengingat perbedaan redaksinya?
d. Apakah pengguna jasa sebagaimana deskripsi di atas bisa disebut *"mendatangi 'Arraf dan Kahin"*?
e. Bagaimanakah hukum mengkafirkan pengguna jasa sebagaimana deskripsi diatas?

Jawaban

a. *'Arraf* adalah orang yang memberitakan hal-hal yang lampau atau hal-hal yang samar. *Kahin* adalah orang yang memberitakan tentang hal-hal yang akan terjadi atau tentang sesuatu yang samar atau tentang keberuntungan, sial, jabatan, cobaan atau pendapatan seseorang. Sedangkan *Sahir* yaitu orang yang menggunakan jasa setan dan melakukan pendekatan kepada jin dengan berbagai perbuatan yang disukai oleh jin hingga tercapai apa yang diharapkan.
b. *Tasdiq* terhadap *kahin* yang pelakunya disebut *kufur* adalah apabila *tasdiq* itu besertaan dengan keyakinan bahwa *ta'tsir* itu dari selain Allah atau terjadi *tasyrik* antara *kahin* dan Allah, atau apabila dalam *tasdiq* itu bersamaan anggapan bahwa perbuatan yang haram itu adalah halal. Adapun *tasdiq* yang tidak demikian, maka dikatakan *kufur* nikmat. Sedangkan yang dimaksud dengan لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ tidak mendapat pahala shalat dan ibadah-ibadah yang lain.
c. Tidak bertentangan.
d. Pengguna jasa dikatagorikan mendatangi, karena titik tekannya adalah bertanya kepada dukun.
e. Tidak boleh, bahkan bisa berakibat *kufur* bagi yang mengkafirkannya, kecuali jika yang dikehendaki dengan pengkafiran adalah *kufur* nikmat.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Faidh al-Qadir*, VI/22 [Dar al-Ma'rifah]:

(مَنْ أَتَى عَرَّافًا) بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِالْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ أَوْ بِمَا أَخْفَى. وَزَعَمَ أَنَّهُ هُوَ الْكَاهِنُ يَرُدُّهُ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا فِي الْخَبَرِ الْآتِي. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ أَنَّ الْكَاهِنَ إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَارَ عَنِ الْكَوَائِنِ الْمُسْتَقْبِلَةِ وَيَزْعُمُ مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ، وَالْعَرَّافُ يَتَعَاطَى مَعْرِفَةَ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَمِنَ الْكَهَنَةِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ جِنِّيًّا يُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَارَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي إِدْرَاكَ الْغَيْبِ بِفَهْمٍ أَعْطِيَهُ وَأَمَارَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الْكَاهِنُ الَّذِي يَتَعَاطَى الْخَبَرَ عَنِ الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَثِيرًا. فَمُعْظَمُهُمْ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى مَنْ تَابَعَهُ مِنْ

الْجِنِّ. وَبَعْضُهُمْ كَانَ يَدَّعِي مَعْرِفَةَ ذَلِكَ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابٍ يَسْتَدِلُّ عَلَى مَوَاقِعِهَا مِنْ كَلَامِ مَنْ يَسْأَلُهُ. وَهَذَا الْأَخِيرُ يُسَمَّى الْعَرَّافَ بِمُهْمَلَتَيْنِ اهـ

(Orang yang mendatangi *'Arraf*), kata عَرَّافًا dengan *tasydid* huruf *ra'*-nya, yaitu orang yang memberitahu tentang berbagai hal yang telah terjadi atau yang masih samar. Asumsi bahwa *'Arraf* sebagai *Kahin* tertolak dengan berkumpul keduanya dalam hadits yang akan disebutkan. An-Nawawi berkata: *"Perbedaan di antara Kahin dan 'Arraf adalah, Kahin menyampaikan kabar-kabar yang akan terjadi di kemudian hari dan mengklaim mengetahui berbagai rahasia, sedangkan 'Arraf menyampaikan barang yang dicuri, tempat barang hilang dan semisalnya. Termasuk kategori Kahin adalah orang yang mengklaim bahwa jin menyampaikan berbagai kabar kepadanya. Begitu pula orang yang mengklaim mengetahui hal gaib dengan pemahaman yang diberikan oleh jin kepadanya dan dengan tanda-tanda yang digunakan sebagai petunjuk untuknya."* Ibn Hajar berkata: *"Kahin adalah orang yang mengabarkan hal-hal gaib, dan mereka sangat banyak pada masa Jahiliyah. Mayoritas mereka berpedoman pada jin yang mengikutinya. Sebagian yang lain mengklaim mengetahui hal-hal gaib tersebut berdasarkan muqaddimah sebab-sebab tertentu yang kejadiannya dijadikan sebagai petunjuk bagi ucapan orang yang bertanya kepadanya. Yang terakhir ini disebut sebagai 'Arraf, dengan huruf 'ain dan ra' tanpa titik."*

b. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, VII/227:

(قَوْلُهُ ﷺ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) أَمَّا الْعَرَّافُ فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ، وَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَنْوَاعِ الْكُهَّانِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: الْعَرَّافُ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى مَعْرِفَةَ مَكَانِ الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِهِمَا. وَأَمَّا عَدَمُ قَبُولِ صَلَاتِهِ فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ، وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهَا إِلَى إِعَادَةٍ، وَنَظِيرُ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ مُجْزِئَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْقَضَاءِ، وَلَكِنْ لَا ثَوَابَ فِيهَا، كَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا. قَالُوا: فَصَلَاةُ الْفَرْضِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ، إِذَا أَتَى بِهَا عَلَى وَجْهِهَا الْكَامِلِ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا شَيْئَانِ: سُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْهُ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ. فَإِذَا أَدَّاهَا فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ حَصَلَ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي. وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ أَتَى الْعَرَّافَ إِعَادَةُ صَلَوَاتِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَوَجَبَ تَأْوِيلُهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

(Sabda Nabi: *"Orang yang mendatangi 'Arraf lantas menanyainya sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam."*). Adapun keterangan

'Arraf telah dikemukakan, dan ia termasuk bagian dari macam-macam *Kahin*. Al-Khaththabi dan selainnya berkata: "*'Arraf adalah orang yang mengabarkan pengetahuan tentang tempat barang curian, barang hilang, dan semisalnya.*" Adapun maksud shalat orang tersebut tidak diterima ialah tidak mendapat pahala meskipun mencukupinya untuk menggugurkan kewajiban darinya, dan tidak perlu mengulanginya. Padanannya adalah shalat di tanah *ghasab*, yang cukup dan menggugurkan *qadha`*, namun tidak mendapat pahala. Demikian pendapat mayoritas *ashab* asy-Syafi'i. Mereka berkata: "*Sebab shalat fardhu dan kewajiban lainnya jika dilakukan menurut tata caranya yang sempurna maka memunculkan dua hal, gugurnya kefardhuan dan menghasilkan pahala. Maka apabila orang melakukannya di tanah ghasab tercapailah hal yang pertama, tidak hal yang kedua.*" *Takwil* ini harus dilakukan untuk hadits ini, sebab ulama sepakat bahwa orang yang mendatangi *'Arraf* tidak wajib mengulangi shalat selama 40 malam, maka hadits ini harus di*takwil*. *Wa Allahu a'lam.*

c. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, XXX/33-34:

٥- الْعِرَافَةُ حَرَامٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ. فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اَلْأَصْلُ فِيهِ اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ، فَيُلْقِيهِ فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ. وَالْكَاهِنُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْعَرَّافِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا: اَلْعَرَّافُ مِنْ جُمْلَةِ الْكُهَّانِ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ مَنْ يَتَعَاطَى عِلْمًا دَقِيقًا كَاهِنًا. وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. قَالَ النَّوَوِيُّ: عَدَمُ قَبُولِ صَلَاتِهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ.

٦- وَاخْتِلَافُ الْوَعِيدَيْنِ: اَلْكُفْرِ وَعَدَمِ قَبُولِ الصَّلَاةِ، بِاخْتِلَافِ حَالِ مَنْ أَتَى الْكَاهِنَ أَوِ الْعَرَّافَ. فَمَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا وَصَدَّقَهُمَا فِي قَوْلِهِمَا يَكْفُرُ، لِإِشْرَاكِهِ الْغَيْرَ مَعَ اللَّهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ بِهِ اللَّهُ. وَمَنْ أَتَاهُمَا لِمُجَرَّدِ السُّؤَالِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَكْفُرْ، بَلْ يُحْرَمُ مِنْ ثَوَابِ صَلَاتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا زَجْرًا. وَهَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

5. *'Irafah* hukumnya haram berdasar *nash Hadits Nabawi*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Orang yang mendatangi Kahin atau 'Arraf kemudian membenarkan ucapannya, maka benar-benar telah kufur dengan ajaran yang diturunkan kepada Muhammad."* Ibn Hajar berkata: *"Asalnya adalah pencurian pendengaran jin pada pembicaraan malaikat, kemudian ia membisikkannya ke telinga Kahin."* *Kahin* adalah nama yang disematkan untuk *'Arraf*. Imam An-Nawawi juga berkata: *"'Arraf termasuk bagian para Kahin."* Bangsa Arab menyebut setiap orang yang membidangi ilmu pelik sebagai *Kahin*. Di dalam hadits Muslim diriwayatkan dari Shafiyah*-radhiy allahu'anhuma-*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: *"Orang yang mendatangi 'Arraf lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam."* Imam An-Nawawi berkata: *"Maksud tidak diterima shalatnya adalah tidak memperoleh pahala, meskipun mencukupi untuk menggugurkan kefardhuan darinya."*
6. Perbedaan ancaman, yaitu kekufuran dan tidak diterimanya shalat, sesuai dengan perbedaan dua kondisi orang yang mendatangi *Kahin* atau *'Arraf*. Orang yang mendatangi *Kahin/ 'Arraf* dan membenarkan ucapannya maka *kufur*, karena telah menyekutukan Allah dengan selain-Nya dalam hal mengetahui perkara gaib yang telah dipilih Allah untuk diketahui sendiri oleh-Nya, dan orang yang mendatanginya hanya untuk bertanya tanpa membenarkannya maka tidak kufur, namun terhalang dari pahala shalatnya selama 40 hari karena sebagai pencegahan supaya tidak mendatanginya. Inilah yang ditunjukkan hadits Anas ﷺ yang berstatus *marfu'* dengan redaksi: *"Orang yang mendatangi Kahin, kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah membebaskan diri dari ajaran yang diturunkan kepada Muhammad; dan orang yang mendatanginya tanpa membenarkannya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 malam."*

d. *Radd al-Mukhtar*, VI/375 [Dar 'Alam al-Kutub]:

مَطْلَبٌ فِي دَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ. قُلْتُ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ دَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ مُعَارِضَةٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ فَيَكْفُرُ بِهَا، إِلَّا إِذَا أَسْنَدَ ذَلِكَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً إِلَى سَبَبٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، كَوَحْيٍ أَوْ إِلْهَامٍ، وَكَذَا لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى أَمَارَةٍ عَادِيَّةٍ بِجَعْلِ اللهِ تَعَالَى.

Masalah klaim mengetahui hal gaib, Saya (Ibn 'Abidin) mengatakan: *"Kesimpulannya, sungguh klaim mengetahui hal gaib bertentangan dengan nash al-Qur'an, maka pelakuknya kufur karenanya, kecuali bila secara sharih atau dilalah hal itu disandarkan pada sebab dari Allah Ta'ala, seperti wahyu atau ilham. Begitu pula tanda yang bersifat adat yang Allah Ta'ala jadikan (sebagai tanda hal gaib)."*

e. *Faidh al-Qadir*, VI/23 [Dar al-Ma'rifah]:

(مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا) وَهُوَ مَنْ يُخْبِرُ عَمَّا يَحْدُثُ أَوْ عَنْ شَيْءٍ غَائِبٍ أَوْ عَنْ طَالِعِ أَحَدٍ بِسَعْدٍ أَوْ نَحْسٍ أَوْ دَوْلَةٍ أَوْ مِحْنَةٍ أَوْ مِنْحَةٍ، (فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ) مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَصَرَّحَ بِالْعَلَمِ تَجْرِيدًا. وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ فَصَدَّقَهُ، أَنَّ الْغَرَضَ إِنْ سَأَلَهُ مُعْتَقِدًا صِدْقَهُ. فَلَوْ فَعَلَهُ اسْتِهْزَاءً مُعْتَقِدًا كِذْبَهُ فَلَا يَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ. ثُمَّ إِنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ ذَا الْخَبَرِ وَمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ إِنَّ مُصَدِّقَ الْكَاهِنِ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ كَفَرَ، وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْجِنَّ تُلْقِي إِلَيْهِ مَا سَمِعَتْهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَأَنَّهُ بِإِلْهَامٍ فَصَدَّقَهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَا يَكْفُرُ. قَالَ الرَّاغِبُ: الْعِرَافَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ وَالْكَهَانَةُ بِالْحَادِثَةِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ كَثِيرًا وَآخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ الْأَخْبَارَ الْعَجِيبَةَ سَطِيحٌ وَسَوَادُ بْنُ قَارِبٍ.

(*Orang yang mendatangi 'Arraf atau Kahin*), yaitu orang yang mengabarkan peristiwa yang akan terjadi, sesuatu yang gaib, nasib seseorang dengan keberuntungan, kesialan, kekuasaan, cobaan, atau anugerah, (kemudian membenarkan ucapannya, maka ia telah *kufur* dengan ajaran yang Allah turunkan kepada Muhammad), dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Nabi ﷺ secara terang-terangan menyebutkan namanya karena melepas diri darinya. Sabda beliau: *"Kemudian membenarkannya"*, memberikan pemahaman, bahwa tujuan sabda beliau bila orang yang bertanya pada *'Arraf* dan *Kahin* meyakini kebenarannya. Andaikan ia melakukannya karena meremehkannya dan meyakini kedustaannya, maka tidak akan mendapat ancaman. Kemudian tidak ada kontradiksi antara hadits ini dan sebelumnya, sebab orang yang membenarkan *Kahin*, bila meyakini bahwa ia mengetahui hal gaib maka *kufur*, dan bila meyakini bahwa jin menyampaikan kabar yang didengarnya dari malaikat, dan berdasarkan *ilham*, kemudian membenarkannya dari faktor ini maka tidak *kufur*. Ar-Raghib berkata: *"'Arrafah khusus mengabarkan kejadian-kejadian yang telah lewat, sedangkan Kahanah khusus mengabarkan peristiwa yang akan terjadi. Semuanya banyak dijumpai di kalangan Arab, dan orang terakhir yang darinya diriwayatkan khabar-khabar aneh adalah Sathih dan Sawad bin Qarib."*

f. *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad*, 206:

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا سَأَلَ رَجُلٌ آخَرَ هَلْ لَيْلَةُ كَذَا أَوْ يَوْمُ كَذَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ أَوِ النُّقْلَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ، لِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ اعْتِقَادِ ذَلِكَ وَزَجَرَ عَنْهُ زَجْرًا بَلِيغًا، فَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ يَفْعَلُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُنَجِّمُ يَقُولُ وَيَعْتَقِدُ

أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إِلَّا اللهُ، وَلَكِنْ أَجْرَى اللهُ الْعَادَةَ بِأَنَّهُ يَقَعُ كَذَا عِنْدَ كَذَا، وَالْمُؤَثِّرُ هُوَ اللهُ ﷻ، فَهَذَا عِنْدِي لَا بَأْسَ فِيهِ. وَحَيْثُ جَاءَ الذَّمُّ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ تَأْثِيرَ النُّجُومِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَفْتَى الزَّمْلَكَانِيُّ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا اهـ

(Permasalahan) Bila orang bertanya pada orang lain, apakah malam atau hari ini baik untuk melakukan akad atau pindah rumah, maka tidak perlu dijawab, sebab Nabi ﷺ melarang untuk meyakininya, dan mencegahnya secara serius, maka orang yang melakukannya tidak perlu dianggap. Ibn al-Farkah menyebutkan dari asy-Syafi'i: *"Sungguh bila seorang ahli perbintangan berpendapat dan berkeyakinan bahwa tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah, akan tetapi Allah memberlakukan suatu adat bahwa akan terjadi peristiwa semacam ini di saat muncul bintang ini, sementara penentunya hanyalah Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung, maka pendapat dan keyakinan ini menurutku tidak apa-apa. Sementara bila terdapat (dalil-dalil) celaan (tentang kasus seperti ini) maka celaan tersebut ditujukan bagi orang yang meyakini pengaruh bintang dan makhluk lainnya."* Sedangkan az-Zamlakani memfatwakan keharamannya secara mutlak.

g. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, XV/292:

وَإِنَّمَا يَكْفُرُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ.

Sungguh yang *kufur* hanya orang yang mengufurkan seorang muslim tanpa *ta'wil*.

h. *I'anah ath-Thalibin*, IV/221 [Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah]:

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ سَمَّى الْإِسْلَامَ كُفْرًا) عِلَّةٌ لِمُقَدَّرٍ: أَيْ فَيَكْفُرُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ، لِأَنَّهُ سَمَّى الْإِسْلَامَ الْمُتَلَبِّسَ بِهِ كُفْرًا. وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا. أَيْ رَجَعَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ.

(Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Karena dia menyebut Islam sebagai kekufuran."*) adalah *'illat* bagi lafal yang dikira-kirakan. Maksudnya maka kufurlah orang yang mengafirkan seorang muslim tanpa *takwil*, karena ia menyebut Islam yang dianutnya sebagai kekufuran. Sungguh *shahih* sabda Nabi ﷺ: *"Bila seseorang berkata pada saudara seagamannya: "Wahai kafir", maka kembalilah perkataan itu kepadanya."* Maksudnya ia kembali dengan membawa kalimat kekufuran.

i. *Fatawa Haditsiyah*, 8, [al-Marja' al-Akbar]:

مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ مُوجِبٍ لِذَلِكَ كَفَرَ.

Barangsiapa yang menuduh kufur seorang muslim tanpa faktor yang

menetapkannya maka ia *kufur* sendiri.

j. Referensi lain:
   1) *Faidh al-Qadir*, VI/22-23 [Dar al-Ma'rifah]

394. Berbakti kepada Orang Tua, Guru, dan Mertua

Deskripsi Masalah

Dengan menikah tentunya seseorang bertambah orang tuanya, yaitu yang disebutnya dengan mertua, sehingga kesemuanya menjadi tiga yaitu orang tua, mertua dan guru yang terhadap keseluruhanya seseorang wajib berbakti.

Pertanyaan

a. Bagaimana batasan berbakti kepada mertua? Jika seorang menantu durhaka kepadanya apakah sebagaimana durhaka terhadap orang tuanya?
b. Jika antara orang tua, mertua dan guru berselisih, haruskah memilih salah satunya ataukah malah tidak diikuti kesemuanya?

Jawaban

a. Berbakti pada mertua adalah sebagaimana ber*muasyarah* dengan mahram yang lain, sehingga durhaka kepadanya tidak sama dengan durhaka terhadap orang tua.
b. Yang diutamakan adalah orang tua kecuali dalam urusan ilmu akhirat, maka yang diutamakan adalah guru, lebih-lebih orang tua yang juga menjadi gurunya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin*, I/335-336, [Mu'assasah at-Tarikh al-'Arabi]:

(اَلْوَظِيْفَةُ الْأُوْلَى) مِنَ الْوَظَائِفِ السَّبْعَةِ (اَلشَّفَقَةُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِيْنَ) بِصَرْفِ الْهِمَّةِ إِلَى إِزَالَةِ الْمَكْرُوهِ عَنْهُمْ (وَأَنْ يُجْرِيَهُمْ مَجْرَى بَنِيْهِ) فِي تِلْكَ الشَّفَقَةِ. (قَالَ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ) ... (لِوَلَدِهِ) ... (بِأَنْ يَقْصِدَ إِنْقَاذَهُمْ) أَيْ تَخْلِيْصَهُمْ (مِنْ) عَذَابِ (نَارِ الْأَخِرَةِ وَهُوَ أَهَمُّ مِنْ إِنْقَاذِ الْوَالِدَيْنِ وَلَدَهُمَا مِنْ نَارِ الدُّنْيَا) أَيْ مَشَاقِّهَا (وَلِذَلِكَ صَارَ حَقُّ الْمُعَلِّمِ) لِطَرِيْقِ الْخَيْرِ (أَعْظَمَ مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ) إِذَا تَعَارَضَا (فَإِنَّ الْوَالِدَ سَبَبُ الْوُجُوْدِ الْحَاضِرِ وَالْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ) وَهُمَا يَضْمَحِلَّانِ، (وَالْمُعَلِّمَ سَبَبُ الْحَيَاةِ الْبَاقِيَةِ) الْأَبَدِيَّةِ. (وَلَوْلَا الْمُعَلِّمُ لَانْسَاقَ مَا حَصَلَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ)، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ جِهَةِ الْأَبَوَيْنِ (إِلَى الْهَلَاكِ الدَّائِمِ، وَإِنَّمَا الْمُعَلِّمُ هُوَ الْمُفِيْدُ لِلْحَيَاةِ الْأُخْرَوِيَّةِ الدَّائِمَةِ)

... وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْرَ فِي الشَّاهِدِ وَجَدْتَ نَفْعَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَعْظَمَ مِنْ نَفْعِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ. فَإِنَّهُ أَنْقَذَكَ وَأَنْقَذَ آبَائَكَ مِنَ النَّارِ. وَغَايَةُ أَمْرِ أَبَوَيْكَ أَنَّهُمَا أَوْجَدَاكَ فِي الْجِسْمِ، فَكَانَا سَبَبًا لِإِخْرَاجِكَ إِلَى دَارِ التَّكْلِيفِ وَالْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ. وَيُلْحَقُ بِهِ ﷺ كُلُّ مُعَلِّمٍ لِطَرِيقَتِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِرْشَادِ وَالْإِصْلَاحِ وَالْهِدَايَةِ.

(Tugas guru yang pertama) dari ketujuh tugasnya adalah (menyayangi para murid) dengan mengarahkan tujuannya untuk menghilangkan hal yang tidak disukai dari mereka (dan memperlakukannya sebagaimana anaknya) dalam kasih sayangnya tersebut, (Nabi ﷺ bersabda: *"Sungguh niscaya bagi kalian aku seperti orang tua"*) ... (kepada anaknya) ... (yaitu dengan maksud menyelamatkan mereka), maksudnya menyelamatkan mereka (dari) *azab* (neraka *akhirat*. Hal ini lebih penting dari penyelamatan kedua orang tua pada anaknya dari neraka dunia), maksudnya beratnya kehidupan dunia. (Sebab itu hak guru) untuk digauli secara baik (lebih agung daripada hak kedua orang tua) ketika keduanya bertentangan, (sebab orang tua merupakan sebab wujud di dunia dan kehidupan *fana'*), yang keduanya akan sirna, (sedangkan guru adalah sebab kehidupan abadi) yang kekal. (Andai tidak ada guru, niscaya apa yang dihasilkan dari arah ayah akan mudah), dalam naskah lain: *"Dari arah kedua orang tua,"* (sirna selamanya. Guru adalah orang yang paling berjasa untuk kehidupan akhirat yang kekal) ... dan jika kamu renungkan perkara yang ada dalam bukti-bukti dalil maka kamu temukan jasa Rasulullah ﷺ lebih besar daripada jasa ayah dan ibu, serta semua makhluk. Sebab, beliau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan ayah-ayahmu dari neraka, sedangkan puncak jasa kedua orang tuamu adalah bahwa mereka telah mewujudkanmu dalam bentuk fisik, karena itu mereka berdua menjadi sebab kamu keluar ke alam tempat *taklif*, cobaan, dan fitnah. Setiap guru disamakan dengan Nabi ﷺ karena jasanya memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk.

b. *Yas`alunaka*, IV/95:

لَا صِحَّةَ لِقَوْلِ مَنْ يَقُوْلُ إِنَّ طَاعَةَ الْإِنْسَانِ لِأُسْتَاذِهِ أَهَمُّ مِنْ طَاعَةِ الْإِنْسَانِ لِأُمِّهِ وَأَبِيْهِ، خُصُوْصًا إِذَا تَسَاوَى الْوَالِدَانِ مَعَ الْأُسْتَاذِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالتَّوْجِيْهِ إِلَى الْخَيْرِ وَالْأَمْرِ بِالطَّاعَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. وَذٰلِكَ لِأَنَّ طَاعَةَ الْإِنْسَانِ لِوَالِدَيْهِ فِيْمَا أَوْجَبَ اللهُ أَوْ شَرَعَ وَأَبَاحَ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى الْإِنْسَانِ. وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكْتَفِيَ فِي هٰذَا الْمَجَالِ بِمُجَرَّدِ الطَّاعَةِ لِلْوَالِدَيْنِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِمَا فِي الْمُعَامَلَةِ. لِأَنَّ

الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَةَ جَعَلَ مَنْزِلَةَ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَنْزِلَةِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ.

Tidak sah pendapat orang yang mengatakan bahwa ketaatan seseorang terhadap gurunya lebih penting daripada ketaatannya kepada ibu dan ayahnya, khususnya ketika mereka berdua sama dengan gurunya dalam hal ilmu pengetahuannya tentang kebenaran, pengarahan mereka pada kebaikan, dan perintahnya pada ketaatan dan amal shaleh. Hal tersebut disebabkan ketaatan seseorang kepada kedua orang tuanya dalam hal yang diwajibkan Allah, atau disyariatkan dan dibolehkannya merupakan kewajiban baginya. Dalam kebajikan ini tidak semestinya seseorang mencukupkan diri dengan hanya taat pada orang tua, bahkan ia wajib bergaul dengan mereka berdua secara baik, sebab al-Qur'an al-Karim memposisikan derajat kedua orang tua setelah posisi beribadah kepada Allah.

c. *Abjad al-'Ulum*, I/127 [Wazarah al-Auqaf wa al-Irsyad al-Qaumi]:

وَأَمَّا وَظَائِفُ الْمُعَلِّمِ الْمُرْشِدِ، فَالْأُوْلَى: اَلشَّفَقَةُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِيْنَ وَأَنْ يُجْرِيَهُمْ مَجْرَى بَنِيْهِ، وَلِذَلِكَ صَارَ حَقُّ الْمُعَلِّمِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ. وَلَوْلَا الْمُعَلِّمُ لَانْسَاقَ مَا حَصَلَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إِلَى الْهَلَاكِ الدَّائِمِ. وَإِنَّمَا الْمُعَلِّمُ هُوَ الْمُفِيْدُ لِلْحَيَاةِ الْأُخْرَوِيَّةِ الدَّائِمَةِ، كَمَا أَنَّ الْوَالِدَ سَبَبُ الْوُجُوْدِ الْحَاضِرِ الْفَانِيْ.

Adapun tugas-tugas guru *mursyid,* maka pertama adalah menyayangi para murid dan memperlakukannya sebagaimana anaknya. Sebab itu, hak guru lebih agung daripada hak kedua orang tua. Andai tidak ada guru, niscaya apa yang dihasilkan dari ayah mudah sirna selamanya. Niscaya hanya guru yang berjasa untuk kehidupan akhirat yang kekal, sebagaimana orang tua menjadi sebab wujud di dunia yang akan sirna.

KOMISI B

MUSHAHIH

KH. Aziz Masyhuri
KH. Syafruddin Syarif
KH. Farichin Muhshan

PERUMUS

KH. Ardani Ahmad
KH. Imam Syuhadak
KH. Murtadlo Abdul Ghoni

MODERATOR

KH. Muhibbul Aman Ali

NOTULEN

KH. M. Ali Maghfur Syadzili Isk., S.Pd.I
K. Anang Darunnaja

395. Menghindari *Dam Tamattu'*

Deskripsi Masalah

Dalam beberapa kitab fiqh di antaranya *Hasyiyah asy-Syarqawi* ada ibarat tertulis:

(وَلَمْ يَعُدْ) مَنْ ذُكِرَ مِنَ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ (لِإِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى مِيقَاتٍ) وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ أَوْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُ. فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ تَمَتُّعِهِ وَتَرَفُّهِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْمِيقَاتِ إلخ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ كَالتَّنْعِيمِ ... (حاشية الشرقاوى جز ١ ص ٤٦٥)

Berpijak pada ibarat tersebut ada sebagian orang (jamaah haji) yang memilih cara *tamattu'* tidak membayar *dam*, keputusan ini (tidak membayar *dam*) ternyata telah diikuti banyak orang. Karena menurut jamaah tersebut, untuk menghindari dari *dam tamattu'* tidak perlu kembali ke *miqat* tempat ihram umrah yang telah dilewatinya, tetapi cukup mengambil *miqat* di Tan'im atau Ji'ranah.

Pertanyaan

a. Benarkah ibarat asy-Syarqawi atau yang semisal maksudnya seperti yang dipahami oleh sebagian jamaah haji tersebut?
b. Jika tidak, bagaimana maksud sebenarnya dari ibarat tersebut?
c. Lalu tindakan apa yang harus dilakukannya, terkait dengan *dam* yang belum terbayar?

Jawaban

a. Setelah dipadukan dengan keterangan dari kitab-kitab fiqh lainnya maka pemahaman terhadap kitab asy-Syarqawi seperti yang difahami oleh sebagian jamaah haji tersebut adalah tidak benar.
b. Yang dimaksud dengan pernyataan di dalam kitab *asy-Syarqawi* tersebut adalah orang-orang yang berasal dari luar Makkah yang semula tidak berniat haji namun setelah berada di dekat Tan'im tiba-tiba memiliki niat untuk melaksanakan haji, seperti pedagang, TKI, orang yang berkunjung pada saudaranya di Makkah.
c. Orang yang sebenarnya wajib membayar *dam*, akan tetapi belum membayarnya maka dia tetap berkewajiban membayar *dam* di Tanah Haram walaupun dengan cara menitipkan *dam* kepada orang yang pergi haji.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Asna al-Mathalib*, I/460 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(فَرْعٌ وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ) إلَى جِهَةِ الْحَرَمِ (غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ، ثُمَّ عَنَّ) أَيْ عَرَضَ (لَهُ) قَصْدُ النُّسُكِ (فَذَلِكَ) أَيْ مَحَلُّ عُرُوضِ ذَلِكَ لَهُ (مِيقَاتُهُ)، وَلاَ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. وَأَشَارَ إلَيْهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ... (فَصْلٌ وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ غَيْرَ مُحْرِمٍ)، وَلَمْ يَنْوِ الْعَوْدَ إلَيْهِ أَوْ إلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ مِنْ مِيقَاتٍ آخَرَ (أَسَاءَ) لِلإِجْمَاعِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَلَزِمَهُ الْعَوْدُ) إلَيْهِ مُحْرِمًا أَوْ لِيُحْرِمَ مِنْهُ تَدَارُكًا لِمَا فَوَّتَهُ (وَأَثِمَ بِتَرْكِهِ) أَيْ الْعَوْدِ (إلاَّ لِعُذْرٍ) كَضِيقِ الْوَقْتِ وَخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوِ الاِنْقِطَاعِ عَنْ الرُّفْقَةِ وَسَهْوِهِ وَجَهْلِهِ فَلَا عَوْدَ عَلَيْهِ، وَلاَ إثْمَ لِعُذْرِهِ.

(Sub masalah: Orang yang melewati *miqat*) sampai ke Tanah Haram (tanpa menghendaki *nusuk*, lalu datang), yakni, datang (kepadanya) kehendak *nusuk* (maka hal itu), artinya, tempat datangnya kehendak *nusuk* itu kepadanya merupakan (*miqat*nya), dan ia tidak harus kembali ke *miqat* sebagaimana tercakup dalam sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang telah lewat, yaitu: *"Dan orang yang tinggal di antara miqat dan Makkah maka ihram dari tempatnya memulai ihram"* dan beliau juga memberi *isyarat* pada hal itu dengan sabdanya: *"Dari orang yang menghendaki haji dan umrah.....*

(Pasal) Ketika seseorang melewati *miqat* dalam kondisi menghendaki *nusuk* tanpa *ihram*, dan tidak berniat kembali ke sana atau ke tempat semisal *masafah*nya dari *miqat* yang lain (maka ia berbuat buruk) pada *ijma'* karena alasan hadits yang terdahulu, (dan wajib baginya kembali) kesana dalam kondisi ihram, atau agar memulai ihram dari tempat tersebut untuk menyusul rangkaian *nusuk* yang terlepas (dan ia berdosa dengan meninggalkannya), maksudnya tidak kembali ke *miqat* (kecuali karena *udzur*) seperti sempitnya waktu, khawatir perjalanan, atau terpisah dari rombongan, lupa dan tidak tahunya maka tidak ada kewajiban kembali baginya dan tidak ada dosa karena *udzur*.

b. *At-Taqrirat as-Sadidah li al-Hasan bin Ahmad al-Kaf*, 491:

إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ وَهُوَ غَيْرُ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ النُّسُكُ، فَمَا الْحُكْمُ؟

يُحْرِمُ مِنْ مَحَلِّ مَا عَنَّ لَهُ أَيْ مِنَ الْمَحَلِّ الَّذِي أَرَادَ وَعَزَمَ عَلَى الإِحْرَامِ فِيهِ (وَيُسَمَّى

(الْمِيْقَاتُ الْمَعْنَوِيُّ)

Saat seseorang melewati *miqat* dalam kondisi tidak menghendaki *nusuk*, lalu datang keinginan *nusuk* kepadanya, maka bagaimana hukumnya? Ia bisa *ihram* dari tempat munculnya keinginan *nusuk*nya, maksudnya tempat dimana dia berkeinginan dan menghendaki secara kuat untuk *ihram* di tempat itu, (dan tempat tersebut dinamakan *miqat maknawi*).

c. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, III/462-463:

فَصْلٌ فِي الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا (وَالدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِحْرَامِ) بِتَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ أَوْ ارْتِكَابِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ) بِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ وَبِطَرِيقِ الْبَسْطِ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ: دَمُ التَّمَتُّعِ، وَدَمُ الْفَوَاتِ، وَالدَّمُ الْمَنُوطُ بِتَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ، وَدَمُ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ، وَدَمُ الْإِحْصَارِ، وَدَمُ قَتْلِ الصَّيْدِ، وَدَمُ الْجِمَاعِ، وَدَمُ الِاسْتِمْتَاعِ، وَدَمُ الْقِرَانِ. فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ أَخَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالْأَخِيرِ مِنْهَا وَالثَّمَانِيَةُ مَعْلُومَةٌ مِنْ كَلَامِهِ إِذِ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ دَاخِلَةٌ فِي تَعْبِيرِهِ بِالنُّسُكِ كَمَا سَيَظْهَرُ لَكَ، وَدَمُ الِاسْتِمْتَاعِ دَاخِلٌ فِي تَعْبِيرِهِ بِالتَّرَفُّهِ كَمَا سَيَظْهَرُ لَكَ أَيْضًا وَسَتَعْرِفُ التَّاسِعَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. (أَحَدُهَا) أَيْ الدِّمَاءِ (الدَّمُ الْوَاجِبُ بِتَرْكِ نُسُكٍ) وَهُوَ شَامِلٌ لِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ. الْأَوَّلُ دَمُ التَّمَتُّعِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ، وَالثَّانِي دَمُ الْفَوَاتِ لِلْوُقُوفِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ كَمَا مَرَّ. وَالثَّالِثُ: الدَّمُ الْمَنُوطُ بِتَرْكِ مَأْمُورٍ بِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

Pasal tentang *dam* wajib dan penggantinya. (*Dam* wajib dalam *ihram*) sebab meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan hal yang dilarang; (ada lima macam) dengan diringkas, dan ada sembilan macam dengan dijabarkan, yaitu: *dam tamatu'*, *dam fawat*, *dam* yang digantungkan sebab meninggalkan perkara yang diperintahkan, *dam* mencukur rambut dan kuku, *dam ihshar*, *dam* membunuh hewan buruan, *dam* bersetubuh, *dam* bercumbu, dan *dam qiran*. Inilah sembilan *dam* yang penulis (Abu Syuja') tidak menyebutkan *dam* terakhir. Sedangkan kedelapan *dam* bisa diketahui dari ungkapannya, sebab ketiga *dam* yang pertama masuk dalam ungkapannya dengan redaksi *nusuk* seperti yang akan Anda pahami; *dam* bercumbu masuk dalam ungkapannya dengan redaksi *tarafuh* sebagaimana yang juga akan Anda pahami, dan Anda *insya Allah Ta'ala* akan mengetahui *dam* yang kesembilan. (Pertama), maksudnya dari macam-macam *dam* (adalah *dam* yang wajib sebab meninggalkan *nusuk*), yaitu mencakup tiga macam *dam*. Pertama *dam*

tamatu', yang hanya wajib sebab meninggalkan *ihram haji* dari *miqat* negerinya. Kedua *dam fawat* (tidak sempat) *wuquf* setelah *tahallul* dengan ritual *umrah* sebagaimana keterangan yang telah lewat. Ketiga *dam* yang digantungkan sebab meninggalkan perkara yang diperintahkan, yaitu beberapa kewajiban haji di muka.

d. Referensi lain:
   1) *Hawasyi asy-Syirwani wa al-'Ubbadi*, IV/152 [at-Tijariyah al-Kubra]

396. Operasi Caesar Karena Ingin Menepatkan Tanggal Lahir

Deskripsi Masalah

Jumlah ibu yang melahirkan melalui operasi caesar semakin meningkat. Para ibu memilih proses ini dengan berbagai alasan, mulai dari mengurangi rasa sakit hingga sebagai langkah antisipasi jika bayi diprediksi mengalami gangguan.

Dari sisi kepraktisan tentunya operasi ini sangat membantu ibu-ibu. Lebih dari itu dengan caesar, ibu juga tahu pasti kapan bayinya akan lahir.

Selain manfaat positif, caesar juga mempunyai resiko. Ibu-ibu perlu memahami bahwa caesar merupakan pembedahan besar di area perut. Prosedur ini melibatkan pembedahan melalui kulit, perut, otot, dan kemudian masuk ke dalam rahim. Dari awal hingga akhir, biasanya memerlukan waktu tiga hingga empat jam.

Pertanyaan

Bagi ibu-ibu yang karena takut sakit, praktis, ingin anaknya lahir tepat tanggal yang dimaksudkan, apakah hal ini dibenarkan?

Jawaban

Alasan operasi caesar seperti yang disebutkan di atas belum dianggap cukup untuk diperbolehkannya melakukan Operasi caesar. Sedangkan diperbolehkannya operasi caesar adalah ketika menurut dokter muslim yang adil tindakan operasi harus dilakukan karena persalinan secara normal dapat mengancam keselamatan atau dampak negatif terhadap ibu, janin, atau keduanya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Hasyiyata al-Qulyubi*, IV/264 [Mushthafa al-Babi al-Halabi]:

قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ أَيْ بَعْضِ الْإِنْسَانِ) أَيِ الْمَعْصُومِ. قَوْلُهُ: (لِغَيْرِهِ) مَا لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا. فَيَجِبُ لَهُ فِي هَذِهِ وَالَّتِي بَعْدَهَا. قَوْلُهُ: (وَمِنْ مَعْصُومٍ) أَيْ عَلَى الْقَاطِعِ فَيَدْخُلُ

امْتِنَاعُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُهْدَرِينَ لِآخَرَ.

قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ) أَيْ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ، قَوْلُهُ: (وَمِنْ مَعْصُومٍ) لِأَنَّ عِصْمَةَ بَعْضِهِ كَعِصْمَةِ كُلِّهِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ يُفْهِمُ جَوَازَ قَطْعِ الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِلتَّعْذِيبِ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ.

(Ungkapan al-Mahalli: *"Dan haram memotongnya, maksudnya memotong bagian tubuh manusia"*), maksudnya manusia *makshum*. (Ungkapan al-Mahalli: *"Untuk orang lain"*), selama bukan seorang nabi. Maka dalam kondisi ini dan kondisi setelahnya seseorang wajib memotong bagian tubuhnya untuk seorang Nabi. (Ungkapan al-Mahalli: *"Dan dari orang makshum"*), maksudnya haram bagi orang yang memotongnya, maka termasuk pula tercegahnya memotong anggota tubuh dari salah seorang *muhdar* (yang nyawanya tidak terlindungi) bagi *muhdar* lain.

(Ungkapan al-Mahalli: *"Dan haram memotongnya"*), maksudnya karena ia orang *makshum*. (Ungkapan al-Mahalli: *"Dan dari orang makshum"*), karena ke*makshum*an sebagiannya seperti ke*makshum*an seluruhnya. Al-'Iraqi berkata: *"Ungkapan itu memberi pemahaman atas kebolehan memotong sebagian tubuh dari orang yang tidak makshum. Akan tetapi tidak seperti itu karena menyiksa, sebagaimana dijelaskan oleh al-Mawardi."*

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 93 [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةٌ) مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ، فَإِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ وَرُجِيَ عَيْشُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ شُقَّ بَطْنُهَا أَيْ بَعْدَ أَنْ تُجَهَّزَ وَتُوضَعَ فِي الْقَبْرِ، وَإِنْ لَمْ تُرْجَ الْحَيَاةُ وُقِفَ دَفْنُهَا وُجُوبًا حَتَّى يَمُوتَ، وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ دُفِنَتْ حَالًا، قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ.

(Permasalahan) Wanita meninggal, sementara ada janin di perutnya, maka jika diketahui kehidupannya dan ada harapan kelanjutan hidupnya berdasar pendapat pakar, maka perutnya dibedah, maksudnya setelah di*tajhiz* dan diletakkan dalam kuburan. Bila tidak ada harapan hidup maka pemakaman wanita itu wajib ditunda sampai janinnya meninggal, dan dalam kondisi ini tidak boleh memukulnya. Bila kehidupan janin itu tidak diketahui maka perempuan tersebut dimakamkan seketika. Demikian pendapat Ibn Hajar dalam *at-Tuhfah*.

c. *Al-Muwafaqat*, II/219-220, [Dar Ibn 'Affan]:

وَأَيْضًا: فَلَا يَمْتَنِعُ قَصْدُ الطَّبِيبِ لِسَقْيِ الدَّوَاءِ الْمُرِّ، وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْمُتَآكِلَةِ، وَقَلْعِ الْأَضْرَاسِ الْوَجِعَةِ، وَبَطِّ الْجِرَاحَاتِ [الْوَجِعَةِ]، وَأَنْ يَحْمِيَ الْمَرِيضَ مَا يَشْتَهِيهِ، وَإِنْ

كَانَ يَلْزَمُ مِنْهُ إِذَايَةُ الْمَرِيضِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ وَأَشَدُّ فِي الْمُرَاعَاةِ مِنْ مَفْسَدَةِ الْإِيذَاءِ الَّتِي هِيَ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ، وَهَذَا شَأْنُ الشَّرِيعَةِ أَبَدًا.

Dan juga, karenanya tidak tercegah tujuan dokter meminum obat yang pahit, mengamputasi anggota tubuh yang rusak, mencabut gigi geraham yang sakit, membedah luka, melarang pasien dari hal yang disukainya, meskipun berkonsekuensi menyakiti pasien, sebab tujuannya hanyalah *maslahat* yang lebih besar dan lebih berat untuk dijaga daripada *mafsadah* menyakiti pasien yang harus ditempuh. Inilah jalan syari'at selamanya.

d. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Alfadz al-Minhaj*, VI/433-434, [Dar al-Ma'rifah]:

قَوْلُهُ: (فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارٌ لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ) لِحُرْمَةِ قَلْعِهَا. وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ عُضْوٍ سَلِيمٍ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ قِصَاصٍ. أَمَّا الْعَلِيلَةُ فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِقَلْعِهَا إِنْ صَعُبَ الْأَلَمُ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إِنَّ قَلْعَهَا يُزِيلُ الْأَلَمَ. وَأَمَّا الْمُسْتَحَقُّ قَلْعُهَا فِي قِصَاصٍ فَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ، لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ فِي الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ جَائِزٌ. وَفِي الْبَيَانِ: أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَنْصِبِ الْإِمَامُ جَلَّادًا يُقِيمُ الْحُدُودَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ. وَلَوْ كَانَ السِّنُّ صَحِيحًا وَلَكِنِ انْصَبَّ تَحْتَهُ مَادَّةٌ مِنْ نَزْلَةٍ وَنَحْوِهَا، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: لَا تَزُولُ الْمَادَّةُ إِلَّا بِقَلْعِهَا، فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ جَوَازُ الْقَلْعِ لِلضَّرُورَةِ.

(Ungkapan an-Nawawi: *"Maka tidak sah menyewa orang untuk mencabut gigi yang sehat"*), karena haram mencabutnya. Dan hukumnya sama dengan gigi yang sehat, setiap anggota tubuh yang sehat dari manusia maupun lainnya selain dalam *qishash*. Adapun gigi yang sakit maka sah menyewa orang untuk mencabutnya apabila sakitnya parah dan pakar berpendapat bahwa: *"Mencabutnya akan menghilangkan sakit."* Sedangkan anggota tubuh yang berhak dipotong dalam *qishash* itu diperbolehkan menyewa orang lain untuk memotongnya. Karena akad sewa dalam *qishash* dan pemenuhan *had* itu diperbolehkan. Dalam kitab *al-Bayan* disebutkan: *"Sungguh upah dibebankan kepada muqtash minhu (orang yang mendapat keuntungan dari qishah) bila Imam tidak menugaskan algojo untuk mengeksekusi had dan menggajinya dari mal mashalih."* Andaikan ada gigi sehat, namun di bawahnya dimasuki suatu benda yang menyakitkan seperti kotoran dan semisalnya, dan pakar berpendapat bahwa benda tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mencabut gigi, maka

yang lebih tepat, seperti dikatakan al-Adzra'i ialah boleh mencabutnya karena darurat.

e. *Ahkam al-Jarahah ath-Thibyah li Syaikh Muhammad asy-Syanqithi*, 154-158:

المبحث الثالث في جراحة الولادة: وهي الجراحة التي يقصد منها إخراج الجنين من بطن أمه، سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقه أو قبله، ولا تخلو الحاجة الداعية إلى فعلها من حالتين: الحالة الأولى: أن تكون ضرورية وهي الحالة التي يخشى فيها على حياة الأم أو جنينها أو هما معا ... وهذا النوع من الجراحة يعتبر مشروعا وجائزا، نظرا لما يشتمل عليه من انقاذ النفس المحرمة الذي هو من أجل ما يتقرب به إلى الله ﷻ ... الحالة الثانية: أن تكون حاجية وهي الحالة التي يحتاجها الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية، وترتب الأضرار عليها إلى درجة لاتصل إلى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك. ومن أشهر أمثلتها: الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عند خوفهم من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معا، إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة، وذلك بسبب وجود العوائق الموجبة لتلك الأضرار، ومن أمثلتها: ضيق عظام الحوض أو تشوهها أو إصابتها ببعض الآفات المفصلية، بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض. أو يكون جدار الرحم ضعيفا، ونحو ذلك من الأمور الموجبة للعدول عن الولادة الطبيعية دفعا للضرر المترتب عليها. والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، فهم الذين يحكمون بوجودها، ولا يعد طلب المرأة أو زوجها مبررا لفعل هذا النوع من الجراحة طلبا للتخلص من آلام الولادة الطبيعية، بل ينبغي للطبيب أن يتقيد بشرط وجود الحاجة، وأن ينظر في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك، فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة، أو غلب على ظنه أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين، فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها، بشرط ألا يوجد بديل يمكن

بِوَاسِطَتِهِ دَفْعُ تِلْكَ الْأَضْرَارِ وَإِزَالَتُهَا.

Pembahasan ketiga tentang operasi caesar, yaitu operasi yang bertujuan mengeluarkan janin dari rahim ibunya, baik janin itu telah sempurna bentuknya maupun belum. Kebutuhan menempuh operasi persalinan tidak terlepas dari dua kondisi: Pertama, kondisi *darurat* yaitu kondisi yang di dalamnya dikhawatirkan keselamatan jiwa ibu, janinnya atau keduanya... operasi semacam ini dianggap *masyru'* dan dibolehkan, karena menimbang unsur di dalamnya, yaitu menyelamatkan jiwa yang dimuliakan yang termasuk ibadah terbesar kepada Allah ﷻ ... Kedua, kondisi dibutuhkan, yaitu kondisi di mana para dokter butuh melakukan operasi sebab sulitnya persalinan alami dan bahayanya tidak sampai pada derajat mengkhawatirkan keselamatan jiwa janin atau ibunya. Contohnya yang paling masyhur adalah operasi caesar (pembedahan) yang para dokter terpaksa melakukannya saat khawatir bila lahir secara alami akan terjadi bahaya terhadap ibu, janin, atau keduanya. Hal itu terjadi sebab adanya hambatan yang menimbulkan bahaya tersebut. Di antara contohnya adalah *pelvic* (tulang panggul)nya sempit, cacat, tulang panggulnya terkena penyakit *arthropoda* (persendian), yaitu sekira sendi tulang panggulnya sulit merenggang, dinding rahimnya lemah, dan semisalnya dari berbagai kondisi yang mengharuskan pindah dari persalinan alami karena menghindari bahaya yang ditimbulkannya. Barometer kebutuhan melakukan operasi semacam ini kembali pada pertimbangan para dokter. Merekalah yang menentukan butuh atau tidaknya melakukannya. Permintaan perempuan atau suaminya untuk melakukan caesar agar terhindar dari sakitnya persalinan alami tidak dianggap sebagai faktor yang membolehkannya. Dokter harus membatasi pelaksanaan operasi ini dengan syarat adanya hajat, dan menimbang kondisi dan kemampuan wanita untuk menanggung sakitnya persalinan alami. Begitu pula menimbang akibat yang ditimbulkannya. Maka jika persalinan alami mengandung resiko yang lebih besar dari biasanya bagi perempuan dan mencapai level yang menyulitkan dan memberatkan perempuan, atau menurut dugaan kuat dokter, apabila persalinan alami menyebabkan bahaya bagi janin, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh pindah pada operasi dan melakukannya dengan syarat tidak ada cara lain yang dapat menolak dan menghilangkan bahaya tersebut.

f. Referensi lain:
   1) *Mughni al-Muhtaj*, VI/164 [Jami' al-Fiqh al-Islami]
   2) *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, IV/342
   3) *Tuhfah al-Muhtaj*, IX/195 [Jami' al-Fiqh al-Islami]

397. Perbedaan Pemahaman tentang Makna *Sabilillah* dalam Zakat

Deskripsi Masalah

Beberapa tahun belakangan ini, kian terlihat bertambah kencang polemik dan perselisihan dikalangan warga NU di beberapa daerah dalam hal penerapan golongan *sabilillah* dalam *asnaf mustahiq* zakat. Hal ini dipicu karena ketidakseragaman dasar mereka dari hasil keputusan hukum yang disosialisasikan oleh jam'iyah NU secara kelembagaan.

Sebagaimana diketahui dari penuturan ulama salaf (*Madzhab al-Arba'ah*) bahwa yang dimaksud "*sabilillah*" dalam *asnaf mustahiq* zakat adalah "*ghuzzat*" (para tentara perang sabil), terkecuali wacana pendapat yang telah di*nuqil* oleh Imam Qaffal dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa kata *sabilillah* itu bisa bermakna luas mencakup seluruh jalur sektor kebaikan (*wujuh/jihah khair*).

Sejak awal berdiri, NU sudah mengambil langkah tegas dan antisipasi melalui keputusan no.5 dalam Muktamar NU pertama di Surabaya tanggal 21 Oktober 1926, bahwa *"Tidak diperbolehkan mentasharufkan zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok-pondok dengan mengatasnamakan sabilillah dengan berdasar pada kutipan Imam Qaffal, sebab pendapat yang dikutip Imam Qaffal tersebut adalah dla'if"*. (lihat Ahkamul Fuqaha': 1/09 – CV. Toha Putra Semarang 1960)

Namun, hasil keputusan masalah serupa diambil oleh PWNU Jatim di era-era berikutnya ternyata berbicara lain. Dalam data hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU yang dilaksanakan di PP. An-Nur Tegalrejo Nganjuk tahun 1981, di PPAI Ketapang Malang tahun 1987 dan di PP. Langitan Tuban tahun 1988, semuanya menyimpulkan bahwa: *"Hukumnya ada dua alternatif, yakni tidak boleh dengan merujuk keputusan Muktamar 1926 dimaksud. Dan yang kedua diperbolehkan dengan dasar mengikuti pendapat kutipan Imam Qaffal dan fatwa Syekh Moh. Ali Al-Maliki dan ulama-ulama yang lain"*. (Lihat CD hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim 1979-1994, 1996 dan 2002).

Pertanyaan

Pendapat siapakah sebenarnya yang dikutip oleh Imam Qaffal tersebut? Dan seberapa *mu'tabar* pendapatnya dalam takaran mazhab?

Jawaban

Belum diketahui secara pasti siapa yang dimaksud oleh Imam Qaffal tersebut, namun ada kemungkinan besar mengarah pada Imam Hasan dan Imam Anas bin Malik. Sedangkan pendapat tersebut menurut Jumhur ulama tidak *mu'tabar*. Pendapat ini tidak didukung oleh mufti

Hadramaut karena pendapat tersebut di luar lingkup mazhab empat. Namun ada juga yang sependapat dengan pendapat kutipan Imam al-Qaffal, seperti Syaikh Hasanain Makhluf dan ulama *mu'ashirin* Mesir yang memfatwakan dan memilih pendapat tersebut.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah Hasanain Makhluf,* 255:

(الْجَوَابُ) إِنَّ مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنْفَاقُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَسَبِيْلُ اللهِ عَامٌّ يَشْمَلُ جَمِيْعَ وُجُوْهِ الْخَيْرِ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْ تَكْفِيْنِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُوْنِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَجْهِيْزِ الْغُزَاةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِمَامُ الْقَفَّالُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الرَّازِيُّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ، وَهُوَ الَّذِيْ نَخْتَارُهُ لِلْفَتْوَى. وَبِنَاءً عَلَيْهِ، لَا مَانِعَ مِنْ صَرْفِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَالْحُبُوْبِ وَالْمَاشِيَةِ، وَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الْأَغْرَاضِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي السُّؤَالِ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَصْلَحَةِ الظَّاهِرَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ، خُصُوْصًا فِيْ هَذِهِ الدِّيَارِ. وَأَمَّا جُلُوْدُ الْأَضَاحِي فَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ فِيْ صَرْفِهَا فِيْ هَذِهِ الْمَشْرُوْعَاتِ الَّتِيْ تَعُوْدُ بِالْخَيْرِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا الْمُضَحُّوْنَ فِيْ ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(Jawaban) Sungguh di antara alokasi *zakat* yang ada 8, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: 60. *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir..."* [Qs: at-Taubah: 60] ialah membelajakannya dalam *sabilillah*. *Sabilillah* itu umum mencakup seluruh sektor sosial yang bermanfaat bagi muslimin, seperti mengafani mayat, membangun benteng, meramaikan masjid-masjid, menyiapkan prajurit untuk perang *fi sabilillah*, dan semisalnya dari sektor-sektor yang berisi kemaslahatan umum bagi kaum muslimin, sebagaimana pendapat sebagian fuqaha', yang dipedomani oleh al-Qaffal dari Syafi'iyah, dikutip darinya oleh ar-Razi dalam tafsirnya, dan yang saya pilih untuk difatwakan. Atas dasar hal itu, tak ada larangan untuk men*tasarruf*kan zakat emas perak, biji-bijian, dan hewan ternak, begitu pula zakat fitrah, untuk tujuan-tujuan yang disebutkan di pertanyaan sebab mengandung kemaslahatan yang jelas bagi kaum muslimin, apalagi di negeri (Mesir) ini. Adapun kulit hewan kurban, maka tidak ada alasan untuk melarang *tasarruf*nya untuk hal yang disyariatkan ini yang menguntungkan bagi muslimin, bila orang yang berkurban menyedekahkannya. *Wa Allahu a'lam.*

b. *Fatawa al-Azhar*, I/139:

جَوَازُ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ ... أَطْلَعْنَا عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَنُفِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا تَمْلِيكٌ، أَخْذًا بِرَأْيِ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي أَجَازَ ذَلِكَ اسْتِدْلَالًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ آيَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الْآيَة، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ مَذْكُورٌ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ لِلْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِي، وَنَصُّ عِبَارَتِهِ : وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُزَاةِ. فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ. انْتَهَتْ عِبَارَةُ الْفَخْرِ، وَلَمْ يَعْقُبْ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ بِشَيْءٍ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْمُغْنِي لِابْنِ قُدَامَةَ بَعْدَ أَنْ قَالَ: وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ وَالطُّرُقِ،[2] فَهِيَ صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّمَا لِلْحَصْرِ وَالْإِثْبَاتُ تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ أَنَسًا وَالْحَسَنَ يُجِيزَانِ صَرْفَ الزَّكَاةِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِصَرْفِهَا فِي عَمَلِ

---

[2] Redaksi *al-Mughni* secara lengkap adalah sebagaimana berikut:

فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ وَسَدِّ الْبُثُوقِ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْأَضْيَافِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرَبِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا اللهُ تَعَالَى. وَقَالَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ: مَا أُعْطِيَتْ فِي الْجُسُورِ وَالطُّرُقِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَإِنَّمَا لِلْحَصْرِ، وَالْإِثْبَاتِ تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ.

(Pasal) Tidak boleh menasarufkan zakat kepada selain orang yang telah disebutkan Allah Ta'ala, seperti untuk membangun masjid, gedung, pengairan, perbaikan jalan, menyumbat semburan air, menjamu tamu dan semisalnya dari berbagai kebaikan yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala. Anas dan al-Hasan berkata: *"Harta yang diberikan untuk pembangunan jembatan dan jalan raya merupakan zakat yang sah."* Pendapat pertama adalah pendapat *ashah*, karena firman Allah ﷻ: *"Sungguh zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin ..."* [QS. at-Taubah: 60] Huruf إِنَّمَا berfungsi membatasi, dan kalam *itsbat* menetapkan hal-hal yang disebutkan dan me*nafi*kan selainnya. Baca, *Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi*, *al-Mughni*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M), IV/125. (Ed).

الطُّرُقِ وَالْجُسُورِ. وَمَا قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمَا غَيْرُ وَجِيهٍ، لِأَنَّ مَا أُعْطِيَ فِي الْجُسُورِ وَالطُّرُقِ مِمَّا أَثْبَتَتْهُ الْآيَةُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَتَنَاوُلِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَعَمَلِ جِسْرٍ وَطَرِيقٍ. وَلِذَلِكَ ارْتَضَاهُ صَاحِبُ شَرْحِ كِتَابِ الرَّوْضِ النَّضِيرِ إِذْ قَالَ: وَذَهَبَ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَيْ دَفْعَ الزَّكَاةِ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ إِلَى الْاِسْتِدْلَالِ بِدُخُولِهِمَا فِي صِنْفِ سَبِيلِ اللهِ، إِذْ هُوَ أَيْ سَبِيلُ اللهِ طَرِيقُ الْخَيْرِ عَلَى الْعُمُومِ وَإِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي فَرْدٍ مِنْ مَدْلُولَاتِهِ، وَهُوَ الْجِهَادُ، لِكَثْرَةِ عُرُوضِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ. وَلَكِنْ لَا إِلَى حَدِّ الْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ. فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْوَضْعِ الْأَوَّلِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْقُرَبِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْبَحْرِ فِي قَوْلِهِ: قُلْنَا ظَاهِرُ سَبِيلِ اللهِ الْعُمُومُ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ. وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لَنَا هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا صَرَفَ الْمُزَكِّي الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ وَأُثِيبَ عَلَى ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

Kebolehan men*tasarruf*kan zakat untuk membangun masjid... Saya telah menelaah pertanyaan ini dan saya menyatakan, boleh men*tasarruf*kan zakat untuk membangun masjid dan semisalnya dari sektor sosial yang tidak mengandung unsur pemberian hak milik, berdasarkan pendapat sebagian fuqaha *al-Muslimin* yang membolehkannya, karena mengambil dalil dengan keumuman firman Allah ﷻ: وَفِي سَبِيلِ اللهِ dari ayat: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...."* [Qs: at-Taubah: 60], meskipun madzhab imam empat tidak demikian. Apa yang saya ungkapkan itu tercantum dalam tafsir ayat ini karya Fakhruddin ar-Razi. Redaksinya adalah: *"Ketahuilah, sungguh lahiriah lafal dalam firman Allah:* وَفِي سَبِيلِ اللهِ *tidak menetapkan pembatasan pada setiap prajurit perang."* Karena makna ini al-Qaffal dalam tafsirnya menukil dari sebagian *fuqaha'*, bahwa mereka membolehkan pen*tasarruf*an zakat untuk segala sektor sosial, seperti halnya mengafani mayat, membangun benteng, dan meramaikan masjid-masjid karena firman Allah وَفِي سَبِيلِ اللهِ mencakup semuanya. Demikian redaksi Fahruddin ar-Razi, dan beliau-*rahimahullah*- tidak sedikitpun mengomentarinya. Dalam *al-Mughni* karya Ibn Qudamah setelah beliau mengatakan: *"Dan tidak dibolehkan*

mentasarrufkan zakat kepada selain orang yang telah disebutkan Allah ﷻ, seperti untuk membangun masjid, gedung, pembangunan jembatan dan jalan, merupakan zakat yang sah." terdapat redaksi: "Pendapat pertama adalah pendapat *ashah*, karena firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin......"* [Qs: at-Taubah: 60] Huruf إِنَّمَا berfungsi membatasi, dan *kalam itsbat* menetapkan hal-hal yang disebutkan dan menafikan selainnya." Demikan redaksi al-Mughni, dan telah jelas bahwa Anas dan al-Hasan memperbolehkan pen*tasharruf*an zakat untuk membangun masjid, karena pen*tasharruf*an zakat untuk membangun jalan dan jembatan. Adapun alasan yang disampaikan Ibn Qudamah untuk menolak pendapat mereka berdua tidak kuat, sebab zakat yang diberikan untuk pembangunan jembatan dan jalan raya termasuk pengalokasian yang ditetapkan ayat di atas karena keumuman firman Allah ﷻ: وَفِي سَبِيلِ اللهِ dan karena cakupannya terhadap setiap sektor sosial, seperti pembangunan masjid, jembatan, dan jalan. Karena itu penulis *Syarh ar-Raudh an-Nadhir* menyetujuinya, karena ia berkata:

"Dan orang yang membolehkannya, maksudnya penyerahan zakat untuk mengafani mayit dan pembangunan masjid berpendapat mengambil dalil, masuknya kedua hal tersebut dalam golongan sabilillah, sebab sabilillah adalah sektor sosial secara umum, meskipun banyak penggunaan kata tersebut untuk salah satu makna yang ditunjukkannya, yaitu jihad, karena banyak terjadinya jihad di awal Islam sebagaimana dalam padanannya, namun tidak sampai mencapai batasan hakikat 'urfiyah. Sebab itu kata sabilillah tetap pada wadha' pertamanya, sehingga segala sektor sosial sesuai pertimbangan mashlahah ammah dan khashshah kecuali yang memiliki dalil khusus masuk padanya". Itulah lahiriah redaksi kitab *al-Bahr* terkait ucapan penulisnya: Saya berpendapat: *"Secara lahiriah kata sabilillah adalah umum kecuali yang dikhususkan dengan dalil."*

Demikian redaksi *Syarh ar-Raudh an-Nadhir*. Kesimpulannya, sungguh yang jelas bagi saya ialah pendapat sebagian fuqaha' *al-Muslimin* yang membolehkan pen*tasharruf*an zakat untuk pembangunan masjid dan semisalnya. Sebab itu, apabila *muzakki* men*tasharruf*kan zakat wajibnya untuk pembangunan masjid, maka kewajiban zakat telah gugur darinya dan ia mendapat pahala karenanya. *Wa Allahu 'a'lam.*

c. *Fatawa Abu Bakr Baghitsan*, 70-76:

سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ هَلْ تُخْرَجُ شَيْءٌ مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ أَيِ النَّقْدِ فِي الْمَشَارِيعِ الْخَيْرِيَّةِ كَبِنَاءِ مَسَاجِدَ أَوْ عِمَارَتِهَا، أَوْ بِنَاءِ مَدَارِسَ أَوِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرَافِقِ

الْعَامَّةِ وَالنَّافِعَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ ... (فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. الْجَوَابُ: لَا يَجُوْزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ السَّائِلُ مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَعِمَارَتِهَا أَوْ بِنَاءِ الْمَدَارِسِ أَوِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْمَشَارِعِ الْخَيْرِيَّةِ ... وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ دَفْعُ هٰذِهِ الزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِ هٰذِهِ الْأَصْنَافِ إِلَّا مَارُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: مَا أُعْطِيْتَ فِي الْجُسُوْرِ وَالطُّرُقَاتِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ ... رَأَيْتُ عَنِ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ رَشِيْدٍ رِضَا عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ الْمَذْكُوْرِ، لِأَنَّ سَبِيْلَ اللهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُوَ الْغَزْوُ مَا لَفْظُهُ: هٰذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ، بَلْ سَبِيْلُ اللهِ هُوَ الطَّرِيْقُ الْمُوْصِلُ إِلَى مَرْضَاتِهِ وَجَنَّتِهِ. وَهُوَ الْإِسْلَامُ فِيْ جُمْلَتِهِ. وَآيَاتُ الْإِنْفَاقِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَشْمَلُ جَمِيْعَ أَنْوَاعِ النَّفَقَةِ الْمَشْرُوْعَةِ. وَمَاذَا يَقُوْلُ فِيْ آيَاتِ الصَّدِّ وَالْإِضْلَالِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْهِجْرَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ بَلْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ سَبِيْلُ اللهِ فِيْ آيَاتِ الْقِتَالِ نَفْسِهَا بِالْغَزْوِ. وَإِنَّمَا يَكُوْنُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِذَا أُرِيْدَ بِهِ أَنْ تَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَدِيْنُهُ الْمُتَّبَعَ. فَسَبِيْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ يَعُمُّ الْغَزْوَ الشَّرْعِيَّ وَغَيْرَهُ مِنْ مَصَالِحِ الْإِسْلَامِ بِحَسَبِ لَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ. وَيَحْتَاجُ التَّخْصِيْصُ إِلَى دَلِيْلٍ صَحِيْحٍ. انْتَهَى. فَلَعَلَّ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ ذَكَرَ السَّائِلُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ وَغَيْرِهِمْ أَخَذَ بِقَوْلِ السَّيِّدِ رَشِيْدٍ رِضَا هٰذَا، وَلٰكِنْ هٰذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْمَعْمُوْلِ بِهَا، كَمَا رَأَيْتَهُ فِيْمَا نَقَلْنَاهُ عَنِ الشَّرْحِ الْمَذْكُوْرِ: ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِهَادِ، لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلشَّهَادَةِ الْمُوْصِلَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ وُضِعَ عَلَى هٰؤُلَاءِ، لِأَنَّهُمْ جَاهَدُوْا لَا فِيْ مُقَابِلٍ، فَكَانُوْا أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِمْ.

Abu Bahar Baghitsan-*rahimahullah*- ditanya: "*Apakah sebagian zakat mal, maksudnya zakat emas perak boleh dikeluarkan untuk sektor-sektor sosial, seperti pembangunan masjid dan imarahnya, pembangunan madrasah dan pendanaannya, atau fasilitas publik dan yang bermanfaat bagi muslimin ...?*" Maka beliau menjawab dengan ucapan: *Segala puji bagi Allah, shalawat Allah semoga terlimpahkan bagi junjungan kita Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.* Jawabannya adalah: "*Tidak boleh mentasharrufkan zakat dalam hal-hal yang disebutkan penanya dari pembangunan masjid dan imarahnya, pembangunan madrasah dan pendanaannya, atau sektor-sektor sosial lainnya.*" Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ahli ilmu dalam

hal tidak dibolehkan menyerahkan zakat ke selain golongan-golongan ini (yang telah disebutkan al-Qur'an), kecuali yang diriwayatkan dari Anas dan al-Hasan, yakni sungguh mereka berpendapat: *"Harta yang diberikan untuk pembangunan jembatan dan jalan merupakan zakat yang sah."* Saya melihat komentar dari as-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha atas pendapat *Syarh* yang telah disebutkan –yaitu pendapat al-Imam Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi di *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn al-Muqni*- berupa: *"Karena kata sabilillah ketika dimutlakkan bermakna perang"*, yang redaksinya adalah: *"Ini tidak benar, bahkan sabilillah ialah jalan yang mengantarkan pada keridhaan Allah dan surga-Nya, di antaranya adalah Islam"*. Ayat-ayat pendanaan *sabilillah* mencakup segala macam pendanaan yang disyariatkan. Apa yang akan dikatakannya tentang ayat-ayat yang mencegah dan menyesatkan dari *sabilillah* dan *hijrah fi sabilillah*? Bahkan *sabilillah* dalam ayat-ayat perang sendiri tidak benar ditafsiri dengan makna perang. Perang hanya akan termasuk *sabilillah* jika yang dikehendaki dengannya keluhuran *kalimah* Allah dan agama-Nya yang diikuti. Karena itu, *sabilillah* dalam ayat (Qs: at-Taubah: 60) tersebut mencakup perang *syar'i* dan selainnya dari kemaslahatan Islam, sesuai lafal Arabnya. Pengkhususan maknanya butuh dalil yang shahih. Demikian komentar as-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Maka mungkin orang yang berpendapat atas kebolehan menyerahkan zakat ke pihak-pihak yang disebutkan penanya, seperti dari ulama al-Azhar dan selainnya, mengambil pendapat as-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha ini. Akan tetapi pendapat ini menentang pendapat ulama berbagai madzhab yang diamalkan, seperti yang Anda lihat dalam nukilanku dari *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn al-Muqni*. Telah banyak penggunaan kata *sabilillah* untuk makna jihad, karena jihad merupakan sebab mati syahid yang bisa mengantarkan pada keridhaan Allah ﷻ. Lalu kata *sabilillah* diperuntukkan orang-orang yang berjihad, karena mereka berjihad tanpa bayaran, sehingga mereka lebih utama dari selainnya.

398. Bekas Sujud di Jidat

Deskripsi Masalah

Dari dahulu sampai sekarang, dalam kacamata kebanyakan masyarakat awam, ada kesan bahwa torehan tanda kelam/hitam di jidat seorang muslim menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang *khusyu'* atau paling tidak ahli beribadah (banyak sujud) dan bahwa ada yang mengatakan bahwa tanda tersebut adalah *nur* (cahaya) yang bisa berdampak prestisius dikalangan masyarakat. Jika tanda kelam/hitam di jidat tersebut dulu kebanyakan terlihat pada orang-orang yang

sudah berusia matang atau berumur, kini tanda tersebut sering dijumpai ada pada jidat seorang muslim yang masih muda atau para santri pondok pesantren, bahkan artis penyanyi dan bekas bromocorah yang walau baru beberapa bulan ia bertaubat pun ikut-ikutan diketemukan ada tanda tersebut.

Pertanyaan

Bagaimanakah pandangan syara' berkenaan dengan tanda kelam/hitam di jidat tersebut? Dan bagaimana hukum *ta'atsur* (mengupayakan bekas ketika sujud) atau membiarkan tanda kelam/hitam tersebut di jidat?

Jawaban

Tanda hitam pada jidat seseorang tidak mencerminkan perilaku kasalehan seseorang, meski pada sebagian orang-orang saleh ditemukan tanda hitam pada jidatnya karena sering shalat. Sedangkan usaha menampakkan tanda hitam pada jidat dengan maksud agar nampak saleh hukumnya adalah haram karena tergolong *riya'*. Bagi sebagaian orang yang telah nampak tanda hitam pada jidatnya, apabila dapat mendorong timbulnya sifat *riya'* maka menurut Imam Ghazali harus dihilangkan agar terhindar dari sifat *riya'*.

Adapun mengenai pengertian tanda hitam yang terdapat dalam ayat Al Quran:

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [الفتح: ٢٩]

Para ulama berbeda dalam menafsirkannya:

a. Tanda hitam seperti bekas cap tanda yang ada di punggung onta atau sapi.
b. Perubahan perilaku positif sebagaimana *khusyu'* dan lain-lain.
c. Kelak di hari kiamat akan nampak sinar pada jidatnya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir li Ibn 'Asyur*, XXVI/205-206 [ad-Dar at-Tunisiyah]:

وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ مِنَ السِّيمَا الَّتِي وُصِفَتْ بِأَنَّهَا مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ. الْأَوَّلُ أَنَّهَا أَثَرٌ مَحْسُوسٌ لِلسُّجُودِ. الثَّانِي أَنَّهَا مِنَ الْأَثَرِ النَّفْسِيِّ لِلسُّجُودِ. الثَّالِثُ أَنَّهَا أَثَرٌ يَظْهَرُ فِي وُجُوهِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَبِالْأَوَّلِ فَسَّرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعِكْرِمَةُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ. قَالَ مَالِكٌ: السِّيمَا هِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِجِبَاهِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ مِثْلُ مَا تَعَلَّقَ بِجَبْهَةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَثَرِ الطِّينِ وَالْمَاءِ لَمَّا وَكَفَ الْمَسْجِدُ صَبِيحَةَ إِحْدَى

وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ. وَقَالَ السَّعِيدُ وَعِكْرِمَةُ: اَلْأَثَرُ كَالْغُدَّةِ يَكُونُ فِي جَبْهَةِ الرَّجُلِ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَتَكَلَّفُونَ حُدُوثَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ، وَلَكِنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ بِسَبَبِ تَكَرُّرِ مُبَاشَرَةِ الْجَبْهَةِ لِلْأَرْضِ. وَبَشَرَاتُ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ فِي التَّأَثُّرِ بِذَلِكَ فَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّفْهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ رِيَاءً. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: يَسْجُدُونَ عَلَى التُّرَابِ لَا عَلَى الْأَثْوَابِ. وَإِلَى النَّحْوِ الثَّانِي فَسَّرَ الْأَعْمَشُ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالرَّبِيعُ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ جُزْءٍ وَالضَّحَّاكِ. فَقَالَ الْأَعْمَشُ: مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ عَنْ عَطَاءٍ وَالرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ حُسْنُ السَّمْتِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ نُورٌ مِنَ الْخُشُوعِ وَالتَّوَاضُعِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَالضَّحَّاكُ: بَيَاضٌ وَصُفْرَةٌ وَتَهَيُّجٌ يَعْتَرِي الْوُجُوهَ مِنَ السَّهَرِ. وَإِلَى النَّحْوِ الثَّالِثِ فَسَّرَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَيْضًا وَالزُّهْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ الْعَوْفِيِّ وَالْحَسَنُ أَيْضًا وَخَالِدٌ الْحَنَفِيُّ وَعَطِيَّةُ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: أَنَّهَا سِيمَا تَكُونُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالُوا: هِيَ بَيَاضٌ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ يَجْعَلُهُ اللهُ كَرَامَةً لَهُمْ.

Tanda yang disifati sebagai bekas sujud diperselisihkan dalam tiga makna. Pertama, tanda tersebut merupakan bekas fisik karena sujud. Kedua, tanda tersebut merupakan bekas fisik karena sujud. Ketiga, bahwa tanda tersebut adalah bekas yang akan tampak di wajah orang-orang yang sujud di hari kiamat. Pada makna pertama Malik bin Anas, 'Ikrimah, dan Abu al-'Aliyah menafsirkannya. Malik berkata: *"Tanda yang dimaksud sebagai bekas sujud adalah tanah yang ikut menempel di kening mereka ketika sujud, sebagaimana tanah dan air yang ikut menempel di kening Nabi ﷺ saat atap masjid bocor pada waktu subuh tanggal 21 Ramadhan"*. As-Sa'id dan 'Ikrimah berkata: *"Bekas sujud itu seperti benjolan yang ada di kening seseorang."* Yang dikehendaki bukanlah mereka bersusah payah agar bekas sujud itu ada di wajah mereka, namun bekas sujud itu ada tanpa disengaja sebab kening berulang kali menempel pada tanah, sementara kulit manusia berbeda-beda dalam membekas dan tidaknya sujud yang dilakukan. Sebab itu tidak mengapa ada orang yang ada bekas sujudnya selama ia tidak membuat-buatnya dan tidak *riya`* dengannya. Abu al-'Aliyah berkata: *"Mereka sujud di debu, tidak di kain."* Pada makna kedua al-A'masy, al-Hasan, 'Atha`, ar-Rabi, dan Mujahid menafsirkannya dari

riwayat Ibn 'Abbas, Ibn Juz'i, dan adh-Dhahak. Al-A'masyi berkata: *"Orang yang banyak shalatnya di malam hari maka wajahnya indah di siang hari."* Tafsir yang serupa dengan penafsiran ini diriwayatkan dari 'Atha' dan ar-Rabi' bin Sulaiman. Ibn 'Abbas berkata: *"Kebaikan kondisi."* Mujahid berkata: *"Bekas sujud itu merupakan cahaya dari kekhusu'an dan ketawadhu'an."* Al-Hasan serta ad-Dhahak berkata: *"Keputih-putihan, kekuning-kuningan, dan kegembiraan yang ada di wajah karena ibadah pada malam hari."* Pada makna ketiga Sa'id bin Jubair pula, az-Zuhri, Ibn 'Abbas di riwayat al-'Aufi, al-Hasan pula, Khalid al-Hanafi, 'Athiyah, dan Syahr bin Hausyab, menafsirkannya, yaitu bahwa tanda bekas sujud akan ada bagi mereka pada hari kiamat. Mereka berkata: *"Tanda bekas sujud itu merupakan kecerahan yang ada di wajah mereka di hari kiamat, seperti bulan di malam purnama yang Allah jadikan karamah bagi mereka."*

b. *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, XXIX/108 [Dar al-Fikr]:

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [الفتح: ٢٩]، فِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ [آل عمران: ١٠٦] وَقَالَ تَعَالَى: نُورُهُمْ يَسْعَى [التحريم: ٨] وَعَلَى هَذَا فَنَقُولُ نُورُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ بِسَبَبِ تَوَجُّهِهِمْ نَحْوَ الْحَقِّ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. [العنكبوت: ٤٣-٤٤] وَمَنْ يُحَاذِي الشَّمْسَ يَقَعُ شُعَاعُهَا عَلَى وَجْهِهِ، فَيَتَبَيَّنُ عَلَى وَجْهِهِ النُّورُ مُنْبَسِطًا، مَعَ أَنَّ الشَّمْسَ لَهَا نُورٌ عَارِضِيٌّ يَقْبَلُ الزَّوَالَ، وَاللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَى وَجْهِهِ يَظْهَرُ فِي وَجْهِهِ نُورٌ يَبْهَرُ الْأَنْوَارَ وَثَانِيهِمَا: أَنَّ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَظْهَرُ فِي الْجِبَاهِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ السُّجُودِ وَالثَّانِي: مَا يُظْهِرُهُ اللهُ تَعَالَى فِي وُجُوهِ السَّاجِدِينَ لَيْلًا مِنَ الْحُسْنِ نَهَارًا، وَهَذَا مُحَقَّقٌ لِمَنْ يَعْقِلُ فَإِنَّ رَجُلَيْنِ يَسْهَرَانِ بِاللَّيْلِ أَحَدُهُمَا قَدِ اشْتَغَلَ بِالشَّرَابِ وَاللَّعِبِ وَالْآخَرُ قَدِ اشْتَغَلَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ وَاسْتِفَادَةِ الْعِلْمِ فَكُلُّ أَحَدٍ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي يُفَرِّقُ بَيْنَ السَّاهِرِ فِي الشُّرْبِ وَاللَّعِبِ، وَبَيْنَ السَّاهِرِ فِي الذِّكْرِ وَالشُّكْرِ.

Firman Allah Ta'ala: *"Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud..."* (Qs: al-Fath, 29). Dalam penafsiran tanda bekas sujud ada dua pendapat. Pertama, sungguh tanda itu ada pada hari kiamat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: *"Pada hari yang di waktu itu ada*

muka yang putih berseri..." (Qs: Ali Imran, 106). Allah Ta'ala berfirman: "*Sedang cahaya mereka memancar....*" (Qs: at-Tahrim: 8). Berdasarkan hal ini saya berkata: "*Cahaya di wajah mereka disebabkan menghadap pada Allah, sebagaimana kata Nabi Ibrahim* ﷺ: "*dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin.*" (Qs: al-Ankabut, 43-44). Orang yang sejajar menghadap matahari, maka sinarnya mengenai wajahnya, sehingga di wajahnya ada cahaya terang, padahal cahaya matahari bersifat baru dan bisa hilang. Sementara Allah adalah cahaya langit dan bumi, sehingga pada wajah orang yang menghadap kepada-Nya terdapat cahaya yang menyilaukan berbagai cahaya. Kedua, tanda bekas sujud itu terdapat di dunia. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, yang dimaksud adalah bekas yang tampak di kening sebab banyak melakukan sujud. Kedua, keindahan di siang hari yang Allah Ta'ala tampakkan di wajah orang-orang yang sujud di malam hari. Ini realitas bagi orang berakal. Sebab, dua orang yang begadang pada malam hari dimana salah satunya sibuk minum-minum dan bermain, sedangkan yang satunya lagi sibuk shalat, membaca al-Qur'an, dan belajar, maka di hari berikutnya masing-masing antara orang yang begadang dengan minum dan bermain dan yang begadang dengan zikir dan syukur pasti berbeda.

c. *Hasyiyah ash-Shawi 'ala al-Jalalain*, IV/89:

قَوْلُهُ: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [الفتح: ٢٩]. أُخْتُلِفَ فِي تِلْكَ السِّيْمَا فَقِيْلَ أَنَّ مَوَاضِعَ سُجُوْدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُرَى كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. وَقِيْلَ هُوَ صُفْرَةُ الْوُجُوْهِ مِنْ سَهَرِ اللَّيْلِ. وَقِيْلَ الْخُشُوْعُ الَّذِيْ يَظْهَرُ عَلَى الْأَعْضَاءِ حَتَّى يَتَرَاءَى أَنَّهُمْ مَرْضَى لَيْسُوْا بِمَرْضَى. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَصْنَعُهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ الْمُرَائِيْنَ مِنَ الْعَلَامَةِ فِي الْجَبْهَةِ، فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْخَوَارِجِ. وَفِي الْحَدِيْثِ: إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ وَأَكْرَهُهُ إِذَا رَأَيْتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرَ السُّجُوْدِ.

Firman Allah: "*Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud...*" (Qs: al-Fath, 29). Maksud tanda-tanda tersebut diperselisihkan. Dikatakan, bahwa kening mereka di hari kiamat terlihat laksana bulan di malam purnama. Dikatakan, maksudnya kecerahan wajah karena beribadah semalaman suntuk. Dikatakan, *khusyu'* yang tampak pada anggota tubuh, sehingga mereka terlihat seolah-olah sakit, padahal tidak sakit. Tidaklah yang dikehendaki adalah tanda di kening yang dibuat-

buat oleh sebagian orang bodoh yang *riya'*, sebab hal itu merupakan identitas kaum Khawarij. Dalam hadits disebutkan: "*Sungguh, orang yang paling aku marahi dan aku benci ketika aku melihat bekas sujud di antara kedua matanya.*"

d. *Tafsir as-Siraj al-Munir li al-Khathib asy-Syirbini*, IV/31:

ثُمَّ بَيَّنَ كَثْرَةَ صَلَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: سِيمَاهُمْ، أَيْ عَلَامَتُهُمُ الَّتِي لَا تُفَارِقُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ. ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى الْعَلَامَةَ بِقَوْلِهِ: مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. وَهُوَ نُورٌ وَبَيَاضٌ فِي وُجُوهِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ [آل عمران: ١٠٦]. رَوَاهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ أَنَسٍ، هُوَ اسْتِنَارَةُ وُجُوهِهِمْ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ. وَقَالَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ: تَكُوْنُ مَوَاضِعُ السُّجُوْدِ مِنْ وُجُوهِهِمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالْخُشُوْعُ وَالتَّوَاضُعُ. وَالْمَعْنَى أَنَّ السُّجُوْدَ أَوْرَثَهُمُ الْخُشُوْعَ وَالسَّمْتَ الْحَسَنَ الَّذِي يُعْرَفُوْنَ بِهِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: هُوَ صُفْرَةُ الْوَجْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ مَرْضَى وَمَا هُمْ بِمَرْضَى. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ أَثَرُ التُّرَابِ عَلَى الْجِبَاهِ. قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: لِأَنَّهُمْ يَسْجُدُوْنَ عَلَى التُّرَابِ لَا عَلَى الثِّيَابِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: اِسْتَنَارَتْ وُجُوهُهُمْ مِنْ طُوْلِ مَا صَلَّوْا بِاللَّيْلِ، لِأَنَّ مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلُّ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. قَالَ الْبِقَاعِيُّ: وَلَا يُظَنُّ أَنَّ مِنَ السِّيمَا مَا يَصْنَعُهُ بَعْضُ الْمُرَائِيْنَ مِنْ أَثَرِ هَيْئَةِ السُّجُوْدِ فِي جَبْهَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سِيمَا الْخَوَارِجِ. وَفِي نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثِيْرِ فِي تَفْسِيْرِ الثَّفِنَاتِ وَمِنْهُ حَدِيْثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ مِثْلُ ثَفِنَةِ الْبَعِيْرِ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا كَانَ خَيْرًا. يَعْنِي كَانَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ السُّجُوْدِ. وَإِنَّمَا كَرِهَهَا خَوْفًا مِنَ الرِّيَاءِ عَلَيْهِ. وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ وَأَكْرَهُهُ إِذَا رَأَيْتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرَ السُّجُوْدِ. وَعَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ: كُنَّا نُصَلِّي فَلَا يُرَى بَيْنَ أَعْيُنِنَا شَيْءٌ، وَنَرَى أَحَدَنَا الْآنَ يُصَلِّي فَيُرَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ رُكْبَةُ الْبَعِيْرِ. فَلَا نَدْرِي أَثَقُلَتِ الرُّؤُوْسُ أَمْ خَشُنَتِ الْأَرْضُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِلنِّفَاقِ.

Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan banyaknya shalat mereka dengan firmanNya: "*Tanda-tanda mereka*", maksudnya tanda-tanda yang tidak

terpisah di wajah mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tanda-tanda itu dengan firmanNya: "*.....dari bekas sujud.*" yaitu cahaya dan cerah di wajah mereka pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "*Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri.....*" (Qs: Ali Imran, 106). (HR. 'Athiyah al-'Aufi dari Ibn 'Abbas). Diriwayatkan dari Anas, maksudnya cahaya di wajah mereka karena begitu sering melakukan shalat. Syahr bin Hausyab berkata: "*Wajah tempat sujud mereka laksana bulan di malam purnama.*" Mujahid berkata: "*Kondisi yang baik, kekhusyu'an, dan ketawadhu'an.*" Artinya sujud membuat mereka *khusyu'* dan kondisi baik yang menjadi identitas mereka. Adh-Dhahak berkata: "*Maksudnya kekuning-kuningan pada wajah.*" Al-Hasan berkata: "*Saat melihat mereka kamu menyangkanya sedang sakit, padahal mereka tidak sakit.*" Ikrimah berkata: "*Maksudnya bekas debu pada kening.*" Abu al-'Aliyah berkata: "*Sebab mereka sujud pada debu, tidak pada kain.*" 'Atha' berkata: "*Wajah mereka bersinar karena lama menjalankan shalat di malam hari. Sebab orang yang sering menjalankan shalat di malam hari, maka wajahnya terlihat indah di siang hari.*" Sebagian ulama mengatakan: "*Orang-orang yang disiplin shalat lima waktu termasuk dalam ayat ini.*" Al-Biqa'i berkata: "*Tidak disangka termasuk tanda bekas sujud adalah bekas sujud di jidat yang dibuat-buat oleh sebagian orang-orang yang riya'. Sebab itu ialah identitas kaum Khawarij.*" Dalam *an-Nihayah* karya Ibn al-Atsir terkait penafsiran orang-orang *tsiqah*, di antaranya hadits Abu Darda': "*Sungguh beliau melihat seorang laki-laki yang diantara kedua matanya terdapat seperti kulit tebal onta, kemudian beliau berkata: "Andaikan tidak ada ini, maka dia lebih baik.*" Yakni di keningnya ada bekas sujud. Beliau membencinya karena khawatir *riya'*. Diriwayatkan dari Anas, dari Nabi ﷺ, sungguh beliau bersabda: "*Sungguh, orang yang paling aku marahi dan aku benci ketika aku melihat bekas sujud diantara kedua matanya.*" Diriwayatkan dari sebagian orang-orang terdahulu: "*Kami shalat, kemudian tidak terlihat sesuatu pun di antara kedua mata kami, dan sekarang kami melihat orang shalat, kemudian kami melihat lutut onta di antara kedua matanya. Maka kami tidak tahu, apakah kepalanya yang berat atau tanahnya yang kasar.*" Dengan pernyataan itu beliau menghendaki orang yang menyengaja membuat bekas sujud karena kemunafikan.

e. *Tafsir Ruh al-Bayan li Isma'il*, XIV / 39 [al-Marji' al-Akbar]:

(سِيْمَاهُمْ) فَعَلَ مَنْ سَامَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ أَيْ جَعَلَهُ ذَا عَلَامَةٍ. وَالْمَعْنَى عَلَامَتُهُمْ وَسِمَتُهُمْ. وَقُرِىءَ سِيْمِيَاؤُهُمْ بِالْيَاءِ بَعْدَ الْمِيْمِ وَالْمَدِّ. وَهُمَا لُغَتَانِ. وَفِيْهَا لُغَةٌ ثَالِثَةٌ، هِيَ السِّيْمَاءُ بِالْمَدِّ. وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُ قَوْلِهِ: (فِيْ وُجُوْهِهِمْ) أَيْ ثَابِتَةٌ فِيْ وُجُوْهِهِمْ (مِنْ أَثَرِ

السُّجُوْدِ) حَالٌ مِنَ الْمُسْتَكِنِّ فِي الْجَارِ. وَأَثَرُ الشَّيْءِ حُصُوْلُ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوْدِهِ، كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ. أَيْ مِنَ التَّأْثِيْرِ الَّذِيْ تُؤَثِّرُهُ كَثْرَةُ السُّجُوْدِ. وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ: لَا تَعْلَبُوْا صُوَرَكُمْ، أَيْ لَا تَسِمُوْهَا، إِنَّمَا هُوَ فِيْمَا إِذَا اعْتَمَدَ بِجَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ لِيُحْدِثَ فِيْهَا تِلْكَ السِّمَةَ، وَذٰلِكَ مَحْضُ رِيَاءٍ وَنِفَاقٍ. وَالْكَلَامُ فِيْمَا حَدَثَ فِيْ جَبْهَةِ السَّجَّادِ الَّذِيْنَ لَا يَسْجُدُوْنَ إِلَّا خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ. وَكَانَ الْإِمَامُ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ ؓ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ، وَكَذَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ يُقَالُ لَهُمَا: ذُو الثَّفِنَاتِ، لِمَا أَحْدَثَتْ كَثْرَةُ سُجُوْدِهِمَا فِيْ مَوَاضِعِهِ مِنْهُمَا أَشْبَاهَ ثَفِنَاتِ الْبَعِيْرِ. وَالثَّفِنَةُ بِكَسْرِ الْفَاءِ مِنَ الْبَعِيْرِ الرُّكْبَةُ وَمَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْ أَعْضَائِهِ عِنْدَ الْإِنَاخَةِ. وَثَفِنَتْ يَدُهُ ثَفَنًا إِذَا غَلُظَتْ عَنِ الْعَمَلِ. وَكَانَتْ لَهُ خَمْسُمِائَةِ أَصْلِ زَيْتُوْنٍ يُصَلِّيْ عِنْدَ كُلِّ أَصْلٍ رَكْعَتَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ قَائِلُهُمْ:

دِيَارُ عَلِيٍّ وَالْحُسَيْنِ وَجَعْفَرٍ ۞ وَحَمْزَةَ وَالسَّجَّادِ ذِي الثَّفِنَاتِ

قَالَ عَطَاءٌ: دَخَلَ فِي الْآيَةِ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. وَقَالَ بَعْضُ الْكِبَارِ سِيْمَا الْمُحِبِّيْنَ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ. فَإِنَّهُمْ لَا يَسْجُدُوْنَ لِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى إِلَّا مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ. وَقِيْلَ صُفْرَةُ الْوُجُوْهِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ. وَقِيْلَ نَدَى الطُّهُوْرِ وَتُرَابُ الْأَرْضِ. فَإِنَّهُمْ كَانُوْا يَسْجُدُوْنَ عَلَى التُّرَابِ لَا عَلَى الْأَثْوَابِ. وَقِيْلَ اسْتِنَارَةُ وُجُوْهِهِمْ مِنْ طُوْلِ مَا صَلَّوْا بِاللَّيْلِ. قَالَ ﷺ: مَنْ كَثُرَ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ سَهِرَ بِاللَّيْلِ وَهُوَ مَشْغُوْلٌ بِالشَّرَابِ وَاللَّعِبِ لَا يَكُوْنُ وَجْهُهُ فِي النَّهَارِ كَوَجْهِ مَنْ سَهِرَ وَهُوَ مَشْغُوْلٌ بِالطَّاعَةِ. وَجَاءَ فِيْ بَابِ الْإِمَامَةِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَعْلَمُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ ثُمَّ الْأَصْبَحُ وَجْهًا، أَيْ أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً بِاللَّيْلِ، لِمَا رُوِيَ مِنَ الْحَدِيْثِ قِيْلَ لِبَعْضِهِمْ: مَا بَالُ الْمُتَهَجِّدِيْنَ، أَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوْهًا؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمٰنِ، فَأَصَابَهُمْ مِنْ نُوْرِهِ كَمَا يُصِيْبُ الْقَمَرَ نُوْرُ الشَّمْسِ فَيَتَنَوَّرُ بِهِ ... وَقَالَ سَهْلٌ: الْمُؤْمِنُ مَنْ تَوَجَّهَ لِلّٰهِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ غَيْرَ مُعْرِضٍ عَنْهُ، وَذٰلِكَ سِيْمَا الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَالَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ: كَادَ وَجْهُ الْمُؤْمِنِ يُخْبِرُ عَنْ مَكْنُوْنِ عَمَلِهِ. وَكَذٰلِكَ وَجْهُ

الْكَافِرِ. وَذَلِكَ قَوْلُهُ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرَى عَلَى وُجُوْهِهِمْ هَيْبَةً لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِمُنَاجَاةِ سَيِّدِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ عَطَاءٍ: تَرَى عَلَيْهِمْ خِلَعَ الْأَنْوَارِ لَائِحَةً. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَكِّيُّ: لَيْسَتْ هِيَ النُّحُوْلَةَ وَالصُّفْرَةَ، لَكِنَّهَا نُوْرٌ يَظْهَرُ عَلَى وُجُوْهِ الْعَابِدِيْنَ، يَبْدُوْ مِنْ بَاطِنِهِمْ عَلَى ظَاهِرِهِمْ يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِيْ زِنْجِيٍّ أَوْ حَبَشِيٍّ انْتَهَى. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ يَقُوْمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ. وَبَعْضُهُمْ يَكُوْنُ وُجُوْهُهُمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ تَأْثِيْرِ نُوْرِ الْقَلْبِ وَانْعِكَاسِهِ.

(سِيْمَاهُمْ) maka berdasarkan kalimat سَوَّمَهُ ketika seseorang menjadikannya sebagai sesuatu yang mempunyai tanda. Maknanya adalah tanda-tanda dan ciri-ciri mereka. Kata سِيْمَاهُمْ dibaca سِيْمِيَاؤُهُمْ dengan huruf *ya'* setelah huruf *mim* dan dibaca panjang. Keduanya merupakan dua *lughat*. Dalam kata ini ada *lughat* ketiga, yaitu kata السِّيْمَاءُ yang dibaca panjang. Kata سِيْمِيَاؤُهُمْ merupakan *mubtada'* yang *khabar*nya adalah firman Allah: (فِيْ وُجُوْهِهِمْ), maksudnya menetap di wajah mereka. (مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ) merupakan *hal* dari *dhamir* yang tersimpan pada huruf *jar*. Bekas sesuatu adalah adanya sesuatu yang menunjukkan wujudnya sebagaimana dalam kitab *al-Mufradat*, maksudnya dari bekas yang ditimbulkan sebab seringnya sujud. Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari sabdanya: لَا تَعْلَمُوْا صُوَرَكُمْ maksudnya jangan tandai rupa kalian, hanya untuk kasus ketika seseorang bertumpu dengan keningnya pada tanah agar muncul tanda tersebut, dan hal itu merupakan murni *riya'* dan ke*munafik*an. Sementara pembahasan di dalam ayat ini terkait tanda bekas *sujud* di kening orang-orang yang sering melakukan sujud yang tidak bersujud kecuali dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah. Imam Zainul Abidin ؓ, yakni Ali bin al-Husain bin Ali ؓ; Begitu pula Ali bin Abdillah bin al-'Abbas. Mereka dijuluki *Dzu ats-Tsafanat*, karena seringnya mereka sujud di berbagai tempat menimbulkan kulit keras yang menyerupai kulit lutut onta yang tebal. Kata الثَّفِنَةُ dibaca *kasrah fa'*-nya, untuk onta bermakna lutut dan anggota tubuhnya yang mengenai tanah ketika berlutut. ثَفِنَتْ يَدُهُ ثَفَنًا bermakna tangannya mengeras karena bekerja. Imam Zainul Abidin mempunyai 500 biji zaitun yang dengan setiap bijinya beliau melaksanakan shalat dua rakaat setiap hari. Ada yang mengatakan:

"Rumah Ali, al-Husain, Ja'far,
Hamzah, dan orang yang sering bersujud, mempunyai banyak tanda bekas sujud."

'Atha berkata: *"Orang-orang yang disiplin shalat lima waktu termasuk dalam khitab ayat ini."* Sebagian tokoh ulama mengatakan: *"Tanda orang-orang yang mencintai Allah dari bekas sujud, sebab mereka tidak sujud karena sesuatu dari dunia dan akhirat kecuali dengan mengikhlaskan agama karena Allah."* Dikatakan, bercahaya wajah mereka, sebab lama menjalankan *shalat* di malam hari. Nabi ﷺ bersabda: *"Orang yang intens mengerjakan shalat di malam hari maka wajahnya indah di siang hari."* Tidakkah anda lihat, sungguh orang yang begadang di malam hari dan disibukkan dengan minuman dan permainan, maka wajahnya di siang hari tidak seperti wajah orang yang begadang dan disibukkan dengan ketaatan. Dalam Bab *al-Imamah* terdapat keterangan, sungguh diutamakan orang yang paling alim, orang yang paling banyak hafalan al-Qur'annya, orang yang paling *wira'i*, orang yang paling tua, kemudian orang yang paling bagus wajahnya. Maksudnya orang yang paling sering shalat di malam hari, karena suatu riwayat: *"Dikatakan kepada sebagian Tabi'in: "Kenapa orang-orang yang bertahajud wajahnya menjadi indah?"* Ia menjawab: *"Sebab mereka menyendiri menghadap Allah sehingga cahanya-Nya mengenai mereka, sebagaimana cahaya matahari mengenai bulan, sehingga ia menyinarinya."* Sahl berkata: *"Mukmin sejati adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak berpaling darinya. Itulah tanda-tanda orang-orang beriman."* 'Amir bin Abd al-Qais berkata: *"Wajah seorang mukmin hampir menandakan rahasia amalnya. Begitu pula wajah seorang kafir."* Sebagaimana firman Allah: *"Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka."* Sebagian ulama berkata: *"Anda lihat kewibawaan di wajah mereka, karena begitu dekatnya mereka dengan munajat kepada Tuhannya."* Ibn 'Atha berkata: *"Anda lihat pancaran cahaya pada mereka terang-benderang."* Abdul Aziz al-Makki berkata: *"Tanda bekas sujud bukanlah karena kurus maupun pucat, akan tetapi cahaya yang tampak pada wajah ahli ibadah yang muncul dari batin mereka pada lahiriah mereka, yang jelas bagi orang-orang mukmin, meski terdapat pada bangsa kulit hitam atau bangsa Etiopia."* Demikian kata beliau. Tidak diragukan, sungguh umat Islam ini bangkit di hari kiamat dalam kondisi wajah, tangan dan kakinya memancarkan cahaya karena bekas wudhu. Di antara mereka wajahnya seperti bulan di malam purnama karena bekas sujud. Semuanya karena pengaruh cahaya hati dan pantulannya.

f. *Ihya' 'Ulumuddin*, I/139-140, [Toha Putera]:

اَلْأَوَّلُ شَعْرُ الرَّأْسِ. وَلَا بَأْسَ بِحَلْقِهِ لِمَنْ أَرَادَ التَّنْظِيفَ. وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِهِ لِمَنْ يَدْهُنُهُ

وَيُرَجِّلُهُ، إِلَّا إِذَا تَرَكَهُ قَزَعًا أَيْ قِطَعًا، وَهُوَ دَأْبُ أَهْلِ الشَّطَارَةِ، أَوْ أَرْسَلَ الذَّوَائِبَ عَلَى هَيْئَةِ أَهْلِ الشَّرَفِ حَيْثُ صَارَ ذَلِكَ شِعَارًا لَهُمْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرِيفًا كَانَ ذَلِكَ تَلْبِيسًا.

Pertama kali yang tumbuh di badan ialah rambut kepala. Tidak apa-apa mencukurnya bagi orang yang ingin membersihkan diri. Tidak apa-apa membiarkannya bagi orang yang merawat dan menyisirnya, kecuali jika ia sisakan sebagian, yang merupakan kebiasaan cendikiawan, atau membiarkan rambut ubun-ubun seperti model para *Syarif* dimana model itu telah menjadi syiar bagi mereka, jika bukan seorang *Syarif* maka memotong rambut dengan model seperti itu merupakan penipuan.

g. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, II/512, [Dar al-Kutub al-'Ilmiyah]:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: مَا يُفْعَلُ فِي زَمَانِنَا مِنْ عَمَائِمَ، كَالْأَبْرَاجِ وَأَكْمَامٍ كَالْأَخْرَاجِ، فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ اهـ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُتَّصِفِينَ بِالْعِلْمِ وَأَرْبَابِ الْمَنَاصِبِ كَالْقُضَاةِ وَنَحْوِهِمْ، فَإِنَّ مَا صَارَ شِعَارًا لِلْعُلَمَاءِ يُنْدَبُ لَهُمْ لُبْسُهُ لِيُعْرَفُوا، فَيُسْأَلُوا وَلِيُطَاعُوا فِيمَا عَنْهُ زَجَرُوا. وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِمْ التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِيهِ لِيَلْحَقُوا بِهِمْ. وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الصَّالِحِ التَّزَيِّي بِزِيِّهِمْ حَتَّى يُظَنَّ صَلَاحُهُ. وَمِثْلُهُ مَنْ تَزَيَّا بِزِيِّ الْعَالِمِ، وَقَدْ كَثُرَ فِي زَمَانِنَا هَذَا. وَمِنْهُ يُعْلَمُ تَحْرِيمُ لُبْسِ الْعِمَامَةِ الْخَضْرَاءِ لِغَيْرِ الشَّرِيفِ، فَقَدْ جُعِلَتْ الْعِمَامَةُ الْخَضْرَاءُ لِأَوْلَادِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ لِيَمْتَازُوا، فَلَا يَلِيقُ بِغَيْرِهِمْ مِنْ بَقِيَّةِ آلِهِ ﷺ لُبْسُهَا، لِأَنَّهُ تَزَيَّا بِزِيِّهِمْ، فَيُوهِمُ الِانْتِسَابَ لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ مَعَ انْتِفَاءِ نَسَبِهِ عَنْهُمَا، وَيَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَاعْلَمْهُ وَتَنَبَّهْ لَهُ.

Ibn al-Qayyim berkata: *"Sorban-sorban yang digunakan pada zaman kita sekarang seperti abraj, dan lengan baju yang lebar-lebar seperti akhraj, maka hukumnya haram secara sepakat."* Demikian kata Ibn al-Qayyim. Mungkin tempat pernyataan ini bagi selain orang yang mempunyai ilmu dan derajat, seperti para *Qadhi* dan semisalnya. Sebab, sungguh atribut yang telah jadi identitas ulama hukumnya sunnah mereka pakai, sehingga mereka (mudah) ditanya dan agar ditaati dalam berbagai hal yang dilarangnya. Bagi selain mereka haram menyerupainya dalam atribut tersebut agar sama dengannya. Bagi orang yang tidak shaleh haram berhias dengan hiasan mereka sehingga disangka keshalehannya. Dari situ diketahui keharaman memakai sorban hijau bagi selain *Syarif*, sebab

sorban hijau telah dijadikan identitas keturunan Fatimah az-Zahra' untuk membedakannya dengan yang lain, sehingga keluarga Nabi ﷺ selain mereka tidak pantas memakainya, karena berarti telah berhias dengan hiasan mereka, lalu akan muncul salah sangka bahwa ia berhubungan nasab kepada al-Hasan atau al-Husain, padahal tidak, dan perbuatan tersebut dilarang. Ketahuilah dan ingatlah.

h. *Tafsir Ruh al-Ma'ani*, XXVI/124-125, [Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi]:

(سِيمَاهُمْ) أَيْ عَلَامَتُهُمْ وَقُرِئَ: سِيمِيَاؤُهُمْ بِزِيَادَةِ يَاءٍ بَعْدَ الْمِيمِ وَالْمَدِّ. وَهِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةٌ كَثِيرَةٌ فِي الشِّعْرِ قَالَ الشَّاعِرُ:

غُلَامٌ رَمَاهُ اللهُ بِالْحُسْنِ يَافِعًا ۞ لَهُ سِيمِيَاءُ لَا تَشُقُّ عَلَى الْبَصَرِ

وَجَاءَ سِيمَا بِالْمَدِّ وَاشْتِقَاقُهَا مِنَ السُّومَةِ بِالضَّمِّ، الْعَلَامَةُ تُجْعَلُ عَلَى الشَّاةِ. وَالْيَاءُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الْوَاوِ. وَهِيَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فِي وُجُوهِهِمْ) أَيْ فِي جِبَاهِهِمْ أَوْ هِيَ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: (مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) حَالٌ مِنَ الْمُسْتَكِنِّ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِسِيمَاهُمْ أَوْ بَيَانٌ لَهَا. أَيْ سِيمَاهُمُ الَّتِي هِيَ أَثَرُ السُّجُودِ. وَوَجْهُ إِضَافَةِ الْأَثَرِ إِلَى السُّجُودِ أَنَّهُ حَادِثٌ مِنَ التَّأْثِيرِ الَّذِي يُؤَثِّرُهُ السُّجُودُ. وَشَاعَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِمَا يَحْدُثُ فِي جَبْهَةِ السَّجَّادِ مِمَّا يُشْبِهُ أَثَرَ الْكَيِّ وَثَفِنَةَ الْبَعِيرِ. وَكَانَ كُلٌّ مِنَ الْعَلِيَّيْنِ، عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَبِي الْأَمْلَاكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُقَالُ لَهُ ذُو الثَّفِنَاتِ، لِأَنَّ كَثْرَةَ سُجُودِهِمَا أَحْدَثَ فِي مَوَاقِعِهِ مِنْهُمَا أَشْبَاهَ ثَفِنَاتِ الْبَعِيرِ. وَهِيَ مَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَعْضَائِهِ إِذَا غَلُظَ. وَمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: لَا تَعْلُبُوا صُوَرَكُمْ، أَيْ لَا تَسِمُوهَا، مِنَ الْعَلْبِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ الْأَثَرُ. وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ رَأَى رَجُلًا بِأَنْفِهِ أَثَرَ السُّجُودِ: أَنَّ صُورَةَ وَجْهِكَ أَنْفُكَ فَلَا تَعْلُبْ وَجْهَكَ وَلَا تُشِنْ صُورَتَكَ، فَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ إِذَا اعْتَمَدَ بِجَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ عَلَى الْأَرْضِ لِتَحْدُثَ تِلْكَ السِّمَةُ. وَذَاكَ مَحْضُ رِيَاءٍ وَنِفَاقٍ. يُسْتَعَاذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْهُ. وَالْكَلَامُ فِيمَا حَدَثَ فِي وَجْهِ السَّجَّادِ الَّذِي لَا يَسْجُدُ إِلَّا خَالِصًا لِوَجْهِ اللهِ ﷻ. وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الْمُرَادِ بِالسِّيمَا ذَلِكَ. أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ وَفِي

وَجْهِهِ أَثَرُ السُّجُوْدِ. فَقَالَ: لَقَدْ أَفْسَدَ هَذَا وَجْهَهُ. إِمَّا وَاللهِ مَا هِيَ السِّيْمَا الَّتِيْ سَمَّى اللهُ تَعَالَى. وَلَقَدْ صَلَّيْتُ عَلَى وَجْهِيْ مُنْذُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً مَا أَثَّرَ السُّجُوْدُ بَيْنَ عَيْنَيَّ. وَرُبَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَشْعَرَ مِنَ الرَّجُلِ تَعَمُّدًا لِذَلِكَ فَنَفَى أَنْ يَكُوْنَ مَا حَصَلَ بِهِ هُوَ السِّيْمَا الَّتِيْ سَمَّى اللهُ تَعَالَى.وَنَظِيْرُهُ مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيْ فَلَا يُرَى بَيْنَ أَعْيُنِنَا شَيْءٌ. وَنَرَى أَحَدَنَا الْآنَ يُصَلِّيْ فَتَرَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ رُكْبَةَ الْبَعِيْرِ. فَمَا نَدْرِيْ أَثَقُلَتِ الرُّؤُوْسُ أَمْ خَشُنَتِ الْأَرْضُ؟

(سِيْمَاهُمْ) maksudnya tanda-tanda mereka. Kata سِيْمَاهُمْ juga dibaca سِيْمِيَاؤُهُمْ dengan tambahan huruf *ya'* setelah huruf *mim* dan dibaca panjang. سِيْمِيَاؤُهُمْ adalah bahasa yang *fasih* dan banyak digunakan di dalam *syi'ir*. Seorang penyair berkata:

> *"Anak laki-laki yang dianugerahi Allah dengan kebaikan pada saat remajanya,*
> *ia memiliki tanda-tanda yang tidak berat di mata."*

Kata سِيْمَا dibaca panjang. Akar katanya ialah السُّوْمَةُ dengan dibaca *dhammah* huruf *sin*-nya, yang bermakna tanda (cap) yang dibuat pada kambing. Huruf *ya'*-nya sebagai pengganti *wawu*. Kata سِيْمَاهُمْ merupakan *mubtada'* yang *khabar*nya adalah firman Allah Ta'ala: (فِيْ وُجُوْهِهِمْ), maksudnya pada kening mereka, atau tanda tersebut ada pada permukaan kening mereka. Firman Allah: (مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ) merupakan *hal* dari *dhamir* yang tersimpan dalam *jar majrur* yang sebenarnya menjadi *khabar* untuk kata سِيْمَاهُمْ atau menjadi *bayan* baginya. Yakni tanda-tanda mereka yang merupakan bekas sujud. Peng*idhafah*an kata أَثَرِ pada kata السُّجُوْدِ karena tanda tersebut ada dari pengaruh sujud. Penafsiran سِيْمَا masyhur dengan makna sesuatu yang menyerupai bekas cap besi panas atau lutut onta. Masing-masing Ali bin al-Husain Zainul Abidin dan Ali bin Abdillah bin 'Abbas Abu al-Amlak-*radhiyallahu ta'ala 'anhuma*- dijuluki *Dzu ats-Tsafinat* karena seringnya mereka sujud menimbulkan kulit tebal di kening seperti lutut onta. *Tsafinat* onta adalah anggota tubuh onta yang menyentuh tanah ketika jongkok. Adapun hadits yang diriwayatkan dari sabda Nabi ﷺ: *"Jangan tandai rupa kalian."* Maksudnya jangan membuat tanda di wajah kalian. Kata تَعَلَّبُوْا berasal dari kata الْعَلْبُ dengan dibaca *fathah* huruf *'ain*-nya dan *sukun* huruf *lam*-nya, yang bermakna bekas. Adapun ucapan Ibn Umar setelah melihat seseorang yang di hidungnya terdapat bekas

sujud: *"Sungguh rupa wajahmu seperti hidungmu, maka jangan kamu tandai wajahmu, dan jangan perburuk rupamu"*, hanya bila seseorang bertumpu dengan kening dan hidungnya pada tanah agar menimbulkan tanda bekas sujud, dan itu murni *riya'* dan kemunafikan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita darinya. Sementara pembahasan dalam ayat ini terkait tanda bekas sujud yang ada di wajah ahli sujud yang tidak sujud kecuali ikhlas karena mengharap ridha Allah ﷻ. Sebagian ulama mengingkari bahwa maksud سيما adalah tanda fisik seperti itu. Ath-Thabarani dan al-Baihaqi dalam Sunannya meriwayatkan, dari Hamid bin Abdirrahman, ia berkata: *"Aku berada di sisi as-Sa'ib bin Yazid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ada bekas sujud di wajahnya."* Kemudian beliau berkata: *"Sungguh ia telah merusak wajahnya. Ketahuilah, demi Allah itu bukan tanda yang ditandai Allah Ta'ala. Sungguh aku telah shalat dengan wajahku selama 80 tahun dan tidak ada bekas sujud di wajahku."*

Terkadang pernyataan tersebut dipahami bahwa beliau merasa bahwa orang tersebut sengaja membuat tanda bekas sujud, sehingga beliau menafikannya sebagai tanda yang ditandai Allah Ta'ala. Selaras dengan pernyataan beliau, hikayat dari sebagian ulama terdahulu: *"Kami shalat, lalu tidak terlihat sesuatu pun di antara kedua mata kami, dan sekarang kami melihat orang shalat, kemudian kami lihat lutut onta di antara kedua matanya. Maka kami tidak tahu, apakah kepalanya yang berat atau tanahnya yang kasar."*

399. *Qadha`* Shalat

Deskripsi Masalah

Kewajiban berbakti terhadap kedua orang tua (*birr al-walidain*) tidak sebatas mereka masih hidup, tapi sampai mereka telah meninggal dunia. Ketika orang tua semasa hidupnya lama meninggalkan shalat dan selanjutnya ia meninggal dunia, maka timbul perasaan iba dalam benak hati anak-anaknya kemudian terlahir inisitif mengqadha' shalatnya sebagai realisasi *birr al-walidain*. Ide ini tentunya didasarkan pada ibarat yang kita jumpai dalam berbagai kitab fikih, yaitu:

(فَائِدَةٌ) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ فَلَا قَضَاءَ وَلَا فِدْيَةَ. وَفِي قَوْلٍ كَجَمْعٍ مُجْتَهِدِينَ: أَنَّهَا تُقْضَى عَنْهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ. وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَفَعَلَ بِهِ السُّبْكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ بُرْهَانَ عَنِ الْقَدِيمِ: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِنْ خَلَفَ تَرِكَةً أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ كَالصَّوْمِ. (فتح المعين [في إعانة الطالبين] الجزء الثاني ص ٤٠٧) (ط دار الكتب العلمية)

Pertanyaan

a. Jika mengikuti pendapat yang membolehkan mengqadha' shalat atas

nama mayat, apakah hukum boleh qadha' itu berlaku umum yaitu mencakup shalat yang ditinggalkan sebab *udzur* maupun tanpa *udzur* dan shalat sebelum *maradh al-maut* maupun saat *maradh al-maut*, ataukah berlaku khusus untuk shalat *maradh al-maut* saja?

b. Jika keberlakuan boleh qadha' itu hanya untuk shalat *faitah* saat *maradh al-maut* saja, adakah cara lain untuk menebus dosa *tark al-shalat* orang tua yang bisa dilakukan oleh anak?

c. Bagaimana kiranya nalar *manhaj al-fikr* para *mujtahid* mengenai qadha' shalat *faitah* atas nama mayat, jika kita tinjau dari disiplin *ushul al-fiqh*?

Jawaban

a. Bolehnya mengqadla' shalatnya mayat tersebut berlaku umum, baik sholat yang ditinggalkan dengan *udzur* maupun tanpa *udzur*, baik ketika sakit atau tidak.

b. Pertanyaan (b) tidak perlu dijawab karena gugur dengan sendirinya.

c. Berdasarkan hadits sebagaimana yang ada di atas.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *At-Turmusi*, IV/280:

(فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ) أَيْ لَمْ يُفْعَلْ عَنْهُ ذٰلِكَ لِعَدَمِ وُرُوْدِهَا وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَا قِيْلَ. لٰكِنْ نَقَلَ جَمْعٌ مِنْهُمُ الْقَفَّالُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا. وَكَذَا الْخُوَارِزْمِيُّ. وَحَكَى ابْنُ بُرْهَانَ عَنِ الْقَدِيْمِ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ مَا فَاتَهُ، لِحَدِيْثِ: أَنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ. وَحَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ أَيْضًا، لِخَبَرٍ فِيْهِ. وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَإِسْحَاقَ، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ، كَابْنِ دَقِيْقِ الْعِيْدِ وَالسُّبْكِيِّ. وَمَالَ إِلَى تَرْجِيْحِهِ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ. وَذَكَرَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ تَفْعَلُ عَنْهُ وَاجِبَةً أَوْ مُتَطَوَّعًا بِهَا عَنْهُ. وَكُتُبُ الْحَنَفِيَّةِ نَاصَّةٌ عَلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. قَالَ فِي الْإِيْعَابِ: وَعَلَيْهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ لَهُ الصَّلَاةَ وَغَيْرَهَا عَنْهُ. وَصَحَّ فِي الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلَاةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقُوْلُهُ إِلَّا تَوْقِيْفًا. لٰكِنْ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ

أَحَدٍ. قَالَ ابْنُ أَبِيْ عَصْرُوْنَ: لَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ وَلَا الْقِيَاسِ مَا يَمْنَعُ وُصُوْلَ ثَوَابِ الصَّلَاةِ لِلْمَيِّتِ. وَرُوِيَ فِيْهَا عَنِ الْوَالِدَيْنِ أَخْبَارٌ غَيْرُ مَشْهُوْرَةٍ وَاسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ لِحَدِيْثٍ مُرْسَلٍ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ. قِيْلَ تَدْعُوْ لَهُمَا، وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ. قَالَ وَمَاتَ لِيْ قَرِيْبٌ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَفَعَلْتُهَا عَنْهُ قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ وَإِنْ مَنَعَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ. قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ نَقْلَ جَمْعٍ شَافِعِيَّةٍ وَغَيْرِهِمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْمَنْعِ الْمُرَادُ بِهِ إِجْمَاعُ الْأَكْثَرِ. وَذَكَرَ الْقَلْيُوْبِيُّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّخْصِ لِنَفْسِهِ، فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُهُ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.

(Maka tidak ada qadha dan *fidyah* bagi mayit), maksudnya hal itu tidak dilakukan sebagai ganti darinya, karena tidak *wurud* dan karena *ijma'* menurut suatu pendapat. Namun segolongan ulama, di antaranya al-Qaffal menukil dari sebagian *Ashab* asy-Syafi'i bahwa setiap satu shalat yang menjadi tanggungan mayit dibayari *fidyah* satu *mud*. Begitu pula al-Khawarizmi. Ibn Burhan menghikayatkan dari *qaul qadim*, sungguh wali wajib shalat sebagai ganti shalat yang tidak sempat dilakukan *mayit*, karena hadits: *"Sungguh di antara kebaikan pasca kebaikan adalah kamu shalat untuk kedua orang tua bersama shalatmu, puasa untuk mereka bersama puasamu."* Al-'Ubbadi juga menghikayatkan satu pendapat asy-Syafi'i karena terdapat hadits tentangnya. Pendapat itu dihikayatkan pula dari 'Atha bin Abi Rabah dan Ishaq, dipilih oleh segolongan *muhaqqiqin*, seperti Ibn Daqiq al-'Id dan as-Subki, dan Ibn Abi 'Ushrun condong mengunggulkannya. Al-Muhib ath-Thabari menyebutkan, sungguh shalat mayit di*qadha*, dilakukan sebagai ganti darinya, baik wajib maupun sunnah sebagai ganti darinya. Ulama Hanafiyah menulis *nash* bahwa orang bisa menjadikan pahala amalnya untuk orang lain, dan sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah *madzhab Ahl as-sunnah wal Jama'ah*. Dalam al-I'ab, Ibn Hajar al-Haitami berkata: *"Berdasarkan pendapat ini, maka tidak jauh dari kebenaran, sungguh wali dapat mengqadha shalat dan ibadah lainnya sebagai ganti dari mayit."* Dalam al-Bukhari ada *riwayat shahih* dari Ibn Umar ؓ, bahwa beliau memerintah orang yang ibunya mati dalam kondisi memiliki tanggungan shalat untuk menshalatinya. Yang jelas beliau tidak mengatakannya kecuali secara *tauqifi* (ajaran Nabi). Namun dalam *al-Muwaththa'* diriwayatkan darinya, bahwa beliau berkata: *"Seseorang tidak boleh shalat sebagai ganti orang lain dan tidak boleh puasa sebagai ganti orang lain."* Ibn Abi 'Ushrun berkata: *"Dalam hadits*

dan qiyas tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya pahala shalat kepada mayit." Dalam shalat sebagai ganti dari kedua orang tua diriwayatkan hadits-hadits yang tidak *masyhur*, dan as-Subki menguatkannya karena hadits *mursal*: *"Di antara birrul walidain adalah kamu shalat untuk mereka berdua bersama shalatmu."* Dikatakan, maksudnya adalah berdoa untuk mereka berdua, namun tidak ada pencegah untuk memahaminya secara tekstual. As-Subki berkata: *"Kerabatku mati dengan menanggung shalat lima waktu, maka aku melakukannya sebagai ganti darinya, karena mengqiyaskan pada puasa, meskipun mayoritas ulama mencegahnya."* Dalam *at-Tuhfah*, Ibn Hajar berkata: *"Dari penjelasan yang telah ditetapkan diketahui, bahwa penukilan ijma' oleh segolongan ulama Syafi'iyah dan selainnya atas larangan mengqadha shalat yang belum sempat dilakukan mayit, maksudnya adalah ijma' mayoritas ulama."* Al-Qulyubi menyebutkan dari guru-gurunya, bahwa praktik qadha tersebut merupakan amal ulama untuk dirinya sendiri, maka boleh mengikutinya, sebab termasuk *muqabil ashah*. Hal itu telah jelas. *Wa Allahu a'lam.*

b. *Hasyiyah al-Jamal*, II/338 [Dar Ihya' at-Turats a'-'Arabi]:

(قَوْلُهُ: لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ) وَفِي الِاعْتِكَافِ قَوْلٌ أَنَّهُ يُفْعَلُ عَنْهُ كَالصَّوْمِ، وَفِي الصَّلَاةِ قَوْلٌ أَيْضًا أَنَّهَا تُفْعَلُ عَنْهُ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَا، حَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ، لِخَبَرٍ فِيهِ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ. بَلْ نَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الْقَدِيمِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِنْ خَلَّفَ تَرِكَةً أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ كَالصَّوْمِ. وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا وَجْهٌ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا. وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَوَّلَ، وَفَعَلَ بِهِ السُّبْكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ. وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ نَقْلَ جَمْعٍ شَافِعِيَّةٍ وَغَيْرِهِمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْمَنْعِ الْمُرَادُ بِهِ إِجْمَاعُ الْأَكْثَرِ. وَقَدْ تُفْعَلُ هِيَ وَالِاعْتِكَافُ عَنْ مَيِّتٍ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَإِنَّهُمَا يُفْعَلَانِ عَنْهُ تَبَعًا لِلْحَجِّ، وَكَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا فَمَاتَ فَيَعْتَكِفُ الْوَلِيُّ أَوْ مَأْذُونُهُ عَنْهُ صَائِمًا اهـ. حج (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ وُرُودِهِمَا) وَهَلْ تُسَنُّ الصَّلَاةُ أَوْ لَا الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمَنْقُولِ عَنْ حج اهـ. ع ش عَلَى م ر

(Ungkapan Syaikh Zakariya al-Anshari: *"Tidak orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan shalat atau puasa."*). Dalam *i'tikaf* ada pendapat yang menyatakan bisa diqadha' sebagai ganti darinya, sebagaimana puasa. Dalam shalat juga ada pendapat yang menyatakan diqadha'

sebagai ganti darinya, baik mayit berwasiat agar shalatnya diqadha' atau tidak, yang dihikayatkan al-'Ubbadi dari ulama Syafi'iyah dan lainnya dari riwayat Ishaq dan 'Atha' karena hadits tentangnya, namun *ma'lul*. Bahkan Ibn Burhan menukil dari *qaul qadim* bahwa apabila mayit meninggalkan harta wali wajib menqadha' shalat sebagai ganti dari mayit sebagaimana puasa. Dalam shalat juga ada pendapat banyak ulama Syafi'iyah yang menyatakan, bahwa wali membayar *fidyah* satu *mud* untuk setiap shalat. Akan tetapi segolongan *muhaqqiqin* dari ulama *muta'akhirin* memilih pendapat pertama dan as-Subki mengamalkannya untuk sebagian kerabatnya. Dari penjelasan yang telah ditetapkan itu, diketahui, bahwa penukilan *ijma'* oleh segolongan ulama Syafi'iyah dan selainnya atas tercegahnya mengqadha' shalat yang belum sempat dilakukan mayit, maksudnya adalah ijma' mayoritas ulama. Qadha' shalat dan *i'tikaf* telah dipraktikkan sebagai ganti dari mayit sebagaimana dua rakaat shalat sunnah thawaf, sebab dua rakaat shalat sunnah *thawaf* dilakukan sebagai ganti dari mayit dengan mengikuti pada haji, dan sebagaimana bila orang nazar akan i'tikaf dalam kondisi berpuasa, lalu meninggal, maka walinya atau orang yang mendapat izinnya dapat mengqadha' *i'tikaf*nya dengan kondisi berpuasa. Begitu kata Ibn Hajar. (Ungkapan Syaikh Zakariya al-Anshari: *"Karena tidak wurudnya qadha' dan pembayaran fidyah sebagai ganti dari mayit ."*) Apakah qadha' shalat disunnahkan ataukah tidak? Yang paling mendekati kebenaran adalah jawaban pertama, karena keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya yang dinukil dari Ibnu Hajar. Demikian pendapat beliau. Demikian dikutip Ali Syibra Malisi atas *Syarh*nya atas *Nihayah al-Muhtaj* karya ar-Ramli.

c. *Al-Minhaj al-Qawim*, 344, [al-Marja' al-Akbar]:

(يُخْرَجُ) مُدٌّ لِكُلِّ يَوْمٍ (مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ) أَوْ كَفَّارَةٌ (وَ) قَدْ (تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ) وَلَمْ يَقْضِ، (أَوْ تَعَدَّى بِفِطْرِهِ) وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ، (أَوْ يَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ) وَإِنْ لَمْ يُوْصِهِ بِذَلِكَ، سَوَاءُ الْعَاصِبُ وَالْوَارِثُ وَوَلِيُّ الْمَالِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ، (أَوْ) يَصُومُ عَنْهُ (مَنْ أَذِنَ لَهُ) الْقَرِيبُ الْمَذْكُورُ سَوَاءٌ (الْوَارِثُ) وَغَيْرُهُ (أَوْ) مَنْ أَذِنَ لَهُ (الْمَيِّتُ) فِي أَنْ يَصُومَ عَنْهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونِهَا. وَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَصَحَّ أَنَّهُ ﷺ أَذِنَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ عَنْ أُمِّهَا صَوْمَ نَذْرٍ مَاتَتْ وَهُوَ عَلَيْهَا. وَلَوْ صَامَ عَمَّنْ عَلَيْهِ رَمَضَانُ مَثَلًا ثَلَاثُونَ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا وَبِالْإِذْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ. وَالْإِطْعَامُ أَوْلَى مِنْ

الصَّوْمِ لِلْخِلَافِ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَخَرَجَ بِالْقَرِيبِ وَمَأْذُونِهِ الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْقَرِيبُ وَلَا الْمَيِّتُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ. وَفَارَقَ نَظِيرَهُ مِنَ الْحَجِّ، بِأَنَّ لَهُ بَدَلًا، وَهُوَ الْإِطْعَامُ، وَالْحَجُّ لَا بَدَلَ لَهُ. وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوِ اعْتِكَافٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ. وَلَا صَحَّ الصَّوْمُ عَنْ حَيٍّ وَلَوْ نَحْوَ هَرِمٍ اتِّفَاقًا. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ تَمَكَّنَ مَا إِذَا مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ، بِأَنْ مَاتَ عَقِبَ مُوجِبِ الْقَضَاءِ أَوِ النَّذْرِ أَوِ الْكَفَّارَةِ، أَوِ اسْتَمَرَّ بِهِ الْعُذْرُ، كَالسَّفَرِ أَوِ الْمَرَضِ إِلَى مَوْتِهِ، فَإِنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، كَمَا لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ تَلِفَ مَالُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْأَدَاءِ.

(Dikeluarkan) satu *mud* untuk setiap hari (dari harta peninggalan orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, puasa lainnya), atau puasa *kafarah*, sebenarnya (ia mampu mengqadha`nya) namun belum melakukannya, (atau ia sengaja membatalkan puasa) meski belum mempunyai kesempatan mengqadha`nya, (atau kerabatnya berpuasa sebagai ganti darinya) meskipun mayit tidak mewasiatinya agar mengqadha`nya, baik ahli waris *ashabah*, ahli waris lainnya, wali dalam masalah harta, dan kerabat lainnya, (atau) yang berpuasa ialah (orang yang diizini) kerabatnya itu, baik (ahli waris) dan lainnya (atau) orang yang diizini oleh (mayit) agar mengqadha` puasa sebagai ganti darinya, baik dengan upah atau tidak. Semuanya berdasarkan hadits-hadits shahih seperti hadits Shahih al-Bukhari Muslim: *"Orang yang meninggal dan memiliki tanggungan puasa, maka walinya dapat berpuasa sebagai ganti darinya."* Dan diriwayatkan dengan status shahih bahwa Nabi ﷺ mengizinkan seorang perempuan untuk berpuasa sebagai ganti dari tanggungan puasa *nazar* ibunya yang telah meninggal. Andaikan 30 kerabat atau orang lain yang mendapat izin berpuasa serentak dalam sehari sebagai ganti dari mayit yang mempunyai tanggungan puasa Ramadhan maka puasa tersebut mencukupi. *Fidyah* makanan lebih utama daripada puasa qadha` karena adanya khilaf di dalam puasa qadla', bukan selainnya. Kerabat dan orang yang mendapatkan izin mengecualikan orang lain yang tidak diizinkan oleh kerabat atau mayit, maka dia tidak boleh berpuasa untuknya. Kasus ini berbeda dengan padanannya, yaitu kasus haji, sebab dalam kasus ini ada pengganti puasa, yaitu memberi *fidyah* makan, sedang haji tidak ada penggantinya. Andai orang mati dan mempunyai tanggungan shalat atau *i'tikaf*, maka tidak dapat diqadha` dan diganti *fidyah*. Tidak sah pula puasa sebagai ganti dari orang yang masih hidup meski pikun, misalnya, berdasarkan kesekapatan ulama. Dengan ungkapan Abdullah Bafadhal al-Hadhrami:

*"Ia telah mampu mengqadha`nya"* mengecualikan kasus ketika orang mati sebelum memiliki kesempatan mengqadha`nya, yakni meninggal segera setelah adanya perkara yang mengharuskan qadha`, *nazar*, atau *kafarah*, atau *udzur* masih terus dialaminya, seperti bepergian atau sakit sampai meninggal, maka tidak ada kewajiban *fidyah*, sebagaimana tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang hartanya rusak setelah *haul* namun sebelum mempunyai kesempatan untuk menunaikannya.

d. *Hasyiyah al-Bujairami*, II/83 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(قَوْلُهُ: لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ) وَهُنَاكَ قَوْلٌ بِجَوَازِ فِعْلِ الصَّلَاةِ عَنْهُ، وَقَدْ صَلَّى السُّبْكِيُّ عَنْ قَرِيبٍ لَهُ مَاتَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَوْلِ الضَّعِيفِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ع ش. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتَى بِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف. وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَ فِي الِاعْتِكَافِ قَوْلٌ. وَفِي الصَّلَاةِ قَوْلٌ أَيْضًا، وَفِيهَا وَجْهٌ أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا، وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ حج. قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّخْصِ لِنَفْسِهِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ.

(Ungkapan: *"Bukan orang meninggal yang mempunyai tanggungan shalat dan i'tikaf."*) Dalam hal tersebut ada pendapat yang membolehkan shalat sebagai ganti, dan as-Subki pernah melakukannya untuk kerabatnya yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa boleh *taqlid* pada *qaul dha'if* untuk diri sendiri sebagaimana secara terang-terangan dijelaskan Ali Sybramalisi, dan tidak boleh difatwakan sebagaimana ditetapkan oleh guruku al-Hafnawi. Redaksi *al-Qulyubi* pada *Syarh* Jalaluddin al-Mahalli: *"Kata al-Mahalli: "Dalam i'tikaf ada pendapat yang membolehkan mengqadha`nya sebagai ganti dari mayit."* Dan dalam shalat juga ada *qaul* yang membolehkan wali meng*qadha*`nya sebagai ganti dari mayit, dan ada pendapat yang membolehkan wali mem*fidyah*inya satu *mud* untuk setiap shalat, dan banyak ulama mengikutinya. Demikian pendapat Ibn Hajar. Sebagian guruku berkata: *"Ini merupakan amal pribadi untuk dirinya sendiri, maka boleh mentaqlidinya, karena termasuk kategori muqabil al-ashah."*

e. *Fath al-'Alam*, IV/138:

تَنْبِيهٌ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلِيِّ الَّذِي يَلْزَمُهُ الْإِطْعَامُ عَنْهُ وَارِثُهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو خُضَيْرٍ.

Peringatan: Yang jelas, sungguh yang dimaksud wali ialah orang yang wajib membayarkan *fidyah* makanan sebagai ganti dari mayit dan ahli

warisnya. Demikian kata asy-Syaikh Abu Hudhair.

f. *I'anah ath-Thalibin*, II/406-408 [Dar al-Kutub al-'Ilmiyah]:

(قَوْلُهُ: إِلَى تَصْحِيحِ الْقَدِيمِ) أَيْ لِوُرُوْدِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِ الصَّوْمِ عَنْهُ، كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَخَبَرِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ صُوْمِيْ عَنْ أُمِّكِ: وَفِي التُّحْفَةِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَيِ الْقَدِيمِ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا فَقَالَ: إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيْثُ قُلْتُ بِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ. وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْاِعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ اخْتِيَارُهُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيْلِ، فَإِنَّ الْمَذْهَبَ هُوَ الْجَدِيْدُ. وَفِي الرَّوْضَةِ الْمَشْهُوْرُ فِي الْمَذْهَبِ تَصْحِيحُ الْجَدِيْدِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا إِلَى تَصْحِيحِ الْقَدِيْمِ، وَهُوَ الصَّوَابُ. بَلْ يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ لِلْأَحَادِيْثِ الصَّحِيحَةِ، وَلَيْسَ لِلْجَدِيْدِ حُجَّةٌ مِنَ السُّنَّةِ، وَالْخَبَرُ الْوَارِدُ بِالْإِطْعَامِ ضَعِيْفٌ اهـ (قَوْلُهُ بَلْ يَجُوْزُ لِلْوَلِيِّ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ قَرِيْبٍ لِلْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاصِبًا وَلَا وَارِثًا وَلَا وَلِيَّ مَالٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَدْ قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهَا. فَإِنَّ قَوْلَهُ ﷺ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ لِلسَّائِلَةِ صُوْمِيْ عَنْ أُمِّكِ يُبْطِلُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ وَلِيُّ الْمَالِ وَالْقَوْلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ وَلِيُّ الْعُصُوْبَةِ. وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ أَنْ يَكُوْنَ بَالِغًا عَاقِلًا وَلَوْ رَقِيْقًا، لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّوْمِ، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ. وَمِثْلُ الْوَلِيِّ الْأَجْنَبِيُّ بِإِذْنٍ مِنَ الْمَيِّتِ بِأَنْ أَوْصَاهُ بِهِ، أَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُوْنِهَا، بِخِلَافِهِ بِلَا إِذْنٍ فَلَا يَصِحُّ ... إِلَى أَنْ قَالَ ... (قَوْلُهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ) أَيْ أَوِ اعْتِكَافٌ (وَقَوْلُهُ فَلَا قَضَاءَ وَلَا فِدْيَةَ) أَيْ لِعَدَمِ وُرُوْدِهِمَا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ الصَّلَاةِ وَالْاِعْتِكَافِ عَنِ الْمَيِّتِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ، فَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ مِنَ الْأَجِيْرِ تَبَعًا لِلْحَجِّ، وَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا فَإِنَّ الْبَغَوِيَّ قَالَ فِي التَّهْذِيْبِ: إِنْ قُلْنَا لَا يُفْرَدُ الصَّوْمُ عَنِ الْاِعْتِكَافِ أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقُلْنَا يَصُوْمُ الْوَلِيُّ، فَهَذَا يَعْتَكِفُ عَنْهُ صَائِمًا وَإِنْ كَانَتِ النِّيَابَةُ لَا تُجْزِئُ فِي الْاِعْتِكَافِ. (قَوْلُهُ وَفِي قَوْلٍ كَجَمْعِ مُجْتَهِدِيْنَ) أَيْ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَنَا تَبَعًا لِجَمْعٍ مُجْتَهِدِيْنَ. وَعِبَارَةُ فَتْحِ الْجَوَادِ: فَفِيهَا أَيِ الصَّلَاةِ قَوْلٌ لِجَمْعٍ مُجْتَهِدِيْنَ أَنَّهَا تُقْضَى عَنْهُ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ. وَمِنْ ثَمَّ إلخ فَلَعَلَّ الْكَافَ الدَّاخِلَةَ

عَلَى لَفْظِ جَمْعِ زِيْدَتْ مِنَ النُّسَّاخِ. (وَقَوْلُهُ أَنَّهَا) أَيِ الصَّلَاةَ تُقْضَى عَنْهُ. وَفِيْ قَوْلٍ أَيْضًا أَنَّ الْاِعْتِكَافَ يُفْعَلُ عَنْهُ . (قَوْلُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ) فِي التُّحْفَةِ لِخَبَرٍ فِيْهِ لَكِنَّهُ مَعْلُوْلٌ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَهُ) أَيْ وَمِنْ أَجْلِ وُرُوْدِ خَبَرٍ فِيْهِ اخْتَارَ الْقَوْلَ بِالْقَضَاءِ جَمْعٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا. (قَوْلُهُ وَفَعَلَ بِهِ) أَيْ عَمِلَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ قَضَاءُ الصَّلَاةِ. وَفِيْ حَوَاشِي الْمَحَلِّيِّ لِلْقَلْيُوْبِيِّ: قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: وَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّخْصِ لِنَفْسِهِ فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُهُ لِأَنَّهُ مِنْ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ اهـ (قَوْلُهُ وَفِيْ وَجْهٍ عَلَيْهِ كَثِيْرُوْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا إلخ) قَالَ الْكُرْدِيُّ قَالَ الْخَوَارِزْمِيُّ: وَرَأَيْتُ بِخُرَاسَانَ مَنْ يُفْتِيْ بِهِ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا. وَعَنِ الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْاِعْتِكَافِ: يَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَإِذَا قُلْنَا الْإِطْعَامَ فِي الْاِعْتِكَافِ، فَالْقَدْرُ الْمُقَابِلُ بِالْمُدِّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ بِلَيْلَتِهِ. هَكَذَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ رِوَايَةِ شَيْخِهِ وَأَصْلِهَا. وَهُوَ مُشْكِلٌ، فَإِنَّ اعْتِكَافَ لَحْظَةٍ عِبَادَةٌ تَامَّةٌ وَإِنْ قِيْسَ عَلَى الصَّوْمِ فَاللَّيْلُ ثَمَّ خَارِجٌ عَنِ الْاِعْتِبَارِ اهـ بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ وَصَلَاتِهِ لِغَيْرِهِ) قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ: كَأَنْ صَلَّى أَوْ صَامَ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَيْهِ. وَهُوَ ضَعِيْفٌ اهـ وَقَالَ فِيْ بُشْرَى الْكَرِيْمِ: وَالضَّعْفُ ظَاهِرٌ إِنْ أُرِيْدَ الثَّوَابُ نَفْسُهُ. فَإِنْ أُرِيْدَ مِثْلُهُ فَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُخْتَلَفَ فِيْهِ. نَعَمْ الصَّدَقَةُ يَصِلُ نَفْسُ ثَوَابِهَا لِلْمُتَصَدَّقِ عَنْهُ إِجْمَاعًا، وَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَدِّقُ. وَيُثَابُ الْمُتَصَدِّقُ ثَوَابَ الْبِرِّ لَا عَلَى الصَّدَقَةِ. وَكَذَا يَصِلُهُ مَا دَعَا لَهُ بِهِ إِنْ قَبِلَهُ اللهُ تَعَالَى.

(Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Menshahihkan qaul qadim."*) Yakni karena ada hadits-hadits *shahih* yang menunjukkan kebolehan berpuasa sebagai ganti dari *mayit*, seperti hadits Shahih Bukhari Muslim: *"Orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, maka walinya dapat berpuasa sebagai ganti darinya"*, dan hadits Muslim: "Sungguh Nabi ﷺ bersabda kepada perempuan yang berkata kepadanya: *"Sungguh ibuku meninggal dan mempunyai tanggungan puasa nazar. Bolehkah aku berpuasa untuk ganti darinya?"* Nabi ﷺ bersabda: *"Berpuasalah sebagai ganti darinya."* Dalam *at-Tuhfah* ada redaksi: *"Dan asy-Syafi'i telah mengatakan secara terang-terangan hal tersebut, maksudnya dalam qaul qadim, dan juga dalam qaul jadid. Ia berkata: "Jika hadits ini valid maka aku akan berpendapat*

sebagaimana hadits tersebut", dan kenyataannya hadits tersebut valid tanpa ada yang menentang. Dengan begitu maka kritik terhadap penulis (an-Nawawi) bahwa semestinya beliau memilih *qaul jadid* yang tidak memperbolehkan puasa sebagai ganti dari mayit karena pertimbangan *dalil*, sebab yang menjadi pendapat *al-Madzhab* ialah *qaul jadid*. Dalam *ar-Raudhah* disebutkan: *"Yang masyhur dalam madzhab asy-Syafi'i adalah menshahihkan qaul jadid. Segolongan muhaqqiq ulama Syafi'iyah berpendapat menshahihkan qaul qadim, dan itu yang benar. Bahkan hendaknya mantap dengannya karena berdasarkan hadits-hadits shahih, dan qaul jadid tidak mempunyai hujjah hadits, sementara hadits tentang fidyah statusnya dha'if."* Demikian redaksi *at-Tuhfah*. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Bahkan wali boleh ..."*) yang dimaksudkan wali dalam kasus ini adalah setiap kerabat mayit, meskipun bukan *'ashabah*, bukan ahli waris, dan bukan wali harta menurut *qaul mu'tamad*. Dikatakan, harus dengan masing-masing dari mereka. Namun sabda Nabi ﷺ kepada perempuan yang bertanya kepada beliau yang telah lewat: *"Puasalah sebagai ganti dari ibumu"* menggugurkan pendapat yang menyatakan, maksudnya adalah wali harta dan pendapat yang menyatakan, maksudnya adalah wali *'ashabah*. Wali disyaratkan baligh dan berakal, meskipun budak, karena ia termasuk ahli puasa fardhu. Lain halnya dengan anak-anak dan orang gila. Orang lain yang mendapat izin dari mayit dengan berwasiat agar berpuasa sebagai ganti darinya atau mendapat izin dari wali mayit, hukumnya seperti wali. Lain halnya bila tidak mendapatkan izin, maka tidak sah ... (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Orang meninggal yang mempunyai tanggungan shalat."*), maksudnya *i'tikaf*. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Maka tidak ada qadha' dan fidyah"*), karena keduanya tidak *wurud*. Dua *rakaat shalat sunnah thawaf* dikecualikan dari tercegahnya shalat dan *i'tikaf* sebagai ganti dari mayit, karena dua rakaat shalat sunnah *thawaf* sah dilakukan oleh orang yang diupah karena mengikuti keabsahan haji, serta kasus andai orang *nazar* akan *i'tikaf* dalam kondisi berpuasa, maka sungguh dalam *at-Tahdzib* al-Baghawi berkata: *"Jika kita berpendapat puasa tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah dari i'tikaf, dan itu pendapat al-ashah, dan kita berpendapat wali dapat puasa untuknya, maka wali ini dapat beri'tikaf sebagai ganti darinya dalam kondisi berpuasa, meski pergantian tidak mencukupi dalam i'tikaf-saja-."* (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dan menurut suatu pendapat seperti golongan mujtahid."*), maksudnya, dan dalam suatu pendapat di dalam madzhab asy-Syafi'i sebab mengikuti segolongan *mujtahid*. Redaksi *Fath al-Jawad* menyatakan: *"Sebab dalam shalat ada pendapat milik segolongan mujtahidin bahwa shalat yang menjadi tanggungan mayit boleh diqadha'."* Karena itu, mungkin huruf *kaf* yang masuk pada kata كمجتهد merupakan tambahan dari

penyalin naskah. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Sungguh shalat."*), maksudnya shalat dapat diqadha` sebagai ganti dari mayit. Ada juga pendapat yang menyatakan, bahwa *i'tikaf* juga boleh diqadha` sebagai ganti dari mayit. (Ungkapan al-Malibari: *"Sebab hadits Shahih al-Bukhari dan selainnya."*) Dalam *at-Tuhfah* ada redaksi: *"sebab ada hadits tentangnya, tapi hadits itu ma'lul."* (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Karena hadits tersebut, segolongan Imam madzhab asy-Syafi'i."*), yakni karena adanya hadits tentang qadha` shalat, segolongan Imam madzhab asy-Syafi'i memilih pendapat yang membolehkannya. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dan as-Subki melakukannya."*), yakni mengamalkan pendapat tersebut, yakni *qadha` shalat.* Dalam *Hawasyi al-Mahalli* karya al-Qulyubi terdapat redaksi: *"Sebagian guruku berkata: "Ini merupakan amal pribadi untuk dirinya sendiri, maka boleh mentaqlidinya, karena termasuk kategori muqabil al-ashah."* (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Di dalam suatu pendapat yang dipedomani banyak ulama Syafi'iyah .."*), al-Kurdi berkata: *"Al-Khawarizmi berkata: "Di Khurasan aku melihat sebagian ulama Syafi'iyah yang menfatwakannya."* Diriwayatkan dari al-Buwaithi, sungguh asy-Syafi'i berkata tentang *i'tikaf*: *"Walinya boleh beri'tikaf sebagai ganti darinya."* Dalam suatu riwayat disebutkan: *"Wali membayar fidyah berupa makanan sebagai ganti darinya."* Apabila kita berpendapat dengan *fidyah* makanan dalam *i'tikaf*, sedangkan kadar yang sebanding dengan satu *mud* ialah *i'tikaf* sehari semalam. Demikian dihikayatkan oleh al-Imam al-Haramain dari riwayat gurunya. Ini musykil. Sebab *i'tikaf* sejenak merupakan ibadah sempurna, dan bila diqiyaskan pada puasa, maka malam harinya tidak dipertimbangkan." Demikian kata al-Kurdi sedikit perubahan. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Madzhab Ahl as-Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa orang dapat menjadikan pahala amal dan shalatnya untuk orang lain."*), al-Bujairami berkata: *"Seperti orang shalat atau puasa kemudian berdoa: "Ya Allah, sampaikan pahalanya kepadanya." Namun pendapat ini dha'if."* Demikian katanya. Sa'id bin Muhammad Baali Ba'isyan al-Hadhrami dalam *Busyra al-Karim* berkata: *"Kelemahan pendapat tersebut jelas bila yang dikehendaki adalah pahala dari shalat atau puasa itu sendiri. Jika yang dikehendaki adalah pahala lain seperti pahala itu maka semestinya tidak diperselisihkan. Ya begitu, namun berdasakan ijma' pahala sedekah sampai kepada mayit yang dimaksud, dan seolah-olah ia adalah pelakunya, sedangkan pelakunya diberi pahala kebaikan, bukan pahala sedekah. Begitu pula apa yang didoakan orang untuk mayit jika Allah Ta'ala mengabulkannya."*

g. *Syarh as-Sunnah li al-Imam al-Baghawi*, VI/327 [Maktabah Islami]:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ

يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ ... إِلَى أَنْ قَالَ ... وَاتَّفَقَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ بِعُذْرٍ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْقَضَاءِ بِأَنْ دَامَ عُذْرُهُ حَتَّى مَاتَ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ قَتَادَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: يُطْعِمُ عَنْهُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُحْكَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ طَاوُوْسٍ. وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ، فَلَا كَفَّارَةَ لَهَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ قَوْمٌ: يُصَلِّي عَنْهُ. رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا الصَّلَاةَ بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّ عَنْهَا. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ.

Diriwayatkan dari Ibn Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: *"Orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa sebulan, maka dibayarkan fidyah berupa makanan darinya bagi satu orang miskin sebagai ganti puasa sehari.*" Mayoritas ulama sepakat bahwa saat orang tidak berpuasa sebab uzur bepergian atau sakit, lalu tidak gegabah dalam mengqadha`nya, seperti uzurnya terus dialami sampai mati, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, kecuali menurut al-Qatadah. Ia berkata: *"Dibayarkan fidyah berupa makanan sebagai ganti darinya."* Hal itu diriwayatkan dari Ibn 'Abbas, dan dihikayatkan pula dari Thawus. Menurut sebagian ulama, orang yang meninggal dan memiliki tanggungan shalat maka tidak ada *kafarah* baginya. Ini pendapat asy-Syafi'i. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa dibayarkan *fidyah* berupa makanan sebagai ganti darinya. Inilah pendapat ulama *ahli ra'yi*. Ulama lain berpendapat dilakukan shalat sebagai ganti darinya. Diriwayatkan dari Umar ؓ, sungguh beliau memerintahkan seorang wanita yang ibunya bernazar shalat di Quba`: *"Shalatlah sebagai ganti darinya."* Atsar seperti itu diriwayatkan pula dari Ibn 'Abbas.

h. *Hawasyi asy-Syirwani*, III/90-91 [at-Tijariyah al-Kubra]:

(قَوْلُهُ: وَنَحْوَ قَضَاءِ الصَّلَاةِ) أَيْ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَرُدُّهُ عَلَى الْمَظْلُومِ، كَالِاسْتِحْلَالِ مِنَ الْغِيبَةِ. وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِابْنِ حجر: وَمِنْهَا قَضَاءُ نَحْوِ صَلَاةٍ وَإِنْ كَثُرَتْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُ سَائِرِ زَمَنِهِ لِذَلِكَ مَا عَدَا الْوَقْتَ الَّذِي يَحْتَاجُهُ لِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ. وَكَذَا يُقَالُ فِي نِسْيَانِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ. انْتَهَى أَقُولُ هَذَا وَاضِحٌ إِنْ قَدَرَ عَلَى قَضَائِهَا فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ. أَمَّا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَكَانَ يَسْتَغْرِقُ قَضَاؤُهَا زَمَنًا كَثِيرًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ فِي صِحَّةِ تَوْبَتِهِ عَزْمُهُ عَلَى

قَضَائِهَا مَعَ الشُّرُوعِ فِيهِ، حَتَّى لَوْ مَاتَ زَمَنَ الْقَضَاءِ لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا.

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: *"Dan seperti qadha` shalat."*) maksudnya dari hal-hal yang di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang dikembalikan kepada orang yang dizalimi, seperti meminta halal dari menggunjing. Dalam *Hasyiyah al-Idhah* karya Ibn Hajar ada redaksi: *"Di antaranya qadha` seperti shalat, meski banyak. Bagi orang yang mempuyai tanggungan shalat, wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha`nya selain waktu yang dibutuhkannya untuk bekerja demi memenuhi biaya hidup diri dan keluarganya. Dikatakan begitupula untuk lupa al-Qur`an atau sebagiannya setelah mencapai usia baligh."* Demikian redaksi *Hasyiyah al-Idhah*. Saya katakan: *"Hal ini jelas bila ia mampu mengqadha`nya dalam waktu yang singkat. Sedangkan seandainya tanggungan shalatnya sangat banyak, dan mengqadha`nya menghabiskan waktunya yang sangat banyak, maka mestinya keabsahan taubatnya cukup dengan keinginan kuat untuk mengqadha`nya disertai melaksanakannya, sehingga bila ia mati dalam waktu mengqadha`nya maka tidak meninggal dalam kondisi maksiat."*

i. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XL/221-222 [Wazarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah]:

الِاتِّجَاهُ الثَّانِي: يَرَى مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ أَدَّاهَا وَلِيُّهُ عَنْهُ. رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- وَقَالَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَعَطَاءٌ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ عَنِ الْمَيِّتِ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ. وَذَهَبَ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْوَارِثَ يُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. وَمَشْهُورُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ نَذَرَ أَدَاءَهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَذَلِكَ صِلَةٌ لَهُ وَإِبْرَاءٌ لِذِمَّتِهِ مِنْهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يَقْضِيهِ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدَهُ. وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَالصِّيَامِ عَنْهُ وَنَحْوِهَا، إِذْ جَاءَ فِيهَا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَاقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا النَّاذِرُ عَلَى نَفْسِهِ هِيَ دَيْنُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَقَدْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهِ، فَيُجْزِئُهُ قَضَاءُ وَلِيِّهِ عَنْهُ ذَلِكَ. وَبِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي

عَنْهَا. وَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ قَضَاءُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ بِالنَّصِّ، فَيَجُوزُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ عَنْهُ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دَيْنٌ وَجَبَ عَلَى الْمَيِّتِ، فَيُقْضَى عَنْهُ كَبَقِيَّةِ دُيُونِهِ وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ.

Pendapat kedua: Ulama yang cenderung padanya berpendapat bahwa orang mati yang mempunyai tanggungan shalat *nazar*, maka walinya dapat melakukannya sebagai ganti darinya. Ini diriwayatkan dari Ibn Umar-*radhiyallahu 'anhuma*-. Al-Auza'i, 'Atha', dan Ishaq berpendapat demikian. Muhammad bin Abdil Hakim dari ulama Malikiyah berkata: *"Boleh disewa seseorang untuk melakukan shalat sebagai ganti dari shalat-shalat yang belum sempat dilakukan mayit."* Sebagian ulama *muta'akhirin* Syafi'iyah berpendapat bahwa ahli waris bisa melakukan shalat sebagai ganti shalat yang wajib bagi mayit. Pendapat masyhur madzhab ulama Hanabilah menyatakan bahwa bagi wali mayit sunnah melaksnakan shalat nazar yang tidak sempat dilakukan mayit sampai meninggalnya, dan hal itu merupakan bentuk kebaikan baginya serta membebaskan tanggungannya. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbas-*radhiyallahu'anhuma*-, bahwa Sa'd bin 'Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ terkait *nazar* yang wajib bagi ibunya, kemudian ia meninggal sebelum melaksanakannya, kemudian Nabi ﷺ berfatwa bahwa dia dapat mengqadha'nya sebagai ganti dari ibunya, kemudian hal tersebut menjadi sunnah setelah beliau wafat. Mereka juga berdalil dengan hadits-hadits yang menunjukkan kebolehan haji, puasa, dan ibadah semisalnya sebagai ganti dari mayit, sebab ada sabda Rasul ﷺ: *"Maka lunasilah hutang kepada Allah, sebab hutang tersebut lebih berhak dilunasi daripada hutang selainnya."* Shalat yang diwajibkan oleh orang yang ber*nazar* bagi dirinya merupakan hutang kepada Allah ﷻ yang menjadi tanggungannya, sementara ia telah meninggal sebelum sempat melakukannya, maka qadha' walinya cukup sebagai gantinya. Selain itu mereka berdalil dengan *atsar* dari Ibn Umar-*radhiyallahu 'anhuma*-, bahwa beliau memerintah perempuan yang ibunya bernazar shalat di Quba', lalu beliau berkata: *"Shalatlah sebagai ganti darinya."* Qadha' puasa dan haji sebagai ganti dari mayit juga telah ditetapkan dengan *nash* maka boleh *mengqadha'* shalat sebagai gantinya dengan *diqiyaskan* pada keduanya. Sebab masing-masing dari keduanya adalah ibadah *badaniyah* dan hutang yang wajib dilunasi oleh si mayit, maka dapat dilunasi sebagaimana hutang-hutangnya yang lain, dan pelunasan itu mencukupi baginya.

j. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah,* XXV/83 [Wazarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah]:

إِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالْإِطْعَامِ: ٦- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِالْإِطْعَامِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمَرِيضُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِهَا. أَمَّا إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الصَّلَاةِ وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ وَفَاتَتْهُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِالْكَفَّارَةِ عَنْهَا. فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ. وَكَذَا الْوِتْرُ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ فِي الصِّيَامِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ. وَالصَّلَاةُ كَالصِّيَامِ بِاسْتِحْسَانِ الْمَشَايِخِ، لِكَوْنِهَا أَهَمَّ. وَالصَّحِيحُ: اعْتِبَارُ كُلِّ صَلَاةٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ، فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ فِدْيَةٌ، وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ، أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَتُهُ، وَهِيَ أَفْضَلُ لِتَنَوُّعِ حَاجَاتِ الْفَقِيرِ. وَإِنْ لَمْ يُوصِ وَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ جَازَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَحْدَهُ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي تَبَرُّعِ الْوَارِثِ بِالْإِطْعَامِ فِي الصَّوْمِ: يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ جَزْمٍ، وَفِي إِيصَائِهِ بِهِ جَزَمَ الْحَنَفِيَّةُ بِالْإِجْزَاءِ. وَلِلتَّفْصِيلِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ.

Gugurnya shalat dengan membayar *fidyah* berupa makanan: 6- *Jumhur* Fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa tanggungan shalat mayit tidak dapat gugur dengan membayar *fidyah* makanan. Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bila orang sakit itu mati dan tidak sanggup melaksanakan shalat dengan isyarat kepala, maka tidak wajib wasiat agar shalatnya diqadha`. Sedangkan bila ia masih mampu shalat meski dengan isyarat dan belum sempat melakukannya tanpa uzur maka wajib wasiat membayar *kafarah*nya. Maka walinya mengeluarkannya dari sepertiga harta peninggalannya bagi tiap shalat fardhu yang ditinggalkannya. Begitu pula shalat witir karena merupakan amaliah fardhu menurut Abu Hanifah. Sungguh ada *nash* tentang qadha` puasa, yaitu sabda Nabi ﷺ: *"Namun dibayarkan fidyah makanan sebagai ganti darinya."* Sementara shalat seperti puasa berdasarkan *istihsan masyayih* Hanafiyah, karena lebih penting daripada hal itu. Pendapat shahih menyatakan menganggap setiap shalat sepadan dengan puasa sehari, maka untuk setiap shalat dibayarkan *fidyah*, yaitu setengah *sha'* gandum, tepung, atau *sawiq*nya; atau satu *sha'* kurma, anggur, gandum *sya'ir*, atau harganya, dan itu paling utama karena

kebutuhan fakir bermacam-macam. Bila mayit tidak mewasiatkannya dan walinya atau orang lain secara sukarela membayarnya *insya Allah Ta'ala* boleh menurut Muhammad bin al-Hasan saja, karena beliau berkata tentang ahli waris yang secara sukarela membayar *fidyah* berupa makanan untuk puasa mayit: *"Insya Allah ﷻ pembayaran fidyah secara suka rela mencukupinya"*, tanpa disertai kemantapan. Ulama Hanafiyah mantap atas cukupnya pembayaran *fidyah* yang diwasiatkan oleh mayit, dan untuk keterangan yang lebih spesifik silahkan merujuk ke istilah shalat dan puasa.

k. *Fath al-Bari*, XI/584 [Dar al-Ma'rifah]:

(قَوْلُهُ: بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ) أَيْ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ أَوْ لَا؟ وَالَّذِيْ ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ يَقْتَضِيْ الْأَوَّلَ، لَكِنْ هَلْ هُوَ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ أَوِ النَّدْبِ؟ خِلَافٌ يَأْتِيْ بَيَانُهُ. (قَوْلُهُ: وَأَمَرَ بْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ) يَعْنِيْ فَمَاتَتْ. فَقَالَ: صَلِّيْ عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ). وَصَلَهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ أَيْ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا. وَأَخْرَجَهُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّةً عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَمِنْ طَرِيْقِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَعْتَكِفْ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اِعْتَكِفْ عَنْ أُمِّكَ. وَجَاءَ عَنِ بْنِ عُمَرِو بْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُ ذٰلِكَ. فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: لَا يُصَلِّيْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيْقِ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُصَلِّيْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. أَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيْقِهِ مَوْقُوْفًا، ثُمَّ قَالَ: وَالنَّقْلُ فِيْ هٰذَا عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ مُضْطَرِبٌ. قُلْتُ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْإِثْبَاتِ فِيْ حَقِّ مَنْ مَاتَ وَالنَّفْيِ فِيْ حَقِّ الْحَيِّ. ثُمَّ وَجَدْتُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيْصِهِ فِيْ حَقِّ الْمَيِّتِ بِمَا إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ وَاجِبٌ. فَعِنْدَ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ

ابْنُ عُمَرَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ صَلِّ عَنْهَا الْعَمَلَ بِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، فَعَدَّ مِنْهَا الْوَلَدَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسْبِهِ، فَأَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ مَكْتُوبَةٌ لِلْوَالِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ. فَمَعْنَى صَلِّ عَنْهَا أَنَّ صَلَاتَكَ مَكْتُوبَةٌ لَهَا وَلَوْ كُنْتَ إِنَّمَا تَنْوِي عَنْ نَفْسِكَ. كَذَا قَالَ، وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ. وَحَاصِلُ كَلَامِهِ تَخْصِيصُ الْجَوَازِ بِالْوَلَدِ. وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ مَالِكٍ. وَفِيهِ تَعَقُّبٌ عَلَى ابْنِ بَطَّالٍ حَيْثُ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ لَا فَرْضًا وَلَا سُنَّةً، لَا عَنْ حَيٍّ وَلَا عَنْ مَيِّتٍ. وَنَقَلَ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ جَازَ لَجَازَ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، وَلَكَانَ الشَّارِعُ أَحَقَّ بِذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْ أَبَوَيْهِ وَلَمَا نُهِيَ عَنِ الْاِسْتِغْفَارِ لِعَمِّهِ، وَلَبَطَلَ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. انْتَهَى. وَجَمِيعُ مَا قَالَ لَا يَخْفَى وَجْهُ تَعَقُّبِهِ، خُصُوصًا مَا ذَكَرَهُ فِي حَقِّ الشَّارِعِ. وَأَمَّا الْآيَةُ فَعُمُومُهَا مَخْصُوصٌ اتِّفَاقًا. وَاللهُ أَعْلَمُ.

(Ungkapan al-Bukhari: *"Bab orang meninggal yang mempunyai tanggungan nazar."*), maksudnya apakah diqadha` sebagai ganti darinya atau tidak? Hadits yang disebutkannya dalam bab ini menetapkan jawaban yang pertama. Tapi apakah hukumnya wajib atau sunnah? Dalam hal ini khilaf, yang akan diterangkan penjelasannya. (Ungkapan al-Bukhari: *"Ibn Umar memerintahkan perempuan yang ibunya mempunyai nazar shalat di Quba`."*), maksudnya lalu ia meninggal. (Lantas Ibn Umar berkata: *"Shalatlah sebagai ganti darinya"*, dan Ibn 'Abbas mengatakan seperti itu.) Malik me*muttashil*kannya dari riwayat Abdullah bin Abi Bakr, maksudnya bin Muhammad bin 'Amr, bin Hazm, dari bibi dari jalur ayahnya, bahwa ia bercerita kepadanya dari neneknya, bahwa ia *nazar* jalan kaki ke Quba`, lalu meninggal dan belum sempat melakukannya, kemudian Abdullah bin 'Abbas berfatwa pada anaknya agar berjalan kaki ke Quba` sebagai ganti dari ibunya. Ibn Abi Syaibah men*takhrij*nya dengan *sanad shahih* dari Sa'id bin Jubair, Murrah berkata dari *riwayat* Ibn 'Abbas, beliau berkata: *"Bila orang mati dan mempunyai tanggungan nazar, maka walinya dapat mengqada`nya sebagai ganti darinya."* Dari jalur 'Aun bin Abdillah bin 'Utbah, sungguh seorang perempuan bernazar untuk *i'tikaf* selama 10 hari, lalu meninggal sebelum melakukannya, lalu Ibn 'Abbas berkata: *"I'tikaflah sebagai ganti dari ibumu."*, dan ada riwayat dari Ibn Umar bin 'Abbas yang bertentangan dengannya. Dalam *al-Muwaththa`* Malik berkata, bahwa telah sampai padanya, sungguh

Abdullah bin Umar berkata: *"Orang tidak bisa shalat sebagai ganti dari orang lain dan tidak bisa puasa sebagai ganti dari orang lain."* An-Nasa`i men*takhrij* dari jalur Ayyub bin Musa, dari 'Atha` bin Rabah, dari Ibn 'Abbas, beliau berkata: *"Orang tidak bisa shalat sebagai ganti dari orang lain dan tidak bisa puasa sebagai ganti dari orang lain."* Ibn Abd al-Barr meriwayatkannya dari jalur Ayyub bin Musa dengan status *mauquf*, lalu berkata: *"Penukilan tentang hal ini dari Ibn 'Abbas bersifat muththarib."* Saya-Ibn Hajar al-'Asqalani-katakan: *"Masih mungkin dikompromikan dengan mengarahkan riwayat yang menetapkan qadha` bagi orang meninggal dan mengarahkan riwayat yang menafikan bagi orang yang masih hidup"*. Lalu saya menemukan riwayat dari Ibn 'Abbas yang menunjukkan pengkhususan riwayat yang menetapkan *qadha`* dalam kasus ketika orang meninggal dalam kondisi memiliki tanggungan yang hukumnya wajib. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dengan *sanad shahih*, Ibn 'Abbas ditanya tentang seorang yang meninggal dalam kondisi mempunyai tanggungan *nazar*, lalu beliau menjawab: *"Nazarnya dipuasai sebagai ganti darinya."* Ibn al-Mundzir berkata: *"Dengan ucapan: "Shalatlah bagi ganti darinya"*, mungkin saja Ibn Umar memaksudkan sabda Nabi ﷺ: *"Ketika anak adam mati maka amalnya terputus kecuali tiga hal"*, lantas beliau memasukkan anak sebagai salah satunya, sebab anak keluar dari upaya orang tua, maka amal-amal shalihnya ditulis untuk orang tua tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Maka makna: *"Shalatlah bagi ganti darinya"*, adalah sungguh shalatmu ditulis untuknya meskipun kamu hanya berniat untuk dirimu sendiri." Demikian katanya, namun tidak samar hal itu dibuat-buat (modus). Kesimpulan pernyatan Ibn al-Mundzir tersebut mengkhususkan bolehnya qadha` bagi anak. Ibn Wahb dan Abu Mush'ab dari Ashab al-Imam Malik. Dalam pendapat tersebut Ibn al-Mundzir menolak Ali bin Baththal dimana ia menukil *ijma'* yang menyatakan bahwa orang tidak bisa shalat sebagai ganti dari orang lain, tidak fardhu, tidak sunnah, tidak sebagai ganti dari orang yang masih hidup, dan tidak sebagai ganti dari orang meninggal; dan menukil dari *al-Mahlab*, bahwa andai hal itu dibolehkan, maka niscaya boleh dalam semua *ibadah badaniyah*, Nabi ﷺ lebih berhak melakukannya untuk kedua orang tuanya, tidak tercegah memohonkan ampun untuk pamannya, batal makna firman Allah: *"Setiap orang tidak melakukan sesuatu melainkan kembali kepada dirinya."* [al-An'am: 164]. Demikian kata Ali bin Baththal. Tidak tersamarkan lagi cara menentang seluruh perkataanya, terlebih hal terkait Nabi ﷺ yang disebutkannya. Adapun ayat tersebut maka keumumannya terbatasi berdasarkan kesepakatan ulama. *Wa Allahu 'a'lam.*

1. *Asy-Syarh al-Kabir li ar-Rafi'i* III/237-238 [Dar al-Kutub al-'Ilmiyah]:

وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوِ اعْتِكَافٌ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلَا يُسْقِطُ عَنْهُ الْفِدْيَةُ. وَعَنِ الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْاِعْتِكَافِ: يَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَفِي رِوَايَةٍ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيْبِ: وَلَا يَبْعُدُ تَخْرِيْجُ هٰذَا فِي الصَّلَاةِ، فَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا.

Bila orang meninggal dan mempunyai tanggungan shalat atau *i'tikaf*, maka walinya tidak dapat mengqadha` sebagai ganti darinya dan *fidyah* tidak dapat menggugurkannya. Diriwayatkan dari al-Buwaithi, bahwa asy-Syafi'i ﷺ berkata tentang *i'tikaf*. *"Walinya dapat ber'itikaf sebagai ganti darinya."* Dalam riwayat lain disebutkan: *"Walinya membayar fidyah makanan sebagai ganti darinya."* Penulis *at-Tahdzib*, al-Baghawi, berkata: *"Tidak jauh dari kebeneran mentakhrij hal ini dalam shalat, maka wali dapat membayar fidyah satu mud sebagai ganti dari setiap shalat."*

m. *Al-Bujairami 'ala al-Khathib*, II/147 [Dar al-Kutub al-'Ilmiyah]:

قَوْلُهُ: (وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ)، قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: إِنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ لَا يَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا وَلَوْ بِإِجْرَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى قَلْبِهِ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيْفَةَ: إِنَّ مَنْ عَايَنَ الْمَوْتَ وَعَجَزَ عَنِ الْإِيْمَاءِ بِرَأْسِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ. وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ سَلَفًا وَخَلَفًا، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَ الْمُحْتَضَرَ بِالصَّلَاةِ. وَوَجْهُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ صَارَ قَلْبُهُ مَعَ اللهِ تَعَالَى أَعْظَمَ مِنَ اشْتِغَالِهِ بِمُرَاعَاةِ الْأَفْعَالِ، لِأَنَّ الْأَفْعَالَ وَالْأَقْوَالَ الَّتِي أَمَرَنَا الشَّارِعُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا أَمَرَنَا بِهَا وَسِيْلَةً إِلَى الْحُضُوْرِ مَعَ اللهِ تَعَالَى فِيْهَا، وَالْمُحْتَضَرُ انْتَهَى سَيْرُهُ إِلَى الْحَضْرَةِ وَتَمَكَّنَ فِيْهَا، فَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْوَلِيِّ الْمَجْذُوْبِ. وَهُنَا أَسْرَارٌ لَا تُسْطَرُ فِي كِتَابٍ، فَافْهَمْ. انْتَهَى مِيْزَانٌ. قَالَ الزِّيَادِيُّ: وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْإِبَاحِيِّيْنَ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بَلَغَ غَايَةَ الْمَحَبَّةِ فِي اللهِ وَصَفَا قَلْبُهُ وَاخْتَارَ الْإِيْمَانَ عَلَى الْكُفْرِ مِنْ غَيْرِ نِفَاقٍ سَقَطَ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ، فَرَدَّهُ التَّفْتَازَانِيُّ بِأَنَّهُ كُفْرٌ وَضَلَالٌ. فَإِنَّ أَكْمَلَ النَّاسِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْإِيْمَانِ الْأَنْبِيَاءُ خُصُوْصًا حَبِيْبَ اللهِ مَعَ أَنَّ التَّكَالِيْفَ فِي حَقِّهِمْ أَتَمُّ اهـ

(Ungkapan al-Khatib asy-Syirbini: "Dan tidak gugur dari hutang shalatnya").

Al-A'immah ats-Tsalatsah berpendapat, bahwa shalat fardhu tidak gugur dari *mukallaf* selama sehat akalnya, meski dengan menjalankan shalat di hatinya. Al-Imam Abu Hanifah berkata: *"Sungguh orang yang hampir meninggal dan sudah tidak mampu shalat dengan isyarat kepalanya maka kefardhuan gugur darinya. Itulah yang diamalkan generasi salaf dan khalaf, dan tidak sampai padaku bahwa seseorang dari mereka memerintah orang sekarat untuk shalat."* Alasan *al-Imam* pendapat Abu Hanifah tersebut ialah bahwa kondisi hati orang yang didatangi kematian bersama Allah Ta'ala lebih agung daripada kesibukannya menjaga ibadah perbuatan, sebab perbuatan dan ucapan yang diperintahkan syariat dalam shalat diperintahkan kepada kita hanya sebagai media untuk menghadirkan diri bersama Allah Ta'ala di dalamnya, sedangkan perjalanan orang *naza'* menuju hadirat Allah telah selesai dan dia berada di dalamnya, maka hukumnya seperti hukum wali *majdzub*. Dalam hal ini terdapat rahasia-rahasia yang tidak dapat dituliskan dalam buku. Pahamilah. Demikian ibarat kitab *Mizan*. Az-Ziyyadi berkata: *"Adapun pendapat yang dinukil dari sebagian kaum Ibahiyin, yaitu bahwa seorang hamba bila telah mencapai puncak mahabbah pada Allah, bersih hatinya, dan memilih iman daripada kekufuran tanpa kemunafikan, maka gugur baginya perintah dan larangan agama dan tidak masuk neraka karena melakukan dosa besar, telah ditolak oleh at-Taftazani dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan kekufuran dan kesesatan. Sebab sesungguhnya manusia yang paling sempura mahabbah dan imannya adalah para Nabi, dan khususnya habibullah Nabi Muhammad ﷺ, padahal taklif mereka lebih sempurna."*

400. Program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah

Deskripsi Masalah

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, karena dengan kesehatan yang prima maka masyarakat dan pemerintah akan lebih produktif dalam menjalankan aktifitasnya. Problem yang terjadi di masyarakat adalah bagaimana warga negara bisa memperoleh pelayanan kesehatan, terutama bagi warga miskin. Program pemerintah yang diamanatkan dalam undang-undang adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negaranya, untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara ada program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jamkesmas diperuntukan bagi warga yang tidak mampu, karena banyaknya warga yang tidak mampu, maka pemerintah daerah juga memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta dalam hal ini rumah sakit, rumah bersalin, klinik, puskesmas

atau jenis layanan kesehatan lainnya. Ada beberapa kasus permasalahan yang kita temui dalam penyelengaraan pelayanan kesehatan, dalam melakukan pelayanan kesehatan ada pembedaan perlakukan bahkan penolakan bagi pasien (pengguna layanan kesehatan) terutama warga miskin, kadang pengguna kartu Jamkesmas atau Kartu Jaminan Kesehatan lainnya, bahkan yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan sekalipun, ditolak oleh instansi layanan kesehatan, berbagai alasan digunakan dalam menolak pasien atau pengunan layanan, seperti tidak ada tempat, dokter dan paramedis serta peralatan medis yang tidak memenuhi. Namun kita tahu bahwa penolakan seringkali ujung-ujungnya dialami oleh penguna layanan atau pasien yang tidak mampu atau miskin.

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya penolakan terhadap pasien yang tidak mampu dengan berbagai macam alasan, seperti tidak ada tempat, dokter/paramedis, peralatan yang tidak memadai dan lain lain? Dan bagaimana hukumnya dokter/paramedis yang menolak pasien yang tidak mampu?

Jawaban

Program Jamkesmas dan Jamkesda telah sesuai dengan prinsip *"Tasharuf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Mashlahah"*. Oleh karena itu pusat-pusat layanan kesehatan dan instansi terkait wajib melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai penolakan terhadap pasien yang tidak mampu, di*tafsil*:

a. Jika penanganan pasien masih bisa ditunda maka penolakan pihak rumah sakit dapat diterima, namun harus mencarikan rumah sakit lain yang bisa menerimanya. Dan jika pasien harus segera ditangani (tidak bisa ditunda) maka harus dilakukan pertolongan pertama sesuai batas kewenangan dan kemampuan yang ada, kemudian setelah itu harus mencarikan rumah sakit lain yang bisa merawat dengan memadai.

b. Jika alasan penolakan itu mengada-ada, maka hukumnya haram karena termasuk berdusta. Adapun menolak (tidak melakukan perawatan) terhadap pasien:

    a. Apabila sakitnya sudah kritis sekira jika tidak dilakukan perawatan akan berdampak pada kematian atau jatuh dalam kondisi yang membahayakan, maka haram.

    b. Apabila sakitnya tidak seperti diatas, maka tidak haram, namun hendaknya pasien itu dapat diterima atau dirujuk kerumah sakit yang lain.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Mawahib as-Saniyah* dan *al-Fawa'id al-Janiyah*, II/123, [Dar al-Basya-ir al-Islamiyah]:

(تَصَرُّفُ الْإِمَامِ) أَيِ الْأَعْظَمِ وَمِثْلُهُ نُوَّابُهُ مِنْ قَاضٍ وَغَيْرِهِ (عَلَى الرَّعِيَّةِ) الْمُوَلَّى هُوَ عَلَيْهِمْ (مَنُوطٌ) مُقْتَرِنٌ جَوَازُهُ (بِالْمَصْلَحَةِ).

(قَوْلُهُ: أَيِ الْأَعْظَمِ) وَهُوَ السُّلْطَانُ أَوِ الْمَلِكُ أَوِ الْخَلِيفَةُ. وَكَذَا رَئِيسُ الْجُمْهُورِيَّةِ ... إِلَى أَنْ قَالَ ... (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ وَغَيْرِ الْقَاضِي. وَذَلِكَ كَالْمُحْتَسِبِ، وَهُوَ مَنْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ نَصْبُهُ لِلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يَعُمُّ نَفْعُهُ كَعِمَارَةِ سُوَقِ الْبَلَدِ وَشُرْبِهِ وَمَعُونَةِ الْمُحْتَاجِيْنَ. وَيَجِبُ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَالٌ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ.

(Kebijakan imam), yakni pemimpin tertinggi, dan juga para wakilnya seperti hakim dan lainnya (atas rakyat) yang dipimpinnya (digantungkan) yakni kebolehannya bersamaan (dengan kemaslahatan).

(Ungkapan Abdullah al-Jarhazi: *"Maksudnya pemimpin tertinggi."*), yaitu sultan, raja, atau *khalifah*. Begitu pula presiden ... (Ungkapan Abdullah al-Jarhazi: *"Dan selainnya."*), maksudnya selain *Qadhi*, seperti *Muhtasib*, yaitu orang yang wajib diangkat oleh Imam untuk *amr ma'ruf nahi munkar*. Maka mereka harus memerintahkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat, seperti pembangunan pasar beserta sarana prasarananya dan menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Alokasi dananya harus diambilkan dari kas negara (APBN/D), dan bila tidak mencukupi maka yang berkewajiban ialah orang-orang yang berkemampuan.

b. *Syarh al-Manhaj* dan *Hasyiyah al-Jamal*, V/183 [Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi]:

(وَدَفْعُ ضَرَرِ مَعْصُومٍ) مِنْ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ كَكُسْوَةِ عَارٍ وَإِطْعَامِ جَائِعٍ.

(قَوْلُهُ: وَدَفْعُ ضَرَرِ مَعْصُومٍ) وَهَلِ الْمُرَادُ بِدَفْعِ ضَرَرِ مَنْ ذُكِرَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ أَمِ الْكِفَايَةُ؟ قَوْلَانِ، أَصَحُّهُمَا ثَانِيهِمَا، فَيَجِبُ فِي الْكُسْوَةِ مَا يَسْتُرُ كُلَّ الْبَدَنِ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ مِنْ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ، وَيُلْحَقُ بِالطَّعَامِ وَالْكُسْوَةِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَثَمَنِ دَوَاءٍ ...

(Dan menolak bahaya dari orang yang terlindungi nyawanya), muslim

dan selainnya, seperti memberi sandang dan pangan bagi orang yang kekurangan.

(Ungkapan Zakaria al-Anshari: *"Dan menolak bahaya dari orang yang terlindungi nyawanya."*) Apakah yang dimaksud menolak bahaya orang-orang itu ialah sekedar menjaga keselamatan nyawa atau sampai pada kecukupannya? Ada dua pendapat, yang *ashah* ialah pendapat kedua. Maka untuk pakaian wajib berupa pakaian yang menutup seluruh badan sesuai kelayakannya dari musim dingin dan musim panas. Hal-hal yang semakna dengan makanan dan pakaian disamakan dengan keduanya, seperti upah dokter dan biaya obat.

c. *Zad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-'Ibad*, IV/142-144 [Mu'sasah ar-Risalah dan Maktabah al-Manar al-Islamiyah]:

فَصْلٌ: اَلْأُمُوْرُ الَّتِيْ يَجِبُ أَنْ يُرَاعِيَهَا الطَّبِيْبُ الْحَاذِقُ. وَالطَّبِيْبُ الْحَاذِقُ: هُوَ الَّذِيْ يُرَاعِيْ فِيْ عِلَاجِهِ عِشْرِيْنَ أَمْرًا ... الثَّالِثَ عَشَرَ: أَلَّا يَكُوْنَ كُلُّ قَصْدِهِ إِزَالَةَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فَقَطْ، بَلْ إِزَالَتُهَا عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ مَعَهُ حُدُوْثَ أَصْعَبَ مِنْهَا، فَمَتَى كَانَ إِزَالَتُهَا لَا يَأْمَنُ مَعَهَا حُدُوْثَ عِلَّةٍ أُخْرَى أَصْعَبَ مِنْهَا، أَبْقَاهَا عَلَى حَالِهَا، وَتَلْطِيْفُهَا هُوَ الْوَاجِبُ. وَهَذَا كَمَرَضِ أَفْوَاهِ الْعُرُوْقِ، فَإِنَّهُ مَتَى عُوْلِجَ بِقَطْعِهِ وَحَبْسِهِ خِيْفَ حُدُوْثُ مَا هُوَ أَصْعَبُ مِنْهُ. الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يُعَالِجَ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، فَلَا يَنْتَقِلُ مِنَ الْعِلَاجِ بِالْغِذَاءِ إِلَى الدَّوَاءِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الدَّوَاءِ الْمُرَكَّبِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الدَّوَاءِ الْبَسِيْطِ. فَمِنْ حِذْقِ الطَّبِيْبِ عِلَاجُهُ بِالْأَغْذِيَةِ بَدَلَ الْأَدْوِيَةِ، وَبِالْأَدْوِيَةِ الْبَسِيْطَةِ بَدَلَ الْمُرَكَّبَةِ. الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنْ يَنْظُرَ فِي الْعِلَّةِ، هَلْ هِيَ مِمَّا يُمْكِنُ عِلَاجُهَا أَوْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عِلَاجُهَا، حَفِظَ صِنَاعَتَهُ وَحُرْمَتَهُ، وَلَا يَحْمِلُهُ الطَّمَعُ عَلَى عِلَاجٍ لَا يُفِيْدُ شَيْئًا. وَإِنْ أَمْكَنَ عِلَاجُهَا، نَظَرَ هَلْ يُمْكِنُ زَوَالُهَا أَمْ لَا؟ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهَا، نَظَرَ هَلْ يُمْكِنُ تَخْفِيْفُهَا وَتَقْلِيْلُهَا أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْلِيْلُهَا، وَرَأَى أَنَّ غَايَةَ الْإِمْكَانِ إِيْقَافُهَا وَقَطْعُ زِيَادَتِهَا، قَصَدَ بِالْعِلَاجِ ذَلِكَ، وَأَعَانَ الْقُوَّةَ، وَأَضْعَفَ الْمَادَّةَ.

Pasal mengenai hal-hal yang wajib diperhatikan oleh dokter profesional. Dokter profesional dalam praktek pengobatannya harus memperhatikan 20 hal..... Ketigabelas, tujuannya tidak hanya sekedar menghilangkan penyakit, tetapi menghilangkan penyakit dengan cara yang aman dari

efek samping yang lebih buruk. Ketika bersama dengan menghilangkannya akan muncul efek penyakit yang lebih parah darinya, maka penyakit tersebut harus dibiarkan, dan yang wajib adalah meminimalisirnya. Seperti sakit di mulut-mulut otot, sebab bila dipotong atau dibungkam, maka dikhawatirkan muncul efek yang justru lebih buruk. Keempat belas, ia melakukan pengobatan dari cara yang paling ringan terlebih dulu, baru tingkat berikutnya. Maka tidak boleh pindah dari pengobatan dengan makanan ke obat-obatan kecuali bila tidak memungkinkan, dan tidak pindah kepada obat gabungan kecuali ketika sulit dengan obat tunggal. Sebab di antara kemahiran dokter adalah mengobati dengan makanan sebagai pengganti obat-obatan, dan mengobati dengan obat tunggal sebagai pengganti obat gabungan. Kelimabelas, harus melihat penyakitnya, apakah mungkin diobati atau tidak. Jika tidak mungkin, maka harus membatasi pengaruh dan proteksinya dan sifat rakus jangan sampai mendorongnya untuk melakukan pengobatan yang tidak berfaidah sama sekali. Jika mungkin diobati, maka harus dilihat, apakah bisa dihilangkan atau tidak. Bila penyakitnya tidak dimungkinkan hilang, maka harus melihat apakah mungkin diringankan dan diminimalisir atau tidak. Apabila tidak mungkin diminimalisir, dan ia memandang bahwa yang paling memungkinkan ialah menahan penyebarannya dan memutus perkembangannya, maka tujuan pengobatannya adalah hal itu, dan memberi support kekuatannya dan melemahkan penyakitnya.

401. Alokasi Dana Pendidikan yang Tidak Merata

Deskripsi Masalah

Seperti halnya kesehatan, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penyenggara pemerintahan, bahkan dalam undang-undang dasar jelas tertulis alokasi dana yang diperuntukan bagi pendidikan adalah 20%, peruntukan alokasi dana pendidikan semestinya disesuikan dengan kebutuhan yang penting dan terpenting, begitu juga adil dan merata menjadi landasan dalam alokasi dana.

Pendidikan yang ada di Indonesia terjadi ketimpangan dalam fasilitas, ada yang mewah dan bagus, namun ada yang sarananya tidak layak. Dalam alokasi anggaran pendidikan dan lembaga pendidikan banyak kita temui di lapangan gedung sekolahan akan runtuh, gedung yang minim dan mengenaskan, fasilitas penunjang yang tidak ada. Namun disisi lain ada sekolah yang mewah dan standart internasioanal, ada perbedaan alokasi pendanaan, belum lagi sekolah atau lembaga pendidikan yang diutamakan adalah lembaga pendidikan milik pemerintah dan sudah mapan, bagaimana yang tidak layak atau lembaga pendidikan non-pemerintah dan swadaya masyarakat, yang perutukannya bagi warga

miskin, alokasi anggaran yang berbeda dan tidak adil menjadi persoalan.

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya alokasi yang tidak merata dan pembiaran sarana pendidikan yang sudah tidak layak (bangunan, guru, fasilitas penunjang)?

Jawaban

Jika dana yang tersedia mencukupi, maka pemerintah wajib untuk mengalokasikan dana itu secara merata dan proporsional, baik untuk kebutuhan siswa, tenaga pendidik dan sarana-prasarana pendidikan. Dan jika dana terbatas, maka yang harus didahulukan adalah hal-hal yang penting (prioritas). Oleh karena itu ketimpangan dalam mengalokasikan anggaran adalah suatu penyelewengan (kezhaliman) yang tidak dapat dibenarkan (haram).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Asybah wa an-Nadha`ir*, 1/203 [Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz]:

وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرَ الْأَحْوَجِ عَلَى الْأَحْوَجِ ... إِلَى أَنْ قَالَ ... وَوَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ، وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنَ الْعَدْلِ تَقْدِيمُ الْأَحْوَجِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ مُتَسَاوِي الْحَاجَاتِ.

Di antara cabang *kaidah tasharruf al-imam manuth bi al-mashlahah* ialah sungguh Imam tidak tidak boleh memprioritaskan orang yang kurang membutuhkan daripada orang yang membutuhkan dalam pembiayaan dari *Bait al-Mal*... Tugas Imam adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana ini wajib dilakukan dengan adil. Di antara bentuk keadilan adalah memprioritaskan orang yang lebih membutuhkan dan meratakan antara orang-orang yang keperluannya sama.

b. *Qawa`id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, II/158 [Dar al-Qalam]:

يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْأً لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، وَلَا يَتَخَيَّرُونَ فِي التَّصَرُّفِ حَسَبَ تَخَيُّرِهِمْ فِي حُقُوقِ أَنْفُسِهِمْ، مِثْلَ أَنْ يَبِيعُوا دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ أَوْ مَكِيلَةَ زَبِيبٍ بِمِثْلِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام: ١٥٢]. وَإِنْ كَانَ هَذَا

فِي حُقُوقِ الْيَتَامَى، فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ فِي حُقُوقِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنَ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ. لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنِ اعْتِنَائِهِ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ. وَكُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan dengan kebijakan-kebijakan yang telah saya sebutkan, yaitu yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan, serta menarik untung dan kebaikan. Salah seorang dari mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik, kecuali akan mengakibatkan *masyaqah* yang berat. Mereka tidak boleh memilih kebijakan sesuai pilihan mereka untuk dirinya sendiri, seperti menjual satu *dirham* dengan harga satu *dirham*, atau setakar *zabib* dengan harga yang sama, karena firman Allah Ta'ala: *"Dan jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik."* [al-An'am: 152]. Apabila hal ini berlaku bagi anak-anak yatim, maka lebih utama ditetapkan bagi hak-hak kaum muslimin secara umum di dalam kebijakan para imam terkait harta publik. Karena perhatian syara' atas kemaslahatan umum lebih besar daripada kemaslahatan terbatas, dan setiap kebijakan yang berdampak pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dilarang agama.

c. *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, 151-154 [Dar Iqra']:

وَالَّذِي يَلْزَمُ سُلْطَانَ الْأُمَّةِ مِنْ أُمُورِهَا سَبْعَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: حِفْظُ الدِّينِ ... إِلَى أَنْ قَالَ ... وَالرَّابِعُ: تَقْدِيرُ مَا يَتَوَلَّاهُ مِنَ الْأَمْوَالِ بِسُنَنِ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ فِي أَخْذِهَا وَإِعْطَائِهَا ... إِلَى أَنْ قَالَ ... فَعَدْلُهُ فِيهِمْ يَكُونُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: بِاتِّبَاعِ الْمَيْسُورِ وَحَذْفِ الْمَعْسُورِ وَتَرْكِ التَّسَلُّطِ بِالْقُوَّةِ وَابْتِغَاءِ الْحَقِّ فِي السِّيرَةِ.

Kewajiban pemimpin umat terkait urusan-urusan mereka ada tujuh: (1) melindungi agama ... (4) mengalokasikan dana berdasarkan aturan agama tanpa melakukan penyelewengan dana dalam mengambil dan memberikannya..... Maka keadilan pemimpin pada rakyatnya harus berprinsip empat hal: mengikuti kemudahan, menghindari kesulitan, tidak sewenang-wenang dengan kekuatannya, dan mencari kebenaran dalam kebijakannya.

KOMISI A

MUSHAHIH

KH. Yasin Asymuni
KH. Nuruddin
KH. Arsyad Busyairi

PERUMUS

Drs. KH. Romadlon Khotib
KH. Murtadlo Ghoni

MODERATOR

KH. Imam Syuhada

NOTULEN

KH. M. Ali Maghfur Syadzili Isk., S.Pd.I
KH. Saifuddin Zuhri

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP Ar-Rosyid Dander Bojonegoro 30 April - 01 Mei 2011 M

402. Penjualan Zakat Fithrah
403. Memperjelas Keputusan Pemasangan Tower di Menara Masjid
404. Utang Bagi Hasil dan Zakatnya
405. Pinjaman Bersyarat
406. Dilema Talak Tiga
407. Membunuh Hewan untuk Umpan
408. Solat Pasien yang Memakai Kateter
409. Menggambar Berdasarkan Imajinasi
410. Konversi BBM Menjadi Gas Elpiji
411. Membunuh Karena Mencari Selamat dan Kadar *Diyat* Uang
412. Kebohongan Publik
413. Problem Jenazah dalam Peti
414. Belanja via Sales dan Zakatnya
415. Perayaan Ulang Tahun
416. Pengembangan *'Illat Ta'addud al-Jum'ah*
417. Aturan *Shaf* Jamaah Wanita
418. *Murabahah* ala BMT
419. Pembunuhan Karakter
420. Dampak Perbedaan Idul Adha pada Ibadah Qurban
421. Mencari Untung Melalui Akad Gadai
422. Air Sedikit di Toilet

402. Penjualan Zakat Fithrah

Deskripsi Masalah

Ada sebuah desa yang setiap menjelang Hari Raya Fitri, masyarakat setempat membentuk kepanitiaan yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah, untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak. Lebih lanjut, karena panitia merasa telah membagi rata kepada semua yang berhak dari *Ashnaf* yang ada di desanya, maka kelebihan zakat fitrah yang berupa beras tersebut disimpan untuk dijual setelah Shalat 'Ied, kemudian uang hasil penjualan beras diberikan kepada masjid setempat. Praktek seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun.

Pertanyaan

Bolehkah kebijakan yang dilakukan oleh panitia zakat tersebut? Dan bagaimanakah jika yang melakukan itu adalah *Amil* bentukan pemerintah?

Jawaban

Panitia yang menyimpan zakat fitrah untuk kemudian menjual dan lalu memberikan kepada masjid setempat adalah tidak diperbolehkan (haram). Kecuali apabila harta zakat tersebut diserah-terimakan kepada *mustahiq* terlebih dahulu kemudian dijual panitia atas izin dari *mustahiq*. Bahkan bagi panitia zakat yang melakukan praktek yang diharamkan di atas, wajib mengganti (*dhaman*) terhadap harta zakat yang disalah-gunakan.

Hukum yang demikian itu berlaku bagi panitia bentukan masyarakat (*mutabarri'*) dan bentukan pemerintah (*amil*) menurut *Jumhur Ulama*. Namun menurut Ulama Hanabilah, bagi Amil yang dibentuk pemerintah dibolehkan menjualnya bila ada hajat atau maslahat.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, VI/151 [Maktabah al-Irsyad]:

(فَرْعٌ) قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَلَا لِلسَّاعِي بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، بَلْ يُوَصِّلُهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا، لِأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ. فَإِنْ وَقَعَتْ ضَرُورَةٌ، بِأَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمَاشِيَةِ، أَوْ خَافَ هَلَاكَهُ، أَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ خَطَرٌ، أَوِ احْتَاجَ إِلَى رَدِّ جُبْرَانٍ، أَوْ إِلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ، أَوْ قَبَضَ بَعْضَ شَاةٍ، وَمَا أَشْبَهَهُ، جَازَ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا سَبَقَ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي مَوَاضِعَ لِلضَّرُورَةِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ وَجَبَتْ

نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ بَيْعُهَا وَتَفْرِقَةُ ثَمَنِهَا عَلَى الْأَصْنَافِ بِلَا خِلَافٍ، بَلْ يَجْمَعُهُمْ وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ. وَكَذَا حُكْمُ الْإِمَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

وَخَالَفَهُمُ الْبَغَوِيُّ، فَقَالَ: إِنْ رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ فَعَلَهُ، وَإِنْ رَأَى الْبَيْعَ وَتَفْرِقَةَ الثَّمَنِ فَعَلَهُ. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا بَاعَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَيُسْتَرَدُّ الْمَبِيعُ. فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

(Cabang permasalahan) *Ashab* kami berkata: *"Bagi Imam dan Amil tidak boleh menjual apapun dari harta zakat ketika tidak dalam kondisi darurat, namun ia harus menyampaikannya kepada para mustahiq dengan bentuk seadanya, sebab mereka adalah orang dewasa yang tidak dikuasai, sehingga tidak boleh menjual harta mereka tanpa seizinnya. Apabila dalam kondisi darurat, yaitu bila sebagian binatang berhenti padanya, khawatir mati, di jalan ada bahaya, butuh memberi pengembalian pecahan bagian zakat, biaya pemindahan, menahan sebagian kambing, dan semisalnya, maka boleh menjual zakat karena darurat sebagaimana keterangan yang telah lewat di akhir Bab Zakat Kambing, bahwa boleh menyerahkan harga kambing dalam beberapa kesempatan karena darurat."* *Ashab* kami berkata: *"Andaikan yang wajib dikeluarkan adalah satu onta, sapi, atau kambing, maka pemilik tidak boleh menjualnya dan membagikan hasil penjualannya kepada para mustahiq tanpa khilaf. Namun ia harus mengumpulkan mereka dan menyerahkannya kepadanya. Begitu pula hukum bagi Imam menurut mayoritas ulama."*

Sedangkan al-Baghawi berbeda dengan mereka. Ia berkata: *"Bila Imam memandang tindakan seperti itu diperlukan, maka ia dapat melakukannya; dan bila ia memandang sebaiknya dijual dan dibagikan hasil penjualannya, maka ia boleh melakukannya."* Yang menjadi pendapat madzhab adalah pendapat pertama. Sebagian *Ashab* kami berkata: *"Bila seseorang menjual zakat pada kondisi yang tidak membolehkan penjualan, maka akad jual-belinya batal, dan zakat yang dijual harus ditarik kembali. Bila sudah rusak maka ia harus menanggungnya."* *Wa Allahu a'lam.*

b. *Kasyf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, II/917 [Dar 'Alam al-Kutub]:

(وَلَهُ) أَيِ السَّاعِي (بَيْعُ الزَّكَاةِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا لِحَاجَةٍ كَخَوْفِ تَلَفٍ وَمُؤْنَةٍ وَمَصْلَحَةٍ)، لِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَأْتِي. (وَ) لَهُ (صَرْفُهُ فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ حَتَّى فِي أُجْرَةِ مَسْكَنٍ)، لِأَنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ فِي حَاجَتِهِمْ أَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ. (وَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ) فَقَالَ الْقَاضِي (لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْإِذْنِ)، أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ، (وَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا تَعَذَّرَ) رَدُّهُ. وَقِيلَ يَصِحُّ. قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ

لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ، فَسَأَلَ عَنْهَا الْمُصَدِّقَ، فَقَالَ: إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِإِبِلٍ. فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ. وَمَعْنَى الرَّجْعَةِ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا.

(Dan baginya), maksudnya *Sa'i* (boleh menjual zakat, berupa binatang ternak atau lainnya karena dibutuhkan, seperti khawatir rusak, membutuhkan biaya, dan karena *maslahat*), berdasarkan hadits Qais bin Abi Hazim yang akan nanti disebutkan, (dan) boleh baginya (men*tasharruf*kannya untuk hal yang terbaik untuk orang-orang fakir atau kebutuhannya sampai untuk membayar ongkos tempat tinggal), sebab ia telah menyerahkan zakat untuk kebutuhan mereka yang serupa dengan menyerahkan zakat apa adanya kepada mereka. (Bila ia menjualnya tanpa ada hajat dan *maslahat*), maka al-Qadhi berkata: (*Tidak sah karena tidak ada izin*), maksudnya, karena ia tidak diizinkan untuk menjualnya, (*dan ia menanggung harga nilai yang sulit*) dikembalikan. Ada pendapat yang mengatakan jual-belinya sah, yang disampaikan sebagian ulama karena hadits yang diriwayatkan Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Amwal*, dari Qais bin Abi Hazim: "Sungguh Nabi ﷺ melihat onta zakat besar punuknya, lalu beliau menanyakan *Sa'i*nya, lalu Qais bin Abi Hazm menjawab: *"Sungguh aku akan mengambilnya dengan ganti onta yang lain. Beliau diam dan tidak memperjelasnya."* Makna *"mengambilnya dengan ganti"* adalah menjualnya dan membeli onta lain dengan hasil penjualannya.

c. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 105 [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةٌ) لَا يَسْتَحِقُّ الْمَسْجِدُ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا، إِذْ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَّا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ. وَلَيْسَتِ الزَّكَاةُ كَالْوَصِيَّةِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ مِنْ أَنَّهُ يُعْطِي الْمَسْجِدَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيهِ خِلَافًا لِـ(بج).

(Permasalahan) Masjid tidak berhak menerima apapun dari zakat secara mutlak, sebab tidak boleh men*tasharruf*kannya kecuali kepada orang muslim merdeka. Zakat tidak seperti wasiat dalam kasus andaikan orang berwasiat untuk tetangganya, yaitu ia boleh memberikannya kepada masjid, sebagaimana secara terang-terangan dijelaskan Ibn Hajar dalam *Fatawa*nya, yang bertentangan dengan al-Bujairami.

d. Referensi Lain
   1) *Raudlah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, I/249;
   2) *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, V/335;
   3) *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, IX/233.

403. Memperjelas Keputusan Pemasangan Tower di Menara Masjid

Deskripsi Masalah

PWNU dalam Bahtsul Masail di Sumenep tahun 2009 yang lalu telah memutuskan keputusan *"menyewakan menara masjid untuk memasang tower antena jasa telekomunikasi adalah haram"* dengan alasan (*illat* hukum): (1) Masjid telah terlepas dari pemiliknya, sehingga siapapun termasuk *waqif*nya sendiri tidak berhak melakukan *istighlal* (komersial). (2) Menyewakan masjid adalah menodai kemuliaannya.

Keputusan itu memang ada dampaknya bagi sebagian umat Islam, namun dipihak lain trend komersialisasi masjid melalui penyewaan menara atau bagian bangunan masjid lainnya guna memasang antena tower, tetap saja melaju di berbagai tempat. Pihak kedua ini lebih mempertimbangkan pada keuntungan/manfaat (ongkos sewa), karena hasilnya memang besar sehingga tidak hanya cukup untuk biaya operasional masjid, tetapi juga perbaikan dan renovasi bangunan fisiknya.

Perbedaan antara dua pihak yang berseberangan ini tampak jelas dalam hal yang dijadikan pijakan hukum, di mana pihak pertama berpijak pada prinsip wakaf masjid harus sesuai dengan peruntukannya dan pihak kedua berpijak pada keuntungan ongkos sewa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masjidnya. Oleh sebab itu, agar hukum transaksi ini dapat difahami oleh umat Islam, khususnya pengelola masjid secara benar dan utuh, maka PWNU bersama PCNU se-Jawa Timur dalam momen Bahtsul Masail kali ini, kiranya perlu menyempurnakan dan memperjelas keputusan terdahulu, boleh jadi dalam persoalan ini masih terdapat *tafsil* mengenai hukumnya atau ditemukan pendapat berbeda dari fuqaha, yang selama ini belum terlacak.

Pertanyaan

a. Mungkinkah penyewaan area (lokasi atau bangunan) masjid untuk pemasangan tower jasa telekomunikasi dilakukan *tafsil* mengenai hukumnya, atau masih ada perbedaan pendapat antara para fuqaha mengenai hal itu?
b. Jika prinsip "peruntukan wakaf" dan "ongkos sewa" disepakati sebagai pijakan hukum penyewaan masjid, manakah yang lebih kuat pengaruhnya terhadap hukum persoalan ini?

Jawaban

a. *Tafsil* dalam masalah pemasangan antena tower tersebut adalah: Ketika tanah tersebut berstatus masjid atau dihukumi masjid, seperti

serambi, atau di luar masjid namun pintunya bersambung dengan masjid maka hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan apabila tanah tersebut di luar (tidak berstatus) masjid maka hukumnya boleh apabila tidak ada dugaan untuk digunakan maksiat. Hukum tidak diperbolehkannya pemasangan antena tower pada menara masjid yang berada pada tanah wakaf masjid karena:

1) Manfaat barang wakaf bukan milik perorangan, sehingga siapa pun tidak bisa menyewakan/*mu'awadlah* pada yang lain.
2) Merusak kehormatan masjid, sebab antena/tower sebagai alat yang dapat digunakan apa saja, baik ibadah atau maksiat. (Keputusan ini masih mengacu pada keputusan Bahtsul Masail Syuriyah PWNU Jatim di PP. Al-Usymuni Tarate Sumenep)

b. Dengan mengacu pada jawaban sub a, maka untuk soal sub b dianggap gugur.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Bahr ar-Ra`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq*, V/421 [Dar al-Kutub al-'Ilmiyah]:

(قَوْلُهُ: وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ أَوْ اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ، فَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ)، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلّٰهِ تَعَالَى لِبَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّقًا بِهِ. وَالسِّرْدَابُ بَيْتٌ يُتَّخَذُ تَحْتَ الْأَرْضِ لِغَرَضِ تَبْرِيدِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ. كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّرْدَابُ الْمَكَانُ الضَّيِّقُ يُدْخَلُ فِيهِ وَالْجَمْعُ سَرَادِيبُ. اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا أَنْ يَكُونَ سُفْلُهُ وَعُلْوُهُ مَسْجِدًا لِيَنْقَطِعَ حَقُّ الْعَبْدِ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ [الجن: ١٨]، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ السِّرْدَابُ أَوْ الْعُلْوُ مَوْقُوفًا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذْ لَا مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ، بَلْ هُوَ مِنْ تَتْمِيمِ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، فَهُوَ كَسِرْدَابِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَهُنَاكَ رِوَايَاتٌ ضَعِيفَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْهِدَايَةِ. وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَنَى بَيْتًا عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ لِسُكْنَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي كَوْنِهِ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَصَالِحِ. فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ جَعَلَ مَسْجِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ: إِذَا بَنَى مَسْجِدًا وَبَنَى غُرْفَةً وَهُوَ فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حِينَ بَنَاهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْنِي لَا يَتْرُكُهُ. وَفِي جَامِعِ الْفَتْوَى إِذَا قَالَ عَنَيْتُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ. اهـ فَإِذَا كَانَ

هَذَا فِي الْوَاقِفِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ؟ فَمَنْ بَنَى بَيْتًا عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَجَبَ هَدْمُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ مُسْتَغَلًّا وَلَا مَسْكَنًا.

(Ungkapan Abdullah bin Ahmad an-Nasafi: *"Orang yang membuat masjid yang di bawahnya terdapat sirdab atau di atasnya terdapat rumah, membuat pintunya ke arah jalan, dan mencabutnya dari kepemilikannya, atau membuat masjid di tengah-tengah rumahnya dan mengizinkan orang lain untuk memasukinya, maka ia boleh menjualnya dan dapat diwaris darinya."*) Karena masjid tersebut tidak murni untuk Allah Ta'ala, sebab masih adanya hak manusia yang terkait dengannya. سِرْدَابٌ adalah ruangan yang dibuat di bawah tanah untuk mendinginkan air atau selainnya. Demikian dalam *Fath al-Qadir*. Dalam *al-Mishbah* disebutkan: "سِرْدَاب *adalah tempat sempit yang dapat dimasuki. Jama'nya* سَرَادِيبُ." Demikian dalam *al-Mishbah*.

Kesimpulannya, syaratnya menjadi masjid adalah atas dan bawahnya juga masjid agar hak manusia terputus darinya, karena firman Allah: *"Dan sungguh masjid-masjid itu milik Allah."* [al-Jin: 18]. Lain halnya bila *sirdab*, atau bagian atas diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, maka boleh, karena tidak ada kepemilikan bagi seorang pun, bahkan hal itu termasuk menyempurnakan kemaslahatan masjid, yaitu seperti *sirdab* masjid Baitul Maqdis. Inilah yang menjadi madzhab yang kuat. Selain itu ada beberapa riwayat lemah yang disebutkan dalam *al-Hidayah*. Dari penjelasan yang telah saya sebutkan diketahui, bahwa andaikan seseorang membangun kamar di atas loteng masjid untuk tempat tinggal Imam maka tidak mempengaruhi keberadaannya sebagai masjid, karena termasuk bagian dari kemaslahatannya. Bila anda bertanya: *"Andaikan seseorang membuat masjid, kemudian ingin membangun rumah di atasnya untuk Imam atau selainnya, apakah hal itu boleh?"* Saya jawab: "'Alim bin 'Ala' dalam *at-Tatarkhaniyah* berkata: *"Bila seseorang membangun masjid dan membangun kamar, dan masjid itu dalam kekuasaannya, maka boleh; dan bila saat membangun masjid ia membebaskan orang lain menggunakannya, kemudian setelah itu ia (baru) membangun (kamar) tanpa meninggalkannya"*, dan dalam *Jami' al-Fatwa* disebutkan: "Bila ia berkata: *"Aku memaksudkannya demikian, maka ia tidak dibenarkan."* Demikian kata 'Alim bin 'Ala' dalam *at-Tatarkhaniyah*. Bila larangan ini berlaku bagi pewakaf, bagaimana bagi lainnya? Sebab itu, orang yang membangun rumah di atas tembok masjid maka wajib dirobohkan, dan tidak boleh mengambil ongkos. Dalam *al-Bazzaziyah* disebutkan: *"Bagi pengelola tidak boleh menjadikan sesuatu dari masjid menjadi barang yang dikomersilkan dan tempat tinggal."*

b. *Al-Majmu'*, VI/534 [Maktabah al-Irsyad]:

وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ: لِلْمَنَارَةِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: (إِحْدَاهَا) أَنْ تَكُونَ مَبْنِيَّةً دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، فَيُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ فِيهَا، لِأَنَّهُ طَاعَةٌ. (الثَّانِيَةُ) أَنْ تَكُونَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَّهَا فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ، فَالْحُكْمُ فِيهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَلَوْ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ. (الثَّالِثَةُ) أَنْ تَكُونَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَيْسَتْ فِي رَحْبَتِهِ إِلَّا أَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَلَهَا بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِيهَا، لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْمَسْجِدِ وَمِنْ جُمْلَتِهِ. (وَالرَّابِعَةُ) أَنْ تَكُونَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَّصِلَةٍ بِهِ، فَفِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ. هَذَا كَلَامُ الْمَحَامِلِيِّ بِحُرُوفِهِ. وَفِيهِ فَوَائِدُ. وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ أَبِي حَامِدٍ فِي التَّعْلِيقِ نَحْوُ هَذَا، وَكَلَامُ غَيْرِهِمَا نَحْوُهُ. وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِخِلَافِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْمَنَارَةِ الْمُتَّصِلِ بَابُهَا بِالْمَسْجِدِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ قَرِيبًا، وَوَعَدْنَا بِذِكْرِ التَّصْرِيحِ بِنَقْلِ خِلَافِهِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Dalam *al-Majmu'* al-Mahamili berkata: "*Menara mempunyai empat kondisi. Pertama, dibangun di dalam masjid, maka sunnah azan di dalamnya, karena merupakan ketaatan. Kedua, dibagun di luar masjid namun masih di dalam serambinya, maka hukumnya sama seperti andaikan berada di dalam masjid, sebab serambi termasuk bagian masjid. Andaikan orang i'tikaf di dalamnya, maka sah i'tikafnya. Ketiga, dibangun di luar masjid, tidak di serambinya, namun bersambung dengan bangunan masjid dan mempunyai pintu ke arah masjid, maka orang i'tikaf boleh azan di dalamnya, karena bersambung dengan masjid dan termasuk bagiannya. Keempat, dibangun di luar masjid dan tidak bersambung dengannya, maka terdapat khilaf yang telah lewat.*" Inilah perkataan al-Mahamili huruf per-huruf. Di dalamnya banyak faidah. Redaksi gurunya Abu Hamid dalam *at-Ta'liq* seperti itu, dan perkataan selain mereka berdua juga seperti itu. Di situ terdapat pernyataan yang secara terang-terangan bertentangan dengan dalil yang digunakan Imam al-Haramain tentang menara yang pintunya bersambung dengan masjid sebagaimana saya kemukakan barusan darinya, dan saya janjikan untuk menukilkan pendapat yang bertentangan dengannya secara terang-terangan. *Wa Allahu ta'ala a'lam.*

c. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah,* V/224 [Dzat as-Salasil]:

٤٢- اِتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الْاِعْتِكَافُ، مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا لِلصَّلَاةِ فِيهِ. أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ

لِتَوْسِعَتِهِ، وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا. فَالَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ. وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ. وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابُهَا فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

42- Ulama sepakat bahwa maksud masjid yang sah digunakan *i'tikaf* adalah bangunan yang disiapkan untuk solat di dalamnya. Adapun serambi masjid, adalah halaman yang ditambahkan di dekat masjid untuk perluasannya, dan dikhususkan untuknya. Yang dipahami dari pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, dalam pendapat shahih madzhabnya menyatakan bahwa serambi tidak termasuk bagian dari masjid; sedangkan *muqabil ash-shahih*nya menyatakan termasuk bagian dari masjid. Abu Ya'la mengkompromikan antara dua riwayat dengan menyatakan bahwa serambi yang dipagari dan mempunyai pintu merupakan masjid. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa serambi masjid termasuk bagian dari masjid. Andaikan orang *i'tikaf* di dalamnya maka sah *i'tikaf*nya. Adapun loteng masjid, Ibn Qudamah mengatakan: "*Orang yang i'tikaf boleh naik ke loteng masjid dan saya tidak mengetahui khilaf tentangnya.*" Adapun menara, jika di dalam masjid atau pintunya di dalam masjid, maka termasuk bagian dari masjid menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

d. *Nihayah al-Muhtaj,* III/232 [Dar al-Kutub al-'Ilmiyah]:

أَمَّا مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَلَا يَضُرُّ صُعُودُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْأَذَانِ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ كَمَا رَجَّحَاهُ وَتَرْبِيعِهِ، إِذْ هِيَ فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ كَمَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ فِيهِ مَالَتْ إِلَى الشَّارِعِ، فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ. وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَوِ اتُّخِذَ لِلْمَسْجِدِ جَنَاحٌ إِلَى الشَّارِعِ فَاعْتَكَفَ فِيهِ صَحَّ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ صَحِيحٌ.

Adapun menara masjid yang pintunya berada di dalamnya atau di serambinya, maka menaikinya tidak membatalkan *i'tikaf*, meskipun tidak untuk adzan, dan meskipun keluar dari sejajar bangunan masjid dan

persegi empatnya sebagaimana di*rajih*kan oleh an-Nawawi dan ar-Rafi'i, sebab diberlakukan hukum masjid baginya. Seperti menara yang dibangun di dalam masjid dan condong ke jalan, maka sah *i'tikaf* di dalamnya, meskipun orang yang *i'tikaf* berada di atas jalan. Simpulan az-Zarkasyi dari hal tersebut, yakni andaikan untuk masjid dibuat bangunan yang condong ke jalan, maka sah *i'tikaf* di dalamnya karena merupakan bangunan yang mengikuti masjid, itu benar.

e. Referensi lain:
   1) *Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, XIII/202;
   2) *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*, V/420;
   3) *Al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Kharaqiy*, VI/228.

404. Utang Bagi Hasil dan Zakatnya

Deskripsi Masalah

Jika ada orang menghutangi orang lain dengan aqad seperti ini: *"Kamu saya pinjami uang sepuluh juta agar kamu jadikan modal berniaga, dengan ketentuan hasil laba yang di peroleh setiap harinya, yang 60 % kita bagi dua dan yang 40 % digunakan untuk belanja"*. Setelah satu tahun dikalkulasi, hasilnya melebihi satu *nishab*.

Pertanyaan

a. Bagaimanakah hukum teransaksi seperti di atas?
b. Jika harta niaga mencapai *nishab*, siapakah yang wajib mengeluarkan zakatnya?

Jawaban

a. Jika transaksi tersebut dimaksudkan oleh pemberi modal sebagai akad *qardh* (hutang-piutang), maka pemberian orang yang dihutangi terhadap orang yang menghutangi tergolong *qardh jarra naf'an* yang menyebabkan transaksi tersebut diharamkan dan batal. Apabila uang yang diberikan *malik* kepada amil tersebut dimaksudkan sebagai modal dan labanya dibagi antara *malik* dan amil, maka transaksi itu termasuk *qiradh*, dan termasuk *qiradh* yang *fasid* karena menentukan laba (laba dibagi) setiap hari.
b. Jika transaksi tersebut *qardh* yang *fasid* (*jarra naf'an*) maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah *rabb al-mal/malik*/pemilik harta, dan amil berhak mendapat *ujrah mitsli*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fath al-Wahab*, I/192 [Toha Putera]:

(وَفَسَدَ) أَيْ الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ،

كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ (وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي (وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﷺ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ. فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ، فَمَنَعَ صِحَّتَهُ. وَجَعْلِي شَرْطَ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَسَادِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنِ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ. (فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً (بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ)، لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ. (أَوْ شَرَطَ) أَنْ يَرُدَّ (أَنْقَصَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً، كَرَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ، (أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلًا بِلَا غَرَضٍ) صَحِيحٍ، أَوْ بِهِ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ (لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ) أَيْ لَا الْعَقْدُ، لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ، أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إِرْفَاقٍ، فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا. وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي. وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ، لِأَنَّهُ سُنَّةٌ بِخِلَافِ الرَّهْنِ. وَتَعْبِيرِي بِأَنْقَصَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ.

(*Dan rusak*), maksudnya akad *iqradh*–menghutangi–(sebab syarat yang menarik keuntungan bagi *muqridh*–pihak yang menghutangi–, seperti mengembalikan dengan tambahan), terkait kadar atau sifatnya, seperti mengembalikan barang utuh dari hutang barang yang pecah, (dan seperti tempo karena suatu tujuan) yang benar (seperti masa perampokan), dengan batasan yang saya tambahkan karena mengikuti *asy-Syarh al-Kabir*, *asy-Syarh ash-Shaghir*, dan *ar-Raudhah*, dengan ucapanku: (*"Sedangkan muqtaridh–orang yang menghutang–mampu melunasinya"*), karena ucapan Fadhalah ﷺ: *"Setiap hutangan yang menarik keuntungan satu pihak maka merupakan riba."* Makna yang ada dalam ucapan ini adalah prinsip menghutangi adalah memberikan bantuan. Sebab itu, bila *muqridh* mensyaratkan keuntungan untuk dirinya, maka keluar dari prinsipnya, maka mencegah keabsahannya. Tindakanku menjadikan syarat yang menarik keuntungan bagi *muqridh* sebagai penentu rusaknya akad dan menjadikan redaksi setelahnya sebagai contoh-contohnya lebih utama daripada an-Nawawi yang mencukupkan diri pada berbagai contoh. (Bila *muqtaridh* mengembalikan hutangan dengan barang yang lebih) dari sisi ukuran atau sifatnya (tanpa pensyaratan, maka bagus), karena hadits

Muslim yang telah lewat: *"Sungguh sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya."*, dan bagi *muqtaridh* tidak makruh menerimanya. (atau bila *muqtaridh* mensyaratkan) akan mengembalikan (barang yang kurang), dari sisi ukuran dan sifatnya, seperti mengembalikan barang pecah dari pinjaman yang utuh, (atau agar *muqridh* menghutangi *muqtaridh* dengan hutang selainnya, atau mensyaratkan tempo tanpa tujuan) yang benar, atau dengan tujuan benar namun *muqtaridh* belum mampu melunasinya, (maka syaratnya saja yang tidak sah), maksudnya bukan akadnya, sebab keuntungan yang ada bukan untuk *muqridh*, namun untuk *muqtaridh*, atau untuk keduanya sedangkan *muqtaridh* dalam kondisi bangkrut, dan akadnya adalah akad *irfaq*–memberi bantuan–, seolah-olah *muqridh* menambahkan bantuan dan menjanjikannya dengan janji yang baik. Hal itu *musykil* dengan kasus sepadannya yang merusak akad *rahn* seperti yang akan dijelaskan. Namun ke*musykil*an itu dijawab dengan kuatnya faktor menganjurkan hutang, sebab hukumnya sunnah berbeda dengan *rahn*. Ungkapanku: *"Dengan barang yang kurang"*, lebih umum daripada ungkapan an-Nawawi: *"Mengembalikan barang pecah dari pinjaman barang utuh."*

b. *Bugyhah al-Mustarsyidin*, 160 [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةُ ي) شُرُوْطُ الْقِرَاضِ اثْنَا عَشَرَ: كَوْنُ الْعَاقِدَيْنِ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ، وَالْعَامِلُ بَصِيْرٌ وَالْمُقَارِضُ لَهُ عَلَى الْمَالِ وِلَايَةٌ، وَكَوْنُهُ بِإِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ، كَقَارَضْتُكَ عَلَى كَذَا وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا بِنِصْفَيْنِ مَثَلًا، فَيَقُوْلُ: قَبِلْتُ، أَوْ خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِعْ وَاشْتَرِ فِيْهَا وَلَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ مَثَلًا. وَكَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ نَقْدًا مَضْرُوْبًا، وَلَوْ مَغْشُوْشًا رَائِجًا لَا عَرَضًا، وَمَعْلُوْمَ الْقَدْرِ، وَفِيْ يَدِ الْعَامِلِ لَا فِيْ يَدِ غَيْرِهِ. وَلَا أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا بِرَأْيٍ. وَكَوْنُ الْعَمَلِ تِجَارَةً لَا حِرْفَةً، كَاشْتَرِ حِنْطَةً وَاخْبِزْهَا وَبِعْهَا. وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا بِالْجُزْئِيَّةِ، لَا لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ وَلَا لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا كَخَمْسَةٍ فِي الْمِائَةِ لِلْعَامِلِ. وَأَنْ لَا يُضَيِّقَ التِّجَارَةَ عَلَى الْعَامِلِ، كَلَا تَبِعْ إِلَّا لِزَيْدٍ، أَوْ لَا تَأْخُذْ إِلَّا يَاقُوْتًا أَحْمَرَ. وَأَنْ لَا يُؤَقِّتَ الْقِرَاضَ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ، وَلَا التَّصَرُّفَ كَقَارَضْتُكَ، وَلَا تَتَصَرَّفْ إِلَّا بَعْدَ شَهْرٍ. وَأَنْ يُعَيِّنَ رَأْسَ الْمَالِ لَا عَلَى إِحْدَى الصُّرَّتَيْنِ وَلَا عَلَى دَيْنٍ كَالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ. نَعَمْ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفٍ نَقْدًا بِذِمَّةِ الْعَامِلِ، ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهَا الْمَالِكُ، ثُمَّ أَقْبَضَهَا لِلْعَامِلِ، صَحَّ بِهَذِهِ الْقُيُوْدِ. وَطَرِيْقُ تَصْحِيْحِ الْقِرَاضِ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ، وَنَحْوِ الْبُرِّ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ الْمَالِكُ: وَكِّلْ عَنِّيْ مَنْ يَقْبِضُ مِنْكَ أَوْ مِنْ زَيْدٍ الْمِائَةَ وَيُقَارِضُكَ

عَلَيْهَا وَيُسَلِّمُهَا لَكَ، أَوْ بِعْ لِي هَذَا الْبَزَّ وَوَكِّلْ عَنِّي مَنْ يُقَارِضُكَ عَلَى ثَمَنِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ نَقْدًا. وَإِذَا تَمَّ الْقِرَاضُ وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ حِفْظُ الْمَالِ. وَأَنْ لَا يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ، وَلَا يَبِيعَ نَسِيئَةً، وَلَا يُسَافِرَ بِهِ بِلَا إِذْنٍ فِيهِمَا، وَلَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ الرِّبْحُ. وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ. وَلَيْسَ عَلَى الْمَالِكِ إِلَّا أُجْرَةُ حَمْلِ الْبِضَاعَةِ الثَّقِيلَةِ. وَالْكَيْلُ وَالْوَزْنُ إِنْ لَمْ يُبَاشِرْهَا الْعَامِلُ بِنَفْسِهِ وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِإِذْنٍ، وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَالِكِ وَلَا الرِّبْحِ، بَلْ لَوْ شُرِطَتْ مِنْهُ فَسَدَ، إِلَّا إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ فِي مُعَيَّنٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ.

(Permasalahan dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya) Syarat-syarat *qiradh* ada 12: 1) Kedua belah pihak yang bertransaksi merupakan orang yang boleh ber*tasharruf*. 2) *'Amil* orang yang melihat dan *muqaridh* lah mempunyai kuasa atas harta. 3) Dilakukan dengan ijab qabul, seperti: *"Aku akad qiradh denganmu pada harta ini, dan labanya untuk kita berdua masing-masing 50 % [umpamanya]"*, kemudian *'amil* menjawab: *"Aku terima"*, atau: *"Ambillah dirham ini, belilah sesuatu dengannya, dan kamu berhak mendapatkan sepertiga dari labanya [umpamanya]"*. 4) Modal berupa *nuqud* yang dicetak, meskipun campuran; yang masih laku; bukan berupa barang; kadarnya diketahui; berada di tangan *'amil*, bukan lainnya. 5) *'Amil* tidak melakukan pembelian kecuali sudah mempertimbangkannya. 6) Usahanya berbentuk *tijarah*, bukan suatu keahlian, seperti: *"Belilah gandum, buatlah roti, dan juallah barang."* 7) Laba menjadi hak kedua belah pihak dengan hitungan prosentase, tidak untuk salah satunya saja, dan orang selain mereka tidak mempunyai hak berapa pun darinya, tidak seperti lima untuk setiap 100 menjadi hak *'amil*. 8) Pemilik modal tidak membatasi *tijarah* yang dilakukan *'amil*, seperti: *"Jangan menjual kecuali kepada Zaid"*, atau: *"Jangan membeli kecuali yaqut merah"*. 9) *Qiradh* tidak dibatasi dengan waktu, seperti setahun; tidak dibatasi *tasharruf*nya, seperti: *"Aku akad qiradh denganmu, dan jangan bertasharruf kecuali setelah lewat satu bulan."* 10) Modalnya sudah ditentukan, tidak pada salah satu dari uang yang ada di dua kantong, dan tidak pada hutang, seperti harga penjualan sebelum diterima. Memang demikian, namun andaikan pemilik modal mengakadi *qiradh 'amil* dengan harta 1000 *nuqud* yang menjadi tanggungan *'amil*, kemudian di majelis itu *'amil* menentukan harta yang dimaksud dan pemilik modal menerimanya, lalu menyerahkannya kepada *'amil* lagi, maka akadnya sah dengan batas-batas tersebut. Cara pengabsahan *qiradh* pada harta yang tidak ada di majelis akad, dan semacam kain, adalah pemiliknya berkata kepada *'amil*: *"Orang yang*

menerima harta 100 darimu atau dari zaid menjadi wakilku, ia akan mengakadi qiradh kamu pada harta itu, dan akan memasrahkannya kepadamu", atau: *"Juallah untukku kain ini, dan orang yang mengakadi qiradh kamu pada hasil penjualannya setelah diterima berupa nuqud menjadi wakilku."* Ketika akad *qiradh* telah sempurna, maka *'amil* wajib menjaga harta tersebut. 11) *'Amil* tidak melakukan transaksi jual beli pada dirinya atau *muwakkil*nya, tidak menjual dengan pembayaran bertempo, tidak membawa harta *qiradh* bepergian tanpa seizin pemilik modal, dan tidak membeli kecuali barang yang diharapkan dapat mendatangkan laba. 12) *'Amil* tidak melakukan pembelanjaan untuk dirinya, maksudnya kecuali seizin pemilik modal, sebagaimana dalam *at-Tuhfah*. Pemilik modal tidak berkewajiban menanggung biaya kecuali upah pengangkutan barang yang berat. Penakaran dan penimbangan bila *'amil* tidak melakukannya sendiri, ia juga boleh mewakilkannya kepada orang lain atas seizin pemilik modal, namun upahnya dibebankan kepadanya, bukan kepada pemilik maupun pada laba. Bahkan, andaikan disyaratkan diambil dari laba maka akad *qiradh*nya rusak, kecuali perwakilan pada orang tertentu yang dibayar dengan upah telah diketahui.

c. *Asna al-Mathalib Syarh Raudl ath-Thalib*, II/384-385 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(فَصْلٌ: وَإِنْ تَصَرَّفَ) الْعَامِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ (وَالْقِرَاضُ فَاسِدٌ صَحَّ) لِصِحَّتِهِ فِي الْقِرَاضِ الصَّحِيحِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ، وَلَيْسَ كَمَا لَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمِلْكِ، وَلَا مِلْكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، (بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ) لِلْعَامِلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ، لِأَنَّهُ عَمِلَ طَمَعًا فِي الْمُسَمَّى. فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ. كَمَا لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ، (إِلَّا إِنْ شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ) الْعَامِلُ (أُجْرَةً) لِعَدَمِ طَمَعِهِ فِي شَيْءٍ. وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّعْلِيلِ وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا أَيْضًا فِيمَا مَرَّ إِذَا عَلِمَ الْفَسَادَ. (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) لَهُ (قَارَضْتُكَ) بَلْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا مَثَلًا (وَقَالَ: اشْتَرِ) بِهَا (كَذَا وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ) الْقِرَاضُ، لِتَعَرُّضِهِ لِلشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ، تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلشِّرَاءِ لَا يُغْنِي عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْبَيْعِ. (وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ) لِلْإِذْنِ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ (وَالرِّبْحُ فِيمَا اشْتَرَاهُ لِلْمَالِكِ) لِأَنَّهُ فَائِدَةُ مَالِهِ. وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ بَعْضَهُ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ

الصَّحِيحِ. فَقَوْلُهُ وَلَكَ بِنِصْفِ الرِّبْحِ مُسَاوٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِقَوْلِ أَصْلِهِ بِالنِّصْفِ.

(Pasal: Bila ber*tasharruf*), maksudnya *'amil* dalam harta *qiradh* (sedangkan akadnya rusak, maka sah), karena keabsahan *tasharruf* dalam *qiradh* yang sah berdasarkan adanya izin, sebagaimana dalam *wakalah* yang rusak. Tidak seperti kasus bila akan jual-beli rusak, maka *tasharruf* pembeli tidak sah, karena ia hanya boleh ber*tasharuf* sebab mempunyai hak milik, dan tidak ada hak milik dalam akad jual-beli yang rusak. (Dengan bayaran upah standar) bagi *'amil*, meskipun tidak menghasilkan laba, sebab ia bekerja dengan mengharap upah yang telah disebutkan dalam akad, sehingga jika tidak didapatkannya, maka wajib mengembalikan pekerjaan yang sudah dilakukannya. Namun karena hal itu tidak mungkin dilakukan, maka yang wajib dikembalikan adalah harganya. Sebagaimana andaikan orang membeli sesuatu dengan akad pembelian yang rusak dan ia telah menerima barang yang dibelinya, lalu barang itu rusak, maka ia wajib mengembalikan harganya. (Kecuali bila ia mensyaratkan semua laba untuk pemilik modal, maka ia tidak berhak), maksudnya *'amil*, (memperoleh upah), karena ia tidak mengharap upah apapun. Dari alasan itu, dan alasan yang akan disampaikan dalam bab *al-Musaqah*, disimpulkan bahwa dalam kasus yang telah lewat *'amil* juga tidak berhak menerima upah bila mengetahui kerusakan akadnya. (Andaikan pemilik modal tidak berkata) kepadanya: (*"Aku akad qiradh padamu"*), namun ia menyerahkan kepadanya harta 1000, umpamanya, (dan ia berkata: *"Belilah) dengannya (barang tertentu, dan kamu berhak mendapatkan separo labanya"*, dan dia tidak menyebutkan penjualan, maka tidak sah) akad *qiradh*nya, sebab menyebutkan pembelian tanpa menyebutkan penjualan, karena mengembangkan dari pendapat *ashah* yang menyatakan, bahwa penyebutan pembelian tidak mencukupi dari penyebutan penjualan, (dan pembelian yang dilakukannya sah), karena terdapat izin baginya, berbeda dengan akad jual beli, (dan laba darinya untuk pemilik modal), sebab merupakan laba dari hartanya. *'Amil* mempunyai hak sebagian darinya hanya dengan pensyaratan dalam akad yang sah. Ungkapan Isma'il bin al-Muqri: *"Dan kamu berhak mendapat separo dari labanya"* dari sisi makna sama dengan ungkapan kitab asalnya: *"Dengan separonya."*

d. *Al-Hawi al-Kubra*, IV/302 [Dar al-Kutub al-'Ilmiyah]:

بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْقِرَاضِ. مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ، فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا وَهِيَ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ، فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تُزَكَّى كُلُّهَا، لِأَنَّهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ أَبَدًا حَتَّى يُسَلَّمَ إِلَيْهِ رَأْسُ

مَالِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَامِلُ نَصْرَانِيًّا. فَإِذَا سَلِمَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ. وَهَذَا أَشْبَهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي الْأَلْفِ وَالْخَمْسِمِائَةِ، وَوُقِفَتْ زَكَاةُ خَمْسِمِائَةٍ. فَإِنْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ صَارَتْ لِلْعَامِلِ زَكَّاهَا، إِنْ كَانَ مُسْلِمًا. فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ رِبْحُهُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ زَكَّاهَا لِأَنَّهُ خَلِيطٌ بِهَا. وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ نَصْرَانِيًّا وَالْعَامِلُ مُسْلِمًا فَلَا رِبْحَ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يُسَلِّمَ إِلَى النَّصْرَانِيِّ رَأْسَ مَالِهِ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ بِرِبْحِهِ حَوْلًا. وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُحْصِي ذَلِكَ كُلَّهُ. فَإِنْ سَلَّمَ لَهُ رِبْحَهُ أَدَّى زَكَاتَهُ كَمَا يُؤَدِّي مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنِينَ مُنْذُ كَانَ لَهُ فِي الْمَالِ فَضْلٌ. قَالَ الْمُزَنِيُّ: أَوْلَى بِقَوْلِهِ عِنْدِي أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعَامِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ الْمَالِ، لِأَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ فِي الْقِرَاضِ. لِأَنَّهُ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لَهُ شِرْكَةٌ فِي الْمَالِ ثُمَّ نَقَصَ قَدْرُ الرِّبْحِ كَانَ لَهُ فِي الْبَاقِي شِرْكُهُ. فَلَا رِبْحَ لَهُ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ رَأْسِ الْمَالِ.

Bab Zakat Harta *Qiradh*; Permasalahan: asy-Syafi'i–*rahimahullahu Ta'ala*–berkata: *"Bila seseorang menyerahkan 1000 dirham sebagai harta qiradh dengan pembagian laba separo, kemudian 'amil membeli barang dengannya, dan kemudian barang itu telah mencapai haul dengan harga 2000, maka dalam hal ini ada dua pendapat; pertama, semuanya dizakati, karena selamanya merupakan milik pemodal sampai modal diserahkan kepadanya. Begitu pula andaikan 'amil berupa orang Nasrani, andaikan ia menyerahkan modal kepada pemodal dan saling berbagi laba. Inilah yang lebih benar. Wa Allahu a'lam. Pendapat kedua, zakatnya yang 1500 menjadi tanggung jawab pemodal, sedangkan yang 500 ditunda zakatnya. Bila harta 500 itu telah mencapai haul dari hari mulai dimiliki 'amil, maka ia menzakatinya, jika ia muslim. Lalu bila keuntungannya hanya mencapai 100 dirham, maka ia tetap harus menzakatinya, karena keuntungannya bercampur dengan harta yang wajib dizakati. Andaikan pemodalnya orang Nasrani, sedangkan 'amilnya Muslim, maka tidak ada laba baginya sampai ia menyerahkan modal kepada pemodalnya yang Nasrani menurut pendapat pertama. Kemudian ia mulai menghitung hasil labanya. Sementara pendapat kedua menyatakan, bahwa ia menghitung semuanya. Sehingga bila labanya dipasrahkan kepadanya, maka ia menzakati tahun-tahun yang telah berlalu sejak ia mempunyai bagian dari harta qiradh."* Al-Muzani berkata: *"Yang utama menurut pendapatku adalah 'amil tidak mempunyai kewajiban zakat sampai ia menghasilkan modal, sebab subtansi hal ini ada dalam qiradh."* Sebab asy-Syafi'i berkata: *"Bila orang mempunyai hak syirkah dalam suatu harta, kemudian kadar labanya berkurang, maka ia tetap mempunyai bagian dalam sisanya. Maka tidak ada laba baginya kecuali*

setelah menyerahkan modal."

e. *Al-Umm li asy-Syafi'i,* II/127 [Dar al-Wafa']:

بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْقِرَاضِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قِرَاضًا، فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً تَسْوَى أَلْفَيْنِ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَا، فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ السِّلْعَةَ تُزَكَّى كُلُّهَا، لِأَنَّهَا مِنْ مِلْكِ مَالِكِهَا لَا شَيْءَ فِيهَا لِلْمُقَارِضِ، حَتَّى يُسَلِّمَ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى رَبِّ الْمَالِ، وَيُقَاسِمَهُ الرِّبْحَ عَلَى مَا تَشَارَطَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ، أَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَمْ يَقْتَسِمَا الْمَالَ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ. قَالَ: وَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، وَسَلَّمَ إِلَى رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، وَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ، ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ، فَفِي رَأْسِ مَالِ رَبِّ الْمَالِ وَرِبْحِهِ الزَّكَاةُ، وَلَا زَكَاةَ فِي حِصَّةِ الْمُقَارِضِ، لِأَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ رَأْسَ مَالِ رَبِّ الْمَالِ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَقْتَسِمَا الرِّبْحَ، حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ صُدِّقَ رَأْسُ مَالِ رَبِّ الْمَالِ وَحِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلَمْ يُصَدَّقْ مَالُ الْمُقَارِضِ، وَإِنْ كَانَ شَرِيكًا بِهِ، لِأَنَّ مِلْكَهُ حَادِثٌ فِيهِ، وَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوِ اسْتَأْخَرَ الْمَالُ سِنِينَ لَا يُبَاعُ زُكِّيَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَبَدًا، حَتَّى يُسَلِّمَ إِلَى رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. فَأَمَّا مَا لَمْ يُسَلِّمْ إِلَى رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فِي هَذَا الْقَوْلِ لَا يَخْتَلِفُ.

Bab Zakat Harta *Qiradh.* Asy-Syafi'i–*rahimahullahu ta'ala*–berkata: *"Bila orang menyerahkan harta 1000 dirham kepada orang lain, kemudian ia membeli barang dengannya dan kemudian bernilai 2000 dirham dan telah mencapai haul sebelum menjualnya lagi, maka dalam hal ini ada dua pendapat; pertama, barang itu dizakati semua, karena termasuk milik pemodal dan tidak ada bagian sedikitpun bagi muqarid, sampai ia menyerahkan modal kepada pemodal dan saling berbagi laba sesuai perjanjian."* Asy-Syafi'i berkata: *"Begitu pula bila ia telah menjualnya setelah mencapai haul atau sebelum haul, kemudian mereka belum berbagi laba sampai mencapai haul."* Asy-Syafi'i berkata: *"Bila ia telah menjualnya sebelum mencapai haul dan menyerahkan modal kepada pemodal dan telah berbagi hasil, kemudian mencapai haul, maka dalam modal dan labanya ada kewajiban zakat, dan tidak ada zakat dalam bagian muqaridh, karena ia memperoleh harta yang belum mencapai haul."* Asy-Syafi'i: *"Begitu pula bila ia telah menyerahkan modal kepada pemodal dan belum berbagi laba sampai mencapai haul, maka modal dan laba bagiannya dizakati, dan harta muqaridh tidak dizakati, meskipun ia merupakan syarik*

pemodal dengan harta tersebut, sebab kepemilikannya baru terjadi dan belum mencapai haul dari hari kepemilikannya." Asy-Syafi'i berkata: "*Andaikan barang belum terjual selama beberapa tahun, maka selamanya pemilik modal wajib menzakatinya setiap tahun sampai muqaridh menyerahkan modal kepadanya. Kemudian selama modal belum diserahkan ke pemodal, maka berdasarkan pendapat ini harta itu termasuk harta milik pemodal tanpa diperselisihkan.*"

f. Referensi lain:
   1) *I'anah ath-Thalibin* pada *Fath al-Mu'in*, III/84.

405. Pinjaman Bersyarat

Deskripsi Masalah

Petani tambak ikan terbiasa pinjam sejumlah uang untuk mengolah tanah, membeli bibit ikan, perawatan ikan dengan pakan ternak, pengendalian mutu baku air, dan lain sebagainya. Kreditur lazim menyertakan syarat berupa "hak membeli hasil tambak" saat panen dengan harga yang dipatok saat penerimaan uang pinjaman, seperti halnya juga kasus kemitraan antara perusahaan dengan petani.

Pertanyaan

a. Apakah orientasi akad menerimakan sejumlah uang kepada petani tambak ikan atas nama kemitraan menjurus pada *"dayn/qardh bi syarthin, syirkah atau mudharabah"*?
b. Sahkah hukum peminjaman sejumlah uang yang diwarnai syarat mengikat itu menurut hukum Islam?
c. Bagaimana praktek kompensasi "membeli hasil panen tambak" dengan harga yang dipatok secara sepihak oleh orang yang meminjamkan uang atau ditentukan sepihak saat panen?

Jawaban

a. Karena harga tersebut telah dipatok pada saat penerimaan pinjaman maka akad menerimakan sejumlah uang kepada petani tambak ikan atas nama kemitraan di atas dimasukkan pada akad *qardh* yang *jarra naf'an*.
b. Tidak sah karena tergolong *jarra naf'an* yang dihukumi haram jika syarat tersebut terdapat dalam akad (*fi shulbi al-aqdi*).
c. Praktek yang semacam itu tidak diperbolehkan karena terdapat syarat *jarra naf'an fi shulbi al-aqdi*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Is'ad ar-Rafiq*, 144 [Maktabah Dar Ihya']:

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَيْضًا (أَنْ يُقْرِضَ الْحَائِكَ أَوْ غَيْرَهُ) نَحْوَ (الْأُجَرَاءِ) وَالْعُمَّالِ (أَوْ

يَسْتَخْدِمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ) لِذَلِكَ الْعَمَلِ (لِأَجْلِ ذَلِكَ الْقَرْضِ) الَّذِي أَقْرَضَهُ إِيَّاهُ (وَيُسَمُّوْنَ ذَلِكَ الرَّابِطَةَ)، لِأَنَّهُ يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ. (وَ) كَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ (أَنْ يُقْرِضَ) نَحْوَ (الْحَرَّاثِيْنَ) وَيَنْتَظِرَهُمْ (إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ) لِزَرْعِهِمْ وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَحْصُدُوْنَ ذَلِكَ الزَّرْعَ (ثُمَّ يَبِيْعُوْنَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْمُقْرِضِ (طَعَامَهُمْ) الَّذِي حَصَدُوْهُ أَوْ غَيْرَهُ (بِأَرْفَعَ مِنَ السِّعْرِ) الَّذِي فِي الْبَلَدِ حِيْنَئِذٍ، (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ الْإِرْتِفَاعُ الَّذِي شَرَطَهُ زَائِدًا عَنْ سِعْرِ الْبَلَدِ (قَلِيْلًا)، كَأَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ: أَقْرَضْتُكُمْ هَذِهِ الْمِائَةَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيْعُوْا مِنِّي الْحَبَّ مَثَلًا بِأَزْيَدَ مِنَ السِّعْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِكَيْلَةٍ مَثَلًا. فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ وَالسِّعْرُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَيَأْخُذُ بِسِتَّةٍ بِهِ. (وَيُسَمُّوْنَ ذَلِكَ الْمُقْضِيَ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ: وَشَمِلَ قَوْلُهُمْ جَرَّ نَفْعٍ لِلْمُقْرِضِ مَا لَوْ كَانَ فِيْهِ نَفْعٌ أَيْضًا لِلْمُقْتَرِضِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ م ر، بِخِلَافِ مَا كَانَ فِيْهِ نَفْعٌ لِلْمُقْتَرِضِ وَحْدَهُ فَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ عَلَى كَلَامٍ فِيْهِ. فَلْيُرَاجَعْ.

Dan haram juga bagi *mukallaf* (menghutangi tukang tenun atau selainnya), seperti (para kuli) dan pekerja, (atau memakai jasa mereka dengan bayaran di bawah upah standar) untuk pekerjaan tersebut (karena hutang tersebut) yang dihutangkan kepadanya. (Mereka menyebut hal itu sebagai *rabithah*), karena hal itu menarik keuntungan bagi *muqridh*. (Dan) begitu pula haram bagi *mukallaf* (menghutangi) semisal (petani) dan menunggu mereka (sampai musim panen) tanaman mereka, dan mensyaratkan bila mereka memanennya (kemudian menjual kepadanya), maksudnya kepada *muqridh* (makanan mereka), yang dipanennya atau selainnya (dengan harga yang lebih tinggi dari harga) pasaran di daerahnya ketika waktu panen, (meskipun) kenaikan harga yang disyaratkan melebihi harga pasaran daerahnya (sedikit), seperti ia berkata kepada mereka: *"Aku hutangi kalian 100 ini sampai waktu panen dengan syarat kalian menjual biji-bijian, umpamanya, kepadaku dengan harga yang melebihi harga pasaran pada waktu tersebut dengan lebih satu takaran, umpamanya."* Kemudian ketika waktu panen tiba, dan harga pasaran lima dirham, maka ia membelinya dengan harga enam dirham sebab hutangannya. (Mereka menamakan *mu'amalah* tersebut sebagai *al-muqdhi*). Hal itu karena praktek tersebut menarik keuntungan bagi *muqridh*. Anda sudah tahu bahwa setiap praktek hutang seperti itu hukumnya haram. Dalam *Hasyiyah 'ala at-Tuhfah*, Ibn Qasim

al-'Ubbadi berkata: "Ungkapan ulama: *"Menarik keuntungan bagi muqridh."*, mencakup kasus meskipun juga ada keuntungan bagi *muqtaridh*, maka akad rusak karenanya. Demikian kata ar-Ramli as-Shaghir. Lain halnya bila di dalamnya hanya ada keuntungan untuk *muqtaridh*, maka akad tidak rusak karenanya, sesuai pembahasan dalam hal tersebut. Maka rujuklah.

b. *Nihayah az-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, I/242:

(كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا) أَيْ كُلُّ قَرْضٍ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إِلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَسَدَ الْعَقْدُ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ. وَمِنْ شَرْطِ الْمَنْفَعَةِ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ، إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، إِذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا، وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ. وَجَازَ فِي الْقَرْضِ شَرْطُ رَهْنٍ وَشَرْطُ كَفِيلٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِمَا. وَشَرْطُ إِقْرَارٍ أَوْ إِشْهَادٍ عِنْدَ حَاكِمٍ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَوْثِقَاتٌ لَا مَنَافِعُ زَائِدَةٌ.

(Setiap *qardh* yang menarik keuntungan termasuk riba), maksudnya setiap akad *qardh* yang di dalamnya disyaratkan keuntungan bagi *muqridh* merupakan bentuk riba. Bila hal itu dilakukan maka akadnya rusak bila persyaratan terjadi di dalam akad. Adapun kedua pihak sepakat dan tidak terjadi dalam akad, maka akadnya tidak rusak. Di antara persyaratan keuntungan adalah menghutangi orang yang akan menyewa barang miliknya, umpamanya dengan ongkos yang melebihi harganya karena akad *qardh* yang dilakukan, jika hal itu terjadi dalam akad, karena dalam kondisi ini hal itu haram menurut *ijma'*, bila tidak terjadi dalam akad maka makruh menurut kita dan haram menurut mayoritas ulama. Dalam akad *qardh* boleh mensyaratkan gadai dan penjamin, dan tidak harus menentukannya, serta mensyaratkan ikrar dan persaksian di hadapan hakim. Sebab semua ini merupakan jaminan, bukan keuntungan yang melebihi hutang.

c. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala Fath al-Wahab, (at-Tajrid li Naf'i al-'Ibad)*, II/325:

(قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِشَرْطٍ إِلَخْ). فَائِدَةٌ: اَلشَّرْطُ الْوَاقِعُ فِي الْقَرْضِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: إِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا، وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ، كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً، وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ

وَكَفِيلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ز ي. فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ، وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمُقْتَرِضِ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: كَرَدِّ زِيَادَةٍ) أَيْ كَشَرْطِ رَدِّ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَكَأَجَلٍ) أَيْ شَرْطِهِ. (قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ زِدْتُهُ تَبَعًا). أُنْظُرْ حِكْمَةَ التَّبَعِيَّةِ فِي هَذَا الْقَيْدِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْقُيُودِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) أَيْ بِالْمُقْرَضِ أَوْ بَدَلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر. قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ بِالْمُقْرَضِ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ، وَإِلَّا فَلَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُتَصَوَّرْ إِعْسَارُهُ بِهِ حِينَئِذٍ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ فَضَالَةَ) هُوَ صَحَابِيٌّ، وَقَالَهُ بِحَضْرَتِهِ ﷺ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ حَدِيثٌ. وَفَضَالَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ. (قَوْلُهُ: جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ شَرْطٍ فِيهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ شَرْحُ م ر. فَالْمُرَادُ جَرُّهَا بِشَرْطٍ. أَمَّا جَرُّهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا يَضُرُّ.

(Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Dan qardh rusak sebab syarat..."*) Faidah: Syarat yang terjadi dalam *qardh* ada tiga macam: 1) Bila menarik keuntungan bagi *muqridh*–yang menghutangi–maka merusak akad, 2) Bila menarik keuntungan bagi *muqtaridh*–yang menghutang– maka syaratnya rusak dan tidak merusak akad, seperti bila *muqridh* menghutangi *muqtaridh* 10 barang yang utuh agar dikembalikan dengan barang yang pecah, 3) Bila untuk jaminan, seperti pensyaratan gadai dan penjamin, maka syaratnya sah. Demikian menurut Ali az-Zayadi. Jadi, syarat pertama rusak dan merusakkan akad, syarat kedua rusak dan tidak merusakkan akad. Telah maklum, bahwa tempat *fasad* ketika syarat terjadi di dalam akad. Adapun bila kedua pihak sepakat dan syarat tidak terjadi di dalam akad, maka tidak *fasad*. Demikian menurut Ali Syibramalisi atas tulisan ar-Ramli as-Shaghir. (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Yang menarik keuntungan bagi muqridh"*), maksudnya hanya menguntungkannya, atau juga menguntungkan *muqtaridh* namun keuntungannya tidak lebih banyak, dengan alasan yang akan dijelaskan dalam ungkapannya: *"Atau keuntungan untuk keduanya sedangkan muqtaridh berstatus mu'sir–belum dapat melunasi–"*, sebagaimana dalam *Syarh ar-Ramli as-Shaghir*. (Ungkapan Zakariya al-

Anshari: *"Seperti mengembalikan tambahan"*), maksudnya seperti syarat mengembalikan tambahan. (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Dan seperti tempo"*), maksudnya mensyaratkannya. (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Dengan batasan yang aku tambahkan karena mengikuti kitab al-Majmu dan selainnya"*). Lihatlah hikmah mengikuti dalam *qayyid* ini bukan *qayyid* lainnya. Demikian kata Muhammad bin Ahmad asy-Syubari. (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Dan muqtaridh berstatus mampu membayar"*), maksudnya melunasi hutangnya atau menggantinya menurut pendapat yang kuat. Demikian dalam *Syarh ar-Ramli as-Shaghir*. Ar-Rasyidi berkata: *"Dan muqtaridh berstatus mampu membayar hutangnya"*, maksudnya dalam jangka yang telah ditentukan, kecuali bila yang dikehendaki adalah ia mampu membayarnya saat akad, maka tidak mampu membayar saat akad tidak dapat di*tashawwur*kan. (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Karena perkataan Fadhalah"*), ia seorang sahabat, mengatakan perkataannya di hadapan Nabi ﷺ, dan beliau menetapkannya, maka perkataannya merupakan hadits. Kata [illegible] dengan dibaca *fathah* huruf *ra'* dan huruf *fa'*-nya sebagaimana dalam *Hasyiyah Muhammad bin Ahmad asy-Syubari*. (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Yang menarik keuntungan"*), makudnya yang di dalamnya disyaratkan keuntungan bagi *muqridh*. Demikian dalam *Syarh ar-Ramli as-Shaghir*. Maksud menarik keuntungan adalah dengan disyaratkan. Adapun keuntungan yang tanpa persyaratan maka tidak mempengaruhi keabsahan akad.

d. Referensi lain:
   1) *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Minhaj*, III/66.

406. Dilema Talak Tiga

Deskripsi Masalah

Laki-laki yang sudah berumah tangga lama dan punya anak, mengatakan pada istrinya saat bertengkar, *"yo wis besok akhir bulan, aku akan mentalak kamu dengan talak tiga"*.

Karena belum mendapatkan kejelasan hukum, laki-laki tersebut terpaksa untuk sementara waktu berusaha menghindari istrinya. Berat dan perih rasa hatinya saat terpaksa harus mengayunkan kaki meninggalkan rumah, sementara rasa cinta pada istri dan anak-anaknya masih kuat mengakar di dalam hati. Bahkan sempat terbersit juga kekhawatiran, andaikan saja nanti talak itu benar-benar jatuh, bagaimana selanjutnya nasib istri dan anak-anaknya, sementara selama ini dirinya menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.

Pertanyaan

a. Jatuhkah talak dari laki-laki tersebut, apabila waktu telah sampai

pada akhir bulan?

b. Bolehkah laki-laki tersebut berinisiatif mencabut lagi talaknya sebelum akhir bulan, mengingat bahasa semacam itu sangat mirip dengan sekedar janji saja?

Jawaban

a. Tidak jatuh talak karena ungkapan seperti itu tidak termasuk *ta'liq* talak dan hanya sebatas janji semata.

b. Karena perkataan tersebut tidak berakibat jatuh talak maka tidak perlu dicabut.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Hawi li al-Fatawa*, I/192:

وَالثَّالِثَةُ كَدِلَالَتِهِ عَلَى الْفِعَالِ وَصَرَّحَ ابْنُ هِشَامٍ الْخُضْرَاوِيُّ فِي الْإِفْصَاحِ بِأَنَّ دِلَالَةَ الْأَفْعَالِ عَلَى الزَّمَانِ لَيْسَتْ لَفْظِيَّةً بَلْ هِيَ مِنْ بَابِ دِلَالَةِ التَّضَمُّنِ وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ أُصُوْلِ النَّحْوِ وَدِلَالَاتِ التَّضَمُّنِ وَالْإِلْتِزَامِ لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي الطَّلَاقِ وَالْأَقَارِيْرِ وَنَحْوِهَا بَلْ لَا يُعْتَمَدُ فِيْهَا إِلَّا عَلَى مَدْلُوْلِ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَالدِّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَثَبَتَ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الصِّيْغَةَ وَعْدٌ وَهُوَ مُضَارِعٌ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ التَّنْفِيْسِ لَقِيْلَ سَوْفَ تَكُوْنِيْنَ طَالِقًا وَهَذِهِ الصِّيْغَةُ وَعْدٌ بِلَا شَكٍّ فَكَذَا عِنْدَ تَجَرُّدِهِ مِنْ سَوْفَ اهـ

Ketiga *dilalah*nya atas perbuatan, ibn Hisyam al-Hadlrawi menjelaskan dalam *al-Ifshah* sungguh *dilalah* perbuatan-perbuatan pada zaman itu bukan *lafzhiyah*, akan tetapi *dilalah* itu masuk pada bab *dilalah tadlammun* (tersimpan). Sunguh masalah itu dijelaskan dalam kitab *ushul nahwu*, dan *dilalah-dilalah tadlammun*. *Dilalah iltizam* itu tidak dipergunakan dalam talak, beberapa pengakuan dan sesamanya bahkan tidak dijadikan pedoman dalam *dilalah iltizam* kecuali pada kasus yang ditunjukkan lafal dari arah *wadla'* dan *dilalah lafdziyah*. Maka tetap perkara yang aku katakan: *"Sungguh shighat ini adalah janji yaitu mudlari' (akan datang) jika huruf tanfis masuk padanya"*. Maka dikatakan: *"Kamu akan tertalak dan shighat ini adalah janji tanpa ragu, maka demikian pula ketika sepi dari saufa."*

b. *Hawasyi asy-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, VIII/95:

تَنْبِيْهٌ: فِيْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّ التَّعْلِيْقَ يَكُوْنُ بِلَا فِيْ بَلَدٍ عَمَّ الْعُرْفُ فِيْهَا كَقَوْلِ أَهْلِ بَغْدَادَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْتُ الدَّارَ اهـ مغني عبارة سم وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَأَدْخَلْتُ الدَّارَ مِنْ لُغَتِهِ بِهَا أَيْ بِلَا مِثْلِ إِنْ كَالْبَغْدَادِيِّيْنَ طَلَقَتْ بِالدُّخُوْلِ

انتهى قَالَ فِيْ شَرْحِهِ أَمَّا مَنْ لَيْسَ لُغَتُهُ كَذَلِكَ فَتُطَلَّقُ زَوْجَتُهُ انتهى ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ لَا أَدْخُلُ الدَّارَ تَعْلِيْقٌ قَالَ فِيْ شَرْحِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لُغَتُهُ بِلَا مِثْلِ إِنْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُضَارِعَ عَلَى أَصْلِ وَضْعِ التَّعْلِيْقِ الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِمُسْتَقْبَلٍ فَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيْقًا بِخِلَافِ الْمَاضِيْ انتهى اهـ سم على حج اهـ ع ش. قوله: (أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ) أَيْ بِإِسْقَاطِ الْفَاءِ اهـ سم قوله: (بِتَفْصِيْلِهِ الْآتِيْ إلخ) أَيْ فِيْ الْفَرْعِ الَّذِيْ فِيْ آخِرِ الْفَصْلِ اهـ كردي عبارة ع ش أَيْ فِيْ آخِرِ هَذَا الْفَصْلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّعْلِيْقَ عَلَى مُجَرَّدِ الْفِعْلِ طَلُقَتْ بِمُجَرَّدِ الدُّخُوْلِ وَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيْقَ التَّطْلِيْقِ عَلَى الْفِعْلِ وَلَمْ يَقْصِدْ فَوْرًا لَمْ تُطَلَّقْ إِلَّا بِالْيَأْسِ مِنَ التَّطْلِيْقِ وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا اهـ

Peringatan: Dalam fatwa-fatwa al-Ghazali sungguh *ta'liq* itu dengan *la* (tidak) di negara yang umum berlaku *'urf* di dalamnya seperti ungkapan ahli Baghdad: *"Kamu tertalak, aku tidak masuk rumah"*. Demikian keterangan dalam kitab *al-Mughni*, ibarat Syihab ad-Din bin Qasim al-Abadi. Dalam *ar-Raudl* jika seseorang berkata: *"Kamu tertalak, aku akan masuk rumah"* dengan menggunakan bahasanya, maksudnya tanpa semisal *in* (jika) seperti penduduk Baghdad, maka istri ter*thalak* dengan masuk rumah. Beliau berkata dalam *syarah*nya: *"Adapun orang yang bahasanya dengan tanpa menggunakan semisal in (jika) itu menyelisihi perkara yang telah lewat"*. Mungkin perbedaannya bahwa sungguh *mudlari'* pada asal *wadla'* penggantungan tidak ada kecuali *mustaqbal* (masa depan). Maka hal itu merupakan penggantungan, berbeda dengan *shighat madli* (masa lalu). Demikian pernyataan Syihab ad-Din bin Qasim al-Abady pada Ibn Hajar al-Haitami. (Ungkapan ibn Mulqin Siraj ad-Din Abu Hafsh Umar bin Ali bin Ahmad asy-Syafi'i al-Mishri: *"Atau kamu tertalak"*) maksudnya menggagurkan *fa'*, Syihab ad-Din bin Qasim al-Abadi. (dengan perinciannya yang akan datang...), maksudnya dalam cabang di akhir pasal. Demikian pernyataan Kurdi, ungkapan Ali Syabramallisi, Nuruddin Abu Dliya' Ali bin Ali: *"Maksudnya di akhir pasal ini"*. Simpulan: sungguh seseorang jika bertujuan menggantungkan pada murni perbuatan maka istri tertalak dengan sekedar masuk rumah, sedangkan jika seseorang bermaksud menggantungkan pentalakan pada perbuatan dan tidak bermaksud segera, maka istri tidak tertalak kecuali dengan putus asa dari pentalakan. Jika seseorang bertujuan janji maka diamalkan. Sehingga jika seseorang mentalak setelah perbuatan maka talak jatuh, sedangkan jika tidak

maka tidak jatuh.

c. *Tuhfah al-Muhtaj ila Adillah al-Minhaj*, XXXIII/320:

وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا اهـ

Jika bertujuan janji maka diamalkan; jika mentalak setelah perbuatan maka jatuh dan jika tidak maka tidak jatuh.

407. Membunuh Hewan untuk Umpan

Deskripsi Masalah

Kita senantiasa dianjurkan untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam hal menyembelih atau membunuh binatang, baik *ma'kul* (boleh dimakan) atau *ghairu ma'kul* (tidak boleh dimakan). Bagi penggemar burung dan orang yang hobi memancing, jangkrik sudah menjadi bagian dari kegemarannya, karena ia sebagai salah satu jenis makanan burung atau umpan memancing. Namun dalam menyajikan jangkrik sebagai makanan atau umpan terindikasi kurang mencerminkan berbuat baik terhadap binatang.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum membunuh atau *memrotoli* dalam keadaan hidup-hidup terhadap hewan yang digunakan sebagai umpan atau pakan burung?
b. Bagaimana hukum memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya?

Jawaban

a. *Memrotoli* binatang (jangkrik) yang masih hidup untuk makanan burung adalah haram karena mengandung unsur *ta'dzib* (menyiksa), akan tetapi jika dibunuh terlebih dahulu lalu di*protoli* maka hukumnya boleh.
b. Memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram karena tergolong menyiksa terhadap ikan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Is'ad ar-Rafiq*, 101:

وَمِنْهَا الْمُثْلَةُ بِالْحَيَوَانِ أَيْ تَقْطِيعُ أَجْزَائِهِ وَتَغْيِيرُ خِلْقَتِهِ وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ اهـ

Di antaranya: *mutsilah* pada binatang, maksudnya memotong bagian-bagian tubuhnya dan merubah *khilqah*nya. Perbuatan ini termasuk bagian dari dosa besar.

b. *Musnad al-Imam Ahmad*, V/528:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ عَنْ خَلَفٍ -يَعْنِيْ ابْنَ مَهْرَانَ- حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّرِيْدَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِيْ عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِيْ لِمَنْفَعَةٍ اهـ

Abdullah menceritakan padaku, ayahku menceritakan padaku, Abdul Wahid al-Haddad yaitu Abu Ubaidah menceritakan padaku dari Khalaf –yakni Ibn Mahran–, Amir al-Ahwal menceritakan padaku dari Shalih bin Dinar dari Amr bin Syarid, beliau berkata: "Saya mendengar Syarid berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Orang yang membunuh burung gereja (emprit) dengan bermain-main, maka burung itu akan menuntut kepada Allah di hari kiamat dari (perbuatan)nya, burung berkata: "Ya Tuhan, sungguh seseorang telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku karena suatu manfaat."*

c. *Muhadharat al-Udaba` wa Muhawarat asy-Syu'ara` wa al-Bulagha` li Abi al-Faraj al-Ashfihani*, II/133 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ بِالْحَيَوَانِ وَالْحَثُّ عَلَى تَحْسِيْنِ الذَّبْحِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَنَ اللهُ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ، وَنَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيْمَةُ وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إِذَا ضُرِبَتْ. وَقَالَ أَيْضًا: لَا تَتَّخِذُوا الرُّوْحَ غَرَضًا. وَقَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ اهـ

Larangan dari *mutslah* (mengambil umpan) pada binatang dan memotifasi penyembelihan secara baik: Nabi ﷺ bersabda: *"Allah melaknat orang yang berbuat mutsilah (membuat umpan) pada binatang, dan melarang mensabar binatang dan memakan dagingnya apabila dipukul."* Dan bersabda pula: *"Janganlah kalian menghilangkan nyawa sebagai tujuan."* Dan bersabda: *"Sungguh Allah menulis kebaikan dalam setiap sesuatu, maka apabila kalian membunuh maka perbaikilah pembunuhan, dan apabila kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihan, serta tajamkanlah (salah seorang dari kalian) pada pisaunya dan enakkanlah sembelihannya."*

d. *Al-Hawasyi al-Madaniyah*, 1/30:

(قَوْلُهُ وَلَا يَجْرَحُ) اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِيْ كُتُبِهِ وَعَبَّرَ فِيْ حَاشِيَتِهِ عَلَى تُحْفَةٍ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوْزُ امْتِحَانُهَا بِشَقِّ بَعْضِ أَجْزَائِهَا خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى كَثْرَتِهِمْ إِلَى آخِرِ مَا أَطَالَ

بِهِ وَفِي الْإِمْدَادِ: اللَّائِقُ بِقَاعِدَةِ تَحْرِيمِ الْمُثْلَةِ إِلَّا الدَّلِيلَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَرْحُهُ مُطْلَقًا اهـ

(Ungkapan pengarang: *"Dan tidak menajamkan"*) Pen*syarih* berpedoman dalam kitabnya dan mengungkapkan dalam *Hasyiyah*nya *'ala Tuhfah* dengan ungkapan: *"Tidak boleh melatih binatang dengan membelah bagian juz (tubuh)nya"*, berbeda menurut al-Ghazali dan mayoritas pengikut beliau sampai akhir keterangan yang panjang. Dalam *al-Imdad*: *"Sepatutnya dengan kaidah keharaman mutsilah kecuali dalil sungguh tidak boleh menajamkannya secara mutlak."*

e. *Faidh al-Qadir,* VI/193:

(مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَنَبَّهَ بِالْعُصْفُورِ لِصِغَرِهِ عَلَى مَا فَوْقَهُ وَأُلْحِقَ بِهِ تَنَزُّهُ الْمُتْرَفِينَ بِالْاِصْطِيَادِ لَا لِأَكْلٍ أَوْ حَاجَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ فَمَا فَوْقَهَا وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِكَوْنِهِ فَوْقَهَا فِي الْحَقَارَةِ وَالصِّغَرِ وَفَوْقَهَا فِي الْجُثَّةِ وَالْعِظَمِ (بِغَيْرِ حَقِّهِ) فِي رِوَايَةٍ حَقِّهَا وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَحَقُّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِهَا (سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ) فِي رِوَايَةٍ عَنْ قَتْلِهِ أَيْ عَاقَبَهُ وَعَذَّبَهُ عَلَيْهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) تَمَامُهُ عِنْدَ مُخَرِّجِهِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَنْ تَذْبَحَهُ فَتَأْكُلَهُ وَلَا تَقْطَعَ رَأْسَهُ فَتَرْمِيَ بِهَا فَمَا أَوْهَمَهُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْقُضَاعِيِّ وَغَيْرِهِ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ صُرَاخٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَقُولُ رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ اهـ

(Orang yang membunuh *ushfur*–burung gereja–) dengan membaca *dlammah* awalnya; peringatan terkait burung gereja karena kecil bentuknya daripada binatang lain. Hukumnya disamakan dengan membunuh burung gereja bagi para pemburu binatang yang tidak bertujuan untuk dimakan atau hajat. Menurut satu riwayat, فَمَا فَوْقَهَا ini *ihtimal*, karena *ushfur* di atas binatang lain dalam rendah dan kecil dan diatasnya dalam jasad dan tulang (tanpa haknya), dalam riwayat lain حَقِّهَا (dengan *dlamir muannats*). Me*muannats*kan memandang jenis, dan me*mudzakar*kan memandang lafal. حَقُّهَا adalah ibarat dari mengambil manfaatnya (Allah menanyai tentangnya). Menurut riwayat lain dari membunuhnya, maksudnya menyiksa dan mengadzabnya (pada hari kiamat). Secara sempurna menurut ulama yang men*takhrij*, yaitu Ahmad dan lainnya, dikatakan: *"Apa haknya ya Rasulallah?"*, Rasul ﷺ bersabda: *"Kamu menyembelih lalu memakannya, tidak memotong kepalanya kemudian melemparnya"*. Perkara

yang disangka *mushannif* sungguh hadits yang disebutkan secara sempurna ini tidaklah shahih. Menurut riwayat Imam Qadla'i dan lainnya: *"Orang yang membunuh burung gereja dengan bermain-main maka burung itu akan datang pada hari kiamat, dan berteriak di bawah Arsy, seraya berkata: "Ya Tuhanku, tanyakanlah urusan ini pada seseorang yang membunuhku tanpa manfaat."*

f. Referensi lain:
   1) *Shahih Ibn Hibban*, V/411
   2) *As-Sa'il al-Jarar*, IV/371
   3) *Is'ad ar-Rafiq*, II/131

408. Solat Pasien yang Memakai Kateter

Deskripsi Masalah

Di sebuah rumah sakit ada pasien yang bernama Sumantri, karena mengidap suatu penyakit tertentu akhirnya Sumantri terpaksa hanya berbaring lemah di atas ranjang. Sudah menjadi prosedur rumah sakit, apabila ada pasien yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya sendiri, maka pada alat kemaluannya akan dipasang sebuah alat yaitu selang (*kateter*) yang dimasukkan dalam lobang dzakarnya untuk buang air kecil. Hal itu dilakukan baik hanya untuk mempermudah perawatan ataupun untuk tujuan pengobatan.

Pertanyaan

Bagaimana hukum solat Sumantri dan bagaimana bersucinya?

Jawaban

Solat Sumantri tersebut sah akan tetapi wajib *i'adah* (mengulang solat), dan cara bersucinya sesuai dengan kemampuannya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, II/279:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهَا بِهِ صَلَّى وَأَعَادَ، كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى قَرْحِهِ دَمٌ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهِ صَلَّى وَأَعَادَ، وَقَالَ فِي «الْقَدِيمِ»: لَا يُعِيدُ لِأَنَّهُ نَجَاسَةٌ يُعْذَرُ فِي تَرْكِهَا فَسَقَطَ مَعَهَا الْفَرْضُ كَأَثَرِ الْاِسْتِنْجَاءِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّهُ صَلَّى بِنَجِسٍ نَادِرٍ غَيْرِ مُتَّصِلٍ فَلَمْ يَسْقُطْ مَعَهُ الْفَرْضُ كَمَا لَوْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ نَسِيَهَا. الشَّرْحُ: الْقَرْحُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ، وَقَوْلُهُ: (صَلَّى بِنَجِسٍ نَادِرٍ) احْتِرَازٌ مِنْ أَثَرِ الْاِسْتِنْجَاءِ، وَقَوْلُهُ: (غَيْرُ مُتَّصِلٍ)

اِحْتِرَازٌ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ. أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَإِذَا كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَعَجَزَ عَنْ إِزَالَتِهَا وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ بِحَالِهِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Mushannif ﷺ berkata: *"Apabila ada najis yang tidak dima'fu di tubuh seseorang dan ia tidak menemukan sesuatu untuk membasuhnya, hendaklah ia solat dan mengulanginya, sebagaimana kita katakan pada seseorang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu. Jika di lukanya ada darah yang dikhawatirkan bila dibasuh, maka solatlah dan mengulangi"*. Dalam *al-Qadim*, pengarang berkata: *"Tidak perlu mengulangi solat, karena najis tersebut merupakan najis yang diudzuri dalam meninggalkan solat"*. Maka kefardluan gugur bersama najis tersebut seperti bekas *istinja'*; Pertama, menurut *qaul Ashah* karena ia solat dengan membawa najis yang langka, tidak *ittishal*; maka kefardluan tidak gugur bersamanya, sebagaimana jika seseorang solat dengan membawa najis dalam keadaan lupa. Syarah: *al-Qarh* dengan membaca *fathah qaf* dan *dlummah*nya ada dua bahasa. (Ungkapan Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syirazi Abu Ishaq: *"Solat dengan membawa najis yang langka"*) pengecualian dari bekas *istinja'*. (Ungkapan Ibrahim bin Ali bin Yusuf asy-Syirazi Abu Ishaq: *"Tidak ittishal"*) pengecualian dari darah *istihadlah*. Adapun hukum masalah: Apabila ada najis yang tidak di*ma'fu* di tubuh seseorang dan ia tidak sanggup menghilangkannya, maka wajib solat dalam kondisinya untuk menghormati waktu berdasarkan hadits Abi Hurairah ﷺ, sungguh Rasulullah ﷺ bersabda: *"Dan apabila aku perintahkan sesuatu padamu maka penuhilah perkara yang kamu mampu kerjakan."* HR. al-Bukhari dan Muslim.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 78:

فَائِدَةٌ: يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ مَعَ كَمَالِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَاجْتِنَابِ مُبْطِلَاتِهَا حَسْبَ قُدْرَتِهِ وَإِمْكَانِهِ، وَلَهُ الْجُلُوسُ ثُمَّ الْاِضْطِجَاعُ ثُمَّ الْاِسْتِلْقَاءُ وَالْإِيمَاءُ إِذَا وَجَدَ مَا يُبِيحُهُ عَلَى مَا قُرِّرَ فِي الْمَذْهَبِ، فَإِنْ كَثُرَ ضَرَرُهُ وَاشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخَشِيَ تَرْكَ الصَّلَاةِ رَأْسًا فَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيدِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَإِنْ فُقِدَتْ بَعْضُ الشُّرُوطِ عِنْدَنَا. وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ فِي رِسَالَتِهِ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ جَازَ لَهُ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِنْ شُفِيَ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَجَزَ عَنِ الشُّرُوطِ بِنَفْسِهِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا بِغَيْرِهِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ لُزُومُ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ لَحِقَتْهُ مَشَقَّةٌ

بِفِعْلِ الْغَيْرِ، أَوْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ تَخْرُجُ مِنْهُ دَائِمًا، وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: لَا يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ عِنْدَهُ لَا يُعَدُّ قَادِرًا بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ لَوْ تَيَمَّمَ الْعَاجِزُ عَنِ الْوُضُوْءِ بِنَفْسِهِ، أَوْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ وُجُوْدِ مَنْ يَسْتَعِيْنُ بِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ صَحَّتْ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ وُجُوْبُ الْإِيْمَاءِ بِالطَّرْفِ أَوْ بِإِجْرَاءِ الْأَرْكَانِ عَلَى الْقَلْبِ، وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ طَهَارَةَ الْخَبَثِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ سُنَّةٌ، فَيُعِيْدُ اسْتِحْبَابًا مَنْ صَلَّى عَالِمًا قَادِرًا عَلَى إِزَالَتِهَا، وَمُقَابِلُهُ الْوُجُوْبُ مَعَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، وَإِلَّا فَمُسْتَحَبٌّ مَا دَامَ الْوَقْتُ فَقَطْ، وَأَمَّا طَهَارَةُ الْحَدَثِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِخَوْفِ حُدُوْثِ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأْخِيْرِ بُرْءٍ جَازَ التَّيَمُّمُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ عَدِمَ مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَاءِ وَالصَّعِيْدِ لِعَدَمِهِمَا أَوْ عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِمَا بِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَلَا قَضَاءَ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ مُطَّلِعٌ عَلَى مَنْ تَرَخَّصَ لِضَرُوْرَةٍ، وَمَنْ هُوَ مُتَهَاوِنٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ، حَتَّى قِيْلَ: يَنْبَغِيْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَأْتِيَ الرُّخْصَةَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهَا لِمَا يَعْلَمُ مَا لَدَيْهِ مِنَ الْعَجْزِ، وَاللهُ يَعْلَمُ الْمَعْذُوْرَ مِنَ الْمَغْرُوْرِ اهـ

Faidah: Wajib bagi orang sakit menjalankan solat lima waktu serta menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dan menjauhi perkara yang membatalkannya sesuai kemampuan dan kemungkinannya, boleh baginya melaksanakan solat dengan duduk, tidur miring, kemudian sujud, dan isyarat apabila menemui kesulitan yang membolehkannya menurut ketetapan *al-madzhab*. Jika bahayanya banyak dan sakitnya parah, serta ia khawatir meninggalkan solat sama sekali, maka tidak masalah mengikuti Abi Hanifah dan Imam Malik meskipun sebagian syarat-syarat ditinggalkan menurut kita. Kesimpulan keterangan yang disebutkan *as-Syaikh* Muhammad bin Khatim dalam *Risalah*nya mengenai persoalan solat orang yang sakit; Sungguh madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa orang yang sakit apabila tidak sanggup isyarat dengan kepalanya, maka boleh meninggalkan solat. Jika sembuh setelah lewat sehari maka tidak ada kewajiban *qadla* baginya; apabila tidak sanggup melaksanakan syarat-syarat sendiri dan mampu melaksanakannya dengan bantuan orang lain, maka menurut *zhahir al-Madzhab* yaitu *qaul shahibin* wajib mengerjakannya, kecuali jika menemui kesulitan dengan bantuan orang lain, atau ada najis yang selalu keluar darinya. Abu Hanifah berkata: *"Tidak fardlu baginya secara mutlak"*, karena orang *mukallaf* menurut

Abu Hanifah tidak dianggap mampu dengan bantuan orang lain. Menurut beliau jika orang yang lemah bertayammum sendiri dari wudlu, solat dengan membawa najis atau menghadap ke selain arah kiblat serta wujud orang yang membantunya, sementara ia tidak memerintahnya maka sah solatnya. Sedangkan menurut Imam Malik, tuntutan madzhabnya: *"Wajib isyarat dengan anggota tubuh atau menjalankan rukun-rukun di dalam hati"*. Menurut *mu'tamad* madzhabnya: *"Sungguh suci dari kotoran baju, badan dan tempat itu sunnah"*, maka orang yang solat serta dia mengetahui, dan mampu menghilangkannya disunnahkan mengulangi solat. Menurut *muqabil*nya wajib apabila mengetahui dan mampu, jika tidak mengetahui dan tidak mampu maka disunnahkan mengulangi selama waktunya masih cukup. Sedangkan suci dari hadats maka apabila tidak sanggup menggunakan air karena khawatir datangnya sakit, bertambah sakit atau mengakhirkan sembuh maka boleh tayammum dan tidak ada kewajiban qadla baginya. Begitu pula apabila tidak dijumpai orang yang menuangkan air padanya meskipun dengan upah. Jika seseorang tidak sanggup menggunakan air dan debu karena keduanya tidak ditemukan atau tidak mampu menggunakannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain maka gugurlah kewajiban solat baginya, serta tidak ada kewajiban qadla'. Ketahuilah sungguh Allah menampakkan pada orang yang mendatangi *rukhshah* karena darurat dan orang yang mempermudah urusan Tuhannya, hingga dikatakan: *"Seyogyanya manusia tidak mendatangi rukhshah hingga dugaannya kuat. Sungguh Allah menyukai orang yang mendatangi rukhshah, karena perkara yang diketahui di sisi-Nya, yaitu kelemahan. Allah mengetahui sesuatu yang di udzuri dari perkara yang maghrur."*

c. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, III/136:

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِذَا كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَعَجَزَ عَنْ إِزَالَتِهَا وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ بِحَالِهِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ قَوْلٌ غَرِيبٌ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَمَرْنَاهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَلَى نَوْعِ خَلَلٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى قَرْحِهِ دَمٌ يَخَافُ مِنْ غَسْلِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ بِحَيْثُ لَا يُعْفَى عَنْهُ فَفِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ الْقَوْلَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ: الْجَدِيدُ الْأَصَحُّ وُجُوبُهَا وَالْقَدِيمُ لَا تَجِبُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْمُزَنِيِّ وَدَاوُدَ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْخَوْفِ مَا سَبَقَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ نَسِيَهَا هَذَا عَلَى طَرِيقَتِهِ وَطَرِيقَةِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ نَسِيَهَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ

قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنَّمَا الْقَوْلَانِ عِنْدَهُمْ فِيمَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ جَهِلَهَا فَلَمْ يَعْلَمْهَا قَطُّ وَعِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِي النَّاسِي خِلَافٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْجَاهِلِ وَسَنُوَضِّحُهُ قَرِيبًا حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى اهـ

Adapun hukum masalah; apabila ada najis yang tidak di*ma'fu* pada tubuh seseorang dan ia tidak sanggup menghilangkannya, maka ia wajib solat dalam kondisinya *lihurmah al-wakti*; berdasarkan hadits Abi Hurairah, sungguh Rasulullah ﷺ bersabda: "*Apabila aku perintahkan suatu hal pada kalian, maka penuhilah selama kalian mampu*". HR. al-Bukhari dan Muslim. Dan wajib baginya mengulangi solat karena alasan yang disebutkan *mushannif*, dan telah dijelaskan dalam bab tayammum ada *qaul gharib*: Sungguh tidak wajib mengulangi setiap solat yang kita perintahkan mengerjakannya pada cabang masalah cela. Adapun apabila terdapat darah pada lukanya yang dikhawatirkan bila membasuhnya, yaitu darah yang banyak sekira tidak di*ma'fu*; maka dalam kewajiban mengulangi solat, ada dua qaul yang disebutkan *mushannif*, menurut *qaul jadid al-Ashah* wajib mengulangi solat, sedangkan menurut *qaul qadim* tidak wajib mengulanginya; yaitu menurut madzhab Abi Hanifah, Malik, Ahmad, al-Muzanni dan Dawud. Yang di*i'tibar* dalam kekhawatiran ialah masalah dahulu dalam bab tayamum. Ungkapan *mushannif*: "*Sebagaimana jika solat dengan membawa najis dalam kondisi lupa*" ini adalah jalan *mushannif* dan jalan ulama Irak: Sungguh orang yang solat dengan membawa najis dalam kondisi lupa maka wajib mengulangi solat menurut satu *qaul*. Sedangkan dua *qaul* menurut mereka mengenai persoalan seseorang yang solat membawa najis yang tidak diketahui, kemudian ia tidak mengetahuinya sama sekali. Menurut ulama Khurasan mengenai persoalan orang yang lupa, ada khilaf yang ditertibkan pada orang yang tidak mengetahui; kita akan segera menjelaskan sekira *mushannif* menuturkannya, *Insya Allah*.

409. Menggambar Berdasarkan Imajinasi

Deskripsi Masalah

Tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, banyak dijumpai di beberapa toko dan pasar yang menjual gambar maupun foto dari para ulama terdahulu, seperti gambar Wali Songo, Khulafa' al-Rasyidin, Imam al-Ghazali, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, Buroq dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat luas, gambar-gambar tersebut telah terpasang di dinding rumah, mushalla dan madrasah. Banyak orang menganggap bahwa gambar itu memang sosok dari diri para ulama tersebut, meski mereka tahu pada masa itu belum ada alat fotografi atau pelukis yang

popular dalam dunia seni. Bahkan ada satu pengamat seni yang memvonis bahwa gambar itu adalah hasil imajinasi, dengan bukti lukisan tentang Sunan Kalijogo yang memakai blangkon, padahal pada masa itu belum ditemukan tutup kepala berupa blangkon.

Pertanyaan

Bagaimanakah hukum menuangkan imajinasi tentang sosok wajah tertentu dalam lukisan sekaligus melengkapi nama dan atributnya?

Jawaban

Hukumnya haram karena menuangkan imajinasi dalam bentuk lukisan mengandung unsur *kadzib* (kebohongan).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin* pada *Fath al-Mu'in*, III/224:

(قَوْلُهُ: الْكَذِبُ حَرَامٌ) أَيْ سَوَاءٌ أَثْبَتَ بِهِ مَنْفِيًّا، كَأَنْ يَقُوْلَ وَقَعَ كَذَا لِمَا لَمْ يَقَعْ، أَوْ نَفَى بِهِ مُثْبَتًا، كَأَنْ يَقُوْلَ لَمْ يَقَعْ لِمَا وَقَعَ، وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِلْإِيْمَانِ مُعَرِّضٌ صَاحِبَهُ لِلَعْنَةِ الرَّحْمنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْكَذِبُ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ اهـ

(Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dusta itu haram"*), maksudnya baik menetapkan sesuatu yang dinafikan, seperti berkata: telah terjadi suatu peristiwa padahal kenyataannya tidak terjadi, atau meniadakan sesuatu yang tetap seperti berkata: tidak ada peristiwa yang terjadi padahal kenyataannya ada peristiwa yang telah terjadi. Kedustaan ini adalah melawan iman yang berarti berpaling pada pemiliknya, karena laknat ar-Rahman berdasarkan firman Allah: *"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta."* dan sabda Nabi ﷺ: *"Sungguh kejujuran menunjukkan pada kebaikan dan kebaikan menunujukkan pada surga, sedangkan kedustaan menunjukkan pada neraka."*

b. *Bulugh al-Amniyah*, 239:

حَاصِلُ مَا فِي اتِّخَاذِ الصُّوَرِ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَجْسَامٍ حَرُمَ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ رَقْمًا فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ الْجَوَازُ مُطْلَقًا لِظَاهِرِ حَدِيْثِ الْبَابِ وَالْمَنْعُ مُطْلَقًا حَتَّى الرَّقْمِ وَالتَّفْصِيْلُ فَإِنْ كَانَتِ الصُّوْرَةُ بَاقِيَةَ الْهَيْئَةِ قَائِمَةَ الشَّكْلِ حَرَامٌ وَإِنْ قَطَعَ الرَّأْسَ وَتَفَرَّقَتِ الْأَجْزَاءُ جَازَ قَالَ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَالرَّابِعُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْتَهَنُ جَازَ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا فَلَا اهـ

Kesimpulan hukum tentang membuat gambar adalah, bila berupa *jisim* maka haram menurut *ijma'*; jika berupa tulisan, maka ada empat pendapat; yaitu: 1) boleh secara mutlak karena lahiriah hadits tentang bab ini, 2) dilarang secara mutlak hingga berupa tulisan, 3) *tafshil*, jika gambar bertahan lama dan tegak bentuknya maka haram, sedangkan jika kepalanya dipotong dan anggota tubuh dipisah-pisah maka hukumnya boleh. Ibn 'Arabi berkata: *"Pendapat ini merupakan qaul ashah-*, 4) jika termasuk benda yang terhina maka boleh, dan jika digantung maka tidak boleh.

KOMISI B

410. Konversi BBM Menjadi Gas Elpiji

Deskripsi Masalah

Harga minyak dunia cenderung naik dan berakibat subsidi APBN untuk pengadaan kebutuhan bahan bakar minyak sangat membebani negara. Penggunaan gas elpiji telah menjadi kenyataan dan diikuti ledakan tabung yang menelan korban manusia dan kebakaran rumah tinggal atau lokasi kerja. Faktor kesalahan teknis dan ulah manusia menjadi kambing hitam ledakan. Kompensasi terhadap dampak korban manusia dan material tak jelas jaminan hukumnya.

Dalam pandangan agama pihak pengambil kebijakan (dalam hal ini Pemerintah) konversi BBM menjadi gas elpiji harus menanggung resiko atas dasar *"dhamman al-mujtama'"*. Namun kenyataannya konversi yang dipaksakan itu tidak diimbangi dengan sistem jaminan hukum yang melindungi rakyat.

Pertanyaan

a. Landasan legitimasi (dalil) syari'at manakah yang mendukung langkah Pemerintah mengambil kebijakan konversi BBM menjadi gas elpiji?
b. Sumber minyak bumi tersedia di Indonesia, tetapi lewat mekanisme pasar harus dilakukan pembelian minyak ke produsen dan muncullah subsidi APBN. Olah *tasharruf* terhadap sumber kekayaan alam oleh negara seharusnya berpihak pada kepentingan siapa menurut Islam?
c. Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap resiko (dampak) dari kebijakan konversi BBM menjadi gas elpiji menurut pandangan Islam?

Jawaban

a. Menjaga keseimbangan dan efisiensi penggunaan APBN dan menjaga kestabilan sumber daya alam termasuk kemaslahatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah.
b. Kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan rakyat.
c. Sebenarnya bukan tanggung jawab langsung pemerintah karena *mafsadah* itu timbul bukan karena akibat langsung kebijakan, namun sebaiknya pemerintah memberikan payung hukum yang melindungi kepentingan rakyat (konsumen) dan jaminan asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, 83:

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ اهـ

Kaidah kelima: Kebijakan imam terhadap rakyat digantungkan pada *maslahat*. Kaidah ini dijelaskan oleh asy-Syafi'i, beliau berkata: *"Derajat imam dihadapan rakyat menempati derajat wali dihadapan anak yatim."*

b. *Al-Mawahib as-Saniyah*, 185:

فَيَلْزَمُ الْإِمَامُ وَنَحْوُهُ فِي التَّصَرُّفِ عَلَى الْأَنَامِ مَنْهَجٌ أَيْ طَرِيقُ الشَّرْعِ الْوَفِيِّ فَمَا حَلَّلَهُ فَعَلَهُ وَمَا حَرَّمَهُ تَرَكَهُ فَيَحْفَظُ أَمْوَالَ الْغَائِبِيْنَ وَيَفْعَلُ فِيْهَا مَا فِيْهِ الْمَصْلَحَةُ اهـ

Wajib bagi imam dan sesamanya dalam *tasharruf* pada manusia sesuai jalur maksudnya jalur *syara'* yang sempurna. Sebuah kebijakan yang dihalalkan *syara'*, boleh dikerjakan imam. Sedangkan perkara yang diharamkan *syara'* maka harus ditinggalkannya. Sehingga imam harus melindungi harta-harta orang yang gaib dan mengerjakan perkara yang ada maslahatnya.

c. *Ushul al-Fiqh li Abi Zahra'*, 279:

قَرَّرَ كُلُّ مَصْلَحَةٍ تَكُوْنُ مِنْ جِنْسِ الْمَصَالِحِ الَّتِي يُقَرِّرُهَا الشَّارِعُ الْإِسْلَامِيُّ بِأَنْ يَكُوْنَ فِيْهَا مُحَافَظَةٌ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الدِّيْنِ أَوِ النَّسْلِ أَوِ الْمَالِ وَلَكِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ حَتَّى تَصْلُحَ قِيَاسًا فَإِنَّهَا يُؤْخَذُ بِهَا عَلَى دَلِيْلٍ قَائِمٍ بِذَاتِهِ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِيْ تُسَمَّى مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً أَوِ اسْتِصْلَاحًا اهـ

Menetapkan setiap maslahat dari jenis-jenis maslahat yang ditetapkan syari'at Islam; yaitu melindungi nyawa, agama, keturunan atau harta. Akan tetapi maslahat ini tidak disaksikan oleh dalil tertentu, sehingga bisa diqiyaskan; karena sungguh maslahat diadopsi pada sebuah dalil yang tegak pada dzatnya. Maslahat ini disebut dengan maslahat *mursalah* atau *istishlah*.

d. *Tafsir al-Qurthubi*, IX/203:

الثَّانِيَةُ: هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ فِي الْقَوْلِ بِالْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِيْ هِيَ حِفْظُ الْأَدْيَانِ وَالنُّفُوْسِ وَالْعُقُوْلِ وَالْأَنْسَابِ وَالْأَمْوَالِ فَكُلُّ مَا تَضَمَّنَ تَحْصِيْلَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُوْرِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ شَيْئًا مِنْهَا فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَقْصُوْدَ الشَّرَائِعِ إِرْشَادُ النَّاسِ إِلَى مَصَالِحِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ لِيَحْصُلَ لَهُمُ التَّمَكُّنُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى وَعِبَادَتِهِ الْمُوْصِلَتَيْنِ إِلَى السَّعَادَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ، وَمُرَاعَاةُ ذَلِكَ فَضْلٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَحْمَةٌ رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ، مِنْ غَيْرِ وُجُوْبٍ عَلَيْهِ، وَلَا اسْتِحْقَاقٍ؛ هَذَا مَذْهَبُ كَافَّةِ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَجْمَعِيْنَ وَبَسْطُهُ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ اهـ

Kedua: Ayat ini merupakan asal menurut *qaul* dengan maslahat-maslahat *syar'iyyah*; yaitu: menjaga agama, akal, nasab, dan harta. Setiap perkara yang bisa menghasilkan tujuan ini disebut maslahat, sedangkan setiap perkara yang meninggalkan tujuan ini disebut *mafsadah*; sementara menolak *mafsadah* merupakan maslahat. Tidak ada khilaf sungguh maksud syariat adalah menunjukkan manusia pada maslahat di dunia agar mereka sanggup mengenal Allah dan ibadah kepada-Nya yang mengantarkan kebahagiaan ukhrawi.

وَمُرَاعَاةُ ذَلِكَ فَضْلٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَحْمَةٌ رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ، مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ عَلَيْهِ، وَلَا اسْتِحْقَاقٍ، هَذَا مَذْهَبُ كَافَّةِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَجْمَعِينَ وَبَسْطُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ اهـ

Menjaganya merupakan anugerah dari Allah ﷻ dan rahmat Allah pada hamba-hamba-Nya tanpa kewajiban dan tidak menyatakan. Ini adalah *madzhab* seluruh *muhaqqiqin* dari semua *ahli sunnah* dan pengembangannya dalam *ushul fikih*.

e. *Al-Mustashfa*, I/286-287:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ اهـ

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ اهـ

Adapun maslahat ialah ibarat asal tentang menarik manfaat atau menolak *madlarat*. Kita tidak bermaksud demikian. Karena sungguh menarik manfaat dan menolak *madlarat* merupakan tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk dalam menghasilkan tujuan-tujuan mereka, akan tetapi maksud maslahat adalah menjaga maksud *syara'*. Maksud *syara'* terhadap makhluk ada lima; yaitu: menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang mengandung perlindungan lima

asal ini merupakan bentuk maslahat, sedangkan setiap perkara yang meninggalkan asal-asal ini merupakan *mafsadah* dimana menolaknya merupakan maslahat.

411. Membunuh Karena Mencari Selamat dan Kadar *Diyat* Uang

Deskripsi Masalah

Beberapa waktu yang lalu negeri kita digemparkan dengan kasus Darsem, seorang TKW asal Subang yang akan dihukum pancung karena tuduhan membunuh di Arab Saudi. Dalam pembelaannya Darsem terpaksa membunuh, karena akan diperkosa oleh majikannya. Vonis pengadilan menyatakan, bahwa Darsem terbukti bersalah telah membunuh majikannya, seorang warga negara Yaman pada Desember 2007. Sidang pengadilan di Riyadh pada 6 Mei 2009, menjatuhkan hukuman pancung bagi Darsem. Namun, Darsem akhirnya lolos dari eksekusi mati setelah mendapat pengampunan dari keluarga korban dengan syarat yang cukup berat untuk ditanggung terpidana.

Pada 7 Januari 2011, ahli waris korban diwakili Asim bin Sali Assegaf bersedia memberikan maaf (*tanazul*) kepada Darsem, dengan kompensasi uang *diyat* sebesar SAR 2 juta, atau sekitar Rp 4,7 miliar.

Pertanyaan

a. Menurut tinjauan fiqh dapatkah alasan Darsem membunuh untuk menghindari pemerkosaan dibenarkan?
b. Atas hak meminta uang kompensasi *diyat*, adakah batas maksimal jumlah *diyat* yang diminta oleh ahli waris korban?
c. Kompensasi uang *diyat* yang tidak sedikit, menjadi tanggungjawab siapa, bila keluarga yang bersangkutan tidak mampu membayar?

Jawaban

a. Apabila yang dilakukan Darsem dalam rangka menghindarkan pemerkosaan yang sedang terjadi maka di*tafsil*:
    1) Bila terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada pemerkosaan (seperti meraba, mencium dan lain-lain) pembunuhan dalam rangka membela diri dibenarkan setelah melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan seperti membentak, berteriak, memukul dll.
    2) Bila pelaku sudah memasukkan Mr. 'p' ke dalam Miss 'v' maka pembunuhan bisa langsung dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan menurut *qaul dlaif*.
    3) Bila yang dilakukan Darsem itu tidak di saat kejadian pemerkosaan maka termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkan *syara'*.

b. Bila tindakan Darsem termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkan *syara'* maka maksimal *diyat* yang harus dibayarkan adalah 100 onta.
c. *Musyawirin* menganggap tidak perlu untuk membahasnya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin*, IV/192:

(وَلْيَدْفَعِ) الصَّائِلَ الْمَعْصُوْمَ (بِالْأَخَفِّ) فَالْأَخَفِّ (إِنْ أَمْكَنَ) كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ بِكَلَامٍ فَاسْتِغَاثَةٍ أَوْ تَحَصُّنٍ بِحَصَانَةٍ فَضَرْبٍ بِيَدِهِ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا فَقَطْعٍ فَقَتْلٍ لِأَنَّ ذٰلِكَ جُوِّزَ لِلضَّرُوْرَةِ وَلَا ضَرُوْرَةَ لِلْأَثْقَلِ مَعَ إِمْكَانِ الْأَخَفِّ، فَمَتَى خَالَفَ وَعَدَلَ إِلَى رُتْبَةٍ مَعَ إِمْكَانِ الْإِكْتِفَاءِ بِدُوْنِهَا ضَمِنَ بِالْقَوَدِ وَغَيْرِهِ. نَعَمْ: لَوِ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ عَنِ الضَّبْطِ سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيْبِ وَمَحَلُّ رِعَايَةِ التَّرْتِيْبِ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَهُ بِالْقَتْلِ وَإِنِ انْدَفَعَ بِدُوْنِهِ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَنَاةِ. اهـ

(Dan lawanlah) orang yang melakukan tindak kejahatan yang terjaga (dengan ringan) kemudian agak ringan (jika mungkin) seperti lari, lalu mencegah dengan ucapan, lalu minta tolong atau menjaga diri dengan kekebalan, lalu memukul dengan tangan, lalu dengan cemeti lalu dengan tongkat, lalu menusuk, lalu membunuh. Perlawanan itu diperbolehkan karena darurat, dan tidak ada darurat melawan dengan perlawanan yang berat apabila memungkinkan melawan dengan perlawanan yang ringan. Apabila menyalahi aturan dan berpindah menuju tingkatan berat apabila mungkin mencukupkan tanpanya, maka menanggung *qishahs* dan lainnya. Ya, jika perlawanan tersebut berakibat pembunuhan di antara keduanya dan urusannya menjadi gawat melebihi batas wajar, maka gugurlah menjaga tertib. Tempat menjaga tertib juga di selain kasus *fahisyah*; sehingga apabila melihat seseorang berzina pada wanita lain, maka dibolehkan memulai pembunuhan meskipun bisa menolak tanpanya; karena di setiap masa ada kejadian-kejadian yang tidak bisa ditoleransi.

b. *Asna al-Mathalib*, IV/166:

(يَجُوْزُ) لِلْمَصُوْلِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ (دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ مِنْ آدَمِيٍّ) مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حُرٍّ أَوْ رَقِيْقٍ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَبَهِيْمَةٍ عَنْ كُلِّ مَعْصُوْمٍ مِنْ نَفْسٍ وَطَرَفٍ) وَمَنْفَعَةٍ (وَبُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ) مِنْ تَقْبِيْلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَنَحْوِهَا (وَمَالٍ وَإِنْ قَلَّ) نَعَمْ لَوْ مَالَ مُكْرَهًا عَلَى

إِتْلَافِ مَالِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمَالِكَ إِنْ بَقِيَ رُوحُهُ بِمَالِهِ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْمُضْطَرُّ طَعَامَهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا دَفْعُ الْمُكْرِهِ وَكَالْمَالِ الاخْتِصَاصَاتُ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ وَنَحْوِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَسِيطِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ أَتَى الدَّفْعُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَارَةٍ وَلَا قِيمَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِدَفْعِهِ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، وَالضَّمَانِ مُنَافَاةٌ اهـ

(Boleh) bagi *mashul alaih* dan lainnya (menolak setiap orang yang membuat sial dari anak Adam) baik muslim atau kafir, merdeka atau budak, *mukallaf* atau lainnya (dan binatang dari setiap orang yang terjaga dari nyawa atau anggota tubuh), manfaat, (kemaluan, *muqaddimah-muqaddimah*nya) dari mencium, memeluk dan sesamanya (dan harta meskipun sedikit). Ya, jika condong pada orang yang dipaksa merusak harta orang lain maka tidak boleh menolaknya. Tapi *malik* wajib menolak jika nyawanya masih tetap dengan hartanya, seperti orang yang terpaksa memperoleh makanannya. Masing-masing keduanya boleh menolak orang yang memaksa. Sebagaimana harta ialah *ikhtishhash* dari kulit bangkai dan sesamanya, sebagaimana tuntutan kalam *al-Bashit* dan lainnya. Jika seseorang menolak sendiri maka tidak ada tanggungan *qishahs*, *diyat*, *kafarat*, dan *qimah* sebagaimana dijelaskan asal; karena ia diperintah menolaknya dan di antara perintah membunuh, sementara tanggungan itu menafikan.

c. *Mughni al-Muhtaj*, IV/138:

الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَ الصَّائِلُ يَنْدَفِعُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْمَصُولُ عَلَيْهِ لَا يَجِدُ إِلَّا السَّيْفَ فَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ الضَّرْبَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ إِلَّا بِهِ وَلَيْسَ بِمُقَصِّرٍ فِي تَرْكِ اسْتِصْحَابِ السَّوْطِ وَنَحْوِهِ اهـ

Ketiga: Jika ada orang yang melakukan tindak pidana maka harus dilawan dengan cemeti dan tongkat. Jika korban tidak menemukan senjata selain pedang, menurut *qaul shahih* sungguh ia boleh menghantam dengannya; karena ia tidak bisa melawan kecuali dengannya serta ia tidak gegabah meninggalkan penggunaan cemeti dan sesamanya.

d. *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*, XXI/268:

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ رِعَايَةِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ إِلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ وَ الْمُعْتَمَدُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ حَتَّى فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُحْصَنًا اهـ

(Ungkapan Zakariya al-Anshari: "*Menjaga tertib di selain kasus fahisyah*

... ") Pendapat ini lemah, menurut *mu'tamad* harus menjaga tertib hingga hal itu meskipun *muhshan* (terjaga).

e. *Nihayah az-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, 358:

أَمَّا الْمُهْدَرُ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ بِشَرْطِهِ وَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ، فَلَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ هَذَا التَّرْتِيبِ فِيهِ بَلْ لَهُ الْعُدُولُ إِلَى قَتْلِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ اهـ

Adapun *muhaddar* (orang yang tidak berguna) seperti pelaku zina *muhshan* dan *tarik ash-solat* dengan syaratnya, *kafir harbi* dan murtad, maka tidak wajib menjaga tertib ini; bahkan boleh berpindah pada pembunuhan karena tidak ada kehormatan selama tidak ada semisalnya.

f. *Fath al-Qarib al-Mujib*, I/131:

(فَصْلٌ): فِي بَيَانِ الدِّيَةِ وَهِيَ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى حُرٍّ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ (وَالدِّيَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ) وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا (فَالْمُغَلَّظَةُ) بِسَبَبِ قَتْلِ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَمْدًا (مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ) وَالْمِائَةُ مُثَلَّثَةٌ (ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً) وَسَبَقَ مَعْنَاهُمَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ (وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَبِالْفَاءِ وَفَسَّرَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ (فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَرْبَعِينَ حَوَامِلُ وَيَثْبُتُ حَمْلُهَا بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْإِبِلِ (وَالْمُخَفَّفَةُ) بِسَبَبِ قَتْلِ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ (مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ) وَالْمِائَةُ مُخَمَّسَةٌ (عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ) وَمَتَى وَجَبَتْ لِلْإِبِلِ عَلَى قَاتِلٍ أَوْ عَاقِلَةٍ أُخِذَتْ مِنْ إِبِلِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ فَتُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إِبِلِ بَلْدَةٍ بَلَدِيٍّ، أَوْ قَبِيلَةٍ بَدَوِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ أَوِ الْقَبِيلَةِ إِبِلٌ فَتُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إِبِلِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَى مَوْضِعِ الْمُؤَدِّي (فَإِنْ عَدِمَتِ الْإِبِلُ انْتَقَلَ إِلَى قِيمَتِهَا) وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى فَإِنْ أُعْوِزَتِ الْإِبِلُ انْتَقَلَ إِلَى قِيمَتِهَا هَذَا مَا فِي الْقَوْلِ الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ (وَقِيلَ) فِي الْقَدِيمِ (يَنْتَقِلُ إِلَى أَلْفِ دِينَارٍ) فِي حَقِّ أَهْلِ الذَّهَبِ (أَوْ) يَنْتَقِلُ إِلَى (اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) فِي حَقِّ أَهْلِ الْفِضَّةِ، وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَالْمُخَفَّفَةُ (وَإِنْ غُلِّظَتْ) عَلَى الْقَدِيمِ (زِيدَ عَلَيْهَا الثُّلُثُ) أَيْ قَدْرُهُ فَفِي الدَّنَانِيرِ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَفِي الْفِضَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (وَتُغَلَّظُ دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ) أَحَدُهَا (إِذَا قُتِلَ فِي الْحَرَمِ) أَيْ حَرَمِ

مَكَّةَ أَمَّا الْقَتْلُ فِيْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ أَوِ الْقَتْلُ فِيْ حَالِ الْإِحْرَامِ، فَلَا تُغَلَّظُ فِيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالثَّانِيْ مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (أَوْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ) أَيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبَ وَالثَّالِثُ مَذْكُوْرٌ فِيْ قَوْلِهِ (أَوْ قَتَلَ) قَرِيْبًا لَهُ (ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ) بِسُكُوْنِ الْمُهْمَلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الرَّحِمُ مَحْرَمًا لَهُ كَبِنْتِ الْعَمِّ فَلَا تَغْلِيْظَ فِيْ قَتْلِهَا (وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ) وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ) نَفْسًا وَجُرْحًا، فَفِيْ دِيَةِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ فِيْ قَتْلِ عَمْدٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ خَمْسُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسَةَ عَشَرَ حِقَّةً، وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَذَعَةً وَعِشْرُوْنَ خَلِفَةً إِبِلًا حَوَامِلَ، وَفِيْ قَتْلِ خَطَإٍ عَشْرُ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَعَشْرُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَعَشْرُ بَنِيْ لَبُوْنٍ، وَعَشْرُ حِقَاقٍ وَعَشْرُ جِذَاعٍ (وَدِيَةُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ) وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُعَاهَدِ (ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) نَفْسًا وَجُرْحًا اهـ

(Pasal) Penjelaskan *diyat*; yaitu: harta yang wajib dibayar sebab terlibat kasus *jinayat* (kriminal) pada orang merdeka dalam menghilangkan nyawa atau melukai anggota tubuh (*diyat* ada dua macam: *mughalladhah* dan *mukhaffafah*) tidak ada ketiganya. (*Diyat mughalladhah*) sebab membunuh laki-laki merdeka, muslim secara sengaja (adalah 100 onta) dan 100/3 (30 *hiqqah* dan 30 *jadzah*) makna keduanya telah dijelaskan dalam kitab pembahasan zakat (dan 40 *khalifah*) dengan fathah *kha'* yang dikosongkan dari titik, kasrah *lam* dan dengan *fa'*. *Mushannif* menjelaskan dengan ungkapan (di perutnya ada anak-anaknya), artinya sungguh 40 itu hamil dan kehamilannya menurut prosedur dokter onta. (Dan *diyat mukhaffafah*) sebab membunuh laki-laki merdeka, muslim (adalah 100 onta) dan 100/5 (20 *hiqqah*, 20 *jadzah*, 20 *bintu labun*, 20 *ibn labun*, dan 20 *bintu makhadz*). Ketika wajib membayar onta bagi orang yang membunuh atau *aqilah* maka diambilkan dari onta orang yang wajib baginya. Jika tidak terdapat onta padanya maka diambilkan dari onta umum ibukota negara, atau Kabilah Baduwi. Jika tidak terdapat onta di negara atau kabilah itu maka diambilkan dari onta umum negara tetangga orang yang menunaikan. (Jika tidak terdapat onta maka berpindah pada *qimah*nya). Dalam naskah lain; Jika onta dibutuhkan maka berpindah pada *qimah*nya. Perpindahan ini menurut *qaul jadid* yaitu pendapat *shahih*. (Menurut satu pendapat) dalam *qaul qadim* (berpindah pada 1000 dinar) dalam hak ahli emas (atau) berpindah pada (12.000 dirham) dalam hak ahli perak; baik dalam perkara yang disebutkan *diyat mughalladhah* maupun *mukhaffafah*; (Jika berat) menurut *qaul qadim* (maka ditambah 1/3 padanya) maksudnya kadarnya. Maka dalam dinar-dinar ialah 1.333 dinar dan 1/3 dinar, sedangkan dalam perak ialah 16.000 dirham. (Memberatkan *diyat khata'* ada tiga

tempat) Pertama, (apabila dibunuh di Tanah Haram) maksudnya Haram Makkah. Sedangkan pembunuhan di tanah haram Madinah atau pembunuhan ketika kondisi *ihram*, maka tidak ada pemberatan menurut *qaul ashah*. Kedua, disebutkan dalam ungkapan *mushannif* (atau dibunuh pada bulan-bulan haram) yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ketiga, disebutkan dalam ungkapan *mushannif*. (Atau dibunuh) di dekatnya (memiliki *rahim muhrim*) dengan membaca sukun huruf yang tidak dititik; jika *rahim* bukan *muhrim* baginya seperti *bintul am*, maka tidak ada pemberatan dalam membunuhnya. (*Diyat* wanita) dan *khuntsa musykil* (adalah setengah dari *diyat* laki-laki), baik menghilangkan nyawa maupun melukai, maka *diyat* wanita merdeka, muslimah dalam pembunuhan terencana, atau serupa direncanakan adalah 50 onta; 15 *hiqqah*, 15 *jadzah* dan 20 *khalifah* onta hamil. Adapun membunuh karena *khata'* (tidak sengaja) adalah 10 bintu *makhadz*, 10 *bintu labun*, 10 *banu labun*, 10 *hiqqah* dan 10 *jadz'ah* (*diyat* Yahudi, Nasrani), *musta'man* dan *mu'ahad* (adalah sepertiga *diyat* muslim), baik menghilangkan nyawa maupun melukai anggota tubuh.

412. Kebohongan Publik

Deskripsi Masalah

Prinsip kerja *waliyyu al-amri* adalah amanah (dapat dipercaya dalam memikul mandat) dan berlaku adil. Selebihnya moral lembaga negara (aparatur) tidak mendorong rakyat untuk bermaksiat. Fakta di lapangan tidak sepenuhnya demikian. Kesan pencitraan mudah terbaca betapa informasi kepada publik diwarnai kebohongan yang dikemas seakan benar adanya.

Praktek pencontohan moral tersebut jelas mengindikasikan bahwa aparatur *waliyyu al-amri* melegalkan penyampaian informasi kepada publik diwarnai kebohongan (tidak sesuainya berita dengan fakta).

Pertanyaan

a. Apakah berbohong/berdusta berlaku toleransi (*rukhshah*) sekira yang melakukannya adalah pihak Pemerintah?
b. Sudah sampaikah derajat kebohongan publik yang dilakukan oleh Pemerintah pada batas "مَا لَمْ يُؤَدِّ بِمَعْصِيَةٍ"?
c. Cukup memadaikah bila kebohongan publik itu menjadi bukti penodaan atas sumpah jabatan?

Jawaban

a. Apabila berbohong yang dimaksud itu sebagaimana pengertian *syar'i* maka tidak ada toleransi/tidak boleh.

b. Belum sampai pada katagori "مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ".
c. Tergantung bentuk kebohongan dan materi sumpah jabatannya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin*, III/288:

(فَائِدَةٌ) اَلْكَذِبُ حَرَامٌ، وَقَدْ يَجِبُ: كَمَا إِذَا سَأَلَ ظَالِمٌ عَنْ وَدِيْعَةٍ يُرِيْدُ أَخْذَهَا فَيَجِبُ إِنْكَارُهَا وَإِنْ كَذَبَ (قوله: وَقَدْ يَجِبُ الخ) قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ، وَالضَّابِطُ فِيْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَقْصُوْدٍ مَحْمُوْدٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيْعًا، فَالْكَذِبُ فِيْهِ حَرَامٌ أَوْ بِالْكَذِبِ وَحْدَهُ فَمُبَاحٌ إِنْ أُبِيْحَ تَحْصِيْلُ ذَلِكَ الْمَقْصُوْدِ. وَوَاجِبٌ إِنْ وَجَبَ، كَمَا لَوْ رَأَى مَعْصُوْمًا اخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيْدُ قَتْلَهُ أَوْ إِيْذَاءَهُ لِوُجُوْبِ عِصْمَةِ دَمِهِ أَوْ سَأَلَهُ ظَالِمٌ عَنْ وَدِيْعَةٍ يُرِيْدُ أَخْذَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْكَارُهَا، وَإِنْ كَذَبَ، بَلْ لَوِ اسْتَحْلَفَ لَزِمَهُ الْحَلْفُ، وَيُوَرِّيْ، وَإِلَّا حَنِثَ، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ مَقْصُوْدُ حَرْبٍ أَوْ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ أَوِ اسْتِمَالَةِ قَلْبِ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ إِلَّا بِكَذِبٍ أُبِيْحَ، وَلَوْ سَأَلَهُ سُلْطَانٌ عَنْ فَاحِشَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ سِرًّا، كَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ، فَلَهُ أَنْ يَكْذِبَ وَيَقُوْلَ مَا فَعَلْتُ، وَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ سِرَّ أَخِيْهِ اهـ

(*Faidah*) Berdusta itu hukumnya haram, namun terkadang wajib seperti apabila seorang zhalim bertanya tentang barang titipan, ia bermaksud hendak mengambilnya; maka wajib mengingkari si zhalim meskipun dengan berdusta. (Ungkapan Zain ad-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari: *"dan terkadang wajib"*). Al-Ghazali berkata dalam *al-Ihya'*: *"Batasannya sungguh setiap maksud yang terpuji yang bisa dihasilkan dengan kejujuran dan kedustaan, maka diharamkan berdusta; atau berdusta saja maka boleh berdusta apabila diperbolehkan menghasilkan maksud itu, dan wajib berdusta apabila wajib menghasilkan maksud itu; sebagaimana jika melihat orang maksum yang hendak dibunuh atau disakiti orang zhalim, karena kewajiban menjaga darahnya; atau si zhalim bertanya tentang barang titipan dan bermaksud hendak merampasnya, maka sungguh orang yang ditanyai wajib mengingkarinya, meskipun dengan cara berdusta. Bahkan jika menuntut sumpah, maka wajib bersumpah dan merahasiakan. Jika tidak, maka ia menerjang sumpah, dan wajib membayar kafarat. Apabila maksud peperangan, upaya perdamaian pada orang yang bertikai atau kecondongan di samping korban tindak pidana tidak sempurna kecuali dengan kedustaan maka diperbolehkan. Jika sulthan menuntut berbuat keji secara rahasia seperti zina dan minum khamr, maka boleh mendustakan dan berkata saya tidak mengerjakan dan boleh mengingkari rahasia saudaranya."*

b. *Ihya' Ulumiddin*, II/332:

بيان ما رخص فيه من الكذب. اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه، وربما كان واجبا. قال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى إليك فقال: أرأيت فلانا؟ ما كنت قائلا؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به. وهذا الكذب واجب. فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا، كما أن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة اهـ

Keterangan hal-hal yang di*rukhshah* melakukan kedustaan. Ketahuilah sungguh berdusta itu tidak haram karena *'ain*nya, akan tetapi karena terdapat bahaya pada *mukhatab* atau orang lain, maka sungguh derajat paling rendah ialah *mukhbir* meyakini sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, maka ia *jahil*. Terkadang dusta berkaitan dengan bahaya terhadap orang lain. Banyak kebodohan yang terdapat manfaat dan *maslahat*, sehingga dusta yang menghasilkan kebodohan itu diizini, dan bahkan terkadang wajib. Maimun bin Mahran berkata: *"Dusta dalam sebagian tempat lebih baik daripada jujur, apa kamu melihat jika seorang lelaki berjalan dibelakang manusia dengan membawa pedang untuk membunuhnya, lalu ia masuk rumah kemudian sampai padamu, lalu lelaki itu berkata: "Apakah kamu melihat seseorang?" Aku tidak berkata: Apakah kamu tidak berkata: Aku tidak*

melihatnya?" Dan perkara yang benar dengannya. Kedustaan dalam kasus ini hukumnya wajib". Maka kita berkata: *"Kalam itu wasilah pada maksud-maksud; setiap maksud baik yang bisa dihasilkan dengan jujur dan dusta, maka diharamkan berdusta"*. Sedangkan jika mungkin dihasilkan dengan dusta bukan jujur, maka dibolehkan berdusta jika tujuannya mubah. Dusta diwajibkan jika tujuannya wajib, sebagaimana sungguh menjaga darah muslim itu wajib. Ketika kejujuran dapat menumpahkan darah seorang muslim yang dirahasiakan dari zhalim maka kedustaan itu wajib. Ketika maksud peperangan atau mendamaikan orang yang bertikai sungguh kecondongan hati *majni alaih* tidak sempurna kecuali dengan kedustaan, maka kedustaan itu boleh. Kecuali sungguh sebaiknya menjaga dari kedustaan selama mungkin. Karena apabila membuka pintu dusta pada dirinya maka dikhawatirkan menarik sesuatu yang bisa dicukupi dan perkara yang tidak teringkas pada batas darurat. Maka dusta itu haram menurut asal kecuali karena darurat.

413. Problem Jenazah dalam Peti

Deskripsi Masalah

Jenazah/mayat meninggal tidak berada di rumah, melainkan di perantauan. Ia dibawa pulang dalam keadaan sudah di dalam peti mati, sehingga kita tidak tahu cara *tajhiz*nya dan posisinya di dalam peti. Adakalanya ia berasal dari rumah sakit dalam negeri atau luar negeri, bahkan dari negeri non muslim, sedang kematiannya ada yang baru sehari, dua hari, seminggu atau beberapa minggu.

Pertanyaan

a. Apakah wajib membuka peti mati untuk melihat posisi mayat?
b. Apakah wajib kita melakukan *tajhiz* (memandikan dan mengafani)? Bagaimana jika mayat telah berubah (membusuk)?
c. Apabila mayat itu sebelum meninggal sering menceritakan, bahwa pekerjaannya merawat anjing, apakah diperlukan cara khusus untuk memandikannya?
d. Sahkah mensolatinya dalam posisi mayat di dalam peti tanpa dibuka?

Jawaban

a. Wajib membuka peti mati itu dalam rangka menjalankan kewajiban menghadapkan mayat ke arah kiblat. Kecuali apabila posisi mayat tersebut sudah dipastikan dalam keadaan menghadap kiblat ketika di masukan ke liang lahat.
b. Jika keadaan mayat menunjukkan sudah dimandikan, seperti sudah bersih dan dikafani, maka pihak keluarga tidak wajib memandikan dan mengkafani ulang.

c. Bila mayat itu diyakinkan belum disucikan dari najis *mughaladzah*-nya maka harus disucikannya. Apabila mayat tersebut diyakini pernah bersentuhan dengan najis *mughalladhah* akan tetapi ada kemungkinan sudah disucikan dengan benar, maka tidak wajib mensucikan mayat dari najis *mughallladhah*.

d. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i jika disolatkan di dalam masjid hukumnya sah meskipun petinya dipaku, apabila diluar masjid tidak sah apabila dipaku. Menurut pendapat sebagian ulama, hukumnya sah meskipun solatnya dilakukan bukan di masjid dan peti dalam keadaan tertutup rapat dengan dipaku.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj*, II/199:

(قَوْلُهُ فَلَوْ وُجِّهَ لِغَيْرِهَا) أَيْ وَلَوْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَشْمَلُ الْمُسْتَلْقِي فَلَا قُصُورَ فِي عِبَارَتِهِ ا هـ شَيْخُنَا. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ حَتْمًا إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَإِلَّا فَلَا وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِلْقِبْلَةِ. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ نَصُّهَا لَوْ جُعِلَ الْقَبْرُ مُمْتَدًّا مِنْ قِبْلِيٍّ إِلَى بَحْرِيٍّ وَأُضْجِعَ عَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَرُفِعَتْ رَأْسُهُ قَلِيلًا كَمَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يَحْرُمُ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَجِّ التَّصْرِيحَ بِالْحُرْمَةِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَيْضًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ اهـ

(Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Jika dihadapkan pada selainnya"*), maksudnya meskipun ke arah langit sehingga mencakup orang yang tidur telentang, maka tidak gegabah dalam ibaratnya. Demikian pernyataan *Syaikhuna*. Ungkapan *syarah* ar-Ramli as-Shaghir: *"Apabila jenazah dikubur membelakangi atau tidur telentang maka wajib digali jika tidak berubah. Jika tidak (sudah berubah) maka tidak wajib digali, dan agar tidak disangka bahwa ia bukan muslim; sebagaimana diketahui dari penjelasan yang akan datang"*. Demikian *ibarat syarah* Muhammad bin Ahmad (ar-Ramli as-Shaghir). (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Atau tidur telentang maka digali zhahirnya"*) meskipun ke arah kiblat. Ungkapan syaikh Amirah yang *nash*nya: *"Jika pemakaman dijadikan panjang dari arah kiblat ke arah laut, ditidurkan di atas punggungnya, tutup ke arah kiblat dan kepala mayat diangkat sedikit seperti dikerjakan pada orang yang hampir menemui ajal, apakah boleh melakukan demikian atau haram"*. Saya tidak melihat ulama yang menentangnya, menurut zhahir diharamkan, kemudian saya melihat di dalam haji ada

penjelasan keharaman juga; keterangan itu akan dijelaskan dalam kalam *syarih* juga setelah ungkapan *mushannif* dalam tambahan atau dikubur ke selain arah kiblat.

b. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, II/194:

(وَيُدْفَنُ فِي لَحْدٍ) وَهُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا وَسُكُونِ الْحَاءِ فِيهِمَا أَصْلُهُ الْمَيْلُ، وَالْمُرَادُ أَنْ يُحْفَرَ فِي أَسْفَلِ جَانِبِ الْقَبْرِ الْقِبْلِيِّ مَائِلًا عَنِ الِاسْتِوَاءِ قَدْرَ مَا يَسَعُ الْمَيِّتَ وَيَسْتُرُهُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ إِنْ صَلُبَتِ الْأَرْضُ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَرَ قَعْرَ الْقَبْرِ كَالنَّهْرِ وَيُبْنَى جَانِبَاهُ بِلَبِنٍ أَوْ غَيْرِهِ غَيْرَ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ بَيْنَهُمَا، أَمَّا الْأَرْضُ الرِّخْوَةُ فَالشَّقُّ فِيهَا أَفْضَلُ خَشْيَةَ الِانْهِيَارِ وَيُوضَعُ فِي اللَّحْدِ أَوْ غَيْرِهِ (مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ) وُجُوبًا تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُصَلِّي فَلَوْ وُجِّهَ لِغَيْرِهَا نُبِشَ وَوُجِّهَ لِلْقِبْلَةِ وُجُوبًا إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَإِلَّا فَلَا اهـ

(Dan dikubur di *lahdi*-liang-) dengan membaca *fathah lam* dan *dlommah*nya dan *sukun ha'* dalam keduanya, asalnya serong. Maksudnya digali di bawah sisi kubur menghadap kiblat dan serong dari *istiwa'* kira-kira luasnya memuat mayat dan bisa menutupinya; ini lebih utama daripada *asy-Syaqq*, dengan membaca *fathah* huruf yang tidak dititik, bila tanahnya padat, yaitu menggali dasar kubur seperti sungai dan membangun dua sisinya dengan bata atau lainnya yang tidak terkena api dan mayat diletakkan di antara keduanya. Adapun tanah yang berbatu maka membelahnya itu lebih utama karena takut runtuh dan mayat diletakkan dalam liang atau lainnya (menghadap kiblat) secara wajib dengan menempatkannya di tempat *mushalli*. Jika mayat dihadapkan ke selain arah kiblat, maka harus digali dan wajib dihadapkan ke arah kiblat jika tidak berubah; dan jika tidak (sudah berubah) maka tidak wajib.

c. *Thariq al-Hushul fi Ghayah al-Wushul*, 71-73:

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ فَرْضَ الْكِفَايَةِ (عَلَى الْكُلِّ) لِإِثْمِهِمْ بِتَرْكِهِ كَمَا فِي فَرْضِ الْعَيْنِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ (وَيَسْقُطُ) ... وَقِيلَ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عَلَى الْبَعْضِ لَا الْكُلِّ وَرَجَّحَهُ الْأَصْلُ وِفَاقًا بِزَعْمِهِ لِلْإِمَامِ الرَّازِيِّ لِلِاكْتِفَاءِ بِحُصُولِهِ مِنَ الْبَعْضِ وِلِآيَةِ: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ... فَعَلَى قَوْلِ الْكُلِّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ فَعَلَهُ أَوْ يَفْعَلُهُ سَقَطَ عَنْهُ وَمَنْ لَا فَلَا. وَعَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَفْعَلْهُ وَلَا يَفْعَلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا فَلَا اهـ

(Menurut *qaul ashah* sungguh hukumnya), maksudnya *fardhu kifayah* (itu bagi setiap individu) karena dosa jika meninggalkannya, sebagaimana *fardhu ain*; dan karena firman Allah Ta'ala: *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah."* Ini yang dipedomani *jumhur ulama* dan di*nash* oleh asy-Syafi'i dalam *al-Umm*; (dan gugur) ... menurut suatu pendapat hukum *fardhu kifayah* itu bagi sebagian masyarakat bukan seluruhnya. Kitab asal-*Jam' al-Jawami'*- mengunggulkannya, sesuai prasangkanya kepada Imam ar-Razi karena cukup dihasilkan sebagian; dan karena ayat: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan"* ... Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa *fardhu kifayah* merupakan kewajiban setiap orang, maka orang yang menyangka bahwa orang lain telah mengerjakannya atau akan mengerjakannya, maka gugurlah *fardhu kifayah* darinya, sedangkan orang yang tidak menyangka demikian maka *fardhu kifayah* darinya tidak gugur darinya. Adapun berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa *fardhu kifayah* ialah kewajiban sebagian orang, maka orang yang menyangka orang lain belum mengerjakannya dan tidak akan mengerjakannya, maka ia wajib mengerjakannya; dan orang yang tidak menyangka demikian maka tidak wajib mengerjakannya.

d. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 15:

(مَسْأَلَةُ ي): خُذْ قَاعِدَةً يَنْبَغِي الْاِعْتِنَاءُ بِهَا لِكَثْرَةِ فُرُوْعِهَا وَنَفْعِهَا، وَهِيَ كُلُّ عَيْنٍ لَمْ تَتَيَقَّنْ نَجَاسَتُهَا لٰكِنْ غَلَبَتِ النَّجَاسَةُ فِيْ جِنْسِهَا، كَثِيَابِ الصِّبْيَانِ، وَجَهَلَةِ الْجَزَّارِيْنَ، وَالْمُتَدَيِّنِيْنَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالنَّجَاسَةِ كَأَكَلَةِ الْخَنَازِيْرِ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ فِيْهَا الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ. نَعَمْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ مَا احْتَمَلَ النَّجَاسَةَ عَلَى قُرْبٍ، وَكُلُّ عَيْنٍ تَيَقَّنَّا نَجَاسَتَهَا وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ ثُمَّ احْتَمَلَ طَهَارَتُهَا وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ لَا تُنَجِّسُ مُلَاقِيَهُ، فَحِيْنَئِذٍ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ دَكَاكِيْنِ الْجَزَّارِيْنَ وَالْحَوَانِيْتِ وَزَوَارِقِهِمُ الَّتِيْ شُوْهِدَتِ الْكِلَابُ تَلْحَسُهَا، أَوْ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ اللَّحْمِ أَوِ الْحُوْتِ الْمَوْضُوْعِ عَلَيْهَا، وَمَا لَاقَاهُ مِنْ أَبْدَانِ النَّاسِ إِلَّا إِنْ شُوْهِدَ مُلَاقَاتُهَا لِلنَّجَاسَةِ، فَتَكُوْنُ الْبُقْعَةُ الَّتِيْ لَحَسَهَا الْكَلْبُ نَجِسَةً، وَكَذَا مَا لَاقَاهَا يَقِيْنًا بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ إِخْبَارِ عَدْلٍ مَعَ الرُّطُوْبَةِ قَبْلَ احْتِمَالِ طُهْرِهَا بِمُرُوْرِ سَبْعِ جَرْيَاتٍ بِمَاءٍ بِتُرَابٍ طَهُوْرٍ، وَلَا يَتَعَدَّى حُكْمُهَا لِبَاقِي الدُّكَّانِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ لَحْمٍ وَحُوْتٍ وَغَيْرِهِمَا خَرَجَ مِنْ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ مَحْكُوْمٌ بِطَهَارَتِهِ، إِلَّا مَا تُيُقِّنَ مُلَاقَاتُهُ لِنَفْسِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ وَلَمْ يَشُقَّ وَيَعُمَّ الْاِبْتِلَاءُ بِهِ،

وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ أَيْضًا، قَالَهُ أَبُو قَضَامٍ وَخَالَفَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَفِي النِّهَايَةِ: وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَشُقُّ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِبًا يُعْفَى عَنْهُ اهـ

(Masalah Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya) Ambillah *kaidah* yang patut diperhatikan sebab banyak cabang masalah dan manfaatnya, yaitu setiap benda yang tidak diyakini najis akan tetapi umum najisnya dalam *jenis*nya seperti baju-baju anak kecil, kebodohan para penjagal dan kebodohan orang-orang non muslim yang beragama terhadap najis, sebagaimana para pemakan babi; menurut *qaul* yang lebih *rajih* ialah mengamalkan hukum asal, yaitu suci. Memang demikian, namun dimakruhkan menggunakan setiap perkara yang sangat berkemungkinan najis, dan setiap benda yang diyakini *najis*nya meskipun *mughalladhah* lalu kemungkinan kecil suci, maka tidak najis bertempelan dengannya. Dengan demikian toko tukang jagal, ikan-ikan dan perahu layar mereka yang disaksikan dijilati anjing, tidak dihukumi najis, atau tidak dihukumi najis daging atau ikan yang diletakkan di atasnya, dan badan-badan manusia yang menempel padanya kecuali jika menempelnya pada najis disaksikan, maka tempat yang dijilat anjing itu najis. Begitu pula barang yang diyakini menempelnya dengan persaksian atau berita orang adil serta basah sebelum kemungkinan sucinya dengan mengalirnya tujuh aliran air bersama debu yang suci-mensucikan, dan hukumnya tidak menular pada bagian toko yang lain apalagi sampai ke toko lainnya. Setiap daging, ikan dan lainnya yang keluar dari tempat-tempat seperti itu dihukumi suci, kecuali perkara yang diyakini menempel pada tempat yang terkena najis, dan tidak memberatkan serta sering terjadi, jika tidak maka di*ma'fu* juga, sebagaimana kata Abu Qadham, sementara Ibn Hajar menentangnya. Dalam *an-Nihayah* ada keterangan: *"Batasannya adalah setiap perkara yang sulit dihindari secara umum maka dima'fu"*.

e. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, I/1157:

(قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ) وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي صُنْدُوقٍ مَثَلًا صَحَّتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَرَدُّدٍ لِبَعْضِ الْيَمَانِيِّينَ اهـ ز ي فرع: قَالَ م ر: إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ بَابٌ مُسَمَّرٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بِبَعْضِ أَلْوَاحِهَا الَّذِي يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتِ الصَّلَاةُ اهـ فَأَوْرَدْتُ عَلَيْهِ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ

(Ungkapan Muhammad asy-Syirbini al-Khatib: *"Pada mayat ini"*) meski mayat berada di dalam peti, misalkan. Maka sah solat di atasnya, menurut *mu'tamad* dari *taraddud* sebagian ulama Yaman. Demikian pernyataan Nuruddin Ali az-Zayadi. (*Far'u*) Ar-Ramli as-Shaghir berkata: *"Apabila ada mayat di peti yang dipaku maka tidak sah menyolatinya, sebagaimana jika makmum berada di tempat yang antara makmum dan imam terdapat pintu yang dipaku. Bila tidak dipaku, meskipun sebagian papannya yang mampu digunakan untuk mengeluarkan mayit melewatinya maka sah menyolatinya."* Sekian kata ar-Ramli. Lalu aku memusykilkannya dengan kasus ketika peti tidak terpaku, namun sebagaimana pintu yang terbalik antara imam dan makmum, maka pasti tidak sah menyolatinya dalam kondisi seperti itu, sebagaimana tidak sah makmum dalam kondisi seperti itu bila berada di luar masjid.

f. *Fath al-Anam 'ala Syarh al-Mursyid al-Anam*, III/178:

وَمِنْهُ يُعْلَمُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الَّذِيْ يَضَعُوْنَهُ الْآنَ فِيْ صُنْدُوْقٍ وَيُسَمِّرُوْنَ عَلَيْهِ وَيَنْقُلُوْنَهُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى أُخْرَى هَذَا اهـ

Di antaranya diketahui bahwa sah mensolati mayat yang diletakkan di peti yang dipaku seperti yang berlaku pada saat ini, dan dipindahkan dari satu negara ke negara lain.

414. Belanja via Sales dan Zakatnya

Deskripsi Masalah

Sekarang ini banyak sekali sales yang berkeliling menawarkan dagangan mereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa. Biasanya para sales itu menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.

Pertanyaan

a. Dinamakan akad apakah transaksi semacam itu?
b. Siapakah yang wajib menzakati harta itu, apakah sales atau pemilik toko?

Jawaban

a. Bisa disebut:
   1) *Wakalah bil ju'li*, yakni pemilik barang mewakilkan kepada pihak toko untuk menjual dengan perjanjian mendapatkan bagian yang jelas dari hasil penjualan.
   2) *Bai' bitsaman muajjal*, yakni pemilik barang menjual kepada pihak toko dengan pembayaran secara tempo. Jika pada saat pembayaran masih ada sisa barang yang belum terjual, maka barang tersebut

tidak dapat dikembalikan kecuali dengan akad *istibdal*, yakni sisa barang dijadikan sebagai bagian dari *tsaman* yang harus dibayarkan dengan persetujuan dua pihak dengan syarat barang itu tidak rusak.

b. Dalam praktek *wakalah bil ju'li* maka yang wajib menzakati adalah sales barang. Dalam praktek *bai' bitsaman muajjal* yang wajib adalah pemilik toko.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Hawi al-Kubra*, IV/1187:

قال الماوردي: وهذا كما قال، وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوما، فلو قال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه أو من كل مائة درهم في ثمنه درهم لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله. فلو وكله في بيع ثوب بجعل معلوم فباعه بيعا فاسدا فلا جعل له لأن مطلق الإذن بالبيع يقتضي ما صح منه، فصار الفاسد غير مأذون فيه فلم يستحق جعلا عليه. فلو باعه بيعا صحيحا وقبض ثمنه وتلف الثمن في يده فله الأجرة لوجود العمل، وهذا بخلاف الصانع إذا استؤجر على خياطة ثوب أو قصارته فتلف في يده بعد عمله فلا أجرة له إن كان مشتركا. والفرق بينهما أن المقصود من الأجير تسليمه العمل المستحق في مقابلة العوض فما لم يحصل التسليم لم يجب ما في مقابلته من العوض. والمقصود من الوكيل وجود العمل المأذون فيه، فلو باع الوكيل الثوب فتلف الثوب في يده قبل تسليمه إلى مستحقه بطل البيع ولم يبطل جعل الوكيل لأن بطلانه بمعنى حادث بعد صحته فصار بالعمل موجودا منه وكان بخلاف وقوع البيع فاسدا. فلو سلم الثوب إلى مشتريه وقبض ثمنه فتلف في يده ثم استحق الثوب في يد المشتري الوكيل كان البيع فاسدا وللوكيل جعله لأن بطلانه ليس من جهة الوكيل، فصار مقصوده بالإذن مجرد العمل على وجه الصحة دون الصحة وقد وجد من الوكيل ذلك العمل اهـ

Al-Mawardi berkata: *"Ini seperti beliau berkata, sungguh kita menyebutkan bahwa perwakilan itu boleh dengan upah dan tanpa upah"*. Tidak sah upah kecuali diketahui, maka jika seseorang berkata: *"Sungguh aku mewakilkanmu dalam penjualan baju ini dengan upah sungguh sepersepuluh harganya atau dari setiap 100 dirham untukmu"*. Maka transaksi semacam ini tidak sah

karena besaran harga tidak diketahui, dan wakil berhak mendapatkan upah sepadan. Apabila seseorang mewakilkan pada orang lain dalam penjualan baju dengan upah yang diketahui, kemudian menjualnya dengan penjualan yang rusak maka wakil tidak berhak mendapatkan upah, karena kemutlakan izin penjualan itu menuntut keabsahan darinya. Maka penjualan yang rusak itu tidak diizini, sehingga wakil tidak berhak mendapatkan upah. Jika wakil menjual barang dengan penjualan yang sah dan menerima harganya lalu harga itu rusak di tangannya, maka ia berhak memperoleh upah karena wujudnya amal. Hal ini berbeda dengan pekerja apabila disewa untuk menjahit baju atau menyembelih kemudian rusak di tangannya setelah selesai kerja, maka ia tidak berhak mendapatkan upah jika *musytarak*. Perbedaan di antara dua kasus di atas ialah sungguh maksud dari *ajir*-buruh adalah menyerahkan amal yang berhak mendapatkan *iwadl* dalam bandingannya, sehingga perkara yang tidak menghasilkan penyerahan maka tidak wajib mendapatkan *iwadl* dalam bandingannya. Maksud dari wakil ialah wujudnya amal yang diizini. Jika wakil menjual baju kemudian baju itu rusak di tangannya sebelum diserahkan pada *mustahiq*nya maka penjualan itu batal, namun upah wakil tidak batal karena batalnya dengan arti baru setelah sahnya. Maka dengan amal itu menjadi wujud darinya; Hal ini berbeda dengan jatuhnya penjualan yang rusak. Jika seseorang menyerahkan baju kepada pembelinya dan menerima pembayarannya lalu rusak di tangannya, kemudian baju yang di tangan pembeli yang merupakan wakil seseorang itu terbukti merupakan milik orang lain, maka akad jual belinya rusak dan wakil tetap berhak atas upahnya. Sehingga maksudnya dengan izin hanyalah bekerja dengan benar pada akad yang sah, dan pekerjaan tersebut telah dilakukannya.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 312:

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ لِآخَرَ: بِعْ هَذَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكَ مِنْ رِبْحِهِ الرُّبُعُ مَثَلًا، فَسَدَتِ الْوَكَالَةُ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِجَهَالَةِ الْجُعْلِ، وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ، وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، رَبِحَ أَمْ لَا، وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِمَكَانِ كَذَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ كَذَا صَحَّ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ كَامِلًا بِإِتْيَانِهِ بِجَمِيعِ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَشْتَرِ مَا أُمِرَ بِهِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ قِسْطَهُ كَالْأَجِيرِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْعَمَلِ أَمْ لَا؟ كَالْجُعْلِ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ مَحَلُّ نَظَرٍ، نَعَمْ قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا حَكَاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيهِ عَنِ الْعِمْرَانِيِّ أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِحَمْلِ كِتَابٍ إِلَى آخَرَ وَرَدِّ جَوَابِهِ فَأَوْصَلَهُ وَلَمْ يَرُدَّ جَوَابَهُ فَلَهُ مِنَ

الْأُجْرَةَ بِقَدْرِ ذَهَابِهِ، بَلْ قَالَ الْقَاضِيْ: لَوْ وُجِدَ الْمَكْتُوْبُ إِلَيْهِ غَائِبًا اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ وَلَا عِبْرَةَ بِعُرْفٍ يُخَالِفُهُ اهـ وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيْلَ فِعْلُ مَا وُكِّلَ فِيْهِ، وَلَوْ بِجَعْلٍ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِشَرْطِهَا، وَيَجُوْزُ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَبَعْدَ الشِّرَاءِ، وَحِيْنَئِذٍ يُوْدِعُهُ أَمِيْنًا، وَلَا يَجُوْزُ رَدُّ الثَّمَنِ دَرَاهِمَ حَيْثُ لَا قَرِيْنَةَ ظَاهِرَةً تَدُلُّ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ، بَلْ يَضْمَنُهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا مَالِكُهَا، نَعَمْ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فِيْ غَيْبَةِ الْمَالِكِ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَالِ جَائِرٌ حَرُمَ الْعَزْلُ كَالْوَصِيِّ بَلْ لَا يَنْفُذُ حِيْنَئِذٍ اهـ

(Masalah) Seseorang berkata pada orang lain: *"Juallah barang ini di suatu tempat dan seperempat keuntungannya untukmu,"* misalkan; maka akad perwakilan ini rusak karena *shigha*nya rusak dengan upah yang tidak diketahui, dan *tasharruf*nya *nufudz* karena keumuman izin dan berhak memperoleh *ujrah mitsli*, baik untung atau tidak. Apabila seseorang mewakilkannya agar menjual di suatu tempat dan membeli barang dengan *tsaman*nya maka sah, dan berhak memperoleh upah sempurna dengan melaksanakan semua proses transaksi yang diperintahkan. Jika wakil menjual dan tidak membeli barang yang diperintahnya, maka apakah ia berhak memperoleh bagiannya seperti *ajir* bila sebagian amal sulit terlaksana atau tidak berhak? Sebagaimana upah, ia tidak berhak kecuali dengan amal yang sempurna; ini perlu dikaji. Bahwa persoalan pertama menguatkan keterangan yang diriwayatkan ibn Hajar dalam *Fatawi*nya dari al-Imrani: *"Sungguh apabila seseorang menyewa ajir agar membawakan surat kepada orang lain dan mengembalikan balasannya lalu wakil menyampaikannya dan tidak mengembalikan balasannya, maka ia berhak memperoleh upah dengan kadar berangkatnya"*. Bahkan Al-Qadli berkata: *"Jika ditemukan surat secara gaib (misterius), maka ia berhak memperoleh bagian; dan tidak ada ibrah dengan urf yang menyelisihinya."* Tidak wajib bagi wakil mengerjakan sesuatu yang diwakilkan padanya. Meskipun dengan menjadikan perkara yang tidak menggunakan lafal sewa beserta syaratnya. Boleh baginya melepaskan diri sebelum, setelahnya dan setelah pembelian. Dengan demikian, ia menitipkannya pada orang terpercaya. Tidak boleh mengembalikan *tsaman* dirham-dirham sekira tidak ada *qarinah* jelas yang menunjukkan padanya karena tidak ada izin, bahkan harus menanggungnya hingga *malik* menerimanya. Jika ia mengetahui sungguh bila ia melepaskan diri dalam kondisi gaibnya *malik*, maka ia menguasai harta tersebut secara menyimpang. Sehingga haram melepaskan diri seperti orang yang diwasiati, bahkan hal itu tidak *nufudz* ketika demikian.

c. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, III/137:

وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إِنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ : بِعْ هَذَا وَلَكَ دِرْهَمٌ . فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ اهـ

Disyaratkan menerima secara lafazh dalam persoalan bila perwakilan dengan upah jika ijab dengan *shighat* akad, bukan perintah; sebagaimana ungkapan: *"Juallah barang ini dan kamu akan memperoleh upah dirham, maka tidak disyaratkan menerima dan amal wakil terbatas karena perwakilan tersebut merupakan bentuk persewaan."*

d. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 131:

(مَسْأَلَةُ ي ك) الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ هُوَ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ نَقْدٌ فَهُوَ الثَّمَنُ وَالْآخَرُ الْمُثْمَنُ، وَإِنْ كَانَا نَقْدَيْنِ أَوْ عَرْضَيْنِ فَالثَّمَنُ مَا دَخَلَتْهُ الْبَاءُ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَنَ يَجُوزُ الْاِسْتِبْدَالُ وَهُوَ الْاِعْتِيَاضُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُثْمَنِ، زاد ي: وَشُرُوطُ الْاِسْتِبْدَالِ عَشَرَةٌ، كَوْنُهُ عَنِ الثَّمَنِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مُسْلَمًا فِيهِ وَلَا رِبَوِيًّا بِيعَ بِمِثْلِهِ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ لَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوِ الشَّرْطِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الْبَدَلُ حَالًا وَبِصِيغَةِ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ صَرِيحَةٍ كَأَبْدَلْتُكَ وَعَوَّضْتُكَ، أَوْ كِنَايَةٍ كَخُذْهُ وَأَنْ يُعَيِّنَ الْبَدَلَ فِي الْمَجْلِسِ، وَأَنْ يَقْبِضَهُ إِنِ اتَّفَقَ هُوَ وَالدَّيْنُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا لَا إِنِ اخْتَلَفَا كَذَهَبٍ بِأَرُزٍّ، وَأَنْ تَتَحَقَّقَ الْمُمَاثَلَةُ فِي رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ كَذَهَبٍ بِمِثْلِهِ، قَالَهُ (م ر) وَهُوَ الْأَحْوَطُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا يُشْتَرَطُ وَأَنْ لَا يَزِيدَ الْبَدَلُ عَلَى قِيمَةِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ بِبَلَدِهِ إِنْ وَجَبَ بِإِتْلَافٍ أَوْ قَرْضٍ، فَلَوْ أَخَذَ رِبِيَّةَ فِضَّةٍ بِمِائَةٍ وَسِتِّينَ دُوَيْنًا مُؤَجَّلَةً، فَإِنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ صَحَّ وَجَازَ الْاِسْتِبْدَالُ عَنْهُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ أَوْ بِصِيغَةِ الْقَرْضِ فَلَا اهـ

(Masalah Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya dan Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani) Perbedaan antara *tsaman* dan *mutsman* ialah sungguh sekira ada mata uang dalam salah satu dua bagian maka alat penukaran itu adalah *tsaman* dan yang lain disebut *mutsman*. Jika keduanya mata uang atau keduanya benda maka *tsaman*nya adalah perkara yang dimasuki oleh *ba'* (pengakuan). Faidah tersebut adalah sungguh *tsaman* boleh diganti yaitu dicarikan ganti, berbeda dengan

mutsman. As-Sayyid bin Abdullah bin Umar al-Alawi menambahkan: Syarat-syarat menjadikan ganti itu ada 10, yaitu: adanya pergantian dari *tsaman*, penjualan dengan *mitsli*nya bukan berupa *muslam fih* dan bukan barang *ribawi*, terjadi setelah ketetapan akad tidak ketika proses *khiyar majlis* atau syarat, gantinya tidak seketika, menggunakan *shighat* ijab dan qabul yang jelas seperti ungkapan: *"Saya menggantikan padamu dan saya mengganti padamu"*, atau *kinayah* seperti *"ambillah barang itu"*, menentukan ganti di dalam *majlis*, menerimanya jika ia dari hutang serasi dalam *illat* riba tidak ketika keduanya berbeda seperti emas dengan beras, dan nyata *mumatsalah* dalam harta *ribawi* dengan jenisnya seperti emas dengan sesamanya. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (ar-Ramli as-Shaghir) berkata: *"Demikian itu lebih berhati-hati"*. Ibn hajar berkata: *"Tidak disyaratkan dan tidak menambahkan ganti pada qimah hutang pada hari muthalabah di negaranya jika wajib merusak atau berhutang."* Maka apabila memungut rupiah perak dengan seratus enam puluh *duwaid* yang ditunda, bila dengan *shighat* penjualan maka sah dan boleh menjadikan ganti darinya dengan ketentuan ini atau dengan *shighat* hutang maka tidak sah.

e. *Al-Umm*, II/30:

بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَتَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ مِنَ الْأَحْرَارِ وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَعْتُوهًا أَوِ امْرَأَةً لَا افْتِرَاقَ فِي ذٰلِكَ بَيْنَهُمْ كَمَا يَجِبُ فِي مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مَا لَزِمَ مَالَهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ جِنَايَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ مِنْهُ أَوْ نَفَقَةٍ عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدٍ زَمِنٍ مُحْتَاجٍ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَاشِيَةِ وَالزَّرْعِ وَالنَّاضِّ وَالتِّجَارَةِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ لَا يَخْتَلِفُ اهـ

(Bab) Orang yang wajib sedekah, asy-Syafii ﷺ berkata: *"Wajib sedekah bagi pemilik harta yang sempurna kepemilikannya, dari orang-orang merdeka meskipun anak kecil, orang gila, atau wanita. Tidak ada perbedaan dalam hal itu di antara mereka, sebagaimana dalam harta masing-masing wajib mengeluarkan perkara yang hartanya lazim dengan salah satu bentuk jinayat (kriminalitas), warisan, nafkah terhadap kedua orang tua atau anak lumpuh yang membutuhkan; baik dalam binatang, tanaman, mata uang, barang dagangan dan zakat fitrah; itu tidak ada perbedaan."*

415. Perayaan Ulang Tahun

Deskripsi Masalah

Ulang tahun bagi sebagian orang, adalah hal yang dinanti-nanti dan jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa upacara perayaan (pesta) walau sangat sederhana. Cara orang memperingati Hari Ulang Tahun

bervariasi. Sebagian orang merayakannya dengan cara kebanyakan orang umum, yaitu dengan mengundang teman-tamannya kemudian tiup lilin yang dinyalakan di atas roti *tart* selanjutnya memotong kue/tumpeng dan diiringi nyanyian lagu "panjang umur" dari para hadirin. Sebagian lagi disamping dengan cara itu juga plus dengan bacaan-bacaan seperti *manaqib*, *diba'* surat pendek, dan lain-lain. Ada juga yang merayakannya dengan mentraktir teman-temanya, dan sebagainya.

Pertanyaan

Sebenarnya bagaimana pandangan fikih tentang hukum merayakan hari ulang tahun? Jika boleh, bagaimana cara-cara yang benar menurut Islam dalam merayakan Hari Ulang Tahun?

Jawaban

Tidak ada dasar hukum *syar'i* tetapi hukum mengadakan ulang tahun tergantung pada maksud dan cara merayakannya. Jika digunakan untuk *muhasabah* dan caranya tidak menggunakan media *munkarat* maka termasuk sesuatu yang baik.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, 170:

وَهُنَاكَ أَعْيَادُ مِيلَادٍ قَدْ يَفْرَحُ الإِنْسَانُ وَيَتَذَكَّرُ مِيلَادَهُ إِنَّمَا عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ مِيلَادَهُ مُنَاسَبَةً لِمُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ وَيَعْمَلُ مُقَارَنَةً بَيْنَ عَامٍ وَعَامٍ هَلِ ازْدَادَ وَتَقَدَّمَ أَمْ نَقَصَ وَتَأَخَّرَ؟ هَذَا شَيْءٌ جَمِيلٌ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ وَلَا لِلسَّرَفِ وَالأَعْيَادُ الْمَجَازِيَّةُ وَالتَّقْلِيدِيَّةُ كَثِيرَةٌ وَكُلُّ فَرْدٍ يَتَمَنَّى عَلَيْهِ الْعِيدُ فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ وَلُطْفٍ وَسَعَادَةٍ وَإِلَى زِيَادَةٍ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْنَا عَوَائِدَهُ الْجَمِيلَةَ اهـ

Di suatu tempat ada sebuah pesta ulang tahun dimana manusia merasa bahagia dan memperingati hari lahirnya. Hendaknya seorang muslim memperingati hari lahir sebagai hari yang tepat untuk *muhasabah* (perhitungan amal) dirinya dan mengadakan banding di antara tahun ini dan tahun lalu, apakah bertambah dan maju atau berkurang dan mundur? Peringatan ini adalah sesuatu yang indah; itu tidak sekedar mengikuti dan tidak karena boros. Peringatan-peringatan *majazi* dan *taqlidi* itu bervariasi, setiap individu berharap agar pada waktu peringatan dalam kondisi sehat, afiyah, baik, bahagia dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah agar mengulangi hari-hari peringatan yang indah pada kita.

b. *Mu`annats Musyawarat wa Fatawa li Syaikh Ramadhan al-Buti*, II/223:

هَلِ الاحْتِفَالُ بِأَعْيَادِ الْمِيلَادِ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ بِالنِّسْبَةِ لِلصِّغَارِ؟ لَا أُحِبُّ أَنْ تَشِيعَ فِي

الْبَيْتِ الْمُسْلِمِ عَادَاتٌ غَرْبِيَّةٌ لَا إِسْلَامِيَّةٌ إِذْ إِنَّ لَهَا عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ آثَارٌ ضَارَّةٌ مَعْرُوفَةٌ اهـ

Apakah peringatan hari lahir itu halal atau haram bagi anak kecil? Saya tidak suka memeriahkan adat-adat asing yang tidak Islami di rumah muslim; karena sungguh pada periode lalu, adat-adat tersebut memiliki pengaruh bahaya yang dikenal.

KOMISI C

MUSHAHIH

KH. Syafruddin Syarif
KH. Mahrus Maryani
KH. Atho'illah Anwar

PERUMUS

KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I
K. Anang Darunnaja

MODERATOR

KH. Azizi Hasbullah

NOTULEN

Ust. M. Ma'ruf Khozin

416. Pengembangan *'Illat Ta'addudul Jum'ah*

Deskripsi Masalah

Sebagaimana dalam literatur kitab-kitab Syafi'iyah dan yang lain, bahwa faktor-faktor tertentu dapat menjadi alasan untuk melaksanakan solat jumat lebih dari satu tempat dalam satu kawasan di antaranya penuhnya masjid dengan jamaah (لِضِيْقِ الْمَكَانِ), sulitnya dipertemukan antara dua belah pihak yang berseteru (لِعُسْرِ الاِجْتِمَاعِ), dan karena jarak yang jauh (لِبُعْدِ الْمَكَانِ). Pada era industrialisasi dan urbanisasi pekerja dari desa ke kota saat ini, seolah menuntut alasan baru dalam melaksanakan *ta'addud al-Jum'ah*, kendatipun jarak antar satu kantor instansi, pabrik, terminal, rumah sakit atau lainnya dengan tempat yang lain tidak terlalu jauh. Namun karena ada aturan kerja yang mengikat, ketertiban pegawai, kantor yang eksklusif (tertutup) dan sebagainya, memaksa masing-masing tempat tersebut untuk mengadakan solat jumat di tempatnya sendiri-sendiri. Banyak juga dari para pekerja tersebut yang berstatus sebagai pekerja kontrak yang berasal dari luar daerah, baik yang tinggal di asrama tempat kerjanya atau menyewa tempat tinggal daerah sekitar tempat kerjanya.

Pertanyaan

a. Adakah kriteria lain yang memperbolehkan *ta'addud al-Jum'at* selain udzur penuhnya masjid dengan jamaah (لِضِيْقِ الْمَكَانِ), sulitnya dipertemukan antara dua belah pihak yang berseteru (لِعُسْرِ الاِجْتِمَاعِ) dan karena jarak yang jauh (لِبُعْدِ الْمَكَانِ)? Dan jika ada, apa batasan kriteria *ta'addud al-Jumat* itu?

b. Apakah faktor efisiensi waktu, keamanan, dan keselamatan ketika menyeberang jalan-raya, minimnya jam istirahat kerja, larangan jum'atan di luar dari pihak perusahaan, dan lain sebagainya, dapat digolongkan kriteria yang memperbolehkan *ta'addud al-Jumat*?

c. Jika jumlah *mustauthinin* (penduduk tetap) dalam mendirikan salat Jumat tidak mencapai 40 orang, bahkan tidak ada sama sekali, maka bagaimana pendapat *musyawirin* menyikapi fenomena ini?

Jawaban

a. Ada, yaitu setiap hajat (keperluan) yang sampai pada taraf *masyaqqah* yang secara adat tidak tertahankan.

b. Sama dengan jawaban sub a.

c. Boleh melakukan salat Jumat, namun setelah salat Jumat dianjurkan melakukan solat Dzuhur sebagai langkah *ihtiyath*. Sedangkan dalam masalah tidak ada *mustauthin* (penduduk domisili tetap) sama sekali,

maka menurut pendapat *al-Ashah* hukumnya tidak boleh, namun menurut *Muqabil al-Ashah* hukumnya boleh bagi *muqimin*, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abi Hurairah dan Imam Subki.

Catatan

Jumlah minimal anggota jamaah salat Jumat menurut pendapat *mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i adalah 40 orang, tapi ada pendapat lain dalam madzhab Syafi'i yang menyatakan cukup 12 orang atau 4 orang.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *At-Turmusi*, III/212-213:

(قَوْلُهُ إِلَّا لِعُسْرِ الْاِجْتِمَاعِ) أَيْ يَقِيْنًا وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَوْفَقَ لِضَبْطِهِمْ عُسْرُ الْاِجْتِمَاعِ بِأَنْ تَكُوْنَ فِيْهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَمِنْ صُوَرِ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَيْضًا وُقُوْعُ تَقَاتُلٍ أَوْ خِصَامٍ بَيْنَ أَهْلِ جَانِبَيِ الْبَلَدِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشَقَّةٌ فَكُلُّ فِئَةٍ بَلَغَتْ أَرْبَعِيْنَ تَلْزَمُهَا إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ وَلَوْ نَقَصَ عَدَدُ جَانِبٍ أَوْ كُلٍّ عَنِ الْأَرْبَعِيْنَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ فِيْهِ وَلَا فِي الْآخَرِ تَأَمَّلْ اهـ

(Ungkapan penulis: *"Kecuali karena sulit berkumpul"*), maksudnya secara yakin, zhahirnya sungguh yang sesuai pada batasan ulama ialah sulit berkumpul karena ada *masyaqqah* yang tidak kuat ditanggung secara adat. Ulama yang menggambarkan boleh *ta'addud* juga ketika terjadi perang atau perselisihan di antara dua kota. Jika tidak ada *masyaqqah* maka tiap-tiap golongan yang mencapai 40 jamaah wajib mendirikan sholat jum'at. Jika jumlah warga satu kota atau seluruh kota tidak mencapai 40 jamaah maka tidak wajib mendirikan solat jum'at bagi mereka di kotanya maupun di tempat lain. Angan-anganlah.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, I/164:

(مَسْأَلَةٌ) وَقَعَ حَرْبٌ وَاخْتِلَافٌ بَيْنَ جُنْدَيْنِ فِيْ بَلْدَةٍ وَتَحَزَّبَ كُلٌّ، وَخَافَ بَعْضُ الرَّعِيَّةِ مِنْ حُضُوْرِ الْجُمُعَةِ فِيْ جَامِعِهَا الْأَصْلِيِّ، فَأَحْدَثُوْا جُمُعَةً فِيْ مَحَلِّهِمْ غَيْرَ الْجُمُعَةِ الْأَصْلِيَّةِ، حَرُمَ عَلَيْهِمْ إِقَامَتُهَا وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فَضْلًا عَنْ نَدْبِهَا أَوْ أَنَّهَا تَلْزَمُهُمْ، إِذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ إِنَّ الْمَعْذُوْرِيْنَ بِعُذْرٍ مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِذَا اجْتَمَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعُوْنَ فِيْ جَانِبٍ مِنَ الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يُقِيْمُوْا جُمُعَةً، بَلْ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا كَانَ الْمَعْذُوْرُوْنَ بِمَحَلٍّ يَجُوْزُ فِيْهِ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ

عِبَارَةِ التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا. وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ: ضِيقُ مَحَلِّ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْمُجْتَمِعِينَ لَهَا غَالِبًا، وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ بِشَرْطِهِ، وَبُعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءَ، أَوْ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا، إِذْ لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ اهـ وَخَالَفَهُ ي فَقَالَ: يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ حِينَئِذٍ لِلْخَوْفِ الْمَذْكُورِ، لِأَنَّ لَفْظَ التَّقَاتُلِ نَصٌّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ، وَلِأَنَّ الْخَوْفَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِمْ: إِلَّا لِعُسْرِ الْاِجْتِمَاعِ، فَالْعُسْرُ عَامٌّ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الْمَحَلِّ أَوْ خَارِجِهِ؟ وَانْحِصَارُ التَّعَدُّدِ فِي الثَّلَاثِ الصُّوَرِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْمُجِيبُ الْمُتَقَدِّمُ لَيْسَ حَقِيقَةً، إِذْ لَمْ يَحْصُرِ الْعُذْرَ فِي التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ ضَبَطُوهُ بِالْمَشَقَّةِ، وَهَذَا الْحَصْرُ إِمَّا مِنَ الْحَصْرِ الْمَجَازِيِّ لَا الْحَقِيقِيِّ إِذْ هُوَ الْأَكْثَرُ فِي كَلَامِهِمْ، أَوْ مِنْ بَابِ حَصْرِ الْأَمْثِلَةِ، فَالضِّيقُ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الْمَحَلِّ وَالْبُعْدِ، وَلِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الطَّرِيقِ وَالتَّقَاتُلِ وَلِغَيْرِهِمَا، كَالْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْحَرِّ الشَّدِيدِ وَالْعَدَاوَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ اهـ

(Masalah) Terjadi perang dan perselisihan di antara dua kubu tentara di suatu *balad* dan masing-masing bersenjata, sebagian rakyat khawatir menghadiri solat jum'at di masjid jami'nya yang asli. Lalu mereka melaksanakan solat jum'at di tempat mereka selain jum'at yang asli. Maka diharamkan bagi mereka mendirikan jum'at dalam situasi itu, apalagi kesunnahannya, atau sungguh jum'at itu wajib bagi mereka, karena tidak seorang pun imam-imam madzhab berkata: *"Sungguh orang-orang yang memiliki udzur jum'at dan jamaah adalah ketika terkumpul 40 jamaah di satu balad yang wajib mendirikan jum'at"*. Bahkan tidak dari imam-imam tiga madzhab, kecuali keterangan yang di*nukil* dari imam Ahmad tentang kebolehan *ta'addud al-jum'at* karena hajat. Bahwasanya khilaf tersebut dalam masalah apabila orang-orang yang memiliki udzur berada di suatu tempat yang boleh *ta'addud al-jum'at*, seperti diketahui dari *ibarat at-Tuhfah* dan lainnya. Kesimpulan dari kalam imam-imam sungguh sebab-sebab boleh *ta'addud al-jum'at* itu ada tiga; yaitu: sempitnya tempat solat, sekira tidak memuat jamaah jum'at di tempat itu pada umumnya, perang di antara dua golongan beserta syaratnya, dan jauhnya *tharaf-tharaf balad* dengan gambaran berada di tempat yang tak terdengar suara adzan darinya, atau di tempat jika seseorang keluar darinya setelah *fajar* (subuh), ia tidak menemukan jum'at, karena tidak wajib baginya

berjalan menuju ke sana kecuali setelah fajar. As-Sayid bin Abdullah bin Umar al-Alawi berbeda pendapat, dan berkata: *"Dengan demikian, boleh bahkan wajib ta'addud al-jum'at karena kekhawatiran tersebut, sebab lafal taqatul itu dinash secara khusus"*, dan karena kekhawatiran itu masuk di bawah ungkapan mereka: *"kecuali ketika sulit berkumpul"* sehingga kesulitan itu umum bagi setiap kesulitan yang muncul dari tempat itu atau di luarnya? Ringkasan *ta'addud* dalam tiga contoh di atas berdasar *istidlal al-mujib* dahulu bukan merupakan hakikat, karena beliau tidak meringkas udzur di dalam *at-Tuhfah*, *an-Nihayah* dan lainnya; tetapi mereka membatasinya dengan *masyaqqah*. Ringkasan ini adakala berupa ringkasan *majazi* bukan *hakiki*, karena ringkasan itu banyak dalam kalam mereka, atau dari bab ringkasan *amtsilah*. Maka sempit bagi tiap kesulitan tersebut muncul dari tempat tersebut dan jauhnya tempat. Dan karena setiap kesulitan yang timbul dari jalan, perang dan lainnya, seperti mengkhawatirkan nyawa, harta, panas yang menyengat, pertikaian dan sesamanya dari setiap perkara yang terdapat *masyaqqah*.

c. *Itsmad al-'Ainain* pada *Bughyah al-Mustarsyidin*, 36 [al-Haramain]:

قَالَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ لَمْ يَقُمْ عِنْدِيْ دَلِيْلٌ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُقِيْمِ غَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ اهـ

Imam as-Subki berkata: *"Tidak terdapat dalil di sisiku atas tidak sahnya jum'at dengan orang mukim yang tidak menetapi tempat tinggal"*.

d. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, IV/503 [Maktabah Syamilah]:

وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هَلْ تَنْعَقِدُ بِمُقِيْمِيْنَ غَيْرِ مُسْتَوْطِنِيْنَ فِيْهِ وَجْهَانِ مَشْهُوْرَانِ (أَصَحُّهُمَا) لَا تَنْعَقِدُ اتَّفَقُوْا عَلَى تَصْحِيْحِهِ مِمَّنْ صَحَّحَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّيْ وَآخَرُوْنَ اهـ

Adapun ungkapan *mushannif*: *"Apakah sah solat jum'at dengan orang-orang mukim yang tidak menetapi tempat tinggal?"* Ada dua *wajah* yang masyhur (menurut *ashah*) solat jum'at tidak sah, mereka sepakat pada keshahihannya dari orang yang menshahihkannya; yaitu: al-Mahamili, imam Haramain, al-Baghawi, al-Mutawalli dan ulama lain.

e. *Al-Muhadzdzab*, I/110, [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَهَلْ تَنْعَقِدُ بِمُقِيْمِيْنَ غَيْرِ مُسْتَوْطِنِيْنَ فِيْهِ وَجْهَانِ قَالَ أَبُوْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُمُ الْجُمُعَةُ فَانْعَقَدَتْ بِهِمْ كَالْمُسْتَوْطِنِيْنَ وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَكَانَ مَعَهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَهُمْ فِيْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مُقِيْمُوْنَ

غَيْرُ مُسْتَوْطِنِيْنَ فَلَوِ انْعَقَدَتْ بِهِمُ الْجُمُعَةُ لَأَقَامَهَا اهـ

Apakah solat jum'at sah dengan *mukimin* yang tidak *mustauthin*. Ada dua *wajah*, Abu Ali bin Abi Hurairah berkata: *"Solat jum'at hukumnya sah, karena mereka wajib melaksanakan jum'at, sehingga jum'at hukumnya sah dengan mereka sebagaimana mustauthin"*. Abu Ishaq berkata: *"Jum'at tidak sah dengan mereka; karena Nabi ﷺ keluar ke Arafah bersama ahli Makkah, mereka di sana mukim tidak mustauthin. Apabila jum'at sah dengan mereka maka Nabi ﷺ akan mendirikannya."*

f. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, IV/503:

(السَّادِسُ) مَنْ تَلْزَمُهُ وَتَصِحُّ مِنْهُ وَفِي انْعِقَادِهَا بِهِ خِلَافٌ وَهُوَ الْمُقِيمُ غَيْرُ الْمُسْتَوْطِنِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْكِتَابِ (أَصَحُّهُمَا) لَا تَنْعَقِدُ بِهِ ثُمَّ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ الْوَجْهَيْنِ فِي كُلِّ مُقِيمٍ لَا يَتَرَخَّصُ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّ الْوَجْهَيْنِ جَارِيَانِ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ هُنَا جَارِيَانِ فِيمَنْ نَوَى إِقَامَةً يَخْرُجُ بِهَا عَنْ كَوْنِهِ مُسَافِرًا قَصِيرَةً كَانَتْ أَوْ طَوِيلَةً وَشَذَّ الْبَغَوِيُّ فَقَالَ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ طَالَ مُقَامُهُ وَفِي عَزْمِهِ الرُّجُوعُ إِلَى وَطَنِهِ كَالْمُتَفَقِّهِ وَالتَّاجِرِ قَالَ فَإِنْ نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي وَنَحْوَهَا مِنَ الْإِقَامَةِ الْقَلِيلَةِ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ وَجْهًا وَاحِدًا وَالْمَشْهُورُ طَرْدُ الْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ وَأَمَّا أَهْلُ الْخِيَامِ وَالْقُرَى الَّذِينَ يَبْلُغُهُمْ نِدَاءُ الْبَلَدِ وَيَنْقُصُونَ عَنْ أَرْبَعِينَ فَقَطَعَ الْبَغَوِيُّ بِأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُقِيمِينَ فِي بَلَدِ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ وَطَرَدَ الْمُتَوَلِّي فِيهِمُ الْوَجْهَيْنِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ اهـ

(*Keenam*) orang yang wajib dan sah mendirikan jum'at; terkait keabsahan jum'at dengannya ada khilaf; yaitu: mukim yang tidak *mustauthin*. Mengenai persoalan ini ada dua *wajah* yang disebutkan dalam kitab; (menurut *ashah*) tidak sah solat jum'at dengannya, kemudian jamaah memutlakkan dua *wajah* itu di setiap mukim yang tidak mengambil *rukhshah*. Jamaah menjelaskan bahwa dua *wajah* itu berlaku bagi musafir yang berniat *iqamah* selama empat hari; yaitu *zhahir kalam mushannif* dan lainnya. Ar-Rafi'i berkata: *"Keduanya berlaku bagi orang yang berniat iqamah yang mengeluarkannya dari musafir jarak dekat atau jauh"*. Al-Baghawi mensyadzkan, dan ia berkata: *"Dua wajah tersebut bagi orang yang lama muqimnya, dan tujuannya mudik ke kampung halaman, seperti orang yang belajar ilmu agama dan pedagang"*. Beliau berkata: *"Jika seseorang berniat*

iqamah selama empat hari, yakni dan sesamanya dari iqamah sebentar maka tidak sah jum'at dengannya ada satu wajah". Menurut masyhur memberlakukan khilaf dalam seluruhnya, sedangkan warga kemah dan penduduk desa yang terdengar suara adzan *balad* dan jumlah mereka tidak mencapai 40 orang, al-Baghawi memastikan bahwa sungguh tidak sah jum'at dengan mereka; karena mereka tidak mukim di *balad jumat*, lain halnya dengan mukimin yang berniat kembali ke kampung halaman. Al-Mutawalli memberlakukan dua *wajah* pada mereka, *wajah* pertama itu lebih jelas.

g. *Fath al-Mu'in* dan *I'anah ath-Thalibin*, II/58-59:

وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ، خِلَافًا لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فَتَنْعَقِدُ عِنْدَهُ بِأَرْبَعَةٍ، وَلَوْ عَبِيْدًا أَوْ مُسَافِرِيْنَ. وَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا إِذْنُ السُّلْطَانِ لِإِقَامَتِهَا وَلَا كَوْنُ مَحَلِّهَا مِصْرًا، خِلَافًا لَهُ فِيْهِمَا. وَسُئِلَ الْبُلْقِيْنِيُّ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ لَا يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ أَرْبَعِيْنَ، هَلْ يُصَلُّوْنَ الْجُمُعَةَ أَوِ الظُّهْرَ؟ فَأَجَابَ -رَحِمَهُ اللهُ-: يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَقَدْ أَجَازَ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ، وَهُوَ قَوِيٌّ، فَإِذَا قَلَّدُوْا - أَيْ جَمِيْعُهُمْ - مَنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، فَإِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ الْجُمُعَةَ. وَإِنِ احْتَاطُوْا فَصَلُّوا الْجُمُعَةَ ثُمَّ الظُّهْرَ كَانَ حَسَنًا.

(قَوْلُهُ أَيْ غَيْرَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ) أَيْ بِاعْتِبَارِ مَذْهَبِهِ الْجَدِيْدِ فَلَا يُنَافِيْ أَنَّ لَهُ قَوْلَيْنِ قَدِيْمَيْنِ فِي الْعَدَدِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ التَّلْخِيْصِ وَحَكَاهُ فِيْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَاخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُزَنِيُّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَكَفَى بِهِ سَلَفًا فِيْ تَرْجِيْحِهِ فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَرُوَاةِ كُتُبِهِ الْجَدِيْدَةِ وَقَدْ رَجَّحَهُ أَيْضًا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَافِ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِيْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ثَانِي الْقَوْلَيْنِ اثْنَا عَشَرَ وَهَلْ يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ؟ الْجَوَابُ نَعَمْ فَإِنَّهُ قَوْلٌ لِلْإِمَامِ نَصَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَرَجَّحَهُ اهـ

Solat jum'at tidak sah dengan jamaah kurang dari 40 orang, berbeda menurut Abi Hanifah ؓ; maka solat jum'at sah menurut beliau dengan 4 (empat) orang jamaah, meskipun budak atau para musafir. Menurut kita (asy-Syafi'iyyah) tidak disyaratkan izin sulthan untuk mendirikan jum'at. Tidak disyaratkan pula tempatnya di kota, berbeda menurut beliau dalam dua kasus. Al-Bulqini ditanya tentang warga desa yang jumlahnya tidak mencapai 40, *"Apakah mereka wajib mendirikan solat*

jum'at atau zhuhur?" Kemudian beliau ﷺ menjawab: *"Mereka wajib mendirikan solat zhuhur menurut madzhab asy-Syafi'i"*. Kelompok ulama membolehkan mereka mendirikan solat jum'at, menurut pendapat yang kuat. Apabila mereka semua mengikuti pada orang yang berkata ini, maka sungguh mereka mendirikan solat jum'at. Jika berhati-hati maka mendirikan solat jum'at lalu solat zhuhur; maka demikian itu baik.

(Ungkapan Zain ad-Din bin Abd al-Aziz al-Malibari: *"Maksudnya selain imam asy-Syafi'i"*), maksudnya memandang madzhab *jadid*nya; maka tidak menafikan bahwa sungguh beliau memiliki dua *qaul qadim* dalam jumlah itu juga. *Pertama*, minimal jamaah adalah empat orang; seperti diriwayatkan oleh *shahib at-Talkhis* dan beliau meriwayatkannya dalam *syarah al-Muhadzdzab*; dan *ashab*nya yaitu al-Muzanni memilihnya, sebagaimana kata al-Adzra'i. Cukup bagi salaf dalam pen*tarjih*annya. Sungguh beliau adalah *ashab* besar asy-Syafi'i dan perawi kitab-kitabnya yang baru. Abu Bakar bin al-Mundzir juga men*tarjih* dalam *al-Isyraf*, sebagaimana di*nukil* an-Nawawi di dalam *syarah al-Muhadzdzab* bahwa *qaul* kedua adalah dua belas. Apakah boleh mengikuti dua *qaul* ini? Jawab: Ya, karena sungguh itu adalah *qaul* imam yang yang dibantu dan di*tarjih* oleh sebagian *ashab*nya.

417. Aturan *Shaf* Jamaah Wanita

Deskripsi Masalah

Aturan shaf jamaah wanita adalah di belakang makmum laki laki. Namun yang terjadi di berbagai daerah secara turun-temurun jamaah perempuan berada di sebelah kanan atau kiri, dengan alasan lebih aman dari fitnah dan tidak dalam satu tempat karena ada *satir* (penutup).

Pertanyaan

a. Adakah perbedaan aturan shaf jamaah putra putri, antara yang dalam satu tempat dan yang beda tempat sebagaimana digambarkan di atas?
b. Kalau ada, yang lebih baik kanan atau kiri?

Jawaban

a. Solat jamaah dengan satu imam dengan makmum laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan aturan shaf antara dalam satu tempat dan dalam tempat yang terpisah:
   1) Jika dalam satu tempat, maka aturannya laki-laki di depan dan perempuan di belakang dengan *fadlilah* terbaik bagi makmum laki-laki adalah yang paling depan, dan bagi makmum perempuan ialah yang paling belakang.
   2) Jika makmum perempuan menempati tempat tersendiri atau di tempat yang jauh dari tempat makmum laki-laki, maka *fadlilah*

terbaik berlaku sama antara laki-laki dan perempuan yaitu shaf yang paling depan.

b. Tidak ditemukan *ibarat* yang menjelaskan keutamaan shaf bagi makmum perempuan yang berada di sebelah kanan atau kiri.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tafsir Ruh al-Bayan*, IV/303:

وَفِي الْحَدِيْثِ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا قَالَ فِيْ فَتْحِ الْقَرِيْبِ هَذَا لَيْسَ عَلَى عُمُوْمِهِ بَلْ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا إِذَا اخْتَلَطْنَ بِالرِّجَالِ فَإِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَاتٍ لَا مَعَ الرِّجَالِ فَهُنَّ كَالرِّجَالِ وَمَنْ صَلَّى مِنْهُنَّ فِيْ جَانِبٍ بَعِيْدٍ عَنِ الرِّجَالِ فَأَوَّلُ صُفُوْفِهِنَّ خَيْرٌ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ وَالْمُرَادُ بِشَرِّ الصُّفُوْفِ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَوْنُهَا أَقَلَّ ثَوَابًا وَفَضْلًا وَأَبْعَدَهَا عَنْ مَطْلُوْبِ الشَّرْعِ وَخَيْرُهَا بِعَكْسِهِ اهـ

Dalam sebuah al-Hadits: *"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah barisan depan, dan seburuk-buruk shaf adalah barisan belakang, sementara sebaik-baik shaf wanita ialah barisan belakang dan keburukan wanita ialah di barisan depan."* *Mushannif* berkata dalam *Fath al-Qarib*: *"Ini bukan pada umumnya, akan tetapi diarahkan pada persoalan apabila wanita berkumpul bersama jamaah laki-laki; apabila wanita-wanita tamyiz menjalankan solat tidak bersama jamaah laki-laki, maka mereka seperti jamaah laki-laki"*. Wanita yang solat di posisi yang jauh dari jamaah laki-laki, maka shaf-shaf depan bagi mereka lebih baik karena hilangnya *illat*. Yang dimaksud dengan shaf-shaf yang buruk bagi jamaah laki-laki dan wanita ialah shaf-shaf itu sedikit pahala dan keutamaannya, dan jauh dari kehendak *syara'*, sedangkan shaf yang lebih baik adalah sebaliknya.

b. *Ihya 'Ulumiddin*, II/337:

وَيَجِبُ أَنْ يُضْرَبَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ حَائِلٌ يَمْنَعُ مِنَ النَّظَرِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَظِنَّةُ الْفَسَادِ وَالْعَادَاتُ تَشْهَدُ لِهَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ وَيَجِبُ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ حُضُوْرِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَوَاتِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ إِذَا خِيْفَتِ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ فَقَدْ مَنَعَتْهُنَّ عَائِشَةُ ﵂ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا مَنَعَهُنَّ مِنَ الْجَمَاعَاتِ فَقَالَتْ لَوْ عَلِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثْنَ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ، حَدِيْثُ عَائِشَةَ لَوْ عَلِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثْنَ أَيِ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِهِ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا اجْتِيَازُ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَتِرَةً فَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ

إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا تَتَّخِذَ الْمَسْجِدَ مَجَازًا أَصْلًا اهـ

Wajib memasang *satir* di antara jamaah laki-laki dan wanita yang dapat mencegah pandangan, karena hal itu juga merupakan tempat prasangka *fasad*; sementara adat-adat menyaksikan pada kemungkaran-kemungkaran ini. Wajib mencegah wanita menghadiri masjid-masjid untuk solat dan majlis-majlis dzikir apabila dikhawatirkan timbul fitnah pada mereka. Sungguh Aisyah Ra mencegah wanita-wanita; dikatakan pada beliau: *"Sungguh Rasulullah ﷺ tidak mencegah mereka dari para jamaah*, lantas Aisyah berkata: *"Jika Rasulullah ﷺ mengetahui sesuatu yang dikerjakan para wanita setelahnya maka sungguh beliau akan mencegah mereka."* Hadits Aisyah: *"Jika Rasulullah ﷺ mengetahui sesuatu yang dikerjakan para wanita setelahnya maka sungguh beliau akan melarang mereka pergi menuju masjid-masjid"*, hadits disepakati Bukhari Muslim. Sedangkan wanita yang melintasi masjid dalam kondisi tertutup, maka tidak dilarang kecuali sungguh sebaiknya tidak menjadikan masjid sebagai *majaz* (perlintasan) sama sekali.

c. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, IV/192:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى آخِرِهَا وَهَذَا الْحُكْمُ مُسْتَمِرٌّ فِي صُفُوفِ الرِّجَالِ بِكُلِّ حَالٍ وَكَذَا فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ بِجَمَاعَتِهِنَّ عَنْ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ أَمَّا إِذَا صَلَّتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ جَمَاعَةً وَاحِدَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فَأَفْضَلُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا رواه مسلم وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ الصَّفُّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ سَوَاءٌ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ وَمَقْصُورَةٌ وَ أَعْمِدَةٌ وَغَيْرُهَا أَمْ لَا وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ، رواه مسلم.

Sungguh kita menyebutkan bahwa disunnahkan shaf awal kemudian shaf berikutnya kemudian shaf berikutnya sampai akhir. Hukum ini berlaku bagi shaf-shaf laki-laki dalam setiap kondisi, begitu juga shaf-shaf wanita bersama jamaahnya yang terpisah dari jamaah laki-laki. Adapun apabila wanita solat berjamaah bersama laki-laki serta tidak ada *satir* di antara mereka, maka shaf yang lebih utama bagi wanita adalah shaf belakang. Karena hadits Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ

bersabda: "*Sebaik-baik shaf laki-laki adalah di depan, dan seburuk-buruk shaf laki-laki adalah di belakang, sedangkan sebaik-baik shaf wanita adalah di belakang dan seburuk-buruk shaf wanita adalah di depan.*" HR. Muslim. Ketahuilah sungguh yang dimaksud dengan shaf awal adalah shaf di samping imam, baik disela-selai mimbar, kotak (peti, lemari kaca dsb) atau tiang dan lainnya maupun tidak disela-selai. Dari Abi Said al-Khudri ﷺ: Sungguh Nabi ﷺ melihat sahabatnya terlambat lalu beliau bersabda pada mereka: "*Majulah kalian dan mendekatlah padaku kemudian mendekatlah kalian setelah yang lain, kaum selalu terlambat hingga Allah melambatkan mereka*". HR. Muslim.

d. *Tuhfah al-Ahwadzi*, II/13:

قَالَ النَّوَوِيُّ أَمَّا صُفُوفُ الرِّجَالِ فَهِيَ عَلَى عُمُومِهَا فَخَيْرُهَا أَوَّلُهَا أَبَدًا وَشَرُّهَا آخِرُهَا أَبَدًا. أَمَّا صُفُوفُ النِّسَاءِ فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ صُفُوفُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَالِ. وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَاتٍ لَا مَعَ الرِّجَالِ فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْرُ صُفُوفِهِنَّ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَالْمُرَادُ بِشَرِّ الصُّفُوفِ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَقَلُّهَا ثَوَابًا وَفَضْلًا وَأَبْعَدُهَا مِنْ مَطْلُوبِ الشَّرْعِ وَخَيْرُهَا بِعَكْسِهِ. وَإِنَّمَا فَضَلَ آخِرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْحَاضِرَاتِ مَعَ الرِّجَالِ لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَرُؤْيَتِهِمْ وَتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهِمْ عِنْدَ رُؤْيَةِ حَرَكَاتِهِمْ وَسَمَاعِ كَلَامِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفِهِنَّ بِعَكْسِ ذَلِكَ اِنْتَهَى.

An-Nawawi berkata: "*Adapun shaf-shaf laki-laki secara umum yang lebih baik adalah selamanya di depan dan yang buruk adalah selamanya di belakang. Sementara shaf-shaf wanita, maka yang dimaksud dengan hadits ialah shaf-shaf wanita yang solat bersama laki-laki. Sedangkan apabila wanita tamyiz solat tidak bersama laki-laki, maka shaf-shaf yang lebih baik bagi mereka sama seperti laki-laki, yaitu shaf awal; dan seburuk-buruknya adalah shaf akhir. Yang dimaksud dengan seburuk-buruk shaf bagi laki-laki dan wanita ialah sedikit pahala dan keutamaan serta jauh dari kehendak syara'; sementara yang lebih baik adalah sebaliknya. Bahwasanya keutamaan shaf akhir bagi wanita yang hadir bersama laki-laki adalah karena jauh dari berkumpul bersama laki-laki, melihat, dan hubungan hati pada mereka ketika melihat gerak-gerik, mendengar suara mereka dan sebagainya. Dan shaf awal bagi wanita itu di cela, berbanding terbalik.*"

418. *Murabahah* ala BMT

Deskripsi Masalah

BMT (*Baitul Mal Wattamwiil*) sebagai lembaga keuangan syari'ah,

telah menjadi alternatif, di samping bank-bank syariah. Keberadaan BMT yang berbentuk kooperasi dan dikelola secara mandiri, konon lebih *syar'i* (Islami) dibandingkan dengan BANK-BANK yang telah menggunakan sistem syari'ah. Hal ini karena BANK–meski berlabel syari'ah–masih terikat dengan undang-undang dan kontrol Bank Indonesia (BI), yang mana regulasinya belum mencerminkan sistem Islam secara penuh. Namun demikian, banyak pula koperasi yang menggunakan BMT sebagai kedok untuk menutupi transaksi ribawi mereka. Terlepas dari permasalahan di atas, kenyataannya BMT semakin menjamur bahkan tidak sedikit pondok pesantren yang telah memiliki lembaga ini.

Salah satu produk yang mereka gunakan adalah *Murabahah* yang sudah dimodifikasi. Prakteknya, jika seorang pedagang kain mengajukan pembiayaan modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli kain, maka pihak BMT memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada si pedagang. Uang ini bukan sebagai pinjaman, akan tetapi uang agar dibelikan kain atas nama BMT dan sekaligus menjual kepadanya dengan harga Rp. 1.150.000,-. Selanjutnya uang Rp. 1.150.000,- inilah yang akan diangsur oleh pedagang kepada BMT.

Catatan

a. Pedagang sebagai wakil BMT dalam membeli kain dan sekaligus menjualnya.
b. Madzhab Maliki membolehkan menjual barang *Qablal Qabdhi*.
c. Madzhab Hanbali membolehkan terjadinya *Ittihad al-Qabidh wal Muqbidh*.

Pertanyaan

a. Apakah transaksi *mu'amalah* yang dilakukan BMT dengan pedagang kain tersebut dapat dibenarkan?
b. Jika tidak, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh BMT?

Jawaban

a. Tidak dapat dibenarkan, karena ada syarat yang tidak terpenuhi dalam akad *murabahah*, yaitu menjual barang yang belum dimiliki oleh *muwakkil* (BMT).
b. Barang yang akan ditransaksikan secara *murabahah* harus sudah menjadi milik BMT. Teknis yang bisa ditawarkan antara lain: Nasabah setelah membeli barang atas nama BMT harus diserahkan kepada BMT terlebih dahulu, lalu melakukan transaksi *murabahah*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin*, III/12:

(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ فُضُولِيٍّ) هُوَ مَنْ لَيْسَ مَالِكًا، وَلَا وَكِيْلًا، وَلَا وَلِيًّا، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ

بَيْعُهُ، لِحَدِيْثِ: لَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ اهـ

(Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Maka tidak sah penjualan fudluli"*), yaitu orang yang tidak memiliki, bukan wakil, dan bukan wali akan tetapi tidak sah penjualannya; karena hadits: *"Tidak ada penjualan kecuali dalam barang yang dimiliki."*

b. *Al-Iqna' fi Hall Alfadz Abi Syuja'*, 1/468:

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُرَابَحَةُ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَهُوَ عَقْدٌ يُبْنَى الثَّمَنُ فِيْهِ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيْعِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةٍ بِأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِمِائَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لِغَيْرِهِ بِعْتُكَ هَذَا بِمَا اشْتَرَيْتُهُ وَرِبْحُ دِرْهَمٍ زِيَادَةً أَوْ بِرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ أَوْ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَيَجُوْزُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ شَيْئًا ثُمَّ يَبِيْعُهُ مُرَابَحَةً مِثْلَ أَنْ يَقُوْلَ اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ وَقَدْ بِعْتُكَهُ بِمِائَتَيْنِ وَرِبْحُ دِرْهَمٍ زِيَادَةً وَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُ بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَكَمَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً يَجُوْزُ مُحَاطَّةً مِثْلَ أَنْ يَقُوْلَ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ بِهِ وَحَطُّ دِرْهَمٍ زِيَادَةً وَفِي الْقَدْرِ الْمَحْطُوْطِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ كَمَا زِيْدَ فِي الْمُرَابَحَةِ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٍ وَأَصَحُّهُمَا يُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ لِأَنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُرَابَحَةِ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَكَذَا الْحَطُّ وَلَيْسَ فِي حَطِّ وَاحِدٍ مِنْ عَشَرَةٍ رِعَايَةٌ لِلنِّسْبَةِ فَإِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَى بِمِائَةٍ فَالثَّمَنُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تِسْعُوْنَ وَعَلَى الثَّانِي تِسْعُوْنَ وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَلَوِ اشْتَرَى بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ فَالثَّمَنُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَعَلَى الثَّانِي مِائَةٌ وَطَرَدَ كَثِيْرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّيْنَ وَغَيْرِهِمُ الْوَجْهَيْنِ فِيْمَنْ قَالَ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ بِحَطِّ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا غَلَطٌ فَإِنَّ فِي هَذِهِ الصِّيْغَةِ تَصْرِيْحًا بِحَطِّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ فَلَا وَجْهَ لِلْخِلَافِ فِيْهِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ بَيِّنٌ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ بِحَطِّ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ فَالْمَحْطُوْطُ دِرْهَمٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَإِنْ قَالَ بِحَطِّ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ فَالْمَحْطُوْطُ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ اهـ

Bagian Kedua: Murabahah; penjualan secara *murabahah* itu dibolehkan tanpa makruh. Yaitu akad yang menetapkan *tsaman* pada *tsaman* barang dagangan pertama serta ada tambahan gambarannya seseorang membeli barang yang berharga seratus, kemudian ia berkata pada orang lain:

"Aku menjual barang ini padamu dengan harga aku membelinya," dan keuntungan dirham itu sebagai tambahan atau dengan keuntungan dirham bagi setiap sepuluh atau di setiap sepuluh. Boleh mengumpulkan sesuatu pada modal kemudian menjualnya secara *murabahah*, seperti seseorang berkata: *"Saya membelinya seharga seratus dan sungguh aku menjualnya padamu seharga dua ratus dua puluh"*. Sebagaimana boleh menjual secara *murabahah*, boleh pula *muhathah*, seperti seseorang berkata: *"Saya menjual seharga saya membelinya"*, dan dirham itu didepositkan sebagai tambahan. Terkait kadar deposito ada dua *wajah*; pertama, setiap sepuluh ada satu deposit, seperti ditambahkan dalam *murabahah*, bahwa setiap sepuluh ada satu. Menurut *qaul ashah* deposit setiap sebelas adalah satu karena keuntungan dalam *murabahah* itu bagian dari sebelas; begitu juga deposito. Dalam deposit, satu tidak dari sepuluh, karena menjaga penisbatan. Apabila seseorang sungguh membeli seharga seratus maka *tsaman* pada *wajah* pertama adalah sembilan puluh, dan pada *wajah* kedua sembilan puluh dan sepuluh bagian dari sebelas bagian dirham. Jika seseorang membeli seharga seratus sepuluh, maka *tsaman* pada wajah pertama adalah sembilan puluh sembilan dan pada *wajah* kedua adalah seratus. Ulama Irak dan selainnya sering memberlakukan dua *wajah*, maka orang yang berkata: *"Saya menjual seharga saya membeli dengan deposit dirham dari setiap sepuluh"*. Imam Haramain berkata: *"Ini merupakan kesalahan"*; karena sungguh dalam *shighat* ini ada penjelasan deposit satu dari setiap sepuluh. Sehingga tidak ada *wajah* karena terdapat khilaf. Ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh al-Imam secara jelas. Al-Mawardi dan ulama lain menyebutkan: *"Sungguh apabila seseorang berkata dengan deposit dirham dari setiap sepuluh, maka yang didepositkan adalah dirham dari setiap sepuluh dan jika seseorang berkata dengan deposit dirham untuk setiap sepuluh maka yang didepositkan adalah satu dari sebelas."*

c. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, V/3767:

شُرُوطُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ الْأَوَّلُ الْعِلْمُ بِالثَّمَنِ الثَّانِي الْعِلْمُ بِالرِّبْحِ أَنْ يَكُوْنَ رَأْسُ الْمَالِ الْمِثْلِيَّاتِ الرَّابِعُ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الْمُرَابَحَةِ فِي أَمْوَالِ الرِّبَا وُوُجُوْدُ الرِّبَا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ الْأَوَّلِ الْخَامِسُ أَنْ يَكُوْنَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ صَحِيْحًا فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُثْبِتُ الْمِلْكَ فِيْهِ بِقِيْمَةِ الْمَبِيْعِ أَوْ بِمِثْلِهِ لَا بِالثَّمَنِ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ اهـ

Syarat-syarat penjualan *murabahah*; *Pertama*: mengetahui *tsaman*. *Kedua*: mengetahui bahwa keuntungan adalah modal yang dijumlah maksimum. *Keempat*: Pada *murabahah*, tidak berkonsekuensi harta-harta riba dan

wujud riba dengan penisbatan pada *tsaman* pertama. *Kelima*: akad pertama itu sah, maka jika akad itu rusak maka tidak boleh menjual secara *murabahah*; karena *murabahah* adalah penjualan dengan *tsaman* pertama serta tambahan keuntungan. Sedangkan penjualan yang rusak tersebut menetapkan kepemilikan dengan *qimah* barang dagangan atau sesamanya; tidak dengan *tsaman*, karena rusaknya penamaan.

419. Pembunuhan Karakter

Deskripsi Masalah

Usaha seseorang dalam meraih sukses, mengejar reputasi, karir dan jabatan, semakin tidak terkendali dengan berbagai macam cara asalkan tercapai, bahkan sampai tega melakukan pembunuhan karakter (*character assasination*), yaitu usaha mencoreng reputasi seorang tokoh nasional atau level di bawahnya, yang umumnya terjadi dikalangan politisi, pejabat publik, pejabat tinggi, ekskutif profesional dan lainnya, dengan memanipulasi fakta kebenaran, pemberitaan dusta, tuduhan melanggar norma agama, hukum atau sosial, dengan tendensius dan tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Melalui cara seperti ini, akibatnya reputasi seseorang menjadi rusak, karir terhambat, dipecat dari jabatan sampai dikucilkan di tengah-tengah masyarakat.

Pertanyaan

a. Bagaimana pandangan fikih tentang pembunuhan karakter sebagaimana digambarkan di atas?
b. Perusakan reputasi berupa tuduhan selingkuh, apakah termasuk katagori *qadzaf*?
c. Dapatkan dilakukan tuntutan hukum terhadap pelaku pembunuhan karakter atas dasar perusakan nama baik?
d. Jika pihak yang digosip (dinodai nama baiknya) malah merasa senang, sebab akan semakin tenar dan dapat menaikkan pendapatan honor, bagaimana hukum pelaku gosip dan yang digosip?

Jawaban

a. Pembunuhan karakter dalam pandangan fikih termasuk pelanggaran terhadap konsep *hifzh al-'irdh* (menjaga harga diri) yang hukumnya haram, sebab perbuataan ini tidak lepas dari perbutan *kidzib* (dusta), *ghibah* (gosip), *namimah* (adu domba) dan lain-lain.
b. Tuduhan selingkuh termasuk *kinayah Qadzaf*, sebab kata "selingkuh" tidak secara pasti mengarah pada zina, melainkan bisa juga menunjukkan makna yang lain (*muqaddimah zina*).
c. Pihak yang dicemarkan nama baiknya berhak melakukan tuntutan hukuman berupa *ta'zir*, bahkan *had* jika sampai *qadzaf* (tuduhan zina).

d. Ketika yang digosipkan adalah realita, maka haram kecuali orang yang digosip berprilaku fasik dengan terang-terangan atau dia memang suka digosipkan. Ketika yang digosipkan bukan realita, maka haram secara mutlak sebab merupakan perbutan dusta.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Hamisy Sab'ah Kutub Mufidah*, 65:

وَاحْفَظْ لِسَانَكَ مِنْ طَعْنِ أَحَدٍ ۞ مِنَ الْعِبَادِ وَمِنْ نَقْلٍ وَمِنْ كَذِبٍ

أَيْ احْرِصْهَا وَرَاعِهَا وَتَوَكَّلْ بِهَا مِنْ وُقُوعِهَا فِيْ عِرْضِ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى وَمِنْ نَقْلِ الْكَلَامِ وَنَقْلِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَمِنَ الْكَذِبِ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِغَيْرِ الْوَاقِعِ فَمَعْنَى الطَّعْنِ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ هُوَ النَّمِيْمَةُ وَالْغِيْبَةُ. قَالَ سَيِّدُنَا النَّاظِمُ وَحَدُّ الْغِيْبَةِ شَرْعًا ذِكْرُكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ فِيْ غَيْبَتِهِ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ سَمِعَهُ سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بِنَقْصٍ فِيْ دِيْنِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ وَلَدِهِ حَتَّى فِيْ مِشْيَتِهِ وَثَوْبِهِ وَسَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَكَذَلِكَ كِتَابَتُكَ لِمَا يَكْرَهُهُ وَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ بِنَحْوِ الْيَدِ وَحَدُّ النَّمِيْمَةِ نَقْلُ كَلَامِ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ بِقَصْدِ الْإِفْسَادِ وَالْفِتْنَةِ اهـ

Dan jagalah lisanmu dari mencaci seseorang ۞
dari hamba-hamba, dari menukil dan dari berdusta.

Maksudnya jagalah lisanmu, lindungilah dia dan pasrahlah dengannya dari jatuhnya lisan dalam mencaci seorang hamba-hamba Allah ﷻ, dari menukil kalam pada sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan dari dusta yaitu mengabarkan sesuatu diluar kenyataan. Arti mencaci dalam kepribadian muslim ialah memfitnah dan mengumpat. *Sayyiduna* Nadzim berkata: *"Batasan mengumpat secara syara' ialah kamu menyebutkan saudara muslimmu dalam ketiadaannya dengan perkara yang dibenci jika ia mendengarnya, baik kamu menyebutkan kekurangan dalam agama, badan, keluarga, atau anaknya hingga jalannya, bajunya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Begitu pula tulisanmu karena perkara yang ia benci dan isyarat kepadanya dengan semisal tangan. Sedangkan batasan memfitnah ialah menukil kalam sebagian manusia pada sebagian yang lain dengan tujuan merusak dan memfitnah."*

b. *Syarh Jauhar at-Tauhid*, 117:

وَحِفْظُ دِيْنٍ ثُمَّ نَفْسٍ مَالٍ نَسَبْ ۞ وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ

(قَوْلُهُ وَعِرْضٌ) أَيْ وَمِثْلُهَا عِرْضٌ فِيْ وُجُوْبِ الْحِفْظِ ... وَلِحِفْظِهِ شُرِعَ حَدُّ الْقَذْفِ

لِلْعَفِيفِ وَالتَّعْزِيرِ لِغَيْرِهِ اهـ

Menjaga agama kemudian nyawa, harta, nasab ❀
Semisalnya yaitu akal, dan harga diri, sungguh wajib.

(Ungkapan penulis: *"Dan harga diri"*), maksudnya, dan semisalnya ialah kepribadian dalam kewajiban menjaganya ... Untuk menjaganya maka disyariatkan *had* menuduh zina bagi orang yang terjaga dan *ta'zir* bagi lainnya.

c. *Hasyiyah al-Bajuri*, II/236:

وَالحَاصِلُ أَنَّ الأَلْفَاظَ فِي هَذَا المَقَامِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ وَتَعْرِيضٌ لِأَنَّ اللَّفْظَ إِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَ القَذْفِ فَصَرِيحٌ وَإِنِ احْتَمَلَهُ وَاحْتَمَلَ غَيْرَهُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلًا لَكِنْ يَفْهَمُ مِنْهُ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ فَتَعْرِيضٌ اهـ

(Simpulan) sungguh lafazh-lafazh dalam tempat ini ada tiga macam; yaitu: *sharih*, *kinayah*, dan sindiran. Karena lafal itu jika tidak *ihtimal* selain menuduh zina maka lafal itu *sharih*, sedangkan jika *ihtimal* menuduh zina dan *ihtimal* lainnya dalam *wadha'*nya maka disebut *kinayah*. Jika tidak *ihtimal* menuduh zina sama sekali, akan tetapi memahamkannya dengan *qarinah-qarinah* kondisi maka disebut sindiran.

d. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XXVII/16:

ط -القَذْفُ- امْتَازَتْ صِيغَةُ القَذْفِ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الصِّيَغِ بِمَجِيءِ الصَّرِيحِ وَالكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ فِيهَا، فَالقَذْفُ الصَّرِيحُ المُتَّفَقُ عَلَى صَرَاحَتِهِ مِنْ قِبَلِ العُلَمَاءِ هُوَ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلٍ: زَنَيْتَ، أَوْ يَا زَانِي أَوْ لِامْرَأَةٍ: زَنَيْتِ، أَوْ يَا زَانِيَةُ فَهَذِهِ الأَلْفَاظُ لَا تَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ غَيْرَ القَذْفِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ اللَّفْظُ المُرَكَّبُ مِنَ النُّونِ وَاليَاءِ وَالكَافِ، وَكَذَا كُلُّ لَفْظٍ صَرِيحٍ فِي الجِمَاعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَذْفًا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ وَصْفُ الحُرْمَةِ.

(*Qadzaf*) *shighat qadzaf* berbeda dengan *shighat* lainnya dengan adanya *sharih*, *kinayah*, dan *ta'ridh*. *Shighat Qadzaf sharih* yang disepakati ulama adalah berkata pada seorang laki-laki: *"Kamu berzina, hai pezina"*; atau pada seorang wanita: *"Kamu berzina, hai pezina"*, Lafal-lafal ini tidak *ihtimal* selain makna *qadzaf*. *Shighat* lain adalah lafal yang tersusun dari *nun*, *ya'* dan *kaf*, begitu pula lafal *sharih* dalam *jima'*, bahwa sungguh lafal tersebut merupakan *qadzaf* apabila sifat *hurmah* berkumpul padanya.

e. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, I/477:

الفَصْلُ السَّادِسُ: فِي التَّعْزِيرِ وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الحُدُودُ،

وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ وَحَالِ فَاعِلِهِ فَيُوَافِقُ الْحُدُودَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهُ تَأْدِيبُ اسْتِصْلَاحٍ وَزَجْرٍ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الذَّنْبِ وَيُخَالِفُ الْحُدُودَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنَّ تَأْدِيبَ ذِي الْهَيْبَةِ مِنْ أَهْلِ الصِّيَانَةِ أَخَفُّ مِنْ تَأْدِيبِ أَهْلِ الْبَذَاءَةِ وَالسَّفَاهَةِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ. فَتُدَرَّجُ فِي النَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ: فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي الْحُدُودِ الْمُقَدَّرَةِ فَيَكُونُ تَعْزِيرُ مَنْ جَلَّ قَدْرُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ، وَتَعْزِيرُ مَنْ دُونَهُ بِالتَّعْنِيفِ لَهُ وَتَعْزِيرُ بِزَوَاجِرِ الْكَلَامِ وَغَايَةِ الِاسْتِخْفَافِ الَّذِي لَا قَذْفَ فِيهِ وَلَا سَبَّ، ثُمَّ يَعْدِلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الْحَبْسِ الَّذِي يُحْبَسُونَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ ذَنْبِهِمْ وَبِحَسَبِ هَفَوَاتِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى غَايَةٍ مُقَدَّرَةٍ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ تُقَدَّرُ غَايَتُهُ بِشَهْرٍ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْكَشْفِ وَبِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّقْوِيمِ ثُمَّ يَعْدِلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إِلَى النَّفْيِ وَالْإِبْعَادِ إِذَا تَعَدَّتْ ذُنُوبُهُ إِلَى اجْتِذَابِ غَيْرِهِ إِلَيْهَا وَاسْتِضْرَارِهِ بِهَا وَاخْتُلِفَ فِي غَايَةِ نَفْيِهِ وَإِبْعَادِهِ، فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تُقَدَّرُ بِمَا دُونَ الْحَوْلِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ لِئَلَّا يَصِيرَ مُسَاوِيًا لِتَغْرِيبِ الْحَوْلِ فِي الزِّنَا، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ عَلَى الْحَوْلِ بِمَا يَرَى مِنْ أَسْبَابِ الزَّوَاجِرِ ثُمَّ يَعْدِلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الضَّرْبِ يَنْزِلُونَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ الْهَفْوَةِ فِي مِقْدَارِ الضَّرْبِ وَبِحَسَبِ الرُّتْبَةِ فِي الِامْتِهَانِ وَالصِّيَانَةِ.

(Pasal VI: *Ta'zir*) *Ta'zir* adalah mengajarkan etika atas dosa-dosa yang tidak disyariatkan *had-had*. Hukumnya berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi pelaku, sehingga serasi dengan *had* dari wajah bahwa *ta'zir* merupakan bentuk *ta'dib istishlah* dan larangan yang berbeda-beda dalam memandang perbedaan dosa. *Ta'zir* berbeda dengan *had* ditinjau dari tiga aspek; pertama, sungguh *ta'dib* pemilik *haibah* dari *ahli ash-shiyanah* lebih ringan daripada *ta'dib ahli* vulgar dan tidak sopan; karena sabda Nabi ﷺ: *"Bicaralah pada dzawil hai'ah menurut pemahaman mereka."* Sehingga manusia ditempatkan sesuai tingkatannya. Apabila mereka disetarakan dalam *had-had muqaddarah* maka *ta'zir* orang yang tinggi pangkatnya dengan berpaling darinya, dan *ta'zir* orang di bawahnya dengan mengecamnya dan *ta'zir* dengan melarang bicara dan puncak *istihqaq* yang tidak terdapat *qadzaf* dan sebab, kemudian dipindah pada orang di bawahnya dengan ditahan memandang dosa dan error. Di antaranya ada yang ditahan sehari, dan lebih dari sehari sampai batas

yang ditentukan. Abu Abdillah az-Zubairi, *ashab asy-Syafi'i* berkata: *"Batasnya dikira-kirakan sebulan karena upaya pembebasan dan sirkulasi, enam bulan karena ta'dib dan penegakan hukum; kemudian dipindah pada orang yang di bawahnya dengan diasingkan dan disingkirkan apabila dosa-dosanya menyebar pada orang lain dan membahayakannya; terkait batas pengasingan dan penyingkiran dibeda-bedakan"*. Menurut zhahir madzhab asy-Syafi'i dikira-kirakan sampai batas kurang dari setahun meskipun kurang sehari agar tidak sama dengan *ta'zir* selama setahun bagi pelaku zina. Sementara zhahir madzhab Malik boleh ditambahkan sampai setahun tergantung sebab-sebab larangan, kemudian dipindahkan pada orang di bawahnya dengan sanksi yang ditempatkan sesuai pelanggaran dalam kadarnya dan menyesuaikan tingkatan dalam ujian dan pengawasan.

f. *Al-Fatawa al-Haditsiyah*, I/303:

وحاصل عبارة الأذكار: يكره لمن ابتلى بمعصية أو غيرها أن يخبر غيره بها إلا نحو شيخه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو من مثلها أو سببها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة روى الشيخان أنه ﷺ قال "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عليه" انتهى، فأفاد أن محل الكراهة إذا انتفت تلك المصلحة فكان يتعين على الجلال أن يقول: وأن يحدث بما عمله من المعاصي إلا المصلحة، وفاته أيضا قول الأذكار أو نحوها المفيدة أن نحو المعاصي مثلها فيما ذكر، والظاهر أن مراده بنحوها كل ما تقتضي العادة كتمه ويعد أهلها ذكره خرما للمروءة كجماع الحليلة ونحوها من غير ذكر تفصيله وإلا حرم بل هو كبيرة لورود الشرع بالوعيد الشديد فيه، وفاتهما أعني الجلال والنووي أن محل الكراهة إذا لم يتحدث على جهة التفكه بها واستحلاء ذكرها وإلا حرم عليه اهـ

Simpulan ungkapan al-Adzkar: Dimakruhkan mengabarkan maksiat dan lainnya pada orang lain kecuali kepada semisal syaikhnya; yaitu orang yang diharapkan bisa membantu mengatasi masalah maksiat, misalnya sebabnya, dia akan mendoakannya dan sebagainya dalam urusan pelik; bahkan tindakan itu bagus. Sungguh dimakruhkan mengabarkan maksiat

apabila tidak terdapat maslahat ini. Sungguh Rasulullah ﷺ bersabda: *"Setiap umatku sehat kecuali orang-orang yang menyatakan; Sungguh orang-orang yang menyatakan adalah seorang lelaki yang beramal di waktu malam, kemudian pagi sungguh Allah menutupi padanya; kemudian Allah berfirman: "Hai fulan kamu beramal demikian dan demikian di waktu cuti sungguh Tuhannya selalu menutupinya, sementara ia membukanya di waktu pagi, dimana Allah telah menutupi padanya."* (HR. Asy-Syaikhani). selesai. Hadits ini memberikan faidah bahwa tempat kemakruhan bila tidak terdapat maslahat tersebut, sehingga menjadi tertentu bagi al-Jalal, berkata: *"Dan memberitakan maksiat yang ia kerjakan kecuali maslahat"*. Ungkapan al-Adzkar atau sesamanya yang berfaidah tertinggal juga sungguh semisal maksiat itu seperti persoalan yang tersebut diatas. Menurut zhahir yang dimaksud dengan semisal maksiat ialah setiap tindakan yang dituntut adat agar dirahasiakan dan dianggap sebagai ahli maksiat jika diberitakan karena merusak harga diri; seperti jimak istri dan semisalnya tanpa menyebutkan detailnya. Jika tidak, maka haram bahkan dosa besar karena ancaman *syara'* yang berat. Dan tertinggal pada keduanya, maksud saya: al-Jalal dan an-Nawawi, sungguh tempat kemakruhan itu bila tidak memberitakan kondisi bersenang-senang pada istri dan membubuhi beritanya. Jika tidak, maka haram baginya.

g. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, XI/80:

(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ وَلَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ) ذُكِرَ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ ﵂ إِذْ بَكَتْ لِمَا سَارَّهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَتْ لِمَا سَارَّهَا ثَانِيًا فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ وَفِيهِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمَنَاقِبِ وَفِي الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ مُسَارَرَةُ الْوَاحِدِ مَعَ الْوَاحِدِ بِحَضْرَةِ الْجَمَاعَةِ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي يُخَافُ مِنْ تَرْكِ الْوَاحِدِ لَا يُخَافُ مِنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ قُلْتُ وَسَيَأْتِي إِيضَاحُ هَذَا بَعْدَ بَابٍ قَالَ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إِفْشَاءُ السِّرِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ مَضَرَّةٌ عَلَى الْمُسِرِّ لِأَنَّ فَاطِمَةَ لَوْ أَخْبَرَتْهُنَّ لَحَزِنَّ لِذَلِكَ حُزْنًا شَدِيدًا وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَتْهُنَّ أَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ لَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَاشْتَدَّ حُزْنُهُنَّ فَلَمَّا أَمِنَتْ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِنَّ أَخْبَرَتْ بِهِ قُلْتُ أَمَّا الشِّقُّ الْأَوَّلُ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ فِيهِ جَوَازُ إِفْشَاءِ السِّرِّ إِذَا زَالَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِفْشَائِهِ مِنَ الْمَضَرَّةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي السِّرِّ الْكِتْمَانُ وَإِلَّا فَمَا فَائِدَتُهُ اهـ

(Ungkapan al-Bukhari: *"Bab orang yang berbisik di antara manusia dan tidak mengabarkan rahasia temannya, bila telah meninggal lalu ia mengabarkannya"*). Hadits Aisyah terkait ini disebutkan mengenai kisah Fatimah ketika ia menangis karena sesuatu yang diikuti Nabi ﷺ, kemudian ia tersenyum karena sesuatu yang diikuti Nabi ﷺ kedua kalinya. Kemudian Aisyah bertanya pada Fatimah mengenai peristiwa itu, Fatimah berkata: *"Saya tidak menyingkap rahasia, dan sungguh beliau mengeksposnya setelah Nabi wafat"*. Sungguh penjelasannya telah terungkap dalam *manaqib* dan *wafat an-Nabawi*. Ibnu Batthal berkata: *"Rahasia seseorang bersama orang lain di hadapan jamaah itu boleh karena maksud yang dikhawatirkan meninggalkan seseorang, tidaklah dikhawatirkan meninggalkan jamaah"*. Saya berkata: *"Penjelasan ini akan diurai setelah bab"*. Beliau berkata: *"Terkait ini sungguh tidak patut menyebarkan rahasia apabila menodai pihak yang merahasiakan. Karena sungguh apabila Fatimah mengabarkan pada para wanita, maka mereka akan merasa sedih yang mendalam. Begitu pula apabila Fatimah mengabarkan pada mereka bahwa ia adalah sayyidah wanita mukminin, maka sungguh besar dan kesedihan yang mendalam bagi mereka. Tatkala Fatimah merasa aman dari itu semua setelah mereka meninggal, barulah Fatimah mengabarkannya.* Saya berkata: *Mengenai bagian pertama, hak ibarat ialah berkata: boleh membuka rahasia apabila resiko yang ditimbulkan telah lenyap; karena hukum asal rahasia adalah ditutupi. Jika tidak, maka tidak ada faidahnya."*

h. *Riyadh ash-Shalihin [Tahqiq Dr. al-Fahl]*, II/182:

إِعْلَمْ أَنَّ الْغِيْبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحِيْحٍ شَرْعِيٍّ لَا يُمْكِنُ الْوُصُوْلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَابٍ: الْأَوَّلُ: التَّظَلُّمُ، فَيَجُوْزُ لِلْمَظْلُوْمِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فَيَقُوْلُ: ظَلَمَنِي فُلَانٌ بِكَذَا. الثَّانِي: الْاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيْرِ الْمُنْكَرِ، وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ، فَيَقُوْلُ لِمَنْ يَرْجُوْ قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلَانٌ يَعْمَلُ كَذَا، فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَيَكُوْنُ مَقْصُوْدُهُ التَّوَصُّلَ إِلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً. الثَّالِثُ: الْاِسْتِفْتَاءُ، فَيَقُوْلُ لِلْمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ زَوْجِي، أَوْ فُلَانٌ بِكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيْقِي فِي الْخَلَاصِ مِنْهُ، وَتَحْصِيْلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ وَالْأَفْضَلَ أَنْ يَقُوْلَ: مَا تَقُوْلُ فِي رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا؟ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِيْنُ جَائِزٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي حَدِيْثِ هِنْدَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. الرَّابِعُ: تَحْذِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ

الشَّرِّ وَنَصِيْحَتُهُمْ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوْهٍ: مِنْهَا جَرْحُ الْمَجْرُوْحِيْنَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُوْدِ وَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، بَلْ وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ. وَمِنْهَا: الْمُشَاوَرَةُ فِيْ مُصَاهَرَةِ إِنْسَانٍ أَوْ مُشَارَكَتِهِ أَوْ إِيْدَاعِهِ أَوْ مُعَامَلَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ مُجَاوَرَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشَاوِرِ أَنْ لَا يُخْفِيَ حَالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ الْمَسَاوِئَ الَّتِيْ فِيْهِ بِنِيَّةِ النَّصِيْحَةِ. وَمِنْهَا: إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهاً يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ نَصِيْحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيْحَةَ، وَهَذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيْهِ. وَقَدْ يَحْمِلُ الْمُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ الْحَسَدُ، وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيْحَةٌ فَلْيَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ. وَمِنْهَا: أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وِلَايَةٌ لَا يَقُوْمُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا: إِمَّا بِأَنْ لَا يَكُوْنَ صَالِحًا لَهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يَكُوْنَ فَاسِقًا أَوْ مُغَفَّلاً وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ لِيُزِيْلَهُ، وَيُوَلِّيَ مَنْ يُصْلِحُ أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حَالِهِ وَلَا يَغْتَرَّ بِهِ وَأَنْ يَسْعَى فِيْ أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ. الْخَامِسُ: أَنْ يَكُوْنَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَأَخْذِ الْمَكْسِ وَجِبَايَةِ الْأَمْوَالِ ظُلْماً، وَتَوَلِّي الْأُمُوْرِ الْبَاطِلَةِ، فَيَجُوْزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوْبِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ. السَّادِسُ: التَّعْرِيْفُ، فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مَعْرُوْفاً بِلَقَبٍ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى وَالْأَحْوَلِ وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيْفُهُمْ بِذَلِكَ وَيَحْرُمُ إِطْلَاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنْقِيْصِ وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيْفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى فَهَذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابٍ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَدَلَائِلُهَا مِنَ الْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ مَشْهُوْرَةٌ.

Ketahuilah sungguh *ghibah* diperbolehkan karena tujuan yang dibenarkan *syara'* yang tidak bisa hasil kecuali dengannya. *Ghibah* memiliki enam sebab; *pertama*, dianiaya; Maka boleh bagi orang yang dianiaya melapor kepada sultan, *qadli* dan pihak lain yang memiliki wilayah atau kuasa atas keadilan terhadap pelaku aniaya. Dengan berkata: *"Fulan telah menganiayaku dengan sesuatu"*. *Kedua*, minta bantuan untuk merubah kemunkaran dan mengembalikan pelaku maksiat ke jalur yang benar. Dengan berkata pada orang yang mempu menghilangkan kemunkaran: *"Fulan berbuat demikian, maka laranglah darinya dan sebagainya"*. Tujuannya adalah mengantarkan untuk menghilangkan kemunkaran, jika tidak bermaksud

demikian maka diharamkan. Ketiga, meminta fatwa. Dengan berkata pada *Mufti*: *"Ayah, saudara, suamiku atau fulan telah menganiayaku dengan sesuatu. Apakah boleh demikian? Sementara aku tidak memiliki jalan untuk menyelamatkan diri, menghasilkan hak dan melawan penganiayaan?"* Dan semacamnya. Maka ini diperbolehkan karena hajat, akan tetapi yang lebih berhati-hati dan lebih utama berkata: *"Kamu tidak berkata dengan menunjuk seorang lelaki, diri seseorang atau suami, urusannya demikian?"* Maka sungguh tujuan itu akan hasil tanpa menunjuk diri seseorang. Di samping itu, menunjuknya diperbolehkan sebagaimana akan saya jelaskan dalam hadits Hindun, *insya Allah*. *Keempat*, menakut-nakuti muslimin dari berbuat tidak terpuji dan menasehati mereka. Hal ini ada beberapa aspek; di antaranya men-*jarhu majruhin* dari para *rawi* dan *syahid*. Hal ini diperbolehkan berdasarkan *ijma'* sahabat, bahkan wajib karena hajat. Di antaranya: musyawarah mengenai mertua seseorang, kerjasama, menitipkan barang, transaksi, dan lain sebagainya, atau bertetangga. Wajib bagi orang yang diajak musyawarah agar tidak merahasiakan kondisinya, akan tetapi menyebutkan sifat celanya dengan tujuan menasehati. Di antaranya: apabila melihat pelajar yang bimbang mengambil ilmu dari pelaku *bid'ah* atau *fasik*, dan khawatir akan menyesatkan dirinya. Maka ia boleh menasehatinya dengan menyebutkan kondisinya dengan tujuan nasehat, dan ini merupakan perkara yang disalahkan. Terkadang rasa dengki mengarahkan demikian pada *mutakallim*, setan menyerupakan padanya dan menghayalkan bahwa yang dikerjakan merupakan bentuk nasehat, maka pahamilah itu. Di antaranya: memiliki wilayah yang tidak menempat pada *wajal*nya; adakala karena tidak layak, dan adakala *fasik* atau pelupa dan semacamnya. Maka wajib menuturkannya bagi pihak yang memiliki wilayah umum agar menghilangkannya, dan menguasakan orang yang layak atau mengetahuinya agar *muamalah* sesuai kondisinya dan tidak membujuknya, serta mendorong dalam memotivasi istiqamah atau mencari gantinya. *Kelima*, menampakkan kefasikan atau *bid'ah* seperti orang yang terang-terangan minum *khamr*, menyita seseorang, memungut *fee*, mengoleksi harta secara dzalim, dan menguasai perkara batil; maka boleh menyebutkan perbuatan yang dilakukan terang-terangan, dan haram menyebutkan aib-aib lain kecuali ada sebab lain yang membolehkan dan akan kita sebutkan nanti. *Keenam*, mengenalkan; apabila seseorang terkenal dengan julukan si buta, si pincang, si tuli, si dungu, si miring dan sebagainya maka boleh mengenalkan mereka dengan julukan tersebut dan diharamkan memutlakkannya atas wajah mengurangi. Apabila bisa mengenalkannya dengan sebutan lain maka lebih utama. Inilah enam sebab utama yang dijelaskan para ulama, yang kebanyakan disepakati dan dalilnya hadits-hadits shahih dan masyhur.

420. Dampak Perbedaan Idul Adha pada Ibadah Qurban

Deskripsi Masalah

Baru-baru ini terjadi perbedaan Hari Idul Adha, sebagain ada yang berhari raya pada hari Selasa karena ikut kyainya dan sebagaian yang lain pada hari Rabu karena ikut Pemerintah. Hal ini menimbulkan masalah ketika ada tujuh orang iuran untuk membeli sapi qurban. Tiga dari mereka berhari raya Selasa, sedangkan yang empat berhari raya Rabu, padahal sapi sudah terlanjur disembelih pada hari Selasa.

Pertanyaan

a. Jika ibadah korban kolektif diwakilkan kepada panitia, bagaimana hukum menyembelih qurban pada hari Selasa?
b. Bagaimana hukum ibadah qurban bagi empat orang yang berhari raya Rabu?

Jawaban

a. Hukumnya tidak boleh, sebab wakil (panitia) harus melakukan tugasnya berdasar pada kemaslahatan yang kembali kepada *muwakkil (mudhahhi)*, sehingga dalam kasus ini panitia wajib *dhaman* (mengganti) qurban untuk empat orang yang berhari raya Rabu.
b. Tidak sah, sebab penyembelihan pada hari Selasa belum masuk waktunya menurut keyakinan empat orang yang berhari raya Rabu.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 1/310:

وَيَجِبُ عَلَى الْوَكِيْلِ مُوَافَقَةُ مَا عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَجِنْسِ ثَمَنٍ، وَقَدْرِهِ كَالْأَجَلِ وَالْحُلُوْلِ وَغَيْرِهَا أَوْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِيْنَةٌ قَوِيَّةٌ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ أَوْ عُرْفِ أَهْلِ نَاحِيَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِالْأَحْوَطِ نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ سُوْقًا أَوْ قَدْرًا أَوْ مُشْتَرِيًا وَدَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ أَوْ لَمْ تَدُلَّ وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ خِلَافِهِ جَازَ لِلْوَكِيْلِ مُخَالَفَتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ مَا وُكِّلَ فِيْهِ اهـ

Wajib bagi wakil menyesuaikan sesuatu yang ditentukan *muwakkil* dari waktu, tempat, jenis harga, dan kadarnya seperti tempo atau kredit dan lainnya. Atau *qarinah* kuat yang menunjukkannya dari kalam *muwakkil* atau *'urf* penduduk daerahnya. Andaikan hal itu tidak ada, maka wajib bagi wakil beramal secara hati-hati. Jika *muwakkil* menentukan pasar, kadar atau pelanggan, dan *qarinah-qarinah* menunjukkannya karena selain tujuan, atau tidak ada petunjuk dan maslahat mengindikasikan

sebaliknya, maka boleh bagi wakil menyelisihi *muwakkil* serta tidak wajib baginya mengerjakan sesuatu yang diserahkan padanya.

b. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj,* XVIII/119:

(وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا) أَيْ التَّضْحِيَةِ (إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ يَوْمَ النَّحْرِ) وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (ثُمَّ مَضَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ) خَفِيفَتَيْنِ (وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَقَعْ أُضْحِيَّةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَفُوا بِعَرَفَةَ فِي الثَّامِنِ غَلَطًا وَذَبَحُوا فِي التَّاسِعِ ثُمَّ بَانَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُمْ تَبَعًا لِلْحَجِّ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ، وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّ الْحَجَّ يُجْزِئُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ، فَكَذَا الْأُضْحِيَّةُ.

(*Waktunya masuk*), maksudnya waktu korban (ketika ketinggian matahari seperti tombak pada hari *nahr*) yaitu tanggal 10 Dzulhijjah (kemudian lewat kadar dua rakaat) yang ringan (dan dua khutbah yang ringan). Apabila menyembelih sebelum itu maka tidak disebut *udhiyah*, karena *khabar sahihain: "Awal mula perkara yang dikerjakan pada hari kita ini ialah solat, lalu kembali dan berkorban; barangsiapa yang mengerjakannya maka ia mengikuti sunnahku. Orang yang menyembelih sebelum itu, maka dagingnya disediakan untuk keluarganya, tidak disebut nusuk sama sekali."* Pengecualian ini adalah apabila diwakafkan di Arafah pada tanggal 8 karena kesalahan dan disembelih pada tanggal 9 kemudian hal itu tampak, maka mencukupi mereka karena mengikuti haji, sebagaimana disebutkan dalam *al-Majmu'* dari ad-Darimi. Pendapat ini hadir menurut *qaul marjuh*, yaitu sungguh haji mencukupi. Menurut *qaul ashah* tidak mencukupi, begitu juga *udhiyah*.

c. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, VIII/376:

(فَرْعٌ) إذَا جَعَلَ شَاتَهُ أُضْحِيَّةً أَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ ذَبَحَهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ وَيَلْزَمُهُ ذَبْحُ مِثْلِهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَدَلًا عَنْهَا وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ الْهَدْيَ الْمُعَيَّنَ قَبْلَ بُلُوغِ الْمَنْسِكِ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهِ وَلَزِمَهُ الْبَدَلُ فِي وَقْتِهِ وَلَوْ بَاعَ الْهَدْيَ أَوْ الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَيْنِ فَذَبَحَهُ الْمُشْتَرِي وَاللَّحْمُ بَاقٍ أَخَذَهُ الْبَائِعُ وَتَصَدَّقَ بِهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَرْشُ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ وَيَضُمُّ الْبَائِعُ إلَيْهِ مَا

يَشْتَرِي بِهِ الْبَدَلَ وَفِيْ وَجْهٍ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي شَيْئًا لِأَنَّ الْبَائِعَ سَلَّطَهُ
وَالْمَذْهَبُ وَلَوْ ذَبَحَ أَجْنَبِيٌّ الْأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَزِمَهُ مَا نَقَصَ مِنَ
الْقِيْمَةِ بِسَبَبِ الذَّبْحِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَجِيْءَ فِيْهِ الْخِلَافُ فِيْ أَنَّ اللَّحْمَ يُصْرَفُ
إِلَى مَصَارِفِ الضَّحَايَا أَمْ يَنْفَكُّ عَنْ حُكْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَيَعُوْدُ مِلْكًا كَمَا سَبَقَ فِيْمَا إِذَا
ذَبَحَ الْأَجْنَبِيُّ يَوْمَ النَّحْرِ وَقُلْنَا لَا يَقَعُ أُضْحِيَّةً ثُمَّ مَا حَصَلَ مِنَ الْأَرْشِ وَمِنَ اللَّحْمِ
إِنْ عَادَ مِلْكًا لَهُ فَيَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً يَذْبَحُهَا يَوْمَ النَّحْرِ وَلَوْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً
عَمَّا فِيْ ذِمَّتِهِ فَذَبَحَهَا أَجْنَبِيٌّ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَخَذَ اللَّحْمَ وَنُقْصَانَ اللَّحْمِ بِالذَّبْحِ
وَمَلَكَ الْجَمِيْعَ وَبَقِيَ الْأَصْلُ فِيْ ذِمَّةِ النَّاذِرِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

(Sub) Apabila seseorang menjadikan kambing tertentu sebagai korban atau *nadzar* korban, kemudian menyembelihnya sebelum hari *nahr*, maka wajib sedekah daging kambing itu. Tidak boleh baginya memakan daging kambing tersebut, dan ia diwajibkan menyembelih kambing lain pada hari *nahr* sebagai ganti dari kambing tersebut. Begitu juga jika seseorang menyembelih *hadyu* tertentu sebelum sampai ke tempat *nusuk*, maka wajib baginya sedekah daging *hadyu*, dan wajib baginya mengganti pada waktunya. Jika seseorang menjual *hadyu* atau korban yang ditentukan, lalu pembeli menyembelihnya, dan daging masih utuh, maka penjual mengambil dan menyedekahnya. Pembeli harus mengganti sesuatu yang kurang karena disembelih, dan penjual mengumpulkan sesuatu yang dibeli. Menurut *wajah* yang lemah sungguh pembeli tidak perlu bertanggung jawab, karena penjual telah memberi kuasa padanya. Menurut *al-Madzhab* jika orang lain menyembelih korban tertentu sebelum hari korban, maka ia wajib menanggung *qimah* yang kurang sebab disembelih. Ar-Rafi'i berkata: *"Barangkali ada khilaf mengenai daging yang dialokasikan ke tempat-tempat korban atau terlepas dari hukum korban dan kembali sebagai kepemilikan, sebagaimana keterangan lalu dalam persoalan apabila orang lain menyembelih pada hari korban"*. Kita (asy-Syafi'iyyah) berpendapat: *"Sembelihan tersebut tidak disebut korban, lalu ursy (ganti) dan daging yang dihasilkan jika kembali menjadi kepemilikan lalu membeli korban maka harus disembelih pada hari nahr. Jika seseorang bernadzar korban kemudian menentukan kambing sebagai tanggungannya, lalu orang lain menyembelihnya sebelum hari nahr, maka ia harus mengambil daging, kurangnya daging yang disembelih dan memiliki semua; sementara asal masih tetap dalam tanggungan nadzir". Wa Allahu a'lam.*

d. *Al-Hawi li al-Fatawa*, I/86:

مَسْأَلَةٌ: شَافِعِيٌّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ فِطْرِهِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ مِمَّنْ يُجَوِّزُ الْاقْتِصَارَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِذْ يَعْسُرُ عَلَيْهِ إِخْرَاجٌ قَدْ عُيِّنَ لِأَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَمْ لَا؟ فَإِنْ جُوِّزَ ثُمَّ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِهِ سِنِيْنَ؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَدْعُوَا إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ أَمْ لَا؟ وَإِذَا وَكَّلَ مِنْ مَذْهَبِهِ جَوَازُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَكِيْلِ أَنْ يُرَاعِيَ مَذْهَبَ الْمُوَكِّلِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَأَخْرَجَهَا لِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنِ الْمُوَكِّلِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ تَسْقُطْ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَكِيْلَ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ يَسْتَرِدُّهَا مِنَ الْفَقِيْرِ أَوْ يُخْرِجُ الْمُوَكِّلُ بَدَلَهَا مِنْ عِنْدِهِ؟ الْجَوَابُ: يَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُقَلِّدَ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ عَمِلَ فِيْهَا فِيْمَا تَقَدَّمَ بِمَذْهَبِهِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ أَمْ لَا، خُصُوصًا أَنَّ صَرْفَ زَكَاةِ الْفِطْرِ لِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ رَأْيٌ فِي الْمَذْهَبِ فَلَيْسَ الْأَخْذُ بِهِ خُرُوجًا عَنِ الْمَذْهَبِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ أَخْذٌ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ فِيْهِ وَتَقْلِيْدٌ لِمَنْ رَجَّحَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْوَكِيْلِ فَيُنْظَرُ إِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ الدَّفْعَ إِلَى عَدَدٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى أَقَلَّ مِنْهُ فَإِنْ فَعَلَ اسْتَرَدَّ مِنَ الْفَقِيْرِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِمَ الْوَكِيْلُ لِبَقِيَّةِ الْأَشْخَاصِ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَيَحْتَمِلُ بُطْلَانُ هَذَا التَّوْكِيْلِ وَيَحْتَمِلُ صِحَّتُهُ، وَيُرَاعِي مَذْهَبَ الْمُوَكِّلِ تَنْزِيْلًا لِلْإِطْلَاقِ مَنْزِلَةَ التَّعْيِيْنِ بِقَرِيْنَةِ الْمُعْتَقِدِ وَهَذَا الْاحْتِمَالُ أَظْهَرُ، فَإِنْ صَرَفَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِوَاحِدٍ اسْتَرَدَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِمَ لِأَحَدَ عَشَرَ نَفَرًا إِذِ الْمَوْجُودُ مِنَ الْأَصْنَافِ الْآنَ أَرْبَعَةٌ فَيَغْرَمُ لِتِسْعَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ قَدَحٍ وَذَلِكَ قَدَحٌ وَنِصْفٌ وَلِلْاِثْنَيْنِ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ، وَمَدَارِكُ جَمِيْعِ مَا قُلْنَاهُ مِنَ التَّخْرِيْجِ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِالْفِقْهِ.

Masalah: Madzhab Syafi'i tidak membolehkan meringkas pengeluaran zakat fitrah kurang dari tiga dari tiap-tiap golongan; apakah boleh bagi madzhab Syafi'i mengikuti sebagian madzhab lain yang membolehkan meringkas kurang darinya sebab sulitnya mengeluarkan yang ditentukan pada beberapa orang atau tidak? Jika dibolehkan maka sempurna; apa itu dibolehkan bagi madzhab Syafi'i, sementara ia mengeluarkannya sebelum itu menurut tuntutan madzhabnya selama beberapa tahun?

Apa kasus itu disyaratkan ketika kondisi darurat atau tidak? Apabila ia mewakilkan boleh kurang dari tiga dari madzhabnya, apakah wakil wajib menjaga madzhab *muwakkil* atau tidak? Jika tidak wajib, dan ia mengeluarkannya kurang dari tiga, apakah zakat gugur dari *muwakkil* atau tidak? Jika tidak gugur, apakah wakil wajib mengeluarkan dari hartanya, meminta kembali dari faqir atau *muwakkil* mengeluarkan ganti zakat dari miliknya? Jawab: Boleh bagi asy-Syafi'i mengikuti sebagian madzhab-madzhab dalam masalah ini; baik ia mengamalkan masalah diatas menurut madzhabnya atau tidak, baik ketika darurat atau tidak. Khususnya sungguh pengalokasian zakat fitrah yang kurang dari tiga adalah pendapat *al-Madzhab*. Sehingga mengadopsinya tidak keluar dari seluruh madzhab, akan tetapi mengadopsi salah satu dua *qaul* atau dua *wajah*, dan mengikuti pada *Ashab* yang men*tarjih*nya. Sedangkan masalah wakil, maka dilihat; jika *muwakkil* menentukan penyerahan padanya terhadap jumlah golongan, maka wakil tidak diperkenankan menyerahkan kurang dari ketentuan. Jika wakil mengerjakan, maka wakil harus meminta kembali dari faqir. Jika sulit, maka wakil menanggung *mustahiq* lain dari hartanya. Jika wakil memutlakkan, maka perwakilan ini *ihtimal* batal, dan *ihtimal* sah. Menjaga madzhab *muwakkil* karena menempatkan kemutlakan di tempat tertentu dengan *qarinah* orang yang meyakini. *Ihtimal* ini lebih jelas; jika seseorang mengalokasikannya sementara kondisinya seperti ini bagi satu orang, maka wakil meminta kembali. Jika sulit, maka ia harus menanggung sebelas golongan, karena golongan yang ada sekarang ada empat. Maka wakil harus menanggung tiga perempat untuk sembilan *mustahiq*, sejak itu. Hal itu mencemarkan dan membagi dua; bagi dua *mustahiq* memperoleh sedikit-sedikitnya *mutamawwal*, dan penemuan-penemuan semua perkara yang kita katakan dari pengeluaran, tidak samar bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang fikih.

e. *Al-Mantsur fi al-Qawa`id*, I/114:

وَلَوْ ضَحَّى عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ قَدْ دَخَلَ فَلَمْ يَكُنْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ شَاةِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَوْلُهُ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ أُضْحِيَّةً وَلَا صَدَقَةً فَإِنَّ الْعِبَادَةَ إِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا تَصِحُّ أَصْلًا اهـ

Jika seseorang berkorban pada waktunya yang telah masuk, ternyata belum waktunya; maka menurut zhahir sungguh korban itu dimiliki *malik*nya. Seperti ditunjukkan sebuah hadits tentang kambing korban. Ungkapan penulis: *"kambingmu"*, maksudnya daging kambing. Sungguh ungkapan tersebut menuntut bahwa kambing itu tidak disebut korban dan bukan sedekah. Karena sungguh ibadah apabila dikerjakan sebelum

masuk waktunya, maka sama sekali tidak sah.

f. Referensi lain:
   1) *Hawasyi asy-Syirwani wa al-'Ubbadi*, IX/358

421. Mencari Untung Melalui Akad Gadai

Deskripsi Masalah

Pak Amir menggadaikan sepeda motornya pada Pak Abu selama 2 bulan dengan kompensasi Rp. 2.000.000,-. Sepeda tersebut bisa diambil, jika Pak Amir membayar sebesar Rp. 2.200.000,-. Kemudian oleh Pak Abu sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada Pak Amin selama 4 bulan dengan kompensasi Rp. 4.000.000,- dan pak Abu bisa mengambil sepeda tersebut dengan membayar Rp. 4.200.000,- dengan konsekwensi jika sewaktu-waktu motor diambil Pak Amir, maka Pak Abu bersedia mengganti dengan sepeda motor gadai lainnya kepada pak Amin.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum mengambil untung dari akad gadai sebagaimana tergambar pada deskripsi soal?
b. Bagaimana hukum menjadikan barang jaminan untuk dijaminkan dalam transaksi utang dengan orang yang berbeda (orang ketiga) dengan jangka waktu jatuh tempo yang berbeda?

Jawaban

a. Hukumnya adalah haram, sebab subtansinya adalah menghutangkan dengan mensyaratkan keuntungan yang kembali kepada yang berpiutang (*muqridh*), dan disamping itu terjadi menjaminkan barang jaminan yang masih dalam status jaminan.
b. Hukumnya tidak diperbolehkan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, I/281:

اَلْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُوْنَ اَلْمَشْغُوْلُ لَا يُشْغَلُ وَلِهَذَا لَوْ رَهَنَ رَهْنًا بِدَيْنٍ ثُمَّ رَهَنَهُ بِآخَرَ لَمْ يَجُزْ فِي الْجَدِيْدِ اهـ

Kaidah ke dua puluh delapan: *"Perkara yang sibuk tidak bisa disibukkan lagi."* Berdasarkan kaidah ini, jika seseorang menggadaikan dengan hutang kemudian menggadaikannya dengan yang lain, maka tidak boleh menurut *qaul jadid*.

b. *I'anah ath-Thalibin*, III/70:

(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ مَا يَضُرُّ الرَّاهِنَ أَوِ الْمُرْتَهِنَ) أَيْ بِشَرْطِ شَيْءٍ يَضُرُّ الرَّاهِنَ أَوِ الْمُرْتَهِنَ –

أَيْ أَوْ كِلَيْهِمَا- فَأَوْ: مَانِعَةُ خُلُوٍّ، فَتَجُوْزُ الْجَمْعُ. وَخَرَجَ بِذَلِكَ: مَا لَا يَضُرُّهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا كَأَنْ شَرَطَ فِيْهِ مُقْتَضَاهُ -كَتَقَدُّمِ مُرْتَهِنٍ بِالْمَرْهُوْنِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ- أَوْ شَرَطَ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ -كَإِشْهَادٍ بِهِ، أَوْ شَرَطَ مَا لَا غَرَضَ فِيْهِ- كَأَنْ يَأْكُلَ الْعَبْدُ الْمَرْهُوْنُ كَذَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَقْدُ الرَّهْنِ فِي الْجَمِيْعِ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ فِي الْأَخِيْرِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ لَا يُبَاعَ) أَيْ أَصْلًا، وَهُوَ تَمْثِيْلٌ لِمَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ (وَقَوْلُهُ: عِنْدَ الْمَحِلِّ) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) أَيْ أَوْ لَا يُبَاعَ عِنْدَ الْمَحِلِّ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَهُوَ أَيْضًا تَمْثِيْلٌ لِمَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ (وَكَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ إلخ) هَذَا مِثَالٌ لِمَا يَضُرُّ الرَّاهِنَ، وَلِذَلِكَ أَعَادَ الْكَافَ. وَإِنَّمَا كَانَ مُضِرًّا بِهِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْمَرْهُوْنِ -كَسُكْنَى الدَّارِ، وَرُكُوْبِ الدَّابَّةِ- مُسْتَحَقَّةٌ لِلرَّاهِنِ، فَإِذَا شُرِطَتْ لِلْمُرْتَهِنِ أَضَرَّ بِالرَّاهِنِ (كَأَنْ يُشْرَطَا) الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ بَعْدُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَنْ يَزِيْدَ وَاوَ الْعَطْفِ، بِأَنْ يَقُوْلَ: وَكَأَنْ يُشْرَطَا إلخ. وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ: كَأَنْ لَا يُبَاعَ عِنْدَ الْمَحِلِّ، وَكَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ -أَيِ الْمَرْهُوْنِ لِلْمُرْتَهِنِ- أَوْ شَرْطِ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ -كَثَمَرِ الشَّجَرَةِ وَنِتَاجِ الشَّاةِ- مَرْهُوْنَةً. اهـ (مَرْهُوْنَةٌ) خَبَرُ أَنَّ أَيْ شَرَطَا أَنَّ الزَّوَائِدَ الَّتِيْ تَحْدُثُ تَكُوْنُ مَرْهُوْنَةً أَيْضًا فِي الدَّيْنِ. (فَيَبْطُلُ الرَّهْنُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ) هِيَ قَوْلُهُ كَأَنْ لَا يُبَاعَ، وَقَوْلُهُ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ، وَقَوْلُهُ كَأَنْ يُشْرَطَا إلخ. وَإِنَّمَا بَطَلَ فِيْهَا: لِإِخْلَالِ الشَّرْطِ فِي الْأُوْلَى بِالْغَرَضِ مِنَ الرَّهْنِ الَّذِيْ هُوَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْمَحِلِّ، وَلِتَغْيِيْرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ فِي الثَّانِيَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْعَقْدِ أَنْ تَكُوْنَ مَنَافِعُ الْمَرْهُوْنِ لِلرَّاهِنِ، لِأَنَّ التَّوَثُّقَ إِنَّمَا هُوَ بِالْعَيْنِ. وَلِجَهَالَةِ الزَّوَائِدِ وَعَدَمِهَا فِي الثَّالِثَةِ. وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِي الثَّانِيَةِ: مَا لَمْ تُقَدَّرِ الْمَنْفَعَةُ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ -وَكَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوْطًا فِيْ بَيْعٍ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَا بُطْلَانَ- بَلْ هُوَ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، وَصُوْرَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُوْلَ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِمِائَةٍ، عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِيْ بِهِ دَارَكَ هَذِهِ، وَيَكُوْنَ سُكْنَاهَا إِلَى سَنَةٍ فَيَقْبَلُ الْآخَرُ اهـ

(Ungkapan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari: *"Dengan syarat perkara yang merugikan penggadai atau pegadaian"*), maksudnya: menyaratkan sesuatu yang merugikan penggadai atau pegadaian (maksudnya kedua belah pihak). Huruf أَوْ berfaidah مَانِعَةُ خُلُوٍّ, sehingga boleh mengumpulkan.

Kecuali perkara yang tidak merugikan kedua pihak atau salah satunya, seperti menyaratkan tuntutan gadai seperti pegadaian mendahulukan barang gadaian ketika banyak penghutang, menyaratkan suatu *maslahat* seperti persaksian, atau menyaratkan sesuatu yang tidak ada tujuannya seperti budak yang digadaikan memakan sesuatu. Maka sungguh semua akad gadai ini sah, dan syarat akhir sia-sia. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Seperti tidak dijual"*), maksudnya sama sekali; ini adalah contoh perkara yang merugikan pegadaian. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Ketika jatuh tempo"*), مَحِلِّ dengan membaca *kasrah ha'*. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Atau lebih banyak"*), maksudnya: atau ketika jatuh tempo tidak dijual kecuali lebih dari harga sepadan. Ini juga merupakan contoh perkara yang merugikan pegadaian. (*"dan seperti manfaatnya..."*), ini adalah contoh perkara yang merugikan penggadai. Karena itu, penulis mengulangi *kaf*. Sungguh merugikannya, karena manfaat-manfaat barang gadaian seperti menempati rumah dan menaiki binatang adalah hak penggadai. Bila disyaratkan sesuatu yang merugikan penggadai pada pegadaian. (*"Seperti kedua pihak menyaratkan"*), yang sesuai pada ungkapan penulis setelahnya mengenai tiga contoh adalah menambahi *athaf*, dengan gambaran penulis berkata: *"dan seperti keduanya menyaratkan..."* Ungkapan *al-Manhaj* dan syarahnya: *"seperti ketika jatuh tempo tidak di jual, dan seperti manfaatnya"* maksudnya barang gadaian pada pegadaian, atau syarat memperbarui tambahan-tambahannya seperti buah dari pohon dan anak kambing yang digadaikan. (*"Barang yang digadaikan"*), ini adalah *khabar* أَنْ; maksudnya persyaratan tambahan-tambahan yang dihasilkan menjadi barang gadaian juga menurut agama, (*"maka ketiga contoh gadai batal"*), yaitu ungkapan penulis: *"seperti tidak dijual"* dan ungkapan penulis: *"seperti syarat manfaatnya"* dan ungkapan penulis: *"seperti kedua pihak menyaratkan..."* Sungguh ini batal, karena menyertai syarat pada kasus pertama dengan tujuan gadai; yaitu penjualan ketika jatuh tempo, dan karena merubah tuntutan akad pada kasus kedua. Itu karena tuntutan akad adalah manfaat-manfaat barang yang gadaian untuk penggadai, karena jaminannya berupa barang. Dan karena tidak diketahui adanya tambahan atau tidak pada kasus ketiga. Tempat batal pada kasus kedua adalah selama manfaatnya tidak dipastikan dengan waktu seperti setahun dan gadai disyaratkan dalam penjualan. Jika demikian, maka tidak batal, bahkan merupakan pengumpulan di antara penjualan dan penyewaan. Bentuknya, seseorang berkata: *"Saya menjual budak ini padamu seharga 100 dengan pertukaran kamu menggadaikan rumahmu ini kepadaku, dan penempatan rumah selama setahun"*; kemudian yang lain menerima.

c. *I'anah ath-Thalibin*, III/76:

(قَوْلُهُ: وَرَهَنَ لِآخَرَ) أَيْ لَيْسَ لَهُ رَهْنُهُ لِآخَرَ غَيْرَ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ لِلْأَوَّلِ أَيْضًا بِدَيْنٍ آخَرَ، لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ، وَالْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ اهـ

(Ungkapan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari: *"Dan menggadaikan pada orang lain"*), maksudnya *rahin* tidak boleh menggadaikan barang pada orang selain *murtahin* pertama, dan juga tidak boleh menggadaikannya pada *murtahin* pertama dengan hutang yang lain. Karena barang itu sudah digadaikan dengan suatu hutang, dimana barang yang sudah digadaikan tidak bisa digadaikan lagi dengan hutang lain.

422. Air Sedikit di Toilet

Deskripsi Masalah

Dalam kaidah fikih ketika terdapat pertentangan antara asal dan dhahir maka dimenangkan hukum dhahir ketika didukung sebab adat/kebiasaan (*'urifa 'adatan*) atau memenangkan salah satu dua hukum asal yang lebih kuat yang didukung oleh adat atau kebiasaan.

Pertanyaan

a. Bolehkah kita menghukumi suci air dalam bak penampung yang kapasitas tempatnya kurang dari dua *kullah*, di WC/tempat kencing yang banyak ditemui pada fasilitas umum (terminal, pasar, SPBU, bahkan di beberapa masjid) dengan mengambil dasar kaidah di atas?
b. Sebatas manakah tendensi adat/*gholib* dalam qaidah *"al yaqiinu laa yuzaalu bisysyak"*?

Jawaban

a. Boleh, menurut *qaul rajih* (yang unggul).
b. Sebatas adat/*ghalib* yang bertendensi pada sebab yang lemah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fath al-Mu'in* pada *I'anah ath-Thalibin*, I/104:

(قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ) وَهِيَ أَنَّ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَنَجُّسُهُ لِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ فِي مِثْلِهِ فِيهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ بِقَوْلَيِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَوِ الْغَالِبِ أَرْجَحُهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ عَمَلًا بِالْأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ مِنَ الْغَالِبِ الْمُخْتَلِفِ بِالْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ.

(قَوْلُهُ: عَمَلًا بِالْأَصْلِ) مَحَلُّ الْعَمَلِ بِهِ إِذَا اسْتَنَدَ ظَنُّ النَّجَاسَةِ إِلَى غَلَبَتِهَا، وَإِلَّا عُمِلَ بِالْغَالِبِ. فَلَوْ بَالَ حَيَوَانٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَتَغَيَّرَ، وَشَكَّ فِي سَبَبِ تَغَيُّرِهِ هَلْ هُوَ الْبَوْلُ؟ أَوْ نَحْوُ طُولِ الْمُكْثِ؟ حُكِمَ بِتَنَجُّسِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، لِاسْتِنَادِهِ إِلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَخَبَرِ

الْعَدْلِ، مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ غَيْرِهِ كَذَا فِيْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِيْ اهـ

(Kaidah penting) sungguh sesuatu yang asalnya suci, dan ada dugaan kuat terkena najis karena keumuman najis dalam semisalnya. Kasus ini ada dua *qaul* yang dikenal dengan ungkapanku: Hukum asal dan zhahir atau umum yang lebih unggul dari keduanya sungguh suci, karena mengamalkan hukum asal yang diyakini; sebab dia lebih membatasi daripada keumuman yang berbeda-beda kondisi dan waktunya. (Ungkapan penulis: *"Karena mengamalkan hukum asal"*), tempat amalnya apabila menyandarkan prasangka najis pada umumnya. Jika tidak, maka diamalkan umumnya. Sehingga jika binatang kencing di air yang banyak dan berubah, lalu diragukan sebab berubahnya; apakah karena air kencing? Atau lama diam? Maka dihukumi najis, karena mengamalkan zhahir; sebab disandarkan pada sebab tertentu seperti khabar adil, serta sungguh hukum asal tidak ada lainnya. Demikian keterangan dalam *syarah ar-Raudl* dan *al-Mughni*.

b. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, I/140:

الثَّالِثُ: مَا يُرَجَّحُ فِيْهِ الْأَصْلُ عَلَى الْأَصَحِّ وَضَابِطُهُ: أَنْ يَسْتَنِدَ الْاِحْتِمَالُ إِلَى سَبَبٍ ضَعِيْفٍ وَأَمْثِلَتُهُ لَا تَكَادُ تُحْصَرُ. مِنْهَا: الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَ لَكِنِ الْغَالِبُ فِيْهِ النَّجَاسَةُ كَأَوَانِيْ وَثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَالْقَصَّابِيْنَ وَالْكُفَّارِ الْمُتَدَيِّنِيْنَ بِهَا كَالْمَجُوْسِ وَمَنْ ظَهَرَ اخْتِلَاطُهُ بِالنَّجَاسَةِ وَعَدَمُ احْتِرَازِهِ مِنْهَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا كَمَا فِيْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنِ الْإِمَامِ وَطِيْنِ الشَّارِعِ وَالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوْشَةِ حَيْثُ لَا تُتَيَقَّنُ وَالْمَعْنَى بِهَا كَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ: الَّتِيْ جَرَى النَّبْشُ فِيْ أَطْرَافِهَا وَالْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ انْتِشَارُ النَّجَاسَةِ فِيْهَا وَفِيْ جَمِيْعِ ذَلِكَ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ اهـ

Ketiga: Sesuatu yang hukum asal di*tarjih qaul ashah* dan batasannya; Penyandaran *ihtimal* pada sebab lemah dan contoh-contohnya hampir tidak teringkas. Di antaranya: perkara yang diyakini najis, akan tetapi pada umumnya terkena najis; seperti wadah-wadah, baju-baju peminum *khamr*, penjagal, kaum kafir yang menetapi agama seperti Majusi, dan orang yang tampak bergumul dengan najis dan tidak bisa menjaganya, baik muslim atau kafir; sebagaimana dalam *Syarah Muhadzzab* dari al-Imam, tanah jalan dan pemakaman yang digali sekira tidak diyakini najisnya. Artinya sebagaimana kata al-Imam dan ulama lain adalah perkara yang biasa digali di pinggir-pingginya, dimana pada umumnya disangka najis menyebar. Semua kasus ini ada dua *qaul*, yang lebih *ashah* dihukumi suci karena menetapi hukum asal.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR di PP As-Sunniyyah Kencong Jember 09-10 Jumadil Ula 1433 H/ 31 Maret-01 April 2012 M

423. Penggabungan Panen dalam Zakat
424. Madrasah di Atas Tanah Masjid
425. Pemberian Calon Pejabat untuk Memilih
426. Zakat Tanaman Karet dan Kelapa Sawit
427. Dana Talangan Haji

KOMISI A

MUSHAHIH

KH. Ahmad Sadid Jauhari
KH. Ali Mas'adi

PERUMUS

KH. Azizi Hasbulloh
KH. Muhibbul Aman Ali
KH. Murtadlo Abdul Ghoni
K. Anang Darunnaja

423. Penggabungan Panen dalam Zakat

Deskripsi Masalah

Zaid menanam padi pada tanggal 1 Muharram 1432, panen bulan Jumadal Ula 1432 dengan penghasilan total beras tiga (3) kwintal. Pada bulan Rajab 1432 menanam lagi, bulan Dzulqa'dah 1432 panen dengan penghasilan tiga (3) kwintal (panen 1 dan 2 belum satu *nishab*). Kemudian Dzulhijjah 1432 menanam lagi, panen jatuh pada Rabi'uts Tsani 1433 dengan penghasilan beras 6 kwintal. Jika panen terakhir ini dijumlahkan dengan panen kedua sudah mencapai satu (1) *nishab*, namun sudah di tahun yang lain. Pada bulan Jumadal Ula 1433 menanam lagi, panen pada bulan Syawwal 1433 dengan penghasilan empat (4) kwintal.

Pertanyaan

a. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan?
b. Penggabungan panen dalam satu tahun (*haul*), apakah dihitung antara tanggal menanam, panen atau *buduww al-shalah* (layak panen)?

Jawaban

a. Menurut pendapat yang kuat (*ashah*) bahwa panen setahun digabungkan jadi satu, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut pendapat yang benar adalah hasil panen satu, dua, tiga dan empat, sebagaimana fatwa Syaikh Abdullah bin Ahmad Bamakhramah, Syaikh Baqusyair dan Syaikh Ali Bayazid.
b. *Khilaf*, menurut pendapat *ashah* dihitung dari hari panennya, pendapat kedua dihitung dari hari tanam.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, III/29:

فَائِدَةٌ: حَاصِلُ كَلَامِهِمْ فِي انْضِمَامِ الزُّرُوْعِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ إِذَا زَرَعَ صَيْفًا ثُمَّ شِتَاءً وَكَمُلَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي وَكَانَ حَصَادُهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ زَكَّاهُمَا بِالْاِتِّفَاقِ، فَلَوْ زَرَعَ صَيْفًا آخَرَ وَكَانَ حَصَادُهُ مَعَ الثَّانِي فِي عَامٍ وَمَجْمُوْعُهُمَا نِصَابًا لَمْ يَضُمَّ الثَّالِثَ إِلَى الثَّانِي عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بَلْحَاجٍ وَابْنِهِ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَخْرَمَةَ، وَيَضُمُّ إِلَيْهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ مَخْرَمَةَ وَصَاحِبِ الْقَلَائِدِ وَعَلِيٍّ بَايَزِيْدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ، اهـ منتخب اهـ من خط بعضهم. وَاشْتَرَطَ فِي التُّحْفَةِ وَالْفَتْحِ فِي الثَّمَرِ كَوْنَ الْقَطْعِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ أَيْضًا كَالزَّرْعِ، وَخَالَفَهُ فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِرْشَادِ، فَاشْتَرَطُوْا كَوْنَ الْإِطْلَاعِ فِي عَامٍ لَا الْقَطْعِ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ حَصَادُهُمَا فِي عَامٍ

وَاحِدٍ) وَلَوْ تَوَاصَلَ بَذْرُ الزَّرْعِ عَادَةً بِأَنِ امْتَدَّ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ مُتَلَاحِقًا عَادَةً فَذَلِكَ زَرْعٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ حَصَادُهُ فِيْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَيُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَأَمَّا إِنْ تَفَاصَلَ الْبَذْرُ بِأَنِ اخْتَلَفَ أَوْقَاتُهُ عَادَةً فَإِنَّهُ يُضَمُّ أَيْضًا بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ لَكِنْ بِشَرْطِ وُقُوْعِ الْحَصَادَيْنِ فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ أَيْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً سَوَاءٌ أَوْقَعَ الزَّرْعَانِ فِيْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لَا اهـ عبد الحميد عن الكردي والنهاية والمغني وباعشن.

Faidah: Kesimpulan kalam ulama mengenai pengumpulan sebagian tanaman pada sebagian yang lain; bila seseorang menanam di musim panas lalu musim dingin, dan menyempurnakan yang pertama pada yang kedua, dimana matang keduanya pada satu tahun, maka ia harus menzakati keduanya menurut kesepakatan ulama. Apabila seseorang menanam di musim panas yang lain dan matangnya bersama yang kedua pada satu tahun, dimana kumpulan keduanya mencapai *nishab*, maka yang ketiga tidak dikumpulkan pada yang kedua; menurut Abdillah Balhaj dan anaknya, Ahmad dan Abdullah bin Umar Makhramah. Sementara menurut Abdullah bin Ahmad Makhramah, *shahib al-Qalaid* dan Ali Bayazid dikumpulkan padanya; dan ini pendapat yang tepat, dan tuntutan *kalam ashab*. Demikian pernyataan Muntakhab dari tulisan sebagian ulama... dalam *at-Tuhfah* dan *al-Fath*, pengarang menyaratkan dalam potongan kurma pada satu tahun juga seperti tanaman. Dalam *al-Imdad, an-Nihayah, al-Mughni* dan *al-Irsyad*, pengarang berbeda pendapat. Mereka menyaratkan muncul dalam satu tahun, bukan potongan. (Ungkapan penulis: "*Dimana kematangan keduanya dalam satu tahun*"), jika biji tanaman bersambung secara adat dengan bertambah panjang sebulan atau dua bulan dalam kondisi bertemu secara adat, maka itu adalah satu tanaman. Jika matangnya tidak terjadi dalam satu tahun, maka sebagiannya dikumpulkan pada sebagian yang lain. Sedangkan jika biji terpisah-pisah, dengan gambaran waktunya berbeda-beda secara adat, maka sungguh sebagiannya dikumpulkan juga pada sebagian yang lain, tetapi dengan syarat jatuhnya dua matang itu dalam satu tahun; maksudnya dalam 12 bulan Arab, baik dua tanaman itu menjatuhkan dalam satu tahun atau tidak... Demikian pernyataan Abdul Hamid dari *al-Kurdi, an-Nihayah, al-Mughni* dan *Baisyna*.

b. *Hasyiyah Qulyubi wa 'Umairah*, II/23:

(وَزَرْعَا الْعَامِ يُضَمَّانِ) وَذَلِكَ كَالذُّرَةِ تُزْرَعُ فِي الْخَرِيْفِ وَالرَّبِيْعِ وَالصَّيْفِ. (وَالْأَظْهَرُ فِي الضَّمِّ (اعْتِبَارُ وُقُوْعِ حَصَادَيْهِمَا فِيْ سَنَةٍ) وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ الْأَوَّلُ: خَارِجًا عَنْهَا،

فَإِنْ وَقَعَ حَصَادُ الثَّانِي بَعْدَهَا فَلَا ضَمَّ لِأَنَّ الْحَصَادَ هُوَ الْمَقْصُودُ، وَعِنْدَهُ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ، وَالثَّانِي: الْاِعْتِبَارُ بِوُقُوعِ الزَّرْعَيْنِ فِي سَنَةٍ وَإِنْ كَانَ حَصَادُ الثَّانِي خَارِجًا عَنْهَا لِأَنَّ الزَّرْعَ هُوَ الْأَصْلُ وَالْحَصَادُ فَرْعُهُ وَثَمْرَتُهُ، وَالثَّالِثُ: الْاِعْتِبَارُ بِوُقُوعِ الزَّرْعَيْنِ وَالْحَصَادَيْنِ فِي سَنَةٍ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ يُعَدَّانِ زَرْعَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الزَّرْعُ الْأَوَّلُ أَوْ حَصَادُ الثَّانِي خَارِجًا عَنْهَا وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً. وَالرَّابِعُ: الْاِعْتِبَارُ بِوُقُوعِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الزَّرْعَيْنِ أَوِ الْحَصَادَيْنِ فِي سَنَةٍ وَفِي قَوْلٍ: إِنَّ مَا زُرِعَ بَعْدَ حَصَادِ الْأَوَّلِ فِي الْعَامِ لَا يُضَمُّ إِلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالضَّمِّ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الزَّرْعُ الثَّانِي بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّ الْأَوَّلِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ وَلَوْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ مَعًا أَوْ عَلَى التَّوَاصُلِ الْمُعْتَادِ ثُمَّ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَقْلٌ لَمْ يَشْتَدَّ حَبُّهُ فَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ فِيهِ بِالضَّمِّ، وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ. قَوْلُهُ: (وَقُوعُ حَصَادَيْهِمَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُرَادُ دُخُولُ وَقْتِ الْحَصَادِ لَا وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ. وَالْمُعْتَمَدُ فِي الثِّمَارِ اعْتِبَارُ وَقْتِ الْاِطْلَاعِ لَا الْجِدَادِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْحَصَادِ وَالْاِطْلَاعِ لَيْسَ بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ كَوْنُ الزَّرْعِ وَاقِعًا مِنَ الْمَالِكِ وَلَا بِقَصْدِهِ اهـ

(Dua tanaman dalam setahun dikumpulkan), seperti jagung yang ditanam di musim gugur, semi, dan panas. (Menurut *qaul azhar*) pengumpulan ini (*i'tibar*nya adalah matangnya dua tanaman dalam satu tahun). Jika tanaman pertama keluar darinya, jika matang kedua terjadi setelahnya maka tidak dikumpulkan, karena matang adalah tujuan. Ketika itu, maka kewajiban tetap. Kedua: di*i'tibar* jatuhnya dua tanaman dalam satu tahun meskipun matang kedua keluar darinya. Karena tanaman itu asal, sedangkan matang adalah cabang dan buahnya. Ketiga: di*i'tibar* jatuhnya dua tanaman dan dua matang dalam setahun, karena keduanya dianggap tanaman satu tahun pada saat demikian. Berbeda dalam persoalan apabila tanaman pertama atau matang kedua keluar darinya, yaitu dua belas bulan Arab.

وَالرَّابِعُ: الْاِعْتِبَارُ بِوُقُوعِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الزَّرْعَيْنِ أَوِ الْحَصَادَيْنِ فِي سَنَةٍ وَفِي قَوْلٍ: إِنَّ مَا زُرِعَ بَعْدَ حَصَادِ الْأَوَّلِ فِي الْعَامِ لَا يُضَمُّ إِلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالضَّمِّ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الزَّرْعُ الثَّانِي بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّ الْأَوَّلِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ وَلَوْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ مَعًا أَوْ عَلَى التَّوَاصُلِ الْمُعْتَادِ ثُمَّ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَقْلٌ لَمْ يَشْتَدَّ حَبُّهُ فَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ

فِيهِ بِالضَّمِّ، وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ. قَوْلُهُ: (وَقُوعُ حَصَادَيْهِمَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُرَادُ دُخُولُ وَقْتِ الْحَصَادِ لَا وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ. وَالْمُعْتَمَدُ فِي الثِّمَارِ اعْتِبَارُ وَقْتِ الْاِطِّلَاعِ لَا الْجِدَادِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْحَصَادِ وَالْاِطِّلَاعِ لَيْسَ بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْ كَوْنَ الزَّرْعِ وَاقِعًا مِنَ الْمَالِكِ وَلَا بِقَصْدِهِ اهـ

Keempat: di*i'tibar* jatuhnya salah satu dua bagian tanaman, atau dua matang dalam setahun. Menurut satu *qaul*: Sesuatu yang ditanam setelah matang pertama dalam setahun tidaklah dikumpulkan padanya. Diantara ulama ada yang memastikan pengumpulan ketika tanaman kedua jatuh setelah matangnya biji pertama. Menurut *qaul ashah* sunggguh ada *khilaf*. Jika dua tanaman jatuh bersama atau pada lanjutan yang dibiasakan, kemudian menyusul salah satunya, dan yang lain berupa sayuran yang bijinya belum matang, menurut *qaul ashah* memetiknya dengan cara dikumpulkan. Menurut satu pendapat: *Sebaliknya*. (Ungkapan penulis: "*Terjadi dua kematangan*"), adalah menurut *mu'tamad;* yang dimaksud ialah masuk waktu matang, bukan wujud matang secara nyata. Menurut *mu'tamad* mengenai buah-buahan, *i'tibar*nya adalah waktu tampak, bukan waktu memilih. Sebagian ulama berkata: *"hikmahnya sungguh tiap-tiap matang dan tampak itu bukan pilihan malik."* Karena itu, penulis tidak mengungkapkan adanya tanaman itu jatuh dari *malik* dan tidak dengan tujuannya.

c. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, V/515:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَوْقَاتُ الزَّرْعِ فَفِي ضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ) (أَحَدُهَا) أَنَّ الْاِعْتِبَارَ بِوَقْتِ الزِّرَاعَةِ فَكُلُّ زَرْعَيْنِ زُرِعَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ مِنْ صَيْفٍ أَوْ شِتَاءٍ أَوْ رَبِيعٍ أَوْ خَرِيفٍ ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَالْحَصَادُ فَرْعٌ فَكَانَ اعْتِبَارُ الْأَصْلِ أَوْلَى (وَالثَّانِي) أَنَّ الْاِعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْحَصَادِ فَإِذَا اتَّفَقَ حَصَادُهُمَا فِي فَصْلٍ ضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ حَالَةُ الْوُجُوبِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ أَوْلَى (وَالثَّالِثُ) يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ زِرَاعَتُهُمَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَحَصَادُهُمَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ فِي زَكَاةِ الْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ يُعْتَبَرُ الطَّرَفَانِ فَكَذَلِكَ هَهُنَا (وَالرَّابِعُ) يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زِرَاعَةِ عَامٍ وَاحِدٍ كَمَا قُلْنَا فِي الثِّمَارِ). (الشَّرْحُ) هَذِهِ الْأَقْوَالُ مَشْهُورَةٌ وَقَدِ اخْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ جِدًّا وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ وَقَدْ جَمَعَهَا الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَلَخَّصَ مُتَفَرِّقَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيهَا فَقَالَ لَا يُضَمُّ

زَرْعُ عَامٍ إِلَى زَرْعِ عَامٍ آخَرَ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ بِلَا خِلَافٍ وَاخْتِلَافُ أَوْقَاتِ الزِّرَاعَةِ لِضَرُورَةِ التَّدْرِيجِ كَمَنْ يَبْتَدِئُ الزِّرَاعَةَ وَيَسْتَمِرُّ فِيهَا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ لَا يَقْدَحُ بَلْ كُلُّهُ زَرْعٌ وَاحِدٌ وَيُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ الشَّيْءُ قَدْ يُزْرَعُ فِي السَّنَةِ مِرَارًا كَالذُّرَةِ تُزْرَعُ فِي الْخَرِيفِ وَالرَّبِيعِ وَالصَّيْفِ فَفِي ضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ عَشَرَةُ أَقْوَالٍ أَكْثَرُهَا مَنْصُوصَةٌ أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ إِنْ وَقَعَ الْحَصَادَانِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ضُمَّ وَإِلَّا فَلَا وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ (وَالثَّانِي) إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ فِي سَنَةٍ ضُمَّ وَإِلَّا فَلَا وَاجْتِمَاعُهُمَا فِي سَنَةٍ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَرْعِ الْأَوَّلِ وَحَصْدِ الثَّانِي أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً كَذَا قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ (وَالرَّابِعُ) إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ فِي سَنَةٍ أَوْ زَرْعُ الثَّانِي وَحَصْدُ الْأَوَّلِ فِي سَنَةٍ ضُمَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ (وَالْخَامِسُ) الْاعْتِبَارُ بِجَمِيعِ السَّنَةِ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ إِمَّا الزَّرْعَيْنِ أَوِ الْحَصَادَيْنِ (وَالسَّادِسُ) إِنْ وَقَعَ الْحَصَادَانِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ضُمَّ وَإِلَّا فَلَا (وَالسَّابِعُ) إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ضُمَّ وَإِلَّا فَلَا (وَالثَّامِنُ) إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ضُمَّ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُرَادُ بِالْفَصْلِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (التَّاسِعُ) أَنَّ الْمَزْرُوعَ بَعْدَ حَصْدِ الْأَوَّلِ لَا يُضَمُّ كَحَمْلَيْ شَجَرَةٍ (وَالْعَاشِرُ) خَرَّجَهُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ مَا بَعْدَ زَرْعِ سَنَةٍ يُضَمُّ وَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِ الزَّرْعِ وَالْحَصَادِ قَالَ وَلَا أَعْنِي بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فَإِنَّ الزَّرْعَ لَا يَبْقَى هَذِهِ الْمُدَّةَ وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ زَرْعُ الثَّانِي بَعْدَ حَصْدِ الْأَوَّلِ فَلَوْ كَانَ زَرْعُ الثَّانِي بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّ الْأَوَّلِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ (أَصَحُّهُمَا) أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ (وَالثَّانِي) الْقَطْعُ بِالضَّمِّ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي الْحُصُولِ فِي الْأَرْضِ اهـ

Mushannif ﷺ berkata: (*Jika waktu menanam berbeda-beda, maka pengumpulan sebagiannya pada sebagian yang lain ada empat qaul*). (Pertama) sungguh *i'tibar*nya adalah waktu menanam, sehingga setiap dua tanaman yang ditanam pada satu musim dari musim panas, dingin, semi atau gugur maka sebagiannya dikumpulkan pada sebagian yang lain. Sebab tanaman adalah asal, sedangkan matang itu cabang. Maka *i'tibar* asal itu lebih utama. (Kedua) sungguh *i'tibar*nya adalah waktu matang. Sehingga bila matang kedua tanaman dalam satu musim, maka salah satunya dikumpulkan pada yang lain, karena itu merupakan kondisi wajib. Maka

i'tibar penulis itu lebih utama. (Ketiga) kedua tanaman di*i'tibar* dalam satu musim dan matang keduanya dalam satu musim. Karena *zakat* binatang dan buah-buahan *i'tibar*nya adalah dua bagian, maka demikian pula di sini. (Keempat) di*i'tibar* dari tanaman satu tahun, sebagaimana kata kita mengenai buah-buahan). (*Syarh*) *qaul-qaul* ini masyhur, sungguh *mushannif* meringkas masalah dengan sungguh-sungguh, yang dikembangkan dalam kitab-kitab *ashab*. Ar-Rafi'i ﷺ mengumpulkan dan meringkas *khilaf kalam ashab* di dalamnya, lalu beliau berkata: *"Tanaman setahun tidak dikumpulkan pada tanaman tahun yang lain dalam menyempurnakan nishab tanpa khilaf dan perbedaan waktu menanam, karena darurat menggolongkan, seperti orang yang mulai menanam dan berlanjut selama sebulan atau dua bulan maka tidak cacat, tetapi seluruhnya satu tanaman dan sebagiannya dikumpulkan pada sebagian yang lain tanpa khilaf. Lalu sesuatu terkadang ditanam dalam satu tahun berulang kali, seperti jagung ditanam di musim gugur, semi, dan panas. Maka dalam mengumpulkan sebagiannya pada sebagian yang lain ada sepuluh pendapat, yang mayoritas dinash."* Menurut *ashah*, menurut mayoritas ulama': jika dua matang jatuh dalam satu tahun, maka dikumpulkan. Sedangkan jika tidak, maka tidak dikumpulkan. Diantara ulama yang menshahihkannya ialah al-Bandaniji. (Kedua) jika dua tanaman dan dua matang terjadi dalam setahun, maka dikumpulkan. Sedangkan jika tidak, maka tidak dikumpulkan. Perkumpulan keduanya dalam satu tahun itu antara tanaman pertama dan matang kedua tidak sampai dua belas bulan Arab. Begitu pula Imam al-Haramain dan al-Baghawi berkata. (Keempat) jika dua tanaman dan dua matang terjadi dalam satu tahun atau tananam kedua dan matang pertama dalam satu tahun, maka dikumpulkan. Jika tidak, maka tidak dikumpulkan. Pendapat ini lemah menurut *ashab*. (Kelima) *I'tibar* seluruh tahun adalah salah satu dua bagian, adakala dua tanaman atau dua matang. (Keenam) jika dua matang terjadi dalam satu musim, maka dikumpulkan. Sedangkan jika tidak, maka tidak dikumpulkan. (Ketujuh) jika dua tanaman terjadi dalam satu musim, maka dikumpulkan. Sedangkan jika tidak, maka tidak dikumpulkan. (Kedelapan) jika dua tanaman dan dua matang terjadi dalam satu musim, maka dikumpulkan. Sedangkan jika tidak, maka tidak dikumpulkan. Yang dimaksud dengan musim ialah empat bulan. (Kesembilan) sungguh yang ditanam setelah matang pertama itu tidak dikumpulkan; seperti dua kandungan pohon. (Kesepuluh) dikeluarkan oleh Abu Ishaq, sungguh perkara setelah ditanam selama setahun itu dikumpulkan. Tidak ada pengaruh karena perbedaan tanaman dan matang. Beliau berkata: *"Maksud setahun bukan dua belas bulan"*. Karena sungguh tanaman tidak tetap selama masa ini. Sungguh maksudnya selama enam bulan sampai delapan bulan. Ini semua bila tanaman kedua setelah

matang pertama. Jika tanaman kedua setelah biji pertama menjadi matang, terkait masalah ini ada dua *thariq*. (Menurut *ashah*) masalah itu menetapi *khilaf* ini. (Kedua) memetik dengan mengumpulkan, karena kumpulan keduanya dihasilkan di tanah.

d. *Qala'id al-Khara'id li al-Faqih Abdullah Muhammad Baa Qusyair al-Hadlrami asy-Syafi'i*, I/213:

أَفْتَى أَبُوْ مَخْرَمَةَ بِأَنَّ مَنْ زَرَعَ ذُرَّةً فِيْ صَيْفٍ ثُمَّ أُخْرَى فِي الشِّتَاءِ وَتَمَّ مَجْمُوْعُهُمَا نِصَابًا ثُمَّ فِيْ أَوَّلِ الصَّيْفِ الْآخَرِ ذُرَّةً لَمْ تَبْلُغْهُ أَنَّهَا إِنْ بَلَغَتْهُ مَعَ ذُرَّةِ الشِّتَاءِ قَبْلَهَا وَكَانَ حَصَادُهُمَا يَجْمَعُهُ سَنَةٌ عَدَدِيَّةٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا وَإِلَّا فَلَا أَيْ فَلَا يُعْتَبَرُ لِلْأَخِيْرَةِ ضَمُّ الْأُوْلَى مَعَهَا وَإِنِ اعْتَبَرْنَا ضَمَّهَا إِلَى الثَّانِيَةِ لِكَوْنِهِمَا فِيْ سَنَةٍ وَيُشْبِهُ هٰذَا مَا سَبَقَ فِي النَّخْلِ وَمِثْلُهُ يُؤْخَذُ مِنْ هُنَا ضَمُّ الثَّانِيْ إِلَى الثَّالِثِ لِتَكْمِلَةِ النِّصَابِ فِي الثَّالِثِ فِيْهِ إِنْ تَمَّ بِهِ اهـ

Abu Makhramah berfatwa: "*Sungguh orang yang menanam jagung di musim panas, lalu orang lain menanam di musim dingin, dan kumpulan keduanya mencapai nishab. Kemudian pada awal musim panas yang lain menanam jagung yang tidak mencapai nishab, sungguh jagung itu mencapai nishab beserta jagung pada musim dingin sebelumnya; dan matang keduanya berkumpul dalam beberapa tahun, maka wajib menzakatinya. Jika tidak, maka tidak wajib; maksudnya bagi yang akhir tidak dii'tibar bahwa yang pertama dikumpulkan bersamanya. Jika kita mengi'tibar pengumpulannya pada yang kedua, karena keduanya dalam satu tahun. Ini menyerupai perkara lalu dalam saringan dan semisalnya; dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa yang kedua dikumpulkan pada yang ketiga untuk menyempurnakan nishab pada yang ketiga, jika mencapai nishab dengannya.*"

424. Madrasah di Atas Tanah Masjid

Deskripsi Masalah

Ketika tanah di halaman masjid masih luas, sementara kegiatan belajar membutuhkan lahan guna pendirian gedung madrasah. Atas kesepakatan takmir masjid, maka dibangunlah madrasah di atas lahan masjid yang masih tersisa. Setelah madrasah menjadi maju dan mempunyai penghasilan yang melimpah, tidak sadar kalau berdiri di atas tanah masjid. Selama ini, tidak pernah memberi kontribusi pada masjid, sehingga takmir masjid merasa dirugikan, karena para tenaga pendidik dan murid selalu menggunakan fasilitas masjid, seperti WC, kamar mandi, dan lain sebagainya. Akan lebih terasa lagi, ketika madrasah dinegerikan.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum membangun gedung madrasah di atas tanah masjid?
b. Perjanjian bentuk apa yang seharusnya dilakukan antara pihak masjid dan madrasah, sekira tidak melanggar hukum *syar'i*?

Jawaban

a. Hukum membangun madrasah di atas tanah milik masjid atau waqaf untuk masjid, tidak boleh kecuali jika sesuai dengan syarat *waqif* yang dinyatakan dalam *sighat* waqaf.
b. Belum ditemukan solusi yang tepat dalam madzhab Syafi'i yang memungkinkan untuk membiarkan keberadaan madrasah tersebut. Akan tetapi, menurut sebagian ulama madzhab Hanbali, jika sebagian besar masyarakat sekitar masjid menyetujui bagian dari masjid dialihfungsikan sebagai madrasah, maka hukumnya boleh. Dengan demikian, jika masyarakat sekitar masjid dalam deskripsi masalah, sepakat untuk membiarkan keberadaan madrasah karena dipandang membawa maslahat bagi masyarakat sekitar, maka hukumnya boleh bagi pengurus masjid untuk melanjutkan keberadaan madrasah tersebut.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 65 [Dar al-Fikr]:

لَا يَجُوْزُ فِعْلُ نَحْوِ حَوْضٍ فِيْهِ مِمَّا يُغَيِّرُ هَيْئَةَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ فِيْ صُلْبِ الْوَقْفِ مُتَّصِلًا بِهِ كَأَنْ يَقُوْلَ: وَقَفْتُ هَذِهِ الْأَرْضَ مَسْجِدًا بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلَ فِيْهَا حَوْضٌ لِلْمَاءِ مَثَلًا، أَوِ اطَّرَدَتْ عَادَةٌ مَوْجُوْدَةٌ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ عَلِمَ بِهَا بِفِعْلِ نَحْوِ الْحَوْضِ اهـ

Tidak boleh membuat seumpama telaga di dalam masjid dari hal-hal yang dapat merubah kondisi masjid, kecuali jika *waqif* menyaratkan di dalam waqaf yang *muttasil*. Misalkan *waqif* berkata: "*Saya mewaqafkan tanah ini sebagai masjid dengan syarat di dalamnya dibuatkan telaga untuk air, misalkan; atau adat yang berlaku dan wujud pada masa waqif yang diketahui dengan membuat semisal telaga.*"

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 174 [Dar al-Fikr]:

(مَسْأَلَةٌ ب) وَظِيْفَةُ الْوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتَعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فِيْ مَصَارِفِهِ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ فَقَدْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيْ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلِ الْأَوْلِيَاءِ ... وَيَجُوْزُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُعَاوَضَةُ فِيْ مِلْكِ الْمَسْجِدِ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ كَأَنْ كَانَتْ أَرْضُ الْمَسْجِدِ لَا تُحْرَثُ أَوْ تُحْرَثُ

نَادِرًا فَرَغِبَ فِيهَا شَخْصٌ بِأَرْضٍ تُحْرَثُ دَائِمًا وَيَكُوْنُ بِصِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ أَوْلَى فَيَكْتُبُ فِي الصِّيغَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ صَارَ الزِّبْرُ الْفُلَانِيُّ الْمُحَدَّدُ بِكَذَا لِمَسْجِدِ كَذَا مِنْ فُلَانٍ بِالْمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَكْمِلَةِ لِلشُّرُوْطِ وَالْأَرْكَانِ، فَصَارَ الزِّبْرُ الْمَذْكُوْرُ مِلْكًا مِنْ أَمْلَاكِ الْمَسْجِدِ قَطْعًا فَلَاحًا، وَتَعَوَّضَ فُلَانٌ الْمَذْكُوْرُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ مِلْكُ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَهُوَ الزِّبْرُ الْفُلَانِيُّ بِحُدُوْدِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى لِسَانِ الْقَيِّمِ وَالْوَلِيِّ شَرْعًا عَلَى الْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ. وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُوْرِ الْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ عَنِ الْمَسْجِدِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ

(Masalah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih) Tugas wali dalam urusan yang ia kuasai ialah menjaga, merawat dan men*tasaruf*kan dengan keuntungan dan kemaslahatan, serta mengalokasikan ke tempat-tempatnya. Tugas ini secara global; sedangkan secara terperinci, terkadang hukumnya berbeda-beda dalam sebagian *furu'* masalah perwalian ... Boleh, bahkan wajib bagi wali menukar harta milik masjid jika ia melihat maslahat, seperti tanah masjid yang tidak ditanami atau jarang ditanami kemudian ada orang yang meminatinya dengan ganti tanah bisa ditanami selamanya. Hal itu lebih utama dilakukan dengan *shighat mu'awadhah.* Lalu Wali menuliskan *sighat*nya: *"Amma ba'du. Sungguh tanah Si Fulan yang terbatasi sekian telah menjadi milik masjid ini, dari Si Fulan dengan tukar-menukar syar'i yang sempurna syarat dan rukunnya, sehingga tanah tersebut menjadi bagian dari harta milik masjid secara pasti dan nyata. Si Fulan tersebut telah diberi ganti dalam pertukaran itu dengan tanah milik masjid tersebut, dan tanah tersebut menurut syara' menjadi milik Si Fulan dengan batasan dari ke empat arahnya berdasarkan pernyataan Qayyim dan Wali Masjid tersebut, yaitu Si Fulan bin Fulan."* Pertukaran itu dilakuan setelah jelas adanya keuntungan yang besar dan kemaslahatan. Wali juga boleh melakukan *muqasamah* (dalam akad *syuf'ah*) atas nama masjid sebagaimana *tasarruf* lainnya.

c. *I'anah ath-Thalibin,* III/171 [Dar al-Fikr]:

تَنْبِيْهٌ حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ، اتُّبِعَ فِيْهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ، ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِيْنَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ ... ثُمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلُ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِشُرْبٍ، وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ حُرْمَةَ نَحْوِ بُصَاقٍ وَغَسْلٍ وَسَخٍ فِي مَاءِ مُطَهَّرَةِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ كَثُرَ. (قَوْلُهُ:

حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ) أَيْ جَعَلَهُ مُجْمَلًا، أَيْ غَيْرَ وَاضِحِ الدَّلَالَةِ، كَمَا إِذَا قَالَ وَقَفْتُ هَذَا عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِ أَبِي الْمَيِّتِ، وَأَطْلَقَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يُعَيِّنْهَا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَلَا بِسُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَيُعْمَلُ بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ فِي زَمَنِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: اتُّبِعَ فِيهِ) أَيْ فِي شَرْطِهِ الْمُجْمَلِ أَوْ فِي الْوَقْفِ، فَالضَّمِيرُ يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي، وَقَوْلُهُ فِي زَمَنِهِ، أَيِ الْوَاقِفِ. وَفِي التُّحْفَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ الْآنَ فِي شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ. اهـ وَالْمُرَادُ بِالْأَوَّلَيْنِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ (لِأَنَّهُ) أَيِ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ فِي زَمَنِهِ (بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ) أَيِ الْوَاقِفِ (ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ الخ) أَيْ ثُمَّ إِذَا فُقِدَ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ، اتُّبِعَ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ (وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ الخ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُتَّبَعُ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ إِذَا فُقِدَ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ: امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ أَيِ الَّتِي لَمْ يُعْلَمْ فِيهَا قَصْدُ الْوَاقِفِ غَيْرَ الشُّرْبِ وَامْتَنَعَ نَقْلُ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ إِلَى قَصْدِ الْوَاقِفِينَ، الشُّرْبُ فِيهَا فَقَطْ اهـ

(Peringatan) sekira *waqif* mengglobalkan syaratnya, maka diikutkan *'urf* yang berlaku pada masanya, karena *'urf* menempati syaratnya. Kemudian sesuatu yang mendekati tujuan-tujuan *waqif,* seperti ditunjukkan kalam ulama. Karena itu, maka air-air yang disediakan di jalan dilarang digunakan selain minum dan dipindahkan meskipun untuk diminum. Sebagian ulama membahas keharaman semisal meludah dan madu yang kotor dalam air yang suci di masjid, meskipun airnya banyak. (Ungkapan penulis: *"Sekira waqif mengglobalkan syaratnya"*), maksudnya menjadikan syarat secara umum, maksudnya tidak jelas petunjuknya, misalkan bila *waqif* berkata: *"Saya mewaqafkan barang ini untuk orang yang membaca di atas makam ayahku yang telah meninggal." Waqif* memutlakkan bacaan, tidak menentukan kadar pasti, dan tidak mengkhususkan surat tertentu. Maka diamalkan *'urf* yang berlaku pada masanya, seperti keterangan yang lalu. (Ungkapan penulis: *"Maka diikutkan di dalamnya"*), maksudnya dalam syarat *waqif* yang global atau dalam *waqaf.* Maka *dhamir* itu sah kembali kepada yang pertama dan kedua. (Ungkapan penulis: *"pada masanya"*), maksudnya masa *waqif.* Dalam *at-Tuhfah*, zhahir kalam sebagian ulama mengi*'tibar* *'urf* yang berlaku sekarang dalam satu kasus, maka

'urf tersebut diamalkan; karena secara zhahir, *'urf* itu wujud pada masa *waqif*. Sungguh mengamalkan *'urf* tersebut dekat, sekira tiap-tiap dari dua masalah awal tidak wujud. Yang dimaksud dengan dua masalah awal ialah *'urf* yang berlaku pada masa *waqif*, dan hal-hal yang mendekati tujuan-tujuan *waqif*. (Karena hal itu), maksudnya *'urf* yang berlaku pada masa *waqif* (menempati syaratnya), maksudnya syarat *waqif*. (Kemudian sesuatu yang medekati....), maksudnya kemudian jika tidak terdapat *'urf* yang berlaku, maka diikutkan pada sesuatu yang mendekati tujuan-tujuan *waqif*. (dari sini, maka tercegah...), maksudnya dari aspek sungguh diikutkan sesuatu yang mendekati tujuan-tujuan *waqif* bila tidak ada *'urf* yang berlaku. Maka dilarang dalam air-air, maksudnya perkara yang tidak diketahui tujuan *waqif* selain minum, dan dilarang memindah air darinya meskipun untuk minum. Hal itu, karena yang lebih mendekati tujuan *waqif* ialah hanya minum di sana.

d. *Mathalib Ulin Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha*, IV/375:

(وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ) إِذَا (أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ) أَيْ: جِيرَانِهِ (ذَلِكَ) أَيْ رَفْعَهُ (وَجُعِلَ) تَحْتَ (سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ) يُنْتَفَعُ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ، لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ.

(Boleh meninggikan masjid) apabila (mayoritas warga menghendaki), maksudnya penduduk sekitar (sepakat), maksudnya meninggikannya (dan dijadikan) di bawah (dasarnya, tangga-tangga dan toko-toko) yang bisa digunakan; sebagaimana *nash* riwayat Abi Dawud, karena terdapat unsur maslahat. Zhahirnya boleh bagi orang junub dan sesamanya duduk di sekitar toko-toko tersebut, karena telah hilang nuansa masjid.

KOMISI B

MUSHAHIH

KH. Farihin Muhshon
KH. Yasin Asmuni
KH. Mukhlis Dimyati

PERUMUS

KH. Ardani Ahmad
KH. Romadlon Khotib
KH. Imam Syuhada
KH. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, S.Pd.I

425. Pemberian Calon Pejabat untuk Memilih

Deskripsi Masalah

PILPRES, PILKADA, PILLEG, bahkan pemilihan ketua NU, ternyata telah menjadi kesempatan yang menguntungkan bagi kader, tokoh masyarakat dan orang yang punya hak pilih, untuk mencari keuntungan mendapatkan uang. Mereka yang menerima berdalih sebagai sedekah, *hibah*, atau hadiah, dan ada yang tidak mau menerima karena menganggap pemberian itu termasuk *risywah*.

Pertanyaan

a. Adakah hal yang membedakan antara hibah, sedekah, hadiah dan *risywah*?
b. Kategori apakah pemberian seorang calon kepada mereka, mengingat mereka memberinya bertujuan agar terpilih (jadi)?

Jawaban

a. Ada perbedaan antara *hibah*, sedekah, hadiah, dan *risywah*, yaitu: *hibah* adalah pemberian dengan tujuan mendapatkan pahala atau untuk menolong orang yang membutuhkan disertai *sighat* (serah terima); sedekah adalah pemberian dengan tujuan mengharapkan pahala atau bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan tanpa disertai *sighat*; hadiah adalah pemberian yang bertujuan memberi penghargaan orang yang diberi tanpa disertai *sighat*; sedangkan *risywah* adalah pemberian yang dimaksudkan untuk membenarkan hal yang bathil atau membatalkan sesuatu yang *haq*.
b. Pemberian tersebut dikategorikan *risywah* sebab bertujuan harus memilih calon tersebut.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Raudhah ath-Thalibin*, XI/144:

فَرْعٌ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشْوَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَالْهَدِيَّةَ جَائِزَةٌ فِي بَعْضٍ فَيَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَ حَقِيقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيهِمَا وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كج أَنَّ الرِّشْوَةَ هِيَ الَّتِي يُشْرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوِ الْامْتِنَاعُ عَنِ الْحُكْمِ بِحَقٍّ وَالْهَدِيَّةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَالثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَهُوَ قُرْبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَإِمَّا لِعَاجِلٍ وَهُوَ إِمَّا مَالٌ فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ ثَوَابٍ أَوْ لِتَوَقُّعِ ثَوَابٍ وَإِمَّا عَمَلٌ فَإِنْ كَانَ عَمَلًا مُحَرَّمًا أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا فَهُوَ رِشْوَةٌ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَى الْمَبْذُولِ لَهُ فَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ نَفْسِهِ فَهَدِيَّةٌ

وَإِنْ كَانَ لِيَتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوِ النَّسَبِ فَهُوَ هَدِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْعَمَلِ فَهُوَ رِشْوَةٌ اهـ

فَرْعٌ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشْوَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَالْهَدِيَّةَ جَائِزَةٌ فِي بَعْضٍ فَيَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَ حَقِيقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيهِمَا وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كج أَنَّ الرِّشْوَةَ هِيَ الَّتِي يُشْتَرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوِ الْإِمْتِنَاعُ عَنِ الْحُكْمِ بِحَقٍّ وَالْهَدِيَّةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَالثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَهُوَ قُرْبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَإِمَّا لِعَاجِلٍ وَهُوَ إِمَّا مَالٌ فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ ثَوَابٍ أَوْ لِتَوَقُّعِ ثَوَابٍ وَإِمَّا عَمَلٌ فَإِنْ كَانَ عَمَلًا مُحَرَّمًا أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا فَهُوَ رِشْوَةٌ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةٌ أَوْ جُعَالَةٌ وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَى الْمَبْذُولِ لَهُ فَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ نَفْسِهِ فَهَدِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ لِيَتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوِ النَّسَبِ فَهُوَ هَدِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْعَمَلِ فَهُوَ رِشْوَةٌ اهـ

(*Far'*) sungguh kita telah memaparkan bahwa *risywah* (suap) hukumnya haram mutlak. Sedangkan *hadiah* dibolehkan dalam sebagian. Sehingga ada perbedaan diantara dua hakikatnya, disamping sungguh pemberi keduanya sama-sama rela. Perbedaannya dari dua tinjauan; pertama Ibn Kaj menyebutkan bahwa dalam *risywah* disyaratkan menghukumi tanpa *haq* bagi penerima atau mencegah dari hukum yang *haq*. Sementara hadiah ialah pemberian secara mutlak. Kedua, al-Ghazali berkata dalam al-Ihya': *"Harta adakala diserahkan karena tujuan yang akan datang; yaitu ibadah dan sedekah. Dan adakala tujuan instan; yaitu adakala berupa harta yang disebut hibah dengan syarat tsawab atau karena mengharap tsawab dan adakala amal; jika berupa amal yang diharamkan atau wajib 'ain maka disebut risywah dan jika mubah maka disebut ijarah atau jualah (sayembara). Dan adakala karena pendekatan dan mengasihi pada orang yang diserahi; jika murni dirinya maka disebut hadiah. Sementara jika martabatnya untuk mengantarkan tujuan dan maksud-maksud tertentu; jika martabatnya berupa ilmu atau nasab maka disebut hadiah dan jika berupa hukum dan amal maka disebut risywah."*

b. *I'anah ath-Thalibin*, III/144:

(وَالْحَاصِلُ) أَنَّهُ إِنْ مَلَّكَ لِأَجْلِ الْاِحْتِيَاجِ أَوْ لِقَصْدِ الثَّوَابِ مَعَ صِيغَةٍ كَانَ هِبَةً وَصَدَقَةً وَإِنْ مَلَّكَ بِقَصْدِ الْإِكْرَامِ مَعَ صِيغَةٍ كَانَ هِبَةً وَهَدِيَّةً وَإِنْ مَلَّكَ لَا لِأَجْلِ

الثَّوَابِ وَلَا الْإِكْرَامِ بِصِيغَةٍ كَانَ هِبَةً فَقَطْ وَإِنْ مَلَكَ لِأَجْلِ الْاِحْتِيَاجِ أَوْ الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ كَانَ صَدَقَةً فَقَطْ وَإِنْ مَلَكَ لِأَجْلِ الْإِكْرَامِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةٍ كَانَ هَدِيَّةً فَقَطْ فَبَيْنَ الثَّلَاثَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ اهـ

(Simpulan) sungguh jika memberi karena keperluan atau karena tujuan balasan beserta *shighat* maka disebut *hibah* dan sedekah. Jika memberi sebab tujuan memuliakan beserta *shighat* maka disebut *hibah* dan hadiah. Jika memberi tidak karena balasan dan tidak karena memuliakan dengan *shighat* maka disebut hibah saja. Jika memberi karena tujuan keperluan atau balasan tanpa *shighat* maka disebut sedekah saja. Dan jika memberi karena tujuan memuliakan tanpa *shighat* maka disebut hadiah saja. Dari satu sisi ada umum dan khusus diantara tiga perkara di atas.

c. *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj,* V/349:

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ قَبُولُهُ هَدِيَّةً إلخ) مِثْلُ الْهَدِيَّةِ الضِّيَافَةُ، وَهَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي مِمَّنْ حَضَرَ ضِيَافَتَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ. وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيهِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ بِأَكْلِ الْحَاضِرِينَ مِنْ ضِيَافَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْضَرَهَا لِلْقَاضِي. وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِي سَائِرِ الْعُمَّالِ. وَمِنْهُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ إِحْضَارِ طَعَامٍ لِشَادِّ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْمُلْتَزِمِ أَوِ الْكَاتِبِ اهـ ع ش على م ر، وَسَائِرُ الْعُمَّالِ مِثْلُهُ فِي نَحْوِ الْهَدِيَّةِ لَكِنَّهُ أَغْلَظُ وَلَا يَلْتَحِقُ بِالْقَاضِي فِيمَا ذُكِرَ الْمُفْتِي، وَالْوَاعِظُ، وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْإِلْزَامِ، وَالْأَوْلَى فِي حَقِّهِمْ إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ لِأَجْلِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُمْ مِنَ الْإِفْتَاءِ وَالْوَعْظِ وَالتَّعْلِيمِ عَدَمُ الْقَبُولِ لِيَكُونَ عَمَلُهُمْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِمْ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا لِعِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ فَالْأَوْلَى الْقَبُولُ، وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الْمُفْتِي الْهَدِيَّةَ لِيُرَخِّصَ فِي الْفَتْوَى فَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ بَاطِلٍ فَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ يُبَدِّلُ أَحْكَامَ اللهِ تَعَالَى، وَيَشْتَرِي بِهَا ثَمَنًا قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً اهـ شرح م ر وَقَوْلُهُ وَسَائِرِ الْعُمَّالِ إلخ مِنْهُمْ مَشَايِخُ الْبُلْدَانِ وَالْأَسْوَاقِ، وَمُبَاشِرُ الْأَوْقَافِ، وَكُلُّ مَنْ يَتَعَاطَى أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عليه

(Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Haram bagi Qadhi menerima hadiah"*), yang semisal hadiah adalah jamuan makanan. Apakah bagi selain *Qadhi*,

yakni orang yang menghadiri jamuan makanan boleh memakannya atau tidak? ini perlu dikaji. Yang agak tepat ialah boleh, karena tidak ada *'illat* keharaman di dalamnya. Telah maklum bahwa tempat dibolehkannya yaitu apabila terdapat *qarinah* kerelaan pemilik hidangan yang dimakan hadirin. Apabila tidak ada *qarinah*, maka tidak boleh; karena pemilik menyediakannya untuk *Qadhi*. Hukum *tafshil* seperti itu akan dijelaskan terklait para pegawai pemerintah. Di antara cabangnya adalah kebiasaan yang berlaku secara adat, yaitu menghadirkan makanan untuk penguasa suatu daerah, atau semisalnya, yaitu orang berpengaruh atau penulis. Demikian menurut Ali Syabramallisi dalam catatannya atas karya ar-Ramli as-Shaghir... Para pegawai itu semisal *qadli* dalam urusan hadiah, tetapi *qadli* lebih salah; sementara *mufti* tidak sama dengan *qadli* dalam urusan tersebut. Begitu pula penasehat, guru al-Qur'an dan ilmu; karena mereka bukan ahli menyanggupi. Yang lebih utama dalam hak mereka, jika hadiah karena tujuan sesuatu yang mereka hasilkan, yakni berfatwa, menasehati dan mengajar adalah tidak menerima; agar amal mereka murni karena Allah ﷻ. Jika mereka diberi hadiah karena cinta dan senang pada ilmu dan kebaikan mereka, maka yang lebih utama ialah menerima hadiah. Sedangkan bila *mufti* memungut hadiah untuk melisensi dalam fatwa, jika dengan cara yang bathil, maka ia merupakan seorang lelaki *fajir* yang mengganti hukum-hukum Allah ﷻ, dan menjualnya dengan harga yang murah. Jika dengan cara yang benar, maka sangat dimakruhkan. Demikian penjelasan Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (Ramli Shaghir)... (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *("Dan para pegawai")* ... di antaranya para guru bangsa, pasar, petugas waqaf, dan setiap orang yang berkontribusi terhadap urusan muslimin. Demikian pernyataan Ali Syabramallisi.

d. *Ihya' 'Ulumiddin*, II/155:

الْخَامِسُ أَنْ يَطْلُبَ التَّقَرُّبَ إِلَى قَلْبِهِ وَتَحْصِيلَ مَحَبَّتِهِ لَا لِمَحَبَّتِهِ وَلَا لِلْأُنْسِ بِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ أُنْسٌ فَقَطْ بَلْ لِيَتَوَصَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ لَهُ يَنْحَصِرُ جِنْسُهَا وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ عَيْنُهَا وَكَانَ لَوْلَا جَاهُهُ وَحِشْمَتُهُ لَكَانَ لَا يَهْدِي إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ لِأَجْلِ عِلْمٍ أَوْ نَسَبٍ فَالْأَمْرُ فِيهِ أَخَفُّ وَأَخْذُهُ مَكْرُوهٌ فَإِنَّ فِيهِ مُشَابَهَةَ الرِّشْوَةِ وَلَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فِي ظَاهِرِهَا فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِوِلَايَةٍ تَوَلَّاهَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ وِلَايَةِ صَدَقَةٍ أَوْ جِبَايَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ حَتَّى وِلَايَةِ الْأَوْقَافِ مَثَلًا وَكَانَ لَوْلَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَكَانَ لَا يَهْدِي إِلَيْهِ فَهَذِهِ رِشْوَةٌ عُرِضَتْ فِي مَعْرِضِ الْهَدِيَّةِ إِذِ الْقَصْدُ بِهَا

فِي الْحَالِ طَلَبُ التَّقَرُّبِ وَاكْتِسَابُ الْمَحَبَّةِ وَلَكِنِ الْأَمْرُ يَنْحَصِرُ فِي جِنْسِهِ اهـ

Kelima seseorang berhasrat mendekatkan pada hatinya, dan menghasilkan cintanya, tidak karena mengasihinya dan tidak karena peduli padanya mengingat sungguh ia hanya mengasihi, tetapi martabatnya untuk mengantarkan pada ambisi pribadinya, yang jenisnya teringkas. Jika bentuknya tidak teringkas, dan jika martabat dan kegelisahannya tidak ada, maka ia tidak menunjukkannya. Jika martabatnya karena ilmu atau nasab, maka urusannya lebih ringan, dan memungutnya dimakruhkan. Sungguh kasus ini menyerupai *risywah* (suap), tetapi itu adalah hadiah menurut zhahirnya. Jika martabatnya dengan wilayah yang ia kuasai dari hukum, amal, wilayah sedekah, mengumpulkan harta atau lainnya dari tugas-tugas sulthan hingga wilayah waqaf-waqaf; misalkan. Jika tidak ada wilayah itu, maka ia tidak memberi hadiah kepadanya; maka ini adalah *risywah* yang ditampakkan di tempat hadiah, karena tujuannya dalam kondisi itu ialah hendak pendekatan dan mengupayakan cinta, akan tetapi urusannya teringkas dalam jenisnya.

e. *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin,* VI/160-161 [Bairut: Mu'assasah at-Tarikh al-'Arabi, 1414 H/1994 M]:

قَالَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ الْهَدِيَّةُ لَا يُقْصَدُ بِهَا إِلَّا اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ، وَالرِّشْوَةُ يُقْصَدُ بِهَا الْحُكْمُ الْخَاصُّ مَالَ الْقَلْبُ أَمْ لَمْ يَمِلْ. فَإِنْ قُلْتَ الْعَاقِلُ إِنَّمَا يَقْصِدُ اسْتِمَالَةَ قَلْبِ غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، أَمَّا مُجَرَّدُ اسْتِمَالَةِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ آخَرَ فَلَا. قُلْتُ: صَحِيحٌ لَكِنِ اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ لَهُ بَوَاعِثُ، مِنْهَا أَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ مَخْصُوصَةٌ مُعَيَّنَةٌ، كَالْحُكْمِ مَثَلًا، فَهَهُنَا الْمَقْصُودُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ وَصَارَتِ اسْتِمَالَةُ الْقَلْبِ وَسِيلَةً غَيْرَ مَقْصُودَةٍ، لِأَنَّ الْقَصْدَ مَتَى عُلِمَ بِعَيْنِهِ لَا يَقِفُ عَلَى سَبَبِهِ، فَدَخَلَ هَذَا فِي قِسْمِ الرِّشْوَةِ. وَمِنْهَا أَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصَالِحُ لَا تَنْحَصِرُ، إِمَّا أُخْرَوِيَّةٌ كَالْأُخُوَّةِ فِي اللهِ تَعَالَى وَالْمَحَبَّةِ وَقِيلَ ثَوَابِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِعِلْمٍ أَوْ دِينٍ، فَهَذِهِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالْإِهْدَاءُ لَهَا مُسْتَحَبٌّ. وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ دُنْيَوِيَّةً كَالتَّوَصُّلِ بِذَلِكَ إِلَى أَغْرَاضٍ لَهُ لَا تَنْحَصِرُ، بِأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَمَالُ قَلْبُهُ صَاحِبَ جَاهٍ فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ فَذَلِكَ جَائِزٌ. وَهَلْ هُوَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ أَوْ بِكَرَاهَةِ تَنْزِيهٍ الْمُقْتَضَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ فِي الْإِحْيَاءِ الثَّانِي. وَمُرَادُهُ فِي الْقَبُولِ فِي الْهَدِيَّةِ. وَهُوَ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَكَلَ بِعِلْمِهِ أَوْ دِينِهِ. أَمَّا

الْبَاذِلُ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ ذٰلِكَ. وَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وِلَايَةً بَلْ كَانَ لَهُ وَجَاهَةٌ بِمَالٍ أَوْ صِلَةٌ عِنْدَ الْأَكَابِرِ وَيَقْدِرُ عَلَى نَفْعِهِ، فَهٰذَا لَايُكْرَهُ الْإِهْدَاءُ إِلَيْهِ لِهٰذَا الْغَرَضِ. وَأَمَّا قَبُولُهُ فَهُوَ أَقَلُّ كَرَاهَةً مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ. بَلْ لَا تَظْهَرُ فِيهِ كَرَاهَةٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ بِعِلْمِهِ وَلَا دِينِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ دُنْيَوِيٌّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الْهَدِيَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ. (فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ لِوِلَايَةٍ تَوَلَّاهَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ وِلَايَةِ صَدَقَةٍ أَوْ جِبَايَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ حَتَّى وِلَايَةِ الْأَوْقَافِ مَثَلًا، وَكَانَ لَوْلَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَكَانَ لَايَهْدِي إِلَيْهِ، فَهٰذِهِ رِشْوَةٌ عُرِضَتْ فِي مَعْرَضِ الْهَدِيَّةِ، إِذِ الْقَصْدُ بِهَا فِي الْحَالِ طَلَبُ التَّقَرُّبِ وَاكْتِسَابُ الْمَحَبَّةِ، وَلٰكِنْ لِأَمْرٍ يَنْحَصِرُ فِي جِنْسِهِ. إِذْ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِالْوِلَايَاتِ لَا يَخْفَى. وَآيَةُ أَنَّهُ لَا تَبْتَغِي الْمَحَبَّةَ إِلَّا بِهِ أَنَّهُ لَوْ وَلِيَ فِي الْحَالِ غَيْرُهُ لَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَى ذٰلِكَ الْغَيْرِ، فَهٰذَا مِمَّا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ شَدِيدَةٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ حَرَامًا، وَالْمَعْنَى فِيهِ مُتَعَارِضٌ. فَإِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ الْمَحْضَةِ وَبَيْنَ الرِّشْوَةِ الْمَبْذُولَةِ فِي مُقَابَلَةِ جَاهٍ مَحْضٍ فِي غَرَضٍ مُعَيَّنٍ. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْمُشَابَهَةُ الْقِيَاسِيَّةُ وَعَضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ الْمَيْلُ إِلَيْهِ). وَعِبَارَةُ السُّبْكِيِّ فِي فَصْلِ الْمَقَالِ: وَإِنْ كَانَ جَاهُهُ وِلَايَةً وَلَمْ يَقْصِدْ حُكْمًا مِنْهُ وَإِنَّمَا قَصَدَ اسْتِمَالَةَ قَلْبِهِ عَسَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَفِي مُهِمَّاتِهِ وَيَنَالَ بِمَحَبَّتِهِ خَيْرًا فَهٰذَا مَحَلُّ التَّرَدُّدِ، يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ لِكَوْنِهِ لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ خَاصٌّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ رِشْوَةٌ لِكَوْنِ الْمُهْدَى إِلَيْهِ فِي مَظِنَّةِ الْحُكْمِ. فَاسْتَدَلَّ الْغَزَالِيُّ بِحَدِيثِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ وَيَكُونُ هٰذَا. وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ اسْتِمَالَةَ الْقَلْبِ مِنْ قَصْدٍ خَاصٍّ خَرَجَ مِنْ قِسْمِ الْهَدِيَّةِ وَدَخَلَ فِي قِسْمِ الرِّشْوَةِ بِالْحَدِيثِ. وَالَّذِي أَقُولُهُ أَنَّ هٰذَا قِسْمٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ وَالرِّشْوَةِ صُورَةً حُكْمًا وَأَنَّ حُكْمَهُ أَنْ يَجُوزَ الْقَبُولُ وَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَحُكْمَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْهَدَايَا يُؤْخَذُ وَيَتَمَلَّكُهُ الْمُهْدَى لَهُ، وَحُكْمَ الرِّشْوَةِ أَنْ لَا يَأْخُذَ بَلْ يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا صَارَ حُكْمُ الْقِسْمِ الْمُتَوَسِّطِ هٰكَذَا بِالْحَدِيثِ. وَسِرُّهُ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صُورَتِهِ جَازَ الْأَخْذُ لِأَغْرَاضِ الْمُعْطِي عَنْهُ وَعَدَمِ مُتَعَلَّقِ قَصْدِهِ بِعِوَضٍ خَاصٍّ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى

مَعْنَاهُ وَأَنَّ الْمُعْطَى لَهُ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ جُعِلَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِأَنْ كَانَ وَلِيًّا عَامِلًا أَوْ قَاضِيًا، وَإِنْ كَانَ عَامِلَ الصَّدَقَةِ جُعِلَتْ فِي الصَّدَقَاتِ الَّذِيْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ أَصْحَابِهَا. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا كَانَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ غَيْرَ حَاكِمٍ؟ قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَائِبَهُ أَوْ حَاجِبَهُ أَوْ مَنْ نَدَبَهُ وَوَلَاهُ اتِّصَالَ الْأُمُوْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهُوَ مِثْلُهُ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ كُلُّ مَنْ تَوَلَّى وِلَايَةً يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ فِيْهَا أَوْ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، كَمَا إِذَا كَانَ اثْنَانِ فِي وَظِيْفَةٍ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ عَلَى شُغْلٍ مِمَّا يَجِبُ أَوْ يَحْرُمُ. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَايَجِبُ وَلَا يَحْرُمُ بَلْ يَجُوْزُ، هَلْ يَجُوْزُ الْأَخْذُ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: هَذَا فِيْ حَقِّ الْمُتَوَلِّيْ عَزِيْزٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ. فَمَتَى ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ فِيْ شَيْءٍ وَجَبَ وَمَتَى ظَهَرَ خِلَافُهَا حَرُمَ، وَمَتَى أَشْكَلَ وَجَبَ النَّظَرُ. فَأَيْنَ يُوْجَدُ فِيْ فِعْلِ الْقَاضِيْ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يَلِيْ أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِمَّا يَتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ عَلَى سَبِيْلِ التَّشَهِّيْ، وَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ الْأَخْذُ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى فِيْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَكَمَا لَا يَأْخُذُ عَلَى حِلِّهِ لَايَأْخُذُ عَلَى فِعْلِهِ. وَأَعْنِيْ بِهَذَا مَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ الْقَاضِيْ غَيْرَ الْأَحْكَامِ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْأً عَلَى أَنْ يُوَلِّيَهُ نِيَابَةَ قَضَاءٍ أَوْ مُبَاشَرَةَ وَقْفٍ أَوْ مَالِ يَتِيْمٍ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا عَلَى مَا يَتَعَاطَاهُ مِنَ الْعُقُوْدِ وَالْفُرُوْضِ وَالْفُسُوْخِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَحْكَامًا، بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ تَنْفِيْذًا لِمَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ، بَلْ إِنْشَاءُ تَصَرُّفَاتٍ مُبْتَدَأَةٍ وَلَكِنِ الْأَخْذُ عَلَيْهَا يَمْتَنِعُ كَالْحُكْمِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِيْهَا عَنِ اللهِ تَعَالَى كَمَا هُوَ نَائِبٌ فِي الْحُكْمِ عَنْهُ.

At-Taqi as-Subki berkata: *"Hadiah itu tidak dimaksudkan kecuali untuk mencondongkan hati, sedangkan yang dimaksud dengan risywah adalah hukum khusus, baik hati terpengaruh atau tidak". Jika kamu berkata: "Orang berakal bermaksud mencondongkan hati orang lain hanya karena tujuan yang benar, sedangkan murni mencondongkan hati tanpa tujuan imbalan, maka tidak dilakukannya." Saya katakan: "Benar demikian, akan tetapi bagi condongnya hati ada berbagai faktor pembangkitnya. Di antaranya adanya maslahat khusus dan tertentu yang muncul darinya, seperti suatu hukum misalnya, maka di sini yang menjadi maksud adalah kemaslahatan tersebut, sedangkan kecondongan hati menjadi lantaran dan tidak menjadi maksud, sebab sungguh suatu maksud ketika diketahui persisnya maka ia tidak akan berhenti pada sebabnya, sehingga*

hal ini termasuk bagian risywah. Di antara faktor pembangkit condongnya hati adalah munculnya berbagai kemaslahatan yang tidak terbatas darinya, adakalanya bersifat ukhrawi, seperti persaudaraan fillahi ta'ala dan rasa cinta, dan dikatakan pahalanya serta hal-hal yang serupa dengannya karena ilmu atau agama, maka maka hal ini disunnahkan dan memberi hadiah karenanya juga disunnahkan; dan di antaranya ada yang bersifat duniawi, seperti misal menjadikannya sebagai lantaran pada berbagai tujuan yang tidak terbatas, seperti halnya orang yang dicondongkan hatinya mempunyai derajat, bila derajatnya berkaitan dengan ilmu dan agama maka hal itu dibolehkan, dan apakah bolehnya tanpa kemakruhan atau makruh tanzih? Pernyataan al-Ghazali dalam Ihya' menetapkan opsi yang kedua. Yang dimaksud al-Ghazali adalah tentang menerima hadiah. Itu benar, karena terkadang ia makan sebab ilmu atau agamanya. Adapun orang yang memberikannya, maka tidak dimakruhkan baginya. Bila derajatnya berkaitan dengan urusan duniawi, maka bila bukan merupakan suatu kekuasaan, namun ia mempunyai berajat sebab harta atau hubungan baik dengan para pembesar dan ia mampu memberi manfaat pada pemberinya, maka tidak makruh memberi hadiah kepadanya karena tujuan ini. Adapun menerimanya maka kemakruhannya lebih sedikit daripada kasus sebelumnya, bahkan di situ tidak tampak kemakruhan, karena ia tidak makan sebab ilmu dan agamanya, namun hanya urusan duniawi dan tidak keluar dari batas hadiah, sehingga tidak makruh." (Bila derajatnya karena kekuasaan yang dikuasainya, seperti urusan hukum, pekerjaan, kekuasaan atas zakat, penarikan harta atau lainnya dari berbagai tugas kepemerintahan hingga kekuasan atas barang-barang waqaf misalnya, dan bila tidak ada kekuasaan tersebut maka ia tidak memberikan hadiah kepadanya, maka ini adalah *risywah* yang ditampakkan dalam bentuk hadiah, karena tujuannya dalam kondisi itu ialah mencari perhatian dan mengupayakan kesenangan, namun karena urusan yang teringkas dalam jenisnya. Sebab hal-hal yang mungkin dilantari dengan berbagai kekuasaan itu tidak samar. Tanda bahwa kesukaan itu tidak akan ada kecuali dengan pemberian itu adalah andaikan pada saat itu orang lain yang berkuasa, niscaya ia akan memberikannya kepada orang lain tersebut, sehingga inilah di antara kasus yang disepakati ulama bahwa kemakruhannya sangat kuat, dan mereka berselisih terkait keharamannya, sementara *'illat* yang ada di dalamnya saling bertentangan. Sebab hal itu berputar-putar antara murni hadiah atau *risywah* yang diserahkan karena derajat tertentu dalam tujuan tertentu. Ketika hal yang samar dan sepadan bertentangan, sedang beberapa hadits dan *atsar* menguatkan salah satunya, maka pasti condong padanya). Ungkapan as-Subki dalam *Fashl al-Maqal*: *"Bila derajatnya berupa kekuasaan dan pemberi tidak bermaksud mendapatkan suatu hukum darinya, namun hanya bermaksud mencondongkan hatinya, barangkali bermanfaat baginya dan bagi kepentingannya, serta mungkin ia mendapat kebaikan dengan*

mencintainya; maka ini merupakan kasus yang membingungkan. Bisa dikatakan ini adalah hadiah karena tidak mempunyai tujuan tertentu, dan bisa dikatakan dikatakan ini adalah risywah karena orang yang diberi hadiah dalam posisi bisa memberi hukum. Lalu al-Ghazali istidlal dengan hadits Ibn al-Lutbiyah atas keharamannya, dan inilah kasusnya, dan bila tujuannya adalah mencondongkan hati karena tujuan tertentu, maka keluar dari kategori hadiah dan termasuk kategori risywah berdasarkan hadits." Sementara yang aku katakan adalah: *"Sungguh ini adalah bagian tengah-tengah di antara hadiah dan risywah dalam bentuk dan hukumnya. Sungguh hukumnya adalah boleh diterima dan dimasukkan ke Baitul Mal, dan berbagai hadiah lainnya adalah orang yang diberi hadiah boleh menerimanya dan memilikinya, sedangkan hukum risywah adalah ia tidak boleh mengambilnya, dan justru harus mengembalikannya kepada pemiliknya."* Hukum bagian tengah-tengah ini berdasarkan hadits. Rahasianya adalah, bila dinisbatkan pada bentuknya maka boleh diambil karena tujuan-tujuan pemberinya, dan tidak adanya hubungan tujuannya dengan imbalan khusus; dan apabila dinisbatkan pada subtansinya dan penerimanya adalah pengganti kaum muslimin, maka pemberian itu dijadikan untuk kaum muslimin, dengan gambaran penerimanya adalah *Wali, Amil* atau *Qadhi*. Bila ia Amil Zakat maka pemberian itu dimasukkan ke kelompok harta zakat di mana ia merupakan pengganti dari orang yang berhak atasnya. Jika kamu berkata: *"Apabila orang yang diberi hadiah bukan hakim?"*, maka aku katakan: *"Jika ia adalah naibnya, penjaganya, atau orang yang didelegasikan dan dikuasakannya untuk menyampaikan berbagai urusannya dan semisalnya, maka ia menyamainya. Kesimpulannya, setiap orang yang menguasai suatu kekuasaan yang suatu perbuatan wajib dilakukannya dalam kekuasaan tersebut, atau wajib meskipun tidak tertentu dengannya, seperti bila ada dua orang dalam satu tugas, maka masing-masing keduanya haram mengambil suatu pemberian karena perbuatan yang wajib atau yang haram."* Jika kamu berkata: *"Jika perbuatan itu termasuk perbuatan yang tidak wajib dan tidak haram, tetapi boleh, apakah boleh mengambil suatu pemberian karenanya?"*, saya katakan: *"Ini bagi seorang penguasa adalah hal yang sangat riskan, karena wajib baginya menjaga berbagai kemaslahatan. Ketika jelas suatu maslahat pada sesuatu maka wajib melakukannya, ketika jelas bertentangan dengan maslahat maka haram melakukannya; dan ketika musykil, maka wajib memikirkannya dahulu, sehingga di mana ditemukan perbuatan Qadhi dan sesamanya yaitu orang-orang yang menguasai urusan muslimin, dari hal-hal yang dibolehkan memilih antara mengerjakan dan meninggalkannya sesuka hati. Jika diandaikan begitu, maka haram juga mengambilnya, karena ia adalah pengganti dari Allah Ta'ala dalam perbuatan tersebut, sehingga sebagaimana ia tidak mengambil pemberian atas apa yang dihalalkannya, ia juga tidak tidak mengambil pemberian atas perbuatannya."* Maksudku dengan pernyataan ini adalah urusan yang dilakukan *Qadhi*

selain hukum, yaitu penguasaan dan semisalnya. Maka ia tidak boleh mengambil sesuatu dari seseorang agar ia menguasakannya sebagai ganti dalam urusan pemutusan hukum, menangani wakaf, atau harta anak yatim. Demikian pula tidak boleh baginya mengambil sesuatu atas urusan yang dikerjakannya dari berbagai akad, pembagian, dan *faskh*, meskipun urusan-urusan ini bukan hukum, dalam arti bukan merupakan pelaksanaan atas sesuatu karena tegaknya suatu hujjah, tetapi merupakan pelaksanaan *tasarruf* baru, namun tercegah mengambil pemberian karenanya sebagaimana urusan hukum, karena ia adalah pengganti Allah Ta'ala dalam urusan tersebut sebagaimana ia pengganti Allah Ta'ala dalam hukum yang keluar darinya.

f. *Ihya' 'Ulumiddin*, II/155:

الْخَامِسُ أَنْ يَطْلُبَ التَّقَرُّبَ إِلَى قَلْبِهِ وَتَحْصِيلَ مَحَبَّتِهِ لَا لِمَحَبَّتِهِ وَلَا لِلْأُنْسِ بِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ أُنْسٌ فَقَطْ بَلْ لِيَتَوَصَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ لَهُ يَنْحَصِرُ جِنْسُهَا وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ عَيْنُهَا وَكَانَ لَوْلَا جَاهُهُ وَحِشْمَتُهُ لَكَانَ لَا يَهْدِي إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ لِأَجْلِ عِلْمٍ أَوْ نَسَبٍ فَالْأَمْرُ فِيهِ أَخَفُّ وَأَخْذُهُ مَكْرُوهٌ فَإِنَّ فِيهِ مُشَابَهَةَ الرِّشْوَةِ وَلَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فِي ظَاهِرِهَا فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِوِلَايَةٍ تَوَلَّاهَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ وِلَايَةِ صَدَقَةٍ أَوْ جِبَايَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ السُّلْطَانِيَّةِ حَتَّى وِلَايَةِ الْأَوْقَافِ مَثَلًا وَكَانَ لَوْلَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَكَانَ لَا يَهْدِي إِلَيْهِ فَهَذِهِ رِشْوَةٌ عُرِضَتْ فِي مَعْرِضِ الْهَدِيَّةِ إِذِ الْقَصْدُ بِهَا فِي الْحَالِ طَلَبُ التَّقَرُّبِ وَاكْتِسَابُ الْمَحَبَّةِ وَلَكِنِ الْأَمْرُ يَنْحَصِرُ فِي جِنْسِهِ اهـ

Kelima mencari kedekatan pada hatinya dan merajut cinta, tidak karena cinta dan tidak karena memikat perhatian sekira ia sebatas memikat perhatian, tetapi untuk mengantarkan pada tujuan-tujuannya dengan martabat yang jenisnya teringkas. Apabila bentuknya tidak teringkas, jika martabat dan kendalinya tidak ada maka ia tidak memberikan hadiah padanya. Jika martabatnya karena ilmu atau nasab maka urusannya lebih ringan dan mengambilnya dimakruhkan; karena sungguh terdapat keserupaan pada *risywah*, tapi ini adalah hadiah menurut zhahirnya. Jika martabatnya dengan wilayah yang ia kuasai dari hukum, amal, wilayah sedekah atau mengumpulkan harta dan lain-lain dari amal-amal sulthan hingga wilayah waqaf; misalkan. Dimana jika tidak ada wilayah itu maka ia tidak memberikannya. Ini disebut dengan *risywah* yang diperlihatkan dalam tempat hadiah; karena tujuannya dalam kondisi itu adalah mencari kedekatan dan merajut cinta; akan tetapi perkara tersebut teringkas dalam jenisnya.

g. *Al-Mabsuth*, V/222:

(قَالَ) وَإِذَا جَعَلَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُعْلًا عَلَى أَنْ يَزِيدَهَا فِي الْقَسْمِ يَوْمًا فَفَعَلَ لَمْ يَجُزْ وَتَرْجِعُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهَا رَشَتْهُ عَلَى أَنْ يجور وَالرِّشْوَةُ حَرَامٌ ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ مِنَ السُّحْتِ، فَلِهَذَا تَسْتَرِدُّ مَا أَعْطَتْ وَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْقَسْمِ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَطَّتْ لَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَهْرِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، أَوْ زَادَهَا الزَّوْجُ فِي مَهْرِهَا، أَوْ جَعَلَ لَهَا جُعْلًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ نَوْبَتَهَا لِفُلَانَةَ فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهَا بِهَذَا لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ شَيْئًا فَلَا تَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ الْمَالَ بِمُقَابَلَتِهِ وَلِأَنَّهَا أَخَذَتِ الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ تَرْضَى بِالْجَوْرِ وَذَلِكَ حَرَامٌ، فَكَانَ الْجُعْلُ مَرْدُودًا اهـ

(Penulis berkata) Apabila seorang istri memberikan upah pada suaminya agar menambah giliran sehari, maka tidak dibolehkan dan ia harus merujuk hartanya. Karena ia menyuap suami agar... sementara *riywah* tersebut diharamkan. Ini menempati *risywah* dalam hukum, yaitu suatu larangan. Karena ini, maka istri harus meminta kembali sesuatu yang ia berikan. Suami harus menyamaratakan dalam menggilir. Begitu pula apabila istri mengurangi maharnya pada suami atas syarat ini, suami menambahkan mahar pada istri, suami memberikan upah pada istri agar memberikan gilirannya untuk istri yang lain, semua tindakan ini batal. Karena itu, suami tidak berhak memiliki sesuatu, sehingga istri tidak boleh memenuhi harta pada suami sebagai pertukarannya. Dan karena istri memungut *risywah* yang berarti rela dengan perbuatan kotor yang diharamkan sehingga upah tersebut ditolak.

h. *Idhah al-Ahkam limaa Ya'khudzu al-'Ummal al-Hukkam li Ibn Hajar al-Haitami*, 71:

لَيْسَ الْمُحَكَّمُ كَالْقَاضِي فِي تَحْرِيمِ أَخْذِ الرِّزْقِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْحُكْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ الْجُورِيُّ بِضَمِّ الْجِيمِ وَبِالرَّاءِ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ حَيْثُ قَالَ لَوْ رَضِيَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ مِنَ الرَّعِيَّةِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا فِي خُصُومَةٍ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ حَاكِمًا مَنْصُوبًا لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا سُلْطَانًا جَازَ لَهُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاكِمِ الْمَنْصُوبِ لِلنَّاسِ أَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ نُصِبَ لِلْقِيَامِ بِهَذَا الْغَرَضِ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ لَمْ يَلْتَزِمِ الْحُكْمَ وَلَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا مَفْرُوضٌ عَلَيْهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ... وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْقَاضِيَ فِيهِ وَصْفَانِ الْوُجُوبُ وَكَوْنُهُ نَائِبًا عَنِ اللهِ تَعَالَى

فِي الْخُصُومِ وَالْإِلْزَامِ بِهِ فَأَخْذُهُ أُجْرَةً فِي مُقَابِلِهِ أَوْ هَدِيَّةً فِيهِ بَيْعُ عَدْلِ اللهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ بِحُطَامِ الدُّنْيَا كَمَا مَرَّ بَسْطُهُ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ مِنْ طَرَفَيِ الرِّشْوَةِ وَأَمَّا الْعَالِمُ فَلَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ فَلَمْ يَحْرُمْ أَخْذُهُ الْمُقَابِلَ عَلَى أَنَّهُ لَا تُهْمَةَ تَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ بِالْأَخْذِ الْجَائِزِ بِخِلَافِ الْقَاضِي اهـ

Muhakkam tidak seperti *qadli* dalam keharaman mengambil gaji dan sesamanya atas suatu hukum; sebagaimana Abu al-Hasan al-Juri dengan membaca *dlummah jim* beserta *ra'* menjelaskan dalam *syarah Mukhtashar al-Muzanni* dari ibn Suraij, sekira berkata: *"Jika dua orang lelaki rela terhadap satu lelaki dari rakyat yang menghukumi diantara keduanya dalam perselisihan di antara mereka, sementara ia bukanlah seorang hakim yang diangkat atas suatu hukum diantara masyarakat, tidak pula sulthan, maka ia boleh mengambil upah atas pekerjaannya. Perbedaan diantara ia dan hakim yang diangkat oleh masyarakat, yaitu: Hakim diangkat untuk menegakkan tujuan ini. Ini adalah pendapat yang dipilihnya, yang tidak menetapkan hukum dan tidak menghukumi diantara keduanya itu dipastikan."* Ulama sungguh berselisih... Bentuk perbedaannya adalah *Qadhi* mempunyai dua sifat yaitu wajib dan merupakan pengganti dari Allah Ta'ala dalam hukum dan penetapannya, sehingga memungut upah sebagai pertukaran atau hadiah adalah menjual keadilan Allah yang ditetapkannya dengan ganti harta dunia yang hina, sebagaimana telah disinggung dalam bagian awal dari dua bagian *risywah*. Sedangkan orang alim, maka tidak seperti itu; sehingga tidak diharamkan baginya memungut upah sebagai ganti, karena pada dirinya tidak ada *tuhmah* yang sudah pasti diperbolehkan mengambil; lain lagi dengan *Qadli*.

i. *Radd al-Mukhtar*, V/373-374:

(وَفِيهَا إِلَخْ) أَيْ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا فِيهَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا مَرَّ عَنِ الْفَتْحِ مِنْ أَنَّ تَعْلِيلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْهَدِيَّةِ الَّتِي سَبَبُهَا الْوِلَايَةُ وَكَذَا قَوْلُهُ وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ لِلْمُسْلِمِينَ عَمَلًا حُكْمُهُ فِي الْهَدِيَّةِ حُكْمُ الْقَاضِي اهـ مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُفْتِي وَاعْتَرَضَهُ فِي الْبَحْرِ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنِ التَّتَارْخَانِيَّةِ وَبِمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَالْمُفْتِي قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِمَامِ إِمَامُ الْجَامِعِ: أَيْ وَأَمَّا الْإِمَامُ بِمَعْنَى الْوَالِي فَلَا تَحِلُّ الْهَدِيَّةُ فَلَا مُنَافَاةَ وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهُ رَأْسُ

الْعُمَّالِ قَالَ فِي النَّهْرِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ وِلَايَةٌ نَاشِئَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ كَالسَّاعِي وَالْعَاشِرِ اهـ قُلْتُ : وَمِثْلُهُمْ مَشَايِخُ الْقُرَى وَالْحِرَفِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَهُمْ قَهْرٌ وَتَسَلُّطٌ عَلَى مَنْ دُونَهُمْ فَإِنَّهُ يُهْدِي إِلَيْهِمْ خَوْفًا مِنْ شَرِّهِمْ أَوْ لِيُرَوِّجَ عِنْدَهُمْ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ نَاشِئَةٌ عَنِ الْإِمَامِ إِلَخْ دُخُولُ الْمُفْتِي إِذَا كَانَ مَنْصُوبًا مِنْ طَرَفِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ جَوَازَ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ لَهُ وَإِلَّا لَزِمَ كَوْنُ إِمَامِ الْجَامِعِ وَالْمُدَرِّسِ الْمَنْصُوبَيْنِ مِنْ طَرَفِ الْإِمَامِ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُفْتِيَ يَطْلُبُ مِنْهُ الْمُهْدِي الْمُسَاعَدَةَ عَلَى دَعْوَاهُ وَنُصْرَةً عَلَى خَصْمِهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْمُفْتِيَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا مِنَ الْإِمَامِ يَكُونُ كَذَلِكَ فَيُخَالِفُ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ جَوَازِهَا لِلْمُفْتِي فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَاضِي وَاضِحٌ فَإِنَّ الْقَاضِيَ مُلْزِمٌ وَخَلِيفَةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ فَأَخْذُهُ الْهَدِيَّةَ يَكُونُ رِشْوَةً عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي يُؤَمِّلُهُ الْمُهْدِي وَيَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ حُكْمِهِ وَالْمُفْتِي لَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ مُرَادَهُمْ بِجَوَازِهَا لِلْمُفْتِي إِذَا كَانَتْ لِعِلْمِهِ لَا لِإِعَانَتِهِ لِلْمُهْدِي بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ فَإِذَا كَانَتْ لِإِعَانَتِهِ صَدَقَ عَلَيْهَا حَدُّ الرِّشْوَةِ لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي حَدِّهَا شَرْطُ الْإِعَانَةِ وَقَدَّمْنَا عَنِ الْفَتْحِ عَنِ الْأَقْضِيَةِ أَنَّهُ لَوْ أَهْدَاهُ لِيُعِينَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ بِلَا شَرْطٍ لَكِنْ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ إِنَّمَا يُهْدِي لِيُعِينَهُ فَمَشَايِخُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَخْ وَهَذَا يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ مِنَ الْعُمَّالِ أَوْ غَيْرِهِمْ اهـ وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْقَاضِي لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِنْ رَجُلٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَاضِيًا لَا يُهْدِي إِلَيْهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ ثُمَّ قَالَ أَقُولُ: يُخَالِفُهُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَقْضِيَةِ إِلَخْ، قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْمُخَالَفَةِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ مَنْصُوصٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فَمَا فِي الْأَقْضِيَةِ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ الْقَبُولِ هُوَ الْمَقْبُولُ وَرَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِلْعَلَّامَةِ مُحَمَّدٍ الدَّاوُدِيِّ الشَّافِعِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ ع ش: وَمِنَ الْعُمَّالِ مَشَايِخُ الْأَسْوَاقِ وَالْبُلْدَانِ، وَمُبَاشِرُو الْأَوْقَافِ وَكُلُّ مَنْ يَتَعَاطَى أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْلِمِينَ انْتَهَى قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ:

وَلَا يَلْحَقُ بِالْقَاضِي فِيمَا ذَكَرَ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظُ وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْإِلْزَامِ، وَالْأَوْلَى فِي حَقِّهِمْ إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ، لِأَجْلِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُمْ مِنَ الْإِفْتَاءِ وَالْوَعْظِ وَالتَّعْلِيمِ عَدَمُ الْقَبُولِ لِيَكُونَ عِلْمُهُمْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِمْ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا لِعِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ فَالْأَوْلَى الْقَبُولُ وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الْمُفْتِي الْهَدِيَّةَ لِيُرَخِّصَ فِي الْفَتْوَى فَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ بَاطِلٍ فَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ يُبَدِّلُ أَحْكَامَ اللهِ تَعَالَى وَيَشْتَرِي بِهَا ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً انْتَهَى هَذَا كَلَامُهُ وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ لَا لِيُرَخِّصَ لَهُ بَلْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَهَذَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْأُجْرَةِ بَلْ مُجَرَّدُ هَدِيَّةٍ لِأَنَّ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى بَيَانِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَا يَحِلُّ عِنْدَنَا، وَإِنَّمَا يَحِلُّ عَلَى الْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

(*"Dan di dalamnya"*...), maksudnya dalam *at-Tatarkhaniyah*. Ini menyelisihi keterangan yang disebutkan pertama dalam hak imam, dan keterangan lalu dari *al-Fath* menguatkan pada yang pertama, sungguh alasan Nabi ﷺ menjadi dalil atas keharaman hadiah yang sebabnya adalah *wilayah*. Begitu juga ungkapan penulis: *"Setiap orang yang beramal untuk muslimin dengan amalan yang hukumnya dalam hadiah itu seperti hukum qadli"*. *Mathlab* tentang hukum hadiah untuk *mufti*; dan penulis menentangnya dalam *al-Bahr* dengan keterangan yang dijelaskan *asy-Syarih* dari *at-Tatarkhaniyah*, dan keterangan dalam *al-Khaniyah*, bahwa sungguh boleh bagi imam dan *mufti* menerima hadiah dan memenuhi undangan khusus; kemudian penulis berkata: *"Kecuali yang dimaksud dengan imam ialah imam jami'"*: maksudnya, sedangkan imam dalam arti wali, maka tidak halal mengambil hadiah, sehingga tidak ada pertentangan. Keterangan ini sesuai pada dalil-dalil, dan karena ia merupakan kepala *'ummal*. Penulis berkata dalam *an-Nahar*: *"Menurut zhahir, sungguh yang dimaksud dengan amal ialah wilayah yang timbul dari imam atau naibnya seperti sa'i dan asyir."* Saya berkata: *"Semisal mereka ialah guru-guru desa, pekerja-pekerja dan lainnya, yakni orang yang memiliki kuasa dan otoritas pada orang di bawah mereka. Sungguh memberi hadiah pada mereka karena takut dari keburukan mereka, atau untuk memberlakukan di sisa mereka."* Zhahir ungkapan penulis timbul dari imam... *mufti* masuk bila diangkat dari sisi imam atau *naib*nya, akan tetapi ia menyelisihi pada kemutlakan mereka, boleh menerima hadiah baginya. Jika tidak, maka imam *jami'* dan guru diangkat dari sisi imam, kecuali dibedakan bahwa sungguh *mufti* dimintai bantuan atas dakwanya

dan membantu menghadapi musuhnya oleh orang yang memberi hadiah, sehingga ia menempati *qadli*. Akan tetapi dari perbedaan ini, menetapkan sungguh *mufti* jika tidak diangkat dari imam, maka demikian. Maka ia menyelisihi keterangan yang dijelaskan ulama dari boleh menerima hadiah bagi *mufti*. Sungguh perbedaan diantara *mufti* dan diantara *qadli* itu jelas; sungguh *qadli* adalah orang yang menetapkan dan khalifah dari Rasulullah ﷺ dalam pelaksanaan hukum-hukum. Hadiah yang dipungut *qadli* disebut *risywah* pada hukum yang diharapkan pemberi hadiah dan hukumnya pasti batal. Sedangkan *mufti* tidak demikian; terkadang dikatakan: *"Sungguh yang dimaksud ulama bahwa boleh menerima hadiah bagi mufti, apabila karena ilmunya, bukan karena bantuannya kepada orang yang memberi hadiah, dengan dalil alasan yang dinukil oleh pensyarih"*. Apabila hadiah yang diberikan karena bantuannya, maka batasan *risywah* itu tepat pada hadiah, akan tetapi batasannya yang disebutkan adalah syarat bantuan. Kita telah menjelaskan dahulu dari *al-Fath* mengenai *qadliyah-qadliyah;* sungguh jika ia memberikan hadiah agar *mufti* membantunya di hadapan sulthan tanpa syarat, akan tetapi ia tahu secara yakin bahwa ia memberikan hadiah agar *mufti* membantunya. Guru-guru kita pada ketetapan yang demikian ini tidak ada masalah... Ini mencakup permasalahan bila dari *ummal* atau lainnya. Dari sini, penulis berkata dalam *Jami' al-Fushulain*: *"Qadli tidak boleh menerima hadiah dari seorang lelaki, dimana jika ia tidak menjadi qadli maka si lelaki tadi tidak memberi hadiah padanya"*. Demikian itu menempati syarat. Lalu penulis berkata, aku berkata: *"Keterangan yang disebutkan mengenai qadliyah-qadliyah tadi berbeda dengannya..."* Saya berkata: *"Secara zhahir tidak ada perbedaan, karena qadli dinash bahwa ia tidak boleh menerima hadiah; sebagaimana akan dijelaskan secara detail"*. Maka permasalahan dalam *qadla-qadla* itu dipastikan pada lainnya. Sehingga *ihtimal* mufti menyamai *qadli* dalam hal itu, dan *ihtimal* tidak menyamai; *wa llahu subhanahu wa ta'ala a'lam* mengenai hakikat kondisi. Tidak ada keraguan, bahwa tidak menerima adalah pendapat yang diterima. Saya melihat dalam *Hasyiyah Syarah al-Manhaj* karya *al-Allamah* Muhammad ad-Dawudi as-Syafi'i: Keterangan yang nashnya Ali Syabramallisi Nur ad-Din Abud Dliya' Ali bin Ali berkata: *"Diantara 'ummal terdapat guru-guru pasar-pasar dan bangsa, pengurus waqaf dan setiap orang yang peduli terhadap urusan muslimin"*. Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad (ar-Ramli as-Shaghir) berkata dalam *syarahnya*: *"Mufti, penasehat, guru al-Qur'an dan ilmu tidak sama dengan qadli dalam persoalan tersebut, karena mereka bukan ahli ilzam. Yang lebih utama dalam hak mereka, jika hadiah karena perkara yang mereka hasilkan, yakni fatwa, menasehati, dan mengajar adalah tidak menerima agar ilmu mereka murni karena Allah ﷻ. Sedangkan jika seseorang menyerahkan hadiah karena cinta dan senang pada ilmu, dan*

kebaikan mereka, maka yang lebih utama ialah menerima. Sementara apabila mufti memungut hadiah untuk melisensi dalam fatwa, jika dengan cara batil maka ia adalah seorang lelaki keji yang mengganti hukum-hukum Allah ﷻ, dan membelinya dengan harga yang remeh. Jika dengan jalan yang shahih, maka sangat dimakruhkan baginya." Ini kalam penulis, sementara undang-undang kita tidak melarangnya; *la haula wala quwwata illa billah.* Adapun bila memungut, tidak untuk melisensinya, akan tetapi untuk menjelaskan hukum *syar'i*, maka ini seperti disebutkan di awal. Ini, apabila tidak dengan jalan *fee*, akan tetapi murni hadiah karena memungut *fee* pada penjelasan hukum *syar'i* itu tidak halal menurut kita (asy-Syafi'iyyah), akan tetapi halal menurut *kitabah*, karena *fee* tidak wajib baginya; *wa Allah subhanahu a'lam.*

j. *Hawasyi asy-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, XV/138:

وَسَائِرُ الْعُمَّالِ مِثْلُهُ فِي نَحْوِ الْهَدِيَّةِ لَكِنَّهُ أَغْلَظُ هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ وَ اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَقَوْلُ الْبَدْرِ بْنِ جَمَاعَةَ بِالْحِلِّ لَهُمْ ضَعِيفٌ جِدًّا مُصَادِمٌ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ (قَوْلُهُ وَسَائِرُ الْعُمَّالِ) هَلْ مِنْهُمْ نَاظِرُ الْوَقْفِ؟ اهـسم عبارة ع ش وَمِنْهُمْ مَشَايِخُ الْأَسْوَاقِ وَالْبُلْدَانِ وَمُبَاشِرُ الْأَوْقَافِ وَكُلُّ مَنْ يَتَعَاطَى أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْلِمِينَ اهـ (قَوْلُهُ وَسَائِرُ الْعُمَّالِ مِثْلُهُ إلخ) وَلَا يَلْتَحِقُ بِالْقَاضِي فِيمَا ذُكِرَ الْمُفْتِي وَالْوَاعِظُ وَمُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْإِلْزَامِ

Para *'Ummal* itu menyamainya dalam urusan hadiah, akan tetapi ia lebih fatal. Ini menurut pendapat yang difatwakan oleh kumpulan ulama, dan as-Subki berpedoman dengannya. Ungkapan al-Badr bin Jamaah mengenai hukum halal bagi mereka itu sangat lemah yang melekat pada hadits *masyhur*: *"Hadiah-hadiah 'ummal itu tipuan"*. (Ungkapan penulis: "*dan para 'ummal*"), apakah diantara mereka terdapat *nazhir* waqaf? Demikian pernyataan Syihabuddin bin Qasim al-Abadi. Ungkapan Ali Syabramallisi; Nur ad-Din Abud Dliya' Ali bin Ali: *"Diantara mereka guru-guru pasar dan bangsa, pengurus waqaf dan setiap orang yang peduli dengan urusan muslimin."* (Ungkapan penulis: "*dan para 'ummal menyamainya*"), mufti, penasehat, guru al-Qur'an dan ilmu tidak sama dengan *qadli* dalam masalah tersebut, karena sungguh mereka bukan *ahli ilzam.*

k. *I'anah ath-Thalibin*, III/144:

(وَالْحَاصِلُ) أَنَّهُ إِنْ مَلَّكَ لِأَجْلِ الْاِحْتِيَاجِ أَوْ لِقَصْدِ الثَّوَابِ مَعَ صِيغَةٍ كَانَ هِبَةً وَصَدَقَةً وَإِنْ مَلَّكَ بِقَصْدِ الْإِكْرَامِ مَعَ صِيغَةٍ كَانَ هِبَةً وَهَدِيَّةً وَإِنْ مَلَّكَ لَا لِأَجْلِ

الثَّوَابِ وَلَا الْإِكْرَامِ بِصِيْغَةٍ كَانَ هِبَةً فَقَطْ وَإِنْ مَلَّكَ لِأَجْلِ الْاِحْتِيَاجِ أَوِ الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ صِيْغَةٍ كَانَ صَدَقَةً فَقَطْ وَإِنْ مَلَّكَ لِأَجْلِ الْإِكْرَامِ مِنْ غَيْرِ صِيْغَةٍ كَانَ هَدِيَّةً فَقَطْ فَبَيْنَ الثَّلَاثَةِ عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مِنْ وَجْهٍ.

(Simpulan) sungguh seseorang jika memberi karena ada kepentingan, atau karena tujuan pahala beserta *shighat*, maka disebut *hibah* atau sedekah. Jika memberi dengan tujuan memuliakan beserta *shighat*, maka disebut *hibah* dan hadiah. Jika memberi tidak karena tujuan pahala, dan tidak tujuan memuliakan beserta *shighat*, maka disebut *hibah* saja. Jika memberi karena ada kepentingan atau pahala tanpa *shighat*, maka disebut sedekah saja. Sedangkan jika memberi karena tujuan memuliakan tanpa disertai *shighat*, maka itu adalah hadiah saja. Sehingga diantara tiga hal, ada umum dan khusus dari satu *wajah*.

l. *Al-Hawi al-Kubra fi Fiqh asy-Syafi'i*, XX/352:

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا: أَنْ يُهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ يَخْطُبُ مِنْهُ الْوِلَايَةَ عَلَى عَمَلٍ يُقَلِّدُهُ فَهَذِهِ رِشْوَةٌ تَخْرُجُ مِنْ حُكْمِ الْهَدَايَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا سَوَاءٌ كَانَ خَاطِبُ الْوِلَايَةِ مُسْتَحِقًّا لَهَا أَوْ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ وَعَلَيْهِ رَدُّهَا وَيَحْرُمُ عَلَى بَاذِلِهَا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ لِلْوِلَايَةِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لَهَا فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الْوِلَايَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ بَذْلُهَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ بَذْلُهَا.

Bagian ketiga: Seseorang memberikan hadiah pada orang lain, yang tidak biasa diberikan padanya sebelum wilayah. Ini ada tiga macam; pertama: memberikan hadiah pada seseorang yang memberi wilayah padanya, atas pekerjaan yang ia diangkat untuknya, maka ini adalah *risywah* yang keluar dari hukum hadiah yang haram diambil, baik pemberi wilayah berhak pada wilayah itu atau tidak. Wajib baginya mengembalikan hadiah tersebut, dan haram bagi pemberi hadiah, jika ia tidak berhak atas wilayah. Sedangkan jika berhak pada wilayah, dan jika cukup dari wilayah, maka haram baginya menyerahkannya. Sedangkan jika dibutuhkan, maka tidak haram baginya menyerahkannya.

426. Zakat Tanaman Karet dan Kelapa Sawit

Deskripsi Masalah

Zakat adalah harta yang diambil dari orang kaya untuk *fuqara'*, *masakin* dan lain-lain, namun dalam kitab Syafi'iyyah tidak hanya melihat

sisi kekayaan saja, tapi juga melihat jenis hartanya, yaitu *mawasyi* (ternak), *zuru'* (tanaman biji-bijian), *tsimar* (buah-buahan), *naqdain* (emas-perak), *ma'dan* (tambang emas-perak), *rikaz* (emas-perak peninggalan sebelum Islam) dan *tijarah* (perniagaan). Sementara tanaman semisal karet, kelapa sawit dan semacamnya hasilnya melebihi jenis-jenis harta zakat di atas.

Pertanyaan

Tanaman karet dan kelapa sawit bila diwajibkan zakat, dikategorikan zakat apa? Berapa *nishab* dan kadar zakatnya?

Jawaban

Masuk dalam kategori zakat *zuru'* dan *tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yang tidak ada *nishab*nya, dan kadar zakatnya adalah 1/10 (10%) atau 1/5 (5%). Hal ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, I/199:

فَائِدَةٌ: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ، وَلَا يُعْتَبَرُ عِنْدَهُ النِّصَابُ، وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ تَجِبُ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَيُدَّخَرُ مِنَ الْقُوتِ وَلَابُدَّ مِنَ النِّصَابِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ كَالشَّافِعِيِّ اهـ قلائد.

(*Faidah*) madzhab Abu Hanifah berpendapat, kewajiban *zakat* itu di setiap perkara yang keluar dari bumi kecuali kayu bakar, biji dan rumput. Menurut madzhab Abi Hanifah, *nishab* itu tidak *di'tibar*. Madzhab Ahmad berpendapat wajib zakat dalam makanan pokok yang ditakar atau ditimbang dan disimpan, serta dipastikan mencapai *nishab*. Sedangkan madzhab Malik seperti asy-Syafi'i.

b. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, V/456:

فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ مِنَ الْأَشْجَارِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُبُوبِ إِلَّا فِيمَا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ وَلَا زَكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ، وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ: يَجِبُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ إِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ الْفَارِسِيَّ وَالْحَشِيشَ الَّذِي يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ، وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزُّرُوعِ زَكَاةٌ إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجِبُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ. فَأَمَّا مَا لَا يُكَالُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبَصَلِ وَالْخِيَارِ وَالْبِطِّيخِ وَالرَّيَاحِينِ وَجَمِيعِ الْبُقُولِ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَأَوْجَبَ أَبُو يُوسُفَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنَّاءِ وَقَالَ

مُحَمَّدٌ: لَا زَكَاةَ وَقَالَ دَاوُدُ: مَا أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ ضَرْبَانِ: مُوسِقٌ وَغَيْرُهُ، فَمَا كَانَ مُوسِقًا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَهَا، وَمَا كَانَ غَيْرَ مُوسِقٍ فَفِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الزَّكَاةُ. وَأَمَّا الزَّيْتُونُ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ: فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُخْرَصُ فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَيْتًا. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُخْرَصُ بَلْ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ بَعْدَ عَصْرِهِ وَبُلُوغِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَأَمَّا الْعَسَلُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَرَوَيْنَا هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَوْ غَيْرِهَا وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَشَرَطَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي وُجُوبِ زَكَاتِهِ أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.

(Sub) Mengenai madzhab-madzhab ulama dalam permasalahan tersebut ini, menurut madzhab kita sungguh tidak ada zakat selain kurma dan anggur dari pepohonan. Tidak ada zakat dalam sesuatu dari biji-bijian kecuali dalam perkara yang dibuat makanan pokok, dan disimpan. Tidak ada zakat dalam sayur-mayur; seperti keterangan ini semua disebutkan oleh Imam Malik, Abu Yusuf dan Muhammad. Imam Abu Hanifah dan golongan ulama berkata: *"Wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh di setiap perkara yang dikeluarkan bumi kecuali kayu bakar, biji al-farisi dan rumput yang tumbuh sendiri"*. Al-Abdari berkata: Ats-Tsauri dan Ibn abi Laila berkata: *"Tidak ada kewajiban zakat dari biji-bijian kecuali kurma, anggur, tepung dan terigu"*; Imam Ahmad berkata: *"Wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh di setiap perkara yang ditakar dan disimpan, dari biji-bijian dan buah-buahan. Sedangkan perkara yang tidak ditakar, seperti ketimun, bawang, khiyar (sejenis ketimun), semangka, tumbuhan yang beraroma wangi, dan semua jenis sayuran, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat."* Abu Yusuf mewajibkan zakat dalam *inai* (pacar). Muhammad berkata: *"Tidak wajib membayar zakat"*. Dawud berkata: *"Sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi ada dua: watsaq dan lainnya, Apabila watsaq, maka wajib zakat dalam perkara yang mencapai lima watsaq; tidak ada zakat dalam perkara yang tidak mencapainya.*

Perkara yang tidak watsaq, maka sedikit dan banyaknya wajib menunaikan zakat. Sedangkan zaitun, maka kita menyebut sungguh pendapat shahih menurut kita ialah: tidak ada zakat dalam zaitun." Dengan pendapat ini al-Hasan bin Shalih, Ibn Laila dan Abu Ubaid berkata: az-Zuhdi, al-Auza'i al-Laits Malik ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Tsur berkata: *"Ini ada kewajiban zakat"*. Az-Zuhri al-Laits dan al-Auzai berkata: *"Dusta, zait ada zakatnya"*. Malik berkata: *"Tidak dusta, tetapi diambil sepersepuluh setelah masanya, dan mencapai lima watsaq"*. Sedangkan madu, menurut pendapat shahih menurut kita, tidak ada kewajiban zakat secara mutlak. Dengan ini Malik, Ats-Tsauri, Hasan bin shalih, ibn Abi Laila dan ibn Mundzir berkata: *"Kita meriwayatkan ini dari ibn Umar, Umar bin Abdul Aziz"*. Abu Hanifah dan al-Auzai berkata: *"Jika madu ditemukan di selain bumi kharaj, maka wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh."* Ahmad dan Ishaq berkata: *"Wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh, baik ada di bumi kharaj atau lainnya."* Ibn Mundzir menukilnya dari Makhul, Sulaiman bin Musa, al-Auzai, imam Ahmad, Ishaq. Abu Yusuf dan Muhammad menyaratkan dalam kewajiban zakatnya mencapai lima *watsaq*, sedangkan Abu Hanifah mewajibkannya dalam sedikit dan banyaknya.

c. *Itsmid al-'Ainain fy Ba'dh Ikhtilaf asy-Syaikhaini*, 47-48:

(مَسْأَلَةٌ): أَفَادَ أَيْضًا أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيْفَةَ وُجُوْبُ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا حَطَبًا أَوْ قَصَبًا أَوْ حَشِيْشًا، وَلَا يُعْتَبَرُ نِصَابًا، وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِيْمَا يُكَالُ أَوْ يُوْزَنُ أَوْ يُدَّخَرُ لِلْقُوْتِ، وَلَابُدَّ مِنَ النِّصَابِ عِنْدَ مَالِكٍ كَالشَّافِعِيِّ، اهـ قلائد باقشير.

(*Masalah*) berfaidah juga, madzhab Abi Hanifah berpendapat, bahwa kewajiban zakat itu dalam setiap hal yang keluar dari bumi, kecuali kayu bakar, biji atau rumput, dan tidak meng*i'tibar nishab*. Menurut Imam Ahmad wajib zakat dalam perkara yang ditakar, ditimbang atau disimpan sebagai makanan pokok, dan dipastikan mencapai *nishab*. Sedangkan menurut Malik sebagaimana asy-Syafi'i.

d. *Al-Madzahib al-Arba'ah*, I/616:

وَحُكْمُ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ هُوَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيْهَا الْعُشْرُ إِذَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ أَرْضٍ تُسْقَى بِالْمَطَرِ أَوِ السَّيْحِ أَيِ الْمَاءِ الَّذِي يَسِيْحُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَصَارِفِ وَنَحْوِهَا وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ أَرْضٍ تُسْقَى بِالدِّلَاءِ وَنَحْوِهَا ... وَسَوَاءٌ كَانَ قَلِيْلًا أَوْ كَثِيْرًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهَا نِصَابٌ وَلَا حَوَلَانُ حَوْلٍ اهـ

Hukum zakat tanaman dan buah-buahan; Sungguh kewajiban zakatnya adalah sepersepuluh, apabila keluar dari tanah yang disiram dengan air

hujan atau aliran, maksudnya air yang mengalir di atas tanah yang tumbuh subur dan sesamanya. Wajib mengeluarkan zakat setengah sepersepuluh, bila keluar dari tanah yang disiram dengan timba dan sesamanya… baik sedikit atau banyak. Maka tidak disyaratkan mencapai *nishab* dan *haul*.

e. *Ad-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, II/355:

(وَ) تَجِبُ فِي (مَسْقِيِّ سَمَاءٍ) أَيْ مَطَرٍ (وَسَيْحٍ) كَنَهْرٍ (بِلَا شَرْطِ نِصَابٍ) رَاجِعٌ لِلْكُلِّ (وَ) بِلَا شَرْطِ (بَقَاءٍ) وَحَوَلَانِ حَوْلٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ، وَلِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ أَخْذُهُ جَبْرًا، وَيُؤْخَذُ مِنَ التَّرِكَةِ وَيَجِبُ مَعَ الدَّيْنِ وَفِي أَرْضِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ وَوَقْفٍ، وَتَسْمِيَتُهُ زَكَاةً مَجَازٌ (إِلَّا فِي) مَا لَا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ (نَحْوِ حَطَبٍ وَقَصَبٍ) فَارِسِيٍّ (وَحَشِيشٍ) وَتِبْنٍ وَسَعَفٍ وَصَمْغٍ وَقَطِرَانٍ وَخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ وَشَجَرِ قُطْنٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَبَزْرٍ وَبِطِّيخٍ وَقِثَّاءٍ، وَأَدْوِيَةٍ كَحُلْبَةٍ وَشُونِيزٍ حَتَّى لَوْ أَشْغَلَ أَرْضَهُ بِهَا يَجِبُ الْعُشْرُ.

Wajib mengeluarkan zakat di (tempat siraman air hujan) maksudnya air hujan (dan aliran) seperti sungai (tanpa syarat *nishab*) yang kembali pada semua. (dan) tanpa syarat (tetap) dan mencapai *haul*. Karena sungguh tersimpan makna *fee* di dalamnya. Karena itu, maka imam memungut paksa, dan diambilkan dari harta tinggalan. Wajib beserta hutang, dalam bumi anak kecil, orang gila, budak *mukatab*, orang yang diizini dan *waqaf*, penamaan zakat ini *majaz*. (Kecuali dalam) perkara yang pemanfaatan bumi tidak dimaksud (sesama kayu dan biji) *farisy*, (rumput), jerami, daun pakis, lem, dupa, moncong dan kalium, pohon, kapas, terung, benih, semangka, ketimun, dan obat-obatan seperti susu dan adas; hingga jika menanamnya di tanah, maka wajib membayar zakat sepersepuluh.

f. *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, II/355:

قَوْلُهُ: (بِلَا شَرْطِ نِصَابٍ) فَيَجِبُ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ بِشَرْطِ أَنْ يَبْلُغَ صَاعًا وَقِيلَ نِصْفَهُ، وَفِي الْخَضْرَوَاتِ الَّتِي لَا تَبْقَى وَهٰذَا قَوْلُ الْإِمَامِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي «التُّحْفَةِ» وَقَالَا: لَا يَجِبُ إِلَّا فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ حَوْلًا بِشَرْطِ أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ إِنْ كَانَ مِمَّا يُوسَقُ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا كُلُّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَبْلُغَ قِيمَةَ نِصَابٍ مِنْ أَدْنَى الْمُوسَقِ عِنْدَ الثَّانِي، وَاعْتَبَرَ الثَّالِثُ خَمْسَةَ أَمْثَالٍ مِمَّا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ، فَفِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ أَحْمَالٍ، وَفِي الْعَسَلِ أَفْرَاقٌ، وَفِي السُّكَّرِ أَمْنَاءٌ. وَتَمَامُهُ فِي

«النَّهْرِ». قَوْلُهُ: (وَحَوَلَانِ حَوْلٍ) حَتَّى لَوْ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِرَارًا وَجَبَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ عَنْ قَيْدِ الْحَوْلِ، وَلِأَنَّ الْعُشْرَ فِي الْخَارِجِ حَقِيقَةً فَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ، وَكَذَا خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ لِأَنَّهُ فِي الْخَارِجِ، فَأَمَّا خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ فَلَا يَجِبُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَارِجِ بَلْ فِي الذِّمَّةِ.

(Ungkapan Ala' ad-Din al-Hashkafi: "*tanpa syarat nishab*"), maka wajib membayar zakat dalam perkara yang tidak mencapai *nishab* dengan syarat mencapai satu *sha'*. Menurut satu keterangan, setengah *sha'*. Wajib membayar zakat dalam sayur-sayuran yang tidak tetap. Ini menurut pendapat al-Imam, yaitu pendapat yang shahih, sebagaimana dalam *at-Tuhfah*. Mereka berdua berkata: "*Tidak wajib membayar zakat, kecuali tanaman yang memiliki buah, yang mencapai haul dengan syarat mencapai lima watsaq, jika dari perkara yang di watsaq.*" *Watsaq* itu enam puluh *sha'*, setiap *sha'* ada empat *anna'*. Sedangkan jika tidak, maka hingga sampai *qimah nishab* dari bawah perkara yang di*watsaq* menurut kedua. Ketiga mengi*'tibar* lima *amtsal* dari perkara yang dikira-kirakan macamnya. Dalam kapas ada lima muatan, dalam madu ada perbedaan-perbedaan, dan dalam gula ada *anna'*. Sempurnanya dalam *an-Nahr*. Ungkapan Ala' ad-Din al-Hashkafi: "*mencapai haul*" hingga jika tanah mengeluarkan berulangkali, maka wajib mengeluarkan zakat setiap mengeluarkan, karena kemutlakan *nash* dari *qayid haul*, dan karena sepersepuluh dalam *kharij* itu hakikat. Sehingga berulang-ulang dengan panen berkali-kali. Begitu juga *kharaj al-muqasamah*[1], karena *kharaj al-muqasamah* itu dalam *kharij*. Adapun *kharaj al-wadhifah*[2], maka tidak wajib dalam satu tahun kecuali sekali, karena *kharaj al-wadhifah* tidak dalam *kharij*, tetapi dalam tanggungan.

427. Dana Talangan Haji

Deskripsi Masalah

Pada akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui bersama, pelayanan ibadah haji oleh KBIH bekerjasama dengan Bank, telah memanjakan para calon jamaah haji melalui dana talangan haji yang cukup memberikan kemudahan bagi para calon jamaah haji guna mendapat kuota haji. Namun di sisi yang lain ada permasalahan yang perlu dikaji, terutama mengenai uang yang disyaratkan oleh pihak Bank tentang adanya *ujrah* sesuai dengan kapasitas uang talangan dan masa pelunasan pembayaran

---

[1] *Kharaj al-muqasamah* adalah pajak bagi hasil bumi dari tanah taklukan.
[2] *Kharaj al-wadhifah* adalah semacam pajak lahan.

pendaftaran haji.

Pertanyaan

a. Bagaimana menurut pandangan fiqih melihat masalah talangan haji oleh pihak Bank?
b. Bolehkah menurut fiqih pihak pengelola haji menjual kuota haji?
c. Apakah dikenakan wajib zakat *mal*, bagi calon jamaah haji yang sudah menyetor sebesar Rp 25. 000. 000,-?

Jawaban

a. Dengan melihat deskripsi di atas, maka menurut pandangan fiqih masalah talangan haji oleh pihak Bank tidak terdapat transaksi *ijarah*, sehingga tidak dibenarkan ada istilah *ujrah*, tetapi merupakan jenis bunga Bank yang hukumnya *ditafsil* sesuai dengan keputusan Muktamar.
b. Pihak pengelola haji tidak berhak dan tidak sah menjual kuota haji, karena kuota haji tidak termasuk *mabi'* yang bisa diperjualbelikan. Jika ada jamaah haji yang meninggal atau mengundurkan diri maka jamaah yang antri di belakangnya yang berhak untuk menggantikan (الْأَسْبَقُ فَالْأَسْبَقُ). Sedangkan yang terjadi saat ini, ketika ada tambahan biaya bagi pengganti maka hukumnya adalah *risywah* (suap).
c. Uang setorang 25.000.000,- yang disetorkan untuk pendaftaran haji tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai *nishab*. Sedangkan status uang tersebut masih tergolong milik.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 129:

(مَسْأَلَةٌ): إِعْطَاءُ الرِّبَا عِنْدَ الْاِقْتِرَاضِ وَلَوْ لِلضَّرُوْرَةِ بِحَيْثُ إِنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يُقْرِضْهُ لَا يَدْفَعُ الْإِثْمَ، إِذْ لَهُ طَرِيْقٌ إِلَى حَلِّ إِعْطَاءِ الزَّائِدِ بِطَرِيْقِ النَّذْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُمَلِّكَةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا قُلْنَا بِالْمُعْتَمَدِ إِنَّ النَّذْرَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُوْلِ لَفْظًا. قُلْتُ: وَهٰذَا أَعْنِي النَّذْرَ الْمَذْكُوْرَ فِي هٰذِهِ وَالْاِسْتِئْجَارِ فِي الَّتِيْ قَبْلَهَا إِنْ وَقَعَ شَرْطُهُمَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ مَجْلِسِ الْخِيَارِ أَبْطَلَا وَإِلَّا كُرِهَ، إِذْ كُلُّ مُفْسِدٍ أَبْطَلَ شَرْطُهُ كُرِهَ إِضْمَارُهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَهٰذِهِ الْكَرَاهَةُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ فَحَرَامٌ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْفُحُوْلُ الْمُتْقِنُوْنَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْجَامِعِيْنَ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ كَالْقُطْبِ الْحَدَّادِ وَغَيْرِهِ، إِذْ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ رِبْحًا فَهُوَ رِبًا، فَانْظُرْهُ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ لِبَاسُوْدَانَ.

(*Masalah*) pemberian riba ketika transaksi hutang meskipun karena darurat, sekira sungguh jika tidak memberikannya, maka ia tidak mendapatkan

hutangan. Hal ini tidak menolak dosa, karena ia memiliki akses menuju halal pemberian tambahan dengan jalan *nadzar* atau lainnya dari sebab-sebab hak milik; apalagi apabila kita berkata menurut *mu'tamad*, sungguh *nadzar* tidak memerlukan penerimaan secara lafazh. Saya berkata: *"Hal ini, maksud saya nadzar tersebut dalam masalah ini dan persewaan dalam masalah sebelumnya, jika syarat keduanya terjadi di dalam akad atau majlis khiyar, maka keduanya batal. Sedangkan jika tidak, maka dimakruhkan. Karena setiap perkara yang rusak yang membatalkan syaratnya, maka dimakruhkan menyimpannya; sebagaimana keterangan dalam at-Tuhfah"*. Kemakruhan ini dari sisi zhahir, sedangkan dari sisi bathin maka haram, sebagaimana di*nash* oleh pembesar *ahli taqwa*; yaitu ulama yang mengumpulkan diantara zhahir dan bathin seperti al-Quthb al Haddad dan lainnya. Karena setiap hutang yang menarik keuntungan disebut dengan riba. Lihatlah dalam *syarah al-Khutbah Basudan*.

b. *Majmu'ah Rasa`il Ibn Abidin*, II/117-118:

(وَحَاصِلُهُ) أَنَّ مَا ذَكَرُوْا فِيْ حِيْلَةِ أَخْذِ الْمُقْرِضِ رِبْحًا مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ، بِأَنْ يَدْفَعَ الْمُسْتَقْرِضُ إِلَى الْمُقْرِضِ مِلْعَقَةً مَثَلًا، وَيَسْتَأْجِرُهُ عَلَى حِفْظِهَا فِيْ كُلِّ شَهْرٍ بِكَذَا، غَيْرُ صَحِيْحٍ. لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مَشْرُوْعَةٌ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ الْمَعْدُوْمَةِ وَقْتَ الْعَقْدِ. وَإِنَّمَا جَازَتْ بِالتَّعَارُفِ الْعَامِّ لِمَا فِيْهَا مِنِ احْتِيَاجِ عَامَّةِ النَّاسِ إِلَيْهَا. وَقَدْ تَعَارَفُوْهَا سَلَفًا وَخَلَفًا، فَجَازَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيْرَةِ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ جَازَتْ لِتَعَامُلِ النَّاسِ. انتهى. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَاضَرُوْرَةَ إِلَى الْاِسْتِئْجَارِ عَلَى حِفْظِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى حِفْظِهِ بِأَضْعَافِ قِيْمَتِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَقْصِدُهُ الْعُقَلَاءُ. وَلِذَا لَمْ يَجُزِ اسْتِئْجَارُ دَابَّةٍ لِيُجَنِّبَهَا أَوْ دَرَاهِمَ لِيُزَيِّنَ بِهَا دُكَّانَهُ كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ أَيْضًا، فَتَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ. وَلَا يَثْبُتُ جَوَازُهَا بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ. فَإِنَّ الْعُرْفَ الْخَاصَّ لَا يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ فِي الصَّحِيْحِ عَلَى أَنَّ هٰذَا الْعُرْفَ لَمْ يَشْتَهِرْ فِيْ بَلْدَةٍ، بَلْ تُعَارِفُهُ بَعْضُ أَهْلِ بُخَارَى دُوْنَ عَامَّتِهِمْ، وَلَا يَثْبُتُ التَّعَارُفُ بِذٰلِكَ. وَأَمَّا مَسْئَلَةُ زِيَادَةِ السَّنْجَاتِ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ يَزِيْدُ فِيْ سَنْجَتِهِ مَا أَرَادَ، فَالْمَنْعُ مِنْهُ ظَاهِرٌ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنْ يَتَّفِقُوْا عَلَى زِيَادَةٍ خَاصَّةٍ، فَوَجْهُ الْمَنْعِ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَهَالَةُ وَالتَّغْرِيْرُ إِذَا اشْتَرَوْا بِهَا مِنْ رَجُلٍ غَرِيْبٍ يَظُنُّهَا عَلَى عَادَةِ بَقِيَّةِ الْبِلَادِ.

(*Simpulan*) sungguh kasus yang orang-orang sebutkan mengenai rekayasa penghutang memungut keuntungan dari orang yang berhutang, yaitu orang yang hutang menyerahkan sendok kepada penghutang misalnya, dan menyewanya agar menjaganya dengan ongkos setiap bulan sekian, demikian itu tidak sah. Karena *ijarah* disyariatkan atas dasar menyelisihi *qiyas*, karena *ijarah* adalah menjual berbagai manfaat yang tiada pada waktu akad. *Ijarah* hanya boleh sebab *urf' amm* karena sesuatu yang dibutuhkan mayoritas orang. Generasi *salaf* dan *khalaf* sudah mengetahuinya, sehingga *ijarah* boleh atas dasar menyelisihi *qiyas*. Ahmad bin Idris al-Qarafi dalam *adz-Dzakhirah* secara terang-terangan menjelaskan, bahwa *ijarah* boleh karena *mu'amalah* masyarakat. Tidak samar bahwa tidak ada kedaruratan menyewa orang untuk menjaga barang yang tidak butuh dijaga dengan upah yang berkali lipat dari harganya. Hal itu bukan merupakan *mu'amalah* yang dikehedaki orang-orang berakal, Karena itu, tidak boleh menyewa hewan tunggangan untuk dituntunnya atau dirham untuk dijadikan hiasan tokonya sebagaimana juga secara terang-terangan ulama katakan, sehingga *ijarah* semacam itu tetap pada asal *qiyas*nya. Kebolehan *ijarah* tidak tetap sebab *'urf khash*, sebab *qiyas* tidak ditinggalkan karena adanya *'urf khash* menurut pendapat yang shahih, padahal *'urf* ini tidak masyhur di negeri, bahkan yang mengetahuinya hanya sebagian penduduk Bukhara, tidak mayoritasnya, dan tidak tetap pengetahuan tentangnya. Adapun masalah tambahan timbangan, maka jika yang dimaksud dengannya adalah setiap orang penduduk negeri itu menambahkan kadar yang dikehendakinya dalam timbangannya, maka jelas pencegahan darinya; dan bila yang dimaksud adalah mereka menyepakati tambahan khusus, maka alasan tercegahnya, *walllahu a'lam*, adalah bahwa dari situ pasti akan ada ketidaktahuan dan penyamaran ketika mereka membelinya dari orang asing yang menyangkanya sesuai dengan adat negeri-negeri lainnya.

c. *Fath al-Mu'in*, III/2:

قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ زِيَادٍ: لَا يَنْدَفِعُ إِثْمُ إِعْطَاءِ الرِّبَا عِنْدَ الْإِقْتِرَاضِ لِلضَّرُورَةِ، بِحَيْثُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِ الرِّبَا لَا يَحْصُلُ لَهُ الْقَرْضُ. إِذْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى إِعْطَاءِ الزَّائِدِ بِطَرِيقِ النَّذْرِ أَوِ التَّمْلِيكِ، لَاسِيَّمَا إِذَا قُلْنَا النَّذْرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ لَفْظًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. وَقَالَ شَيْخُنَا: يَنْدَفِعُ الْإِثْمُ لِلضَّرُورَةِ.

Syaikhuna Ibn Ziyad berkata: "*Dosa memberikan riba ketika berhutang tidak tertolak karena darurat, sekira sungguh jika ia tidak memberikan riba, maka tidak bisa menghasilkan hutang. Karena ia memiliki akses memberikan tambahan dengan metode nadzar atau pemberian hak milik; apalagi bila kita berkata,*

nadzar tidak butuh terhadap penerimaan secara lafal menurut mu'tamad. Syaikhuna berkata: Dosa itu tertolak karena darurat."

d. *I'anah ath-Thalibin*, III/2:

وَقَالَ سَيِّدُنَا الْحَبِيْبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَدَّادِ: إِيَّاكُمْ وَمَا يَتَعَاطَاهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ الْأَغْبِيَاءِ الْمَغْرُوْرِيْنَ الْحَمْقَاءِ مِنِ اسْتِحْلَالِهِمُ الرِّبَا فِيْ زَعْمِهِمْ بِحِيَلٍ أَوْ مُخَادَعَاتٍ وَمُنَاذَرَاتٍ يَتَعَاطَوْنَهَا بَيْنَهُمْ، وَيَتَوَهَّمُوْنَ أَنَّهُمْ يَسْلَمُوْنَ بِهَا مِنْ إِثْمِ الرِّبَا، وَيَتَخَلَّصُوْنَ بِسَبَبِهَا مِنْ عَارِهِ فِي الدُّنْيَا، وَنَارِهِ فِي الْعُقْبَى وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، إِنَّ الْحِيْلَةَ فِي الرِّبَا مِنَ الرِّبَا، وَإِنَّ النَّذْرَ شَيْءٌ يَتَبَرَّرُ بِهِ الْعَبْدُ، وَيَتَبَرَّعُ وَيَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ لَا يَصِحُّ النَّذْرُ إِلَّا كَذٰلِكَ، وَقَرَائِنُ أَحْوَالِ هٰؤُلَاءِ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذٰلِكَ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: لَا نَذْرَ إِلَّا فِيْمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ... فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَظَوَاهِرِهَا لَا غَيْرُ. فَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحْكَامِ الْبَاطِنِ، وَأُمُوْرِ الْآخِرَةِ فَلَا.

Sayyiduna al-Habib Abdullah bin al-Haddad berkata: "*Takutlah kalian pada sesuatu yang dianggap halal oleh sebagian orang bodoh dan dungu yang terbujuk dan tolol, yaitu memberikan riba, dalam persangkaan mereka dengan hilah, atau khayalan buta, dan nadzar yang diberikan diantara mereka. Mereka menyangka bahwa mereka menyelamatkan, dengan hilah tersebut dari dosa riba. Mereka selamat dengan hilah dari cela di dunia. Sementara api neraka berada di akhirat dan betapa mustahil. Sungguh hilah dalam riba merupakan riba. Sungguh nadzar adalah sesuatu yang dinilai baik oleh hamba, dan menjadi amal ibadah pada Tuhannya. Tidak sah nadzar kecuali demikian itu, dan qarinah-qarinah kondisi mereka menunjukkan kepada perbedaan tersebut."* Sungguh Nabi ﷺ bersabda: "*Tidak ada nadzar kecuali dalam perkara yang memperoleh ridla Allah dengannya...*" ini dinisbatkan pada hukum-hukum dunia dan zhahirnya; bukan lainnya. Sedangkan bila dinisbatkan pada hukum-hukum batin, dan urusan-urusan akhirat maka tidak.

e. *Kifayah al-Akhyar*, I/398-399:

وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ، إِذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: مُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ، الْقِيَاسُ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مَوْضُوْعَةٌ لِلْمَنَافِعِ وَهِيَ مَعْدُوْمَةٌ، وَالْعَقْدُ عَلَى الْمَعْدُوْمِ غَرَرٌ لٰكِنِ الْحَاجَةُ الْمَاسَّةُ دَاعِيَةٌ إِلَى ذٰلِكَ، إِذِ الضَّرُوْرَةُ الْمُحَقَّقَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى الْإِجَارَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِكُلِّ أَحَدٍ مَسْكَنٌ، وَلَا مَرْكُوْبٌ، وَلَا خَادِمٌ، وَلَا آلَةٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، فَجُوِّزَتْ لِذٰلِكَ كَمَا جُوِّزَ السَّلَمُ وَغَيْرُهُ مِنْ عُقُوْدِ الْغَرَرِ.

Setiap perkara yang bisa diambil manfaat, serta tetap bentuknya, maka sah disewakan. Apabila manfaatnya dapat diukur dengan salah satu dua perkara: masa atau amal; menurut *qiyas* tidak sah persewaan, karena persewaan disediakan bagi manfaat-manfaat, sementara manfaat-manfaat itu tidak ada. Akad pada perkara yang tidak ada merupakan *ghurur*, tetapi kebutuhan terhadap hal itu amat mendesak. Karena darurat yang nyata mendesak persewaan. Bahwa tidak setiap orang memiliki tempat tinggal, kendaraan, pembantu, dan perkakas yang dibutuhkan, hingga diperbolehkan menyewa, sebab kebutuhan tersebut. Sebagaimana diperbolehkan akad *salam* dan lainnya dari akad-akad yang mengandung unsur *ghurur*.

f. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'iy wa ar-Ra'iyah*, 17:

فَإِنْ عَدَلَ عَنِ الْأَحَقِّ الْأَصْلَحِ إِلَى غَيْرِهِ، لِأَجْلِ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ وَلَاءِ عِتَاقَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ، أَوْ مُوَافَقَةٍ فِي بَلَدٍ أَوْ مَذْهَبٍ أَوْ طَرِيقَةٍ أَوْ جِنْسٍ، كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالتُّرْكِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ، أَوْ لِرِشْوَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، أَوْ لِضِغْنٍ فِي قَلْبِهِ عَلَى الْأَحَقِّ، أَوْ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، وَدَخَلَ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ. فَإِنَّ الرَّجُلَ لِحُبِّهِ لِوَلَدِهِ، أَوْ لِعَتِيْقِهِ، قَدْ يُؤْثِرُهُ فِي بَعْضِ الْوِلَايَاتِ، أَوْ يُعْطِيْهِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، فَيَكُوْنُ قَدْ خَانَ أَمَانَتَهُ، كَذَلِكَ قَدْ يُؤْثِرُهُ زِيَادَةً فِي مَالِهِ أَوْ حِفْظِهِ، بِأَخْذِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، أَوْ مُحَابَاةِ مَنْ يُدَاهِنُهُ فِي بَعْضِ الْوِلَايَاتِ، فَيَكُوْنُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، وَخَانَ أَمَانَتَهُ.

Jika imam berpindah dari yang *haq* yang lebih baik pada lainnya, karena hubungan kerabat antara imam dan rakyat, *waris wala'* kemerdekaan, teman atau sesama warga negara, madzhab, thariqah atau suku bangsa seperti bangsa Arab, Persi, Turki dan Rum, atau karena suap yang diambil darinya, baik berupa harta atau manfaat, atau selain itu dari sebab-sebab, atau karena kedengkian dalam hatinya terhadap *haq*, atau adanya permusuhan di antara keduanya. Maka sungguh ia berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan mukminin, serta masuk dalam larangan firman Allah: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."* Kemudian firman: "*dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu*

hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." Sungguh seorang lelaki, karena cinta pada anaknya, atau pada budaknya terkadang itu dapat mempengaruhi dalam sebagian wilayah kekuasaan, atau memberikan perkara yang tidak menjadi haknya. Maka ia mengkhianati amanatnya. Demikian pula, terkadang tambahan dalam harta atau lindungannya dapat mempengaruhinya, dengan mengambil perkara yang tidak menjadi haknya, atau pilih kasih terhadap orang yang memuji berlebihan dalam sebagian wilayah. Maka ia mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan mengkhianati amanah dirinya.

g. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifahMa'ani Alfazh al-Minhaj*, III/101:

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، فَهِيَ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي رَدِّ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَهِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَمَانَاتِ.

Firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* Ayat ini meskipun turun dalam masalah mengembalikan kunci Ka'bah pada Utsman bin Thalhah, tetapi amanat tersebut umum bagi seluruh amanat.

h. *Al-Hawi al-Kabir*, IV/66:

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْمُسْتَفَادِ النِّصَابُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْحَوْلُ فَيَنْكَسِرُ عَنِ اتِّبَاعِ مَاشِيَتِهِ بِمَالٍ قَدْ زَكَّاهُ فَلَا يَجِبُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَضُمَّهُ إِلَى حَوْلِ مَاشِيَتِهِ وَيَسْتَأْنِفُ حَوْلَهُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ فَكَانَ الْحَوْلُ مُعْتَبَرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النِّصَابُ مُعْتَبَرًا عَلَى أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ أَنَّ النِّصَابَ اعْتُبِرَ لِيَبْلُغَ الْمَالُ قَدْرًا يَتَّسِعُ لِلْمُوَاسَاةِ وَهَذَا حَاصِلٌ بِوُجُودِ مَا اسْتَفَادَهُ وَالْحَوْلُ اعْتُبِرَ لِيَتَكَامَلَ فِيهِ نَمَاءُ الْمَالِ وَهَذَا غَيْرُ حَاصِلٍ بِوُجُودِ مَا اسْتَفَادَهُ حَتَّى يَحُولَ حَوْلُهُ.

Sedangkan ungkapan ulama: *"Sungguh ketika yang diambil faidah dari nishab tidak dii'tibar, maka haul tidak dii'tibar. Sehingga pecah dari mengikutkan binatangnya pada harta yang benar-benar ia zakati. Menurut mereka tidak wajib mengumpulkannya sampai genap haul binatangnya, dan memulai haulnya sejak hari ia memiliki. Sehingga haul tersebut dii'tibar, meskipun nishab tidak dii'tibar. Sungguh perbedaan diantara nishab dan haul ialah: bahwa nishab itu dii'tibar agar harta mencapai kadar yang mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini hasil ketika wujud perkara yang di ambil faidah, sedangkan haul dii'tibar agar sempurna perkembangan harta; Hal ini tidak hasil ketika wujud perkara yang diambil faidah, hingga datang haulnya."*

i. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*, II/389:

(بَابُ الْخُلْطَةِ) (وَهِيَ نَوْعَانِ خُلْطَةُ شَرِكَةٍ) وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَعْيَانٍ وَخُلْطَةَ شُيُوعٍ وَذَلِكَ (حَيْثُ كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا) بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَخُلْطَةُ جِوَارٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَوْصَافٍ (وَ) ذَلِكَ حَيْثُ (مَالُ كُلٍّ مُتَمَيِّزٌ) أَيْ (مُعَيَّنٌ) فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عُرْفًا (لَكِنَّهُمَا مُتَجَاوِرَانِ كَمُجَاوَرَةِ مِلْكِ الْوَاحِدِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فَيُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْمَالِ الْوَاحِدِ) لِمَا فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ نَهَى الْمُلَّاكُ عَنِ التَّفْرِيقِ وَعَنِ الْجَمْعِ خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا وَنَهَى السَّاعِي عَنْهُمَا خَشْيَةَ سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ وَمِثْلُهَا خُلْطَةُ الشُّيُوعِ بَلْ أَوْلَى.

(*Bab Khulthah*) (*Khulthah* ada dua macam, yaitu *khulthah syirkah*) dan disebut dengan *khulthah a'yan* dan *khulthah syuyu'*. Hal itu (sekira harta bersama) dalam waris, pembelian dan lain-lain. (dan *khulthah jiwar*) dengan membaca *kasrah jim* lebih *fasih* daripada membaca *dhummah*nya, dan disebut dengan *khulthah aushaf* (dan) hal itu sekira (harta masing-masing dapat dibedakan) maksudnya (tertentu) pada dirinya. Aoabila tidak bisa dibedakan menurut *'urf* (tetapi keduanya berhimpitan seperti himpitan milik salah satu pihak pada perkara yang akan saya sebutkan, maka kedua pihak menunaikan zakat harta satu pihak) karena alasan yang terdapat dalam *khabar al-Bukhari* dari Anas. Tidak dikumpulkan diantara perkara yang terpisah, dan tidak dipisahkan diantara perkara yang berkumpul karena khawatir sedekah yang dilarang *mulak* dari dipisahkan dan dikumpulkan karena khawatir wajib atau banyaknya, dan *Sa'i* melarang keduanya karena khawatir jatuh atau sedikitnya. Adapun *khabar* itu jelas dalam *khulthah jiwar* dan semisalnya adalah *khulthah syuyu'*; bahkan lebih utama.

j. Referensi lain:
   1) *Ghayah at-Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad*, 129

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR
di PP Ma'had Ilmi Wal 'Amal Tulungagung
27-28 Rabi'ul Awwal 1434 H/
08-09 Februari 2013 M

428. Penceraian oleh Hakim
429. *Muhakkam* dalam Nikah dan *Fasakh*
430. Harga Jual Barang Bersubsidi
431. Galian Tanah Masjid untuk Perataan Jalan
432. Tasaruf Kekayaan Masjid yang Berkecukupan
433. Nikah *Misyar*
434. *Takfir* dan Munafik
435. Jasa Pelayanan Lembaga Pengadilan
436. HAKI (Hak Cipta Karya Ilmiah) dan Kitab Karya Ulama *Salaf*
437. Validitas Data Kitab
438. Demokrasi dan Pemilu Secara Langsung

KOMISI A

MUSHAHIH:

KH. Yasin Asymuni
KH. Mahrus Maryani

PERUMUS:

KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I
KH. Muhshon Hamdani
KH. Romadlon Khotib

MODERATOR:

KH. Imam Syuhada

NOTULEN:

KH. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, S.Pd.I

428. Penceraian oleh Hakim

Deskripsi Masalah

Supono mengatur rumah tangganya dengan belanja sendiri dan memasak sendiri sehingga istrinya Markonah tidak harus belanja sendiri. Setiap bulannya Supono memberi uang istrinya Rp. 40.000.- sebagai pegangan saja. Awalnya pernikahan berjalan lancar hingga kemudian dikaruniai seorang anak. Dalam perjalanan waktu, Markonah ingin seperti ibu rumah tangga yang lain, bisa belanja sendiri dan memasak untuk suami, hanya Supono tidak mengizinkan.

Berawal dari masalah ini, Markonah akhirnya menggugat cerai suaminya dengan alasan sudah tidak harmonis lagi dan uang sakunya tidak cukup. Hakim pun meluluskan cerai. Di depan pengadilan, Supono bertanya kepada hakim dasar utama meluluskan gugat cerai istrinya, namun hakim tidak mampu menunjukkan kesalahannya, karenanya Supono di depan hakim bersumpah: *"Wallaahi, saya tidak menceraikan Markonah."*

Pertanyaan

a. Dalam tinjauan Fikih Syafi'i maupun mazhab lain, bagaimanakah cerai yang ditetapkan Hakim atas gugatan istri?
b. Adakah batas minimal nafkah yang harus dipenuhi suami atas istri, sehingga istri bisa menggugat suami dengan alasan nafkahnya kurang?
c. Kapan *hakam* (juru damai) boleh ditunjuk oleh hakim untuk meng-*islah*-kan di antara keduanya?
d. Seberapa jauh kah kewenangan *hakam* yang ditunjuk hakim dapat memutuskan perkara *syiqaq*?

Jawaban

a. Putusan cerai oleh hakim dalam permasalahan Markonah atas dasar ketidak-harmonisan dan ketidak-puasan uang saku dari suaminya sebagaimana dalam deskripsi, belum cukup/memenuhi sebab-sebab *fasakh*, kecuali telah terjadi *idhrar* (tindakan yang membahayakan/ merugikan) yang sudah *tsubut* (ketetapan) dari Pengadilan Agama, atau *syiqaq* (pertengkaran) yang sudah tidak bisa didamaikan melalui *Hakam*.
b. Ada, yaitu disesuaikan kemampuan suami dalam nafkah, pakaian, tempat tinggal dan hal lain yang menjadi kesempurnaannya. Jadi istri dibolehkan menggugat suami jika tidak dapat memenuhi:
   1) Makanan pokok minimal satu *mud* (± 7 Ons).
   2) Pakaian penutup badan.
   3) Tempat tinggal yang layak.
   4) Nafkah batin (menurut sebagian pendapat).

c. Ketika *syiqaq* (perpecahan) telah sampai pada pertengkaran mulut atau pemukulan atau pengrusakan.
d. Dalam hal upaya yang terbaik *(ashlah)* bagi terwujudnya perdamaian (*shulh*) pasangan suami istri melalui cara dan prosedur yang benar menurut *syara'*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *At-Tuhfah fi Syarh al-Bahjah*, I/495:

(وَيَثْبُتُ الْإِضْرَارُ) فِعْلٌ وَفَاعِلٌ (بِالشُّهُوْدِ) يَتَعَلَّقُ بِهِ (أَوْ بِسَمَاعٍ) مَعْطُوْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ يَلِيْهِ (شَاعَ) فَاعِلُهُ ضَمِيْرٌ يَعُوْدُ عَلَى السَّمَاعِ (فِي الْوُجُوْدِ) يَتَعَلَّقُ بِشَاعَ وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِسَمَاعٍ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ ضَرَرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ بِمُعَايَنَتِهِمْ إِيَّاهُ لِمُجَاوَرَتِهِمْ لِلزَّوْجَيْنِ أَوْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْهُمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِمَّا بِالسَّمَاعِ الْفَاشِيْ الْمُسْتَفِيْضِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْجِيْرَانِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ وَغَيْرِهِمَا بِأَنَّ فُلَانًا يَضُرُّ بِزَوْجَةِ فُلَانَةٍ بِضَرْبٍ أَوْ شَتْمٍ فِيْ غَيْرِ حَقٍّ أَوْ تَجْوِيْعٍ أَوْ عَدَمِ كَلَامٍ أَوْ تَحْوِيْلِ وَجْهِهِ عَنْهَا فِيْ فِرَاشِهِ كَمَا فِي الْمُتَيْطِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِيْ قِلَّةِ الضَّرَرِ وَكَثْرَتِهِ شَيْءٌ مَعْرُوْفٌ.

(Tetap membahayakan) mengikuti *wazan* فعل dan فاعل (dengan saksi-saksi) yang ber*ta'alluq* dengannya (atau dengan mendengar) *di'athafkan* pada lafal sebelumnya, yang berdampingan dengannya (*masyhur*) pelakunya. *Dhamir* kembali pada lafal سَمَاع (dalam wujud) yang ber*ta'alluq* dengan lafal شَاعَ, dan *jumlah* tersebut menjadi sifat untuk سَمَاع. Artinya, sungguh bahaya salah satu pasutri terhadap lawannya tetap dengan salah satu dari dua perkara: (1) adakala dengan persaksian dua orang adil atau lebih secara nyata terhadapnya, karena mereka bertetangga dengan pasutri atau bersaudara dengan keduanya, dan sesamanya; dan (2) adakala dengan mendengar secara pasti dan seksama melalui berbagai cerita tetangga dari para wanita, pelayan, dan lainnya, bahwa Si Fulan berantem dengan istrinya *Fulanah* dengan memukul, mencaci tanpa hak, menelantarkan, tidak mau bicara, atau mengalihkan pandangan dari istri di kamarnya. Sebagaimana dalam *al-Mutithiyah*, Imam Malik berkata: *"Pada kita tidak ada sesuatu yang dikenal terkait sedikit dan banyaknya bahaya."*

b. *Syarh Mukhtashar Khalil li al-Kharasi*, XII/23:

(ص) وَلَهَا التَّطْلِيْقُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ

بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ الزَّوْجَ يُضَارِرُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ وَلَوْ كَانَ الضَّرَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ شَاءَتْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ لِخَبَرِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فَلَوْ أَوْقَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ، وَمِنَ الضَّرَرِ قَطْعُ كَلَامِهِ عَنْهَا، وَتَحْوِيلُ وَجْهِهِ عَنْهَا، وَضَرْبُهَا ضَرْبًا مُؤْلِمًا لَا مَنْعُهَا الْحَمَّامَ أَوْ تَأْدِيبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّسَرِّي، وَالتَّزَوُّجُ عَلَيْهَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ إِذَا أَرَادَتِ الْفِرَاقَ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ لِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَتِ الْبَقَاءَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَهَا إلخ أَنَّهُ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْبَالِغِينَ ثُمَّ إِنَّهُ يَجْرِي هُنَا هَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ قَوْلَانِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ إلخ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ) أَيْ وَيَزْجُرُهُ الْحَاكِمُ كَمَا تَقَدَّمَ.

(*Mushannif*) Boleh bagi istri mencerai dengan sebab disakiti mekipun saksi tidak melihatnya berulang kali. (*Syarh*) yakni sungguh bila tetap dengan saksi di hadapan *Qadhi* bahwa suami menyakiti istrinya sementara istri dalam lindungannya, meskipun sekali dalam menyakiti, maka menurut pendapat masyhur, istri memiliki hak pilih, bila ia menghendaki maka ia boleh bertahan dalam kondisi ini, dan apabila ia menghendaki maka ia boleh menceraikan dirinya dengan satu perceraian *ba'in* karena khabar: *"Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain."* Jika istri menjatuhkan lebih dari satu maka sungguh kelebihan itu tidak tetap bagi suami. Diantara bentuk menyakiti ialah memotong pembicaraan terhadap istri, memalingkan wajah darinya, memukul dengan keras, tidak melarang istri pergi ke pemandian, tidak mendidik shalat, tidak menganggap sebagai istri, dan tidak mau menggaulinya. Ungkapan *mu'allif*: *"Apabila istri menghendaki cerai"* tidaklah menafikan ungkapan beliau: *"Karena gegabahnya, hakim mencegahnya"* karena itu ketika istri menghendaki bertahan dan dhahir ungkapan beliau: *"Dan boleh bagi istri....."* sungguh berlaku bagi selain orang-orang baligh kemudian sungguh berlaku di sini apakah hakim menthalak atau memerintah istri dengannya, lalu hakim menghukuminya, ada dua pendapat. (Ungkapan penulis: *"meski tidak menyaksikan..."*), *muqabil*nya, sungguh tidak boleh bagi istri mencerai hingga saksi melihatnya berulang-ulang. (Ungkapan penulis: *"jika istri menghendaki, maka ia boleh menetapkan"*), maksud hakim mencegahnya, sebagaimana terdahulu.

c. *Tafsir Marah al-Labid*, I/150:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا أَيْ وَإِنْ عَلِمْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مُخَالَفَةً بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَلَمْ تَدْرُوا مِنْ أَيِّهِمَا فَابْعَثُوا إِلَى الزَّوْجَيْنِ لِإِصْلَاحِ الْحَالِ بَيْنَهُمَا حَكَمًا، أَيْ رَجُلًا وَسَطًا صَالِحًا لِلْإِصْلَاحِ مِنْ أَهْلِهِ - أَيْ الزَّوْجِ - وَحَكَمًا آخَرَ عَلَى صِفَةِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِهَا لِأَنَّ أَقَارِبَهُمَا أَعْرَفُ بِحَالِهِمَا مِنَ الْأَجَانِبِ وَأَشَدُّ طَلَبًا لِلْإِصْلَاحِ. فَإِنْ كَانَا أَجْنَبِيَّيْنِ جَازَ فَيَسْتَكْشِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِيقَةَ حَالِ الزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْحَكَمَانِ فَيَفْعَلَانِ مَا هُوَ الصَّوَابُ مِنْ جَمْعِهِمَا أَوْ إِيقَاعِ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ.

"*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*" Maksudnya, wahai orang-orang mukmin; apabila kalian mengetahui perselisihan di antara suami dan istri, serta kalian tidak mengetahui dari pihak mana di antara keduanya, maka utuslah seorang *hakam* pada pasangan itu untuk mendamaikan kondisi diantara mereka, maksudnya seorang lelaki cakap yang mampu mendamaikan dari pihak keluarganya, maksudnya suami dan *hakam* yang lain, seperti sifat *hakam* pertama dari pihak keluarga istri, karena kerabat-kerabat mereka berdua lebih mengerti akan keadaan keduanya daripada orang lain, dan lebih dahsyat tuntutan pada perdamaian. Maka jika keduanya adalah orang lain, maka boleh, kemudian masing-masing meminta membuka hakikat kondisi rumah tangga, kemudian dua *hakam* berkumpul, lalu mereka menetapkan suatu perkara yang tepat dari mengumpulkan keduanya, menjatuhkan *thalak* atau *khulu'*.

d. *Tafsir al-Qurthubi*, V/174:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى الشِّقَاقِ فِي «الْبَقَرَةِ». فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَأْخُذُ شِقًّا غَيْرَ شِقِّ صَاحِبِهِ، أَيْ نَاحِيَةً غَيْرَ نَاحِيَةِ صَاحِبِهِ. وَالْمُرَادُ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا، فَأُضِيفَ الْمَصْدَرُ إِلَى الظَّرْفِ كَقَوْلِكَ: يُعْجِبُنِي سَيْرُ اللَّيْلَةِ الْمُقْمِرَةِ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ.

"*Dan apabila kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan*

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." Telah berlalu makna شِقَاق dalam surat al-Baqarah. Maka seolah-olah sungguh masing-masing pasangan mengambil bagian selain bagian lawannya, maksudnya, porsi pihak selain porsi temannya. Maksudnya adalah "*Apabila kalian takut permusuhan diantara keduanya.*" maka *masdar* disandarkan pada *dharaf* seperti ungkapanmu: "*Perjalanan malam yang terang dan puasa hari Arafah menakjubkanku.*"

e. *Tuhfah al-Muhtaj,* VIII/361:

(قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَادَتْ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْلَامُ زَوْجَتِهِ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهَا خِدْمَتُهُ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ مِنْ الطَّبْخِ وَالْكَنْسِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ لَا وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَعْلَمْ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا رُبَّمَا ظَنَّتْ وُجُوبَهَا وَعَدَمَ اسْتِحْقَاقِهَا لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ لَوْ لَمْ تَفْعَلْهُ فَتَصِيرُ كَأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ عَلَى الْفِعْلِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ فَعَلَتْهُ وَلَمْ تَعْلَمْهَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا أُجْرَةٌ عَلَى الْفِعْلِ لِتَقْصِيرِهَا بِعَدَمِ الْبَحْثِ وَالسُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ طَحْنَهُ إلَخْ) أَيْ إنْ أَرَادَتْهُ مِنْهُ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ لَهَا أُجْرَةُ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي حَتَّى لَوْ بَاعَتْهُ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا طَحْنُهُ وَعَجْنُهُ وَخَبْزُهُ فِي الْأَصَحِّ أَيْ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ ذَلِكَ بِبَذْلِ مَالٍ أَوْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ اهـ وَظَاهِرُهَا أَنَّ الْخِيَارَ لِلزَّوْجِ دُونَ الزَّوْجَةِ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فِي ثَمَنِ نَحْوِ مَاءِ الْغُسْلِ مَا يُصَرِّحُ بِهَذَا.

(Ungkapan penulis: "*Meski istri membiasakan...*") ada sebuah pertanyaan dalam pengajian, apakah wajib bagi seorang laki-laki menginformasikan pada istrinya bahwa istri tidak wajib melayani suaminya dengan tugas-tugas menurut adat istri, seperti memasak, menyapu dan lain-lain atau tidak. Saya menjawab pertanyaan ini, sungguh menurut zhahir jawaban yang tepat adalah yang pertama. Sebab seorang istri bila tidak mengetahui kewajibannya terkadang ia akan menyangka wajib dan tidak berhak memperoleh nafkah dan sandang bila ia tidak mengerjakannya, maka seolah-olah ia mengerjakan dengan paksa. Sementara itu apabila istri mengerjakannya dan ia tidak tahu akan kewajibannya, maka di tanggung bahwa tidak wajib bagi istri mendapat bagian upah dari pekerjaannnya karena gegabah dengan tidak membahas dan menanyakannya. Demikian pernyataan Ali Syabramalisi. (Ungkapan matan: "*dan menumbuknya...*") maksudnya apabila istri menginginkan darinya, dan jika tidak maka

kewajiban bagi istri adalah upahnya dengan dalil ungkapan penulis selanjutnya hingga apabila istri menjualnya... Demikian penyataan Ali Syabramalisi. Ungkapan *al-Mughni*: *"Begitu pula wajib bagi suami menumbuk"*, memberi adonan dan membuat roti menurut *Ashah*, maksudnya wajib baginya memberikan harta atau menguasakannya sendiri atau dengan orang lain, seperti dijelaskan dalam *al-Muharrar*. Zhahirnya sungguh *khiyar* bagi suami, bukan istri dan akan dijelaskan oleh *syarih* seperti dalam *an-Nihayah* terkait *tsaman* semisal air madu yang menjelaskan hal ini.

f. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*, VII/449:

(كِتَابُ النَّفَقَاتِ) ... (وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي) نَفَقَةِ (الزَّوْجَةِ) ... وَهُوَ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ) مِنَ الْوَاجِبَاتِ (الْأَوَّلُ الطَّعَامُ فَلِزَوْجَةِ الْمُوسِرِ) عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ مَرِيضَةً أَوْ ذَاتَ مَنْصِبٍ) أَوْ ذِمِّيَّةً (مُدَّانِ وَ) لِزَوْجَةِ (الْمُعْسِرِ) عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ (مُدٌّ) وَلِزَوْجَةِ (الْمُتَوَسِّطِ) عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ (مُدٌّ، وَنِصْفٌ) وَالْعِبْرَةُ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَعِنْدَ النَّوَوِيِّ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ رَطْلِ بَغْدَادَ وَاحْتَجُّوا لِأَصْلِ التَّفَاوُتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الْآيَةَ.

(Kitab Nafkah)... (Terdiri dari enam bab, pertama mengenai) nafkah (istri) yaitu ... enam macam dari kewajiban, (pertama) makanan (maka bagi istri orang kaya) wajib bagi suami memberikan (meski ia seorang budak perempuan, sedang sakit atau memiliki derajat) atau *dzimmi* ialah (dua *mud*) dan bagi istri (orang miskin) wajib bagi suami, meskipun istri dalam kondisi demikian ialah (satu *mud*), dan bagi istri (standar) wajib bagi suami, meskipun istri dalam kondisi demikian (satu *mud* setengah). Yang di*i'tibar* ialah satu *mud* Nabi ﷺ yaitu: menurut ar-Rafi'i 173 *dirham* dan 1/3 *dirham*. Sedangkan menurut an-Nawawi 171 dan 3 *asba' dirham*, karena menetapkan perbedaan keduanya dalam kadar ritel Baghdad dan mereka membuat *hujjah* pada asal selisih dengan firman Allah: *"Nafkahkanlah orang yang memiliki keluasan harta dari rizkinya."* Al-Ayat.

g. *Fath al-Qarib al-Mujib*, I/125:

(وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ) عَلَى الزَّوْجِ وَلَمَّا اخْتَلَفَتْ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِحَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ (وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ فَإِنْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ

إِنْ (كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا) وَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ بِطُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ (فَمُدَّانِ) مِنْ طَعَامٍ وَاجِبَانِ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ لَيْلَتِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ لِزَوْجَتِهِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً حُرَّةً كَانَتْ أَوْ رَقِيقَةً وَالْمُدَّانِ (مِنْ غَالِبِ قُوتِهَا) وَالْمُرَادُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا حَتَّى الْأَقِطِ فِي أَهْلِ بَادِيَةٍ يَقْتَاتُونَهُ (وَيَجِبُ) لِلزَّوْجَةِ (مِنَ الْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ) فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ الْبَلَدِ فِي الْأُدْمِ بِزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ وَجُبْنٍ وَنَحْوِهَا اتُّبِعَتِ الْعَادَةُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ أُدْمٌ غَالِبٌ فَيَجِبُ اللَّائِقُ بِحَالِ الزَّوْجِ، وَيَخْتَلِفُ الْأُدْمُ بِاخْتِلَافِ الْفُصُولِ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ فَصْلٍ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْأُدْمِ، وَيَجِبُ لِلزَّوْجَةِ أَيْضًا لَحْمٌ يَلِيقُ بِحَالِ زَوْجِهَا، وَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ الْبَلَدِ فِي الْكِسْوَةِ مِثْلُ الزَّوْجِ بِكَتَّانٍ أَوْ حَرِيرٍ، وَجَبَ (وَإِنْ كَانَ) الزَّوْجُ (مُعْسِرًا) وَيُعْتَبَرُ إِعْسَارُهُ بِطُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ (فَمُدٌّ) أَيْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مُدُّ طَعَامٍ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ) كُلَّ يَوْمٍ مَعَ لَيْلَتِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ (وَمَا يَأْتَدِمُ بِهِ الْمُعْسِرُونَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ مِنَ الْأُدْمِ (وَيَكْسُونَهُ) مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ مِنَ الْكِسْوَةِ (وَإِنْ كَانَ) الزَّوْجُ (مُتَوَسِّطًا) وَيُعْتَبَرُ تَوَسُّطُهُ بِطُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ مَعَ لَيْلَتِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ (فَمُدٌّ) أَيْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مُدٌّ (وَنِصْفٌ) مِنْ طَعَامٍ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ (وَ) يَجِبُ لَهَا (مِنَ الْأُدْمِ) الْوَسَطِ (وَ) مِنَ (الْكِسْوَةِ الْوَسَطِ) وَهُوَ مَا بَيْنَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَمْلِيكُ زَوْجَتِهِ الطَّعَامَ حَبًّا وَعَلَيْهِ طَحْنُهُ وَخَبْزُهُ، وَيَجِبُ لَهَا آلَةُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ، وَيَجِبُ لَهَا مَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا عَادَةً (وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ) أَيِ الزَّوْجِ (إِخْدَامُهَا) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ، أَوْ أَمَةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَ الزَّوْجَةَ مِنْ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ لِخِدْمَةٍ إِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِهَا (وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا) أَيِ الْمُسْتَقْبَلَةِ (فَلَهَا) الصَّبْرُ عَلَى إِعْسَارِهِ وَتُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا أَوْ تَقْتَرِضُ، وَيَصِيرُ مَا أَنْفَقَتْهُ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَلَهَا (فَسْخُ النِّكَاحِ) وَإِذَا فَسَخَتْ حَصَلَتِ الْمُفَارَقَةُ، وَهِيَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ الْمَاضِيَةُ فَلَا فَسْخَ لِلزَّوْجَةِ بِسَبَبِهَا (وَكَذَلِكَ) لِلزَّوْجَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ (إِنْ أَعْسَرَ) زَوْجُهَا (بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) بِهَا سَوَاءٌ عَلِمَتْ يَسَارَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ أَمْ لَا.

(*Nafkah istri yang menetapi dirinya itu wajib*) bagi suami. Karena nafkah istri berbeda-beda melihat kondisi suami, maka penulis menjelaskannya dalam sebuah ungkapan (*nafkah itu dikira-kirakan; maka jika*) di dalam sebagian naskah, jika (suami kaya) dimana kekayaannya di*i'tibar* sejak terbitnya fajar setiap hari (adalah dua *mud*) dari makanan pokok yang wajib baginya setiap hari serta malamnya yang akhir untuk istrinya, baik muslimah atau *dzimmi*, baik merdeka ataupun budak. Dua *mud* itu (dari keumuman makanan pokok istri), yang dimaksud adalah keumuman makanan pokok negara yaitu terigu, gandum atau lainnya hingga keju bagi penduduk padang pasir yang menjadi makanan pokoknya. (Wajib) untuk istri (dari lauk-pauk dan baju menyesuaikan adat yang berlaku) dalam masing-masing keduanya. Jika adat yang berlaku di negara mengenai lauk-pauk ialah *zait*, wijen, keju dan semisalnya, maka adat tersebut diikuti dalam hal ini. Jika tidak ada lauk-pauk yang umum di suatu negara, maka wajib memberikan lauk yang pantas sesuai kondisi suami. Lauk-pauk itu berbeda-beda sesuai dengan musim. Maka wajib memberikan lauk menurut adat yang berlaku di setiap musim. Wajib pula istri diberikan daging yang lezat menurut kondisi suami. Jika terdapat adat yang berlaku di sebuah negara mengenai busana, semisal suami seperti kain katun atau sutera, maka wajib. (Sedangkan apabila) suami (berstrata rendah), dimana stratanya di*i'tibar* sejak terbit fajar setiap hari (maka satu *mud*), maksudnya, maka kewajiban bagi sang suami untuk istrinya ialah satu *mud* makanan (dari keumuman makanan pokok di suatu negara) setiap hari serta malamnya yang akhir (dan perkara yang dijadikan lauk oleh orang-orang miskin sesuai adat yang berlaku) (dan busana yang mereka kenakan) dari busana-busana yang berlaku pada adatnya mereka. (Dan jika) suami (yang berstrata menengah), dimana stratanya di *i'tibar* sejak terbitnya *fajar* setiap hari serta malamnya yang akhir (maka satu *mud*) maksudnya, maka kewajiban bagi suami untuk istrinya ialah satu *mud* makanan (dan setengah) dari makanan yang umum di suatu negara. (Dan) wajib untuk istrinya (dari lauk-pauk) yang sedang (dan) dari (busana standar) yaitu diantara busana yang wajib bagi orang strata tinggi dan strata rendah. Wajib bagi suami memberikan makanan dari biji untuk istrinya, dan suami menumbuk bijinya serta membuatkan roti. Wajib untuk istri disediakan alat makan, minum dan memasak. Wajib untuk istri disediakan tempat tinggal yang layak bagi istri menurut adat. (Dan jika istri termasuk seorang yang membutuhkan pembantu, maka wajib baginya), maksudnya bagi suami (mencarikan pembantu) dari wanita yang merdeka, *amat*nya, *amat* yang disewa, atau menafkahi wanita merdeka agar menemani sang istri, atau *amat* untuk melayani, jika suami rela padanya (Jika suami tidak mampu menafkahi istrinya), maksudnya di masa mendatang, (maka bagi istri) hendaknya

bersabar atas kemiskinan suami, dan menafkahkan dirinya dari hartanya sendiri atau berhutang. Hutang istri untuk menafkahi dirinya menjadi tanggung jawab suami. Boleh bagi istri (men*fasakh*, merusak nikah), bila istri men*fasakh* maka perceraian berhasil, istri berstatus dicerai dengan *faskh* bukan perceraian *thalak*. Sedangkan nafkah yang telah berlalu, maka tidak ada *faskh* bagi istri dengan sebabnya. (Begitu pula) boleh bagi istri men*faskh* nikah (jika miskin) suaminya (dengan mas kawin sebelum *dukhul*) dengan istri, baik istri mengetahui kekayaan suami sebelum akad atau tidak.

h. *Tafsir Lubab at-Ta'wil fi Ma'alim at-Tanzil*, V/18:

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ يَعْنِيْ وَإِنْ عَلِمْتُمْ وَتَيَقَّنْتُمْ، وَقِيْلَ مَعْنَاهُ الظَّنُّ أَيْ ظَنَنْتُمْ. شِقَاقَ بَيْنِهِمَا يَعْنِيْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَأَصْلُ الشِّقَاقِ الْمُخَالَفَةُ وَكَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَخَالِفَيْنِ فِيْ شِقٍّ غَيْرِ شِقِّ صَاحِبِهِ أَوْ يَكُوْنُ أَصْلُهُ مِنْ شَقِّ الْعَصَا وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَا يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ سَمَاعُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ شِقَاقٌ وَمُخَالَفَةٌ وَاشْتَبَهَ حَالُهُمَا وَلَمْ يَفْعَلِ الزَّوْجُ الصُّلْحَ وَلَا الصَّفْحَ وَلَا الْفُرْقَةَ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ لَا تُؤَدِّيْ الْحَقَّ وَلَا الْفِدْيَةَ وَخَرَجَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ قَوْلًا وَفِعْلًا. قَوْلُهُ تَعَالَى: فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اخْتَلَفُوْا فِي الْمُخَاطَبِيْنَ بِهَذَا وَمَنِ الْمَأْمُوْرُ بِبَعْثَةِ الْحَكَمَيْنِ. فَقِيْلَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِأَنَّ تَنْفِيْذَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَيْهِ وَقِيْلَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ صَالِحِي الْأُمَّةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَابْعَثُوْا خِطَابُ الْجَمْعِ وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْبَقِيَّةِ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْكُلِّ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ أَمْرًا لِآحَادِ الْأُمَّةِ سَوَاءٌ وُجِدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يُوْجَدْ. فَلِلصَّالِحِيْنَ أَنْ يَبْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، وَأَيْضًا فَهَذَا يَجْرِيْ مَجْرَى دَفْعِ الضَّرَرِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَقُوْلَ بِهِ وَقِيْلَ وَهُوَ خِطَابٌ لِلزَّوْجَيْنِ فَإِذَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا شِقَاقٌ بَعَثَا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلَاحًا يَعْنِيْ الْحَكَمَيْنِ وَقِيْلَ الزَّوْجَيْنِ يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا يَعْنِيْ بِالصَّلَاحِ وَالْأُلْفَةِ.

Firman Allah ﷻ: *"Jika kalian takut."* yakni jika kalian mengetahui dan yakin, menurut satu pendapat, maknanya persangkaan; maksudnya kalian menyangka. *"Permusuhan diantara keduanya"* maksudnya, diantara pasutri. Asal permusuhan ialah perselisihan. Setiap pihak yang berselisih dalam sisi selain sisi lawannya; atau asalnya dari potongan tongkat;

yaitu masing-masing pihak berkata sesuatu yang berat terdengar oleh lawannya. Hal itu, bila tampak permusuhan dan perselisihan diantara pasangan, serta perihal keduanya mirip, sedang suami tidak mengupayakan perdamaian, tidak salaman maupun tidak menceraikan. Begitu pula istri tidak mendatangi hak dan *fidyah*, serta karena keluar menuju perkara yang tidak halal dari ucapan dan tindakan. Firman Allah ﷻ: *"Maka utuslah hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga isteri."* Para ulama berselisih terkait orang-orang yang di*khithabi* oleh ayat ini, dan orang yang diperintahkan untuk mengutus dua *hakam*. Menurut satu pendapat, dikatakan: orang yang di*khitabi* hal tersebut adalah imam atau penggantinya; karena pelaksanaan hukum-hukum syariat itu ada padanya. Menurut satu pendapat, orang yang di*khitabi* hal itu adalah setiap *shalih* dari *umat*, karena firman Allah ﷻ: *"Utuslah kalian semua."* Itu merupakan *khitab jama'*. Arahan pada sebagian itu tidak lebih utama daripada arahannya pada yang lain. Maka wajib mengarahkannya pada keseluruhan. Dari sini, maka wajib adanya perintah pada individu umat; baik ditemukan imam atau tidak. Maka bagi orang-orang shalih mengutus *hakam* dari keluarga suami dan *hakam* dari keluarga istri. Begitupun, maka ini berlaku juga di tempat menolak bahaya. Maka masing-masing individu berkata demikian. Menurut satu pendapat, dikatakan: hal itu merupakan *khitab* bagi pasutri. Maka apabila hasil permusuhan diantara keduanya, masing-masing mengutus *hakam* dari keluarga mereka. *"Jika keduanya menghendaki perdamaian."* yakni dua *hakam*. Menurut satu pendapat ialah pasutri. *"Semoga Allah memberikan taufik diantara mereka berdua."* yakni dengan perdamaian dan kasih sayang.

i. *Tafsir al-Baghawi*, II/209:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥) هُوَ بِمَعْنَى الظَّنِّ يَعْنِي: إِنْ ظَنَنْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. جُمْلَتُهُ: أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ شِقَاقٌ وَاشْتَبَهَ حَالُهُمَا فَلَمْ يَفْعَلِ الزَّوْجُ الصَّفْحَ وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ وَخَرَجَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ قَوْلًا وَفِعْلًا بَعَثَ الْإِمَامُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِلَيْهَا، رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ، لِيَسْتَطْلِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَكَمَيْنِ رَأْيَ مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ رَغْبَتُهُ فِي الْوُصْلَةِ أَوْ فِي الْفُرْقَةِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْحَكَمَانِ فَيُنْفِذَانِ مَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ رَأْيُهُمَا مِنَ الصَّلَاحِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يَعْنِي:

الْحَكَمَيْنِ، يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي: بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَقِيلَ: بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ ﷺ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللهِ بِمَا عَلَيَّ فِيهِ وَلِيَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ: كَذَبْتَ وَاللهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ.

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS: an-Nisa' 35). Lafal itu menggunakan arti dugaan, yakni: jika kalian menduga permusuhan diantara keduanya. Kesimpulannya: bila tampak permusuhan diantara pasutri, dan kondisi keduanya mirip; sang suami tidak mengupayakan perdamaian maupun perpisahan. Sedangkan si istri tidak mendatangi hak dan *fidyah*, dan karena keluar menuju perbuatan yang tidak halal, dari ucapan dan tindakan, maka imam mengutus *hakam* dari pihak suami kepadanya, dan hakam dari pihak istri kepadanya. Yaitu dua laki-laki merdeka yang adil, agar masing-masing *hakam* itu menjelaskan pendapat orang yang di utus kepadanya. Jika keinginan suami dalam persambungan atau perpisahan, kemudian dua *hakam* itu berkumpul, kemudian mereka melanjutkan pendapat bagus yang disepakati. Hal itu, seperti firman Allah ﷻ: *"Maka utuslah hakam dari ahlinya dan hakam dari ahli wanita jika keduanya menghendaki perdamaian."* yakni, dua *hakam*, semoga Allah memberikan taufik diantara keduanya, yakni: diantara suami dan istri. Menurut satu pendapat: diantara kedua *hakam, sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Waspada;* Abdul wahhab bin Muhammad al-Kisa'i mengabarkan padaku, aku adalah abdul Aziz bin Ahmad al-Khalal, aku adalah Abu al-Abbas al-Asham, aku adalah ar-Rabi', aku adalah asy-Syafi'i, aku adalah ats-Tsaqafi dari Ayub, dari Ibn Sirin, dari Ubaidah, sungguh ia berkata mengenai ayat ini: *"Dan jika kalian khawatirkan*

permusuhan diantara keduanya, maka utuslah hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri." ia berkata: Telah datang seorang lelaki dan wanita pada Ali bin Abi Thalib ﷺ. Masing-masing bersama kelompok manusia. Kemudian Ali ﷺ memerintahkan pada mereka, lalu mereka mengutus *hakam* dari pihak suami dan *hakam* dari pihak istri. Lalu Ali ﷺ berkata pada dua *hakam*: *"Apakah kalian tahu mengenai masalah yang kalian hadapi?" Jika kalian berpendapat mengumpulkan mereka berdua, maka kalian boleh mengumpulkan. Sedangkan apabila kalian berpendapat untuk memisahkan mereka, maka kalian boleh memisahkannya."* wanita itu berkata: *"Saya rela terhadap kitab Allah mengenai sesuatu yang terdapat wali padaku"*. Kemudian laki-laki itu berkata: *"Sedangkan perpisahan, maka tidak."* Lantas Ali ﷺ berkata: *"Kamu berdusta, wa Allahi; hingga wanita itu mengakui semisal perkara yang diakuinya."*

j. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*, VI/585:

(فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ وَفَحُشَ وَجَبَ) عَلَى الْحَاكِمِ (أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا لَهَا وَحَكَمًا لَهُ بِرِضَاهُمَا لِيُصْلِحَا) بَيْنَهُمَا إِنْ تَيَسَّرَ الْإِصْلَاحُ (أَوْ يُفَرِّقَا) بَيْنَهُمَا (بِطَلْقَةٍ) فَقَطْ (إِنْ عَسُرَ الْإِصْلَاحُ) لِلْآيَةِ وَاعْتُبِرَ رِضَاهُمَا لِأَنَّ الْحَكَمَيْنِ وَكِيلَانِ كَمَا قَالَ. (وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا) فَلَيْسَا بِحَاكِمَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفِرَاقِ وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ وَهُمَا رَشِيدَانِ فَلَا يُوَلَّى عَلَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا (فَيُشْتَرَطُ تَوْكِيلُ الزَّوْجَيْنِ لَهُمَا فِيمَا يَفْعَلَانِ) فَيُوَكِّلُ الزَّوْجُ (هَذَا) أَيْ حَكَمَهُ (فِي التَّطْلِيقِ وَالْخُلْعِ وَ) تُوَكِّلُ الزَّوْجَةُ (هَذَا) أَيْ حَكَمَهَا (فِي الْبَذْلِ) لِلْعِوَضِ (وَالْقَبُولِ) لِلطَّلَاقِ بِهِ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى أَوْ (فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا بِبَعْثِهِمَا) وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ (أَدَّبَ الْحَاكِمُ الظَّالِمَ وَاسْتَوْفَى لِلْمَظْلُومِ) حَقَّهُ (وَلَا يَكْفِي حَكَمٌ وَاحِدٌ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ يَتَّهِمُهُ وَلَا يُفْشِي إِلَيْهِ سِرَّهُ (وَشَرْطُهُمَا الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ) الْمُتَضَمِّنَةُ لِلتَّكْلِيفِ (وَالِاهْتِدَاءُ إِلَى الْمَقْصُودِ) بِمَا بُعِثَا لَهُ لَا الِاجْتِهَادُ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ فِيهِمَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِتَعَلُّقِ وَكَالَتِهِمَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي أَمِينِهِ. (فَإِنْ أَصْلَحَا) بَيْنَهُمَا (بِتَرْكِ حَقٍّ) كَقَسْمٍ وَنَفَقَةٍ وَعَدَمِ تَسَرٍّ أَوْ نِكَاحٍ عَلَيْهَا (لَمْ يَلْزَمْ) تَرْكُهُ (وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِهِمَا) لِلْآيَةِ وَلِأَنَّ الْأَهْلَ أَشْفَقُ وَأَقْرَبُ إِلَى رِعَايَةِ الْإِصْلَاحِ وَأَعْرَفُ بِبَوَاطِنِ الْأَحْوَالِ وَلِأَنَّ الْقَرِيبَ يُفْشِي

سِرَّهُ إِلَى قَرِيبِهِ مِنْ غَيْرِ حِشْمَةٍ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ بَعَثَ أَجْنَبِيَّيْنِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى.

Apabila perseteruan sudah sedemikian rupa dan sengit maka wajib bagi hakim mengutus *hakam* istri dan *hakam* suami dengan kerelaan kedua mempelai, agar mendamaikan persengketaan diantara mereka berdua bila mudah mendamaikannya, atau memisahkannya dengan perceraian saja jika sulit mendamaikan, karena ayat. Kerelaan keduanya *di'tibar* karena kedua *hakam* tersebut merupakan dua wakil seperti dikatakan. (Keduanya adalah wakil bagi masing-masing pihak). Mereka bukanlah hakim dari sisi hakim karena kondisi terkadang menuntut perpisahan, sementara *budhu'* adalah hak suami dan harta hak istri. Keduanya pintar, maka haknya tidak dikuasakan bagi hak mereka. (Disyaratkan mewakilkan pasangan suami istri bagi keduanya dalam urusan yang mereka hadapi) maka suami mewakilkan (ini), maksudnya *hakam*nya (dalam men*thalak* dan *khulu'*).... Dan istri mewakilkan (ini), maksudnya *hakam*nya (dalam penyerahan) *iwadh* (dan menerima) talak dengannya. *Wawu* dalam *kalam*nya di dua tempat memiliki arti *au*. (Bila keduanya tidak sepakat mengutus keduanya) dan tidak sepakat pada sesuatu (maka hakim mengajarkan tatakrama pada orang zhalim dan memenuhi hak orang yang dizhalimi) haknya (dan tidak cukup satu) hukum karena zhahir ayat, dan karena tiap-tiap pasangan menyangkanya, serta tidak membuka rahasianya. Syarat keduanya adalah beragama Islam, merdeka, adil, yang tercakup dalam *taklif* (dan memperoleh petunjuk pada maksud) dengan sesuatu yang mereka berdua diutus untuknya bukan *ijtihad*. Bahwa hal itu disyaratkan bagi keduanya, serta keduanya merupakan wakil karena perwakilan keduanya berkaitan dengan pandangan hakim, seperti dalam kepercayaannya. (Apabila kedua *hakam* mendamaikan) diantara mereka berdua (dengan meninggalkan hak) seperti menggilir, menafkahi, tidak menjadikan nyonya atau menikahinya (maka tidak wajib) meninggalkannya (dan disunahkan kedua *hakam* merupakan keluarga kedua mempelai), berdasarkan *ayat* dan karena keluarga lebih menyayangi, lebih menjaga perdamaian dan lebih mengenali dalamnya masalah. Karena keluarga dekat bisa membuka rahasia pada kerabatnya tanpa permusuhan, berbeda dengan orang lain, apabila mengutus dua orang lain, maka *khilaf al-aula*.

k. *Qulyubi wa 'Umairah*, XII/227:

(فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ) أَيْ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ دَامَا عَلَى التَّسَابِّ وَالتَّضَارُبِ (بَعَثَ الْقَاضِي (حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) لِيَنْظُرَا فِي أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلَاءِ حَكَمِهِ بِهِ، وَحَكَمِهَا بِهَا وَمَعْرِفَةِ مَا عِنْدَهُمَا فِي ذَلِكَ، وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا أَوْ يُفَرِّقَا إِنْ عَسُرَ

الْإِصْلَاحُ عَلَى مَا سَيَأْتِي قَالَ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا الْخ وَهَلْ بَعْثُهُ وَاجِبٌ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَجْهَانِ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ، وُجُوبَهُ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ (وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا وَفِي قَوْلٍ) حَاكِمَانِ (مُوَلَّيَانِ مِنَ الْحَاكِمِ) لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ، وَالْوَكِيلُ مَأْذُونٌ لَيْسَ بِحَكَمٍ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفِرَاقِ وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ، وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ وَهُمَا رَشِيدَانِ، فَلَا يُوَلَّى عَلَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا (فَعَلَى الْأَوَّلِ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا) بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ (فَيُوَكِّلُ) هُوَ (حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضِ خُلْعٍ وَتُوَكِّلُ) هِيَ (حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُولِ طَلَاقٍ بِهِ)، وَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا إِنْ رَأَيَاهُ صَوَابًا وَعَلَى الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ، وَإِذَا رَأَى حَكَمُ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ اسْتَقَلَّ بِهِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى طَلْقَةٍ وَإِنْ رَأَى الْخُلْعَ، وَوَافَقَهُ حَكَمُهَا تَخَالَعَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ ثُمَّ الْحَكَمَانِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا الْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ وَالْاِهْتِدَاءُ إِلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ بَعْثِهِمَا دُونَ الْاِجْتِهَادِ، وَتُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ عَلَى الثَّانِي وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ أَوْلَى لَا وَاجِبٌ.

(Bila seteru semakin sengit), maksudnya sengketa diantara mempelai berdua, sekira mereka sudah saling mencaci dan memukul (maka *Qadhi* mengutus) (*hakam* dari keluarga suami dan *hakam* dari keluarga istri), agar mereka melihat perseteruan diantara mereka setelah *hakam* suami mengintrospeksinya, hakam *istri* mengintrogasinya, dan mengetahui akar permasalahan diantara mereka. Lalu kedua *hakam* mendamaikan mempelai atau memisahkan mereka apabila sulit didamaikan menurut keterangan berikut; Allah ﷻ berfirman: "*Jika kalian takut persengketaan diantara mereka berdua maka utuslah hakam….*" Apakah hukum mengutus wajib atau disunahkan? Ada dua *wajah*, an-Nawawi menshahihkan dalam ar-Raudlah, kewajibannya karena zhahir perintah dalam ayat (kedua *hakam* adalah dua wakil mempelai, menurut satu pendapat) dua *hakam* (yang menguasai dari Hakim), karena Allah menyebut mereka sebagai *hakam*, sementara wakil direkomendasi bukan *hakam*. *Wajah* pertama, sungguh kondisi terkadang menuntut perpisahan. *Budlu'* merupakan hak suami, sementara harta adalah hak istri. Keduanya adalah orang yang pintar, maka hak mereka tidak dikuasai. (Menurut *wajah* pertama, disyaratkan kerelaan mempelai berdua) dengan mengutus dua *hakam* (maka suami mewakilkan) (*hakam*nya dengan talak, menerima *iwadh khulu'* dan istri mewakilkan *hakam*nya dengan menyerahkan *iwadh* dan

menerima *thalak*). Kedua *hakam* memisahkan diantara mempelai berdua bila mereka berpendapat benar. Menurut *wajah* kedua, tidak disyaratkan kerelaan mempelai berdua dengan mengutus *hakam*, apabila *hakam* suami berpendapat talak dalam satu pihak, dan tidak bertambah pada *thalak*. Jika berpendapat *khulu'* dan hakam istri bertepatan sama, maka mereka berdua di*khulu'* meskipun mempelai berdua tidak rela. Kemudian dua *hakam* disyaratkan menurut dua pendapat secara serentak, yaitu merdeka dan memperoleh petunjuk pada tujuan mengutus bukan *ijtihad*, dan disyaratkan merdeka, laki-laki menurut pendapat kedua, kedua *hakam* dari keluarga mempelai berdua lebih utama, bukan wajib.

429. *Muhakkam* dalam Nikah dan *Fasakh*

Deskripsi Masalah

Dalam majlis akad nikah telah hadir para undangan, pemeran utama prosesi akad nikah meliputi mempelai laki-laki, ketidak-hadiran wali (ayah) tentu sangat mencemaskan dan setelah lama ditunggu, dinyatakan wali (ayah) tidak berkenan hadir pada pernikahan putrinya. Suasana menjadi gaduh, namun akad nikah tidak boleh gagal. Berbagai solusi hukum diperdebatkan oleh yang hadir dan akhirnya dipilih seseorang sebagai *muhakkam*, sebab petugas KUA tidak bersedia menjadi wali hakim, malah ia meninggalkan majlis karena suasana yang sudah sedemikian kacau.

Di tempat lain, terjadi kasus panelantaran istri dari pernikahan *sirri* (tidak tercatat pada KUA) oleh suaminya yang telah lama pergi tanpa kabar berita yang jelas apalagi nafkah. Sang istri menyadari bahwa pernikahannya yang *sirri* tidak memiliki dokumen buku nikah, sehingga tidak bisa mengajukan gugatan cerai *fasakh* di Pengadilan Agama. Oleh karenanya pada suatu ketika dia bersama walinya datang ke KUA, memohon agar pihak KUA setempat mem*fasakh* nikah *sirri*nya dan selanjutnya segera dilaksanakan akad nikah dengan laki-laki lain secara prosedural menurut hukum Islam dan hukum positif. Kejadian ini disikapi oleh pihak KUA agar pelapor (istri) membuat pernyataan di atas materai dengan menyertakan wali dan saksi, lantas dinyatakan cerai *fasakh* oleh pihak KUA sebagai *muhakkam*.

Pertanyaan

a. Solusi akad nikah dengan wali *muhakkam* sebagaimana kasus pada deskripsi, sudahkah merupakan langkah terbaik dalam pandangan hukum Islam?
b. Jika langkah tersebut keliru, bagaimana langkah hukum selanjutnya?
c. Apakah dalam hukum Islam dikenal *fasakh* oleh *muhakkam*? Jika

iya, bagiamana cara pengangkatan *muhakkam* dalam *fasakh* nikah?

Jawaban

a. Akad nikah oleh *muhakkam* sebagaimana tergambar pada deskripsi adalah bukanlah yang terbaik, bahkan akad nikahnya tidak sah, sebab penolakan wali untuk menikahkan bukan katagori *'adhal*. Hanya saja Ibnu al-Imad berpendapat boleh menggunakan wali *muhakkam* walau masih ada hakim dalam hal jika walinya bepergian (*ghaib*) pada jarak boleh *qashar* salat. Perlu diperhatikan, bahwa *tahkim* (pengangkatan *muhakkam*) harus prosedural, yaitu diangkat oleh kedua mempelai atau atas persetujuan mereka.

b. Karena pada sub a akad nikah dinyatakan tidak sah, maka wajib mengulang akad nikahnya oleh wali nasab, atau oleh hakim jika walinya telah ditetapkan *'adhal* (menolak menikahkan) dari Pengadilan Agama, atau oleh *muhakkam* pada jarak boleh qashar salat dari tempat tinggal wali sebagaimana pendapat Ibnu al-Imad.

c. Dalam hukum Islam dikenal *fasakh* oleh *muhakkam*. Adapun prosedur pengangkatannya apabila suami telah terputus berita keberadaannya, maka cukup oleh pihak istri sebagaimana yang terjadi pada kasus ini.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fawa`id al-Makiyyah fi Sab'ah al-Kutub al-Mufidah li as-Sayyid Alawi Ahmad as-Saqqaf*, 67:

وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَشْخَرِ الْيَمَنِيُّ هَلْ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي النِّكَاحِ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ سَبَقَ فِي الْجَوَابِ قَبْلَهُ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ اخْتَارَ الْجَوَازَ حَتَّى فِي التَّفْوِيضِ إِلَى مُجَرَّدِ الْعَدْلِ فَضْلًا عَنِ التَّحْكِيمِ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ الْمَسَافَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ، وَبِالْجَوَازِ أَفْتَى الْكَمَالُ الرَّدَّادُ وَعِبَارَةُ السِّرَاجِيَّةِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سِرَاجِ الدِّينِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ نَائِبٌ وَلَّتْ أَمْرَهَا عَدْلًا لِلْقَضَاءِ فَقِيهًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَقِيهٌ وَلَّتْ أَمْرَهَا عَدْلًا غَيْرَ فَقِيهٍ وَالْفَقِيهُ الْمُقَلِّدُ فِي هَذَا الْأَعْصَارِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُجْتَهِدِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فَلَا يَنْبَغِي جَوَازُ تَوْلِيَةِ غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ الْحَالَةَ هَذِهِ.

Sungguh *al-Imam al-Muhaqqiq* Muhammad bin Abi Bakar bin Abdillah al-Asykhar al-Yamani ditanya; "*Apakah boleh tahkim dalam pernikahan ketika wali gaib atau tidak?*" Aku menjawab dengan ungkapan beliau:

"Telah lewat dalam jawaban sebelumnya, sungguh al-Adzra'i memilih boleh hingga menyerahkan murni keadilan. Apalagi tahkim bagi orang yang ahli. Tetapi disyaratkan diantara istri dan wali terdapat jarak yang di i'tibar dalam pernikahan hakim". Al-Kamal ar-Radad berfatwa bahwa hukumnya boleh. *Ibarat as-Sarajiyah* karya as-Syaikh Muhammad bin Abdir Rahman bin Siraj ad-Din: *"Jika tidak ada naib di suatu negara, maka istri menguasakan urusan qadla pada fakih yang adil. Jika di suatu negara tidak terdapat fakih, maka istri tadi menguasakan urusannya pada orang adil yang tidak fakih. Sedangkan fakih yang bertaqlid pada masa-masa sekarang ini menempati posisi mujtahid."* Ibn Hajar berkata: *"Boleh menguasakan kepada orang lain ketika wujud kondisi ini."*

b. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, IV/209:

وَلَا يَجُوْزُ تَحْكِيْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ مُطْلَقًا وَلَا يُفِيْدُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ إِلَّا بِرِضَاهُمَا بِهِ لَفْظًا لَا سُكُوْتًا فَيُعْتَبَرُ رِضَا الزَّوْجَيْنِ مَعًا فِي النِّكَاحِ، نَعَمْ: يَكْفِيْ سُكُوْتُ الْبِكْرِ إِذَا اسْتُؤْذِنَتْ فِي التَّحْكِيْمِ وَلَا يَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ إِنْ كَانَ ثَمَّ قَاضٍ خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ لِأَنَّهُ يَنُوْبُ عَنِ الْغَائِبِ بِخِلَافِ الْمُحَكَّمِ: وَيَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ.

Tidak boleh *tahkim* pada orang yang tidak adil secara mutlak. Hukum *muhakkam* tidak berfaidah kecuali atas kerelaan kedua pihak secara lafal, bukan diam. Kerelaan pasutri bersama di*i'tibar* dalam pernikahan. Ya, bagi seorang gadis cukup diam apabila ia ditawari *tahkim*. Tidak boleh *tahkim* ketika *wali ghaib*, meski mencapai *masafatul qashri* jika terdapat *Qadhi*. Berbeda menurut pendapat Ibn al-Imad, karena *Qadhi* mengganti peran orang yang gaib, berbeda dengan *muhakkam*. Boleh baginya menghukumi dengan ilmunya menurut pendapat *al-Awjah*.

c. *I'anah ath-Thalibin*, IV/209:

(قوله: وَلَا يَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ) هٰذَا كَالتَّقْيِيْدِ لِمَا تَقَدَّمَ، فَكَأَنَّهُ قَالَ مَحَلُّ جَوَازِ التَّحْكِيْمِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَلِيُّ غَائِبًا بِأَنْ كَانَ مَفْقُوْدًا بِالْكُلِّيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ) أَيْ لَا يَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: إِنْ كَانَ ثَمَّ) أَيْ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِيْ يُرَادُ التَّحْكِيْمُ فِيْهَا. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِابْنِ الْعِمَادِ) أَيِ الْقَائِلِ بِجَوَازِهِ عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيِ الْقَاضِيَ وَهِيَ عِلَّةٌ لِعَدَمِ جَوَازِ التَّحْكِيْمِ حِيْنَ إِذْ غَابَ الْوَلِيُّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ

الْمُحَكَّمِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَنُوْبُ عَنِ الْغَائِبِ، فَلَا يَجُوْزُ تَحْكِيْمُهُ مَعَ وُجُوْدِ الْغَائِبِ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوْزُ لَهُ) أَيْ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ كَقَاضِي الضَّرُوْرَةِ كَمَا مَرَّ. (وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ، وَأَمَّا عِنْدَ م ر فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْجَوَازِ قَالَ: لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ عَنِ الْقَاضِيْ.

(Ungkapan Zanuddin al-Malibari: *"Tidak boleh tahkim ketika tiadanya Wali"*). Hal ini seperti membatasi keterangan lalu, seolah-olah penulis berkata: *"Tempat kebolehan tahkim dalam pernikahan adalah apabila Wali tidak ghaib, sekira tidak wujud semuanya."* (Ungkapan Zanuddin al-Malibari: *"Meski mencapai masafah al-qashr"*), maksudnya tidak boleh melaksanakan *tahkim* beserta tiadanya Wali, meskipun tiadanya mencapai *masafah al-qashr*. (Ungkapan Zanuddin al-Malibari: *"Jika di sana"*), maksudnya di suatu negara, di mana *tahkim* dikehendaki. (Ungkapan Zanuddin al-Malibari: *"Berbeda menurut Ibn al-Imad"*), maksudnya yang berkata bahwa hukumnya boleh ketika tidak ada Wali, meskipun ada *Qadhi*. (Ungkapan Zanuddin al-Malibari: *"Karena ia"*), maksudnya *Qadhi*; ini merupakan alasan, karena tidak boleh *tahkim* sejak Wali gaib. (Ungkapan Zanuddin al-Malibari: *"Berbeda dengan muhakkam"*), Maksudnya, sungguh ia tidak bisa mengganti orang *ghaib*, sehingga tidak boleh men*tahkim*nya ketika wujud orang *ghaib*. (Ungkapan Zanuddin al-Malibari: *"Dan boleh baginya"*), maksudnya bagi *Muhakkam* menghukumi dengan ilmunya, seperti *Qadhi Dharurah*, seperti keterangan yang telah lewat. (Ungkapan Zanuddin al-Malibari: *"Menurut al-Aujah"*), maksudnya menurut Ibn Hajar, sedangkan menurut ar-Ramli as-Shaghir menurut *al-Aujah* tidak boleh. Beliau berkata: "Karena rendah derajatnya daripada *Qadhi*."

d. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 207:

وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ مِنَ الْمُحَكِّمَيْنِ كَالزَّوْجَيْنِ فِي التَّحْكِيْمِ كَقَوْلِ كُلٍّ: حَكَّمْتُكَ لِتَعْقِدَ لِيْ أَوْ فِيْ تَزْوِيْجِيْ، أَوْ أَذِنْتُ لَكَ فِيْهِ، أَوْ زَوِّجْنِيْ مِنْ فُلَانَةَ أَوْ فُلَانٍ.

Serta harus ada pelafalan dari *muhakkam*, sebagaimana pasutri dalam kasus *tahkim*, misalnya ucapan masing-masing: *"Aku mentahkim kepadamu agar mengakadkanku," "dalam menikahkanku, aku mengizinkan kepadamu dalam menikahkanku," "atau nikahkanlah aku pada fulanah atau pada fulan."*

e. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 1/242:

وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ وَابْنُ كُبْنٍ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّوْيَانِيُّ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ تَحْصِيْلُ النَّفَقَةِ مِنَ الزَّوْجِ فِيْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ جَازَ لَهَا الْفَسْخُ حَضَرَ الزَّوْجُ أَوْ غَابَ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ،

وَرَجَّحَهُ ابْنُ زِيَادٍ وَالطَّنْبَدَاوِيُّ وَالْمُزَجَّدُ وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرُهُمْ، فِيمَا إِذَا غَابَ وَتَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ مِنْهُ وَلَوْ بِنَحْوِ شِكَايَةٍ، قَالَ (سم): وَهَذَا أَوْلَى مِنْ غَيْبَةِ مَالِهِ وَحْدَهُ الْمُجَوِّزِ لِلْفَسْخِ، أَمَّا الْفَسْخُ بِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الْغَيْبَةِ وَشَهْوَةِ الْوِقَاعِ فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا وَإِنْ خَافَتِ الزِّنَا، فَإِنْ فَقَدَتِ الْحَاكِمَ أَوِ الْمُحَكَّمَ أَوْ عَجَزَتْ عَنِ الرَّفْعِ إِلَيْهِ كَأَنْ قَالَ: لَا أَفْسَخُ إِلَّا بِمَالٍ وَقَدْ عَلِمَتْ إِعْسَارَهُ وَأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ لِلنَّفَقَةِ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِلضَّرُورَةِ، كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَإِمَامُهُ، وَرَجَّحَهُ فِي التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا، كَمَا لَوْ عَجَزَتْ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ وَعَلِمَتْ إِعْسَارَهُ وَلَوْ بِخَبَرِ مَنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهَا صِدْقُهُ فَلَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا، نَقَلَهُ الْمَلِيبَارِيُّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ بِشَرْطِ إِشْهَادِهَا عَلَى الْفَسْخِ اهـ وَذَكَرَ غَالِبَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي تَعَذُّرِ النَّفَقَةِ بِغَيْبَةِ الزَّوْجِ فِي (ج) وَفِي (ش) أَيْضًا نَحْوَ مَا مَرَّ وَزَادَ: فَحِينَئِذٍ إِذَا قَضَى بِالْفَسْخِ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ بِالْغَيْبَةِ وَالْامْتِنَاعِ شَافِعِيٌّ لِتَرْجِيحِهِ عِنْدَهُ، لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ رَأَى تَضَرُّرَ الْمَرْأَةِ نَفَذَ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا فَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ، وَيَجُوزُ الْإِفْتَاءُ وَالْعَمَلُ بِهِ لِلضَّرُورَةِ، إِذِ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ، نَعَمْ لَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدُ أَنَّ لَهُ مَالًا بِالْبَلَدِ خَفِيَ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ، وَأَنَّ الزَّوْجَةَ تَعْلَمُهُ وَتَقْدِرُ عَلَيْهِ وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً بَانَ بُطْلَانُ الْفَسْخِ إِنْ تَيَسَّرَ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ مِنْهُ لَا كَعَقَارٍ وَعَرَضٍ.

Ibn Ajil berfatwa demikian, Ibn Kabn, Ibn as-Shabagh dan ar-Rauyani: Sungguh jika sulit menghasilkan nafkah dari suami selama tiga hari, maka boleh bagi istri men*fasakh*, baik suami hadir atau gaib. Ibn as-Shalah menguatkannya, Ibn Ziyad, at-Thanbadawi, al-Muzajjad, *shahib al-Muhadzdzab*, al-Kafi dan ulama lain mengunggulkannya, dalam kasus apabila suami gaib dan sulit mendatangkan nafkah darinya meskipun dengan sesama kata *'ah'* (seruan kesal). (Syihabuddin bin Qasim al-Abadi berkata), ini lebih utama daripada gaib hartanya saja yang membolehkan *fasakh*. Sedangkan *fasakh* sebab istri merasa tersiksa karena lama gaib, dan hasrat berhubungan intim. Maka tidak boleh menurut kesepakatan ulama, meskipun istri takut zina. Jika istri tidak menemukan hakim, *muhakkam* atau lemah dari melaporkannya, misalkan berkata: *"Saya tidak menfasakh kecuali dengan harta."* Istri telah mengetahui kemiskinan suami, dan sungguh ia berhak menerima nafkah, maka ia boleh men*fasakh* sendiri karena *darurat*; sebagaimana al-Ghazali dan imamnya berkata,

dan beliau mengunggulkannya dalam *at-Tuhfah*, *an-Nihayah* dan kitab lain. Sebagaimana jika istri lemah dari saksi miskin, dan ia mengetahui kemiskinan suami meski melalui kabar orang yang jujurnya tertambat dalam sanubari istri. Sehingga istri boleh men*fasakh* juga. Al-Malibari menukil dari Ibn Ziyad dengan syarat mempersaksikan istri terhadap *fasakh*, dan Ia menyebut mayoritas syarat-syarat ini dalam Bab *Kesulitan Nafkah Karena Ghaibnya Suami* dalam Alawi Ibn Saqaf Ibn Muhammad al-Ja'fari al-Alawi al-Hadhrami. Dalam Muhammad Abu Bakar al-Yamani al-Asykhar juga ada syarat seperti yang telah lewat, dan dia menambah: *"Dengan demikian, ketika seorang Qadhi bermadzhab Syafi'i memutuskan Faskh karena kesulitan nafkah sebab tiadanya suami dan tercegah, karena hal itu menjadi rajah menurutnya, karena ia termasuk ahli tarjih, atau karena ia melihat bahaya istri berlanjut secara lahir dan batin, maka tidak boleh merusak keputusan hukumnya. Boleh berfatwa dan mengamalkannya karena darurat, karena kesulitan menarik kemudahan, dan hal ini bukan termasuk mengikuti kemudahan. Ya, jika Si Suami setelah itu mengklaim memiliki harta di suatu negara yang samar bagi saksi atas kemiskinannya, sementara istri mengetahuinya, mampu mengambilnya, dan Suami menegakkan saksi untuk klaimnya, maka jelas kebatalan faskh jika mudah memperoleh nafkah dari suami yang tidak seperti pekarangan dan barang."*

430. Harga Jual Barang Bersubsidi

Deskripsi Masalah

Dalam rangka menekan defisit APBN, pemerintah memberlakukan dua sistem harga jual barang, bersubsidi dan harga tidak bersubsidi. Perlakuan serupa juga pada tarif PLN untuk rumah tangga V.450 (R.1) berbeda untuk usaha industri, begitu pula pupuk, beras dan sebagainya.

Pertanyaan

Bagaimanakah hukum membeli atau menjual barang bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak?

Jawaban

Membeli atau menjual barang bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak adalah haram.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, III/503:

قَوْلُهُ: (مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ بِظَنِّهِ مَالَهُ الخ) قَالَ م ر: وَقَدْ أَفَادَ الْوَالِدُ أَنَّ الَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيْ تَعْرِيْفِ الْغَصْبِ أَنَّهُ حَقِيْقَةً وَإِثْمًا وَضَمَانًا الْاِسْتِيْلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وَضَمَانًا الْاِسْتِيْلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِثْمًا

الْاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْغَصْبُ فِيهِ الْإِثْمُ وَالضَّمَانُ كَمَا إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ غَيْرِهِ عُدْوَانًا وَمِنْهُ الْقَبْضُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوِ الضَّمَانِ دُونَ الْإِثْمِ كَمَا إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ غَيْرِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ مَالُهُ، أَوِ الْإِثْمُ دُونَ الضَّمَانِ كَمَا إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى اخْتِصَاصِ غَيْرِهِ عَالِمًا بِهِ. وَمِثْلُ الْاخْتِصَاصِ الْمَالُ الَّذِي لَا يُتَمَوَّلُ كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا.

(Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib: "*Persoalan jika mengambil harta orang lain dan menyangka hartanya*"). Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad (ar-Ramli as-Shaghir) berkata: "*Sungguh al-Walid memberikan faidah bahwa perkara yang dihasilkan dari kalam al-Ashab dalam mengartikan ghasab; sungguh ghasab menurut perspektif hakikat adalah dosa dan tanggungan.*" Menurut perspektif hakikat, *ghashab* ialah menguasai harta orang lain secara aniaya. Menurut perspektif tanggungan, *ghashab* ialah menguasai harta orang lain tanpa hak. Menurut perspektif dosa, *ghashab* adalah menguasai hak orang lain dengan cara aniaya. Simpulannya, *ghashab* adakala berkaitan dengan dosa dan tanggungan, sebagaimana apabila seseorang menguasai harta orang lain secara aniaya, dan diantaranya menerima penjualan yang rusak. Atau berkaitan dengan tanggungan bukan dosa, sebagaimana apabila seseorang menguasai harta orang lain dan ia menyangka bahwa yang diambil itu hartanya. Atau berkaitan dengan dosa bukan tanggungan, sebagaimana jika seseorang menguasai *ikhtishash* orang lain, dan ia mengetahuinya. Semisal *ikhtishahs* adalah barang yang tidak dianggap harta, seperti satu atau dua biji gandum dan sesamanya.

b. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib,* I/3410:

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْمَالَ لَيْسَ مُشْتَرَكًا) يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّعْلِيلُ فَإِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الرَّدَّ عَلَى الْأَوَّلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالَ الخ رَدٌّ لِعِلَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَيْ لِأَنَّ الثَّابِتَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ اخْتِصَاصٌ لَا اشْتِرَاكٌ بِالْمِلْكِ، حَتَّى يَمْتَنِعَ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ بَيْتِ الْمَالِ مَا دَامَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلَيْسَتْ كَالْأَمْوَالِ الْمَمْلُوكَةِ عَلَى وَجْهِ الْاشْتِرَاكِ وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ: لَيْسَ مُشْتَرَكًا الخ. أَيْ لَيْسَ الْاشْتِرَاكُ فِيهِ كَالْاشْتِرَاكَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِلْكٌ لَهُمْ الخ بِخِلَافِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلْمُسْلِمِينَ بَلِ الثَّابِتُ لَهُمُ اخْتِصَاصُهُمْ بِهِ لَا الْمِلْكُ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.

(Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib: *"Karena harta itu tidak dimiliki bersama"*) alasan ini perlu dikaji ulang, karena sungguh alasan ini kurang tepat kecuali ditolak pada kasus pertama. Sebagian ulama berkata, yang ungkapannya: *"karena harta"*... ini menolak alasan ungkapan pertama, maksudnya karena perkara yang tetap dalam *baitul mal* itu menjadi tertentu, tidak dimiliki bersama, sehingga dilarang mengambil sesuatu darinya. Simpulan, sungguh mereka tidak memiliki harta *baitul mal* selama harta itu berada di *baitul mal*. Harta tersebut tidak seperti harta-harta yang dimiliki bersama. *Syaikhuna* al-Asymawi berkata: *"tidak dimiliki bersama..."*, kepemilikan bersama tidak seperti beberapa kepemilikan di atas, karena hal itu milik mereka.... Berbeda dengan harta *baitul mal*, sungguh harta tersebut tidak dimiliki oleh kaum muslimin, akan tetapi mereka memiliki hak khusus dengannya, namun tidak memiliki secara kepemilikan, dengan *dalil* alasan di atas.

c. *Mughni al-Muhtaj*, II/21-22 [Dar al-Ma'rifat; 1418 H/1997 M]:

الشَّرْطُ (الرَّابِعُ) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ (الْمِلْكُ)...(فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ) وَهُوَ الْبَائِعُ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا وِلَايَةٍ (بَاطِلٌ) لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ الْقَابِلَةِ لِلنِّيَابَةِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ أَوْ ابْنَتَهُ أَوْ طَلَّقَ مَنْكُوحَتَهُ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَجَّرَ دَارَهُ أَوْ وَقَفَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ اشْتَرَى لَهُ بِعَيْنِ مَالِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا وَكِيلٍ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّصَرُّفِ بَدَلَ الْبَيْعِ لَشَمِلَ الصُّوَرَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا (وَفِي الْقَدِيمِ) تَصَرُّفُهُ الْمَذْكُورُ كَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا مَرَّ (مَوْقُوفٌ) وَقِيلَ التَّصَرُّفُ صَحِيحٌ وَالْمَوْقُوفُ الْمِلْكُ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْإِمَامِ كَمَا مَرَّ عَلَى الْإِجَازَةِ (إِنْ أَجَازَ مَالِكُهُ) أَوْ وَلِيُّهُ (نَفَذَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ مَضَى (وَإِلَّا فَلَا) يَنْفُذُ وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُرْسَلًا وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ وَذَكَرْتُ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ رَبِحَ فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَهَذَا الْقَوْلُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْجَدِيدِ وَقَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ إِنَّهُ أَقْوَى مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ.

Syarat (keempat) dari syarat-syarat barang dagangan ialah (kepemilikan)

... (maka *bai' fudluli*) yaitu menjual harta orang lain tanpa seizinnya dan tanpa *wilayah* (hukumnya *bathil*). Karena hadits terdahulu, begitu juga *tasharruf-tasharruf* yang menerima pergantian, sebagaimana jika seseorang menikahkan *amat* orang lain atau putrinya, men*thalak* wanita yang dinikahinya, memerdekakan seorang hamba, menyewakan rumah, mewakafkan, memberikan atau membelinya dengan hartanya. Karena ia tidak punya, tidak wali, dan tidak *wakil*; Jika *mushannif* mengatakan *tasharruf* sebagai ganti penjualan, maka mencakup pada bentuk-bentuk yang telah saya sebutkan. (Menurut pendapat terdahulu) *tasharruf* itu, sebagaimana diunggulkan oleh *mushannif*, sebagaimana penjelasan yang lalu (itu di*wakaf*kan). Menurut satu pendapat, *tasharruf* tersebut sah dan barang *wakaf*an itu bisa dimiliki, sebagaimana ar-Rafi'i menukilkan dari al-Imam, sebagaimana penjelasan di muka dalam *ijazah*. (Jika *malik*nya membolehkan) atau *wali*nya (maka *nufudz*, terlaksana) dengan membaca *fathah fa'* yang di titik satu, maksudnya yang telah lalu. (Jika tidak, maka tidak) terlaksana. Dalilnya adalah hadits riwayat al-Bukhari yang berstatus *mursal*, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah dengan *isnad* yang *shahih*: *"Sungguh Urwah al-Bariqi berkata seraya menyerahkan dinar pada Rasulullah ﷺ, agar aku membeli kambing dengannya. Aku akan membeli dua kambing lalu aku akan menjual salah satunya dengan dinar. Lantas aku menemui Nabi ﷺ dengan membawa kambing dan dinar. Aku menuturkan pada beliau mengenai persoalanku. Kemudian beliau berkata: Semoga Allah memberkatimu dalam bungkus tangan kananmu. Sehingga jika ia membeli turab maka ia beruntung."* Abu Dawud dan Ibn Majah meriwayatkan dengan *isnad* yang *shahih*; *Qaul* ini dijelaskan dalam *al-Um*, dan dinukil oleh jamaah dari *qaul jadid* dan beliau berkata dalam tambahan *ar-Raudlah*, sungguh pendapat ini lebih kuat dari *wajah dalil*.

d. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, VIII/262:

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ ضَامِنًا لِمَا أَتْلَفَهُ، وَأَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَزِمَهُ رَدُّهُ، أَوْ رَدُّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيمَتَهُ إِنْ كَانَ قِيمِيًّا.

Orang yang merusakkan harta-harta *baitul mal* tanpa hak, maka ia harus bertanggung-jawab atas barang yang dirusak. Sungguh orang yang mengambil sesuatu tanpa memiliki hak dari *baitul mal*, maka ia wajib mengembalikannya, atau mengembalikan sesamanya jika berbentuk *mitsli*, dan *qimah*nya jika berupa barang *qimah*.

KOMISI B

MUSHAHIH

KH. Ali Mas'adi
KH. Farihin Muhsan

PERUMUS

KH. Athoillah Anwar
Drs. KH. Romadlon Khotib
KH. Murtadlo Abdul Ghoni

MODERATOR

KH. Muhibbul Aman Ali

NOTULEN

K. Anang Darunnaja
Ust. M. Ma'ruf Khozin

431. Galian Tanah Masjid Untuk Urug Jalan

Deskripsi Masalah

Sebuah masjid yang telah berdiri sejak ratusan silam yang lalu membutuhkan perbaikan hingga perlu membangun pondasi baru di tanah masjid. Masalahpun muncul ketika tanah galian pondasi yang begitu banyak tak bisa dimanfaatkan lagi oleh masjid, dan sudah tidak ada lagi tempat untuk menampung tanah tersebut. Akhirnya ta'mir membuat kebijakan untuk menjadikan tanah galian tersebut sebagai penambal jalan (urug).

Pertanyaan

Sampai batas mana *maratib* pemindahan urug, sehingga boleh dialihkan ke sasaran wakaf yang lain?

Jawaban

Menurut mazhab Syafi'i urug tanah tersebut tidak boleh dialihkan untuk jalan, Seharusnya, jika masjid yang bersangkutan tidak membutuhkan maka harus dilakukan tindakan sebagai berikut: Pertama sedapat mungkin dimasukkan dalam bagian masjid yang besangkutan. Kedua disimpan untuk digunakan dalam waktu mendatang. Ketiga dijual dan uang yang dihasilkan dibelikan benda yang sama, atau digunakan untuk kemaslahatan masjid.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Mawahib al-Fadhl min Fatawa Bafadhl li-Syaikh Ali bin Abi Bakar Muhammad Bafadhl,* 137:

مَا قَوْلُ أَهْلِ الْفَضْلِ فِيْمَنْ قَامَ بِتَصْلِيْحِ مَسْجِدٍ مِنْ جَدِيْدٍ أَيْ تَجْدِيْدِهِ، وَقَدْ بَقِيَ بَعْدَ الْعِمَارَةِ أَطْيَانٌ مِنْ جِدَارَاتِهِ الدُّوَيْلَةِ. فَهَلْ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْهَا أَوِ الْعَمَلُ بِهَا فِيْ أَعْمَالٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا؟ أَفْتُوْنَا وَلَكُمُ الْأَجْرُ. (الْجَوَابُ) الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْهَادِيْ لِلصَّوَابِ: سُئِلَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا السُّؤَالِ أَوْ قَرِيْبٍ مِنْهُ، وَصُوْرَتُهُ: وَسُئِلَ بَلْ وَكَثُرَ السُّؤَالُ عَلَيْهِ مِنْ عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ، عَمَّا يَبْقَى بَعْدَ عِمَارَتِهِنَّ مِنْ فُتَاتِ الطِّيْنِ وَالْأَعْوَادِ وَالنُّوْرَةِ الْقَدِيْمَةِ إِذَا عُمِّرَتْ بِآلَاتٍ جُدُدٍ وَمَا بَقِيَ مِمَّا ذُكِرَ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَعْمُوْرُ أَصْلًا، وَمِثْلُهُ الْمُتَنَاثِرَةُ مِنْ طِيْنِهِنَّ الْقَدِيْمَةِ حَالَ الْعِمَارَةِ، مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْ عِمَارَتِهِنَّ أَيْضًا، فَمَا الَّذِيْ يَفْعَلُ بِذَلِكَ؟ هَلْ يَجُوْزُ بَيْعُهُ، وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِيْ عِمَارَتِهِنَّ وَمَصَالِحِهِنَّ، أَوْ لَا يُبَاعُ بَلْ

يُحْفَظُ لَهُنَّ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا يُبَاعُ بَلْ يُحْفَظُ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ضَيَاعٍ أَوْ فَوَاتٍ، فَهَلْ يُقَالُ بِجَوَازِ الْبَيْعِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ مِمَّا ذُكِرَ وَلَا صَرْفُهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ أَوْ غَيْرِ مُحْتَاجٍ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَصَالِحِ وَلَوْ عَامَّةً مَا دَامَ الْمَسْجِدُ الَّذِي هِيَ مِنْهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا. أَمَّا إِذَا قُطِعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ الَّتِي هِيَ مِنْهُ إِلَيْهَا قَبْلَ فَنَائِهَا وَخَرَابِهِ فَيَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ بِهَا وَالْأَقْرَبُ أَوْلَى. وَأَمَّا بَيْعُهَا فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ، هَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي فَتَاوِيهِ. وَظَاهِرُ عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ وَإِنْ خِيفَ تَلَفُهُ أَوْ فَوَاتُهُ، وَهُوَ مُشْكِلٌ. فَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِجَوَازِ بَيْعِ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَأَخْشَابِهِ إِذَا انْكَسَرَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلَّا لِلْإِحْرَاقِ. نَعَمْ، ذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَخْرَمَةَ فِي فَتَاوِيهِ، أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَبِعْ ضَاعَ وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهُ أَوْ أَنَّهُ تَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَيْدِي الظَّلَمَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. جَازَ بَلْ وَجَبَ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ بِثَمَنِهِ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ يُمْكِنُ حِفْظُهُ وَيُؤْمَنُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا أُخِذَ بِهِ جُزْءُ عَقَارٍ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ حِفْظُهُ بِمَسْجِدٍ. اهـ وَيُؤْخَذُ جَوَابُ السَّائِلِ، أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ حِفْظُ الْأَطْيَانِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ إِلَى وَقْتِ حَاجَةِ الْمَسْجِدِ الَّتِي هِيَ مِنْهُ لَهَا، فَيَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا صَرْفُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ. أَمَّا إِذَا قُطِعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ الَّتِي هِيَ مِنْهُ إِلَيْهَا فَيَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ، وَالْقَرِيبُ أَوْلَى وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِحَالٍ. وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَخْرَمَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تُبَعْ ضَاعَتْ أَوْ أَنَّهَا تَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا مَثَلًا أَيْدِي الظَّلَمَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، جَازَ بَلْ وَجَبَ بَيْعُهَا وَيُؤْخَذُ بِثَمَنِهَا مِثْلُهَا، إِنْ كَانَ يُمْكِنُ حِفْظُهُ وَيُؤْمَنُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا أُخِذَ بِهِ جُزْءُ عَقَارٍ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ حِفْظُهُ لِلْمَسْجِدِ إِلَى وَقْتِ حَاجَتِهِ.

Ungkapan *ahli al-Fadl* mengenai orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki masjid yang baru; maksudnya memperbaruinya, sementara setelah *imarah* masih tersisa tanah-tanah dari temboknya yang kecil. Apakah boleh men*tasharuf*kannya atau menggunakannya untuk selain masjid atau tidak? Kita berfatwa-*semoga kalian memperoleh pahala*- (Jawab) Alhamdulillah, yang menunjukkan pada kebenaran: *Syaikhuna al-Allamah*

Abu Bakar bin Ahmad al-Khatib ﷺ ditanya tentang pertanyaan seperti ini atau mirip dengannya. Gambarannya: Beliau ditanya, bahkan banyak pertanyaan yang diajukan pada beliau mengenai petugas takmir masjid, terkait persoalan bekas-bekas tanah, sisa-sisa kayu dan material yang masih utuh setelah merenovasi masjid, apabila menggunakan alat-alat modern, sementara masjid sama sekali tidak butuh terhadap sisa-sisa bahan tersebut. Begitu pula serpihan tanah bekas ketika *imarah*, dari bahan-bahan yang tidak dibutuhkan dalam *imarah*. Apakah yang harus dikerjakan dengan hal itu? Apa boleh menjualnya, dan mengalokasikan hasilnya untuk *imarah* dan *maslahat-maslahat*nya, atau tidak boleh dijual bahkan harus dirawat? Jika kalian berkata tidak boleh dijual bahkan harus dirawat, jika dikhawatirkan akan tersia-sia atau lenyap, apakah dikatakan boleh menjual sementara kondisinya seperti demikian itu?

Aku menjawab dengan ungkapan beliau: *"Tidak boleh menjual bahan-bahan itu dan tidak perlu menyerahkannya ke masjid lain yang membutuhkan atau yang tidak butuh untuk imarah, dan tidak digunakan untuk maslahat-maslahat meskipun umum, selama masjid tersebut masih membutuhkannya meskipun di masa mendatang, maka nazhir wajib merawatnya. Sedangkan bila dipastikan bahwa masjid tersebut tidak membutuhkannya lagi sebelum bahan-bahan itu rusak dan hancur, maka boleh merenovasi masjid lain menggunakan bahan material bekas ini, dan yang lebih mendekati benar itu lebih utama. Sedangkan apabila menjualnya maka tidak boleh seketika itu. Ini menurut penjelasan as-Syaikh Ibn Hajar ﷺ dalam Fatawinya"*. Kejelasan tidak boleh menjual dan jika dikhawatirkan rusak atau lenyap itu *musykil*. Sungguh *asy-Syaikhani* menjelaskan boleh menjual tikar masjid dan kayu-kayunya bila pecah-pecah dan tidak layak kecuali untuk di bakar. Ya, as-Syaikh Abdullah bin Umar Makhramah menyebutkan dalam Fatawinya, bila *takmir* masjid mengetahui atau menduga kuat, bahwa apabila ia tidak menjualnya maka bahan-bahan tersebut akan tersia-sia dan tidak mudah merawatnya, atau bahkan menjadi jalan bagi tangan-tangan jahil untuk mengambilnya dan sebagainya. Maka boleh, bahkan wajib menjualnya dan diambil *tsaman mitsl*nya jika mungkin menjaga dan kondisi aman.

Jika tidak, maka diambil bagian pekarangan dan sesamanya dari bahan-bahan yang bisa diamankan dan juga mungkin dijaga untuk keperluan masjid. Dapat diambil kesimpulan, jika mungkin merawat tanah-tanah tersebut dalam pertanyaan sampai waktu masjid membutuhkannya, maka *nadzir* wajib menjaganya, tidak boleh menjual dan menyerahkan ke masjid lain untuk *imarah*. Sedangkan apabila dipastikan bahwa masjid tidak membutuhkannya lagi, maka boleh untuk *imarah* masjid lain. Lebih tepatnya lebih utama dan tidak boleh menjualnya seketika. *As-Syaikh al-Allamah* Abdullah bin Umar Makhramah ﷺ berkata: *"Sungguh*

apabila bahan-bahan tersebut tidak dijual maka akan tersia-sia atau sungguh akan menjadi jalan, misalkan bagi tangan-tangan jahil dan sebagainya. Maka boleh, bahkan wajib menjual dan diambil hasilnya, jika mungkin merawatnya dan kondisi aman. Jika tidak, maka diambil bagian pekarangan dan sesamanya dari bahan-bahan yang dirasa aman, dan mungkin dirawat sampai batas waktu masjid membutuhkannya."

b. *'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti li Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal,* II/235-236:

لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَةِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ. أَقُولُ: هَذَا حَيْثُ تَوَقَّعَ النَّاظِرُ احْتِيَاجَ الْمَسْجِدِ إِلَيْهَا وَأَمِنَ مِنْ ضَيَاعِهَا وَإِلَّا فَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَصَرْفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ

Tidak boleh menyerahkan alat-alat yang dibutuhkan oleh masjid untuk *imarah* masjid lain, dan tidak boleh menjualnya, bahkan *nazhir* wajib menjaganya untuk keperluan sarana masjid. Saya berkata: *"Hal ini sekira nazhir mengharap masjid membutuhkannya dan aman dari tersia-sia. Jika tidak, maka boleh menjual dan menyerahkannnya untuk mashalih masjid". Wa Allahu a'lam.*

c. *'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti,* II/257:

قَالَ فِي التُّحْفَةِ: وَالَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ فِي رَيْعِ وَقْفِ الْمُنْهَدِمِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي نَقْضِهِ أَنَّهُ إِنْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ حَفِظَ لَهُ وَإِلَّا صَرَفَ لِمَسْجِدٍ آخَرَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ صَرَفَ لِلْفُقَرَاءِ كَمَا يُصْرَفُ النَّقْضُ لِنَحْوِ رِبَاطٍ، أَمَّا غَيْرُ الْمُنْهَدِمِ فَمَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مَصَالِحِهِ يَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا وَيُوقَفُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَتِهِ يَجِبُ ادِّخَارُهُ لِأَجْلِهَا أَيْ إِنْ تَوَقَّعَتْ عَنْ قُرْبٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ السُّبْكِيُّ، وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ تَتَوَقَّعَ قَبْلَ عُرُوضِ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ، وَإِلَّا لَمْ يُدَّخَرْ مِنْهَا شَيْءٌ لِأَجْلِهَا، لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلضَّيَاعِ أَوْ لِظَالِمٍ يَأْخُذُهُ، أَيْ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَقَارًا.

Penulis berkata dalam *at-Tuhfah*: *"Wajah yang diunggulkan terkait keuntungan wakaf yang roboh dalam merusaknya karena mengadopsi penjelasan di muka, sungguh jika bisa diharapkan kembali maka harus dijaga. Sementara jika tidak maka dialokasikan pada masjid lain. Jika sulit, maka dialokasikan pada fuqara' seperti bahan-bahan yang rusak dialokasikan pada pondok misalnya. Sedang benda-benda bekas dari hasil mauquf yang masih utuh, agar bermanfaat*

maka dibelikan pekarangan dan diwakafkan padanya. Berbeda dengan barang wakaf yang wajib disimpan untuk imarahnya, maksudnya jika bisa diharapkan dalam jangka pendek, sebagaimana isyarat as-Subki. Batasannya jelas, apabila masih bisa diharapkan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jika tidak, maka bahan-bahan tersebut tidak perlu disimpan. Karena akan membuat sia-sia atau diambil oleh orang zhalim. Maksudnya jika terjadi seperti demikian, maka menjadi tertentu harus dibelikan pekarangan."

d. *Al-Fatawa an-Nafi'ah fi Masa`il al-Ahwal al-Waqi'ah li Abi Bakr bin Ahmad bin Abdullah al-Khathib,* 110:

وَسُئِلَ بَلْ كَثُرَ السُّؤَالُ مِنْ عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ عَمَّا يَبْقَى بَعْدَ عِمَارَتِهِنَّ مِنْ فُتَاتِ الطِّيْنِ وَالْأَعْوَادِ وَالنُّوْرَةِ الْقَدِيْمَاتِ إِذَا عُمِّرَتْ بِآلَاتٍ جُدُدٍ وَمَا بَقِيَ مِمَّا ذُكِرَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَعْمُوْرُ أَصْلًا وَمِثْلُهُ الْمُتَنَاثِرُ مِنْ طِيْنِهِنَّ الْقَدِيْمَةِ حَالَ الْعِمَارَةِ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ فِيْ عِمَارَتِهِنَّ أَيْضًا مَا الَّذِيْ يَفْعَلُ بِذَلِكَ هَلْ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِيْ عِمَارَتِهِنَّ وَمَصَالِحِنَّ أَوْ لَا يُبَاعُ بَلْ يُحْفَظُ لَهُنَّ ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوْزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ وَلَا صَرْفُهُ فِيْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ أَوْ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ وَلَا فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْمَصَالِحِ وَلَوْ عَامَّةً مَا دَامَ الْمَسْجِدُ الَّذِيْ هِيَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ...

Syaikhuna al-Allamah Abu Bakar bin Ahmad al-Khatib ﷺ ditanya, bahkan banyak pertanyaan yang diajukan pada beliau mengenai petugas *takmir* masjid, terkait persoalan bekas-bekas tanah, sisa-sisa kayu dan material yang masih utuh setelah merenovasi masjid, apabila menggunakan alat-alat modern, sementara masjid sama sekali tidak butuh terhadap sisa-sisa bahan tersebut. Begitu pula serpihan tanah bekas ketika imarah, dari bahan-bahan yang tidak dibutuhkan dalam *imarah*. Apakah yang harus dikerjakan terkait hal itu? Apakah boleh menjual, dan mengalokasikan hasilnya untuk *imarah* dan *maslahat-maslahat*nya, atau tidak boleh dijual bahkan harus dirawat? Aku menjawab dengan ungkapan beliau: *"Tidak boleh menjual bahan-bahan tersebut dan tidak perlu menyerahkannya ke masjid lain yang membutuhkan atau tidak butuh untuk imarah, dan tidak digunakan untuk maslahat-maslahat meskipun umum, selama masjid tersebut masih membutuhkannya..."*

e. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra,* VII/189:

(وَسُئِلَ) عَمَّا إِذَا جُدِّدَ مَسْجِدًا بِآلَاتٍ جُدُدٍ، فَهَلْ يَجُوْزُ صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنَ الْآلَاتِ الْقَدِيْمَةِ فِيْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيْمٍ مُحْتَاجٍ لِلْعِمَارَةِ أَوْ لَا، وَحِيْنَئِذٍ فَهَلْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ تُحْفَظُ هِيَ لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ آجِلًا وَلَوْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا

مُعَيَّنًا وَجَمَعَ لِذَلِكَ آلَاتٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْقَصْدِ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ يَصْرِفَ مَا نَذَرَهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا بَيْعُهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إِنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فَرَاشِهِ فِي غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

Beliau ditanya terkait kasus apabila pengurus masjid merenovasi masjid dengan alat-alat baru, apakah boleh menyerahkan alat-alat bekas untuk merenovasi masjid lain yang memerlukannya atau tidak boleh. Dengan begitu, apa alat-alatnya perlu dijual dan hasil penjualannya disimpan, atau alat-alat tersebut dirawat untuk keperluan masjid mendatang. Bila berniat atau ber*nadzar* meramaikan masjid tertentu dan mengumpulkan alat-alat untuk keperluan tersebut, akan tetapi tidak mudah baginya. Apakah ia boleh meramaikan masjid lain atau tidak, apakah dibedakan diantara *nadzar* dan tujuan atau tidak. Apabila seseorang ber*nadzar* membangun masjid di tempat tertentu, apakah ia boleh membangun masjid di tempat lain, atau mengoper *nadzar*nya untuk *imarah* masjid lain atau tidak. Apakah boleh menggunakan tikar masjid dan karpetnya untuk hajatan, seperti *walimah al-'urs* dan seperti menggelar sesuatu seperti kitab-kitab di bawah terik matahari jika sangat dibutuhkan atau tidak? Aku menjawab dengan ungkapan beliau: "*Tidak boleh menyerahkan alat-alat tersebut yang dibutuhkan masjid untuk digunakan sebagai alat imarah masjid lain, tidak menjualnya bahkan wajib bagi nadzir agar merawatnya untuk keperluan masjid tersebut. Apabila seseorang bernadzar meramaikan masjid tertentu atau di tempat tertentu, maka ia tidak diperkenankan meramaikan masjid lain sebagai gantinya, ini apabila ia mengucapkan nadzar. Apabila bertujuan demikian, maka ia tidak diwajibkan mengerjakannya sebatas tujuan*

tersebut. Tidak boleh menggunakan tikar dan karpet masjid selain tikar-tikarnya secara mutlak, meskipun karena kebutuhan atau tidak. Menggunakannya untuk sarana pernikahan merupakan bentuk kemungkaran yang buruk, yang harus diingkari oleh setiap orang". Ulama sangat berat pengingkaran kepada orang yang menggunakannya untuk sarana pernikahan dan pesta. Ulama berkata: *"Haram memakai tikar masjid meskipun untuk keperluan masjid lain." Wa Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam.*

f. *Kanz ar-Raghibin* dan *Hasyiyatan Qulyubi wa 'Umairah*, X/40:

(وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ، إِذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعِهِ إِذَا انْكَسَرَتْ، وَلَمْ تَصْلُحْ إِلَّا لِلْإِحْرَاقِ) لِئَلَّا تَضِيعَ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، وَالثَّانِي لَا تُبَاعُ بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا أَبَدًا وَحُصُرُهُ الَّتِي اشْتُرِيَتْ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَلَمْ تُوقَفْ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ جَزْمًا (وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ) لِإِمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيهِ فِي الْحَالِ.

قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَجُذُوعِهِ إلخ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. قَوْلُهُ: (وَجُذُوعِهِ) وَكَذَا جُذُوعُ عَقَارَاتِهِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ وَأَبْنِيَتِهَا، وَمِثْلُ انْكِسَارِهَا مَا لَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْكِسَارِ أَوْ الْهَدْمِ، أَوْ كَانَتْ فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ وَلَمْ يَزِدْ رِيعُهَا عَلَى الْأُجْرَةِ فَإِنَّ لَهُ قَلْعَهَا. قَوْلُهُ: (وَلَمْ تَصْلُحْ) أَيْ الْحُصُرُ وَالْجُذُوعُ إِلَّا لِلْإِحْرَاقِ دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، مَا لَوْ صَلَحَتْ لِخَلْطِ طِينٍ، وَلَوْ بِنَشْرِهَا أَوْ لِجَعْلِهَا فِي بِنَاءٍ بَدَلَ الْآجُرِّ، أَوْ السَّقْفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تُبَاعُ كَمَا مَرَّ وَمِثْلُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَجُذُوعِهِ غَيْرُهَا مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا عُلِمَ. قَوْلُهُ: (وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ) أَيْ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيرٍ أَوْ جِذْعٍ بِهِ، كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ. قَوْلُهُ: (اشْتُرِيَتْ لَهُ) أَيْ مِنْ رِيعِهِ بِمُبَاشَرَةِ نَاظِرٍ.

Menurut pendapat *Ashah* boleh menjual tikar masjid *mauquf*, apabila basah dan sulit diperbaiki ketika rusak, dan tidak layak kecuali untuk dibakar) agar supaya tidak tersia-sia, dan *tsaman*nya diserahkan untuk *mashalih* masjid. Pendapat kedua, tidak dijual akan tetapi ditinggalkan seperti kondisinya selamanya, tikar masjid yang dibeli atau diberikan untuk masjid dan tidak diwakafkan boleh dijual ketika hajat secara pasti (bila masjid roboh dan sulit mengembalikan maka tidak dijual seketika) karena mungkin *shalat* di dalamnya seketika itu.

Ungkapan al-Mahalli: (*menurut Ashah boleh menjual tikar masjid dan kayu-kayunya...*) menurut *mu'tamad.* Ungkapan penulis (*dan kayu-kayunya*), begitu juga kayu pekarangannya yang diwakafkan dan bangunannya, semisal tikar yang sobek-sobek ialah jika mendekati sobek atau roboh, atau berada di tanah persewaan, dan *rai'* (hasil)nya tidak menambah *'ujrah*, maka sungguh boleh dicabut. Ungkapan al-Mahalli: (*tidak layak*), maksudnya tikar dan kayu-kayunya kecuali untuk dibakar. Masuk dalam *mutstatsna minhu*, sesuatu jika layak dicampur pada tanah, meskipun digelar atau dijadikan untuk bangunan sebagai ganti bata atau genteng dan sebagainya, maka tidak dijual sebagaimana penjelasan di muka. seperti tikar dan kayu masjid ialah barang-barang wakaf lain menurut *mu'tamad* sebagaimana diketahui. Ungkapan penulis (*tsamannya diserahkan untuk mashalih masjid*), maksudnya jika tidak mungkin menjual tikar atau kayu, sebagaimana penjelasan dalam *syarah syaikhuna* ar-Ramli. Ungkapan penulis (*yang dibeli untuk masjid*) maksudnya dari *rai'*nya dengan dikerjakan oleh *nadzir.*

432. Tasaruf Kekayaan Masjid yang Berkecukupan

Deskripsi Masalah

Sebuah masjid memiliki tanah wakaf dengan penghasilan cukup besar, sehingga dalam jangka beberapa tahun kemudian, masjid tersebut dari segi fisik, sarana dan prsarananya telah memadai. Saat ini kekayaan masjid nyaris hanya untuk pembiayaan operasinal masjid dan perawatan peralatan masjid yang tentu terbilang sedikit bila dibanding asset kekayaan yang dimiliki. Akhir-akhir ini muncul ide dari sebagian jamaah, bagaimana jika aset yang berlebih itu ditasarufkan untuk semisal konsumsi rapat takmir dan remas, konsumsi *roan* kebersihan masjid, biaya PHBI, sampai konsumsi panitia korban.

Ide terbaru muncul, yaitu kelebihan aset itu untuk membantu kesejahteraan para guru swasta di madrasah berbasis Islam yang secara historis terdapat hubungan dengan keberadaan masjid. Ide ini lahir atas pertimbangan, bahwa masjid di samping merupakan tempat salat dan *i'tikaf* sebagai fungsi utamanya, adalah juga sebagai sentral komando kemajuan dan kekuatan Islam dan umat Islam.

Pertanyaan

Apa dibenarkan, jika kelebihan asset kekayaan masjid di*tasaruf*kan untuk hal-hal sebagaimana dijelaskan pada deskripsi di atas? Dan langkah pengelolaan strategis macam apa yang harus dilakukan *nazhir* wakaf, sekiranya aset kekayaan masjid yang besar itu dapat berdaya-guna untuk kemakmuran masjid yang di sisi lain merupakan sentral komando

kemajuan dan kekuatan Islam dan kaum muslimin di sekitarnya?

Jawaban

Apabila kekayaan masjid itu benar-benar tidak dibutuhkan oleh masjid yang bersangkutan untuk kepentingan yang dianggap mendesak, maka boleh digunakan untuk keperluan konsumsi rapat takmir atau rapat Remas yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan masjid atau pembangunan masjid, juga boleh dipergunakan untuk kegiatan PHBI yang dilaksanakan di masjid yang bersangkutan dengan mempertimbangkan batas kewajaran. Adapun untuk panitia Qurban, atau pengajar madrasah, maka tidak diperbolehkan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fath al-Ilah al-Manan Fatawa asy-Syaikh Salim bin Sa'id Bakir Baghitsan asy-Syafi'i*, 150:

سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ أَمْوَالًا كَثِيْرَةً عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ وَهُوَ الْآنَ مَعْمُوْرٌ وَفِيْ خِزَانَةِ الْمَسْجِدِ مِنْ هٰذَا الْوَقْفِ الشَّيْءُ الْكَثِيْرُ فَهَلْ يَجُوْزُ إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْوَقْفِ لِإِقَامَةِ وَلِيْمَةٍ مَثَلًا يَوْمَ الزِّيْنَةِ تَرْغِيْبًا لِلْمُصَلِّيْنَ الْمُوَاظِبِيْنَ؟ فَأَجَابَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ الْمَوْقُوْفُ عَلَى مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِيْ مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ يَجُوْزُ الصَّرْفُ فِيْهِ فِي الْبِنَاءِ وَالتَّجْصِيْصِ الْمُحْكَمِ وَفِيْ أُجْرَةِ الْقَيِّمِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْإِمَامِ وَالْحُصْرِ وَالدُّهْنِ وَكَذَا فِيْمَا يَرْغَبُ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ نَحْوِ قَهْوَةٍ وَبُخُوْرٍ يُقَدَّمُ مِنْ ذٰلِكَ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ وَعَلَيْهِ فَيَجُوْزُ الصَّرْفُ فِيْ مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ لِمَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ إِذَا فَضَلَ عَنْ عِمَارَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ.

Beliau ditanya tentang persoalan seorang laki-laki yang mewakafkan banyak harta untuk kemaslahatan masjid fulan yang sedang proses *imarah*, dan ia banyak mewakafkan harta dalam bentuk lemari. Apakah diperbolehkan mengeluarkan sesuatu dari wakaf ini untuk pelaksanaan *walimah*, misalkan pada hari *fashion* agar menyenangkan pada *mushallin* yang intensif? Aku menjawab: "*Alhamdulillah, Allah yang menolong pada kebenaran.*" Barang wakafan untuk maslahat masjid sebagaimana dalam deskripsi masalah, boleh dialokasikan untuk membangun, merenovasi, upah pengurus, guru, imam, tikar, dan minyak. Begitu juga perkara yang disukai *mushalli* seperti kopi dan rokok. Didahulukan yang lebih penting kemudian agak penting. Boleh mengarahkan dalam deskripsi masalah karena pertanyaan yang diajukan *sa'il* apabila lebih dari *imarah*nya dan tidak terdapat hal-hal yang lebih penting daripada *mashalih*.

b. *Rawa'i' al-Bayan*, I/573:

ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ هُوَ بِنَاؤُهَا وَتَشْيِيدُهَا وَتَرْمِيمُ مَا تَهَدَّمَ مِنْهَا وَهَذِهِ هِيَ الْعِمَارَةُ الْحِسِّيَّةُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِعِمَارَتِهَا الصَّلَاةُ وَالْعِبَادَةُ وَأَنْوَاعُ الْقُرُبَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَهَذِهِ هِيَ الْعِمَارَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِي هِيَ الْغَرَضُ الْأَسْمَى مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ النَّوْعَيْنِ الْحِسِّيَّةَ وَالْمَعْنَوِيَّةَ وَهُوَ اخْتِيَارُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَالْمَقَامُ يَقْتَضِيهِ.

Sebagian ulama berpendapat, sungguh yang dimaksud dengan *imarah* masjid ialah membangun, mengokohkan, dan merenovasi bangunan yang roboh. Ini adalah *imarah* secara fisik, sebagaimana ditunjukkan sebuah hadits: "*Barangsiapa membangun masjid karena Allah, meskipun seumpama sejenis burung belibis, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga*". Sebagian ulama berkata: "*Yang dimaksud dengan imarah adalah shalat, ibadah dan macam-macam ibadah*"; sebagaimana Allah ﷻ berfirman: "*Di rumah-rumah yang Allah mengizinkan ditinggikan dan disebut di dalamnya nama-Nya*". Ini adalah *imarah* non fisik dimana tujuan yang dimaksud ialah nama dari bangunan masjid. Tidak ada pencegah yang dimaksud dengan ayat itu ada dua macam, yaitu fisik dan non fisik. Ini merupakan pilihan *jumhur ulama*, karena sungguh lafal itu menunjukkan padanya dan *maqam* menuntutnya.

433. Nikah *Misyar*

Deskripsi Masalah

Nikah *Misyar* memang masih terasa asing di lingkungan kita, baik secara *terminology* maupun prakteknya. Namun di kawasan Timur Tengah khususnya Negara Teluk, nikah *Misyar* ini sudah banyak dilakukan. *Misyar* artinya adalah "*lewat dan tidak berlama-lama dalam bermukim*", yang diambil dari kalimat "*Saara-Yasiiru-Sairan*". Seperti makna *lughawi* inilah praktek nikah *Misyar*, yang sekedar tinggal beberapa saat di rumah istri yang dijadikan nikah *Misyar*.

Dr. Yusuf al-Qardlawi, ulama kontemporer yang mempelopori diperbolehkannya nikah *Misyar* memberi ulasan mengenai praktek nikah tersebut, yaitu seorang laki-laki datang ke rumah wanita yang tidak tinggal bersama di rumah laki-laki tersebut, kemudian pulang kembali.

Tujuan nikah semacam ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban istri untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dengan istri yang pertama. Oleh sebab itu, umumnya nikah *misyar* ini dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai istri yang lebih dulu tinggal bersamanya (Qardlawi dalam *Fatawi Mu'ashirah*, III/289).

Para ulama yang lain banyak yang menentang fatwa al-Qardlawi ini dan menilai hukum nikah *Misyar* ini dilarang karena *mafsadah* dan hilangnya *maaqashid an-nikaah*, terlebih dalam perkembangannya nikah *Misyar* ini dilakukan oleh wanita karir yang kaya dan hanya membutuhkan hubungan biologis dalam waktu tertentu. Disaat butuh dia memanggil suaminya, namun ketika sudah terpenuhi maka suami tersebut pulang kembali ke rumahnya.

Pertanyaan

Bagaimanakah pandangan hukum Islam menyangkut pernikahan *Misyar* ini? Sudah tepatkah dilarangnya pernikahan *Misyar* ini karena mengabaikan kewajiban nafkah dan memberi tempat tinggal dari suami? Dan dapatkah dibenarkan fatwa yang memperblehkan Nikah *Misyar* dengan mengabaikan *maaqashid an-nikaah*?

Jawaban

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Diantara Hikmah Pernikahan:

1. Pernikahan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat dan menambah iman. Rasulullah ﷺ bersabda:

   يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

   "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu memenuhi biaya, maka menikahlah; karena sungguh hal itu dapat menjaga pada pandangan, dan menjaga kemaluan." HR. al-Bukhari.

   إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

   "Ketika seorang hamba menikah, maka ia menyempurnakan setengah agamanya; maka bertakwalah kepada Allah dalam setengah yang lain."

HR. al-Baihaqi.

2. Menjaga dan melanjutkan keturunan. Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. (الفرقان: ٧٤).

"Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".
(QS. al-Furqan: 74)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً. (الرعد: ٣٨)

"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".
(QS. Ar-Ra'du: 38)

Rasulullah ﷺ bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

"Menikahlah kalian, karena sungguh aku berlomba-lomba pada umat lain pada hari kiamat, dan janganlah kalian seperti rahib-rahib Nashara."
HR. al-Baihaqi.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

"Apabila anak Adam meninggal, maka putuslah segala sesuatu kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya."
HR. Muslim, Abu dawud dan an-Nasa'i.

3. Melaksanakan tuntunan agama. Allah ﷻ berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. النور: ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum bersuami atau beristri) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan".
(QS. An-Nur: 32).

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

"Nikah itu sunahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunahku maka tidak termasuk bagian dariku." HR. Ibn Majah.

مَنْ نَكَحَ لِلّٰهِ وَأَنْكَحَ لِلّٰهِ اسْتَحَقَّ وِلَايَةَ اللّٰهِ رَوَاهُ أَحمد

"Barangsiapa menikah karena Allah maka ia berhak memperoleh wilayah Allah." HR. Ahmad.

4. Menumbuhkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga. Allah ﷻ berfirman:

   وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. النور: ٣٢

   "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. An-Nur: 32)

   Rasulullah ﷺ bersabda:

   اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِي

   "Raihlah rizki dengan pernikahan." HR. ad-Dailami.

Disamping itu pernikahan adalah sebagai media pendidikan: Islam begitu teliti dalam menciptakan lingkungan yang sehat dalam membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa hubungan ibu bapak akan memudahkan anak terjerumus dalam kegiatan yang tidak bermoral. Oleh itu, institusi kekeluargaan yang disyariatkan dalam Islam sebagai media yang sangat tepat sebagai petunjuk dan pedoman kepada anak-anak.

Hukum Pernikahan:

Secara umum hukum pernikahan terbagi sebagai berikut:

1. *Sunnah*, bagi orang yang ingin menikah dan mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang harus dipenuhi.
2. *Wajib*, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
3. *Makruh*, bagi orang yang tidak ingin menikah sebab lemah syahwat atau lainya serta tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya.
4. *Haram*, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.

5. *Mubah*, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Rukun dan Syarat Perkawinan:

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Saksi.
5. *Shighat* nikah/ijab qabul.

Masing-masing rukun nikah harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.

Keabsahan akad nikah sangat tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, secara normatif hukumnya adalah sah dan dengannya hubungan seksual antara suami istri bukan tergolong zina, sebaliknya pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, hukum nikahnya batal dan hubungan seksual yang dilakukan keduanga tergolong zina.

Hukum keabsahan nikah berbeda dengan hukum menjalankan pernikahan dalam kaitan boleh/mubah dan haramnya. Artinya, akad nikah yang telah dianggap sah secara normatif karena telah memenuhi segala syarat dan rukunnya, bisa jadi haram dilaksanakan jika memenuhi unsur yang menyebabkan haramnya pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Nikah Misyar:

Misyar adalah *shighat mubalaghah* (deskripsi *hiperbolis*) untuk menggambarkan laki-laki yang sering bepergian. Barangkali perkawinan ini disebut demikian karena suami tidak tinggal menetap di tempat istrinya, akan tetapi ia selalu berpindah-pindah sering bepergian dan hanya mengunjunginya sewaktu-waktu.

Nikah *misyar* adalah model pernikahan baru yang secara istilah tidak ditemukan dalam kitab-kitab *fiqh turats*. Konon istilah ini dimunculkan oleh DR. Yusuf Qardhawi ketika menjawab pertanyaan berkaitan dengan fenomena sosial di masyarakat timur tengah, yaitu pernikahan antara lak-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi selanjutnya suami hanya sebagai pemuas nafsu seksual istri atau sebaliknya tanpa ada ikatan tanggungjawab nafkah dan lainnya dengan kesadaran dari pihak istri dan suami.

Dengan demikian istilah nikah *misyar* adalah untuk merespon gejala sosial yang berkembang di Negara Timur Tengah dan sebagian negara mayoritas muslim, bukan istilah baku sebagaimana yang lazim

dalam hukum fiqh. Oleh karenanya istilah ini tidak memliki gambaran yang baku mengenai praktek sesungguhnya bahkan bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Faktor terpenting yang mendorong kemunculan dan penyebaran fenomena perkawinan seperti ini di beberapa negara adalah adanya sejumlah wanita yang mencapai usia kawin yang telah cukup namun belum kawin (perawan tua), atau mereka menikah namun kemudian menjanda muda entah karena ditinggal mati suaminya atau dicerai ditambah lagi dengan naluri seksual dan kebutuhan perempuan pada lelaki.

Sementara dari pihak laki-laki, mereka terdorong untuk melakukan perkawinan model ini karena hasrat menggebu-gebu untuk melakukan hubungan seksual dan tidak merasa cukup dengan satu istri saja namun kemampuan finansial mereka tidak mencukupi untuk melangsungkan perkawinan normal dengan segala konsekuensinya, seperti memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal, dan sejenisnya. Dalam kasus lain, laki-laki terdorong melakukan perkawinan model ini karena istri pertama menolak jika ia menikah lagi. Atau didorong oleh ambisi untuk menguasai kekayaan si wanita jika ia kaya sambil memanfaatkan ketidakinginan si wanita untuk berpisah dengannya sehingga wanita tersebut bersedia mengucurkan hartanya dan masih banyak lagi faktor yang mendorong orang lain untuk melakukan perkawinan model ini .

Hukum Nikah Misyar

Dengan tidak adanya gambaran yang baku mengenai praktek nikah *misyar* sebab keberagaman praktek nikah *misyar* sesuai dengan kondisi sosial mayarakatnya, maka para *musyawirin* kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku secara general.

Akan tetapi, dengan penjelasan mengenai hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah dan hukum malaksanakan pernikhan di atas, dapat disimpulkan, bahwa jika praktek pernikahan *misyar* dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, maka secara normatif pernikahannya dihukumi sah. Namun demikian, apabila maksud dan dorongan pernikahan itu memenuhi unsur yang menyebabkan haramnya pernikahan, misalnya pernikahan tersebut dimaksudkan hanya untuk melampiaskan seksual dan diyakini tidak akan mampu menjalankan kewjiban dan hak yang harus dipenuhi, maka hukumnya menjadi haram.

Pernikahan yang hanya dijadikan sebagai cara untuk menghalalkan hubungan seksual tanpa memperhatikan hikmah nikah/*maqasidun nikah* sebagaimana di atas, bukan tergolong pernikahan ideal yang dianjurkan dalam agama Islam dan yang dimaksudkan dalam pemberlakuan hukum nikah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al Quran dan hadits

Rasulullah ﷺ di atas.

Sudah barang tentu, pernikahan yang mengabaikan *maqasidun nikah*/hikmah nikah seperti di atas, tidak akan mampu mendatangkan keberkahan dan ketenangan. Lebih-lebih budaya timur yang di anut oleh mayarakat Indonesia sangat menekankan pada etika dan norma agama. Pernikahan dalam budaya timur, bukan hanya jalinan hubungan anatara suami dan istri, lebih dari itu, pernikahan adalah jalinan dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri yang tentu menyangkut harkat dan martabat keluarga suami dan istri.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, IV/81:

قَوْلُهُ: (وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَحْكَامٍ: الِاسْتِحْبَابُ لِلتَّائِقِ الْوَاجِدِ وَلَيْسَ فِي دَارِ أَوْلَى إنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَلَمْ يَتَخَلَّ لِلْعِبَادَةِ. وَزَادَ الرَّمْلِيُّ الْوُجُوبَ إنْ خَافَ الْعَنَتَ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا وَوَجَدَ الْحَرْبَ، وَالْكَرَاهَةُ لِغَيْرِ الْمُحْتَاجِ الْفَاقِدِ لِلْأُهْبَةِ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ وَكَوْنُهُ خِلَافَ الْأَوْلَى إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ، وَفَقَدَ الْأُهْبَةَ وَكَوْنُهُ الْأُهْبَةَ وَالْإِبَاحَةَ، كَمَا إذَا أُرِيدَ مُجَرَّدُ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، وَلِذَا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَأَمَّا حُرْمَتُهُ فَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَيَحْرُمُ لِمَنْ عَلِمَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَدَمَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَلَمْ تَحْتَجْ إلَيْهِ. قَوْلُهُ: (مُسْتَحَبٌّ إلَخْ) وَقَيَّدَ ذَلِكَ بِقَيْدَيْنِ، وَأَخَذَ مُحْتَرَزَ الثَّانِي أَوَّلًا ثُمَّ أَخَذَ مُحْتَرَزَ الْأَوَّلِ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ. قَالَ الزِّيَادِيُّ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَجِبُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بَعْضُهُمْ مَا إذَا نَذَرَهُ حَيْثُ كَانَ مُسْتَحَبًّا كَأَنْ قَصَدَ بِهِ غَضَّ الْبَصَرِ، وَاسْتَثْنَى بَعْضٌ آخَرُ حَالَةَ خَوْفِ الْعَنَتِ حَيْثُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّسَرِّي، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ هَذَا بِمَا إذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَاءِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ انْعِقَادِ نَذْرِهِ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنْ الْكَافِرِ، لَكِنْ فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِهِ طَاعَةً مِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ أَوْ إعْفَافٍ فَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْآخِرَةِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَمُبَاحٌ اهـ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي صُورَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ فَظَلَمَ وَاحِدَةً بِتَرْكِ الْقَسْمِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوفِيَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا لِيُوفِيَهَا حَقَّهَا بِنَظِيرِ مَا ظَلَمَ بِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَحْرُمُ طَلَاقُهَا وَيَكُونُ طَلَاقُهَا بِدْعِيًّا إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ تَوْفِيَةِ حَقِّهَا مِمَّا

طَلَبُهَا بِهِ. وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّ النِّكَاحَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْأُمَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ قُطْرٍ عَلَى تَرْكِهِ أُجْبِرُوا عَلَيْهِ وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اهـ ذَكَرَهُ الشَّبَابَةُ. قَوْلُهُ: (لِتَائِقٍ) أَيْ مُشْتَاقٍ لَهُ أَيِ النِّكَاحِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْبَاءَةِ، لِأَنَّهَا مُؤَنُ النِّكَاحِ، لَكِنْ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بِتَوَقَانِهِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ. وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ لِتَائِقٍ لَهُ أَيِ النِّكَاحِ يُوهِمُ أَنَّهُ تَائِقٌ لِلنِّكَاحِ بِمَعْنَى الْقَبُولِ أَوَّلَهُ بِقَوْلِهِ بِتَوَقَانِهِ لِلْوَطْءِ أَيْ وَلَوْ خَصِيًّا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِحْيَاءِ. قَوْلُهُ: (مِنْ مَهْرٍ) أَيِ الْحَالِّ مِنْهُ، وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ زَائِدٌ عَنْ مَسْكَنِهِ وَخَادِمِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَمَلْبُوسِهِ. قَوْلُهُ: (يَوْمِهِ) أَيْ يَوْمِ التَّمْكِينِ. وَقَوْلُهُ: تَحْصِينًا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: مُسْتَحَبٌّ. قَوْلُهُ: (سَوَاءٌ أَكَانَ مُشْتَغِلًا) أَيْ لِوُجُودِ التَّوَقَانِ مَعَ الْأُهْبَةِ، بِخِلَافِ غَيْرِ التَّائِقِ الْآتِي إِذَا وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَلَا عِلَّةَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّى لِلْعِبَادَةِ فَهِيَ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَهُوَ أَفْضَلُ. قَوْلُهُ: (إِرْشَادًا) أَيْ أَمَرَهُ الشَّارِعُ أَيْ أَرْشَدَهُ وَدَلَّهُ عَلَيْهِ لَا أَمْرَ وُجُوبٍ، وَالْإِرْشَادُ مَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ النَّفْسِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيلٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ امْتَلَأَ الْإِنَاءُ مَاءً أَيْ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ الْإِرْشَادِيِّ، وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ الصَّوْمِ سَوَاءٌ لَاحَظَ امْتِثَالَ الشَّارِعِ أَمْ لَا كَمَا هُوَ شَأْنُ كُلِّ مَا كَانَ رَاجِعًا لِتَكْمِيلٍ شَرْعِيٍّ كَمَا هُنَا لِرُجُوعِهِ إِلَى الْعِفَّةِ، أَمَّا مَا لَا يَكُونُ لِتَكْمِيلٍ شَرْعِيٍّ كَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا قَصَدَ امْتِثَالَ الشَّارِعِ وَإِلَّا فَلَا ثَوَابَ. قَالَ م ر فِي بَابِ الْمِيَاهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ مَا نَصُّهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ: التَّحْقِيقُ أَنَّ فَاعِلَ الْإِرْشَادِ لِمُجَرَّدِ غَرَضِهِ لَا يُثَابُ وَلِمُجَرَّدِ الِامْتِثَالِ يُثَابُ وَلَهُمَا ثَوَابًا أَنْقَصَ مِنْ ثَوَابِ مِنْ مَحْضِ قَصْدِ الِامْتِثَالِ اهـ بِحُرُوفِهِ. قَوْلُهُ: (بِصَوْمٍ) قَالَ الْعُلَمَاءُ الصَّوْمُ يُثِيرُ الْحَرَكَةَ وَالشَّهْوَةَ أَوَّلًا، فَإِذَا دَاوَمَ سَكَنَتْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا دَخْلَ لِلصَّوْمِ فِي الْمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَكْسِرُ شَهْوَتَهَا. قَالَ سم: فِي إِطْلَاقِهِ نَظَرٌ مَا الْمَانِعُ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهَا الشَّهْوَةَ فَتَكْسِرُهَا بِالصَّوْمِ فَلْيُرَاجَعْ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ طِبِّيٌّ لَا دَخْلَ لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ فَكَيْفَ يَقُولُ مَا الْمَانِعُ. قَوْلُهُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ أَيِ الرِّجَالِ، وَخَصَّهُمْ، لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ يَكْسِرُ شَهْوَتَهُمُ الصَّوْمُ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَكْسِرُ شَهْوَتَهَا الصَّوْمُ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَالْمَعْشَرُ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ يَجْمَعُهُمْ وَصْفٌ وَاحِدٌ كَمَا هُنَا. وَإِنَّمَا خَصَّ الشَّبَابَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِيهِمْ أَغْلَبُ وَإِلَّا فَغَيْرُهُمْ مِثْلُهُمْ. قَوْلُهُ: فَلْيَتَزَوَّجْ الْأَمْرُ فِيهِ لِلنَّدْبِ. قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ إِلَخْ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ لِأَنَّ عَدَمَ النِّكَاحِ لَيْسَ فِيهِ غَضٌّ لِلْبَصَرِ وَلَا إِحْصَانٌ لِلْفَرْجِ. قَوْلُهُ: (فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ وَالصَّوْمُ مُبْتَدَأٌ وَمَا قَبْلَهُ خَبَرٌ، أَيْ فَالصَّوْمُ عَلَيْهِ. وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اسْمُ فِعْلٍ وَفَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وَالصَّوْمُ مَفْعُولٌ بِهِ. وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ، وَالْمَعْنَى: فَلْيَلْزَمِ الصَّوْمَ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِيهِ إِغْرَاءً لِلْغَائِبِ وَهُوَ شَاذٌّ عَمَلًا بِقَوْلِ الْخُلَاصَةِ: وَشَذَّ إِيَّايَ وَإِيَّاهُ أَشَذُّ الْبَيْتَ. أَيْ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ فَعَلَيْكُمْ أَوْ فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِغْرَاءٌ لِلْمُخَاطَبِ فَهُوَ مِنَ الْقَاعِدَةِ، وَإِنَّمَا قَالَ: "فَعَلَيْهِ" نَظَرًا لِلَفْظِ مَنْ وَمَدْخُولُ مَنْ فِي الْمَعْنَى مُخَاطَبٌ وَهُوَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، لِأَنَّ الْمَعْنَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَهُوَ مُخَاطَبٌ أَيْضًا. قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ) أَيِ الصَّوْمَ، وَقَوْلُهُ : "لَهُ" أَيْ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ لِتَوَقَانِهِ. قَوْلُهُ: (فَلَا يَكْسِرُهُ) أَيِ التَّوَقَانَ بِالْكَافُورِ، أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُفَتِّرُهَا، وَلَوْ أَرَادَ إِعَادَتَهَا بِاسْتِعْمَالِ ضِدِّ ذَلِكَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ أَمْكَنَ، وَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ مِنَ الْحُرْمَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَطْعِ لَهَا مُطْلَقًا. اهـ م ر، أَيْ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ إِنْ قَطَعَ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَيُكْرَهُ إِنْ أَضْعَفَهَا وَقَطْعُ الْحَبَلِ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسَبُّبِ إِلَى إِلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ، فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: يَجُوزُ إِلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، لِأَنَّهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إِلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ اهـ ابْنُ حَجَرٍ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ. قَوْلُهُ: (بَلْ يَتَزَوَّجُ) أَيْ يُبَاحُ لَهُ التَّزَوُّجُ وَيَتَكَلَّفُ اقْتِرَاضَ الْمَهْرِ إِنْ لَمْ تَرْضَ بِذِمَّتِهِ.

Ungkapan penulis: (*Nikah disunahkan*...), Di sini *Syarih* menuturkan empat macam hukum: Sunah, bagi orang yang berhasrat dan mampu, tidak berada di rumah lebih baik jika memiliki bekal dan tidak sibuk dengan ibadah. Ar-Ramli menuturkan hukum wajib apabila khawatir zina, menjadi alternatif tertentu, dan menemukan sarana. Makruh bagi

orang yang tidak berhasrat dan tidak punya biaya atau memiliki penyakit. *Khilaf al-aula* apabila berhasrat namun tidak memiliki bekal. *Ibahah* sebagaimana bila menghendaki sekedar melampiaskan nafsu, karena itu *nadzar*nya tidak sah menurut *mu'tamad.* Sementara hukum haram, bagi hak orang yang tidak memenuhi hak istri. Sedangkan dalam hak wanita, maka haram jika ia mengetahui bahwa calon suami tidak bisa memenuhi hak-haknya dan ia tidak berhasrat. Ungkapan penulis: (*disunahkan*...), hal ini di*qayyidi* dengan dua batasan. Pengecualian kedua dijadikan sebagai yang pertama, kemudian pengecualian pertama dibuat dengan pola *al-laff wa an-nasyr al-musyawwisy*. Az-Ziyadi berkata: "*Kalamnya memberi pemahaman bahwa nikah tidak wajib.*" Sebagian ulama mengecualikan persoalan bila seseorang ber*nadzar* sekira disunahkan, sebagaimana bila ia bertujuan agar menjaga pandangan. Sebagian yang lain mengecualikan kondisi khawatir zina sekira tidak mampu menahan. Sebagian ulama meng*qayyidi* ini apabila menjadi alternatif utama untuk menolak zina. Menurut *mu'tamad* tidak sah *nadzar*nya, karena menurut asal bukan merupakan wujud ibadah, akan tetapi hukumnya mubah dengan dalil sahnya pernikahan dari orang kafir. Tapi dalam *Fatawa an-Nawawi*, sungguh bila seseorang bermaksud taat dari anak shalih atau menjaga diri, maka termasuk amal akhirat dan ia memperoleh pahala, jika tidak maka mubah hukumnya. Sebagian ulama menuturkan: "*Pernikahan wajib dalam satu bentuk menurut al-mazhab, yaitu persoalan apabila seseorang memiliki dua istri kemudian ia menzhalimi salah satunya dengan meninggalkan giliran, kemudian ia menthalaknya sebelum ia memenuhi hak istri. Maka ia wajib menikahinya untuk memenuhi hak istri sebagai ganti dari hak yang telah ia tinggalkan*". Dalam kasus ini haram baginya menthalak istri, dan hasil thalaknya dihukumi *bid'ah* apabila ia menthalak sebelum memenuhi hak istri dari hak yang ia tinggalkan. Kita memiliki *wajah*, sungguh nikah itu hukumnya *fardhu kifayah* bagi umat ini, menurut mazhab Ahmad ۞, apabila ahli *qathar* (penduduk setempat) sepakat meninggalkannya maka mereka dipaksa mengerjakannya, dan dibuat *istidlal* dengan firman Allah ﷻ: "*Dan menjadikan kamu pemakmurnya.*" An-Nasabah menuturkan. Ungkapan Abi syuja' (*bagi orang yang berhasrat*), maksudnya orang yang ingin menikah yang difahami dari kata *al-ba'ah*, yaitu biaya nikah akan tetapi dengan membuang *mudhaf*, yaitu dengan keinginan menikah sebagaimana kata *Syarih*. Ketika ungkapan penulis "*bagi orang yang ingin menikah*" maka memberi pemahaman bahwa ia berhasrat untuk menikah, maksudnya menerima yang ditakwil dengan ungkapan penulis "*dengan keinginan wathi*" meskipun dikebiri sebagaimana runtutan *kalam al-Ihya'*. Ungkapan penulis (*dari mahar*), maksudnya mas kawin. Yang dimaksud sungguh hal itu mencukupi dari rumah, pembantu, kendaraan, dan

sandangnya. Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib (*dan nafkah pada hari itu*), maksudnya hari penetapan. Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib (*baik ia sibuk*), maksudnya karena wujud keinginan serta biaya, lain halnya dengan orang yang tidak berhasrat tapi memiliki biaya dan tidak ada *illat* padanya. Maka apabila sibuk dengan ibadah maka ibadah lebih utama, dan apabila tidak sibuk maka menikah lebih utama. Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib (*untuk menunjukkan*) maksudnya *syara'* memerintahnya, maksudnya menunjukkannya dan *dilalah* tidak perintah kewajiban. *Al-Irsyad* adalah sesuatu *maslahat* untuk dirinya, yang di*nashab*kan sebagai *tamyiz*, tanpa *tahwil* karena *al-irsyad* tidak menjadi syarat sebagaimana dalam ungkapannya wadah itu memenuhi air, maksudnya dari sisi *dalil al-irsyadi*. Dan ia mendapatkan pahala dengan puasa, baik ia bertepatan memenuhi anjuran *syara'* atau tidak seperti kondisi sesuatu yang kembali untuk menyempurnakan *syara'*, sebagaimana di sini agar kembali ke jalur terjaga. Sementara perkara yang tidak untuk menyempurnakan *syara'* seperti persaksian ketika jual-beli maka dia tidak memperoleh pahala kecuali apabila dia bertujuan mengikuti *syara'* dan apabila tidak demikian maka tidak ada pahala. Muhammad ar-Ramli berkata dalam bab *al-Miyah* setelah ungkapan pengarang "*dan dimakruhkan menggunakan air yang dipanaskan*" yang nashnya: as-Subki berkata: "*Tahqiqnya sungguh pelaku irsyad dengan murni tujuannya tidak memperoleh pahala dan karena murni mengikut maka mendapatkan pahala. Dan keduanya mendapat pahala kurang dari pahala dari kemurnian tujuan mengikut*". Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib (*dengan puasa*). Ulama berkata: "*Puasa dapat meredam gejolak dan syahwat dalam tahap awal, selanjutnya akan bisa menenangkan*". Ibn Hajar berkata: "*Tidak ada pengaruh puasa bagi seorang wanita, karena puasa tidak dapat mencegah syahwatnya*". Ibn Qasim al-Abbadi berkata: "*Terkait kemutlakannya perlu perenungan, apa yang mencegah seorang wanita seperti seorang laki-laki disaat kebutuhannya berupa syahwat yang bisa diredam dengan puasa, maka merujuklah.*" Terkait pembahasan, sungguh di sini merupakan *amr thibi*, dimana tidak ada masukan bagi fuqaha, maka bagaimana mereka bisa mengatakan apa yang menjadi pencegah. Sabda Nabi ﷺ (*Wahai kawula muda*), maksudnya para pemuda, Nabi menentukannya karena mereka bisa meredam syahwat dengan puasa, lain halnya dengan wanita, maka syahwatnya tidak bisa diredam oleh puasa, sebagaimana penjelasan di muka. *Al-ma'syar* adalah komunitas yang terdiri dari satu sifat, sebagaimana penjelasan di sini. Bahwa dikhususkan penyebutan pemuda karena syahwat mereka lebih menggelora, bila tidak bergejolak maka selain mereka seperti mereka. Sabda Nabi ﷺ: "*Maka menikahlah*", perintah di sini menunjukkan kesunahan. Ungkapan Muhammad asy-

Syarbini al-Khatib (*sungguh menikah dapat menjaga pandangan....*), *af'al at-tafdhil* di sini tidak dalam babnya, Karena tidak menikah tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga *farji*.
Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib (*maka hendaknya berpuasa*), *ba'* di sini tambahan, kata الصوم menjadi *mubtada'*, dan kata sebelumnya berstatus *khabar*, maksudnya hendaknya ia berpuasa. Dan boleh kata itu menjadi *isim fi'il*, dimana *fa'il*nya tersimpan, dan kata الصوم menjadi *maf'ul bih*. *Ba'* di situ *zaidah*, artinya: *maka hendaklah ia berpuasa*. Bahwa di sini *ighra'* pada perkara ghaib, merupakan *syadz*, karena mengamalkan ungkapan *al-Khulashah*: وَشَذَّ إِيَّايَ وَإِيَّاهُ أَشَذّ. Maksudnya, penggiyasannya, dikatakan: *maka hendaklah kalian atau hendaklah kamu berpuasa*. Dan dijawab, bahwa kata tersebut *ighra'* pada *mukhatab*, yang masuk pada kaidah. Bahwa pengarang memaparkan kata فَعَلَيْهِ sebab memandang pada kata مَنْ dan yang dimasuki مَنْ, maksudnya *mukhatab* yaitu orang yang tidak mampu, karena artinya dan orang yang tidak mampu dari kalian, maka ini merupakan *mukhatab* juga.
Ungkapan Muhammad as-Syarbini al-Khatib (*maka sesungguhnya*), yaitu puasa. Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib: "*baginya*" maksudnya bagi orang yang tidak mampu, yaitu membuang *mudhaf*, maksudnya karena hasratnya. Ungkapan Muhammad as-Syarbini al-Khatib (*maka tidak bisa meredamnya*), yaitu hasrat dengan kapur, maksudnya dimakruhkan meredam dengan kapur apabila kuat dugaan bahwa kapur tersebut tidak bisa memutus seluruh syahwatnya, bahkan akan meredakannya. Jika ingin mengulanginya dengan menggunakan sebaliknya hal tersebut dari obat-obatan maka memungkinkan. Penjelasan yang mantap dalam *al-Anwar* dari hukum haram itu diarahkan pada pemutusan syahwat secara mutlak. Demikian pernyataan Muhammad ar-Ramli. Maksudnya diharamkan bila memutus seluruh syahwat, dan dimakruhkan apabila melemahkan syahwat dan memutus rahim wanita secara detail. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menjadikan sebab menjatuhkan sperma setelah berada di rahim. Abu Ishak al-Maruzi berkata: "*Boleh menjatuhkan sperma dan gumpalan darah*", pendapat ini dinukil dari Abu Hanifah. Dalam *al-Ihya'* dalam pembahasan *al-Azl*, terdapat penjelasan yang menunjukkan keharamannya, yaitu menurut *al-Aujah*. Sebab setelah menetap di rahim maka akan bersiap menjadi makhluk untuk dimasuki ruh, lain halnya dengan *Azl*. Demikian pernyataan Ibn Hajar. Menurut *mu'tamad*, tindakan itu tidak diharamkan kecuali setelah meniup ruh di dalamnya. Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib (*akan tetapi menikah*), maksudnya diperbolehkan baginya menikah, dan dibebankan hutang mahar apabila istri tidak rela terhadap tanggungannya.

b. *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib*, III/156:

فَرْعٌ لو نَكَحَهَا على أَنَّ النِّكَاحَ يَنْتَهِي بِالْوَطْءِ بَطَلَ لِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَا إنْ شَرَطَ طَلَاقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يَمْنَعُ دَوَامَ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ التَّأْقِيتَ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا طَلَّقَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَوْ تَوَاطَآ أَيْ الْعَاقِدَانِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَقَدَا بِذَلِكَ الْقَصْدِ بِلَا شَرْطٍ كُرِهَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَهُ وَلِأَنَّ كُلَّ ما صُرِّحَ بِهِ أَبْطَلَ إذَا أُضْمِرَ كُرِهَ وَمِثْلُهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا بِلَا شَرْطٍ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إذَا وَطِئَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ وَتَصْرِيحُ الْمُصَنِّفِ بِالْكَرَاهَةِ فِيمَا قَالَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذِهِ من زِيَادَتِهِ هُنَا أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا إلَّا نَهَارًا أَوْ إلَّا مَرَّةً مَثَلًا وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا نَهَارًا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ بَطَلَ النِّكَاحُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْهَا أَيْ مِنْ جِهَتِهَا لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الْعَقْدِ لَا مِنْهُ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقٌّ لَهُ فَلَهُ تَرْكُهُ وَالتَّمْكِينُ حَقٌّ عليها فَلَيْسَ لَهَا تَرْكُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا يَتِمُّ الْعَقْدُ بِمُسَاعَدَةِ غَيْرِ الشَّارِطِ لِلشَّارِطِ وَالْمُسَاعَدَةُ مِنْهُ تَرْكٌ لِحَقِّهِ وَمِنْهَا مَنْعٌ لَهُ فَهَلَّا جُعِلَتْ كَالِاشْتِرَاطِ وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهَا إذَا جُعِلَتْ كَالِاشْتِرَاطِ فَقَدْ تَعَارَضَ مُقْتَضِيَا الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَتَرَجَّحَ بِالِابْتِدَاءِ لِقُوَّتِهِ وَعَنَى بِمُقْتَضِي الصِّحَّةِ شَرْطَ الزَّوْجِ أَوْ مُسَاعَدَتَهُ وَفِي اقْتِضَائِهِ لَهَا نَظَرٌ إذْ غَايَتُهُ عَدَمُ اقْتِضَائِهِ الْفَسَادَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اقْتِضَاؤُهُ الصِّحَّةَ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الِاشْتِرَاطَ إلْزَامٌ وَالْمُسَاعَدَةَ الْتِزَامٌ وَالشَّرْطُ على الْمُلْتَزِمِ لِلْمُلْزِمِ وَلَا عَكْسَ وَرَدَّهُ ابْنُ النَّقِيبِ بِأَنَّ هَذَا إنْ ظَهَرَ فِي شَرْطِهَا فَلَا يَظْهَرُ فِي شَرْطِهِ لِأَنَّ شَرْطَهُ الْتِزَامٌ لَا إلْزَامٌ وَمُسَاعَدَتُهَا بِالْعَكْسِ لِأَنَّ حَقَّ التَّرْكِ مِنْ جِهَتِهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَمِنْ جِهَتِهَا بِالْعَكْسِ وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ لِأَنَّ شَرْطَهُ وَإِنْ كَانَ الْتِزَامًا نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَهُوَ إلْزَامٌ نَظَرًا لِلَّفْظِ بَلْ لِلْمَعْنَى أَيْضًا إذْ فِيهِ

إلزامها بعدم مطالبتها له بالوطء وإن قام به عنة أو نحوها هذا والأول في الجواب عن كلام الرافعي أن يقال البادئ بالشرط إن كان صاحب الحق فهو تارك لحقه ابتداء والآخر ليس مانعا له منه وإن كان غير صاحب الحق فاشتراطه مفيد لما بدأ به فمساعدة صاحب الحق لا تفيد تمام العقد لفساد الشق الأول ثم ما ذكره المصنف كأصله من التفصيل المذكور هو ما عليه الجمهور وفي البحر أنه مذهب الشافعي وصححه النووي في تصحيح التنبيه والذي صححه في الشرح الصغير الفساد مطلقا للإخلال بمقصود العقد وجزم في المنهاج كأصله بالفساد من غير تفصيل ويستثنى من ذلك المأيوس من احتمالها الوطء مطلقا أو حالا إذا شرط في نكاحها على الزوج أن لا يطأها مطلقا أو إلى الاحتمال فإنه يصح لأنه قضية العقد ذكره البغوي في فتاويه.

(Cabang persoalan), apabila seseorang menikahi wanita dengan tujuan mengakhiri nikah dengan persetubuhan maka batal, karena merupakan bagian dari nikah *muth'ah*. Dari sini, khabar: *"Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang menjalaninya"* HR. at-Tirmidzi diarahkan. Beliau berkata, "*Hadits ini hasan shahih*". Begitu pula apabila mensyaratkan menthalaknya sebelum *wathi* atau sesudahnya, karena itu merupakan persyaratan yang mencegah kelanjutan nikah, sehingga menyerupai pembatasan waktu. Ungkapan pengarang seperti yang beliau ungkapkan lebih umum daripada ungkapan aslinya. Maka apabila mensyaratkan bahwa sungguh apabila ia me*wathi*nya maka ia akan menthalaknya, az-Zarkasyi berkata: *"Bila seseorang menikahi wanita agar ia halal baginya karena permasalahan pertama, maka dalam al-Istidzkar karya ad-Darimi terdapat dua wajah, al-Mawardi mantap dengan hukum sah, sebab ia tidak mensyaratkan furqah, akan tetapi ia mensyaratkan konsekuensi akad. Sehingga apabila kedua mempelai berhubungan badan sebelum akad kemudian mereka berdua akad karena tujuan tersebut tanpa syarat, maka dimakruhkan karena keluar dari khilaf ulama yang membatalkannya, dan karena setiap perkara yang menjelaskan demikian maka batal apabila menyimpannya maka dimakruhkan"*. Kasus lain, bila seseorang menikahi wanita tanpa syarat dengan tujuan menthalak apabila ia me*wathi*nya. Penjelasan ini di*sharih*kan oleh kitab asal. Penjelasan *mushannif* dengan hukum makruh dalam permasalahan yang beliau paparkan adalah sebagai tambahan. Al-Mawardi dan ulama lain telah menjelaskannya, atau seorang menikahi wanita dengan tujuan tidak akan me*wathi*nya, penjelasan macam ini merupakan tambahan,

atau menikahinya agar tidak me*wathi*nya kecuali di siang hari atau kecuali satu kali misalkan. *Ibarat al-Asal* agar me*wathi*nya di siang hari, kedua ungkapan tersebut tepat, nikah batal apabila persyaratan tersebut dari sisi istri untuk menafikan maksud akad, tidak dari pihak suami, karena wathi merupakan haknya. Sehingga ia boleh meninggalkannya, sementara penetapan menjadi hak istri, sehingga ia tidak diperkenankan meninggalkannya. Ar-Rafi'i berkata: Kamu bisa berkata: *"Bahwa akad menjadi sempurna dengan bantuan selain penyarat bagi penyarat tersebut dan bantuan darinya itu meninggalkan haknya, sementara istri mencegahnya. Maka jauh sekali dijadiakan seperti syarat"*. Ibn Rif'ah merespon problem tersebut bahwa hal itu apabila dijadikan seperti persyaratan maka bertentangan dengan konsekuensi sah dan *fasad*, maka dikembalikan pada awal mula sebab kuatnya, dan bermaksud konsekuensi sah menjadi syarat suami atau bantuannya. Sementara konsekuensi bagi istri perlu renungan, karena ujungnya tidak berkonsekuensi *fasad*, dan konsekuensi sah tidak tetap dari suami. As-Subki menjawab: *"Bahwa syarat itu merupakan penetapan, sementara bantuan merupakan penyanggupan. Pesyaratan terhadap orang yang menyanggupi karena perkara yang ditetapkan, dan tidak sebaliknya"*. Ibn an-Naqib menolaknya, bahwa ini bila jelas dalam syarat istri maka tidak jelas dalam syarat suami, karena syarat suami adalah menyanggupi bukan penetapan. Sementara bantuan istri sebaliknya, Karena hak meninggalkan berada di sisi suami dan wajib bagi si suami, tidak berguna baginya. Sementara dari sisi istri sebaliknya. Dan dijawab dengan pencegahan hal tersebut, karena syaratnya meskipun ia menyanggupi memandang pada makna maka ia menetapkan memandang pada lafal bahkan karena makna juga, karena ada penetapan istri dengan tidak ada tuntutan istri pada suami dengan *wathi* meski dia mengidap impoten atau semisalnya. Jawaban yang lebih baik dari ungkapan ar-Rafi'i ialah: *"Orang yang memulai persyaratan, apabila ia memiliki hak maka ia meninggalkan haknya pada mulanya, dan yang akhir tidak mencegah padanya dan darinya. Sementara apabila ia bukan pemilik hak maka persyaratannya merusak pada perkara yang dimulainya. Sehingga bantuan pemilik hak tidak berguna menyempurnakan akad karena rusaknya sisi pertama"*. Kemudian penjelasan yang dipaparkan *mushannif* itu seperti kitab asalnya dari perincian detailnya. Ini adalah penjelasan yang dipedomani *jumhur*. Dalam *al-Bahr* ini merupakan pendapat mazhab asy-Syafi'i. an-Nawawi menshahihkanya dalam *at-Tashih at-Tanbih*. Penjelasan yang dishahihkannya dalam *Syarah Shaghir* ialah *fasad* secara mutlak karena terdapat cela terhadap maksud akad. Dan beliau mantap dalam *al-Minhaj* sebagaimana asalnya dengan *fasad* tanpa perincian. Dikecualikan dari hal di atas orang yang putus asa dari menanggung *wathi* secara mutlak atau seketika bila ia mensyaratkan

dalam menikahi wanita pada suami agar ia tidak me*wathi*nya secara mutlak atau pada tanggungan, maka sah, karena hal itu merupakan konsekuensi akad, seperti dipaparkan al-Baghawi dalam *Fatawa*nya.

c. *Al-Umm*, V/189:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ حَبْسُ الْمَرْأَةِ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ الْقَسْمِ لَهَا أَوْ كُلِّهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسًا فَإِذَا رَجَعَتْ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِلَّا الْعَدْلُ لَهَا أَوْ فِرَاقُهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَهَبُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مَا لَمْ يَجِبْ لَهَا فَمَا أَقَامَتْ عَلَى هِبَتِهِ حَلَّ وَإِذَا رَجَعَتْ فِي هِبَتِهِ حَلَّ مَا مَضَى بِالْهِبَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مَا يُسْتَقْبَلُ إِلَّا بِتَجْدِيدِ الْهِبَةِ لَهُ (قَالَ) وَإِذَا وَهَبَتْ لَهُ ذَلِكَ فَأَقَامَ عِنْدَ امْرَأَةٍ لَهُ أَيَّامًا ثُمَّ رَجَعَتْ اسْتَأْنَفَ الْعَدْلَ عَلَيْهَا وَحَلَّ لَهُ مَا مَضَى قَبْلَ رُجُوعِهَا.

(Asy-Syafi'i berkata) *"Suami boleh menahan istri agar meninggalkan sebagian giliran atau seluruhnya selama hati istrinya tidak baik. Apabila istrinya kembali ke jalur yang benar maka tidak halal bagi suami kecuali berbuat adil padanya atau menceraikannya, karena istri memberikan sesuatu yang tidak wajib pada mulanya, sehingga sesuatu yang diberikan istri halal. Sementara apabila istri kembali dalam pemberiannya maka halal pemberian yang lalu dan tidak halal pemberian berikutnya kecuali dengan memperbarui pemberian pada suami".* (Beliau berkata) *"Jika istri memberikan pada suami kemudian suami berada di samping istrinya beberapa hari, kemudian istrinya kembali maka suami harus mulai berlaku adil pada istrinya, dan pemberian istri yang dahulu sebelum kembali halal bagi suami."*

d. *Raudhah ath-Thalibin*, VII/265:

وَإِنْ شَرَطَ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ الْأَصْلِيِّ مِنَ النِّكَاحِ فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا بِأَنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى أَوْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهَا أَوْ أَنْ تَخْرُجَ مَتَى شَاءَتْ أَوْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا أَوْ كَانَ عَلَيْهَا بِأَنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَ ضَرَّاتِهَا وَبَيْنَهَا فِي مَسْكَنٍ أَوْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا ثُمَّ فَسَادُ الشَّرْطِ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي وَجْهٍ أَوْ قَوْلٍ حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَيَفْسُدُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى أَمْ نَقَصَ أَمْ سَاوَاهُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَنِ ابْنِ خَيْرَانَ إِنْ زَادَ وَالشَّرْطُ لَهَا فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى وَكَذَا إِنْ نَقَصَ وَالشَّرْطُ عَلَيْهَا وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ هَذَا قَوْلًا مُخَرَّجًا وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ وَجْهًا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَوَجْهًا أَنَّ

الشَّرْطُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّدَاقِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ. الضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ كَشَرْطِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يَطَأَهَا وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي فَصْلِ التَّحْلِيلِ فَإِنْ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ أَثَّرَ الشَّرْطُ فِي الصَّدَاقِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ.

Apabila seseorang menyaratkan sesuatu yang menyalahi ketentuan, maka ada dua macam. Pertama, sesuatu yang tidak mencacatkan maksud asli dari pernikahan, maka syarat tersebut rusak; baik ia mensyaratkan pada istri, dengan gambaran ia mensyaratkan tidak menikahi seorang wanita, tidak menjadikannya kekasih, tidak menthalaknya, tidak bepergian bersamanya, atau istri keluar ketika ia menghendaki atau menthalak isterinya atau ada pada istri, dengan gambaran ia mensyaratkan tidak menggilir pada istri, atau mengumpulkan diantara istri dan istri-istri yang lain dalam satu rumah, atau tidak menafkahinya. Kemudian rusaknya syarat tidak merusak pernikahan menurut pendapat masyhur. Dalam satu *wajah* atau *qaul*, al-Hanathi menceritakan hal ini bisa membatalkan nikah. Sedangkan mas kawin maka rusak dan wajib memberikan *mahar mitsil*; baik lebih dari *mahar musamma*, kurang atau sepadan. Ini menurut al-mazhab. Dari Ibn Khairan, jika melebihi dan syarat pada istri maka wajib memberikan *mahar musamma*. Begitu juga apabila kurang dan menyaratkan padanya. Diantara mereka ialah ulama yang menjadikan ini sebagai *qaul mukharaj*. Al-Hanathi menceritakan sebuah *wajah*, sungguh kewajiban terkait syarat-syarat yang rusak ialah sedikit-sedikitnya *mahar musamma* dan *mahar mitsil*. Beliau juga menceritakan satu *wajah*, syarat itu tidak mempengaruhi pada mas kawin seperti tidak mempengaruhi dalam nikah. Bagian kedua, sesuatu yang mencacatkan terhadap maksud nikah seperti syarat menthalaknya atau tidak me*wathi*nya. Hal ini telah dijelaskan di muka mengenai dua contoh dalam pasal *tahlil*. Jika kita menshahihkan nikah maka akan mempengaruhi syarat dalam mas kawin seperti syarat-syarat lain yang rusak.

e. *At-Tanbih*, I/161:

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَحَلَّهَا طَلَّقَهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَبْطُلُ وَالثَّانِي لَا يَبْطُلُ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَإِنْ تَزَوَّجَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْلَا يَبِيتَ عِنْدَهَا أَوْلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَوْلَا يُسَافِرَ بِهَا أَوْلَا يَقْسِمَ لَهَا بَطَلَ الشَّرْطُ وَالْمُسَمَّى وَصَحَّ الْعَقْدُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقِيلَ إِنْ شَرَطَ تَرْكَ الْوَطْءِ أَهْلُ الزَّوْجَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ.

Jika seseorang menikahi wanita dengan ketentuan apabila istri halal

baginya, maka ia akan menthalaknya. Terkait masalah ini ada dua pendapat; pertama ini membatalkan. Kedua tidak membatalkan, jika seseorang menikahi dengan syarat *khiyar* maka akad tersebut batal; dan jika menikahi dan mensyaratkan padanya agar tidak me*wathi* istri maka akadnya batal. Jika menikahi agar tidak menafkahinya, tidak menginap di sampingnya, tidak menjadikan kekasih padanya, tidak bepergian bersamanya atau tidak menggilirnya maka syarat dan *mahar musamma* batal, akad sah dan wajib membayar *mahar mitsil.* Menurut satu pendapat apabila keluarga istri mensyaratkan meninggalkan *wathi* maka batal akadnya.

KOMISI C

PERUMUS DAN MUSHAHIH

KH. Hasyim Abbas
KH. Ahmad Sadid Jauhari
KH. Muhlis
KH. Khusnan Ali

MODERATOR

KH. M. Azizi Hasbulloh

NOTULEN

KH. Achmad Shampton Masduqie

434. *Takfir* dan Munafik

Deskripsi Masalah

Permusuhan laten antar faham-faham keagamaan akhir-akhir ini mengimplisitkan tuduhan kafir, bukannya karena mengingkari atau menolak tegas kebenaran yang diajarkan Islam, melainkan sebatas berbeda pemahaman doktrinal yang mengarah pada Islam sebagai ideologi. Tidak jauh stigma munafiq yang seharusnya diartikan *"orang yang secara lisan menerima ajaran tapi di belakang mengingkari"*, tetapi sikap menolak formalisasi *syari'at* dituduh munafiq karena format keislamannya tidak *kaffah*.

Pertanyaan

a. Sejauh mana tuduhan kafir pada *person*, institusi atau kelompok orang dibenarkan? Apakah lantaran berbeda faham keagamaan yang bersifat *doktrinal ideologis* bisa menjadi dasar? Dampak apa dari mengkafirkan *person* atau instusi tertentu?
b. Pendustaan terhadap apa berpotensi menimbulkan sifat "*nifaq*" pada diri seseorang?
c. Bagaimana rumusan maksud "*udkhulu fi al-silmi kaffah*" (QS al-Baqarah 208) semestinya?

Jawaban

a. Menuduh kafir pada *person* atau intitusi bisa dibenarkan, apabila yang dituduh benar-benar kafir. Jika pengkafiran tersebut terhadap *person* atau institusi yang tidak jelas kafir maka dampak/hukumnya *tafsil*:
   1) Kafir, jika meyakinkan iman adalah kufur, orang Mu'min adalah kafir, terus menerus melempar tuduhan kekafiran atau mempunyai ideologi berupa mencaci maki dengan pengkafiran.
   2) Haram, jika tidak menghendaki iman adalah kufur, mu'min ialah kafir, tapi sekedar menghendaki *kufur ni'mat* atau seperti orang kafir di dalam perbuatannya. Namun menurut Imam Ghazali mengkafirkan terhadap orang yang tidak kafir mutlak kafir.
   3) Tidak berdosa, jika ada indikasi/pijakan untuk mengkafirkan berdasarkan *qarinah* yang kuat, atau karena *nushun* yang sangat dibutuhkan.
b. Mendustkan terhadap ajaran agama yang *Mujma' alaih* dan *Ma'lum Dharuri* yang ada nashnya atau tidak ada *nash*nya menurut *Qaul Ashah*.
c. Tafsiran "*silmi*" ada tiga macam, adakalanya yang berartikan damai, adakalanya yang berartikan Islam, dan adakalanya berartikan Taat.

Adapun *kaffah* ada dua kemungkinan, adakalanya sifat dari *silmi* yang bermakna *"Masuklah di dalam agama Islam dengan mengamalkan syari'at Islam baik perintah atau larangn selama mampu"*. Ada kalanya sifat dari "*Udkhulu*" yang berarti *"Masuklah kalian semua pada agama Islam tanpa terkecuali"*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, 5:

وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ تَكْفِيْرِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِمَا فِيْهِ نَفْيُ الصَّانِعِ الْقَادِرِ جَلَّ وَعَلَا، أَوْ شِرْكٌ جَلِيٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيْلَ أَوْ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ أَوْ إِنْكَارُ مُتَوَاتِرٍ أَوْ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ ضَرُوْرَةً مِنَ الدِّيْنِ.

Sungguh sah *ijma'* larangan mengkafirkan seorang *ahli kiblat* kecuali dengan perbuatan yang mengandung pe*nafi*an terhadap dzat Pencipta yang maha Kuasa ﷻ, terang-terangan *syirik* yang tidak bisa ditakwil, mengingkari hal-hal yang pasti dari agama, mengingkari sesuatu yang *mutawatir* atau di sepakati secara pasti dari agama.

b. *Dalil al-Falihin*, IV/498:

وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى بِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ – أَوْ قَالَ – عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ. رواه البخاري ومسلم. حَارَ: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ أَيْ رَجَعَ عَلَيْهِ مَا قَالَ. عَدُوُّ اللهِ: بِحَذْفِ النِّدَاءِ أَيْ دَعَا بِهِ، أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ، حَارَ: أَيْ رَجَعَ وَصْفُهُ الْمُؤْمِنَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْإِيْمَانَ كُفْرٌ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ كَافِرٌ وَعَدُوُّ اللهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَرَادَ كُفْرَ النِّعْمَةِ أَوِ الْكَافِرَ فِي الْأَفْعَالِ فَلَا.

Dari Abi Dzar ﷺ, sungguh ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidak ada seorang lelaki yang mengaku lahir tanpa ayahnya dan ia mengetahui kecuali kufur. Orang yang mengakui perkara yang bukan miliknya maka tidak lah ia bagian dari kita; dan masuklah di dalam neraka. Orang yang mengajak temannya dengan kekufuran -atau berkata: musuh Allah; tidaklah demikian kecuali menjadi tetangga baginya."* HR. Bukhari dan Muslim. *Harun* dengan *ha'* yang dikosongkan dari titik dan *ra'* maksudnya kembali padanya perkara yang berkata. Musuh Allah: dengan membuang *nida'* maksudnya mengajak dengannya, atau memutlakkan padanya dari selain panggilan, *harun* maksudnya kembali sifatnya orang mukmin dengan

hal itu padanya jika meyakini sungguh iman itu *kufur* dan sungguh mukmin itu kafir dan musuh Allah dan jika tidak menghendaki dengan hal itu dan sungguh menghendaki kekufuran nikmat atau kafir dalam perbuatan-perbuatan maka tidak.

c. *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, XXXII/297:

(بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيْلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ) أَيْ هَذَا بَابٌ فِيْ بَيَانِ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ أَيْ دَعَاهُ كَافِرًا أَوْ نَسَبَهُ إِلَى الْكُفْرِ قَوْلُهُ بِغَيْرِ تَأْوِيْلٍ يَعْنِيْ فِيْ تَكْفِيْرِهِ قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا تَأَوَّلَ فِيْ تَكْفِيْرِهِ يَكُوْنُ مَعْذُوْرًا غَيْرَ آثِمٍ وَلِذَلِكَ عَذَرَ النَّبِيُّ عُمَرَ ﷺ فِيْ نِسْبَةِ النِّفَاقِ إِلَى حَاطِبِ بْنِ بَلْتَعَةَ لِتَأْوِيْلِهِ وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ظَنَّ أَنَّهُ صَارَ مُنَافِقًا بِسَبَبِ أَنَّهُ كَاتَبَ الْمُشْرِكِيْنَ كِتَابًا فِيْهِ بَيَانُ أَحْوَالِ عَسْكَرِ رَسُوْلِ اللهِ قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ جَوَابُ كَلِمَةٍ مِنَ الْمُتَضَمِّنَةِ مَعْنَى الشَّرْطِ يَعْنِيْ أَنَّ الَّذِيْ قَالَهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَكُفْرِ نَفْسِهِ لِأَنَّ الَّذِيْ كَفَّرَهُ صَحِيْحُ الْإِيْمَانِ وَلَمْ يَتَأَوَّلْ فِيْهِ بِشَيْءٍ يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِيْمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِرَمْيِهِ لَهُ بِالْكُفْرِ فَقَدْ كَفَّرَ نَفْسَهُ فَافْهَمْ.

(*Bab orang yang mengkufurkan saudaranya tanpa takwil maka sebagaimana ia berkata*) maksudnya bab ini menjelaskan orang yang mengkufurkan saudaranya, maksudnya mengajak kafir atau menisbatkannya kepada kekufuran. (Ungkapan al-Bukhari: "*tanpa takwil*"), maksudnya pen*takfir*annya di*qayyidi* tanpa takwil, karena jika ia mentakwil dalam pen*takfir*annya maka ia di*udzuri* dan tidak berdosa. Karena itu Nabi menerima alasan Umar ﷺ dalam penisbatan *nifak* pada Hathib bin Baltaah ﷺ karena pen*takwil*annya. Dalam hal itu, sungguh Umar bin Khathab menyangka bahwa Hathib menjadi munafik karena ia menulis surat pada kaum kafir yang berisi penjelasan kondisi-kondisi tentara Rasulullah ﷺ. (Ungkapan al-Bukhari: "*maka sebagaimana ia berkata*"), ini adalah jawaban kalimat dari makna *syarat* yang tersimpan, yakni sungguh sesuatu yang diucapkan kembali padanya dan menyebakan kufur dirinya, karena orang yang shahih imannya yang mengkufurkan orang lain dan tidak men*takwil*nya dengan sesuatu yang menyebabkan keluar dari iman, maka jelas sungguh ia menghendaki melempar orang lain dengan kekufuran, sehingga sungguh ia mengkufurkan dirinya sendiri, maka pahamilah.

d. *Faidh al-Bari*, VI/150:

بَابُ مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيْلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ. أَيْ بِغَيْرِ مَنْشَإٍ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ فِيْ إِكْفَارِ مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ، وَالْمُتَأَخِّرُوْنَ إِلَى كَوْنِهِ إِنْ قَالَهَا سَابًّا شَاتِمًا لَمْ يَكْفُرْ، وَإِنْ كَانَ

فِي عَقِيْدَتِهِ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ. وَعِنْدِي هَذَا مِنْ بَابٍ آخَرَ. فَإِنْ رَمَى بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ عَلَى أَحَدٍ مِثْلَ رَمْيِ الْحِجَارَةِ، فَلَا بُدَّ لَهَا إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَائِلِهَا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَقُوْلُ لَهُ مَحَلًّا لَهَا، أَوْ تَلْزَقَ بِهِ إِنْ كَانَ مَحَلًّا لَهَا. وَلَا يُوْجِبُ ذَلِكَ كُفْرًا غَيْرَ الرَّدْغَةِ كَرَدْغَةِ الطِّيْنَةِ، وَلَا يُوْرِثُ فِيْهِ شَيْئًا غَيْرَ التَّقْبِيْحِ، إِلَّا أَنَّ تِلْكَ الْحَقِيْقَةَ لَمَّا لَمْ تُذْكَرْ فِي الْفِقْهِ لَمْ تَتَبَادَرْ إِلَيْهَا أَذْهَانُ الْعَامَّةِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا.

(Bab) Orang yang mengafirkan saudaranya tanpa *ta`wil* maka ia seperti perkataannya. Maksudnya tanpa sebab. Sungguh al-Ghazali secara mutlak mengafirkan orang yang mengafirkan saudaranya. Sementara ulama *muta`akhirin* berpendapat, bila ia mengucapkannya karena mencela dan mencerca, maka tidak kafir, dan bila dalam keyakinannya saudaranya kafir maka ia sendiri yang kafir. Menurutku ini permasalahan lain. Jika ia mengucapkan kalimat itu kepada orang lain sebagaimana melempar batu, maka pasti kalimat itu adakalanya kembali kepada pengucapnya bila orang yang dikatai tidak berstatus kafir, atau melekat kepadanya bila orang yang dikatai berstatus kafir, dan hal itu tidak menetapkan kekufuran ... dan tidak mewariskan sesuatu selain celaan. Hanya karena hakikat ini tidak disebutkan dalam fikih, maka tidak segera dipahami oleh hati orang awam. Inilah makna ungkapan al-Bukhari *"Maka salah satunya kembali padanya"*.

e. *Ghayah al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul*, 115:

(جَاحِدُ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مَعْلُوْمٍ مِنَ الدِّيْنِ ضَرُوْرَةً) وَهُوَ مَا يَعْرِفُهُ مِنْهُ الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ مِنْ غَيْرِ قَبُوْلِ تَشْكِيْكٍ كَوُجُوْبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَحُرْمَةِ الزِّنَا وَالْخَمْرِ. (كَافِرٌ) قَطْعًا (إِنْ كَانَ فِيْهِ نَصٌّ) لِأَنَّ جَحْدَهُ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيْبَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِ. وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْآمِدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَنَّ فِيْهِ خِلَافًا لَيْسَ بِمُرَادٍ لَهُمْ. (وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ) فِيْهِ نَصٌّ جَاحِدُهُ كَافِرٌ. (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ، وَقِيْلَ لَا لِعَدَمِ النَّصِّ وَخَرَجَ بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ نَصٌّ، وَبِالْمَعْلُوْمِ ضَرُوْرَةً غَيْرُهُ كَفَسَادِ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ، وَإِنْ كَانَ فِيْهِ نَصٌّ كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الْاِبْنِ السُّدُسَ مَعَ الْبِنْتِ لِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ، كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَبِالدِّيْنِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُوْمِ مِنْ غَيْرِهِ ضَرُوْرَةً كَوُجُوْدِ بَغْدَادَ، فَلَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَلَا جَاحِدُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَإِنِ اشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ. هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الرِّدَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ خَالَفَهُ مَا فِي الْأَصْلِ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ.

(Orang yang mengingkari *mujma' alaih* yang diketahui dari agama secara pasti), yaitu perkara yang diketahui orang khusus dan orang awam tanpa menerima keraguan, seperti kewajiban shalat, puasa, keharaman zina dan *khamr*, ia (kafir) secara pasti, (bila di dalamnya ada *nash*), karena pengingkarannya menetapkan pendustaan terhadap Nabi ﷺ di dalamnya. Persangkaan yang dipahami dari kalam al-Amidi, dan pengikutnya, bahwa dalam persoalan ini ada *khilaf*, maka bukanlah yang mereka maksudkan. (Begitu juga bila tidak terdapat) ada *nash* di dalamnya yang pengingkarnya kafir (menurut *ashah*), karena alasan yang telah lewat. Menurut satu pendapat: tidak, karena tidak terdapat *nash*. Kata "*mujma' alaih*" mengecualikan selain *mujma' alaih*, meskipun ada *nash*nya. Kata "*diketahui secara pasti*" mengecualikan selainnya, seperti rusaknya haji sebab *wathi* sebelum *wukuf*, meskipun ada *nash*nya seperti *bintu al-Ibn* berhak memperoleh bagian 1/6 bersama *bintu*, karena keputuan Nabi ﷺ, sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari. Kata "*agama*" mengecualikan sesuatu yang disepakati dan diketahui secara pasti yang bukan agama, seperti wujudnya kota Baghdad, maka orang yang mengingkarinya dan mengingkari sesuatu darinya tidak kufur, meskipun masyhur di tengah manusia. Ini kesimpulan penjelasan dalam *ar-Raudlah* seperti kitab asalnya dalam Bab *Riddah*. Inilah pendapat *mu'tamad*, meskipun Kitab asal menyelisihinya sebagaimana aku jelaskan dalam *al-Hasyiyah*.

f. *Tafsir al-Qurthubi*, VIII/194:

السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا مَفْعُولَانِ أَيْ أَعْقَبَهُمُ اللهُ تَعَالَى نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ وَقِيلَ: أَيْ أَعْقَبَهُمُ الْبُخْلُ نِفَاقًا وَلِهَذَا قَالَ: بَخِلُوا بِهِ -إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ أَيْ يَلْقَوْنَهُ بُخْلَهُمْ أَيْ جَزَاءَ بُخْلِهِمْ كَمَا يُقَالُ: أَنْتَ تَلْقَى غَدًا عَمَلَكَ وَقِيلَ: إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ أَيْ يَلْقَوْنَ اللهَ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ مُنَافِقًا وَهُوَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُنَزَّلُ فِيهِ ثَعْلَبَةَ أَوْ حَاطِبَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. وَثَعْلَبَةُ وَحَاطِبٌ مِمَّنْ حَضَرَ بَدْرًا وَشَهِدَهَا بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ كِذْبُهُمْ نَقْضُهُمُ الْعَهْدَ وَتَرْكُهُمُ الْوَفَاءَ بِمَا الْتَزَمُوهُ مِنْ ذَلِكَ. الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: نِفَاقًا النِّفَاقُ إِذَا كَانَ فِي الْقَلْبِ فَهُوَ الْكُفْرُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْأَعْمَالِ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ

فَجَرَ. خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ مَضَى فِي الْبَقَرَةِ اشْتِقَاقُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهَا وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ وَيَعْهَدُ عَهْدًا لَا يَعْتَقِدُ الْوَفَاءَ بِهِ وَيَنْتَظِرُ الْأَمَانَةَ لِلْخِيَانَةِ فِيهَا وَتَعَلَّقُوا بِحَدِيثٍ ضَعِيفِ الْإِسْنَادِ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ لَقِيَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ خَارِجَيْنِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمَا ثَقِيلَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَالِيْ أَرَاكُمَا ثَقِيلَيْنِ؟ قَالَا حَدِيثًا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ خِلَالِ الْمُنَافِقِينَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَفَلَا سَأَلْتُمَاهُ؟ فَقَالَا: هِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَكِنِّي سَأَلُهُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمَا ثَقِيلَانِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَاهُ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثْتُهُمَا وَلَمْ أَضَعْهُ عَلَى الْوَضْعِ الَّذِي وَضَعَاهُ وَلَكِنِ الْمُنَافِقُ إِذَا حَدَّثَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَكْذِبُ وَإِذَا وَعَدَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يُخْلِفُ وَإِذَا ائْتُمِنَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَخُونُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ مُتَعَمِّدَ هَذِهِ الْخِصَالِ لَا يَكُونُ كَافِرًا وَإِنَّمَا يَكُونُ كَافِرًا بِاعْتِقَادٍ يَعُودُ إِلَى الْجَهْلِ بِاللهِ وَصِفَاتِهِ أَوِ التَّكْذِيبِ لَهُ تَعَالَى اللهُ وَتَقَدَّسَ عَنِ اعْتِقَادِ الْجَاهِلِينَ وَعَنْ زَيْغِ الزَّائِغِينَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْمُنَافِقِينَ زَمَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَعَلَّقُوا بِمَا رَوَاهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فَفِيهِ ثُلُثُ النِّفَاقِ فَظَنَنَّا أَنَّا لَمْ نَسْلَمْ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ بَعْضِهِنَّ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلَهُنَّ إِنَّمَا خَصَصْتُ بِهِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَمَا خَصَّهُمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ أَمَّا قَوْلِي إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ [المنافقون: الأولى] -الآيَة- أَفَأَنْتُمْ كَذَلِكَ؟ قُلْنَا لَا قَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ مِنْ ذَلِكَ بُرَاءُ وَأَمَّا قَوْلِي إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ فَذَلِكَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ -الآيَاتِ الثَّلَاث- أَفَأَنْتُمْ كَذَلِكَ؟ قُلْنَا لَا وَاللهِ لَوْ عَاهَدْنَا

اللهُ عَلَى شَيْءٍ أَوْ فِينَا بِهِ قَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ مِنْ ذَلِكَ بَرَاءٌ وَأَمَّا قَوْلِي وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ فَذَلِكَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ [الأحزاب: ٧٢] -الآيَة- فَكُلُّ إِنْسَانٍ مُؤْتَمَنٍ عَلَى دِينِهِ فَالْمُؤْمِنُ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْمُنَافِقُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْعَلَانِيَةِ أَفَأَنْتُمْ كَذَلِكَ؟ قُلْنَا لَا قَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ مِنْ ذَلِكَ بَرَاءٌ] وَإِلَى هَذَا صَارَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ قَالَتْ طَائِفَةٌ: هَذَا فِيمَنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْخِصَالُ وَيَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ الذَّمِيمَةَ مُنَافِقٌ مَنِ اتَّصَفَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَوْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْمَعَاصِي مَا كَانَ بِهَا كَافِرًا مَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الِاعْتِقَادِ.

Ketujuh, firman Allah ﷻ: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا menjadi dua *maf'ul*, maksudnya Allah menimbulkan kemunafikan di hati mereka. Menurut satu pendapat: maksudnya *bakhil* mengakibatkan kemunafikan mereka. Karena ini, Allah berfirman: إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ -بَخِلُوا بِهِ di tempat *khafdh*, maksudnya mereka menemukan ke*bakhil*an, maksudnya pembalasan ke*bakhil*an, sebagaimana dikatakan: besok kamu mendapatkan amal perbuatanmu. Menurut satu pendapat إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, maksudnya mampu sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Terkait ini, terdapat sebuah dalil: Sungguh bila ia mati dalam keadaan munafik; dalil ini jauh dari penurunannya ditujukan kepada Tsa'labah atau Hathib; karena sungguh Nabi ﷺ bersabda pada Umar: *"Sesuatu yang menemukanmu semoga Allah memperlihatkan pada ahli badar."* kemudian beliau berdsabda: *"Kerjakanlah sesuatu yang kalian kehendaki karena sungguh aku mengampuni pada kalian."* Tsa'labah dan Hatib termasuk yang menghadiri perang *badar* dan menyaksikan ayat: بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Pendustaan mereka merusak pada janji dan tidak memenuhi perkara yang mereka sanggupi. Kedelapan, firman Allah ﷻ: نِفَاقًا maksudnya *sifat nifaq* apabila hal itu terdapat dalam hati, sehingga ia kufur. Sementara apabila terdapat dalam amal perbuatan maka ia maksiat. Nabi ﷺ bersabda: *"Empat hal, barang siapa memiliki empat karakter tersebut maka ia munafik murni dan orang yang memiliki pekerti darinya maka ia memiliki pekerti kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yaitu: apabila dipercaya mengkhianati, apabila berbicara berdusta, bila berjanji menciderai dan bila berselisih maka ia memusuhi."* HR. al-Bukhari. Sungguh telah berlalu dalam surat al-Baqarah *isytiqaq* kalimat ini, sehingga tidak

ada arti untuk mengulanginya. Ulama berbeda pendapat dalam *takwil hadits* ini; sebagian berpendapat: *"Sungguh itu bagi orang yang bercerita dengan sebuah cerita yang ia tahu bahwa ia berdusta, berjanji dengan sebuah janji yang tidak ia yakini bisa memenuhinya dan mengharap amanat untuk dikhianati"*. Mereka menggantungkan dengan hadits yang lemah sanadnya. Sungguh Ali ﷺ bertemu Abu Bakar dan Umar keluar dari sisi Rasul ﷺ, dan mereka merasa berat. Lantas Ali merespon: *"Apa yang membuat kalian merasa berat?"* Mereka berkata: *"Kita mendengar dari Rasulullah ﷺ tanda-tanda munafik apabila berbicara berdusta, apabila berjanji menciderai, apabila dipercaya mengkhianati dan bila berjanji maka ia menyelisihinya."* Lalu Ali menanggapi: *"Apa kalian berdua tidak menanyakannya?"* Mereka berkata: *"Kita memberi Rasulullah ﷺ,"* lantas Ali berkata: *"Akan tetapi aku menanyakannya,"* lalu beliau menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: *"Ya Rasulallah, Abu Bakar dan Umar keluar, mereka berdua merasa berat"*, kemudian Ali menuturkan perkara yang mereka katakan. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: *"Sungguh aku menceritakan pada mereka berdua dan aku tidak meletakkannya di atas tempat yang mereka letakkan, akan tetapi orang munafik jika bercerita dan dia menceritakan dirinya sungguh dia berdusta, bila berjanji dia menceritakan dirinya sungguh dia menyelisihi dan bila dipercaya dia menceritakan dirinya sungguh dia berkhianat."* Ibn al Arabi berkata: *"Sungguh terdapat dalil yang jelas bahwa sengaja melakukan tindakan ini tidaklah kafir, akan tetapi sungguh kafir dengan keyakinan yang kembali pada kebodohan terhadap Allah dan sifat-sifat-Nya atau mendustakan pada-Nya Maha Tinggi Allah dan maha suci dari keyakinan orang-orang bodoh dan dari terpelesetnya orang-orang yang terpeleset."* Golongan ulama berkata: "Hal itu ditentukan pada orang-orang munafik di zaman Rasulullah ﷺ dan mereka menggantungkan dengan perkara yang diriwayatkan Muqatil bin Hayyan dari Said bin Jubair dari Ibn Umar dan Ibn Abbas, mereka berdua berkata: *"Aku mendatangi Rasulullah ﷺ terkait para sahabatnya, kita berkata: "Ya Rasulallah sungguh engkau berkata: tiga perkara yang dimiliki seseorang, maka ia munafik, meski ia berpuasa dan shalat, dan ia menyangka ia mukmin bila bercerita maka ia berdusta, bila berjanji maka menyelisihi dan bila dipercaya maka ia mengkhianati. Orang yang memiliki sebagian pekerti darinya maka dia sepertiga nifak. Kita menyangka sungguh kita tidak selamat darinya atau dari sebagiannya dan tidak banyak orang tidak selamat darinya."* Beliau berkata, kemudian Rasulullah tersenyum dan bersabda: *"Perkara tersebut tidak untuk kalian dan mereka, sungguh aku mengkhususkannya untuk orang-orang munafik, sebagaimana Allah mengkhususkan pada mereka dalam kitab-Nya."* Sedangkan ungkapanku: *"Bila dia bercerita maka dia berdusta, maka itu sebagaimana firman* ﷻ: *"Bila datang padamu orang-orang munafik"* (QS. al-Munafiqun: 1) al-Ayat. Apakah kalian demikian? Kita berkata:

"Tidak," Rasul bersabda: *"Tidak bagi kalian; kalian bebas darinya."* Sedangkan ungkapanku: *"Bila dia berjanji maka dia menyelisihi,"* maka itu sebagaimana Allah menurunkan ayat padaku: *"Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami." -tiga ayat- apakah kalian demikian?* Kita berkata tidak, demi Allah jika kita berikrar kepada Allah terhadap sesuatu atau kita dengannya. Rasul bersabda: *"Tidak bagi kalian, kalian bebas darinya."* Sedangkan ungkapanku: *"Apabila dia dipercaya maka dia mengkhianati,"* maka itu sebagaimana Allah menurunkan ayat padaku: *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung."* (QS. al-Ahzab: 72). al-Ayat. Setiap manusia percaya pada agamanya; orang mukmin mandi *janabat* saat sendiri dan bersama orang. Sementara orang munafik tidak mengerjakannya kecuali ketika bersama orang lain; apakah kalian demikian? Kita berkata: *tidak*, Nabi bersabda: *"Tidak bagi kalian, kalian bebas darinya."* Mayoritas tabi'in dan para imam menetapi riwayat ini. Golongan ulama berkata: *"Ini bagi orang yang pada umumnya berlaku seperti ini."* Jelas dari mazhab al-Bukhari dan ahli ilmu: sungguh orang yang memiliki sifat tercela ini dikatakan munafik sampai hari Kiamat. Ibn al-Arabi berkata: *"Menurutku, sungguh bila seseorang sering melakukan maksiat maka dia tidak dihukumi kafir selama tidak mempengaruhi terhadap keyakinan."*

g. *Tafsir Ibn Katsir,* I/565:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٠٩) يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ الْمُصَدِّقِينَ بِرَسُولِهِ: أَنْ يَأْخُذُوا بِجَمِيعِ عُرَى الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ، وَالْعَمَلِ بِجَمِيعِ أَوَامِرِهِ، وَتَرْكِ جَمِيعِ زَوَاجِرِهِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الْعَوْفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَالضَّحَّاكِ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ وَابْنِ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ يَعْنِي: الْإِسْلَامَ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ يَعْنِي: الطَّاعَةَ. وَقَالَ قَتَادَةُ أَيْضًا: الْمُوَادَعَةُ. وَقَوْلُهُ: كَافَّةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَعِكْرِمَةُ وَالرَّبِيعُ وَالسُّدِّيُّ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ: جَمِيعًا، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَيِ اعْمَلُوا بِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ. وَمِنَ الْمُفَسِّرِينَ مَنْ يَجْعَلُ قَوْلَهُ: كَافَّةً حَالًا مِنَ الدَّاخِلِينَ، أَيْ: ادْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ كُلُّكُمْ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ أَنَّهُمْ

أُمِرُوْا [كُلُّهُمْ] أَنْ يَعْمَلُوْا بِجَمِيْعِ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ كَثِيْرَةٌ جِدًّا مَا اسْتَطَاعُوْا مِنْهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ يَمَانٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً–كَذَا قَرَأَهَا بِالنَّصْبِ- يَعْنِيْ مُؤْمِنِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ الْإِيْمَانِ بِاللهِ مُسْتَمْسِكِيْنَ بِبَعْضِ أَمْرِ التَّوْرَاةِ وَالشَّرَائِعِ الَّتِيْ أُنْزِلَتْ فِيْهِمْ، فَقَالَ اللهُ: ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً يَقُوْلُ: ادْخُلُوْا فِيْ شَرَائِعِ دِيْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا تَدَعُوْا مِنْهَا شَيْئًا وَحَسْبُكُمْ بِالْإِيْمَانِ بِالتَّوْرَاةِ وَمَا فِيْهَا.

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang padamu bukti-bukti kebenaran, Maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. al-Baqarah: 208-209). Allah berfirman memerintah hamba-hamba-Nya yang beriman pada-Nya yang membenarkan Rasul-Nya: Mereka mengambil semua intisari Islam dan syariat-syariatnya, mengamalkan semua perintah-perintahnya, dan meninggalkan semua larangan-larangannya selama mereka mampu. Al-Aufi berkata: Diriwayatkan dari Ibn Abbas, Mujahid, Thawus, ad-Dlahak, Ikrimah, Qatadah, as-Sudi dan Ibn Zaid dalam firman-Nya: ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ maksudnya Islam. Ad-Dlahak berkata: diriwayatkan dari Ibn Abbas, Abu Aliyah, dan ar-Rabi' bin Anas: ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ yakni: taat. Qatadah juga berkata: kesabaran. Firman-Nya: كَافَّةً Ibn Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, ar-Rabi', as-Sudi, Muqatil bin Hayyan, Qatadah, dan ad-Dlahak semuanya berkata, dan Mujahid berkata: maksudnya kerjakanlah semua amal-amal dan bentuk-bentuk kebaikan. Diantara *mufassirin* ada yang menjadikan firman-Nya: كَافَّةً sebagai حَالٌ dari الدَّاخِلِيْنَ, maksudnya masuklah kalian semua dalam Islam. Menurut pendapat shahih yang awal, yaitu mereka semua diperintahkan mengerjakan semua cabang-cabang iman, dan syariat-syariat Islam yang sangat banyak selama mereka mampu. Ibn Abi Hatim berkata: Ali bin al-Husain mengabarkan padaku, Ahmad bin As-Shabah mengabarkan padaku, al-Haitsam bin Yaman mengabarkan padaku, Ismail bin Zakariya menceritakan padaku, Muhammad bin Aun menceritakan padaku, dari Ikrimah dari Ibn Abbas: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً –begitu juga membacanya dengan *nashab*-

maksudnya mukminin *ahli kitab*, mereka di samping beriman pada Allah juga berpedoman pada sebagian perintah Taurat dan syariat-syariat yang diturunkan pada mereka.
Maka Allah berfirman: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً *(Masuklah kalian semua dalam syariat-syariat agama Muhammad ﷺ dan janganlah kalian meninggalkannya dan cukup bagi kalian beriman pada Taurat beserta isinya.)*

h. *Tafsir ath-Thabari*, IV/251:

الْقَوْلُ فِيْ تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً قَالَ أَبُوْ جَعْفَرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيْلِ فِيْ مَعْنَى السِّلْمِ فِيْ هَذَا الْمَوْضِعِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ: الْإِسْلَامُ. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ عِيْسَى عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: "ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ"، قَالَ: ادْخُلُوْا فِي الْإِسْلَامِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: "ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ"، قَالَ: ادْخُلُوْا فِي الْإِسْلَامِ. حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً"، قَالَ: السِّلْمُ: الْإِسْلَامُ. حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: "ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ"، يَقُوْلُ: فِي الْإِسْلَامِ. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ: ادْخُلُوْا فِي الْإِسْلَامِ. حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِيْ قَوْلِهِ: "ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ". قَالَ: السِّلْمُ: الْإِسْلَامُ. حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَرَجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ الْفَضْلَ بْنَ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُوْلُ: "ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ": فِي الْإِسْلَامِ. وَقَالَ آخَرُوْنَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: ادْخُلُوْا فِي الطَّاعَةِ. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الرَّبِيْعِ: "ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ"، يَقُوْلُ: ادْخُلُوْا فِي الطَّاعَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِيْ قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُرَّاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ: "ادْخُلُوْا فِي السَّلْمِ" بِفَتْحِ السِّيْنِ، وَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُرَّاءِ الْكُوْفِيِّيْنَ بِكَسْرِ السِّيْنِ. فَأَمَّا الَّذِيْنَ فَتَحُوا "السِّيْنَ" مِنَ "السَّلْمِ"، فَإِنَّهُمْ وَجَّهُوْا تَأْوِيْلَهَا إِلَى الْمُسَالَمَةِ، بِمَعْنَى: ادْخُلُوْا فِي الصُّلْحِ

وَالْمُسَاوَمَةِ وَتَرْكِ الْحَرْبِ وَإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ. وَأَمَّا الَّذِينَ قَرَءُوا ذَلِكَ بِالْكَسْرِ مِنَ "السِّينِ"
فَإِنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي تَأْوِيلِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ يُوَجِّهُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، بِمَعْنَى ادْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ
كَافَّةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَجِّهُهُ إِلَى الصُّلْحِ، بِمَعْنَى: ادْخُلُوا فِي الصُّلْحِ، وَيَسْتَشْهِدُ عَلَى أَنَّ
"السِّينَ" تُكْسَرُ، وَهِيَ بِمَعْنَى الصُّلْحِ بِقَوْلِ زُهَيْرِ ابْنِ أَبِي سُلْمَى: وَقَدْ قُلْتُمَا إِنْ نُدْرِكِ
السِّلْمَ وَاسِعًا بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الْأَمْرِ نَسْلَمِ وَأَوْلَى التَّأْوِيلَاتِ بِقَوْلِهِ: "ادْخُلُوا فِي
السِّلْمِ"، قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَاهُ: ادْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ كَافَّةً. وَأَمَّا الَّذِي هُوَ أَوْلَى الْقِرَاءَتَيْنِ
بِالصَّوَابِ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ بِكَسْرِ "السِّينِ" لِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُرِئَ كَذَلِكَ -
وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الصُّلْحِ- فَإِنَّ مَعْنَى الْإِسْلَامِ: وَدَوَامَ الْأَمْرِ الصَّالِحِ عِنْدَ
الْعَرَبِ، أَغْلَبُ عَلَيْهِ مِنَ الصُّلْحِ وَالْمُسَالَمَةِ، وَيُنْشِدُ بَيْتَ أَخِي كِنْدَةَ: دَعَوْتُ عَشِيرَتِي
لِلسِّلْمِ لَمَّا رَأَيْتُهُمْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَا بِكَسْرِ السِّينِ، بِمَعْنَى: دَعَوْتُهُمْ لِلْإِسْلَامِ لَمَّا ارْتَدُّوا،
وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ ارْتَدَّتْ كِنْدَةُ مَعَ الْأَشْعَثِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقَدْ كَانَ أَبُو
عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ يَقْرَأُ سَائِرَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ "السَّلْمِ" بِالْفَتْحِ سِوَى هَذِهِ الَّتِي فِي
سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَخُصُّهَا بِكَسْرِ سِينِهَا تَوْجِيهًا مِنْهُ لِمَعْنَاهَا إِلَى الْإِسْلَامِ دُونَ مَا
سِوَاهَا. وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا مَا اخْتَرْنَا مِنَ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ: "ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ" وَصَرَفْنَا مَعْنَاهُ
إِلَى الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْآيَةَ مُخَاطَبٌ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَلَنْ يَعْدُوَ الْخِطَابُ إِذْ كَانَ خِطَابًا
لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ خِطَابًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ الْمُصَدِّقِينَ بِهِ وَبِمَا
جَاءَ بِهِ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى أَنْ يُقَالَ لَهُمْ وَهُمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ: "ادْخُلُوا
فِي صُلْحِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُسَالَمَتِهِمْ"، لِأَنَّ الْمُسَالَمَةَ وَالْمُصَالَحَةَ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهَا مَنْ كَانَ حَرْبًا
بِتَرْكِ الْحَرْبِ، فَأَمَّا الْمُوَالِي فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: "صَالِحْ فُلَانًا"، وَلَا حَرْبَ بَيْنَهُمَا وَلَا
عَدَاوَةَ. أَوْ يَكُونَ خِطَابًا لِأَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُصَدِّقِينَ
بِهِمْ، وَبِمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْمُنْكِرِينَ مُحَمَّدًا وَنُبُوَّتَهُ، فَقِيلَ لَهُمْ: "ادْخُلُوا فِي
السِّلْمِ"، يَعْنِي بِهِ الْإِسْلَامَ، لَا الصُّلْحَ. لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ عِبَادَهُ بِالْإِيمَانِ بِهِ
وَبِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ وَإِلَى الَّذِي دَعَاهُمْ دُونَ الْمُسَالَمَةِ وَالْمُصَالَحَةِ.

Ungkapan dalam *takwil* firman Allah ﷻ: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan."* Abu Ja'far berkata: *ahli takwil* berselisih pendapat mengenai makna السِّلْمِ di tempat ini. Sebagian mereka berkata: *makna*nya: Islam. Ulama yang berkata demikian menyebut: Muhammad bin Umar menceritakan padaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan padaku, dari Isa dari Ibn Abi Najih dari Mujahid terkait firman Allah ﷻ: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ, beliau berkata: masuklah kalian semua dalam Islam. Hasan bin Yahya menceritakan padaku, beliau berkata: Abdur-Razaq mengabarkan padaku, beliau berkata: Ma'mar mengabarkan padaku dari Qatadah, firman-Nya: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ: berkata: *Masuklah kalian semua dalam Islam.* Muhammad bin Sa'd menceritakan padaku, beliau berkata: *Abi* menceritakan padaku, beliau berkata: *Ammi* menceritakan padaku, beliau berkata: Abi menceritakan padaku dari ayahnya dari Ibn Abbas: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ, beliau berkata: السِّلْمِ *ialah Islam.* Musa bin Harun menceritakan padaku, beliau berkata: Amr mengabarkan padaku, beliau berkata: *Asbath* menceritakan padaku, dari as-Sadi: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ, ia berkata: dalam Islam. Abu Karib berkata padaku, ia berkata: Waki' berkata padaku dari an-Nadlr bin Arabi dari Mujahid: masuklah kalian dalam Islam. Yunus menceritakan padaku, ia berkata: Ibn Wahb mengabarkan padaku, ia berkata: Ibn Zaid berkata mengenai firman-Nya: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ Ia berkata: السِّلْمِ *adalah Islam.* Saya menceritakan dari Husain bin Faraj, ia berkata: saya mendengar Aba Muadz al-Fadl bin Khalid berkata: Ubaid bin Sulaiman berkata padaku, ia berkata: saya mendengar ad-Dlahak berkata: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ maksudnya *Islam.* Yang lain berkata: bahkan makna itu: *masuklah kalian semua dalam ketaatan.* Ulama yang berkata demikian menyebut: saya menceritakan dari Ammar, ia berkata: Ibn Abi Ja'far menceritakan padaku dari ayahnya dari ar-Rabi': ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ, ia berkata: *masuklah kalian semua dalam ketaatan.* Sungguh para *qari* berbeda pendapat dalam bacaan itu, mayoritas *qurra'* ahli Hijaz membaca: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ, dengan membaca *fathah sin*, dan mayoritas *qurra'* Kufah membacanya dengan *kasrah sin.* Adapun ulama yang membaca *fathah sin* السَّلْمِ, mereka menghadapkan *takwil*nya pada *musalamah*, dalam arti masuklah kalian semua dalam perdamaian, perundingan, meninggalkan peperangan dan memberikan pajak. Sedangkan ulama yang membacanya dengan *kasrah sin* mereka berselisih pendapat terkait *takwil*nya. Diantara mereka ada yang menghadapkannya pada Islam, dalam arti masuklah kalian semua dalam Islam dengan cara menyeluruh, dan di antara mereka ada yang menghadapkannya pada perdamaian, dalam arti masuklah kalian semua dalam perdamaian, dan ber*isytisyhad* bahwa sungguh *sin* itu dibaca *kasrah*,

yaitu dalam arti perdamaian dengan ungkapan Zuhair Ibn Abi Salma: sungguh kalian berdua telah berkata: *jika kita menemukan silmi itu luas dengan harta dan amar makruf maka kita menerima*. Sebaik-baik takwil firman-Nya: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ialah ungkapan ulama yang berkata: maknanya: *Masuklah kalian semua dalam Islam secara menyeluruh*. Sedangkan sebaik-baik kebenaran dua bacaan itu, maka bacaan ulama yang membaca dengan *kasrah sin*, karena sungguh apabila dibaca demikian *-meskipun sungguh mungkin bermakna perdamaian-* maka sungguh makna Islam dan keabadian perintah baik menurut Arab, itu lebih umum baginya daripada perdamaian dan kerukunan. Saudaraku Kandah melantunkan *bait*: *"Saya meninggalkan keluargaku karena silmu, ketika saya melihat mereka berpaling membelakangiku"*; dengan membaca *kasrah sin*, dalam arti *"saya meninggalkan mereka karena Islam ketika mereka murtad."* Demikian ini sejak Kandah murtad bersama Asyats setelah Rasulillah ﷺ wafat. Abu Amr bin Alla' membaca ayat-ayat lain dalam al-Qur'an dari penyebutan السِّلْم dengan membaca *fathah* selain ayat ini yang ada dalam surat al-Baqarah, ini dikhususkan dengan mambaca *kasrah sin*nya karena menghadapkan maknanya pada Islam, tidak lainnya. Sungguh kita memilih perkara yang kita pilih dari *takwil* dalam firman-Nya: ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ, kita mengarahkan maknanya pada Islam, karena ayat tersebut meng*khithabi* mukminin, tidak semata-mata *khitab* karena meng*khitabi* mukminin ditinjau dari salah satu perkara: Adakala meng*khitabi* mukminin yang membenarkan Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Jika seperti demikian, maka tidak ada makna bila dikatakan pada mereka, sementara mereka itu *ahli iman: masuklah kalian dalam perdamaian mukminin dan kerukunan mereka*, karena kerukunan dan perdamaian itu sungguh diperintahkan bagi orang-orang yang memusuhi dengan meninggalkan permusuhan, sedangkan *mawali* maka tidak boleh dikatakan padanya: ia berdamai dengan *fulan*, sementara tidak ada peperangan di antara keduanya dan tidak ada permusuhan. Atau meng*khitabi ahli iman* pada nabi sebelum Muhammad ﷺ yang membenarkan mereka, dan ajaran yang mereka bawa dari sisi Allah, yang mengingkari Muhammad dan kenabiannya, maka dikatakan pada mereka: *Masuklah kalian semua dalam silmi*, yakni Islam, tidak perdamaian. Karena Allah ﷻ memerintahkan hamba-hambaNya untuk beriman kepada-Nya, Muhammad ﷺ dan ajaran yang dibawanya, dan hal-hal yang mereka diajak, bukan kerukunan dan perdamaian.

435. Jasa Pelayanan Lembaga Pengadilan

Deskripsi Masalah

Institusi pengadilan negara mempekerjakan aparat/karyawan yang

digaji berikut tunjangan fungsional atau struktural. Belanja operasional lembaga ditanggung oleh APBN. Tugas luhur lembaga memberikan layanan kepada masyarakat. Ironisnya dalam *amar* keputusan hakim sering memuat *"Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara subsi-dair hukuman sekian waktu"*.

Pertanyaan

a. Dalam ajaran Islam apakah mengenal istilah "biaya perkara", ataukah terdapat peluang hukum agar pihak yang dinyatakan kalah/bersalah layak dibebani biaya perkara?
b. Tepatkah bila biaya perkara merupakan kompensasi dana transportasi mendatangkan saksi, karena mereka bukan aparat pengadilan?
c. Mengapa dalam kasus salah menghukum, salah tangkap atau salah penindakan (perlakuan aparat saat penyidikan), tidak diberikan ganti rugi hingga rehabilitasi kehormatannya?

Jawaban

a. Biaya perkara pengadilan dalam Islam dikenal sebagai berikut:
   1) Biaya administrasi, termasuk kertas, penulis, dibebankan pada *bait al-mal* atau pihak yang membutuhkan (baik *mudda'i* atau *Mudda'a 'alaih*)
   2) Gaji hakim dibebankan pada *baitul Mal* atau jika tidak ada *baitul mal*, maka dibebankan pada kedua pihak yang bersengketa jika hakim faqir atau menyita pekerjaannya, dengan syarat memberitahukan sebelum menghukumi, dengan izin imam.
   3) Biaya pemanggilan tergugat, termasuk transportasi pembantu hakim dibebankan pada penggugat, kecuali pihak tergugat menolak hadir, maka biaya penjemputaan paksa ditanggung pihak tergugat jika terbukti salah.
   4) Biaya transportasi saksi dibebankan pada *masyhud lah* (jika saksinya penggugat, maka dibebankan pada pihak penggugat, jika dibebankan pada tergugat maka dibebankan pada pihak tergugat).
   5) Biaya penjara termasuk konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak yang dipenjara, jika tidak mampu maka dibebankan pada *bait al-mal*, jika tidak ada maka dibebankan pada *Mayasirul Muslimin*.
   6) Biaya penahanan dalam penyidikan dibebankan kepada pihak penuntut.
b. Terjawab otomatis oleh jawaban sub a.
c. Bila yang bersangkutan menuntut ganti rugi maka pemerintah boleh memberikan ganti rugi.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Nihayah al-Muhtaj*, VIII/251 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

(وَيَتَّخِذُ) نَدْبًا (مُزَكِّيًا) بِصِفَتِهِ الْآتِيَةِ وَأَرَادَ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ الْجِنْسَ إِذْ لَا يَكْتَفِي بِوَاحِدٍ (وَكَاتِبًا) لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ، وَلِأَنَّهُ ﷺ كَانَ لَهُ كُتَّابٌ فَوْقَ أَرْبَعِينَ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إِذَا رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا لَمْ يُنْدَبِ اتِّخَاذُهُ إِلَّا إِنْ تَعَيَّنَ كَالْقَاسِمِ وَالْمُقَوِّمِ وَالْمُتَرْجِمِ وَالْمُسْمِعِ وَالْمُزَكِّي لِئَلَّا يُغَالُوا فِي الْأُجْرَةِ، وَلِلْقَاضِي وَإِنْ وَجَدَ كِفَايَتَهُ أَخْذُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَغَيْرَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إِلَّا إِنْ تَعَيَّنَ لِلْقَضَاءِ وَوَجَدَ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ عِيَالِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ، وَمَحَلُّ جَوَازِ الْأَخْذِ لِلْمُكْتَفِي وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِالْقَضَاءِ صَالِحٌ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْقَضَاءِ، وَلَا يُرْزَقُ مِنْ خَاصِّ مَالِ الْإِمَامِ أَوِ الْآحَادِ وَأُجْرَةُ الْكَاتِبِ وَلَوْ قَاضِيًا وَثَمَنِ وَرَقِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ وَنَحْوِهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوِ احْتِيجَ لِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى مَنْ شَاءَ الْكِتَابَةَ.

(Disunahkan memungut zakat pada *muzakki*) dengan sifatnya yang akan datang. Pengarang bermaksud jenis padanya dan perkara setelahnya, karena tidak cukup satu, (dan *katib*) karena ia membutuhkannya, sebab banyak kesibukan-kesibukannya, dan karena Nabi ﷺ memiliki kitab di atas empat puluh, tempatnya apabila dia digaji dari *baitul mal*. Jika tidak, maka tidak disunahkan memungutnya kecuali jika menjadi khusus, seperti pembagi, penegak, penerjemah, pendengar dan *muzakki* supaya mereka tidak merendahkan upah. *Qadhi* meski menemukan kecukupannya ia tetap boleh mengambil kadar kecukupan *nafkah*, sandang dan lain-lain untuk dirinya dan keluarganya dari *baitul mal*, kecuali jika *qadla* menjadi tertentu baginya, dan menemukan kecukupan untuk dirinya dan keluarganya maka ia tidak boleh mengambil sesuatu dari *baitul mal*. Tempat boleh mengambil bagi orang yang bisa mencukupi dan lainnya bila tidak ditemukan orang layak yang menderma *qadla*, jika tidak maka tidak boleh; sebagaimana dijelaskan al-Mawardi dan ulama lain. Tidak boleh *akad ijarah* pada *qadla*, dan ia tidak digaji dari harta khusus imam atau individu. Upah *katib* meskipun *Qadhi*, harga kertas jurnal, arsip dan semisalnya dari *baitul mal*, jika tidak ada sesuatu atau dibutuhkan karena perkara yang lebih penting maka bagi orang yang ia kehendaki menulis.

b. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khathib*, V/320:

وَأُجْرَةُ الْكَاتِبِ وَلَوْ كَانَ الْكَاتِبُ الْقَاضِيَ وَثَمَنُ الْوَرَقِ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الْمَحَاضِرَ

وَالسِّجِلَّاتِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوِ احْتِيجَ إِلَيْهِ لِمَا هُوَ أَهَمُّ فَعَلَى مَنْ لَهُ الْعَمَلُ : الْمُدَّعِيْ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ذَلِكَ إِنْ شَاءَ كِتَابَةَ مَا جَرَى فِيْ خُصُوْمَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ يُعْلِمُهُ الْقَاضِيْ، أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكْتُبْ مَا جَرَى فَقَدْ يَنْسَى شَهَادَةَ الشُّهُوْدِ وَحُكْمَ نَفْسِهِ اهـ.

Upah *katib* meskipun ia seorang *Qadhi*, harga kertas jurnal, arsip dan semisalnya diambilkan dari *baitul mal*. Jika di *baitul mal* tidak ada suatu harta atau dibutuhkan karena perkara yang lebih penting, maka bagi orang yang memiliki amal: *mudda'i* dan *mudda'a alaih*, demikian itu bila ia hendak menulis perkara yang berlaku dalam sengketa. Bila tidak, maka tidak dipaksa mengerjakannya akan tetapi *Qadhi* mengetahuinya, sungguh bila ia tidak menulis perkara yang berlaku maka ia akan lupa kesaksian para saksi dan hukum dirinya.

c. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 1/581:

(مَسْأَلَةُ ي) أَرْزَاقُ الْقُضَاةِ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الْقَائِمِيْنَ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرَ كِفَايَتِهِ اللَّائِقَةِ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ يَدٌ عَادِيَةٌ أُلْزِمَ بِذَلِكَ مَيَاسِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُمْ مَنْ عِنْدَهُ زِيَادَةٌ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ، وَلَا يَجُوْزُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، أَوْ مِمَّنْ يُحَلِّفُهُ أَوْ يَعْقِدُ لَهُ النِّكَاحَ، قَالَ السُّبْكِيُّ: فَمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْأَخْذِ شَاذٌّ مَرْدُوْدٌ مُتَأَوَّلٌ بِصُوْرَةٍ نَادِرَةٍ بِشُرُوْطٍ تِسْعَةٍ، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِالشَّاذِّ.

(Masalah dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya) Gaji *Qadhi* sebagaimana selain mereka yaitu para pejabat yang mengurus kepentingan umum diambilkan dari *baitul mal*. Masing-masing dari mereka diberikan kadar kecukupan yang layak tanpa me*mubadzir*kan. Apabila tidak ada atau dikuasai tangan adat maka ditetapkan pada orang kaya muslimin, mereka adalah orang yang memiliki kecukupan lebih selama setahun. Tidak boleh memungut sesuatu dari para *mutada'i*, orang yang menyumpah atau mengakadkan nikah padanya. As-Subki berkata: Persoalan yang terjadi pada sebagian mereka yakni pungutan itu *syadz* yang ditolak dan di*takwil* dengan bentuk yang langka dengan sembilan syarat, dan diketahui bahwa tidak boleh mengamalkan sesuatu yang *syadz*.

d. *'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti*, II:

وَأَمَّا أَخْذُ الْقَاضِي الْأُجْرَةَ عَلَى الْحُكْمِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَا أَحْكُمُ حَتَّى

تَجْعَلَا لِي رِزْقًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ فَقِيْرًا وَأَنْ يَنْقَطِعَ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا عَنْ كَسْبِهِ وَأَنْ يَعْلَمَا بِهِ قَبْلَ التَّرَافُعِ وَأَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْإِمَامُ وَأَنْ يَعْجِزَ عَنْ رِزْقِهِ وَيُفْقَدَ مُتَطَوِّعًا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يَضُرَّ بِالْخُصُوْمِ وَلَا جَاوَزَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَاشْتَهَرَ قَدْرُهُ وَسَاوَى بَيْنَ الْخُصُوْمِ فِيْهِ إِنِ اسْتَوَى وَقْتُ نَظَرِهِ وَإِلَّا جَازَ التَّفَاوُتُ اهـ

Adapun *Qadhi* yang memungut upah atas suatu putusan, simpulannya sungguh ia berkata: "*Saya tidak akan menghukumi hingga kalian berdua menyelipkan upah*"; dengan syarat ia *fakir*, dan akan memutus hukum diantaranya dari usahanya, mereka berdua mengetahuinya sebelum laporan, dan mereka berdua bersama, imam mengizinkan padanya, tidak mampu menggajinya, tidak ada orang yang menderma *qadla*, tidak membahayakan permusuhan, tidak melewati kadar kebutuhannya, masyhur kadarnya, dan sama diantara permusuhan jika waktu melihatnya sama; jika tidak maka boleh selisih.

e. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, X/130:

وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ حُكْمُ أَخْذِ الْقَاضِي الْأُجْرَةَ عَلَى الْعَقْدِ وَأَمَّا أَخْذُهُ عَلَى الْحُكْمِ فَفِيْهِ تَفْصِيْلٌ حَاصِلُهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُوْلَ لِلْخَصْمَيْنِ لَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا حَتَّى تَجْعَلَا لِي جُعْلًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ فَقِيْرًا أَوْ أَنْ يَنْقَطِعَ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمَا عَنْ كَسْبِهِ وَأَنْ يَعْلَمَا بِهِ قَبْلَ التَّرَافُعِ وَأَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ أَوْ يَعْجِزَ عَنْ رِزْقِهِ أَو يُفْقَدَ مُتَطَوِّعٌ بِالْقَضَاءِ ولم يَضُرَّ بِالْخُصُوْمِ وَلَا جَاوَزَ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَاشْتُهِرَ قَدْرُهُ وَسَاوَى بَيْنَ الْخُصُوْمِ فِيْهِ إِنِ اسْتَوَى وَقْتُ نَظَرِهِ وَإِلَّا جَازَ التَّفَاوُتُ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

Dari ketetapan lalu diketahui bahwa hukum *Qadhi* memungut upah atas suatu akad; Adapun hukum *Qadhi* memungut upah atas suatu putusan maka terdapat pen*tafsilan*. Simpulannya, sungguh *Qadhi* berkata kepada dua orang yang bersengketa: "*Saya tidak akan memutuskan perkara diantara kalian berdua hingga kalian memberikanku upah*"; dengan syarat ia *fakir*, hukum akan memutus upah dari usahanya, mereka berdua mengetahuinya sebelum melaporkan, laporan mereka berdua bersama, imam mengizinkan padanya, lemah meninggalkan gaji, tidak ada orang yang menyumbang *qadla*, tidak membahayakan permusuhan, tidak melewati kebutuhannya, *masyhur* kadarnya, dan sama diantara permusuhan jika waktu melihatnya sama; jika tidak maka boleh selisih. *Wallahu a'lam.*

f. *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hawasyai asy-Syirwani wa al-'Ubbadi*, X/188-191 [Mesir: at-Tijariyah al-Kubra]:

(وَإِذَا اسْتُعْدِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (عَلَى حَاضِرٍ بِالْبَلَدِ) وَلَوْ يَهُودِيًّا يَوْمَ سَبْتِهِ أَهْلٍ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى وَجَوَابِهَا أَيْ: طُلِبَ مِنْهُ إِحْضَارُهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ وَلَا كَانَ أَجِيرَ عَيْنٍ وَلَا نَحْوَ مُعَاهِدٍ وَلَا أَرَادَ التَّوْكِيلَ (أَحْضَرَهُ) وُجُوبًا وَإِنْ أَحَالَتِ الْعَادَةُ مَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ كَوَزِيرٍ ادَّعَى عَلَيْهِ وَضِيعٌ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ سَائِسًا أَوْ نَازِحَ قَذَرٍ وَإِنِ اخْتَارَ جَمْعٌ خِلَافَهُ وَمِمَّا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا يَأْتِي مِنْ تَمَكُّنِهِ مِنَ التَّوْكِيلِ أَمَّا إِذَا عَلِمَ كَذِبَهُ فَلَا يُحْضِرُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا أَجِيرُ عَيْنٍ وَحُضُورُهُ يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يُحْضِرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ التَّعْطِيلِ الْمُضِرِّ بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَذَا مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ كَمُعَاهِدٍ عَلَى مِثْلِهِ وَكَذَا مَنْ وَكَّلَ فَيَقْبَلُ وَكِيلَهُ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ ذَكَرَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَالَّذِي يَتَّجِهُ قَبُولُ وَكِيلِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ ثُمَّ رَأَيْتُ شَارِحًا اعْتَرَضَهُ بِتَجْوِيزِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ التَّوْكِيلَ مُطْلَقًا وَيَلْزَمُهُ إِذَا لَزِمَ مُخَدَّرَةً يَمِينٌ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا مَنْ يُحَلِّفُهَا كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُ الْجَوَاهِرِ عَنِ الصَّيْمَرِيِّ بِسَنِّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ (بِدَفْعِ خَتْمٍ طِينٍ رَطْبٍ أَوْ غَيْرِهِ) مَكْتُوبٍ فِيهِ أَجِبِ الْقَاضِيَ فُلَانًا وَكَانَ ذَلِكَ مُعْتَادًا فَهُجِرَ وَاعْتِيدَ الْكِتَابَةُ فِي الْوَرَقِ قِيلَ: وَهُوَ أَوْلَى (أَوْ بِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ) وَهُوَ الْعَوْنُ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالرَّسُولِ وَلَمْ يَرْتَضِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ التَّخْيِيرَ فَقَالَ : يُرْسِلُ الْخَتْمَ أَوَّلًا فَإِنِ امْتَنَعَ فَالْعَوْنُ وَأَقَرَّهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِأَنَّ الطَّالِبَ قَدْ يَتَضَرَّرُ بِأَخْذِ أُجْرَتِهِ مِنْهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ التَّرْتِيبَ الَّذِي جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلطَّالِبِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا عَمِلَ بِهِ لَا يَزِنُ الطَّالِبُ أُجْرَةً مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَخَيَّرَ فَإِنَّهُ قَدْ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْعَوْنَ أَوَّلًا فَيَأْخُذُ أُجْرَتَهُ مِنَ الطَّالِبِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ لَهُ الْخَتْمَ أَوَّلًا جَاءَ وَتَوَفَّرَتْ عَلَى الطَّالِبِ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا لِلْبُلْقِينِيِّ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِأَنَّ أُجْرَةَ الْعَوْنِ عَلَى الطَّالِبِ أَرْسَلَ الْقَاضِي الْعَوْنَ أَوَّلًا أَوْ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنَ الْحُضُورِ بِالْخَتْمِ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ هَذَا أَنَّهُ يَقُولُ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الطَّالِبِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا بِالتَّخْيِيرِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي الْعَوْنَ أَوَّلًا أَمْ بِالتَّرْتِيبِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ الْقَاضِي بِأَنْ أَرْسَلَهُ أَوَّلًا وَفِيهِ مَا فِيهِ وَبِالْأَوْلَى إِذَا عَمِلَ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ إِلَّا بَعْدَ

الْامْتِنَاعِ مِنَ الْخَصْمِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْإِطْلَاقَ إِطْلَاقُهُمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُلَازِمِ عَلَى الطَّالِبِ وَهُوَ الْمُدَّعِي بِخِلَافِ أُجْرَةِ الْحَبْسِ وَاعْتَمَدَ أَبُو زُرْعَةَ مَا أَطْلَقَهُ شَيْخُهُ أَوَّلًا فَقَالَ: الْأُجْرَةُ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا وَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ مَعَهُ إِلَّا بِرَسُولٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِمَجْلِسِ الشَّرْعِ إِلَّا بِطَلَبٍ أَيْ: مِنَ الْقَاضِي وَقَدْ لَا يُوَافِقُ الطَّالِبَ عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَقًّا وَيَرَاهُ مُبْطِلًا. اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ إِطْلَاقِ شَيْخِهِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ طَلَبٌ مِنَ الْقَاضِي، وَإِلَّا لَزِمَتِ الْمَطْلُوبَ لِتَعَدِّيهِ بِامْتِنَاعِهِ بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي لَهُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لِلْقَاضِي، أَوْ لَزِمَهُ إِرْسَالُ عَوْنِ الْحَاكِمِ، وَعَزَّرَهُ إِنْ رَآهُ دُونَ مَا أَطْلَقَهُ ثَانِيًا فَجَعَلَ أُجْرَةَ الْمُلَازِمِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَدِينِ قَالَ : لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ الْوَفَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَلَا يَلْزَمُ الدَّائِنَ مُلَازَمَتُهُ بِنَفْسِهِ. اهـ وَبِتَأَمُّلِ كَلَامِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأُجْرَتَيْنِ أُجْرَةَ الْعَوْنِ، وَأُجْرَةَ الْمُلَازِمِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الِامْتِنَاعُ بَعْدَ طَلَبِ الْحَاكِمِ لَزِمَتِ الْمَطْلُوبَ ، وَإِلَّا فَالطَّالِبَ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ : مَعَ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ يَسَارِهِ ، وَالَّذِي يَتَّجِهُ التَّغْرِيمُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ إِعْسَارِهِ ، وَالْكَلَامُ فِي عَوْنٍ مَنْ لَيْسَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا (تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَةَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُضُورُ مَجْلِسِ الْقَاضِي إِلَّا بِطَلَبِهِ دُونَ طَلَبِ الْخَصْمِ هُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ كَالْمَرَاوِزَةِ قَالُوا : ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِنَّمَا هُوَ أَدَاءُ الْحَقِّ إِنْ صَدَقَ ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : بَلْ يَجِبُ ، وَلَوْ بِطَلَبِ الْخَصْمِ ، وَجَمَعَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا قَالَ : لِي عَلَيْكَ كَذَا فَاحْضُرْ مَعِي ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إِذَا قَالَ بَيْنِي ، وَبَيْنَكَ خُصُومَةٌ فَاحْضُرْ مَعِي ، وَلَهُ ، وَجْهٌ ، وَمَرَّ أَنَّهُ مَتَى ، وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ بِنَفْسِهِ (فَإِنِ امْتَنَعَ) مِنَ الْحُضُورِ بِنَفْسِهِ ، أَوْ وَكِيلُهُ مِنْ مَحَلٍّ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ مِنْهُ (بِلَا عُذْرٍ) مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ ، وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَلَوْ بِقَوْلِ عَوْنٍ ثِقَةٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَغَيْرُهُ (أَحْضَرَهُ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ) ، وَأُجْرَتُهُمْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ (وَعَزَّرَهُ) إِنْ رَأَى ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ.

(Apabila dipersiapkan) dengan *mabni maf'ul* (pada orang yang hadir di negara) meski Yahudi pada hari Sabtunya, seorang ahli agar mendengar dakwa dan jawabannya, maksudnya menuntutnya agar menghadirkannya, sementara ia tidak mengetahui dustanya, ia bukan memburuhkan dirinya, bukan semisal *mu'ahad* dan ia tidak menghendaki mewakilkan, (maka

harus menghadirkannya), maksudnya wajib menghadirkan meskipun adat memustahilkan perkara yang didakwakannya kepadanya, seperti menteri yang didakwa oleh orang rendah bahwa ia menyewanya sebagai perawat kudanya atau pembersih kotoran, meskipun segolongan ulama memilih pendapat yang berbeda dengannya. Di antara alasan yang dimusykilkan kepada mereka ialah penjelasan yang akan datang yaitu memungkinkannya ia mewakilkan. Adapun apabila *Qadhi* mengetahui dustanya maka tidak perlu menghadirkannya, sebagaimana al-Mawardi dan ulama lain menyebutkan. Begitu juga orang yang memburuhkan dirinya, sementara kehadirannya merugikan hak penyewa, maka *Qadhi* tidak boleh menghadirkannya sehingga masa persewaan habis, seperti disebutkan oleh as-Subki dan selainnya. Sangat jelas batasan yang dapat merugikan penyewa yaitu suatu waktu yang bisa membandingi upah, meskipun sedikit. Begitu juga kasus hukum di antara keduanya tidak lazim baginya seperti orang *mu'ahad* dengan sesamanya, dan kasus orang yang mewakilkan, lalu diterima wakilnya, jika ia termasuk orang yang memiliki *hai'ah*, sebagaimana kedua kasus ini disebutkan al-Bulqini. Yang kuat ialah menerima wakilnya meskipun dari orang yang tidak memiliki *hai'ah*. Kemudian aku melihat *Syarih* menentangnya dengan kebolehan mewakilkan dari Ibn Abi ad-Dam secara mutlak. Dan wajib bagi *Qadhi* ketika pasti ada orang yang memalsukan sumpah, mengirim orang yang menyumpahnya, sebagaimana penjelasan yang akan datang. Pendapat *al-Jawahir* dari as-Shaimari mengenai kesunahannya tertolak. (*Dengan menyerahkan akhir tanah basah atau lainnya*) yang ditulis: *"Saya memenuhi Qadhi pada fulan dimana hal itu dibiasakan lalu didiamkan dan dibiasakan menulis di kertas"*. Menurut satu pendapat: *"Itu lebih utama (atau perkara yang diruntutkan karena hal itu) yaitu bantuan yang sekarang disebut sebagai utusan"*. As-Syaikh Abu Hamid tidak rela memberi pilihan, ia berkata: *"Pertama mengirim khatam"*; jika tercegah maka bantuan, dimana keduanya menetapkannya. Al-Bulqini berkata: *"Di sini ada maslahat karena penuntut terkadang merasa bahaya dengan memungut upah darinya."* Artinya sungguh tertib yang mereka berdua berlakukan dalam *ar-Raudlah* dan aslinya terdapat *maslahat* bagi penuntut, karena *Qadhi* apabila melakukannya tidak menimbang upah penuntut dari permulaan menimbang. Lain persoalannya apabila ia memilih, sungguh terkadang ia mengirim bantuan padanya atau tidak, lalu memungut upahnya dari penuntut serta kemungkinan sungguh ia jika mengirim *khatam* padanya pertama kali. Dengan demikian, ia datang dan upah sempurna pada penuntut, dan sungguh ini dihadapkan pada al-Bulqini jika ia berkata: *"Sungguh upah bantuan dibebankan pada penuntut," al-Qadhi* mengutus bantuan pertama atau setelah mencegah menghadirkan *khatam*. Dengan

demikian, secara *zhahir kalam* al-Bulqini: *"Sungguh ia berkata bahwa upah itu bagi penuntut, baik apakah kita berpendapat memberikan pilihan dan al-Qadhi memilih bantuan atau tidak, atau secara tertib dan al-Qadhi tidak mengerjakannya; dengan gambaran pertama kali ia mengirimnya dan di dalamnya berisi sesuatu dan lebih utama apabila ia mengerjakannya; dengan gambaran ia tidak menghadirinya kecuali setelah mencegah dari mengakhiri"*. Kemutlakan mereka menguatkan kemutlakan ini, sungguh upah yang menetapi pada penuntut yaitu *muddda'i*, berbeda dengan upah tahanan. Abu Zur'ah berpedoman pada perkara yang dimutlakkan oleh gurunya pertama kali, ia berkata: *"Upah itu bagi penuntut secara mutlak meskipun ia mencegah menghadiri bersamanya kecuali dengan utusan, karena sungguh ia tidak wajib menghadiri pada majlis syara' kecuali dengan tuntutan, maksudnya dari al-Qadhi."* Terkadang ia tidak sesuai dengan penuntut bahwa sungguh ia memiliki hak terhadapnya dan ia melihatnya membatalkan. Simpulan; *qayyid* kemutlakan gurunya dalam persoalan apabila ia tidak menuntut pada *al-Qadhi*. Jika tidak, maka wajib bagi orang yang dituntut karena ia gegabah dengan mencegahnya setelah tuntutan *al-Qadhi* padanya. Dari sini maka boleh bagi *al-Qadhi*, atau wajib baginya mengutus bantuan hakim, dan men*ta'zir*nya apabila ia melihat, bukan persoalan yang ia mutlakkan kedua kali, lalu menjadikan upah orang yang menetapi izin hakim pada orang yang dihutangi, beliau berkata: *"Karena ia gegabah dengan mengakhirkan membayar ketika mampu, dan tidak wajib bagi kreditor menetapinya sendiri"*. Dengan mengkaji *kalam*nya diketahui dua upah itu adalah upah bantuan dan upah menetapi hukum dimana keduanya satu; yaitu sungguh jika adanya larangan setelah tuntutan hakim maka wajib bagi orang yang dituntut. Apabila tidak, maka bagi penuntut. Lanjutan ungkapan pengarang: "*Serta mampu*" sungguh ia harus dalam kondisi mudah. Perkara yang diungkapkan dengan kata "*ma'a*" adalah tidak dalam kondisi sulit. *Kalam* ini dalam membantu orang yang tidak punya gaji tetap dari *baitul mal*. Jika tidak, maka tidak ada bagian untuknya pada salah satu dari keduanya. (Peringatan) Keterangan yang disebutkan Abu Zar'ah bahwa sungguh tidak wajib baginya menghadiri *majlis Qadhi* kecuali bila dituntut. Bukan tuntutan permusuhan; sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh Imam al-Haramain seperti ulama kota Marwaz. Mereka berkata: *"Karena sungguh kewajibannya adalah sekedar mendatangi hak jika benar"*. Ulama Irak berkata: *"Bahkan wajib, meskipun menuntut musuh."* Ibn Abi ad-Dam mengumpulkan dengan mengarahkan yang pertama pada perkara bila ia berkata: *"Kamu memiliki tanggungan sesuatu padaku, maka penuhilah bersamaku."* Kedua pada persoalan bila ia berkata: *"Diantara aku dan kamu ada perseteruan, maka datangilah padaku."* Dan ini memiliki satu *wajah;* Dan telah dijelaskan bahwa ketika ia mewakilkan

maka tidak wajib baginya menghadiri sendiri. (Jika ia enggan) hadir sendiri atau wakilnya dari tempat yang harus dipenuhi (tanpa *udzur*) dari *udzur-udzur* Jum'at, dan hal itu tetap di sampingnya, meskipun dengan ucapan pendukung terpercaya; sebagaimana kata al-Mawardi dan ulama lain (menghadirinya dengan asisten-asisten *sulthan*) dimana upah-upah mereka menjadi tanggungannya ketika itu (dan men*ta'zir*nya) jika ia melihatnya karena gegabah.

g. *Hasyiyah al-Jamal 'ala al-Minhaj*, XXIII/215:

وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَأَمَّا أُجْرَةُ الْحَبْسِ فَهِيَ عَلَى الْمَحْبُوسِ نَفْسِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر

Upah sipir adalah tanggungan *mudda'i*, sedangkan upah tahanan adalah tanggungan orang yang ditahan sendiri. Sekian dari *Syarh ar-Ramli*.

h. *Hasyiyah ash-Shawi 'ala Jami' ash-Shaghir*, IV/425:

وَحُبِسَ أَيْ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَنَفَقَتِهِ وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ وَجَدُوا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ.

Dan ditahan, maksudnya upah tahanan menjadi tanggungannya jika ia memiliki harta seperti nafkahnya. Jika tidak, maka diambilkan dari *baitul mal* jika mereka menemukan. Jika tidak, maka bagi umat muslimin.

i. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XIII/38:

وَمِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي نَصُّوا عَلَى ضَمَانِهَا تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْحُرِّ فَإِنَّ مَنْ قَهَرَ حُرًّا وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ. وَأَمَّا لَوْ حَبَسَهُ وَعَطَّلَ مَنَافِعَهُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُ ضَامِنٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ. وَأَمَّا مَنَافِعُ الْمَغْصُوبِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِهَا: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى ضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ -تَعْوِيضًا- عَمَّا فَاتَهُ سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْغَاصِبُ الْمَنَافِعَ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ -فِي الْمَشْهُورِ-: يَضْمَنُ الْغَاصِبُ غَلَّةَ مَغْصُوبٍ مُسْتَعْمَلٍ دُونَ غَيْرِ الْمُسْتَعْمَلِ وَيَضْمَنُ غَلَّةَ مَا عَطَّلَ مِنْ دَارٍ أَغْلَقَهَا وَأَرْضٍ بَوَّرَهَا وَدَابَّةٍ حَبَسَهَا.

Manfaat-manfaat yang dijelaskan ulama pada tanggungannya adalah menghilangkan manfaat orang merdeka. Sungguh orang yang memaksa kepada orang merdeka dan meluluhkannya dalam amal maka ia harus menanggung upahnya. Sedangkan jika ia menahannya dan mengosongkan

manfaat-manfaatnya maka sungguh ia harus bertanggung jawab menurut Malikiyah, dan Hanabilah; tidak bertanggung jawab menurut Syafi'iyyah, menurut *qaul* Ashah *mazhab* mereka. Sedangkan manfaat-manfaat barang yang di*ghashab* maka *fuqaha'* berlainan pendapat mengenai tanggung jawabnya. Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat: Harus menangung manfaat-manfaat barang yang di*ghashab* dan wajib baginya memberikan upah sepadan, sebagai ganti dari hal yang dilepaskan, baik peng*ghashab* memenuhi manfaat-manfaat atau tidak, karena sungguh manfaat tersebut adalah harta yang berharga. Malikiyyah berkata: Menurut *qaul masyhur*, peng*ghashab* harus menanggung hasil barang *ghashab* yang digunakan, bukan yang tidak digunakan dan juga menanggung hasil perkara yang dikosongkan dari rumah yang ia kunci, tanah yang ia binasakan dan binatang yang ia tahan.

436. HAKI (Hak Cipta Karya Ilmiah) dan Kitab Karya Ulama *Salaf*

Deskripsi Masalah

Undang-undang perlindungan Hak Cipta Karya Ilmiah (HAKI) telah berlaku UU No. 19 tahun 2002. Untuk karya Ilmiah mutakhir (kontemporer) tentu dijamin oleh UU tersebut. Masalahnya, terkait kitab-kitab karya ulama salaf rata-rata pengarangnya tidak pernah melarang siapapun untuk menggandakan atau menerbitkan. Oleh karenanya *kaifiyat* pemanfaatan karya tersebut dibenarkan sekalipun *al-tahammul wa al-adaa*'nya menempuh jalur *al-wijadah*. Di lain pihak dalam ilmu Balaghah termuat istilah *Badi' Saraqah* lantaran indikasi plagiat. QS. Ali Imran: 188 mengkritisi orang yang senang memperoleh pujian bukan dari hasil ciptaannya.

Pertanyaan

a. Adakah pengaturan (etis) terkait karya-karya ilmiah Ulama Salaf-Khalaf yang melindungi keberadaan kitab karangan mereka sesuai penegasan Syari'at?
b. Termasuk dalam transaksi apa pembelian hak cipta, hak penerbitan dan hak penyiaran serta bagaimana hukumnya?
c. Siapakah yang berhak menentukan standar harga (قيمة) dan bolehkah jika hanya diukur oleh salah satu pihak saja?

Jawaban

a. Ulama *muta'akhir* sepakat melindungi hak cipta sementara ulama salaf menghormati perlindungan terhadap hak cipta apabila sudah diundang undangkan sebagai kewajiban taat kepada *ulil amri*.
b. Aqadnya adalah *naqlul yad an nuzul anil wadlaif* (menugaskan orang

lain untuk melakukan tanggungjawabnya).

c. Mekanisme penentuan *qimah*/atau standar harga disesuaikan dengan kebiasaan dalam menilai hak cipta oleh orang-orang yang ahli tetapi bila penentuan *tsaman* atau *ujroh* ditentukan keduabelah pihak.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, I/91:

(مَسْأَلَةُ ك) يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِيْ كُلِّ مَا لَهُ فِيْهِ وِلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيْهِ وِلَايَةٌ وَهُوَ مِنَ الْحُقُوْقِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْمَنْدُوْبَةِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالْاِسْتِقْلَالُ بِصَرْفِهِ فِيْ مَصَارِفِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُوْرُ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوْهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيْهِ كَمَا قَالَهُ (م ر) وَتَرَدَّدَ فِيْهِ فِي التُّحْفَةِ، ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوْبِ فِيْ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ مُحَرَّمًا لَكِنْ ظَاهِرًا فَقَطْ، وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ أَيْضًا. وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَنْدُوْبِ وَالْمُبَاحِ بِعَقِيْدَةِ الْمَأْمُوْرِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِعَدَمِ الْاِمْتِثَالِ، وَمَعْنَى بَاطِنًا أَنَّهُ يَأْثَمُ اهـ قُلْتُ: وَقَالَ ش ق: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيْمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوْهٍ، فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَالْمَنْدُوْبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ التُّنْبَاكِ إِذَا قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّ فِيْهِ خِسَّةً بِذَوِي الْهَيْئَاتِ، وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَمَرَ نَائِبَهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِعَدَمِ شُرْبِ النَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْقَهَاوِيْ، فَخَالَفُوْهُ وَشَرِبُوْا فَهُمُ الْعُصَاةُ، وَيَحْرُمُ شُرْبُهُ الْآنَ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ، وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ وَلَوْ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْوُجُوْبُ اهـ

(Masalah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani) Wajib mengikuti setiap perintah imam yang memiliki *wilayah* seperti penyerahan *zakat* harta yang jelas. Apabila imam tidak memiliki *wilayah* yaitu hak-hak yang wajib atau disunahkan maka boleh menyerahkan padanya dan mengarahkannya sendiri ke tempat-tempatnya. bila yang diperintahkan itu *mubah*, *makruh* atau *haram* maka tidak wajib mengikuti perintahnya, seperti Muhammad ar-Ramli berkata dan *taraddud* dalam *at-Tuhfah*, lalu condong pada kewajiban di setiap perkara yang diperintahkan imam meskipun diharamkan akan tetapi secara *zhahir* saja, dan perkara lain jika ada *maslahat* umum maka wajib secara *zhahir* dan batin; jika tidak maka jelas juga. *Ibrah* dalam *sunah* dan *mubah* berkaitan dengan *akidah* yang diperintahkan. makna ungkapan ulama "secara *zhahir*" sungguh

tidak berdosa bila tidak mengikuti, dan makna "batin" ialah berdosa. Saya dan Abdullah Ibn Hijazi Ibn Ibrahim as-Syarqawi berkata: Simpulan: Sungguh wajib mematuhi perintah imam secara *zhahir* dan batin dari perintah yang tidak haram atau makruh, maka kewajiban itu menjadi *muakkad* dan kesunahan menjadi wajib; begitu pula mubah, jika ada *maslahat* seperti meninggalkan menghisap tembakau, bila kita berkata *makruh* menghisapnya, karena menghisapnya menjadikan rendah orang yang memiliki martabat. Sungguh terjadi bahwa sulthan memerintahkan *naib*nya, dengan memanggil agar manusia tidak menghisapnya di pasar-pasar dan cafe-cafe, kemudian mereka menyelisihinya dan menghisap maka mereka telah maksiat, dan sekarang haram menghisapnya karena mengikuti perintahnya. Jika imam memerintahkan sesuatu mencabutnya meski sebelum mengerjakannya maka tidak gugur kewajiban tersebut.

b. *Hawasyi asy-Syirwani wa Ibn Qasim al-'Ibadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, VIII/3:

(أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي) أَيْ وَلَوْ بِمَالٍ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَجُوزُ لِلْمُؤْثِرِ أَخْذُهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي النُّزُولِ عَنِ الْوَظَائِفِ بِعِوَضٍ وَحَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ اهـ

(Atau saya menempatkanmu di tempatku) maksudnya meskipun harta dalam bandingannya mengenai persoalan yang jelas. Seseorang yang berpengaruh boleh mengambilnya, karena mengadopsi perkara yang mereka sebutkan dalam penempatan dari tugas-tugas dengan *iwadl*; sekira terjadi seperti ini maka ia tidak boleh mencabut setelahnya karena ia menggugurkan haknya.

c. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV/386-387 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

حَقُّ التَّأْلِيفِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ:

أ- أَمَّا حَقُّ الْمُؤَلِّفِ الَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَ عِنْوَانٍ قَانُونِيٍّ جَدِيدٍ وَهُوَ الْحَقُّ الْأَدَبِيُّ فَهُوَ حَقٌّ مَصُونٌ فِي تَقْدِيرِي شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الْاِسْتِصْلَاحِ أَوِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (وَهِيَ الْأَوْصَافُ الَّتِي تُلَائِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ وَمَقَاصِدِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالْاِعْتِبَارِ أَوِ الْإِلْغَاءِ، وَيَحْصُلُ مِنْ رَبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ عَنِ النَّاسِ) فَكُلُّ عَمَلٍ فِيهِ مَصْلَحَةٌ غَالِبَةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ يَكُونُ مَطْلُوبًا شَرْعًا. وَالْمُؤَلِّفُ قَدْ بَذَلَ جُهْدًا كَبِيرًا فِي

إعْدَادِ مُؤَلَّفِهِ، فَيَكُوْنُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ، سَوَاءٌ فِيْمَا يُمَثِّلُ الْجَانِبَ الْمَادِيَّ: وَهُوَ الْفَائِدَةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِيْ يَسْتَفِيْدُهَا مِنْ عَمَلِهِ، أَوِ الْجَانِبَ الْمَعْنَوِيَّ: وَهُوَ نِسْبَةُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ. وَيَظَلُّ هَذَا الْحَقُّ خَالِصًا دَائِمًا لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ. وَبِنَاءً عَلَيْهِ يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرِهِ اعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلِّفِ، أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مُوْجِبَةٌ لِلْإِثْمِ شَرْعًا وَسَرِقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلِّفِ فِيْ مُصَادَرَةِ النُّسَخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا وَتَعْوِيْضُهُ عَنِ الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِيْ أَصَابَهُ. وَذَلِكَ سَوَاءٌ كُتِبَ عَلَى النُّسَخِ الْمَطْبُوْعَةِ عِبَارَةُ: (حَقُّ التَّأْلِيْفِ مَحْفُوْظٌ لِلْمُؤَلِّفِ) أَمْ لَا، لِأَنَّ الْعُرْفَ وَالْقَانُوْنَ السَّائِدَ اعْتَبَرَ هَذَا الْحَقَّ مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوْقِ الشَّخْصِيَّةِ، وَالْمَنَافِعُ تُعَدُّ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمُتَقَوِّمَةِ فِيْ رَأْيِ جُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ أَوِ الْأَعْيَانَ تُقْصَدُ لِمَنَافِعِهَا لَا لِذَوَاتِهَا، وَالْغَرَضُ الْأَظْهَرُ مِنْ جَمِيْعِ الْأَمْوَالِ هُوَ مَنْفَعَتُهَا كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ. بَلْ إِنَّ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ أَفْتَوْا بِضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوْبِ فِيْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْمَالُ الْمَوْقُوْفُ وَمَالُ الْيَتِيْمِ وَالْمَالُ الْمُعَدُّ لِلْإِسْتِغْلَالِ. وَالْمُؤَلِّفُ حِيْنَمَا يَطْبَعُ كِتَابَهُ يَقْصِدُ بِهِ أَمْرَيْنِ: نَشْرُ الْعِلْمِ، وَاسْتِثْمَارُ مُؤَلَّفِهِ. وَيَكُوْنُ لِكُلِّ طَبْعَةٍ مِنْ طَبَعَاتِ الْكِتَابِ حَقٌّ خَاصٌّ لِلْمُؤَلِّفِ...

ب- وَأَمَّا حَقُّ النَّشْرِ أَوِ التَّوْزِيْعِ فَيَحْكُمُهُ الْعَقْدُ أَوِ الْإِتِّفَاقُ الْحَاصِلُ بَيْنَ الْمُؤَلِّفِ وَالنَّاشِرِ أَوِ الْمُوَزِّعِ، فَيَجِبُ عَلَى طَرَفَيِ الْإِتِّفَاقِ الْإِلْتِزَامُ بِمَضْمُوْنِهِ مِنْ حَيْثُ عَدَدُ النُّسَخِ الْمَطْبُوْعَةِ وَالْمُدَّةِ الَّتِيْ يَسْرِيْ فِيْهَا الْإِتِّفَاقُ. وَاللهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُوْدِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ [المائدة:٥/١]، وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ [الإسراء:١٧/٣٤]. وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَحْرُمُ شَرْعًا نَقْضُ بُنُوْدِ الْإِتِّفَاقِ، وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُوْمَ بِإِعْطَاءِ حَقِّ النَّشْرِ أَوِ التَّوْزِيْعِ لِغَيْرِ الدَّارِ الَّتِيْ الْتَزَمَ مَعَهَا فِيْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. وَأَمَّا مَا يُقَالُ مِنْ جُهْدِ دَارِ التَّوْزِيْعِ أَوِ النَّشْرِ، فَهَذَا قَدِ اسْتَوْفَتِ الدَّارُ عِوَضَهُ بِمَا تَأْخُذُهُ مِنْ رِبْحٍ، وَالشُّهْرَةُ كَانَتْ بِالرَّوَاجِ النَّابِعِ مِنْ مَوْضُوْعِ الْكِتَابِ لَا مِنْ شَكْلِهِ وَإِخْرَاجِهِ، فَهَذَا لَهُ دَوْرٌ ثَانَوِيٌّ، بِدَلِيْلِ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْكُتُبِ ذَاتِ إِخْرَاجٍ بَدِيْعٍ، وَلَكِنَّهَا تَافِهَةٌ لَمْ

يُكْتَبُ لَهَا الرَّوَاجُ. كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْقَوْلُ: إِنَّ دَارَ النَّشْرِ أَوِ التَّوْزِيعِ هِيَ الَّتِي
أَضْفَتْ عَلَى الْمُؤَلِّفِ وَكِتَابِهِ شُهْرَةً، فَذَلِكَ قَدِ اسْتَوْفَتِ الدَّارُ عِوَضَهُ مِمَّا أَخَذَتْهُ
مِنْ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ عَالِيَةٍ تَفُوقُ فِعْلًا مَا يَسْتَفِيدُهُ صَاحِبُ التَّأْلِيفِ ذَاتُهُ.

ج- كَذَلِكَ التَّرْجَمَةُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَشْرُهَا بِإِذْنِ الْمُؤَلِّفِ وَبِاتِّفَاقٍ مَعَهُ، وَحَقُّ
الْمُؤَلِّفِ أَوِ النَّاشِرِ حِينَئِذٍ يَتَجَلَّى فِي الْمُطَالَبَةِ بِمَا يُحَقِّقُ الْكِتَابُ مِنْ أَرْبَاحٍ
بِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ بِحَسَبِ الِاتِّفَاقَاتِ أَوِ الْأَعْرَافِ الشَّائِعَةِ الَّتِي تُعْرَفُ مِنْ مَجْمُوعِ
اتِّفَاقَاتِ الْمُؤَلِّفِينَ وَالنَّاشِرِينَ.

Hak Cipta, Distribusi dan Percetakan:

1) Adapun hak penyusun yang masuk di bawah aturan undang-undang baru yakni hak etika, yaitu hak yang dilindungi dalam pen*taqdir*an menurut *syara'* berdasarkan undang-undang *istishlah* atau *maslahat mursalah* (yaitu sifat-sifat yang serasi pada *tasharruf-tasharruf syara'* dan maksud-maksudnya, tapi tidak ada *dalil* tertentu dari *syara'* yang menyaksikannya dengan meng*i'tibar* atau meninggalkan. Dari korelasi hukumnya menghasilkan menarik *maslahat* atau menolak *mafsadah* dari manusia), tiap tindakan yang terdapat *maslahat* umum, menolak bahaya atau *mafsadah* yang dituntut secara *syara'*. Penyusun sungguh mengerahkan upaya besar dalam usaha menyusun, maka ia lebih berhak terkait hasilnya, baik menghasilkan karya yang ia kutip dari manuskrip yang sudah ada: yaitu faidah naskah-naskah yang ia hasilkan dari usahanya, atau sisi maknawi: yaitu *nisbat* amal padanya. Dan ini selamanya menjadi hak murni baginya, kemudian bagi ahli warisnya, karena sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan lainnya: *"Orang yang meninggalkan harta atau hak maka bagi ahli warisnya"*. Dan menetapkan padanya, bahwa pengulangan cetak kitab atau gambarannya di*i'tibar* bagi hak penyusun, maksudnya ia maksiat yang menetapkan dosa menurut *syara'* dan plagiat yang menetapkan tanggungan hak penyusun dalam penerbitan naskah yang dicetak, secara aniaya, *zhalim* dan menggantinya dari etika buruk yang ia kenakan. Hal itu, baik ditulis pada naskah yang dicetak *ibaran*nya: (Hak Cipta dilindungi bagi penyusun) atau tidak, karena *'urf* dan undang-undang yang berkuasa meng*i'tibar* hak ini sebagai bagian dari jumlah hak-hak seseorang, dan manfaat-manfaat itu dianggap sebagai harta-harta yang berharga menurut pendapat *jumhur fuqaha'* selain Hanafiyah, karena hal-hal atau perkara yang manfaatnya dimaksud, bukan karena *dzatiyah*nya. Tujuan yang jelas dari seluruh harta ialah

manfaatnya sebagaimana *syaikh al-Islam* Izzuddin bin abdissalam berkata: Bahkan sungguh *mutakkhirin* Hanafiyah berfatwa bahwa menanggung manfaat-manfaat barang *ghashab* dalam tiga hal: Harta yang diwakafkan, harta anak yatim dan harta yang disediakan untuk keuntungan. Penyusun ketika mencetak kitabnya bermaksud dua hal: Menyebarkan ilmu dan keuntungan hasil susunannya. Setiap cetakan dari beberapa cetakan kitab adalah hak khusus penyusun ...

2) Sementara hak penyebaran dan distribusi, hukumnya menyesuaikan akad atau kesepakatan yang dihasilkan diantara penyusun, penerbit dan percetakan. Sehingga wajib berdasarkan dua jalan kesepakatan menyanggupi kandungannya dari sisi jumlah naskah yang dicetak dan waktu kesepakatannya. Allah ﷻ memerintahkan agar memenuhi akad-akad: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."* (QS. al-Maidah: 1). *"Dan penuhilan janji."* (QS. al-Isra': 34). Menetapkan pada ayat tersebut, maka diharamkan menurut *syara'* merusak *klausul* (ketentuan) kesepakatan, dan tidak dibolehkan bagi penyusun untuk memberikan hak penerbit dan percetakan kepada selain penerbitan yang menyanggupinya pada masa yang ditentukan. Sedangkan yang dikatakan: Orang yang bertindak jahat pada rumah penerbitan dan percetakan, maka rumah tersebut harus memenuhi *iwadh*nya dengan keuntungan yang diambilnya, dan kemasyhuran itu dengan laku yang jelas dari tema kitab tidak dari bentuk dan pengeluarannya, maka ini merupakan putaran kedua, dengan *dalil* sungguh banyak kitab-kitab yang memiliki keluaran yang indah, tetapi sepele tidak menulisnya laku. Begitu juga tidak sah ungkapan: Sungguh rumah penyebaran dan distribusi ialah penyandaran pada penyusun dan kitabnya yang masyhur, demikian itu sungguh rumah itu harus memenuhi *iwadh*nya dari keuntungan yang diambilnya dari *nisbat* seratusan yang tinggi yang mencapai tindakan perkara yang diambil faidah oleh *sahibut ta'lif* pada *dzat*nya.

3) Begitu juga terjemah, sebaiknya distribusinya melalui ijin penyusun dan kesepakatan bersama. Dengan begitu hak penyusun atau penerbit menjadi jelas dalam tuntutan dengan perkara yang menyatakan kitab dari keuntungan-keuntungan dengan *nisbat* seratusan, memandang kesepakatan atau pengakuan yang masyhur yang telah diketahui dari kumpulan kesepakatan para *mu'allif* dan penerbit.

d. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar*, V/74:

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ أَنَّ الثَّمَنَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ، وَالْقِيمَةُ مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ.

Perbedaan antara *tsaman* dan *qimah; Tsaman* adalah hal yang direlakan, baik melebihi *qimah* atau kurang; sementara *qimah* adalah perkara yang dijadikan harta di tempat timbangan tanpa ditambahi dan dikurangi.

e. *Ahkam Taghyir Qimah al-'Amlah an-Naqdiyah wa Asyriha fi Tasdid al-Qardh*, 165:

(وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْقِيْمَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ وَلَا شَكَّ فِي اخْتِلَافِ أَزْمِنَةِ الْوَاقِفِيْنَ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَاللهُ تَعَالَى الْمُوَافِقُ) الْحَقِيْقَةُ فَفِي زَمَانِ أَبِي حَنِيْفَةَ كَانَتِ الْقِيَمُ مُسْعِرَةً وَفِي زَمَانِهِمَا تَغَيَّرَتِ الْقِيْمَةُ فِيْهِ فَجُعِلَ لَكَ لِزَمَانٍ قِيْمَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ ... قَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فَيَقُوْلُ إِلَى أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَمَا إِذَا كَانَ تَغَيُّرُ الْفُلُوْسِ يَسِيْرًا أَوْ فَاحِشًا فَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا رَدَّ الْمُقْتَرِضُ الْمِثْلَ وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا رَدَّ الْقِيْمَةَ لِتَضَرُّرِ الْمُقْرِضِ بِالتَّغَيُّرِ الْفَاحِشِ دُوْنَ الْيَسِيْرِ اهـ

(Dan sungguh diketahui bahwa *qimah* itu berbeda-beda memandang perbedaan zaman; tidak ada keraguan terkait perbedaan zaman para *wakif*, dan selayaknya mempertimbangkan zaman *wakif*, Allah ﷻ Maha Menolong). Hakikatnya; pada zaman Abi Hanifah, *qimah-qimah* mahal dan pada zaman keduanya *qimah* berubah, sehingga dijadikan untukmu untuk suatu zaman *qimah* tertentu yang khusus untuknya, ... al-Malikiyah berpendapat, kemudian ia berkata, bahwa dibedakan antara persoalan perubahan uang receh sedikit atau banyak; bila sedikit maka *Muqtaridh* mengembalikan sesamanya, sedang bila banyak maka mengembalikan *qimah*nya; karena kerugian *muqridh* dengan perubahan yang banyak, bukan yang sedikit.

437. Validitas Data Kitab

Deskripsi Masalah

Pada masa sekarang ini semakin naiknya angka pelajar baik formal maupun nonformal menjadikan industri percetakan kitab dan buku bacaan berkembang pesat. Akan tetapi sayangnya pesatnya industri percetakan kitab dan buku bacaan tidak seiring dengan validitas dan akurasi data. Baik berupa kesalahan penulisan, teks hilang, penambahan lafadz baik sengaja atau tidak mengakibatkan kesalahan persepsi dan pemahaman pada suatu masalah. Sementara itu di banyak pesantren sampai sekarang ini masih tetap menggunakan kitab-kitab dari percetakan sebagai sumber dasar keilmuan dan amaliyah dengan tanpa adanya kajian validitas data yang ada dalam kitab-kitab tersebut.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum menggunakan kitab-kitab sebagai sumber dasar keilmuan dan amaliyah dengan tanpa mengetahui kebenarannya?

b. Dan apakah sudah dapat dikategorikan taqlid kepada imam madzab kitab-kitab tersebut?

c. Seandainya tidak diperbolehkan, maka apa yang harus kita lakukan untuk menjaga eksistensi syari'at Islam?

Jawaban

a. Pengambilan hukum dari kitab-kitab yang ada harus jelas tervalidasi secara keilmuan dan tidak ada distorsi *nash* percetakannya. Mengingat banyaknya percetakan-percetakan yang tidak bisa dipercaya karena melakukan distorsi *nash*, maka pengambilan hukum harus diambil dari kitab-kitab yang diterbitkan dari percetakan yang dapat dipercaya. Orang yang melakukan distorsi *nash* kitab termasuk orang sesat dan menyesatkan.

b. Tidak dianggap mengikuti imam mazhabnya tetapi mengikuti *shahib al kitab*, dengan menisbatkan pendapat pada imam yang menyatakan.

c. Bagi yang mengetahui wajib hukumnya memberitahukan kepada masyarakat luas.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Syarh Sullam at-Taufiq*, 86:

وَأَطْلُبُ مِمَّنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ أُولِى الْمَعْرِفَةِ وَأَتَى فِيهِ عَلَى خَطَإٍ أَوْ زَلَلٍ أَنْ يَنْبَهَ عَلَى ذٰلِكَ بِالرَّدِّ الصَّرِيحِ لِيَحْذَرَ النَّاسُ مِنْ أَتْبَاعِي (أَنْ يَنْبَهَ عَلَى ذٰلِكَ بِالرَّدِّ الصَّرِيحِ) بِأَنْ يَقُولَ أَوْ يَكْتُبَ عَلَى الْهَامِشِ مَثَلًا هٰذَا سَبْقُ قَلَمٍ أَوْ سَهْوٌ أَوْ تَحْرِيفٌ مِنَ النُّسَّاخِ وَلَعَلَّ صَوَابَهُ كَذَا مِنْ غَيْرِ تَشْنِيعٍ وَلَا تَقْرِيعٍ وَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ ذٰلِكَ بِأَنْ يُزِيلَهُ وَيَكْتُبَ بَدَلَهُ فَإِنَّهُ لَوْ فُتِحَ بَابُ ذٰلِكَ لَأَدَّى إِلَى عَدَمِ الْوُثُوقِ بِشَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُؤَلِّفِينَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ إِصْلَاحِ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى كُتُبِهِمْ فَفَاعِلُ ذٰلِكَ ضَالٌّ مُضِلٌّ.

Orang yang melihat dan mengetahui kesalahan atau distorsi dituntut mengingatkannya dengan menolak yang jelas, supaya manusia khawatir mengikuti. (Ungkapan *mushannif*: *"Mengingatkannya dengan penolakan yang jelas"*) dengan berkata atau menulis pada *Hamisy*, misalkan: Ini ada kesalahan redaksi, lupa atau ada perubahan naskah dan kemungkinan kebenarannya demikian tanpa distorsi (penyimpangan) dan cacian; tidak boleh merubahnya dengan menghilangkan dan menulis gantinya. Jika membuka bab tersebut maka akan mendatangkan pada tidak percaya

dalam suatu kitab penyusun; karena kemungkinan sungguh perbaikan orang yang mengetahui kitab-kitab mereka, lalu mengerjakannya maka sesat menyesatkan.

b. *Is'ad ar-Rafiq*, II/91-92:

وَفِي التُّحْفَةِ تَنْبِيهٌ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ جَوَازِ النَّقْلِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَنِسْبَتِهِ لِمُؤَلِّفِهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُ النَّاقِلِ بِمُؤَلِّفِهَا نَعَمْ إِنَّ النَّقْلَ مِنْ نُسْخَةِ كِتَابٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِنْ وَثِقَ بِصِحَّتِهَا أَوْ تَعَدَّدَتْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَعَهُ صِحَّتُهَا أَوْ رَأَى لَفْظَهَا مُنْتَظِمًا وَهُوَ خَبِيرٌ فَطِنٌ يُدْرِكُ السَّقْطَ وَالتَّحْرِيفَ.

Dalam *at-Tuhfah* ada peringatan: "*Keterangan yang kalamnya memberi pemahaman bahwa boleh menukil kitab-kitab yang bisa dijadikan pedoman dan dinisbatkan pada penyusun yang disepakati, meskipun sanad penukil tidak bersambung pada muallifnya. Sungguh nukilan naskah kitab itu tidak dibolehkan kecuali jika dipercaya betul atau bilangan yang diduga kuat keabsahannya atau melihat lafadznya runtut, dan ia merupakan sebaik-baik orang cerdas yang menemukan kesalahan dan perubahan.*"

c. *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, IX/270:

وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ: الْمُتَوَسِّطُونَ وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا رُتْبَةَ الْاِجْتِهَادِ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ، لَكِنَّهُمْ وَقَفُوا عَلَى أُصُولِ الْإِمَامِ فِي الْأَبْوَابِ وَتَمَكَّنُوا مِنْ قِيَاسِ مَا لَمْ يَجِدُوهُ مَنْصُوصًا لَهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ مُقَلِّدُونَ لَهُ تَفْرِيعًا عَلَى تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ، وَهَكَذَا مَنْ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِمْ مِنَ الْعَوَامِّ تَقْلِيدًا لَهُ، وَالْمَعْرُوفُ لِلْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُقَلِّدُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّهُمْ مُقَلِّدُونَ، وَقَدْ نَجِدُ مَا يُخَالِفُ هَذَا فَإِنَّ أَبَا الْفَتْحِ الْهَرَوِيَّ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ يَقُولُ فِي الْأُصُولِ: مَذْهَبُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ، فَإِنْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا قَلَّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، وَوَجَدَ مُتَبَحِّرًا فِي مَذْهَبٍ، فَإِنَّهُ يُفْتِيهِ عَلَى مَذْهَبِ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَامِّيُّ لَا يَعْتَقِدُ مَذْهَبَهُ. وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ يُقَلِّدُ الْمُتَبَحِّرَ فِي نَفْسِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ مُتَبَحِّرَانِ فِي نَفْسِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ مُتَبَحِّرَانِ فِي مَذْهَبٍ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي قِيَاسِ أَصْلِ مَذْهَبِ إِمَامِهِمَا، وَمِنْ هَذَا يَتَوَلَّدُ وُجُوهُ الْأَصْحَابِ، فَنَقُولُ: أَيُّهُمَا يَأْخُذُ الْعَامِّيُّ؟ فِيهِ مَا سَنَذْكُرُهُ فِي اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَإِذَا نَصَّ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ عَلَى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ، أُلْحِقَ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ غَيْرُ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمِ، فَهَلْ

يَسْتَنْبِطُ الْمُتَبَحِّرُ الْعِلَّةَ وَيُعَدِّي الْحُكْمَ بِهَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : لَا، وَالْأَشْبَهُ بِفِعْلِ الْأَصْحَابِ جَوَازُهُ، لِأَنَّهُمْ يَنْقُلُوْنَ الْحُكْمَ، ثُمَّ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْ عِلَّتِهِ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ يَطْرُدُ الْحُكْمَ فِيْ فُرُوْعِ عِلَّتِهِ.

Bagian ketiga: Orang tengah-tengah, yaitu mereka yang tidak sampai tingkatan *ijtihad* dalam *ushul syara'*. Akan tetapi mereka menggantungkan pada *ushul* imam dalam bab dan memungkinkan pengqiyasan masalah yang tidak ditemukan *nash*nya pada persoalan yang terdapat *nash*nya. Mereka mengikutinya dalam cabang masalah sebagaimana mayat, dan seterusnya; orang yang mengadopsi ungkapan mereka dari kaum awam karena mengikutinya. Yang dikenal pada *Ashab*: ia tidak mengikuti dalam diri mereka, karena sungguh mereka mengikuti. Kita menemukan perkara yang menyelisihi ini. Sungguh Abal Fathi al-Harawi yaitu *ashab al-Imam* berkata dalam *ushul*: madzhab umum *ashab* kita; sungguh kaum awam tidak memiliki mazhab, jika ia menemukan *mujtahid* maka ia harus mengikutinya. Jika tidak menemukannya dan menemukan orang yang luas pemahamannya dalam madzhab, maka sungguh ia berfatwanya atas madzhab dirinya, jika kaum awam tidak meyakini madzhabnya. Penjelasan ini, ia mengikuti orang yang luas pemahaman dirinya. Jika dua orang yang luas pemahamannya berselisih dalam dirinya, dan bila dua orang yang luas pemahamannya berselisih dalam madzhab, karena perselisihan dalam pengqiyasan asal madzhab imamnya. Dari sini, *wajah-wajah ashab* lahir, lalu kita berkata: *Dari keduanya apa yang harus diambil orang awam?* ada penjelasan yang akan kami uraikan dalam perbedaan pendapat antar *mujtahid*, insya Allah Taala. Apabila *shahibul mazhab* menjelaskan hukum dan *illat*, maka *illat* yang tidak di*nash* disamakan dengan *illat* yang di*nash*, meskipun meringkas pada hukum. Apakah orang yang luas pemahamannya *istinbath* pada *illat* dan menyampaikan hukumnya, Muhammad bin Yahya berkata: *"Tidak, yang lebih serupa pada tindakan ashab adalah boleh, karena sungguh mereka menukil hukum, kemudian berselisih dalam illatnya, dan masing-masing memberlakukan hukum dalam cabang-cabang illatnya."*

438. Demokrasi dan Pemilu Secara Langsung

Deskripsi Masalah

Dewasa ini sistem demokrasi telah merambah luas ke seluruh dunia dan secara sukarela atau tidak, diterima oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Demokrasi telah menjadi agenda utama dunia, yang dimotori oleh barat. Istilah demokrasi secara singkat diistilahkan dengan kekuasaan atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya dalam

konsep demokrasi rakyatlah yang memegang kendali keputusan atau kekuasaan. Dalam praktiknya sistem demokrasi ini memerlukan biaya mahal dan mengakibatkan akibat yang luar biasa di masyarakat setiap kali pemilihan Presiden, Gubernur, ataupun Bupati/Walikota. Konflik dan kerusuhan sering terjadi, dan banyak sekali ternyata wakil rakyat, presiden, gubernur atau bupati yang dipilih mengecewakan.

Pertanyaan

a. Bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam tentang demokrasi?
b. Apa perbedaan antara konsep *syura* dan demokrasi?
c. Bagaimanakah sebenarnya pandangan hukum Islam tentang pemilu legislatif, presiden dan pemilukada langsung?
d. Kalau wakil rakyat, presiden, gubernur atau bupati terpilih ternyata mengecewakan bahkan melanggar norma agama, apa tindakan yang seharusnya dilakukan menuju perbaikan penyelenggaraan pemerintah?

Jawaban

a. Islam tidak mengenal prinsip demokrasi, prinsip dasar pijakan Islam ialah *maslahat ummat* menurut ulama dan orang-orang yang berakal karenanya bila memberikan *maslahat ummat* maka demokrasi dapat diakomodir, apabila tidak memberi *maslahat ummat* maka prinsip demokrasi tertolak.
b. Konsep *syura* mendasarkan keputusannya pada koridor *syari'ah*, sementara demokrasi merujuk kepada keputusan mayoritas tanpa menyeleksi kapabilitas kemampuannya dalam memutuskan.
c. Mengingat fakta lapangan menunjukkan bahwa pemilihan langsung telah menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar maka pilihan pimpinan lebih baik diserahkan kepada perwakilan-perwakilan yang amanah.
d. Apabila melanggar hukum *syari'at*, berkhianat terhadap kemaslahatan ummat yang *inkonstitusional* maka dia bisa diturunkan/dipecat selama tidak ada *mafsadah* yang lebih besar terhadap itu.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir li Ibn Najim:*

القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وقد صرحوا به في مواضع. منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة، وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج في مواضع، وصرحوا في كتاب الجنايات: أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له، وإنما له القصاص والصلح وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظرا، وليس من النظر للمستحق

الْعَفْوَ وَأَصْلُهَا مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ).

Kaidah kelima: *Tasharruf imam* pada rakyat digantungkan pada *maslahat.* Ulama menjelaskannya dalam beberapa tempat; diantaranya dalam kitab perdamaian dalam masalah perdamaian *imam* yang terpeleset di jalan umum. Imam Abu Yusuf ﷺ menjelaskannya dalam kitab *al-Kharaj* dalam beberapa tempat, dan ulama menjelaskan dalam kitab *jinayat*: *"Sungguh ampunan sultan tidak sah bagi pembunuh orang yang tidak punya wali, dan sungguh ia memiliki pilihan diantara qishas dan suluh"*. Pengarang membuat alasan dalam *al-Idlah* sungguh imam diangkat sebagai *nadlir*, sementara ampunan bukan termasuk *nadlar* pada *mustahiq* ampunan. Asalnya dari hadits yang di*takhrij* Sa'id bin Manshur dari al-Bara'; beliau berkata: Umar ﷺ berkata: (*sungguh aku menempatkan diriku dalam urusan harta Allah ﷻ menempati wali yatim; jika aku membutuhkannya maka aku mengambil darinya, jika aku dalam kondisi mudah maka aku mengembalikannya, dan jika aku merasa cukup maka aku meminta ampunannya*).

b. *Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Ma'ashir li ad-Duktur Wahbah az-Zuhaili*, 516-517:

فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ السِّيَاسَةَ فِي الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ الْغَرْبِيَّةِ هِيَ لِلْأُمَّةِ مُطْلَقًا. وَفِي الْإِسْلَامِ هِيَ لِلشَّرِيعَةِ وَالْأُمَّةِ مَعًا. وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ الْحَاكِمَ فِي الْإِسْلَامِ يَحْكُمُ بِمَا كَانَ مَعْرُوفًا فِي الْغَرْبِ بِمُقْتَضَى حَقِّ التَّفْوِيضِ الْإِلَهِيِّ الْمُقَدَّسِ وَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِإِرَادَةِ الْأُمَّةِ الَّتِي بَايَعَتْهُ وَلَهَا حَقُّ مُرَاقَبَتِهِ وَعَزْلِهِ إِنْ خَالَفَ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ أَوْ خَانَ مَصَالِحَ الْأُمَّةِ أَوْ هَدَّدَ كِيَانَ الدَّوْلَةِ بِالضَّيَاعِ وَ الْخُسْرَانِ وَالزَّوَالِ.

Simpulan: Sungguh politik dalam Demokrasi Barat adalah bagi umat secara mutlak, sementara dalam Islam ialah untuk *syariat* bersama umat. Ini tidak bermaksud Imam yang berkuasa dalam Islam menghukumi dengan hukum yang dikenal di Barat dengan tuntutan hak pemasrahan yang bersifat ketuhanan yang disucikan, akan tetapi ia menghukumi dengan kehendak umat yang membaiatnya. Umat memiliki hak untuk mengkritiknya dan memakzulkannya jika ia memang menentang hukum-hukum syari'at, mengkhianati kemaslahatan umat, atau mengancam eksistensi negara dengan menyia-nyiakan, merugikan, dan menghilangkan kekuatannya.

c. *Al-Imamah al-'Udhma 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, 158:

وَحَيْثُ أَنَّ الْأُمَّةَ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَصْقَاعِ وَالْأَمْصَارِ، فِيهَا الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ، وَالْعَالِمُ بِالْمَصْلَحَةِ وَالْجَاهِلُ، وَالْعَاقِلُ وَغَيْرُهُ، وَصَاحِبُ الْهَوَى وَالْغَرَضِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْإِخْتِلَافَاتِ الَّتِي يَصْعُبُ مَعَهَا التَّمْيِيزُ بَيْنَ الصَّالِحِ وَالطَّالِحِ، وَالَّذِي يَتَوَسَّمُ فِيهِ حَمْلَ هَذِهِ الْأَمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، تَكُونُ الْمَسْؤُولِيَّةُ فِي هَذِهِ الْمَحَالِّ وَاقِعَةً عَلَى أَعْنَاقِ عُقَلَاءِ الْأُمَّةِ وَعُلَمَائِهَا وَفُضَلَائِهَا الَّذِينَ يَخْتَارُونَ مَنْ يَرَوْنَ أَهْلًا لِلْقِيَامِ بِهَذَا الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ إِقَامَةُ شَرْعِ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي نَحَا الْمَعْمُورَةِ. اهـ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ مُعَلِّمٌ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى الْحَقَّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو دَاوُودَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ).

Ketika umat berbeda-beda di berbagai tempat dan kota, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang mengerti kemaslahatan dan ada yang tidak mengerti, ada yang berakal dan selainnya, yang memiliki kesenangan dan tujuan dan selainnya, dari perbedaan-perbedaan yang dengannya sulit dibedakan diantara orang yang baik dan orang jahat, orang yang pantas memegang amanah ini dan lainnya, maka tanggungjawab dalam urusan publik ini berada di pundak cendekiawan, ulama dan *fudhala*'nya, yang akan memilih orang yang dianggap ahli menjalankan kewajiban *syar'i* ini yang diwajibkan Allah bagi mereka, yaitu menegakkan syariat Allah di bumiNya, *al-amr bi al-makruf wa an-nahi 'an al-mungkar* di bumi yang dimakmurkan. Dari Ibn Buraidah, dari ayahnya, Nabi ﷺ bersabda: *"Qadhi itu ada tiga; dua qadhi di neraka dan satu qadhi di surga. Orang yang menghukumi tanpa hak dalam kondisi mengetahuinya, maka ia di dalam neraka; Qadhi yang tidak mengetahui lalu merusak hak-hak manusia maka ia di dalam neraka; dan Qadhi yang menghukumi dengan haq, maka ia di surga."* (HR. at-Tirmidzi, al-Baihaqi, Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibn Majah).

d. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, I/116:

وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي «كِتَابِ الْعِلْمِ» مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ سَمِعْتُ خَلَّادَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسَمِّنُ الرَّجُلُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى يَسِيرَ عَلَيْهَا فِي الْأَمْصَارِ يَلْتَمِسُ مَنْ يُفْتِيهِ بِسُنَّةٍ قَدْ

عَمِلَ بِهَا، فَلَا يَجِدُ إِلَّا مَنْ يُفْتِيهِ بِالظَّنِّ» فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَغْلَبُ الْأَكْثَرُ فِي الْحَالَيْنِ، وَقَدْ وُجِدَ هَذَا مُشَاهِدًا ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يُقْبَضَ أَهْلُ تِلْكَ الصِّفَةِ وَلَا يَبْقَى إِلَّا الْمُقَلِّدُ الصِّرْفُ، وَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ حَتَّى فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ بَلْ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، وَلَكِنْ يَبْقَى مَنْ لَهُ نِسْبَةٌ إِلَى الْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ يَزْدَادُ حِينَئِذٍ غَلَبَةُ الْجَهْلِ وَتَرْئِيسُ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يُقْبَضَ أُولَئِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَذَلِكَ جَدِيرٌ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْعِلْمِ أَصْلًا، ثُمَّ تَهُبُّ الرِّيحُ فَتَقْبِضُ كُلَّ مُؤْمِنٍ، وَهُنَاكَ يَتَحَقَّقُ خُلُوُّ الْأَرْضِ عَنْ مُسْلِمٍ فَضْلًا عَنْ عَالِمٍ فَضْلًا عَنْ مُجْتَهِدٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ «كِتَابِ الْفِتَنِ» كَثِيرٌ مِنَ الْمَبَاحِثِ وَالنُّقُولِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِقَبْضِ الْعِلْمِ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. وَفِي الْحَدِيثِ الزَّجْرُ عَنْ تَرْئِيسِ الْجَاهِلِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ. وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِهِ مَنْ لَا يُجِيزُ تَوْلِيَةَ الْجَاهِلِ بِالْحُكْمِ، وَلَوْ كَانَ عَاقِلًا عَفِيفًا.

Sungguh Ibn Abdi al-Bar men*takhrij* dalam *kitab "al-Ilm"* dari jalur Abdillah bin Wahbin, saya mendengar Khalad bin Salman al-Hadlrami berkata: Daraj Abu as-Samhi menceritakan padaku, ia berkata: "*Akan datang pada manusia zaman dimana seorang lelaki yang menggemukkan kendaraannya hingga ia berjalan di kota-kota seraya mencari orang yang mampu berfatwa sesuai sunah yang sungguh ia mengerjakannya, lalu ia tidak menemukan kecuali orang yang berfatwa dengan duguan*" keterangan tersebut diarahkan bahwa yang dimaksud adalah yang lebih umum dan lebih banyak dalam dua kondisi, dan sungguh ia telah menemukan saksi ini kemudian *ahli sifat* itu boleh menerima dan tidak tetap kecuali orang yang mengikuti *as-sharf.* Dengan demikian, sepinya zaman dari *mujtahid* hingga dalam sebagian bab bahkan dalam sebagian masalah digambarkan, akan tetapi orang yang memiliki *nisbat* ilmu secara *jumlah* masih tetap, kemudian saat itu bertambahlah kebodohan dan menjadi pimpinan keluarganya, kemudian mereka boleh menerima hingga tidak tersisa seorangpun dari mereka. Hal itu patut ketika keluarnya Dajjal atau setelah meninggalnya Nabi Isa عليه السلام. Demikian ini menggambarkan sepinya zaman dari orang yang berilmu sama sekali, kemudian angin berhembus dan mencabut nyawa setiap *mukmin,* di sana nyatalah sepinya bumi dari hunian *muslim*, apalagi orang *alim*, apalagi *mujtahid.* Keburukan manusia akan tetap, mereka

menjumpai hari kiamat, dan ilmu tersebut berada di sisi Allah ﷻ. Telah terungkap dalam permulaan "*Kitab Fitan*" berbagai pembahasan dan nukilan yang berkaitan dengan mencabut ilmu, dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Dalam hadits ada larangan mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin, karena resikonya besar. Terkadang orang yang tidak berkenan mengangkat pimpinan orang yang bodoh dalam putusan berpedoman terhadapnyanya, meskipun ia berakal dan terjaga.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KONFERENSI WILAYAH PWNU JAWA TIMUR 2013 di PP Bumi Solawat Lebo Sidoarjo 31 Mei-02 Juni 2013

439. *Money Laundry*
440. Perasa pada Makanan/Minuman
441. Jual Beli Galon Air Mineral
442. Mempertegas Perbedaan *Amil* dan Panitia Zakat
443. Azan Saat Bencana
444. Perilaku dan Tindakan Orang Gila
445. Menyebar Uang Saat Pembacaan Solawat
446. Kriteria *Balad al-Jum'ah* dan *Balad az-Zakah*
447. Calon Suami Pilihan Orang Tua

KOMISI WAQI'IYAH

MUSHAHIH

KH. Aziz Masyhuri
KH. Yasin Asymuni
KH. Ardani Ahmad

PERUMUS

KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I
KH. Imam Syuhadak

MODERATOR

KH. Romadlon Khotib

NOTULEN

KH. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, S.Pd.I

439. *Money Laundry*

Deskripsi Masalah

Pengungkapan kasus korupsi oleh KPK dengan melibatkan PPATK sering memunculkan dakwaan praktek pencucian uang atau *money laundry*. Bagi disiplin ilmu Fikih istilah itu merupakan wacana baru.

Pertanyaan

a. Adakah hukum Islam mengenal praktek pencucian uang sebagai perbuatan *jinayah* atau *jarimah*?

b. Tergolong jenis hukum apakah perbuatan pencucian uang atau *money laundry* menurut fikih?

Jawaban

a. Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Memperhatikan pengertian di atas, maka pencucian uang merupakan lanjutan tindak kriminal korupsi sebagai upaya menghilangkan jejak mengenai asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara tidak halal, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jinayah mal* (perbuatan haram pada harta) sekaligus juga *jarimah*, karena pelakunya layak menerima hukuman dan siksaan *(adzab)*.

b. Pencucian uang sebagai *jinayah* harta adalah mentasarufkan harta oleh pihak yang tidak mempuyai hak tasaruf atas harta tersebut, sehingga tasarufnya dihukumi batal (tidak sah) dan wajib menarik kembali atau mengganti, kemudian mengembalikan kepada asal usul harta hasil korupsi tersebut. Di pihak lain, perbuatan korupsi dan pencucian uang sebagai tindak kriminal lanjutan adalah juga *jarimah*, maka pelakunya dapat di*ta'zir* (dihukum) bahkan sampai hukuman mati bila hukuman yang lain tidak dapat menjerakan, sebagaimana keputusan **Munas dan Konbes NU 2012** di Cirebon Jawa Barat.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Mabsuth li as-Sarkhasi al-Hanafi*, XXVII/84:

اعْلَمْ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ حَلَّ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ، وَلَكِنْ فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ يُرَادُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْجِنَايَةِ الْفِعْلُ فِي النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ.

Ketahuilah sungguh *jinayah* adalah nama tindakan yang diharamkan menurut *syara'* baik terkait harta atau nyawa, tetapi menurut bahasa *Fuqaha'* yang dikehendaki dengan kemutlakan nama *jinayah* adalah tindak kejahatan terkait nyawa dan anggota tubuh.

b. *Adhwa' al-Bayan*, IV/543:

وَالْإِجْرَامُ: ارْتِكَابُ الْجَرِيمَةِ، وَهِيَ الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ بِهِ النَّكَالَ وَالْعَذَابَ.

Ijram: adalah melakukan tindakan kriminal, yang berkonsekuensi dosa dimana pelakunya berhak dicap nakal dan disiksa.

c. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, IX/312-314:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ لِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلِأَنَّ مَا لَا يَمْلِكُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَهُوَ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ أَوِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ). (الشَّرْحُ) حَدِيثُ حَكِيمٍ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ (مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ) يُرِيدُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ شَرْعِيٍّ ... وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّهُ سَبَقَ أَنَّ شُرُوطَ الْمَبِيعِ خَمْسَةٌ. مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ. فَإِنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ فَشَرْطُهُ كَوْنُهُ مَالِكًا لِلْعَيْنِ. وَإِنْ بَاشَرَهُ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ. فَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَا وِلَايَةٍ فَقَوْلَانِ (الصَّحِيحُ) أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ، وَهَذَا نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاهِيرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَكَثِيرُونَ أَوِ الْأَكْثَرُونَ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَسَنَزِيدُهُ دَلَالَةً فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. (وَالْقَوْلُ الثَّانِي) وَهُوَ الْقَدِيمُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ إِنْ أَجَازَ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا لَغَا. وَهَذَا الْقَوْلُ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْهُمُ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَسَيَأْتِي دَلِيلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ. (وَأَمَّا) قَوْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ: أَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ لَمْ يَعْرِفُوا هَذَا الْقَوْلَ، وَقَطَعُوا بِالْبُطْلَانِ، فَمُرَادُهُ مُتَقَدِّمُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ كُلَّ مَنْ حَكَاهُ إِنَّمَا حَكَاهُ عَنِ الْقَدِيمِ خَاصَّةً، وَهُوَ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَهُوَ مِنَ الْجَدِيدِ قَالَ

الشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ بَابِ الْغَصْبِ مِنَ الْبُوَيْطِيِّ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ رَضِيَ: فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزَانِ هٰذَا نَصُّهُ، وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ، فَصَارَ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ أَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ، والله تعالى أعلم ... قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَطَّرِدُ هٰذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ عَقْدٍ يَقْبَلُ الْاِسْتِنَابَةَ كَالْبُيُوعِ وَالْإِجَارَاتِ وَالْهِبَاتِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهَا، وَيُسَمَّى هٰذَا بَيْعَ الْفُضُولِيِّ وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ: الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ جَارِيَانِ فِي شِرَائِهِ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا اشْتَرَى الْفُضُولِيُّ لِغَيْرِهِ نُظِرَ: إِنِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ ذَاتِ الْغَيْرِ، فَفِيهِ هٰذَانِ الْقَوْلَانِ، (الْجَدِيدُ) بُطْلَانُهُ (وَالْقَدِيمُ) وَقْفُهُ عَلَى الْإِجَازَةِ.

Mushannif-rahimahullahu ta'ala-berkata: *"Tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki tanpa seizin pemiliknya"*; berdasarkan pada penjelasan yang diriwayatkan Hakim bin Hazam, sungguh Nabi ﷺ bersabda: *"Jangan kamu menjual barang yang tidak ada di sisimu"* dan karena sungguh perkara yang tidak dimiliki tidak mampu diserahkan, seperti burung di udara atau ikan di air.

(*Syarh*) Hadits Hakim berstatus *shahih*, diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibn Majah dan lain-lain dengan *sanad-sanad shahih*. At-Tirmidzi berkata: *"Hadits tersebut berstatus hasan"*. Adapun ungkapan *mushannif* (*tanpa seizin*) maksudnya tanpa seizin *syara'*... Kesimpulan *qaul* dalam pasal ini telah lewat, bahwa syarat barang dagangan ada lima, diantaranya dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Jika ia melakukan akad untuk dirinya maka syaratnya adalah memiliki barang, dan jika ia mengerjakan untuk orang lain dengan *wilayah* atau perwakilan, maka syaratnya adalah kepemilikan orang lain. Apabila orang menjual harta orang lain tanpa izin dan tanpa *wilayah* maka ada dua *qaul*, (menurut *Shahih*) akad itu batal. Ini adalah *nash* menurut *qaul jadid*. *Mushannif*, *Jumhur* Irak, dan banyak atau mayoritas ulama Khurasan, memastikan pendapat ini karena alasan yang telah disebutkan *Mushannif*. Kita akan menambahinya untuk *dilalah* dalam cabang mazhab-mazhab ulama, *insyaallah* ﷻ. (Menurut *qaul* kedua) yakni *qaul qadim*, sungguh jual beli itu sah yang digantungkan pada putusan pemilik, jika ia memperkenankan maka penjualan sah dan jika tidak maka sia-sia. Ini menurut pendapat

yang diceritakan ulama Khurasan dan Irak; diantaranya al-Mahamili dalam *al-Lubab*, *asy-Syasyi* serta *Shahib al-Bayan*, dan dalilnya akan disebutkan *insyaallah*, dalam cabang madzhab-madzhab ulama. (Adapun *qaul* Imam al-Haramain): *"Sungguh ulama Irak tidak mengetahui qaul ini dan mereka memastikan hukumnya batal, maka yang dikehendaki adalah ulama mutaqaddimin mereka."* Kemudian setiap orang yang menceritakannya, ia menceritakan dari *qaul qadim* secara khusus, yaitu *nash* Syafi'i dalam *al-Buwaithi*, sementara *nash* dalam *al-Buwaithi* termasuk *qaul jadid*. Asy-Syafi'i berkata di akhir *Bab Ghashab* dari *al-Buwaithi*: *"Jika hadits Urwah al-Bariqi sah maka setiap orang yang menjual atau memerdekakan barang miliki orang lain tanpa izinnya kemudian ia rela, maka penjualan dan pembebasan itu boleh"*, ini *nash*nya. Padahal telah *shahih* hadits Urwah al-Bariqi yang akan segera kami jelaskan, *insyaallah* dalam cabang madzhab-madzhab ulama. Jadi asy-Syafi'i memiliki dua *qaul* dalam *qaul jadid*. Salah satunya sesuai *qaul qadim*. *Wa Allah a'lam* … Imam al-Haramain berkata: *"Qaul ini berlaku di tiap akad yang menerima pergantian seperti penjualan, persewaan, pemberian, memerdekakan, nikah, thalak dan lain-lain,* dan ini disebut sebagai penjualan *fudhuli*". Imam al-Haramain dan al-Ghazali berkata dalam *al-Bashith* dan *al-Mahamili*, serta ulama yang tidak terbatas, bahwa dua *qaul* dalam *bai' fudhuli* berlaku untuk pembeliannya dari orang lain tanpa izin". *Ashabuna* berkata: *"Apabila seseorang membeli bai' fudhuli untuk orang lain maka dilihat; jika ia membeli dengan harta milik orang lain maka dalam hal ini ada dua qaul (menurut qaul jadid), dan hukumnya batal, dan (menurut qaul qadim) digantungkan pada persetujuan orang lain tersebut."*

d. *Bughyah al-Mustarsyidin*, I/250:

فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِيْ كِتَابِهِ التَّفْقِيْهِ: يَجُوْزُ قَتْلُ عُمَّالِ الدَّوْلَةِ الْمُسْتَوْلِيْنَ عَلَى ظُلْمِ الْعِبَادِ إِلْحَاقًا لَهُمْ بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، إِذْ ضَرَرُهُمْ أَعْظَمُ مِنْهَا، وَنَقَلَ الْأَسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْقَادِرِ عَلَى قَتْلِ الظَّالِمِ كَالْمَكَّاسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِنَحْوِ سُمٍّ لِيَسْتَرِيْحَ النَّاسُ مِنْ ظُلْمِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ دَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشَرْطِهِ فَأَوْلَى الظَّالِمُ الْمُتَعَدِّيْ اهـ

Faidah: Al-Muhib ath-Thabari berkata dalam kitabnya *at-Tafqih*: *"Boleh membunuh pejabat negara yang sewenang-wenang menzalimi hamba, karena menyamakan mereka dengan lima binatang fasik, karena bahaya mereka lebih besar darinya"*. Al-Isnawi menukil dari Ibn Abdissalam: *"Sungguh orang yang mampu boleh membunuh orang zalim seperti pemungut pajak dan sesamanya dari para penguasa yang zalim dengan semisal racun agar masyarakat merasa tenang dari kezalimannya, karena sungguh apabila boleh menolak penjahat*

meskipun dengan satu dirham hingga membunuh dengan syaratnya maka lebih utama orang zalim yang membahayakan orang lain."

e. *Takmilah al-Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzdzab*, XXVII/241-242, [al-Maktabah as-Salafiyah]:

(الْقَتْلُ) وَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ كَذٰلِكَ كَانَ جَزَاءً عَلَى أَفْحَشِ الْجَرَائِمِ وَأَعْظَمِهَا ضَرَرًا بِمَصَالِحِ الْمُجْتَمِعِ وَالْجَرَائِمِ الْهَادِمَةِ لِكَيَانِ الْمُجْتَمِعِ الْمُقَوِّضَةِ لِأَرْكَانِ النِّظَامِ- إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى جَوَازِ التَّعْزِيرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ لَايَزُولُ فَسَادُهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ كَمَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اغْتِيَالُ النُّفُوسِ لِأَخْذِ الْمَالِ مَثَلًا وَكَذٰلِكَ قَالُوا السَّاعِيْ إِلَى الْحُكَّامِ بِالْإِفْسَادِ وَالظُّلْمَةِ وَالسَّارِقِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُمْ إِلَى النَّاسِ وَكَذٰلِكَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ جَوَازُ الْقَتْلِ تَعْزِيرًا كَمَا فِي قَتْلِ الْجَاسُوْسِ الْمُسْلِمِ إِذَا اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ ذٰلِكَ وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُمْ فَهَا هُوَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَجِيْزِ يَقُوْلُ وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَقْتُلَ فِي التَّعْزِيرِ وَالْاِسْتِصْلَاحِ وَهٰذَا النَّصُّ صَرِيْحٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْقَتْلِ تَعْزِيرًا عِنْدَهُمْ وَلٰكِنِ ابْنُ الْقَيِّمِ يَقُوْلُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ قَتْلِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْبِدْعَةِ كَالتَّهَجُّمِ وَالرَّفْضِ وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ وَهٰذَا صَرِيْحٌ أَيْضًا فِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يُجِيْزُوْنَ الْقَتْلَ تَعْزِيرًا.

(Pembunuhan) merupakan macam-macam *ta'zir* yang berat, begitu juga menjadi balasan atas tindakan kriminal terburuk dan terbesar bahayanya bagi kemaslahatan sosial, dan kriminal yang merusak eksistensi sosial, dan merusak aturan-aturan pokok ... Ulama Hanafiyah menjelaskan boleh men*ta'zir* dengan membunuh orang yang kerusakannya tidak hilang kecuali dengan membunuh, seperti orang yang sering menghilangkan nyawa untuk mengambil harta, misalkan. Begitu pula mereka berkata: *"Orang yang berjalan menuju para hakim dengan membawa kerusakan dan kezaliman, pencuri dan semisalnya yakni orang-orang yang bahayanya mengancam masyarakat"*. Begitu juga diriwayatkan dari Malik dan sebagian *ashab* Ahmad: *"Boleh membunuh sebagai bentuk ta'zir sebagaimana membunuh mata-mata muslim, bila maslahat menuntutnya"*. Adapun Ulama Syafi'iyyah, terjadi perbedaan penukilan dari mereka; ingatlah Imam al-Ghazali dalam *al-Wajiz* berkata: *"Tidak boleh membunuh dalam ta'zir dan upaya perbaikan."* *Nash* ini jelas bahwa tidak boleh membunuh sebagai bentuk *ta'zir* menurut mereka, akan tetapi Ibn al-Qayyim berkata: *"Diriwayatkan dari sebagian Ashab asy-Syafi'i, boleh membunuh para pengajak bid'ah seperti mesum, kaum*

Rafidhah dan yang mengingkari qadar." Ini *sharih* juga, bahwa sebagian *Ashab asy-Syafi'i* membolehkan membunuh sebagai bentuk *ta'zir*.

f. Referensi lain:
   1) *Ad-Durr al-Mukhtar*, VI/257 [al-Maktabah asy-Syamilah]
   2) *At-Tasyri' al-Jana'i fi al-Islam*, III/1
   3) *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XVI/59

440. Perasa pada Makanan/Minuman

Deskripsi Masalah

Untuk menikmati rasa durian kita tidak harus membelah buah yang penuh duri itu. Demikian juga untuk menikmati lezatnya ayam dan sapi, tak perlu lagi bersusah-payah menyembelih dan memilah tulang dari dagingnya. Itulah ajaibnya bahan perasa atau *flavor*. Hampir setiap makanan dan minuman olahan yang beredar di pasaran saat ini tidak terlepas dari bahan perasa buatan. Di dalam mie instan yang berisi berbagai rasa, seperti rasa bakso, rasa ayam, rasa udang, rasa sapi dan seterusnya, pada dasarnya hanyalah efek yang ditimbulkan oleh bahan perasa yang bercampur dengan berbagai penyedap masakan. Demikian juga dengan aneka minuman ringan, jus buah, makanan anak-anak hingga susu, semuanya memakai bahan tersebut. Melihat karakteristik bahan perasa yang banyak dipakai di industri pangan, maka perhatian perlu dicurahkan untuk bahan-bahan alami, khususnya untuk perasa yang mengarah pada rasa daging (*savory flavor*). Apabila diekstrak dari bahan hewani yang tidak halal, maka akan menghasilkan perasa yang tidak halal juga. Misalnya perasa yang diperoleh dari *pork powder* atau tepung babi yang ditulis dalam bahasa asing dan tidak dimengerti kebanyakan konsumen.

Pertanyaan

a. Bagaimanakah hukumnya memproduksi makanan/minuman yang mengandung bahan perasa buatan?
b. Bagaimanakah hukumnya mengkonsumsi makanan tersebut tanpa memperhatikan komposisi bahan makanannya?
c. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah adanya makanan yang mengandung bahan perasa yang tidak halal?

Jawaban

a. Memproduksi makanan/minuman olahan yang melibatkan perasa buatan adalah boleh, bila bahan maupun produk jadinya memenuhi kriteria halal, yaitu suci, tidak berbahaya, tidak menjijikkan, bukan bagian organ tubuh manusia dan bukan dari binatang hidup yang menjadi najis sebab kematianya.

b. Mengkonsumsi makanan/minuman produksi olahan dengan tanpa memperhatikan komposisi bahannya adalah boleh/halal, apabila tidak diketahui dengan yakin/nyata bahwa makanan/minuman itu adalah dari bahan yang haram.
c. Tindakan yang seharusnya dilakukan terkait produk makanan atau minuman yang tidak halal, yaitu :
   1) Menyampaikan teguran kepada podusen secara tertutup dan jika tidak berhasil, maka melaporkannya pada pihak yang berwenang dengan menunjukkan bukti produk berbahan tidak halal.
   2) Menghimbau pada masyarakat agar tidak mengkonsumsi produk makanan/minuman yang terbukti merupakan produk olahan dari bahan yang tidak halal.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*, I/150:

(وَفِيهِ بَابَانِ الْأَوَّلُ فِي الْمَطْعُومِ حَالَ الْاخْتِيَارِ) مِمَّا يَتَأَتَّى أَكْلُهُ مِنْ جَمَادٍ وَحَيَوَانٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُ أَنْوَاعِهِ (وَ) لَكِنَّ (الْأَصْلُ) فِي الْجَمِيعِ (الْحِلُّ) لِأَنَّ الْأَعْيَانَ مَخْلُوقَةٌ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِآيَةِ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ) بِنَصٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي فَيَحْرُمُ (كَالْخَمْرِ).

(قوله: وَالْأَصْلُ الْحِلُّ) لَوْ نَتَجَتْ شَاةٌ سَخْلَةً رَأْسُهَا يُشْبِهُ رَأْسَ الشَّاةِ وَذَنَبُهَا يُشْبِهُ ذَنَبَ الْكَلْبِ فَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهَا تَحِلُّ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ أَنَّ فَحْلَهَا كَلْبٌ (قوله إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ) الضَّابِطُ: كُلُّ طَاهِرٍ لَا ضَرَرَ فِي أَكْلِهِ وَلَيْسَ مُسْتَقْذَرًا وَلَا جُزْءًا مِنْ آدَمِيٍّ وَلَا حَيَوَانًا حَيًّا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

(*Dan di dalamnya ada dua bab; pertama mengenai makanan ketika dalam kondisi normal*) dari bahan makanan benda padat dan binatang yang tidak bisa disebut satu per satu (dan) tetapi (hukum asal) seluruhnya (adalah halal), karena berbagai barang di dunia diciptakan untuk kepentingan manusia. Zakaria al-Anshari berhujah dengan ayat: "*Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan padaku, sesuatu yang diharamkan. (Kecuali perkara yang dikecualikan) dengan nash atau selainnya dari hal-hal yang akan datang maka hukumnya haram (seperti khamr).*"

(Ungkapan Zakaria al-Anshari: "*Hukum asalnya adalah halal*") Apabila kambing melahirkan anak yang kepalanya menyerupai kepala kambing dan ekornya menyerupai ekor anjing, maka menurut keterangan dalam *Fatawa al-Qadhi Husain*, kambing tersebut hukumnya halal, karena kita belum terbukti jantannya adalah anjing. (Ungkapan Zakaria al-Anshari:

"Kecuali perkara yang dikecualikan"). Batasannya: Setiap perkara yang suci yang tidak membahayakan bila dimakan, tidak menjijikkan, bukan bagian organ tubuh manusia dan bukan dari binatang hidup yang jadi najis sebab kematianya, maka halal dimakan.

b. *Ihya' 'Ulumiddin*, II/118-119:

أَنَّ الْمَجْهُوْلَ إِنْ قَدَّمَ إِلَيْكَ طَعَامًا أَوْ حَمَلَ إِلَيْكَ هَدِيَّةً أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْ دُكَّانِهِ شَيْئًا فَلَا يَلْزَمُكَ السُّؤَالُ بَلْ يَدُهُ وَكَوْنُهُ مُسْلِمًا دِلَالَتَانِ كَافِيَتَانِ فِي الْهُجُوْمِ عَلَى أَخْذِهِ وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُوْلَ الْفَسَادُ وَالظُّلْمُ غَالِبٌ عَلَى النَّاسِ فَهٰذِهِ وَسْوَسَةٌ وَسُوْءُ ظَنٍّ بِهٰذَا الْمُسْلِمِ بِعَيْنِهِ وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

Jika orang yang tak dikenal memberikan makanan, membawa hadiah kepadamu, atau kamu mau membeli sesuatu dari tokonya, maka tidak wajib bagimu menanyainya, akan tetapi penguasaannya atas barangnya dan status muslimnya merupakan dua *dilalah* yang mencukupi untuk mengambil barangnya. Kamu tidak boleh berkata: *"Banyak kerusakan dan kezaliman pada manusia"*, sebab ini adalah was-was dan buruk sangka pada orang muslim tersebut secara nyata; padahal sebagian prasangka itu dosa.

c. *I'anah ath-Thalibin*, I/104-105:

فِي الْمُغْنِي سُئِلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ الْجُوْخِ الَّذِي اشْتَهَرَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ أَنَّ فِيْهِ شَحْمَ الْخِنْزِيْرِ فَقَالَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ إِلَّا بِتَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ اهـ

Dalam *al-Mughni*: Ibn Shalah ditanyai perihal *al-Jukh* yang masyhur diperbincangkan masyarakat bahwa di dalamnya ada lemak babinya, lalu ia berkata: *"Al-Jukh tidak dihukumi najis kecuali nyata najisnya."*

d. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, I/119, [Dar al-Kutub al-'Ilmiyah]:

وَلَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ هَلْ هُوَ ضَارٌّ أَوْ لَا؟ يَنْبَغِي الْحِلُّ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ م ر وع ش

Jika ragu-ragu dalam sesuatu apakah membahayakan atau tidak? Maka sebaiknya dihukumi halal, karena hukum asalnya tidak ada larangan. Demikian pernyataan ar-Ramli dan asy-Syubramilsi.

e. *Jami al-'Ulum wa al-Hikam*, 81:

وَالنَّصِيْحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَطَاعَتُهُمْ فِيْهِ وَتَذْكِيْرُهُمْ وَتَنْبِيْهُهُمْ فِي رِفْقٍ وَلُطْفٍ وَمُجَانَبَةُ الْوُثُوْبِ عَلَيْهِمْ وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالتَّوْفِيْقِ وَالنَّصِيْحَةُ لِعَامَّةِ

الْمُسْلِمِيْنَ إِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَتَعْلِيْمُهُمْ أُمُوْرَ دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَسَتْرُ عَوْرَاتِهِمْ وَسَدُّ خَلَّاتِهِمْ وَسَدُّ رَوْعَاتِهِمْ وَمُجَانَبَةُ الْغِشِّ وَالْحَسَدِ لَهُمْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ: وَمِنْ أَنْوَاعِ نُصْحِهِمْ تَعْلِيْمُ جَاهِلِهِمْ وَرَدُّ مَنْ زَاغَ مِنْهُمْ عَنِ الْحَقِّ فِيْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ بِالتَّلَطُّفِ فِيْ رَدِّهِمْ إِلَى الْحَقِّ وَالرِّفْقِ بِهِمْ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مَحَبَّةً لِإِزَالَةِ فَسَادِهِمْ وَلَوْ بِحُصُوْلِ ضَرَرٍ لَهُ فِيْ دُنْيَاهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ السَّلَفِ: وَدِدْتُ أَنَّ هٰذَا الْخَلْقَ أَطَاعُوا اللهَ وَأَنَّ لَحْمِيْ قُرِضَ بِالْمَقَارِيْضِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رضي الله عنه يَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِيْ عَمِلْتُ فِيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَعَمِلْتُمْ بِهِ فَكُلَّمَا عَمِلْتُ فِيْكُمْ بِسُنَّةٍ وَقَعَ مِنِّيْ عُضْوٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ شَيْءٍ مِنْهَا خُرُوْجَ نَفْسِيْ.

Nasehat untuk para pemimpin muslim adalah membantu membela kebenaran, mentaati, mengingatkan, serta melarang mereka dengan kelembutan, kehalusan, menghindari perlawanan, serta mendoakan mereka mendapatkan taufik; dan nasehat untuk kaum muslimin adalah menunjukkan pada *mashalih*, mengajarkan tentang urusan agama, dunia, menutup aib, mengoreksi kesalahan, mengoreksi fitnah, menghindari menipu dan dengki kepada mereka. Al-Hafidh Ibn Rajab berkata: *"Di antara bentuk-bentuk menasehati adalah mengajarkan kepada orang bodoh mereka dan mengembalikan orang yang melenceng dari kebenaran dalam lisan atau perbuatan dengan lemah lembut dalam mengembalikan mereka ke jalan yang lurus dan lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar karena senang untuk menghilangkan kerusakan mereka meski dengan ancaman bahaya baginya di dunia"*; sebagaimana kata sebagian salaf: *"Saya senang sungguh makhluk ini mentaati Allah dan jiwaku menjadi hutang dengan beberapa hutangan"*. Umar bin Abd al-Aziz ra. berkata: *"Aduhai semoga aku bisa memperlakukan padamu seusai ajaran kitab Allah dan kalian bisa mengamalkan dengannya, tatkala aku memperlakukan padamu dengan sunnah maka anggota tubuhku jatuh hingga akhirnya keluarlah nyawaku."*

f. *Az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, II/24:

الرَّابِعُ تَحْذِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيْحَتُهُمْ كَجَرْحِ الرُّوَاةِ وَالشُّهُوْدِ وَالْمُصَنِّفِيْنَ وَالْمُتَصَدِّيْنَ لِإِفْتَاءٍ أَوْ إِقْرَاءٍ مَعَ عَدَمِ أَهْلِيَّةٍ أَوْ مَعَ نَحْوِ فِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ وَهُمْ دُعَاةٌ إِلَيْهَا وَلَوْ سِرًّا فَيَجُوْزُ إِجْمَاعًا بَلْ يَجِبُ وَكَأَنْ يُشِيْرَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرْ عَلَى مُرِيْدِ تَزَوُّجٍ أَوْ مُخَالَطَةٍ لِغَيْرِهِ فِيْ أَمْرٍ دِيْنِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ وَقَدْ عَلِمَ فِيْ ذٰلِكَ الْغَيْرِ قَبِيْحًا مُنَفِّرًا كَفِسْقٍ أَوْ

بِدْعَةٍ أَوْ طَمَعٍ أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ كَفَقْرٍ فِي الزَّوْجِ لِمَا يَأْتِي فِي مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه بِتَرْكِ تَزْوِيجِهِ أَوْ مُخَالَطَتِهِ.

Keempat memperingatkan muslimin dari keburukan dan menasehati mereka seperti menilai cela para *rawi*, saksi, *mushannif* dan ahli fatwa atau orang yang tidak ahli membaca atau bersama sifat *fasiq* atau *bid'ah*; dan mereka mengajak padanya meskipun secara rahasia, maka boleh memperingatkan mereka dari keburukan menurut *ijma'*, bahkan wajib, dan seperti memberi isyarat, meskipun tidak dimintai isyarat pada orang yang hendak menikah atau bergaul dengan orang lain dalam urusan agama atau dunia, sementara diketahui pada orang lain itu terdapat keburukan yang *dibenci* seperti *fasiq*, *bid'ah*, rakus, atau lain-lain, seperti fakirnya calon suami karena keterangan yang akan datang mengenai Muawiyah ☪ dengan meninggalkan menikahkan atau menggaulinya.

g. *Mawahib as-Saniyah* dan *al-Fawa'id al-Janiyah*, 345-346:

(كَذَا إِذَا مَا اسْتُهْلِكَ الْحَرَامُ أَوْ قَارَبَ الاسْتِهْلَاكَ فِيمَا قَدْ رَأَوْا). وَمِنْ فُرُوعِهَا مَا إِذَا اسْتُهْلِكَ الطِّيبُ فَأَكَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْمُسْتَهْلَكِ، فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ. قَالَ السُّيُوطِيُّ: وَلَوْ مُزِجَ لَبَنُ امْرَأَةٍ بِمَاءٍ بِحَيْثُ اسْتُهْلِكَ فِيهِ لَمْ يُحَرِّمْ. وَكَذَا لَوْ لَمْ يُسْتَهْلَكْ وَلَنْ يَشْرَبَ الْكُلَّ.

(قوله مَا إِذَا اسْتُهْلِكَ الطِّيبُ) أَيْ فِي الْمُخَالِطِ لَهُ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ رِيحٌ وَلَا طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ كَأَنِ اسْتُعْمِلَ فِي دَوَاءٍ (قوله فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ) أَيْ وَإِنْ بَقِيَ الرِّيحُ فِيمَا اسْتُهْلِكَ ظَاهِرًا أَوْ خَفِيًّا يَظْهَرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ نَدًى لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَعْظَمَ مِنَ الطِّيبِ الرِّيحُ وَكَذَا لَوْ بَقِيَ الطَّعْمُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَقَاءِ الطِّيبِ لَا إِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ فَقَطْ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ الزِّينَةُ (قوله بِحَيْثُ اسْتُهْلِكَ فِيهِ) أَيِ اسْتُهْلِكَ اللَّبَنُ فِي الْمَاءِ بِأَنْ زَالَتْ أَوْصَافُهُ الثَّلَاثَةُ مِنْ رِيحٍ وَطَعْمٍ وَلَوْنٍ حِسًّا وَتَقْدِيرًا.

(Begitu juga termasuk kasus yang dikecualikan dari kaidah إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام adalah ketika suatu keharaman telah rusak atau mendekati kerusakan, menurut pendapat ulama). Diantara cabang permasalahannya adalah ketika wewangian telah rusak, kemudian seorang yang sedang ihram memakannya, maka tidak ada keharaman dan tidak ada *fidyah*. As-Suyuthi berkata: "*Apabila susu perempuan dicampur dengan air sekira susu itu rusak di dalamnya, maka tidak menyebabkan hubungan mahram.*

Begitu juga meski susu tidak rusak namun si anak tidak meminum semuanya."

(Ungkapan al-Jarhazi: *"Ketika wewangian telah rusak"*), maksudnya dalam air yang mencampurinya; dengan gambaran bau, rasa, dan warnanya menjadi tidak ada, seperti dipakai sebagai obat. (Ungkapan al-Jarhazi: *"Maka tidak ada keharaman dan tidak ada fidyah"*), maksudnya meskipun baunya masih ada, dalam kasus susu yang rusak secara lahiriah atau samar yang jelas dengan memercikkan air yang ada embun di atasnya, sebab tujuan utama dari wewangian adalah aromanya. Begitu juga jika rasanya masih ada karena ia menunjukkan masih adanya wewangian. Lain halnya jika yang masih ada adalah warnanya saja. Karena tujuan utamanya adalah untuk berhias. (Ungkapan al-Jarhazi: *"Sekira susu itu rusak di dalamnya*), maksudnya susu tersebut rusak di dalam air; dengan gambaran ketiga sifatnya yaitu bau, rasa, dan warna, hilang secara kasat mata dan kira-kiranya.

h. Referensi lain:
   1) *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, I/119.

441. Jual Beli Galon Air Mineral

Deskripsi Masalah

Perusahaan air minum seperti Aqua, Coca-Cola dan sebagainya dalam mendistribusikan air minum dengan beberapa cara, diantaranya:

a. Perusahaannya meminjamkan botol gallon kepada distributor
b. Distributor membayar uang jaminan botol gallon kepada perusahaan dengan jumlah yang ditentukan dan ketika gallon kembali maka uang dikembalikan
c. Transaksi dari distributor kepada pembeli adalah jual beli
d. Pada botol Aqua gallon tertulis: *"Botol ini hanya boleh diisi pemilik merk Aqua. Pasal 9 Ayat 1 Kep. Menperindag No. 705/MPP/Kep/11/2003."*

Pertanyaan

a. Bagaimana menurut *syara'* tentang penjualan gallon dari distributor kepada konsumen mengingat gallon tersebut dari perusahaan?
b. Bolehkah gallon diisi dengan merk lain atau air rebus karena gallon telah dibeli?
c. Apakah boleh perusahaan menuntut, ketika gallon diisi dengan merk lain atau air rebus? (PCNU Kab. Blitar)

Jawaban

a. Hukum penjualan gallon oleh distributor kepada konsumen adalah sah, sebab dugaan ridho dari pihak perusahaan atas penguasaan gallon oleh distributor sangat kuat, berdasarkan *qarinah* (indikator), yaitu

keharusan uang jaminan bagi perusahaan dan kesanggupan pihak distributor untuk membayarnya secara suka rela.

b. Boleh, sebab distributor sudah sah kepemilikannya terhadap gallon, karena ia telah mengganti jaminan uang.

c. Tidak boleh, sebab pihak perusahaan telah menerima uang pengganti gallon dari distributor yang sekarang jadi pemilik gallon. Berbeda halnya, apabila sampai terjadi penipuan/*tadlis*, sebab akan dapat merugikan pihak perusahaan atau pihak konsumen.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Is'ad ar-Rafiq*, I/126:

قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ لَكِنِ الْمُخْتَارُ الْإِنْعِقَادُ بِكُلِّ مَا يَتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِهَا فِيهِ كَالْخُبْزِ دُونَ نَحْوِ الدَّوَابِّ وَالْأَرَاضِيِّ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْمَقْبُوضُ بِهَا كَالْمَقْبُوضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَا مُطَالَبَةَ بِهَا وَيَجْرِي خِلَافُهَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ ... وَفِي الْإِيعَابِ لَكَ أَنْ تَقُولَ الْكَلَامُ جَمِيعُهُ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ لَا يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ رِضَا الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَلَوْ بِلَا بَدَلٍ أَمَّا مَنْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ خِلَافُ الْمُعَاطَاةِ لِأَنَّهُمْ إِذَا جَوَّزُوا لَهُ الْأَخْذَ مِنْ مَالِهِ مَجَّانًا مَعَ عِلْمِ الرِّضَا أَوْ ظَنِّهِ فَلِأَنْ يَجُوزَ عِنْدَ بَذْلِ الْعِوَضِ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ظَنِّ الرِّضَا أَوْ عِلْمِهِ لَا عَلَى وُجُودِ الْعِوَضِ أَوْ عَدَمِهِ اهـ

Mushannif berkata dalam *al-Fath*: *"Dan tidak sah akad jual beli dengan mu'athah"*; akan tetapi pendapat yang dipilih adalah sah terkait setiap perkara yang dikenal jual beli dengannya, seperti roti bukan semisal binatang dan tanah. Berdasarkan pendapat pertama, status barang yang diterima seperti barang yang diterima dengan akad penjualan yang rusak, maksudnya terkait hukum duniawi. Adapun dalam akhirat maka tidak ada tuntutan dengannya. *Khilaf Mu'athah* berlaku dalam akad-akad lain ... Keterangan dalam *al-I'ab*: *"Kamu boleh berkata, semua pembahasan ini diandaikan bagi orang yang tidak meyakini atau menyangka kerelaan orang barangnya diambil, meskipun tanpa ganti. Adapun orang yang meyakini atau menyangkanya demikian, maka tidak berlaku baginya khilaf mu'athah; karena sungguh bila ulama membolehkan mengambil hartanya secara gratis besertaan keyakinan kerelaan atau dugaannya, maka kebolehan ketika besertaan memberikan iwadh lebih utama; karena barometernya adalah dugaan atau keyakinan atas kerelaannya, bukan wujudnya iwadh atau tidaknya."*

b. *Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, IV/116, [Dar al-Fikr]:

(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذِ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ

الضِّيَافَةِ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إِنْ بَانَ خِلَافُ ظَنِّهِ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ

(Ibn Hajar al-Haitami ditanya) tentang suatu persoalan yang lafalnya: *"Apakah boleh mengambil dengan keyakinan ridla dari setiap sesuatu atau dikhususkan pada makanan yang disediakan untuk tamu?"* (Beliau menjawab) dengan ungkapannya: *"Keterangan yang ditunjukkan oleh pendapat ulama, sungguh hal itu tidak dikhususkan dengannya. Ulama menjelaskan bahwa dugaan kuat statusnya seperti keyakinan dalam hal tersebut. Dengan demikian, ketika ada dugaan kuat bahwa sungguh malik melegalkannya mengambil sesuatu yang ditentukan dari hartanya maka ia boleh mengambilnya, kemudian ketika terbukti dugaannya salah maka ia wajib menanggungnya dan jika tidak terbukti maka tidak wajib menanggung."*

c. *Al-Muhadzdzab* dan *al-Majmu'*, IX/312-314:

أ- قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ لِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلِأَنَّ مَا لَا يَمْلِكُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَهُوَ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ أَوِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ).

ب-(الشَّرْحُ) حَدِيثُ حَكِيمٍ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ (مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ) يُرِيدُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ شَرْعِيٍّ ... وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّهُ سَبَقَ أَنَّ شُرُوطَ الْمَبِيعِ خَمْسَةٌ. مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَنْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ. فَإِنْ بَاشَرَ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ فَشَرْطُهُ كَوْنُهُ مَالِكًا لِلْعَيْنِ. وَإِنْ بَاشَرَهُ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ. فَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَا وِلَايَةٍ فَقَوْلَانِ (الصَّحِيحُ) أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ. وَهَذَا نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاهِيرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَكَثِيرُونَ أَوِ الْأَكْثَرُونَ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَسَنَزِيدُهُ دِلَالَةً فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. (وَالْقَوْلُ الثَّانِي) وَهُوَ الْقَدِيمُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ إِنْ أَجَازَ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا لَغَا. وَهَذَا الْقَوْلُ

حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْهُمُ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ وَالشَّاشِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَسَيَأْتِي دَلِيلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ. (وَأَمَّا) قَوْلُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ: أَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ لَمْ يَعْرِفُوا هٰذَا الْقَوْلَ، وَقَطَعُوا بِالْبُطْلَانِ، فَمُرَادُهُ مُتَقَدِّمُوهُمْ، ثُمَّ إِنَّ كُلَّ مَنْ حَكَاهُ إِنَّمَا حَكَاهُ عَنِ الْقَدِيمِ خَاصَّةً، وَهُوَ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَهُوَ مِنَ الْجَدِيدِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ بَابِ الْغَصْبِ مِنَ الْبُوَيْطِيِّ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ رَضِيَ: فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزَانِ هٰذَا نَصُّهُ. وَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي فَرْعِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ. فَصَارَ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ أَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ، والله تعالى أعلم ... قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ يَطَّرِدُ هٰذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ عَقْدٍ يَقْبَلُ الْاِسْتِنَابَةَ كَالْبُيُوعِ وَالْإِجَارَاتِ وَالْهِبَاتِ وَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهَا، وَيُسَمَّى هٰذَا بَيْعَ الْفُضُولِيِّ وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ: الْقَوْلَانِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ جَارِيَانِ فِي شِرَائِهِ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا اشْتَرَى الْفُضُولِيُّ لِغَيْرِهِ نُظِرَ: إِنِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ ذَاتِ الْغَيْرِ، فَفِيهِ هٰذَانِ الْقَوْلَانِ، (الْجَدِيدُ) بُطْلَانُهُ (وَالْقَدِيمُ) وَقْفُهُ عَلَى الْإِجَازَةِ.

a. *Mushannif-rahimahullahu ta'ala*-berkata: *"Tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki tanpa seizin pemiliknya"*; berdasarkan keterangan yang diriwayatkan Hakim bin Hazam, sungguh Nabi ﷺ bersabda: *"Jangan kamu menjual barang yang tidak ada di sisimu"* dan karena sungguh perkara yang tidak dimiliki tidak mampu diserahkan, seperti burung di udara atau ikan di air.
b. (*Syarh*) Hadits Hakim berstatus *shahih,* diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibn Majah dan lain-lain dengan *sanad-sanad shahih.* At-Tirmidzi berkata: *"Hadits tersebut berstatus hasan"*. Adapun ungkapan *mushannif* (*tanpa seizin*) maksudnya tanpa seizin *syara'*.... Kesimpulan *qaul* dalam pasal ini telah lewat, bahwa syarat barang dagangan ada lima, diantaranya dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Jika ia melakukan akad untuk dirinya maka syaratnya adalah memiliki barang, dan jika ia mengerjakan untuk orang lain dengan *wilayah* atau perwakilan, maka syaratnya adalah kepemilikan orang

lain. Jika orang menjual harta orang lain tanpa izin dan tanpa *wilayah* maka ada dua *qaul*, (menurut *Shahih*) akad tersebut batal. Ini adalah *nash* menurut *qaul jadid*. *Mushannif*, *Jumhur* Irak, dan banyak atau mayoritas ulama Khurasan, memastikan pendapat ini karena alasan yang disebutkan *Mushannif*. Kita akan menambahinya untuk *dilalah* dalam cabang mazhab-mazhab ulama, *insyallah* ﷻ. (Menurut *qaul* kedua) yakni *qaul qadim*, sungguh jual beli itu sah yang digantungkan pada putusan pemilik, jika ia memperkenankan maka penjualan sah dan jika tidak maka sia-sia. Ini menurut pendapat yang diceritakan ulama Khurasan dan golongan ulama Irak; di antaranya al-Mahamili dalam *al-Lubab*, asy-Syasyi dan *Shahib al-Bayan*, dan dalilnya akan disebutkan *insyaallah* ﷻ dalam cabang mazhab-mazhab ulama.

442. Mempertegas Perbedaan *Amil* dan Panitia Zakat

Deskripsi Masalah

Ketika panitia zakat yang dibentuk masyarakat ingin mendapatkan bagian dari *amil*, maka panitia berinisiatif dan memutuskan mengajukan izin pengesahan pada camat atau bupati dan akhirnya izin itu dapat diraih, bahkan bersedia melantiknya. Melihat definisi "*amil*" adalah orang yang ditugaskan imam untuk mengambil dan membagi (mengurus) zakat, maka model pembentukan *amil* menyisakan *musykilah*, karena formasi *amil* adalah formasi panitia yang ada, lalu mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

Pertanyaan

a. Bisakah panitia yang mendapat izin bupati cq. camat menjadi *amil*?
b. Seberapa jauh kewenangan imam dalam urusan ke*amil*an, adakah keharusan keterlibatan dalam pengurusan zakat?
c. Bagaimana prosedur yang benar dalam pengangkatan *amil*? (PWNU)

Jawaban

a. Bisa, sebab pembentukan *amil* dalam perspektif fiqih hanya soal pengangkatan, yaitu oleh imam atau pejabat penggantinya (*naib*).[1]
b. Kewenangan imam dalam urusan ke*amil*an, yaitu memilih dan mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat sebagai *amil* serta mengawasi kinerjanya.
c. Prosedur pembentukan *amil* yaitu pengangkatan oleh imam (kepala Negara) atau pejabat pengganti (*naib*) terhadap orang-orang yang memenuhi kualifikasi menjadi *amil* berdasar urusan yang dibutuhkan, baik personalia serta formasinya juga ditentukan oleh pejabat yang

[1] Baca Bahtsul Masail Maudhu'iyah di PP. Tremas, 09-10 November 2014.

mengangkat atau atas usulan dari masyarakat, sebab status ke*amil*an bagi *amil* adalah ditentukan ada atau tidaknya pengangkatan (*ba'tsu*) dari imam atau pejabat penggantinya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Nihayah al-Muhtaj*, VII/168:

وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَعْثُ السُّعَاةِ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ.

Dan wajib bagi imam atau *naib*nya mengangkat petugas untuk memungut zakat.

b. *Al-Mughni li Ibn Qudamah Hanafiyah*, VII/326:

مَسْأَلَةٌ قَالَ: (وَالْعَامِلِيْنَ عَلَى الزَّكَاةِ وَهُمُ الْجُبَاةُ لَهَا وَالْحَافِظُوْنَ لَهَا) يَعْنِي الْعَامِلِيْنَ عَلَى الزَّكَاةِ. وَهُمُ الصِّنْفُ الثَّالِثُ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ وَهُمُ السُّعَاةُ الَّذِيْنَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِأَخْذِهَا مِنْ أَرْبَابِهَا وَجَمْعِهَا وَحِفْظِهَا وَنَقْلِهَا وَمَنْ يُعِيْنُهُمْ مِمَّنْ يَسُوْقُهَا وَيَرْعَاهَا وَيَحْمِلُهَا وَكَذٰلِكَ الْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْكَيَّالُ وَالْوَزَّانُ وَالْعَدَّادُ وَكُلُّ مَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْهَا فَإِنَّهُ يُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْهَا لِأَنَّ ذٰلِكَ مِنْ مُؤْنَتِهَا فَهُوَ كَعَلَفِهَا وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَلَى الصَّدَقَةِ سُعَاةً وَيُعْطِيْهِمْ عُمَالَتَهُمْ.

Masalah Ibn Qudamah berkata: (*Dan amil-amil zakat; mereka adalah orang yang memungut dan menjaganya*) yakni *amil-amil* zakat; mereka adalah golongan ketiga dari *ashnaf* zakat, dan mereka adalah orang-orang yang bertugas yang diperintahkan imam untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, mengumpulkan, menjaga, dan memindahnya serta orang yang membantu, seperti orang yang menuntun, menjaga, dan membawa hewan zakat. Begitupun juga penghitung, penulis, penakar, penimbang, penjumlah dan setiap orang yang membutuhkannya. Ia diberikan upah darinya, karena hal itu termasuk biaya pengelolaan zakat, maka seperti makanannya. Sungguh Nabi ﷺ mengangkat petugas pemungut zakat dan memberikan upah pekerjaannya.

c. *Al-Adab an-Nabawi*, 96, [Dar al-Fikr]:

أُوْلُو الْأَمْرِ هُمُ الَّذِيْنَ وُكِّلَ إِلَيْهِمُ الْقِيَامُ بِالشُّئُوْنِ الْعَامَّةِ وَالْمَصَالِحِ الْمُهِمَّةِ فَيَدْخُلُ فِيْهِمْ كُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ مَلِكٍ وَوَزِيْرٍ وَرَئِيْسٍ وَمُدِيْرٍ وَمَأْمُوْرٍ وَعُمْدَةٍ وَقَاضٍ وَنَائِبٍ وَضَابِطٍ وَجُنْدِيٍّ وَقَدْ أَوْجَبَ الرَّسُوْلُ ﷺ السَّمْعَ لِأَوَامِرِ هٰؤُلَاءِ وَالْمُبَادَرَةَ إِلَى تَنْفِيْذِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَحْبُوْبَةً لَهُ أَمْ بَغِيْضَةً إِلَيْهِ اهـ

Ulul amri adalah orang-orang yang diserahi tanggungjawab terkait kondisi umum dan *maslahat* penting, sehingga memasukkan setiap orang yang memiliki kuasa terhadap urusan muslimin, yaitu *Raja, Wazir, Rais, Mudir, Ma'mur, 'Umdah, Qadhi, Naib, Dhabith,* dan tentara. Sungguh Rasulullah ﷺ mewajibkan untuk mendengarkan perintah-perintah mereka dan segera memenuhi, baik disenangi atau dibenci.

d. *I'anah ath-Thalibin,* II/77:

وَيُشْتَرَطُ فِيْ هٰذَا أَنْ يَكُوْنَ فَقِيْهًا بِمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ مِنْهَا وَأَنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا حُرًّا عَدْلًا سَمِيْعًا بَصِيْرًا ذَكَرًا لِأَنَّهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ.

Dalam *'amil* ini disyaratkan harus *fakih* dengan perkara yang diserahkan padanya, dan harus muslim, *mukallaf,* merdeka, adil, mendengar, melihat, dan berjenis kelamin laki-laki karena sungguh ini merupakan bagian dari *wilayah.*

e. *Nihayah al-Muhtaj,* VII/168:

(وَشَرْطُ السَّاعِ) وَصْفٌ بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ الْمَارَّةِ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَا مَوَالِيْهِمْ وَلَا مِنَ الْمُرْتَزِقَةِ نَعَمْ مَرَّ اغْتِفَارُ كَثِيْرٍ مِنْ هٰذِهِ الشُّرُوْطِ فِيْ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَا وِلَايَةَ فِيْهِ بِوَجْهٍ فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مَحْضَ أُجْرَةٍ (فَقِيْهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيْمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيَعْرِفَ مَا يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَدْفَعُهُ لَهُ.

(Adapun syarat *sai*) yang disifati dengan salah satu sifat-sifatnya yang telah lewat (dia adalah orang yang merdeka) laki-laki (adil) dalam *syahadah,* karena sungguh ini adalah terkait *wilayah.* Tidak dari *dzawil qurba,* tidak *mawali* dan tidak dari *murtaziqah.* Ya, banyak ampunan yang sudah lewat dari syarat ini dalam sebagian macam-macam *amil,* karena dalam pekerjaannya sama sekali tidak terdapat *wilayah,* sehingga upah yang diambilnya murni upah, (pandai dalam bab-bab zakat) terkait hal yang menjadi wilayahnya; sebagaimana *diqayyidi* al-Mawardi, supaya tahu harta yang diambil dan orang yang diberinya.

443. Azan Saat Bencana

Deskripsi Masalah

Bencana seakan makin akrab dengan masyarakat Indonesia. Angin puting beliung, banjir bandang, kebakaran, gempa bumi dan berbagai jenis bencana lain telah menjadi ritual tahunan masyarakat. Namun

bagaimanapun juga, bencana tetaplah bencana dan kedatangannya bukan hal yang ditunggu-tunggu meski kadang telah dapat diprediksi.

Nuansa religius sebagai karakter rakyat Indonesia yang terkenal sangat '*tawakkal*' begitu kentara ketika menyambut hadirnya sang bencana. Bukan cerita asing bila bencana telah begitu mengharu biru, masyarakat berinisiatif untuk mengumandangkan azan, entah karena dianggap sangat menakutkan seperti jin yang merasuk atau berdasarkan pertimbangan lain. Anehnya sering pula azan tersebut *mujarrab* untuk menaklukkan dahsyatnya bencana. Bahkan hujan yang sangat deraspun bisa menjadi sedikit reda.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum mengumandangkan azan ketika terjadi angin ribut, gempa bumi, dan aneka ragam bencana yang lain?
b. Bagaimana sebenarnya ritual tuntunan agama ketika menghadapi bencana? (PCNU Kab. Trenggalek)

Jawaban

a. Azan di luar konteks solat fardhu tidaklah dilarang (tidak sunnah), sebab azan sebagai dzikir adalah dianjurkan pada setiap saat kecuali ketika buang air (*qadha' hajah*), apalagi dengan azan juga bertujuan mengharap berkah, mengharap ketenangan hati atau menghilangkan rasa sedih sedang menimpa.
b. Tuntunan agama ketika terjadi bencana adalah memanjatkan doa dan dzikir (termasuk azan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, dan melakukan solat sunat secara sendirian (*minfarid*).

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, II/17-18, [Dar al-Fikr]:

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللهُ بِهِ مَا حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْدَ سَدِّ فَتْحِ اللَّحْدِ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ هُوَ بِدْعَةٌ إِذْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِيهِ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْأَصْبَحِيَّ أَفْتَى بِمَا ذَكَرْتُهُ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ وَرَدَ فِيهِمَا خَبَرٌ عِنْدَ ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خَبَرًا وَلَا أَثَرًا إِلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّهُ مَقِيسٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ الْوِلَادَةُ أَوَّلُ الْخُرُوجِ إِلَى الدُّنْيَا وَهَذَا آخِرُ الْخُرُوجِ مِنْهَا وَفِيهِ ضَعْفٌ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ أَعْنِي تَخْصِيصَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَإِلَّا فَذِكْرُ اللهِ مَحْبُوبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي وَقْتِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ اهـ كَلَامُهُ رَحِمَهُ اللهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ

بِدْعَةٌ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ ضَعْفِ الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ يُعْلَمُ دَفْعُهُ بِأَدْنَى تَوَجُّهٍ.

(Ibn Hajar ditanya) *–nafa'a Allah bihi-* apa hukum azan dan iqamah saat membuka liang *lahd*? (aku menjawab) dengan ungkapannya hukumnya *bid'ah*, karena tidak sah sesuatu di dalamnya dan perkara yang di*nukil* dari sebagian ulama bahwa hal itu tidak bisa dijadikan sandaran. Lalu aku melihat al-Ashbahi berfatwa sebagaimana aku sebutkan; sungguh beliau ditanya, apakah terdapat khabar tentang keduanya ketika itu? Aku menjawab dengan ungkapannya: Saya tidak mengetahui adanya khabar dan *atsar* dalam hal itu kecuali riwayat yang diceritakan dari sebagian *mutaakkhirin*, beliau berkata: *"Barangkali hal itu disamakan pada kesunahan azan dan iqamah di telinga anak yang dilahirkan"*, dan seolah-olah beliau berkata: *"Melahirkan adalah awal keluar ke dunia dan ini ialah akhir keluar darinya"*. Dalam riwayat ini terdapat kelemahan, sehingga sungguh semisal ini tidak tetap kecuali dengan ajaran *syara'*, maksud saya ketentuan azan dan iqamah; jika tidak maka dzikir kepada Allah itu disunahkan dalam setiap kondisi kecuali pada waktu *qadha'il hajat*. Dengan ini diketahui, sungguh hal itu sesuai pada riwayat yang saya sebutkan bahwa sungguh hal itu merupakan perbuatan *bid'ah*; adapun keterangan yang diisyaratkan sebagian ulama mengenai kelemahan *qiyas* tersebut, maka hal itu sangat jelas dan terang, yang telah maklum dapat ditolak dengan sangat mudah.

b. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, II/372:

الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ:

٥١ - شُرِعَ الْأَذَانُ أَصْلًا لِلْإِعْلَامِ بِالصَّلَاةِ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ تَبَرُّكًا وَاسْتِئْنَاسًا أَوْ إِزَالَةً لِهَمٍّ طَارِئٍ، وَالَّذِينَ تَوَسَّعُوا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ هُمْ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالُوا: يُسَنُّ الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ، وَفِي أُذُنِ الْمَهْمُومِ فَإِنَّهُ يُزِيلُ الْهَمَّ، وَخَلْفَ الْمُسَافِرِ، وَوَقْتَ الْحَرِيقِ، وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ، وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيلَانِ وَعِنْدَ الضَّلَالِ فِي السَّفَرِ، وَلِلْمَصْرُوعِ، وَالْغَضْبَانِ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، وَعِنْدَ إِنْزَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ إِلَى الدُّنْيَا. وَقَدْ رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ مِنْهَا مَا رَوَى أَبُو رَافِعٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ، كَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ. وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ" إلخ.
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ مَسْأَلَةَ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ فَقَطْ وَنَقَلَ الْحَنَفِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَسْتَبْعِدُوهُ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لِأَنَّ مَا صَحَّ فِيهِ الْخَبَرُ بِلَا مُعَارِضٍ مَذْهَبٌ لِلْمُجْتَهِدِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ وَكَرِهَ الْإِمَامُ مَالِكٌ هَذِهِ الْأُمُورَ وَاعْتَبَرَهَا بِدْعَةً إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ نَقَلَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ ثُمَّ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهِ.

Azan untuk selain solat:
Azan disyariatkan pada asalnya untuk memberitakan datangnya waktu solat, kecuali kadang disunahkan azan untuk selain solat sebab mencari berkah dan mencari kenyamanan atau menghilangkan perkara yang datang kepada mereka. Adapun orang-orang yang membuat keluasan dalam menyebutkan hal-hal ini adalah *Fuqaha' Syafiyyah* yang berkata: *"Disunahkan azan di telinga anak yang dilahirkan ketika ia dilahirkan, di telinga orang yang sedih karena hal itu dapat menghilangkan kesedihannya, di belakang musafir, di waktu kebakaran, ketika berkecamuk perang, ketika mengamuknya setan, saat tersesat dalam perjalanan, karena ayan, dan marah, orang yang buruk perilakunya dari manusia atau binatang, saat menurunkan mayat ke dalam kubur karena menyamakan pada awal keluarnya ia ke dunia".* Sungguh diriwayatkan sebagian hadits mengenainya; diantaranya hadits yang diriwayatkan Abu Rafi': *"Saya melihat Nabi ﷺ azan di telinga Hasan ketika Fatimah melahirkannya".* Juga diriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda: *"Orang yang melahirkan anak kemudian mengazaninya di telinga kanan dan mengiqamahi di telinga kiri, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh Umm ash-Shibyan (jenis jin)."* Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda: *"Sungguh setan, saat kita dipanggil untuk menjalankan solat maka ia berpaling."* Ulama al-Hanabilah menuturkan masalah azan di telinga anak yang dilahirkan saja, sedangkan Ulama al-Hanafiyah menukil riwayat yang disebutkan asy-Syafi'i dan tidak menganggapnya jauh dari kebenaran. Ibn Abidin berkata: *"Karena sungguh hadits yang sah dan tiada penentang merupakan mazhab bagi mujtahid meskipun tidak dinash."* Imam Malik memakruhkan perkara-perkara ini dan menganggapnya sebagai *bid'ah*, tapi sebagian Ulama Malikiyyah menukil pendapat Ulama Syafi'iyyah, kemudian mereka berkata: *"Tidak masalah bila diamalkan."*

c. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*, IV/149:

(وَيُسْتَحَبُّ لِكُلٍّ) وَفِي نُسْخَةٍ لِكُلِّ أَحَدٍ (أَنْ يَتَضَرَّعَ) بِالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ (عِنْدَ الزَّلَازِلِ وَنَحْوِهَا مِنَ الصَّوَاعِقِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ) وَالْخَسْفِ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَنَحْوِهَا

أَوْ يَقُوْلُ كَالصَّوَاعِقِ (وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا لِئَلَّا يَكُوْنَ غَافِلًا) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ رواه مسلم وَرَوَى الشَّافِعِيُّ خَبَرَ مَا هَبَّتْ رِيْحٌ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا وَرَوَى أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ حَثَّ عَلَى الصَّلَاةِ فِيْ زَلْزَلَةٍ وَلَا يُسْتَحَبُّ فِيْهَا الْجَمَاعَةُ وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى فِيْ زَلْزَلَةٍ جَمَاعَةً لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْحَلِيْمِيُّ: وَصِفَتُهَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَصَلَاةِ الْكُسُوْفِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَغَيُّرَ عَنِ الْمَعْهُوْدِ إِلَّا بِتَوْقِيْفٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَبِهٰذَا الْاِحْتِمَالِ جَزَمَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فَقَالَ تَكُوْنُ كَكَيْفِيَّةِ الصَّلَوَاتِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى هَيْئَةِ الْخُسُوْفِ قَوْلًا وَاحِدًا وَيُسَنُّ الْخُرُوْجُ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَقْتَ الزَّلْزَلَةِ قَالَهُ الْعَبَادِيُّ وَيُقَاسُ بِهَا نَحْوُهَا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ لٰكِنَّهُ قِيَاسُ النَّافِلَةِ الَّتِيْ لَا تُشْرَعُ لَهَا الْجَمَاعَةُ.

(Disunahkan bagi masing-masing), dalam satu naskah: *"Bagi tiap-tiap individu"*, (merendah) dengan doa dan sesamanya (ketika ada gempa dan sesamanya seperti kilat dan angin dahsyat), serta gerhana. Sebaiknya penulis cukup menulis kalimat: *"Dan sesamanya"* atau berkata: *"Seperti halilintar"*, (dan solat di rumahnya sendiri supaya tidak lupa) karena sungguh ketika angin berhembus, Nabi ﷺ berdoa: *"Ya Allah, sungguh aku memohon kebaikannya, kebaikan perkara di dalamnya dan kebaikan hal yang dikirimkan padanya dan aku berlindung pada engkau dari keburukannya, keburukan perkara di dalamnya dan keburukan perkara yang diutus padanya."* HR. Muslim. Asy-Syafi'i meriwayatkan khabar: Angin tidak berhembus kecuali Nabi ﷺ berlutut di atas kedua lututnya dan berkata: *"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat dan janganlah jadikan sebagai adzab. Ya Allah jadikanlah ia sebagai angin yang menyejukkan dan janganlah jadikan sebagai angin yang merontuhkan."* Diriwayatkan juga: *"Sungguh Umar mengajarkan solat ketika ada kegoncangan dan tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah."* Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ali: *"Sungguh beliau solat ketika terjadi kegoncangan secara berjamaah itu tidak shahih."* Beliau berkata dalam *ar-Raudhah*, al-Halimi berkata: *"Caranya menurut Ibn Abbas dan A'isyah seperti solat kusuf"*. Mungkin tidak mengubah dari cara yang diketahui kecuali dengan ajaran *syara'*. Az-Zarkasyi berkata: *"Dengan kemungkinan*

ini Ibn abi ad-Dam mantap." Kemudian ia berkata: *"Caranya seperti tata cara solat yang lain dan tidak boleh solat sebagaimana cara solat khusuf menurut satu qaul saja"*. Selain itu, disunnahkan keluar ke tanah lapang ketika terjadi gempa sebagaimana kata al-'Ubbadi; dan sesamanya disamakan dengannya. Adapun ungkapan *Mushannif*: *"Di rumahnya"*, merupakan tambahannya dan aku tidak melihat tambahan pada penulis lain, tetapi itu adalah *qiyas nafilah* yang tidak disyariatkan berjamaah.

d. *Makarim al-Akhlaq*, 137:

(فِي الْمَطَرِ) وَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ فَقَالَ صَيِّبًا هَنِيئًا وَعَنِ الصَّادِقِ رضي الله عنه قَالَ إِذَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ فَأَكْثِرْ مِنَ التَّكْبِيرِ وَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا هَاجَتْ بِهِ الرِّيَاحُ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْنَا رَحْمَةً وَعَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا.

(Ketika hujan) dan saat langit menurunkan hujan, maka beliau berkata: *"Awan hujan yang bermanfaat."* Dari ash-Shadiq ☙ berkata: *"Bila angin bertiup kencang maka perbanyaklah takbir dan katakanlah: Ya Allah, sungguh aku memohon kebaikannya, kebaikan perkara yang ditiupkan angin dan kebaikan perkara yang ada di dalamnya dan aku berlindung pada-Mu dari keburukannya dan keburukan perkara di dalamnya. Ya Allah jadikanlah ia sebagai rahmat bagiku dan sebagai adzab bagi orang kafir."*

444. Perilaku dan Tindakan Orang Gila

Deskripsi Masalah

Tidak layak untuk disalahkan, jika ada seorang yang akalnya di bawah normal melakukan kesalahan. Sebut saja Budi, dia terlahir normal sebagaimana anak yang lain, namun entah apa sebabnya ketika menginjak remaja, akalnya jadi kurang normal. Kelakuannya terkadang membuat orang senang, namun disisi lain membuat orang merasa kurang nyaman. Contoh ulahnya:

1) Kegemarannya berada di dalam masjid dan selalu terdepan mengikuti aktifitas masjid, namun ketika ia bersuara melalui microfon suaranya jadi tidak karuan dan sangat mungkin dapat menimbulkan *tasywisy*.
2) Terkadang dia berkeliling di jalan-jalan dengan telanjang.
3) Terkadang dia merusak barang milik orang lain.
4) Terkadang dia tidak pulang semalaman, dan pihak keluarga khawatir ada bahaya yang menghampirinya.
5) Akhirnya keluarganya memasung dia dengan harapan mungkin dengan jalan itu Budi dapat menjadi seorang yang normal seperti

yang lain, atau setidaknya mencegah hal-hal yang dikhawatirkan keluarga.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum memasung orang kurang normal dengan berbagai alasan tersebut?
b. Bagaimana seharusnya sikap orang yang normal melihat kejadian di atas?
c. Jika memang yang dilakukan itu adalah hal yang tidak dibenarkan, apakah walinya wajib *dhaman*? (PCNU Kab. Pasuruan)

Jawaban

a. Mempertimbangkan penjelasan pada deskripsi masalah, maka memasung Budi yang sudah demikian mengganggu bahkan boleh jadi menyakiti orang lain, adalah diperbolehkan jika memang sudah tidak menemukan cara yang lain.
b. Sikap masyarakat terhadap orang tidak normal yaitu memberi teguran (menyampaikan perintah dan larangan) bahkan sampai ikut bertanggung jawab dalam urusan kemaslahatannya bagi yang mampu, apabila penanggung jawab dari pihak keluarga sudah tidak mampu, yaitu seperti urusan makan, minum, pakaian, kebersihan dan kesehatan.
c. Kerusakan dan kerugian harta milik orang lain akibat tindakan orang gila harus diganti menggunakan harta miliknya dan jika tidak mungkin, maka menjadi tanggung jawab walinya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *At-Tasyri' al-Jana'i fi al-Islam*, I/162:

وَيَسْتَدِلُّ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ التَّعْزِيْرِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ بِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا اتُّهِمَ بِسَرِقَةِ بَعِيْرٍ، وَلَمَّا ظَهَرَ فِيْمَا بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْهُ أَخْلَى الرَّسُوْلُ سَبِيْلَهُ - إلى أن قال - وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّعْزِيْرِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ مَنْعُ الْمَجْنُوْنِ مِنَ الْاِتِّصَالِ بِالنَّاسِ إِذَا كَانَ فِي اتِّصَالِهِ بِهِمْ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ، وَحَبْسُ مَنْ شُهِرَ بِإِيْذَاءِ النَّاسِ وَلَوْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ أَنَّهُ أَتَى فِعْلًا مُعَيَّنًا.

Para Fuqaha ber*istidlal* tentang syariat *ta'zir* demi kemaslahatan umum dengan fakta, bahwa Rasulullah ﷺ telah menahan seorang lelaki yang dituduh mencuri unta; saat terbukti setelahnya bahwa sungguh ia tidak mencuri maka Rasul melepaskannya ... Di antara contoh *ta'zir* karena kepentingan umum ialah mencegah orang gila dari bertemu masyarakat bila pertemuannya membahayakan pada mereka, dan menahan orang yang dikenal suka menyakiti orang lain meski tidak terbukti adanya

dalil sungguh ia datang dengan melakukan tindakan tertentu.

b. *Hasyiyah Qulyubi* pada *Hasyiyatan*, IV/206 [Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1375 H/1950 M]:

قوله: (بِحَبْسٍ) وَلَهُ إِدَامَةُ حَبْسِ مَنْ يَكْثُرُ أَذَاهُ لِلنَّاسِ، وَلَا يَكْفِيهِ التَّعْزِيرُ حَتَّى يَمُوتَ، قوله: (صَفْعٍ) هُوَ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الْكَفِّ أَوْ بِبَطْنِهَا (أَوْ تَوْبِيخٍ بِالْكَلَامِ) وَبِالْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسٍ وَخَلْعِ مَلْبُوسٍ وَيَجُوزُ بِإِرْكَابِ دَابَّةٍ نَحْوِ حِمَارٍ مَقْلُوبًا وَدَوَرَانِهِ بَيْنَ النَّاسِ وَبِكَشْفِ رَأْسٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ وَبِصَلْبٍ دُونَ ثَلَاثٍ وَتَغْرِيبٍ دُونَ عَامٍ فِي الْحُرِّ، وَدُونَ نِصْفِهِ فِي الرَّقِيقِ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ حَلْقِ لِحْيَةٍ وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ حَلْقُهَا لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَحَلْقُ رَأْسِ الْمَرْأَةِ كَاللِّحْيَةِ وَلَوْ عُزِّرَ بِهِ فِيهِمَا كَفَى وَمَنَعَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ الضَّرْبَ بِالدِّرَّةِ الْمَعْرُوفَةِ الْآنَ لِذَوِي الْهَيْئَاتِ لِأَنَّهُ صَارَ عَارًا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ فَرَاجِعْهُ. قوله: (وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ) وَكَذَا غَيْرُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ التَّعْزِيرُ مِنْ نَحْوِ كَافِلِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ وَسَيِّدٍ فِي رَقِيقِهِ وَمُعَلِّمٍ لِمُتَعَلِّمٍ مِنْهُ لَكِنْ بِإِذْنِ وَلِيِّ مَحْجُورٍ وَزَوْجٍ لِحَقِّ نَفْسِهِ. قوله: (وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ إلخ) هُوَ دَفْعٌ لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ أَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الْأَشْيَاءِ، فَيُفِيدُ أَنَّهَا لِلْإِبَاحَةِ فَلَهُ جَمْعُ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ وَيَجِبُ مُرَاعَاةُ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ كَالصِّيَالِ.

Pendapat Jalaluddin al-Mahalli (*dengan menahan*), dan ia boleh menahan selamanya hingga meninggal orang yang sering menyakiti manusia, sementara *ta'zir* tidak menjerakannya. Ungkapan Jalaluddin al-Mahalli (*menampar*), maksudnya memukul dengan mengepalkan telapak tangan atau bagian dalamnya, (*atau mencela dengan ucapan*), menyuruh berdiri dari tempat duduk, melepas pakaian yang dipakai, boleh menaikkan ke atas kendaraan semisal keledai secara terbalik dan diarak di tengah manusia, membuka penutup kepala dan mencukur rambut bagi orang yang membencinya, disalib di bawah tiga hari dan diasingkan di bawah setahun bagi orang merdeka, dan di bawah setengah tahun bagi budak. Tidak boleh menahan dari makan, minum, solat, atau mencukur jenggot, meskipun kita berpendapat: *"Menurut qaul ashah dimakruhkan mencukur jenggotnya untuk kebaikan dirinya, dan mencukur rambut kepala wanita sebagaimana jenggot; dan jika dita'zir dengannya maka cukup." Syaikhuna* ar-Ramli mengikuti Ibn Daqiq al-'Id melarang memukul dengan *dirrah* (alat pemukul) yang terkenal sekarang orang yang memiliki kemuliaan, karena hal menjadi aib bagi keluarganya. Rujuklah. Ungkapan Jalaluddin

al-Mahalli (*dan imam berijtihad*), dan selainnya juga yaitu orang yang boleh men*ta'zir*, seperti orang yang merarwat anak kecil, orang gila, dan *safih*, dan *Sayid* kepada budaknya, pengajar pada siswanya tetapi dengan izin Wali anak yang tercegah bertasaruf dan suami untuk hak dirinya. Ungkapan Jalaluddin al-Mahalli (*dan ia boleh mengumpulkan…*) ini menolak keterangan yang dipahami dari أَوْ atau salah satu beberapa hal tersebut, maka berfaidah *ibahah*, sehingga ia boleh mengumpulkan dua *ta'zir* atau lebih, dan wajib mengutamakan *ta'zir* yang lebih ringan, lalu yang agak ringan seperti tindakan kepada pengganggu.

c. *At-Taj al-Mazhab li Ahkam al-Mazhab*, VIII/12:

(وَلَا) يُنْكِرُ (غَيْرُ وَلِيٍّ) لِلصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ (عَلَى صَغِيرٍ) أَوْ مَجْنُونٍ إِذَا رَآهُ يَفْعَلُ مُنْكَرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ (بِالْإِضْرَارِ بِهِ) بِالضَّرْبِ أَوِ الْحَبْسِ بَلْ يَكْفِيهِ الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ لِأَنَّ ضَرْبَهُ مِنْ بَابِ التَّأْدِيبِ وَهُوَ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَطْ فَإِنْ فَعَلَ الْغَيْرُ ضَمِنَ مَا جَنَاهُ عَلَى الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ إِلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُؤَدِّبُ صَبِيَّ الْآخَرِ كَانَ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ ذَلِكَ وَيَكُونُ جَرْيُ الْعُرْفِ إِذْنًا لَهُ فِي التَّأْدِيبِ.

Dan tidak boleh mengingkari (selain wali) bagi anak kecil atau orang gila (pada anak kecil) atau orang gila bila melihatnya melakukan kemungkaran, maka tidak boleh baginya mengingkarinya (dengan merugikannya) dengan memukul atau menahan, tapi cukup baginya memerintah atau melarang karena memukulnya merupakan bagian dari mengajarkan budi pekerti yang menjadi hak walinya saja. Jika orang lain ikut campur maka ia harus menanggung perbuatannya terhadap anak kecil dan sesamanya, kecuali berlaku kebiasaan di antara para wali bahwa setiap orang boleh mendidik anak orang lain, maka boleh bagi selain wali melakukan hal tersebut, dan berlakunya *'urf* menjadi izin baginya dalam mendidik.

d. *Fath al-Qarib al-Mujib* pada *at-Taqrib*, 137:

(فصل) فِي أَحْكَامِ الْحَضَانَةِ وَهِيَ لُغَةً مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحِضْنِ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَهُوَ الْجَنْبُ لِضَمِّ الْحَاضِنَةِ الطِّفْلَ إِلَيْهِ وَشَرْعًا حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِ نَفْسِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ كَطِفْلٍ وَكَبِيرٍ مَجْنُونٍ (وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ) أَيْ تَرْبِيَتِهِ بِمَا يُصْلِحُهُ بِتَعَهُّدِهِ بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَغَسْلِ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَتَمْرِيضِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ.

(Pasal) tentang hukum *hadhanah*. Menurut bahasa diambil dari kata الْحِضْنِ

dengan dibaca *kasrah ha*'nya, yaitu perlindungan, sebab berkumpulnya wanita yang mengasuh dengan anak kecil. Menurut *syara'* adalah menjaga anak-anak yang tidak mandiri dalam urusan dirinya dari hal-hal yang menyakitinya karena tidak adanya *tamyiz*, seperti anak kecil dan orang tua gila, (dan bila seorang laki-laki menceraikan istrinya dan ia memiliki anak dari istrinya maka istri lebih berhak mengasuhnya), maksudnya hak mengasuh dengan hal yang maslahat bagi anak, dengan merawatnya dengan menyediakan makanan dan minuman, memandikan, mencucikan pakaian, mengobatinya dan lain-lain dari berbagai kebutuhannya.

e. *I'anah ath-Thalibin*, IV/101:

فَصْلُ الْحَضَانَةِ ... وَتَثْبُتُ لِكُلِّ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَكِنِ الْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا لِأَنَّهُنَّ بِالْمَحْضُونِ أَشْفَقُ وَعَلَى الْقِيَامِ بِهَا أَصْبَرُ وَبِأَمْرِ التَّرْبِيَةِ أَبْصَرُ وَإِذَا تُوزِعَ فِي الْأَهْلِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَمُؤْنَتُهَا فِي مَالِ الْمَحْضُونِ ثُمَّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ ثُمَّ هُوَ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ فَتَكُونُ الْمُؤْنَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِنِ انْتَظَمَ وَإِلَّا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ.

Pasal *hadhanah* ... *hadhanah* ditetapkan bagi setiap orang yang memiliki keluarga baik laki-laki maupun wanita, akan tetapi wanita lebih layak dengannya karena mereka lebih sayang dan lebih telaten mengasuh anak yang diasuh dan lebih perhatian terhadap urusan pendidikan. Apabila keahliannya diperselisihkan, maka harus ada ketetapan di depan hakim. Biaya asuh ditanggung dengan harta anak asuh, ayah, ibu, kemudian menjadi kebutuhan kaum muslimin, sehingga biayanya ditanggung *baitul mal* jika ada. Jika tak ada, maka ditanggung orang kaya muslimin.

f. *'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti*, IV/45:

مَسْأَلَةٌ قَتَلَ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ دَابَّةً كَحِمَارٍ مَثَلًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ غُرْمُ قِيمَةِ الْحِمَارِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ تَلْزَمُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ بَقِيَتْ قِيمَةُ الْحِمَارِ بِذِمَّتِهِ دَيْنًا حَتَّى يَبْلُغَ وَيُوسِرَ قَالَهُ شَيْخُنَا فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهُ إِذَا كَانَ لَا مَالَ لِلصَّبِيِّ شَيْءٌ.

Permasalahan anak *mumayyiz* yang membunuh binatang seperti keledai misalkan, maka wajib bagi wali menanggung harganya dari harta anak tersebut, karena hak-hak yang bersifat harta wajib ditanggung anak dan orang gila. Jika ia tidak memiliki harta, maka harganya tetap menjadi tanggungannya sampai baligh dan menjadi kaya. Demikian kata *Syaikhuna*.

Jadi tidak wajib bagi walinya bila anak tersebut tidak memiliki harta.

g. *Hasyiyah al-'Athar*, I/51:

وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ مُخَاطَبٌ بِأَدَاءِ مَا وَجَبَ فِي مَالِهِمَا مِنْهُ كَالزَّكَاةِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفِ كَمَا يُخَاطَبُ صَاحِبُ الْبَهِيْمَةِ بِضَمَانِ مَا أَتْلَفَتْهُ حَيْثُ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا لِتَنَزُّلِ فِعْلِهَا فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ.

Wali anak dan orang gila *dikhithabi* dengan memenuhi tanggungan yang wajib dalam harta keduanya dari harta mereka, seperti zakat dan beban atas barang yang dirusaknya, sebagaimana pemilik hewan yang *dikhitabi* menanggung barang yang dirusak oleh binatangnya karena ia ceroboh menjaganya, sebab dalam kondisi seperti ini perbuatan hewan menempati posisi perbuatan pemiliknya.

445. Menyebar Uang Saat Pembacaan Solawat

Deskripsi Masalah

Sudah menjadi tradisi di daerah kami, ketika memperingati maulid Nabi Muhammad ﷺ banyak kalangan *aghniya'* memanfaatkan momen tersebut untuk bersedekah dengan cara menyebar uang receh pada saat pembacaan Salawat Nabi (*srakalan*), sehingga konsentrasi pembacaan Solawat beralih pada rebutan uang receh tersebut. Melihat antusiasme masyarakat dalam ritual tersebut, akhirnya budaya ini berkembang tidak hanya dalam peringatan Maulid Nabi, tetapi juga dalam peringatan lain yang di dalamnya terdapat pembacaan Solawat, baik dilakukan di masjid, musholla maupun di rumah-rumah.

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum bersedekah dengan cara disebar/dilempar tersebut?
b. Bagaimana hukum menyebar uang receh di tengah-tengah pembacaan Solawat Nabi (*srakalan*)?
c. Bagaimana hukum menyebar uang tersebut, bila dilakukan di dalam masjid? (PCNU Kab. Mojokerto)

Jawaban

a. Bersedekah dengan cara menyebar/melempar uang diperbolehkan, akan tetapi apabila sedekah dengan cara itu malah menimbulkan hal-hal yang kurang baik seperti saling berebut, ketidak-samaan dalam mendapatkan sedekah bahkan sampai mengabaikan *muru'ah*, maka lebih baik cara sedekah semacam itu dihindari.
b. Boleh, asalkan tidak sampai menimbukan hal-hal di atas dan juga tidak malah terkesan menodai tujuan maulid.

c. Mengingat tempatnya yaitu masjid dan berebut uang sedekah justru menjadikan konsentrasi sebagian yang hadir tidak menghiraukan kemuliaan masjid, maka sedekah dengan cara menyebar uang di dalam masjid tidak perlu dilakukan apalagi dilestarikan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Hawi fi Fiqh asy-Syafi'i*, IX/565:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيْ نَثْرِ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ فِي الْعُرْسِ لَوْ تُرِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِخِلْسَةٍ وَنُهْبَةٍ وَلَا يَبِيْنُ أَنَّهُ حَرَامٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَغْلِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَى صَاحِبِهِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا نَثْرُ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ فِي الْعُرْسِ أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ طِيْبٍ أَوْ دَرَاهِمَ ، فَمُبَاحٌ إِجْمَاعًا اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ الْجَارِيْ فِيْهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ زَوَّجَ عَلِيًّا بِفَاطِمَةَ رضي الله عنها نَثَرَ عَلَيْهِمَا لَكِنِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِحْبَابِهِ وَكَرَاهِيَتِهِ فَذَهَبَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَفِعْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ النَّثْرِ فَقَالَ: هِبَةٌ مُبَارَكَةٌ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ مُبَاحٌ لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ وَلَا مَكْرُوْهٍ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ وَقَالَ سَائِرُ أَصْحَابِنَا - وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - : أَنَّهُ مَكْرُوْهٌ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهِ لِأُمُوْرٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ قَدْ يُوْقِعُ بَيْنَ النَّاسِ تَنَاهُبًا وَتَنَافُرًا وَمَا أَدَّى إِلَى ذٰلِكَ فَهُوَ مَكْرُوْهٌ. وَالثَّانِيْ: أَنَّهُ قَدْ لَا يَتَسَاوَى النَّاسُ فِيْهِ، وَرُبَّمَا حَازَ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَهُ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَى آخَرِيْنَ شَيْءٌ مِنْهُ، فَيَتَنَافَسُوْا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ قَدْ يَلْجَأُ النَّاسُ فِيْهِ إِلَى إِسْقَاطِ الْمُرُوْءَاتِ إِنْ أَخَذُوْا، أَوْ يَتَسَلَّطُ عَلَيْهِمُ السُّفَهَاءُ إِنْ أَمْسَكُوْا، وَقَدْ كَانَتِ الصَّحَابَةُ وَمَنْ عَاصَرَ الرَّسُوْلَ صلى الله عليه وسلم أَحْفَظَ لِلْمُرُوْءَاتِ وَأَبْعَدَ لِلتَّنَازُعِ وَالتَّنَافُسِ، فَلِذٰلِكَ كُرِهَ النِّثَارُ بَعْدَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُكْرَهْ فِيْ زَمَانِهِمْ، وَعَادَةُ أَهْلِ الْمُرُوْءَاتِ فِيْ وَقْتِنَا أَنْ يَقْتَسِمُوْا ذٰلِكَ بَيْنَ مَنْ أَرَادُوْا أَوْ يَحْمِلُوْا إِلَى مَنَازِلِهِمْ.

Masalah: Asy-Syafi'i berkata: *"Menyebar kacang-kacangan, biji cokelat dan gula dalam pernikahan; jika ditinggalkan maka lebih aku sukai, karena barang-barang itu diambil dengan cara menyelubung, dan menjarah, namun tidak jelas keharamannya, kecuali sebagian orang mengalahkan sebagian yang lain, lalu mengambilnya dari orang lain yang disenanginya."* Al-Mawardi berkata: *"Adapun menyebar gula dan biji cokelat pada pernikahan atau lainnya dari*

minyak wangi atau dirham-dirham, maka hukumnya mubah menurut ijma' karena mempertimbangkan urf' yang berlaku, karena hadits yang diriwayatkan bahwa ketika menikahkan Ali dengan Fathimah Nabi ﷺ menyebarkan sesuatu kepada keduanya; tetapi Fuqaha berbeda pendapat mengenai kesunnahan dan kemakruhannya." Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa tradisi itu disunnahkan dan mengerjakannya lebih utama daripada meninggalkannya, karena hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang tradisi menyebarkan sesuatu; lalu beliau bersabda: *"Tradisi itu adalah pemberian yang diberkati"*. Sebagian *Ashab* kita berkata: *"Tradisi itu mubah, tidak disunnahkan, tidak makruh, dikerjakan dan ditinggalkan hukumnya sama"*. Para *Ashab* kita yang lain, yaitu menurut lahiriah mazhab asy-Syafi'i menyatakan: *"Tradisi itu hukumnya makruh dan meninggalkannya lebih utama daripada mengerjakannya; karena beberapa alasan. Pertama, tradisi itu kadang memicu saling jarah dan saling berbantahan di antara orang, sehingga perbuatan yang mendatangkannya hukumnya makruh. Kedua, kadang perolehan orang tidak rata, terkadang sebagian orang memperoleh lebih banyak, dan tidak ada sedikitpun yang diperoleh orang lain, lalu mereka saling berbangga diri. Ketiga, terkadang orang berpolemik sampai menggugurkan muruah jika mereka mengambil, atau orang safih menguasainya jika mereka tidak melakukannya, padahal sahabat dan orang yang semasa dengan Rasul ﷺ lebih menjaga muruah dan lebih menjauhi perselisihan serta saling berbangga diri, karena itu maka tradisi itu dimakruhkan setelah masa mereka, meskipun tidak dimakruhkan pada masa mereka. Adapun kebiasaan ahli muruah pada masa kita membagi barang-barang yang disebarkan itu kepada orang yang menghendaki, atau membawanya ke rumah-rumah mereka."*

b. *Al-Majmu'*, XVI/395, [al-Maktabah as-Salafiyah]:

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالنِّثَارُ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا مَا يُنْثَرُ فِي النِّكَاحِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مُبَاحٌ إِذْ مَا يَنْثُرُهُ إِلَّا إِبَاحَةً لَهُ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِمُنَافَاةِ الْمُرُوءَةِ وَالْوَقَارِ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي نَثْرِ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ لَوْ تَرَكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِخُلْسَةٍ وَنَهْبٍ وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّهُ حَرَامٌ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ نَثْرَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ وَالزَّبِيبِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يُكْرَهُ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ (كَانَ إِذَا نَثَرَ لِلصِّبْيَانِ يَمْنَعُ صِبْيَانَهُ عَنِ الْتِقَاطِهِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى.

Mushannif berkata dalam *al-Bahr*: *Nutsar* dengan membaca *dhummah nun* dan *kasrah*nya adalah perkara yang disebar dalam pernikahan atau lainnya yang diperbolehkan, karena tidak menyebarnya kecuali *ibahah* dan sungguh dimakruhkan karena menafikan *muruah* dan ketenangan.

Dan sungguh asy-Syafi'i berkata mengenai menyebar gula, biji cokelat dan kacang-kacangan; apabila ditinggalkan maka lebih menyenangkan padaku karena hal itu diambil dengan menahan dan menjarahnya dan tidak jelas bagiku bahwa hal itu diharamkan. Kesimpulannya, sungguh menyebar gula, biji cokelat, kacang-kacangan, anggur, dirham, dinar dan lain-lain itu dimakruhkan. Dan diriwayatkan sungguh abu Mas'ud al-Anshari (saat ia menyebar pada anak kecilnya maka ia mencegah anaknya dari mengumpulkannya; dengan ini Ath', Ikrimah, Ibn Sirin dan Ibn Abi Laila berpendapat).

c. *Al-Mausu'ah al-Yusufiyah*, 404-405:

وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِسْلَامُ ابْنُ الْحَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ رحمه الله تعالى أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ وَلٰكِنَّهَا مَعَ ذٰلِكَ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا عَلَى الْمَحَاسِنِ وَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَ بِدْعَةً حَسَنَةً وَإِلَّا فَلَا وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيْجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا: هُوَ يَوْمٌ أَغْرَقَ اللهُ فِيْهِ الْفِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوْسَى فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى: فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الشُّكْرُ لِلّٰهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ وَيُعَادُ ذٰلِكَ فِي نَظِيْرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ تَعَالَى يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُوْدِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتِّلَاوَةِ وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِبُرُوْزِ هٰذَا النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَعَلَى هٰذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ فِيْهِ عَلَى مَا يُفْهِمُ الشُّكْرَ لِلّٰهِ تَعَالَى مِنَ التِّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَإِنْشَادِ شَيْءٍ مِنَ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَرِّكَةِ لِلْقُلُوْبِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ وَأَمَّا مَا يَتْبَعُ ذٰلِكَ مِنَ السَّمَاعِ وَاللَّهْوِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: مَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يَقْتَضِي السُّرُوْرَ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ لَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ بِهِ وَمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوْهًا فَيُمْنَعُ وَكَذَا مَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى.

Asy-Syaikh al-Islam Ibn Hajar al-Asqalani-*Rahimahu Allah Ta'ala*- berkata: "*Hukum asal amal maulid adalah bid'ah yang tidak dinukil dari seorang salaf shalih sejak tiga kurun, akan tetapi bid'ah tersebut bersama hal itu sungguh mencakup pada kebagusan-kebagusan dan sebaliknya. Barang siapa meneliti amalnya pada kebagusan dan membela sebaliknya maka merupakan bid'ah hasanah; jika tidak meneliti maka tidak bid'ah hasanah.*" Dan bagiku sungguh

mengeluarkannya telah jelas pada asal yang tetap dalam dua kitab Shahih bahwa sungguh Nabi ﷺ mendahulukan Madinah lalu menemui Yahudi yang menjalankan puasa pada hari Asyura lalu beliau menanyai mereka, lalu mereka berkata: *"Ini adalah hari dimana Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari itu dan Musa selamat; Sehingga kita puasa sebab bersyukur pada Allah ﷻ"*. Kemudian diambil faidah darinya, bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan padanya di hari itu, yaitu datangnya nikmat atau tertolaknya keburukan. Dan hal itu diulangi pada hari yang bertepatan dengannya setiap tahun. Adapun bersyukur kepada Allah bisa dihasilkan dengan bermacam-macam ibadah seperti sujud, puasa, sedekah, dan membaca al-Qur`an. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat hadirnya Nabi yang membawa rahmat pada hari itu? Berdasar hal itu, sebaiknya perayaan maulid Nabi dicukupkan dengan kegiatan yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah ﷻ semisal membaca al-Qur`an, memberi makan, mendendangkan sesuatu dari puji-pujian nabawi yang memotivasi hati untuk melakukan perbuatan baik dan amal akhirat. Adapun kegiatan yang diikutkan padanya seperti mendengar nyanyian, gurauan dan lain-lain, maka sebaiknya dikatakan: kegiatan yang *mubah* sekira menunjukkan kebahagiaan pada hari itu maka tidak masalah disertakan pada perayaan itu, sedangkan kegiatan yang haram atau makruh maka dicegah. Begitu juga yang *khilaf al-aula*.

d. *Nail al-Authar*, II/190:

٦٤٨ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَأَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ رواه أبو داود) قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الْبَزَّارُ: هٰذَا الْحَدِيْثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَذُكِرَ أَنَّهُ رُوِيَ مُرْسَلًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي حَازِمٍ سَلْمَانَ الْأَشْجَعِيِّ بِنَحْوِهِ أَتَمَّ مِنْهُ. وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّصَدُّقِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَقَدْ بَوَّبَ أَبُوْ دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ ... وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسَرَ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ فَرَبَطَ بِسَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ نَثَرَ مَالًا جَاءَهُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَسَمَهُ فِيْهِ انتهى. قُلْتُ: رَبْطُ ثُمَامَةَ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيْحَيْنِ بِلَفْظِ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ

أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. وَنَثْرُ الْمَالِ فِي الْمَسْجِدِ وَقِسْمَتُهُ ثَابِتٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَاقَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا. وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ رَبْطِ الْأَسِيرِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُسْلِمُ بِالْأَوْلَى وَعَلَى جَوَازِ قِسْمَةِ الْأَمْوَالِ فِي الْمَسَاجِدِ وَنَثْرِهَا فِيهَا.

Dari Abdurrahman bin Abu Bakar, ia berkata: *"Rasulullah ﷺ bersabda: "Apakah di antara kalian ada yang memberi makan orang miskin pada hari ini?"* Abu Bakar berkata: *"Saya masuk masjid, dan tatkala itu saya bertemu orang yang sedang meminta-minta, lalu saya menemukan potongan roti di depan Abdurrahman, lalu aku mengambil dan memberikannya kepadanya."* (HR. Abu Dawud)

Abu Bakar al-Bazzar berkata: *"Hadits ini tidak saya ketahui diriwayatkan dari abdurrahman bin Abu Bakar kecuali isnad ini dan disebutkan sungguh hadits ini diriwayatkan secara mursal"*. Al-Mudziri berkata: *"Imam Muslim telah mengeluarkannya dalam Shahihnya dan an-Nasa'i dalam Sunannya dari hadits Abu Hazim Salman al-Asyja'i dengan redaksi sesamanya yang lebih sempurna darinya"*. Hadits itu menunjukkan atas kebolehan sedekah di masjid dan bolehnya masalah ketika hajat. Abu Dawud telah membuat bab dalam *Sunan*nya pada hadits ini, lalu beliau berkata: *Bab Meminta-minta di Masjid* ... *Mushannif-Rahimahullah*-berkata: *"Telah tetap bahwa Nabi ﷺ menawan Tsamamah bin Atsal lalu mengikatnya dengan tiang di masjid sebelum Islamnya. Sudah tetap dari beliau, sungguh beliau menyebar harta yang berasal dari Bahrain di masjid dan membaginya di situ."* Saya berkata: *"Kisah mengikat Tsamamah tersebut ada dalam Shahihain dengan lafal: "Nabi ﷺ mengirim pasukan kuda di sisi Najd, lalu mereka datang dengan membawa laki-laki dari Bani Hanifah yang disebut Tsamamah bin Atsal. Mereka mengikatnya dengan salah satu tiang di masjid lalu ia mandi, kemudian masuk dan berkata: "Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah"*. Adapun kisah menyebar harta di masjid dan membaginya di situ telah ada dalam *al-Bukhari* dan lainnya dengan lafal: *"Nabi ﷺ dibawakan harta dari Bahrain lalu bersabda: "Sebarkanlah harta itu di masjid"*, banyaknya harta yang dibawa Nabi lalu disebutkan kisahnya secara panjang. Dua hadits itu menunjukkan boleh mengikat tawanan musyrik di masjid, apalagi tawanan muslim, maka lebih utama, dan boleh membagi harta di masjid dan menyebarkan di dalamnya.

e. *Sunan Ibnu Majah*, I/481:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ: صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَارَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ.

Ahmad bin Yusuf as-Sulami menceritakan padaku, Muslim bin Ibrahim menceritakan padaku, al-Harits bin Nabhan menceritakan padaku, Uthbah bin Yaqhdhan menceritakan padaku dari Abu Said dari Makhul dari Watsilah bin al-Asqa', sungguh Nabi ﷺ bersabda: *"Jauhkanlah masjid-masjidmu dari anak-anak kecilmu, orang-orang gilamu, orang-orang burukmu, jual-belimu, permusuhanmu, meninggikan suaramu, menegakkan had-hadmu, menghunus pedangmu, buatkan tempat bersuci di dekat pintu-pintunya, dan berilah wewangian tiap hari Jumat."*

446. Kriteria *Balad al-Jum'ah* dan *Balad az-Zakah*

Deskripsi Masalah

Dalam kajian kitab *salaf* tentang penggunaan istilah tempat dalam pemberlakuan solat jumat dan zakat selalu identik dengan kalimat *balad*. Sementara struktur tata pemerintahan di Indonesia dari yang terendah adalah RT, RW, Dusun/Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Ketegasan tentang kriteria ini sangat dibutuhkan terkait dengan banyak persoalan hukum Islam, misalnya dalam satu *balad* tidak boleh *ta'addud al-Jum'ah*, masalah *naql az-zakat* dan sebagainya.

Pertanyaan

a. Apa kriteria yang tepat di Indonesia dengan istilah *balad* ?
b. Adakah persamaan atau perbedaan *balad* dalam banyak terminologi misalnya masalah Solat Jum'at dan zakat? (PCNU Kab. Blitar)

Jawaban

a. *Balad* dalam peristilahan kitab-kitab fiqh adalah kawasan hunian tempat tinggal tetap (bukan musiman) yang telah memiliki sebagian dari layanan publik yaitu pengadilan agama, pelayanan keamanan dan fasilitas perbelanjaan/pasar.
b. *Term balad* dalam bab jum'ah dan zakat tidak terdapat perbedaan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin*, II/59:

وقوله بِمَحَلٍّ مَعْدُودٍ مِنَ الْبَلَدِ الْمُرَادُ بِالْبَلَدِ أَبْنِيَةُ أَوْطَانِ الْمُجَمِّعِينَ سَوَاءٌ كَانَتْ بَلَدًا أَوْ قَرْيَةً أَوْ مِصْرًا وَهُوَ مَا فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَحَاكِمٌ شَرْطِيٌّ وَأَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ وَالْبَلَدُ مَا فِيهِ بَعْضُ ذَلِكَ وَالْقَرْيَةُ مَا خَلَتْ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Di tempat yang dianggap sebagai balad"*, yang dimaksud dengan *Misr* (kota) adalah bangunan tanah kelahiran jamaah Jumat, baik berupa *balad*, desa, atau kota. Kota adalah tempat yang ada hakim *syar'i*nya, petugas keamanan (semacam polisi), dan pasar untuk *muamalah*. *Balad* adalah tempat yang sebagian hal di atas ada; sedangkan desa adalah tempat yang semua hal itu tidak ada.

b. *Fath al-'Alam*, III/35:

(حَدُّ الْمِصْرِ وَالْبَلَدِ وَالْقَرْيَةِ) وَالْمِصْرُ مَا فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَحَاكِمٌ شَرْطِيٌّ وَسُوقٌ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيُسَمَّى مَدِينَةً. وَالْبَلَدُ مَا بَعْضُ ذَلِكَ وَالْقَرْيَةُ مَا خَلَتْ عَنِ الْجَمِيعِ وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ الصِّحَّةَ بِالْمِصْرِ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَرَحْمَةِ الْأُمَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَبْنِيَةِ الْمَنَازِلُ وَالْبُيُوتُ الَّتِي يَسْتَوْطِنُهَا الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ لَبِنٍ أَوْ آجُرٍّ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ ... وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُجْتَمِعَةً عُرْفًا أَوْ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْزِلَيْنِ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَمَا بِهَامِشِ الشَّرْقَاوِيِّ نَقْلًا عَنِ الْمَدَابِغِيِّ فَإِنْ تَفَرَّقَتْ لَمْ تَجِبِ الْجُمُعَةُ إِلَّا إِنْ بَلَغَ أَهْلُ دَارٍ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَتَصِحُّ إِقَامَتُهَا فِيهِ وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهُ كَبَلَدِ الْجُمُعَةِ. وَحَدُّ الْقُرْبِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ مَنْزِلٍ وَمَنْزِلٍ دُونَ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ. وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعُرْفُ أَفَادَهُ بجيرمي. وَفِي فَتْحِ الْمُعِينِ: وَلَوْ تَعَدَّدَتْ مَوَاضِعُ مُتَقَارِبَةٌ وَتَمَيَّزَ كُلٌّ بِاسْمٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ إِنْ عُدَّ كُلٌّ مَعَ ذَلِكَ قَرْيَةً مُسْتَقِلَّةً عُرْفًا. وَمِثْلُهُ فِي بُشْرَى الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ وَلِكُلٍّ حُكْمُهُ أَيْ فَلِكُلِّ مَوْضِعٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ حُكْمٌ مُخْتَصٌّ بِهِ فَإِنْ كَانَ كُلُّ مَوْضِعٍ مُشْتَمِلًا عَلَى أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ لَزِمَتْهُمُ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُمْ.

(Batasan kota, *balad* dan desa) *Misr* adalah tempat yang terdapat hakim *syar'i*, hakim *syarthi* dan pasar untuk jual beli dan dinamakan *Madinah*. *Balad* adalah tempat yang tersedia sebagian dari hal-hal itu; Sedangkan *Qaryah* adalah tempat yang tidak terdapat dari semuanya. Abu Hanifah mengkhususkan keabsahan Solat Jumat di *Misr*, sebagaimana dalam *al-Bujairami* dan *Rahmah al-Ummah*. Yang dimaksud dengan bangunan

adalah rumah-rumah dan ruang-ruang yang dijadikan tempat tinggal sejumlah warga yang dipertimbangkan dalam keabsahan Solat Jumat, baik dari bahan batu bata, maupun kayu ... dan disyaratkan berkumpul menurut *urf* atau jarak di antara dua tempat tersebut tidak melebihi 300 *dzira'* sebagaimana dalam *Hamisy asy-Syarqawi* yang menukil dari al-Mudabighi. Jika terpisah-pisah maka tidak wajib Solat Jumat, kecuali jika penduduknya sempurna 40 orang. Maksudnya wajib bagi mereka melaksanakan Solat Jumat dan sah menegakkannya di sana; yaitu dinisbatkan kepada orang yang dekat darinya, seperti *balad al-jum'ah*. Adapun batasan dekat adalah di antara rumah dan rumah setelahnya 300 *dzira'*. Menurut *qaul rajih* yang dipertimbangkan adalah *'urf*, seperti penjelasan *al-Bujairami*. Dalam *Fath al-Mu'in*: *"Jika tempatnya banyak dan saling berdekatan, dan masing-masing dibedakan dengan nama tertentu, maka masing-masing tempat memiliki hukum sendiri, jika masing-masing di anggap sebagai desa yang berdiri sendiri menurut 'urf"*. Pendapat semisalnya ada dalam *Busyra al-Karim*. Ungkapan *Mushannif*: *"Masing-masing memiliki hukumnya"*, maksudnya masing-masing tempat dari tempat-tempat itu memiliki hukum khusus. Jika setiap tempat mencakup sempurna 40 orang, maka wajib bagi mereka melaksanakan Solat Jumat, dan jika tidak maka tidak wajib.

c. *Bulghah ath-Thulab*, 172:

(مسألة ك) لَا فَرْقَ بَيْنَ بَلَدَيِ الْجُمُعَةِ وَالزَّكَاةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ فِيهِمَا مَا فِي خِطَّةِ الْأَبْنِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ الْجَمْعُ وَالْقَصْرُ فِيهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابَيْهِمَا.

(Masalah Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani) Tidak ada perbedaan antara *balad jum'at* dan zakat; sebab yang dimaksud dengan *balad* pada keduanya adalah tempat dalam garis bangunan sekira tidak boleh bagi *musafir* menjamak dan meng*qashr* di dalamnya; sebagaimana ulama menjelaskan di kedua babnya.

447. Calon Suami Pilihan Orang Tua

Deskripsi Masalah

Ada seorang janda yang telah memiliki calon suami pengganti suami yang lalu dan keduanya telah sepakat untuk menikah. Tanpa persetujuan si janda, ternyata orang tuanya sudah menyiapkan calon suami baginya. Ketika orang tuanya mengajukan calon suami bagi anaknya tersebut, putrinya menolak sebab dia tidak suka dengan calon suami pilihan orang tuanya. Menurut hadits Nabi dinyatakan, bahwa seorang janda berhak menentukan sendiri calon suaminya. Ini mengandung makna bahwa wanita janda berhak menentukan sendiri calon suaminya

bukan orang tuanya. Sedang di satu sisi orang tua tetap ngotot dengan pilihannya dengan dalih anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya.

Pertanyaan

a. Bolehkah orang tua memaksakan kehendak untuk menikahkan anak perempuannya yang janda dengan calon pilihan orang tuanya?
b. Berdosakah bagi seorang anak dalam konteks deskripsi di atas yang menolak keinginan orang tuanya?
c. Adakah solusi yang terbaik untuk keduanya? *(PCNU Kota Malang)*

Jawaban

a. Tidak diperbolehkan orang tua memaksa *(ikrah)* terhadap anak perempuannya dalam persoalan nikah, sebab boleh jadi hal itu justru malah menimbulkan *madharat*.
b. Penolakan dalam persoalan ini tidak berdosa, tetapi tidak dengan cara yang vulgar dan terkesan menentang, melainkan harus dengan cara yang baik dan santun.
c. Di zaman seperti sekarang ini sudah seharusnya terdapat ruang dan kesempatan komunikasi yang baik dalam keluarga, terutama antara orang tua dan anak dalam persoalan pernikahan, sehingga akan melahirkan saling pengertian dan tidak sampai terjadi pemaksaan kehendak dari pihak orang tua atau perlawanan dari pihak anak.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Adab al-Islam fi Nizham al-Usrah li Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani*, 66-67:

وَلْيَكُنْ مَعْلُومًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِكْرَاهُ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَكَمْ لِلْإِكْرَاهِ مِنْ بَلَايَا وَنَكَبَاتٍ وَعَوَاقِبَ وَخِيمَةٍ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَأْبَاهُ كُلَّ الْإِبَاءِ. رَوَى النَّسَائِيُّ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضي الله تعالى عنها فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِيْ ابْنَ أَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِيْ خَسِيْسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ اجْلِسِيْ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيْهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِيْ وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

Ketahuilah sungguh tidak boleh memaksa wanita dewasa agar menikah, baik ia masih gadis atau sudah janda. Banyak bahaya, penyimpangan, akibat buruk dan kesengsaraan dari pemaksaan; Islam mencegahnya dengan sebenar-benarnya pencegahan. An-Nasa'i meriwayatkan: "*Seorang pemudi mendatangi Aisyah Umm al-Mukminin-Radhiyallahu 'anha-lalu*

berkata: "Sungguh ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat kerendahannya, dan aku tak suka". Aisyah berkata: "Duduklah hingga Rasulullah datang.," Rasulullah datang, kemudian aku mengabarinya, dan beliau mengirimkan utusan kepada ayahnya, lalu memanggilnya, lalu menyerahkan urusan itu kepada wanita tersebut. Wanita itu berkata: "Ya Rasulullah, sungguh aku memperkenankan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin tahu, apakah wanita memiliki suatu hak dari urusan ini?"

b. *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, I/143-159:

(سُؤَالٌ) قوله تعالى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَالنِّكَاحُ مُبَاحٌ وَقَدْ نُهِيَ الْأَبُ عَنْ مَنْعِ ابْنَتِهِ فَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي تَرْكِ الْمُبَاحِ وَلَا فِي تَرْكِ الْمَنْدُوبِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. (جَوَابُهُ) أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا حَقٌّ فِي الْإِعْفَافِ وَالتَّصَوُّنِ وَدَفْعِ ضَرَرِ مُوَاقَعَةِ الشَّهْوَةِ وَسَدِّ ذَرَائِعِ الشَّيْطَانِ عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لَهَا وَأَدَاءُ الْحُقُوقِ وَاجِبٌ عَلَى الْآبَاءِ لِلْأَبْنَاءِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ لِلْأَبْنَاءِ جَوَازُ إِذَايَةِ الْآبَاءِ بِاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ الْحَقِّ أَلَا تَرَى أَنَّ مَالِكًا فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنَعَ مِنْ تَحْلِيفِ الْأَبِ فِي حَقٍّ لَهُ وَقَالَ: إِنْ حَلَّفَهُ كَانَ جُرْحَةً فِي حَقِّ الْوَلَدِ فَالْآيَةُ مَا دَلَّتْ إِلَّا عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْآبَاءِ لَا عَلَى إِبَاحَةِ إِذَايَتِهِمْ بِالْمُخَالَفَةِ.

(*Soal*) firman Allah ﷻ: "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*" [QS. al-Baqarah: 232]. Nikah itu dibolehkan dan seorang ayah dilarang mencegah putrinya, maka apakah tidak wajib mentaati orang tua dalam meninggalkan perkara mubah, dan tidak dalam meninggalkan perkara sunnah dengan jalan lebih utama? (*Jawab*) anak perempuan punya hak menjaga, melindungi dan menolak bahaya tuntutan syahwat, dan menutup pintu setan darinya dengan menikah. Apabila demikian, maka hal itu menjadi haknya dan memenuhinya menjadi kewajiban ayah terhadap anaknya. Akan tetapi kewajiban hak yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak-anaknya tidak menetapkan bolehnya menyakiti ayah dengan memenuhi hak itu. Ingatlah, Imam Malik dalam *al-Mudawwanah* melarang anak menyumpah ayah terkait hak baginya. Beliau berkata: "*Jika anak menyumpah ayahnya, maka itu merupakan kejahatan bagi anak.*" Jadi ayat ini (QS. al-Baqarah: 232) tidak menunjukkan selain kewajiban ayah, tidak pada bolehnya menyakiti mereka dengan menyelisihinya.

c. *An-Nafa'is al-'Ulwiyah fi al-Masa'il ash-Shufiyah li Sayyid Abdullah Alawi al-Haddad*, 170:

وَسَأَلَهُ الْفَقِيهُ الْفَاضِلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمُودِيُّ عَنْ طَاعَةِ الْوَالِدَيْنِ فِيمَا يَأْمُرَانِهِ بِهِ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إِذَا أَمَرَا بِمُبَاشَرَةِ أَسْبَابِ الدُّنْيَا وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمُبَاحَاتِ الَّتِي رُبَّمَا أَدَّتْ إِلَى الْمَضَرَّاتِ؟ فَأَجَابَهُ نَفَعَ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُ مَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ طَاعَةِ الْوَالِدَيْنِ فَذَلِكَ كَذَلِكَ وَلَوْ أَنَّهُمَا أَمَرَاهُ بِالتَّوَسُّعِ فِي الْمُبَاحَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالتَّلَبُّسِ بِأَسْبَابِ الدُّنْيَا الَّتِي رُبَّمَا تَضُرُّ الْإِنْسَانَ فِي دِينِهِ أَوْ تُعَرِّضُهُ لِلْوُقُوعِ فِي مَعْصِيَةِ رَبِّهِ، فَالَّذِي نَرَاهُ وَنَقُولُ بِهِ إِنَّهُ لَا يُطِيعُهُمَا فِي ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَا يُشَافِهُهُمَا وَلَا يُوَاجِهُهُ بِصَرِيحِ الرَّدِّ وَالْمُخَالَفَةِ وَلَكِنَّهُ يُدَارِيهِمَا وَيَتَلَطَّفُ مَعَهُمَا لِمَا يَجِبُ لَهُمَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنَ الْبِرِّ لَهُمَا وَالرِّفْقِ بِهِمَا.

Al-Faqih al-Fadhil Abdullah Muhammad bin Utsman al-Amudi bertanya kepada Sayyid Abdullah Alawi bin akl-Haddar mengenai taat kepada orang tua dalam hal yang diperintahkannya, apa hal itu berlaku dalam kasus bila orang tua memerintah anak melakukan urusan dunia dan memperluas hal mubah yang terkadang mendatangkan bahaya? Beliau menjawab-*nafa'a Allah wa radhiya anhu*-: "Apa yang kamu tanyakan, yaitu ketaatan terhadap orang tua yang wajib bagi anak, maka hal itu ya demikian itu. Jika keduanya memerintahkan memperluas kemubahan duniawi dan mencampur-adukkan sebab-sebab dunia yang terkadang membahayakan bagi agamanya atau menjatuhkannya dalam maksiat terhadap Tuhannya, maka yang kita yakini dan kita katakan adalah, sungguh tidak wajib menaati kedua orang tua dalam hal tersebut, tapi tidak perlu menampakkan dan menghadapi mereka dengan penolakan dan penentangan secara jelas. Hendaknya anak tetap berkomunikasi dan sopan terhadap mereka, karena kasih sayang yang wajib diberikan kepadanya, serta keharusannya berbuat baik dan halus terhadapnya.

d. *An-Nasha'ih ad-Diniyah li Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad*, 284:

ثُمَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي وَيُسْتَحَبُّ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يُعِينُوا أَوْلَادَهُمْ عَلَى بِرِّهِمْ بِالْمُسَامَحَةِ وَتَرْكِ الْمُضَايَقَةِ فِي طَلَبِ الْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ وَمُجَانَبَةِ الْاِسْتِقْصَاءِ فِي ذَلِكَ سِيَّمَا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الَّتِي قَلَّ فِيهَا الْبِرُّ وَالْبَارُّونَ وَفَشَا فِيهَا الْعُقُوقُ وَكَثُرَ الْعَاقُّونَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَسَامَحَ أَوْلَادَهُ سَلَّمَهُمْ وَخَلَّصَهُمْ مِنْ إِثْمِ الْعُقُوقِ وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَحَصَلَ لَهُ مِنْ ثَوَابِ اللهِ وَكَرِيمِ جَزَائِهِ مَا هُوَ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ وَخَيْرٌ وَأَبْقَى مِنْ بِرِّ الْأَوْلَادِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَحِمَ اللهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ.

Kemudian sungguh sebaiknya dan disunnahkan bagi kedua orang tua membantu anak-anak mereka dalam berbakti pada kedua orang tua, dengan kemurahan, tidak menyulitkan dalam menuntut mendatangkan berbagai hak, dan menjauhi mendominasinya dalam hal itu. Apalagi di masa kini sedikit kebaikan, sedikit orang yang berbuat baik, populer berani kepada kedua orang tua, dan banyak orang berani pada orang tua; bila orang tua melakukannya dan memberi kemurahan pada anak-anaknya maka akan menyelamatkan mereka dan menghindarkannya dari dosa berani pada orang tua dan resiko yang muncul darinya, yaitu berbagi akibat di dunia dan di akhirat, dan menghasilkan pahala Allah dan kemuliaan balasan-Nya baginya. Ini lebih utama, lebih mulia, lebih baik, dan lebih kuat bagi kebaikan anak-anak. Sungguh berkata Nabi ﷺ: *"Semoga Allah mengasihi orang tua yang membantu anaknya berbuat kebaikan."*

e. *Al-Kalim ath-Thayib Fatawa 'Ushriyah li Ali Jum'ah Muhammad al-Hanafi*, I/341:

وَهُنَاكَ نِدَاءٌ إِلَى كُلِّ الْآبَاءِ فِيْ هٰذَا الْعَصْرِ الَّذِيْ نَعِيْشُ فِيْهِ وَقَدْ خَفَّ الضَّغْطُ الْاِجْتِمَاعِيُّ أَنْ يَكُوْنُوْا حُكَمَاءَ فِيْ هٰذَا وَزَوَاجُ الْبِنْتِ بِمَنْ تُرِيْدُ أَوْلَى مِنْ ذَهَابِهَا هُنَا وَهُنَاكَ وَقَطْعِهَا لِلْأُسْرَةِ وَالْبِنْتُ تَتَزَوَّجُ الَّذِيْ تُرِيْدُهُ وَهٰذَا أَوْلَى مَا دَامَ تَحْتَ نَظَرِ الْأُسْرَةِ وَرِعَايَتِهَا حَتَّى مَعَ رَفْضِهِمْ لَهُ مِنْ أَنْ تَذْهَبَ وَتَتَزَوَّجَ رَغْمًا عَنْهُمْ وَبَعِيْدًا عَنْهُمْ وَتُصْبِحَ الْأُمُوْرُ فِي الْحَيَاةِ أَكْثَرَ تَعْقِيْدًا وَسُوْءًا وَالْبِنْتُ مُعَرَّضَةٌ لِضَيَاعٍ أَكْثَرَ مِنَ الضَّيَاعِ الَّذِيْ لَوْ كَانُوْا هُمْ مَعَهَا مُسْتَمِرِّيْنَ.

Di sana ada peringatan bagi setiap ayah di masa kini, di mana kita hidup di dalamnya, dan sungguh ringan pengendalian sosial, bahwa orang-orang adalah juru hakim dalam masalah ini. Pernikahan anak gadis dengan orang yang dikehendakinya lebih baik daripada perginya kesana kemari dan memutuskan hubungan keluarga, sementara ia menikah dengan orang yang dikehendakinya. Ini lebih utama selama berada di bawah bimbingan keluarganya serta pengawasannya, hingga bersama penolakan orang tua terhadap calon suaminya, karena ia akan pergi dan menikahinya tanpa memedulikan orang tua dan menjahuinya. Urusan kehidupannya akan lebih banyak kesukaran dan keburukannya, dan ia akan menjerumuskan dirinya dalam kesia-sian yang lebih besar daripada kesia-siaan andaikan keluarga tetap bersamanya.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR
di PP Modern Hidayatul Hasan Blukon
Lumajang, 17-18 Januari 2014

448. Status Bangunan Masjid di Atas Lahan Pengairan
449. Hukum Renovasi Masjid yang Kondisinya Masih Baik
450. Tukar Guling Tanah Wakaf Aset Masjid dan Perluasan Masjid
451. Hibah Ayah kepada Anaknya (1)

KOMISI A

MUSHAHIH

KH. Athoillah Anwar
KH. Farihin Muhsan
KH. Mahrus Maryani

PERUMUS

K. Anang Darunnaja
K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams

MODERATOR

K. Ali Romzi
K. Ahmad Fauzi Hamzah Syams

NOTULEN

Ust. Ahmad Muntaha AM
Ust. Abdul Mughits

448. Status Bangunan Masjid Di Atas Lahan Pengairan

Deskripsi Masalah

Terdapat suatu masjid yang lahannya kebetulan persis di tepi sungai. Seiring perkembangan, masjid tersebut mengalami perbaikan dan pelebaran sesuai kebutuhan jamaah dan kepentingan masjid. Karena dipandang lahan masjid yang lama kurang memadai untuk dilakukan perluasan, maka panitia pembangunan mengambil alternatif melakukan pelebaran lahan masjid dengan meminta ijin dinas pengairan setempat untuk membuat cor dak di atas sungai yang ada di sampingnya untuk dipergunakan sebagai lahan masjid. Hanya saja, dimaklumi bahwa lahan sungai itu adalah milik dinas pengairan, yang –apabila dipergunakan oleh pihak lain– hanya mungkin berstatus "hak pakai", bukan atau tidak dapat distatuskan "hak wakaf".

Pertanyaan

a. Hak pakai, hak guna lahan, hak guna bangunan atau hak-hak terbatas atas tanah yang diatur oleh Undang-undang Pertanahan apakah juga diatur dalam syariah?
b. Apakah lahan masjid disyaratkan harus berstatus lahan wakaf?
c. Bangunan masjid di atas sungai yang berstatus "hak pakai" apakah berstatus masjid? (*PCNU Lumajang*)

Jawaban a

Aturan-aturan tersebut ada dalam syariat. Pertimbangannya:

1) Hak guna-usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
2) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
3) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-undang.
4) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya bisa dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

5) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

Dengan mempertimbangkan maksud dari istilah hak-hak terbatas ini, maka menurut syariat perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Hak guna-usaha yang menjadi wilayah pemerintah hanya terkait *mawat*, *ma'adin al-bathinah*, aset *baitul mal*.
2) Hak guna bangunan yang menjadi wilayah pemerintah adalah *al-marafiq al-ammah* selain *harim an-nahr* dengan berbentuk bangunan, sedangkan yang dimiliki pribadi maka boleh dengan cara ibahah.
3) Hak pakai sama dengan hak guna bangunan.
4) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan termasuk kategori *ihya' al-mawat* yang pengolahannya harus disesuaikan dengan syarat-syaratnya.
5) Hak guna air, termasuk pemanfaatan *huquq al-musytarakah* yang berarti siapapun boleh memanfaatkannya dengan catatan tidak merugikan hak milik orang lain.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Ahkam as-Sulthaniyah*, 243 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِيمَا انْتَقَلَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ رِقَابِ الْأَمْوَالِ هَلْ يَصِيرُ وَقْفًا عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْانْتِقَالِ إِلَيْهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا لِعُمُومِ مَصْرِفِهَا الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِجِهَةٍ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا إِقْطَاعُهَا. وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَصِيرُ وَقْفاً حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا إِذَا رَأَى بَيْعَهَا أَصْلَحَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيَكُونُ ثَمَنُهَا مَصْرُوفاً فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ، وَفِي ذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَأَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وَأَمَّا إِقْطَاعُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ قِيلَ بِجَوَازِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ بَيْعُهَا وَصَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى مَنْ يَرَاهُ مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ وَأَرْبَابِ الْمَصَالِحِ جَازَ إِقْطَاعُهَا لَهُ، وَيَكُونُ تَمْلِيكُ رَقَبَتِهَا كَتَمْلِيكِ ثَمَنِهَا.

Dan *ashab* asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai sesuatu yang beralih ke *baitul-mal* yang berupa harta benda, apakah secara otomatis menjadi wakaf hanya dengan peralihan/perpindahan tersebut? Ada dua pendapat: salah satunya: harta benda tersebut seketika menjadi wakaf dikarenakan keumuman dari arah penyalurannya yang tidak tertentu dengan satu arah manapun, sehingga apabila mengikuti pendapat ini maka tidak boleh menjual harta benda tersebut dan tidak boleh memberikannya secara khusus (pemberian sebagian). adapun pendapat yang kedua adalah:

harta benda itu tidak menjadi wakaf secara langsung, tapi menunggu sehingga imam (pemimpin negara) mewakafkannya, dengan mengikuti pendapat ini, maka boleh bagi imam menjual harta benda itu apabila dia berpendapat bahwa penjualan itu lebih berguna bagi *baitul-mal* dan uang hasil penjualan tersebut disalurkan pada kemaslahatan umum, dan orang-orang yang membutuhkan dari *ahlul-fai'* dan *ahlus-shadaqat*, adapun pemberian yang secara khusus menurut pendapat ini maka sungguh-sungguh telah ada yang menyatakan diperbolehkan, dikarenakan ketika penjualan harta benda tersebut serta penyaluran hasilnya untuk orang-orang yang membutuhkan dan mereka yang termasuk *arbab al-mashalih* yang dipertimbangkan oleh imam itu boleh, maka pemberian khusus dari imam kepada mereka juga boleh, dan pemberian kepemilikan atas benda-benda tersebut adalah sama seperti pemberian uang (pengganti) yang didapatkan dari penjualan benda-benda itu.

b. *Ahkam as-Sulthaniyah*, 236-237 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتُصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنِ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنَ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا وَيَكُونُ السَّابِقُ إِلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْمَسْبُوقِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إِجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا. وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إِلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْغَدِ فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ وَاعْتِبَارُ هَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إِلَى حُكْمِ الْمِلْكِ.

Adapun bagian yang ketiga adalah sesuatu yang menjadi khusus bagi berbagai pelataran/halaman dari beberapa jalan tembus di perkotaan dan beberapa jalan secara umum, hal ini tergantung pertimbangan dari sultan, dan dalam pertimbangan sultan terdapat dua pendapat ulama: salah satunya pertimbangan sultan dalam hal ini hanya sebatas mencegah

mereka (para pengguna jalan) dari penganiayaan dan tindakan yang membahayakan serta mendamaikan mereka ketika ada perselisi' .in dan tidak ada kewenangan bagi sultan untuk menyuruh berdiri orang yang sedang duduk, mendahulukan orang yang datang terakhir (setelahnya) dan orang yang datang lebih dulu di suatu tempat di sana menjadi lebih berhak atas tempat tersebut daripada orang yang datang setelahnya. Dan pendapat kedua menyatakan bahwa pertimbangan sultan mengenai hal khusus tentang berbagai jalan adalah seperti pertimbangan seorang *mujtahid* mengenai apa yang dia nilai bagus dia dapat memberikan hak duduk bagi orang yang duduk di sana dan melarang orang yang dia larang untuk duduk, serta mendahulukan orang yang dia dahulukan, sebagaimana dia dapat ber*ijtihad* di dalam harta-harta *baitul-mal* dan memberikan sebagian tanah yang tak bertuan, orang yang datang lebih dulu tidak dijadikan lebih berhak. Dan tidak diperbolehkan baginya meminta biaya atas perbuatan orang-orang yang duduk di sana menurut dua pendapat tadi. Dan bila dia membiarkan mereka atas dasar saling merelakan, maka orang yang lebih dulu dari dua orang yang datang ke suatu tempat di sana lebih berhak akan tempat tersebut daripada orang yang dia dahului, dan ketika dia pergi meninggalkan tempat itu, maka dia dan orang yang selain dia bagi tempat tersebut di keesokan harinya adalah sama (tidak ada hak lebih diutamakan) yang dijaga (diutamakan) adalah orang yang lebih dulu datang ke tempat itu di hari tersebut. Al-Imam Malik berkata: *"Apabila salah satu dari mereka dikenali dengan suatu tempat dan dia menjadi masyhur dengan tempat tersebut, maka dia lebih berhak dengan tempat itu dibandingkan orang yang lainnya, hal ini dikarenakan demi menghentikan perebutan dan menutup jalur pertikaian"*. Dan pertimbangan semacam ini meskipun di dalam segi kemaslahatan memiliki pendapat yang kuat, akan mengeluarkannya (hal-hal yang tertentu bagi jalan) dari hukum Ibahah menuju hukum kepemilikan.

c. *Ahkam as-Sulthaniyah,* 248, [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(فَصْلٌ) وَأَمَّا إِقْطَاعُ الْمَعَادِنِ وَهِيَ الْبِقَاعُ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللهُ تَعَالَى جَوَاهِرَ الْأَرْضِ فَهِيَ ضَرْبَانِ: ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ. فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَهِيَ مَا كَانَ جَوْهَرُهَا الْمُسْتَوْدَعُ فِيهَا بَارِزًا كَمَعَادِنِ الْكُحْلِ وَالْمِلْحِ وَالْقَارِ وَالنِّفْطِ، وَهُوَ كَالْمَاءِ الَّذِي لَا يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ وَالنَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ يَأْخُذُهُ مَنْ وَرَدَ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ ...وَأَمَّا الْمَعَادِنُ الْبَاطِنَةُ فَهِيَ مَا كَانَ جَوْهَرُهَا مُسْتَكِنًّا فِيهَا لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعَمَلِ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ، فَهَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا مَعَادِنُ بَاطِنَةٌ سَوَاءٌ احْتَاجَ الْمَأْخُوذُ مِنْهَا إِلَى سَبْكٍ

وَتَخْلِيصٍ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ. وَفِي جَوَازِ إِقْطَاعِهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ وَكُلُّ النَّاسِ فِيهَا شَرْعٌ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَجُوزُ إِقْطَاعُهُ لِرِوَايَةِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Fasal: adapun pemberian beberapa pertambangan yaitu beberapa lahan (tanah) yang dititipi berbagai permata bumi oleh Allah, maka pemberian tersebut ada dua macam: ada pertambangan yang dhahir dan ada yang bathin. Adapun yang dhahir adalah pertambangan yang mana permata yang dititipkan di sana itu tampak seperti pertambangan-pertambangan celak, garam, minyak tanah dan ter, maka hukumnya sama dengan air yang tidak dibolehkan untuk memberikan kepemilikan atas hal-hal itu, dan para manusia di dalam mengenai hal ini adalah sama, siapapun yang datang boleh untuk mengambil... hingga Al-Imam Al-Mawardi Berkata: "*Adapun pertambangan-pertambangan bathin adalah pertambangan yang mana permata yang dititipkan di sana itu tersimpan di dalamnya dan tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha, seperti pertambangan-pertambangan emas, perak, tembaga, dan besi, maka hal itu dan yang semisalnya dikategorikan pertambangan-pertambangan yang bathin, meski sesuatu yang diambil darinya membutuhkan untuk dicetak dan dibersihkan ataupun tidak.*" Dan di dalam kewenangan untuk memberikan kepemilikan atas hal-hal tersebut ada dua pendapat: salah satunya: tidak boleh, sebagaimana pertambangan-pertambangan yang dhahir dan setiap manusia di dalam mengenai hal ini adalah sepadan. Adapun pendapat yang kedua menyatakan: boleh memberikan kepemilikan dikarenakan riwayat dari Katsir Bin Abdullah Bin Amr Bin 'Auf Al-Muzni dari Ayahnya dari Kakeknya dari Rasul ﷺ.

d. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, I/129-132, [Dzat as-Salasil]:

١٩- الْإِبَاحَةُ مِنَ الْعِبَادِ لَا بُدَّ فِيهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَأْبَاهُ الشَّرْعُ، وَأَلَّا تَكُونَ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ، وَإِلَّا كَانَتْ هِبَةً أَوْ إِعَارَةً. ... إلى أن قال ... إِبَاحَةُ الْعِبَادِ كَذَلِكَ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَكُونُ التَّسْلِيطُ فِيهِ عَلَى الْعَيْنِ لِاسْتِهْلَاكِهَا، وَنَوْعٌ يَكُونُ التَّسْلِيطُ فِيهِ عَلَى الْعَيْنِ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا فَقَطْ. ... إلى أن قال ... إِبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ:

٢٠ - هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْإِبَاحَةِ قَدْ يَكُونُ مَعَ مِلْكِ الْآذِنِ لِعَيْنِ مَا أَذِنَ الِانْتِفَاعَ بِهِ كَإِذْنِ مَالِكِ الدَّابَّةِ أَوِ السَّيَّارَةِ لِغَيْرِهِ بِرُكُوبِهَا، وَإِذْنِ مَالِكِ الْكُتُبِ لِلِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا. وَقَدْ يَكُونُ الْإِذْنُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ عَيْنُهُ، وَلَكِنْ يُمْلَكُ مَنْفَعَتُهُ بِمِثْلِ الْإِجَارَةِ أَوِ الْإِعَارَةِ، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِمَا أَنْ يَكُونَ الِانْتِفَاعُ شَخْصِيًّا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ.

Ibahah dari para hamba (artinya para manusia) tidak boleh tidak, disana harus sesuai dengan jalan yang tidak dilarang agama, dan tidak dengan cara memberikan kepemilikan, apabila tidak, maka akan menjadi hibah atau *i'arah* ... *ibahah* dari para hamba itu ada dua macam sebagaimana sesuatu yang diizinkan oleh *syari'* juga ada dua macam, macam yang pertama adalah penguasaan akan suatu benda yang terkandung di dalam *ibahah* tersebut dengan tujuan untuk kewenangan *istihlak* (memusnahkan benda itu), sedangkan macam yang kedua yaitu penguasaan didalam ibahah ini berpusat kepada kewenangan untuk pengambilan manfaat saja ... *ibahatul-intifa'* (izin untuk mengambil manfaat akan sesuatu) Macam yang ini termasuk di dalam kategori *ibahah* yang terkadang orang yang mengizinkan adalah orang yang memiliki benda yang dia izinkan untuk diambil manfaatnya, sebagaimana izin dari orang yang memiliki hewan atau mobil kepada orang lain untuk menumpanginya (menaikinya), dan seperti izin dari orang yang memiliki beberapa kitab untuk melihat kitab-kitab tersebut. Dan terkadang izin (*ibahah*) itu dapat terjadi didalam sesuatu yang sebenarnya bendanya itu bukanlah milik bagi orang yang mengizinkan, tetapi dia memiliki akan manfaatnya dengan melalui cara yang semisal *ijarah* (menyewa/akad sewa) atau *i'arah* (pinjam-meminjam), apabila didalam akad sewa dan akad pinjam itu tidak terdapat persyaratan bahwa orang yang akan menggunakan/mengambil manfaat dari benda yang disewa/dipinjam itu adalah *musta'jir* (penyewa) dan *musta'ir* (peminjam)

e. *Hasyiyah Qulyubi 'ala al-Mahalli*, III/90, [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

فَرْعٌ: لَوْ رَكِبَ الْأَرْضَ مَاءٌ أَوْ رَمْلٌ أَوْ طِينٌ فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ مِلْكٍ، وَوَقْفٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّمْلُ مَثَلًا مَمْلُوكًا فَلِمَالِكِهِ أَخْذُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْحَسِرْ عَنْهَا وَلَوْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إِقْطَاعُهُ لِأَحَدٍ كَالنَّهْرِ وَحَرِيمِهِ وَلَوْ زَرَعَهُ أَحَدٌ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ إنْ كَانَ لَهُ حِصَّةٌ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ، نَعَمْ لِلْإِمَامِ دَفْعُهُ لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ، وَمِثْلُهُ مَا يَنْحَسِرُ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ الْجَزَائِرِ فِي الْبَحْرِ وَيَجُوزُ زَرْعُهُ، وَنَحْوُهُ لِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ إِحْيَاءَهُ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاءُ وَلَا الْغِرَاسُ وَلَا مَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر وَبَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ شَيْئًا مِمَّا يُخَالِفُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ...فَرْعٌ: حَرِيمُ النَّهْرِ كَالنِّيلِ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ كَإِلْقَاءِ الْأَمْتِعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ عِنْدَ حَفْرِهِ أَوْ تَنْظِيفِهِ،

فَيُهْدَمُ مَا بُنِيَ فِيهِ وَلَوْ مَسْجِدًا كَمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ،

Suatu Cabang: Apabila terdapat air naik keatas tanah atau pasir atau lumpur maka tiga hal itu tetaplah seperti sediakala secara kepemilikan dan wakaf, bila pasir itu misalkan berpemilik, maka boleh bagi pemiliknya untuk mengambilnya, meskipun tidak terbuka dari tanah itu (mengisut darinya). Apabila air dari sungai menjadi terbuka dari satu sisi sungai itu, maka tidak menjadikan sisi yang terbuka itu keluar dari hak kaum Muslimin secara umum, dan tidak diperbolehkan bagi Sultan untuk memberikannya kepada siapapun seperti halnya sungai dan tempat yang dilindungi (diharamkan) dari sungai itu, apabila ada seseorang yang menanaminya, maka wajib atas dia membayar biayanya (biaya pemakaian itu) untuk kemaslahatan muslimin, dan gugur darinya bagian dari harta yang diperuntukkan untuk kemaslahatan muslimin apabila dia termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Tapi memang bagi Imam (pemimpin negara) boleh menyerahkannya kepada orang yang akan menggunakannya (memanfaatkannya) dengan memakai sesuatu yang tidak membahayakan kaum muslimin. Dan yang semisal hukumnya dengan sisi sungai yang terbuka airnya tersebut adalah bagian tanah yang terbuka airnya (mengering airnya) dari berbagai pulau dilautan, dan boleh menanaminya dan semisalnya bagi orang yang tidak bertujuan menghidupkannya (mendiaminya), dan disini tidak boleh mendirikan bangunan dan menanam pepohonan (tanaman yang memiliki batang kayu/tiang kayu) serta tidak boleh apapun yang membahayakan kaum Muslimin. Ini adalah pendapat yang dipakai pedoman oleh guru kami (yang *mu'tamad* menurut beliau) mengikuti Imam ar-Ramli dan beliau mengingkari habis-habisan pada orang yang menuturkan sesuatu yang berlainan dengan pendapat itu. *Wallahu A'lam*

... *Suatu Cabang*: tempat yang dilindungi (diharamkan) dari sungai [*harim An-Nahr*] seperti halnya Sungai Nil adalah: daerah sekitar sungai yang dibutuhkan untuk mengambil manfaat dari sungai itu, seperti menaruh beberapa barang (harta benda) dan daerah yang berada di wilayah luar dari sungai itu ketika penggaliannya atau saat sedang membersihkan sungai tersebut, maka apapun yang didirikan disana harus dirobohkan meskipun itu berupa Masjid sebagaimana pendapat dari *al-A'immah Al-Arba'ah* (Imam Empat Madzhab).

f. *Hawasyi asy-Syirwani*, VII/218 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنِ امْتِنَاعِ الْإِثْبَاتِ بِبِنَاءٍ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بِنَائِهِ لِلتَّمَلُّكِ وَبِنَائِهِ لِلِارْتِفَاقِ وَفِي كَلَامِ سم عَلَى حج اسْتِنْبَاطٌ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضِ أَنَّ بِنَاءَ الْبُيُوتِ فِي حَرِيمِ

الْأَنْهَارِ وَفِي مِنًى إِذَا كَانَ لِلْإِرْتِفَاقِ لَا يَمْتَنِعُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ بَلْ لِتَصْرِيحِهِمْ بِامْتِنَاعِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي حَرِيمِ الْأَنْهَارِ، لِأَنَّهَا لَا تُفْعَلُ لِلتَّمَلُّكِ. اهـ

Kemudian apa yang telah disebutkan yang berupa dilarang menetap dengan mendirikan bangunan ini adalah penjelasan yang secara terang-terangan menyatakan tidak ada bedanya antara membangun hal tersebut untuk tujuan dimiliki atau membangunnya untuk sekedar memanfaatkan (menggunakan/mengambil kegunaannya saja) dan didalam perkataan Imam Ibnu Qasim dalam *Hasyiyah* beliau atas *Tuhfah* karya Ibnu Hajar terdapat *istinbath* (pengambilan hukum) dari *ar-Raudh* bahwa mendirikan berbagai rumah diatas tempat yang dilindungi dari sungai dan diatas tanah Mina, apabila sekedar untuk memanfaatkan saja maka tidak dilarang, dan pernyataan beliau itu jelas tidak sesuai dengan tuntutan dari perkataan ini (tuntutan perkataan yang menyatakan larangan menetap dengan bangunan), dan bahkan menyimpang dari penjelasan ulama yang secara terang-terangan melarang membangun berbagai masjid diatas tempat yang dilindungi dari berbagai sungai (*harim al-anhar*), karena berbagai masjid itu juga tidak dibuat (dibangun) untuk tujuan supaya dimiliki.

g. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, 236:

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْأَمْلَاكِ ، فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا بِأَرْبَابِهَا مُنِعَ الْمُرْتَفِقُونَ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فَيُمَكَّنُوا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِمْ فَفِي إِبَاحَةِ ارْتِفَاقِهِمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِمْ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُمُ الْإِرْتِفَاقَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَرْبَابُهَا ، لِأَنَّ الْحَرِيمَ مِرْفَقٌ إِذَا وَصَلَ أَهْلُهُ إِلَى حَقِّهِمْ مِنْهُ سَاوَاهُمُ النَّاسُ فِيمَا عَدَاهُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِرْتِفَاقُ بِحَرِيمِهِمْ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِمْ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأَمْلَاكِهِمْ فَكَانُوا بِهِ أَحَقَّ وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَخَصَّ

Adapun bagian yang kedua (dari *irtifaq*/pengambilan manfaat) yaitu sesuatu yang tertentu dengan halaman-halaman berbagai rumah dan beberapa tempat yang dimiliki, bila pengambilan manfaat akan sesuatu tersebut membahayakan (mengganggu) orang-orang yang memiliki rumah-rumah dan tempat-tempat itu, maka orang-orang yang mengambil manfaat (menggunakan) halaman rumah atau halaman tempat-tempat tersebut dilarang untuk menggunakannya kecuali para pemilik itu mengizinkan masuknya gangguan/*dlarar* pada diri mereka, jika memang mengizinkan maka para pengambil manfaat tersebut dipersilahkan menggunakan, lalu apabila *irtifaq* tersebut tidak membahayakan kepada para pemilik

tempat-tempat itu, maka di dalam kebolehan mengambil faedahnya (memanfaatkannya) tanpa izin dari para pemilik tempat-tempat itu ada dua pendapat: Salah satunya boleh bagi para pengguna tersebut untuk memanfaatkannya meskipun para pemilik tidak mengizinkan, karena wilayah yang dilindungi dari suatu tempat (*harim*) adalah kemanfaatan umum (fasilitas umum) yang mana bila orang yang tinggal di dekatnya dapat mencapai kepada haknya, maka para manusia yang selain dia pun memiliki hak yang setara dengannya dalam hal yang selain itu. Sedang pendapat yang kedua: tidak boleh memanfaatkan wilayah yang dilindungi bagi suatu tempat/rumah (*harim*) kecuali dengan seizin para pemilik tempat/rumah-rumah itu, disebabkan *harim* (daerah yang dilindungi tersebut) hanyalah sekedar pengikut dari benda-benda (tempat-tempat) yang mereka miliki, sehingga mereka (para pemilik itu) lebih berhak akan *harim* itu dan lebih spesial dalam hal melakukan *tasarruf* (penggunaan) disana.

Jawaban b

Lahan masjid tidak disyaratkan harus berstatus lahan wakaf, tapi boleh pada tanah yang berstatus sewaan atau pinjaman.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/273-274 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَسُئِلَ عَمَّنْ بَنَى فِي مَوْضِعٍ مَمْلُوكٍ بِنَاءً لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ جَعَلَهُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ وَقْفِ الْأَرْضِ فَهَلْ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ فِي أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَالْقَمُولِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي بِنَاءِ أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ إِلَّا أَنْ يُثَبِّتَ فِيهِ دَكَّةً أَوْ يُبَلِّطَهُ بِأَحْجَارٍ وَوَقَفْتُ مَسْجِدًا وَاعْتَمَدَاهُ هُنَا وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ مِنْ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ فِيهِ مَسْطَبَةً بَلْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ إِنْ وَقَفَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ مَسْجِدًا وَقُلْنَا بِصِحَّةِ وَقْفِهِ فَهُوَ لَا قَرَارَ لَهُ وَالِاعْتِكَافُ إِنَّمَا يَصِحُّ بِاللُّبْثِ فِي مَسْجِدٍ وَلُبْثُهُ هُنَا لَيْسَ فِي مَسْجِدٍ بِخِلَافِهِ فِي الدَّكَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا مَسْجِدٌ فَاللُّبْثُ فِيهَا لُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الزَّرْكَشِيِّ الْمُتَّجَهُ صِحَّتُهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِشْ بِالْبِنَاءِ تَبَعًا لِلْحِيطَانِ وَالسَّقْفِ وَإِنْ جَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ يُحِيطُ بِهِ اهـ مُلَخَّصًا. وَمَا قَالَهُ عَجِيبٌ

والصواب خلافه لأن الاعتكاف إنما يصح على السقف لا تحته انتهت عبارة شرح العباب وهي صريحة كما ترى في صحة وقف البناء دون الأرض مسجدا سواء أكانت الأرض مستأجرة أم مستعارة أم لا ... رجح الإسنوي قول بعضهم لو بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدا صح كما يصح على سطحه وجدرانه وقول الزركشي يصح وإن لم يبن مسطبة مردود إذ المسجد هو البناء الذي في تلك الأرض لا الأرض ومن هنا علم أنه يصح وقف العلو دون السفل مسجدا كعكسه انتهت وهي أيضا مصرحة بصحة وقف البناء دون الأرض مسجدا فالمصلي في هوائه كأنه مصل بالمسجد ولو سقف ذلك البناء صح على سقفه الاعتكاف وأعطي سقفه جميع أحكام المسجد وذكر القمولي في باب الاعتكاف نحو ما قدمته. فقال يصح وقف العلو دون السفل مسجدا وعكسه فعلى هذا لو أراد بناء مسجد في أرض موقوفة للسكنى وقلنا لا يجوز البناء فيها وهو المرجح فالحيلة أن تبنى العرصة بالآجر والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه بناء على وقف العلو دون السفل اهـ

Ibn Hajar al-Haitami ditanya tentang orang yang mendirikan bangunan untuk solat dan untuk selainnya, di atas tempat yang dimiliki, kemudian dia menjadikannya sebagai masjid tanpa mewakafkan tanahnya, maka apakah dengan hanya seperti itu bisa menjadi masjid atau tidak, dan apakah boleh membangun masjid di atas tanah yang pinjaman atau sewaan atau tidak boleh? Beliau menjawab melalui perkataannya: "*Ibarat* dari *Syarh al-Ubab*: Al-Isnawi berkata sebagaimana al-Qamuli: "*Sebagian Ulama berpendapat tidak sah i'tikaf di dalam bangunan tanah sewaan kecuali apabila di dalam bangunan tersebut terdapat bangunan datar sebagai alas untuk duduk yang didirikan secara permanen atau mengalasinya dengan beberapa batu ubin dan diwakafkan sebagai masjid*". Al-Isnawi dan al-Qamuli memilihnya sebagai pendapat yang *mu'tamad* dan demikian pula ulama selain beliau berdua. Pendapat ini lebih unggul dibandingkan pendapat az-Zarkasyi yang menyatakan sah ber*i'tikaf* di sana meski tidak membangun *misthabah* (tempat yang ditinggikan untuk tempat duduk) di dalamnya. Bahkan ketika direnungkan tidak ada sama sekali keunggulan pendapat yang dikatakan az-Zarkasyi itu, karena kalau memang *waqif* mewakafkan bangunan itu sebagai masjid dan kita berpendapat sah wakafnya, maka bangunan itu tidak memiliki tempat menetap, sedangkan *i'tikaf* hanya dinyatakan sah apabila dengan cara menetap di masjid, sedangkan

menetapnya orang yang berada di sini tidak di dalam masjid, berbeda dengan menetap di atas bangunan datar untuk alas duduk yang telah disebutkan tadi, karena bangunan datar tersebut adalah masjid dan menetap di sana berarti menetap di dalam masjid. Lalu aku melihat sebagian ulama berkata setelah perkataan dari al-Imam az-Zarkasyi: pendapat yang diunggulkan ialah sahnya melakukan *i'tikaf* diatas bumi meski tidak ditancapi dengan bangunan karena mengikuti akan tembok-tembok dan atapnya walaupun dia duduk di atas tanah dikarenakan angkasanya meliputi dia. Sekian secara langsung ke intinya. Dan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama tadi itu sangat mengherankan, adapun yang benar adalah kebalikannya, dikarenakan *i'tikaf* hanya sah di atas atap bukan di bawahnya. Sekian ungkapan dari *Syarh Al-Ubab*, dan ungkapan itu sangat terang sebagaimana engkau lihat menyatakan sah mewakafkan bangunan tanpa tanahnya sebagai masjid entah tanah itu disewa atau dipinjam atau tidak hingga Imam Ibn Hajar berkata Imam al-Isnawi mengunggulkan perkataan dari sebagian ulama yang menyatakan: "*apabila waqif mendirikan tempat yang ditinggikan untuk alas duduk diatas tanah yang disewakan dan mewakafkan tempat duduk itu sebagai masjid, maka sah i'tikafnya sebagaimana sah melakukan i'tikaf diatas atap masjid yang datar (loteng) dan tembok-temboknya*", adapun perkataan Imam az-Zarkasyi yang menyatakan: sah *i'tikaf*nya meski tidak membangun alas duduk, itu tertolak dikarenakan masjid adalah bangunan yang ada ditanah itu bukan tanahnya, dan dari sini dapat diketahui bahwasannya bisa sah mewakafkan bagian atasnya sebuah bangunan sebagai masjid tanpa mewakafkan bagian bawahnya bangunan, sebagaimana sebaliknya. Sekian *ibarah* dari *Syarh al-Irsyad*. Dan *ibarah* ini juga menjelaskan akan sahnya mewakafkan bangunan tanpa tanahnya sebagai masjid, sehingga orang yang solat di langitnya seakan-akan dia solat di masjid, dan bila bangunan itu diberi atap, maka sah melakukan *i'tikaf* diatas atapnya, dan atap tersebut memiliki keseluruhan hukum bagi masjid, dan Imam al-Qamuli menyebutkan didalam bab *i'tikaf* seperti apa yang telah aku dahulukan tadi, hingga beliau berkata: "*Sah hukumnya mewakafkan bagian atas dari sebuah bangunan sebagai masjid, tanpa mewakafkan bagian bawahnya dan juga sebaliknya.*" Maka kalau kita mengikuti pendapat ini, bila ada seseorang yang menginginkan membangun masjid diatas tanah yang diwakafkan untuk ditinggali dan kita katakan tidak boleh membangun diatas tanah tersebut, dan ini adalah pendapat yang diunggulkan, maka cara merekayasanya adalah dengan membangun di atas halamannya dengan menggunakan batu bata dan kapur (gamping) maka bangunan itu akan menjadi masjid bila dia mewakafkannya, ini meng*qiyas*kan akan pendapat yang membolehkan wakaf atasnya saja tanpa wakaf

bagian bawahnya. Sekian

Jawaban c

Bangunan masjid di atas sungai yang berstatus hak pakai tidak berstatus masjid.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fatawa ar-Ramli*, III/68-69:

(سُئِلَ) عَمَّا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ صِحَّةِ وَقْفِ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَمَا وَجْهُ الْبُطْلَانِ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ إِذْ مِنْ شَرْطِ الْمَوْقُوفِ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَهَذَا مُسْتَحِقُّ الْإِزَالَةِ. فَإِذَا هُدِمَ الْبِنَاءُ وَقُلِعَ الْغِرَاسُ خَرَجَ عَنْ مُسَمَّاهُ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِالْمَوْقُوفِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَقَدْ قَالُوا فِي مَعْنَى الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمُسْتَعَارَةُ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَصْوِيرُهُمْ الْمَسْأَلَةَ بِالْمُسْتَأْجَرَةِ يُفْهِمُ تَصْوِيرَهَا فِي الْمَوْضُوعَةِ بِحَقٍّ أَمَّا لَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ ثُمَّ وَقَفَهُ لَمْ يَصِحَّ بَلْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ إِلَى وُجُوبِ بَقَائِهِ بِالْأُجْرَةِ مُحَافَظَةً عَلَى بَقَاءِ الْوَقْفِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ قَالَ لِي ابْنُ الرِّفْعَةِ أَفْتَيْت بِبُطْلَانِ خِزَانَةِ كُتُبٍ وَقَفَهَا وَاقِفٌ لِتَكُونَ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ فِي مَدْرَسَةِ الصَّاحِبِ بِمِصْرَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَكَانَ مُسْتَحَقٌّ لِغَيْرِ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ بِمُقْتَضَى الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَنَظِيرُهُ إِحْدَاثُ مِنْبَرٍ فِي مَسْجِدٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ جُمُعَةٌ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إِحْدَاثُ كُرْسِيِّ مُصْحَفٍ مُؤَبَّدٍ يُقْرَأُ فِيهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وَغَيْرِهِ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ وَيَجِبُ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ لِغَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ وَالْعَجَبُ مِنْ قُضَاةٍ يُثْبِتُونَ وَقْفَ ذَلِكَ شَرْعًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

Al-Imam Syihabuddin Ahmad ar-Ramli ditanyai mengenai fatwa al-Bulqini yang berupa keabsahan wakaf bangunan atau tanaman di atas tanah yang di*ghasab*, apakah fatwa itu *mu'tamad* atau tidak sebagaimana dapat difahami dari *ibarah al-Manhaj* dan *syarah*nya, dan apa keunggulan dari pendapat batalnya wakaf? Beliau menjawab: "*Bahwasannya tidak sah wakaf bangunan atau tanaman tersebut dikarenakan di antara syarat dari sesuatu yang diwakafkan adalah dapat diambil manfaatnya dalam keadaan bendanya tetap, sedangkan wakaf bangunan atau tanaman di atas tanah*

ghasaban itu berhak untuk dihilangkan, sehingga bila bangunan itu dihancurkan dan tanaman itu dijebol, maka akan keluar dari sesuatu yang dinamai dengan nama wakaf tersebut, sehingga sesuatu yang diwakafkan tidak dapat diambil manfaatnya dalam keadaan tetapnya benda wakaf itu serta tetap namanya." Sedangkan ulama telah sungguh-sungguh berkata: *"Yang termasuk dalam makna/kategori tanah yang disewa adalah tanah yang dipinjam dan tanah yang diwasiatkan untuk waqif kemanfaatannya."* Sebagian ulama berkata: *"Penggambaran mereka akan persoalan itu, dengan berupa tanah yang disewa, memberikan pengertian (kefahaman) bahwa penggambaran tersebut didalam sesuatu yang diletakkan/ditaruh dengan hak, adapun bila waqif membangun atau menanam di atas tanah yang digasab lalu dia mewakafkan bangunan atau tanaman itu maka tidak sah hukumnya".* Bahkan sebagian ulama berpendapat dalam hal *ijarah*, bahwa wajib menetapkannya (membiarkannya tetap) dengan membayar biaya sewa, karena alasan menjaga kelestariannya (tetapnya) wakaf. Dan Imam as-Subki berkata, Imam Ibnu ar-Rif'ah berkata kepadaku: *"Aku menfatwakan batalnya wakaf lemari buku yang diwakafkan seorang waqif agar berada ditempat yang tertentu di madrasah ash-Shahib di Mesir karena tempat itu telah di-hak-i untuk selain kemanfaatan/kegunaan tersebut, dikarenakan tuntutan dari wakaf yang terdahulu (yang sebelumnya), Sehingga tidak boleh memindahkan kegunaan/kemanfaatannya yang terdahulu tersebut menuju yang selainnya."* Imam as-Subki berkata: *"Dan yang sama dengannya adalah mewujudkan mimbar didalam masjid yang tidak pernah digunakan untuk jumatan, hal itu tidak boleh, begitu pula memunculkan meja mushaf yang diabadikan untuk membaca mushaf, seperti dilakukan di Masjid Jami' al-Azhar dan selainnya, wakaf meja tersebut tidak sah dan wajib mengeluarkannya dari masjid karena keterangan yang telah berlalu, yang berupa kemanfaatan dari tempat tersebut telah dimiliki (dihak-i) untuk suatu arah (tujuan) dari wakaf yang bukan merupakan arah/tujuan yang ini, dan sangat mengherankan sekali ada beberapa qadli yang menetapkan wakaf itu secara syar'i, dalam keadaan mereka menganggap bahwa diri mereka sungguh-sungguh telah melakukan perbuatan yang bagus."*

b. *Hawasyi asy-Syirwani*, VII/240:

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَهَذَا مُسْتَحَقُّ الْإِزَالَةِ وَمِنْهُ مَا لَوْ بَنَى فِي حَرِيمِ النَّهْرِ بِنَاءً وَوَقَفَهُ مَسْجِدًا فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الْإِزَالَةِ. اهـ

Imam asy-Syibramalisi berkata: *Perkataan Imam Muhammad ar-Ramli: dan ini (mewakafkan sesuatu di atas tanah yang dighasab) adalah hal yang berhak untuk dihilangkan, dan diantara hal yang berhak untuk dihilangkan adalah: bila seseorang mendirikan bangunan di atas harim an-nahr (daerah yang dilindungi untuk sebuah sungai) dan dia mewakafkannya sebagai masjid,*

maka wakaf tersebut tidak sah (bathil), karena bangunan itu berhak untuk dihilangkan. Sekian Perkataan Al-Imam asy-Syibramalisi.

c. *Al-Hawiy lil-Fatawa li as-Suyuthi*, I/130-132:

وَقَدْ وَقَعَ فِي حَيَاةِ شُيُوخِنَا أَنَّ أَيْبَكَ الْخَاصِكِيَّ بَنَى بَيْتًا بِمِصْرَ تُجَاهَ جَامِعِ الرَّيِّسِ وَبَرَزَ فِيهِ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ فَاسْتَفْتَى الشَّيْخَ الْإِمَامَ الْعَلَّامَةَ الْمُحَقِّقَ جلال الدين المحلي الشافعي فَأَفْتَى بِمَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ لَا تُمْلَكُ وَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا وَلَا الْبِنَاءُ فِيهَا، وَهَذَا هُوَ مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ ﷺ وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ بَلْ وَلَا فِي بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، بَلِ الْأَئِمَّةُ وَأَتْبَاعُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ، وَهَذِهِ نُبْذَةٌ مِنْ نُقُولِ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ ... وَقَالَ الزركشي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: حَافَاتُ النِّيلِ وَالْفُرَاتِ لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُ شَيْءٍ مِنْهَا بِالْإِحْيَاءِ وَلَا بِالِابْتِيَاعِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا غَيْرِهِ، قَالَ: وَقَدْ عَمَّتِ الْبَلْوَى بِالْأَبْنِيَةِ عَلَى حَافَاتِ النِّيلِ كَمَا عَمَّتْ بِالْقَرَافَةِ مَعَ أَنَّهَا مُسَبَّلَةٌ، وَذَكَرَ الدميري فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَدْ رَاجَعْتُ نَصَّ الشَّافِعِيِّ فَوَجَدْتُهُ نَصَّ فِي مُخْتَصَرِ المزني وَفِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ النَّهْرَ وَالْمَاءَ الظَّاهِرَ لَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْطِعَهُ بِحَالٍ، وَالنَّاسُ فِيهِ شَرْعٌ، وَالْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ شُرَكَاءُ فِي ذَلِكَ. هَذَا نَصُّهُ فِي الْكِتَابَيْنِ، زَادَ فِي الْأُمِّ: وَلَوْ أَحْدَثَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا بِنَاءً قِيلَ لَهُ حَوِّلْ بِنَاءَكَ وَلَا قِيمَةَ لَهُ فِيمَا أَحْدَثَ بِتَحْوِيلِهِ.

Dan telah sungguh-sungguh terjadi di masa kehidupan beberapa guru kami bahwasannya Aibak al-Khasiki membangun sebuah rumah di Mesir di depan Masjid Jami' Ar-Rayyis dan menampakkannya diatas pinggiran (tepi) sungai, kemudian dia meminta fatwa kepada *as-Syaikh al-Imam al-'Allaamah al-Muhaqqiq* Jalaluddin al-Mahalli asy-Syafi'i, lalu Beliau menfatwakan larangan bagi Aybak untuk melakukan pembangunan tersebut, dan beliau memberikan alasan bahwasannya tepian sungai tidak dapat dimiliki dan tidak boleh menghidupkannya (mendiami/menghuni) dan tidak boleh mendirikan bangunan di atasnya, ini adalah sesuatu yang dinuqil dari madzhab Syafi'i dan telah dinash (dijelaskan) oleh Imam kita asy-Syafi'i serta para sahabatnya dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai hukum ini di dalam madzhab Syafi'i, bahkan di dalam madzhab empat selain madzhab Syafi'i, bahkan para

Imam Madzhab beserta para pengikutnya pun telah bersepakat atas hukum ini, dan ini adalah sedikit dari nuqilan para Imam mengenai hukum tersebut hingga beliau berkata: al-Imam az-Zarkasyi berkata di dalam *Syarh al-Minhaj*: *"Pinggiran sungai Nil dan sungai Furat tidak boleh dimiliki sedikitpun darinya dengan cara menghidupkannya (mendiaminya/menghuninya) dan tidak pula dengan cara membelinya dari baitul-mal serta tidak dari selain baitul-mal."* Al-Imam Az-Zarkasyi berkata: *"Dan cobaan/ujian yang berupa pembangunan-pembangunan di atas pinggiran sungai Nil (tepian sungai Nil) telah meluas secara umum, sebagaimana bangunan-bangunan itu terjadi secara umum di Qarafah, padahal Qarafah adalah pemakaman yang musabbalah (disediakan untuk umum)."* Dan Imam ad-Damiri menuturkan didalam *Syarh al-Minhaj* sesuatu yang semisal itu juga, dan aku telah berulang kali menelaah kembali *nash* dari Imam asy-Syafi'i sehingga aku menemukan bahwa beliau telah menjelaskan didalam *Mukhtashar al-Muzani* dan di dalam *al-Umm* bahwa sungai dan air yang nampak tidaklah dimiliki oleh manusia siapapun, dan tidak sah bagi siapapun memilikinya dalam keadaan bagaimanapun, dan para manusia dalam hal ini adalah setara, serta muslimin seluruhnya adalah orang-orang yang bersekutu (sama-sama berhak) di dalam hal tersebut, ini adalah *nash* dari Imam asy-Syafi'i dalam kedua kitab itu, beliau menambahkan didalam *al-Umm*: *"Bila ada seseorang mendirikan bangunan (memunculkan/mewujudkan bangunan) diatas satu tempat dari tempat-tempat ini, maka akan dikatakan kepadanya: Pindahkan bangunanmu. Dan tidak ada harga apapun baginya (dia tidak berhak mendapatkan upah/ongkos apapun) dari akibat pemindahan itu."*

449. Hukum Renovasi Masjid yang Kondisinya Masih Baik

Deskripsi Masalah

Tren penyerapan dana aspirasi politik di beberapa partai diarahkan anggota legislatif terpilih agar diserap konstituennya untuk pembangunan dan renovasi tempat ibadah (masjid, mushalla). Banyak masjid dan mushalla yang masih sangat layak pakai memperoleh dana bantuan pembangunan dan renovasi tersebut.

Dengan alasan model arsitektur masjid lama yang dipandang kurang bagus, maka pihak takmir setuju melakukan pemugaran. Akibatnya bangunan masjid lama yang sebenarnya masih layak pakai dibongkar total demi menuruti selera arsitektur. Dengan dana politik tersebut ditemukan juga ada beberapa mushalla di atas lahan wakaf yang kemudian diusulkan berganti status menjadi masjid.

Pertanyaan

a. Apakah bangunan masjid atau mushalla wakaf yang masih layak pakai tapi dianggap kurang artistik (bagus) boleh dipugar, baik total maupun sebagian?
b. Apakah mushalla di atas lahan wakaf boleh direnovasi untuk dinaikkan statusnya menjadi sebuah masjid? *(PCNU Lumajang)*

Jawaban a

Tidak Boleh.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti*, I/234:

مَسْئَلَةٌ قَالَ شَيْخُنَا: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ هَدْمِ الْمَسْجِدِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْخَرَابِ لِيُعَادَ كَمَا هُوَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ نَقْضِ غَيْرِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْخَرَابِ لِأَجْلِ تَوْسِعَةٍ. فَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيْهِ: جَوَّزَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ الْمُتَوَفَّى ٦٩٠ تِسْعِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ ، وَمَنَعَهُ الْأَصْبَحِيُّ الْيَمَنِيُّ مُؤَلِّفُ الْمُعِيْنِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٠٠ سَبْعِمِائَةٍ. وَقَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْوَسِيْطِ: يَجُوْزُ بِشَرْطِ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ وَرَآهُ الْإِمَامُ أَوْ أَنْ يَقُوْمَ مَقَامَهُ ، فَقَدْ فُعِلَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ مِرَارًا فِي زَمَنِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ.

Masalah: Guru kami berkata: *"Tidak ada perkhilafan mengenai kebolehan merobohkan masjid yang hampir runtuh supaya dikembalikan seperti sediakala, dikarenakan disana ada kemaslahatan. Perbedaan pendapat (perkhilafan) hanya berada di dalam masalah diperbolehkannya meruntuhkan masjid yang tidak dalam keadaan hampir roboh, karena alasan untuk memperluas masjid itu."* Sehingga al-Imam Ibn Hajar berkata di dalam *Fatawi* beliau: *al-Imam Ibnu 'Ujail yang wafat tahun 690H memperbolehkannya, sedangkan al-Imam al-Ashbahi al-Yamani Pengarang kitab al-Mu'in (Mu'in Ahli at-Taqwa ala at-Tadris)*[1] *yang wafat tahun 700 H melarangnya.* Dan sebagian penyarah kitab *al-Wasith* berkata: *"Boleh dengan syarat terdapat hajat yang mendorong untuk melakukannya, dan Imam (pemimpin negara) atau orang yang menempati posisinya menilai bagus akan hal itu, karena sesungguhnya perluasan ini telah dilakukan secara berulang kali didalam Masjid Mekkah dan Masjid Madinah di zaman ulama mujtahidin serta tak ada satupun orang yang menginkarinya."*

b. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/153:

---

[1] Baca *Thabaqat asy-Syafi'iyah al-Kubra* karya as-Subki, X/128. (Pen.)

وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فِي التَّغْيِيرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ فَلَا يَجْعَلُ الدَّارَ بُسْتَانًا وَلَا حَمَّامًا وَلَا بِالْعَكْسِ إِلَّا إِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ إِلَى النَّاظِرِ مَا يَرَى فِيهِ مَصْلَحَةَ الْوَقْفِ. وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ حَانُوتُ الْقَصَّارِينَ لِلْخَبَّازِينَ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغَيُّرَ النَّوْعِ دُونَ الْجِنْسِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا جَوَازُ التَّغْيِيرِ حَيْثُ بَقِيَ الِاسْمُ وَالْجِنْسُ، سَوَاءٌ أَكَانَ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا، وَسَوَاءٌ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ إِذْهَابُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ أَمْ لَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُمَا كَالْأَصْحَابِ إِذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ خَرْقٌ عَظِيمٌ وَمَفَاسِدُ لَا تَخْفَى؛ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ السُّبْكِيُّ مَا سَأَذْكُرُهُ عَنْهُ وَأَقَرُّوهُ عَلَيْهِ. قَالَ السُّبْكِيُّ وَالَّذِي أَرَاهُ فِي ذَلِكَ الْجَوَازُ بِشَرْطَيْنِ هَذِهِ عِبَارَةُ التَّوَسُّطِ. وَعِبَارَةُ الْخَادِمِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُغَيِّرُ مُسَمَّى الْوَقْفِ. الثَّانِي: أَنْ لَا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهِ بَلْ يَنْتَقِلُ بَعْضُهُ مِنْ جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ فَإِنِ اقْتَضَى زَوَالَ شَيْءٍ مِنَ الْعَيْنِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي نَصَّ الْوَاقِفُ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْخَادِمِ الشَّارِعُ وَهُوَ تَحْرِيفٌ عَلَى جِنْسِهِ تَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ زَادَ فِي التَّوَسُّطِ وَهُوَ الْعَيْنُ وَالرَّقَبَةُ وَهِيَ مَادَّةُ الْوَقْفِ وَصُورَتُهُ الْمُسَمَّاةُ مِنْ دَارٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَيَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى إِبْقَاءِ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ وَإِنْ وَقَعَ التَّسَمُّحُ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ، وَاسْتَنَدَ إِلَى مَا سَبَقَ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ فِي حَانُوتِ الْحَدَّادِ اهـ زَادَ فِي الْخَادِمِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ وَعَلَى هَذَا فَفَتْحُ شُبَّاكِ الطَّيْبَرْسِيَّةِ فِي جِدَارِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ لَا يَجُوزُ؛ إِذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْجَامِعِ فِيهِ وَكَذَلِكَ فَتْحُ أَبْوَابِ سَطْحِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ لَا حَاجَةَ لِلْحَرَمِ بِهَا، وَإِنَّمَا هِيَ لِمَصْلَحَةِ سَاكِنِيهَا فَلِهَذَا لَا تَجُوزُ.

Dan kesimpulan dari *qaul* para Imam di dalam masalah pengubahan adalah: tidak boleh mengubah wakaf dari bentuknya, sehingga tidak boleh mengubah rumah menjadi kebun dan tidak boleh mengubahnya menjadi tempat mandi (pemandian) serta tidak boleh pula sebaliknya, kecuali *waqif* memberi kuasa kepada *nadhir* akan sesuatu yang dinilai ada kemaslahatannya bagi wakaf maka *nadhir* bisa melakukannya. Dan di dalam *Fatawa al-Qaffaal* ada pernyataan: "*Boleh mengubah toko tukang setrika menjadi toko tukang roti.*" *Asy-Syaikhan* berkata: "*Sepertinya al-Qaffaal menerima perubahan nau' (macam) bukan jenis*". Sekian perkataan *asy-Syaikhan* dan yang *dhahir* dari perkataan *asy-Syaikhan* adalah: *boleh*

mengubah, sekiranya nama dan jenis masih tetap sama, baik perubahan itu sedikit atau banyak, dan entah atas tuntutan kemaslahatan atau tidak, baik disini terdapat perbuatan memusnahkan benda yang diwakafkan ataupun tidak. Dan yang jelas hal itu bukan sesuatu yang beliau berdua kehendaki, sebagaimana *Ashabus-Syafi'i*. Dikarenakan bila itu memang iya (dikehendaki), maka akan menetapkan sebuah celah yang besar dan berbagai kerusakan yang tidak lagi samar. Dan karena itulah al-Imam as-Subki memberi persyaratan berupa sesuatu yang akan aku tuturkan nanti dari beliau dan para ulama pun telah mengakui (menetapkan) hal itu dari al-Imam as-Subki ... Al-Imam As-Subki berkata: *"Dan sesuatu yang aku yakini mengenai pengubahan tersebut adalah boleh hukumnya dengan melalui dua syarat"*. Ini adalah *Ibarah* dari kitab *at-Tawassuth*. Adapun *ibarah* dari *al-Khadim* dengan tiga syarat: Salah satunya: perubahan itu harus sedikit dan tidak merubah sesuatu yang dinamai dengan nama wakaf itu (*musamma al-Waqf*). Syarat yang kedua: perubahan itu tidak menghilangkan sesuatu apapun dari benda yang diwakafkan, tapi hanya memindahkan sebagian dari benda-benda tersebut dari satu sisi kesisi yang lainnya, sehingga apabila pengubahan itu menjadikan hilangnya/ musnahnya sesuatu dari benda yang diwakafkan maka pengubahan itu hukumnya tidak boleh, dikarenakan asal yang telah ada *nash*-nya dari *waqif* (*dan ada di sebagian redaksi dari kitab al-Khadim yang menggunakan kata asy-Syaari' dan itu adalah tahrif/pengubahan tulisan*) atas jenisnya itu wajib untuk dijaga. Didalam *at-Tawassuth*, al-Adra'i menambahkan: *"Asal adalah bendanya dan tubuhnya, benda dan tubuh adalah materi wakaf dan macamnya yang dinamai dengan nama yang semisal rumah misalkan, atau kamar mandi atau seperti itu, maka wajib menjaga/memelihara untuk menetapkan materi dan macam wakaf, meski terdapat kemurahan di dalam sebagian dari sifat-sifatnya dan kemurahan itu disandarkan kepada keterangan yang telah terdahulu dari fatawa al-Imam al-Qaffaal didalam persoalan toko tukang besi (pande besi)."* Sekian perkataan al-Adzra'i dalam *at-Tawassuth*. Al-Imam az-Zarkasyi menambahkan didalam *al-Khadim*: *"Syarat yang ketiga: ada kemaslahatan bagi wakaf didalam pengubahan tersebut, dan ketika kita mengikuti persyaratan ini maka membuka jendela Thabrasyiyah di tembok Masjid Jami' al-Azhar itu tidak boleh, dikarenakan tidak ada kemaslahatan bagi Masjid Jami' didalam hal ini, begitupun membuka berbagai pintu di atap yang datar (loteng/sutuh) dari Masjidil-haram Mekkah, tidak ada hajat dari Masjidil-Haram dengan pintu-pintu itu, kemaslahatan dari pintu-pintu itu hanya untuk penghuninya saja, maka karena inilah hal itu tidak diperbolehkan."*

c. *Qala'id al-Khara'id wa Fara'id al-Fawa'id*, 1/616:

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ فِي فَتَاوِيهِ: إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ نَقْضَ الْمَسْجِدِ وَتَوْسِعَتِهِ

قَبْلَهُ ذَلِكَ ، كَمَا فُعِلَ فِي الْحَرَمَيْنِ بِغَيْرِ نَكِيرٍ. أَقُولُ وَكَذَا لِغَيْرِهِ الزِّيَادَةُ فِيهِ مِنْ خَارِجِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِلَا شَكٍّ لَا يَدْخُلُ مَعَ الْأَوَّلِ فِيمَا وُقِفَ عَلَيْهِ قَبْلُ. اهـ

Masalah: Abu Syukail berkata dalam *Fatawa* beliau: "*Apabila al-Imam (pemimpin negara) atau penggantinya berkehendak untuk meruntuhkan masjid dan meluaskannya maka boleh baginya melakukan hal itu, seperti dilakukan di dua tanah haram tanpa pengingkaran sama sekali.*" Aku berkata: "*Begitu pun bagi orang yang selain al-Imam (pemimpin negara) atau penggantinya, boleh baginya menambahkan tempat di luar masjid ke dalam masjid, dan bila pemimpin negara atau penggantinya tidak mengizinkan orang itu maka tanpa keraguan lagi tempat yang dimasukkan tersebut tidak masuk bersama tempat yang awal di dalam mengenai pewakafan yang terjadi sebelumnya.*"

Jawaban b

Tidak boleh dan memang statusnya tidak bisa menjadi masjid.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin*, III/179 [Maktabah asy-Syamilah]:

(قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ مَوْقُوفٌ) أَيْ وَلَا يُوهَبُ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ أَوَّلَ الْبَابِ وَكَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ يَمْتَنِعُ تَغْيِيرُ هَيْئَتِهِ جَعْلَ الْبُسْتَانِ دَارًا. وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوزُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُغَيِّرُهُ مُسَمَّاهُ وَعَدَمِ إِزَالَةِ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِهِ بَلْ يَنْقُلُهُ مِنْ جَانِبٍ إِلَى آخَرَ وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ أَفَادَهُ م ر

(Perkataan Imam Zainuddin al-Malibari: *Dan sesuatu yang diwakafkan tidak dapat dijual*) Maksudnya juga tidak dapat dihibahkan karena hadits yang telah lalu di awal bab, dan sebagaimana tidak boleh dijual dan dihibahkan tidak boleh pula merubah bentuknya, seperti merubah kebun wakaf menjadi rumah. Imam as-Subki berkata: "*Boleh Merubah dengan tiga syarat, perubahan itu sedikit tidak sampai merubah musammanya (sesuatu yang dinamai dengan nama dari wakaf itu), dan tidak menghilangkan sesuatu apapun dari benda-benda wakaf itu akan tetapi sekedar memindahkannya dari satu sisi ke sisi yang lainnya, serta di dalam perubahan itu ada kemaslahatan bagi wakaf.*" Al-Imam Muhammad ar-Ramli telah memberikan faedah (menjelaskan) akan hal ini.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 171 [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةٌ) لَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَسْجِدِ الَّذِي أَرْضُهُ وَقْفٌ عَلَى مَصْرِفٍ آخَرَ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْإِزَالَةِ وَمَوْضُوعٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَحِينَئِذٍ فَالْوَقْفُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ

(Masalah) Tidak sah mewakafkan masjid yang status tanahnya telah diwakafkan untuk kegunaan lain, sebab hal itu berhak dihilangkan dan diletakkan tanpa hak, dan ketika hal itu terjadi maka wakaf di atasnya tidak sah.

450. Tukar Guling Tanah Wakaf Aset Masjid dan Perluasan Masjid

Deskripsi

Sebidang lahan tambak wakaf asset masjid seluas ± 6.000 m2 berlokasi di ujung tambak (tepi laut). Sebagai asset wakaf, tambak itu tergolong jenis wakaf yang diambil hasilnya (*muntafa' bi ghullatihi*). Mengingat lokasinya jauh dari jalan, hasil tidak sebanding dengan standart hasil tambak pada umumnya serta terjadinya kepindahan hak kepemilikan tambak di sekitarnya dari tangan warga ke pihak pengusaha besar, maka pendayagunaan atas asset wakaf tersebut semakin sulit dan tidak prospektif.

Di sisi lain, masjid sebagai *mawquf 'alaih* (sasaran wakaf) memerlukan perluasan bangunan masjid, mengingat jumlah warga pengguna masjid semakin bertambah banyak. Akan tetapi dalam upaya merealisasikan perluasan masjid ini, terkendala oleh keberadaan gedung sekolah yang berdiri kokoh persis berdampingan dengan masjid tersebut.

Dalam persoalan pendayagunaan asset wakaf masjid, rapat takmir memunculkan wacana *istibdal wakaf* (tukar guling) dengan lahan lain. Dan dalam persoalan perluasan masjid, memunculkan wacana pemindahan gedung sekolah, di mana saat ini dari segi lokasi memang kurang nyaman, baik bagi sekolah maupun bagi masjid.

Dari dua persoalan di atas (*istibdal wakaf* dan perluasan masjid), kemudian takmir berinisiatif melakukan upaya yang menurutnya mudah dan simpel, yaitu menjadikan lahan hasil tukar guling dari tambak wakaf asset masjid sebagai kompensasi area bekas madrasah, yang selanjutnya area ini digunakan untuk rencana perluasan masjid.

Pertanyaan

a. Bolehkah menukarkan lahan wakaf aset masjid dengan lahan lain?
b. Bagaimana pendapat *musyawirin* tentang penukaran wakaf dengan model jalan pintas sebagaimana dijelaskan pada deskripsi di atas?
c. Bolehkah takmir masjid melakukan penukaran lahan wakaf masjid, mengingat selama ini yang mengurus dan mengelola adalah takmir? *(PCNU Kota Surabaya)*

Jawaban

a. Boleh menurut madzhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki sesuai syarat

masing-masing madzhab, sebagaimana berikut:

No	Madzhab	Syarat Tukar Lahan Wakaf Aset Masjid dengan Lahan Lain
1.	Hanafi	a. Tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, b. Harus ditukar dengan lahan, c. Penukaran harus dilakukan oleh *Qadhi* yang saleh (punya ilmu agama yang cukup dan mengamalkannya), d. Ditukar kepada orang yang dapat diterima kesaksiannya dan tidak mempunyai hutang, e. Yang menjadi ganti harus sejenis dan berada dalam satu tempat atau tempat lain yang lebih baik.
2.	Maliki	Sudah tidak mungkin dimanfaatkan.
3.	Hanabilah	Sudah tidak mungkin dimanfaatkan.

b. Menurut madzhab Syafi'i tidak dibolehkan secara mutlak, sedangkan menurut madzhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki tidak boleh karena tidak memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana dalam poin a.
c. Tidak boleh.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar*, IV/386-387 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَشَرَطَ فِي الْبَحْرِ خُرُوجَهُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ وَكَوْنَ الْبَدَلِ عَقَارًا وَالْمُسْتَبْدِلُ قَاضِي الْجَنَّةِ الْمُفَسَّرُ بِذِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَفِي النَّهْرِ أَنَّ الْمُسْتَبْدِلَ قَاضِي الْجَنَّةِ فَالنَّفْسُ بِهِ مُطْمَئِنَّةٌ فَلَا يُخْشَى ضَيَاعُهُ وَلَوْ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. ...

مَطْلَبٌ فِي شُرُوطِ الِاسْتِبْدَالِ وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ خَمْسَةُ شُرُوطٍ أَسْقَطَ الشَّارِحُ مِنْهَا الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ، لِظُهُورِهِمَا لَكِنْ فِي الْخَامِسِ كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا، وَأَفَادَ فِي الْبَحْرِ زِيَادَةَ شَرْطٍ سَادِسٍ: وَهُوَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ، وَلَا مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَيْثُ قَالَ وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِثَتَانِ لِلْفَتْوَى.

إِحْدَاهُمَا: بَاعَ الْوَقْفَ مِنِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ فَأَجَبْتُ: بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بَاعَ مِنِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ كَذَلِكَ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا عُرِفَ فِي الْوَكَالَةِ.

ثَانِيهِمَا: بَاعَ مِنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى الْمُسْتَبْدِلِ دَيْنٌ وَبَاعَهُ الْوَقْفَ بِالدَّيْنِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَهِلَالٍ لِأَنَّهُمَا لَا يُجَوِّزَانِ الْبَيْعَ بِالْعُرُوضِ فَالدَّيْنُ أَوْلَى اهـ وَذَكَرَ عَنِ الْقُنْيَةِ مَا يُفِيدُ شَرْطًا سَابِعًا حَيْثُ قَالَ: وَفِي الْقُنْيَةِ مُبَادَلَةُ دَارِ الْوَقْفِ بِدَارٍ أُخْرَى إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَتَا فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَحَلَّةِ الْأُخْرَى خَيْرًا وَبِالْعَكْسِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ أَكْثَرَ مِسَاحَةً وَقِيمَةً وَأُجْرَةً لِاحْتِمَالِ خَرَابِهَا فِي أَدْوَنِ الْمَحَلَّتَيْنِ لِدَنَاءَتِهَا وَقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِيهَا اهـ وَزَادَ الْعَلَّامَةُ قِنَالِي زَادَهْ فِي رِسَالَتِهِ ثَامِنًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ اسْتِبْدَالَهَا بِدَارٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِبْدَالُهَا بِأَرْضٍ، وَبِالْعَكْسِ أَوْ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ تَقَيَّدَ اهـ فَهَذَا فِيمَا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، فَكَذَا يَكُونُ شَرْطًا فِيمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لِنَفْسِهِ بِالْأَوْلَى تَأَمَّلْ.

Dan al-Imam Zain bin Ibrahim al-Hanafi memberikan persyaratan di dalam kitab *al-Bahr* (*Al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*) yang berupa keluarnya benda yang diwakafkan dari kemanfaatan secara keseluruhan, serta penggantinya harus berupa harta milik yang tak bergerak (seperti tanah, rumah dan sebagainya) dan orang yang mengganti adalah *qadli* surga yang ditafsiri (dijelaskan) dengan pengertian: *Qadli* yang berilmu dan beramal, dan didalam kitab *an-Nahr* (*an-Nahr al-Fa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq* karangan al-Imam Sirajuddin Umar bin Ibrahim al-Hanafi Saudaranya *Shahib al-Bahr*) terdapat keterangan bahwa yang mengganti adalah *qadli surga* sehingga hati tenang karenanya dan tidak ada rasa kekhawatiran harta pengganti akan tersia-sia meski digantikan dengan beberapa dirham dan beberapa dinar.

Beberapa syarat menggantikan benda wakaf dan kesimpulannya adalah terdapat lima syarat didalam upaya menggantikan benda wakaf, yang mana *asy-syarih* (sang penyarah) menggugurkan syarat kedua dan ketiga dari syarat-syarat itu, dikarenakan dua syarat tersebut sudah jelas, akan tetapi di dalam syarat kelima terdapat pembicaraan yang sebentar lagi akan datang, dan al-Imam Zain bin Ibrahim al-Hanafi di dalam kitab *al-Bahr* memberikan faedah berupa tambahan syarat keenam yaitu: *"Mustabdil tidak boleh menjualnya ke orang yang tidak diterima kesaksiannya bagi mustabdil dan tidak kepada orang yang menghutangi mustabdil (orang yang hendak menjual benda wakaf tersebut).* Penambahan syarat yang keenam ini tersirat melalui perkataan beliau (Shahib al-Bahr) yang berupa: *"Dan telah sungguh-sungguh terjadi dua kejadian permohonan fatwa: salah satunya adalah: tentang mustabdil yang menjual benda yang diwakafkan kepada anaknya*

yang masih kecil, kemudian aku menjawab: bahwasannya hal tersebut tidak boleh secara kesepakatan ulama sebagaimana orang yang diangkat sebagai wakil dalam melaksanakan akad jual-beli, lalu dia menjualnya kepada anaknya yang masih kecil, dan hukum anak dia yang sudah besar pun sama seperti itu", Berbeda dengan pendapat dua *Shahib* Abu Hanifah (Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf) seperti dapat diketahui di dalam bab *al-Wakaalah*. Yang kedua: *Mustabdil menjualnya ke seorang lelaki yang telah menghutangi mustabdil tersebut (orang yang hendak mengganti benda wakaf itu) dan dia menjual benda wakafnya dengan harga penjualan berupa hutang itu (hutang itu dijadikan penggantinya), dan hendaknya hal ini tidak dibolehkan menurut pendapat al-Imam Abu Yusuf dan al-Imam Hilal, karena keduanya tidak memperbolehkan penjualan wakaf dengan ganti berupa harta selain nuqud, maka apalagi berbentuk hutang"*. Sekian perkataan dari *Shahib al-Bahr* dan *Shahib al-Bahr* menuturkan dari *al-Qunyah* sesuatu yang memberikan faedah adanya syarat yang ketujuh, dengan sekiranya beliau berkata *"Dan di dalam al-Qunyah disebutkan: "Menggantikan sebuah rumah wakaf dengan rumah yang lain, ini hanya boleh ketika keduanya berada dalam satu tempat tinggal, atau adanya tempat tinggal dari rumah yang dimiliki (yang akan menggantikan rumah wakaf itu) lebih baik daripada tempat kediaman rumah yang telah diwakafkan, dan jika sebaliknya maka tidak boleh, meski rumah yang dimiliki (rumah yang akan dijadikan pengganti) itu lebih luas ukurannya dan lebih tinggi harga serta upahnya dikarenakan masih ada kemungkinan anjloknya harga serta upah dari rumah yang berada dalam tempat kediaman yang paling rendah/hina dari kedua tempat kediaman tersebut, disebabkan oleh remehnya tempat kediaman itu dan minimnya minat akan tempat itu."* Sekian perkataan dari *Shahib al-Bahr*.

Dan *al-'Allamah* Qanali Zadah menambahkan syarat yang kedelapan di dalam *Risalah*-nya, syarat itu adalah: pengganti dan yang diganti harus sejenis karena keterangan yang ada dalam *al-Khaniyyah* yang berupa: *"Bila waqif mensyaratkan untuk dirinya agar boleh menggantinya dengan rumah, maka tidak boleh baginya menggantikannya dengan tanah. Begitupun sebaliknya, atau mensyaratkan bagi dirinya agar boleh menggantinya dengan tanah di bashrah, maka itu menjadi ketentuan (qayyid)."* Sekian perkataan dari *al-Khaniyyah*. Dan ini (syarat harus sejenis) adalah hukum untuk pergantian benda wakaf yang disyaratkan oleh *waqif* pada dirinya sendiri, sehingga demikian pula akan menjadi syarat secara otomatis dalam penggantian yang sama sekali tidak dia syaratkan bagi dirinya, secara tinjauan lebih utama. Renungkanlah.

b. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, VII/324-326 [Dzat as-Salasil]:

(انْدِرَاسُ الْوَقْفِ) مَعْنَى انْدِرَاسِ الْوَقْفِ أَنَّهُ أَصْبَحَ بِحَالَةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، بِأَلاَّ

يَحْصُل مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلاً، أَوْ لاَ يَفِي بِمُؤْنَتِهِ، كَأَوْقَافِ الْمَسْجِدِ إِذَا تَعَطَّلَتْ وَتَعَذَّرَ اسْتِغْلاَلُهَا. فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَوَّزَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ الاِسْتِبْدَال عَلَى الأَصَحِّ عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ أَجَازَ جُمْهُورُهُمُ اسْتِبْدَال الْوَقْفِ الْمَنْقُول فَقَطْ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ مَالِكٍ. قَال الْخَرَشِيُّ: إِنَّ الْمَوْقُوفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَقَارًا - إِذَا صَارَ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي وُقِفَ فِيهِ كَالثَّوْبِ يَخْلَقُ، وَالْفَرَسِ يَمْرَضُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى مِثْلُهُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ.

وَأَمَّا الْعَقَارُ فَقَدْ مَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ اسْتِبْدَالَهُ مَعَ شَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيل .فَفِي الْمَسَاجِدِ: أَجْمَعَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا.

وَفِي الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةَ الْمَنْفَعَةِ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَاسْتَثْنَوْا تَوْسِيعَ الْمَسْجِدِ أَوِ الْمَقْبَرَةِ أَوِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَأَجَازُوا بَيْعَهُ، لأَنَّ هَذَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلأُمَّةِ، وَإِذَا لَمْ تُبَعِ الأَحْبَاسُ لأَجْلِهَا تَعَطَّلَتْ، وَأَصَابَ النَّاسَ ضِيقٌ، وَمِنَ الْوَاجِبِ التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ فِي عِبَادَتِهِمْ وَسَيْرِهِمْ وَدَفْنِ مَوْتَاهُمْ.

وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ شَدَّدُوا كَثِيرًا فِي اسْتِبْدَال الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ، حَتَّى أَوْشَكُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ مُطْلَقًا خَشْيَةَ ضَيَاعِ الْوَقْفِ أَوِ التَّفْرِيطِ فِيهِ.

قَال النَّوَوِيُّ: وَالأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصُرِ الْمَسْجِدِ إِذَا بَلِيَتْ، وَجُذُوعِهِ إِذَا انْكَسَرَتْ، وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ لِلإِحْرَاقِ. وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَ إِعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ، وَتُصْرَفُ غَلَّةُ وَقْفِهِ إِلَى أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إِلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ الْمَسْجِدَ الْمُنْهَدِمَ لاَ يُنْقَضُ إِلاَّ إِذَا خِيفَ عَلَى نَقْضِهِ، فَيُنْقَضُ وَيُحْفَظُ أَوْ يُعَمَّرُ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ إِنْ رَآهُ الْحَاكِمُ، وَالأَقْرَبُ إِلَيْهِ أَوْلَى، وَلاَ يُصْرَفُ نَقْضُهُ لِنَحْوِ بِئْرٍ وَقَنْطَرَةٍ وَرِبَاطٍ.

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ تُبْتَاعُ وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورَثُ.(١)

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ: فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ فِي جَوَازِ الاِسْتِبْدَال وَعَدَمِهِ، وَأَخَذُوا

حُكْمَ الْعَقَارِ مِنْ حُكْمِ الْمَنْقُولِ، فَكَمَا أَنَّ الْفَرَسَ الْحَبِيسَةَ عَلَى الْغَزْوِ إِذَا كَبِرَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ لِلْغَزْوِ، وَصَلُحَتْ لِشَيْءٍ آخَرَ يَجُوزُ بَيْعُهَا، فَكَذَلِكَ يُقَاسُ الْمَنْقُولُ الْآخَرُ وَغَيْرُ الْمَنْقُولِ عَلَيْهَا. فَبَيْعُ الْمَسْجِدِ لِلْحَنَابِلَةِ لَهُمْ فِيهِ رِوَايَتَانِ:

الرِّوَايَةُ الْأُولَى: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسْجِدِ إِذَا صَارَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْغَايَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ، كَأَنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ، أَوْ خَرِبَتِ النَّاحِيَةُ، وَحِينَئِذٍ يُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي إِنْشَاءِ مَسْجِدٍ آخَرَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ الْوَقْفَ إِذَا خَرِبَ وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ، كَدَارٍ انْهَدَمَتْ، أَوْ أَرْضٍ خَرِبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتًا وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهَا، أَوْ مَسْجِدٍ انْتَقَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ، أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِهِ، أَوْ تَشَعَّبَ جَمِيعُهُ، وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ، وَلَا عِمَارَةُ بَعْضِهِ إِلَّا بِبَيْعِ بَعْضِهِ، جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتُعَمَّرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيعَ جَمِيعُهُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسَاجِدِ. رَوَى عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تُبَاعُ وَإِنَّمَا تُنْقَلُ آلَتُهَا. وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ قُدَامَةَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى

(*Terhapusnya Wakaf*) Makna dari terhapusnya wakaf adalah: benda wakaf itu berubah/beralih kepada suatu kondisi yang membuatnya tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, dengan gambaran: tiada sesuatu apapun yang bisa diperaleh darinya, atau ada, akan tetapi pendapatan itu tidak mencukupi untuk membiayai benda wakaf tersebut, seperti halnya beberapa wakaf untuk masjid, ketika wakaf-wakaf itu terlantar (kosong) dan sulit untuk mendapatkan penghasilannya. Maka didalam kondisi seperti ini mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan mengganti benda wakaf itu, menurut pendapat yang lebih shahih di dalam pandangan Mereka, apabila dilakukan dengan seizin *qadli* serta dengan pendapat dari *qadli* juga, dikarenakan ada maslahat di dalamnya.

Adapun ulama Malikiyah: mayoritas dari mereka hanya membolehkan menggantikan benda wakaf yang dapat dipindahkan saja (seperti baju atau hewan dan lain-lain), apabila terdapat kemaslahatan (kemanfaatan/faedah) yang mendorong untuk melakukan penggantian tersebut, dan pendapat itu adalah riwayat yang masyhur dari Imam Malik.

Imam al-Kharasyi berkata: "*Sesungguhnya sesuatu yang diwakafkan bila*

tidak berupa pekarangan (harta milik yang tidak dapat bergerak seperti tanah, rumah dan lain-lain) itu, ketika berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat difungsikan sesuai dengan arah tujuannya diwakafkan seperti baju wakaf yang usang dan kuda wakaf yang sakit serta sesuatu yang lain yang menyerupai itu, maka benda wakaf tadi dijual dan dibelikan benda yang semisal dengannya tapi yang dapat dimanfaatkan."

Adapun untuk harta milik yang tidak dapat bergerak seperti tanah, rumah dan lain-lain, maka ulama Malikiyyah melarang untuk menggantinya, serta ada sedikit perincian disini:

Dalam hal mengenai masjid: ulama Malikiyyah bersepakat tidak boleh menjualnya dan dalam hal mengenai berbagai rumah yang diwakafkan, serta toko-toko (kedai) yang diwakafkan mereka berpendapat: apabila kemanfaatannya masih tegap berdiri, maka tidak boleh menjualnya, akan tetapi mereka mengecualikan penjualan rumah-rumah dan toko-toko (atau kedai-kedai) yang diwakafkan demi untuk perluasan masjid atau kuburan atau jalan umum, maka apabila untuk kepentingan ini mereka membolehkan untuk menjual rumah-rumah serta toko-toko yang diwakafkan tersebut, karena ini tergolong kepentingan-kepentingan (kemaslahatan) yang umum (menyeluruh) bagi umat Islam, dan bila rumah-rumah dan toko-toko wakaf tidak boleh dijual karenanya maka kepentingan-kepentingan umum itu akan terabaikan, dan akan ada kesulitan yang menimpa manusia, sedangkan di antara sesuatu yang wajib adalah mempermudah para manusia dalam melaksanakan ibadah dan melakukan perjalanan serta mengubur orang-orang yang meninggal dari mereka.

Adapun ulama Syafi'iyyah, maka mereka sering memperberat dalam menggantikan benda yang diwakafkan, sehingga hampir saja mereka mencegahnya secara mutlak karena khawatir tersia-sianya (terlantarnya) benda wakaf atau sembrono akan benda wakaf.

Al-Imam an-Nawawi berkata: *"Menurut pendapat yang lebih shahih boleh menjual tikar-tikar masjid apabila telah usang dan batang-batang kayunya apabila telah pecah, serta tidak patut kecuali untuk dibakar. Apabila terdapat masjid yang runtuh dan sulit untuk mengembalikannya, maka tidak boleh dijual sama sekali, dan penghasilan wakaf untuknya didistribusikan (disalurkan) ke masjid yang terdekat darinya. Kemudian masjid yang runtuh bangunannya tidak boleh dirobohkan kecuali bila mengkhawatirkan reruntuhannya, maka boleh dirobohkan dan dijaga (disimpan) reruntuhannya atau dipakai untuk membangun/memperbaiki masjid yang lainnya apabila hakim berpendapat begitu, sedangkan masjid yang lebih dekat darinya lebih diutamakan, dan reruntuhannya tidak boleh digunakan untuk semisal sumur dan jembatan serta tempat yang diwakafkan untuk fakir miskin."*

Dan mereka mengambil dalil dengan memakai sabda Nabi Muhammad ﷺ: *"Tidak boleh dijual bendanya dan tidak boleh dibeli, serta tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan."*

Adapun ulama madzhab Hanbali: Mereka tidak membedakan antara harta wakaf yang tidak bergerak (seperti tanah, rumah dan sebagainya) dan harta yang dapat dipindahkan dalam kebolehan mengganti dan larangan untuk menggantinya, dan mereka mengambil hukum *Aqar* (harta yang tidak bergerak) dari hukum harta yang dapat dipindahkan, maka sebagaimana kuda yang diwakafkan untuk perang, ketika ia sudah tua dan tidak cocok untuk digunakan berperang, serta pantas untuk digunakan yang lainnya maka boleh untuk menjualnya, seperti itupun harta yang dapat dipindahkan yang selain kuda perang wakaf dan juga harta yang tidak dapat dipindahkan, keduanya disamakan secara hukum dengan kuda perang wakaf tersebut. Sehingga menjual masjid bagi ulama madzhab Hanbali ada dua riwayat :

Riwayat yang pertama: Boleh menjual masjid apabila masjid tersebut menjadi tidak cocok bagi tujuan yang dimaksud dari masjid itu, seperti apabila masjid tersebut menjadi sempit atau runtuh salah satu sisinya, dan ketika penjualan itu dilakukan maka harga dari penjualan itu dipakai untuk mendirikan masjid lain yang dibutuhkan di tempat yang lain.

Imam ibnu Qudamah berkata: *"Sesungguhnya wakaf apabila runtuh dan kosong manfaatnya (tersia-sia manfaatnya) seperti rumah yang roboh, atau tanah yang rusak dan kembali menjadi tanah yang tak bertuan serta tidak mungkin mendirikannya lagi (memperbaikinya) atau seperti halnya masjid yang ditinggalkan oleh penduduk desa setempat, ditinggal pergi jauh darinya sehingga dia berada didalam tempat yang tidak dipakai solat, atau masjid itu menjadi sempit untuk penduduknya dan tidak mungkin untuk diperluas ditempatnya itu, atau keseluruhan masjid itu menjadi pecah belah, dan tidak mungkin untuk memperbaikinya, serta tidak mungkin memperbaiki sebagian darinya kecuali dengan menjual sebagian dari masjid tersebut, maka boleh menjual sebagian darinya untuk digunakan memperbaiki sebagian yang lainnya (bagian yang tersisa yang tidak ikut dijual), lalu apabila masjid itu tidak mungkin untuk diambil manfaatnya, meski sedikitpun tetap tidak bisa, maka dijuallah seluruhnya."*

Adapun riwayat yang kedua: Tidak boleh menjual berbagai masjid. Diriwayatkan dari Ali bin Sa'id: *"Bahwa sesungguhnya masjid-masjid tidak boleh dijual, hanya boleh dipindahkan perabotannya saja. Dan al-Imam Ibnu Qudamah Sungguh-sungguh telah mengunggulkan riwayat yang pertama."*

c. *'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti*, I/238:

قُلْتُ لَا سَبِيْلَ إِلَى بَيْعِ الْمَوْقُوْفِ بِحَالٍ وَلَا الْاِسْتِبْدَالِ بِهِ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ غِبْطَةٌ

وَمَصْلَحَةٌ بِحَالٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَتُهُ حَسْمًا لِلْبَابِ وَجَوَّزَ الْحَنَفِيَّةُ الْاِسْتِبْدَالَ بِهِ بِبَيْعِهِ ثُمَّ بِالْاِسْتِبْدَالِ بِهِ أَوْ بِالْمُعَاوَضَةِ بِهِ بِشُرُوْطٍ قَدْ يَعِزُّ وُجُوْدُهَا وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ يَمْنَعُ ذٰلِكَ مُطْلَقًا.

Aku berkata tak ada cara untuk menjual benda yang diwakafkan sama sekali dan tidak ada cara menggantikannya sama sekali meski disana terdapat *ghibthah* (ketertarikan) dan kemaslahatan menurut Syafi'iyyah meski kosong kemanfaatannya, ini karena untuk menutup rapat akan bab ini (penjualan dan penggantian benda yang diwakafkan), dan ulama Hanafiyyah membolehkan menggantikan benda yang diwakafkan dengan cara menjualnya kemudian dengan cara menggantikannya atau dengan tukar-menukarkannya, melalui beberapa syarat yang terkadang terbilang langka untuk ditemukan, dan banyak sekali dari ulama Hanafiyyah yang melarangnya secara mutlaq.

d. *Al-Inshaf,* VIII/101 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، وَلَا الْمُنَاقَلَةُ بِهِ مُطْلَقًا. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ: لَا يَسْتَبْدِلُ بِهِ وَلَا يَبِيعُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ. وَلَا يُبَاعُ، إِلَّا أَنْ لَا يُنْتَفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ ذٰلِكَ لِمَصْلَحَةٍ. وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ الْهَدْيِ. وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ. وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ. وَنَقَلَ صَالِحٌ: يَجُوزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ. وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ. وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ. وَحَكَمَ بِهِ نَائِبًا عَنِ الْقَاضِي جَمَالِ الدِّينِ الْمَسْلَاتِيِّ. فَعَارَضَهُ الْقَاضِي جَمَالُ الْمِرْدَاوِيُّ صَاحِبُ الِانْتِصَارِ وَقَالَ: حُكْمُهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ. وَصَنَّفَ فِي ذٰلِكَ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ. سَمَّاهُ "الْوَاضِحُ الْجَلِيُّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ الْحَنْبَلِيِّ" وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ عَلَى ذٰلِكَ. وَصَنَّفَ صَاحِبُ الْفَائِقِ مُصَنَّفًا فِي جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ. سَمَّاهُ "الْمُنَاقَلَةُ بِالْأَوْقَافِ وَمَا فِي ذٰلِكَ مِنَ النِّزَاعِ وَالْخِلَافِ" وَأَجَادَ فِيهِ. وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِهَا الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ، وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ حَمْزَةُ بْنُ شَيْخِ السَّلَامِيَّةِ. وَصَنَّفَ فِيهِ مُصَنَّفًا سَمَّاهُ (رَفْعُ الْمُنَاقَلَةِ فِي مَنْعِ الْمُنَاقَلَةِ). وَوَافَقَهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ فِي عَصْرِهِ. وَكُلُّهُمْ

تَبِعَ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ.

Ketahuilah bahwa wakaf tidak pernah sepi dari dua hal: adakalanya habis kemanfaatannya adakalanya tidak. Bila kemanfaatannya belum habis maka tidak boleh menjualnya, dan tidak boleh memindahkannya secara mutlaq. Imam Ahmad menjelaskan hal itu dalam riwayat Ali bin Sa'id, beliau berkata: *"Tidak dapat menggantikannya dan tidak dapat menjualnya kecuali benda yang diwakafkan tersebut berada didalam kondisi yang sudah tidak dapat digunakan lagi (dimanfaatkan)"*. Dan al-Imam Abu Thalib menuqil: *"Benda yang diwakafkan tidak boleh diubah dari keadaannya dan tidak boleh dijual, kecuali sama sekali tidak dapat dimanfaatkan."* Dan *ashab* Imam Ahmad pun berpendapat demikian. Sedangkan asy-Syaikh Taqiyyuddin *rahimahullah* membolehkan hal itu apabila ada maslahat. Dan beliau berkata: *"Itu adalah qiyas dari al-Hadyu (hewan rajakaya yang dihadiahkan ke Tanah Haram dengan mengharapkan ridla Allah)"*. Dan beliau menuturkan hal itu sebagai sebuah pendapat di dalam persoalan pemindahan sesuatu yang diwakafkan. Serta Imam Ahmad *rahimahullah* memberikan isyarat kesana. Lalu Imam Shalih menuqil: *"Boleh memindah masjid dikarenakan alasan kemaslahatan para manusia"*. Dan riwayat ini termasuk riwayat yang perawinya adalah satu-satunya orang yang menuturkan. Lalu *Shahibul-Fa'iq* (pengarang kitab *al-Fa'iq*) memilihnya, dan beliau memutuskan suatu keputusan hukum dengan menggunakan pendapat ini, ketika menggantikan *Qadli* Jamaluddin al-Muslati. Lalu *al-Qadli* Jamal al-Mirdawi pengarang kitab *al-Intishar* menentangnya dan beliau berkata: *"Hukum dia (keputusan dia) adalah bathil (tidak sah) menurut qa'idah-qa'idah dari madzhab Hanbali"*. Serta mengenai hal ini beliau juga mengarang sebuah kitab yang isinya menolak hakim tersebut (*Shahibul-Fa'iq*). Beliau menamainya: *"Al-Wadlih al-Jaliy fiy Naqdli Hukm ibn Qadli al-Jabal al-Hanbali"* dan pengarang kitab *al-Furu'* sependapat dengan beliau mengenai hal ini, Dan pengarang kitab *al-Fa'iq* mengarang sebuah kitab yang menjelaskan kebolehan memindahkan benda yang diwakafkan dengan alasan maslahat. Beliau menamainya *"Al-Munaaqalah bil-Auqaf wa maa fii Dzaalika min an-Nizaa' wa al-Khilaaf"* dan beliau melakukan hal yang bagus disini. Serta *asy-Syaikh* Burhanuddin ibn al-Qayyim sependapat dengan beliau di dalam kebolehan *munaqalah* dan juga *asy-Syaikh* Izzuddin Hamzah bin *Syaikh* as-Salaamiyyah yang mana *asy-Syaikh* Izzuddin pun mengarang sebuah kitab yang dinamakan: *"Raf'u al-Mutsaqalah fiy Man'i al-Munaaqalah"*. dan sekelompok ulama di zamannya juga sependapat dengan beliau ini. Semuanya adalah pengikut dari *asy-Syaikh* Taqiyyuddin *Rahimahullah* dalam kebolehan *munaaqalah* (pemindahan wakaf) tersebut.

e. Referensi lain:
   1) *Al-Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, V/241 [Jami' al-Fiqh al-Islami]
   2) *Al-Muhadzdzab*, I/347 [al-Marji' al-Akbar]

451. Hibah Ayah kepada Anaknya (1)

Deskripsi

Ada seseorang punya anak, 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Dia memiliki beberapa aset di antaranya sebidang tanah, kemudian dia menyampaikan dihadapan anak-istrinya: *"Tanah yang saya miliki itu tidak saya wariskan, tapi akan saya bagi 6 secara merata. Yang 5 bagian saya hibahkan untuk kamu anak-anakku, masing-masing 1 bagian, dan yang 1 bagian dibuat mushalla"*. Kemudian sang istri bertanya: *"Lha bagian saya mana?"*. Sang suami tidak menjawab, dia hanya diam saja.

Pemilik tanah ketika mengucapkan itu dalam keadaan sehat *wal afiat* dan dia tidak menentukan lokasi mana yang untuk anak-anaknya dan mana yang untuk mushalla. Selang beberapa tahun, dia (*wahib*) meninggal.

Pertanyaan

a. Termasuk akad apakah pernyataan di atas?
b. Bagaimana cara menentukan lokasi bagian masing-masing?
c. Bagaimanakah status tanah yang untuk mushalla?
d. Bolehkan tanah yang diperuntukkan mushalla ditukar dengan bagian yang lain?
e. Bolehkan membangun masjid sebagai ganti mushalla pada konteks diatas?
f. Bagaimanakah nasib sang istri, apakah mendapat bagian dari tanah tersebut atau tidak? *(PCNU Kab. Jember)*

Jawaban a

Bukan termasuk akad apapun, akan tetapi sekedar janji untuk melakukan hibah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Asybah wa an-Nadha'ir*, 95 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

تَنْبِيْهٌ إِنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَرُ عُرْفُهُ قَطْعًا إِذْ لَا وَضْعَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَيْتِ بِالْفَارِسِيَّةِ لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْتِ الشَّعْرِ وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَمْ يَدْخُلْ قَرَابَةُ الْأُمِّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْعَجَمِ وَلَوْ قَالَ إِنْ

رَأَيْتِ الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَآهُ غَيْرُهَا قَالَ الْقَفَّالُ إِنْ عَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الْمُعَايَنَةِ سَوَاءٌ فِيهِ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى.

Tanbih: *Wadl'u* (Peletakan kata) dan *Urf'* (Pemakaian) itu hanya akan saling tarik-menarik bila di dalam bahasa Arab, adapun dalam bahasa *'ajam*, maka yang dipertimbangkan (*di'i'tibar*) hanya pemakaiannya saja, karena tidak ada peletakan kata untuk mengarahkan (membebankan) bahasa *'ajam* itu diatasnya, sehingga apabila seseorang bersumpah atas sebuah rumah dengan bahasa *Farisiyah* (Iran), maka dia tidak dinilai melanggar sumpahnya disebabkan sebuah rumah dari bulu, dan bila seseorang berwasiat untuk kerabat-kerabatnya, maka kerabat dari ibunya tidaklah termasuk di dalam wasiat dari orang arab, dan memasukkan kerabat dari ibunya bila wasiat itu dari orang *'ajam*, dan jika ada orang berkata: *"Jika kau melihat hilal maka engkau adalah wanita yang ditalaq"* lalu ada orang yang selain wanita itu melihat hilal tersebut, Imam al-Qaffal berkata: *"Apabila sang suami tersebut di dalam menggantungkan/melakukan ta'liq dengan menggunakan bahasa 'ajam maka diarahkan kepada perbuatan melihat secara tampak mata langsung, disini sama saja antara orang yang dapat melihat dan orang yang buta."*

b. *Asna al-Mathalib*, II/293 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(فَإِنْ قَالَ دَارِي) أَوْ دَارِي هَذِهِ أَوْ ثَوْبِي (أَوْ ثَوْبِي هَذَا لِزَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ) ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ لَهُ فَيُنَافِي الْإِقْرَارَ بِهِ لِغَيْرِهِ إِذْ هُوَ إِخْبَارٌ سَابِقٌ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْوَعْدِ بِالْهِبَةِ

Jika *al-Muqir* berkata rumahku, atau rumahku ini, atau bajuku, atau bajuku ini milik Zaid, maka pengakuan (*iqrar*) itu tidak sah, karena *idlafah* kepada dirinya sendiri (*al-Muqir*) itu menuntut arti kepemilikan baginya, sehingga berlawanan dengan *iqrar* (pengakuan) kepemilikan bagi orang yang lain (selain diri *al-Muqir* sendiri) karena *iqrar* adalah memberitakan sesuatu yang telah terjadi terdahulu (sebelumnya *iqrar*) yang memberatkan kepada *al-Muqir* (orang yang *iqrar*) sebagaimana keterangan yang telah lalu, dan perkataan *al-Muqir* tersebut diarahkan kepada janji akan pemberian (*hibah*).

c. *Jawahir al-'Uqud wa Mu'in al-Qadhah wa al-Muqi'in wa asy-Syuhud*, I/315-316, [Maktabah asy-Syamilah]:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ فِي الْخَيْرِ مَطْلُوبٌ. وَهُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ فِيهِ خِلَافٌ. ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. فَلَوْ تَرَكَهُ

فَاتَهُ الْفَضْلُ ، وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، وَلَكِنْ لَا يَأْثَمُ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبًا ثَالِثًا: أَنَّ الْوَعْدَ إِنْ اُرْتُبِطَ بِسَبَبٍ ، كَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْ وَلَكَ كَذَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَعْدُ مُطْلَقًا لَمْ يَجِبْ .

Dan ulama bersepakat (ijma') bahwasannya memenuhi janji didalam kebaikan adalah sesuatu yang *mathlub* (yang dicari/yang diingini/yang dikehendaki). Apakah itu termasuk wajib atau sunnah? Disini terdapat khilaf, al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam asy-Syafi'i serta al-Imam Ahmad dan mayoritas ulama memilih bahwa menepati janji kebaikan itu sunnah. Sehingga apabila orang yang berjanji tidak menepatinya maka dia kehilangan keutamaannya (keutamaan memenuhi janji) dan dia melakukan sesuatu yang makruh dengan tingkat kemakruhan yang sangat, tetapi tidak berdosa. Dan sekelompok ulama memilih bahwa memenuhi janji di dalam kebaikan itu wajib, di antara para ulama itu adalah al-Imam Umar bin Abdul-Aziz. Dan ulama Malikiyyah memilih pendapat yang ketiga yaitu: Apabila janji tersebut disyaratkan dengan suatu sebab, seperti ucapan orang yang berjanji: *"Menikahlah dan kamu berhak mendapatkan ini"* dan semacam itu, maka wajib untuk memenuhi janji tersebut. Dan apabila janji itu mutlaq (terlepas dari syarat) maka tidak wajib untuk dipenuhi.

d. *Asna al-Mathalib*, II/487, [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبِ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إِخْلَافُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

Tidak diwajibkan memenuhi janji dan tidak diharamkan untuk tidak menepatinya, ini semata-mata karena janji tergolong hibah (pemberian), sedangkan pemberian tidak dihukumi tetap terkecuali dengan adanya penerimaan

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL MUSYKERWIL PWNU 2014
di PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
25 - 27 Februari 2014

452. Hibah Ayah kepada Anaknya (2)
453. Antara Umrah dan Haji
454. Peralihan *Nazhir* Wakaf

Komisi A
Waqi'iyah

MUSHAHIH

KH. Yasin Asymuni
KH. Ardani Ahmad

PERUMUS

KH. Athoillah Anwar
K. Anang Darunnaja
KH. Ali Maghfur Syadzili Isk., S.Pd.I
Ust. Syihabuddin Sholeh
Ust. H. Abdul Mughits Miftah

MODERATOR

K. Ali Ramzi

452. Hibah Ayah kepada Anaknya (2)

Deskripsi Masalah

Ada seseorang punya anak, 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Dia memiliki beberapa aset di antaranya sebidang tanah, kemudian dia menyampaikan dihadapan anak-istrinya: *"Tanah yang saya miliki itu tidak saya wariskan, tapi akan saya bagi 6 secara merata. Yang 5 bagian saya hibahkan untuk kamu anak-anakku, masing-masing 1 bagian, dan yang 1 bagian dibuat mushalla"*. Kemudian sang istri bertanya: *"Lha bagian saya mana?"* Sang suami tidak menjawab, dia hanya diam saja.

Pemilik tanah ketika mengucapkan itu dalam keadaan sehat *wal afiat* dan dia tidak menentukan lokasi mana yang untuk anak-anaknya dan mana yang untuk mushalla. Selang beberapa tahun, dia (*wahib*) meninggal.

Pertanyaan

a. Termasuk akad apakah pernyataan di atas?
b. Bagaimana cara menentukan lokasi bagian masing-masing?
c. Bagaimanakah status tanah yang untuk mushalla?
d. Bolehkah tanah yang diperuntukkan mushalla ditukar dengan bagian yang lain?
e. Bolehkah membangun masjid sebagai ganti mushalla pada konteks di atas?
f. Bagaimanakah nasib sang istri, apakah mendapat bagian dari tanah tersebut atau tidak? *(PCNU Kab. Jember)*

Keterangan

Soal sub a terjawab dalam Bahtsul Masail PWNU di Lumajang 17-18 Januari 2014, dengan jawaban:

a. Bukan termasuk akad apapun, namun sekedar janji untuk melakukan hibah.

Jawaban b-f:

Soal sub b sampai f dinyatakan gugur karena belum terjadi akad apapun dalam *sighat* di atas.

453. Antara Umrah dan Haji

Deskripsi Masalah

Calon Jamaah Haji khususnya di Jawa Timur, yang telah mendaftarkan diri pada tahun ini harus rela mengantri keberangkatannya kurang lebih 15 tahun yang akan datang, karena terbatasnya kuota yang ada. Sebab itu, secara prosedur (legal) orang yang punya uang pun tidak bisa berangkat

kecuali menanti giliran porsi yang dimiliki. Hal ini berbeda dengan Umrah yang bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang diinginkan, tergantung pada travel dan besaran biaya yang diperlukan.

Pertanyaan

a. Apakah orang yang telah mendaftar haji dalam masa antrian tahun keberangkatan, diwajibkan umrah terlebih dahulu (tidak menunggu haji), jika ia telah memiliki biaya dan tercukupi segala keperluannya?

b. Apakah orang yang meninggal dunia saat menunggu antrian haji, sudah dikatakan *istitha'ah* haji sehingga dia terbebani wajib *badal* haji, dan *badal* umrah (jika pada tahun tunggu antrian haji dia belum umrah)?

c. Apakah bagi mereka yang belum mendaftar haji berlaku kriteria *istitha'ah umrah*? bagaimana kriterianya? *(PCNU Kota Surabaya)*

Jawaban a

Menurut pendapat yang menyatakan kewajiban umrah *'ala al tarakhi* (boleh menunggu waktu yang memungkinkan) maka dia tidak diwajibkan umrah mendahului porsi hajinya, kecuali apabila keadaannya *mudlayyaq* (ada sesuatu yang menyebabkan harus segera umrah). Dan apabila dia belum berumrah namun sudah meninggal dunia maka wajib badal umrah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, VII/3:

الثَّانِيَةُ: إِذَا وُجِدَتْ شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَى التَّرَاخِي، عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إِلاَّ الْمُزَنِيَّ ، فَقَالَ: هُوَ عَلَى الْفَوْرِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ سَنَةِ الْإِمْكَانِ مَا لَمْ يَخْشَ الْعَضْبَ، فَإِنْ خَشِيَهُ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي كُتُبِ الْخُرَاسَانِيِّينَ، حَكَاهُمَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَآخَرُونَ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: أَصَحُّهُمَا لاَ يَجُوزُ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلاَّ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلاَمَةُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِهِ، وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي مَسْأَلَتِنَا وَالثَّانِي: يَجُوزُ، لِأَنَّ أَصْلَ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي، فَلاَ يَتَغَيَّرُ بِأَمْرٍ مُحْتَمِلٍ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَيَجْرِي هَذَانِ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ خَافَ أَنْ يَهْلِكَ مَالُهُ، هَلْ لَهُ تَأْخِيرُ الْحَجِّ أَمْ لاَ؟ وَاللهُ أَعْلَمُ.

Yang kedua: Apabila syarat-syarat wajibnya haji telah terpenuhi, maka haji hukumnya wajib secara perlahan-lahan (tidak bersegera) menurut pendapat yang telah di-*nash* oleh Imam Syafi'i, dan *ashab asy-Syafi'i* bersepakat akan hal itu. Kecuali al-Imam al-Muzani, beliau berkata:

"Kewajiban melaksanakan haji secara secepatnya/segera (bergegas). Sehingga kalau kita mengikuti pendapat al-Madzhab, maka boleh mengakhirkan haji setelah tahun kemampuannya (tahun kuasa berangkat) selama orang yang berkewajiban tersebut tidak khawatir akan terjadi kelumpuhan. Apabila dia mengkhawatirkannya maka terdapat dua pendapat yang keduanya masyhur di dalam kitab-kitab Khurasaniyin, yang diriwayatkan oleh Imam al-Haramain dan al-Baghowi serta al-Mutawalli dan Shahib al-Uddah (pengarang kitab al-Uddah) serta ulama' yang lainnya". Imam ar-Rafi'i berkata: *"Yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah: tidak boleh, dikarenakan sesuatu yang wajib yang terdapat kelonggaran di dalam melaksanakannya, itu tidak boleh diakhirkan terkecuali dengan syarat ada keunggulan di dalam persangkaan orang yang berkewajiban, bahwa dia akan selamat hingga waktunya dia melaksanakan kewajiban itu, dan ini tidak ada di dalam persoalan yang sedang kita bicarakan. Pendapat kedua: boleh, karena hukum asal dari haji adalah wajib dengan berlahan-lahan (tidak bersegera), maka hukum tersebut tidak akan berubah hanya disebabkan oleh sesuatu yang masih muhtamil (yang masih memiliki kemungkinan terjadi dan tidak terjadi)."* Imam al-Mutawalli berkata: *"Dan dua pendapat ini bagi orang yang khawatir hartanya akan rusak (musnah), apakah dia boleh mengakhirkan (menunda) haji atau tidak?" Wallahu A'lam.*

b. *Nihayah az-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, I/183:

(يَجِبَانِ) أَيِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (عَلَى مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْتَطِيعٍ مَرَّةً بِتَرَاخٍ) مِنْ حَيْثُ الْأَدَاءُ فَلِمَنْ وَجَبَا عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ تَأْخِيرُهُمَا بَعْدَ سَنَةِ الْإِمْكَانِ لِأَنَّ الْحَجَّ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَحُجَّ إِلَّا سَنَةَ عَشْرٍ. وَمَكَّةُ قَدْ فُتِحَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ فَعَدَمُ حَجِّهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعٍ دِلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ، وَمَحَلُّ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إِنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهِمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ؛ أَيْ فَالنُّسُكُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ وَمِنَ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ، بَلْ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَحَجَّ، وَوُجُوبُهُ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهِ تَبَيَّنَ عِصْيَانُهُ مِنَ السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ حَتَّى لَوْ شَهِدَ فِيهَا شَهَادَةً وَلَمْ يُحْكَمْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَلَا يُحْكَمُ بِهَا، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّنَةِ الْأَخِيرَةِ زَمَنُ إِمْكَانِ الْحَجِّ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ، وَمِثْلُ مَوْتِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَضَبُهُ فَيَتَبَيَّنُ، مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ وَفِيمَا بَعْدَهُ إِلَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْاِسْتِنَابَةُ فَوْرًا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِهِ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَوْ خَشِيَ الْعَضَبَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ هَلَاكَ مَالِهِ وَكَذَا لَوْ أَفْسَدَ حَجَّةً

الْإِسْلَامِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا أَوْ تَضِيْقُ بِالنَّذْرِ، وَمَعَ كَوْنِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيْلُهُ خُرُوْجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ الْفَوْرَ كَالْإِمَامِ مَالِكٍ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ.

Haji dan Umrah wajib atas *mukallaf* yang bebas (bukan budak) yang mampu. Kewajiban tersebut hanya satu kali dan dengan perlahan-lahan (tidak bersegera) dalam melaksanakannya, sehingga boleh bagi orang yang berkewajiban melalui dirinya sendiri atau orang yang menggantikannya untuk mengakhirkan haji dan umrah setelah tahun kemampuan (tahun kuasa berangkat) dikarenakan haji diwajibkan pada tahun 6 hijriyah sedang Nabi tidak berhaji kecuali tahun sepuluh Hijriyah. Sedangkan Makkah telah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriyah, sehingga Nabi ﷺ tidak melaksanakan haji pada tahun 8 dan 9, menunjukkan bahwa haji tidak wajib dilakukan secepatnya (bersegera), tempat diperbolehkannya mengakhirkan adalah bila orang yang berkewajiban menyengaja akan melaksanakannya di tahun yang akan datang sebagaimana dalam solat. Maksudnya Ibadah haji dan umrah adalah *fardlu ain* atas orang yang mampu, dan ibadah tersebut termasuk sebagian dari syari'at-syari'at yang terdahulu, bahkan tidak ada satupun nabi kecuali beliau pasti berhaji, dan kewajiban melaksanakan haji itu secara perlahan-lahan (tidak bersegera), akan tetapi kalau orang yang berkewajiban ternyata mati sebelum melaksanakannya, maka tampaklah secara jelas bahwa dia telah bermaksiat (sebab meninggalkan haji dalam keadaan mampu) mulai tahun terakhir dari masa dia mampu untuk melaksanakan haji, sehingga apabila dia bersaksi di dalam tahun tersebut dengan sebuah kesaksian dan belum diberikan suatu keputusan hukum berdasarkan kesaksian tersebut sehingga dia mati, maka tidak boleh memberikan keputusan hukum dengan berdasarkan kesaksian itu. Menurut pendapat yang diunggulkan: yang diinginkan dengan tahun terakhir adalah masa kemungkinan melaksanakan haji sesuai dengan kebiasaan penduduk negerinya. Yang semisal dengan kematiannya adalah kelumpuhan dia, sehingga menjadi jelas maksiatnya mulai tahun terakhir dari beberapa tahun kemampuan melaksanakan haji. Begitu juga waktu-waktu setelah kelumpuhan itu terjadi sehingga ada yang berhaji untuknya. Wajib atasnya untuk mencarikan (mengupayakan) pengganti secepatnya.

Lalu hukum wajibnya melaksanakan haji yang secara perlahan-lahan ini mengecualikan ketika orang yang mampu tersebut khawatir lumpuh atau mati atau musnahnya harta, maka harus segera. Begitupun bila dia membatalkan (membuat batal/*fasad*) haji Islam maka wajib atas dia meng*qadla*'inya segera, atau haji itu menjadi sempit kesempatannya

disebabkan *nadzar* (seperti jika orang yang mampu tersebut ber*nadzar* melaksanakan haji Islam di tahun ini misalkan). Meskipun kewajiban untuk melaksanakan haji itu sebenarnya secara perlahan-lahan (tidak bersegera) tapi harus ada *'azm* (kesengajaan) untuk melaksanakannya (di waktu yang akan datang), dan disunnahkan untuk melaksanakannya segera karena berusaha lepas dari *khilaf* ulama yang mewajibkan untuk melaksanakannya dengan segera, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad.

c. *Asna al-Mathalib*, III/128:

(فَصْلٌ). (وُجُوبُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) وَمِنْ حَيْثُ الْأَدَاءُ (عَلَى التَّرَاخِي) فَلِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ بَعْدَ سَنَةِ الْإِمْكَانِ، لِأَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ خَمْسٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا أَوْ سَنَةَ سِتٍّ كَمَا صَحَّحَهُ فِي السِّيَرِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الْأَصْحَابِ [وَأَخَّرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَنَةِ عَشْرٍ بِلَا مَانِعٍ] وَقِيسَ بِهِ الْعُمْرَةُ وَتَضْيِيقُهُمَا بِنَذْرٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبٍ أَوْ قَضَاءٍ كَمَا سَيَأْتِي عَارِضٌ. ثُمَّ التَّأْخِيرُ إِنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الصَّلَاةِ (فَلَوْ خَشِيَ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَوِ الْعُمْرَةُ (الْعَضْبَ حَرُمَ) عَلَيْهِ (التَّأْخِيرُ) ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ إِنَّمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَمِثْلُهُ مَنْ خَشِيَ هَلَاكَ مَالِهِ (وَلَوْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ) الْحَجُّ (بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَ) مُضِيِّ (إِمْكَانِ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ) وَالسَّعْيِ إِنْ دَخَلَ الْحَاجُّ بَعْدَ الْوُقُوفِ (صَارَ) يَعْنِي مَاتَ (عَاصِيًا)، وَلَوْ شَابًّا، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعِ الْقَافِلَةُ (لِاسْتِقْرَارِ الْوُجُوبِ) عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا جُوِّزَ لَهُ التَّأْخِيرُ لَا التَّفْوِيتُ فَيَلْزَمُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ. وَيُخَالِفُ ذَلِكَ نَظِيرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا مَعْلُومٌ فَلَا تَقْصِيرَ مَا لَمْ يُؤَخِّرْ عَنْهُ.

(Pasal) Kewajiban melaksanakan haji dan melakukan umrah dari segi pelaksanaannya adalah secara perlahan-lahan (tidak bersegera) maka boleh bagi orang yang berkewajiban menunaikan haji melalui dirinya sendiri atau melalui orang lain untuk mengakhirkannya setelah tahun kemampuan, karena haji difardukan pada tahun 5 Hijriyah sebagaimana diyakini oleh Imam ar-Rafi'i di sini (bab haji), atau tahun 6 Hijriyah sebagaimana dishahihkan oleh beliau di bab *as-Sair* dan Imam an-Nawawi mengikuti beliau di dalam pendapat tahun keenam tersebut di dalam

kitab *ar-Raudlah* serta Imam an-Nawawi menuqilnya di dalam *al-Majmu'* dari *ashab* asy-Syafi'i, kemudian Rasulullah ﷺ mengakhirkannya hingga tahun 10 Hijriyah tanpa ada halangan. Umrah di*qiyas*kan dengan haji, sedangkan menyempitnya waktu haji dikarenakan *nadzar* atau khawatir lumpuh atau karena *qadla'* sebagaimana keterangan yang akan datang ialah hal yang baru (bukan hukum asal). Mengakhirkan/menunda haji hanya diperbolehkan dengan syarat menyengaja akan melakukannya di masa yang akan datang sebagaimana yang telah lalu keterangannya di dalam Bab solat. Lalu bila orang yang berkewajiban melaksanakan haji atau umrah khawatir mengalami kelumpuhan, maka haram baginya untuk menunda haji karena sesuatu yang wajib yang ada kelonggaran di dalam melaksanakannya, itu tidak boleh diakhirkan kecuali dengan syarat ada keunggulan di dalam persangkaan orang yang berkewajiban bahwa dia akan selamat hingga waktunya dia melaksanakan kewajiban itu. Imam an-Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*: "Imam al-Mutawalli berkata: *"Dan yang termasuk semisal dengannya adalah orang yang khawatir akan kemusnahan hartanya."*" Bila orang yang berkewajiban melaksanakan haji, mati setelah separuh malam hari raya kurban dan setelah lewatnya waktu yang mungkin untuk digunakan melempar jumrah serta *thawaf* dan *sa'i* apabila orang yang haji masuk setelah *wuquf*, maka dia menjadi orang yang durhaka, maksudnya dia mati dalam keadaan bermaksiat meski dia seorang pemuda, dan meski rombongan-rombongan haji belum kembali pulang, karena kewajiban haji telah menetap pada dirinya, dan karena yang dibolehkan hanya menundanya bukan meninggalkannya, sehingga wajib menghajikan orang tersebut dengan ongkos dari harta waris dia, dan hal itu berbeda dengan sesuatu yang mirip dengannya di dalam persoalan solat, karena sesungguhnya akhir dari waktu solat itu bisa diketahui, maka tidak ada kesembronoan selagi dia tidak menunda dari waktunya.

d. *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, XIV/212:

وَهُمَا عَلَى التَّرَاخِي بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدُ وَأَنْ لَا يَتَضَيَّقَا بِنَذْرٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ بِقَرِينَةٍ وَلَوْ ضَعِيفَةً كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْمُوَسَّعِ إلَّا إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ تَمَكُّنُهُ مِنْهُ أَوْ بِكَوْنِهِمَا قَضَاءً عَمَّا أَفْسَدَهُ وَمَتَى أَخَّرَ فَمَاتَ تَبَيَّنَ فِسْقُهُ بِمَوْتِهِ مِنْ آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ إلَى الْمَوْتِ فَيُرَدُّ مَا شَهِدَ بِهِ وَيُنْقَضُ مَا حَكَمَ بِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ بِوُجُودِ مَالٍ لَهُ لَمْ يَعْلَمْهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَحْكُمُ بِفِسْقِهِ لِعُذْرِهِ.

Haji dan Umrah itu wajib secara perlahan-lahan dengan syarat ada kesengajaan untuk melakukannya setelah waktu kemampuan itu, dan

adanya kewajiban haji serta umrah tersebut tidak menyempit waktunya karena *nadzar* atau khawatir lumpuh atau rusak/musnahnya harta dengan adanya *qarinah* meskipun lemah, sebagaimana kepahaman yang tersirat dari perkataan ulama': *"Tidak boleh menunda (mengakhirkan) sesuatu yang wajib yang terdapat kelonggaran di dalam melaksanakannya kecuali unggul di dalam persangkaan bahwa dia mungkin untuk melaksanakannya nanti"*, atau menyempit waktunya karena haji atau umrah itu *qadla'* dari haji atau umrah yang dirusakkannya (dibatalkan di tengah pelaksanaannya). Ketika dia menundanya lalu mati, maka tampak kefasikannya melalui kematiannya yang terhitung mulai dari tahun-tahun kemampuannya berhaji hingga kematian itu, sehingga tertolaklah kesaksiannya tentang sesuatu yang disaksikannya, dan hukum yang telah dia putuskan juga dibatalkan (digagalkan). Akan datang keterangan yang menjelaskan bahwa kewajiban haji dan umrah juga menimpa/wajib baginya karena harta yang dia miliki tetapi tidak diketahuinya. Meskipun begitu kita tidak menghukuminya sebagai orang *fasiq* karena memiliki *udzur*.

e. *Hasyiyah al-Jamal*, VIII/432:

(قَوْلُهُ بِتَرَاخٍ) إِمَّا حَالٌ مِنْ كُلٍّ عَلَى أَنَّ الْبَاءَ لِلْمُلَابَسَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ، وَإِمَّا مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبُ وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ، أَيْ يَجِبُ بِتَرَاخٍ فِي مُتَعَلَّقِهِ أَيِ الْوُجُوبِ، وَالْمُتَعَلَّقُ هُوَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَأَمَّا الْوُجُوبُ فَلَا تَرَاخِيَ فِيهِ بَلْ هُوَ حَالِيٌّ تَأَمَّلْ وَإِنَّمَا كَانَ الْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي ؛ لِأَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ [وَلَمْ يَحُجَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَنَةَ عَشْرٍ وَمَعَهُ مَيَاسِيرُ] لَا عُذْرَ لَهُمْ وَقِيسَ بِهِ الْعُمْرَةُ ثُمَّ النُّسُكُ إِمَّا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَحُجَّ بِشَرْطِهِ أَوْ كِفَايَةٍ لِلْأَحْيَاءِ أَوْ تَطَوُّعٍ وَيُتَصَوَّرُ فِي الْأَرِقَّاءِ وَالصِّبْيَانِ إِذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِمْ نَعَمْ لَوْ تَطَوَّعَ مِنْهُمْ مَنْ تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ احْتَمَلَ أَنْ يَسْقُطَ بِفِعْلِهِمُ الْحَرَجُ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ. اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِتَرَاخٍ) فَلِمَنْ لَزِمَاهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يُؤَخِّرَهُمَا بَعْدَ سَنَةِ الْإِمْكَانِ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنَا كَالْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمَا عَلَى الْفَوْرِ وَلَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ لَكِنِ اخْتَلَفَ صَاحِبَاهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ كَقَوْلِنَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَنَّهُمَا عَلَى الْفَوْرِ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْإِيضَاحِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) إِذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَى التَّرَاخِي فَلَهُ التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يَخْشَ الْعَضْبَ فَإِنْ خَشِيَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ عَلَى الْأَصَحِّ هَذَا مَذْهَبُنَا.

[Perkataan Imam Zakariya al-Anshari: *Bitarakhin* (dengan perlahan-lahan)] Bisa jadi sebagai *haal* dari kata "*Kullun*" dengan menganggap huruf *baa'* berfaedah *mulaabasah*, dan ketika ini yang dikehendaki maka jelaslah persoalannya. Bisa jadi ber*ta'alluq* (berhubungan/berkaitan) dengan kata "*Yajibu*", dan ketika itu yang terjadi, maka butuh adanya perkiraan yang artinya: wajib secara perlahan-lahan dalam melaksanakan hal yang dikaitkan dengan hukum wajib tersebut, dan *al-muta'allaq* (yang dikaitkan dengan wajib) adalah setiap satu dari haji dan umrah. Adapun untuk hukum wajib itu sendiri, maka tidak ada penundaan di dalamnya, akan tetapi hukum wajib adalah seketika. Renungkanlah. Adanya haji diwajibkan secara perlahan-lahan ini dikarenakan alasan, haji itu sebenarnya diwajibkan pada tahun enam hijriyah sedangkan Rasulullah ﷺ tidak berhaji kecuali tahun kesepuluh hijriyah dan terdapat orang-orang Islam yang kaya bersama beliau, yang mana mereka tidak memiliki udzur apapun. Umrah disamakan dengan haji. Kemudian *nusuk* (haji dan umrah) adakalanya *fardu ain*, yang wajib atas seseorang yang belum pernah berhaji sesuai persyaratannya, atau *fardu kifayah* bagi orang-orang yang hidup. Adakalanya juga sunnah, dan untuk sunnah dapat tergambarkan di dalam hajinya para budak (hamba sahaya) dan anak-anak kecil, karena *fardu kifayah* tidak ditujukan pada mereka, akan tetapi jika ada sebagian orang dari mereka yang bisa menunaikan *fardu kifayah* (yang mampu menggugurkan *fardu kifayah*) melakukan *nusuk* secara *tathawwu'* (sunnah) maka ada kemungkinan gugurnya dosa dari orang-orang *mukallaf* yang disebabkan perbuatan ibadah mereka, seperti dalam solat jenazah. Sekian. Syarh al-Imam Muhammad ar-Ramli.

(Sekali lagi tentang: Perkataan Imam Zakariya al-Anshari: *Bitarakhin* (dengan perlahan-lahan)] Maka bagi orang yang wajib melaksanakan haji dan umrah baik kewajiban itu melalui dirinya sendiri atau orang yang menggantikannya, boleh untuk menunda keduanya setelah tahun kemampuannya. Sedangkan Imam al-Muzani yang termasuk salah satu dari para pemimpin (para imam) kita berkata, sebagaimana Imam Malik dan Imam Ahmad: "*Bahwasannya haji dan umrah itu wajib dengan bersegera (secepatnya/segera dilakukan)*", dan Imam Abu Hanifah tidak memiliki *nash* (penjelasan) mengenai persoalan ini, akan tetapi kedua sahabatnya berselisih tentang ini, sehingga Imam Muhammad berkata sebagaimana pendapat kita. Imam Abu Yusuf berkata: "*Sesungguhnya haji dan umrah wajib secara bersegera/secepatnya.*" Sekian Birmawi. Dalam *al-Idhah* ada keterangan yang tertulisnya seperti ini: "*(Suatu Cabang) Apabila syarat-syarat wajib haji telah terpenuhi, maka wajib hukumnya melaksanakan haji secara perlahan-lahan (tidak bersegera), sehingga boleh bagi orang yang berkewajiban tersebut untuk mengakhirkannya (menundanya) selama dia tidak khawatir akan*

kelumpuhan, apabila dia mengkhawatirkannya maka haram baginya untuk menunda menurut pendapat yang lebih shahih, ini adalah madzhab kami."

Jawaban b

Orang yang meninggal dunia saat menunggu antrian haji belum bisa dikatakan *istitha'ah* haji karena belum mendapat jatah kendaraan (pesawat) sehingga dia tidak terbebani wajib badal haji. Sedangkan untuk badal umrah perlu ditinjau, bila telah *istitha'ah* umrah maka wajib *badal* umrah dan jika belum *istitha'ah* umrah maka tidak wajib *badal* umrah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Kanz ar-Raghibin/Syarh al-Mahalli*, V/472:

تَتِمَّةٌ: الْعُمْرَةُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَظْهَرِ بِفَرْضِيَّتِهَا كَالْحَجِّ فِي شَرْطِ مُطْلَقِ الصِّحَّةِ، وَصِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَالِاسْتِطَاعَةُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا. (وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ وَلَهَا شُرُوطٌ أَحَدُهَا وُجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي السَّفَرِ مُدَّةَ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ . وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَنْ يَجِدَ الزَّادَ وَأَوْعِيَتَهُ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي السَّفَرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ اُشْتُرِطَ ذَلِكَ لِذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ. (وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ. (أَهْلٌ) أَيْ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ. (وَعَشِيرَةٌ) أَيْ أَقَارِبُهُ، أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. (لَمْ تُشْتَرَطْ) فِي حَقِّهِ. (نَفَقَةُ الْإِيَابِ) الْمَذْكُورَةُ مِنَ الزَّادِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْبِلَادَ فِي حَقِّ مِثْلِهِ مُتَقَارِبَةٌ،

[Penyempurnaan] Umrah menurut pendapat yang lebih unggul yang menyatakan kefarduannya adalah seperti halnya haji di dalam syarat sahnya secara mutlaq, dan keabsahan melaksanakan ibadah itu, serta syarat wajibnya dan mencukupinya akan umrah Islam (umrah satu kali yang diwajibkan di dalam Islam), Dan satu *Istitha'ah* (kemampuan) saja sudah mencukupi untuk keduanya secara seluruhnya. Dan *Istitha'ah* itu ada dua macam: salah satunya adalah kemampuan menjalaninya melalui dirinya sendiri, dan *Istitha'ah* ini memiliki beberapa syarat: wujudnya ongkos dan wadah-wadah orang itu, serta biaya pergi dan pulangnya. Ungkapan dari Kitab *al-Muharrar*: *"Dan segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam keadaan bepergiannya, selama melakukan perjalanan berangkat dan perjalanan pulang"*, Adapun *Ibarah* dari kitab ar-Raudlah: *"Menemukan/wujudnya/adanya ongkos serta wadah-wadah bagi dirinya dan apapun yang dia butuhkan di dalam bepergian, kemudian apabila dia memiliki keluarga*

atau kerabat maka hal tersebut (adanya ongkos serta wadah dan seterusnya) disyaratkan harus ada bagi perjalanan dia berangkat dan perjalanan pulangnya, apabila tidak punya keluarga, maka juga disyaratkan seperti itu pula menurut pendapat yang lebih shahih." Dan ada yang menyatakan: *"Apabila dia tidak memiliki keluarga, maksudnya mereka yang wajib dia nafkahi atau 'asyirah yang maksudnya adalah para kerabat artinya dia tidak memiliki salah satu dari dua golongan tersebut di negeri dia"*, (dengan menggunakan *haa' dlamir hi*), maka tidak disyaratkan baginya adanya biaya untuk kembali pulang yang telah disebutkan tadi, di antaranya adalah ongkos pulang dan lain-lainnya, karena semua negeri bagi orang semacam dia hampir sama.

b. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, VII/3:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ نُظِرَتْ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنَ الْأَدَاءِ ـــ سَقَطَ فَرْضُهُ، وَلَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ، وَقَالَ أَبُو يَحْيَى الْبَلْخِيُّ: يَجِبُ الْقَضَاءُ، وَأَخْرَجَ إِلَيْهِ أَبُو إِسْحَاقَ نَصَّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَرَجَعَ عَنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ أَنَّهُ هَلَكَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْفَرْضُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْأَدَاءِ فَسَقَطَ الْفَرْضُ، كَمَا لَوْهَلَكَ النِّصَابُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْأَدَاءِ لَمْ يَسْقُطِ الْفَرْضُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لِمَا رَوَى بُرَيْدَةُ قَالَ: «أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَالَ: حُجِّي عَنْ أُمِّكِ» وَلِأَنَّهُ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ لَزِمَهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ، كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ عَنْهُ مِنَ الْمِيقَاتِ، لِأَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَيَجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَاجِبٌ فَكَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ وَإِنِ اجْتَمَعَ الْحَجُّ وَدَيْنُ الْآدَمِيِّ وَالتَّرِكَةُ لَا تَتَّسِعُ لَهُمَا فَفِيهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.

Mushannif Rahimahullah Ta'ala berkata: *"Dan barang siapa berkewajiban melaksanakan haji, tapi dia tidak berhaji hingga dia mati, maka dipertimbangkan dulu: bila dia mati sebelum dia mampu untuk melaksanakannya maka gugurlah kewajiban haji itu darinya dan tidak wajib menggadla'inya."* Dan Imam Abu Yahya al-Balkhi berkata: *"Wajib menggadla'inya,"* Lalu Imam Abu Ishaq mengeluarkan *nash* dari Imam Syafi'i, sehingga Imam Abu Yahya al-Balkhi mencabut kembali pendapat beliau diatas. Dan bukti bahwa kewajiban haji tersebut menjadi gugur adalah: sesuatu berkaitan dengan kewajiban itu (yang berarti disini adalah orangnya) telah musnah sebelum

ada kemungkinan untuk melaksanakan, sehingga kewajiban pun menjadi gugur, sebagaimana apabila *nishab* menjadi musnah sebelum adanya kemungkinan untuk mengeluarkan zakat, dan bila dia mati setelah ada kemungkinan untuk melaksanakan maka kewajiban tersebut tidak jadi gugur. dan wajib meng-*qadla'*inya dari harta peninggalan dia, karena Hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah, Beliau berkata: *"Telah datang seorang wanita kepada Nabi ﷺ kemudian wanita tersebut berkata: "Wahai Rasulallah sesungguhnya ibuku telah meninggal sedangkan beliau belum berhaji".* Nabi ﷺ bersabda: *"Berhajilah engkau untuk ibumu"* (sebagai ganti dari Ibumu) dan karena haji adalah hak yang dapat digantikan yang telah wajib atas dirinya di dalam keadaan dia masih hidup, maka tidak akan menjadi gugur disebabkan kematian, seperti halnya hutang kepada manusia, dan wajib meng*qadla'* haji itu atas nama dia dari *miqat*, dikarenakan haji wajib dari *miqat*, serta wajib dari keseluruhan harta (sebelum diwaris) dikarenakan haji tersebut adalah hutang yang wajib dibayar, sehingga harus dari keseluruhan harta, sebagaimana hutang kepada manusia, lalu bila ada haji dan hutang kepada manusia merangkap dalam satu tanggung jawab, sedang harta peninggalannya tidak mencukupi untuk keduanya, maka disini terdapat tiga pendapat yang Aku Sebutkan semuanya di dalam akhir *Bab Zakat*.

c. *Nihayah az-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, I/183:

سَابِعُهَا: وُجُوْدُ الزَّمَنِ الَّذِيْ يَسَعُ الْمَعْهُوْدَ لِلنُّسُكِ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى مَكَّةَ بِأَنْ يَكُوْنَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ بَعْدَ الْاِسْتِطَاعَةِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنَ السَّيْرِ الْمُعْتَادِ لِأَدَاءِ النُّسُكِ وَهٰذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، فَإِنْ وُجِدَتْ الْاِسْتِطَاعَةُ وَالْبَاقِي زَمَنٌ لَا يَسَعُ السَّيْرَ الْمُعْتَادَ لَمْ يَنْعَقِدِ الْوُجُوْبُ فِيْ حَقِّهِ فِيْ هٰذَا الْعَامِ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْاِسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا فِيْ حَقِّ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ وَقْتِ خُرُوْجِ أَهْلِ بَلَدِهِ مِنْهُ لِلْحَجِّ إِلَى عَوْدِهِمْ فَمَتَى أَعْسَرَ فِيْ جُزْءٍ مِنْ ذٰلِكَ فَلَا اسْتِطَاعَةَ، وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَا بَعْدَهُ وَهٰذَا فِيْ حَقِّ الْحَيِّ، أَمَّا مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْاِسْتِطَاعَةِ فَإِنَّهُ يُحَجُّ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَقَبْلَ عَوْدِهِمْ، وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُوْدِ رُفْقَةٍ يَخْرُجُ مَعَهُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالْخُرُوْجِ فِيْهِ، وَأَنْ يَسِيْرُوْا السَّيْرَ الْمُعْتَادَ، وَهٰذَا إِنِ احْتِيْجَ إِلَى الرُّفْقَةِ لِدَفْعِ الْخَوْفِ، فَإِنْ أَمِنَ الطَّرِيْقُ بِحَيْثُ لَا يَخَافُ الْوَاحِدُ فِيْهَا لَزِمَهُ النُّسُكُ، وَلَا حَاجَةَ لِلرُّفْقَةِ، وَلَا نَظَرَ لِلْوَحْشَةِ لِأَنَّ النُّسُكَ لَا بَدَلَ لَهُ. ثَانِيْهَا: اسْتِطَاعَةٌ بِغَيْرِهِ فَتَجِبُ الْإِنَابَةُ عَنْ غَيْرِ

مُرْتَدٌّ مَاتَ وَعَلَيْهِ نُسُكٌ وَلَوْ بِنَحْوِ نَذْرٍ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا تُقْضَى مِنْهَا دُيُوْنُهُ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ سُنَّ لِوَارِثِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْهُ، وَلَوْ فَعَلَهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ بِلَا إِذْنٍ مِنَ الْوَارِثِ جَازَ كَمَا يَصِحُّ قَضَاءُ دُيُوْنِهِ بِلَا إِذْنٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نُسُكٌ بِأَنْ كَانَ أَدَّى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَا تَجُوْزُ الْإِنَابَةُ عَنْهُ إِلَّا لَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ وَإِلَّا جَازَتْ مُطْلَقًا قَالَ شَيْخُنَا يُوْسُفُ إِذَا كَانَتِ الْأُجْرَةُ مِنَ الْمُنِيْبِ لَا مِنَ التَّرِكَةِ جَازَتِ الْإِنَابَةُ بِلَا وَصِيَّةٍ

Yang ketujuh dari beberapa perkara yang tergolong *istitha'ah binnafsi* (mampu melaksanakan dengan diri sendiri) adalah: wujudnya waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu yang diketahui bagi ibadah haji (yang lumrah bagi pelaksanaan ibadah tersebut) mulai dari negerinya sampai mekkah dengan gambaran setelah mampu berangkat, terdapat sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk melakukan perjalanan dalam sisa waktu itu dengan bentuk perjalanan yang biasa/umum untuk dilakukan untuk melaksanakan ibadah haji, dan ini adalah pendapat yang *mu'tamad*, sehingga bila terdapat kemampuan berangkat sedangkan yang tersisa dari waktu hanyalah zaman yang tidak mencukupi untuk melakukan perjalanan yang normal maka tidak ada kewajiban atas orang tersebut di tahun ini, dan dalam kemampuan melakukan ibadah haji dipertimbangkan pula kelestariannya bagi setiap manusia. Dimulai dari waktu keluarnya penduduk negeri dari negeri tersebut untuk melakukan keberangkatan haji hingga kembalinya dari haji, maka kapanpun dia melarat di dalam satu *juz* (bagian) saja dari waktu-waktu tersebut maka itu berarti dia tidak memiliki kemampuan, dan tidak ada penilaian bagi kekayaan dia sebelum waktu itu dan tidak juga dengan waktu-waktu yang setelahnya, dan ini adalah hukum bagi orang yang masih hidup. Adapun bagi orang yang mati setelah mampu berhaji, maka dia harus dihajikan dengan ongkos dari harta peninggalannya meski kematiannya setelah para penduduk negerinya selesai berhaji dan sebelum mereka kembali. Harus ada rombongan yang keluar bersamanya pada waktu yang umum bagi penduduk negeri tersebut untuk keluar/berangkat di waktu itu, dan mereka melakukan perjalanan dengan tempo perjalanan yang umum dilakukan, dan persyaratan adanya rombongan ini apabila memang dibutuhkan adanya rombongan itu untuk menolak kekhawatiran, lalu apabila jalan yang dilalui aman-aman saja dengan sekira orang yang berangkat sendiri tidak merasa khawatir disana, maka ibadah haji dan umrah wajib baginya. Rombongan tidak dibutuhkan, serta perasaan kesepian dari teman tidak dijadikan pertimbangan dikarenakan ibadah *nusuk* tidak tergantikan.

Yang kedua dari pembagian *istitha'ah* (kemampuan) adalah *istitha'ah bi ghairihi* (mampu haji diwakili orang lain) maka wajib mewakilkan atas nama seseorang "selain orang yang murtad" yang mati sedangkan dia berkewajiban melaksanakan ibadah haji atau umrah meski kewajiban itu dikarenakan *nadzar*, dan ongkos diambilkan dari harta peninggalannya seperti hutang-hutangnya dilunasi menggunakan harta peninggalan itu. Apabila dia tidak memiliki harta peninggalan maka disunnahkan bagi ahli warisnya untuk melaksanakan ibadah *nusuk* (haji dan umrah) itu atas nama orang yang meninggal tersebut (sebagai ganti dari orang mati itu), dan bila ada orang lain (selain ahli waris) melaksanakannya, maka boleh meski tanpa izin dari ahli waris, sebagaimana diperbolehkannya melunasi berbagai hutang dari orang yang mati tersebut tanpa izin sama sekali. Jika orang yang mati tersebut tidak memiliki tanggungan wajib *nusuk* sama sekali dengan gambaran dia telah melaksanakan haji Islam (haji rukun islam/haji fardu), maka tidak boleh menggantikan dia dalam beribadah *nusuk* kecuali jika orang yang mati tersebut berwasiat untuk melakukan itu, bila tidak (yang berati dia berwasiat) maka boleh secara mutlaq. Guru kami yang bernama Yusuf berkata: *"Bila biayanya ditanggung oleh orang yang menggantikan (biayanya dari orang yang menggantikan), bukan diambil dari harta peninggalan orang yang mati itu, maka boleh menggantikan tanpa adanya wasiat."*

Jawaban c

Bisa berlaku kriteria *istitha'ah* umrah. Sedangkan kriteria *istitha'ah* umrah sama dengan kriteria *istitha'ah* haji, namun umrah bisa dilakukan kapanpun berbeda dengan haji.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, III/8:

(وَشَرْطُ وُجُوبِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (الْإِسْلَامُ) فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ إِلَّا لِلْعِقَابِ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَلَا أَثَرَ لِاسْتِطَاعَتِهِ فِي كُفْرِهِ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَيُخَاطَبُ بِهِ فِي رِدَّتِهِ حَتَّى لَوِ اسْتَطَاعَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْحَجُّ، وَإِنِ افْتَقَرَ، فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى مَاتَ حُجَّ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ (وَالتَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِاسْتِطَاعَةُ) بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَضْدَادِ هَؤُلَاءِ لِنَقْصِهِمْ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ مَا مَرَّ فِيهِ أَنَّ الْمَرَاتِبَ خَمْسٌ صِحَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَصِحَّةُ مُبَاشَرَةٍ فَوُقُوعٌ عَنْ نَذْرٍ فَوُقُوعٌ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ فَوُجُوبٌ وَأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الْوَاحِدَةَ كَافِيَةٌ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ أَمَّا اسْتِطَاعَةُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ فَلَا يُتَوَهَّمُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا لِلْحَجِّ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ إِلَخْ) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَكَذَا اسْتِطَاعَةُ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا فِي وَقْتِ الْحَجِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَكِّيِّ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَجِدَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْإِتْيَانِ بِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ دُونَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْوُصُولِ بِعَرَفَةَ وَلَوْ قَرَنَ بَلْ وَلِغَيْرِهِ أَيْضًا. خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ التُّحْفَةِ وَشَرْحِ الْمُخْتَصَرِ اِنْتَهَى اهـ مُحَمَّدُ صَالِحُ الرَّئِيسُ

Syarat wajibnya sesuatu yang telah tersebut tadi, maksudnya sesuatu yang telah disebutkan berupa haji dan umrah adalah Islam, sehingga haji dan umrah tidak wajib atas orang kafir asli kecuali sebatas untuk memberikan konsekuensi berupa siksaan kepadanya, seperti keterangan yang telah lalu di dalam mengenai solat dan lain-lainnya serta tidak ada efek bagi kemampuan dia di dalam keadaan dia kafir, adapun orang murtad maka ikut diperintahkan (dihadapkan kearah perintah) dengan haji dan umrah dalam kemurtadannya, sehingga apabila dia memiliki kemampuan (ketika keadaan murtad) kemudian dia masuk Islam, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji, meski dia telah jadi seorang fakir, bila dia menundanya hingga dia mati, maka wajib dihajikan dari harta peninggalannya. Syarat wajib yang berikutnya adalah *taklif* (yang dibebani tanggung jawab) dan merdeka (bukan budak) serta mampu, secara *Ijma' Ulama'*. Sehingga haji dan umrah tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat yang sebaliknya dari sifat-sifat tadi, dikarenakan minusnya mereka. dan dapat diketahui dari perkataan beliau beserta penjelasan yang telah terdahulu disini (di dalam penjelasan dari haji fardlu Islam) bahwa ada lima kategori (tingkatan): sah secara mutlaq, sah melaksanakan, kemudian terjadi bagi *nadzar*, lalu terjadi untuk haji fardlu Islam, kemudian kewajiban melaksanakan. dan dapat diketahui bahwa sesungguhnya wujudnya satu kemampuan saja, sudah cukup untuk menjadikan wajibnya melaksanakan haji dan umrah, begitulah Ulama mengatakannya. Dan letak dari pernyataan ini (satu kemampuan saja cukup) seperti yang sudah jelas: di dalam kemampuan berhaji, adapun kemampuan untuk melaksanakan umrah di selain waktu haji, maka tidak dapat digambarkan/dipahami bahwa kemampuan itu sudah cukup untuk haji.

(Perkataan al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami: *"Di selain waktu-waktu haji"*) *Al-'Allaamah* Ibn Al-Jamal berkata di dalam *Syarh al-Idlah*: *"Begitupun kemampuan untuk umrah saja di dalam waktu-waktu haji (musim haji) dengan dinisbatkan kepada orang mekkah, karena mungkin saja dia memiliki sesuatu yang dia butuhkan untuk digunakan sampai ke tanah halal yang terdekat, akan tetapi dia tidak mempunyai sesuatu yang digunakan untuk sampai ke tanah Arafah, meskipun dia barengkan (meskipun andai dia jadikan qiran), bahkan*

bagi selain orang mekkah juga begitu". Pendapat ini berbeda dengan sesuatu yang tersirat dari tindakan (yang dibuat/dikerjakan oleh) *At-Tuhfah* dan *Syarh al-Mukhtashar*. Sekian Perkataan dari *al-'Allaamah* Ibn Al-Jamal. Sekian. Muhammad Saleh ar-Ra'is.

454. Peralihan *Nazhir* Wakaf

Deskripsi Masalah

Pada awalnya, *waqif* telah menyerahkan wakafnya kepada *Nazhir* 1 untuk dijadikan mushalla (tempat solat). Dalam perjalanan waktu ternyata *Nazhir* 1 tidak amanah, karena menyalahgunakan wakaf untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hal itu, lalu *waqif* mengalihkan wakafnya kepada *Nazhir* lain (*Nazhir* 2) yang diyakini dapat menjaga amanah, karena telah lama mengelola pondok pesantren.

Setelah *waqif* bertemu dengan *Nazhir* 2 lantas terdapat kesepakatan, bahwa wakafnya tidak hanya untuk solat saja namun bisa juga untuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pondok yang dikelola oleh *Nazhir* 2.

Pertanyaan

a. Apakah peralihan dari *Nazhir* 1 ke *Nazhir* 2 dengan merubah tujuan wakaf seperti di atas dapat dibenarkan?
b. Bagaimanakah apabila yang melakukan peralihan dan perubahan itu adalah ahli waris waqif?
c. Bolehkah tanah yang telah diwakafkan ditulis dalam sertifikat sebagai tanah hibah demi untuk mengambil manfaat, seperti dijadikan jaminan pinjaman? (PCNU Kab. Blitar)

Jawaban a

Apabila *Waqif* sekaligus berstatus sebagai *Nazhir* maka boleh mengganti *Nazhir* pada orang lain yang berstatus sebagai wakil *Nazhir*. Namun apabila *Waqif* telah menyaratkan *Nazhir* dalam ikrar wakaf atau *Nazhir* yang ditunjuk tidak memenuhi syarat menjadi *Nazhir* seperti *fasiq* maka status ke*nazhir*an menjadi milik hakim.

Sedangkan hukum peralihan (perubahan) status wakaf tidak diperbolehkan karena *waqif* sudah tidak punya hak apapun pada harta wakaf setelah ikrar wakaf.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Asna al-Mathalib*, V/549:

(فَرْعٌ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ وَلَّاهُ) وَيَنْصِبَ غَيْرَهُ حَيْثُ كَانَ النَّظَرُ لَهُ كَمَا يَعْزِلُ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ وَيَنْصِبُ غَيْرَهُ وَكَأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ نَائِبًا عَنْهُ، فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْزِلُهُ

بِسَبَبٍ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بَعِيدٌ (لَا مَنْ شَرَطَ نَظَرَهُ أَوْ تَدْرِيسَهُ، أَوْ فَوَّضَهُ) أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا (إِلَيْهِ حَالَ الْوَقْفِ) فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْفُقَرَاءِ لَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُمْ بِالْأَغْنِيَاءِ وَلِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ بَعْدَ شَرْطِهِ النَّظَرَ فِي الْأُولَى لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَنْ جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْفِ فَإِنَّ لَهُ عَزْلَهُ كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ النَّظَرِ لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ فِي تَفْوِيضِ التَّدْرِيسِ بِمَا إِذَا كَانَتْ جُنْحَةٌ[1] ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّفْوِيضِ تَبِعَ فِيهِ الْبَغَوِيَّ وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ جَوَازَ عَزْلِهِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لِعَدَمِ صِيغَةِ الشَّرْطِ (بَلْ لَوْ عَزَلَ النَّاظِرُ) الثَّابِتُ لَهُ النَّظَرُ (بِالشَّرْطِ نَفْسَهُ، أَوْ فَسَقَ فَتَوْلِيَةُ غَيْرِهِ إِلَى الْحَاكِمِ) لَا إِلَى الْوَاقِفِ إِذْ لَا نَظَرَ لَهُ بَعْدَ أَنْ جَعَلَ النَّظَرَ فِي حَالِ الْوَقْفِ لِغَيْرِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الْفِسْقِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَإِنْ شَرَطَ النَّظَرَ) حَالَ الْوَقْفِ (لِزَيْدٍ بَعْدَ انْتِقَالِ الْوَقْفِ مِنْ عَمْرٍو إِلَى الْفُقَرَاءِ فَعَزَلَ زَيْدٌ نَفْسَهُ) مِنَ النَّظَرِ (أَوِ اسْتَنَابَ) فِيهِ غَيْرَهُ (قَبْلَ انْتِقَالِ الْوَقْفِ) مِنْ عَمْرٍو (إِلَى الْفُقَرَاءِ لَمْ يَصِحَّ) كُلٌّ مِنَ الْعَزْلِ وَالِاسْتِنَابَةِ (لِأَنَّهُ غَيْرُ نَاظِرٍ فِي الْحَالِ) وَلَا يَمْلِكُ الْوَاقِفُ عَزْلَ زَيْدٍ فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّعْلِيلِ مِنْ زِيَادَتِهِ.

Suatu Cabang. Boleh bagi *waqif* untuk memecat seseorang yang dia beri kekuasaan (sebagai wakil *Nazhir*) dan mengangkat orang yang lainnya, apabila ke*nazhir*an itu dimiliki oleh *waqif*[2] sebagaimana *muwakkil* (orang yang mewakilkan) boleh memecat wakilnya, dan mengangkat orang yang lainnya, serta orang yang dia beri kekuasaan adalah orang yang menggantikan dia (*waqif*), sehingga pendapat yang menyatakan *"bahwa waqif hanya dapat memecat nazhir tersebut di atas bila dikarenakan adanya suatu sebab, dan jika tidak ada sebab sama sekali, maka waqif tidak berhak untuk memecatnya, sehingga apabila waqif tetap memecatnya maka nazhir tersebut tidak terpecat."* Pendapat ini jauh sekali dari kebenaran. Tidak boleh bagi *waqif* untuk memecat orang yang mana dia mensyaratkan ke*nazhir*annya (penjagaan dia untuk wakaf) atau pengajarannya ketika wakaf terjadi, atau dia serahkan kedua-duanya kepada orang tersebut ketika melangsungkan pewakafan, maka *waqif* tidak berhak mencopot/memecat dia meski karena alasan kemaslahatan, sebagaimana contoh apabila dia telah mewakafkan sesuatu untuk anak-anaknya yang fakir,

---

[1] الجنحة جرم بين المخالفة والجناية kejahatan ringan: Lihat *Al-Munawwir* 230.

[2] (Misalkan dengan cara *waqif* mensyaratkan adanya ke*nazhir*an untuk dirinya sendiri: lihat *at-Tuhfah*, VI/291).

maka tidak boleh menggantikan mereka dengan anak-anak yang kaya. Dan dikarenakan *waqif* sudah tidak memiliki hak ke*nazhir*an setelah dia mensyaratkan ke*nazhir*an tersebut pada pertama kali ke selain dirinya sendiri, berbeda dengan seseorang yang dia jadikan *nazhir* atau pengajar setelah pewakafan selesai sepenuhnya, maka *waqif* berhak memecatnya seperti keterangan yang telah terdahulu di dalam persoalan ke*nazhir*an (penjagaan wakaf), akan tetapi sebaiknya kewenangan memecat tersebut untuk persoalan penyerahan pengajaran (pendidikan) diberikan suatu ketentuan (*qayyid*) bila ada kejahatan (yang dilakukan oleh pengajar) lalu keterangan yang disebutkan oleh kitab *ar-Raudh* dalam masalah *tafwidh* (penyerahan ketika wakaf) ini mengikuti pendapat Imam al-Baghawi, sedangkan ar-Rafi'i membahas dalam hal *tafwidh* (penyerahan: ingat, ini bukan mensyaratkan ketika wakaf tapi menyerahkan ketika wakaf) adanya kewenangan *waqif* untuk memecatnya dan pendapat Imam ar-Rafi'i tersebut dishahihkan oleh Imam Nawawi dikarenakan tidak ada *shighat* syarat. Bahkan apabila *Nazhir* yang telah ditetapkan ke*nazhir*annya dengan melalui syarat dari *waqif* ketika pewakafan terjadi, memecat dirinya sendiri, atau dia berubah jadi *fasiq*, maka kewenangan untuk mengangkat orang yang lainnya adalah terserah hakim bukan terserah *waqif* dikarenakan ke*nazhir*an sudah tidak dimiliki (dipegang/dikendalikan) oleh *waqif* lagi setelah dia menjadikan ke*nazhir*an tersebut, ketika dia mewakafkan, untuk orang yang selain dirinya sendiri, dan menuturkan secara *sharih* (jelas/terang-terangan) dengan persoalan *fasiq* adalah termasuk penambahan dari kitab *ar-Raudl*.
Lalu jika *waqif* ketika melangsungkan pewakafan menyaratkan ke*nazhir*an untuk Zaid, setelah wakaf itu berpindah dari 'Amr menuju orang-orang fakir. Kemudian Zaid memecat dirinya sendiri dari ke*nazhir*an atau Zaid mengangkat orang lain sebagai pengganti ke*nazhir*annya sebelum wakaf itu berpindah dari 'Amr ke orang-orang fakir, maka pemecatan Zaid kepada dirinya sendiri tadi serta pengangkatan pengganti yang dia lakukan, masing-masing dari kedua hal tersebut tidak sah. Karena Zaid bukanlah *Nazhir* di dalam keadaan seketika (dalam keadaan seketika setelah wakaf terjadi tapi menunggu wakaf beralih dari 'Amr kepada fuqara') dan *waqif* pun tidak memiliki kewenangan untuk memecat Zaid seketika itu dan juga tidak memiliki kewenangan memecat Zaid setelah waktu tersebut sebagaimana telah diketahui dari keterangan yang telah berlalu, sedang menuturkan secara terang-terangan alasan (karena Zaid bukanlah *Nazhir* seketika) adalah termasuk tambahan dari *ar-Raudl*.

b. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala Fath al-Wahab*, III/202:

قَوْلُهُ: (وَلَوْ فَسَقَ النَّاظِرُ الخ) قَالَ م ر: وَعِنْدَ زَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ يَكُوْنُ النَّظَرُ لِلْحَاكِمِ

كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ لَا لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَهْلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمُتَأَخِّرِ نَظَرًا إِلَّا بَعْدَ فَقْدِ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا سَبَبَ لِنَظَرِهِ غَيْرُ فَقْدِهِ.

Perkataan Imam Zakariya al-Anshari: (*Apabila nazhir berubah fasiq ...*) Imam Muhammad ar-Ramli berkata: *"Dan ketika keahlian sebagai nazhir hilang darinya, maka kenazhiran akan menjadi milik hakim sebagaimana pendapat yang diunggulkan oleh Imam as-Subki, tidak menjadi milik orang yang berada di urutan setelahnya (setelah nazhir yang kehilangan keahliannya tadi) dari calon nazhir yang ahli sesuai dengan syarat dari waqif"*, berbeda dengan pendapat dari Imam Ibnu ar-Rif'ah, dikarenakan *waqif* tidak menjadikan bagi *nazhir* yang berada di urutan yang setelahnya sebuah ke*nazhir*an terkecuali setelah *Nazhir* yang sebelumnya tiada, sehingga tidak ada sebab untuk menjadikan dia *nazhir* selain ketiadaan *nazhir* yang sebelumnya.

c. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, III/157:

(وَأَفْتَى ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّ لَهُ الْاِسْتِقْلَالَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ وَيَنْعَزِلُ النَّاظِرُ بِالْفِسْقِ، فَيَكُونُ النَّظَرُ لِلْحَاكِمِ وَلِلْوَاقِفِ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ إِلَّا إِنْ شَرَطَ نَظَرَهُ حَالَ الْوَقْفِ.

Dan Imam Ibnu ash-Shabbagh memberikan fatwa bahwa *nazhir* boleh mengambil sendiri ukuran minimal dari *nafaqah* dia dan ukuran minimal dari *ujrah mitsil* dia (minimal dari upah umumnya). Dan seorang *Nazhir* dapat terpecat karena kefasikannya, sehingga kemudian ke*nazhir*an dimiliki oleh hakim. Dan boleh bagi *waqif* memecat orang yang dia beri kekuasaan menjadi *nazhir* dan mengangkat orang yang selainnya, kecuali bila *waqif* mensyaratkan ke*nazhir*an orang tersebut ketika mewakafkan. (maka *waqif* tidak dapat memecatnya).

d. *Fatawa ar-Ramli*, III/42:

(سُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا وَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ وَقَفْتُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ التَّوْلِيَةُ لِزَيْدٍ بِأَنْ قَالَ فَوَّضْتُ التَّوْلِيَةَ لِزَيْدٍ أَوْ جَعَلْتُهُ مُتَوَلِّيًا فَهَلْ لِلْوَاقِفِ أَوْ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ عَزْلُهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ أَمْ لَا وَإِذَا أَسْقَطَ الْمُتَوَلِّي التَّفْوِيضَ أَوِ الْجَعْلَ حَقَّهُ هَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَالنَّظَرِ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَلِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ عَزْلُ الْمَذْكُورِ مِنَ النَّظَرِ وَنَصْبُ غَيْرِهِ فِيهِ وَكَذَا الْوَاقِفُ إِنْ كَانَ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ حَالَ وَقْفِهِ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِذَا أَسْقَطَ النَّاظِرُ حَقَّهُ مِنَ النَّظَرِ انْعَزَلَ وَلِلْحَاكِمِ نَصْبُ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ نَظَرَهُ حَالَ الْوَقْفِ ثُمَّ عَزَلَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ

نَصْبُ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ بَلْ يَنْصِبُ الْحَاكِمُ نَاظِرًا وَلَكِنَّهُ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ.

Imam ar-Ramli ditanya tentang *waqif* yang mewakafkan sebuah benda wakaf dan dia tidak menuturkan dalam kitab wakafnya *"aku mewakafkan sesuatu dengan syarat kekuasaannya (kewenangan pengaturannya) milik Zaid"* akan tetapi dia mengatakan *"aku serahkan kewenangannya kepada Zaid atau aku jadikan Zaid sebagai orang yang berwenang (penjaga wakaf/Nazhir)"*, maka apakah boleh bagi *waqif* atau pemerintah untuk memecatnya dan mengangkat orang selain dia atau tidak, dan ketika orang yang diberi kekuasaan dengan *tafwidl* (penyerahan) atau dengan jalur pengangkatan menggugurkan hak dirinya sendiri (memecat dirinya sendiri), apakah menjadi gugur hak dia dari penguasaan dan ke*nazhir*an atau tidak? Lalu beliau menjawab: *"Adapun untuk persoalan yang pertama maka boleh bagi hakim ummat muslim untuk memecat orang tersebut dari kenazhiran dan mengangkat yang lainnya, begitupun boleh bagi waqif untuk memecatnya bila waqif tersebut mensyaratkan kenazhiran itu bagi dirinya waqif sendiri ketika pewakafan berlangsung dan bila waqif tidak mensyaratkan bagi dirinya sendiri ketika pewakafannya, maka waqif tidak berwenang memecat orang itu. Ada pun untuk persoalan yang kedua: ketika nazhir menggugurkan hak dia, maka terpecatlah dia. dan boleh bagi hakim untuk mengangkat orang selainnya, dan bila waqif mensyaratkan kenazhiran orang tersebut (si nazhir) ketika mewakafkan kemudian orang itu (nazhir itu) memecat dirinya sendiri, maka tidak boleh bagi waqif mengangkat orang selainnya, dikarenakan waqif sudah tidak memiliki kenazhiran lagi, akan tetapi justru hakim yang dapat mengangkat nazhir baru, akan tetapi nazhir yang lama tersebut tetap berada di dalam kewenangannya."*

e. *Fatawa Ibn Hajar al-Haitami*, III/141:

وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فِي التَّغْيِيرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ فَلَا يُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَانًا وَلَا حَمَّامًا وَلَا بِالْعَكْسِ إِلَّا إِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ إِلَى النَّاظِرِ مَا يَرَى فِيهِ مَصْلَحَةَ الْوَقْفِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ حَانُوتُ الْقَصَّارِينَ لِلْخَبَّازِينَ قَالَ الشَّيْخَانِ وَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغَيُّرَ النَّوْعِ دُونَ الْجِنْسِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا جَوَازُ التَّغْيِيرِ حَيْثُ بَقِيَ الْاِسْمُ وَالْجِنْسُ سَوَاءٌ أَكَانَ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِيهِ إِذْهَابُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُمَا كَالْأَصْحَابِ إِذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ خَرْقٌ عَظِيمٌ وَمَفَاسِدُ لَا تَخْفَى وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ السُّبْكِيُّ مَا سَأَذْكُرُهُ عَنْهُ وَأَقَرُّوهُ عَلَيْهِ وَفِي الْخَادِمِ وَالضَّابِطُ فِي الْمَنْعِ تَبَدُّلُ الْاِسْمِ أَيْ مَعَ الْجِنْسِ لِمَا تَقَرَّرَ.

Kesimpulan dari perkataan para Imam di dalam masalah pengubahan adalah: *tidak boleh mengubah wakaf dari bentuknya, sehingga tidak boleh*

merubah rumah menjadi kebun dan tidak boleh merubahnya menjadi tempat mandi serta tidak boleh pula sebaliknya, kecuali waqif memberikan kuasa kepada nazhir akan sesuatu yang dinilai ada kemaslahatannya bagi wakaf maka nazhir bisa melakukannya. Dan di *Fatawa al-Qaffaal* terdapat pernyataan: *Boleh merubah toko tukang setrika menjadi toko tukang roti. Asy-Syaikhan* berkata: *"Sepertinya al-Qaffaal menerima perubahan nau' (macam) bukan jenis"*. Sekian perkataan *as-Syaikhan* dan yang dhahir dari perkataan *asy-Syaikhan* adalah: *boleh mengubah, sekiranya nama dan jenis masih tetap sama, baik perubahan itu sedikit atau banyak, dan atas tuntutan kemaslahatan atau tidak, baik disini terdapat perbuatan memusnahkan benda yang diwakafkan ataupun tidak.* Dan yang jelas hal itu bukan sesuatu yang beliau berdua kehendaki, sebagaimana *Ashabus-Syafi'i*. Dikarenakan bila itu memang dikehendaki, maka akan menetapkan celah yang besar dan berbagai kerusakan yang tidak lagi samar. Karena itu as-Subki memberikan persyaratan berupa sesuatu yang akan aku tuturkan nanti dari beliau dan ulama pun telah mengakui (menetapkan) hal itu darinya. Az-Zarkasyi berkata di dalam *al-Khadim*: *"Dan batasan di dalam larangannya adalah berubahnya nama"*, maksudnya beserta dengan berubahnya jenis, karena alasan yang tadi telah ditetapkan.

Jawaban b

Tidak boleh. Karena *waqif* saja tidak punya hak apapun terlebih bagi ahli warisnya.

Jawaban c

Tidak boleh karena terdapat unsur kebohongan dan menggadaikan harta wakaf.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Is'ad ar-Rafiq*, II/76-77:

(وَ) مِنْهَا (الْكَذِبُ وَهُوَ) عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ (الْإِخْبَارُ) بِالشَّيْءِ (بِخِلَافِ الْوَاقِعِ) أَيْ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ ذَلِكَ وَتَعَمَّدَهُ أَمْ لَا وَأَمَّا الْعِلْمُ وَالتَّعَمُّدُ فَإِنَّمَا هُمَا شَرْطَانِ لِلْإِثْمِ

Dan di antara maksiat lisan adalah berbohong: bohong menurut *ahlus sunnah* adalah memberitakan akan sesuatu dengan berita/kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan, maksudnya tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi pada sesuatu tersebut, baik orang yang memberitakan/mengabarkan itu tahu akan hal tersebut dan sengaja atau tidak, adapun mengetahui dan menyengaja maka kedua-duanya hanyalah persyaratan untuk mendapatkan dosa.

b. *Is'ad ar-Rafiq*, II/105:

وَمِنْهَا كِتَابَةُ مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ بِهِ قَالَ فِي الْبِدَايَةِ لِأَنَّ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ فَحِفْظُهُ عَمَّا

يَجِبُ حِفْظُ اللِّسَانِ مِنْهُ أَيْ مِنْ غِيْبَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَكْتُبُ بِهِ مَا يَحْرُمُ النُّطْقُ بِهِ مِنْ جَمِيْعِ مَا مَرَّ وَغَيْرِهِ وَفِي الْخُطْبَةِ وَكَاللِّسَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ الْقَلَمُ إِذْ هُوَ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ بِلَا جَرَمٍ أَيْ شَكٍّ بَلْ ضَرَرُهُ أَعْظَمُ وَأَدْوَمُ فَلْيَصُنِ الْإِنْسَانُ قَلَمَهُ عَنْ كِتَابَةِ الْحِيَالِ وَالْمُخَادَعَةِ وَمُنْكَرَاتِ حَادِثَاتِ الْمُعَامَلَاتِ اهـ.

Dan di antara maksiat kedua tangan adalah menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan. Al-Ghazali berkata dalam *al-Bidayah*: *"Dikarenakan pena adalah salah satu dari dua lisan, maka jagalah dia (hindarkanlah dia) dari segala hal yang wajib dihindari oleh lisan,"* maksudnya termasuk *ghibah* dan lain-lainnya, maka janganlah seseorang itu menggunakan penanya untuk menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan yang berupa segala hal yang dulu telah dijelaskan dan selainnya. Dan di dalam *al-Khutbah* dikatakan: *"Dan yang seperti halnya lisan di dalam semua itu, maksudnya semua hal yang disebutkan mengenai marabahaya dari lisan adalah pena. Dikarenakan pena adalah salah satu dari dua lisan dengan tanpa keraguan, maksudnya dengan pasti/mantap, bahkan bahaya dari pena lebih besar dan lebih abadi (langgeng), sehingga semestinya/seharusnya bagi manusia untuk menjaga pena dari perbuatan menulis berbagai rekayasa dan tipu muslihat (tipu-menipu) serta sesuatu-sesuatu yang munkar yang baru terjadi/muncul diberbagai mu'amalah."*

c. *Fatawa al-Fighiyah al-Kubra*, III/252:

وَسُئِلَ: رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ مَحَلَّيْنِ عَلَى جَمْعٍ وَجِهَاتٍ لِلَّهِ كَتَسْبِيْلِ مَاءٍ وَقِرَاءَةٍ وَصَدَقَةٍ مِنْ رَيْعِ ذَلِكَ فَإِذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ عَلَيْهِ أَحَدَ الْمَحَلَّيْنِ وَتَعَطَّلَ الثَّانِي بِهَدْمٍ أَوِ اسْتِيْلَاءِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ وَجَدَهُ بِدُوْنِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَمَا يُجْعَلُ فِي أُجْرَةِ الْمَحَلِّ الْمُسْتَأْجَرِ يُوَزِّعُهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّيْنَ بِحَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مُرَتَّبًا أَوْ مُتَسَاوِيًا أَمْ لَا وَإِذَا بَاعَ أَوْ رَهَنَ الْوَقْفَ هَلْ يُعْزَلُ وَيَفْسُقُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ وَيُقِيْمُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ غَيْرَهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْوَاقِفِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا جُنَّ أَوْ كَانَ صَبِيًّا وَقُلْتُمْ يَئُوْلُ إِلَى الْحَاكِمِ وَيُقِيْمُ نَائِبًا عَنْهُمَا فَإِذَا أَفَاقَ أَوْ كَمُلَ الصَّبِيُّ هَلْ تَعُوْدُ وِلَايَتُهُمَا أَمْ لَا. فَأَجَابَ: بِقَوْلِهِ إِنْ رَتَّبَ الْوَاقِفُ صَرْفَ الْغَلَّةِ أَوْ بَيَّنَ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ وَجَبَ الْعَمَلُ بِمَا رَتَّبَهُ وَإِلَّا فَمَا وُجِدَ مِنَ الْغَلَّةِ يُقَسَّمُ عَلَى الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَإِذَا تَعَدَّى النَّاظِرُ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ انْعَزَلَ وَلَزِمَ الْحَاكِمَ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْوَاقِفِ وَكَذَا إِذَا جُنَّ أَوْ كَانَ

صَبِيًّا فَإِذَا زَالَ مَانِعُهُ عَادَتْ وِلَايَتُهُ إِنْ كَانَ نَظَرُهُ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا لَمْ تَعُدْ وَاللهُ أَعْلَمُ.

Dan Imam Ibn Hajar ﷺ ditanyai tentang seseorang yang mewakafkan dua tempat untuk sekelompok orang dan beberapa tujuan karena Allah seperti mengalirkan air dan membaca al-Qur'an serta shadaqah dari penghasilan wakaf tersebut, sehingga ketika *nazhir* menyewakan salah satu dari dua tempat tersebut sedangkan tempat yang kedua menjadi kosong/sepi dikarenakan runtuh atau dikuasai orang zalim atau tidak menemukan orang yang mau menyewanya atau menjumpainya tetapi kurang dari *ujrah mitsil* (tarif standart), maka apa yang akan dilakukan dalam upah tempat yang disewakan tadi, dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya (*mustahiqqin*) sesuai dengan hak (keberhakan) mereka secara berurutan atau secara sama atau tidak, dan ketika *nazhir* menjual wakaf atau menggadaikannya apakah dia menjadi terpecat dan dihukumi fasiq dikarenakan perbuatannya itu, dan hakim *syar'i* akan mengangkat *nazhir* selain dia, entah itu dari pihak *waqif* atau yang selainnya, dan apabila *nazhir* itu gila atau dia adalah anak kecil, sedangkan kalian berpendapat dikembalikan kepada hakim dan hakim mengangkat seorang pengganti dari keduanya (*Nazhir* gila dan *Nazhir* yang masih anak-anak), maka ketika si gila sembuh (sadar) atau si anak kecil itu baligh apakah kekuasaan keduanya kembali atau tidak? Maka beliau menjawab: *"Apabila waqif memberikan urutan di dalam penyaluran dari hasil wakaf atau menjelaskan untuk mustahiqqiin maka wajib untuk melaksanakan sesuai dengan urutan yang diurutkan oleh waqif, apabila tidak ada pengurutan atau penjelasan dari waqif, maka apapun yang didapatkan dari penghasilan wakaf dibagikan kepada al-mauquf 'alaihim (orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf) sesuai dengan ukuran hak mereka, dan apabila nazhir melakukan kesembronoan, misalnya menggadaikan atau menjual maka dia terpecat dan wajib bagi hakim untuk mengangkat penguasa wakaf yang selain orang itu, meskipun dari pihak waqif. Begitupun bila nazhir jadi gila atau nazhir seorang anak kecil. lalu ketika sesuatu yang menghalangi dia dari keahlian dia/kebolehan di dalam menjadi nazhir) menghilang, maka kekuasaan dia akan wakaf menjadi kembali kepadanya apabila kenazhiran dia disyaratkan di dalam pewakafan serta kenazhiran itu telah di-nash (disebutkan dengan jelas) atas orang itu secara tertentu dengan sosok orangnya, dan jika tidak, maka tidak kembali kepadanya."*

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR
di PP. Tremas Pacitan
09-10 November 2014

455. Penetapan Awal Dzul Hijjah
456. Mushalla Seperti Masjid
457. Menghutangkan Kas Masjid dan Madrasah

KOMISI A
Waqi'iyah

MUSHAHIH

KH. Mahrus Maryani
KH. Ardani

PERUMUS

KH. Ahmad Farihin Muhshan
KH. Athoillah Anwar
KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I
Ust. M. Ma'ruf Khozin

MODERATOR

K. Ali Ramzi

NOTULEN

KH. M. Ali Maghfur Syadzili Isk, S.Pd.I
Ust. H. Abdul Mughits
Ust. H. Syihabuddin Sholeh

455. Penetapan Awal Dzul Hijjah

Deskripsi masalah

Dalam menetapkan hari raya Idul Adha 1435 H, pemerintah Arab Saudi hanya menggunakan metode *hisab* yang tidak menggunakan metode *ru'yatul hilal* seperti yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Sedangkan kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut sedikit banyak mempengaruhi keyakinan sebagian umat Islam di negara lain.

Pertanyaan

Bagaimana sikap NU terkait penetapan awal Dzul Hijjah oleh Pemerintah Arab Saudi yang seolah-olah tidak menggunakan dasar *ru'yah*? *(PP. Tremas)*

Jawaban

Penetapan *(Itsbat)* Pemerintah Saudi terhadap awal Dzulhijjah apabila atas dasar *ru'yah al-hilal* yang benar, maka NU sudah pasti mendukungnya. Namun bila berdasarkan *hisab*, maka NU mendorong agar pemerintah Indonesia:

a. Mengklarifikasi kepada Pemerintah Saudi Arabia mengenai hal tersebut.
b. Jika benar bahwa *itsbat*nya atas dasar *hisab*, maka seharusnya Pemerintah RI segera melakukan upaya pelurusan agar *itsbat*nya menggunakan dasar rukyah yang benar untuk menghindari terjadinya *takhashum* (pertentangan) di kalangan ummat Islam.

Sikap NU terhadap warga *Nahdliyyin* dan umat Islam pada umumnya:

a. Bagi mereka yang sedang ada di Arab Saudi dan yakin akan kebenaran keputusan Pemerintah Arab Saudi agar mentaati keputusannya.
b. Bagi mereka yang ada di wilayah Indonesia wajib mentaatati keputusan Pemerintah RI selama keputusannya berdasarkan rukyah yang benar.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 170 [Maktabah Asy-Syamilah]:

(فَائِدَةٌ): تَرَائِيْ هِلَالِ رَمَضَانَ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُوْرِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْفَوَائِدِ الْكَثِيْرَةِ اهـ شوبري.

Faidah: Melihat hilal Ramadhan dan bulan lainnya hukumnya fardhu kifayah, karena faidah-faidah yang banyak yang muncul darinya.

b. *At-Turmusi,* IV/157-160 [Matba'ah Al-'Amirah Asy-Syarqiyah]:

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا وَإِنْ كَانَتِ السَّمَاءُ مُطْبِقَةً بِالْغَيْمِ (أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ) وَاحِدٍ (الْهِلَالَ) إِذَا شَهِدَ بِهَا عِنْدَ الْقَاضِيْ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ أَوْ بِنَحْوِ

أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ دَعْوَى بَلْ أَنْ يَكُونَ عَدْلَ شَهَادَةٍ.

(قوله إِذَا شَهِدَ بِهَا) بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَهٰذَا شَرْطٌ لِلثُّبُوتِ عُمُوْمًا، لِمَا سَيَأْتِي مِنْ لُزُوْمِ الصَّوْمِ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ بِهَا وَلَوْ فَاسِقًا.

Puasa Ramadhan wajib sebab bulan Sya'ban sempurna 30 hari, meski langit dipenuhi mendung, (atau sebab melihat hilal) seseorang (yang adil) apabila dia mempersaksikannya di hadapan *Qadhi* dengan lafal persaksian atau semisal lafal: "*Saya bersaksi sunggguh saya telah melihat hilal.*" Tidak cukup ia mengucapkan: "*Besok masuk bulan Ramadhan*", dan tidak disyaratkan adanya dakwaan terlebih dahulu, namun cukup orang yang bersaksi berstatus *adil syahadah*.

(*Qaul* penulis: "*Bila dia mempersaksikannya*"), maksudnya mempersaksikan telah melihat hilal. Ini merupakan syarat bagi tetapnya hilal secara luas, karena alasan wajibnya puasa bagi orang yang meyakini kebenaran orang yang memberi kabar tentangnya meski fasik seperti keterangan nanti.

c. *I'anah ath-Thalibin*, II/243:

وَفِي مُغْنِي الْخَطِيْبِ مَا نَصُّهُ: (فَرْعٌ) لَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ وَاقْتَضَى الْحِسَابُ عَدَمَ إِمْكَانِ رُؤْيَتِهِ، قَالَ السُّبْكِيُّ: لَا تُقْبَلُ هٰذِهِ الشَّهَادَةُ، لِأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةَ ظَنِّيَّةٌ، وَالظَّنُّ لَا يُعَارِضُ الْقَطْعَ. وَأَطَالَ فِي بَيَانِ رَدِّ هٰذِهِ الشَّهَادَةِ، وَالْمُعْتَمَدُ قَبُوْلُهَا، إِذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْحِسَابِ. اهـ

Dalam *Mughni al-Muhtaj* karya al-Khatib ada redaksi yang menyatakan: "*Far'un: Andaikan seseorang atau dua orang bersaksi melihat hilal, sementara hisab menyatakan mustahil melihatnya", as-Subki berpendapat: "Persaksian ini tidak diterima, karena hisab bersifat qath'i sedangkan persaksian bersifat dhanni, padahal dhanni tidak dapat menentang qath'i". As-Subki menjelaskan penolakan kepada persaksian ini secara panjang lebar, namun yang mu'tamad adalah menerima syahadah itu, sebab pendapat hisab tidak dipertimbangkan.*" Demikan dalam *Mughni al-Muhtaj*.

d. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 170:

(مَسْأَلَةٌ: ش) إِذَا لَمْ يَسْتَنِدِ الْقَاضِي فِي ثُبُوْتِ رَمَضَانَ إِلَى حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ تَهَوُّرٍ وَعَدَمِ ضَبْطٍ، كَانَ يَوْمَ شَكٍّ وَقَضَاؤُهُ وَاجِبٌ إِذَا بَانَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى عَلَى مَنْ صَامَهُ، إِلَّا إِنْ كَانَ عَامِيًّا ظَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يُجَوِّزُهُ، بَلْ يَجِبُ الصَّوْمُ فَيُجْزِيْهِ فِيْمَا

يَظْهَرُ اهـ قُلْتُ: وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَقْرِيظِهِ عَلَى تَحْرِيرِ الْمَقَالِ: وَأَفْتَى شَيْخُنَا وَأَئِمَّةُ عَصْرِهِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الصَّوْمُ أَوِ الْفِطْرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَلْزَمِ الصَّوْمُ وَلَمْ يَجُزِ الْفِطْرُ لِمَنْ يَشُكُّ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ، لِتَهَوُّرِ الْقَاضِي أَوْ لِمَعْرِفَةِ مَا يَقْدَحُ فِي الشُّهُوْدِ، فَأَدَارُوْا الْحُكْمَ عَلَى مَا فِيْهِ ظَنُّهُ وَلَمْ يَنْظُرُوْا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ، إِذِ الْمَدَارُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْاِعْتِقَادِ الْجَازِمِ اهـ

(*Mas'alah* dari Syaikh Muhammad bin Abi Bakr al-Asykhar al-Yamani): Apabila dalam penetapan awal Ramadhan *Qadhi* tidak menyandarkan penetapannya pada *hujjah syar'i*, namun hanya dengan kesewenang-wenangan dan tanpa batasan, sementara hari tersebut adalah hari *syakk* dan puasanya wajib di*qadha'* apabila terbukti merupakan bagian dari Ramadhan, bahkan bagi orang yang sudah berpuasa, kecuali bila ia merupakan orang awam dan menyangka (kebenaran) keputusan hukum yang diambil hakim tersebut maka ia boleh bahkan wajib berpuasa dan mencukupinya menurut pendapat yang kuat. Sekian permasalahan dari al-Asykhar. Saya katakan: Dalam pengantarnya *'ala Tahrir al-Maqal*, Ibn Hajar berkata: *"Guruku dan para Imam semasanya karena mengikuti segolongan ulama memfatwakan, bahwa andaikan puasa atau tidak puasa menjadi tetap di hadapan hakim, maka bagi orang yang ragu atas keabsahan hukumnya tidak wajib puasa dan tidak boleh berbuka, karena kesewenang-wenangan Qadhi atau karena mengetahui adanya cacat persaksian. Ulama memberlakukan hukum sesuai persangkaan orang tersebut, dan tidak menanti keputusan hukum dari hakim, hanya berdasarkan pada keyakinan yang kuat."*

e. *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar al-Khalil*, III/290:

وَقَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ الثَّانِي وَالْمِائَةِ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ يَجُوْزُ إِثْبَاتُهَا بِالْحِسَابِ وَالْآلَاتِ وَكُلِّ مَا دَلَّ عَلَيْهَا وَقَاعِدَةِ رُؤْيَةِ الْأَهِلَّةِ فِي الرَّمَضَانَاتِ لَا يَجُوْزُ إِثْبَاتُهَا بِالْحِسَابِ. وَفِيْهِ قَوْلَانِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَشْهُوْرُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْحِسَابِ.

قَالَ سَنَدٌ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى الْحِسَابَ فَأَثْبَتَ الْهِلَالَ بِهِ لَمْ يُتَّبَعْ لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى خِلَافِهِ مَعَ أَنَّ حِسَابَ الْأَهِلَّةِ وَالْكُسُوْفَاتِ وَالْخُسُوْفَاتِ قَطْعِيٌّ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَجْرَى عَادَتَهُ بِأَنَّ حَرَكَاتِ الْأَفْلَاكِ وَانْتِقَالَاتِ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ طُوْلَ الدَّهْرِ.

وَكَذَلِكَ الْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَوَائِدُ إِذَا اسْتَمَرَّتْ أَفَادَتْ الْقَطْعَ كَمَا إِذَا رَأَيْنَا شَيْخًا نَجْزِمُ بِأَنَّهُ لَمْ يُولَدْ كَذَلِكَ بَلْ طِفْلًا لِلْعَادَةِ وَإِلَّا فَالْعَقْلُ يُجَوِّزُ وِلَادَتَهُ كَذَلِكَ فَالْقَطْعُ الْحَاصِلُ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الْعَادَةِ وَإِذَا حَصَلَ الْقَطْعُ بِالْحِسَابِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَالْفَرْقُ هٰهُنَا وَهُوَ عُمْدَةُ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَصَبَ زَوَالَ الشَّمْسِ سَبَبًا لِوُجُوبِ الظُّهْرِ.

وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَوْقَاتِ فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا بِأَيِّ طَرِيقٍ لَزِمَهُ حُكْمُهُ فَلِذَلِكَ اعْتُبِرَ الْحِسَابُ الْمُفِيدُ الْقَطْعَ وَأَمَّا الْأَهِلَّةُ فَلَمْ يَنْصِبْ خُرُوجَهَا مِنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ سَبَبًا لِلصَّوْمِ بَلْ نَصَبَ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ خَارِجًا عَنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ هُوَ السَّبَبُ فَإِذَا لَمْ تَحْصُلِ الرُّؤْيَةُ لَمْ يَحْصُلِ السَّبَبُ الشَّرْعِيُّ وَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ١ وَلَمْ يَقُلْ لِخُرُوجِهِ عَنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ فِي الصَّلَاةِ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الاسراء: من الآية٧٨] أَيْ مَيْلِهَا انتهى. أَكْثَرُهُ بِلَفْظِهِ وَفِيهِ إِثْبَاتُ الْقَوْلِ بِالْاِعْتِمَادِ عَلَى حِسَابِ الْمُنَجِّمِينَ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ وَغَيْرُهُ وَمَا فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَرُؤْيَةِ الْأَهِلَّةِ حَسَنٌ وَقَدْ قَبِلَهُ ابْنُ الشَّاطِ وَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ نَحْوُ ذَلِكَ.

Al-Qarafi berkata dalam perbedaan ke 102: Di antara kaidah waktu-waktu shalat, boleh menetapkannya dengan hisab, alat-alat dan setiap perkara yang menunjukkan kepadanya; dan kaidah melihat hilal pada bulan-bulan Ramadhan tidak boleh ditetapkan dengan hisab. Ini ada dua *qaul* menurut kita, menurut asy-Syafi'iyyah dan menurut *qaul* masyhur dalam dua madzhab adalah tidak meng*i'tibar* hisab.

Beliau berkata: "*Sanad, apabila imam melihat hisab lalu menetapkan hilal dengannya maka tidak perlu diikuti karena ijma' salaf atas sebaliknya, serta hisab hilal, kusuf dan khusuf itu pasti maka Allah ﷻ memberlakukan adat-Nya bahwa pergerakan cakrawala dan perpindahan bintang-bintang tujuh pada satu aturan sepanjang masa.*"

Dan begitu pula empat musim dan pengulangan apabila menerus maka berfaidah pasti; sebagaimana apabila kita melihat syaikh kita mantap bahwa ia tidak dilahirkan seperti demikian akan tetapi menjadi anak karena adat. Dan jika tidak maka akal memperbolehkan kelahirannya demikian. Maka kepastian yang tercapai di dalamnya itu karena adat.

Dan bila kepastian tercapai dengan hisab maka sebaiknya dijadikan pedoman seperti waktu-waktu shalat. Adapun perbedaan di sini adalah pokok salaf dan *khalaf*. Allah ﷻ menetapkan terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya melaksanakan shalat dhuhur. Dan begitu juga waktu-waktu yang lain. Barangsiapa mengetahui sesuatu dengan suatu jalan maka hukumnya wajib baginya. Karena itu, hisab yang berfaidah pasti itu di*i'tibar*. Adapun hilal maka tidak menetapkan keluarnya dari sorot matahari menjadi sebab puasa, tapi rukyah hilal menetapkan hilal keluar dari sorot matahari, yaitu sebab. Apabila rukyah tidak hasil maka sebab syar'i tidak hasil dan hukum tidak tetap, dan hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ: "*Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya.*" Dan tidak berkata karena keluarnya dari sorot matahari. Allah berfirman terkait shalat: "*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.*" (Qs. al-Isra': 78). Yakni condongnya. Kebanyakan dengan lafalnya. Dan di dalamnya ada penetapan *qaul* dengan berpedoman pada hisab *ahli nujum*; sebagaimana dinukil *shahib at-Taudhih* dan lainnya. Dan perkara yang membedakan dengannya di antara waktu-waktu shalat dan melihat hilal itu *hasan*, dan ibn asy-Syath menerimanya, dan beliau dalam *adz-Dzakhirah* memiliki pendapat semacam itu.

f. *Fath al-'Ali al-Malik fi Fatawa 'ala Madzhab al-Imam Malik*, I/412-413:

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ فِي الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى وَالْعَمَلِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ الرَّاجِحِ وَطَرْحِ الشَّاذِّ وَالضَّعِيفِ وَبِالْجُمْلَةِ لَا نَذْكُرُ وُجُودَ رِوَايَةٍ بِجَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحِسَابِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بَلْ نَعْتَرِفُ بِهَا فِي الْمَذْهَبَيْنِ وَلَكِنَّهَا شَاذَّةٌ فِيهِمَا وَمُقَيَّدَةٌ بِخَاصَّةِ النَّفْسِ وَبِالْغَيْمِ فَبَانَ أَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ضَلَالٌ لَا يُوَافِقُ حَتَّى الرِّوَايَةَ الشَّاذَّةَ لِأَنَّهُمْ يَتَجَاهَرُونَ بِالصَّوْمِ أَوِ الْفِطْرِ قَبْلَ النَّاسِ وَيَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ مَعَ الصَّحْوِ وَعَدَمِ إِمْكَانِ الرُّؤْيَةِ لِضَعْفِ نُورِ الْهِلَالِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ بَسَطَ اللهُ تَعَالَى يَدَهُ بِالْحُكْمِ زَجْرُهُمْ وَتَأْدِيبُهُمْ أَشَدَّ الزَّجْرِ وَالْأَدَبِ لِيَنْسَدَّ بَابُ هَذِهِ الْفِتْنَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْخَلَلِ فِي رُكْنِ الدِّينِ، وَمُخَالَفَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

Telah diketahui sungguh wajib meringkas dalam *qadha'*, fatwa dan amal menurut *qaul* masyhur atau *rajih* dan membuang *syadz* dan *dhaif*. Kesimpulannya kita tidak menyebut adanya riwayat dengan bersanding amal dengan hisab menurut kita dan menurut asy-Syafi'iyyah, tetapi kita mengakui dengannya dalam dua madzhab, namun ada *syadz* pada

keduanya dan di*qayyidi* dengan kekhususan diri dan mendung, maka jelas bahwa sungguh perkara yang terjadi dari kaum mereka itu sesat, tidak sesuai hingga riwayat yang *syadz*, karena sungguh mereka tidak menjelaskan dengan puasa atau buka di sisi manusia dan mengajak mereka padanya serta terang dan tidak mungkin melihat kelemahan cahaya hilal, maka wajib bagi orang yang Allah menggelar kuasa-Nya dengan hukum agar mencegah mereka dan mengajarkan mereka larangan yang berat dan adab agar bab fitnah ini yang menetapkan cela kepada rukun agama menjadi buntu, menyelisihi *Sayyid al-Mursalin* ﷺ dan para keluarganya semua.

g. *Ihya' 'Ulumiddin*, II/177:

قَدْ ذَكَرْنَا دَرَجَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَنَّ أَوَّلَهُ التَّعْرِيْفُ، وَثَانِيَهُ الْوَعْظُ، وَثَالِثَهُ التَّخْشِيْنُ فِي الْقَوْلِ، وَرَابِعَهُ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِّ بِالضَّرْبِ وَالْعُقُوْبَةِ. وَالْجَائِزُ مِنْ جُمْلَةِ ذٰلِكَ مَعَ السَّلَاطِيْنِ الرُّتْبَتَانِ الْأُوْلَيَانِ وَهُمَا: التَّعْرِيْفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذٰلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ مَعَ السُّلْطَانِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ، وَيَكُوْنُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْذُوْرِ أَكْثَرَ، وَأَمَّا التَّخْشِيْنُ فِي الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ: يَا ظَالِمُ يَا مَنْ لَا يَخَافُ اللهَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَذَاكَ إِنْ كَانَ يُحَرِّكُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى شَرُّهَا إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهِ.

Sungguh kita menyebutkan tingkat-tingkat *amar ma'ruf nahi munkar* dan permulaannya adalah mengingatkan, kedua menasehati, ketiga berkata keras dan keempat mencegah paksa dalam mengarahkan pada hak dengan memukul dan menghukum. Adapun yang dibolehkan dari jumlah itu bersama para sultan adalah dua tingkatan pertama, yaitu mengingatkan dan menasehati. Adapun mencegah paksa maka hal itu tidak ada bagi seorang rakyat bersama sultan, karena sungguh hal itu menggerakkan fitnah dan mengobarkan keburukan, dan perkara yang lahir darinya yang dilarang itu lebih banyak. Adapun bicara kasar seperti ucapan: *"Hai dhalim"*, *"Hai orang yang tidak takut pada Allah"*, dan perkara yang berlaku di tempatnya. Maka apabila menggerakkan kepada fitnah yang keburukannya melebar pada orang lain maka tidak boleh. Dan bila tidak takut kecuali pada dirinya maka itu boleh bahkan disunahkan.

456. Mushalla Seperti Masjid

Deskripsi Masalah

Dalam sebuah kitab *Ahkam al-Masajid Fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*

hlm. 279 karya Ibrahim bin Shalih al-Khadiri (*Al-Maktabah asy-Syamilah; al-Masail al-Fiqhiyyah*) terdapat ibarat di bawah ini:

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حُكْمُ هٰذِهِ الْمُصَلَّيَاتِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رحمهم الله تعالى فِي هٰذِهِ الْمُصَلَّيَاتِ، إِذَا أُوقِفَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ هٰذِهِ الْمُصَلَّيَاتِ لَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْمَسَاجِدِ سَوَاءٌ أُوقِفَتْ لِلصَّلَاةِ فِيهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ هٰذِهِ الْمُصَلَّيَاتِ لَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا إِذَا أُوقِفَتْ فَإِذَا جَعَلَهَا صَاحِبُهَا وَقْفًا، صَارَتْ مَسْجِدًا تَأْخُذُ حُكْمَ الْمَسْجِدِ، وَبِهِ قَالَ عِيَاضٌ وَالدَّارِمِيُّ... وَاسْتَدَلَّ الْفَرِيقُ الثَّانِي بِقَوْلِ حَفْصَةَ رضي الله عنها "وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى" وَهٰذَا عَنْ أَمْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا لَهُ حُكْمُ الْمَسَاجِدِ، لَمَا مُنِعَتْ الْحَائِضُ مِنْهُ، فَإِذَا أُوقِفَ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ مَسْجِدٌ

Masalah kedua: Hukum mushalla ini, ulama-*Rahimahu Allah Ta'ala*- berbeda pendapat mengenai mushalla ini, apabila diwakafkan maka ada dua pendapat. *Pertama*: Sungguh mushalla ini tidak mengambil hukum masjid, baik diwakafkan untuk shalat di dalamnya atau tidak diwakafkan. Dan dengan ini jumhur ulama berpendapat. *Kedua*: Sungguh mushalla ini tidak mengambil hukum masjid kecuali jika diwakafkan; apabila pemiliknya menjadikannya wakaf, maka menjadi masjid yang mengambil hukum masjid. Dengan ini, Iyadh dan ad-Darimi berpendapat. Golongan kedua ber*istidlal* dengan ungkapan Hafshah–*radliyallahu anha*–: "*Wanita-wanita haid menyingkir dari mushalla*" dan ini adalah perintah Rasulullah ﷺ dan apabila tidak menjadi masjid maka ia memiliki hukum masjid, ketika wanita haid di cegah darinya; apabila diwakafkan untuk shalat maka menjadi masjid.

Dari pendapat kedua dapat disimpulkan, "*Jika mushalla tersebut diwakafkan untuk shalat maka berstatus masjid*".

Pertanyaan

a. Apakah pendapat kedua tersebut bisa dijadikan acuan?
b. Dalam literatur *kutub mu'tabarah* adakah *qaul sharih* atau setidaknya berupa *mulhaq bih* yang sejalan dengan pendapat tersebut?
c. Bagaimana cara menetapkan status wakaf ketika tidak diketahui niat wakaf masjid dari Pewakaf (*Waqif*) karena misal ia sudah meninggal?
d. Ketika *Waqif* masih hidup, bolehkah ia mengubah niat wakaf tempat shalat menjadi masjid? *(PCNU Kota Surabaya)*

Jawaban a

Pendapat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan hukum bahwa mushalla wakaf dihukumi masjid, karena tidak sejalan dengan keterangan

yang tercantum dalam *kutubul mu'tabarah*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin*, III/190:

(وقوله: بِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ جَعَلْتُ الخ (قوله: وَإِنْ الخ) غَايَةٌ فِي صَيْرُوْرَتِهِ مَسْجِدًا بِقَوْلِهِ الْمَذْكُوْرِ (قوله: وَلَا أَتَى بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ (قوله: لِأَنَّ الْمَسْجِدَ الخ) عِلَّةٌ لِصَيْرُوْرَتِهِ مَسْجِدًا بِذٰلِكَ، أَيْ أَنَّهُ يَصِيْرُ مَسْجِدًا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا وَقْفًا، فَأَغْنَى لَفْظُهُ عَنْ لَفْظِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ (قوله: وَوَقَفْتُهُ لِلصَّلَاةِ الخ) أَيْ وَإِذَا قَالَ الْوَاقِفُ وَقَفْتُ هٰذَا الْمَكَانَ لِلصَّلَاةِ، فَهُوَ صَرِيْحٌ فِي مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ (قوله: وَكِنَايَةٌ فِي خُصُوْصِ الْمَسْجِدِيَّةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا) فَإِنْ نَوَى الْمَسْجِدِيَّةَ، صَارَ مَسْجِدًا، وَإِلَّا صَارَ وَقْفًا عَلَى الصَّلَاةِ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا، كَالْمَدْرَسَةِ.

(Dan ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"dengannya"*) maksudnya dengan ungkapannya *"saya menjadikan..."* (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"meskipun..."*) *ghayah* dalam menjadi masjid dengan ungkapan tersebut (ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"dan tidak datang dengan sesuatu dari perkara yang telah lewat"*) maksudnya tidak dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Karena masjid..."*) *illat* menjadikan masjid dengan hal itu, maksudnya tempat itu menjadi masjid murni lantaran ungkapan *wakif*: *"Saya menjadikannya sebagai masjid"*, karena tidak ada masjid kecuali wakaf, maka lafalnya cukup dari lafal wakaf dan sejenisnya (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Saya mewakafkannya untuk shalat..."*) maksudnya apabila wakif berkata: *"Saya mewakafkan tempat ini untuk shalat"*, maka itu *sharih* dalam kemutlakan wakaf. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dan kinayah dalam kekhususan masjid, maka harus disertai niat"*) Jika berniat masjid, maka menjadi masjid dan jika tidak maka menjadi wakaf untuk shalat saja, meskipun tidak berupa masjid seperti madrasah.

b. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*, V/528-529:

(فَرْعٌ) لَوْ (قَالَ جَعَلْتُ هٰذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا صَارَ) بِهِ (مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلّٰهِ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُوْدِ وَاشْتِهَارِهِ فِيْهِ (وَوَقَفْتُهُ لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ) فِي وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَأَمَّا كَوْنُهُ وَقْفًا بِذٰلِكَ

فَصَرِيحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ.

(*Far'*) jika (seseorang berkata: *Saya menjadikan tempat ini sebagai masjid maka menjadi*) dengannya (*masjid meskipun tidak berkata karena Allah*) dan tidak mendatangi sesuatu dari kata terdahulu, karena mengisyaratkan maksud dan masyhur di dalamnya. (Dan saya mewakafkannya untuk shalat adalah *shighat kinayah*) dalam wakafnya menjadi masjid, maka butuh terhadap niat menjadikannya sebagai masjid. Adapun sebagai wakaf dengan hal itu maka *sharih* yang tidak membutuhkan niat.

c. *Mathalib Uli an-Nuha fiy Syarh Ghayah al-Muntaha*, I/378:

(وَمُصَلَّى عِيدٍ لَا) مُصَلَّى (جَنَائِزَ مَسْجِدٍ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلْيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَأَمَّا صَلَاةُ الْجَنَائِزِ فَلَيْسَتْ ذَاتَ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ بِخِلَافِ الْعِيدِ (وَيَتَّجِهُ) مَحَلُّ اعْتِبَارِ مُصَلَّى الْعِيدِ مَسْجِدًا (إِنْ وُقِفَ) لِذَلِكَ (وَلَوْ) كَانَ وَقْفُهُ (بِقَرَائِنَ) كَأَنْ يَأْذَنَ مَالِكُهُ لِلنَّاسِ إِذْنًا عَامًّا بِالصَّلَاةِ فِيهِ ، وَيَتَكَرَّرُ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَا يَشْغَلُهُ بِشَيْءٍ وَيُجَنِّبُهُ مَا يُقَذِّرُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(Mushalla Id tidak) tempat shalat (janazah masjid) karena sabda Nabi ﷺ: "*Dan hendaklah wanita-wanita haid menyingkir dari mushalla*" Adapun shalat janazah maka tidak memiliki ruku' dan sujud berbeda dengan Shalat Id (dan ada *wajah*) tempat *i'tibar* mushalla Id sebagai masjid (apabila diwakafkan untuk itu) (meskipun) wakafnya (dengan *qarinah-qarinah*) seperti *malik*nya mengizinkan warga secara umum untuk shalat di dalamnya, hal itu berulang-ulang darinya, tidak disibukkan dengan sesuatu dan menjauhkan perkara yang mengotori menurut *muttajih*.

d. *I'anah ath-Thalibin*, III/160:

(قوله لِأَنَّ الْمَسْجِدَ الخ) عِلَّةٌ لِصَيْرُورَتِهِ مَسْجِدًا بِذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُونُ إِلَّا وَقْفًا فَأَغْنَى لَفْظُهُ عَنْ لَفْظِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ (قوله وَوَقَفْتُهُ لِلصَّلَاةِ الخ) أَيْ وَإِذَا قَالَ الْوَاقِفُ وَقَفْتُ هَذَا الْمَكَانَ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ (قوله وَكِنَايَةٌ فِي خُصُوصِ الْمَسْجِدِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا) فَإِنْ نَوَى الْمَسْجِدِيَّةَ صَارَ مَسْجِدًا وَإِلَّا صَارَ وَقْفًا عَلَى الصَّلَاةِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا كَالْمَدْرَسَةِ.

(Ungkapan Zainuddin al-Malibari: "*Karena masjid...*") *Illat* menjadi masjid dengan hal itu, maksudnya sungguh tempat itu menjadi masjid murni

karena ungkapan *wakif*. *"Saya menjadikannya sebagai masjid"*, karena tak ada masjid kecuali wakaf, maka lafalnya cukup dari lafal wakaf dan sesamanya (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Saya mewakafkannya untuk shalat..."*) maksudnya apabila wakif berkata: *"Saya mewakafkan tempat ini untuk shalat"*, maka *shighat* itu *sharih* dalam kemutlakan wakaf. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"dan kinayah dalam kekhususan masjid, maka harus disertai niat"*) jika *wakif* berniat masjid, maka menjadi masjid dan jika tidak maka menjadi wakaf untuk shalat saja, meskipun tidak masjid seperti madrasah.

e. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XXXVIII/31:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى. فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لِمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجَنَازَةِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي مَنْعِ دُخُولِ الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ مَعَ عَدَمِ اتِّصَالِ الصُّفُوفِ (١).وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: الْمُصَلَّى الْمُتَّخَذُ لِلْعِيدِ وَغَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَسْجِدٍ لاَ يَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ (٢). وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ: عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُصَلَّى الَّذِي بُنِيَ لِصَلاَةِ الْعِيدِ خَارِجَ الْبَلَدِ فَقَالَ: لاَ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الاِعْتِكَافِ وَمُكْثِ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَحْكَامِ، لأَنَّ الْمَسْجِدَ هُوَ الَّذِي أُعِدَّ لِرَوَاتِبِ الصَّلاَةِ وَعُيِّنَ لَهَا حَتَّى لاَ يُنْتَفَعَ بِهِ فِي غَيْرِهَا.

Fuqaha' berbeda pendapat dalam memberlakukan hukum-hukum masjid di atas mushalla. Al-Hanafiyah berkata: *"Tidak ada hukum masjid bagi mushalla Id dan jenazah dalam mencegah masuknya orang haid meskipun pada keduanya ada hukum masjid dalam sahnya mamkmum serta tidak ada sambungan shaf."* Dan asy-Syafi'iyyah berkata: *"Mushalla yang digunakan untuk Shalat Id dan lainnya yang tidak berada di masjid maka tidak haram diam di dalamnya bagi orang junub dan haid menurut al-Madzhab. Dengan ini jumhur asy-Syafiiyyah memastikan, dan ad-Darimi menuturkan bahwa di dalamnya ada dua wajah."* Az-zarkasyi menukil: Dari al-Ghazali sungguh beliau ditanya tentang mushalla yang dibangun untuk shalat di luar *balad*, lalu beliau berkata: *"Tidak tetap padanya hukum masjid dalam i'tikaf dan diamnya orang junub dan lainnya dari hukum-hukum, karena masjid adalah tempat yang disediakan untuk shalat rawatib dan ditentukan padanya hingga tidak dimanfaatkan untuk selainnya."*

f. Referensi lain
   1) *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, I/194

2) *Hasyiyah ath-Thahthawi 'ala ad-Dar al-Mukhtar*, I/66
3) *Al-Majmu'*, II/180.

Jawaban b

Menurut madzhab Syafi'iyah tidak ada, tetapi dalam madzhab Hanbali ditemukan *mulhaq bih* "mushalla 'Id" untuk *mulhaq* hanya bagi mushalla yang bukan wakaf (mushalla milik), dengan syarat:

1) Telah diwakafkan sebagai masjid walaupun diketahui lewat *qarinah*, seperti ada izin secara umum ditempati shalat dan terjadi berulang kali.
2) Tidak dipergunakan untuk kegiatan lain.
3) Dijauhkan dari hal-hal yang mengotori kesucian masjid.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fath al-Bari*, Ibn Hajar, XII/130:

وَقَالَ النَّوَوِيُّ ذَكَرَ الدَّارِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُصَلَّى الْعِيْدِ وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا يَكُوْنُ فِيْ ثُبُوْتِ حُكْمِ الْمَسْجِدِ لَهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ فِيْ رَجْمِ هٰذَا بِالْمُصَلَّى دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ وَالْأَعْيَادِ إِذَا لَمْ يُوْقَفْ مَسْجِدًا لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ لَاجْتُنِبَ فِيْهِ مَا يُجْتَنَبُ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ وَهُوَ كَلَامُ عِيَاضٍ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ لِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ سِوَى التَّرْجَمَةِ.

An-Nawawi berkata: *"Ad-Darimi menuturkan dari ashabina bahwa sungguh mushalla Id dan lainnya apabila bukan masjid maka dalam penetapan hukum masjid ada dua wajah; Menurut wajah ashah tidak."* Al-Bukhari dan yang lainnya berkata: *"Dalam dugaan ini di mushalla ada dalil bahwa sungguh mushalla janazah dan Id apabila tidak diwakafkan sebagai masjid maka tidak tetap padanya hukum masjid, karena jika memiliki hukum masjid maka sungguh di dalamnya harus menjauhi perkara yang dijauhi di masjid"*. Saya berkata: *"Itu adalah kalam Iyadh dengan ainnya, dan tidak ada pada al-Bukhari darinya selain terjemah."*

b. *Mathalib Uli an-Nuha*, I/378:

(وَمُصَلَّى عِيْدٍ لَا) مُصَلَّى (جَنَائِزَ مَسْجِدٌ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: وَلْيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَأَمَّا صَلَاةُ الْجَنَائِزِ فَلَيْسَتْ ذَاتَ رُكُوْعٍ وَلَا سُجُوْدٍ بِخِلَافِ الْعِيْدِ (وَيَتَّجِهُ) مَحَلُّ اعْتِبَارِ مُصَلَّى الْعِيْدِ مَسْجِدًا (إِنْ وُقِفَ) لِذٰلِكَ (وَلَوْ) كَانَ وَقْفُهُ (بِقَرَائِنَ) كَأَنْ يَأْذَنَ مَالِكُهُ لِلنَّاسِ إِذْنًا عَامًّا بِالصَّلَاةِ فِيْهِ وَيَتَكَرَّرُ مِنْهُ ذٰلِكَ وَلَا

يَشْغَلُهُ بِشَيْءٍ وَيُجَنِّبُهُ مَا يُقْذِرُهُ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. وَحِينَئِذٍ (فَلَا يَجُوزُ لِنَحْوِ جُنُبٍ) كَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا (لُبْثٌ بِهِ) بِلَا عُذْرٍ أَوْ وُضُوءٍ. (وَيَتَّجِهُ صِحَّةُ اعْتِكَافٍ فِيهِ) - أَيْ مُصَلَّى الْعِيدِ - مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجَمَاعَةُ مُطْلَقًا، وَمِمَّنْ تَلْزَمُهُ إِنْ كَانَتْ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَلَوْ مِنْ مُعْتَكِفِينَ، لِثُبُوتِ حُكْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ لَهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(Dan mushalla Id tidak) mushalla (janazah masjid) karena sabda Nabi ﷺ: *"Dan hendaknya wanita-wanita haid menyingkir dari mushalla."* Adapun shalat janazah maka tidak ada ruku' dan sujud berbeda dengan shalat Id (dan memiliki *wajah*) tempat *i'tibar* mushalla Id sebagai masjid (bila diwakafkan) karena itu (meskipun) wakafnya (dengan *qarinah-qarinah*) seperti *malik*nya mengizinkan manusia dengan izin umum dengan shalat di dalamnya, hal itu berulang-ulang darinya, tidak menyibukkan dengan sesuatu dan menjahui perkara yang mengotori, yaitu menurut *muttajih*. Dengan demikian (maka tidak boleh bagi sesama orang junub) seperti wanita haid dan nifas yang terputus darahnya (diam di dalamnya) tanpa udzur atau wudhu.

(Dan memiliki *wajah* sahnya *i'tikaf* di dalamnya) -maksudnya mushalla Id- dari orang yang tidak wajib berjama'ah secara mutlak dan dari orang yang wajib berjama'ah baginya jika jamaah berdiri di dalam walau dari para *mu'takif*, karena tetapnya hukum masjid baginya, menurut *muttajih*.

c. *I'anah ath-Thalibin*, III/190:

(قوله: وَوَقَفْتُهُ لِلصَّلَاةِ الخ) أَيْ وَإِذَا قَالَ الْوَاقِفُ وَقَفْتُ هٰذَا الْمَكَانَ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ (قوله: وَكِنَايَةٌ فِي خُصُوصِ الْمَسْجِدِيَّةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا) فَإِنْ نَوَى الْمَسْجِدِيَّةَ، صَارَ مَسْجِدًا، وَإِلَّا صَارَ وَقْفًا عَلَى الصَّلَاةِ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا، كَالْمَدْرَسَةِ.

(Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dan saya mewakafkannya untuk shalat ..."*) maksudnya bila wakif berkata: *"Saya mewakafkan tempat ini untuk shalat"*, maka itu *sharih* dalam kemutlakan wakaf (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dan kinayah dalam kekhususan masjid, maka haru disertai niatnya"*) jika niat menjadikan masjid, maka menjadi masjid, dan jika tidak maka menjadi wakaf untuk shalat saja, meskipun tidak berupa masjid seperti madrasah.

d. *Asna al-Mathalib*, XVI/442:

(وَوَقَفْتُهُ لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ) فِي وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَأَمَّا كَوْنُهُ

وَقْفًا بِذٰلِكَ فَصَرِيْحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ (لَا) إِنْ بَنَى بِنَاءً وَلَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ (أَذِنْتُ فِي الصَّلَاةِ فِيْهِ) فَلَا يَصِيْرُ بِذٰلِكَ مَسْجِدًا وَإِنْ صَلَّى فِيْهِ وَنَوَى جَعْلَهُ مَسْجِدًا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْبِنَاءُ بِمَوَاتٍ فَيَصِيْرُ مَسْجِدًا بِالْبِنَاءِ وَالنِّيَّةِ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النِّيَّةِ يُغْنِيْ عَنِ الْقَوْلِ أَيْ فِيْمَا بَنَى فِي مَوَاتٍ قَالَ السُّبْكِيُّ الْمَوَاتُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا احْتِيْجَ لِلَّفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ ذٰلِكَ إِجْرَاؤُهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا مِنَ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَغَيْرِهِمَا وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ يَدُلُّ لَهُ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَذِنْتُ فِي الْاِعْتِكَافِ فِيْهِ صَارَ بِذٰلِكَ مَسْجِدًا لِأَنَّ الْاِعْتِكَافَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ.

(*"Dan saya wakafkan untuk shalat"* adalah bentuk *shighat kinayah*) dalam wakafnya sebagai masjid maka dibutuhkan niat menjadikannya masjid. Adapun wakaf dengan hal itu maka *sharih* yang tidak butuh pada niat. (Tidak) jika membangun bangunan meski dengan bentuk masjid dan berkata (*saya mengizinkan shalat di dalamnya*) maka tidak menjadi masjid dengan hal itu meskipun shalat di dalamnya dan niat menjadikannya sebagai masjid. *Mushannif* berkata dalam *al-Kifayah* karena mengikuti al-Mawardi kecuali bangunan tersebut berada di bumi mati yang tidak masuk dalam kepemilikan seseorang yang menghidupkannya sebagai masjid. Dan sungguh dibutuhkan pada lafal untuk mengeluarkan hal yang ada dalam kepemilikan darinya, dan bangunan menjadi memiliki hukum masjid karena mengikuti. Al-Asnawi berkata: *"Qiyas itu adalah memberlakukannya di selain masjid juga dari madrasah-madrasah, ribath-ribath dan selain keduanya"*. Adapun kalam ar-Rafi'i dalam *Ihya' al-Mawat* menunjukkan padanya; selesai. Menurut dhahir jika *wakif* berkata: *"Saya mengizinkan i'tikaf di dalamnya"*, maka dengan izin tersebut menjadi masjid karena tidak sah *i'tikaf* kecuali di masjid, berbeda dengan shalat.

Jawaban c

Kalau bangunannya berbentuk masjid, menurut Imam Ibnu hajar dihukumi masjid dan Imam Ramli manambahkan syarat telah masyhur sebagai masjid.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/264:

وَسُئِلَ عَمَّا إِذَا وَجَدْنَا صُوْرَةَ مَسْجِدٍ وَلَمْ نَدْرِ هَلْ وُقِفَ مَسْجِدًا أَمْ لَا فَهَلْ تَثْبُتُ لَهُ

أَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ ذٰلِكَ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَالِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ أَفْتَى بِذٰلِكَ وَفِيْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِيْ بَابِ الْوَقْفِ مَا هُوَ صَرِيْحٌ فِيْ ذٰلِكَ وَجَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ عَمَلًا بِالْقَرِيْنَةِ هٰذَا إِنْ لَمْ تَسْتَفِضْ تَسْمِيَةُ النَّاسِ لَهُ مَسْجِدًا وَإِلَّا حُكِمَ بِكَوْنِهِ مَسْجِدًا بِلَا تَوَقُّفٍ.

وَالْكَلَامُ فِيْ غَيْرِ مَسَاجِدِ مِنًى غَيْرَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُجُوْدُ مَسْجِدٍ فِيْهَا غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ بِنَاءُ مَسْجِدٍ فِيْهَا.

Ibn Hajar al-Haitami ditanya mengenai masalah jika kita menemukan bentuk masjid dan kita tidak mengetahui apakah diwakafkan sebagai masjid atau tidak, apakah tetap baginya hukum-hukum masjid? Maka aku menjawab dengan ungkapan beliau: *"Menurut dhahir sungguh hal itu tetap baginya karena mengamalkan pada dhahir kondisi"*, kemudian saya melihat sebagian *muta'akkhirin* berfatwa dengan itu dan dalam *Fatawa ibn Shalah* dalam bab wakaf ada perkara yang *sharih* dalam hal itu dan as-Subki memberlakukannya karena mengamalkan dengan *qarinah*. Ini jika tidak menyerakan penamaan manusia padanya sebagai masjid dan jika tidak maka dihukumi menjadi masjid tanpa *tawaqquf*.

Adapun kalam di selain masjid-masjid Mina selain masjid al-Khaif maka tidak mungkin wujud masjid di dalamnya selain masjid tersebut karena dilarang membangun masjid di dalamnya.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 98:

(مسألة: ي) الْمَسْجِدُ الْمَعْمُوْرُ بِمَوَاتٍ تَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَسْجِدِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ الْعَامِرُ مُسْلِمًا، وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِوَقْفِهِ، أَوْ يَقْصِدَ بِالْبِنَاءِ جَعْلَهُ مَسْجِدًا، وَأَنْ تَكُوْنَ الْأَرْضُ الْمَذْكُوْرَةُ لَمْ تُعْمَرْ أَصْلًا، أَوْ شُكَّ فِيْ عِمَارَتِهَا أَوْ عَمَرَهَا كَافِرٌ قَبْلَ اسْتِيْلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهَا أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِ مُسْلِمٍ، أَوْ شُكَّ هَلِ الْعِمَارَةُ جَاهِلِيَّةٌ أَوْ إِسْلَامِيَّةٌ؟ وَكَالْمَوَاتِ مَا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ وَلَوْ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ مِنْ كَافِرٍ فَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ، فَلَا اعْتِدَادَ بِبِنَائِهِ فِيْ تِلْكَ الصُّوَرِ، إِذْ لَا يَجُوْزُ لَهُ إِحْيَاءُ مَوَاتِ الْإِسْلَامِ، فَلَوْ بَاعَهَا الْمُسْلِمُ فَبَنَاهَا مَسْجِدًا، أَوْ مَلَّكَهَا لِمُسْلِمٍ آخَرَ فَبَنَاهَا الثَّانِيْ، كَذٰلِكَ بِاللَّفْظِ أَوِ النِّيَّةِ ثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُهُ، وَلَمْ يَمْلِكِ الثَّمَنَ آخِذُهُ إِذْ بَيْعُ الْكَافِرِ الْمَذْكُوْرِ حِيْنَئِذٍ فَاسِدٌ، وَإِنَّمَا ذٰلِكَ صُوْرَةُ افْتِدَاءٍ، نَعَمْ لَوْ بَنَى كَافِرٌ مَسْجِدًا بِأَرْضٍ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ

أَنَّهَا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ ثَبَتَتْ لَهُ الْأَحْكَامُ، كَمَا لَوْ بَاعَ الْكَافِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ لِمُسْلِمٍ بَيْعًا صَحِيحًا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ فَبَنَى بِهَا مَسْجِدًا، لَكِنْ لَا بُدَّ فِي هَاتَيْنِ مِنَ التَّلَفُّظِ بِالْوَقْفِ، فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ، بِخِلَافِ الْمَوَاتِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ رَأَيْنَا صُورَةَ مَسْجِدٍ وَلَمْ نَدْرِ مَنْ بَانِيهِ وَهَلْ هُوَ فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ، وَهَلْ تَلَفَّظَ عَامِرُهُ بِوَقْفِهِ أَمْ لَا؟ ثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُهُ أَيْضًا، سَوَاءٌ اسْتَفَاضَ بَيْنَ النَّاسِ تَسْمِيَتُهُ مَسْجِدًا أَمْ لَا، كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ. وَقَالَ (م ر) بِشَرْطِ الْاِسْتِفَاضَةِ، قَالَ ع ش: وَالْأَقْرَبُ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ، وَإِذَا ثَبَتَتْ لِأَرْضِ الْمَسْجِدِ أَحْكَامُهُ ثَبَتَتْ لِجُدْرَانِهِ وَأَخْشَابِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ آلَاتِ الْعِمَارَةِ، لِأَنَّ الْمُتَصَدِّيَ لِقَبْضِ ذٰلِكَ مِنَ النَّاسِ نَائِبٌ عَنْهُمْ فِي شِرَائِهَا، فَيَزُولُ مِلْكُهُمْ عَنْهَا بِاسْتِقْرَارِهَا فِي مَحَلِّهَا لَا قَبْلَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ لِقَيِّمِ الْمَسْجِدِ: اضْرِبِ اللَّبِنَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ أَرْضِي فَضَرَبَهُ وَبَنَى بِهِ يَصِيرُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ.

(Masalah Abdillah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya) Masjid yang diramaikan di bumi mati maka tetap padanya hukum-hukum masjid dengan syarat adanya peramai adalah muslim dan mengucapkan wakafnya atau tujuan membangun untuk menjadikannya sebagai masjid. Dan bumi tersebut tidak diramaikan sama sekali, diragukan dalam *imarah*nya atau orang kafir meramaikannya sebelum dikuasai muslim atau setelahnya dan tidak masuk di bawah kekuasaan muslim, atau diragukan apakah *imarah* itu secara *Jahiliyah* atau Islami? Dan sebagaimana bumi mati adalah perkara yang diambil muslim meskipun dengan penjualan yang rusak dari orang kafir, mengecualikan dengan kata muslim yaitu orang kafir, maka tidak di*i'tibar* dengan bangunannya dalam bentuk tersebut. Karena tidak boleh baginya menghidupkan bumi mati Islam. Jika orang muslim menjual lalu membangunnya menjadi masjid atau memberikan kepemilikannya pada muslim yang lain lalu pihak kedua membangunnya. Begitu juga dengan lafal atau niat maka tetap hukum-hukumnya, dan tidak memiliki *tsaman* bagi pemungutnya karena penjualan orang kafir tersebut dengan demikian menjadi rusak, dan sungguh hal itu merupakan bentuk tebusan. Ya, jika orang kafir membangun masjid di tanahnya dan tidak diketahui sungguh hal itu berkonsekuensi padanya tanpa hak, maka tetap baginya hukum-hukum tersebut; sebagaimana jika orang kafir menjual bumi itu pada orang muslim dengan penjualan yang sah melalui ijab qabul kemudian ia membangunnya sebagai masjid, akan tetapi dalam kedua kasus ini harus ada pelafalan wakaf, maka tidak cukup sekedar niat, berbeda dengan kasus bumi mati sebagaimana yang telah

lewat. Jika kita melihat bentuk masjid dan kita tidak tahu siapa yang membangunnya, apa itu merupakan bumi mati atau ada yang memiliki, dan apakah amirnya melafalkan dengan wakafnya atau tidak? Maka tetap baginya beberapa hukum juga. Baik menyerahkan di antara manusia penamaannya sebagai masjid atau tidak, sebagaimana kata ibn Hajar.

وَقَالَ (م ر) بِشَرْطِ الْاِسْتِفَاضَةِ، قَالَ ع ش: وَالْأَقْرَبُ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ، وَإِذَا ثَبَتَتْ لِأَرْضِ الْمَسْجِدِ أَحْكَامُهُ ثَبَتَتْ لِجُدْرَانِهِ وَأَخْشَابِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ آلَاتِ الْعِمَارَةِ، لِأَنَّ الْمُتَصَدِّيَ لِقَبْضِ ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ نَائِبٌ عَنْهُمْ فِي شِرَائِهَا، فَيَزُولُ مِلْكُهُمْ عَنْهَا بِاسْتِقْرَارِهَا فِي مَحَلِّهَا لَا قَبْلَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ لِقَيِّمِ الْمَسْجِدِ: اضْرِبِ اللَّبِنَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ أَرْضِي فَضَرَبَهُ وَبَنَى بِهِ يَصِيرُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ.

Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah, Syams ad-Din ibn Syihab ad-Din ar-Ramli berkata: *"Dengan syarat istifadhah"*. Ali ibn Ali, Nur ad-Din asy-Syubramillsi berkata: *"Yang lebih dekat adalah kalam ibn Hajar, dan bila hukum-hukumnya tetap pada bumi masjid maka hukum-hukumnya tetap pada tembok, kayu-kayunya dan lainnya dari alat-alat imarah, karena orang yang bersedia untuk menerima itu dari manusia menjadi naib dari mereka dalam membelinya. Maka hilang kepemilikan mereka darinya dengan pengakuan di tempatnya tidak sebelum pengakuannya, sebagaimana apabila berkata pada qayyim masjid, buatlah batu-bata untuk masjid dari tanahku lalu ia membuatnya dan membangun dengannya maka dengan demikian baginya menjadi memiliki hukum masjid."*

Jawaban d

Mengubah (*taghyir*) status wakaf dalam konteks madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan.

Dasar Pengambilan Hukum

Hasyiyah Qulyubi wa 'Umairah, X/43:

تَنْبِيهٌ: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اتُّبِعَ شَرْطُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رَيْعِهِ وَأَنْ لَا تُزَالَ عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إِلَى آخَرَ. نَعَمْ يَجُوزُ فِي وَقْفِ قَرْيَةٍ عَلَى قَوْمٍ إِحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا.

Peringatan: Tidak boleh merubah bentuk wakaf meskipun pada yang lebih tinggi darinya; jika *wakif* mensyaratkan amal dengan maslahat maka harus syaratnya diikuti. As-Subki berkata: *"Boleh merubah wakaf dengan*

tiga syarat; yaitu tidak merubah nama, ada maslahat baginya seperti menambah rai'nya dan tidak hilang ainnya; maka tidak bahaya memindahnya dari satu sisi ke sisi yang lain." Ya, dalam wakaf desa untuk suatu kaum, boleh membuat masjid, *maqbarah* dan siraman baru di dalamnya.

457. Menghutangkan Kas Masjid dan Madrasah

Deskripsi Masalah

Hampir di setiap daerah terdapat masjid dan madrasah yang notabene adalah wakaf untuk umum. Tidak sedikit di antara masjid-masjid dan madrasah-madrasah tersebut yang memiliki kas cukup banyak yang didapat dari berbagai sumber. Semua kas tersebut digunakan untuk kepentingan masjid atau madrasah, yang di antaranya untuk gaji takmir dan pengurus. Namun tidak jarang di antara takmir atau pengurus yang ketika dalam keadaan terdesak mereka menghutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi. Bahkan tidak jarang warga sekitar masjid atau madrasah juga menghutang pada masjid atau madrasah. Sebagian dari takmir dan pengurus memilih kebijakan untuk tidak menghutangi sebab tidak ada sangkut paut dengan kepentingan masjid, akan tetapi sebagian pengurus yang lain memilih untuk menghutangi, sebab jika tidak dihutangi akan bisa berpengaruh pada ramai tidaknya masjid atau madrasah.

Pertanyaan

a. Bolehkah takmir atau pengurus menghutang uang kas masjid, madrasah, ormas dan semacamnya untuk kepentingan pribadi dengan alasan seperti di atas?
b. Bolehkah pengurus atau takmir menghutangkan uang kas masjid atau madrasah dengan pertimbangan seperti di atas?
c. Kalau kas yang dihutangkan tidak kembali, siapa yang bertanggung jawab? *(PCNU Kab. Kediri dan PWNU)*

Jawaban a

Menurut Syafi'iyah Tidak boleh, sedangkan menurut pendapat Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari kalangan Hanafiyah boleh dengan syarat mampu membayarnya dan pengurus termasuk *nazhir*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fatawa Ibn Hajar al-Haitami,* II/205:

وَسُئِلَ: عَنْ شَخْصٍ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ لِيَتِيمٍ أَوْ لِغَائِبٍ أَوْ لِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ وَالْيَتِيمُ وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهَا فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُهُ إِقْرَاضَهَا أَوِ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِرَدِّ بَدَلِهَا فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذٰلِكَ وَهَلْ قَالَ بِذٰلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ

رضي الله تعالى عنه - مَعَ أَنَّ الْبَلَدَ لَيْسَ بِهَا حَاكِمٌ وَهَلْ تَجِدُوْنَ لَهُ طَرِيْقًا فِيْ ذٰلِكَ أَمْ لَا. فَأَجَابَ: إِقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُوْرِهِ فِيْهِ تَفْصِيْلٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ لِنَهْبٍ أَوْ حَرِيْقٍ أَوْ إِرَادَةِ سَفَرٍ وَفِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ وَلِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مُطْلَقًا لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ هٰذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ لٰكِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ فِيْ رَدِّهِ وَإِنَّ الْقَاضِيَ كَغَيْرِهِ فِيْ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لَهُ الْإِقْرَاضُ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمَحْجُوْرِ بُسْتَانٌ فَأَجَرَ وَلِيُّهُ بَيَاضَ أَرْضِهِ بِأُجْرَةٍ تَفِيْ بِمِقْدَارِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَقِيْمَةِ الشَّجَرِ ثُمَّ سَاقَى عَلَى الشَّجَرِ عَلَى سَهْمٍ مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ لِلْمَحْجُوْرِ وَالْبَاقِيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ صَحَّتِ الْمُسَاقَاةُ وَهِيَ مَسْئَلَةٌ نَفِيْسَةٌ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ صَبِيٌّ يَتِيْمٌ وَلَيْسَ وَصِيًّا شَرْعِيًّا وَلَا وَلِيًّا وَخَافَ ضِيَاعَ مَالِهِ إِنْ سَلَّمَهُ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ جَازَ لَهُ النَّظَرُ فِيْ أَمْرِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيْ مَالِهِ وَمُخَالَطَتُهُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ أَصْلَحُ لَهُ وَاسْتِخْدَامُهُ بِمَا فِيْهِ تَدْرِيْبُهُ قَاصِدًا مَصْلَحَتَهُ وَيَجُوْزُ مِنْ غَيْرِ ذٰلِكَ بِمَا لَا يُعَدُّ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَمَا سِوَى ذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ إِلَّا بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِيْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ لِلْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ الْإِنْفَاقَ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ فِيْ تَأْدِيْبِهِ وَتَعْلِيْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لِأَنَّهَا قَلِيْلَةٌ فَسُوْمِحَ بِهَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَلَوْ لَمْ يُوْجَدْ وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْحَاكِمِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ النَّظَرُ فِيْ مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ اهـ.

وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ فِيْهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوْزُ وَإِنْ كَانَ بِنِيَّةِ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا حِيْلَةَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ هُوَ وَالْيَتِيْمُ إِلَى بَلَدٍ لَهَا قَاضٍ فَإِذَا ذَهَبَا إِلَيْهِ وَكَانَ هُنَاكَ ضَرُوْرَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِإِقْرَاضِ مَالِ الْيَتِيْمِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ يَجُوْزُ لِلْقَاضِيْ حِيْنَئِذٍ إِقْرَاضُ مَالِهِ لِلْوَلِيِّ ... وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذٰلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّيْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذٰلِكَ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَقٍّ فَإِنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ نَائِبَهُ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيْهِ إِذَا

اضْطُرَّ إِلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَأَنَّ وَكِيْلًا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ مَا أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِيْهِ نَعَمْ لَهُ وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ إِمَّا يَعْلَمَانِ أَوْ يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هٰذَا كُلُّهُ إِنْ كَانَ الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيْدًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا التَّصَرُّفُ فِيْهِ إِلَّا لِلْوَلِيِّ أَوْ مَأْذُوْنِهِ والله أعلم.

Ibn Hajar al-Haitami ditanya tentang seseorang yang membawa dirham milik anak yatim, orang yang *gha`ib*, atau milik masjid dan sesamanya, sementara anak yatim dan sesamanya itu tidak membutuhkannya pada waktu tersebut, lalu *Qayyim* dan sesamanya hendak menghutangkannya atau mentasarufkannnya dengan mengembalikan gantinya; apakah hal itu boleh dilakukannya? Apakah ada ulama yang berpendapat demikian meski selain *Ashab* asy-Syafi'i ﷺ, sementara di *balad* tidak ada Hakim? Apakah Anda menemukan solusi mengenai hal itu atau tidak? Ibn Hajar menjawab: *"Penghutangan harta mahjur yang dilakukan oleh wali ada tafsil. Bagi ayah, kakek, dan Wasyi boleh menghutangkan harta mahjur dalam kondisi terdesak, karena akan dijarah, terbakar, atau hendak bepergian; sedangkan selain kondisi itu maka tidak boleh. Bagi Qadhi boleh menghutangkannya secara mutlak karena banyak kesibukannya. Ini menurut pendapat Syaikhuna."*. Namun al-Isnawi memperpanjang dalam menolaknya, sebagaimana as-Subki. Al-Qadhi seperti selainnya menyatakan, bahwa tidak boleh bagi *Qadhi* menghutangkannya kecuali karena darurat. Ibn ash-Shalah berfatwa, jika ada kebun milik *mahjur* kemudian walinya menyewakan tanah kosongnya dengan upah yang memenuhi kadar manfaat tanah dan *qimah* pohon, kemudian ia mengakadi *musaqah* pohonnya dengan sebagian dari seribu bagian bagi *mahjur* dan bagian sisanya bagi *musta'jir* sebagaimana berlaku sesuai adatnya, maka akad *musaqah* sah. Ini masalah yang indah. Ibn ash-Shalah juga berfatwa, jika pada seseorang ada anak kecil yatim, sedangkan ia bukan *Washi* menurut *syara'*, bukan wali, dan takut hartanya tersia-sia jika diserahkannya kepada *Wali al-Amri*, maka ia boleh mengambil kebijakan terkait hal itu, mentasarufkan hartanya, mengajaknya bersama-sama dalam urusan makan dan selainnya, dari berbagai kebijakan yang lebih baik baginya, dan meminta pelayanan lainnya dengan pekerjaan yang pekerjaan semisalnya pelayanannya dengan pekerjaan yang terdapat unsur melatihnya dengan tujuan untuk kemaslahatannya. Boleh pula baginya meminta pelayanan lainnya yang pekerjaan semisalnya tidak terukur dengan upah. Adapun pekerjaan selain itu maka tidak boleh kecuali dengan upah standar. An-Nawawi menuturkan dalam *Syarh al-Muhadzdzab*, bagi *'Ashabah* seperti saudara laki-laki dan paman boleh menafkahkan harta *shabi* untuk mendidik

dan mengajarnya meski tidak ada wilayah bagi mereka terhadapnya, karena biaya tersebut sedikit, sehingga tolelir. Al-Jurjani berkata: *"Jika tidak ditemukan Wali dan Hakim maka wajib bagi kaum muslimin mengelola harta shabi dan orang gila dengan menjaganya. Adapun mentasarufkannya bagi dirinya sendiri maka tidak boleh meski dengan niat mengembalikan gantinya, karena dia tidak boleh menyerahkan harta untuk diterima dirinya sendiri, sehingga tidak ada rekayasa baginya dalam hal itu, kecuali dia dan anak yatim pergi ke balad yang terdapat Qadhi; lalu apabila mereka berdua pergi ke sana dan di sana ada darurat yang memperbolehkan menghutangkan harta anak yatim, maka tidak jauh dari kebenaran bila dikatakan, dengan demikian Qadhi boleh menghutangkan hartanya pada wali"* ... Dengan ini diketahui, tidak boleh baginya mengambil hutang untuk dirinya dari barang milik harta wakaf yang dikuasainya. *Syaikhani*, menjelaskan secara terang-terangan hal itu, sekira mereka berkata: *"Tidak boleh bagi Mutawalli mengambil sesuatu dari harta wakaf dengan niat menanggungnya. Jika ia mengerjakannya maka ia harus menanggungnya. Sedangkan orang yang di bawah kuasanya terdapat harta milik orang gha`ib, maka jika kuasa pada harta tersebut tanpa hak maka jelas, tidak boleh baginya mentasarufkannya untuk dirinya dan tidak untuk orang lain. Sedangkan jika dengan hak, jika ia seorang Qadhi atau Naibnya maka boleh baginya mentasarufkannya apabila kondisi terpaksa, seperti menjualnya jika takut rusak, dan seorang wakil boleh mentasarufkannya sesuai muwakkilnya dalam hal itu."* Ya bagi *Muwakkil* dan selain *muwakkil* boleh mengambil harta itu, kadang mereka mengetahui atau menyangka pemiliknya rela dengannya. Ini semua jika pemiliknya yang *gha`ib* itu pintar *(rasyid)*, sedangkan jika tidak maka tidak boleh mengambil sedikit pun dari hartanya secara mutlak, dan tidak boleh mentasarufkannya, kecuali bagi Wali atau orang yang diizini. *Wa Allahu a'lam.*

b. *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib*, II/472:

فَرْعٌ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ عَلَى وَجْهِ الضَّمَانِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ.

(Far') Tidak boleh bagi *nadhir* mengambil sesuatu dari harta wakaf atas dasar menanggung; jika ia mengerjakan maka ia harus menanggungnya.

c. *Majmu' adh-Dhamanat*, VII/180:

وَلَا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ إِقْرَاضَ مَالِ الْيَتِيمِ، فَإِنْ أَقْرَضَ كَانَ ضَامِنًا، وَالْقَاضِي يَمْلِكُ الْإِقْرَاضَ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي الْأَبِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَبَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ لَا بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فَلَوْ أَخَذَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ قَرْضًا لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ، وَيَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مَالَ الْيَتِيمِ

فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا أَنَا أَرْجُو أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْقَضَاءِ لَا بَأْسَ بِهِ. وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِيُّ أَوِ الْأَبُ مَالَ الْيَتِيمِ بِدَيْنِ نَفْسِهِ فِي الْقِيَاسِ: لَا يَجُوزُ، وَيَجُوزُ اسْتِحْسَانًا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَخَذَ بِالْقِيَاسِ، وَلَوْ قَضَى الْوَصِيُّ دُيُونَ نَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ فَعَلَ الْأَبُ ذٰلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ، وَالْأَبُ يَمْلِكُ، وَالرَّهْنُ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ.

Orang yang diwasiati tidak memiliki hak menghutangkan harta anak yatim, jika ia menghutangkan maka ia harus menanggung, sedangkan *qadhi* memiliki hak untuk menghutangkan. *Masyayikh* berbeda pendapat mengenai ayah dengan perbedaan dua riwayat dari abu Hanifah. Menurut *qaul shahih* sungguh ayah menempati posisi orang yang diwasiati, tidak menempati *qadhi*. Jika *washi* mengambil harta anak yatim dengan hutang untuk dirinya maka tidak boleh, dan menjadi hutang baginya. Dari Muhammad: *"Tidak boleh bagi washi menuntut hutang harta anak yatim menurut qaul abi Hanifah"-Rahimahu Allah-*. Dan Muhammad berkata: *"Adapun aku mengharap sungguh jika ia mengerjakan hal itu, dan ia mampu membayar maka tidak ada masalah dengannya"*. Jika *washi* atau ayahnya menggadaikan harta anak yatim dengan hutang dirinya dalam *qiyas*: *"Tidak boleh, dan boleh menurut metode istihsan"*. Dari abi Yusuf, sungguh ia mengambil dengan *qiyas*, dan jika *washi* membayar hutangnya dengan harta anak yatim maka tidak boleh. Jika ayah mengerjakan hal itu maka boleh, karena *washi* tidak memiliki hak membelikan harta anak yatim untuk dirinya dengan semisal *qimah*, sedangkan ayah memiliki dan gadai tersebut menempati *qadha'*.

d. Referensi lain
    1) *Al-'Aziz*, VI/290

Jawaban b

Tidak boleh. Akan tetapi menurut sebagian kalangan Hanafiyah diperbolehkan dengan dua syarat:
1) Diambilkan dari lebihan kas masjid atau lembaga.
2) Menghutangkan dianggap lebih menjaga harta masjid atau lembaga.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *I'anah ath-Thalibin*, III/73:

وَلِوَلِيٍّ إِقْرَاضُ مَالِ مَحْجُورٍ لِضَرُورَةٍ وَلِقَاضٍ ذٰلِكَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ كَوْنِ الْمُقْتَرِضِ مَلِيئًا أَمِينًا (قوله وَلِوَلِيٍّ الخ) أَيْ وَيَجُوزُ لِوَلِيٍّ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ مُوَلِّيهِ إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ فَإِنْ لَمْ

تُوجَدْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْقَرْضِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَيَمْتَنِعُ عَلَى وَلِيٍّ قَرْضُ مَالِ مُوَلِّيهِ بِلَا ضَرُورَةٍ نَعَمْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي إِقْرَاضُ مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِلَا ضَرُورَةٍ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ إِنْ كَانَ الْمُقْتَرِضُ أَمِينًا مُوسِرًا اه (قوله وَلِقَاضٍ) أَيْ وَيَجُوزُ لِقَاضٍ (وقوله ذَلِكَ) أَيِ الْإِقْرَاضُ (وقوله مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَتْ ضَرُورَةٌ أَوْ لَمْ تُوجَدْ (قوله بِشَرْطِ الخ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ لِقَاضٍ فَقَطْ لَكِنِ الْمَعْنَى يَقْتَضِي أَنَّ الْوَلِيَّ غَيْرَ الْقَاضِي مِثْلُهُ.

Dan wali boleh menghutangkan harta *mahjur* karena darurat dan bagi *qadhi* boleh melakukan hal itu juga dengan syarat orang yang berhutang semangat dan dapat dipercaya.

(Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"dan bagi wali…"*) maksudnya boleh bagi wali menghutangkan harta *muwalli*nya bila dalam kondisi darurat; jika tidak ditemukan maka dilarang menghutangkan baginya, sebagaimana telah lewat dalam masalah hutang. Adapun ibaratnya ada di sana: Dan tercegah bagi wali menghutangkan harta *muwalli*nya tanpa darurat. Ya, boleh bagi *qadhi* menghutangkan harta *mahjur alaih* tanpa darurat karena banyak kesibukan-kesibukannya jika *muqtaridh* bisa dipercaya dan kaya. (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dan bagi qadhi"*) maksudnya dan boleh bagi *qadhi* (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Itu"*) maksudnya menghutang (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Secara mutlak"*) yakni ditemukan darurat atau tidak (Ungkapan Zainuddin al-Malibari: *"Dengan syarat…"*) Kenyataan perbuatannya itu berhubungan dengan ungkapan Zainuddin al-Malibari: *Bagi qadhi saja, akan tetapi makna tersebut menuntut bahwa sungguh wali selain qadhi itu semisalnya.*

b. *Al-Fatawa al-Iqtishadiyah*, 1354:

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَإِقْرَاضُ النَّاظِرِ مَالَ الْوَقْفِ كَإِقْرَاضِ مَالِ الصَّبِيِّ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي إِقْرَاضُ مَالِ الْوَقْفِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَسَفَرٍ أَوْ نَهْبٍ فَيُقْرِضُهُ مَلِيئًا أَمِينًا خَالِيًا مَالُهُ عَنِ الشُّبْهَةِ وَأَخَذَ رَهْنًا إِنْ رَأَى فِي أَخْذِهِ مَصْلَحَةً.

Masalah kedua: Sungguh tidak boleh bagi *nadhir* mengambil sesuatu dari harta wakaf; Adapun *nadhir* menghutangkan harta wakaf seperti menghutangkan harta *shabi* maka tidak diperbolehkan bagi selain *qadhi* menghutangkan harta wakaf kecuali karena darurat seperti pergi atau dijarah, maka menghutangkan kepada orang yang semangat dan jujur

yang hartanya sepi dari syubhat dan mengambil gadai apabila melihat maslahat dalam mengambilnya.

c. *Hasyiyah Ibn Abidin*, V/417:

مَطْلَبٌ لِلْقَاضِي إِقْرَاضُ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ قوله (يُقْرِضُ الْقَاضِي الخ) أَيْ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُبَاشِرَ الْحِفْظَ بِنَفْسِهِ وَالدَّفْعُ بِالْقَرْضِ أَنْظَرُ لِلْيَتِيمِ لِكَوْنِهِ مَضْمُونًا وَالْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَالَ الْمُسْتَقْرِضِينَ حَتَّى لَوِ اخْتَلَّ أَحَدُهُمْ أَخَذَ مِنْهُ الْمَالَ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَقْرِضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ط عَنِ الْهِنْدِيَّةِ قوله (مَالَ الْوَقْفِ) ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا عَنِ الْعِدَّةِ يَسَعُ لِلْمُتَوَلِّي إِقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْقَاضِي مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْخِزَانَةِ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنِ الْإِقْرَاضُ أَحْرَزَ.

(*Mathlab*) *Qadhi* boleh menghutangkan harta anak yatim dan sesamanya. Ungkapan al-Hashkafi: (*Qadhi menghutangkan*...) maksudnya hal tersebut disunahkan bagi *qadhi* karena sungguh dengan banyak kesibukannya tidak mungkin melakukan penjagaan sendiri; Adapun menyerahkan hutang itu lebih bijak bagi anak yatim karena hal tersebut di tanggung, sedangkan titipan adalah amanah, dan sebaiknya *qadhi* menjauhkan kondisi-kondisi orang-orang yang mencari hutang sehingga jika salah seorang dari mereka menjadi cacat maka ia mengambil harta darinya. Adapun sempurnanya dalam *al-Bahr*. *"Dan tidak boleh bagi qadhi mencari hutang hal itu untuk dirinya"*; Muhith Dinari dari al-Hindiyah. Ungkapan al-Hashkafi (harta wakaf) penulis menyebutkannya dalam *al-Bahr* dari *Jami' al-Fushuliyyin*, tetapi di dalam *al-Bahru* juga terdapat keterangan dari kitab *al-Uddah* bagi *mutawalli* boleh menghutangkan kelebihan harta hasil pengembangan wakaf, andai hal itu lebih menjaganya. Adapun tuntutannya sungguh tidak menjadi tertentu dengan *qadhi* serta penulis menjelaskan dalam *al-Bahr* dari *al-Khazanah*: *"Sungguh al-mutawalli harus menanggung kecuali dikatakan: Sungguh sekira menghutangkan tersebut tidak lebih menjaganya."*

d. *Al-Bahr ar-Ra`iq*, XIV/454:

وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ وَلَا الْبَيْعُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَسْجِدِ اهـ فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا أَمَرَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ فَفَعَلَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ

بِشَرْعِيٍّ أَوْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ الْقَيِّمُ ضَامِنًا قُلْتُ: قَالَ فِي الْقُنْيَةِ طَالِبُ الْقَيِّمِ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يَضْمَنُ الْقَيِّمُ اهـ مَعَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَيْسَ لَهُ إِقْرَاضُ مَالِ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إِيدَاعُ مَالِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ إِلَّا مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ وَلَا إِقْرَاضُهُ فَلَوْ أَقْرَضَهُ ضَمِنَ وَكَذَا الْمُسْتَقْرِضُ وَذَكَرَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَوْ أَقْرَضَ مَالَ الْمَسْجِدِ لِيَأْخُذَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَحْرَزُ مِنْ إِمْسَاكِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْعُدَّةِ يَسَعُ الْمُتَوَلِّي إِقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ اهـ.

Qayyim tidak boleh membeli sesuatu dari harta masjid dan menjualnya untuk dirinya meskipun terdapat manfaat yang jelas bagi masjid. Jika kamu berkata bila *qadhi* memerintahkan sesuatu lalu ia mengerjakannya kemudian terbukti bahwa hal itu tidak secara *syara'* atau ada bahaya pada wakaf; apakah *qayyim* harus menanggung. Saya berkata: Penulis berkata dalam *al-Qaniyyah*: *"Penuntut qayyim adalah ahli mengganti menghutangkan dari harta masjid bagi imam lalu enggan, maka qadhi memerintahkannya dengannya lalu menghutangkannya kemudian imam meninggal dalam kondisi melarat maka qayyim tidak terkena beban menanggung. Serta sungguh qayyim tidak boleh menghutangkan harta masjid"*. Penulis berkata dalam *al-Fushulain*: *"Tidak boleh bagi mutawalli menitipkan harta wakaf dan masjid kecuali pada keluarganya dan tidak boleh menghutangkannya; Jika ia menghutangkannya maka ia harus bertanggung jawab; begitu juga orang yang mencari hutang"*. Beliau menuturkan bahwa jika *Qayyim* menghutangkan harta masjid untuk diambil ketika hajat dan ia menjaga dari perampasannya maka tidak ada masalah. Dalam *al-'Uddah*: *"Bagi Mutawalli boleh menghutangkan kelebihan harta hasil pengembangan wakaf andai hal itu lebih menjaganya."*

Jawaban c

Khilaf. Menurut Syafi'iyah pihak *Nazhir* wajib bertanggung jawab secara mutlak, sedang menurut Hanafiyah, bila menghutangkan harta itu lebih menjamin keamanan uang kas maka *Nazhir* tidak bertanggung jawab, dan bila tidak demikian maka *Nazhir* harus bertanggung jawab.

Adapun pihak yang berhutang, bagaimanapun kondisinya tetap berkewajiban membayar tanggung jawab hutangnya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/41-42:

... وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ بِنِيَّةِ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ

يَقْبِضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي ذٰلِكَ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ هُوَ وَالْيَتِيمُ إِلَى بَلَدٍ لَهَا قَاضٍ فَإِذَا ذَهَبَا إِلَيْهِ وَكَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِإِقْرَاضِ مَالِ الْيَتِيمِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي حِينَئِذٍ إِقْرَاضُ مَالِهِ لِلْوَلِيِّ. وَأَمَّا فِي غَيْرِ هٰذِهِ الصُّورَةِ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ نَظَرٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ لِنَفْسِهِ ... هٰذَا كُلُّهُ حُكْمُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ مِن يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَرَّرَ نَاظِرُ الْوَقْفِ فِي مَالِ الْوَقْفِ أَخْذًا مِن قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ... فَافْهَمْ ذٰلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فِيهِ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذٰلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا: لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ.

"… Al-Jurjani berkata: *"Jika tidak ditemukan Wali dan Hakim maka wajib bagi kaum muslimin mengelola harta shabi dan orang gila dengan menjaga dan selainnya. Adapun mentasarufkan harta shabi dan orang gila bagi diri seorang muslim (ketika tidak ada Wali dan Hakim) sendiri maka tidak boleh meskipun dengan niat mengembalikan gantinya, karena dia tidak dibolehkan menyerahkan harta untuk diterimanya sendiri, sehingga tidak ada rekayasa baginya dalam hal itu, kecuali dia dan anak yatim pergi ke balad yang ada Qadhi; lalu apabila mereka berdua pergi ke sana dan di sana ada darurat yang membolehkan menghutangkan harta anak yatim, maka tidak jauh dari kebenaran bila dikatakan, dengan demikian Qadhi boleh menghutangkan hartanya pada wali."* Adapun dalam selain kasus ini, sesuai pengelolaan yang ada di dalamnya, maka bagi Wali, baik ayah atau selainnya, tidak dibolehkan mentasarufkan harta *Muwalli*nya untuk kepentingan pribadinya sendiri. …. Ini semua hukum Wali *Mahjur* seperti anak yatim dan semisalnya. Dalam semua aturan yang telah ditetapkan tersebut, terkait pengelolaan harta wakaf *Nazhir* wakaf sama dengan Wali *Mahjur* karena mengambil pendapat *Syaikhani* dan ulama lainnya … Pahamilah hal itu, bahwa hukum *Nazhir* wakaf sama dengan hukum wali dalam aturan-aturan yang ditetapkan untuknya. Dengan ini diketahui, tidak boleh baginya mengambil hutang untuk dirinya dari barang milik harta wakaf yang dikuasainya. *Syaikhani* menjelaskan dengan terang hal itu, dimana mereka berkata: *"Mutawalli tidak boleh mengambil sesuatu dari harta wakaf dengan niat menanggungnya. Jika ia mengerjakannya maka ia harus menanggungnya."*

b. *Asna al-Mathalib fi Syarh ar-Raudh ath-Thalib*, II/472:

فَرْعٌ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِن مَالِ الْوَقْفِ عَلَى وَجْهِ الضَّمَانِ. فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ.

Cabang masalah: Bagi *nazhir* wakaf tidak boleh mengambil harta wakaf sedikitpun dengan maksud menanggungnya, sehingga bila ia melakukan hal itu maka ia harus menanggungnya.

c. *Al-Wasith*, III/383:

أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ الْمُبَاشَرَةُ وَحَدُّهُ إِيجَادُ عِلَّةِ التَّلَفِ كَالْقَتْلِ وَالْأَكْلِ وَالْإِحْرَاقِ. وَنَعْنِي بِالْعِلَّةِ مَا يُقَالُ مِنْ حَيْثُ الْعَادَةُ أَنَّ الْهَلَاكَ حَصَلَ بِهَا كَمَا يُقَالُ حَصَلَ بِالْقَتْلِ وَالْأَكْلِ وَالْإِحْرَاقِ. أَمَّا التَّسَبُّبُ فَهُوَ إِيجَادُ مَا يَحْصُلُ الْهَلَاكُ عِنْدَهُ وَلَكِنْ بِعِلَّةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ السَّبَبُ مَا يُقْصَدُ لِتَوَقُّعِ تِلْكَ الْعِلَّةِ. فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ عَلَى إِتْلَافِ الْمَالِ وَالْإِكْرَاهُ سَبَبُهُ وَعَلَى مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَحَلِّ عُدْوَانٍ إِذَا تَرَدَّى فِيهِ بَهِيمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ إِنْسَانٌ فَإِنْ رَدَّى فِيهِ غَيْرُهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُرَدِّي تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ عَلَى التَّسَبُّبِ.

Adapun yang pertama, yaitu *mubasyarah* saja, adalah mewujudkan *'illat* kerusakan, seperti membunuh, memakan, dan membakar. Yang dimaksud dengan *'illat* adalah yang dalam adatnya dikatakan bahwa kerusakan dihasilkan dengannya, sebagaimana dikatakan kerusakan dihasilkan dengan membunuh, memakan, dan membakar. Adapun *tasabbub* adalah mewujudkan sesuatu yang kerusakan dihasilkan ketika di sisinya, namun sebab *'illat* lain ketika suatu sebab tidak dimaksudkan untuk terjadinya *'illat* itu. Karena itu, orang yang statusnya dipaksa wajib bertanggung jawab memberi ganti rugi atas perusakan harta, sementara pemaksaannya merupakan sebab. Wajib pula bertanggung jawab orang yang menggali sumur secara jahat ketika ada hewan, budak, atau manusia jatuh ke dalamnya. Bila yang jatuh adalah selain hal-hal tersebut, maka tanggung jawab menjadi beban orang yang menjatuhkan, karena mengutamakan *mubasyarah* daripada *tasabbub*.

d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VI/584:

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: الْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ أَيْدِي ضَمَانٍ وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا الْغَصْبَ، لِأَنَّهُ (أَيِ الْوَاضِعَ) وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَالْجَهْلُ لَيْسَ مُسْقِطًا لِلضَّمَانِ بَلْ يُسْقِطُ الْإِثْمَ فَقَطْ. فَيُطَالِبُ الْمَالِكُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. لَكِنْ لَا يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْآخِذِ مِنَ الْغَاصِبِ إِلَّا بِعِلْمِهِ بِالْغَصْبِ، حَتَّى يَصْدُقَ عَلَيْهِ مَعْنَى الْغَصْبِ، أَوْ إِنْ جَهِلَ بِهِ وَكَانَتْ يَدُ الْوَاضِعِ فِي أَصْلِهَا يَدَ ضَمَانٍ، كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُقْتَرِضِ وَالسَّائِمِ؛ لِأَنَّهُ تَعَامَلَ مَعَ الْغَاصِبِ عَلَى الضَّمَانِ، فَلَمْ يَغُرَّهُ. أَمَّا

إِنْ جَهِلَ الْوَاضِعُ يَدَهُ عَلَى الْمَغْصُوبِ بِالْغَصْبِ، وَكَانَتْ يَدُهُ يَدَ أَمَانَةٍ بِلَا اتِّهَابٍ، كَوَدِيعٍ وَمُضَارِبٍ، فَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ دُونَ الْآخِذِ، لِأَنَّهُ تَعَامَلَ مَعَ الْغَاصِبِ عَلَى أَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ يَدِ الْغَاصِبِ. وَأَمَّا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ لَيْسَتْ يَدَ ضَمَانٍ إِلَّا أَنَّ أَخْذَهُ الشَّيْءَ لِلتَّمَلُّكِ. وَعَلَى هَذَا، فِي حَالَةِ الْجَهْلِ بِالْغَصْبِ، يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ، وَالْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ فَقَطْ. وَأَمَّا الْوَدِيعُ وَالْمُضَارِبُ الْمُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَمِينٌ، فَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ الَّذِي دَفَعَهُ عَلَى الْغَاصِبِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي تَضْمِينِ الْغَاصِبِ أَوِ الْآخِذِ مِنْهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat: Penguasaan suatu harta yang muncul dari penguasaan orang yang *ghasab* merupakan penguasaan pertanggung jawaban, meski orang yang menguasainya tidak mengetahui peng*ghasab*an, karena ia melakukan penguasaan harta milik orang lain tanpa seizinnya, sementara ketidaktahuan bukan merupakan faktor yang menggugurkan pertanggungjawaban, namun hanya menggugurkan dosanya. Sebab itu, pemilik harta boleh menagih salah satunya yang dikehendakinya. Namun pertanggungjawaban tidak tetap bagi pengambilnya dari orang yang *ghasab* kecuali sebab ia mengetahui *ghasab* tersebut, sehingga subtansi *ghasab* tidak benar terbebankan kepadanya. Atau ia tidak mengetahui *ghasab* sementara pada asalnya penguasaan Si Pengambil merupakan penguasaan pertanggungjawaban, seperti peminjam, pembeli, penghutang, dan orang yang menawar, sebab ia pada asalnya ber*mu'amalah* dengan pelaku *ghasab* dengan penguasaan pertanggungjawaban, sehingga pelaku *ghasab* tidak menipunya. Adapun bila penguasa barang *ghasab*an tidak mengetahui *ghasab*nya sementara penguasaannya merupakan amanah tanpa menerima suatu pemberian, seperi orang yang dititipi atau pelaku akad *mudharabah*, maka pertanggungjawabannya terbebankan kepada pelaku *ghasab*, tidak ke pengambilnya. Adapun orang yang menerima suatu pemberian, maka menurut *al-Azhar* tetapnya pertanggungjawaban terbebankan kepadanya, karena meski penguasannya bukan merupakan penguasaan pertanggungjawaban, namun pengambilannya pada suatu harta bertujuan untuk memilikinya. Berdasarkan hal ini, ketika dalam kondisi tidak mengetahui *ghasab*, menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah pertanggungjawaban terbebankan ke peminjam, penerima pemberian, dan orang yang disedekahi saja. Adapun orang yang dititipi suatu barang, pelaku akad *mudharabah*, yang dipertimbangan masing-masing mereka

merupakan orang yang dipercaya, sehingga pertanggungjawaban atas barang yang diserahkannya ada pada pelaku *ghasab* menurut masing-masing Hanafiyah dan Syafi'iyah. Tidak ada perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang pertanggungjawaban pelaku *ghasab* atau orang yang mengambil darinya dalam kondisi apapun.

e. *Al-Bahr ar-Ra`iq*, V/259:

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا قَصَّرَ الْمُتَوَلِّي فِي شَيْءٍ من مَصَالِحِ الْوَقْفِ، هَلْ يَضْمَنُ؟ قُلْتُ إِنْ كَانَ فِي عَيْنٍ ضَمِنَهَا، وَإِنْ كَانَ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَضْمَنُ. قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ فَلَمْ يَحْفَظْهُ الْقَيِّمُ حَتَّى ضَاعَتْ خَشَبَةٌ يَضْمَنُ اشْتَرَى الْقَيِّمُ من الدَّهَّانِ دُهْنًا وَدَفَعَ الثَّمَنَ ثُمَّ أَفْلَسَ الدَّهَّانُ بَعْدُ لَمْ يَضْمَنْ اهـ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ امْتَنَعَ الْمُتَوَلِّي عَنْ تَقَاضِي مَا عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ لَا يَأْثَمُ. فَإِنْ هَرَبَ بَعْضُ الْمُتَقَبِّلِينَ بَعْدَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَالٌ كَثِيرٌ بِحَقِّ الْقَبَالَةِ لَا يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّي اهـ

Bila kamu bertanya: "*Ketika Mutawalli ceroboh terkait suatu kemaslahatan wakaf, apakah dia menanggung gantinya?*", maka aku jawab: "*Bila terkait barang maka ia menanggungnya, dan bila terkait tanggungan, maka ia tidak menanggungnya.*" Mahmud bin Ahmad al-Qunawi (w. 770 H) dalam *Bughyah al-Qunyah fi al-Fatawa* berkata: "*Ada masjid roboh, lalu Qayyim tidak menjaganya sehingga kayunya sia-sia, maka ia menanggungnya. Qayyim membeli minyak dari tukang minyak, dan menyerahkan pembayaran padanya. Setelah itu Si Tukang Minyak bangkrut, maka ia tidak menanggungnya.*" Sekian kata al-Qunawi. Dalam *al-Fatawa al-Bazaziyah* disebutkan: "*Bila Mutawalli enggan menerima suatu apapun atas nama Mutaqabbilin (orang-orang yang dirawatnya), maka ia tidak berdosa. Bila sebagian Mutaqabbilin lari setelah berkumpulnya harta yang banyak pada Mutawalli sebab hak merawat anak, maka Mutawalli tidak menanggungnya.*" Sekian kutipan dalam *al-Bazaziyah*.

f. Referensi lain:
   1) *Hasyiyah Ibn Abidin*, V/417
   2) *Al-Bahr ar-Ra`iq*, XIV/454

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MAUDHU'IYAH

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MAUDHU'IYAH PWNU JAWA TIMUR
di PP As-Sunniyyah Kencong Jember
09-10 Jumadil Ula 1433 H/
31 Maret-01 April 2012 M

1. Kriteria Faham Keagamaan Sempalan
2. Kekerasan Atas Nama Agama

MUSHAHIH

KH. Bashori Alwi
KH. Mahrus Mariyani

PERUMUS

KH. Firjaun Barlaman

MODERATOR

KH. Saifuddin Zuhri

NOTULEN

KH. Achmad Shampton Masduqie, M.HI

1. Kriteria Faham Keagamaan Sempalan

Deskripsi Masalah

Konflik di akar rumput (masyarakat lapis bawah) sering dipicu oleh klaim faham keagamaan tertentu dianggap sesat, menyimpang atau berperilaku *bid'ah*. Seringkali sulit diupayakan titik temu karena masing-masing kelompok menganggap dirinya benar.

Pertanyaan

a. Adakah kriteria normatif *syar'i* guna memastikan bahwa faham keagamaan tertentu sesat, menyimpang atau tergolong *bid'ah*, baik pada aspek aqidah, ibadah, perilaku keagamaan dan tradisi budaya yang dilestarikan?

b. Kecenderungan mengkafirkan (*takfiri*) yang bersifat terbuka, atau *bithanah/taqiyyah*, menuduh tidak *kaffah* bila belum menformalkan syari'at, mungkinkah dieliminasi lewat solusi *at-Taqrib baina al-Madzahib wa ath-Thaifiyah*?

c. Budaya *ngelarung* sesajen, memasang tumbal, tidak melewati gunung *pegat* dan sejenisnya, apakah berlawanan dengan aqidah?

Jawaban

a. Ada, manakala sebuah aliran itu tidak sesuai dengan ruh/nafas al-Quran, al-Hadits, *ijma'* atau *atsar* maka disebut *bid'ah dlalalah*/sesat.

b. *Tafsil*: dalam hal aqidah tidak mungkin, hal-hal yang bersifat *furu'iyah* masih mungkin dilakukan *taqrib bainal madzahib*.

c. Budaya di Indonesia sebelum Islam banyak sekali, karenanya selama meyakini bahwa *muatsir*nya adalah Allah, maka melestarikan budaya tersebut tidak bertentangan, dengan catatan:

   1) Budaya yang dalam proses pelaksanaannya mengandung unsur *tabdzir maal* harus diluruskan ke arah yang dibenarkan oleh *syara'* (misal larung dijadikan sedekah fuqara dan lain-lain).

   2) Bila ada indikasi perilakunya menunjukkan bahwa *muatsir*nya selain Allah maka tidak dapat ditolelir.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Sullam at-Taufiq*, 4:

إِنَّ كُلَّ اعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى اسْتِهَانَةٍ أَوِ اسْتِخْفَافٍ بِاللهِ أَوْ كُتُبِهِ أَوْ رُسُلِهِ أَوْ مَلَائِكَتِهِ أَوْ شَعَائِرِهِ أَوْ مَعَالِمِ دِيْنِهِ أَوْ أَحْكَامِهِ أَوْ وَعْدِهِ أَوْ وَعِيْدِهِ كُفْرٌ.

Sungguh setiap keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan pada penghinaan atau meremehkan pada Allah, kitab-kitab, rasul-rasul,

malaikat, syiar-syiar, ajaran agama, hukum-hukum, janji atau ancaman-Nya itu dapat menyebabkan kekufuran.

b. *Al-Milal wa an-Nihal*, 9:

وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً النَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَالْبَاقُوْنَ هَلْكَى قِيْلَ وَمَنِ النَّاجِيَةُ؟ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قِيْلَ وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِيْ.

Nabi ﷺ mengabarkan: *"Umatku akan bercerai-berai pada tujuh puluh tiga golongan; satu golongan selamat, sedangkan yang lain celaka."* Dikatakan, *"Siapakah yang selamat?"* Nabi bersabda: *"Ahlus sunnah wal jamaah"*; dikatakan, *"Apa sunnah dan jamaah itu?"* Nabi bersabda: *"Sesuatu yang aku dan para sahabatku amalkan, pada hari ini."*

c. *Al-Kawakib al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar*, 32:

(فَصْلٌ) وَاعْلَمُوْا أَنَّ إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمِ الشَّيْءِ بِالصِّحَّةِ أَوِ الْفَسَادِ فَهُوَ حَقٌّ مَقْطُوْعٌ بِهِ لَايَجُوْزُ مُخَالَفَتُهُمْ وَيَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(Pasal) ketahuilah, sungguh *ijma'* ulama menetapkan hukum sesuatu dengan sah atau *fasad*, maka itu kebenaran yang dipastikan, tidak boleh menyelisihi mereka, dan wajib bagi kita mengikuti mereka. Nabi ﷺ bersabda: *"Orang yang memisahkan diri dari jamaah kira-kira satu jengkal, maka sungguh ia melepas jerat Islam dari lehernya."*

d. *Hasyiyah I'anah ath-Thalibin*, 1/313:

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِيْ فَتْحِ الْمُبِيْنِ، فِيْ شَرْحِ قَوْلِهِ: مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، مَا نَصُّهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: مَا أَحْدَثَ وَخَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثَرًا فَهُوَ الْبِدْعَةُ الضَّالَّةُ، وَمَا أَحْدَثَ مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْبِدْعَةُ الْمَحْمُوْدَةُ.

Ibn Hajar berkata dalam *Fath al-Mubin*; tentang penjelasan sabda Nabi ﷺ: *"Barangsiapa yang memperbarui dalam perkaraku ini, sesuatu yang tidak ada darinya, maka ia tertolak"*, yang nashnya adalah: *"Asy-Syafi'i* ‎رضي الله عنه *berkata: "Sesuatu yang baru dan menyelisihi kitab, sunnah, ijma', atau atsar, maka ia bid'ah yang sesat. Sedangkan sesuatu yang baru dari kebaikan, dan tidak menyelisihi sesuatu dari hal itu, maka ia bid'ah yang terpuji."*

e. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 106:

وَمِنْهَا مَنْ حُكِمَ بِإِيْمَانِهِ لَا يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا تَكَلَّمَ أَوِ اعْتَقَدَ أَوْ فَعَلَ مَا فِيْهِ تَكْذِيْبٌ لِلنَّبِيِّ فِي شَيْءٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ ضَرُوْرَةً، وَقَدَرَ عَلَى تَعَقُّلِهِ، أَوْ نَفَى الْاِسْتِسْلَامَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، كَالْاِسْتِخْفَافِ بِهِ أَوْ بِالْقُرْآنِ.

Di antaranya, orang yang dihukumi dengan imannya tidak dihukumi kufur kecuali apabila berbicara, meyakini atau berbuat sesuatu yang mengandung unsur pendustaan kepada Nabi ﷺ di dalam sesuatu yang disepakati secara pasti, sementara ia mampu memahaminya, atau ia menafikan penyerahan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti halnya meremehkan Allah, atau meremehkan al-Qur'an.

f. *Raudhah ath-Thalibin*, X/64:

وَكَذَا مَنْ جَحَدَ جَوَازَ بِعْثَةِ الرُّسُلِ أَوْ أَنْكَرَ نُبُوَّةَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَوْ كَذَّبَهُ أَوْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ مُجْمَعًا عَلَيْهَا أَوْ زَادَ فِي الْقُرْآنِ كَلِمَةً وَاعْتَقَدَ أَنَّهَا مِنْهُ أَوْ سَبَّ نَبِيًّا أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِ أَوِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّمًا بِالْإِجْمَاعِ كَالْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا بِالْإِجْمَاعِ.

Begitu juga orang yang ingkar atas kebolehan terutusnya para Rasul, mengingkari kenabian para Nabi ﷺ, mendustakannya, ingkar pada ayat al-Qur'an yang disepakati, menambahi kalimat dalam al-Qur'an dan meyakini kalimat itu bagian dari al-Qur'an, mencaci Nabi, meremehkan padanya, menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh *ijma'* seperti *khamr* dan sodomi, atau mengharamkan sesuatu yang halal oleh *ijma'*.

g. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, I/2835:

مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ تُجَاهَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَأْمُرُوْا أَهْلَ الْبِدَعِ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحُضُّوْهُمْ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالْإِقْلَاعِ عَنِ الْبِدْعَةِ وَالْبُعْدِ عَنْهَا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ولقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ- مَرَاحِلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِمَنْعِ الْبِدْعَةِ. أ- التَّعْرِيْفُ بِبَيَانِ الصَّوَابِ مِنَ الْخَطَإِ بِالدَّلِيْلِ. ب- الْوَعْظُ بِالْكَلَامِ الْحَسَنِ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. ج- التَّعْنِيفُ وَالتَّخْوِيفُ مِنَ الْعِقَابِ الدُّنْيَوِيِّ وَالْأُخْرَوِيِّ بَيَانُ أَحْكَامِ ذَلِكَ فِيْ أَمْرِ بِدْعَتِهِ. د- الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ مِثْلَ كَسْرِ الْمَلَاهِيْ وَتَمْزِيْقِ الْأَوْرَاقِ وَفَضِّ الْمَجَالِسِ. التَّخْوِيْفُ وَالتَّهْدِيْدُ بِالضَّرْبِ الَّذِيْ يَصِلُ إِلَى التَّعْزِيْرِ وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِلْإِمَامِ أَوْ بِإِذْنِهِ لِئَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا ضَرَرٌ أَكْبَرُ مِنْهَا.

Sesuatu yang wajib bagi muslimin melawan ahli *bid'ah*- wajib bagi kaum muslim dari penguasa urusan dan selain mereka untuk memerintah ahli *bid'ah* dengan baik, mencegah mereka dari kemungkaran, mendorong mereka agar mengikuti sunnah dan mencabut dari *bid'ah*, serta menjauhi darinya. Karena firman Allah ﷻ: *"Dan jadilah kalian umat yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran; mereka ialah orang-orang yang beruntung."* Dan firman Allah ﷻ: *"Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah kekasih sebagian lain yang memerintah kebaikan dan mencegah dari kemungkaran."*

Fase-fase *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mencegah *bid'ah*:
1. Mengingatkan dengan cara menjelaskan kebenaran dari kesalahan dengan menggunakan dalil. 2. Menasehati dengan ungkapan yang baik, sesuai firman Allah ﷻ: *"Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mauizhah hasanah."* 3. Peringatan keras dan menakut-nakuti dari siksa dunia dan akhirat; menjelaskan hukum-hukum tersebut dalam tindakan *bid'ah*nya. 4. Mencegah dengan paksa seperti mematahkan alat musik, merobek kertas-kertas dan menjungkalkan tempat duduk. Menakut-nakuti dan mengancam dengan pukulan yang sampai pada *ta'zir*. Fase ini tidak layak kecuali bagi imam atau atas seizinnya, supaya tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar darinya.

h. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, I/102:

وَالْبِطَانَةُ اصْطِلَاحًا : خَاصَّةُ الرَّجُلِ الْمُقَرَّبُوْنَ الَّذِيْنَ يُفْضِيْ إِلَيْهِمْ بِأَسْرَارِهِ.

Bithanah menurut istilah: orang dekat seseorang, yaitu orang-orang dekat yang yang menjadi tumpuan hati tentang rahasia-rahasianya.

i. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 128:

(مَسْأَلَةُ ي) مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ مَنْ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَعُصِمَ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَمْ يُكْشَفْ حَالُهُ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ مَعْنَى مَا تَلَفَّظَ بِهِ. وَمِنْهَا أَنَّ الْإِيْمَانَ الْمُنْجِيْ مِنَ الْخُلُوْدِ فِي النَّارِ التَّصْدِيْقُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ، فَمَنْ مَاتَ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ وَلَمْ يَدْرِ غَيْرَهُ مِنْ تَفَاصِيْلِ الدِّيْنِ فَنَاجٍ مِنَ الْخُلُوْدِ فِي النَّارِ،

وَإِنْ شَعَرَ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَبَلَغَهُ بِالتَّوَاتُرِ لَزِمَهُ بِاعْتِقَادِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَى تَعَقُّلِهِ. وَمِنْهَا مَنْ حُكِمَ بِإِيْمَانِهِ لَا يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا تَكَلَّمَ أَوِ اعْتَقَدَ أَوْ فَعَلَ مَا فِيْهِ تَكْذِيْبٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْ شَيْءٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ ضَرُوْرَةً، وَقَدَرَ عَلَى تَعَقُّلِهِ، أَوْ نَفَى الْاِسْتِسْلَامَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، كَالْاِسْتِخْفَافِ بِهِ أَوْ بِالْقُرْآنِ. وَمِنْهَا أَنَّ الْجَاهِلَ وَالْمُخْطِئَ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَكْفُرُ بَعْدَ دُخُوْلِهِ فِي الْإِسْلَامِ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَهُ الْحُجَّةُ الَّتِيْ يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَهِيَ الَّتِيْ لَا تَبْقَى لَهُ شُبْهَةٌ يُعْذَرُ بِهَا.

(Masalah dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya) Kaidah-kaidah yang telah disepakati menurut *Ahlussunnah*, Sungguh orang yang mengucapkan dua syahadat itu dihukumi beragama Islam, dijaga darah dan hartanya, tidak dibuka kepribadiannya, tidak ditanya tentang makna sesuatu yang diucapkannya. Di antaranya, sungguh iman yang dapat menyelamatkan dari keabadian dalam neraka ialah membenarkan atas ke-Esa-an dan utusan. Orang yang meninggal dengan meyakini hal itu, namun tidak mengetahui secara detail perincian-perincian agama, maka ia selamat dari keabadian dalam neraka. Jika merasa telah sesuai yang disepakati ulama, dan telah sampai kepadanya secara *tawatur*, maka wajib baginya untuk meyakini, apabila ia mampu memahaminya. Di antaranya, orang yang dihukumi iman itu tidak kufur kecuali apabila berbicara, meyakini atau berbuat suatu pendustaan terhadap Nabi ﷺ dalam urusan-urusan yang disepakati ulama secara pasti, dan mampu memahaminya, atau menafikan penyerahan diri pada Allah dan Rasul-Nya, seperti meremehkan terhadap-Nya atau terhadap al-Qur'an. Di antaranya, orang bodoh dan orang yang bersalah dari umat ini, tidak kufur setelah masuk Islam dengan sesuatu yang timbul darinya, yakni hal-hal yang dapat mengkufurkan, sehingga menjadi jelas alasan yang menyebabkan kufur penentangnya, yaitu hal-hal yang tidak terdapat keserupaan yang dapat ditolerir.

j. *Mafahim Yajib an Tushahhah*, 5:

يُخْطِئُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَصْلَحَهُمُ اللهُ فِيْ فَهْمِ حَقِيْقَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِيْ تُخْرِجُ صَاحِبَهَا عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَتُوْجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِالْكُفْرِ فَتَرَاهُمْ يُسَارِعُوْنَ إِلَى الْحُكْمِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِالْكُفْرِ لِمُجَرَّدِ الْمُخَالَفَةِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا الْقَلِيْلُ وَنَحْنُ نَتَلَمَّسُ لِهٰؤُلَاءِ الْعُذْرَ تَحْسِيْنًا لِلظَّنِّ وَنَقُوْلُ لَعَلَّ نِيَّتَهُمْ حَسَنَةٌ مِنْ دَافِعِ وَاجِبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلٰكِنْ فَاتَهُمْ أَنَّ وَاجِبَ الْأَمْرِ

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لَابُدَّ فِي أَدَائِهِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَإِذْ اقْتَضَى الْمُجَادَلَةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ تَكْفِيرِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِمَا فِيهِ نَفْيُ الصَّانِعِ الْقَادِرِ جَلَّ وَعَلَا أَوْ شِرْكٌ جَلِيٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ إِنْكَارُ النُّبُوَّةِ أَوْ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَوْ إِنْكَارُ مُتَوَاتِرٍ أَوْ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ ضَرُورَةً مِنَ الدِّينِ.

Banyak manusia melakukan kesalahan, –semoga Allah memperbaiki mereka– dalam memahami hakikat sebab-sebab yang bisa mengeluarkan pelaku dari ranah Islam, dan menetapkan hukum kufur padanya. Kamu melihat mereka tergesa-gesa menyimpulkan hukum kufur pada muslim, gara-gara sekedar perselisihan, sehingga tidak tersisa kaum muslim di atas muka bumi kecuali minoritas. Kita toleran terhadap mereka, karena memperbaiki persangkaan, kita berkata mudah-mudahan niat mereka itu baik, yakni menjalankan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*, akan tetapi mereka lupa, bahwa kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* harus disertai dengan hikmah (kata yang bijak) dan *mauizhah hasanah*. Bila menuntut perdebatan, maka harus dengan cara debat yang lebih baik... Sungguh sah *ijma'* atas larangan mengkafirkan seorang ahli kiblat (muslim) kecuali dengan sesuatu yang menafikan sang Pencipta yang Kuasa ﷻ; atau syirik yang jelas dan tidak mungkin ditakwil, atau mengingkari kenabian, mengingkari sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama, atau mengingkari ke*mutawatir*an atau sesuatu yang disepakati secara pasti dari agama.

k. *Ghayah at-Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad*, 1/149:

(مَسْأَلَةٌ): إِذَا سَأَلَ رَجُلٌ آخَرَ: هَلْ لَيْلَةُ كَذَا أَوْ يَوْمُ كَذَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ أَوِ النَّقْلَةِ؟ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ، لِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ اعْتِقَادِ ذَلِكَ وَزَجَرَ عَنْهُ زَجْرًا بَلِيغًا، فَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ يَفْعَلُهُ، وَذَكَرَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُنَجِّمُ يَقُولُ وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إِلَّا اللهُ، وَلَكِنْ أَجْرَى اللهُ الْعَادَةَ بِأَنَّهُ يَقَعُ كَذَا عِنْدَ كَذَا، وَالْمُؤَثِّرُ هُوَ اللهُ ﷻ، فَهَذَا عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ، وَحَيْثُ جَاءَ الذَّمُّ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ تَأْثِيرَ النُّجُومِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ. وَأَفْتَى الزَّمْلَكَانِيُّ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِتَحْرِيمِ الضَّرْبِ بِالرَّمْلِ وَبِالْحَصَى وَنَحْوِهَا. قَالَ حُسَيْنٌ الْأَهْدَلُ: وَمَا يُوجَدُ مِنَ التَّعَالِيقِ فِي الْكُتُبِ مِنْ ذَلِكَ فَمِنْ خُرَافَاتِ بَعْضِ الْمُنَجِّمِينَ وَالْمُتَحَذْلِقِينَ وَتُرَّهَاتِهِمْ

لَا يَحِلُّ اعْتِقَادُ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنَ الْاِسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ، وَمِنْ جُمْلَةِ الطِّيَرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ

(*Masalah*) Apabila lelaki lain bertanya: Apakah malam ini atau hari itu pantas untuk akad atau berpindah? Maka tidak butuh jawaban, karena *Syari'* melarang meyakini hal terrsebut, dan mencegah darinya secara dahsyat. Maka tidak ada anggapan pada orang yang mengerjakannya. Ibn al-Farkah menyebut dari asy-Syafi'i, sungguh jika ahli perbintangan berkata dan meyakini bahwa tidak mampu mempengaruhi kecuali Allah, tapi Allah memberlakukan adat, bahwa akan terjadi sebuah peristiwa, ketika demikian. Dzat yang mempengaruhi adalah Allah ﷻ; maka hal ini, menurutku tidak masalah, Sekira muncul celaan yang ditujukan pada orang yang meyakini karena pengaruh bintang dan selainnya dari para makhluk. Az-Zamlakany berfatwa dengan mengharamkan secara mutlak. Ibn Shalah berfatwa atas keharaman memukul dengan debu, kerikil dan semacamnya. Husain al-Ahdal berkata: *"Ta'liq-ta'liq yang ditemukan dari kaitan-kaitan di dalam kitab-kitab dari hal seperti itu, maka merupakan khurafat ahli perbintangan dan orang-orang yang suka menonjolkan ilmunya. Barang sepele mereka tidak halal keyakinan tersebut, yaitu menganggap divisi dengan (anak) panah, dan termasuk ramalan yang dilarang. Sungguh Ali dan ibn Abbas telah melarang darinya."*

1. *Busyra al-Karim*, 703:

وَيَحْرُمُ الذَّبْحُ تَقَرُّبًا إِلَى سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عِنْدَ لِقَائِهِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ قَصَدَ الْاِسْتِبْشَارَ بِقُدُومِهِ فَلَا بَأْسَ أَوْ لِيُرْضِيَ غَضْبَانًا جَازَ لِأَنَّهُ لَايَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَضْبَانِ بِخِلَافِ الذَّبْحِ لِنَحْوِ الصَّنَمِ وَلَوْ ذَبَحَ لِلْجِنِّ حَرُمَ إِلَّا إِنْ قَصَدَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ لِيَكْفِيَهُ شَرَّهُ فَيُسَنُّ بَلْ لَوْ ذَبَحَ لَا بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ وَلَا إِلَى الْجِنِّ بَلْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ فَهُوَ كَالذَّبْحِ لِإِرْضَاءِ غَضْبَانَ أَفَادَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَنُقِلَ فِي الْأَخِيرَةِ عَنْ أَبِي مَخْرَمَةَ وَغَيْرِهِ الْحُرْمَةُ وَلَكِنْ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ عَدَمِهَا هُوَ الْقِيَاسُ كَمَا مَرَّ.

Haram menyembelih untuk mendekatkan diri pada sulthan atau lainnya, ketika bertemu dengannya, sebab alasan yang telah lalu. Jika bertujuan menyenangkan atas kehadirannya, maka tidak masalah; atau karena meraih kerelaan orang yang sedang marah, maka boleh; karena tidak mendekatkan diri pada orang yang sedang marah dengannya. Berbeda dengan penyembelihan karena berhala. Apabila menyembelih untuk jin, maka hukumnya haram, kecuali jika bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mencegah dari keburukannya. Maka hal tersebut

disunahkan, bahkan jika menyembelih tidak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak kepada jin, akan tetapi untuk menolak keburukan mereka, maka hal itu seperti menyembelih untuk merelakan seseorang yang marah. Keterangan tersebut dijelaskan dalam *ar-Raudh* dan *Syarh*nya. Dinukil dari Abu Makhramah dan selainnya bahwa di dalam masalah terakhir hukumnya haram; akan tetapi keterangan yang telah berlalu dari *Syarh ar-Raudh* yaitu ketidakharaman merupakan *qiyas*, sebagaimana yang telah lewat.

m. *Hamisy Fath al-Wahab*, II/15:

وَمِنْهَا الْإِسْتِعَانَةُ بِالْأَرْوَاحِ الْأَرْضِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الرِّيَاضَةِ وَقِرَاءَةِ الْعَزَائِمِ إِلَى حَيْثُ يَخْلُقُ اللهُ تَعَالَى بِمَحْضِ ذٰلِكَ عَلَى سَبِيْلِ جَرْيِ الْعَادَةِ بَعْضَ خَوَارِقَ وَهٰذَا النَّوْعُ قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ أَنَّهُ كُفْرٌ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ مَعْرِفَةُ صِدْقِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْإِلْتِبَاسِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ الْعَادَةُ الْإِلٰهِيَّةُ جَرَتْ بِصَرْفِ الْمُعَارِضِيْنَ لِلرُّسُلِ ... ثُمَّ التَّحْقِيْقُ أَنْ يُقَالَ إِنْ كَانَ مَنْ يَتَعَاطَى ذٰلِكَ خَيْرًا مُتَشَرِّعًا فِيْ كَامِلِ مَا يَأْتِيْ وَيَذَرُ وَكَانَ مَنْ يَسْتَعِيْنُ بِهِ فِي الْأَرْوَاحِ الْخَيِّرَةِ وَكَانَتْ عَزَائِمُهُ لَا تُخَالِفُ الشَّرْعَ وَلَيْسَ لِمَا يَظْهَرُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْخَوَارِقِ ضَرَرٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَحَدٍ فَلَيْسَ ذٰلِكَ مِنَ السِّحْرِ بَلْ مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْمَعُوْنَةِ وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ إِنْ تَعَلَّمَهُ لِيَعْمَلَ بِهِ بَلْ يَكْفُرُ إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ ذٰلِكَ فَإِنْ تَعَلَّمَهُ لِيَتَوَقَّاهُ فَمُبَاحٌ وَإِلَّا فَمَكْرُوْهٌ.

Di antaranya, meminta tolong pada roh-roh bumi dengan laku tirakat, dan membaca *azimah-azimah* (jimat), sekiranya sesuai pemberlakuan *sunnatullah*, setelah itu menciptakan sebagian hal di luar adat. Terkait kasus ini, al-Muktazilah berkata: *"Sungguh hal itu merupakan kekufuran, karena tidak mungkin mengetahui kebenaran para Rasul ﷺ bersamanya, karena terdapat keserupaan."* Pendapat tersebut ditolak, dengan alasan bahwa hal itu merupakan *adat ilahi* yang berlaku bagi orang-orang yang menentang para Rasul... Kemudian *tahqiq*nya hendaknya dikatakan, jika pelakunya orang baik, yang menjalankan syariat dalam kesempurnaan perkara yang dikerjakan dan ditinggalkannya, sedangkan roh-roh yang dimintai tolong adalah roh-roh baik, jimat-jimatnya tidak menyelisihi syara', dan *khariqul adat* yang keluar dari hal itu tidak membahayakan seseorang secara syar'i, maka hal itu bukan termasuk sihir, akan tetapi merupakan rahasia-rahasia dan pertolongan Allah. Apabila tidak, maka tindakan tersebut haram, bila ia mempelajari untuk mengerjakannya. Bahkan kufur, andai meyakini kehalalannya. Jika ia mempelajarinya

untuk menjaga diri darinya maka boleh, sedangkan apabila tidak maka makruh.

n. *Qadha' al-Adab,* 441:

وَالضَّابِطُ فِيْ إِضَاعَةِ الْمَالِ أَنْ يَكُوْنَ لَا لِغَرَضٍ دِيْنِيٍّ وَلَا دُنْيَاوِيٍّ. فَمَتَى انْتَفَى هَذَانِ الْغَرَضَانِ مِنْ جَمِيْعِ وُجُوْهِهِمَا حَرُمَ قَطْعًا قَلِيْلًا كَانَ الْمَالُ أَوْ كَثِيْرًا. وَمَتَى وُجِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْغَرَضَيْنِ وُجُوْدًا لَهُ مَالٌ وَكَانَ الْإِنْفَاقُ لَائِقًا بِالْحَالِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيْهِ جَازَ قَطْعًا اهـ

Batasan dalam menyia-nyiakan harta ialah tidak karena tujuan agama dan tidak tujuan dunia. Ketika kedua tujuan ini tidak wujud dari semua bentuknya, maka haram secara pasti, baik harta sedikit atau banyak. Sedangkan ketika ditemukan salah satu tujuan itu, dengan wujud sebuah harta, dan penafkahan baik pada kondisi tersebut, serta tidak terdapat maksiat di dalamnya, maka boleh secara pasti.

o. *Siraj ath-Thalibin,* I/110:

وَمِنَ الْأَوَّلِ أَيْضًا مَا عَمَّ بِهِ الْإِبْتِلَاءُ مِنْ تَزْيِيْنِ الشَّيْطَانِ لِلْعَامَّةِ تَخْلِيَةُ حَائِطٍ أَيْ بِأَنْ يُخَلِّقُوْهُ بِالْخَلُوْقِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الطِّيْبِ أَوْ تَخْلِيْطُ عَمُوْدٍ وَتَعْظِيْمُ نَحْوِ عَيْنٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرَةٍ لِرَجَاءِ شِفَاءٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ وَقَبَائِحُ فِيْ هَذَا ظَاهِرَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْإِيْضَاحِ وَالْبَيَانِ اهـ

Bagian pertama juga, yaitu sesuatu yang sudah umum menjadi cobaan karena bujukan setan terhadap orang awam, adalah menghiasi tembok, maksudnya melumuri temboknya dengan berbagi macam *khuluq*, yaitu suatu macam wewangian, atau mencampur tiang dan mengagungkan sejenis benda, batu, atau pohon, untuk mengharap kesembuhan, atau terkabulnya hajat. Keburukan-keburukan dalam hal ini cukup jelas tidak perlu penjelasan dan keterangan.

p. *Siraj ath-Thalibin,* I/58:

أَمَّا وَضْعُ الطَّعَامِ وَالْأَزْهَارِ فِي الطُّرُوْقِ وَالْمَزَارِعِ أَوِ الْبُيُوْتِ لِرُوْحِ الْمَيِّتِ وَغَيْرِهِ فِي الْأَيَّامِ الْمُعْتَادَةِ كَيَوْمِ الْعِيْدِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِمَا وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُوْرِ الْمُحَرَّمَةِ وَمِنْ عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمِنْ عَمَلِ أَهْلِ الشِّرْكِ.

Sedangkan menaruh makanan dan menaburkan bunga-bunga di jalan-jalan, ladang-ladang atau rumah-rumah untuk roh mayat dan selainnya di hari-hari yang dibiasakan, seperti hari raya, hari jum'at dan lainnya. Semua itu merupakan bagian dari hal-hal yang diharamkan, termasuk

adat jahiliyah dan perbuatan ahli syirik.

2. Kekerasan Atas Nama Agama

Deskripsi Masalah

Stigma "atas nama agama" muncul karena kelompok pelaku kekerasan terdiri atas komunitas beragama. Motif dilakukan tindak kekerasan antara lain pelecehan lambang kebesaran agama (pembakaran mushaf al-Quran), reaksi atas penyimpangan ajaran (Ahmadiyah, Syi'ah, teologi Lia Eden), faham keagamaan yang eksklusif (LDII, Pengamal Shalawat Wahidiyah, MTA), karena pembelaan diri dan motifasi lain.

Pelaku mengatasnamakan tindakannya sebagai bentuk respon terhadap kemungkaran. Contoh praktisnya pembakaran lokalisasi PSK yang legal, *sweeping* tempat hiburan malam dan warung makanan di siang hari Ramadhan, perusakan tempat ibadah aliran sesat, penumpahan cairan legen, usaha menggagalkan aktifitas organisasi kelompok yang berseberangan.

Tindakan reaktif itu lebih didorong oleh sikap pihak berwajib (aparat keamanan) terkesan membiarkan, melindungi atau menfasilitasi dan lamban mengambil sikap.

Pertanyaan

Apakah batas suatu maksiat tergolong "kemungkaran" dan pada bentuk mana layak ditindak dengan kekerasan?

Jawaban

Kemungkaran adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kemungkaran yang boleh ditindak dengan kekerasan adalah kemungkaran yang tidak bisa dihentikan dengan cara persuasif dan dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran baru.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Ihya' 'Ulumiddin*, II/324:

الْأَوَّلُ كَوْنُهُ مُنْكَرًا وَنَعْنِيْ بِهِ أَنْ يَكُوْنَ مَحْذُوْرَ الْوُقُوْعِ فِي الشَّرْعِ وَعَدَلْنَا عَنْ لَفْظِ الْمَعْصِيَةِ إِلَى هَذَا لِأَنَّ الْمُنْكَرَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصِيَةِ إِذْ مَنْ رَأَى صَبِيًّا أَوْ مَجْنُوْنًا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرِيْقَ خَمْرَهُ وَيَمْنَعَهُ وَكَذَا إِنْ رَأَى مَجْنُوْنًا يَزْنِيْ بِمَجْنُوْنَةٍ أَوْ بَهِيْمَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِتَفَاحُشِ صُوْرَةِ الْفِعْلِ وَظُهُوْرِهِ بَيْنَ النَّاسِ بَلْ لَوْ صَادَفَ هَذَا الْمُنْكَرَ فِيْ خَلْوَةٍ لَوَجَبَ الْمَنْعُ مِنْهُ وَهَذَا لَا يُسَمَّى مَعْصِيَةً فِيْ حَقِّ الْمَجْنُوْنِ إِذْ مَعْصِيَةٌ لَا عَاصِيَ بِهَا مُحَالٌ.

Pertama: Adanya perkara yang diingkari *muhtasib* berupa kemunkaran, maksudnya perkara itu dilarang terjadi oleh *syara'*. Kita mengganti lafal maksiat menjadi lafal ini, karena perkara yang diingkari itu lebih umum daripada maksiat. Karena seseorang yang melihat anak kecil atau orang gila meminum arak, maka ia wajib menumpahkan arak dan mencegahnya. Begitu pula jika seseorang melihat orang gila berzina bersama wanita gila atau dengan binatang, maka ia wajib mencegahnya dari berbuat mesum. Hal itu, bukan karena buruknya bentuk perbuatan dan maraknya di antara manusia, akan tetapi jika secara kebetulan kemungkaran ini terjadi dalam kondisi sepi, maka wajib mencegah darinya. Hal ini tidak disebut maksiat dalam hak orang gila, karena kemaksiatan tanpa pelaku maksiat itu mustahil.

b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh,* VIII/473:

وَالْمُنْكَرُ: هُوَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ حَرَّمَتْهَا الشَّرِيْعَةُ سَوَاءٌ أَوَقَعَتْ مِنْ مُكَلَّفٍ أَمْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ، فَمَنْ رَأَى صَبِيًّا أَوْ مَجْنُوْنًا يَشْرَبُ خَمْرًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَهُ وَيُرِيْقَ خَمْرَهُ، وَمَنْ رَأَى مَجْنُوْنًا يَزْنِيْ بِمَجْنُوْنَةٍ أَوْ يَأْتِي بَهِيْمَةً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ، وَعَرَّفَ الْغَزَالِيُّ الْمُنْكَرَ: بِأَنَّهُ كُلُّ مَحْذُوْرِ الْوُقُوْعِ فِي الشَّرْعِ.

Kemungkaran ialah setiap maksiat yang diharamkan oleh syariat, baik dilakukan oleh orang *mukallaf* maupun yang bukan *mukallaf*. Seseorang yang melihat anak kecil atau orang gila meminum *khamr*, maka ia wajib mencegah dan menumpahkannya, dan orang yang melihat orang gila berzina bersama wanita gila atau menyodomi binatang, maka ia wajib mencegahnya. Al-Ghazali mendefinisikan kemungkaran dengan ungkapan: *"Kemungkaran ialah setiap perkara yang dihindari terjadi oleh syara'."*

c. *Is'ad ar-Rafiq,* I/66-67:

(وَقَهْرُهُ عَلَى) تَرْكِ (ذَلِكَ) وَالْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ تَارِكًا لَهُ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ (إِنْ قَدَرَ) الْمُنْكِرُ أَوِ الْآمِرُ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ التَّغْيِيْرِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّى فِيْ نَحْوِ إِرَاقَةِ الْخَمْرِ وَكَسْرِ آلَةِ اللَّهْوِ الْكَسْرَ الْفَاحِشَ إِلَّا إِذَا لَمْ تُرَقْ إِلَّا بِهِ أَوْ خَشِيَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْفُسَّاقُ وَيَمْنَعُوْهُ فَيَفْعَلُ حِيْنَئِذٍ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَوْ بِحَرْقٍ وَغَرْقٍ وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ مُطْلَقًا زَجْرًا وَتَعْزِيْرًا وَلَهُ فِيْمَنْ لَا يَنْكَفُّ بِخَشِنِ الْكَلَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ بِنَحْوِ يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْكَفَّ إِلَّا بِشَهْرِ سِلَاحٍ مِنْهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ فَعَلَ ذَلِكَ لَكِنْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

(Dan memaksa pelaku kemungkaran agar) meninggalkan (perbuatan itu) dan menjalankan kewajiban baginya, jika ia meninggalkannya akan tetapi tidak secara mutlak; bahkan (jika ia mampu), maksudnya orang yang mengingkari atau orang yang memerintah (padanya), maksudnya pada perubahan itu dan perkara yang disebutkan bersamanya. Wajib juga baginya berhati-hati dalam menumpahan *khamr*, misalnya dan mematahkan alat musik secara keras, kecuali bila tidak dapat tumpah kecuali dengan cara tertentu atau mengkhawatirkan orang-orang fasik akan menemukannya, dan mereka mencegahnya, maka ketika seperti itu ia harus melakukan tindakan yang semestinya, meskipun dengan cara membakar dan menghanyutkan. Imam harus bertindak demikian secara mutlak dengan mencegah dan men*ta'zir*, dibolehkan bagi imam memukulnya dengan semisal tangan dalam menghadapi orang yang tidak mau jera dengan ungkapan kasar. Jika tidak jera kecuali dengan menghantamkan senjata dari dirinya sendiri atau bersama jamaah, maka boleh mengerjakan hal itu, tapi atas seizin imam menurut *mu'tamad*.

d. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 251-252:

الرَّابِعُ: نَفْسُ الاِحْتِسَابِ وَلَهُ دَرَجَاتٌ: التَّعْرِيْفُ، ثُمَّ الْوَعْظُ بِالْكَلَامِ اللَّطِيْفِ، ثُمَّ السَّبُّ وَالتَّعْنِيْفُ، ثُمَّ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ، وَالْأَوَّلَانِ يَعُمَّانِ سَائِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْأَخِيْرَانِ مَخْصُوْصَانِ بِوُلَاةِ الْأُمُوْرِ، زَادَ ج: وَيَنْبَغِي كَوْنُ الْمُرْشِدِ عَالِمًا وَرِعًا وَحَسَنَ الْخُلُقِ، إِذْ بِهَا تَنْدَفِعُ الْمُنْكَرَاتُ وَتَصِيْرُ الْحِسْبَةُ مِنَ الْقُرُبَاتِ، وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، بَلْ رُبَّمَا تَكُوْنُ الْحِسْبَةُ مُنْكَرَةً لِمُجَاوَزَةِ حَدِّ الشَّرْعِ، وَلْيَكُنِ الْمُحْتَسِبُ صَالِحَ النِّيَّةِ، قَاصِدًا بِذَلِكَ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ، وَيَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

(Keempat) bentuk *ihtisab*; yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: mengingatkan, kemudian menasehati dengan tutur bahasa yang lembut, mencaci dan memperingatkan dengan keras, dan mencegah dengan paksa. Dua hal pertama itu umum untuk kaum muslim, sedangkan dua hal yang terakhir itu khusus bagi penguasa urusan. Alawi bin Saqaf bin Muhammad al-Ja'fari al-Alawiyyun al-Hadlramiyyun menambahkan: *"Sebaiknya orang yang memberi petunjuk itu alim, wira'i dan bagus budi pekerti, karena dengan sifat-sifat itu, akan tertolak kemungkaran-kemungkaran dan tindakan menjadi ibadah. Jika tidak, maka tidak diterima tindakannya; bahkan terkadang tindakan itu menjadi diingkari sebab melewati batas syara'. Hendaklah orang yang melakukan ihtisab bagus niatnya, bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah ﷻ, memantapkan kesabaran diri, dan percaya terhadap pahala di sisi Allah ﷻ."*

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR
di PP Ma'had Ilmi Wal 'Amal Tulungagung
27-28 Rabi'ul Awwal 1434 H/
08-09 Februari 2013 M

3. Pemilukada Langsung

PERUMUS

KH. Miftahul Akhyar (Rais Syuriyah PWNU)
KH. Syafrudin Syarif (Katib Syuriyah PWNU)
KH. Syariful Wafa (PCNU Tuban)
K. Ahmad Suhairi (PCNU Bangil)
KH. MB. Firjhon Barlaman (PW LBM NU)
KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I (PW LBM NU)

3. Pemilukada Langsung

A. Pandangan Umum

1. Ulama sebagai pewaris Nabi dalam menggali dan menyebarkan ilmunya, perjuangannya, keihlasannya, dan penanaman serta uswah atas akhlaq mulyanya, dipandang sebagai tokoh sentral dalam segala hal tanpa kecuali, termasuk di dalamnya adalah para kyai, ustadz, guru ngaji dan alumni pesantren. Hal ini karena beliau-beliau itu semua yang dipandang sebagai sosok panutan dalam segala hal, simbol kedamaian, ketentraman dan keberkahan dalam berbagai masalah.
2. Kegiatan maupun acara apa saja yang dapat menghadirkan para ulama menjadi dambaan dan kebanggan tersendiri. Tidak ketinggalan pula kegiatan yang bernuansa politik, bahkan kegiatan politik praktis pun tidak luput sasaran berebut dukungan dari para tokoh-tokoh sentral ulama, kyai, ustadz dan guru-guru ngaji. Bahkan di antara mereka ada yang langsung terlibat dalam dunia politik praktis, ikut berebut pengaruh dan dukungan dari masyarakat, bersaing dengan lawan-lawan politiknya.
3. Fenomena dukung mendukung calon yang dilakukan oleh beberapa kalangan ulama juga sering terjadi. Bahkan antara ulama atau kyai satu dengan lainnya terjadi perbedaan pilihan, yang berakibat saling berseberangan, sehingga oleh sebagian kalangan masyarakat dinilai tidak pantas. Dampak yang terjadi, masyarakat bingung mau mengikuti dan menghormati pilihan Ulama atau Kyai mana yang harus diikuti. Lebih ironis lagi di belakang ada sebagian kelompok masyarakat yang sudah berani menghembuskan kata *"Kalau urusan ngaji ya ikut ulama/ kyai, tapi kalau urusan pilitik iku siapa saja yang banyak mengasih uang"*. Ada pula yang berkata *"mereka dapat saya juga harus dapat"*. Hal ini barangkali yang menjadikan pilihan ulama/kyai tidak diikuti oleh masyarakat, bahkan dilawan dan dikalahkan oleh masyarakat. Harga diri dan keputusan ulama/kyai banyak ternodai dalam kancah politik.
4. Kondisi semacam ini jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan berimbas kepada fatwa hukum, nasihat dan *uswah hasanah* ulama/ kyai semakin luntur dan bahkan diabaikan masyarakat, mereka lebih senang berguru dan minta nasihat kepada dukun, paranormal, percaya klenik, mengundi nasib dan sesamanya dalam segala hal. Oleh sebab itu, Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur memandang sangat *urgent*, para ulama, kyai dan syuriyah menformulasikan konsep mengenai sikap yang terbaik dalam menghadapi setiap pemilu, pemilukada maupun pemilihan-pemilihan lainnya.

B. Prinsip dan Sikap NU Jawa Timur

1. PEMILU Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) merupakan proses demokrasi kenegaraan yang harus dilaksanakan dan harus disikapi dengan dewasa, cerdas, teliti dan proporsional demi kepentingan negara, khususnya masyarakat Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.
2. PEMILU Kepala Daerah, merupakan proses memilih pemimpin yang akan berpengaruh besar terhadap pembangunan dan budaya kehidupan masyarakat Kabupaten atau Kota di Jawa Timur serta akan dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat.
3. Dalam pelaksanaan PEMILU Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Wali Kota) PWNU Jawa Timur menghimbau seluruh masyarakat untuk berlaku adil, jujur, transparan dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak legal, apalagi *money politics* dan *black campaign* (kampanye hitam/menjelek-jelekkan) yang berpotensi terjadinya konflik horizontal.
4. Pengurus NU di semua tingkatan secara kelembagaan sebagai *jam'iyyah* tidak boleh melibatkan diri dalam proses PEMILU Kepala Daerah, baik pada tahap pencalonan, penetapan calon dan pemilihan. Dan jika sangat diperlukan untuk menjadi tim sukses salah satu calon, maka ia harus non aktif dari kepengurusan NU di semua tingkatan.
5. Bagi pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan hendaknya tidak ikut dukung mendukung secara aktif kepada salah satu pasangan calon dengan mengatasnamakan jam'iyah Nahdlatul Ulama'. Dan jika diperlukan, maka cukup dengan memberikan petunjuk, *irsyad/ taujih*.
6. Bagi seluruh warga NU wajib ikut berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya dalam mensukseskan Pemilu Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/wali Kota) dengan jalan datang ke tempat pemungutan suara untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.
7. Bagi warga NU yang menjadi bagian dari proses Pemilu Kepala Daerah, diharapkan berdasarkan pada kepentingan masyarakat secara umum, utamanya kepentingan *jam'iyah* Nahdlatul Ulama untuk lima tahun kedepan dan bukan kepentingan sesaat secara pribadi maupun golongan.
8. Bagi warga NU, terjadinya perbedaan pandangan terhadap para calon, harus diberi makna sebagai suatu hal yang wajar dan harus tetap dalam bingkai persaudaraan, tawadlu' *akhlak al-karimah* serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

9. Keutuhan dan kekokohan jama'ah dan jam'iyyah NU wajib dijaga dan merupakan syarat mutlak yang harus diusahakan semaksimal mungkin dalam menangkal kemungkinan munculnya konflik antar tokoh NU di semua tingkatan di seluruh Wilayah Jawa Timur, dengan saling berkomunikasi, bermusyawarah, dan bersilaturrahim.

C. Formalisasi Ulama

1. Memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah*.
2. Berpolitik secara santun, mengedepankan *akhlak karimah* serta menjaga persatuan dan kesatuan.
3. Mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum daripada kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
4. Mengayomi, melindungi, membimbing dan menjadi penengah dalam mensikapi setiap perbedaan.
5. Menguatkan posisi *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama' sebagai tempat silaturrahim dan bermusyawarah dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* menuju masyarakat yang Islami.
6. Tidak membawa *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama ke dalam ranah politik praktis atau sebaliknya ranah politik praktis terbawa ke dalam *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama'.

D. *Da'wah, Taujih wa Irsyad al-Ummah*

1. Bagi penyelenggara pemilu hendaknya menjalankan tugasnya dengan jujur, adil dan fair serta mensosialisaikan masing-masing pasangan calon lengkap dengan profilnya.
2. Bagi calon dilarang melakukan *black campaign* (kampanye hitam/ menjelek-jelekkan) maupun *money politic*, karena semua itu haram hukumnya.
3. Bagi semua pihak hendaknya melakukan *ijtihad* politik, *istikharah* dan musyawarah untuk memilih calon sesuai dengan petunjuk Islam, dengan kriteria *shidiq*, *'adalah*, *amanah*, *wafa' bil-'ahdi*, dan mampu memimpin.
4. bagi ulama hendaknya memberikan petunjuk, *taujih/irsyad* kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dibenarkan oleh syari'at Islam dalam segi aqidah, syari'ah, akhlaq dan *siyasah*.

E. Dasar Pengambilan Hukum

a. QS. Ali Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران: ١٥٩).

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mintakan lah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imran: 159).

b. QS. at-Taubat: 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (التوبة: ١٢٨).

"Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin." (QS. at-Taubat: 128).

c. QS. asy-Syu'ara: 215:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشعراء: ٢١٥).

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman." (Qs. asy-Syu'ara: 215).

d. *Tafsir ar-Razi*, I/65:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الأعراف: ١٩٩-٢٠٠) وَقَالَ فِي حم السَّجْدَةِ: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (فصلت: ٣٤) إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (فصلت: ٣٦) فَهَذِهِ الْآيَاتُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوا أَبَدًا فِي الْاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ.

"Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan Maka berlindunglah kepada Allah" (Qs. al-A'raf: 199-200). Dan Allah berfirman dalam surat Hamim as-Sajdah: *"Dan tidaklah sama*

kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." (Qs. Fhusshilat: 34)... *"Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (Qs. Fhusshilat: 36). Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sungguh para Nabi ﷺ selamanya dilindungi dari keburukan setan-setan dari jenis manusia dan jin.

e. *Al-Mu'jam al-Ausath li ath-Thabrani*, XIV/394:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ» عَالَ: افْتَقَرَ.

Dari Anas bin Malik, berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidak salah orang yang istikharah, tidak ada penyesalan bagi orang yang musyawarah dan tidak fakir orang yang sederhana."* Maksud kata عَالَ adalah butuh.

f. *Syu'b al-Iman li al-Baihaqi*, XVI/61:

عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (الْهَنَاتُ: الشُّرُوْرُ وَالْفَسَادُ، وَالشَّدَائِدُ وَالْأُمُوْرُ الْعِظَامُ)، فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَكَأَنَّمَا فَارَقَ بَيْنَ أُمَّتِيْ، فَاقْتُلُوْهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنَّ يَدَ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مُفَارِقِ الْجَمَاعَةِ يَرْكُضُ» وَقَالَ مَرَّةً: «عَلَى الْجَمَاعَةِ».

Dari Ziyad bin Alaqah dari Arfajah, berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Akan datang setelahku keburukan dan keburukan"* (الْهَنَاتُ ialah keburukan dan kerusakan, huru-hara dan urusan besar); *barang siapa di antara kalian melihat seseorang yang berpisah dari jamaah, maka seolah-olah ia berpisah di antara umatku, maka bunuhlah ia dimana pun berada, karena sungguh kuasa Allah bersama jamaah, dan sungguh setan berjalan bersama orang yang memisahkan diri dari jamaah.* Dan beliau bersabda sekali lagi, *bersamalah dengan jamaah.*

g. *Shahih Ibn Hibban*, XIX/158:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَأَمْرُهُمْ

جَمِيعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنَّ يَدَ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْتَكِضُ».

Ahmad bin Yahya bin Zuhair Batastur mengabarkan padaku, beliau berkata: Musa bin Abd ar-Rahman al-Masruqi menceritakan padaku, beliau berkata: Abd al-Hamid al-Hamani menceritakan kepadaku dari Yahya bin Ayyub dari Ziyad bin Alaqah dari Arfajah bin Syuraih al-Asyja'i, berkata: *"Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Akan datang setelahku keburukan dan keburukan; barang siapa di antara kalian melihat seseorang yang berpisah dari jamaah atau hendak mencerai-beraikan di antara umat Muhammad ﷺ dan ada segolongan orang yang memerintah mereka, maka bunuhlah ia dimana pun berada, karena sungguh kuasa Allah bersama jamaah, dan sungguh setan berjalan cepat-cepat bersama orang yang memisahkan diri dari jamaah."*

h. *Sunan at-Tirmidzi*, VIII/71:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ.

Abu Bakar bin Nafi' al-Bashri menceritakan padaku, al-Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepadaku, Sulaiman al-Madani menceritakan padaku, dari Abdullah bin Dinar dari ibn Umar sungguh Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sungguh Allah tidak mengumpulkan umatku, atau bersabda: umat Muhammad ﷺ atas kesesatan, sementara kuasa Allah bersama jamaah, barang siapa menyimpang maka ia menyimpang menuju ke neraka."*

i. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, I/220:

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ: مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ. قُلْتُ: وَأَصْلُ ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ. وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قَسَمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْأَصْنَافِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ، مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ. وَمِنْهَا: إِذَا أَرَادَ إِسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ مِنَ الدِّيوَانِ بِسَبَبٍ: جَازَ،

وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَمِنْهَا: مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يَنْصِبَ إِمَامًا لِلصَّلَاةِ فَاسِقًا، وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ، لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ. وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ.

Kaidah kelima: *Tasharruf* imam terhadap rakyat digantungkan kepada maslahat; kaidah ini di-*nash* oleh asy-Syafi'i dan beliau berkata: *Posisi imam dihadapan rakyat menempati posisi wali terhadap anak yatim.* Saya berkata: *Asal kaidah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunannya.* Beliau berkata: Abu al-Ahwash menceritakan padaku dari Abi Ishaq dari al-Bara' bin Azib berkata: Umar ﷺ berkata: "*Sungguh aku menempatkan diriku dari harta Allah di tempat wali anak yatim; ketika aku butuh maka aku mengambilnya, ketika aku dalam kondisi mudah maka aku mengembalikannya, dan ketika aku merasa cukup maka aku mencukupkan diri darinya.*" Di antara cabang-cabang masalahnya adalah apabila seseorang membagikan zakat kepada beberapa golongan maka diharamkan baginya melebihkan seseorang daripada selainnya, padahal kebutuhannya sama. Di antaranya: Apabila Imam ingin menghapus sebagian tentara dari buku catatan dengan suatu sebab maka dibolehkan, sementara apabila tanpa sebab maka tidak diperbolehkan; sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *ar-Raudlah*. Di antaranya: Keterangan yang disebutkan al-Mawardi: *Sungguh tidak boleh bagi pemerintah mengangkat imam shalat pada orang fasik, meski kita membenarkan shalat dibelakangnya, sebab hal itu hukumnya makruh. Pemerintah dituntut agar menjaga maslahat, sementara tidak ada maslahat dalam mengarahkan manusia pada perbuatan makruh.*

j. *Ghamz 'Uyun al-Basha`ir fi Syarh al-Asyhbah wa an-Nazha`ir*, II/289:

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فِي مَسْأَلَةِ صُلْحِ الْإِمَامِ عَنِ الظُّلَّةِ الْمَبْنِيَّةِ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ فِي مَوَاضِعَ، وَصَرَّحُوا فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْ قَاتِلِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَإِنَّمَا لَهُ الْقِصَاصُ، وَالصُّلْحُ وَعَلَّلَهُ فِي الْإِيضَاحِ بِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظِرًا، وَلَيْسَ مِنَ النَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّ الْعَفْوُ، وَأَصْلُهَا مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ: (إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا

أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ).

Kaidah kelima: *Tasharruf* imam terhadap rakyat digantungkan kepada maslahat; Sungguh para ulama menjelaskannya di berbagai tempat, di antaranya dalam kitab *ash-Shulh* dalam pembahasan *shulh* Imam terkait tempat berteduh yang dibangun di jalan umum. Al-Imam Abu Yusuf-*rahimahullahu*- menjelaskannya dalam kitab *al-Kharaj* di berbagai tempat, dan Ulama menjelaskannya dalam kitab *al-Jinayat*, bahwa Sultan tidak sah memberi grasi pada pembunuh korban yang tidak memiliki wali. Ia hanya berhak meng*qishash* dan *shulh*. Beliau membuat *illat* dalam *al-Idhah* bahwa ia boleh mengangkat *Nazhir*, dan pemberian grasi bagi orang yang berhak bukan merupakan *nazhar*. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari al-Bara', ia berkata: *"Umar ﷺ berkata: "Sungguh aku menempatkan diriku dari harta Allah di tempat wali anak yatim, saat aku butuh maka aku mengambilnya, saat aku dalam kondisi mudah maka aku mengembalikannya, dan ketika aku merasa cukup maka aku menahan diri."*

k. *Tafsir Haqi*, I/359:

وَذُكِرَ فِي الْخَالِصَةِ لَنْ يَهْلِكَ قَوْمٌ بِظُلْمِهِمْ وَإِنَّمَا أَهْلَكَهُمْ ظُلْمُ وُلَاتِهِمْ، قَالَ الشَّيْخُ الشَّهِيْرُ بِافْتَادَهْ أَفَنْدِيْ قُدِّسَ سِرُّهُ وَكَذَا الْحَالُ فِي الْإِرْشَادِ فَإِنَّ الضَّلَالَ وَالْفَسَادَ فِي الطَّالِبِيْنَ مِنْ فَسَادِ مُرْشِدِهِمْ فَمَا دَامَ الْمُرْشِدُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ يَحْفَظُ اللهُ تَعَالَى الطَّالِبَ مِنَ الضَّلَالِ فَإِنَّ نُزُوْلَ الْبَلَاءِ عَلَى قَوْمٍ مِنْ فَسَادِ رَئِيْسِهِمْ.

Dan disebutkan dalam *al-Khalishah*: *"Tidak akan rusak suatu kaum sebab kezhaliman mereka, akan tetapi sungguh kezhaliman penguasalah yang merusak mereka."* Syaikh yang terkenal dengan julukan Aftadah Afandi-*qaddasa sirrah*-berkata: *"Dan begitu pula perihal memberi petunjuk; sungguh kesesatan dan kerusakan para pelajar berakar dari kerusakan guru mereka; sehingga selama guru itu menetapi jalan yang lurus maka Allah ﷻ akan menjaga pelajar dari kesesatan. Karena sungguh turunnya bala' pada suatu kaum disebabkan oleh kerusakan pemimpin mereka"*.

l. *Tafsir al-Khazin*, IV/411 (Dar al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubra):

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (١٣) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨)

(قَوْلُهُ ﷻ: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ) أَيِ الَّذِيْ بَخِلَ بِهِ (إِذَا تَرَدَّى) أَيْ إِذَا مَاتَ، وَقِيْلَ هَوَى

فِي جَهَنَّمَ (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى) أَيْ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَ طَرِيقَ الْهُدَى مِنْ طَرِيقِ الضَّلَالَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا عَرَّفَهُمْ مَا لِلْمُحْسِنِ مِنَ الْيُسْرَى، وَمَا لِلْمُسِيْءِ مِنَ الْعُسْرَى أَخْبَرَهُمْ أَنَّ بِيَدِهِ الْإِرْشَادَ وَالْهِدَايَةَ وَعَلَيْهِ تَبْيِيْنُ طَرِيقِهَا، وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَالْإِضْلَالَ فَاكْتَفَى بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا.

"(11) *Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa*. (12) *Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk,* (13) *Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.* (14) *Maka, Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.* (15) *Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,* (16) *Yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).* (17) *Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,* (18) *Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya."* (Qs. al-Lail: 11-18).

(Firman Allah ﷻ: *"Hartanya tidak bermanfaat baginya"*), maksudnya: harta yang dibakhilinya, (*apabila ia telah binasa*), maksudnya ketika ia mati, menurut satu pendapat yaitu saat ia masuk ke neraka *Jahannam,* (*Sesungguhnya pada kamilah memberi petunjuk*), maksudnya sungguh pada kami urusan menjelaskan jalan petunjuk dari jalan kesesatan.

Maksudnya, ketika Allah memberitahukan manusia bahwa kemudahan untuk orang yang berbuat baik dan kesulitan untuk orang yang berbuat jahat, Allah mengabarkan pada mereka, bahwa petunjuk dan hidayah ada pada kekuasaanNya, begitu pula penjelasan cara meraihnya. Maksud firman Allah tersebut adalah: *"Sungguh petunjuk dan penyesatan hanya ada pada Kami"*, lalu Allah cukup menyebut salah satunya.

m. *Tafsir ar-Razi*, IX/438:

قَوْلُهُ: أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ أَيْ أَيْنَمَا يُرْسِلْهُ، وَمَعْنَى التَّوْجِيهِ أَنْ تُرْسِلَ صَاحِبَكَ فِي وَجْهٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الطَّرِيقِ. يُقَالُ: وَجَّهْتُهُ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ لَا يُحْسِنُ وَلَا يَفْهَمُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: هَلْ يَسْتَوِي هُوَ أَيْ هَذَا الْمَوْصُوفُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْأَرْبَعِ: وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْآمِرَ بِالْعَدْلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بِالنُّطْقِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ آمِرًا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا، لِأَنَّ الْأَمْرَ مُشْعِرٌ بِعُلُوِّ الْمَرْتَبَةِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مَعَ كَوْنِهِ قَادِرًا، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا حَتَّى يُمْكِنَهُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْعَدْلِ وَبَيْنَ الْجَوْرِ. فَثَبَتَ أَنَّ وَصْفَهُ بِأَنَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ يَتَضَمَّنُ وَصْفَهُ بِكَوْنِهِ قَادِرًا عَالِمًا، وَكَوْنُهُ آمِرًا يُنَاقِضُ كَوْنَ الْأَوَّلِ أَبْكَمَ، وَكَوْنُهُ

قَادِرًا يُنَاقِضُ وَصْفَ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَبِأَنَّهُ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وَكَوْنُهُ عَالِمًا يُنَاقِضُ وَصْفَ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَعْنَاهُ كَوْنُهُ عَادِلًا مُبَرَّأً عَنِ الْجَوْرِ وَالْعَبَثِ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: ظَاهِرٌ فِي بَدِيهَةِ الْعَقْلِ أَنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ لَا يَسْتَوِيَانِ، فَكَذَا هَهُنَا وَاللهُ أَعْلَمُ.

Firman-Nya: *"Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun."* Maksudnya kemana saja dia disuruh. Arti *at-Taujih* ialah bila kamu menyuruh temanmu pada jalan tertentu. Menurut satu keterangan: *"Saya menyuruhnya ke suatu tempat, maka menghadaplah ia ke tempat itu."* Dan firman-Nya: *"Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun."* artinya karena sungguh ia lemah, tidak bagus dan tidak paham. Kemudian Allah ﷻ berfirman: *"Samakah orang itu."* Yakni orang yang disifati dengan empat sifat ini. *"Dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan."* Ketahuilah sungguh orang yang menyuruh berlaku adil harus bersifat cakap; jika tidak maka tidaklah ia menyuruh berlaku adil. Ia harus mampu, karena sungguh suatu perintah menyiratkan ketinggian derajat, dimana hal tersebut tidak akan tercapai kecuali bersama sifat mampu. Ia harus memahaminya hingga ia bisa membedakan antara keadilan dan kejahatan. Sehingga sungguh menyifati bahwa ia memerintahkan berbuat adil, mengandung sifat mampu dan mengerti. Menyuruh berbuat adil berlawanan dengan orang bisu bagi yang pertama. Bersifat mampu bertentangan dengan sifat pertama bahwa sungguh ia tidak mampu berbuat sesuatu dan semua itu digantungkan pada tuannya. Bersifat mengerti berlawanan dengan sifat pertama bahwa sungguh ia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Kemudian Allah ﷻ berfirman: *"Dan dia pun berada di atas jalan yang lurus?"* Artinya ia adil, bebas dari kejahatan dan penyalahgunaan; bila ini tetap maka kita berkata: *"Jelas dalam keindahan akal bahwa yang pertama dan kedua tidak sama; demikian pula seterusnya." Wa Allahu a'lam.*

n. *Tafsir ar-Razi*, VI/361:

ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْهِدَايَةِ الثَّوَابُ الْعَظِيمُ، وَهِيَ الْهِدَايَةُ إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ هَذِهِ الْهِدَايَةَ قَالَ بَعْدَهَا: وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْهِدَايَةَ كَانَتْ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ عَلَى إِحْسَانِهِمْ وَجَزَاءُ الْمُحْسِنِ عَلَى إِحْسَانِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا الثَّوَابَ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ

هَذِهِ الْهِدَايَةِ هُوَ الْهِدَايَةُ إِلَى الْجَنَّةِ. فَأَمَّا الْإِرْشَادُ إِلَى الدِّينِ وَتَحْصِيلُ الْمَعْرِفَةِ فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ جَزَاءً لَهُ عَلَى عَمَلِهِ، وَأَيْضًا لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْهِدَايَةِ هُوَ الْهِدَايَةُ إِلَى الدِّينِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَانَ جَزَاءً عَلَى الْإِحْسَانِ الصَّادِرِ مِنْهُمْ، لِأَنَّهُمُ اجْتَهَدُوا فِي طَلَبِ الْحَقِّ، فَاللَّهُ تَعَالَى جَازَاهُمْ عَلَى حُسْنِ طَلَبِهِمْ بِإِيصَالِهِمْ إِلَى الْحَقِّ، كَمَا قَالَ: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. (العنكبوت : ٦٩).

"Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan" (Qs. al-An'am: 88). Sebagian dari *muhaqqiqin* berkata: *"Maksud hidayah ini ialah pahala yang agung, yaitu hidayah ke jalan surga."* Hal itu karena sungguh Allah ﷻ ketika menyebutkan hidayah ini, Dia berfirman setelahnya: *"Dan begitu juga kita membalas orang-orang yang berbuat baik."* Hal itu menunjukkan bahwa sungguh hidayah itu sebagai balasan terhadap orang-orang yang berbuat baik atas kebaikan mereka, dimana tiada balasan bagi orang yang berbuat baik atas kebaikannya kecuali pahala. Maka tetap sungguh maksud hidayah ini ialah hidayah ke surga. Sementara menunjukkan kepada agama dan menghasilkan makrifat di hatinya, maka sungguh itu bukanlah balasan baginya atas perbuatannya, dan juga tidak jauh dikatakan: *"Maksud dari hidayah ini adalah hidayah pada agama dan makrifat."* Bahwasanya hal itu adalah balasan atas kebaikan yang tumbuh dari mereka, karena sungguh mereka berupaya keras dalam mengerahkan hak, maka Allah ﷻ membalas mereka atas kebaikan upaya mereka dengan menyampaikan pada kebenaran, seperti halnya firman Allah: *"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami."* (Qs: al-Ankabut: 69).

o. *Tafsir ar-Razi*, IX/355:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩)

اعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا شَرَحَ دَلَائِلَ التَّوْحِيدِ قَالَ: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ أَيْ إِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ الدَّلَائِلَ وَشَرَحْتُهَا إِزَاحَةً لِلْعُذْرِ وَإِزَالَةً لِلْعِلَّةِ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَفِي الْآيَةِ مَسَائِلُ. الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَالَ الْوَاحِدِيُّ: الْقَصْدُ اسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ يُقَالُ: طَرِيقٌ قَصْدٌ وَقَاصِدٌ إِذَا أَدَّاكَ إِلَى مَطْلُوبِكَ، إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَفِي الْآيَةِ حَذْفٌ، وَالتَّقْدِيرُ: وَعَلَى اللَّهِ بَيَانُ قَصْدِ السَّبِيلِ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهَا جَائِرٌ أَيْ عَادِلٌ مَائِلٌ

وَمَعْنَى الْجَوْرِ فِي اللُّغَةِ الْمَيْلُ عَنِ الْحَقِّ وَالْكِنَايَةُ فِي قَوْلِهِ: وَمِنْهَا جَائِرٌ تَعُوْدُ عَلَى السَّبِيْلِ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ يَعْنِيْ وَمِنَ السَّبِيْلِ مَا هُوَ جَائِرٌ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْحَقِّ وَهُوَ أَنْوَاعُ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

"Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)." (QS. an-Nahl: 9).

Ketahuilah sungguh pada saat menjelaskan dalil-dalil tauhid, Allah ﷻ berfirman: *"Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus."* Yakni, dalil-dalil ini aku sebutkan dan aku menjelaskan untuk membersihkan uzur dan menghapus *illat*, supaya binasa orang yang merusak saksi dan supaya hidup orang yang menghidupkan saksi. Terkait ayat ini terdapat beberapa masalah. *Pertama*, al-Wahidi berkata: *"Al-Qashdu adalah jalan yang lurus"*, dikatakan: *"Tahriq qashd wa qashid"*, saat ia memenuhimu pada tujuaanmu. Ketika kamu telah mengetahui ini maka dalam ayat ini ada pembuangan lafal, dan kira-kiranya adalah: وَعَلَى اللهِ بَيَانُ قَصْدِ السَّبِيْلِ. Kemudian Allah berfirman: وَمِنْهَا جَائِرٌ Maksudnya jalan yang menyimpang. Makna الْجَوْرِ menurut bahasa ialah menyimpang dari kebenaran. *Kinayah* dalam firman Allah: وَمِنْهَا جَائِرٌ kembali kepada jalan. Kata السَّبِيْلِ *muannats* menurut bahasa Hijaz. Yakni di antara jalan-jalan ada yang menyimpang, yaitu tidak menuju pada kebenaran; yaitu segala macam kekufuran dan kesesatan, *wa Allahu a'lam.*

p. *Hadits al-Bukhari, Muslim*, dan *Ashab as-Sunan*:

وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ (رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن).

"Dan laki-laki yang berbaiat pada imam, dimana ia tidak berbaiat padanya kecuali karena urusan dunia, jika imam memberikan dunia kepadanya maka ia rela, dan jika tidak memberikan dunia kepadanya maka ia murka" (HR. Al-Bukhari dan Muslim dan *ashab as-Sunan*).

q. *Raudhah ath-Thalibin*, XI/144:

فَرْعٌ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشْوَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَالْهَدِيَّةُ جَائِزَةٌ فِي بَعْضٍ فَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ حَقِيْقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيْهِمَا وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كج أَنَّ الرِّشْوَةَ هِيَ الَّتِيْ يُشْرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوِ الْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْحُكْمِ بِحَقٍّ وَالْهَدِيَّةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَالثَّانِيْ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضٍ

آجِلٍ فَهُوَ قُرْبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَإِمَّا لِعَاجِلٍ وَهُوَ إِمَّا مَالٌ فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ ثَوَابٍ أَوْ لِتَوَقُّعِ ثَوَابٍ وَإِمَّا عَمَلٌ فَإِنْ كَانَ عَمَلًا مُحَرَّمًا أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا فَهُوَ رِشْوَةٌ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةٌ أَوْ جُعَالَةٌ وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَى الْمَبْذُولِ لَهُ فَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ نَفْسِهِ فَهَدِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ لِيَتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوِ النَّسَبِ فَهُوَ هَدِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْعَمَلِ فَهُوَ رِشْوَةٌ.

(Sub) Sungguh kita telah menyebutkan bahwa suap hukumnya haram mutlak, sementara hadiah itu dibolehkan dalam sebagian kasus; maka dituntut perbedaan di antara hakikat keduanya, serta sungguh orang yang menyerahkan keduanya itu rela. Adapun mengenai perbedaan tersebut ditinjau dari dua sudut, *pertama*: Ibn Kaj menyebutkan bahwa syarat suap pada penerima ialah menghukumi tanpa hak, atau mencegah dari menghukumi dengan *haq*. Sementara hadiah ialah pemberian secara mutlak. *Kedua*: al-Ghazali berkata dalam *al-Ihya'*: *"Harta itu adakalahnya diserahkan karena tujuan akhirat; maka merupakan ibadah dan sedekah, dan adakalanya sebab tujuan duniawi. Tujuan duniawi ini (1) Adakalanya berupa harta, maka itu merupakan hibah dengan syarat imbalan atau hibah karena mengharap balasan. (2) Adakalanya berupa amal. Apabila berupa amal yang diharamkan atau fardhu 'ain maka merupakan suap, sedangkan jika mubah maka disebut persewaan atau ju'alah. (3) Adakala karena kedekatan dan kasih sayang pada orang yang diberi sesuatu; jika murni karena dirinya maka disebut hadiah dan jika sebab pangkatnya untuk mengantarkan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan, maka apabila pangkatnya berupa ilmu atau nasab maka disebut hadiah, sementara jika berupa pemutusan hukum dan perbuatan, maka disebut suap."*

r. *Al-Mabsuth*, V/221 [Bairut: Dar al-Ma'rifah]:

وَإِذَا جَعَلَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُعْلًا عَلَى أَنْ يَزِيدَهَا فِي الْقَسْمِ يَوْمًا فَفَعَلَ لَمْ يَجُزْ وَتَرْجِعُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهَا رَشَتْهُ عَلَى أَنْ يَجُورَ وَالرِّشْوَةُ حَرَامٌ وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ مِنَ السُّحْتِ.

Jika istri memberikan upah pada suaminya agar menambahi gilirannya sehari, lalu ia mengerjakan maka tidak boleh dan istri harus menarik kembali harta pemberiannya, karena ia menyuap suami agar berbuat serong; sementara suap itu diharamkan, dan ini menempati hukum suap yang diharamkan.

s. *Al-Fatawa asy-Syar'iyah al-Masirah li Syaikh Ahmad Hasan Muslim*, 239:

مَا نَصُّهُ (دَفْعُ النُّقُوْدِ لِلْإِنْتِخَابِ) السُّؤَالُ بَعْضُ الْمُرَشَّحِيْنَ لِلْإِنْتِخَابِ يَدْفَعُوْنَ النُّقُوْدَ لِمَجْمُوْعَاتِهِ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ إِغْرَاءِ النَّاخِبِيْنَ بِهِ فَهَلْ هَذِهِ رِشْوَةٌ؟ الْجَوَابُ أَنَّ إِعْطَاءَ النُّقُوْدِ إِغْرَاءً لِلنَّاخِبِ فَيَبْذُلُ صَوْتَهُ لِمَنْ يُعْطِيْهِ نُقُوْدًا عَمَلٌ خَبِيْثٌ ضَارٌّ بِالْأَخْلَاقِ وَضَارٌّ بِمَصْلَحَةِ الْوَطَنِ وَبِمَصْلَحَةِ الْفَرْدِ النَّاخِبِ وَالْمُرَشَّحِ مَعًا.

Keterangan yang *nash*nya (penyerahan harta dalam pemilihan umum): Pertanyaan: *"Sebagian orang yang maju mencalonkan diri dalam pemilihan umum menyerahkan harta pada jamaahnya untuk menggerakkan mereka agar memilih dirinya, apakah ini termasuk suap?"* Jawab: *"Sungguh pemberian harta yang bertujuan untuk mendorong pemilih agar menyerahkan suaranya pada orang yang memberinya harta merupakan perbuatan kotor yang merusak moral dan mengancam kepentingan negara, kepentingan individu pemilih dan calon secara serentak."*

t. *Ihya' 'ulumiddin*, II/351:

فَسَادُ الرَّعَايَا بِفَسَادِ الْمُلُوْكِ وَفَسَادُ الْمُلُوْكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ وَفَسَادُ الْعُلَمَاءِ بِاسْتِيْلَاءِ حُبِّ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَمَنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ حُبُّ الدُّنْيَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحِسْبَةِ عَلَى الْأَرَاذِلِ فَكَيْفَ عَلَى الْأَكَابِرِ اهـ

Kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan raja-raja; kerusakan raja-raja disebabkan oleh kerusakan ulama dan kerusakan ulama disebabkan karena dikuasai cinta harta, dan pangkat. Orang yang dikuasai cinta dunia maka tidak mampu menguasai hal-hal kecil sehingga bagaimana mungkin mampu menguasai perkara besar.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KONFERENSI WILAYAH PWNU JAWA TIMUR 2013
di PP Bumi Shalawat Lebo Sidoarjo
31 Mei-02 Juni 2013

4. Status Nasab Anak

5. Operasionalisasi *Maqashid asy-Syari'ah*

6. Prinsip Jam'iyah NU: اَلْأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ الْأَصْلَحِ

7. Kekebalan Jurnalistik

8. Baiat dalam Pengamalan Agama

9. Dasar Memilih Alternatif Kebijakan

MUSHAHIH

KH. M. Anwar Manshur
KH. Arsyad Busairi

PERUMUS

Prof. Dr. H. Ridwan Nasir, M.A.
KH. Mujib Imron
KH. Syaifuddin Zuhri
KH. Ahmad Murtadlo Abdul Ghoni

MODERATOR

KH. Muhibbul Aman Ali

NOTULEN

Ust. M. Ma'ruf Khozin

4. Status Nasab Anak

Anak yang terlahir selepas *iddah thalaq*, sedang ibu anak tersebut tetap menjanda menjadi dilematis bagi pria mantan suami dari ibu tersebut bila harus menerima atau harus menolak tuntutan *nisbah* anak kepadanya. Ikatan hukum nikah telah lepas akibat *thalaq bain*, karenanya tertutup baginya untuk menempuh upaya *li'an* dengan tujuan *"nafyu al-walad"*. Ketahanan janda yang melahirkan anak tersebut kehilangan dasar hukum untuk menggugat mantan suaminya agar mengakui nasab anak tersebut.

Pada pasal 102 ayat (1) KHI ditegaskan bahwa pengingkaran terhadap status nasab anak mematok batas waktu 360 hari pasca putus perkawinan atau 180 hari sesudah hari lahir anak. Batasan waktu demikian berlawanan dengan doktrin *mainstream* fuqaha sunni.

Pertanyaan

a. Sekira anak perempuan terlahir pasca *iddah thalaq* atas diri ibu yang melahirkannya, kepada siapa otoritas wali nikah harus diberikan?
b. Bagaimana kepastian tuntutan *nafaqah* anak tersebut dan hak *hadhanah* harus dibebankan?
c. Adakah status saudara dalam hukum waris dengan anak yang lahir sewaktu pasangan ibu dan ayah tersebut masih utuh pernikahannya?

Jawaban

a. Otoritas wali nikah bagi anak yang kelahirannya terjadi pasca *iddah thalaq* di*tafsil* sesuai dengan tersambung atau tidaknya nasab anak itu kepada laki-laki yang mentalak ibunya. Adapun perinciannya sebagai berikut:
   1) Apabila si ibu ditalak dalam keadaan hamil dan ia melahirkan kandungannya, maka *iddah*nya selesai. Oleh karenanya apabila si ibu tersebut melahirkan lagi pada jarak masa setelah enam (6) bulan dari kelahiran anak sebelumnya, maka anak yang kedua ini nasabnya tidak tersambung dengan laki-laki yang mentalak ibunya (ayah nasab dari anak sebelumnya). Dengan demikian wali nikahnya bukan suami yang mentalaknya.
   2) Apabila si ibu ditalak dalam keadaan tidak hamil dan ia telah menjalani *iddah*nya dengan *aqra'* (3 kali masa suci), sedangkan jarak antara kelahiran anak dan selesainya masa *iddah* minimal 6 bulan sampai 4 tahun sementara wanita tersebut tidak menikah dengan laki-laki lain, maka nasab si anak secara dzahir bersambung dengan laki-laki yang mentalak ibunya. Demikian ini jika laki-laki yang mentalaknya tidak menafikan anak yang dilahirkan. Apabila

laki-laki yang mentalaknya yakin anak yang dilahirkan tersebut bukan hasil dari pernikahannya, maka wajib dinafikan (*li'an*).

b. Kewajiban nafkah dan biaya *hadlanah* menjadi kewajiban wali nasab. Adapun hak *hadlanah* diberikan kepada ibu yang melahirkan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XIX/57:

فَصْلٌ: قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ: (وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ، انْتَفَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ، لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ قَبْلَ حُدُوثِ الْفِرَاشِ. وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ الْحَمْلَ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، لَمْ يَلْحَقْهُ وَانْتَفَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ، لِأَنَّا قَطَعْنَا بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَأَنَّ هٰذَا الْوَلَدَ الْآخَرَ عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْفِرَاشِ. وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهِيَ غَيْرُ حَامِلٍ وَاعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ وَضَعَتْ وَلَدًا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، لَحِقَهُ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا أَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ. وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ مَا بَيْنَهُمَا، لَحِقَهُ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ: لَا يَلْحَقُهُ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِبَاحَتِهَا لِلْأَزْوَاجِ، وَمَا حُكِمَ بِهِ يَجُوزُ نَقْضُهُ لِأَمْرٍ مُحْتَمِلٍ، وَهٰذَا خَطَأٌ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، وَالنَّسَبُ إِذَا أَمْكَنَ إِثْبَاتُهُ لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ. وَلِهٰذَا إِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الْعَقْدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، لَحِقَهُ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْوَطْءِ وَبَرَاءَةَ الرَّحِمِ. فَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ نُظِرَتْ: فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، انْتَفَى عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ، لِأَنَّ الْعُلُوقَ حَادِثٌ بَعْدَ زَوَالِ الْفِرَاشِ. وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَنْتَفِي عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ، لِأَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ تَحْرِيمَ الْمَبْتُوتَةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَلْحَقُهُ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ وَالطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ. فَإِذَا قُلْنَا بِهٰذَا، فَإِلَى مَتَى يَلْحَقُهُ وَلَدُهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يَلْحَقُهُ أَبَدًا، لِأَنَّ الْعِدَّةَ يَجُوزُ أَنْ تَمْتَدَّ، لِأَنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ لَا حَدَّ لَهُ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَلْحَقُهُ إِلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ إِذَا انْقَضَتْ بَانَتْ وَصَارَتْ كَالْمَبْتُوتَةِ).

(Pasal) *Mushannif-Rahimahu Allah*- berkata: Jika istri melahirkan anak pada usia kandungannya yang kurang dari 6 bulan sejak akad, maka anak tersebut ternafikan dari suaminya tanpa *li'an*, sebab kita tahu bahwa

perempuan itu telah mengandungnya sebelum menjadi istrinya. Apabila Si Suami menggaulinya kemudian menceraikannya dalam kondisi hamil, lalu istri melahirkan kandungan, kemudian melahirkan anak lain dalam waktu enam bulan, maka anak tersebut tidak bertemu nasab pada suami tanpa *li'an*, sebab kita memastikan bebasnya rahim seorang istri dengan melahirkan kandungan, dan anak lain tersebut dikandung oleh si istri setelah hilangnya status istri. Apabila suami menceraikan istri ketika tidak sedang hamil dan istri *'iddah* dengan beberapa sucian, kemudian ia melahirkan anak sebelum menikah dengan orang lain sebelum enam bulan, maka anak bertemu nasab dengan suami, karena kita meyakini *'iddah* istri belum habis. Apabila istri melahirkan anak ketika 6 bulan, 4 tahun, atau waktu antara keduanya, maka anak bertemu nasab dengan suami. Abu al-'Abbas bin Suraij berkata: *"Anak tidak bertemu nasab dengan suami, karena kita menghukumi habisnya iddah dan dibolehkannya istri menikah lagi."* Perkara yang dihukumi demikian boleh dirusak karena perkara yang *ihtimal*. Ini merupakan kesalahan, sebab ada kemungkinan anak yang dilahirkan buah dari hasil hubungan suami. Sebuah nasab apabila mungkin di*itsbat*kan maka tidak boleh dinafikan. Karena ini, apabila istri melahirkan anak setelah akad pada waktu 6 bulan maka anak tersebut bertemu nasab dengan suami, meskipun hukum asal tidak ada persetubuhan dan bebasnya rahim. Apabila istri melahirkan anak dalam waktu lebih dari 4tahun maka dilihat: (1) Apabila berupa talak *ba'in* maka ternafikan dari suami tanpa *li'an*, karena embrio tumbuh setelah hilangnya ikatan pernikahan; (2) Apabila berupa talak *raj'i* maka terdapat dua pendapat: *pertama*, tidak adanya hubungan nasab dari suami ibunya tanpa *li'an*, karena istri telah menjadi haram bagi suami sebab talak dengan keharaman istri yang tertalak *ba'in*, sehingga suami seolah-olah telah mentalak istrinya dengan talak *ba'in; pendapat kedua*, anak bertemu nasab dengan suami, karena istri masih dalam status sebagai istri terkait tempat tinggal, nafkah, *thalak, dhihar*, dan *i'la'*. Apabila kita berkata demikian, maka kapan anaknya bertemu nasab dengan suami? Dalam hal ini ada dua pendapat; Abu Ishaq berkata: *"Anak bertemu nasab dengan suami selamanya, sebab iddah boleh menjadi panjang, karena maksimal suci tidak terbatas."* Di antara *Ashabina* ada yang berkata: *"Anak bertemu nasab dengan suami sampai empat tahun sejak waktu selesainya iddah, yaitu menurut pendapat shahih, karena bila iddah telah habis maka istri menjadi terthalak ba'in dan ia menjadi seperti terputus."*

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 1/496:

(مَسْأَلَةٌ ي ش) نَكَحَ حَامِلًا مِنَ الزِّنَا فَوَلَدَتْ كَامِلًا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ، إِمَّا مُنْتَفٍ عَنِ الزَّوْجِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِنْ غَيْرِ مُلَاعَنَةٍ، وَهُوَ الْمَوْلُودُ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إِمْكَانِ

الْاِجْتِمَاعِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْ آخِرِ إِمْكَانِ الْاِجْتِمَاعِ، وَإِمَّا لَاحِقٌ بِهِ وَتَثْبُتُ لَهُ الْأَحْكَامُ إِرْثًا وَغَيْرَهُ ظَاهِرًا، وَيَلْزَمُهُ نَفْيُهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنَ السِّتَّةِ وَأَقَلَّ مِنَ الْأَرْبَعِ السِّنِيْنَ، وَعَلِمَ الزَّوْجُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ تَسْتَدْخِلْ مَاءَهُ، أَوْ وَلَدَتْ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْهُ، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهِ لَهَا بِحَيْضَةٍ وَثَمَّ قَرِيْنَةٌ بِزِنَاهَا، وَيَأْثَمُ حِيْنَئِذٍ بِتَرْكِ النَّفْيِ بَلْ هُوَ كَبِيْرَةٌ، وَوَرَدَ أَنَّ تَرْكَهُ كُفْرٌ، وَإِمَّا لَاحِقٌ بِهِ ظَاهِرًا أَيْضًا، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِلَا غَلَبَةٍ، بِأَنِ اسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ الْوَطْءِ وَوَلَدَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهُ وَثَمَّ رِيْبَةٌ بِزِنَاهَا، إِذِ الْاِسْتِبْرَاءُ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَكِنْ يُنْدَبُ تَرْكُهُ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيْضُ، وَإِمَّا لَاحِقٌ بِهِ وَيَحْرُمُ نَفْيُهُ بَلْ هُوَ كَبِيْرَةٌ، وَوَرَدَ أَنَّهُ كُفْرٌ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْهُ، أَوِ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ إِلَى أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْ وَطْئِهِ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَهُ أَوِ اسْتَبْرَأَهَا وَوَلَدَتْ بَعْدَهُ بِأَقَلَّ مِنَ السِّتَّةِ، بَلْ يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ الْفِرَاشِ، كَمَا لَوْ عَلِمَ زِنَاهَا وَاحْتَمَلَ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ أَوْ مِنَ الزِّنَا، وَلَا عِبْرَةَ بِرِيْبَةٍ يَجِدُهَا مِنْ غَيْرِ قَرِيْنَةٍ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَوْلُوْدَ عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِ لَاحِقٌ بِهِ مُطْلَقًا إِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إِلَّا بِاللِّعَانِ وَالنَّفْيِ تَارَةً يَجِبُ، وَتَارَةً يَحْرُمُ، وَتَارَةً يَجُوْزُ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِقْرَارِ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا، وَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ.

(Masalah Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhar al-Yamani) Seseorang menikahi wanita hamil dari hasil hubungan zina kemudian si wanita melahirkan anak secara sempurna; maka ia memiliki 4 hal, (1) Adakala anak terputus nasabnya dari suami secara lahir-batin tanpa *li'an*, yaitu bagi anak yang dilahirkan di bawah enam bulan sejak ada kesempatan berhubungan badan setelah akad atau lebih dari empat tahun sejak akhir kemungkinan berhubungan badan; (2) Adakalanya anak bertemu nasab dengan suami, ada hukum waris dan lainnya secara dhahir, dan suami wajib menafikannya apabila istri melahirkan anak lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun dan suami mengetahui atau kuat dugaan bahwa anak tersebut bukan dari hasil hubungannya, apabila ia belum menyetubuhinya setelah akad dan istri tidak memasukkan spermanya, atau istri melahirkan setelah kurang dari enam bulan dari persetubuhannya atau lebih dari empat tahun darinya, atau lebih dari enam bulan setelah *istibra'* suami terhadap budak wanitanya dengan satu

haid dan ada *qarinah* atas hubungan zina. Dengan demikian, suami berdosa sebab meninggalkan penafian bahkan berdosa besar. Terdapat keterangan bahwa meninggalkannya merupakan perbuatan kufur. (3) Adakalanya anak bertemu dengan suami secara lahiriah juga, tetap ia tidak wajib menafikannya bila ia menyangka bahwa anak tersebut dari hasil hubungan badannya tanpa dugaan yang kuat, dengan gambaran ia meng*istibra'* istri setelah persetubuhan dan istri melahirkan anak lebih dari enam bulan setelahnya dan disana terdapat keraguan mengenai hubungan zinanya. Karena *istibra'* merupakan tanda yang jelas bahwa anak tersebut bukan hasil dari hubungan suami, bahkan disunahkan meninggalkannya, sebab wanita yang hamil terkadang mengalami haid. (4) Adakalanya anak bertemu nasab dengan suami dan suami haram menafikannya, bahkan itu merupakan dosa besar. Terdapat keterangan bahwa ini merupakan perbuatan kufur bila kuat dugaan anak tersebut dari dirinya. Atau ada dua kemungkinan yang sama, jika istri melahirkan anak ketika waktu enam bulan atau lebih sampai empat tahun sejak suami menyetubuhinya, dan suami tidak meng*istibra'* setelahnya atau suami meng*istibra'* dan budak perempuan tersebut melahirkan setelahnya kurang dari enam bulan, bahkan anak bertemu nasab dengan suami dengan hubungan pernikahan, sebagaimana bila suami mengetahui zina istri dan dimungkinkan adanya kelahiran anak dari suami atau dari zina. Tidak melihat ada keraguan yang ditemukan pada budak wanita tersebut tanpa wujud *qarinah*. Kesimpulan, anak yang dilahirkan melalui status suami istri, maka anak tersebut bertemu nasab dengannya secara mutlak bila mungkin anak yang dilahirkan buah dari suami, dan anak tersebut tidak bisa dinafikan dengan *li'an*. Adapun mengenai penafian terkadang hukumnya wajib, haram, dan boleh. Tidak ada anggapan mengenai pengakuan istri atas perbuatan zina, meski suami membenarkan hal itu dan jelas tanda-tandanya.

c. *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj ath-Thulab*, II/38:

(وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ) بِالتَّزْوِيجِ (أَبٌ فَأَبُوهُ) وَإِنْ عَلَا لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وِلَادَةً وَعَصُوبَةً فَقُدِّمُوا عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا عَصُوبَةٌ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ (فَسَائِرُ الْعَصَبَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى إِرْثِهِمْ) مِنْ نَسَبٍ وَوَلَاءٍ (كَإِرْثِهِمْ) أَيْ كَتَرْتِيبِ إِرْثِهِمْ فَيُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ ابْنُ عَمٍّ كَذَلِكَ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَخًا لِأُمٍّ أَوْ كَانَ مُعْتِقًا وَاسْتَوَيَا عَصُوبَةً قُدِّمَ ثُمَّ مُعْتِقٌ ثُمَّ عَصَبَتُهُ بِحَقِّ الْوَلَاءِ كَتَرْتِيبِ إِرْثِهِمْ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِهِ (فَالسُّلْطَانُ) فَيُزَوِّجُ مَنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.

(Wali-wali yang lebih berhak) menikahkan ialah (ayah lalu ayahnya) meski ke atas, sebab masing-masing keduanya memiliki garis kelahiran dan *ashabah*. Maka mereka didahulukan dari orang yang tidak memiliki sesuatu kecuali *ashabah* dan orang yang paling dekat dari mereka lebih didahukukan lalu orang yang terdekat berikutnya, (lalu *ashabah* yang lain yang disepakati atas warisan mereka) dari nasab dan *wala'* (seperti hak waris mereka), maksudnya sebagaimana urutan waris mereka, maka saudara laki-laki seayah dan seibu didahulukan, kemudian saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah meski dan seterusnya, paman, kemudian anak paman dan seterusnya. Ya, bila salah satu *ashabah* berupa saudara laki-laki seibu atau orang yang memerdekakan dan mereka berdua sama dalam *ashabah*, maka ia didahulukan, lalu orang yang memerdekakan kemudian *ashabah*nya dengan hak *wala'* seperti urutan hak waris mereka dan penjelasannya yang telah lewat dalam babnya (lalu sultan) maka ia menikahkan orang yang berada di tempat wilayahnya dengan wilayah umum.

d. *Fath al-Qarib al-Mujib Hasyiyah al-Bajuri*, II/385:

فَأَمَّا الْوَالِدُوْنَ وَإِنْ عَلَوْا. فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ الْفَقْرِ لَهُمْ وَهُوَ عَدَمُ قُدْرَتِهِمْ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ. وَالزَّمَانَةِ أَوِ الْفَقْرِ وَالْجُنُوْنِ وَهِيَ مَصْدَرُ زَمِنَ الرَّجُلُ زَمَانَةً إِذَا حَصَلَ لَهُ آفَةٌ فَإِنْ قَدَرُوْا عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُمْ. وَأَمَّا الْمَوْلُوْدُوْنَ وَإِنْ سَفَلُوْا. فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْوَالِدِيْنَ. بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَحَدُهَا الْفَقْرُ وَالصِّغَرُ فَالْغَنِيُّ الْكَبِيْرُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ. أَوِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ فَالْغَنِيُّ الْقَوِيُّ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ. أَوِ الْفَقْرُ وَالْجُنُوْنُ فَالْغَنِيُّ الْعَاقِلُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ.

Adapun orang tua meskipun ke atas, maka wajib menafkahi mereka dengan dua syarat: fakir, yaitu tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja; dan lumpuh atau fakir dan gila. الزَّمَانَة masdar dari زَمِنَ الرَّجُلُ زَمَانَةً seorang laki-laki mengalami kelumpuhan ketika ia terkena penyakit. Apabila mereka mampu menghasilkan harta atau pekerjaan maka tidak wajib menafkahi mereka. Sementara anak sampai ke bawah, maka wajib menafkahi mereka bagi orang tua dengan tiga syarat; Pertama, fakir dan masih kecil; maka orang kaya dan dewasa tidak wajib dinafkahi. Atau fakir dan lumpuh, maka orang kaya yang kuat tidak wajib dinafkahi. Atau fakir dan orang gila maka orang kaya yang berakal tidak wajib dinafkahi.

e. *Fath al-Qarib al-Mujib Hasyiyah al-Bajuri*, II/371:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ أَيْ: تَرْبِيَتِهِ بِمَا يُصْلِحُهُ بِتَعَهُّدِهِ بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَغَسْلِ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَتَمْرِيضِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ. وَمُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الطِّفْلِ وَإِذَا امْتَنَعَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ حَضَانَةِ وَلَدِهَا انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِأُمَّهَاتِهَا.

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dan ia mempunyai anak hasil hubungan dengannya, maka sang istri lebih berhak mengasuhnya, maksudnya merawatnya dengan baik dengan menyediakan makanan, minum, memandikan, mencucikan baju, mengobati dan lain-lain dari kebutuhannya. Biaya asuh ditanggung oleh orang yang wajib menafkahi anak tersebut; apabila istri menolak mengasuh anaknya maka hak asuh berpindah pada ibunya.

f. *Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil li al-Hithab*, VIII/579:

فَإِنَّ أَسْبَابَ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: نَسَبٌ وَنِكَاحٌ وَوَلَاءٌ. فَأَمَّا مِيرَاثُهُ بِالنَّسَبِ فَسَيَأْتِي فِي الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ وَالْعَصَبَاتِ.

Sungguh sebab-sebab waris ada tiga hal: nasab, nikah dan *wala'*. Adapun warisan sebab nasab maka akan dijelaskan dalam bahasan anak, anak-anaknya, saudara dan *ashabah*.

g. *Nihayah az-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, 257:

فَالذُّكُورُ خَمْسَةَ عَشَرَ: الِابْنُ وَابْنُهُ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخُ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأُمِّ وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ وَالْعَمُّ لِلْأَبِ وَابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَالزَّوْجُ وَذُو الْوَلَاءِ.

Pihak lelaki ada 15 macam: anak laki-laki, anaknya anak, ayah, kakek, saudara lelaki seayah dan seibu, saudara seayah, saudara seibu, anaknya saudara seayah dan ibu, anak saudara seayah, paman seayah dan ibu, paman seayah, anak paman seayah dan ibu, anak paman seayah, suami dan waris *wala'*.

5. Operasionalisasi *Maqashid asy-Syari'ah*

Penalaran terkait hal-hal yang tidak diatur lewat *nash syar'i* telah muncul kecenderungan pada pertimbangan *"maqashid asy-syari'ah"* yang terurai pada kitab *al-Mawafaqat fi Ushuli asy-syari'ah* karya asy-Syathibi. Analisis terkait *maslahat-mafsadah*, melalui pendekatan *dharuriat-hajiat-tahsiniyat-tahsiniat/takmiliat* bisa terjebak pada ukuran subyektif, lokalistik,

pragmatik, periodik hingga sifat partikulir.

Ketegasan dalam menunjuk hipotesis masalah tak jarang bisa mengabaikan aturan *nash* sunnah/hadits/praktik keagamaan/fatwa ulama salaf dan doktrin keagamaan pada *kutub al-mu'tabarah*. Sikap *ikhtiyath* (hati-hati) dalam berfatwa, pengujian argumentasi/*hujjah syar'iyah* bisa tanpa *istiqra'* terhadap dampak.

Pertanyaan

a. Bila pola penalaran *"maqashid asy-syari'ah"* efektif, dalam situasi dan kondisi seperti apa boleh dioperasionalkan?
b. Upaya ilmiah apa harus menindaklanjuti uji kebenaran hukum yang berorientasi pada *maqashid asy-syari'ah*?
c. Bagaimana nilai pertanggungjawaban fatwa hukum bila sebatas di dasari prediksi *maqashid asy-syari'ah*, karena langkah kerjanya mirip dengan eksplorasi *illat mustanbathah* untuk ber*qiyas*?

Jawaban

Penalaran *"maqashid asy-syari'ah"* yang berintikan pada perlindungan hak-hak dasar yang lima *"al-ushul al-khams"* yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta adalah salah satu bagian dari perangkat *ijtihad*. Pertimbangan *maslahat* dan *mafsadah* dalam merumuskan hukum hanya dapat dilakukan oleh mujtahid mutlak. Sedangkan *muqallid* harus bersandar kepada hasil rumusan *mujtahid* mutlak. Namun demikian pertimbangan *maslahat* dan *mafsadah* dapat dijadikan dasar di dalam menentukan pilihan *aqwal* (pendapat) yang berkembang dalam 4 madzhab atau *Ashab* imam pendiri madzhab. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam memilih pendapat sebagaimana hasil keputusan Muktamar NU 31 di Boyolali.

Dasar Hukum

a. *Al-Fawa'id al-Makiyah li Sayyid Alawi bin Ahmad as-Saqqaf*, 81:

اَلْبَحْثُ عَنِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ وَظِيْفَةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ الْمَحْضُ فَلَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذٰلِكَ وَيُخَالِفَ كَلَامَ أَئِمَّتِنَا ثُمَّ قَالَ: فَعَلِمْنَا بِذٰلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ لَا يَجُوْزُ لَهُ النَّظَرُ فِي الْمَصَالِحِ وَلَا فِي الْمَفَاسِدِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّظَرُ فِيْ كَلَامِ إِمَامِهِ وَأَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ.

Pembahasan tentang *mashalih* dan *mafasid* adalah tugas para mujtahid, sementara *muqallid* murni tidak diperkenankan ikut membahasnya dan menentang pendapat ulama kita. Kemudian beliau berkata: *"Kita telah mengetahui bahwa selain mujtahid tidak boleh melihat dalam urusan mashalih*

dan tidak dalam urusan mafasid, bahwasanya ia hanya boleh melihat kalam Imamnya dan Imam-imam madzhabnya."

b. *Al-Muwafaqat,* II/110:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِي التَّكْلِيفِ الشَّرِيعَةِ جَارِيَةٌ فِي التَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا عَلَى الطَّرِيقِ الْوَسَطِ الْأَعْدَلِ، الْآخِذِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِقِسْطٍ لَا مَيْلَ فِيهِ، الدَّاخِلِ تَحْتَ كَسْبِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ وَلَا انْحِلَالٍ، بَلْ هُوَ تَكْلِيفٌ جَارٍ عَلَى مُوَازَنَةٍ تَقْتَضِي فِي جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ غَايَةَ الْاعْتِدَالِ كَتَكَالِيفِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَالْجِهَادِ، وَالزَّكَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ ابْتِدَاءً عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ اقْتَضَى ذَلِكَ، أَوْ لِسَبَبٍ يَرْجِعُ إِلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِطَرِيقِ الْعَمَلِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ [سورة البقرة: ٢١٩] وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ التَّشْرِيعُ لِأَجْلِ انْحِرَافِ الْمُكَلَّفِ، أَوْ وُجُودِ مَظِنَّةِ انْحِرَافِهِ عَنِ الْوَسَطِ إِلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، كَانَ التَّشْرِيعُ رَادًّا إِلَى الْوَسَطِ الْأَعْدَلِ، لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ يَمِيلُ فِيهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ لِيَحْصُلَ الْاعْتِدَالُ فِيهِ.

Tujuan-tujuan syariat dalam *taklif* syariat berlaku dalam *taklif* menurut tuntutannya berdasarkan jalan yang seimbang dan adil yang mengambil dari dua sisi dengan suatu bagian tidak ada kecondongan di dalamnya yang masuk di bawah upaya hamba tanpa memberatkan dan tidak bias, akan tetapi ia merupakan penyesuaian yang berlaku pada keseimbangan yang menuntut pada seluruh *mukallaf* dengan puncak seimbang seperti *taklif-taklif* shalat, puasa, haji, jihad, zakat dan lain sebagainya dari hal-hal yang disyariatkan di awal mula tanpa sebab jelas yang menuntut demikian, atau karena sebab yang kembali pada tidak ada pengetahuan tentang metode amal, sebagaimana firman Allah: *"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan."* (QS. al-Baqarah: 219) dan hal-hal serupa. Apabila pensyariatan karena tujuan penyimpangan *mukallaf*, atau wujudnya dugaan adanya penyimpangan dari tengah ke salah satu dua sisi, maka pensyariatan itu mengembalikan pada keadaan seimbang yang adil, tapi atas jalan condong ke sisi yang lain agar menghasilkan keseimbangan.

c. *Al-Muwafaqat,* IV/56:

[شُرُوطُ دَرَجَةِ الْاجْتِهَادِ] إِنَّمَا تَحْصُلُ دَرَجَةُ الْاجْتِهَادِ لِمَنْ اتَّصَفَ بِوَصْفَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فَهْمُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عَلَى كَمَالِهَا، وَالثَّانِي: التَّمَكُّنُ مِنَ الْاسْتِنْبَاطِ بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ فِيهَا. أَمَّا الْأَوَّلُ: فَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اعْتِبَارِ

الْمَصَالِحِ، وَأَنَّ الْمَصَالِحَ إِنَّمَا اعْتُبِرَتْ مِنْ حَيْثُ وَضَعَهَا الشَّارِعُ كَذَلِكَ، لَا مِنْ حَيْثُ إِدْرَاكُ الْمُكَلَّفِ، إِذِ الْمَصَالِحُ تَخْتَلِفُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالنِّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ.

(Syarat-syarat derajat *ijtihad*) bahwasanya derajat *ijtihad* tercapai bagi orang yang memiliki dua sifat berikut: *Pertama*, memahami maksud-maksud syariat secara sempurna. *Kedua*, terdapat kemungkinan mampu meng*istinbath* atas dasar kefahamannya. Adapun yang pertama, maka telah berlalu keterangannya dalam *al-Maqahid* bahwa syariat dibangun atas dasar *mashalih*, dan *mashalih* tersebut hanya dapat diterima dari sisi penetapan *syari'*, tidak dari sisi penemuan *mukallaf*, karena ketika demikian adanya, *mashalih* akan berbeda-beda karena penisbatan dan penyandaran.

d. *Al-Mustashfa fiy Ushul al-Fiqh*, I/173 [Dar al-Kutub al-Ilmiyah]:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ: فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Adapun maslahat: Dalam asalnya adalah ungkapan tentang menarik manfaat atau menolak *madharat*, dan kita tidak menghendaki begitu karena sungguh menarik maslahat dan menolak *madharat* merupakan tujuan-tujuan makhluk dan kebaikan makhluk di dalam menghasilkan tujuan-tujuan mereka, akan tetapi kita memaksudkan maslahat dengan menjaga tujuan syariat. Maksud syariat terkait makhluk ada lima, yaitu: menjaga agama, nyawa, akal, dan harta. Setiap hal yang mengandung menjaga lima dasar ini maka merupakan maslahat. Setiap perkara yang mengabaikan lima dasar ini merupakan suatu *mafsadah* dan menolaknya adalah maslahat.

e. *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Abdul Wahab Khalaf, 21-22:

ثَبَتَ بِالْاِسْتِقْرَاءِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تُسْتَفَادُ مِنْهَا الْأَحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى أَرْبَعَةٍ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ بِهَا وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا مُرَتَّبَةٌ فِي الْاِسْتِدْلَالِ بِهَا هَذَا التَّرْتِيبَ الْقُرْآنُ

فَالسُّنَّةُ فَالْإِجْمَاعُ فَالْقِيَاسُ ... وَتُوجَدُ أَدِلَّةٌ أُخْرَى عَدَا هٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَتَّفِقْ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ بِهَا ... وَأَشْهَرُ هٰذِهِ الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِي الْاِسْتِدْلَالِ بِهَا سِتَّةٌ الْاِسْتِحْسَانُ وَالْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ وَالْاِسْتِصْحَابُ وَالْعُرْفُ وَمَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا.

Telah ditetapkan berdasarkan *istiqra'* sungguh dalil-dalil syariat yang darinya diambil faidah hukum-hukum amaliyah kembali pada empat perkara: al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Empat dalil ini disepakati oleh *jumhur muslimin* sebagai *istidlal*. Para ulama sepakat juga bahwa empat dalil ini diurutkan dalam *istidlal* sebagaimana tertib ini; yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas... dalil-dalil lain yang selain empat ini ditemukan juga, namun tidak disepakati oleh *jumhur* muslimin untuk digunakan sebagai *istidlal* ... Dalil-dalil ini yang diperselisihkan untuk *istidlal* yang paling masyhur ada enam, yaitu: *istihsan*, *maslahat mursalah*, *istishab*, *urf*, *madzhab shahabi*, dan syariat umat sebelum kita.

f. *Asna al-Mathalib*, IX/159:

(وَالْحَقُّ) الَّذِي أُمِرَ الْمُجْتَهِدُ بِإِصَابَتِهِ (مَعَ أَحَدِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْفُرُوعِ). قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ أَوْ فِي الْأُصُولِ (وَالْآخَرُ مُخْطِئٌ مَأْجُورٌ لِقَصْدِهِ) الصَّوَابَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

(Kebenaran) yang *mujtahid* diperintahkan meraihnya (ada pada salah satu *mujtahid* dalam cabang-cabang). *Shahib al-Anwar* berkata atau dalam *al-Ushul* (*dan yang lain salah yang diberi pahala sebab tujuannya*) mencari kebenaran dan berdasarkan hadits al-Bukhari Muslim: "*Apabila Hakim berijtihad kemudian ia benar maka mendapatkan dua pahala, dan apabila ia berijtihad kemudian salah maka mendapatkan satu pahala.*"

6. Prinsip Jam'iyah NU اَلْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Prinsip kerja jam'iyah tersebut populer oleh inisiatif KH. Ahmad Shiddiq sekitar 1983-1984 bersamaan pelaksanaan MUNAS/Muktamar Situbondo. Bagi kalangan awam ungkapan slogan tersebut sama membingungkan dengan *"kembali ke khittah 1926"*. Kiranya perlu penjabaran otentik (*tafsir bayani*) atas maksud ungkapan tersebut.

Pertanyaan

a. Apakah slogan *jam'iyah* tersebut inklusif ke dalam kerangka "Khithah Nahdliyah"?

b. Gerak operasional slogan tersebut menghajatkan langkah *"tarjih"* guna mengklarifikasi sifat shalih dan *ashlah*. Bukankah kemampuan *tarjih* bagi NU tergolong aktifitas *ijtihad murajjih/muharrir*? Siapkah kader NU masa kini melakukan uji komparatif antara satu/lebih doktrin ulama salaf?
c. Efektifkah *implementasi* slogan tersebut pada masalah *siyasah duniawiyah*, teknis kejam'iyahan atau direkomendasikan pada wilayah ilmiah dan berarti peluang berpikir liberal?

Jawaban

Prinsip jami'yah sebagaimana diatas bukan bagian dari kaedah fikih sebagaimana yang disusun oleh para fuqaha'. Oleh karenanya slogan ini tidak dapat diterapkan dalam menentukan hukum syar'i. Dengan demikian masalah ini tidak dapat dibahas dalam komisi *Bahtsul Masail Fikhiyah* dan lebih tepat dibahas dalam komisi organisasi.

14. Kekebalan Jurnalistik

Sempat terwacanakan tafsir atas penggalan QS. al-Baqarah 282: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا sebagai dasar penetapan hukum kekebalan jurnalistik. Konsekuensi dari penafsiran tersebut mengesahkan kebebasan pers, hal tersebut rentan melahirkan pemberitaan sepihak dan mengakibatkan pencemaran nama baik seseorang. Kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh pemberitaan media cetak/elektronik oleh UU Pers dan Kode Jurnalistik difasilitasi dengan hak jawab lewat media yang sama. Kapasitas insan jurnalis tidak setingkat dengan saksi/*syahid* yang tentunya harus konfirmasi atas kebenaran berita (*vide* QS. al-Hujurat 6). Posisi subyek yang diberitakan justru sederajat dengan *mudda'a 'alaih* dan cukup bersumpah sebagai penolakan atas berita.

Pertanyaan

a. Seperti apakah rumusan tafsir komprehensif atas penggalan QS. al-Baqarah 282?
b. Adakah pengaturan kebebasan pers dalam Islam?
c. Sanksi hukum apa layak dijatuhkan kepada pelaku pencemaran nama baik seseorang karena perlindungan terhadap kehormatan hamba *"hifdzu al-irdhi"* masuk pada misi pokok *al-dharuriyat al-khams*?

Jawaban a

Menurut *Mufassirin* ayat tersebut berkaitan dengan hukum kesaksian (*tahammul* dan *ada' asy-Syahadah*). Dengan demikian ayat tersebut tidak ada kaitan dengan kebebasan pers dan tidak dapat dijadikan dalil pembenaran terhadap kebebasan pers.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tafsir al-Alusi*, II/390:

وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ لأَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ لِتَحَمُّلِهَا وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَخَصَّ ذٰلِكَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ جُبَيْرٍ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إِلَى ارْتِكَابِ الْمَجَازِ إِلَّا أَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنِ الرَّبِيعِ أَنَّ الْآيَةَ نُزِلَتْ حِيْنَ كَانَ الرَّجُلُ يَطُوفُ فِي الْقَوْمِ الْكَثِيرِ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَلَا يَتْبَعُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَسْتَدْعِي الْقَوْلَ بِمَجَازِ الْمُشَارَفَةِ.

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) bila mereka dipanggil" untuk menyampaikan *syahadah* atau menanggungnya. Ini yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Hasan ra. Mujahid dan ibn Jubair mengkhususkan yang pertama, yaitu menurut dhahir karena tidak perlu melakukan majaz, hanya saja yang diriwayatkan dari ar-Rabi' ayat tersebut turun ketika seorang laki-laki mengelilingi banyak kaum lalu memanggil mereka pada persaksian, maka tidak seorang pun dari mereka yang memenuhinya, karena lahiriahnya menarik ungkapan dengan *majaz musyarafah*.

b. *Tafsir Ibn Katsir*, I/725:

وقوله: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قِيلَ: مَعْنَاهُ: إِذَا دُعُوْا لِلتَّحَمُّلِ فَعَلَيْهِمُ الْإِجَابَةُ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ. وَهٰذَا كَقَوْلِهِ: وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَمِنْ هَاهُنَا اسْتُفِيدَ أَنَّ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَقِيلَ -وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ-: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا لِلْأَدَاءِ، لِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ: الشُّهَدَاءُ وَالشَّاهِدُ حَقِيقَةً فِيمَنْ تَحَمَّلَ، فَإِذَا دُعِيَ لِأَدَائِهَا فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، والله أعلم.

Firman Allah swt: *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."* Menurut riwayat, artinya ialah apabila mereka dipanggil untuk menanggung kesaksian, mereka harus memenuhinya; demikian ini menurut pendapat Qatadah, dan ar-Rabi' bin Anas. Ini seperti firman Allah swt: *"Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis."* Dari keterangan ini diambil faidah bahwa menanggung *syahadah* hukumnya *fardhu kifayah*. Menurut satu keterangan, yaitu menurut madzhab *Jumhur*, yang dimaksud dengan firman Allah swt: *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"* adalah untuk mendatangi

persaksian, karena hakikat dari firman Allah ﷻ: *"Saksi-saksi"* saksi itu hakikatnya adalah orang yang menanggung, maka apabila ia dipanggil untuk mendatanginya, maka ia harus memenuhi bila menjadi tertentu; apabila tidak maka hukumnya *fardhu kifayah. Wa Allahu a'lam.*

Jawaban b

Pers adalah bagian dari *ikhbar* (pemberitaan) kepada pembaca, oleh karenanya pemberitaan seharusnya mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a. Isi berita yang disampaikan harus benar-benar sesuai dengan kenyataan (*muthabiq lil waqi'*).
b. Berita yang disampaikan tidak menimbulkan fitnah seperti *namimah*, gejolak di masyarakat atau syahwat pembaca.
c. Tidak mengandung unsur *ghibah* (membuka aib orang lain) kecuali jika obyek yang diberitakan tergolong orang yang terang-terangan menampakkan kemungkaran dan pemberitaan dimaksudkan untuk peringatan kepada pembaca supaya tidak meniru perbuatan yang bersangkutan.
d. Pemberitaan yang menyangkut perbuatan zina, harus lebih berhati-hati sebab berpotensi masuk dalam kategori *qadzaf* (tuduhan zina yang memenuhi syarat-syaratnya) yang tergolong dosa besar dan berhak mendapat sangsi hukum *haddul qadzaf.*

Meskipun dalam Islam tidak ada aturan sanksi hukum tegas *(hudud)* akibat pemberitaan yang salah -kecuali dalam *qadzaf*- akan tetapi pemerintah berhak memberi hukum *ta'zir* karena mempertimbangkan dampak dari pemberitaan tersebut.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *QS. al-Hujurat: 6:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات: ٦].

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. al-Hujurat: 6).

b. *Fath al-Bari*, XVII/98:

قَوْلُه: (وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ) وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي قِيلَ وَقَالَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ لِلْقَوْلِ، تَقُولُ قُلْتُ قَوْلًا وَقِيلًا وَقَالًا وَالْمُرَادُ فِي الْأَحَادِيثِ الْإِشَارَةُ إِلَى

كَرَاهَةِ كَثْرَةِ الْكَلَامِ لِأَنَّهَا تَؤُولُ إِلَى الْخَطَإِ قَالَ: وَإِنَّمَا كَرَّرَهُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ، ثَانِيهَا: إِرَادَةُ حِكَايَةِ أَقَاوِيلِ النَّاسِ وَالْبَحْثِ عَنْهَا لِيُخْبِرَ عَنْهَا فَيَقُولُ: قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَقِيلَ كَذَا وَالنَّهْيُ عَنْهُ إِمَّا لِلزَّجْرِ عَنِ الْاِسْتِكْثَارِ مِنْهُ وَإِمَّا لِشَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْهُ وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ. ثَالِثُهَا: أَنَّ ذَلِكَ فِي حِكَايَةِ الْاِخْتِلَافِ فِي أُمُورِ الدِّينِ كَقَوْلِهِ: قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَقَالَ فُلَانٌ كَذَا وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يُؤْمَنُ مَعَ الْإِكْثَارِ مِنَ الزَّلَلِ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ يَنْقُلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ وَلَكِنْ يُقَلِّدُ مَنْ سَمِعَهُ وَلَا يَحْتَاطُ لَهُ. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ قَوْلُهُ: قِيلَ وَقَالَ مِنْ قَوْلِهِمْ قِيلَ كَذَا وَقَالَ كَذَا، وَبِنَاؤُهُمَا عَلَى كَوْنِهِمَا فِعْلَيْنِ مَحْكِيَّيْنِ مُتَضَمِّنَيْنِ لِلضَّمِيرِ وَالْإِعْرَابِ عَلَى إِجْرَائِهِمَا مَجْرَى الْأَسْمَاءِ خُلُوَّيْنِ مِنَ الضَّمِيرِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: إِنَّمَا الدُّنْيَا قِيلَ وَقَالَ وَإِدْخَالُ حَرْفِ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِمَا فِي قَوْلِهِ: مَا يُعْرَفُ الْقَالُ الْقِيلُ لِذَلِكَ.

Ungkapan ibn Hajar (dimakruhkan bagimu berkata "قيل وقال") al-Muhib at-Thabari berkata mengenai "قيل وقال". Beliau berkata, kata itu memiliki tiga *wajah*; *Pertama*: kedua kata tersebut merupakan *masdar* bagi قول, kamu berkata قلت قولا وقيلا وقالا. Maksud dari hadits tersebut adalah *isyarah* pada kemakruhan memperbanyak kalam, karena hal itu menjurus pada kesalahan. Beliau berkata: *"Bahwasanya beliau mengulang-ulang karena melebih-lebihkan dalam pelarangan." Kedua*: menghendaki menceritakan perbincangan manusia dan pembahasan darinya untuk mengabarkannya, lalu berkata: *Fulan berkata begini, dan katanya begitu*. Adapun larangan ini, adakalanya karena mencegah dari memperbanyak ungkapan dan adakalanya karena perkara tertentu, yaitu perkara yang dibenci orang yang diperbincangkan. *Ketiga*: Sungguh hal itu meriwayatkan perbedaan di dalam urusan agama, seperti ungkapan: *Fulan berkata demikian, dan fulan berkata demikian*. Letak kemakruhan itu ialah memperbanyak dari hal tersebut sekira tidak aman serta memperbanyak tergelincir, yaitu dikhususkan pada orang yang memindah hal itu tanpa hati-hati, akan tetapi mengikuti orang yang ia dengar dan ia tidak berhati-hati. Saya berkata: Hal itu dikuatkan oleh hadits shahih: *"Cukuplah bagi seseorang mendapat dosa, apabila ia menceritakan setiap perkara yang ia dengar."* (HR. Muslim). Dalam *syarah al-Misykah* ada ungkapan: قيل وقال dari ungkapan mereka: *"Dikatakan demikian dan katanya demikian"*. *Bina'* kedua ini

merupakan dua *fi'il* yang diceritakan yang menyimpan *dhamir* dan *i'rab* dengan menempatkan keduanya di tempat-tempat *isim* yang sepi dari *dhamir*. Di antaranya ungkapan: *Bahwasanya dunia ini adalah* قِيلَ وَقَالَ *dan memasukkan huruf ta'rif pada keduanya dalam sebuah ungkapan: Perkara yang diketahui* الْقَالُ الْقِيلُ *karena itu.*

c. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XVII/119:

الْإِنْسَانُ يُعَبِّرُ عَمَّا فِيْ نَفْسِهِ بِكِتَابَتِهِ كَمَا يُعَبِّرُ عَنْهُ بِلِسَانِهِ، وَلِهٰذَا قِيلَ: الْقَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ.

Manusia mengungkapkan perkara tentang dirinya dengan tulisannya, sebagaimana ia mengungkapkan dengan lisannya; karena itu dikatakan: *Pena merupakan salah satu dari dua bahasa.*

d. *Al-Adzkar*, I/340:

(بَابُ بَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيبَةِ) اعْلَمْ أَنَّ الْغِيبَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فَإِنَّهَا تُبَاحُ فِيْ أَحْوَالٍ لِلْمَصْلَحَةِ. وَالْمُجَوِّزُ لَهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ شَرْعِيٌّ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا، وَهُوَ أَحَدُ سِتَّةِ أَسْبَابٍ. الْأَوَّلُ: التَّظَلُّمُ، فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِيْ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فَيَذْكُرُ أَنَّ فُلَانًا ظَلَمَنِيْ، وَفَعَلَ بِيْ كَذَا، وَأَخَذَ لِيْ كَذَا، وَنَحْوَ ذٰلِكَ. الثَّانِيْ: الْاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِيْ إِلَى الصَّوَابِ، فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُوْ قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلَانٌ يَعْمَلُ كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ، وَنَحْوَ ذٰلِكَ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلَ إِلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذٰلِكَ كَانَ حَرَامًا. الثَّالِثُ: الْاِسْتِفْتَاءُ، بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُفْتِيْ: ظَلَمَنِيْ أَبِيْ أَوْ أَخِيْ، أَوْ فُلَانٌ بِكَذَا، فَهَلْ لَهُ ذٰلِكَ، أَمْ لَا؟ وَمَا طَرِيقِيْ فِي الْخَلَاصِ مِنْهُ وَتَحْصِيلِ حَقِّيْ وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنِّيْ؟ وَنَحْوَ ذٰلِكَ. وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ: زَوْجَتِيْ تَفْعَلُ مَعِيْ كَذَا، أَوْ زَوْجِيْ يَفْعَلُ كَذَا، وَنَحْوَ ذٰلِكَ، فَهٰذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، وَلٰكِنِ الْأَحْوَطُ أَنْ يَقُولَ: مَا تَقُولُ فِيْ رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا، أَوْ فِيْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ تَفْعَلُ كَذَا، وَنَحْوَ ذٰلِكَ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ، لِحَدِيثِ هِنْدَ الَّذِيْ سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَقَوْلِهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ الحديث، وَلَمْ يَنْهَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. الرَّابِعُ: تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ، وَذٰلِكَ مِنْ وُجُوهٍ: مِنْهَا جَرْحُ

الْمَجْرُوحِيْنَ مِنَ الرُّوَاةِ لِلْحَدِيْثِ وَالشُّهُوْدِ، وَذٰلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، بَلْ وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ. وَمِنْهَا مَا اسْتَشَارَكَ إِنْسَانٌ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ، أَوْ إِيْدَاعِهِ، أَوِ الْإِيْدَاعِ عِنْدَهُ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ بِغَيْرِ ذٰلِكَ، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ مَا تَعْلَمُهُ مِنْهُ عَلَى جِهَةِ النَّصِيْحَةِ، فَإِنْ حَصَلَ الْغَرَضُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِكَ لَا تَصْلُحُ لَكَ مُعَامَلَتُهُ، أَوْ مُصَاهَرَتُهُ، أَوْ لَا تَفْعَلْ هٰذَا، أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ، لَمْ تَجُزِ الزِّيَادَةُ بِذِكْرِ الْمَسَاوِيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْغَرَضُ إِلَّا بِالتَّصْرِيْحِ بِعَيْنِهِ فَاذْكُرْهُ بِصَرِيْحِهِ. وَمِنْهَا إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَشْتَرِيْ عَبْدًا يُعْرَفُ بِالسَّرِقَةِ أَوِ الزِّنَا أَوِ الشُّرْبِ أَوْ غَيْرِهَا، فَعَلَيْكَ أَنْ تُبَيِّنَ ذٰلِكَ لِلْمُشْتَرِيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِذٰلِكَ، بَلْ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِالسِّلْعَةِ الْمَبِيْعَةِ عَيْبًا وَجَبَ عَلَيْهِ بَيَانُهُ لِلْمُشْتَرِيْ إِذَا لَمْ يَعْلَمْهُ. وَمِنْهَا إِذَا رَأَيْتَ مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ خِفْتَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذٰلِكَ، فَعَلَيْكَ نَصِيْحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَ النَّصِيْحَةَ، وَهٰذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيْهِ، وَقَدْ يَحْمِلُ الْمُتَكَلِّمَ بِذٰلِكَ الْحَسَدُ، أَوْ يُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ، وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيْحَةٌ وَشَفَقَةٌ، فَلْيَتَفَطَّنْ لِذٰلِكَ. وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُوْنَ لَهُ وِلَايَةٌ لَا يَقُوْمُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا، إِمَّا بِأَنْ لَا يَكُوْنَ صَالِحًا لَهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يَكُوْنَ فَاسِقًا أَوْ مُغَفَّلًا وَنَحْوَ ذٰلِكَ، فَيَجِبُ ذِكْرُ ذٰلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ لِيُزِيْلَهُ وَيُوَلِّيَ مَنْ يَصْلُحُ أَوْ يَعْلَمَ ذٰلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حَالِهِ وَلَا يَغْتَرَّ بِهِ، وَأَنْ يَسْعَى فِيْ أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ. الْخَامِسُ: أَنْ يَكُوْنَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ، كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ مُصَادَرَةِ.

(*Bab Menjelaskan Menggunjing yang Diperbolehkan*) Ketahuilah sungguh menggunjing orang lain meskipun diharamkan, tapi sungguh dibolehkan dalam beberapa kondisi karena maslahat. Hal-hal yang membolehkannya adalah tujuan yang benar menurut syara' yang tidak mungkin tercapai kecuali dengannya, yaitu salah satu dari 6 sebab. *Pertama*, mengadukan kezaliman maka boleh bagi orang yang dizalimi melaporkan kepada sultan, *qadhi* dan lainnya dari pihak yang memiliki wilayah atau memiliki kuasa agar menjatuhkan hukuman yang setimpal pada pelaku dhalim. Lantas menuturkan bahwa si fulan mendhalimiku, melakukan sesuatu padaku, mengambil sesuatu milikku dan sebagainya. *Kedua*, meminta bantuan agar mengubah kemungkaran serta mengembalikan pelaku

maksiat ke jalan yang benar, lalu berkata pada orang yang diharapkan kuasanya agar menghilangkan kemungkaran: *Si fulan melakukan sesuatu maka cegahlah ia dari tindakannya,* dan sebagainya. Adapun maksudnya ialah bertujuan agar menghilangkan kemungkaran; bila tidak bertujuan demikian, maka hukumnya haram. *Ketiga:* meminta fatwa, dengan gambaran ia berkata kepada Mufti: *"Ayahku atau saudaraku menzalimiku, atau Fulan berbuat demikian, maka apakah ia boleh melakukannya atau tidak? Bagaimana caraku menyelamatkan diri, menghasilkan hakku dan menghindari penganiayaan padaku?* dan sebagainya. Begitu pula ungkapan: *Istriku berbuat demikian padaku, atau suamiku melakukan demikian* dan sebagainya. Maka ini diperbolehkan karena hajat, akan tetapi yang lebih hati-hati berkata: *Apakah yang akan kamu katakan mengenai seorang laki-laki yang menyuruh sesuatu atau mengenai suami atau istri yang melakukan demikian* dan sebagainya; maka sungguh tujuannya tercapai tanpa menentukan, di samping penentuan itu boleh karena hadits Hindun yang akan kita sebutkan insya Allah ﷻ, dan ungkapan beliau: *"Ya Rasulallah, sungguh Abu Sufyan ialah seorang laki-laki yang pelit,"* al-Hadits; dan Rasulullah ﷺ tidak mencegahnya. *Keempat*, memberi peringatan kaum muslim dari keburukan dan menasehati mereka; hal tersebut dari beberapa *wajah*, di antaranya men*jarhu* (menilai cacat) orang-orang yang dianggap cacat dari para perawi terhadap hadits dan para saksi. Hal itu boleh menurut *ijma'* muslimin, bahkan wajib karena hajat. Di antaranya perkara dimana seseorang meminta pendapat dalam hubungan perjodohan, kerjasama, penitipan atau menerima titipan, atau transaksi dengan selain hal itu, maka wajib bagimu menyebutkan perkara yang kamu ketahui padanya dengan tujuan nasehat. Apabila tujuan tersebut tercapai dengan murni bahasa lisanmu maka tidak layak bagimu bertransaksi, atau hubungan mertua dengannya; atau janganlah kamu mengerjakan ini atau sesamanya maka tidak dibolehkan menambahi dengan menyebutkan keburukan-keburukan. Apabila tujuan tidak tercapai kecuali dengan menjelaskan bentuknya maka sebutkanlah secara *sharih*. Di antaranya apabila kamu melihat orang yang membeli budak yang dikenal suka mencuri, berzina, mabuk atau lainnya, maka kamu harus menjelaskannya pada pembeli apabila dia tidak mengetahuinya, dan tidak hanya hal di atas, bahkan setiap orang yang mengetahui barang dagangan yang terdapat cacat maka wajib baginya menjelaskan kepada pembeli apabila dia tidak mengetahuinya. Di antaranya apabila kamu melihat siswa bergaul pada pelaku *bid'ah* atau orang *fasik* untuk mengambil ilmu darinya yang kamu khawatirkan membahayakan kepada siswa tersebut, maka kamu harus menasehati dengan menjelaskan duduk perkaranya, dan disyaratkan bermaksud menasehati, dan ini merupakan perkara yang sering terjadi

kesalahan, dan terkadang pembicara tentang hal tersebut terdorong *hasud* atau setan mengaburkan hal itu padanya dan menghayalkannya sebagai nasehat dan kasih sayang, maka cermatlah terhadap hal tersebut. Di antaranya ia tidak memiliki wilayah yang tidak bisa tegak dengannya menurut jalannya, adakala karena tidak layak dan adakala karena ia fasik atau pelupa dan sebagainya, maka wajib menuturkan hal itu pada orang yang memiliki kekuasaan wilayah umum agar menghentikannya dan menyerahkan urusannya pada orang yang pantas menangani atau mengetahui urusannya agar bertransaksi dengan tuntutan kondisi dan tidak terbujuk olehnya dan berjalan dalam memotifasinya agar *istiqamah* atau mencari gantinya. *Kelima:* Menampakkan kefasikan atau bid'ahnya seperti orang yang terang-terangan minum *khamr* atau merampas.

e. *Fath al-Wahab*, II/289:

(فَصْلٌ) (فِي التَّعْزِيرِ) مِنَ الْعَزْرِ أَيِ الْمَنْعِ وَهُوَ لُغَةً التَّأْدِيبُ وَشَرْعًا تَأْدِيبٌ عَلَى ذَنْبٍ لَا حَدَّ فِيهِ، وَلَا كَفَّارَةَ غَالِبًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ). وَفِعْلُهُ ﷺ رواه الحاكم في صحيحه (عَزَّرَ لِمَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ)، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ، كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَسَبٍّ لَيْسَ بِقَذْفٍ، وَتَزْوِيرٍ وَشَهَادَةِ زُورٍ وَضَرْبٍ بِغَيْرِ حَقٍّ بِخِلَافِ الزِّنَا، لِإِيجَابِهِ الْحَدَّ وَبِخِلَافِ التَّمَتُّعِ بِطِيبٍ، وَنَحْوِهِ فِي الْإِحْرَامِ لِإِيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ، وَأَشَرْتُ بِزِيَادَتِي (غَالِبًا) إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُشْرَعُ التَّعْزِيرُ وَلَا مَعْصِيَةَ كَمَنْ يَكْتَسِبُ بِاللَّهْوِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ مَعَهُ، وَقَدْ يَنْتَفِي مَعَ انْتِفَاءِ الْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ صَدَرَتْ مِنْ وَلِيٍّ لِلَّهِ تَعَالَى وَكَمَا فِي قَطْعِ شَخْصٍ أَطْرَافَ نَفْسِهِ، وَأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ كَمَا فِي تَكَرُّرِ الرِّدَّةِ وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَإِفْسَادِ الصَّائِمِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ حَلِيلَتِهِ، وَيَحْصُلُ (بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ) غَيْرِ مُبَرِّحٍ كَصَفْعٍ وَنَفْيٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَتَسْوِيدِ وَجْهٍ وَصَلْبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ، وَتَوْبِيخٍ بِكَلَامٍ لَا بِحَلْقِ لِحْيَةٍ (بِاجْتِهَادِ إِمَامٍ) جِنْسًا وَقَدْرًا إِفْرَادًا وَجَمْعًا وَلَهُ فِي الْمُتَعَلِّقِ بِحَقِّ اللهِ تَعَالَى الْعَفْوُ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ أَوْ تَوْبِيخٍ، وَالصَّفْعُ الضَّرْبُ بِجَمْعِ الْكَفِّ أَوْ بِبَسْطِهَا (وَلْيَنْقُصْهُ) أَيِ الْإِمَامُ التَّعْزِيرَ وُجُوبًا (عَنْ أَدْنَى حَدِّ الْمُعَزَّرِ) فَيَنْقُصُ فِي تَعْزِيرِ الْحُرِّ بِالضَّرْبِ عَنْ أَرْبَعِينَ، وَبِالْحَبْسِ أَوِ النَّفْيِ

عَنْ سَنَةٍ وَفِيْ تَعْزِيْرِ غَيْرِهِ بِالضَّرْبِ عَنْ عِشْرِيْنَ وَبِالْحَبْسِ أَوِ النَّفْيِ، عَنْ نِصْفِ سَنَةٍ
لِخَبَرِ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِيْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ رواه البيهقي، وَقَالَ الْمَحْفُوْظُ إِرْسَالُهُ.

(Pasal) (*Ta'zir*) dari *masdar* تعزر yaitu mencegah, menurut bahasa adalah mengajarkan budi pekerti; sedangkan menurut *syara'* ialah mengajarkan budi pekerti atas dosa yang tidak terdapat *had*, dan tidak ada *kafarat* pada umumnya; sebagaimana diadopsi dari keterangan yang akan datang. Dasarnya sebelum *ijma'* adalah ayat: *"perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya"* dan tindakan Nabi ﷺ yang diriwayatkan al-Hakim dalam *Shahih*nya (*Bahwa nabi menta'zir karena maksiat yang tidak terdapat had dan tidak terdapat kafarat di dalamnya*), baik berupa hak Allah atau hak Adami, sebagaimana bersentuhan kulit dengan wanita lain selain *farji*, mencaci-maki selain menuduh zina, berdusta, kesaksian palsu, dan memukul tanpa hak. Lain halnya dengan zina, karena menetapkan *had* dan berbeda dengan bersenang-senang dengan memakai parfum dan sesamanya pada waktu ihram; karena menetapkan *kafarat*. Dan saya mengisyaratkan dengan tambahanku (secara umum) bahwa sungguh terkadang *ta'zir* disyariatkan sementara tidak ada maksiat seperti orang yang memainkan alat musik tanpa melakukan maksiat. Dan terkadang tidak wujud dengan tidak adanya *had* dan kafarat; sebagaimana dosa kecil yang timbul dari wali Allah ﷻ dan seperti pemotongan seseorang terhadap anggota tubuhnya, dan sungguh terkadang berkumpul bersama *had*, sebagaimana perbuatan murtad dan terkadang berkumpul bersama *kafarat* di dalam *dhihar*, sumpah palsu dan merusak puasa Ramadhan sehari dengan menyetubui istrinya, dan *ta'zir* dapat dilakukan (dengan menahan dan memukul, misalnya) yang tidak menyakitkan seperti menampar, mengasingkan, membuka penutup kepala, menghitamkan wajah dan menyalib selama tiga hari atau kurang dan mencerca dengan ungkapan, tidak dengan memotong jenggot (berdasarkan *ijtihad* imam) dari sisi jenis, kadar, sendiri dan berkumpul. Ia boleh memberi grasi dalam pelanggaran yang berhubungan dengan hak Allah bila ia melihat maslahat. Ungkapanku tersebut lebih umum daripada ungkapannya *"Dengan menahan, memukul, manampar, atau mencerca."* Menampar ialah memukul dengan menggunakan tangan atau dengan membukanya, (dan hendaklah imam menguranginya) maksudnya imam wajib mengurangi *ta'zir* (dari batas minimal *had* pelaku yang di*ta'zir*), maka ia mengurangi dalam men*ta'zir* laki-laki merdeka dengan memukul 40 kali dan dengan menahan atau mengasingkan selama satu tahun dan dalam men*ta'zir* budak dengan memukul sebanyak 20 kali dan dengan menahan atau mengasingkan selama setengah tahun, sebagaimana khabar: *"Orang yang*

melebihi batas di selain batasnya maka ia merupakan orang yang melampaui batas." HR. al-Baihaqi, dan ia berkata: *"Hadits ini terjaga kemursalannya."*

15. Baiat dalam Pengamalan Agama

Proses penerimaan keislaman seseorang/kelompok pada masa hidup Nabi Muhammad ﷺ ditandai dengan baiat. QS. al-Taubah 111, al-Mumtahanah 12, al-Fatah 10, 19 dan fakta sejarah periode *nubuwah*. Pada masa sekarang *ceremony* baiat mewarnai proses penerimaan *salik* oleh *mursyid thariqah*. Hegemoni rasa keagamaan versi *thariqah* senantiasa menjadi kebanggaan tersendiri. Ekses negatifnya menimpa kelompok muslim yang tidak mengafiliasikan diri pada jaringan *thariqah* tertentu. Dalam hazanah fuqaha baiat menjadi syarat legitimasi pejabat *khilafah/imamah*.

Pertanyaan

a. Wajibkah setiap muslim ber*thariqah* dan berbaiat kepada *mursyid* tertentu?
b. Seberapa jauh baiat dalam *thariqah* memiliki nilai tambah bagi mutu amaliah keagamaan seseorang?
c. Prosedur baiat *barzahiyah* cukup menjadi bukti bahwa sanad thariqah tidak diwarnai fakta *mu'asharah* (kesejamanan) dan tak ada jaminan *tsubut al-liqa'* (kepastian komunikasi antara *mursyid* dengan *khalifah*), berarti sanad *thariqah* terputus. Adakah jaminan *syar'i* bahwa temu ruh, konsultasi spiritual memadai untuk dasar *ittiba'*?

Jawaban a dan b

Thariqah memiliki dua makna, yaitu *'amm* (umum) dalam arti mengamalkan kewajiban syariat, membersihkan hati dari sifat-sifat kotor dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji, adalah bagian kewajiban setiap muslim. Sedangkan dalam makna *khash* (spesifik) dalam istilah *shufiyah* yang berbentuk metode *suluk* yang disusun oleh pendiri *thariqat* adalah sunah.

Dasar Hukum

a. *QS. asy-Syams:* 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا [الشمس/٧-١٠]

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), *Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu* (jalan) *kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya.*

b. *Dala`il al-'Aliyah; As`ilah wa Ajwibah fi at-Tashawwuf wa Thariqah as-Sadat an-Naqsyabandiyah*, Dr. Najmuddin al-Kurdi, 36:

(س) هَلْ يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَصَوَّفَ؟ (ج) إِذَا أُرِيْدَ بِالتَّصَوُّفِ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّحَلِّيْ بِالْفَضَائِلِ وَالتَّخَلِّيْ عَنِ الرَّذَائِلِ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَإِذَا أُرِيْدَ بِالتَّصَوُّفِ هُنَا الْاِنْضِمَامُ إِلَى طُرُقِ الصُّوْفِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ النِّسْبَةِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ سُنَّةٌ وَإِذَا أُرِيْدَ بِالتَّصَوُّفِ الْعَمَلُ بِمَا عَهِدَهُ الْمُرِيْدُ إِمَامَ شَيْخِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ لِقَرِيْنَةٍ أَوْجَبَتْ ذٰلِكَ وَهُوَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ. أَمَّا قَبُوْلُ الشَّيْخِ لِمُبَايَعَةِ الْمُرِيْدِ وَتَلْقِيْنِهِ الذِّكْرَ وَالْأَوْرَادَ إِيَّاهُ فَتَفَضُّلٌ مِنْ جَنَابِهِ الْكَرِيْمِ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ يُثَابُ الشَّيْخُ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ بِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ إِنْ تَرَكَهُ أَوِ امْتَنَعَ عَنْهُ. وَإِذَا كُنْتَ مِنَ الَّذِيْنَ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّيْنِ فَأَوْلَى بِكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْخَيْرَيْنِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ (الْفِقْهِ) وَالتَّصَوُّفِ وَأَنْ تَعْمَلَ بِنَصِيْحَةِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه حَيْثُ يَقُوْلُ:

فَقِيْهًا وَصُوْفِيًّا فَكُنْ لَيْسَ وَاحِدًا ۞ فَإِنِّيْ وَحَقِّ اللهِ إِيَّاكَ أَنْصَحُ

فَذٰلِكَ قَاسٍ لَمْ يَذُقْ قَلْبُهُ تُقًى ۞ وَهٰذَا جَهُوْلٌ كَيْفَ ذُو الْجَهْلِ يَصْلُحُ

(*Pertanyaan*) Apakah wajib bagi kaum muslim berperilaku tasawuf?

(*Jawab*) Bila yang dikehendaki tasawuf ialah ungkapan tentang menghiasi dengan keutamaan-keutamaan dan menghindari hal-hal rendah, maka merupakan *fardhu ain* bagi tiap-tiap *mukallaf* dari kaum muslimin dan muslimat. Apabila yang dikehendaki tasawuf di sini adalah bergabung dengan tarekat para sufi yang sah dinisbatkan pada Rasulullah ﷺ maka disunahkan. Jika yang dikehendaki dengan tasawuf ialah mengamalkan ajaran yang telah dijanjikan murid di depan Syaikhnya maka merupakan kewajiban karena *qarinah* yang mewajibkan hal itu; yaitu memenuhi janji. Adapun syaikh menerima untuk membaiat murid dan men*talqin*nya zikir dan wirid-wirid padanya, maka keutamaan dari sisinya yang mulia yaitu disunahkan dan Syaikhnya mendapat pahala bila ia menegakkannya dan tidak disiksa bila ia meninggalkannya atau mencegahnya. Apabila kamu termasuk orang-orang yang diberikan anugerah ilmu agama oleh Allah, maka sebaiknya kamu mengumpulkan di antara dua kebaikan syariat (yaitu fikih) dan tasawuf dan hendaknya kamu mengamalkan nasehat imam asy-Syafi'i ؓ, tatkala beliau berkata:

Jadilah seorang fakih dan sufi, dan jangan menjadi salah satunya ❀ sungguh aku demi Allah menasehati padamu.
Seorang fakih saja hatinya keras dan hatinya tidak merasakan takwa ❀ Seorang sufi saja adalah sangat bodoh, bagaimana orang bodoh menjadi baik.

c. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, I/14:

مَبْحَثٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ شَرِيعَةً وَهِيَ أَنْ تَعْبُدَهُ تَعَالَى، فَعِبَادَةُ اللهِ تَعَالَى شَرِيعَةٌ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ الشَّرِيعَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا شَرَعَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْأَحْكَامِ وَطَرِيقَةٌ وَهِيَ أَنْ تَقْصِدَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَحَقِيقَةٌ وَهِيَ نَتِيجَتُهُمَا وَهِيَ أَنْ تَشْهَدَ بِنُورٍ أَوْدَعَهُ اللهُ فِي سُوَيْدَاءِ الْقَلْبِ أَيْ وَسَطِهِ، أَنَّ كُلَّ بَاطِنٍ لَهُ ظَاهِرٌ وَعَكْسُهُ أَيْ كُلُّ ظَاهِرٍ لَهُ بَاطِنٌ مَعْلُومٌ كَخَرْقِ الْخَضِرِ لِلسَّفِينَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُنْكَرًا ظَاهِرًا فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْبَاطِنِ، لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِنَجَاةِ السَّفِينَةِ مِنَ الْمَلِكِ، وَالْأَوْلَى أَنْ تُعَرَّفَ الْحَقِيقَةُ بِعِلْمِ بَوَاطِنِ الْأُمُورِ كَعِلْمِ الْخَضِرِ بِأَنَّ مَا فَعَلَهُ مَعَ مُوسَى مِنْ خَرْقِ السَّفِينَةِ وَغَيْرِهَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ مَفْسَدَةً فِي الْبَعْضِ، وَالشَّرِيعَةُ ظَاهِرُ الْحَقِيقَةِ وَالْحَقِيقَةُ بَاطِنُهَا وَهُمَا مُتَلَازِمَانِ مَعْنًى كَمَا سَبَقَ وَمَثَّلْتُ الثَّلَاثَةَ بِالْجَوْزَةِ فَالشَّرِيعَةُ كَالْقِشْرِ الظَّاهِرِ، وَالطَّرِيقَةُ كَاللُّبِّ الْخَفِيِّ، وَالْحَقِيقَةُ كَالدُّهْنِ الَّذِي فِي بَاطِنِ اللُّبِّ، وَلَا يُتَوَصَّلُ إِلَى اللُّبِّ إِلَّا بِخَرْقِ الْقِشْرِ وَلَا إِلَى الدُّهْنِ إِلَّا بِدَقِّ اللُّبِّ.

Pembahasan mengenai syariat, thariqah, dan haqiqat. Ketahuilah sungguh syariat menurut ulama adalah kamu menyembah kepada Allah ﷻ. Ibadah kepada Allah ﷻ merupakan syariat menurut mereka, karena sungguh ibadah merupakan tujuan dari syariat, meski syariat menurut fuqaha ialah perkara yang disyariatkan Allah ﷻ terkait hukum-hukum. Dan thariqah ialah kamu menuju kepada-Nya dengan ilmu dan amal. Sementara hakikat merupakan buah dari keduanya, yaitu apabila kamu menyaksikan dengan cahaya yang dititipkan oleh Allah dalam tengah hati; sungguh setiap batin memiliki lahir dan sebaliknya; maksudnya setiap lahir memiliki batin yang diketahui, seperti Nabi Khidhir merusak perahu, karena sungguh meskipun diingkari secara dhahir namun itu boleh menurut batin, karena itu merupakan sebab keselamatan perahu dari raja. Yang lebih utama hakikat didefinisikan dengan mengetahui batin perkara seperti ilmu Nabi Khidhir bahwa sungguh perkara yang dikerjakannya bersama Nabi Musa tentang merusak perahu dan lainnya terdapat maslahat, meskipun secara dhahir merusak sebagian. Syariat

ialah dhahir hakikat. Sementara hakikat ialah batinnya, dan keduanya saling melengkapi satu makna sebagaimana telah lalu. Saya misalkan tiga perkara itu dengan buah kelapa; Syariat seperti kulitnya, thariqah seperti buah yang samar, sedangkan hakikat seperti minyak yang ada dalam buah. Dan tidak akan mencapai buah kecuali dengan membedah kulitnya dan tidak akan mencapai minyak kecuali dengan melembutkan buahnya.

d. *Iqadl al-Hamam Syarh Matan al-Hikam*, I/5:

وَالْأَعْمَالُ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ عَمَلِ الشَّرِيْعَةِ وَعَمَلِ الطَّرِيْقَةِ وَعَمَلِ الْحَقِيْقَةِ أَوْ تَقُوْلُ عَمَلِ الْإِسْلَامِ وَعَمَلِ الْإِيْمَانِ وَعَمَلِ الْإِحْسَانِ أَوْ تَقُوْلُ عَمَلِ الْعِبَادَةِ وَعَمَلِ الْعُبُوْدِيَّةِ وَعَمَلِ الْعُبُوْدَةِ أَيِ الْحُرِّيَّةِ أَوْ تَقُوْلُ عَمَلِ أَهْلِ الْبِدَايَةِ وَعَمَلِ أَهْلِ الْوَسَطِ وَعَمَلِ أَهْلِ النِّهَايَةِ فَالشَّرِيْعَةُ أَنْ تَعْبُدَهُ وَالطَّرِيْقَةُ أَنْ تَقْصِدَهُ وَالْحَقِيْقَةُ أَنْ تَشْهَدَهُ أَوْ تَقُوْلُ الشَّرِيْعَةُ لِإِصْلَاحِ الظَّوَاهِرِ وَالطَّرِيْقَةُ لِإِصْلَاحِ الضَّمَائِرِ وَالْحَقِيْقَةُ لِإِصْلَاحِ السَّرَائِرِ، وَإِصْلَاحُ الْجَوَارِحِ بِثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّقْوَى وَالْاِسْتِقَامَةِ، وَإِصْلَاحُ الْقُلُوْبِ بِثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ بِالْإِخْلَاصِ وَالصِّدْقِ وَالطُّمَأْنِيْنَةِ، وَإِصْلَاحُ السَّرَائِرِ بِثَلَاثَةِ أُمُوْرٍ بِالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمَعْرِفَةِ أَوْ تَقُوْلُ إِصْلَاحُ الظَّوَاهِرِ بِاجْتِنَابِ النَّوَاهِيْ وَامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، وَإِصْلَاحُ الضَّمَائِرِ بِالتَّخْلِيَةِ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالتَّحْلِيَةِ بِأَنْوَاعِ الْفَضَائِلِ، وَإِصْلَاحُ السَّرَائِرِ وَهِيَ هُنَا الْأَرْوَاحُ بِذُلِّهَا وَانْكِسَارِهَا حَتَّى تَتَهَذَّبَ وَتَرْتَاضَ بِالْأَدَبِ وَالتَّوَاضُعِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ.

Amal-amal menurut *ahli fan* ada tiga macam: Yaitu amal syariat, amal thariqah dan amal hakikat; atau kamu berkata: Amal Islam, amal iman dan amal ihsan; atau kamu berkata: Amal ibadah, amal ubudiyah dan amal *"ubudah"*, maksudnya merdeka; atau kamu berkata: Amal ahli bidayah, amal ahli *wasath* dan amal ahli *nihayah*. Maka syariat adalah kamu menyembah Allah, thariqah adalah kamu menuju kepada Allah dan hakikat ialah kamu menyaksikan kepada-Nya; atau kamu berkata: syariat ialah untuk memperbaiki dhahir, thariqah untuk memperbaiki dhamir dan hakikat untuk memperbaiki *sirri*. Adapun memperbaiki anggota tubuh dengan tiga perkara; yaitu taubat, taqwa dan istiqamah. Memperbaiki hati dengan tiga hal, yaitu ikhlas, jujur dan *tumakninah*. Memperbaiki rahasia dengan tiga perkara; yaitu mawas diri, merasa disaksikan dan makrifat. Atau kamu berkata: Memperbaiki dhahir dengan menjauhi larangan dan mengikuti perintah. Memperbaiki dhamir dengan

menghindari hal-hal yang rendah dan menghiasi dengan keutamaan-keutamaan. Memperbaiki rahasia,–yang dimaksud ialah ruh–dengan menyerahkannya dan memecahkannya hingga kamu memiliki kesopanan dan adab yang direlakan, *tawadhu'* dan budi pekerti yang baik.

e. *Ihya' 'Ulumiddin*, II/261:

وَكَمَا أَنَّ الْبَدَنَ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَشَأْنُ الطَّبِيبِ تَمْهِيدُ الْقَانُونِ الْحَافِظِ لِلصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَشَأْنُهُ جَلْبُ الصِّحَّةِ إِلَيْهِ، فَكَذٰلِكَ النَّفْسُ مِنْكَ إِنْ كَانَتْ زَكِيَّةً طَاهِرَةً مُهَذَّبَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْعَى لِحِفْظِهَا وَجَلْبِ مَزِيدِ قُوَّةٍ إِلَيْهَا وَاكْتِسَابِ زِيَادَةِ صَفَائِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَدِيمَةَ الْكَمَالِ وَالصَّفَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْعَى لِجَلْبِ ذٰلِكَ عَلَيْهَا. وَكَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُغَيِّرَةَ لِاعْتِدَالِ الْبَدَنِ الْمُوجِبَةَ لِلْمَرَضِ لَا تُعَالَجُ إِلَّا بِضِدِّهَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَرَارَةٍ فَبِالْبُرُودَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ بُرُودَةٍ فَبِالْحَرَارَةِ، فَكَذٰلِكَ الرَّذِيلَةُ الَّتِي هِيَ مَرَضُ الْقَلْبِ وَعِلَاجُهَا بِضِدِّهَا. فَيُعَالَجُ مَرَضُ الْجَهْلِ بِالتَّعَلُّمِ، وَمَرَضُ الْبُخْلِ بِالتَّسَخِّي، وَمَرَضُ الْكِبْرِ بِالتَّوَاضُعِ، وَمَرَضُ الشَّرَهِ بِالْكَفِّ عَنِ الْمُشْتَهَى تَكَلُّفًا. وَكَمَا أَنَّ لَابُدَّ مِنَ الْاِحْتِمَالِ لِمَرَارَةِ الدَّوَاءِ وَشِدَّةِ الصَّبْرِ عَنِ الْمُشْتَهَيَاتِ لِعِلَاجِ الْأَبْدَانِ الْمَرِيضَةِ فَكَذٰلِكَ لَابُدَّ مِنِ احْتِمَالِ مَرَارَةِ الْمُجَاهَدَةِ وَالصَّبْرِ لِمُدَاوَاةِ مَرَضِ الْقَلْبِ بَلْ أَوْلَى. فَإِنَّ مَرَضَ الْبَدَنِ يُخْلَصُ مِنْهُ بِالْمَوْتِ وَمَرَضُ الْقَلْبِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ مَرَضٌ يَدُومُ بَعْدَ الْمَوْتِ أَبَدَ الْآبَادِ. وَكَمَا أَنَّ كُلَّ مُبَرِّدٍ لَا يَصْلُحُ لِعِلَّةٍ سَبَبُهَا الْحَرَارَةُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ عَلَى حَدٍّ مَخْصُوصٍ –وَيَخْتَلِفُ ذٰلِكَ بِالشِّدَّةِ وَالضُّعْفِ وَالدَّوَامِ وَعَدَمِهِ بِالْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ، وَلَابُدَّ لَهُ مِنْ مِعْيَارٍ يَعْرِفُ بِهِ مِقْدَارَ النَّافِعِ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِعْيَارَهُ زَادَ الْفَسَادُ– فَكَذٰلِكَ النَّقَائِضُ الَّتِي تُعَالَجُ بِهَا الْأَخْلَاقُ لَابُدَّ لَهَا مِنْ مِعْيَارٍ. وَكَمَا أَنَّ مِعْيَارَ الدَّوَاءِ مَأْخُوذٌ مِنْ عِيَارِ الْعِلَّةِ حَتَّى إِنَّ الطَّبِيبَ لَا يُعَالِجُ مَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ الْعِلَّةَ مِنْ حَرَارَةٍ أَوْ بُرُودَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَرَارَةٍ فَيَعْرِفُ دَرَجَتَهَا أَهِيَ ضَعِيفَةٌ أَمْ قَوِيَّةٌ؟ فَإِذَا عَرَفَ ذٰلِكَ الْتَفَتَ إِلَى أَحْوَالِ الْبَدَنِ وَأَحْوَالِ الزَّمَانِ وَصِنَاعَةِ الْمَرِيضِ وَسِنِّهِ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ ثُمَّ يُعَالِجُ بِحَسَبِهَا.

فَكَذٰلِكَ الشَّيْخُ الْمَتْبُوعُ الَّذِي يُطَبِّبُ نُفُوسَ الْمُرِيدِينَ وَيُعَالِجُ قُلُوبَ الْمُسْتَرْشِدِينَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَهْجُمَ عَلَيْهِمْ بِالرِّيَاضَةِ وَالتَّكَالِيفِ فِي فَنٍّ مَخْصُوصٍ وَفِي طَرِيقٍ مَخْصُوصٍ مَا لَمْ يَعْرِفْ أَخْلَاقَهُمْ وَأَمْرَاضَهُمْ. وَكَمَا أَنَّ الطَّبِيبَ لَوْ عَالَجَ جَمِيعَ الْمَرْضَى بِعِلَاجٍ وَاحِدٍ

قَتَلَ أَكْثَرَهُمْ فَكَذَلِكَ الشَّيْخُ لَوْ أَشَارَ عَلَى الْمُرِيدِينَ بِنَمَطٍ وَاحِدٍ مِنَ الرِّيَاضَةِ أَهْلَكَهُمْ وَأَمَاتَ قُلُوبَهُمْ. بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي مَرَضِ الْمُرِيدِ وَفِي حَالِهِ وَسِنِّهِ وَمِزَاجِهِ وَمَا تَحْتَمِلُهُ بِنْيَتُهُ مِنَ الرِّيَاضَةِ وَيَبْنِي عَلَى ذَلِكَ رِيَاضَتَهُ. فَإِنْ كَانَ الْمُرِيدُ مُبْتَدِئًا جَاهِلًا بِحُدُودِ الشَّرْعِ فَيُعَلِّمُهُ أَوَّلًا الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ وَظَوَاهِرَ الْعِبَادَاتِ، وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ مُقَارِفًا لِمَعْصِيَةٍ فَيَأْمُرُهُ أَوَّلًا بِتَرْكِهَا، فَإِذَا تَزَيَّنَ ظَاهِرُهُ بِالْعِبَادَاتِ وَطَهُرَ عَنِ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ جَوَارِحُهُ نَظَرَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ إِلَى بَاطِنِهِ لِيَتَفَطَّنَ لِأَخْلَاقِهِ وَأَمْرَاضِ قَلْبِهِ: فَإِنْ رَأَى مَعَهُ مَالًا فَاضِلًا عَنْ قَدْرِ ضَرُورَتِهِ أَخَذَهُ مِنْهُ وَصَرَفَهُ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَلْتَفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنْ رَأَى الرُّعُونَةَ وَالْكِبْرَ وَعِزَّةَ النَّفْسِ غَالِبَةً عَلَيْهِ فَيَأْمُرُهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْأَسْوَاقِ لِلْكُدْيَةِ وَالسُّؤَالِ، فَإِنَّ عِزَّةَ النَّفْسِ وَالرِّيَاسَةِ لَا تَنْكَسِرُ إِلَّا بِالذُّلِّ وَلَا ذُلَّ أَعْظَمُ مِنْ ذُلِّ السُّؤَالِ فَيُكَلِّفُهُ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً حَتَّى يَنْكَسِرَ كِبْرُهُ وَعِزُّ نَفْسِهِ، فَإِنَّ الْكِبْرَ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُهْلِكَةِ وَكَذَلِكَ الرُّعُونَةُ، وَإِنْ رَأَى الْغَالِبَ عَلَيْهِ النَّظَافَةَ فِي الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ وَرَأَى قَلْبَهُ مَائِلًا إِلَى ذَلِكَ فَرِحًا بِهِ مُلْتَفِتًا إِلَيْهِ اسْتَخْدَمَهُ فِي تَعَهُّدِ بَيْتِ الْمَاءِ وَتَنْظِيفِهِ وَكَنْسِ الْمَوَاضِعِ الْقَذِرَةِ وَمُلَازَمَةِ الْمَطْبَخِ وَمَوَاضِعِ الدُّخَانِ حَتَّى تَتَشَوَّشَ عَلَيْهِ رُعُونَتُهُ فِي النَّظَافَةِ. فَإِنَّ الَّذِينَ يُنَظِّفُونَ ثِيَابَهُمْ وَيُزَيِّنُونَهَا وَيَطْلُبُونَ الْمُرَقَّعَاتِ النَّظِيفَةَ وَالسَّجَّادَاتِ الْمُلَوَّنَةَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَرُوسِ الَّتِي تُزَيِّنُ نَفْسَهَا طُولَ النَّهَارِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْبُدَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ أَوْ يَعْبُدَ صَنَمًا فَمَهْمَا عَبَدَ غَيْرَ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ حُجِبَ عَنِ اللهِ وَمَنْ رَاعَى فِي ثَوْبِهِ شَيْئًا سِوَى كَوْنِهِ حَلَالًا وَطَاهِرًا مُرَاعَاةً يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا قَلْبُهُ فَهُوَ مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ.

Sebagaimana badan, apabila dalam kondisi sehat, maka tindakan dokter ialah memberi resep untuk menjaga kebugaran. Apabila dalam kondisi sakit maka tindakan dokter adalah mengobati penyakit agar kembali sehat. Demikian pula jiwa, apabila bersih dan suci serta sopan, maka sebaiknya kamu berusaha menjaganya, mencari tambahan kekebalan dan mengupayakan bertambah bersih. Jika tidak sempurna dan bening maka sebaiknya kamu berusaha untuk memperbaikinya. Sebagaimana penyakit yang mengubah kondisi badan yang sehat menjadi sakit, yang tidak bisa diobati kecuali dengan sebaliknya. Apabila penyakit itu dari panas maka obatnya dengan dingin, dan jika dari dingin maka dengan panas. Begitu pula jiwa yang hina; yaitu penyakit hati dimana obatnya

adalah dengan sebaliknya; sehingga penderita harus mengobati sakit kebodohan dengan belajar, sakit pelit dengan menderma, sakit sombong dengan *tawadhu'* dan sakit rakus dengan menahan hal-hal yang berbau kesenangan. Sebagaimana pasti menanggung pahitnya obat dan beratnya sabar dari hal-hal yang diinginkan untuk mengobati badan yang sakit, begitu juga harus menanggung pahitnya *mujahadah* dan sabar untuk mengobati penyakit hati bahkan lebih utama. Karena sakitnya badan berakhir dengan kematian, sementara penyakit hati-*na'udzu billah*-ialah sakit yang berlanjut setelah kematian selama-lamanya. Sebagaimana setiap obat dingin tidak pantas untuk mengobati penyakit yang sebabnya panas kecuali apabila menetapi dosis tertentu, dan hal itu berbeda-beda menurut kuat dan lemahnya, berlanjut dan tidaknya dengan banyak dan sedikitnya. Harus ada standarisasi untuk mengukur kadar yang berguna, karena apabila tidak bisa menjaga standarnya maka si penyakit akan bertambah parah, begitu juga obat untuk penyakit akhlak harus ada kadarnya. Sebagaimana kadar obat diambil dari kadar penyakit hingga dokter tidak bisa mengobati penyakit itu, selama ia tidak mengetahui penyakit yang diderita dari gejala panas atau dingin. Jika penyakit dari panas maka ia harus diagnosis tingkatannya, apakah lemah ataukah kuat? Apabila ia telah mengetahui maka ia akan melihat kondisi tubuh, waktu, aktifitas penderita, umurnya dan kondisi-kondisi lain, kemudian mengobati berdasarkan pandangannya.

Begitu juga Syaikh yang diteladani, mengobati hati pelaku tarekat dan mengobati hati para pencari petunjuk, sebaiknya tidak memaksa mereka dengan *riyadhah* dan tuntutan-tuntutan dalam bidang tertentu dan jalan tertentu, selama sang guru tidak mengetahui akhlak dan sakit mereka. Sebagaimana dokter jika mengobati semua penderita dengan satu obat maka ia sama saja membunuh banyak korban. Begitu pula Syaikh jika ia berisyarat kepada para murid dengan satu metode *riyadhah* maka ia akan merusak mereka dan mematikan hati mereka. Tetapi sebaiknya ia mendeteksi penyakit murid, kondisi, umur, tabiat, dan hal-hal yang kuat ditanggung oleh niatnya dari *riyadhah* dan menetapkan *riyadhah*nya berdasarkan hal tersebut. Jika murid masih baru dan tidak mengetahui batas-batas syariat maka tahap pertama diajarkan masalah kesucian, shalat dan ibadah lahiriah. Jika murid disibukkan urusan harta yang haram atau biasa melakukan maksiat maka tahap pertama diperintahkan agar meninggalkannya. Jika murid menghiasi lahiriahnya dengan ibadah dan menyucikan anggota badannya dari maksiat lahir maka Syaikh melihat tanda-tanda kondisi hingga batinnya agar dapat mencermati akhlaknya dan penyakit hatinya. Apabila Syaikh melihat harta yang melebihi kadar yang pasti bersamanya, maka Syaikh mengambilnya dan menyalurkannya ke jalur-jalur kebaikan dan menyisakan sedikit hingga

murid tidak lagi menolehnya. Jika Syaikh melihat kebodohan murid, kesombongan dan keangkuhan hati yang menguasainya maka syaikh memerintahnya agar pergi ke pasar untuk bekerja keras dan meminta-minta, karena perasaan tinggi hati dan keangkuhannya tidak bisa pudar kecuali dengan kerendahan; dan tidak ada kerendahan yang lebih besar daripada kerendahan meminta-minta. Jadi Syaikh menuntutnya agar senantiasa melakukan hal itu dalam beberapa tempo sehingga lenyap kesombongan dan tinggi hatinya. Karena sungguh kesombongan adalah penyakit yang mematikan, begitu pula kebodohan. Jika Syaikh melihat keseringannya membersihkan badan dan pakaian, dan melihat hatinya suka dan senang seperti itu maka hendaknya Syaikh menjadikannya sebagai *khadim* untuk merawat kamar mandi, dan membersihkannya, menyapu ruang-ruang kotor, menjaga dapur dan tempat-tempat yang berasap hingga keseringannya membersihkan tempat-tempat tersebut mengganggu kenyamanan dirinya. Karena orang yang terlalu sering membersihkan pakaiannya, berhias, mencari potongan yang bersih, dan sajadah yang diwarnai, itu tidak ada perbedaan di antara mereka dan pengantin yang berhias diri sepanjang hari, sehingga tiada perbedaan di antara orang yang menyembah dirinya atau menyembah berhala. Tatkala ia menyembah selain Allah ﷻ maka sungguh ia terhalang dari Allah; dan orang yang memperhatikan pakainnya selain dalam aspek kehalalan dan kesuciannya, dengan perhatian yang menyibukkan hati, maka pada hakikatnya ia tersibukkan dengan dirinya sendiri.

f. *Tafsir al-Khazin*, V/433:

وَأَصْلُ الْبَيْعَةِ: الْعَقْدُ الَّذِي يَعْقِدُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ بَذْلِ الطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ الَّذِي الْتَزَمَهُ لَهُ.

Asal baiat adalah akad yang dilakukan seseorang untuk dirinya, yaitu menyerahkan kepatuhan terhadap Imam dan memenuhi janji disanggupinya.

Jawaban c

Direkomendasikan agar dibahas di Muktamar Thariqah al-Mu'tabarah.

16. Dasar Memilih Alternatif Kebijakan

Jawaban c

Instrumen yang diperbantukan dalam menetapkan pilihan kerja, pilihan jodoh, pilihan lokasi usaha, arah menghadap rumah kediaman dan pilihan tindakan yang lain tersedia dalam berbagai sarana. Jasa paranormal, kaidah *Hong Sui* (Cina), buku *primbon*, ramalan *astrologi*, hitungan *wifiq* hingga *istikharah* di atas lembaran *mushaf*. Cara melempar

kalam (QS. Ali Imran: 44), kritik atas permainan *anshab* dan *azlam* (QS. al-Maidah: 90), yang pertama masuk *syar'u man qablana* terimbangi dengan cara *qur'ah* oleh Nabi ﷺ dalam menentukan isteri pendamping dalam perjalanan luar kota, sedang yang kedua terlarang.

Pertanyaan

a. Adakah petunjuk praktis yang sesuai akidah untuk menentukan pilihan instrumen?
b. Bila Abu Hamid al-Ghazali menghimpun rumus *wifiq*, seperti juga Abu Mahsyar al-Falaki, buku primbon menyediakan rumus-rumus menduga rencana serupa, apakah terlarang penggunaannya? Bukankah sikap hati-hati (waspada akan akibat) diperintahkan? Bagaimana memanage *qadha mu'allaq*?
c. Seperti apa rangkai hubungan antara qadha dan qadar versi *Ahlus-Sunnah wal Jama'ah*?

Jawaban a dan b

Istilah *Qur'ah* sebagaimana yang dimaksudkan dalam fikih adalah media dalam menentukan pilihan yang harus diambil berkaitan dengan tuntutan syariat, seperti menentukan salah satu istri yang diajak pergi, menentukan dalam pembagian warisan dan lain-lain. Sedangkan *al-Anshab* dan *al-Azlam* adalah istilah praktek ramalan nasib atau masa depan yang dapat dilakukan dengan media apapun. Dengan demikian istilah *Qur'ah* tidak ada kaitannya dengan *al-Anshab* dan *al-Azlam*.

Adapun ramalan nasib atau masa depan, secara umum hukumnya adalah haram bahkan berpotensi pada kemurtadan, kecuali jika perkiraan akan sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang disandarkan pada hukum alam atau kebiasaan yang berlaku serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah ﷻ maka yang demikian hukumnya diperbolehkan dan bukan tergolong praktek *anshab wal azlam*. Demikian juga harapan akan berlakunya kebaikan pada masa yang akan datang dengan tetap meyandarkan kepada kehendak Allah sebagaimana yang berlaku pada penulisan *wifiq* atau media lain yang ditulis oleh para *salafus shalih*.

Dasar Hukum

a. *Shahih al-Bukhari*, XIX/136:

وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ.

Affan berkata: Sulaim bin Hayyan menceritakan kepadaku, Sa'id bin Mina' menceritakan kepadaku, beliau berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidak ada pengebalan, tidak ada ramalan, tidak ada pengganggu dan tidak ada penderitaan; larilah kamu dari orang sakit judzam sebagaimana kamu lari dari singa."*

b. *Fatawa al-Azhar*, X/99:

الْقُرْعَةُ

السُّؤَالُ: قَدْ تَلْجَأُ بَعْضُ الْجِهَاتِ إِلَى عَمَلِ قُرْعَةٍ لِتَوْزِيعِ جَائِزَةٍ عَلَى بَعْضِ مَنْ قَدَّمُوا عَمَلًا يَسْتَحِقُّ الْجَائِزَةَ، فَهَلْ هٰذَا مَشْرُوعٌ؟ الْجَوَابُ: الْقُرْعَةُ جَائِزَةٌ شَرْعًا، لِأَنَّهَا تُعَيِّنُ لَا تُحَرِّمُ وَلَا تُحَلِّلُ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ وَمِنْ حَوَادِثِهَا:

أ- الْقُرْعَةُ فِيمَنْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. آل عمران : ٤٤.

ب- الْقُرْعَةُ فِيمَنْ يَرْمُونَهُ مِنَ السَّفِينَةِ الَّتِي رَكِبَهَا يُونُسُ. قَالَ تَعَالَى: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. الصافات ١٤١

ج- صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ عَلَيْهَا السَّهْمُ سَافَرَ بِهَا.

د- وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

ه- جَاءَ فِي السُّنَنِ وَمُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا.

و- وَفِيهِمَا أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَرِهَ الْإِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا"

ز- وَجَاءَ فِي السُّنَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى الرَّسُولِ ﷺ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا دَرَسَتْ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا أَسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي،

فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ "أَمَّا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَتَحَلَّلْ كُلٌّ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ" الْأَسْطَامُ جَمْعُ سِطَامٍ وَهُوَ حَدُّ السَّيْفِ.

ح- وَأَقْرَعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ بَيْنَ الْمُؤَذِّنِينَ" بَدَائِعُ الْفَوَائِدِ لِابْنِ الْقَيِّمِ" هٰذَا، وَهُنَاكَ قُرْعَةٌ تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ لِأَخْذِ جَائِزَةٍ، أَوْ لِإِعْطَاءِ هَدَايَا لِمَنْ يَشْتَرُونَ بِضَاعَةً بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَحَلٍّ تِجَارِيٍّ، أَوْ لِأَيِّ غَرَضٍ مُبَاحٍ، وَهٰذِهِ حَلَالٌ لَا حُرْمَةَ فِيهَا.

جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ (ج ٤ ص ٨٦) أَنَّ الْقُرْعَةَ أَصْلٌ فِي شَرْعِنَا لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْعَدْلَ فِي الْقِسْمَةِ، وَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي الْحُجَّةِ، وَرَدَّ الْعَمَلَ بِالْقُرْعَةِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَرَدُّوا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِيهَا وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا مَعْنَى لَهَا وَأَنَّهَا تُشْبِهُ الْأَزْلَامَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ جَوَّزَهَا، وَقَالَ: الْقُرْعَةُ فِي الْقِيَاسِ لَا تَسْتَقِيمُ، وَلٰكِنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ فِي ذٰلِكَ وَأَخَذْنَا بِالْآثَارِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ عَمِلَ بِالْقُرْعَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: يُونُسُ وَ زَكَرِيَّا وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَةِ كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يَقْسِمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ رَدَّهَا. وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ "بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ" وَقَوْلُ اللهِ ﷻ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَسَاقَ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي مَثَلِ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ. وَحَدِيثَ أُمِّ الْعَلَاءِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، وَحَدِيثَ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.

ثُمَّ يَقُولُ الْقُرْطُبِيُّ: وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذٰلِكَ أَيْ فِي الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ مَرَّةً بِالْقُرْعَةِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَقَالَ مَرَّةً:

يُسَافِرُ بِأَوْفَقِهِنَّ لَهُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ حَدِيثَ " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ- الْأَذَانِ-وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ-فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ-ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا" أَيْ أَجْرَوُا الْقُرْعَةَ، وَالْأَحَادِيثُ فِي هٰذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ.

ثُمَّ تَحَدَّثَ عَنْ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي شَأْنِ زَكَرِيَّا وَأَزْوَاجِ الرَّسُولِ بِأَنَّ الْقُرْعَةَ كَانَتْ مِمَّا لَوْ تَرَاضَوْا عَلَيْهِ دُونَ قُرْعَةٍ لَجَازَ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهٰذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ إِنَّمَا فَائِدَتُهَا اسْتِخْرَاجُ الْحُكْمِ الْخَفِيِّ عِنْدَ التَّشَاحِّ-التَّنَازُعِ-وَلَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تَجْرِي مَعَ مَوْضِعِ التَّرَاضِي، فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَبَدًا مَعَ التَّرَاضِي، بَلْ تَكُونُ فِيمَا يَتَشَاحُّ النَّاسُ فِيهِ وَيَضَنُّ بِهِ.

Undian

Pertanyaan: Sungguh sebagian masalah mengharuskan praktik undian untuk membagikan kompensasi pada sebagian orang yang melakukan pekerjaan yang berhak mendapatkan kompensasi, apa ini disyariatkan?

Jawab: Undian diperbolehkan menurut *syara'*, karena undian itu untuk menentukan, tidak untuk mengharamkan dan menghalalkan. Undian telah dikenal sejak masa lalu dan masa kini. Di antara contohnya:

a. Undian untuk orang yang merawat Maryam, sebagaimana firman Allah ﷻ: *"Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, pada saat mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam."* (QS. Ali Imran: 44).
b. Undian bagi orang yang dilemparkan dari perahu yang dinaiki Yunus. Dalam firman Allah ﷻ: *"Kemudian ia ikut berundi, lalu Dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian."* (QS. ash-Shaffat, 141).
c. Telah sah bahwa bila hendak bepergian, Nabi ﷺ mengundi di antara para istrinya, dan siapa di antara mereka yang keluar undiannya maka beliau pergi bersamanya.
d. Al-Bukhari meriwayatkan: *"Sungguh Nabi ﷺ menawari sumpah pada suatu kaum, lalu mereka bergegas. Lalu beliau memerintah agar membagi di antara mereka dalam sumpah, siapa di antara mereka yang bersumpah."*
e. Telah datang dalam *as-Sunan* dan *Musnad Ahmad*, sungguh dua orang laki-laki saling mendakwa dalam urusan hewan tunggangan dimana antara keduanya tidak terdapat *bayyinah*, kemudian Rasulullah ﷺ memerintah mereka agar membagi dengan sumpah, baik mereka suka atau benci.
f. Dan di dalam kedua kitab tersebut juga, sungguh Nabi ﷺ bersabda: *"Jika dua insan membenci sumpah atau suka terhadapnya maka hendaklah mereka membagi dengannya."*
g. Telah diriwayatkan dalam *as-Sunan* dari Umm Salamah–*Radhiyallahu anha*–: *"Sungguh dua orang laki-laki yang saling bertikai telah datang mengadu pada Rasulullah ﷺ mengenai urusan warisan di antara keduanya yang dirundingkan, dimana di antara keduanya tidak terdapat bayyinah, lantas Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh kalian bertikai di hadapanku,*

sementara aku hanyalah seorang manusia, barangkali di antara kalian bisa mematahkan lawan melalui hujjahnya."Bahwasanya aku menghukumi di antara kalian menurut perkara yang aku dengar, barangsiapa yang aku hukumi sesuatu terhadapnya dari hak saudaranya maka janganlah ia mengambilnya, sebab aku memastikan bagian padanya dari api neraka yang akan datang dengannya berupa pedang di lehernya pada hari kiamat. Maka dua laki-laki tadi menangis dan masing-masing dari keduanya berkata: *"Hakku untuk saudaraku."* Rasulullah ﷺ bersabda: *"Adapun bila kalian berdua berkata demikian, maka pergilah, bagilah, kemudian tujulah hak lalu bagilah, kemudian halalkanlah masing-masing di antara kalian berdua terhadap temannya."* الأَسْطَامُ *jamak* dari سَطَامٍ yaitu mata pedang.

h. Sa'd bin Abi Waqash mengundi di hari Qadisiyyah di antara *mua'dzin* بَدَائِعُ الْفَوَائِدِ لِابْنِ الْقَيِّمِ *"keindahan faidah milik ibn al-Qayyim"* ini, dan di sana ada undian yang berlaku di antara orang-orang yang berlomba untuk mengambil kompensasi atau memberikan hadiah pada orang yang membeli barang dengan harga tertentu dari tempat dagangan, atau pada suatu tujuan yang diperkenankan, dan ini adalah halal tidak ada keharaman di dalamnya.

Telah datang dalam *tafsir al-Qurthubi* (juz 4 h 86), undian merupakan asal dalam syara' kita bagi orang yang menghendaki keadilan dalam suatu bagian, hukumnya sunnah menurut *jumhur fuqaha* dalam hal-hal yang sama *hujjah*nya. Abu Hanifah dan *ashab*nya menolak mempraktikkan undian dan mereka menolak hadits-hadits yang *warid* di dalamnya. Mereka menyangka undian tidak mempunyai makna dan menyerupai mengundi dengan anak panah yang telah dilarang oleh Allah. Ibn al-Mundzir menceritakan dari Abu Hanifah, bahwa beliau membolehkan undian, dan berkata: *"Undian menurut qiyas tidak ditegakkan, tetapi kita meninggalkan qiyas dalam hal itu dan mengambil atsar dan as-sunnah."* Abu Ubaid berkata:*"Tiga Nabi mengamalkan undian yaitu: Yunus, Zakariya dan Nabi kita Muhammad ﷺ."* Ibn al-Mundzir berkata: *"Penggunaan undian bagaikan satu ijma' ahli ilmu dalam hal yang dibagi di antara syuraka', maka tidak ada alasan bagi orang yang menolaknya."* Sungguh al-Bukhari telah membuat bab dalam akhir kitab *asy-Syahadat*: الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ dan firman Allah: *"Saat mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam"*, dan menyampaikan hadits an-Nu'man bin Basyir dalam semisal orang yang menegakkan *had-had* Allah dan perkara yang terjadi seperti kaum yang mengundi di atas perahu, hadits dari Ummi al-Ala' yang di dalamnya disebutkan: *"Sungguh bagian Utsman bin Madh'un terbang pada mereka saat kaum Anshar mengundi rumah Muhajirin"*, dan hadits Aisyah: *"Nabi ketika menghendaki*

bepergian maka beliau mengundi di antara istri-istrinya, siapapun yang keluar bagiannya maka beliau keluar bersamanya."

Kemudian, al-Qurthubi berkata: *"Dan sungguh riwayat dari Malik tentang hal itu berbeda-beda, maksudnya dalam hal undian di antara istri-istri dalam bepergian, kemudian beliau berkata dalam suatu kesempatan dengan undian berdasarkan hadits Aisyah, dan berkata dalam kesempatan yang lain, beliau bepergian bersama istri yang lebih serasi dengannya dalam bepergian."* Lalu al-Qurthubi menuturkan hadits: *"Jika manusia mengetahui perkara dalam panggilan, maksudnya adzan dan shaf awal dalam shalat jamaah kemudian mereka tidak menemukan kecuali mereka mengundinya maka sungguh mereka akan mengundi."* Maksudnya mereka memberlakukan undian, adapun hadits-hadits mengenai makna ini ada banyak.

Kemudian dibincangkan pendapat Abu Hanifah tentang Nabi Zakariya dan istri-istri Rasul bahwa undian yang dimaksud ialah undian terkait suatu hal yang jika mereka rela tanpa undian maka boleh. Ibn al-Arabi berkata: *"Ini lemah, karena bahwasanya faidah undian adalah mencari jalan keluar suatu hukum yang samar saat terjadi perbedaan, maksudnya perselisihan. Dan tidak sah bagi seseorang berkata: Sungguh undian itu berlaku ketika saling rela, karena selamanya tidak akan ada undian beserta saling rela, akan tetapi undian itu ada dalam masalah dimana manusia berselisih di dalamnya dan menyembunyikannya."*

Jawaban c

Hubungan antara *qadha* dan *qadar* versi *Ahlussunnah wal Jama'ah* terjadi *ikhtilaf* antara *Asya'irah* dan *Maturidiyah*. Banyak di antara ulama yang mengatakan bahwa '*Qadha*' berkaitan dengan *Azali* dan '*Qadar*' adalah realisasi dari Qadha'.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Syarh as-Suyuthi li Sunan an-Nasa'i*, VIII/270:

قَالُوْا فِيْ تَعْرِيْفِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ الْقَضَاءُ هُوَ الْحُكْمُ بِالْكُلِّيَّاتِ عَلَى سَبِيْلِ الْإِجْمَالِ فِي الْأَزَلِ وَالْقَدَرُ هُوَ الْحُكْمُ بِوُقُوْعِ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِيْ لِتِلْكَ الْكُلِّيَّاتِ عَلَى سَبِيْلِ التَّفْصِيْلِ فِي الْإِنْزَالِ قَالَ تَعَالَى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ.

Ulama berkata dalam mendefinisikan *qadha'* dan *qadar*. *Qadha'* adalah menghukumi *kulliyah* secara *ijmal* pada *azali*. Sedangkan *qadar* adalah menghukumi terjadinya *juz'iyyah* terhadap *kulliyah* tersebut secara detail pada penempatannya. Allah berfirman: *"Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu."*

b. *Fath al-Bari* XI/477:

وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْمُرَادُ بِالْقَدَرِ حُكْمُ اللهِ وَقَالُوْا أَيِ الْعُلَمَاءُ الْقَضَاءُ هُوَ الْحُكْمُ الْكُلِّيُّ الْإِجْمَالِيُّ فِي الْأَزَلِ وَالْقَدَرُ جُزْئِيَّاتُ ذٰلِكَ الْحُكْمِ وَتَفَاصِيْلِهِ وَقَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ سَبِيْلُ مَعْرِفَةِ هٰذَا الْبَابِ التَّوْقِيْفُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دُوْنَ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَالْعَقْلِ فَمَنْ عَدِلَ عَنِ التَّوْقِيْفِ فِيْهِ ضَلَّ وَتَاهَ فِي بِحَارِ الْحَيْرَةِ وَلَمْ يَبْلُغْ شِفَاءَ الْعَيْنِ وَلَا مَا يَطْمَئِنُّ بِهِ الْقَلْبُ لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَى اخْتَصَّ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ بِهِ وَضَرَبَ دُوْنَهُ الْأَسْتَارَ وَحَجَبَهُ عَنْ عُقُوْلِ الْخَلْقِ وَمَعَارِفِهِمْ لِمَا عَلِمَهُ مِنَ الْحِكْمَةِ فَلَمْ يَعْلَمْهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَقِيْلَ أَنَّ سِرَّ الْقَدَرِ يَنْكَشِفُ لَهُمْ إِذَا دَخَلُوْا الْجَنَّةَ وَلَا يَنْكَشِفُ لَهُمْ قَبْلَ دُخُوْلِهَا انتهى.

Al-Kirmani berkata: *"Yang dikehendaki dengan qadar ialah hukum Allah."* Mereka berkata, maksudnya para ulama: *"Qadha' adalah hukum secara menyeluruh dan global pada azali; sedangkan qadar adalah juz'iyyah hukum tersebut dan perinciannya."* Abu al-Mudhaffar bin Sam'ani berkata: *"Jalan mengetahui bab ini adalah ajaran dari al-Kitab dan as-sunnah, bukan murni qiyas dan akal. Barangsiapa mengganti ajaran ini, maka ia tersesat dan tenggelam dalam lautan kebingungan, tidak mendapat kesembuhan hati dan hal yang menenangkan hati, karena qadar merupakan salah satu rahasia-rahasia Allah ﷻ yang khusus bagi Dzat yang Maha Mengetahui dan Waspada, dan Allah menjadikan penutup pada qadar dan menghalanginya dari akal makhluk dan pengetahuannya; sebab perkara yang Dia ketahui dari suatu hikmah, sehingga tidak ada Nabi yang diutus dan malaikat yang mendekatkan diri yang dapat mengetahuinya."* Menurut satu pendapat, rahasia *qadar hijab* menjadi terbuka bagi mereka ketika masuk surga dan tidak terbuka bagi mereka sebelum memasukinya.

c. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib,* VI/177:

قَوْلُهُ: (لِقَضَاءِ اللهِ) وَقَدْ نَظَمَ الْعَلَّامَةُ الْأَجْهُوْرِيُّ الْمَالِكِيُّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ فَقَالَ: "إِرَادَةُ اللهِ مَعَ التَّعَلُّقِ فِي أَزَلٍ قَضَاؤُهُ فَحَقِّقْ وَالْقَدَرُ الْإِيْجَادُ لِلْأَشْيَاءِ عَلَى وَجْهٍ مُعَيَّنٍ أَرَادَهُ عَلَا" وَبَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ مَعْنَى الْأَوَّلِ الْعِلْمُ مَعَ تَعَلُّقٍ فِي الْأَزَلِ وَالْقَدَرُ الْإِيْجَادُ لِلْأُمُوْرِ عَلَى وِفَاقِ عِلْمِهِ الْمَذْكُوْرِ.

Ungkapan Muhammad asy-Syarbini al-Khatib (*Karena qadha' Allah*): Sungguh *al-Allamah* al-Ajhuri al-Maliki telah meruntutkan perbedaan

di antara *qadha'* dan *qadar*, beliau berkata: *"Kehendak Allah serta kaitannya pada azali adalah qadha'nya maka nyatakanlah, sedangkan qadar adalah mewujudkan sesuatu menurut jalan tertentu yang dikehendaki Dzat yang Maha Tinggi."* Sebagian ulama terkadang berkata: *"Makna pertama ialah mengetahi serta kaitannya pada azali, sedangkan qadar adalah mewujudkan perkara sesuai pengetahuan-Nya tersebut."*

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR
di PP Modern Hidayatul Hasan Blukon
Lumajang
17-18 Januari 2014

10. Tukar Guling Tanah Wakaf (Komplit)
11. Legalitas Wirausaha DAUM (Dana Umum) Harta Wakaf (1)

KOMISI B

Maudhu'iyah

MUSHAHIH

KH. Romadlon Khotib

PERUMUS

KH. Azizi Hasbullah
Ust. H. Arya Muhammad

MODERATOR

KH. Abdurrozaq Sholeh

NOTULEN

Ust. M. Ma'ruf Khozin
Ust. Faris Khoirul Anam, Lc., MH.I

10. Tukar Guling Tanah Wakaf (Komplit)

Deskripsi Masalah

Tukar guling tanah wakaf aset masjid, madrasah, mushalla, dan semisalnya, merupakan kasus yang telah merata di berbagai daerah dan merupakan kebutuhan yang urgen baik bagi yang membutuhkan *(mauquf alaih)* atau pihak lain seperti perusahaan yang perlu menggusur jalan milik yayasan, pesantren atau yang lain. Demikian pula pemindahan status wakaf yang asalnya mushalla dijadikan masjid, wakaf madrasah yang kemudian didirikan masjid atau mushalla, dan semisalnya.

Agar para pelaku yang mayoritas dari warga *Nahdliyyin* tidak terjebak dalam larangan syariat karena belum mengetahui pendapat yang memperbolehkan atau tata cara tukar guling yang legal dalam madzhab *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, maka sangat perlu PW LBM NU JATIM membuat rumusan jawaban berupa konsep tukar guling wakaf yang *mukafi'* dari pendapat Imam *Madzahib al-Arba'ah* atau ulama yang pendapatnya *mu'tabar* di kalangan *Madzahib al-Arba'ah* dengan dilengkapi *manhaj al-fikr*nya untuk memperkuat pendapat tersebut, sehingga dapat dijadikan solusi dari larangan memutuskan hukum tanpa didasari ilmu, atau kecurigaan sebagian masyarakat yang hanya mengetahui satu rumusan hukum saja sehingga dapat mengakibatkan polemik saling menyalahkan dan saling membodohkan.

Permintaan Konsep

a. Bagaimanakah konsep tukar guling wakaf yang *mukafi'* dan detail dari *Madzahib al-Arba'ah* atau *Ashab*nya serta *manhaj*nya?
b. Bagaimana pendapat imam *madzahib* atau *Ashab*nya yang dapat dijadikan konsep pemindahan status wakaf mushalla ke wakaf masjid agar dapat dijadikan tempat *i'tikaf* dan *tahiyyat al-masjid* mengingat mushalla tersebut dijadikan tempat shalat jum'ah?
c. Bagaimana cara yang legal dalam *Madzahib al-Arba'ah* atau *Ashab*nya tentang pendirian *mushalla* atau masjid di tanah wakaf madrasah atau sebaliknya dengan dalih kebutuhan *mauquf alaih*?
d. Bagaimana pentasharrufan barang milik masjid yang sudah tidak dibutuhkan lagi, seperti genteng, yang apabila ditasharrufkan kepada masjid lain tidak ada yang menerima, karena rata-rata memilih yang baru?
e. Jika ditasharrufkan pada sasaran wakaf yang berbeda, semisal madrasah atau mushalla apa harus ada ganti rugi dari madrasah atau mushalla tersebut?

(PCNU Kab. Blitar dan PWNU Jawa Timur)

Jawaban a

Hukum tukar guling wakaf menurut *Madzahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

a. Untuk tukar guling masjid mayoritas ulama tidak membolehkan secara mutlak, sedangkan menurut madzhab Hanbali dibolehkan tukar guling wakaf yang telah rusak atau sudah tidak bermanfaat tanpa membedakan antara masjid dan selainnya.

b. Untuk tukar guling selain masjid, *Madzahib al-Arba'ah* berbeda pendapat sebagai berikut:

   1) Madzhab Hanafi

      Boleh tukar guling selain masjid dalam kasus:

      - *Wakif* mensyaratkan tukar guling dalam wakafnya kepada dirinya ataupun orang lain yang mengelola sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Demikian menurut pendapat Hilal, Abu Yusuf dan al-Hassaf. Bahkan beliau menganggap hal ini merupakan ijma'.
      - *Wakif* tidak mensyaratkan tukar guling untuk dirinya atau orang lain, akan tetapi barang yang diwakafkan sudah tidak bermanfaat lagi, maka menurut pendapat *al-ashah* dibolehkan tukar guling dengan syarat berlandaskan keputusan hakim dengan pertimbangan maslahat.
      - *Wakif* tidak mensyaratkan tukar guling untuk dirinya atau orang lain dan barang yang diwakafkan masih bermanfaat, cuma tidak bermutu *(manfaat dha'ifah)*, dan gantinya lebih baik darinya, maka menurut pendapat *al-ashah al-mukhtar* dibolehkan tukar guling setelah mendapat persetujuan hakim.

   2) Madzhab Maliki

      Madzhab Maliki membedakan hukum tukar guling selain masjid, yaitu di antara bangunan dan barang yang bisa dipindah *(manqul)*. Adapun bangunan berupa rumah atau semacamnya di-*tafsil* sebagaimana berikut;

      - *Pendapat pertama*, boleh tukar guling ketika bangunan berupa rumah atau semacamnya tidak bisa diharapkan lagi manfaatnya, atau masih bermanfaat tapi dalam kondisi darurat, seperti kepentingan pelebaran jalan, masjid, pemakaman, dan kepentingan umum lainnya.
      - *Pendapat kedua*, boleh tukar guling ketika bangunan berupa rumah atau semacamnya tidak bermanfaat, tapi masih ada harapan dimanfaatkan di masa mendatang, maka hukumnya *tafsil*; (a) Jika bangunan berupa rumah atau semacamnya terletak di Kota Madinah maka tidak boleh, (b) Jika di luar Madinah maka

khilaf, ada ulama yang membolehkan, dan ada yang tidak membolehkannya.

Adapun untuk wakaf barang yang bisa dipindah *(manqul)* atau hewan, mayoritas ulama Malikiyah membolehkan penukaran bila terdapat maslahat. Pendapat ini dikuatkan ulama *mutaakhirin* Malikiyah, walaupun Sahnun memilih pendapat yang tidak membolehkannya.

3) Madzhab Syafi'i
   Secara umum tidak membolehkan tukar guling wakaf walaupun sudah diputus oleh *Qadhi*. Kecuali tikar atau kayu masjid yang tidak layak pakai dan dibelikan yang layak (ditasarufkan untuk *mashalih*).
4) Madzhab Hanbali
   Secara umum ulama Hanabalah tidak membolehkan tukar guling wakaf kecuali dalam kondisi darurat. Akan tetapi ketika kondisi darurat mereka tidak membedakan kebolehan tukar guling untuk masjid dan wakaf selainnya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fatawa Qadhi Khan li asy-Syaikh Nizham*, III/306:

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ إِذَا شَرَطَ الْاِسْتِبْدَالَ لِنَفْسِهِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ يَصِحُّ الشَّرْطُ وَالْوَقْفُ.

Ulama sepakat bahwa apabila *Waqif* mensyaratkan adanya *istibdal* bagi dirinya sendiri dalam mengenai benda yang diwakafkan maka syarat tersebut sah serta wakaf itu juga sah.

b. *Radd al-Muhtar*, IV/386 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

مَطْلَبٌ فِي اسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ شَرْطُ الْاِسْتِبْدَالِ بِهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْاِسْتِبْدَالَ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَشْرِطَهُ الْوَاقِفُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، فَالْاِسْتِبْدَالُ فِيهِ جَائِزٌ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ اتِّفَاقًا.

Tujuan: *Istibdal* (mengganti) wakaf dan beberapa syaratnya, perkataan al-Hashkafi: *"Dan boleh mensyaratkan istibdal wakaf..."* Ketahuilah bahwa *istibdal* ada tiga macam: *pertama* waqif mensyaratkannya bagi dirinya sendiri, orang lain, atau bagi dirinya dan orang lain, maka *istibdal* dalam hal ini hukumnya boleh menurut pendapat yang shahih, dan ada yang menyatakan boleh menurut mufakat ulama.

c. *Bahr ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, V/239 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الاسْتِبْدَالَ لِنَفْسِهِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ أَنَّ الشَّرْطَ وَالْوَقْفَ صَحِيحَانِ وَيَمْلِكُ الاسْتِبْدَالَ.

Ulama sepakat bila *Waqif* mensyaratkan adanya *istibdal* bagi dirinya sendiri mengenai benda yang diwakafkan, maka syarat dan wakaf dihukumi sah, serta *Waqif* memiliki hak *istibdal*.

d. *Bahr ar-Ra`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq*, V/241 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةِ اسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ مَا صُورَتُهُ وَهَلْ هُوَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَجَابَ الاسْتِبْدَالُ إِذَا تَعَيَّنَ بِأَنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَثَمَّ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ وَيُعْطِي بَدَلَهُ أَرْضًا أَوْ دَارًا لَهَا رِيعٌ يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ فَالاسْتِبْدَالُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ لِلْوَقْفِ رِيعٌ وَلَكِنْ يَرْغَبُ شَخْصٌ فِي اسْتِبْدَالِهِ إِنْ أَعْطَى مَكَانَهُ بَدَلًا أَكْثَرَ رِيعًا مِنْهُ فِي صُقْعٍ أَحْسَنَ مِنْ صُقْعِ الْوَقْفِ جَازَ عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ اهـ.

Pengarang *al-Fatawa as-Sirajiyah* ditanya mengenai *istibdal al-waqf* melalui pertanyaan yang berupa: Bagaimana istibdal wakaf menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah serta para pengikutnya? Beliau Menjawab: *Istibdal* (berusaha mengganti benda wakaf) apabila menjadi satu-satunya jalan/cara, dengan gambaran: sesuatu yang diwakafkan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, sedangkan disana terdapat orang yang berminat akan benda yang diwakafkan tersebut dan dia bersedia menggantinya dengan tanah atau rumah yang memiliki penghasilan, yang mana pada nantinya manfaat dari penghasilan tanah atau rumah itu akan kembali sesuai dengan arah dari pewakafan (prosedur pewakafan), maka dibolehkannya *istibdal* di dalam bentuk ini adalah pendapat dari As-Syaikh Abu Yusuf dan As-Syaikh Muhammad, kemudian apabila di dalam benda wakaf masih ada penghasilannya akan tetapi terdapat seseorang yang berminat untuk menggantinya maka hukumnya di *tafsil*: jika dia memberikan pengganti yang lebih banyak penghasilannya dibandingkan dengan benda wakaf tersebut di dalam distrik (daerah) yang lebih bagus daripada distrik wakaf itu maka boleh menurut Al-Qadhi Abu Yusuf dan amal (yang diberlakukan) adalah mengikuti pendapat beliau tersebut, lalu apabila tidak memberikan pengganti yang penghasilannya lebih banyak dan distriknya lebih bagus, maka tidak boleh. Sekian.

e. *Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah*, 396:

فَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ فِي حُكْمِ اسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ بَيْنَ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ فَضْلًا عَنِ الْمَسَاجِدِ

كَمَا سَيَأْتِي حَتَّى قَالُوْا وَالْأَحْبَاسُ بِالنَّظَرِ إِلَى بَيْعِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَذَكَرُوْا الْمَسْجِدَ ثُمَّ الْعَقَارَ ثُمَّ الْعُرُوْضَ وَالْحَيَوَانَ.

Ulama Malikiyah membedakan di dalam hukum mengganti benda wakaf antara harta yang tidak bergerak (seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya) dengan sesuatu yang dapat dipindahkan apalagi berbagai masjid, seperti halnya yang akan datang nanti. Sehingga mereka pun berkata: *"Adapun berbagai wakaf dengan meninjau dari segi hukum menjualnya maka terbagi menjadi tiga kelompok, lalu mereka menyebutkan Masjid, harta yang tak bergerak, lalu berbagai barang-barang dan hewan."*

f. *Risalah fi Hukm Bai' al-Ahbas*, 29-35:

قَالَ الْجَزُوْلِيُّ: أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ قَائِمَةً فَالْإِجْمَاعُ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ ... جَاءَ فِي نَوَازِلِ سَحْنُوْنَ: لَمْ يُجِزْ أَصْحَابُنَا بَيْعَ الْحُبُسِ بِحَالٍ إِلَّا دَارَ جِوَارِ مَسْجِدٍ لِيُوَسَّعَ بِهَا وَيَشْتَرُوْنَ بِثَمَنِهَا دَارًا مِثْلَهَا تَكُوْنُ حُبُسًا فَقَدْ أُدْخِلَ فِي مَسْجِدِهِ ﷺ دُوْرٌ كَانَتْ مُحَبَّسَةً اهـ

Al-Imam al-Jazuli berkata: *"Adapun apabila manfaat dari wakaf itu masih tegap berdiri maka ijma' (kesepakatan ulama) mengenai hal ini adalah tidak boleh untuk dijual..."* Terdapat ungkapan dalam *Nawazil* milik al-Imam Sahnun: *Ashab Malik*/Ulama Malikiyyah tidak membolehkan penjualan barang wakaf dengan digantikan suatu harta, terkecuali rumah yang diwakafkan di dekat Masjid, demi untuk perluasan Masjid, kemudian mereka membeli rumah yang sama dengan rumah itu dengan memakai uang hasil penjualan tersebut dan nantinya juga akan menjadi wakaf pula, karena terdapat beberapa rumah yang sebenarnya berstatus wakaf yang kemudian dimasukkan di dalam Masjid Rasulullah ﷺ. Sekian.

g. *Syarh Mukhtashar Khalil*, VII/95 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(ص) لَا عَقَارٌ وَإِنْ خَرِبَ (ش) عَطْفٌ عَلَى مَا مِنْ قَوْلِهِ وَبِيعَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَهَذَا مَفْهُوْمُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَارٍ صَرَّحَ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَفْهُوْمِ شَرْطٍ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ الْمُبَالَغَةَ وَالْعَطْفَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُبَاعُ الْعَقَارُ الْحُبُسُ وَلَوْ خَرِبَ وَبَقَاءُ إِحْبَاسِ السَّلَفِ دَاثِرَةً دَلِيْلٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ.

Al-Imam Kholil berkata: *"Tidak boleh menjual pekarangan (perkebunan, sawah, ladang/harta yang tidak bergerak, semisal tanah, rumah dan lain sebagainya) yang diwakafkan meskipun telah roboh/runtuh."* Al-Imam al-Khorsyi berkata: kata *"Laa Aqarun"* adalah *athaf* pada kalimat *"Maa"* dari perkataan al-Imam Kholil yang berupa *"Wabii'a Maa Laa Yuntafa'u bih"* (sesuatu yang tidak dapat diambil kemanfaatannya boleh dijual) dan ini (kata: Tidak boleh menjual pekarangan wakaf/*Laa Aqarun*) ialah

mafhum dari perkataan beliau: *"min ghairi 'aqarin"* (sebelumnya) yang disini diperjelas/dipertegas oleh beliau, dikarenakan kata *Aqar* (yang artinya: perkebunan, sawah, ladang/harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan lain sebagainya) bukan termasuk *mafhum* dari syarat dan dengan tujuan agar bisa diberikan *mubalaghah* (kata yang melebih-lebihkan, yaitu kata: *meskipun runtuh*) setelahnya serta dapat di-*athafi*, al-Imam Malik berkata: *"Pekarangan yang diwakafkan tidak dapat dijual meski dalam keadaan runtuh dan perbuatan mempertahankan yang dilakukan oleh Ulama salaf akan tanah wakaf meskipun dalam keadaan rusak adalah bukti bahwa penjualan tersebut memang tidak diperbolehkan."*

h. *Minah al-Khalil Syarh Mukhtashar Khalil*, VIII/154 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ بِهِ بِرَبْعٍ غَيْرِ خَرِبٍ. قَوْلُ الشَّيْخِ فِي رِسَالَتِهِ وَابْنُ شَعْبَانَ وَابْنُ رُشْدٍ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْقِطْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُحْبَسَةِ انْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهَا جُمْلَةً وَعَجَزَ عَنْ عِمَارَتِهَا وَكِرَائِهَا فَلَا بَأْسَ بِالْمُعَاوَضَةِ فِيهَا بِمَكَانٍ يَكُونُ حَبْسًا مَكَانَهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحُكْمٍ مِنْ الْقَاضِي بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ السَّبَبِ وَالْغِبْطَةِ فِي الْمُعَوَّضِ عَنْهُ وَيُسَجِّلُ ذَلِكَ وَيُشْهِدُ بِهِ.

Ibn Arafah menyatakan di dalam kebolehan tukar guling (pergantian) wakaf yang berupa rumah (tempat tinggal) yang belum hancur terdapat pendapat dari as-Syaikh di dalam *Risalah* beliau dan Ibn Sya'ban serta Ibn Rusydin, yang berupa: *"Apabila manfaat bsebidang tanah dari tanah yang diwakafkan ini terhenti/terputus secara keseluruhan (global) serta tidak mampu dibangun dan disewakan, maka tiada masalah untuk ditukar dengan tempat yang nantinya akan menjadi wakaf untuk menggantikan sebidang tanah yang awal tadi."* Hal itu harus melalui putusan hukum dari *Qadhi* setelah sebab-sebab di atas ditetapkan serta ditetapkan pula adanya ketertarikan akan tanah yang dijadikan penggantinya dan dibukukan serta disaksikan.

i. *Tahdzib al-Mudawwanah*, VIII/413 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَمَا ضَعُفَ مِنْ الدَّوَابِّ الْمُحْبَسَةِ فِي السَّبِيلِ، وَمَا بَلِيَ مِنْ الثِّيَابِ حَتَّى لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، بِيعَ فَاشْتُرِيَ بِثَمَنِ الدَّوَابِّ فَرَسٌ أَوْ بِرْذَوْنٌ أَوْ هَجِينٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أُعِينَ بِهِ فِي فَرَسٍ. ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ يَكْلَبُ أَوْ يَخْبُثُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ وَيُشْتَرَى فَرَسٌ مَكَانَهُ.

Dan seekor binatang yang sudah lemah, dari berbagai binatang yang diwakafkan untuk *sabilillah*, serta pakaian yang telah usang sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka hukumnya adalah dijual kemudian hasilnya dibelikan beberapa hewan baik itu kuda atau *birdzaun* (kuda tarik/kuda beban) atau *hajin* (kuda blasteran/bapaknya arab), lalu bila tidak mencukupi maka dibuat untuk membantu sebagai dana tambahan untuk membeli kuda wakaf yang lainnya. Ibn Wahb dari al-Imam Malik menyatakan: *"Begitupun kuda yang kehilangan nalurinya (penyakit yang dapat menimpa kuda yang menjadikannya tak mau makan tak mau minum dan kedua matanya memerah serta menggigit setiap orang yang mendekatinya) atau menjadi buruk, maka tidak mengapa untuk dijual dan dibelikan kuda lain sebagai penggantinya."*

j. *Al-Mudawwanah*, IV/418 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْفَرَسِ الْحَبِيسِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِذَا كَلِبَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ وَيُشْتَرَى فَرَسٌ مَكَانَهُ سَحْنُونٌ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُهُ: أَنَّ مَا جُعِلَ فِي السَّبِيلِ مِنَ الْعَبِيدِ وَالثِّيَابِ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ. قَالَ: وَلَوْ بِيعَتْ لَبِيعَ الرَّبْعُ الْمُحَبَّسُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ الْخَرَابُ، وَهَذِهِ جُلُّ الْأَحْبَاسِ قَدْ خَرِبَتْ فَلَا شَيْءَ أَدَلُّ عَلَى سُنَّتِهَا مِنْهَا. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ يَجُوزُ فِيهَا مَا أَغْفَلَهُ مَنْ مَضَى، وَلَكِنْ بَقَاؤُهُ خَرَابًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ وَبِحَسْبِكَ حُجَّةً فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَ مُتَقَادِمًا بِأَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا جَرَى الْأَمْرُ عَلَيْهِ، فَالْأَحْبَاسُ قَدِيمَةٌ وَلَمْ تَزَلْ وَجُلُّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِالَّذِي بِهِ لَمْ تَزَلْ تَجْرِي عَلَيْهِ فَهُوَ دَلِيلُهَا. قَالَ سَحْنُونٌ: فَبَقَاءُ هَذِهِ خَرَابًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ فِيهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَقَامَ لَمَا أَخْطَأَهُ مَنْ مَضَى مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَمَا جَهِلَهُ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ حِينَ تُرِكَتْ خَرَابًا وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ خِلَافٌ لِهَذَا فِي الرِّبَاعِ وَالْحَيَوَانِ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ.

Ibn Wahb berkata: Aku mendengar Imam Malik berkata mengenai kuda yang diwakafkan untuk Sabilillah apabila kuda tersebut kehilangan nalurinya (*kalab: sejenis penyakit yang menimpa kuda yang menjadikannya tak mau makan minum, dan kedua matanya memerah serta menggigit setiap orang yang mendekatinya*) maka tidak masalah untuk dijual dan dibelikan kuda lain untuk menggantikannya. Sahnun. Sedangkan selain Ibn Wahb telah meriwayatkan bahwa sesuatu yang dijadikan untuk Sabilillah yang berupa budak-budak dan juga berbagai pakaian, maka tidak boleh dijual. Selain Ibn Wahb berkata: Apabila budak-budak dan pakaian-pakaian wakaf tersebut dapat dijual, maka rumah yang diwakafkan pun mestinya

dapat dijual jika dikhawatirkan runtuh, dan lihatlah ini, kebanyakan hal-hal yang diwakafkan telah rusak/runtuh, sedangkan tiada sesuatu yang lebih dapat dijadikan dalil/bukti akan sunnah/ajaran mengenai benda wakaf dibandingkan dengan benda-benda itu sendiri. Tidakkah kau berpikir andaikata penjualan benda-benda wakaf itu diperbolehkan, maka orang-orang terdahulu tidak akan melupakannya, tetapi justru perbuatan dari mereka yang berupa membiarkan/mempertahankan benda-benda wakaf tersebut meskipun dalam keadaan rusak/runtuh adalah bukti bahwa menjual benda-benda wakaf itu tidaklah benar. Dan cukuplah bagimu sebagai bukti/*hujjah* dalam mengenai sesuatu yang ada sejak zaman dahulu dengan cara mengikuti tradisi yang berlaku atasnya, maka benda-benda yang diwakafkan ialah sesuatu yang sudah ada sejak zaman dulu dan tidak henti-hentinya ada dan kebanyakan pelajaran yang diambil dari benda-benda wakaf tersebut melalui tradisi yang tidak berhenti selalu mengikutinya adalah bukti baginya.

Sahnun berkata: *"Maka tetap dipertahankan benda-benda wakaf ini meskipun dalam keadaan rusak/runtuh adalah bukti bahwa menjual benda-benda wakaf tersebut tidaklah benar, dikarenakan apabila penjualan tersebut adalah hal yang benar, maka orang-orang terdahulu semenjak generasi awal dari ummat ini tidak akan lalai darinya dan tidak mungkin tidak diketahui oleh orang yang tidak melakukannya ketika benda-benda tersebut dibiarkan dalam keadaan roboh/rusak, meskipun memang telah benar-benar diriwayatkan dari Rabi'ah sesuatu yang berbeda dari hal ini dalam mengenai perumahan dan hewan jika Imam (presiden) menilai bagus penjualan perumahan dan hewan itu."*

k. *Fath al-Mu'in* pada *I'anah ath-Thalibin*, III/211 [Maktabah Syamilah]:

(وَلَا يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ وَإِنْ خَرِبَ) فَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ: لَمْ يُبَعْ، وَلَا يَعُوْدُ مِلْكًا بِحَالٍ لِإِمْكَانِ الصَّلَاةِ وَالْاِعْتِكَافِ فِي أَرْضِهِ.

Sesuatu yang telah diwakafkan tidak dapat dijual meski runtuh/rusak/roboh, sehingga apabila terdapat Masjid yang roboh dan sulit untuk mengembalikannya, maka tidak dibolehkan untuk dijual, dan meskipun bagaimanapun tidak bisa untuk dimiliki kembali, dikarenakan masih mungkin untuk melakukan sholat serta *i'tikaf* di atas tanahnya.

l. *Al-Minhaj*, 251 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَلَوْ جَفَّتْ الشَّجَرَةُ لَمْ يَنْقَطِعْ الْوَقْفُ عَلَى الْمَذْهَبِ، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهَا جِذْعًا، وَقِيلَ تُبَاعُ، وَالثَّمَنُ كَقِيمَةِ الْعَبْدِ.

Apabila pohon yang diwakafkan mengering, maka hukum dari wakaf tidak terputus karenanya menurut pendapat *al-Madzhab* (yang terpilih),

akan tetapi justru pohon tersebut tetap dimanfaatkan meskipun hanya berbentuk sebuah batang, dan ada pendapat yang menyatakan: Dapat dijual, sedang uang/harta hasil penjualannya (harga pembelian) hukumnya sama dengan harta penjualan hamba sahaya yang diwakafkan ketika hamba tersebut dirusakkan.

m. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj,* V/394 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(وَلَوْ جَفَّتْ الشَّجَرَةُ) الْمَوْقُوفَةُ أَوْ قَلَعَهَا نَحْوُ رِيحٍ أَوْ زَمِنَتْ الدَّابَّةُ (لَمْ يَنْقَطِعْ الْوَقْفُ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ امْتَنَعَ وَقْفُهَا ابْتِدَاءً لِقُوَّةِ الدَّوَامِ (بَلْ يُنْتَفَعُ بِهَا جِذْعًا) بِإِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا (وَقِيلَ تُبَاعُ) لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ عَلَى وَفْقِ شَرْطِ الْوَاقِفِ (وَالثَّمَنُ) الَّذِي بِيعَتْ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (كَقِيمَةِ الْعَبْدِ) فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ، فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهَا بِإِحْرَاقٍ وَنَحْوِهِ صَارَتْ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، لَكِنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ بَلْ يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهَا.

Bila pohon yang diwakafkan mengering, atau tumbang dikarenakan semisal angin atau hewan yang diwakafkan menjadi lumpuh, maka wakaf tidaklah terputus menurut pendapat *Al-Madzhab*, meski apabila hal itu terjadi ketika awal mula wakaf (ada ketika pewakafan terjadi) maka tidak boleh, sedangkan disini boleh karena kuatnya pelestarian. Wakaf disini tidak terputus akan tetapi justru pohon tersebut tetap akan dimanfaatkan meskipun berupa batang dengan cara disewakan atau dengan cara yang lainnya, dan ada pendapat yang menyatakan pohon tersebut dijual dengan alasan sulitnya memanfaatkan pohon itu dengan cara yang sesuai dengan syarat dari *waqif* (orang yang wakaf) sedangkan harta hasil dari penjualannya menurut pendapat ini sama hukumnya dengan harta hasil penjualan budak/hamba sahaya yang diwakafkan ketika mengalami kerusakan, sehingga disini berlaku pula ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam budak wakaf yang telah terdahulu dijelaskan, kemudian bila tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan cara memusnahkannya seperti dibakar atau yang semisalnya, maka pohon tersebut menjadi milik *al-Mauquf 'alaih* sebagaimana yang telah dishahihkan oleh al-Imam Ibn ar-Rif'ah dan al-Imam al-Qomuli. Sedangkan al-Imam Ibn al-Muqri mengikuti pendapat tersebut di dalam kitab karangan beliau *ar-Raudl*, akan tetapi pohon tersebut tidak dapat dijual dan tidak bisa dihibahkan, hanya saja *al-mauquf 'alaih* bisa memanfaatkan dengan menggunakan bendanya.

n. *Al-Mughni,* V/369 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

فَصْلٌ: وَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنْفَعَةُ الْوَقْفِ بِالْكُلِّيَّةِ، لَكِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ غَيْرُهُ أَنْفَعَ مِنْهُ وَأَكْثَرَ رَدًّا عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ، وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ صِيَانَةً لِمَقْصُودِ الْوَقْفِ عَنِ الضَّيَاعِ، مَعَ إِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ، وَمَعَ الِانْتِفَاعِ، وَإِنْ قَلَّ مَا يَضِيعُ الْمَقْصُودُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ فِي قِلَّةِ النَّفْعِ إِلَى حَدٍّ لَا يُعَدُّ نَفْعًا فَيَكُونُ وُجُودُ ذَلِكَ كَالْعَدَمِ.

Fasal: Apabila kemanfaatan dari suatu benda wakaf tidak hilang secara keseluruhan, tapi hanya berkurang saja, sedangkan terdapat benda lain yang lebih bermanfaat dan lebih banyak manfaatnya, maka benda wakaf tersebut dikembalikan pada ahli wakaf, dan tidak boleh untuk dijual, dikarenakan hukum asal baginya ialah haram untuk dijual, sedangkan penjualan benda wakaf hanya dibolehkan bila dalam keadaan darurat dengan alasan menjaga maksud dari wakaf agar tidak tersia-siakan, padahal masih ada kemungkinan untuk menghasilkannya. Kemudian apabila benda wakaf masih dapat diambil manfaat meskipun sedikit maka maksud wakaf tidak tersia-sia. Ya Allah (pengecualian ini cukup jauh) kecuali kemanfaatannya yang sedikit itu mencapai batas minimum yang tidak terhitung sebagai manfaat, maka keberadaan manfaat yang sangat sedikit itu sama saja dengan tidak adanya manfaat sama sekali.

o. *Al-Mubdi Syarh al-Muqni*, V/369 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(وَعَنْهُ: لَا تُبَاعُ الْمَسَاجِدُ)، نَقَلَهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ مِنْ غَيْرِهَا (لَكِنْ تُنْقَلُ آلَتُهَا إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ)، اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى غَرَضِ الْوَاقِفِ، لَكِنْ نَقَلَ جَعْفَرٌ فِيمَنْ جَعَلَ خَانًا فِي السَّبِيلِ وَبَنَى بِجَنْبِهِ مَسْجِدًا فَضَاقَ، أَيُزَادُ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَإِنَّهُ تُرِكَ لَيْسَ يُنْزَلُ فِيهِ، فَقَدْ عُطِّلَ، قَالَ: يُتْرَكُ عَلَى مَا صُيِّرَ إِلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ مَعَ إِمْكَانِ عِمَارَتِهِ، قَالَهُ فِي الْفُنُونِ، وَإِنَّ جَمَاعَةً أَفْتَوْا بِخِلَافِهِ وَغَلَّطَهُمْ. (وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ آلَتِهِ وَصَرْفُهَا فِي عِمَارَتِهِ).

Dan diriwayatkan dari al-Imam Ahmad Bin Hanbal: Masjid-masjid tidak dapat dijual, riwayat ini dinukil oleh al-Imam Ali bin Sa'id dikarenakan masjid-masjid tersebut lebih kuat (di dalam pewakafan) dibandingkan dengan yang lainnya, akan tetapi peralatannya (perabotnya) masih bisa dipindahkan ke masjid yang lain, pendapat ini dipilih oleh al-Imam Abu Muhammad al-Jauzi, karena pemindahan tersebut lebih mendekati akan tujuan dari *waqif* (orang yang mewakafkan). Akan tetapi al-Imam Ja'far menuqil mengenai orang yang menjadikan kedai (toko) untuk Sabilillah dan dia membangun masjid di sampingnya, sehingga kemudian (suatu

ketika) masjid ini menjadi sempit, apakah boleh mengambil sebagian dari kedai (toko) tersebut untuk menambahkannya ke dalam masjid? Al-Imam Ahmad berkata: *"Tidak boleh"* lalu dikatakan kepada Beliau: *"Sungguh kedai itu telah ditinggalkan dan tidak ditinggali/didiami sama sekali dan benar-benar telah diabaikan/diterlantarkan"* Beliau berkata: *"Biarkanlah sesuai dengan tujuan dia dijadikan dan tidak boleh memindahkannya dalam keadaan mungkin untuk membangunnya kembali (mendiaminya kembali)"*, Hal ini dikatakan oleh al-Imam Ibn 'Aqil di dalam Kitab *al-Funun* dan sesungguhnya ada sekelompok ulama yang memberikan fatwa dengan kebalikannya dan beliau menyalahkannya. Dan boleh menjual sebagian peralatan/perabot wakaf serta menggunakannya (mentasarufkannya/menyalurkannya) untuk pembangunan wakaf tersebut.

p. *Al-Mubdi Syarh al-Muqni*, V/353 [al-Marja' al-Akbar]:

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ) وَلَا الْمُنَاقَلَةُ بِهِ (إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ) بِالْكُلِّيَّةِ، كَدَارٍ انْهَدَمَتْ، أَوْ أَرْضٍ خَرِبَتْ، وَعَادَتْ مَوَاتًا، وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهَا،

Tidak boleh menjual wakaf (benda wakaf) dan menggantinya kecuali apabila manfaat-manfaatnya menjadi kosong secara keseluruhan, seperti rumah yang roboh/runtuh, atau tanah yang rusak/hancur dan kembali menjadi tak berpenghuni (*Ardul-Mawat*/tanah tak berpenghuni) serta tidak mungkin membangunnya kembali (mendiaminya).

q. *Al-Inshaf li al-Muradi*, VII/102 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَأَمَّا إِذَا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ، فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُبَاعُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.

Adapun apabila manfaat-manfaat dari masjid tersebut hilang (menjadi kosong manfaatnya) maka menurut pendapat shahih dari *al-Madzhab* adalah boleh dijual dalam kondisi seperti ini. Dan mayoritas Ulama yang bermadzhabkan Hanbali berpendapat dengan pendapat ini. Serta banyak dari beliau-beliau yang membuat kepastian dengan pendapat tersebut.

Jawaban b

Wakaf diperuntukkan sesuai syarat *Wakif*, atau paling tidak diperuntukkan bagi sesuatu yang sama dengan tujuan wakif. Artinya, jika suatu wakaf diperuntukkan untuk dijadikan mushalla, maka harus dijadi(guna)kan untuk mushalla, dan jika diperuntukkan untuk dijadikan masjid, maka harus dijadi(guna)kan untuk masjid. Dengan kata lain, barang wakaf tidak boleh diubah statusnya. Hal ini sesuai dengan konsep

wakaf madzhab empat.

Pendapat ulama Syafi'iyah menyatakan, bahwa mengubah wakaf hukumnya tidak dibolehkan. Namun menurut Ibn Hajar, jika pengubahannya memenuhi beberapa kriteria berikut ini, maka dibolehkan, yaitu:

1) Pengubahannya tidak sampai mengubah nama dan jenisnya.
2) Pengubahannya tidak sampai menghilangkan bagian dari *mauquf.*
3) Dalam pengubahannya terdapat kemaslahatan untuk *mauquf.*

Pengubahan wakaf yang memenuhi kriteria-kriteria ini dibolehkan Ibn Hajar karena dinilai tidak menyalahi tujuan Wakif.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra,* III/155 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَيَطَّرِقُ هَذَا قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ السَّابِقِ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ، وَالْمُخْتَارُ الْأَقْوَى الْجَوَازُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ التَّغْيِيرَ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ إِذْ غَرَضُ الْوَاقِفِ الِاسْتِغْلَالُ وَتَكْثِيرُ الرِّيعِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِلَا شَكٍّ لَا مُسَمَّى الْبُسْتَانِ وَنَحْوِهِ وَقَدْ قَالَ الْقَفَّالُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ، وَكُلُّ أَحَدٍ يَجْزِمُ بِأَنَّ غَرَضَهُ تَوْفِيرُ الرِّيعِ عَلَى جِهَةِ الْوَقْفِ، وَقَدْ يَحْدُثُ عَلَى تَعَاقُبِ الْأَزْمَانِ مَصَالِحُ لَمْ تَظْهَرْ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي وَتَظْهَرُ الْغِبْطَةُ فِي شَيْءٍ يُقْطَعُ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ أُطْلِعَ عَلَيْهِ لَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ فَيَنْبَغِي لِلنَّاظِرِ أَوْ الْحَاكِمِ فِعْلُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا عَظُمَتِ الْأُجْرَةُ وَتَضَاعَفَتِ الْفَائِدَةُ، وَالتَّسْمِيَةُ بِالدَّارِ أَوِ الْبُسْتَانِ إِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ غَالِبًا التَّعْرِيفُ لِإِبْقَاءِ الِاسْمِ مَعَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ الظَّاهِرَةِ فِي غَيْرِهِ ظُهُورًا عَظِيمًا، كَدَارٍ ظَهْرُهَا مُجَاوِرٌ لِسُوقٍ أُجْرَتُهَا فِي الشَّهْرِ عَشَرَةٌ مَثَلًا، وَلَوْ عُمِلَتْ حَوَانِيتَ فَبَلَغَتْ مِائَةً أَوْ مِائَتَيْنِ مَعَ خِفَّةِ عِمَارَتِهَا وَمَرَمَّتِهَا فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِلْجُمُودِ عَلَى بَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ مِنَ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ، وَقَوْلُ الشُّرُوطِيِّ وَقْفُ جَمِيعِ الدَّارِ أَوِ الْبُسْتَانِ لِلتَّعْرِيفِ، وَالْمُخْتَارُ مِنْ وَجْهَيِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ الْأَوَّلُ عِنْدَ ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْغَرْسِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِبِلَادِ الشَّامِ فِي قُرَى الِاسْتِغْلَالِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنِّي، وَأَكْثَرُ الْوَاقِفِينَ يَقُولُ فِي شَرْطِهِ وَعَلَى النَّاظِرِ فِعْلُ مَا فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَزِيدُ لِغَلَّاتِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ اهـ.

Dan ini mengikuti pendapat dari *as-Syaikhan* (ar-Rafi'i dan an-Nawawi) yang telah lalu yaitu: tidak boleh merubah wakaf. Adapun pendapat terpilih yang lebih kuat ialah boleh, meskipun orang yang mewakafkan tidak mensyaratkan pengubahan, selama pengubahan itu tidak dicegah oleh *nash* atau ijma' dikarenakan maksud dari orang yang mewakafkan adalah agar digunakan serta memperbanyak penghasilan bagi *mauquf 'alaih* tanpa keraguan sama sekali, bukan bermaksud kepada sesuatu yang bisa disebut kebun dan semisalnya, sedangkan al-Imam al-Qaffaal telah berkata: *"Sesungguhnya sudah seharusnya mempertimbangkan tujuan-tujuan dari orang-orang yang mewakafkan, selang setiap orang pun yakin bahwa tujuan dari orang yang mewakafkan ialah menyempurnakan (memaksimalkan) penghasilan yang sesuai dengan segi pewakafan, dan terkadang seiring dengan pergantian zaman terdapat beberapa kemaslahatan yang muncul, yang mana kemaslahatan itu di masa-masa yang telah lalu belum tampak, dan tampak pula ketertarikan mengenai sesuatu yang dapat dipastikan apabila orang yang mewakafkan itu melihatnya maka dia tidak akan beralih darinya."* Maka sudah semestinya bagi *Nazhir* atau hakim untuk melakukannya dan Allah Maha Mengetahui akan orang yang melakukan perbuatan merusak dan orang yang melakukan perbuatan memperbaiki, apalagi ketika upah itu besar serta faedahnya pun berlipat ganda, sedangkan memberikan sebuah nama dengan kata rumah atau kebun, secara umum hanyalah disengaja sebatas *ta'rif* (mendefinisikan/memberitahukan), bukan supaya membiarkan nama itu untuk selamanya tetap meskipun kemaslahatan telah tampak dan sangat jelas dengan selain nama itu. Sebagaimana sebuah rumah yang bagian belakangnya bertetangga (bersebelahan) dengan pasar, yang mana penghasilan perbulannya katakanlah sepuluh, dan andaikata rumah itu dijadikan beberapa toko maka penghasilannya akan mencapai seratus atau bahkan sampai dua ratus, serta pembangunan dan perbaikan untuk masa ke depannya pun ringan, ketika hal ini terjadi maka tidak ada artinya untuk tetap bersikukuh mempertahankan nama *ad-Dar* (rumah) tanpa ada penjelasan secara terang (nash) dari orang yang mewakafkan untuk hal itu. Adapun perkataan As-Syuruti berupa: *"Wakaf semua rumah atau kebun"* adalah untuk *ta'rif*, dan pendapat yang terpilih dari kedua pendapat Al-Qadhi Husain adalah pendapat yang pertama (yaitu: boleh menanam di atas tanah wakaf) ketika terlihat adanya kemaslahatan di dalam menanam dan itulah yang diamalkan di kota-kota di negeri Syam dalam pedesaan-pedesaan yang memiliki pendapatan dari bercocok tanam tanpa ada keingkaran sama sekali. Dan ini adalah pendapat yang jelas bagiku, lalu bila pendapat ini memang benar maka semata-mata datang dari Allah dan pertolongannya, namun apabila salah, maka kesalahan itu semata-mata datang dari diriku, dan

kebanyakan orang yang mewakafkan berkata dalam persyaratannya: *"wajib bagi Nazhir untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi pengembangan hasil dan menambah pendapatannya, dan seterusnya semacam itu"*. Sekian kata-kata dari al-Imam al-Adzra'i.

b. *Nihayah az-Zain*, 273 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

قَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُهُ فِيْ غَيْرِ صُوْرَةِ الشَّرْطِ بِثَلَاثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيْرًا لَا يُغَيِّرُ مُسَمَّاهُ وَأَنْ لَا يُزِيْلَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهِ بَلْ يَنْقُلُهُ مِنْ جَانِبٍ إِلَى آخَرَ وَأَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ فَلَوْ أَنَّ شَخْصًا أَرَادَ عِمَارَةَ جَامِعٍ خَرِبٍ بِآلَةٍ جَدِيْدَةٍ غَيْرِ آلَتِهِ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيْ جَعْلِ بَابِهِ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ غَيْرِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ لِكَوْنِهِ بِجِوَارِ مَنْ يَمْنَعُ الْاِنْتِفَاعَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيْهِ مَصْلَحَةً أَيَّ مَصْلَحَةٍ لِلْجَامِعِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَلَوْ خَرِبَتِ الْبَلَدُ وَكَانَ فِيْهَا مَسْجِدٌ وَعُمِرَ مَسْجِدٌ بِمَحَلٍّ آخَرَ جَازَ نَقْلُ وَقْفِهِ لِلْمَحَلِّ الْآخَرِ حَيْثُ تَعَذَّرَ إِجْرَاؤُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ بِأَنْ لَمْ يُصَلِّ فِيْهِ أَحَدٌ وَيَجُوْزُ هَدْمُ جُدْرَانِ الْمَسْجِدِ لِإِصَابَةِ الْقِبْلَةِ كَمَا يَجُوْزُ تَوْسِيْعُهُ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَدْ وُسِّعَ مِرَارًا.

Al-Imam as-Subki berkata: *"Boleh merubah benda wakaf dalam hal wakaf yang tidak bersyarat dari waqif. Apabila perubahan itu memenuhi tiga syarat: perubahan itu sedikit, tidak sampai merubah sesuatu yang dinamai dengan wakaf itu (type-nya), tidak sampai menghilangkan sesuatu apapun dari bendanya akan tetapi sebatas memindahkannya dari satu sisi ke sisi yang lainnya dan di dalam perubahan tersebut terdapat kemaslahatan bagi wakaf itu. Apabila ada seseorang yang hendak membangun kembali Masjid Jami' yang runtuh dengan menggunakan perabot baru, yang bukan merupakan perabot dari Masjid Jami' itu dan dia menilai adanya kemaslahatan di dalam memindahkan pintu Masjid itu kesisi yang lain yang selain posisi dari pintu itu yang semula (yang awal/yang sebelumnya), dengan alasan tempat dari pintu yang semula tersebut berada didekat (bersanding dengan) orang yang melarang/menghalangi untuk memakai pintu itu dengan penggunaan yang biasa/umum dilakukan, maka boleh baginya untuk memindahkan, dikarenakan disini terdapat kemaslahatan, yang berupa maslahat apapun bagi Masjid Jami' itu serta kaum Muslimin. Apabila ada kota yang runtuh dan disana terdapat suatu Masjid, kemudian ada sebuah Masjid di tempat yang lain yang sedang dibangun, maka boleh memindahkan benda wakafnya pada tempat yang lain tersebut ketika terdapat kesulitan (udzur) untuk menggunakannya bagi Masjid yang awal, dengan bentuk/contoh tidak ada seorangpun yang hendak sholat disana. Dan boleh merobohkan dinding Masjid untuk mencapai/mendapatkan ketepatan arah qiblat, sebagaimana memperluas Masjid juga dibolehkan, karena Masjidil-*

Haram pun telah benar-benar berulangkali diperluas."

c. *Adz-Dzakhirah*, III/332 [Dar al-Gharbi al-Islami]:

فَرْعٌ – قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا وَقَفَ الْحَيَوَانَ وَأَمْضَيْنَاهُ عَلَى شَرْطِهِ لَهُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ لِلْعَبِيدِ.

(*Far'*) – Al-Imam Ibn Yunus berkata: *"Jika Waqif mewakafkan hewannya dan kita lestarikan sesuai dengan persyaratan dia, maka boleh baginya untuk mengubah wakaf kearah yang lebih utama bagi seorang hamba."*

Jawaban c

Pembangunan masjid di tanah wakaf untuk madrasah hukumnya tidak boleh, karena akan mengubah status wakaf dan tidak sesuai dengan tujuan *wakif*. Padahal masjid pasti berstatus wakaf dan pembangunan masjid tersebut akan mengubah status wakaf menjadi masjid.

Sedangkan bila mendirikan mushalla atau menambah fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kemaslahatan madrasah, selama tidak sampai mengubah status wakaf, maka dibolehkan demi kemaslahatan madrasah. Meskipun demikian, kebolehan tersebut tidak menafikan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan pewakaf.

Dasar Pengambilan Hukum

Mauhibah Dzi al-Fadhl min Fatawa Bafadhal, 73:

(مَسْئَلَةٌ) الَّذِي يَظْهَرُ لِلْمُوَلَّى فِي نَقْضِ الْمَسْجِدِ وَعِمَارَتِهِ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْخَرَابِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْجَوَازِ إِلَى آخِرِ السُّؤَالِ؟ الْجَوَابُ نَعَمْ يَجُوزُ نَقْضُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَالصُّورَةُ هَذِهِ وَأَمَّا نُقْضَةُ الْقَدِيمَةِ مِنْ خَشَبٍ وَتُرَابٍ فَلِلْقَاضِي أَيْ وَالنَّاظِرِ أَنْ يَحْفَظَهُ أَوْ يَبْنِيَ بِهِ مَسْجِدًا آخَرَ خَرَابًا إِنْ رَأَى ذَلِكَ وَمَا قَرُبَ مِنَ الْأَوَّلِ أَوْلَى وَلَا يَعْمُرُهُ غَيْرَ جِنْسِهِ كَبِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ كَالْعَكْسِ إِلَّا إِنْ تَعَذَّرَ جِنْسُهُ اهـ

(*Masalah*) Yang jelas, bagi orang yang diberi kewenangan meruntuhkan masjid dan membangunnya bila Masjid tersebut hampir roboh apakah boleh merobohkannya atau tidak, apabila kalian mengatakan boleh dan seterusnya hingga akhir dari soal? *Jawab*: ya, boleh meruntuhkannya dikarenakan di sana terdapat kemaslahatan bagi wakaf dalam keadaan seperti ini, adapun reruntuhannya (bekas runtuhan) yang dahulu, baik itu berupa kayu serta tanah (pasir) maka *Qadhi*, demikian pula *Nazhir*, memiliki kewenangan untuk menjaganya atau menggunakannya untuk membangun masjid lain yang roboh (rusak) apabila dia menilai hal itu baik. Masjid yang dekat dengan masjid pertama lebih diutamakan dalam

hal ini, serta tidak diperkenankan menggunakannya untuk membangun selain jenis masjid seperti: sumur wakaf, atau kolam, sebagaimana tidak diperkenankan melakukan yang sebaliknya, kecuali apabila kesulitan (mengalami udzur untuk) menemukan yang sejenisnya. Sekian.

Jawaban d

Barang-barang milik masjid masih dihukumi sebagai miliknya, di mana penggunannya harus ditasarufkan pada kemaslahatan masjid secara maksimal. Namun ada kemungkinan barang-barang yang sudah lama dan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masjid tidak dapat dimanfaatkan dengan cara apapun, sehingga tidak diperlukan, seperti genteng yang sudah lama, atau kayu yang sudah tidak dimanfaatkan, atau bongkaran bangunan, maka pentasarufannya diberikan pada wakaf sejenis atau masjid lain. Jika tidak mungkin, maka pada tingkatan di bawahnya, seperti pondok, mushalla. Lalu pada kemaslahatan umum. Bila pentasarufannya diarahkan pada hal-hal tersebut, maka tidak ada kewajiban mengganti rugi.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 63 [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةُ ك): انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَلَهُ وَقْفٌ، فَإِنْ تُوُقِّعَ عَوْدُهُ حُفِظَ رَيْعُهُ، وَإِلَّا جَازَ صَرْفُهُ لِمَسْجِدٍ آخَرَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ صُرِفَ لِلْفُقَرَاءِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: صُرِفَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْوَاقِفِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ اهـ قُلْتُ: وَقَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ: وَإِذَا عُمِرَ الْمَسْجِدُ الْمُنْهَدِمُ رُدَّ عَلَيْهِ وَقْفُهُ اهـ فَائِدَةٌ: تَعَطَّلَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ عِمَارَتُهُ لِخَرَابِ الْبِلَادِ وَقِلَّةِ مَا يَحْصُلُ مِنْ غَلَّتِهِ وَخِيفَ ضَيَاعُهَا بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ، جَازَ نَقْلُهَا لِمَسْجِدٍ آخَرَ مَعْمُورٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ، نَعَمِ الْمَسْجِدُ الْأَقْرَبُ أَوْلَى، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْبِئْرِ وَالْقَنْطَرَةِ إِذَا تَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهَا أَوِ اسْتُغْنِيَ عَنْهَا، أَمَّا الْمَسْجِدُ فِي الْمَكَانِ الْعَامِرِ فَتُجْمَعُ غَلَّاتُ وَقْفِهِ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ مِنْهَا مَا يَعْمُرُهُ وَلَا تُنْقَلُ عَنْهُ اهـ حَسَنٌ النَّجُوقُ لِلْعَمُودِيِّ، وَبِنَحْوِهِ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ بْنُ حَسَنٍ الْحَدَّادُ قَالَ: فَإِنْ تَعَذَّرَ وُجُودُ مَسْجِدٍ فَلِرِبَاطٍ أَوْ زَاوِيَةٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ أَوْ بِئْرٍ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَوْقَافِ الْعَامَّةِ الْأَشْبَهِ فَالْأَشْبَهِ، وَلَا يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ جَدِيدٌ مَعَ إِمْكَانِ صَرْفِهَا لِعَامِرٍ اهـ

[Persoalan al-Kurdi] Terdapat Masjid yang roboh dan masjid tersebut memiliki wakaf untuknya (yang penghasilannya untuk masjid itu), bila ada harapan bahwa Masjid itu dapat berdiri kembali maka penghasilan

dari wakaf itu harus dijaga/disimpan, lalu apabila tidak bisa diharapkan untuk kembali berdiri maka boleh digunakan untuk masjid yang lainnya, kemudian apabila kesulitan mendapatkan masjid yang lainnya maka penghasilan itu disalurkan/ditasarufkan kepada orang-orang faqir seperti yang ada di dalam *at-Tuhfah*, Muhammad ar-Ramli berkata dalam *an-Nihayah*: *"Penghasilan itu disalurkan kepada orang terdekat waqif, kemudian apabila tidak ada maka kepada orang-orang fakir."* Sekian. Aku (Al-Kurdi) berkata: *"Abu Makhramah berkata: "Ketika masjid yang runtuh itu dibangun, maka wakaf yang diperuntukkan baginya harus dikembalikan padanya."* Sekian. (*Faedah*) Ada masjid yang kosong (ditinggalkan) dan ada udzur untuk membangunnya/meramaikannya kembali karena hancurnya perkotaan serta minimnya harta yang didapatkan dari penghasilan masjid tersebut, dan ada kekhawatiran masjid akan tersia-sia sebab dikuasai orang yang zhalim, maka boleh memindahkan penghasilan-penghasilannya untuk masjid lain yang ditempati (dipakai) menurut pendapat *mu'tamad* dari kelima jumlah pendapat-pendapat ulama mengenai hal ini, akan tetapi Masjid yang lebih dekat darinya lebih diutamakan. Begitupun hukum sumur dan gedung bila kesulitan mendirikannya kembali atau sudah tidak lagi dibutuhkan. Adapun masjid di tempat yang ramai penghuninya maka penghasilan wakafnya harus dikumpulkan hingga mencapai jumlah yang dapat digunakan untuk membangunnya kembali dan penghasilan tersebut tidak dapat dipindahkan darinya. Sekian dari *Hasan an-Najuq li al-'Amawi*. Dengan pendapat yang semisal itu pula *al-'Allamah* Ahmad bin al-Hasan al-Haddad memberikan fatwa. Beliau berkata: *"Apabila sulit menemukan masjid, maka disalurkan pada pondok wakaf, musholla wakaf, gedung wakaf, sumur wakaf, dan semisalnya, yaitu yang termasuk wakaf-wakaf yang bersifat umum dengan urutan al-Asybah fa al-Asybah (yang lebih mendekati tujuan dari waqif, lalu diurutkan ke bawahnya). Penghasilan-penghasilan itu tidak boleh digunakan untuk membangun masjid yang baru ketika masih ada kemungkinan untuk mentasarufkannya pada Masjid yang dihuni."* Sekian.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 171 [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةٌ): أَوْقَافُ الْمَسَاجِدِ وَالْآبَارِ وَالرِّبَاطَاتِ الْمُسَبَّلَةِ إِذَا تَعَذَّرَ صَرْفُ مُتَوَجَّهَاتِهَا إِلَيْهَا عَلَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ لِخَرَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْعُمْرَانِ، عِنْدَهَا يَتَوَلَّى الْحَاكِمُ أَمْرَ ذَلِكَ وَفِي صَرْفِهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا قَالَهُ الرُّوْيَانِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ: يُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. الثَّانِي: حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضاً: أَنَّهُ كَمُنْقَطِعِ الْآخِرِ. الثَّالِثُ: حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ: أَيْضاً يُصْرَفُ إِلَى الْمَصَالِحِ. الرَّابِعُ: قَالَهُ الْإِمَامُ وَابْنُ عُجَيْلٍ: يُحْفَظُ لِتَوَقُّعِ عَوْدِهِ. الْخَامِسُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْأَنْوَارِ وَالْجَوَاهِرِ وَزَكَرِيَّا أَنَّهُ

يُصْرَفُ إِلَى مِثْلِهَا الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَسْجِدِ الخ، وَالْقَرِيْبُ أَوْلَى، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّيْ لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ. قُلْتُ: وَافَقَ هَذَا الْأَخِيْرَ ابْنُ حَجَرٍ وَأَبُوْ مَخْرَمَةَ اهـ

(Masalah) Berbagai wakaf untuk beberapa masjid, sumur, dan pondok yang dipersiapkan untuk umum, jika kesulitan untuk menggunakannya/ menyalurkannya ke arah tujuan yang sesuai dengan syarat dari *waqif* sebab runtuhnya berbagai masjid tersebut dan juga peradaban disana, maka hakim berwenang untuk menguasai/mengatur harta wakaf tersebut, Dan di dalam pentasarufannya terdapat lima pendapat. Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh al-Imam ar-Ruyani, al-Imam al-Mawardi dan al-Imam al-Bulqini: Disalurkan kepada orang-orang yang faqir dan miskin. *Yang kedua*: diceritakan oleh al-Imam al-Hannathi dan dikatakan al-Imam al-Mawardi juga: penghasilan wakaf masjid itu ditasarufkan sebagaimana wakaf yang *munqathi' al-akhir*. *Yang ketiga*: diceritakan oleh al-Khannathi juga: ditasarufkan untuk berbagai kemaslahatan. *Yang keempat* dikatakan oleh al-Imam Ibn 'Ujail: dipelihara (disimpan) karena ada harapan Masjid itu akan kembali berdiri seperti semula. *Yang kelima*: dan ini pendapat yang *mu'tamad* dan dilalui oleh al-Imam al-Ardabili dalam kitab *al-Anwar* dan al-Imam al-Mahamili dalam al-Jawahir serta al-Imam Zakariya yaitu ditasarufkan kepada yang semisal dengannya seperti: penghasilan wakaf untuk masjid ditasarufkan kepada masjid dan seterusnya, sedangkan yang lebih dekat, hukumnya lebih utama, dan pendapat dari al-Imam al-Mutawalli yang berupa *"Ditasarufkan kepada masjid terdekat"* pun diarahkan sesuai dengan pendapat yang kelima ini. Aku berkata: al-Imam Ibn Hajar serta al-Imam Abu Makhramah sepakat dengan pendapat yang akhir ini. Sekian.

c. *Fath al-Mu'in* dan *I'anah ath-Thalibin*, III/171 [Maktabah Syamilah]:

تَنْبِيْهٌ حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ، اتُّبِعَ فِيْهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِيْ زَمَنِهِ - لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ - ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِيْنَ - كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ - وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلُ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ) أَيْ جَعَلَهُ مُجْمَلًا، أَيْ غَيْرَ وَاضِحِ الدَّلَالَةِ، كَمَا إِذَا قَالَ وَقَفْتُ هَذَا عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِ أَبِي الْمَيِّتِ، وَأَطْلَقَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يُعَيِّنْهَا بِقَدْرٍ مَعْلُوْمٍ وَلَا بِسُوْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَيُعْمَلُ بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ فِيْ زَمَنِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: اتُّبِعَ فِيْهِ) أَيْ فِيْ شَرْطِهِ الْمُجْمَلِ أَوْ فِي الْوَقْفِ، فَالضَّمِيْرُ يَصِحُّ رُجُوْعُهُ لِلْأَوَّلِ وَلِلثَّانِيْ، وَقَوْلُهُ فِيْ زَمَنِهِ، أَيْ الْوَاقِفِ. وَفِي التُّحْفَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ الْآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ

لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ

Tanbih: Ketika waqif membiarkan persyaratan dia dalam keadaan global (tanpa perincian), maka *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di masa dia (*waqif*) lah yang menjadi standart (tolok ukur) bagi keumuman syarat dari *waqif* tadi, dikarenakan kebiasaan dalam zaman dia itu sama posisinya dengan persyaratan dari dia sendiri, kemudian untuk urutan yang selanjutnya adalah sesuatu yang lebih mendekati akan berbagai tujuan dari orang-orang yang melakukan wakaf, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh perkataan dari ulama, dan karena alasan itulah tempat penampungan air (bejana/*siqayat*) yang disediakan di jalan-jalan dilarang untuk dipakai selain untuk diminum dan dilarang pula memindahkannya dari bejana tersebut meskipun untuk tujuan diminum.

(Perkataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: Ketika *waqif* membiarkan persyaratannya dalam keadaan umum). Artinya menjadikannya global, yaitu tidak jelas petunjuknya, seperti jika dia berkata *"aku mewakafkan ini untuk orang yang membaca al-Quran di atas makam Ayahku yang telah wafat"*, dan dia (*waqif*) memutlakkan apa yang akan dibaca dan tidak menentukan batas/ukuran tertentu dalam bacaan tersebut serta tidak menentukan surah yang tertentu pula, maka yang diberlakukan (dalam kadar/ukuran/ketentuan) adalah kebiasaan yang berlaku di masanya *waqif*, sebagaimana keterangan yang telah berlalu. (Perkataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: Yang diikuti/dijadikan pengukur dalam syarat tersebut) maksudnya: syarat dari *waqif* yang masih global/umum itu atau dalam hal wakaf itu, maka *dlamir* dalam kata *"fiihi"* itu sah untuk dikembalikan kepada syarat dari *waqif* maupun kepada wakaf, dan perkataan *Mushannif "fii zamanihi"* (di dalam zamannya) maksudnya adalah zaman dari *waqif*, dan di dalam *at-Tuhfah* terdapat ungkapan: *"Sesuatu yang dhahir dari kalam sebagian ulama adalah mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku di saat ini dalam sesuatu (yang diwakafkan) sehingga kebiasaan itu harus diamalkan (digunakan) pula, karena yang dhahir adalah wujudnya kebiasaan (tradisi) tersebut di zamannya waqif."* Mengamalkan atau memberlakukan pendapat ini memang bisa dianggap mendekati akan kebenaran, tetapi hanya ketika setiap satu dari kedua ketentuan-ketentuan yang awal tadi, tidak ada sama sekali.

Jawaban e

Apabila barang-barang masjid yang sudah tidak diperlukan lagi di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang bermanfaat atau untuk kemaslahatan umum, maka tidak perlu mengganti rugi.

Dasar Pengambilan Hukum

Fath al-Mu'in dan *I'anah ath-Thalibin*, III/212 [Maktabah Syamilah]:

وَيَجُوزُ بَيْعُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ إِذَا بَلِيَتْ، بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي بَيْعِهَا، وَكَذَا جُذُوعُهُ الْمُنْكَسِرَةُ - خِلَافًا لِجَمْعٍ فِيهِمَا - وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيرٍ أَوْ جِذْعٍ بِهِ.

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بَيْعُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ الخ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ، أَيْ لِئَلَّا تَضِيعَ فَتَحْصِيلُ يَسِيرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهَا، وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ، لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا) أَيْ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا، وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِبَلَائِهَا (قَوْلُهُ: وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ) أَيْ لِلْوَقْفِ. (وَقَوْلُهُ: فِي بَيْعِهَا) أَيْ الْحُصُرِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا جُذُوعُهُ الخ) أَيْ وَمِثْلُ الْحُصُرِ، الْجُذُوعُ، فَيَجُوزُ بَيْعُهَا إِذَا انْكَسَرَتْ. وَجِذْعُ النَّخْلَةِ مَا بَيْنَ أَصْلِهَا الَّذِي فِي الْأَرْضِ وَرَأْسِهَا، كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْخَطِيبِ (وَقَوْلُهُ: الْمُنْكَسِرَةُ) أَيْ أَوِ الْمُشْرِفَةُ عَلَى الْانْكِسَارِ، وَزَادَ فِي مَتْنِ الْمِنْهَاجِ، وَلَمْ تَصْلُحْ إِلَّا لِلْإِحْرَاقِ. قَالَ فِي التُّحْفَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ الخ: مَا إِذَا أَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهُ نَحْوُ أَلْوَاحٍ، فَلَا تُبَاعُ قَطْعًا، بَلْ يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ وَيَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَقْصُودِ الْوَاقِفِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ بِإِدْرَاجِهِ فِي آلَاتِ الْعِمَارَةِ، امْتَنَعَ بَيْعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ.

Dan boleh menjual berbagai tikar masjid yang diwakafkan untuk masjid bila tikar-tikar tersebut telah usang (rusak), dengan gambaran/bentuk kerusakan yang berupa: hilang keindahan serta kegunaannya, dan ada kemaslahatan di dalam penjualannya, begitupun hukum berbagai batang pohon/kayu wakaf masjid yang mana batang-batang pohon tersebut telah terpecah-belah, hal ini berbeda dengan pendapat sekelompok ulama mengenai tikar dan batang pohon tersebut, lalu setelah dijual nanti maka hasilnya akan ditasarufkan untuk kemaslahatan masjid itu, jika memang hasil tersebut tidak mungkin untuk dibuat membeli tikar atau batang pohon lagi.

(Perkataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: *Dan boleh menjual berbagai tikar masjid dan seterusnya*) Al-Imam Ibn Hajar al-Haitami berkata di dalam *at-Tuhfah*, maksudnya agar tikar-tikar itu tidak tersia-siakan, sehingga penghasilan yang sedikit dari harga tikar-tikar itu yang nantinya akan kembali untuk wakaf lebih utama ketimbang menyia-nyiakannya, dan penjualan ini dikecualikan dari penjualan wakaf yang dilarang, sebab tikar-tikar usang itu dinilai seperti halnya benda yang tidak ada. Sekian (Perkataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: *dengan gambaran telah hilang*

keindahannya dan kemanfaatannya) maksudnya dalam keadaan bendanya masih ada. Dan kata *"Hilangnya keindahan dan kegunaan"* ialah gambaran terhadap keusangan dari tikar-tikar itu (Perkataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: *Dan terdapat kemaslahatan*) maksudnya kemaslahatan untuk wakaf (Perkataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: *dalam menjualnya*) maksudnya ialah menjual tikar-tikar itu (Perkataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: *begitupun batang-batang kayu masjid dan seterusnya*) yakni batang-batang kayu masjid hukumnya adalah sama dengan tikar-tikar masjid di atas, sehingga boleh menjual batang-batang kayu tersebut bila menjadi pecah. Adapun batang pohon kurma adalah: bagian dari pohon tersebut yang terdapat/berada di antara akar dari pohon itu yang tertancap di tanah dan ujung pohon tersebut. Sebagaimana yang ada di dalam Tafsir *al-Khatib* (Perkataan Zainuddin al-Malibari: *Yang terpecah*) maksudnya: atau yang hampir terpecah. Dan al-Imam an-Nawawi menambahkan dalam *Matan al-Minhaj*: *"Dan tidak layak dipakai kecuali untuk dibakar."* Di dalam *at-Tuhfah* Ibn Hajar al-Haitami berkata: Dan dikecualikan dari perkataan Imam an-Nawawi yang berupa *"dan tidak layak dan seterusnya"* apabila masih mungkin untuk membuat semisal beberapa papan darinya, maka hukumnya secara pasti tidak boleh dijual, tetapi hakim haruslah berijtihad dan menggunakannya di dalam hal yang paling mendekati kepada tujuan dari *waqif*. Al-Imam as-Subki berkata: *"Sehingga apabila masih ada kemungkinan untuk menggunakannya meskipun dengan melalui cara memasukkannya ke dalam peralatan pembangunan (dijadikan diantara bahan-bahan bangunan), maka tidak boleh dijual menurut apa yang jelas."*

11. Legalitas Wirausaha DAUM (Dana Umum) Harta Wakaf (1)

Deskripsi Masalah

Dengan banyaknya orang yang kreatif dan berpikir secara rasional maka muncullah gagasan untuk mengembangkan harta milik masjid, baik hasil dari pengumpulan kotak amal atau penghasilan dari aset wakaf masjid, termasuk juga dana sumbangan masyarakat untuk kemaslahatan masjid atau madrasah, bahkan dana untuk bangunan, dengan melalui investasi atau dikembangkan melalui wirausaha dagang peternakan dan lain-lain. Ironisnya, tidak jarang yang mengalami kerugian, sehingga tujuan baik tersebut menjadi kandas.

Permintaan Konsep

a. Hukum mengembangkan DAUM (dana umum) dengan wira usaha, baik wakaf, milik masjid, hasil kotak amal, atau hasil wakaf.
b. Mekanisme dan bentuk usaha yang dibolehkan dan yang tidak

dibolehkan.

c. Ketika terjadi kebangkrutan, maka siapa yang paling bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan sanksi apa yang patut diberikan sebagai rasa tanggung jawab?
(PCNU Kab. Blitar)

Jawaban a

Harta milik masjid, baik hasil panenan, wakafan, harta sumbangan melalui *Nazhir*, dan melalui kotak amal harus ditasarufkan sesuai tujuan orang yang menyumbang atau orang yang mewakafkan, dan tidak boleh dijadikan modal wirausaha apapun. Jika harta tersebut telah lebih dari penggunaan semestinya, maka bagi *Nazhir* wajib mentasarufkan harta yang diperuntukkan kemaslahatan masjid untuk pembangunan masjid. Namun menurut sebagian ulama *mutaakhirin* boleh mengembangkannya dalam bentuk wirausaha dengan syarat:

1) Telah melebihi dari penggunaannya.
2) Jelas ada laba.
3) Aman (tidak spekulatif).
4) Harta merupakan hasil *(ghullah)* dari wakafan untuk kemaslahatan masjid.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/336 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

أَمَّا عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَالَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ أَنَّ مِنْ وَظِيفَةِ نَاظِرِ الْوَقْفِ حِفْظَ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ، وَمِنْ وَظِيفَتِهِ أَيْضًا إِجَارَتُهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ.

Adapun tentang persoalan yang pertama maka hal yang dijelaskan oleh *asy-Syaikhan* (ar-Rofi'i dan an-Nawawi) sebagaimana *ashab* asy-Syafi'i: adalah termasuk sebagian dari pekerjaan *Nazhir* adalah memelihara/ menjaga pokok dari wakaf dan berbagai penghasilannya dengan kehati-hatian (waspada), dan diantara pekerjaannya pula ialah menyewakannya secara berhati-hati.

b. *Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Umairah*, III/336 [al-Marja' al-Akbar]:

تَنْبِيهٌ: لَوْ زَادَ رِيعُ مَا وُقِفَ عَلَى الْمَسْجِدِ لِمَصَالِحِهِ أَوْ مُطْلَقًا أُدُّخِرَ لِعِمَارَتِهِ وَلَهُ شِرَاءُ شَيْءٍ بِهِ مِمَّا فِيهِ زِيَادَةٌ غَلَّتِهِ. وَلَوْ زَادَ رِيعُ مَا وُقِفَ لِعِمَارَتِهِ لَمْ يُشْتَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُقَدَّمُ عِمَارَةُ عَقَارِهِ عَلَى عِمَارَتِهِ وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْوَاقِفُ كَذَا فِي الْعُبَابِ. وَيَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ ادِّخَارُ شَيْءٍ مِمَّا زَادَ مِنْ غَلَّتِهِ لِعِمَارَتِهِ وَشِرَاءُ عَقَارٍ بِبَاقِيهِ وَأَفْتَى بَعْضُ

الْمُتَأَخِّرِينَ بِجَوَازِ الِاتِّجَارِ فِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ وَقْفِ مَسْجِدٍ وَإِلَّا فَلَا وَسَيَأْتِي إِقْرَاضُهُ.

Tanbih: jika terdapat kelebihan dari penghasilan sesuatu yang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid atau mutlaq (tanpa *qayyid*/ketentuan untuk maslahat atau *imarah*) maka hukumnya disimpan untuk membangun masjid tersebut, dan boleh bagi *Nazhir* untuk membeli sesuatu yang bisa menambahkan penghasilan dengan menggunakan kelebihan tersebut, lalu jika terdapat kelebihan penghasilan dari sesuatu yang diwakafkan untuk tujuan *imarah*/pembangunan bagi masjid maka tidak boleh untuk dibelikan apapun. Dan yang didahulukan ialah membangun pekarangan daripada membangun wakaf itu serta ketimbang *mustahiqqin*, meskipun *waqif* tidak mensyaratkannya, beginilah yang ada dalam kitab *al-Ubab*. Dan wajib atas *Nazhir* wakaf, menyimpan sesuatu yang berlebih dari penghasilan wakaf itu, guna untuk pembangunan wakaf tersebut serta membeli pekarangan/tanah dengan menggunakan sisanya. Sebagian ulama *muta'akhirin* memberikan fatwa bahwa menggunakannya untuk berdagang itu boleh, apabila sisanya itu termasuk dari wakaf masjid, sedang jika bukan termasuk wakaf masjid maka tidak boleh. Sedangkan untuk hukum menghutangi dengan menggunakan harta tersebut, maka akan datang keterangannya.

c. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/328 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ إِلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ... وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِيهِ وَظِيفَةُ الْمُتَوَلِّي الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الرَّيْعِ وَقِسْمَتُهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ اهـ فَقَوْلُهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ رَاجِعٌ إِلَى كُلِّ مِمَّا قَبْلَهُ وَمِنْهُ الْإِجَارَةُ فَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ إِجَارَةَ النَّاظِرِ إِنَّمَا تَنْفُذُ مِنْهُ إِنْ كَانَتْ عَلَى جِهَةِ الِاحْتِيَاطِ وَأَنْ لَا تُؤَجِّرَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إِلَّا إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا وَكَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِعَيْنِ الْوَقْفِ، وَسَبَقَهُمَا الْجُرْجَانِيُّ إِلَى ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ: وَيَتَصَرَّفُ مَنْ إِلَيْهِ النَّظَرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ انْتَهَتْ.

Ulama Syafi'iyyah telah menjelaskan pula, bahwa *Nazhir* harta wakaf sama halnya dengan *Washi* (orang yang diwasiati) serta *Qayyim* (orang yang berhak/berkuasa mengatur) harta anak yatim, sedangkan *Washi* dan *Qayyim* tidak dibolehkan melakukan tasaruf kecuali dengan *ghibthah* (prediksi keuntungan) serta maslahat... Sedangkan *ibarah* dari *ar-Raudhah* maupun kitab asal *ar-Raudhah* mengenai ini: *"Kegiatan orang yang diberi*

kuasa mengelola harta wakaf ialah membangun, menyewakan, mengupayakan penghasilan, membagikan penghasilan kepada orang-orang yang berhak, dan memelihara harta pokok serta penghasilannya dengan penuh kehati-hatian." Sekian. Maka perkataan Imam an-Nawawi "*'Ala al-ihtiyath*" (penuh kehati-hatian) ini kembali pada setiap hal yang disebutkan sebelumnya, yang di antaranya adalah *ijarah*/menyewakan. Jadi *ibarah* ini sangat jelas menerangkan bahwa kegiatan menyewakan yang dilakukan *Nazhir* hanya bisa lestari bila sesuai penuh kehati-hatian. Syaratnya juga, benda wakaf tidak disewakan dalam jangka waktu yang lama kecuali apabila dibutuhkan, dan dalam menyewakannya dalam jangka waktu yang lama terdapat kemaslahatan bagi benda yang diwakafkan. Al-Jurjani telah mendahului beliau berdua mengenai fatwa ini. Sedangkan *ibarah* dari beliau adalah: *"Orang yang menjadi Nazhir boleh melakukan pentasarufan dengan penuh kehati-hatian dan status benda wakaf di tangan Nazhir adalah amanah, sehingga Nazhir berposisi sebagaimana wakil dan washi (orang yang diwasiati)."* Sekian *ibarah* dari al-Jurjani.

d. *Hasyiyah 'Umairah*, III/111:

فَرْعٌ فَضَلَ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ شَيْءٌ هَلْ يَجُوزُ الِاتِّجَارُ فِيهِ؟ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِالْجَوَازِ إِنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَلَا.

Cabang Permasalahan. Terdapat kelebihan penghasilan wakaf, apakah boleh diperdagangkan? Sebagian ulama *muta'akhirin* memberikan fatwa kebolehannya bila merupakan wakaf untuk masjid. Bila bukan, maka tidak boleh.

e. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/331 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَأَمَّا حُكْمُ إِجَارَةِ النَّاظِرِ مِنَ الصِّحَّةِ تَارَةً وَالْفَسَادِ أُخْرَى، فَقَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ، حَيْثُ أَشَارُوا فِيهِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ النَّاظِرَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَقْصُودِهِ وَبَقَاءِ عَيْنِهِ، لَا بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ، وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ إِلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يُكْتَفَى فِيهِمَا بِقَوْلِهِمَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي، فَكَذَلِكَ النَّاظِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ.

Adapun hukum penyewaan yang dilakukan oleh *Nazhir* yang kadang sah dan terkadang tidak sah, maka ulama Syafi'iyyah telah memberikan keterangan tentang hal itu dalam bab wakaf, sekiranya mereka memberi

isyarat dalam bab wakaf: *"Wajib bagi Nazhir melakukan tasaruf harta wakaf berdasarkan kemaslahatan yang berguna untuk menjaga tujuan dari wakaf dan kelestarian wakaf sebagaimana orang yang diwasiati."* Bukan tasaruf yang menjaga kemaslahatan orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Ulama juga telah menjelaskan, bahwa *Nazhir* harta wakaf sama halnya dengan *Washi* (orang yang diwasiati) serta *qayyim* (orang yang menguasai) harta anak yatim. Sedangkan *Washi* serta *qayyim* tidak boleh melakukan tasaruf kecuali dengan adanya *ghibtah* dan maslahat. Dalam menetapkan adanya *ghibtah* dan kemaslahatan tidak cukup sekedar dengan ucapan mereka berdua, akan tetapi masing-masing *ghibthah* dan maslahat harus ditetapkan di hadapan *Qadhi*. Begitu pula *Nazhir*, tidak boleh baginya menyewakan barang wakaf dalam jangka waktu yang lama kecuali karena hajat atau maslahat untuk wakaf, bukan berdasarkan hajat atau kemaslahatan yang kembali *mustahiq* (orang yang berhak mendapatkan penghasilan wakaf).

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL MUSYKERWIL PWNU JAWA TIMUR di PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 25 - 27 Februari 2014

12. Legalitas Wirausaha DAUM (Dana Umum) Harta Wakaf (2)
13. Penyadapan dalam Konteks Penegakan Hukum dan Hubungan Antarnegara

KOMISI B

Maudhu'iyah

Musahih

KH. Aziz Masyhuri
KH. Muhlis Dimyati
KH. Arsyad Busyairi

Perumus

KH. Azizi Hasbullah
K. Fauzi Hamzah
KH. Jazuli Makmun Murad
KH. Murtadlo Abdul Ghoni

Moderator

Ust. Ahmad Muntaha AM

Notulen:

Ust. M. Ma'ruf Khozin
Ust. Faris Khoirul Anam, Lc., MH.I

12. Legalitas Wirausaha DAUM (Dana Umum) Harta Wakaf (2)

Deskripsi Masalah

Dengan banyaknya orang yang kreatif dan berpikir secara rasional maka muncullah gagasan untuk mengembangkan harta milik masjid, baik hasil dari pengumpulan kotak amal atau penghasilan dari aset wakaf masjid, termasuk juga dana sumbangan masyarakat untuk kemaslahatan masjid atau madrasah, bahkan dana untuk bangunan, dengan melalui investasi atau dikembangkan melalui wirausaha dagang, peternakan, dan lain-lain. Ironisnya, tidak jarang yang mengalami kerugian, sehingga tujuan baik tersebut menjadi kandas.

Permintaan Konsep

a. Hukum mengembangkan wakaf dan infak lainnya (milik masjid, hasil kotak amal, atau hasil wakaf) dengan wirausaha.
b. Mekanisme dan bentuk usaha yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
c. Ketika terjadi kebangkrutan, maka siapa yang paling bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan sanksi apa yang patut diberikan sebagai rasa tanggung jawab?

Keterangan

Konsep sub a sudah terjawab dalam Bahtsul Masail PWNU di Lumajang 17-18 Januari 2014.

Jawaban b

Pendayagunaan (pengembangan) wakaf dan infak lainnya yang dibolehkan harus memenuhi tiga syarat:

1) Kondisi zaman yang aman (kondusif).
2) Pemerintah yang adil.
3) Bisnis yang berpotensi besar menguntungkan.

Sedangkan bentuk usaha pengembangan yang dibolehkan adalah jual beli, *syirkah, qiradh* dan *ijarah* sesuai ketentuannya berikut:

1) Pembelian harus memenuhi syarat:
    a) Barang yang dibeli tahan lama,
    b) Berpotensi besar menguntungkan,
    c) Pembelian dengan kontan,
    d) Pembayaran harus dilakukan setelah penerimaan barang.
2) Penjualan harus memenuhi syarat:
    a) Setelah pasti (diduga kuat) memperoleh keuntungan yang paling

banyak;

b) Berusaha memperoleh keuntungan yang paling banyak semaksimal mungkin;

c) Penjualan harus secara kontan, kecuali penjualan secara tempo lebih menguntungkan dengan lima syarat:
   - Harganya di atas harga kontan
   - Dalam tempo waktu yang singkat
   - Pembelinya orang terpercaya dan mampu membayar
   - Dipersaksian, dan
   - Ada jaminan *(rahn)*.

d) Barang diserahkan kepada pembeli setelah pembayarannya lunas.

3) *Syirkah* harus memenuhi syarat:
   a) Mashlahat
   b) Harta keduanya selamat dari *syubhat*
   c) *Syarik* dapat dipercaya saat mentasarufkan.

4) *Qiradh*, harus memenuhi syarat:
   a) Membeli barang yang berpotensi menguntungkan.
   b) Membeli barang yang akan dikembangkan dengan harga murah bila akan dijual seketika, dan boleh dengan harga standar bila berpotensi menguntungkan bila tidak dijual seketika.
   c) Dalam penjualan ada harapan mencapai harga yang paling tinggi sehingga mencapai keuntungan yang diharapkan,
   d) Berusaha mencapai harga tertinggi.

5) *Ijarah*, harus memenuhi syarat: ada *ghibtah dhahirah* yang telah ditetapkan di hadapan *qadhi*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Hawi al-Kabir*, V/363-364:

وَإِنْ كَانَ لَوِ ابْتَاعَ بِهِ عَقَارًا لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ مِنْ فَاضِلِ غَلَّتِهِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ جَازَ أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ بِالْمَالِ عَلَى شُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الزَّمَانُ أَمِينًا، وَالسُّلْطَانُ عَادِلًا، وَالتِّجَارَةُ مُرْبِحَةً. فَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ مَخُوفًا لَمْ يَتَّجِرْ بِالْمَالِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّغْرِيرِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ جَائِرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَّجِرَ بِهِ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا طَمِعَ فِيهِ بِجَوْرِهِ، وَإِنْ كَانَتِ التِّجَارَةُ غَيْرَ مُرْبِحَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَّجِرَ بِالْمَالِ لِعَدَمِ الْفَضْلِ الْمَقْصُودِ بِالتِّجَارَةِ. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ مِنْ أَمْنِ الزَّمَانِ وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَأَرْبَاحِ الْمَتَاجِرِ، جَازَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ بِمَالِهِ عَلَى شُرُوطٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الشِّرَاءِ وَشُرُوطٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْبَيْعِ. فَأَمَّا

الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الشِّرَاءِ فِيْ تِجَارَةِ الْيَتِيمِ فَأَرْبَعَةٌ. أَحَدُهَا أَنْ يَشْتَرِيَ مَا لَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ وَإِنْ بَقِيَ، لِأَنَّ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ لَا يَتَحَفَّظُ ثَمَنُهُ وَأَنْ يَقَعَ عِنْدَ خَوْفِ فَسَادٍ وَكَسْرٍ. وَأَمْوَالُ الْيَتَامَى يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ مَحْفُوظَةَ الْأَصْلِ مَوْجُودَةَ النَّمَاءِ. وَالثَّانِيْ أَنْ يَكُوْنَ الرِّبْحُ فِيْهِ غَالِبًا، إِمَّا بِظُهُوْرِهِ فِي الْحَالِ وَإِمَّا لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِهِ فِي ثَانِيْ حَالٍ. فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ ظُهُوْرُ الرِّبْحِ فِيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْيَتِيمِ حَظٌّ فِيْ صَرْفِ مَالِهِ فِيْهِ. وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُوْنَ الشِّرَاءُ بِالنَّقْدِ لَا بِالنَّسَاءِ، لِأَنَّ شِرَاءَ النَّقْدِ أَرْخَصُ وَالرِّبْحَ فِيْهِ أَظْهَرُ، لِأَنَّ فِي النَّسَاءِ إِلْزَامَ دَيْنٍ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ تَلَفُ الْمَالِ وَبَقَاءُ الدَّيْنِ. فَهَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ هِيَ مِنْ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ جَمِيْعًا. فَإِنْ أَخَلَّ الْوَلِيُّ بِهَا أَوْ بِأَحَدِهَا لَمْ يَلْزَمِ الشِّرَاءُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَكَانَ بَاطِلًا إِنْ عَقَدَ بِعَيْنِ الْمَالِ وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِنْ لَمْ يَعْقِدْ بِعَيْنِ الْمَالِ. وَالرَّابِعُ: أَنْ لَا يَدْفَعَ الثَّمَنَ إِلَّا بَعْدَ قَبْضِ مَا اشْتَرَى مَا لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِدَفْعِ الثَّمَنِ نَاضًّا، لِأَنَّ فِي دَفْعِ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيْعِ تَغْرِيْرًا. وَهَذَا شَرْطٌ فِيْ حَقِّ الْوِلَايَةِ لَا فِيْ صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ الْوَلِيُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَكَانَ ضَامِنًا لِمَا عَجَّلَ مِنَ الثَّمَنِ حَتَّى يَقْبِضَ الْمَبِيْعَ فَيَسْقُطَ عَنْهُ بِقَبْضِهِ ضَمَانُ الثَّمَنِ. فَصْلٌ: وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْبَيْعِ فِيْ تِجَارَةِ الْيَتِيمِ فَأَرْبَعَةٌ. أَحَدُهَا أَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الثَّمَنِ وَكَمَالِ الرِّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْلِبَ فِي الظَّنِّ حُدُوْثُ زِيَادَةٍ فِيْهِ لِمَا فِي بَيْعِهِ قَبْلَ كَمَالِ الرِّبْحِ مِنْ تَفْوِيْتِ بَاقِيْهِ. فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِيْ حُدُوْثِ الزِّيَادَةِ فِيْ ثَمَنِهِ لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ الْحَظِّ لِلْيَتِيمِ فِي بَيْعِهِ. وَالثَّانِيْ الْإِجْتِهَادُ فِيْ تَوْفِيْرِ الثَّمَنِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ. فَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ هُوَ قَادِرٌ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيْهِ لَمْ يَجُزْ، سَوَاءٌ كَانَ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ: لِأَنَّ تَرْكَ الزِّيَادَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا عُدُوْلٌ عَنِ الْحَظِّ لِلْيَتِيمِ. وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ بِالنَّقْدِ دُوْنَ النَّسَاءِ، لِأَنَّ بَيْعَ النَّقْدِ أَحْفَظُ لِلْمَالِ مَعَ اتِّصَالِ التِّجَارَةِ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ النَّسَاءُ أَحَظَّ لَهُ فِيْ بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَيَجُوْزُ أَنْ يَبِيْعَ بِالنَّسِيئَةِ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ. أَحَدُهَا زِيَادَةُ الثَّمَنِ عَلَى سِعْرِ النَّقْدِ. وَالثَّانِي قُرْبُ الْأَجَلِ. وَالثَّالِثُ ثِقَةُ الْمُشْتَرِيْ وَيَسَارِهِ. وَالرَّابِعُ: الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ. وَالْخَامِسُ: الرَّهْنُ فِيْهِ عَلَى مَا سَنُوَضِّحُ مِنْ أَحْكَامِ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِ الرَّهْنِ. وَالرَّابِعُ أَنْ لَا يَدْفَعَ مَا بَاعَهُ نَقْدًا إِلَّا بَعْدَ قَبْضِ

ثَمَنِهِ مَا لَمْ يَقْبِضْ عَلَيْهِ بِدَفْعِهِ نَاضًّا. وَهٰذَا شَرْطٌ فِي حَقِّ الْوِلَايَةِ لَا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ أَقْبَضَ الْمَبِيعَ كَانَ ضَامِنًا لِثَمَنِهِ لَا لِلْمَبِيعِ فِي نَفْسِهِ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ سَقَطَ ضَمَانُهُ عَنِ الْيَتِيمِ بِالْقَبْضِ، وَإِنَّمَا حَقُّهُ فِي الثَّمَنِ، فَيَصِيرُ الْوَلِيُّ بِدَفْعِ ذٰلِكَ ضَامِنًا لِمَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي حَصَلَ التَّفْرِيطُ بِتَأْخِيرِ قَبْضِهِ.

Apabila ada seseorang yang membeli pekarangan dengannya maka kadar kecukupannya tidak kembali padanya dari kelebihan *ghullah*nya, maka boleh berbisnis padanya dengan harta dengan tiga syarat; yaitu: Kondisi zaman yang aman (kondusif), pemerintah yang adil, dan bisnis yang berpotensi besar menguntungkan. Jika kondisi zaman mengkhawatirkan maka tidak boleh berbisnis dengan harta tersebut karena di dalamnya terdapat *ghurur*. Jika sultan menyeleweng maka tidak boleh berbisnis dengannya, karena terkadang ia rakus dengan penyelewengannya. Jika bisnis tidak menguntungkan maka tidak boleh berbisnis dengan harta tersebut karena tidak ada keuntungan yang dituju dalam bisnis. Maka apabila kriteria ini terpenuhi dari keamanan kondisi zaman, pemerintah yang adil, dan bisnis yang berpotensi besar menguntungkan maka boleh bagi wali berbisnis padanya dengan hartanya menurut syarat-syarat yang di*i'tibar* dalam pembelian dan syarat-syarat yang di*i'tibar* dalam penjualan. Adapun syarat-syarat yang di*i'tibar* dalam pembelian dalam bisnis anak yatim itu ada 4; *Pertama*: Membeli barang yang tidak dikhawatirkan rusak meskipun masih utuh, karena barang yang cepat rusak itu tidak terjaga *tsaman*nya, dan terjadi penurunan harga saat ada kekhawatiran. Harta-harta anak yatim wajib dijaga asalnya yang ada potensi untuk berkembang. *Kedua*, keuntungannya secara umum, adakalanya dengan tampak seketika dan adakalanya karena kuat dugaan dengannya dalam kondisi kedua. Jika tidak ada dugaan kuat jelasnya keuntungan maka tidak ada bagian bagi anak yatim di dalam mengalokasikan hartanya. *Ketiga*, pembelian secara *nuqud* (kontan), tidak secara *nasa'* (kredit), sebab pembelian secara kontan lebih murah dan keuntungannya lebih jelas, karena dalam sistem kredit ada penetapan hutang yang tidak dijamin aman kerusakan harta dan tetapnya hutang. Ketiga syarat-syarat ini merupakan *hak wilayah* dan keabsahan akad seluruhnya. Apabila wali mencacatkannya atau salah satunya maka tidak wajib membeli dalam harta anak yatim, dan menjadi batal jika bertransaksi dengan bentuk harta dan wali diwajibkan jika tidak bertransaksi dengan bentuk harta. *Keempat*, tidak menyerahkan *tsaman* kecuali setelah menerima barang yang yang dibeli selama tidak membayarnya dengan menyerahkan *tsaman* secara *cash*, karena penyerahan harta sebelum menerima barang yang

dijual merupakan bentuk *ghurur*. Ini adalah syarat dalam *hak wilayah*, bukan dalam keabsahan akad. Jika wali mencacatkan padanya maka akad sah, dan ia harus menanggung karena tergesa-gesa menyerahkan *tsaman* dan menerima barang yang dijual, sehingga gugur tanggungan *tsaman* darinya dengan menerimanya. Pasal: Adapun syarat-syarat yang di*i'tibar* dalam penjualan dalam bisnis anak yatim maka ada empat hal; *Pertama*: Penjualan terjadi ketika ujung *tsaman* dan sempurna labanya tanpa dugaan kuat datangnya tambahan di dalamnya karena penjualan sebelum laba sempurna akan menghabiskan sisanya. Jika menjualnya serta ada dugaan kuat datangnya tambahan dalam *tsaman*nya maka tidak boleh karena tidak ada bagian bagi anak yatim dalam penjualannya. *Kedua*, *ijtihad* dalam menyempurnakan *tsaman* melihat kemungkinan. Apabila menjualnya dengan *tsaman* dimana ia mampu menambahinya maka tidak boleh, baik ia menjualnya dengan *tsaman mitsli*, kurang atau lebih. Karena meninggalkan tambahan serta mampu menambahnya berarti memindah dari suatu bagian bagi anak yatim. *Ketiga*, penjualan secara kontan bukan kredit, karena sungguh penjualan secara kontan lebih menjaga harta serta persambungan bisnis dengannya, kecuali bila kredit lebih menjaga kepadanya dalam sebagian kondisi, maka boleh menjual secara kredit dengan lima syarat; *Pertama*, tambahan *tsaman* menurut grosir kontan. *Kedua*, masa waktu yang dekat. *Ketiga* pelanggan profesional dan kaya. *Keempat*, menyaksikannya. *Kelima*, menggadaikan menurut keterangan yang akan kita jelaskan terkait hukum-hukumnya dalam *kitab rahn*. *Keempat*: tidak menyerahkan barang yang dijual secara kontan kecuali setelah menerima *tsaman*nya selama tidak mendatanginya dengan menyerahkannya secara grosir. Ini adalah syarat dalam *hak wilayah*, bukan dalam keabsahan akad. Jika menerima barang bisnis maka ia harus menanggung *tsaman*nya tidak pada barang yang dijual tersebut, karena sungguh barang yang dijual merupakan kepemilikan pelanggan. Dan sungguh tanggungannya dari anak yatim gugur dengan menerima. Bahwa haknya dalam *tsaman*; wali apabila menyerahkannya maka harus menanggung pada harta anak yatim dimana ia gegabah dengan mengakhirkan menerimanya.

b. *Al-Hawi al-Kabir*, V/353-354:

مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمُزَنِيُّ رحمه الله تعالى: وَلَوِ اشْتَرَى الْعَامِلُ أَوْ بَاعَ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فَبَاطِلٌ وَهُوَ لِلْمَالِ ضَامِنٌ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهٰذَا صَحِيحٌ، لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ مَوْضُوعٌ لِتَثْمِيرِهِ وَتَنْمِيَتِهِ، فَيَلْزَمُهُ فِي بُيُوعِهِ وَأَشْرِيَتِهِ شَرْطَانِ: أَحَدُ شَرْطَيْ شِرَائِهِ: أَنْ يَشْتَرِيَ مَا يَرْجُو مِنْهُ فَضْلًا وَرِبْحًا إِمَّا فِي الْحَالِ أَوْ فِي ثَانِي حَالٍ. فَإِنْ

اشْتَرَى مَا يَعْلَمُ أَنْ لَا فَضْلَ فِيهِ فِي الْحَالِ وَلَا فِي ثَانِي حَالٍ لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ الرِّبْحِ الْمَقْصُودِ بِهِ. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ إِمَّا مُسْتَرْخِصًا إِنْ كَانَ بَيْعُهُ فِي الْحَالِ أَوْ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ يَتَوَقَّعُ فِيهِ رِبْحًا فِي ثَانِي حَالٍ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ الْغَبْنُ فِيهِ يَسِيرًا قَدْ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ، لِأَنَّ الْعُقُودَ لَا تَخْلُو غَالِبًا مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ لَمْ يَجُزْ. ثُمَّ يُنْظَرُ فِي الْعَقْدِ، فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ الْمَالِ بَطَلَ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ كَانَ الشِّرَاءُ لَازِمًا لَا فِي مَالِ الْقِرَاضِ. وَأَمَّا بَيْعُهُ فَبِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقَّعَ بِهِ تَنَاهِيَ أَسْعَارِهِ الْمَعْهُودَةِ لِيَسْتَكْمِلَ بِهِ الرِّبْحَ الْمَقْصُودَ. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَسْتَوْفِيَ أَوْفَرَ الْأَثْمَانِ الْمَوْجُودَةِ ، لِأَنَّ بِهَا مَحَلَّ بِرِبْحٍ مَقْصُودٍ . فَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ نُظِرَ فِيمَا غُبِنَ بِهِ: فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا قَدْ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ، لِأَنَّ الْعُقُودَ لَا تَخْلُو غَالِبًا مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ لَمْ يَجُزْ وَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقْبِضْ فَإِنْ قَبَضَ ضَمِنَ وَفِي قَدْرِ مَا يَضْمَنُهُ قَوْلَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. أَحَدُهُمَا: وَهُوَ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا قَصَّرَ فِيهِ مِنْ نَقْصِ الْقِيمَةِ.

وَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ الْقِرَاضِ [بِضَمَانِهِ] لِاسْتِقْرَارِهِ بِتَصَرُّفِهِ.

Masalah: Al-Muzani-*rahimahu Allah Ta'ala*- berkata: Jika *amil* membeli atau menjual barang dengan sistem dimana pada umumnya masyarakat tidak rugi maka batal, dan ia harus menanggung harta. Al-Mawardi berkata: *"Ini shahih, karena sungguh tasaruf amil dalam qiradh itu dipakai untuk membuahkannya dan mengembangkannya."* Maka wajib baginya di dalam penjualan dan pembeliannya memenuhi dua syarat; Pertama, dua syarat pembeliannya, yaitu membeli barang yang diharapkan darinya ada kelebihan dan keuntungan adakalanya seketika atau pada kondisi kedua. Apabila membeli barang yang ia ketahui tidak ada kelebihan di dalamnya seketika itu dan tidak pada kondisi kedua maka tidak boleh karena tidak ada keuntungan yang dimaksud. Syarat kedua: Pembelian adakala mencari kemurahan jika penjualannya seketika atau dengan *tsaman mitsl*nya jika bisa diharapkan keuntungannya pada kondisi kedua. Jika membelinya dengan lebih banyak dari *tsaman misl*nya maka dilihat; Jika kerugiannya sedikit dimana pada umumnya masyarakat terkadang rugi dengan sesamanya maka di *makfu*. Karena sungguh *akad-akad* itu pada umumnya tidak lepas darinya. Sedangkan jika kerugiannya banyak

dimana masyarakat tidak rugi dengan sesamanya maka tidak boleh. Kemudian melihat pada akad. Jika dengan bentuk harta maka batal dan jika dalam tangungan maka pembelian itu tetap, tidak dalam harta *qiradh*. Adapun penjualannya maka dengan dua syarat; Pertama: diharapkan dengannya tingginya harga yang dia ketahui supaya keuntungan yang dimaksud menjadi sempurna. Syarat kedua: memenuhi *tsaman* yang lebih sempurna yang wujud, karena sungguh dengan ini ada peluang meraup keuntungan yang dimaksud. Apabila menjualnya kurang dari *tsaman mistl*nya maka dilihat di dalam barang yang rugi dengannya. Apabila kerugiannya sedikit dimana kadang masyarakat rugi dengan semisal itu maka di*makfu*, sebab sungguh *akad-akad* pada umumnya tidak lepas darinya. Dan jika kerugiannya banyak dimana masyarakat tidak rugi dengan sesamanya maka tidak boleh; penjualan menjadi batal dan tidak ada tanggungan baginya selama ia tidak menerima. Jika ia menerima maka ia harus menanggung. Adapun mengenai kadar perkara yang harus ditanggung ada dua *qaul* yang kita sebutkan keduanya di selain tempat. Pertama, yaitu menurut *ashah*, sungguh ia harus menanggung semua *qimah*. Kedua sungguh ia harus menanggung perkara dimana ia gegabah di dalamnya dari kekurangan *qimah*. Dan *akad qiradh* tidak batal dengan *dhaman*nya, karena tetapnya dengan *tasaruf*nya.

c. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XV/227:

وَشَرْطُ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ، كَوَكِيلٍ وَمُوَكِّلٍ فِيْ شَرْطِهِمَا. لِأَنَّ الْقِرَاضَ تَوْكِيلٌ بِعِوَضٍ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ. وَعَلَى هٰذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ وَلَا الْعَامِلُ سَفِيهًا، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا مَجْنُونًا، أَمَّا وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ سَفِيهٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، أَنْ يُقَارِضَ مَنْ يَجُوزُ إِيدَاعُهُ الْمَالَ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَالِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا، أَوْ حَاكِمًا. وَأَمَّا الْمَحْجُورُ بِالْفَلَسِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَارِضَ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا.

Syarat bagi *malik* (pemilik harta) serta amil, itu sama dengan wakil dan *muwakkil* di dalam persyaratan keduanya. Karena akad *qiradl* (bagi hasil) adalah mewakilkan, hanya saja dengan menggunakan ongkos, maka di dalam akad *qiradl* disyaratkan adanya pemilik serta amil harus *ahliyatut-tawkil*, atas dasar persyaratan inilah, sehingga pemilik dan 'amil tidak boleh *safih*, balita (*shabi*), gila, adapun wali bagi *mahjur 'alaih* (orang yang menguasai kepemilikan *mahjur alaih*. *Mahjur alaih*: orang yang dicekal kekuasaannya atas apa yang ia miliki) baik itu *mahjur 'alaih* sebab *safih* atau *shabi* (anak-anak) atau gila, maka boleh baginya melakukan akad

qiradl (bagi hasil) dengan seseorang yang diperbolehkan bagi wali untuk menitipkan harta *qiradl* itu kepadanya atas nama titipan, baik adanya wali itu adalah ayah bagi *mahjur 'alaih*, atau kakek, atau orang yang diwasiati atau hakim. Adapun *mahjur alaih* yang disebabkan bangkrut, maka tidak sah untuk melaksanakan akad *qiradl* (sebagai pemilik) akan tetapi sah apabila dia hendak menjadi amil-nya akad *qiradl* (bagi hasil).

d. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj*, II/361:

وَلَا (يَرْهَنُ وَلِيٌّ) أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا أَوْ أَمِيْنَهُ. (مَالَ مَحْجُوْرِهِ) مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُوْنٍ وَسَفِيْهٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيْرِهِ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ (وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) فَيَجُوْزُ لَهُ الرَّهْنُ وَالْإِرْتِهَانُ فِيْهِمَا دُوْنَ غَيْرِهِمَا مِثَالُهُمَا لِلضَّرُوْرَةِ أَنْ يَرْهَنَ عَلَى مَا يَقْتَرِضُ لِحَاجَةِ الْمُؤْنَةِ لِيُوَفِّيَ مِمَّا يَنْتَظِرُ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ حُلُوْلِ دَيْنٍ أَوْ نِفَاقِ مَتَاعٍ كَاسِدٍ وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَى مَا يُقْرِضُهُ أَوْ يَبِيْعُهُ مُؤَجَّلًا لِضَرُوْرَةِ نَهْبٍ أَوْ نَحْوِهِ وَمِثَالُهُمَا لِلْغِبْطَةِ أَنْ يَرْهَنَ مَا يُسَاوِيْ مِائَةً عَلَى ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ نَسِيْئَةً وَهُوَ يُسَاوِيْ مِائَتَيْنِ وَأَنْ يَرْتَهِنَ عَلَى ثَمَنِ مَا يَبِيْعُهُ نَسِيْئَةً بِغِبْطَةٍ كَمَا سَيَجِيْءُ فِيْ بَابِ الْحَجْرِ وَإِذَا رَهَنَ فَلَا يَرْهَنُ إِلَّا مِنْ أَمِيْنٍ آمَنَ.

(قوله أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) يَأْتِيْ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّ الْغِبْطَةَ مَالٌ لَهُ وَقْعٌ فَانْظُرْ مَفَادَ قَوْلِهِ هُنَا ظَاهِرَةٍ شَوْبَرِيٌّ. وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِظُهُوْرِهَا ظُهُوْرُ نَفْعِهَا لِلْمُوَلَّى فَقَدْ يَكُوْنُ مَالٌ لَهُ وَقْعٌ لَكِنْ بِعَارِضٍ بِمُضَارٍّ. ... (قوله كَمَا سَيَجِيْءُ فِيْ بَابِ الْحَجْرِ) رَاجِعٌ لِصُوْرَتَيِ ارْتِهَانِ الْوَلِيِّ أَيْ: ارْتِهَانُهُ لِأَجْلِ الْغِبْطَةِ وَارْتِهَانُهُ لِأَجْلِ الضَّرُوْرَةِ. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ نَسِيْئَةً. وَمِنْ مَصَالِحِ النَّسِيْئَةِ أَنْ يَكُوْنَ بِزِيَادَةٍ أَوْ لِخَوْفٍ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ نَهْبٍ وَأَنْ يَكُوْنَ الْمُعَامِلُ مَلِيْئًا ثِقَةً. وَيُشْهِدُ حَتْمًا فِيْ بَيْعِهِ نَسِيْئَةً وَيَرْتَهِنُ كَذٰلِكَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا وَافِيًا. (قوله إِلَّا مِنْ أَمِيْنٍ) أَيْ: يَجُوْزُ إِيْدَاعُهُ بِأَنْ يَكُوْنَ عَدْلَ رِوَايَةٍ آمِنًا أَيْ: لَا يَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْخَوْفُ فِيْ زَمَنِ الْخَوْفِ وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِشْهَادِ. وَكَوْنُ الْأَجَلِ قَصِيْرًا عُرْفًا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذٰلِكَ بَطَلَ الْبَيْعُ فَإِنْ خَافَ تَلَفَ الْمَرْهُوْنِ فَالْأَوْلَى عَدَمُ الْإِرْتِهَانِ لِاحْتِمَالِ رَفْعِهِ بَعْدَ تَلَفِهِ إِلَى حَاكِمٍ يَرَى سُقُوْطَ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الْمَرْهُوْنِ م ر ع ش وَإِنِ ارْتَهَنَ فَلَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ الرَّهْنُ وَافِيًا بِالدَّيْنِ، وَأَنْ يَكُوْنَ الْأَجَلُ قَصِيْرًا

وَتَشْهَدُ فَشُرُوطُ الْإِرْتِهَانِ ثَلَاثَةٌ وَشُرُوطُ الرَّهْنِ أَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي كَلَامِهِ. وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْإِرْتِهَانِ شَرْطًا رَابِعًا، وَهُوَ أَنْ لَا يَخَافَ تَلَفَ الْمَرْهُوْنِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا رَفَعَهُ إِلَى حَاكِمٍ يَرَى سُقُوطَ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الْمَرْهُوْنِ س ل لَكِنِ الَّذِيْ فِيْ ع ش فَإِنْ خَافَ تَلَفَ الرَّهْنِ فَالْأَوْلَى عَدَمُ الْإِرْتِهَانِ.

Wali baik itu ayah atau kakek atau orang yang diwasiati atau hakim atau orang yang dia percaya, tidak boleh menggadaikan harta seorang *mahjur* (orang yang dicekal) yang dia kuasai, baik *mahjur* itu anak kecil, orang gila dan *safih*, maka kata *mahjur* yang dia kuasai ini lebih umum ketimbang ungkapan dariImam an-Nawawi dengan melalui kata anak kecil (bocah/*shabi*) dan *majnun* (orang gila), dan wali juga tidak boleh menerima penggadaian akan harta *mahjur*nya kecuali karena *dlarurah* atau *ghibthah dhahirah*, maka boleh bagi wali untuk menggadaikan dan menerima penggadaian disebabkan *dlarurah* dan *ghibthah dhahirah*, bukan dengan alasan yang selain itu. Contoh menggadaikan dan menerima penggadaian yang disebabkan *dlarurah* alah: perbuatan wali yang berupa menggadaikan harta milik *mahjur*nya untuk jaminan atas sesuatu yang dia pinjam dikarenakan kebutuhan membiayai *mahjur*nya, agar nantinya akan dia lunasi, dari hal yang dapat ditunggu/diharapkan yang bisa saja berupa penghasilan (pemasukan) atau hutang yang datang waktu pelunasannya atau terjualnya harta benda yang tidak laku, dan contoh: perbuatan wali menerima gadai untuk jaminan sesuatu yang dipinjam dari harta milik *mahjur*nya, atau jaminan sesuatu yang dia jual dengan harga yang dibayar secara kredit (tidak kontan) dikarenakan dlarurah (keterpaksaan) yang berupa perampokan (kalau tidak dijual khawatir dirampok) atau yang semisalnya. Dan untuk contoh dari menggadaikan dan menerima gadai yang disebabkan adanya *ghibthah* ialah: perbuatan wali menggadaikan harta *mahjur*nya yang senilai seratus, untuk jaminan (harga) sesuatu yang dia beli dengan harga seratus secara kredit (tidak kontan), sedangkan barang yang dia beli tersebut bernilai dua ratus. Dan contoh: wali menerima gadai atas harga dari sesuatu yang dia jual secara kredit sebab adanya *ghibthah* sebagaimana keterangan yang akan datang didalam bab *al-Hajr*. Dan saat wali menggadaikan maka, dia tidak boleh menggadaikan kecuali kepada orang yang dapat dipercaya yang aman (kekhawatiran akan harta dalam zaman/masa yang menghawatirkan tidak akan berlanjut kepadanya/mengenainya).

(Perkataan al-Imam Zakariya: atau *ghibthah dhahirah*) akan datang di dalam bab *syirkah* bahwasannya *ghibthah* adalah harta yang memiliki bagian (maksudnya: diperhitungkan), maka renungkanlah faedah dari

perkataan beliau disini yang berupa *dhahirah*. Syaubari, dan jawaban untuk al-Imam Syaubari ialah: *"Yang dimaksud dengan tampaknya ghibthah adalah tampaknya kemanfaatan dari ghibthah tersebut untuk orang yang dia kuasai, sebab kadangkala ada memang harta yang tergolong diperhitungkan (bernilai) hanya saja terhalang oleh hal-hal yang berbahaya..."* (Perkataan al-Imam Zakariya: *"Sebagaimana akan datang dalam bab al-hajr"*) ini kembali pada dua bentuk yang berupa perbuatan wali menerima gadai maksudnya dia menerima gadai karena *ghibthah* dan menerima gadai dikarenakan *dlarurah*. Adapun ungkapan beliau di dalam bab itu: baik secara *matan* dan *syarh* adalah: *"Dan wali wajib melakukan tasarruf sebab maslahat meski tasarruf itu tidak kontan (nasi'ah/menunggu jatuh tempo), di antara maslahat nasi'ah ialah ada kelebihan (tambahan) dalam tasarruf yang dilakukan secara tempo tersebut atau terdapat kehawatiran akan harta anak kecil itu dari semisal perampokan, dan adanya orang yang diajak bermu'amalah (relasi) itu kaya dan dapat dipercaya, dan wajib bagi wali mengajak saksi (memberikan saksi) di dalam akad jual beli dia yang dilakukan secara tempo serta menerima gadai secara wajib pula hukumnya yang disebabkan harga (yang belum dibayar kontan) dengan penggadaian yang sempurna."* (Perkataan Imam Zakariya: *kecuali kepada seseorang yang dapat dipercaya*) artinya orang yang boleh dititipi, yaitu orang yang adil secara *riwayah*, yang ada dalam keadaan aman, maksudnya kehawatiran tidak berlanjut hingga kepadanya (orang yang bisa dipercaya itu) di waktu kehawatiran, dan harus disaksikan, serta adanya tempo itu dekat (tidak lama) secara *'urf* nya sebagaimana keterangan yang telah lalu, apabila satu syarat saja dari berbagai syarat tersebut tidak ditemukan, maka jual beli itu tidak sah, apabila wali menghawatirkan rusaknya barang yang digadaikan maka yang lebih utama ialah tidak menerima gadai dikarenakan ada kemungkinan orang yang menggadaikan akan melaporkan setelah rusaknya barang yang digadaikan pada hakim yang menganggap/menilai gugurnya (lunasnya) hutang sebab rusaknya barang yang digadaikan. Muhammad ar-Ramli, Ali Syibromalissi. Apabila wali menerima gadai, maka barang gadai haruslah mencukupi dengan sempurna akan nominal hutang, dan tempo harus pendek, serta disaksikan, maka syarat menerima gadai ada tiga dan syarat menggadaikan ada empat yang telah terdahulu diperkataan beliau, dan sebagian ulama memberikan syarat keempat di dalam hal menerima gadai, yaitu, wali tidak khawatir akan rusaknya barang yang digadaikan itu, karena terkadang orang yang menggadaikan bisa saja melaporkannya pada seorang hakim yang menilai gugurnya hutang sebab rusaknya barang yang digadaikan. *Sin Lam*. Akan tetapi yang terdapat di dalam *hasyiyah* asy-Syibromalissi adalah: *"Apabila wali khawatir akan rusaknya barang yang digadaikan, maka yang lebih diutamakan ialah tidak menerima gadai."*

e. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 298 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

(مسألة): أَرْكَانُ الشَّرِكَةِ خَمْسَةٌ: الشَّرِيْكَانِ وَشَرْطُهُمَا إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ وَالْبَصَرُ إِنْ تَصَرَّفَا مَعًا، فَإِنْ تَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُشْتَرَطْ إِبْصَارُ الْآخَرِ، وَتَصِحُّ مِنْ وَلِيٍّ بِشَرْطِ الْمَصْلَحَةِ وَسَلَامَةِ مَالِ الشَّرِيْكِ عَنْ شُبْهَةٍ، خَلَا عَنْهَا مَالُ الْمَحْجُوْرِ وَأَمَانَةُ الشَّرِيْكِ إِنْ تَصَرَّفَ.

(Masalah) Rukun-rukun *syirkah* ada lima: dua orang yang melakukan *syirkah*, syarat bagi keduanya adalah memiliki kebebasan bertasarruf (menggunakan hartanya), serta bisa melihat apabila yang melakukan tasarruf ialah kedua-duanya, lalu apabila yang melakukan tasarruf ialah salah satunya saja, maka tidak disyaratkan bisa melihat bagi yang lainnya, dan akad *syirkah* dapat dihukumi sah dari seorang wali dengan syarat adanya maslahat dan harta *syarik* (teman *syirkah*nya) harus selamat dari syubhat yang mana harta *al-mahjur* (orang yang dicekal penguasaan akan hartanya) bersih dari syubhat itu, juga disyaratkan *syarik* memiliki sifat amanah (dapat dipercaya) apabila dia ikut melakukan tasaruf.

f. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/328 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَصَرَّحُوْا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ فِيْ مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ لَا يَجُوْزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ إِلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَلَا يَكْتَفِيْ فِيْهِمَا بِقَوْلِهِمَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِيْ فَكَذٰلِكَ النَّاظِرُ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ الْمُدَّةَ الطَّوِيْلَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُوْدُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ ... وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِيْهِ وَظِيْفَةُ الْمُتَوَلِّي الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيْلُ الرِّيْعِ وَقِسْمَتُهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّيْنَ وَحِفْظُ الْأُصُوْلِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الْإِحْتِيَاطِ اهـ فقوله عَلَى الْإِحْتِيَاطِ رَاجِعٌ إِلَى كُلِّ مِمَّا قَبْلَهُ وَمِنْهُ الْإِجَارَةُ فَهِيَ صَرِيْحَةٌ فِيْ أَنَّ إِجَارَةَ النَّاظِرِ إِنَّمَا تَنْفُذُ مِنْهُ إِنْ كَانَتْ عَلَى جِهَةِ الْإِحْتِيَاطِ وَأَنْ لَا تُؤَجَّرَ الْمُدَّةَ الطَّوِيْلَةَ إِلَّا إِنِ احْتِيْجَ إِلَيْهَا وَكَانَ فِيْهَا مَصْلَحَةٌ لِعَيْنِ الْوَقْفِ وَسَبَقَهُمَا الْجُرْجَانِيُّ إِلَى ذٰلِكَ وَعِبَارَتُهُ وَيَتَصَرَّفُ مَنْ إِلَيْهِ النَّظَرُ عَلَى الْإِحْتِيَاطِ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ فِيْ يَدِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ كَالْوَكِيْلِ وَالْوَصِيِّ انتهت

Para ulama menjelaskan juga bahwa sungguh *nadhir* dalam harta *wakaf* seperti *washi* dan *qayyim* di dalam harta anak yatim. *Qashi* dan *qayyim* tidak boleh tasaruf kecuali dengan keuntungan dan *maslahat;* tidak cukup bagi keduanya dengan ungkapan keduanya, tapi harus ada penetapan

salah satunya di depan *qadhi*. Begitu pula *nadhir* tidak boleh menyewakan *wakaf* dalam masa yang lama kecuali karena *hajat* atau *maslahat* yang kembali kepada *wakaf*, bukan kepada *mustahiq*… *Ibarat ar-Raudhah* dan *asal*nya: *"Tugas mutawalli adalah imarah, ijarah, menghasilkan rai' dan bagiannya pada mustahiqqin dan menjaga asal dan ghullah secara hati-hati."* (Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: *"Secara hati-hati"*) kembali pada tiap-tiap perkara sebelumnya dan di antaranya adalah *ijarah*, ini *sharih* bahwa *ijarah nadhir* berlaku jika secara hati-hati dan tidak menyewakan dalam jangka yang panjang kecuali apabila dibutuhkan dan ada maslahat pada bentuk *wakaf*, dan al-Jurjani telah mendahulukan keduanya pada hal itu. Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: *"Dan orang yang memiliki pandangan bisa mentasarufkan secara hati-hati dan hal itu dalam tangannya atas wajah amanah seperti wakil dan washi."*

g. *Hasyiyah 'Umairah*, III/111:

فَرْعٌ: فَضَلَ مِنْ رَيْعِ الْوَقْفِ شَيْءٌ هَلْ يَجُوزُ الْإِتِّجَارُ فِيهِ؟ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِالْجَوَازِ إِنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَلَا.

(*Far'*) Ada sesuatu yang lebih dari *rai' wakaf*, apakah boleh berbisnis di dalamnya? Sebagian *muta'akkhirin* berfatwa dengan boleh jika untuk masjid; sedangkan jika tidak maka tidak boleh.

h. *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, III/331:

وَأَمَّا حُكْمُ إِجَارَةِ النَّاظِرِ مِنَ الصِّحَّةِ تَارَةً وَالْفَسَادِ أُخْرَى فَقَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ حَيْثُ أَشَارُوا فِيهِ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ النَّاظِرَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَقْصُودِهِ وَبَقَاءِ عَيْنِهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ إِلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَلَا يَكْتَفِي فِيهِمَا بِقَوْلِهِمَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي فَكَذَلِكَ النَّاظِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ.

Adapun hukum penyewaan yang dilakukan oleh *Nazhir*, yang mana satu ketika dihukumi sah dan di lain waktu dihukumi *fasad*/tidak sah, maka para ulama Syafi'iyyah telah memberikan keterangan tentang hal itu di dalam bab waqaf, sekiranya mereka memberikan isyarat dalam bab waqaf yang berupa: *"Wajib bagi nazhir untuk melakukan tasarruf di dalam harta waqaf dengan meninjau kemaslahatan yang dinisbatkan/kembali/berguna bagi pemeliharaan tujuan dari waqaf dan kelestarian bagi benda waqaf*

sebagaimana orang yang diwasiati. Bukan tasarruf yang dinisbatkan untuk menjaga kemaslahatan/kebaikan bagi orang-orang yang berhak atas waqaf tersebut." Dan para ulama juga telah menjelaskan pula bahwa *nazhir* di dalam harta waqaf sama halnya dengan *washi* (orang yang diwasiati) serta *qayyim* (orang yang menguasai harta) di dalam harta anak yatim. Sedangkan *washi* serta *qayyim* tidak boleh melakukan tasarruf kecuali dengan adanya *ghibthah* dan maslahat, dan dalam menetapkan adanya *ghibthah* serta kemaslahatan tidaklah cukup sekedar dengan ucapan dari mereka berdua, akan tetapi salah satu dari *ghibthah* dan maslahat haruslah ditetapkan di depan *qadli*, begitupun *nazhir*, tidak dibolehkan baginya menyewakan benda waqaf dalam jangka waktu yang lama terkecuali sebab hajat atau maslahat yang kembali untuk waqaf (bermanfaat untuk waqaf) bukan hajat atau kemaslahatan yang kembalinya untuk *mustahiq* (orang yang berhak mendapatkan penghasilan waqaf).

Jawaban c

Jika tidak sesuai dengan prosedur maka yang bertanggungjawab ialah pihak yang dianggap melakukan kesalahan baik *nazhir* maupun wali. Sedangkan jika sudah sesuai, maka ditanggung oleh kas negara.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Bujairami 'ala al-Khatib*, III/197-198:

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ) بِتَلَفِ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَلَا يَضْمَنُ (إِلَّا بِعُدْوَانٍ) مِنْهُ كَتَفْرِيطٍ أَوْ سَفَرٍ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ إِذَا أَطْلَقَ، فَإِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى سَبَبٍ فَعَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ ... (وَإِذَا حَصَلَ) فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ (رِبْحٌ وَخُسْرَانٌ) بَعْدَهُ بِسَبَبِ رُخْصٍ أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ (جُبِرَ الْخُسْرَانُ) الْحَاصِلُ بِرُخْصٍ أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ (بِالرِّبْحِ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذٰلِكَ. وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ.

قوله: (إِلَّا بِعُدْوَانٍ) فَإِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهِ أَوِ اسْتَعْمَلَهُ لِغَيْرِ جِهَةِ الْقِرَاضِ أَوْ سَافَرَ بِهِ بِلَا إِذْنٍ أَوْ فِي الْبَحْرِ بِلَا نَصٍّ وَخَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِمَالِ مُقَارِضٍ لَهُ آخَرَ أَوْ بِمَالٍ آخَرَ لِذٰلِكَ الْمُقَارِضِ وَقَدْ قَارَضَهُ عَلَيْهِمَا فِي عَقْدَيْنِ أَوْ أَخَذَ لِلْقِرَاضِ مَا عَجَزَ عَنْهُ أَوْ قَصَّرَ ثَوْبَ الْقِرَاضِ أَوْ صَبَغَهُ بِلَا إِذْنٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ. وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى عَلَى وَرَثَتِهِ إِلَّا إِنِ ادَّعَى تَفْرِيطَ مُوَرِّثِهِمْ أَوْ أَنَّ الْمَالَ بِأَيْدِيهِمْ فَيَحْلِفُونَ عَلَى نَفْيِ

الْعِلْمِ فِي الْأُولَى وَعَلَى الْبَتِّ فِي الثَّانِيَةِ؛ سم على ابن حجر. فَرْعٌ: لَوِ اسْتَعْمَلَ الْعَامِلُ دَوَابَّ الْقِرَاضِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ لِلْمَالِكِ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ دَوَابِّ الْقِرَاضِ إِلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ اهـ سم ... قوله : (الْحَاصِلُ إِلَخ) الْأَنْسَبُ وَالْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ: الْمَذْكُورُ ق ل. قوله: (بِآفَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ) كَغَصْبٍ وَتَعَذُّرِ أَخْذِ بَدَلِهِ شرح المنهج. فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَهُ اسْتَمَرَّ فِيهِ الْقِرَاضُ. قوله : (بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ) فَإِنْ تَلِفَ بِذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِهِ بَلْ يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ شرح المنهج. قوله: (عَلَى مَا مَرَّ) أَيِ النَّقْصِ بِرُخْصٍ أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ. وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: " لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ "مَا لَوْ تَلِفَ كُلُّهُ فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ أَمْ بِإِتْلَافِ الْمَالِكِ أَمِ الْعَامِلِ أَمْ أَجْنَبِيٍّ. لَكِنْ تَسْتَقِرُّ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنَ الرِّبْحِ فِي إِتْلَافِ الْمَالِكِ وَيَبْقَى الْقِرَاضُ فِي الْبَدَلِ إِنْ أَخَذَهُ فِي إِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَذَا الْعَامِلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِإِتْلَافِهِ. اهـ م د.

(*Tidak ada tanggungan bagi amil*) dengan rusaknya harta atau sebagiannya karena ia terpercaya sehingga tidak wajib menanggung (kecuali dengan ceroboh) darinya seperti gegabah atau pergi di daratan atau lautan tanpa izin. Ungkapannya dalam kerusakan itu diterima ketika dimutlakkan. Apabila menyandarkannya pada sebab maka ada perincian yang akan datang dalam *wadiah* (penitipan) ... (Dan apabila hasil) dalam harta yang ada di tangannya (keuntungan dan kerugian) setelahnya dengan sebab murah atau cacat yang baru (maka harus mengganti kerugian) yang hasil dengan kemurahan atau cacat yang baru (dengan keuntungan) karena tuntutan *'urf* pada hal itu. Begitu juga jika sebagiannya rusak dengan *afat samawi* setelah *tasaruf amil* dengan penjualan atau pembelian karena menyamakan pada persoalan yang telah lewat.

(Ungkapan Muhammad asy-Syirbini al-Khatib: *"Kecuali dengan gegabah"*) jika gegabah dalam menjaga atau menggunakannya pada selain arah *qiradh*, bepergian dengannya tanpa izin, pergi ke lautan tanpa kejelasan dan mencampur harta *qiradh* dengan hartanya, dengan harta *muqaridh*nya yang lain atau dengan harta yang lain karena *muqaridh* itu. Dan sungguh ia meng*qiradh*nya pada keduanya di dalam dua akad atau mengambil perkara yang sulit darinya untuk *qiradh* atau memendekkan baju *qiradh* atau mewarnainya tanpa izin sebagaimana al-Imam berkata. Jika *amil* meninggal maka *dakwa* pada ahli warisnya tidak didengar kecuali jika ia mendakwa ceroboh *muwarris* mereka atau sungguh harta yang ada

di tangan-tangan mereka; maka mereka menyumpah pada menafikan ilmu dalam persoalan pertama dan pada perbaikan pada masalah kedua. Demikian pernyataan Ahmad ibn Qasim ibn ash-Shabbagh Syihab ad-Din al-Abbadi atas Ibn Hajar. *Far'*: Jika *amil* menggunakan kendaraan *qiradh* maka ia wajib membayar *ujrah* dari hartanya kepada *malik*. Dan tidak boleh menggunakan kendaraan *qiradh* kecuali dengan izin *amil*; apabila ia menyelisihi maka tidak ada sesuatu selain dosa. Demikian pernyataan Ahmad ibn Qasim ibn Ash-Shabbagh Syihab ad-Din al-Abbadi... Ungkapan Muhammad asy-Syirbini al-Khatib (*yang hasil...*) yang lebih sesuai dan lebih ringkas adalah berkata: Yang disebutkan Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah, Syihab ad-Din al-Qalyubi. Ungkapan Muhammad asy-Syirbini al-Khatib (*Dengan afat atau kriminal*) seperti *ghashab* dan sulit mengambil gantinya; dari *Syarah al-Manhaj*. Apabila ia mengambil gantinya, maka *qiradh* di dalamnya berlaku. Ungkapan Muhammad asy-Syirbini al-Khatib (*setelah tasaruf amil*) jika rusak dengan hal itu sebelumnya maka tidak ditambal dengannya tetapi dihitung dari modal; Karena sungguh akad tersebut tidak kuat dengan *amal*, *syarah al-Manhaj*. Ungkapan Muhammad asy-Syirbini al-Khatib (*menurut keterangan yang telah lewat*) maksudnya kurang dengan kemurahan atau cacat yang baru. Dan kecuali dengan ungkapan Muhammad asy-Syirbini al-Khatib (*apabila sebagiannya rusak*) perkara jika semuanya rusak, maka sungguh *qiradh* bisa hilang; baik kerusakan itu dengan *afat*, *malik*, *amil* atau orang lain merusak, akan tetapi bagian *amil* dari keuntungan tetap dalam *malik* yang merusak dan *qiradh* tetap dalam badan jika ia mengambilnya dalam orang lain yang merusak. Begitu juga *amil* menurut *mu'tamad*. Sedangkan *muqabil*nya sungguh itu menjadi rusak dengan merusaknya. Demikian pernyataan Hasan ibn Ali ibn Ahmad al-Manthawi asy-Syafi'i al-Azhari.

b. *Fath al-Mu'in* dan *I'anah ath-Thalibin*, III/72:

وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ وَيَلْزَمُهُ حِفْظُ مَالِهِ وَاسْتِنْمَاؤُهُ قَدْرَ النَّفَقَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْمُؤَنِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَلَهُ السَّفَرُ بِهِ فِي طَرِيقٍ آمِنٍ لِمَقْصِدٍ آمِنٍ بَرًّا لَا بَحْرًا وَشِرَاءُ عَقَارٍ يَكْفِيهِ غَلَّتُهُ أَوْلَى مِنَ التِّجَارَةِ وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ.

(قوله: إِلَّا لِحَاجَةٍ) أَيْ كَخَوْفِ ظَالِمٍ أَوْ خَرَابِهِ أَوْ عِمَارَةِ بَقِيَّةِ أَمْلَاكِهِ أَوْ لِنَفَقَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يَجِدْ مُقْرِضًا أَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي عَدَمِ الْقَرْضِ أَوْ لِكَوْنِهِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَيَحْتَاجُ لِكَثْرَةِ مُؤْنَةٍ لِمَنْ يَتَوَجَّهُ لِإِيجَارِهِ وَقَبْضِ غَلَّتِهِ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ هٰذِهِ الْكَثْرَةِ بِأَنْ تَسْتَغْرِقَ أُجْرَةَ الْعَقَارِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهَا إِلَّا مَالًا وَقْعَ لَهُ عُرْفًا اهـ تحفة. (وقوله: أَوْ

غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) أَيْ بِأَنْ يَرْغَبَ فِيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذٰلِكَ الثَّمَنِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ بِكُلِّهِ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ مَا نَصُّهُ تَنْبِيْهٌ: الْمَصْلَحَةُ أَعَمُّ مِنَ الْغِبْطَةِ إِذِ الْغِبْطَةُ: بَيْعٌ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيْمَةِ لَهَا وَقْعٌ وَالْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ ذٰلِكَ لِصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مَا يُتَوَقَّعُ فِيْهِ الرِّبْحُ، وَبَيْعِ مَا يُتَوَقَّعُ فِيْهِ الْخُسْرَانُ لَوْ بَقِيَ.

Wali mentasarufkan dengan maslahat dan wajib baginya menjaga harta dan mengembangkannya kadar nafkah, zakat dan biaya jika mungkin baginya dan ia boleh bepergian dengan membawanya di jalan yang aman ke tempat tujuan yang aman di daratan tidak lautan. Adapun membeli pekarangan yang *ghullah*nya mencukupinya itu lebih utama daripada berbisnis dan tidak menjual pekarangannya kecuali karena *hajat* atau keuntungan yang jelas.

(Ungkapan Zain ad-Din bin abd al-Aziz al-Malibari: *"Kecuali karena hajat"*) maksudnya seperti khawatir dari orang dhalim, robohnya, *imarah* sisa-sisa hartanya atau karena nafkahnya dan tidak boleh baginya selain itu dan tidak menemukan orang yang menghutangi atau melihat *maslahat* dalam tidak berhutang atau karena hal itu berada di selain negaranya dan ia membutuhkan banyak biaya bagi orang yang menghadapkan untuk menyewakannya dan menerima *ghullah*nya. Batasan banyak ini jelas, dengan gambaran menghabiskan upah pekarangan atau hampir mendekatinya, sekira tidak utuh darinya kecuali harta yang jatuh padanya menurut *'urf*. Demikian keterangan dalam *Tuhfah*. (Ungkapan Zain ad-Din bin abd al-Aziz al-Malibari: *"Atau keuntungan yang jelas"*) artinya dengan gambaran senang di dalamnya lebih banyak daripada *tsaman mistl*nya dan ia menemukan semisalnya dengan sebagian *tsaman* tersebut atau lebih baik darinya dengan seluruhnya. Dalam *al-Bujairami* terdapat keterangan yang *nash*nya; *"Tanbih: Maslahat lebih umum daripada ghibthah karena ghibthah adalah penjualan dengan melebihi qimahnya yang terjadi, sedangkan maslahat tidak menetapkan hal itu karena sesuai dengan semisal membeli perkara yang diharapkan ada keuntungan, dan menjual perkara yang diharapkan ada kerugian jika masih utuh."*

c. *Nihayah al-Muhtaj*, IV/436:

وَتَعْبِيْرُ الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ دُوْنَ الْغِبْطَةِ أَوْلَى لِعُمُوْمِهَا إِذِ الْغِبْطَةُ كَمَا مَرَّ بَيْعٌ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيْمَةِ لَهَا وَقْعٌ، وَالْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ ذٰلِكَ لِصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مَا يُتَوَقَّعُ فِيْهِ الرِّبْحُ وَبَيْعِ مَا يُتَوَقَّعُ فِيْهِ الْخُسْرَانُ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُفِيْدُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَلَى الْوَلِيِّ بَيْعٌ خَالٍ عَنْ نَفْعٍ وَضَرَرٍ لَا الَّذِيْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ فِيْهِ إِلَى الْغِبْطَةِ.

Ungkapan *Mushannif*: *"sebagaimana ar-Rafi'i dengan maslahat bukan ghibthah lebih utama karena umumnya, sebab ghibthah sebagaimana telah lewat ialah penjualan melebihi qimah yang terjadi; sedangkan maslahat tidak menetapkan hal itu karena sesuai dengan semisal membeli perkara yang diharapkan ada keuntungan, dan menjual perkara yang diharapkan ada kerugian; karena sungguh ibaratnya memberi faidah sungguh perkara yang tercegah pada wali adalah penjualan yang kosong dari manfaat dan madharat, tidak perkara yang terdapat maslahat meskipun tidak berakhir pada keuntungan."*

d. *Kifayah al-Akhyar*, I/305:

وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لَا تَبِعْ وَنَقْتَسِمُ الْعُرُوْضَ أَوْ قَالَ أُعْطِيْكَ قَدْرَ نَصِيْبِكَ نَاضًّا فَفِيْ تَمَكُّنِ الْعَامِلِ مِنَ الْبَيْعِ وَجْهَانِ وَالَّذِيْ قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ وَالْقَاضِيْ أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لِلْمُعِيْرِ أَنْ يَتَمَلَّكَ غِرَاسَ الْمُسْتَعِيْرِ بِقِيْمَتِهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَالْمَالِكُ هُنَاكَ أَوْلَى لِأَنَّهُ شَرِيْكُ هٰذَا إِذَا كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَهَلْ لِلْمَالِكِ تَكْلِيْفُ الْعَامِلِ الْبَيْعَ وَجْهَانِ الرَّاجِحُ نَعَمْ لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ مَشَقَّةُ الْبَيْعِ هَلْ لِلْعَامِلِ الْبَيْعُ إِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِمْسَاكِهَا وَجْهَانِ الصَّحِيْحُ أَنَّ لَهُ ذٰلِكَ إِذَا تَوَقَّعَ رِبْحًا بِأَنْ ظَفِرَ بِرَاغِبٍ أَوْ بِسُوْقٍ يُتَوَقَّعُ فِيْهِ الرِّبْحُ.

Apabila pemilik harta berkata: *"Janganlah kamu menjual dan kita membagi barang"*; atau berkata: *"Saya memberikan padamu kadar bagianmu secara tunai"*; maka kemungkinan *amil* dari penjualan ada dua *wajah*. Adapun perkara yang dipastikan asy-Syaikh abu Hamid dan al-Qadhi abu at-Thayyib sungguh hal itu tidak mungkin, karena sungguh bila pemberi pinjaman dibolehkan menerima kepemilikan tananam peminjam dengan *qimah*nya untuk menolak *dharar* maka *malik* di sana lebih utama karena sungguh ia bersekutu; ini bila ada keuntungan dalam harta. Sedangkan apabila tidak ada keuntungan maka apakah *malik* boleh menuntut *amil* menjual, maka terdapat dua *wajah*; menurut *rajih* ya agar dikembalikan sebagaimana diambil dan karena sungguh tidak wajib bagi *malik* beratnya penjualan. Apakah boleh bagi *amil* menjual, apabila *malik* rela dengan menahannya; terdapat dua *wajah*. Menurut *shahih* sungguh ia boleh melakukannya apabila ia mengharap keuntungan, dengan gambaran mendapat perkara yang menyenangkan atau di pasar yang diharapkan ada keuntungan.

e. *Mughni al-Muhtaj*, VIII/67 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

(وَلَا) يَشْتَرِيْ لَهُ مَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ وَإِنْ كَانَ مُرْبِحًا ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَا (يَبِيْعُ عَقَارَهُ)

لِأَنَّ الْعَقَارَ أَسْلَمُ وَأَنْفَعُ مِمَّا عَدَاهُ (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّةُ الْعَقَارِ بِهِمَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ، أَوْ لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي الْاِقْتِرَاضِ، أَوْ خَافَ ... (أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) كَأَنْ يَرْغَبَ فِيهِ شَرِيكٌ أَوْ جَارٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ بِكُلِّهِ أَوْ يَكُونُ ثَقِيلَ الْخَرَاجِ: أَيِ الْمَغَارِمِ مَعَ قِلَّةِ رَيْعِهِ. تَنْبِيهٌ: قوله : " ظَاهِرَةٍ " مِنْ زِيَادَةِ الْمِنْهَاجِ عَلَى بَقِيَّةِ كُتُبِ الشَّيْخَيْنِ. قَالَ الْإِمَامُ وَضَابِطُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ أَنْ لَا يَسْتَهِينَ بِهَا الْعُقَلَاءُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شِرَاءِ الْعَقَارِ، وَكَالْعَقَارِ فِيمَا ذُكِرَ آنِيَةُ الْقِنْيَةِ مِنْ نُحَاسٍ وَغَيْرِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ الْبَنْدَنِيجِيِّ قَالَ: وَمَا عَدَاهُمَا لَا يُبَاعُ أَيْضًا إِلَّا لِغِبْطَةٍ أَوْ حَاجَةٍ لَكِنْ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ لَائِقٍ بِخِلَافِهِمَا. وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ، بَلْ لَوْ رَأَى الْبَيْعَ بِأَقَلَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِيَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ مَا هُوَ مَظِنَّةٌ لِلرِّبْحِ جَازَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَلَوْ طَلَبَ مَالَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَجَبَ بَيْعُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عَقَارًا يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ كِفَايَتُهُ.

(Dan tidak) boleh baginya membeli barang yang cepat rusak meskipun murah, seperti al-Mawardi berkata. *Dan tidak (menjual pekarangannya)*; karena sungguh pekarangan lebih selamat dan lebih bermanfaat daripada lainnya (kecuali sebab *hajat*) seperti nafkah dan sandang, gambarannya *ghullah* pekarangan tidak memenuhi keduanya dan tidak menemukan orang yang menghutanginya, tidak melihat *maslahat* dalam menerima hutangan, atau khawatir.... (atau keuntungan yang jelas) seperti *syarik* atau tetangga senang di dalamnya lebih banyak daripada *tsaman mitsl*nya dan ia menemukan misalnya dengan sebagian *tsaman* itu atau semuanya lebih baik darinya atau tingginya pajak, maksudnya hutangan serta sedikit hasilnya. Peringatan; (Ungkapan Muhyi ad-Din Abu Zakariya Yahya bin Syaraf ad-Din an-Nawawi: "*Secara dhahir*") ialah tambahan dari *al-Minhaj* atas kitab *asy-Syaikhaini* yang lainnya. Al-Imam berkata: "*Batasan tambahan itu ialah para intelektual memandang rendah dengannya dengan penisbatan pada pembelian pekarangan. Sebagaimana pekarangan dalam persoalan tersebut adalah wadah properti dari tembaga dan lainnya,*" sebagaimana dinukil oleh ibn ar-Rif'ah dari al-Bandaniji. Beliau berkata: "*Adapun selain keduanya maka tidak dijual juga kecuali karena keuntungan atau hajat, akan tetapi boleh karena hajat yang sedikit dan keuntungan yang sedikit yang layak; berbeda dengan keduanya.*" Dan sebaiknya sebagaimana

kata ibn Mulqin boleh menjual harta-harta bisnis tanpa meng*qaiyid*nya dengan sesuatu, tapi jika ia melihat penjualan kurang dari modal untuk membeli barang yang dispekulasi ada keuntungan dengan *tsaman* maka boleh sebagaimana kata sebagian *muta'akkhirin*. Jika menuntut hartanya lebih dari *tsaman mitsl*nya maka wajib menjualnya jika tidak dibutuhkan dan bukan pekarangan yang kecukupannya hasil darinya.

f. *Al-Fawa'id al-Janiyah*, 396-397 [Dar al-Fikr]:

وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ التَّصَرُّفُ بِالْمَصْلَحَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ "الأنعام: ١٥٢" وقوله تعالى وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ "البقرة: ٢٢٠" فَلَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ بِمَا لَا خَيْرَ فِيْهِ وَلَا شَرَّ إِذْ لَا مَصْلَحَةَ فِيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ حِفْظُ مَالِهِ عَنْ أَسْبَابِ التَّلَفِ وَاسْتِنْمَاؤُهُ قَدْرَ مَا تَأْكُلُهُ الْمُؤَنُ مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَوْ خَافَ الْوَلِيُّ اسْتِيْلَاءَ ظَالِمٍ عَلَى مَالِ الْيَتِيْمِ فَلَهُ بَذْلُ بَعْضِهِ لِتَخْلِيْصِهِ وُجُوْبًا وَتَسْتَأْنِسُ لَهُ بِخَرْقِ السَّيِّدِ الْخَضِرِ السَّفِيْنَةَ.

Dan wajib bagi wali mentasarufkan dengan maslahat karena firman Allah ﷻ: "*dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.*" (QS. al-An'am: 152). Dan firman Allah ﷻ: "*dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.*" (QS. al-Baqarah: 220). Maka tidak boleh mentasarufkan dengan model yang tidak ada kebaikannya dan tidak ada keburukan karena tidak ada maslahatnya, sebagaimana asy-Syaikh abu Muhammad dan al-Mawardi menjelaskannya. Dan wajib bagi wali menjaga hartanya dari sebab-sebab kerusakan dan mengembangkannya dengan sekadar biaya nafkah dan lainnya. Jika wali khawatir penguasaan orang dhalim atas harta anak yatim maka ia boleh menyerahkan sebagiannya untuk menyelamatkan harta itu secara wajib dan *isti'nas* padanya dengan kisah nabi Khadhir yang membedah perahu.

g. *Hawasyi asy-Syirwani*, VI/278 [Dar Shadir]:

(قوله: وَلَوْ أَشْرَفَتْ مَأْكُوْلَةٌ عَلَى الْمَوْتِ ذُبِحَتْ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهَا مِنْ جِنْسِهَا إلخ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ قُطِعَ بِمَوْتِ الْمَوْقُوْفَةِ ذُبِحَتْ وَفَعَلَ الْوَاقِفُ بِلَحْمِهَا مَا رَآهُ مَصْلَحَةً انتهى وَبَيَّنَ فِيْ شَرْحِهِ أَنَّ التَّرْجِيْحَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ الْأَوْلَى بِالتَّرْجِيْحِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ بِمَوْتِهَا لَمْ يَجُزْ ذَبْحُهَا وَإِنْ خَرَجَتْ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ كَمَا لَا يَجُوْزُ إِعْتَاقُ الْعَبْدِ

الْمَوْقُوفِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا حَيَّةً وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْمَحَامِلِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْجَوَازِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ انتهى وَفِي شَرْحِ م ر وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَا إِذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَمِيعُ ذَلِكَ صُرِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ انتهى (فَرْعٌ) لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهَا حَيَّةً فَبَاعَهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي خِلَافِهِ فَالْمُتَّجِهُ عَدَمُ ضَمَانِ النَّقْصِ بِالذَّبْحِ بَلْ يُبَاعُ اللَّحْمُ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ مِثْلَهَا أَوْ شِقْصٍ مِنْهُ مَرَّ اهـ وقوله وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا إلخ اعْتَمَدَهُ ع ش وقوله حَيَّةً فَبَاعَهَا لَعَلَّ صَوَابَهُ مَذْبُوحَةً فَذَبَحَهَا.

(Ungkapan abd al-Hamid al-Makki asy-Ayarwani: *"Jika binatang yang boleh dimakan mendekati kematian maka disembelih dan membeli jenisnya dengan tsamannya…*) *Ibarat ar-Raudh*: *"Apabila dipastikan kematian hewan wakafan maka disembelih dan tindakan wakif terkait dagingnya sesuatu yang ia ketahui ada maslahat."* Demikian; dan menjelaskan dalam *syarah*nya: Sungguh pengunggulan adalah tambahannya dan sungguh yang lebih baik terkait pengunggulan adalah keterangan yang disebutkan *syarih*; kemudian berkata: *"Jika tidak dipastikan kematiannya maka tidak boleh menyembelihnya meskipun keluar dari kemanfaatan, sebagaimana tidak boleh memerdekakan budak yang diwakafkan."* Adapun tuntutan kalamnya seperti *asal*nya, sungguh tidak boleh menjualnya dalam kondisi masih hidup; ini adalah pendapat yang dishahihkan al-Mahamili dan al-Jurjani, akan tetap al-Mawardi dan lainnya mantap dengan hukum boleh. Sementara menurut *mu'tamad* yang pertama. Dalam *syarah* Muhammad Ramli: *"Dan dikumpulkan antara keduanya dengan mengarahkan masing-masing dari keduanya pada perkara apabila maslahat menuntutnya. Jika semua itu sulit maka diarahkan pada mauquf alaih dalam perkara yang jelas."* (*Far'*) Jika melihat *maslahat* dalam penjualannya pada saat masih hidup, lalu menjualnya, kemudian ternyata sungguh *maslahat* itu terbukti sebaliknya maka menurut *muttajih* tiada tanggungan kurang dengan penyembelihan, akan tetapi dagingnya dijual dan membeli pada *mitsil*nya atau bagian darinya dengan *tsaman*nya yang telah lewat. Ungkapan abd al-Hamid al-Makki asy-Ayarwani: *"dan dikumpulkan di antara keduanya…"* Ali ibn Ali Nur ad-Din asy-Syubramilsi berpedoman dengannya. (Ungkapan abd al-Hamid al-Makki asy-Ayarwani: *"masih hidup lalu menjualnya"*) mungkin yang benar adalah disembelih kemudian menyembelihnya.

h. *Al-Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, II/164 [Dar Shadir]:

الْمِثَالُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَزِمَهُ الضَّمَانُ جَبْرًا لِمَا فَاتَ

مِنَ الْحَقِّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذٰلِكَ صُوَرٌ .. الْخَامِسَةُ: أَنَّ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ إِذَا أَتْلَفَا شَيْئًا مِنَ النُّفُوسِ أَوِ الْأَمْوَالِ فِيْ تَصَرُّفِهِمَا لِلْمَصَالِحِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ دُوْنَ الْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ وَدُوْنَ عَوَاقِلِهِمَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَصَرَّفَا لِلْمُسْلِمِيْنَ صَارَ كَأَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ هُمُ الْمُتْلِفُوْنَ وَلِأَنَّ ذٰلِكَ يَكْثُرُ فِيْ حَقِّهِمَا فَيَتَضَرَّرَانِ بِهِ وَيَتَضَرَّرُ عَوَاقِلُهُمَا.

Contoh yang ke dua puluh tujuh: Orang yang merusak sesuatu dengan sengaja tanpa hak maka harus menanggung karena menambal hak yang terlepas, dan kecuali beberapa contoh.... Kelima: Sungguh imam dan hakim apabila merenggut nyawa atau harta dalam tasaruf keduanya karena *mashalih* maka sungguh wajib bagi *bait al-mal* bukan hakim dan imam dan bukan keduanya menurut *qaul* asy-Syafi'i, karena sungguh keduanya ketika mentasarufkan untuk muslimin maka seolah-olah sungguh muslimin ialah orang-orang yang merusak. Dan sungguh sebab itu, banyak dalam hak keduanya maka keduanya dan para cendikiawan menjadi bahaya dengannya.

i. *Kanz ar-Raghibin* dan *Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Umairah*, II/380:

(وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ فَيَشْتَرِيْ لَهُ الْعَقَارَ) وَهُوَ أَوْلَى مِنَ التِّجَارَةِ (وَيَبْنِيْ دُوْرَهُ بِالطِّيْنِ وَالْآجُرِّ) أَيِ الطُّوْبِ الْمُحْرَقِ (لَا اللَّبِنِ) أَيِ الطُّوْبِ الَّذِيْ لَمْ يُحْرَقْ بَدَلَ الْآجُرِّ لِقِلَّةِ بَقَائِهِ (وَالْجِصِّ) أَيِ الْجِبْسِ بَدَلَ الطِّيْنِ لِكَثْرَةِ مُؤْنَتِهِ (وَلَا يَبِيْعُ عَقَارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّتُهُ بِهِمَا (أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) بِأَنْ يَرْغَبَ فِيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ. وَهُوَ يَجِدُ مِثْلَهُ بِبَعْضِ ذٰلِكَ الثَّمَنِ (وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرَضٍ وَنَسِيْئَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ) الَّتِيْ رَآهَا. قوله (بِالْمَصْلَحَةِ) وَمِنْهَا بَيْعُ مَا وَهَبَهُ لَهُ أَصْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ خَشْيَةَ رُجُوْعِهِ فِيْهِ وَبَيْعُ مَا خِيْفَ خَرَابُهُ أَوْ هَلَاكُهُ أَوْ غَصْبُهُ وَلَوْ بِدُوْنِ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَهُ وَلَوْ فِيْمَا فَعَلَ مَا يَرْغَبُ فِيْ نِكَاحِ مَوْلِيَّتِهِ أَوْ بَقَائِهِ وَلَوْ بِنَحْوِ بَيْعِ حُلِيٍّ لِصَبْغِ ثِيَابٍ وَشِرَاءِ جِهَازٍ مُعْتَادٍ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِيْهِ إِذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ الْحَالِ قوله (وَهُوَ أَوْلَى) إِنْ أَمِنَ فِيْهِ جَوْرٌ وَخَرَابٌ وَكَفَى رَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ ثِقَلُ خَرَاجٍ وَلَا بَعُدَ عَنْ بَلَدِ الْمَحْجُوْرِ، وَبِحَيْثُ يَحْتَاجُ فِيْ تَحْصِيْلِ غَلَّتِهِ إِلَى أُجْرَةِ مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ لِأَجْلِهَا أَوْ لِنَحْوِ عِمَارَةٍ. قوله: (وَيَبْنِيْ دُوْرَهُ إلخ) قَالَ شَيْخُنَا: الْمُعْتَمَدُ الرُّجُوْعُ إِلَى عَادَةِ الْبَلَدِ، وَفِيْ شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يُخَالِفُهُ، وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا نَصُّوْا عَلَيْهِ، وَإِنْ خَالَفَ الْعَادَةَ وَسَوَاءٌ فِي الْبِنَاءِ ابْتِدَاؤُهُ، وَدَوَامُهُ فَلَوْ تَرَكَهُ أَوْ

تَرَكَ عَلَفَ دَابَّتِهِ أَوْ سَقْيَهَا ضَمِنَ، وَكَذَا تَرْكُ نَخْلٍ بِلَا تَلْقِيحٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا خِلَافَهُ قَالَ الْقَفَّالُ وَيَضْمَنُ وَرَقَ الْفِرْصَادِ إِذَا تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَرْعٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَقَارِ أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ بِنَائِهِ مَا صَرَفَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِنُدُورِهِ وَإِنْ وَقَعَ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَرَامَةً لَهُ "تَنْبِيهٌ" حُكْمُ نَاظِرِ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ كَالْوَلِيِّ قوله (وَالْآجُرِّ) وَأَوَّلُ مَنْ صَنَعَهُ هَامَانُ عِنْدَ بِنَاءِ الصَّرْحِ لِفِرْعَوْنَ قوله (وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ) وَمِثْلُهُ آلَةُ الْقِنْيَةِ وَمِنَ الْحَاجَةِ مَا مَرَّ فِي الْحَرْفِ، فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْحَاجَةِ فِي هَذَيْنِ أَكِيدَةً، وَيَجُوزُ بَيْعُ غَيْرِهِمَا وَلَوْ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَبَيْعُ مَالِ التِّجَارَةِ لِمَصْلَحَةٍ قوله (وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ) وَلَا يَجُوزُ إِقْرَاضُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ إِلَّا لِلْقَاضِي فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا وَلَا يَبِيعُ الْوَلِيُّ إِلَّا لِثِقَةٍ مَلِيءٍ.

(Dan wali mentasarufkan dengan *maslahat* maka ia membeli pekarangan untuknya) ini lebih utama daripada berbisnis (dan rumahnya dibangun dengan tanah liat dan batu-bata) maksudnya bata yang dibakar (bukan bata) maksudnya bata yang tidak dibakar sebagai ganti batu-bata karena sedikit utuhnya (dan plester semen) maksudnya plester sebagai ganti tanah sebab banyak biayanya (dan tidak menjual pekarangannya kecuali karena *hajat*) seperti nafkah dan sandang dengan gambaran *ghullah*nya tidak memenuhi keduanya (atau keuntungan yang jelas) dengan gambaran kesenangan di dalamnya lebih banyak daripada *tsaman mitsli*nya. Dan ia menemukan semisalnya dengan sebagian *tsaman* itu (dan ia boleh menjual hartanya dengan dibayar suatu barang dan menjualnya secara kredit karena *maslahat*) yang ia lihat.

Ungkapan al-Mahalli (*dengan maslahat*) di antaranya menjual barang yang ia berikan asalnya kepadanya dengan *tsaman mitsli*nya karena khawatir kembali di dalamnya dan menjual barang yang dikhawatirkan roboh, rusak atau marahnya meskipun di bawah *tsaman mistli*nya. Dan boleh baginya meski dalam persoalan yang ia kerjaan sesuatu yang ia senangi dalam pernikahan *mauliyah*nya atau tetapnya meskipun dengan semisal menjual perhiasan untuk mewarnai baju dan membeli *jihaz* (radio, TV) yang dibiasakan meski tanpa izin hakim dan dakwanya diterima jika *dhahir hal* tidak mendustakannya. Ungkapan Jalal ad-Din al-Mahalli (*itu lebih utama*) jika aman dari penyelewengan dan kerusakan, *rai'*nya mencukupi, tidak ada keberatan kerusakan dengannya dan tidak jauh dari negara orang yang dilarang tasarrufnya, dan sekiranya di dalam menghasilkan *ghullah*nya butuh upah orang yang menghadap padanya karena itu atau sebab semisal *imanah*. Ungkapan Jalal ad-Din al-Mahalli (*dan rumahnya dibangun...*) *Syaikhuna* berkata: Menurut *mu'tamad* kembali

pada *adat balad*, dan dalam *syarah* Syaikhuna ada keterangan sebaliknya, dan sungguh pendapat yang di *i'tibar* adalah pendapat yang dijelaskan ulama, meski menyelisihi *adat*. Dan baik dalam bangunan itu awalnya maupun abadinya. Maka jika meninggalkannya, meninggalkan makanan binatang atau minumannya maka harus menanggung. Demikian pula meningggalkan saringan tanpa perabukan sebagaimana kata ibn Qasim. *Syaikhuna* berpedoman sebaliknya. Al-Qaffal berkata: *"dan menanggung kertas tumbuhan apabila meninggalkannya hingga mati."* (*Far'i*) terkait pekarangan tidak disyaratkan menyamakan perkara yang mengarahkan padanya setelah membangunnya menurut *mu'tamad* karena langkanya, meskipun jatuh keramat baginya pada sebagian ulama. Peringantan: Hukum *nadhir wakaf* dalam hal itu seperti wali. Ungkapan Jalal ad-Din al-Mahalli (dan bata) permulaan orang yang melakukannya ialah Haman ketika membangun negara untuk Fir'aun. Ungkapan Jalal ad-Din al-Mahalli (*dan tidak menjual pekarangannya*) dan misalnya properti dan di antara *hajat* ialah persoalan yang telah lewat dalam pekerjaan. Maka hajat dalam kedua ini harus secara kuat. Dan boleh menjual selain keduanya meskipun karena *hajat* yang sedikit dan menjual harta dagangan sebab maslahat. Ungkapan Jalal ad-Din al-Mahalli (*dan boleh baginya menjual hartanya*) dan tidak boleh menghutangkannya tanpa ada *dharurah* kecuali pada *qadhi*; maka boleh karena *hajat* juga dan wali tidak boleh menjual kecuali pada orang yang terpercaya dan profesional.

13. Penyadapan dalam Konteks Penegakan Hukum dan Hubungan Antarnegara[1]

I. Definisi Penyadapan

Merujuk Kamus Bahasa Indonesia, menyadap berarti mendengarkan (merekam) informasi orang lain dengan sengaja secara diam-diam, seperti: "*Salah satu tugas agen rahasia itu menyadap pembicaraan lawan.*" Sedangkan penyadapan bermakna proses, cara, dan perbuatan menyadap.[2] Dalam bahasa Arab penyadapan sering diidentikkan dengan kata *tajassus*, sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an وَلَا تَجَسَّسُوا *"Dan janganlah kalian mencari-cari rahasia dan aib kaum muslimin."* (QS. al-Hujurat: 12).[3] Sebab itu, secara sederhana penyadapan bisa diartikan sebagai perbuatan mendengarkan atau merekam informasi (rahasia) dari pihak lain yang dilakukan secara sengaja dan diam-diam.

---

[1] PCNU Kab. Trenggalek dan PWNU.

[2] Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1337.

[3] As-Suyuthi dan al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain* (Kairo: Dar al-Hadits, tth.) I/686.

Selain identik dengan *tajassus*, penyadapan juga identik dengan istilah *tasammu'* atau *istiraq as-sam'*, yang oleh para pakar bahasa diartikan dengan makna *at-tasammu' mustakhfiyah*,[4] yakni mencuri pendengaran dari orang lain atau mendengarkan pembicaraannya secara diam-diam. Sementara *tajassus* adalah at-*taftisy 'ala bawathin al-umur* atau mengorek rahasia. Selain itu, ada pula istilah *tahassus* yang lebih umum daripada *tasammu'*, yakni mencari tahu dengan berbagai indra.[5] Dari sini dapat disimpulkan, bahwa penyadapan dapat dikategorikan sebagai *tajassus* dari sisi mengorek rahasia; dikategorikan sebagai *tahassus* dari sisi mencari informasi dengan indra, dan secara lebih khusus berarti *tasammu'* atau *istiraq as-sama'* dari sisi mencuri pendengaran dari orang lain.

II. Hukum Penyadapan

Dalam kajian hukum *syar'i*, penyadapan termasuk kategori *tajassus* yang merupakan tindak kejahatan melanggar hak privasi yang hukumnya haram, kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat,[6] yaitu dalam rangka menghilangkan kejahatan yang sedang atau akan terjadi. Bahkan sebenarnya negara berkewajiban menjaga hak privasi dari setiap kesewenang-wenangan campur tangan orang lain.[7] Keharaman penyadapan tersirat dalam ayat, hadits, dan *atsar* berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. (الحجرات: ١٢)

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (al-Hujurat: 12).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ

---

[4] Wazarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Dzat as-Salasil, 1404 H/1983 M), III/279.

[5] Ibid, III/280.

[6] Ibid.

[7] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 8/550. CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

اللهِ إِخْوَانًا. (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah ﷺ bersabda: Jauhilah prasangka, sebab prasangka merupakan pembicaraan yang paling bohong. Janganlah kalian mendengar-dengar pembicaraan orang lain, mencari-cari rahasianya, saling mengunggulkan diri, saling hasud, saling menyulut kebencian, dan saling memutus hubungan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim)

وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)

"Orang yang menguping pembicaraan suatu kaum dan mereka membencinya, maka akan dicurahkan timah panas ke kedua telinganya di hari kiamat." (HR. al-Bukhari)

عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ. (رواه أبو داود بإسناد صحيح)

"Dari Mu'awiyah رضي الله عنه, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh bila kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin, maka kamu akan membuat mereka terjebak dalam kerusakan, atau hampir membuat mereka terjebak dalam kerusakan."

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ: هٰذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلٰكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ، نَأْخُذْ بِهِ. (رواه أبو داود. حديث حسن صحيح)

"Dari Ibn Mas'ud رضي الله عنه: "Sungguh beliau didatangi seseorang, lalu dikatakan padanya: "Fulan ini, ada khamr menetes dari jenggotnya." Kemudian beliau berkata: "Sungguh kami dilarang melakukan tajassus, namun bila tampak suatu kemungkaran kepada kami, maka kami akan menghukumnya." (HR. Abu Dawud. Hadits hasan shahih)

Meski begitu, keharaman penyadapan tidak bersifat mutlak. Dalil-dalil keharamannya bersifat umum dan ter*takhsis* dengan dalil lain yang membolehkan penyadapan dalam kondisi tertentu, di antaranya adalah hadits tentang kisah Ibn Shayyad:

اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ، وَقَالَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ. فَقَالَ لَهُ:

مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ ﷺ: خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ: اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ. وَقَالَ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ -يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ- فِيهَا رَمْرَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ -وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ- هَذَا مُحَمَّدٌ. فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ. (رواه البخاري)

"Nabi ﷺ pergi bersama sejumlah sahabat ke arah Ibn Shayyad sampai menemukannya sedang bermain bersama anak-anak di perbukitan Bani Maghalah, dimana ia hampir baligh. Ia tidak mengetahui kedatangan Nabi ﷺ sampai beliau menepuknya dengan tangannya. Lalu beliau bersabda kepada Ibn Shayyad: "Apakah kamu bersaksi bahwa aku merupakan Rasulullah?" Ibn Shayyad lalu memandang beliau dan kemudian menjawab: "Aku bersaksi, sungguh anda adalah utusan orang-orang ummi." Ia balik bertanya kepada Nabi ﷺ "Apakah anda menyaksikan, sungguh aku adalah Rasulullah? Lalu beliau mengabaikannya dan bersabda: "Aku beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Beliau bersabda lagi: "Apa yang telah kamu lihat?" Ibn Shayyad menjawab: "Telah datang kepadaku orang yang jujur dan orang yang bohong." Nabi ﷺ bersabda: "Perkara ini menjadi tidak jelas disamarkan bagimu." Beliau bersabda kepadanya: "Sungguh aku menyembunyikan sesuatu untukmu." Ibn Shayyad menjawab: "Itu dukhan." Beliau bersabda: "Menjauhlah, maka kamu tidak akan melewati takdirmu." Umar berkata: "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Rasulullah ﷺ menjawab: "Bila ia Dajjal maka kamu tidak dapat mengalahkannya, dan bila bukan Dajjal maka tidak ada kebaikan dalam membunuhnya." Salim berkata dari riwayat Ibn Umar: "Setelah peristwa itu Nabi ﷺ dan Ubai bin Ka'b pergi ke kebun Palm secara diam-diam untuk mendengarkan sesuatu dari Ibn Shayyad sebelum diketahuinya. Kemudian Nabi ﷺ melihatnya sedang tidur-di kain beludrunya-yang terdengar suara berisik dari dalamnya. Kemudian Ibunya melihat Rasulullah ﷺ, dan berkata kepada Ibn Syayyad: "Wahai Shaf-yang merupakan nama Ibn Shayyaf-, ini Muhammad." Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Andaikan ibunya diam saja, maka keyakinan Ibn Shayyaf pasti menjadi jelas." (HR. al-Bukhari).

Ketika menjelaskan hadits ini, pakar hadits asal kota Cordova, Ibn Baththal (w. 339 H/1057 M) dalam *Syarh al-Bukhari*nya menyatakan:

قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ صَيَّادٍ مِنَ الْفِقْهِ جَوَازُ التَّجَسُّسِ عَلَى مَنْ تُخْشَى مِنْهُ فَسَادُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. وَهٰذَا الْحَدِيثُ يُبَيِّنُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَلَا تَجَسَّسُوا [الحجرات: ١٢] لَيْسَ عَلَى الْعُمُومِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّجَسُّسِ عَلَى مَنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهُ الْقَدْحُ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُضْمِرِ الْغِلَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَاسْتَتَرَ بِقَبَائِحِهِ. فَهٰذَا الَّذِي حَالُهُ التَّوْبَةُ وَالْإِنَابَةُ. وَأَمَّا مَنْ خُشِيَ مِنْهُ مِثْلُ مَا خُشِيَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ أَوْ مِنْ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّنْ كَانَ يُضْمِرُ الْفَتْكَ بِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَجَائِزٌ التَّجَسُّسُ عَلَيْهِ، وَإِعْمَالُ الْحِيلَةِ فِي أَمْرِهِ إِذَا خُشِيَ مِنْهُ.[8]

"Al-Muhallab menyatakan: "Di antara hukum fikih yang terkandung dalam hadits Ibn Shayyad adalah kebolehan melakukan tajassus kepada orang yang dikhawatirkan akan merusak urusan agama dan urusan dunia." Hadits ini menjelaskan bahwa firman Allah ﷻ "Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain" [al-Hujurat: 12] tidak berlaku secara umum. Yang dikehendaki ialah tajassus kepada orang yang tidak dikhawatirkan menistakan agama dan tidak menyimpan kedengkian pada kaum muslimin, dan masih menutupi perbuatan buruknya. Orang semacam ini cukup bertobat dan kembali kepada Allah. Adapun orang yang dikhawatirkan kejahatannya seperti Ibn Shayyad atau Ka'b bin al-Asyraf dan semisalnya, yakni orang-orang yang berencana membuat kerusakan kepada umat Islam, maka boleh memata-matainya dan mencegah ancamannya dengan berbagai cara."

Dengan bahasa berbeda, *mufassir* modern, Rektor Universitas az-Zaitunah, dan *Ra'is Mufti* Malikiyah di Tunisia, Ibn 'Asyur (1296-1393 H/1879-1973 M) dalam tafsirnya, *at-Tahrir wan at-Tanwir*, menyatakan:

وَإِذْ قَدِ اعْتَبَرَ النَّهْيَ عَنِ التَّجَسُّسِ مِنْ فُرُوعِ النَّهْيِ عَنِ الظَّنِّ، فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالتَّجَسُّسِ الَّذِي هُوَ إِثْمٌ أَوْ يُفْضِي إِلَى الْإِثْمِ ... فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ التَّجَسُّسُ الَّذِي لَا يَنْجَرُّ مِنْهُ نَفْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ دَفْعُ ضَرٍّ عَنْهُمْ، فَلَا يَشْمَلُ التَّجَسُّسَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجَسُّسَ الشُّرَطِ عَلَى الْجُنَاةِ وَاللُّصُوصِ.[9]

"Dan karena Allah mengungkapkan pelarangan tajassus dari cabang larangan berprasangka, maka larangannya terbatasi dengan tajassus yang merupakan dosa atau menjerumuskan padanya ... Sebab itu, yang dilarang adalah tajassus

[8] Ali bin Khalf bin Abdil Malik bin Baththal al-Qurthubi, *Syarh Shahih al-Bukhari*, III/342. CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.
[9] Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wan at-Tanwir* (Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah, 1984), XXVI/254.

yang tidak menarik keuntungan bagi kaum muslimin atau menghindarkan bahaya darinya. Maka larangan itu tidak mencakup memata-matai musuh, dan spionase polisi terhadap para penjahat dan pencuri."

Sebab itu, penyadapan boleh dilakukan dalam konteks penegakan hukum dan hubungan antarnegara (sesuai batasan yang akan dijelaskan), sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum, dan antisipasi terjadinya kezaliman secara makro, serta wujud perlindungan massa dari dampak sosial tindak kejahatan.

Bahkan penyadapan hukumnya wajib dilakukan bila menjadi satu-satunya cara untuk mencegah tindak kejahatan yang membahayakan masyarakat luas. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* ditegaskan:

وَقَدْ يَكُوْنُ التَّجَسُّسُ وَاجِبًا. فَقَدْ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُوْنِ أَنَّهُ قَالَ: اَللُّصُوْصُ وَقُطَّاعُ الطَّرِيْقِ أَرَى أَنْ يُطْلَبُوْا فِي مَظَانِّهِمْ وَيُعَانَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقْتَلُوْا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ بِالْهَرَبِ. وَطَلَبُهُمْ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِالتَّجَسُّسِ عَلَيْهِمْ وَتَتَبُّعِ أَخْبَارِهِمْ.[10]

"Terkadang tajassus hukumnya wajib. Sebab, sungguh telah dinukil dari Ibn al-Majisyun, beliau berkata: "Aku berpendapat, para pencuri dan perampok jalanan harus dicari di tempat-tempat yang kemungkinan menjadi sarang mereka, sehingga mereka dibunuh atau diusir dari negeri", dan pencarian terhadap mereka tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memata-matai mereka dan meneliti kabarnya."

1. Penyadapan dalam Konteks Penegakan Hukum dan Batasannya

Kasus-kasus pelanggaran hukum dapat dikategorikan dalam dua jenis;

a. Kejahatan yang membahayakan pribadi.

1) Jenis Kejahatan

Masalah atau kejahatan yang penanganannya memerlukan penyadapan dari jenis ini adalah kejahatan yang terkait dengan kezaliman terhadap harta benda, keselamatan fisik, dan harga diri. Dalam *Bariqah Mahmudiyah* Muhammad al-Khadimi menyebutkan:

وَفِي الْحَاشِيَةِ وَالتَّجَسُّسُ مَنْهِيٌّ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِظُلْمٍ فِي مَالِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ فَيَجُوْزُ التَّجَسُّسُ لِدَفْعِ الظُّلْمِ وَالْخَلَاصِ مِنْ شَرِّهِ.[11]

---

[10] Al-Kuwait, *al-Mausu'ah*, X/162.

[11] Muhammad bin Muhammad al-Khadimi, *Bariqah Mahmudiyah fi Syarh Thariqah Muhammadiyah wa Syari'ah Nabawiyah fi Sirah Ahmadiyah*, II/296. CD Jami' al-Fiqh al-Islami, al-Ishdar aal-Awwal.

"Dan dalam Hasyiyah Rumuz al-Kunuz karya Ramzi al-Qaishari, terdapat redaksi: "Tajassus dilarang, kecuali jika berkaitan dengan kezaliman dalam harta, jiwa, dan kehormatannya, sehingga boleh melakukan tajassus untuk melawan kezaliman dan menyelamankan diri dari bahayanya."

Terkait kejahatan semacam ini, penyadapan dilakukan untuk mendeteksi gejala perilaku yang mengarah pada penodaan kehormatan, seperti kasus penyekapan, *trafficking*, dan pemerkosaan.

2) Syarat Menyadap

Syarat bolehnya melakukan penyadapan untuk mencegah kejahatan semacam ini bila terdapat dugaan kuat kejahatan tersebut akan terjadi berdasarkan indikator-indikator yang terpercaya.[12]

3) Pihak yang Berwenang Menyadap

Adapun pihak yang berwenang melakukannya adalah polisi, dan masyarakat yang mengetahuinya.

Ibn Qasim al-'Ubbadi mengutip pernyataan al-Mawardi:

فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اسْتِسْرَارُ قَوْمٍ بِهَا لِأَمَارَاتٍ وَآثَارٍ ظَهَرَتْ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ فِي انْتِهَاكِ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا مِثْلُ: أَنْ يُخْبِرَهُ مَنْ يَثِقُ بِصِدْقِهِ أَنَّ رَجُلًا خَلَا بِرَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ أَوْ بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا؛ فَيَجُوزُ لَهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ أَنْ يَتَجَسَّسَ وَيَقْدَمَ عَلَى الْبَحْثِ وَالْكَشْفِ حَذَرًا مِنْ فَوَاتِ مَا لَا يُسْتَدْرَكُ. وَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ غَيْرُ الْمُحْتَسِبِ مِنَ الْمُتَطَوِّعَةِ جَازَ لَهُمُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْكَشْفِ وَالْإِنْكَارِ.[13]

"Maka apabila muncul dugaan kuat ada orang yang terus-menerus melakukan kemungkaran berdasarkan indikator-indikator yang jelas, maka ada dua kondisi. Pertama, kemungkaran tersebut merusak kehormatan manusia yang tidak mungkin dipulihkan, seperti orang yang terpercaya mengabari bahwa ada seorang lelaki berduaan dengan lelaki lain di tempat sepi untuk membunuhnya, atau bersama wanita untuk berzina dengannya, maka dalam kondisi seperti ini muhtasib (polisi atau instrumen negara terkait) boleh melakukan tajassus, menyelidiki, dan membongkarnya, karena khawatir hilangnya kesempatan menyelamatkan nyawa dan kehormatan orang. Begitu pula andaikan orang yang bukan muhtasib (suka relawan) mengetahuinya, maka ia boleh melakukan pembongkaran dan pengingkaran padanya."

4) Publikasi (Penyampaian) Hasil Penyadapan

Dalam konteks penegakan hukum, hasil penyadapan boleh

---

[12] Al-'Ubbadi, *Hasyiyah al-'Ubbadi*, IX/219.

[13] Ibid.

dipublikasikan di majelis pengadilan, dan dipublikasikan di media massa bila menjadi satu-satunya cara agar tindak kejahatan tersebut tidak ditiru oleh orang lain, dengan harus berusaha sebisa mungkin menghindari *ghibah* dan menjaga kesantunan penyampaiannya demi menyampaikan kebenaran sekaligus menghindari membeberkan aib orang lain yang semestinya bisa dihindari.[14]

b. Kejahatan yang membahayakan masyarakat luas, bangsa, dan negara.[15]

1) Jenis Kejahatan

Kejahatan yang penanganannya memerlukan penyadapan dari jenis ini adalah setiap kejahatan yang mencederai kewibawaan dan kekuatan masyarakat, negara, dan bangsa, sebagaimana hadits Nabi ﷺ tentang kisah Ibn Shayyad riwayat al-Bukhari, pendapat al-Muhallab (7-83 H/628-702 M), Ibn al-Majisyun (w. ± 212 H/827 M), dan Ibn 'Aysur di atas. Hal ini selaras dengan kewajiban pemimpin negara dalam mengurus kepentingan rakyat, yang di antaranya adalah:[16]

a) Menjaga kemurnian agama agar masyarakat tidak terjerumus dalam kesesatan.
b) Menjaga keamanan negara.
c) Menegakkan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa, dan menerapkan sanksi dalam rangka menjaga hak-hak manusia.

Secara lebih kongkrit kejahatan tersebut dapat berupa:[17]

a) Kejahatan mendorong rakyat agar memberontak terhadap pemerintah.
b) Kejahatan mencuri rahasia negara dan membocorkannya ke pihak musuh.
c) Kejahatan merusak tatanan ilmu pengetahuan (pendidikan), ekonomi (kontrol penggunaan sarana transaksi umum-timbangan-, keaslian komoditas, alat bukti administrasi publik, dan penyelundupan bahan-bahan berbahaya), dan agama.
d) Kejahatan menyebarkan tindakan asusila yang merusak moral dan akal sehat generasi bangsa.
e) Kejahatan menyimpangkan aspirasi rakyat dalam keikutsertaannya

---

[14] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadh ash-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin* (Damaskus-Bairut: Dar Ibn Katsir), 425, dan al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, V/295.

[15] Sa'd, *Fiqh Taghyir al-Munkar*, 61, al-Ubbadi, *Hasyiyah al-'Ubbadi*, IX/219, dan al-Khadimi, *Bariqah Mahmudiyah*, II, 296.

[16] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah* (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M), 22.

[17] Mahmud Taufiq Muhammad Sa'd, *Fiqh Taghyir al-Munkar*, 60. CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

memilih wakilnya di parlemen.

f) Kejahatan yang masuk dalam kategori *extra ordinary crime*, yaitu teror, korupsi, dan narkotika.

2) Frekuensi Penyadapan

Penyadapan untuk mencegah kejahatan yang mengancam masyarakat luas dan negara harus dilakukan secara terus-menerus atau sesuai kebutuhan. Terkait hal ini Syaikh Abdurrahman bin Nashr asy-Syaizari (w. ± 590 H/1094 M),[18] Qadhi kota Tiberias bermadzhab Syafi'i, dalam *Nihayah ar-Rutbah azh-Zharifah* menyatakan:

وَيَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَجُدَّدَ النَّظَرَ فِي الْمَكَايِيلِ، وَيُرَاعِي مَا يُطَفِّفُونَ بِهِ الْمِكْيَالَ .. وَلَهُمْ فِي مَسْكِ الْمِكْيَالِ صِنَاعَةٌ يَحْصُلُ بِهَا التَّطْفِيفُ، فَلَا يَدَعُ التَّجَسُّسَ عَلَيْهِمْ.[19]

"Hendaknya muhtasib selalu melakukan pengawasan pada validitas takaran dan menjaganya dari hal-hal yang sering digunakan untuk menguranginya oleh para pelaku bisnis… mereka mempunyai berbagai trik untuk mengurangi takaran, karena itu hendaknya dia tidak meninggalkan tajassus terhadap mereka."

3) Pihak yang Berwenang Menyadap

Adapun pihak yang berwenang melakukannya adalah instrumen negara yang terkait, seperti polisi, intelejen, dan KPK. Syaikh Ali Ash-Shabuni dalam *Tafsir Ayat al-Ahkam* menyatakan:

وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّمَا يَكُونُ تَنْفِيذُهُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْ يُنِيبُهُ مِنَ الْقُضَاةِ أَوِ الْوُلَاةِ أَوْ غَيْرِهِمْ.[20]

"Setiap hal yang termasuk bagian kemaslahatan umum, maka pengaturannya merupakan tugas Imam, atau orang yang menggantikannya, seperti para Qadhi, para pejabat pemerintah, dan selainnya."

4) Publikasi (Penyampaian) Hasil Penyadapan

Hasil penyadapan kejahatan yang membahayakan masyarakat luas sama dengan ketentuan publikasi kejahatan yang membahayakan pribadi sebagaimana telah dijelaskan.

---

[18] Khairiddin az-Zirikla, *al-A'lam; Qamus Tarajim li ar-Rijal wa an-Nisa' wa al-Musta'ribin wa al-Mustasyriqin* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002 M), III/340.

[19] Abdurrahman bin Nashr as-Syaizari, *Nihayah ar-Rutbah azh-Zharifah fi Thalab al-Hisbah asy-Syarifah*, 20. CD Jami' al-Fiqh al-Islami, al-Ishdar ast-Tsani.

[20] Muhammad bin Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, 303. CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

2. Penyadapan dalam Konteks Hubungan Antarnegara dan Batasannya

Dalam konteks hubungan antarnegara, kondisi yang membolehkan pemerintah untuk melakukan penyadapan adalah kondisi yang menuntut kewaspadaan terhadap ancaman dari negara lain, baik saat perang maupun sebelumnya dalam rangka memrediksi ancaman musuh dan mempertahankan kedaulatan negara.

Rasulullah ﷺ pernah mengirim mata-mata untuk mengintai rombongan Abu Sufyan sebelum kemudian melakukan penyerangan. Anas bin Malik ؓ meriwayatkan:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ... فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا ... (رواه مسلم)

"Rasulullah ﷺ pernah mengutus Busaisah sebagai mata-mata untuk mengintai rombongan Abu Sufyan. Lalu Busaisah datang ketika di dalam rumah tidak ada orang kecuali aku dan Rasulullah ﷺ … Busaisah melaporkan hasil pengintaiannya. Beliau lalu keluar dan bersabda: "Sungguh saya memerlukan bantuan, siapa saja yang membawa kendaraan maka pergilah bersamaku." (HR. Muslim)

Jabir bin Abdillah ؓ mengisahkan:

نَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ... (رواه البخاريّ)

"Rasulullah ﷺ meminta orang-orang untuk memata-matai musuh pada perang Khandaq, kemudian yang bersedia sahabat az-Zubair."

Dalam menjelaskan hadits ini Ibn Bathal menyatakan:

وَأَمَّا قِصَّةُ الزُّبَيْرِ فَإِنَّمَا هِيَ لِيَعْرِفَ أَمْرَ الْعَدُوِّ. وَالْوَاحِدُ الثَّابِتُ فِي ذَلِكَ أَخْفَى عَلَى الْعَدُوِّ وَأَقْرَبُ إِلَى التَّجَسُّسِ بِالاخْتِفَاءِ ...[21]

"Adapun kisah az-Zubair, maka niscaya untuk mengetahui kondisi musuh. Dalam hal ini satu orang yang lebih sulit diketahui oleh musuh, dan lebih memudahkan pengintaian secara sembunyi-sembunyi."

Sementara al-Hafizh Ibn Hajar secara tegas mengatakan:

وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ التَّجَسُّسِ فِي الْجِهَادِ.[22]

"Dan dalam hadits kisah az-Zubair tersebut terdapat kebolehan menggunakan cara tajassus dalam perang."

---

[21] Al-Qurthubi, *Syarh Shahih al-Bukhari*, V/155.
[22] Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, VI/53.

Dalam kondisi normal, suatu negara tidak boleh melakukan penyadapan karena akan mengganggu hubungan diplomatik dan perdamaian antarnegara. An-Nawawi menjelaskan:

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدَاعِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ وَكَيْفَ أَمْكَنَ الْخِدَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ نَقْضُ عَهْدٍ أَوْ أَمَانٍ، فَلَا يَحِلُّ.[23]

"Ulama sepakat atas kebolehan melakukan tipu muslihat terhadap kaum kuffar di dalam peperangan, bagaimanapun caranya, kecuali cara-cara yang dapat merusak perjanjian damai atau jaminan keamanan, maka tidak halal."

---

[23] An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (ttp.: al-Mathba'ah al-Mishriyah bi al-Azhar, 1349 H/1930 M), XII/45.

Daftar Pustaka Penyadapan dalam Konteks Penegakan Hukum dan Hubungan Antarnegara

Al-'Abdari, Muhammad bin Muhammad. Tth. *al-Madkhal*, Kairo: Maktabah Dar at-Turats.

Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. Tth. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Khadimi, Muhammad bin Muhammad. *Bariqah Mahmudiyah fi Syarh Thariqah Muhammadiyah wa Syari'ah Nabawiyah fi Sirah Ahmadiyah*, CD Jami' al-Fiqh al-Islami, al-Ishdar aal-Awwal.

Al-Kuwait, Wazarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah. 1404 H/ 1983 M. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Dzat as-Salasil.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. 1409 H/1989 M. *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah.

Al-Qurthubi, Ali bin Khalf bin Abdil Malik bin Baththal. *Syarh Shahih al-Bukhari*, CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

Al-'Ubbadi, Ibn Qasim. Tth. *Hasyiyah al-'Ubbadi* pada *Hawasyi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Mesir: at-Tijariyah al-Kubra.

An-Nawawi. 1349 H/1930 M. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (ttp.: al-Mathba'ah al-Mishriyah bi al-Azhar.

Ash-Shabuni, Muhammad bin Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

As-Suyuthi dan al-Mahalli. Tth. *Tafsir al-Jalalain*, Kairo: Dar al-Hadits.

Asy-Syaizari, Abdurrahman bin Nashr. *Nihayah ar-Rutbah azh-Zharifah fi Thalab al-Hisbah asy-Syarifah*, CD Jami' al-Fiqh al-Islami, al-Ishdar ast-Tsani.

'Asyur, Muhammad Thahir bin. 1984. *Tafsir at-Tahrir wan at-Tanwir*, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah.

Az-Zirikla, Khairiddin. 2002 M. *Al-A'lam; Qamus Tarajim li ar-Rijal wa an-Nisa' wa al-Musta'ribin wa al-Mustasyriqin*, Bairut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

Sa'd, Mahmud Taufiq Muhammad. *Fiqh Taghyir al-Munkar*. CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

Sugono, Dendi. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR
di PP Tremas Pacitan
09-10 November 2014

14. Ketentuan Amil Zakat

KOMISI B

Maudhu'iyah

MUSHAHIH

KH. Arsyad Busyairi
KH. Yasin Asmuni
KH. M. Romadlon Khotib

PERUMUS

KH. Azizi Hasbullah
K. Fauzi Hamzah
KH. Jazuli Makmun Murad

MODERATOR

Ust. Ahmad Muntaha AM

NOTULEN

Ust. Faris Khoirul Anam, Lc., MH.I

14. Ketentuan Amil Zakat

I. Definisi, Macam, dan Syarat Amil Zakat

Amil zakat dalam konteks *syar'i* adalah orang yang ditunjuk *Imam* (penguasa tertinggi negara) sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Amil merupakan kepanjangan tangan dari *Imam*. Al-Qadhi Abdul Haq bin Ghalib al-Andalusi al-Maliki (481-543 H/1088-1147 M) dalam tafsirnya, *al-Muharrar al-Wajiz*, menjelaskan:

وَأَمَّا الْعَامِلُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ فِي السَّعْيِ فِي جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَكُلُّ مَنْ يَصْرِفُ مِنْ عَوْنٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَهُوَ مِنَ (الْعَامِلِيْنَ).[1]

Adapun amil adalah orang yang mengganti Imam dalam menarik zakat, dan setiap orang yang berkerja membantu amil yang pasti dibutuhkannya, maka ia termasik golongan amil.

Definisi senada juga disampaikan Ibn Qasim al-Ghazi (859-918 H/ 1455-1512 M), dalam karya legendarisnya, *Fath al-Qarib*.

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيْهَا.[2]

Amil adalah orang yang ditugasi Imam untuk memungut zakat dan menyerahkan kepada *mustahiq*nya.

Melihat tugas tugas amil, maka dapat dipahami bahwa macam-macam amil terdiri dari:

a) Penarik zakat dari orang-orang yang wajib zakat (*as-Sa'i*).
b) Pengumpul orang-orang yang wajib zakat dan pengumpul orang-orang yang berhak menerima zakat (*al-Hasyir*).
c) Pemberi informasi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang orang yang wajib zakat kepada penarik zakat (*al-'Arif*).
d) Pencatat harta zakat yang masuk dan yang didistribusikan kepada yang berhak (*al-Katib*).
e) Pendistribusi zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*al-Qasim*).

---

[1] Abdul Haq bin Ghalib al-Andalusi, *al-Muharrar al-Wajiz fi at-Tafsir al-Kitab al-'Aziz* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H/2001 M), III/49. Baca pula, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, VIII/176, dan Wazarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Dar ash-Shafwah, 1414 H/1993 M), XXIX/226.

[2] Ibn Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib* pada *Hasyiyah al-Bajuri* (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tth.), I/283.

f) Pengkalkulasi (*nishab* & kadar) zakat (*al-Hasib*).
g) Penjaga harta zakat (*al-Khazin*).
h) Zakat yang terkait hewan ternak (*al-'Addad*).
i) Penakar zakat (*al-Kayyal*).
j) Juru timbang (*al-Wazzan*).
k) Dan orang-orang yang dibutuhkan dalam pengurusan zakat.

Dalam beberapa kitab disebutkan:

الصِّنْفُ (الثَّالِثُ الْعَامِلُ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (وَبَعْثُهُ) لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَاجِبٌ) عَلَى الْإِمَامِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي بَابِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ (وَيَدْخُلُ فِي اسْمِهِ السَّاعِي) وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَالْكَاتِبُ) وَهُوَ مَنْ يَكْتُبُ مَا يُؤْخَذُ وَيُدْفَعُ (وَالْقَاسِمُ وَالْحَاشِرُ) وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ (وَالْعَرِيفُ) وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ أَرْبَابَ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ (وَالْحَاسِبُ وَالْحَافِظُ) لِلْأَمْوَالِ وَالْجُنْدِيُّ وَالْجَابِي.[2]

Golongan (ketiga adalah amil) meskipun kaya. (Adapun mengutusnya) untuk memungut zakat (hukumnya wajib) bagi Imam sebagaimana keterangan yang telah lewat dalam *bab Ada` az-Zakat*. (Termasuk dalam kategori amil adalah 1- *Sa'i*), yaitu orang yang ditugasi Imam memungut zakat; (2- *Katib*) yaitu orang yang mencatat harta yang dipungut dan diserahkan, (3 dan 4- *Qasim*, *Hasyir*), yaitu orang yang mengumpulkan pemilik harta, (5- *'Arif*) yaitu orang yang mengenal pihak yang berhak; seperti *naqib* (kepala suku) suatu kabilah, (6 dan 7- *Hasib* dan *Hafizh*) harta, 8- tentara, dan 9- *al-jabi*/ penarik zakat.

وَمِنَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الْعَرِيفُ وَالْحَاشِرُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَيَّالُ وَالْعَدَّادُ فَأَمَّا الْعَرِيفُ: فَعَرِيفَانِ: عَرِيفٌ عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَعَرِيفٌ عَلَى أَهْلِ السُّهْمَانِ فَأَمَّا الْعَرِيفُ عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُ أَمْوَالَهُمْ وَهٰذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِيرَانِ أَهْلِ الْمَالِ لِيَصِحَّ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِجَمِيعِهَا وَبِأَرْبَابِهَا وَأَمَّا عَرِيفُ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَحْوَالُهُمْ وَهٰذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِيرَانِ أَهْلِ السُّهْمَانِ لِيَصِحَّ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِظَاهِرِ أَحْوَالِهِمْ وَبَاطِنِهَا وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ أُجْرَتُهُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَأُجْرَتُهُمَا أَقَلُّ لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى قَطْعِ مَسَافَةٍ لِكَوْنِهِمَا مِنْ بَلَدِ الصَّدَقَةِ لَا مِنَ الْمُسَافِرِينَ إِلَيْهِ وَأَمَّا الْحَاشِرُ فَحَاشِرَانِ: حَاشِرٌ لِأَهْلِ السُّهْمَانِ

---

[2] Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, 1/522-523.

يَقْتَصِرُ عَلَى النِّدَاءِ فِي النَّاحِيَةِ بِاجْتِمَاعِهِمْ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ وَهَذَا أَقَلُّهُمَا أُجْرَةً لِكَوْنِهِ أَقَلَّهُمْ تَحَمُّلًا وَالثَّانِي: حَاشِرُ الْأَمْوَالِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أَنْ يَتْبَعَ الْمَوَاشِيَ سَارِحَةً فِي مَرَاعِيهَا فَاحْتَاجَ إِلَى حَاشِرٍ يَحْشُرُهَا إِلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا وَهَذَا أَكْثَرُهُمَا أُجْرَةً لِكَوْنِهِ أَكْثَرَهُمَا عَمَلًا وَكِلَاهُمَا أُجْرَتُهُمَا فِي سَهْمِ الْعَامِلِينَ فَأَمَّا الْحَاسِبُ فَهُوَ الَّذِي يَحْسِبُ النِّصَبَ وَقَدْرَ الْوَاجِبِ فِيهَا وَمَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ صِنْفٍ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ جِيرَانِ الْمَالِ وَأُجْرَتُهُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ فَإِنْ كَانَ كَاتِبًا كَانَتْ أُجْرَتُهُ أَكْثَرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَاتِبًا وَكَانَ الْعَامِلُ يَكْتُبُ وَإِلَّا احْتَاجَ إِلَى كَاتِبٍ يَكْتُبُ مَا أَخَذَ مِنَ الصَّدَقَاتِ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ ثَبَتَ عَلَيْهِ قَدْرُ مَالِهِ وَمَبْلَغُ صَدَقَتِهِ وَمَا أَعْطَى كُلَّ صِنْفٍ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ بِإِثْبَاتِ أَسْمَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ وَنَسَبِهِ وَحِلْيَتِهِ وَقَدْرِ عَطِيَّتِهِ وَكَتْبُ بَرَاءَةٍ لِرَبِّ الْمَالِ بِأَدَاءِ صَدَقَتِهِ وَيُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَأَمَّا الْعَدَّادُ فَهُوَ الَّذِي يَعُدُّ مَوَاشِيَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فَيُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَأَمَّا الْكَيَّالُ: فَكَيَّالُ مَالِ رَبِّ الْمَالِ وَكَيَّالُ لِحُقُوقِ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَأَمَّا كَيَّالُ الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَفِي أُجْرَتِهِ وَجْهَانِ مَضَيَا وَأَمَّا الْكَيَّالُ لِحُقُوقِ أَهْلِ السُّهْمَانِ فَفِي أُجْرَتِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي مَالِ أَهْلِ السُّهْمَانِ وَالثَّانِي: مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَرُبَّمَا احْتَاجَ الْعَامِلُ إِلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الْأَعْوَانِ فَيَكُونُ أَجْوَزُ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنِ اعْتِبَارِ حَالِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ عَمِلَهُ.[4]

Di antara Amil adalah *'Arif, Hasyir, Hasib, Kayyal* dan *'Adad*. Adapun *'Arif* ada dua; yaitu *'Arif* pada pemilik harta dan *'Arif* pada golongan yang menerima zakat. Adapun *'Arif* pada pemilik harta adalah orang yang mengenal mereka dan mengetahui hartanya. Amil ini wajib berasal dari tetangga pemilik harta supaya sah menjadi *'Arif* untuk seluruh harta dan para pemiliknya. Adapun *'Arif* pada golongan penerima zakat ialah orang yang mengenal setiap golongan dari mereka dan tidak samar kondisi-kondisi mereka baginya. *'Arif* ini wajib berasal dari tetangga golongan penerima zakat agar benar-benar tahu kondisi luar dalam mereka. Upah kedua golongan ini diambilkan dari bagian amil dan upah keduanya lebih sedikit dibanding yang lain karena keduanya termasuk orang yang tidak butuh menempuh jarak, karena keduanya berasal dari daerah zakat, tidak dari orang-orang yang mendatanginya. Adapun *Hasyir*

---

[4] Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, VIII/523.

ada dua, yaitu *Hasyir* yang mengumpulkan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang cukup memanggil mereka untuk berkumpul memungut zakat. *Hasyir* ini paling sedikit upahnya, karena ia lebih sedikit kerjanya. Kedua: *Hasyir* pengumpul harta zakat, karena tidak wajib bagi amil meneliti binatang-binatang yang ada di kandangnya sehingga ia membutuhkan *Hasyir* yang mengumpulkannya ke tempat minum hewan pemiliknya. *Hasyir* ini lebih banyak upahnya sebab lebih banyak kerjanya. Upah keduanya diambilkan dari bagian Amil. Adapun *Hasib* ialah orang yang menghitung *nishab*, kadar yang wajib dibayarkan, dan bagian yang menjadi hak dari setiap golongan yang mendapat bagian zakat. *Hasib* ini boleh bukan tetangga pemilik harta zakat, dan upahnya diambilkan dari bagian Amil. Jika ia menjadi juru tulis maka upahnya lebih banyak; jika tidak dan Amil yang menulis maka tidak mendapat upah lebih banyak. Apabila Amil tidak menulis, demikian juga *Hasib*, maka Amil tentu membutuhkan *Katib* yang mencatat harta zakat yang dipungut dari setiap pemilik harta, yang kadar hartanya dan kadar zakatnya telah ditetapkan, dan kadar harta yang diberikan ke setiap golongan dengan menetapkan bagian masing-masing, prosentasenya, bentuknya dan kadar pemberiannya, dan menulis keterangan telah membayar zakat untuk pemilik harta. *Katib* ini upahnya dari bagian Amil. Adapun *'Adad* ialah orang yang menghitung hewan pemilik harta, maka upahnya diambilkan dari bagian Amil. Adapun *Kayyal* adalah penakar harta pemilik harta dan penakar bagian hak-hak golongan penerima zakat. Adapun penakar harta bagi pemilik harta maka terkait upahnya ada dua pendapat yang telah lewat. Adapun penakar untuk bagian penerima zakat maka terkait upahnya ada dua pendapat. *Pertama*, upahnya diambilkan dari harta golongan penerima zakat; dan *kedua*, upah diambilkan dari bagian amil. Kadang amil membutuhkan pembantu-pembantu selain yang kita sebutkan, maka upah disesuaikan dengan aturan yang telah disebut, yaitu mempertimbangkan kondisinya terkait kerja yang khusus baginya.

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ عَلَى الزَّكَاةِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ لقوله تعالى: (وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا) وَقَالُوْا: إِنَّهُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعَامِلِ السَّاعِيْ: وَهُوَ الَّذِيْ يَجْبِي الزَّكَاةَ وَيَسْعَى فِي الْقَبَائِلِ لِجَمْعِهَا وَالْحَاشِرُ: وَهُوَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَثَانِيْهِمَا: مَنْ يَجْمَعُ ذَوِي السِّهَامِ مِنَ الْأَصْنَافِ وَالْعَرِيْفُ: وَهُوَ كَالنَّقِيْبِ لِلْقَبِيْلَةِ وَهُوَ الَّذِيْ يُعَرِّفُ السَّاعِيَ أَهْلَ الصَّدَقَاتِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ وَالْكَاتِبُ: وَهُوَ الَّذِيْ يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْمَالِ وَيَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً بِالْأَدَاءِ وَيَكْتُبُ كَذٰلِكَ مَا

يَدْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَالْقَاسِمُ: وَهُوَ الَّذِي يَقْسِمُ أَمْوَالَ الزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا وَيَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعَامِلِ كَذَلِكَ: الْحَاسِبُ وَالْخَازِنُ وَحَافِظُ الْمَالِ وَالْعَدَّادُ وَالْكَيَّالُ وَالْوَزَّانُ وَالرَّاعِي لِمَوَاشِي الصَّدَقَةِ وَالْحَمَّالُ وَكُلُّ مَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ الصَّدَقَةِ حَتَّى إِذَا لَمْ تَقَعِ الْكِفَايَةُ بِسَاعٍ وَاحِدٍ أَوْ كَاتِبٍ وَاحِدٍ أَوْ حَاسِبٍ وَاحِدٍ أَوْ حَاشِرٍ أَوْ نَحْوِهِ زِيدَ فِي الْعَدَدِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.[5]

Fuqaha sepakat bahwa amil zakat merupakan salah satu dari delapan golongan, sebab firman Allah: *"Dan amil-amilnya"*. Ulama berpendapat, yang termasuk di dalam golongan Amil adalah *Sa'i*; yaitu orang yang menghimpun zakat dan mendatangi kabilah-kabilah untuk mengumpulkan zakatnya. Adapun *Hasyir* ada dua: *pertama*, orang yang mengumpulkan pemilik harta zakat, dan *kedua*, orang yang mengumpulkan golongan penerima zakat. *'Arif* seperti pemimpin kabilah, yaitu orang yang memberi tahu orang-orang yang wajib zakat kepada *Sa'i* bila ia tidak mengetahui mereka. *Katib* adalah orang yang mencatat harta yang diberikan pemilik harta zakat, menulis keterangan telah membayar zakat untuk pemilik harta zakat, dan mencatat harta zakat yang telah diserahkan kepada *mustahiqqin*. *Qasim* adalah orang yang membagi harta zakat di antara para *mustahiq*nya. Demikian juga termasuk golongan amil adalah *Hasib* (penghitung), *Khazin* (penyimpan), *Hafidz al-Mal* (penjaga harta), *'Addad* (penghitung), *Kayyal* (penakar), *Wazzan* (penimbang), *Ra'i* (perawat) binatang-binatang zakat, *Hammal* (pengangkut), dan setiap orang yang dibutuhkan untuk mengurusi zakat, sehingga bila tidak tercukupi dengan satu *Sa'i*, *Katib*, *Hasib*, *Hasyir* atau semisalnya, maka jumlahnya ditambah sesuai kebutuhan.

Sedangkan melihat kewenangan tugasnya, amil terbagi menjadi dua: 1) *Amil Tafwidh*, yaitu amil yang diberi kewenangan secara menyeluruh; dan 2) *Amil Tanfidz*, yaitu amil yang hanya menjalankan tugas sesuai arahan atasannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi *amil tafwidh* adalah:

1. Islam.
2. Berakal.
3. Baligh.
4. Adil (tidak *fasiq*/ adil dalam hal kesaksian).
5. Bisa mendengar.
6. Bisa melihat.

---

[5] *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XXIX/226-228.

7. Laki-laki. (Menurut satu pendapat yang lemah, tidak disyaratkan harus laki-laki/ boleh wanita).
8. Mengerti tentang bab zakat.
9. Merdeka (bukan budak).
10. Bukan keturunan Bani Hasyim (syarat ke sembilan dan ke sepuluh diperselisihkan ulama).

Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi *amil tanfidz* adalah:

1. Islam. (Menurut satu pendapat tidak disyaratkan harus Islam).
2. Berakal.
3. Baligh.
4. Adil (tidak *fasiq*/adil dalam hal kesaksian).
5. Bisa mendengar.
6. Bisa melihat.
7. Bukan keturunan Bani Hasyim.

Dalam beberapa kitab disebutkan:

(وَشَرْطُ السَّاعِي) وَهُوَ الْعَامِلُ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا مُكَلَّفًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا لِأَنَّهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الْوِلَايَاتِ. تَنْبِيهٌ: اسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ عَنِ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ (فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيَعْلَمَ مَنْ يَأْخُذُ وَمَا يُؤْخَذُ هَذَا إِذَا كَانَ التَّفْوِيضُ عَامًّا (فَإِنْ عُيِّنَ لَهُ أَخْذٌ وَدَفْعٌ) فَقَطْ (لَمْ يُشْتَرَطِ الْفِقْهُ) الْمَذْكُورُ لِأَنَّهُ قَطَعَ الِاجْتِهَادَ بِالتَّعْيِينِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَيُعْتَبَرُ مِنْهَا التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ وَكَذَا الْإِسْلَامُ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ دُونَ الْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ وَمِثْلُ السَّاعِي أَعْوَانُ الْعَامِلِ مِنْ كُتَّابِهِ وَحُسَّابِهِ وَجُبَاتِهِ وَمُسْتَوْفِيهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي حَاوِيهِ وَيُقَسِّمُ الزَّكَاةَ سَاعٍ قُلِّدَ الْقِسْمَةَ أَوْ أُطْلِقَ تَقْلِيدُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلِّدَ الْأَخْذَ وَحْدَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَسِّمَ فَإِنْ كَانَ السَّاعِي جَائِرًا فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ عَادِلًا فِي قَسْمِهَا جَازَ كَتْمُهَا عَنْهُ وَدَفْعُهَا إِلَيْهِ أَوْ كَانَ جَائِرًا فِي الْقِسْمَةِ عَادِلًا فِي الْأَخْذِ وَجَبَ كَتْمُهَا فَلَوْ أَعْطَيْهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا أَجْزَأَتْ وَإِنْ لَمْ يُوصِلْهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ كَالْإِمَامِ.[6]

(Syarat *Sa'i*) maksudnya amil (adalah merdeka), laki-laki, *mukallaf*, (adil) dalam semua persaksian. Jadi *sa'i* harus bisa mendengar dan melihat,

---

[6] Muhamamd al-Khatib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, IV/192.

karena *sa'i* merupakan bagian dari *wilayah* (kekuasaan *syar'i*), padahal di antara syarat *wilayah sa'i* seperti syarat wilayah lainnya. Peringatan: An-Nawawi mencukupkan penyebutan sifat adil dari syarat Islam. (*Faqih* dalam bab-bab zakat) dalam urusan yang menjadi wilayahnya, sebagaimana dibatasi al-Mawardi, agar Amil mengetahui orang yang mengambil zakat dan barang yang diambil. Syarat ini bila keberadaan mandat secara umum. (Jika ditentukan padanya mandat mengambil dan menyerahkan) saja, (maka tidak disyaratkan *Fakih*), karena Imam memutus *ijtihad* Amil dengan penentuan mandat. Adapun syarat-syarat lain, maka yang dianggap ialah *taklif*, sifat adil, dan Islam; sebagaimana yang *an-Nawawi* pilih dalam *al-Majmu'*, selain syarat merdeka dan laki-laki. Sebagaimana *Sa'i* adalah pembantu-pembantu Amil, di antaranya pencatat, penghitung, pemungut, dan penagih. Al-Mawardi mengingatkan dalam kitab *al-Hawi*nya. *Sa'i* yang diangkat untuk membagi zakat dan yang dimutlakkan pengangkatannya bertugas membagi zakat. Lain halnya bila ia diangkat untuk pemungutan saja, maka ia tidak boleh membagi. Apabila si *Sa'i* menyeleweng dalam memungut zakat dan adil dalam membaginya, maka pemilik harta boleh menyimpan zakat darinya dan menyerahkan kepadanya; atau *Sa'i* menyeleweng dalam membagi zakat akan tetapi adil dalam hal memungut zakat, maka pemilik harta wajib menyembunyikan zakat darinya. Jika ia memberikan zakat kepadanya secara suka rela atau karena paksaan, tetap maka mencukupi, meskipun *Sa'i* tidak menyampaikannya kepada para *mustahiq*, karena sungguh *Sa'i* adalah pengganti mereka sebagaimana Imam.

(وَشَرْطُ السَّاعِيْ) وُصِفَ بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ الْمَارَّةِ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَا مَوَالِيْهِمْ وَلَا مِنَ الْمُرْتَزِقَةِ نَعَمْ مَرَّ اغْتِفَارُ كَثِيْرٍ مِنْ هٰذِهِ الشُّرُوْطِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَا وِلَايَةَ فِيْهِ بِوَجْهٍ فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مَحْضَ أُجْرَةٍ (فَقِيْهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيْمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيَعْرِفَ مَا يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَدْفَعُهُ لَهُ هٰذَا إِنْ كَانَ التَّفْوِيْضُ عَامًّا (فَإِنْ عُيِّنَ لَهُ أَخْذٌ وَدَفْعٌ) فَقَطْ (لَمْ يُشْتَرَطْ) فِيْهِ كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْوِ حَاسِبٍ وَكَاتِبٍ وَمُشْرِفٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِيْ (الْفِقْهُ) وَلَا الذُّكُوْرَةُ وَلَا الْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهَا سِفَارَةٌ لَا وِلَايَةٌ نَعَمْ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوْطِ كَمَا فِي الْمَجْمُوْعِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَخْذٍ مِنْ مُعَيَّنٍ وَصَرْفٍ مِنْ مُعَيَّنٍ كَمَا يَجُوْزُ تَوْكِيْلُ الْآحَادِ لَهُ فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعِ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ

بَعْثُ السُّعَاةِ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ.

(قَوْلُهُ: فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ) وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ حَيْثُ لَمْ يُسْتَأْجَرْ أَمَّا إِذَا اسْتُؤْجِرَ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا (قَوْلُهُ: وَلَا الْحُرِّيَّةُ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الصَّبِيِّ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ حَيْثُ عَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ وَمَا يَدْفَعُهُ.[7]

(*Syarat Sa'i*) yang disifati dengan salah satu sifat-sifatnya yang telah lalu (adalah 1- merdeka), 2- laki-laki, (3- adil) dalam persaksian, karena *Sa'i* merupakan *wilayah*, tidak dari golongan *Dzawi al-Qurba*/Kerabat Nabi Muhammad ﷺ, budak yang dimerdekakannya, dan orang yang mendapat gaji negara. Memang demikian, namun banyak yang ditolelir dari syarat-syarat ini yang keterangannya sudah lewat untuk sebagian *amil*, karena dalam kerjanya tidak ada untur *wilayah* menurut satu pendapat, maka upah yang diambilnya murni upah. (4- *Fakih* dalam bab-bab zakat) dalam urusan menjadi wilayahnya; sebagaimana al-Mawardi membatasinya agar *Sa'i* mengetahui harta yang dipungut dan orang yang memungutnya. Ini jika mandatnya secara umum. (Jika mandatnya ditentukan untuk mengambil dan menyerahkan) saja, (maka tidak disyaratkan) baginya seperti halnya para pembantunya dari semisal *Hasib*, *Katib* dan *Musyrif*, sebagaimana diperingatkan oleh al-Mawardi dalam *al-Hawi* (syarat *fakih*), laki-laki, dan merdeka, karena pekerjaannya adalah pekerjaan murni bukan *wilayah*/kekuasaan. Memang demikian, namun disyaratkan harus Islam seperti syarat-syarat yang lain sebagaimana keterangan di dalam *al-Majmu'*. Adapun pendapat al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*: *"Tidak disyaratkan Islam"* itu diarahkan pada pendapat yang dikatakan al-Adzra'i, yaitu memungutnya dari orang yang telah ditentukan dan mengalokasikan dari harta yang telah ditentukan, sebagaimana boleh mewakilkannya pada individu untuk menerima dan menyerahkannya. Imam atau *na'ib*nya wajib mengutus para *sa'i* untuk memungut zakat.

(Ungkapan an-Nawawi: *"Maka upah yang diambilnya"*) menurut *mu'tamad* justru sebaliknya, sekira Imam tidak menyewanya. Adapun bila ia disewa, maka boleh dari Bani Hasyim atau Muthallib. (Ungkapan an-Nawawi: *"Dan tidak merdeka"*), *qiyas* permasalahan yang telah lewat yaitu boleh mewakilkan anak kecil untuk membagikan zakat, tidak disyaratkan *baligh* sekira Imam menentukan zakat yang dipungut dan yang dia serahkan.

(أَمَّا الْأَحْكَامُ) فَفِيهَا مَسَائِلُ: (إِحْدَاهَا) قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ

---

[7] Ar-Ramli dan Ali Syibramalisi, *Nihayah al-Muhtaj* dan *Hasyiyah Ali Syibramalisi* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), VI/176.

لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالسُّعَاةُ جَمْعُ سَاعٍ وَهُوَ الْعَامِلُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا حُرًّا عَدْلًا فَقِيهًا فِي أَبْوَابِ الزَّكَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِقْهُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا إِذَا كَانَ التَّفْوِيضُ لِلْعَامِلِ عَامًّا فِي الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا إِذَا عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْفِقْهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْمُعَيَّنِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهُ رِسَالَةٌ لَا وِلَايَةٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ مُشْكِلٌ وَالْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهُ.[8]

(Adapun terkait hukum-hukum) maka ada beberapa masalah. (Pertama) *Ashab asy-Syafi'i* berpendapat: Wajib bagi Imam mengutus *Sa'i* untuk memungut zakat karena alasan yang disebutkan asy-Syirazai. سُعَاةُ ialah jamak dari سَاعٍ yaitu Amil. Ulama sepakat bahwa *Sa'i* disyaratkan muslim, merdeka, adil, dan *fakih* dalam bab-bab zakat, dan tidak disyaratkan *fakih* dalam selainnya. *Ashab asy-Syafi'i* berpendapat: Ini bila mandat untuk Amil diberikan secara umum dalam urusan Zakat. Adapun bila Imam menentukan harta zakat tertentu yang diambilnya maka syarat *fakih* tidak dianggap. Al-Mawardi berkata dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah*: *"Begitu juga syarat Islam dan merdeka tidak dianggap bagi orang yang tugasnya sudah ditentukan ini, karena penugasannya itu merupakan risalah, bukan wilayah."* Pendapat yang dikatakannya ini, bahwa tidak ada persyaratan Islam, itu *musykil*; sedang pendapat *al-Mukhtar* ialah mensyaratkannya.

فَأَمَّا إِذَا اخْتَصَّ لِعَامِلٍ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ تَفْرِيقُهَا ثَبَتَ فِيهَا حِينَئِذٍ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لِيَكُونَ مَصْرُوفًا إِلَى الْعَامِلِ وَأَعْوَانِهِ فِيهَا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُوصَفَ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا فِيهَا بِهَا فِي الْقَبْضِ وَالتَّفْرِقَةِ وَهُوَ مَنْ تَكَامَلَتْ فِيهِ سِتُّ خِصَالٍ:

أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ لِأَنَّ الصِّغَرَ لَا يَصِحُّ مَعَهُ قَبْضٌ وَلَا تَقْبِيضٌ وَالثَّانِيَةُ: الْعَقْلُ الَّذِي يَصِحُّ التَّمْيِيزُ بِهِ وَالثَّالِثَةُ: الْحُرِّيَّةُ وَالرَّابِعَةُ: الْإِسْلَامُ لِأَنَّ الْكُفْرَ يَمْنَعُ مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (الممتحنة: آية ١) وَقَدِمَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى عُمَرَ بِحِسَابٍ اسْتَحْسَنَهُ عُمَرُ فَقَالَ مَنْ عَمِلَ هَذَا فَقَالَ كَاتِبِي فَقَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: أَجُنُبٌ هُوَ؟ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ ذِمِّيٌّ فَأَمَرَهُ بِعَزْلِهِ

[8] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (ttp.: al-Muniryah, tth.), VI/141-142.

وَقَالَ: لَا تَأْمَنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَلَا تُقَرِّبُوهُمْ إِذْ بَعَّدَهُمُ اللهُ. وَالْخَامِسُ: الْأَمَانَةُ لِأَنَّهَا نِيَابَةٌ لِيَقْصِدَ بِهَا حِفْظَ الْمَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَنِيبِ فَأَشْبَهَ وَلِيَّ الْيَتِيمِ الَّذِي إِنْ خِيفَتْ خِيَانَتُهُ سَقَطَتْ وِلَايَتُهُ وَالسَّادِسَةُ: الْفِقْهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَوَاتِ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَمَا لَا تَجِبُ وَفِي مَقَادِيرِهَا وَقَدْرِ الْحَقِّ فِيهَا وَأَوْصَافِ مُسْتَحِقِّيهَا وَمَبْلَغِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْهَا لِئَلَّا يَكُونَ جَاهِلًا بِمَا هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى نَظَرِهِ فَلَا يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ كَالْحَاكِمِ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ عَامِلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ جَامِعَةٌ فَاحْتَاجَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَوِلَايَةُ عَامِلِ الصَّدَقَاتِ مَخْصُوصَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِغَيْرِ أَحْكَامِهَا. فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ السِّتَّةُ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا وَسَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَإِنْ كَرِهْنَا تَقْلِيدَ النِّسَاءِ لِذَلِكَ لِمَا عَلَيْهِنَّ مِنْ لُزُومِ الْخَفَرِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمَّا جَازَ أَنْ تَلِيَ أَمْوَالَ الْأَيْتَامِ جَازَ أَنْ تَلِيَ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ.

فَأَمَّا أَعْوَانُ الْعَامِلِ مِنْ كُتَّابِهِ وَحُسَّابِهِ وَجُبَاتِهِ وَمُسْتَوْفِيهِ فَأُجُورُهُمْ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ لِعَمَلِهِمْ فِيهَا وَلَا يَلْزَمُ اعْتِبَارُ الْحُرِّيَّةِ وَالْفِقْهِ فِيهِمْ لِأَنَّهُمْ خَدَمٌ فِيهَا مَأْمُورُونَ وَيَلْزَمُ اعْتِبَارُ الْخِصَالِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْإِسْلَامِ وَالْأَمَانَةِ. وَأَمَّا الرُّعَاةُ وَالْحَفَظَةُ لَهَا بَعْدَ قَبْضِهَا فَفِي أُجُورِهِمْ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالثَّانِي: مِنْ أَصْلِ الصَّدَقَاتِ. فَأَمَّا أُجْرَةُ الْحَمَّالِينَ وَالنَّقَّالِينَ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فَفِيهَا وَجْهَانِ: كَالرُّعَاةِ وَالْحَفَظَةِ، وَإِنْ كَانَتْ لِحَمْلِهَا لِأَهْلِ الصَّدَقَاتِ فَأُجُورُهُمْ فِي أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ وَجْهًا وَاحِدًا. وَأَمَّا أُجُورُ الْكَيَّالِينَ وَالْوَزَّانِينَ وَالْعَدَّادِينَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَا عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ التَّسْلِيمِ وَالتَّمْكِينِ فَأَشْبَهَ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ فِي الْمَبِيعِ يَخْتَصُّ بِهَا الْبَائِعُ دُونَ الْمُشْتَرِي، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ إِنَّهَا فِي سَهْمِ الْعَامِلِينَ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَبِيعِ أَنَّ الْمَبِيعَ مَكِيلٌ فِي حَقِّ الْبَائِعِ وَهَذَا مَكِيلٌ فِي حَقِّ أَهْلِ السُّهْمَانِ.

فَصَارَ مَا يَلْزَمُ مِنْ أُجُورِ الْعَمَلِ فِي أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا

كَانَ فِي سَهْمِ الْعَامِلِينَ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَهُوَ الْعَامِلُ وَأَعْوَانُهُ وَالثَّانِي: مَا كَانَ فِي أَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ مِنْ غَيْرِ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَهُوَ أُجُورُ الْحَمَّالِينَ وَالنَّقَّالِينَ إِلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَمِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الرُّعَاةِ وَالْحَفَظَةِ فَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَالثَّانِي: مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.[9]

Apabila pembagian zakat ditentukan untuk Amil yang menerimanya, maka dalam zakat tersebut ada bagian untuk Amil, agar ditasarufkannya kepada Amil dan para pembantunya. Apabila demikian maka orang yang boleh menjadi Amil zakat untuk menerima dan membaginya harus ditentukan sifatnya; yaitu orang memenuhi enam syarat:

Pertama baligh, karena anak kecil tidak sah menerima dan menyerahkan suatu barang. *Kedua* berakal, yang *tamyiz* sah dengannya. *Ketiga* merdeka. *Keempat* Islam, karena kekafiran mencegah kekuasaan pada muslim, sebab firman Allah ﷻ: *"Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia."* (QS. al-Mumtahanah: 1). Abu Musa al-Asy'ari datang dari kota Bashrah kepada Umar dengan penghitung zakat yang diperintahkan Umar; lalu beliau berkata: *"Siapa yang mengerjakan ini?"* Abu Musa menjawab: *"Katibku."* Beliau bertanya: *"Di mana dia?"* sementara orang itu ada di pintu masjid. Beliau bertanya: *"Apakah dia junub?"* Abu Musa menjawab: *"Tidak, tapi dia kafir dzimmi."* Lalu beliau memerintahkan agar menyingkirkannya dan berkata: *"Janganlah kalian mempercayai mereka karena Allah ﷻ menganggapnya khianat dan janganlah kalian mendekati mereka karena Allah menjauhkannya." Kelima* amanah, karena kekuasan amil merupakan *niyabah* (pengganti) yang bertujuan menjaga harta orang lain yang menjadikan dirinya sebagai gantinya, sehingga menyerupai wali yatim yang bila ditakutkan *khiyanat*nya maka gugur kekuasaannya. *Keenam fakih* pada hukum-hukum zakat terkait harta-harta yang wajib dizakati, harta-harta yang tidak wajib dizakati, kadar-kadarnya, kadar haknya, kriteria *mustahiq*nya dan bersaran haknya, agar ia tidak bodoh atas suatu urusan yang diserahkan pada kebijakannya. Jadi tidak sah mengangkatnya seperti hakim, bila ia bodoh dalam bab zakat. Amil zakat tidak wajib *fakih* dalam semua hukum, karena *wilayah* hakim bersifat menyeluruh maka ia harus *alim* terhadap semua hukum, sedang *wilayah* Amil zakat bersifat khusus, sehingga tidak perlu bersifat *alim* atas semua hukum. Jika enam kriteria ini terpenuhi maka seseorang

---

[9] Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M), VIII/494.

boleh menjadi Amil Zakat; baik ia laki-laki atau perempuan, meskipun kita memakruhkan mengangkat perempuan untuk urusan tersebut, rasa malu perempuan. Sebab ketika perempuan boleh menguasai harta anak-anak yatim maka dia boleh menguasai harta zakat.

Adapun para pembantu-pembantu Amil yaitu para *Katib, Hasib, Jabi*, dan *Mustaufi*, maka upahnya diambilkan dari bagian Amil karena kerja mereka dalam urusan zakat, dan bagi mereka tidak disyaratkan merdeka dan *fakih,* karena mereka adalah pelayan yang diperintahkan dalam mengurusi zakat, namun harus memenuhi empat kriteria, yaitu *baligh*, berakal, Islam, dan *amanah.*

Ru'ah (penggembala) dan *Hafadhah* (penjaga) harta zakat setelah zakat diterima, maka terkait upah mereka ada dua pendapat: *pertama* upahnya diambilkan dari bagian Amil; dan *kedua* diambilkan dari harta pokok zakat. Upah *Hammalin* (orang yang mengangkut zakat) dan *Naqqalin* (orang-orang yang memindah zakat), apabila kerjanya dibutuhkan pada saat memungut zakat dari pemilik harta, maka terdapat dua pendapat, sebagaimana *Ru'ah* dan *Hafadhah*; dan jika kerjanya untuk menganggut zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka terkait upahnya hanya ada satu pendapat, yaitu diambilkan dari harta zakat. Adapun upah para penakar, penimbang, dan penghitung, maka ada dua pendapat: *pertama* menurut Abu Ali bin Abi Hurairah, bahwa upahnya dibebankan ke pemilik harta, sebab upahnya merupakan hak penyerahan dan untuk memungkinkan membayar zakat, sehingga menyerupai upah penakar dan penimbang barang dagangan yang khusus menjadi beban penjual, bukan pembeli; dan pendapat *kedua* adalah pendapat Abu Ishaq al-Maruzi, yang menyatakan bahwa upahnya diambilkan dari bagian Amil. Perbedaan di antara penakar zakat dan penakar barang dagangan adalah bahwa penakar barang dagangan itu untuk kepentingan penjual; sedang penakar zakat ini untuk kepentingan orang-orang yang berhak menerima bagian zakat.

Dengan demikian, upah kerja terkait harta zakat terbagi menjadi empat bagian: *pertama* upah yang diambilkan dari bagian Amil dari harta zakat, yaitu Amil dan para pembantunya; *kedua* upah yang diambilkan dari harta zakat selain bagian Amil, yaitu upah para pengangkut dan pemindah zakat kepada para penerima zakat; *ketiga* upah yang dibebankan kepada pemilik harta menurut salah satu dari dua pendapat dan diambilkan dari bagian Amil menurut pendapat yang kedua, yaitu upah penakar dan penimbang; dan *keempat* upah yang diperselisihkan oleh *Ashab asy-Syafi'i*, yaitu upah *Ru'ah* dan *Hafadhah*. Menurut salah satu pendapat, tersebut diambilkan dari bagian Amil, dan menurut pendapat kedua diambilkan dari harta zakat.

وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي هٰذِهِ الْوِلَايَةِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا عَادِلًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ مُنَفِّذًا قَدْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرٍ يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَاتُ مِنْ ذِي الْقُرْبَى وَلٰكِنْ يَكُونُ رِزْقُهُ عَنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.

وَلَهُ إِذَا قُلِّدَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَقَسْمَهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا سَنَشْرَحُ وَالثَّانِي: أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَيُنْهَى عَنْ قِسْمَتِهَا فَنَظَرُهُ مَقْصُورٌ عَنِ الْأَخْذِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ الْقَسْمِ وَالْمُقَلَّدُ بِهِمَا بِتَأْخِيرِ قَسْمِهَا مَأْثُومٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ تَقْلِيدَهَا لِمَنْ يَنْفَرِدُ بِتَعْجِيلِ قَسْمِهَا وَالثَّالِثُ: أَنْ يُطْلَقَ تَقْلِيدُهُ عَلَيْهَا فَلَا يُؤْمَرُ بِقَسْمِهَا وَلَا يُنْهَى عَنْهُ فَيَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَخْذِهَا وَقَسْمِهَا فَصَارَتِ الصَّدَقَاتُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْأَخْذِ وَالْقَسْمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ وَسَنَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي هٰذَا الْبَابِ عَلَى الْإِخْتِصَارِ."

Syarat-syarat yang dipertimbangkan dalam *wilayah* zakat ini adalah merdeka, muslim, adil, dan alim terhadap hukum-hukum zakat jika termasuk *ummal tafwidh* (pekerja yang diberi kekuasaan penuh). Jika hanya sebagai pelaksana, yang oleh Imam telah ditentukan kadar harta yang dipungutnya, maka boleh tidak dari orang yang mengetahui ilmu zakat. Imam boleh mengangkat orang yang haram meneriman zakat sebagai Amil zakat, yaitu golongan *Dzawi al-Qurba*, akan tetapi rizkinya diambilkan dari bagian *mashalih*.

Bila seseorang diangkat menjadi Amil zakat, maka ia memiliki tiga kondisi: *pertama* diangkat untuk memungut dan membagikan zakat, maka ia boleh melakukan semuanya berdasarkan keterangan yang akan aku jelaskan; *kedua* diangkat untuk memunggutnya dan dilarang membagikannya, maka kebijakannya terbatas pada pemungutan zakat dan ia dilarang membagikannya–orang yang diangkat untuk memungut dan membagi zakat maka ia berdosa sebab menunda pembagiannya, kecuali Imam memasrahkannya kepada orang tersendiri yang segera membaginya–; *ketiga* pengangkatannya dimutlakkan, sehingga ia tidak diperintahkan dan tidak dilarang membagi zakat, maka berdasarkan kemutlakan pengangkatannya ia diarahkan pada keumumannya dalam

---

[illegible] Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah* (Kuwait: Ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M), 145-146.

dua perkara, yaitu memungut dan membagi zakat. Jadi *Wilayah* Zakat mencakup pemungutan dan pembagian. Masing-masing memiliki hukum, dan akan kukumpulkan di antara keduanya dalam bab ini secara ringkas.

II. Prosedur Pengangkatan Amil Zakat

1. Pengangkatan amil dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan *wilayah* (kekuasaan) amil.
2. *Muwalli* (Pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya) mengetahui bahwa *Muwalla* (calon amil zakat) memenuhi syarat diangkat sebagai amil.
3. Dalam pengangkatannya disebutkan tugas amil zakat adalah menangani urusan zakat.
4. Dalam pengangkatannya disebutkan wilayah kerjanya.
5. Diangkat secara langsung *(bi al-lafzhi musyafahah)* atau tidak langsung *(ma'a al-ghaibah murasalatan wa mukatabatan)*.
6. *Muwalla* (calon Amil) mengetahui bahwa *muwalli* berhak mengangkatnya, telah mengangkatnya, dan berhak menggantikan (mendelagasikan) tugasnya dalam urusan zakat.
7. *Muwalla* menyampaikan menjawab atas kesanggupannya atau langsung bekerja.
8. *Muwalla* resmi menjadi amil.

Imam al-Mawardi menjelaskan:

(فصل) وولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات مع الحضور باللفظ مشافهة ومع الغيبة مراسلة ومكاتبة ولكن لا بد مع المكاتبة من أن يقترن بها من شواهد الحال ما يدل عليها عند المولى وأهل عمله.

والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان: صريح وكناية. فالصريح أربعة ألفاظ: قد قلدتك وولَّيتك واستخلفتك واستنبتك، فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ انعقدت ولاية القضاء وغيرها من الولايات وليس يحتاج معها إلى قرينة أخرى إلا أن يكون تأكيدا لا شرطا. فأما الكناية فقد ذكر بعض أصحابنا أنها سبعة ألفاظ: قد اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت إليك ووكلت إليك وأسندت إليك، فهذه الألفاظ لما تضمنته من الاحتمال تضعف في الولاية عن حكم الصريح حتى يقترن بها في عقد الولاية ما ينفي عنها الاحتمال فتصير مع ما يقترن بها في حكم الصريح مثل قوله فانظر فيما وكلته إليك واحكم فيما اعتمدت فيه عليك

فَتَصِيرُ الْوِلَايَةُ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابَةِ مُنْعَقِدَةً.

ثُمَّ تَمَامُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى قَبُولِ الْمُوَلَّى، فَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ مُشَافَهَةً فَقَبُولُهُ عَلَى الْفَوْرِ لَفْظًا، وَإِنْ كَانَ مُرَاسَلَةً أَوْ مُكَاتَبَةً جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّرَاخِي، وَيَجُوزُ قَبُولُهُ بِالْقَوْلِ مَعَ التَّرَاخِي. وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْقَبُولِ بِالشُّرُوعِ فِي النَّظَرِ، فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَهُ كَالنُّطْقِ وَأَبَاهُ آخَرُونَ حَتَّى يَكُونَ نُطْقًا لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِي النَّظَرِ فَرْعٌ لِعَقْدِ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ قَبُولُهَا.

وَيَكُونُ تَمَامُ الْوِلَايَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ مُعْتَبَرًا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمُوَلِّي لِلْمُوَلَّى بِأَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُوَلَّى مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَجُوزُ مَعَهَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَمْ يَصِحَّ تَقْلِيدُهُ، فَلَوْ عَرَفَهَا بَعْدَ التَّقْلِيدِ اسْتَأْنَفَهَا وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَوِّلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَهَا. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْمُوَلَّى بِمَا عَلَيْهِ الْمُوَلِّي مِنِ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا مُسْتَحِقًّا لَهَا وَأَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَهَا وَصَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِنَابَةِ فِيهَا إِلَّا أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فِي قَبُولِ الْمُوَلَّى وَجَوَازِ نَظَرِهِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي عَقْدِ تَقْلِيدِهِ وَوِلَايَتِهِ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلَيْسَ يُرَاعَى فِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ الْمُشَاهَدَةُ بِالنَّظَرِ. وَإِنَّمَا يُرَاعَى انْتِشَارُهَا بِتَتَابُعِ الْخَبَرِ. وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: ذِكْرُ مَا تَضَمَّنَهُ التَّقْلِيدُ مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ إِمَارَةِ الْبِلَادِ أَوْ جِبَايَةِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ تَقْلِيدٍ فَافْتَقَرَتْ إِلَى تَسْمِيَةِ مَا تَضَمَّنَتْ لِيَعْلَمَ عَلَى أَيِّ نَظَرٍ عُقِدَتْ فَإِنْ جُهِلَ فَسَدَتْ. وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ: ذِكْرُ تَقْلِيدِ الْبَلَدِ الَّذِي عُقِدَتِ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِيَعْرِفَ بِهِ الْعَمَلَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ فِيهِ، وَلَا تَصِحُّ الْوِلَايَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ تَمَّ تَقْلِيدُ الْوِلَايَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشُّرُوطِ."[11]

(*Pasal*) Kekuasaan hukum menjadi sah dengan syarat yang mengesahkan berbagai kekuasaan disertai kehadiran orang yang dilantik dengan lafal pengangkatan secara langsung, dan disertai tidak hadirnya orang yang dilantik, dengan pengiriman surat dan tulisan. Akan tetapi pada saat menggunakan tulisan harus dibarengi berbagai kesaksian kondisi yang menunjukkan kekuasaan di sisi orang yang diangkat dan rakyat wilayah kerjanya.

Lafal-lafal yang dengannya suatu pengangkatan kekuasaan menjadi sah ada dua macam: yaitu *sharih* dan *kinayah*. Lafal pengangkatan yang *sharih* ada empat: "*Sungguh aku mengangkatmu, menjadikanmu sebagai penguasa,*

[11] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, 92-118.

menjadikanmu sebagai khalifah, dan menjadikanmu sebagai pengganti." Apabila Imam mengucapkan salah satu dari lafal-lafal ini maka kekuasan hukum dan selainnya menjadi sah dan tidak butuh pada *qarinah* lain kecuali sebagai penguat, bukan syarat. Adapun lafal pengangkatan yang *kinayah* maka sebagian *Ashab* asy-Syafi'i telah menyebutkannya, dan lafal-lafal *kinayah* tersebut ada tujuh, yaitu: *"Sungguh aku berpedoman kepadamu, percaya padamu, mengembalikan kepadamu, menjadikanmu, menyerahkan padamu, memasrahkan kepadamu, dan menyandarkan kepadamu."*

Lafal-lafal ini karena berbagi kemungkinan makna yang dikandungnya maka lemah untuk menunjukkan makna penguasaan yang jauh dari keterusterangan, sehingga saat pengangkatan kekuasaan harus ada lafal lain yang menafikan berbagai kemungkinan makna darinya, sehingga bersamaan lafal tersebut, lafal-lafal itu sederajat dengan lafal yang *sharih*, seperti: *"Buatlah kebijakan dalam urusan yang aku pasrahkan kepadamu, dan hukumilah dalam urusan yang dalamnya aku berpedoman padamu"*, sehingga pengangkatan kekuasaan tersebut sah dengan adanya indikasi dari lafal-lafal ini, besertaan *kinayah* yang telah lewat.

Kemudian kesempurnaan pengangkatan kekuasaan *(wilayah)* tergantung pada penerimaan *Muwalla* (orang yang diangkat). Jika pengangkatan itu secara langsung, maka menerimanya harus dengan segera, sedangkan jika dengan surat atau tulisan maka penerimaannya boleh ditunda, dan boleh menerimanya dengan ucapan dan ditunda. Mengenai keabsahan menerima pengangkatan dan langsung melaksanakan tugas diperselisihkan ulama. Sebagian ulama membolehkannya dan menjadikannya seperti ucapan, dan sebagian lain menolaknya sehingga ia menerimanya secara lisan, karena melaksanakan tugas merupakan cabang bagi *akad wilayah*, sehingga tidak menjadi sah menerima *wilayah* dengannya.

Kesempurnaan *wilayah* beserta lafal pengangkatan yang telah aku sebutkan dianggap sah dengan 4 syarat, yaitu: 1) *Muwalli* (orang mengangkat) mengenal *Muwalla*, bahwa *Muwalla* memenuhi sifat yang dengannya boleh diangkat sebagai penguasa. Jika *Muwalli* tidak mengetahui bahwa *Muwalla* memenuhi sifat yang kekuasaan itu boleh dijabat bersamaan dengannya, maka tidak sah pengangkatannya. Jika *Muwalli* mengetahuinya setelah pengangkatan maka harus mengulangi pengangkatannya dan tidak boleh berpedoman pada pengangkatan sebelumnya. 2) *Muwalla* mengetahui hak yang ada pada *Muwalli*, yaitu berhak mencari pengganti dalam kekuasaan tersebut dengan sifat-sifatnya yang dengannya ia berhak mencari ganti, mengetahui ia telah menerima pengangkatan kekuasan/ *wilayah* tersebut dan menjadi berhak mencari pengganti untuknya. Hanya saja, ini merupakan syarat yang dipertimbangkan untuk penerimaan *Muwalla* dan kebolehan atas pengelolaannya, bukan merupakan syarat

sahnya pengangkatan dan kekuasannnya, berbeda dengan syarat yang telah lewat tadi. Dalam pengetahuan *Muwalla* atas *Muwalli* ini tidak disyaratkan harus mengetahui hal itu secara langsung, yang penting mengetahuinya dengan melihat berita. 3) Penyebutan hal-hal yang termuat dalam pengangkatan, yaitu pengangkatan untuk menguasai penanganan hukum, mengatur negeri, atau menarik *kharaj*. Karena syarat-syarat ini dipertimbangkan dalam setiap pengangkatan jabatan, sehingga harus disebutkan apa yang termuat di dalamnya, agar diketahui pada urusan apa pengangkatan itu dilaksanakan. Bila tidak diketahui maka rusaklah akad pengangkatan tersebut. 4) Penyebutan negeri yang kekuasaan/*wilayah* itu dipasrahkan padanya, agar dengannya diketahui kerja yang menjadi hak pengelolaannya, dan tidak sah pengangkatan *wilayah* besertaan ketidaktahuan tentangnya. Bila suatu kekuasaan telah sah, maka pengangkatannya sempurna dengan memenuhi syarat yang telah aku sebutkan.

Terkait amil zakat merupakan *wilayah syar'iyyah*, Syaikh Zakariya al-Anshari dalam *Fath al-Wahhab* mengatakan:

(وَشَرْطُ الْعَامِلِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ) أَيْ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذَكَرٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي بَابِهَا (وَفِقْهُ زَكَاةٍ) بِأَنْ يَعْرِفَ مَا يُؤْخَذُ وَمَنْ يَأْخُذُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وِلَايَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَافْتَقَرَتْ لِهَذِهِ الْأُمُورِ كَالْقَضَاءِ.[12]

(Syarat Amil adalah *ahli syahadah*) yaitu muslim, *mukallaf*, adil, laki-laki dan lain sebagainya dari berbagai syarat yang telah disebutkan dalam babnya, (dan memahami zakat) dengan gambaran mengetahui barang yang dipungut dan orang yang memungut, karena Amil adalah *wilayah syar'i* sehingga butuh pada berbagai persyaratan ini sebagaimana *qadha'*.

III. Pihak yang Berwenang Mengangkat Amil Zakat di Indonesia, dari Tingkat Nasional sampai Desa

Untuk mengetahui pihak yang berwenang mengangkat amil di Indonesia, dari tingkat nasional sampai desa, diperlukan pemahaman Pengelola Zakat yang ada, sebagaimana dalam bagan berikut:

---

[12] Zakariya bin Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H), I/117-118.

Bagan Pengelola Zakat di Indonesia
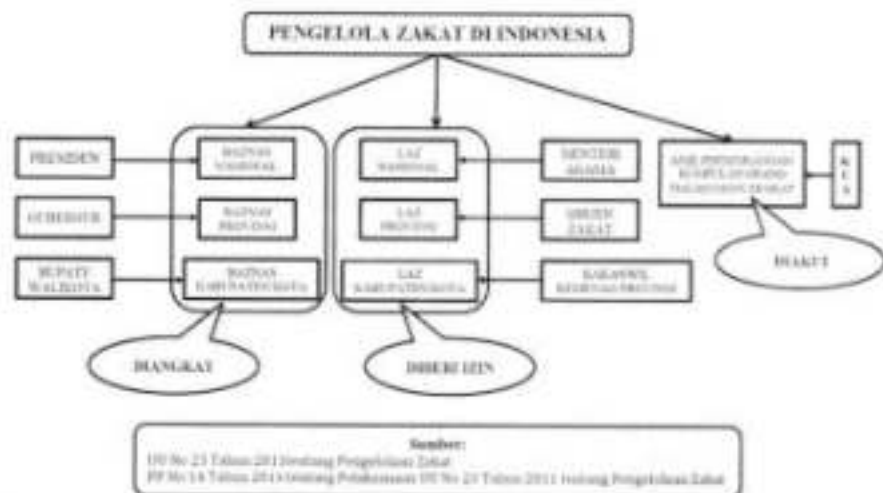
UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terpetakan dalam bagan tersebut menggambarkan, bahwa Pengelola Zakat di Indonesia ada tiga:

1. BAZNAS (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
2. LAZ (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
3. Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS DAN LAZ.

Namun demikian, dari ketiga Pengelola Zakat tersebut, yang jelas-jelas diangkat oleh pemerintah hanya BAZNAS, sedangkan LAZ hanya diberi izin dan Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat hanya diakui. Sehingga keduanya tidak berstatus sebagai status *amil syar'i*.

Pengangkatan Amil adalah kewenangan Imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi amil di atas. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat amil–yang menurut PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah gubernur, bupati, atau walikota–dan mereka pun boleh mengangkat pegawai *('ummal)* untuk membantu tugas mereka dalam mengelola zakat. Dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah* Imam al-Mawardi mengatakan:

وَإِذَا فَوَّضَ الْخَلِيفَةُ تَدْبِيرَ الْأَقَالِيمِ إِلَى وُلَاتِهَا وَوَكَّلَ النَّظَرَ فِيهَا إِلَى الْمُسْتَوْلِينَ عَلَيْهَا

كَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ زَمَانِنَا جَازَ لِمَالِكِ كُلِّ إِقْلِيمٍ أَنْ يَسْتَوْزِرَ، وَكَانَ حُكْمُ وَزِيرِهِ مَعَهُ كَحُكْمِ وَزِيرِ الْخَلِيفَةِ مَعَ الْخَلِيفَةِ فِي اعْتِبَارِ الْوِزَارَتَيْنِ وَأَحْكَامِ النَّظَرَيْنِ.

وَإِذَا قَلَّدَ الْخَلِيفَةُ أَمِيرًا عَلَى إِقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ كَانَتْ أَمَارَتُهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ. فَأَمَّا الْعَامَّةُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَمَارَةُ اسْتِكْفَاءٍ بِعَقْدٍ عَنِ اخْتِيَارٍ وَأَمَارَةُ اسْتِيلَاءٍ بِعَقْدٍ عَنِ اضْطِرَارٍ.

فَأَمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ الَّتِي تَنْعَقِدُ عَنِ اخْتِيَارِهِ فَتَشْتَمِلُ عَلَى عَمَلٍ مَحْدُودٍ وَنَظَرٍ مَعْهُودٍ، وَالتَّقْلِيدُ فِيهَا أَنْ يُفَوِّضَ إِلَيْهِ الْخَلِيفَةُ إِمَارَةَ بَلَدٍ أَوْ إِقْلِيمٍ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ وَنَظَرًا فِي الْمَعْهُودِ مِنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ فَيَصِيرُ عَامَّ النَّظَرِ فِيمَا كَانَ مَحْدُودًا مِنْ عَمَلٍ وَمَعْهُودًا مِنْ نَظَرٍ فَيَشْتَمِلُ نَظَرُهُ فِيهِ عَلَى سَبْعَةِ أُمُورٍ: أَحَدُهَا النَّظَرُ فِي تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ وَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّوَاحِي وَتَقْدِيرِ أَرْزَاقِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ قَدَّرَهَا فَيُدِرُّهَا عَلَيْهِمْ. وَالثَّانِي النَّظَرُ فِي الْأَحْكَامِ وَتَقْلِيدُ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ. وَالثَّالِثُ: جِبَايَةُ الْخَرَاجِ وَقَبْضُ الصَّدَقَاتِ وَتَقْلِيدُ الْعُمَّالِ فِيهِمَا وَتَفْرِيقُ مَا اسْتُحِقَّ مِنْهَا.[13]

Bila *Khalifah* menyerahkan pengaturan daerah kepada penguasanya dan menyerahkan pengelolaannya pada orang-orang yang diberi kekuasan olehnya sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sekarang ini, maka boleh bagi penguasa setiap daerah mengangkat *Wazir*, dan status hukum *Wazir* terhadapnya seperti hukum *Wazir Khalifah* terhadap *Khalifah* dalam hal mengangkat dua orang *Wazir* dan terkait berbagai hukum dalam dua pengelolaan.

Bila *Khalifah* mengangkat seorang *Amir* untuk suatu distrik atau negeri, maka keamirannya ada dua macam, yaitu keamiran yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Keamiran yang bersifat umum ada dua, yaitu Keamiran *Istikfa`* dengan pengangkatan secara suka rela, dan Keamiran *Istila`* dengan pengangkatan secara paksa.

Keamiran *Istikfa`* yang terbentuk dengan usaha *Khalifah* mencakup pekerjaan yang jelas batas-batasnya dan pengelolaan yang telah diketahui kriterianya. Pengangkatan dalam Keamiran *Istikfa`* berlangsung dengan *Khalifah* memasrahkan pemerintahan suatu negeri atau distrik padanya dengan kekuasaan terhadap seluruh penduduknya dan pengelolaan yang telah diketahui kriterianya dari perkerjaan-pekerjaannya yang lain, sehingga pengelolaan *Amir* yang diangkat bersifat menyeluruh dalam

---

[13] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, 38-39.

pekerjaan yang jelas batas-batasnya dan pengelolaan yang telah diketahui kriterianya. Pengolaannya mencakup tujuh urusan, yaitu: 1) mengelola urusan tentara, pembagian tugasnya, dan penentuan gajinya, kecuali *Khalifah* yang menentukannya, maka ia tinggal membagikannya kepada mereka. 2) Mengelola urusan hukum, pengangkatan *Qadhi,* dan berbagai hakim. 3) Menarik *Kharaj,* menarik zakat, mengangkat pegawai untuk dua urusan ini, dan membagikannya kepada yang berhak.

IV. Status Kepanitiaan Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat Seperti di Pedesaan, Perkantoran, Sekolahan dan Semisalnya

Dikarenakan kepanitiaan zakat (Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat)–begitu pula Pengelola Zakat Perseorangan– yang dibentuk atas prakarsa masyarakat tidak diangkat oleh presiden atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya, maka keduanya tidak berstatus sebagai *amil syar'i.* Begitu pula LAZ sebagaimana dalam pembahasan nomor III. Terlepas dari keabsahan sebagai *amil syar'i,* pengelolaan zakat yang dilakukannya bisa dibenarkan, tapi terbatas pada menerima zakat dari *muzakki* dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan *amil syar'i* memiliki beberapa perbedaan, di antaranya sebagaimana dalam tabel berikut:

Perbedaan Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan Amil Zakat *Syar'i*

No	Kepanitiaan Zakat dan LAZ	Amil Zakat *Syar'i*
1	Berstatus sebagai wakil dari *muzakki* (bila *wakalah*nya sah), sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat *muzakki* belum gugur	Berstatus sebagai *naib (pengganti) mustahiq,* sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat *muzakki* telah gugur.
2	Tidak berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional	Berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan
3	Tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama Amil Zakat	Berhak mendapatkan bagian zakat atas nama Amil Zakat

Dalam beberapa kitab dijelaskan:

(الرَّابِعَةُ) فِي بَيَانِ الْأَفْضَلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: تَفْرِيقُهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْكِيلِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ تَفْرِيقِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَعَلَى تَقْدِيرِ خِيَانَةِ الْوَكِيلِ لَا يَسْقُطُ

الْفَرْضُ عَنِ الْمَالِكِ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ فَمَا لَمْ يَصِلِ الْمَالُ إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَالِكِ بِخِلَافِ دَفْعِهَا إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنِ الْمَالِكِ.[14]

Adapun (yang keempat) dalam penjelasan teknis pembagian zakat yang lebih utama. *Asyhab asy-Syafi'i* berpendapat, membagikan sendiri harta zakat lebih utama daripada mewakilkannya tanpa *khilaf*, sebab pembayar zakat terpercaya membagikannya; berbeda dengan wakil. Berdasarkan perkiraan wakil melakukan pengkhiyanatan, kewajiban membayar zakat tidak gugur dari pemilik harta, karena penguasaan wakil sebagaimana penguasaannya, sehingga selama harta zakat tidak sampai ke *mustahiq* maka tidak tanggungannya belum terbebaskan. Lain halnya dengan menyerahkan zakat kepada Imam, maka sungguh dengan hanya Imam menerimanya, kewajiban zakat menjadi gugur zakat pemilik harta.

(الثَّانِيَةُ): لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي صَرْفِ الزَّكَاةِ الَّتِي لَهُ تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ شَاءَ وَكَّلَ فِي الدَّفْعِ إِلَى الْإِمَامِ وَالسَّاعِي وَإِنْ شَاءَ فِي التَّفْرِقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ قَضَاءَ الدُّيُونِ وَلِأَنَّهُ قَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى الْوَكَالَةِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: سَوَاءٌ وَكَّلَهُ فِي دَفْعِهَا مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ فَهُمَا جَائِزَانِ بِلَا خِلَافٍ قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي أَوَّلِ بَابِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ: وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَةِ.[15]

(Kedua) Pemilik harta boleh mewakilkan penasarufan zakat yang boleh dibagikannya sendiri. Apabila berkehendak, maka ia boleh mewakilkan penyerahannya kepada Imam dan *Sa'i*, dan jika berkehendak, ia boleh mewakilkan pembagiannya kepada golongan penerima zakat. Kedua hal itu boleh tanpa *khilaf.* Bahwasanya boleh mewakilkan dalam hal tersebut, padahal zakat merupakan ibadah karena pembayaran zakat menyerupai pelunasan hutang, dan karena kadang hajat mengharuskan perwakilan karena tidak adanya harta di tempat pemilik dan selainnya. *Ashab asy-Syafi'i* berpendapat: baik mewakilkannya dalam penyerahan zakat, dari harta *Muwakkil* atau dari harta Wakil, keduanya boleh tanpa *khilaf.* Al-Baghawi berkata dalam awal bab Niat Zakat: *"Boleh mewakilkan kepada seorang budak atau non muslim untuk mengeluarkan zakat, seperti halnya boleh mewakilkannya untuk menyembelih hewan korban."*

---

[14] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (ttp.: al-Muniryah, tth.), II/365.

[15] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (ttp.: al-Muniryah, tth.), VI/138.

بَابُ ضَيْعَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ قَسْمِهَا أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ مَحِلِّهَا أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ مِنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَجِدُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا حَتَّى يَقْسِمَهَا أَوْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْوَالِي وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا يُبْرِئُهُ مِنْهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ مَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لَا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهَا رَجُلٌ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ سَهْمَ الْعَامِلِينَ وَسَهْمَ الْمُؤَلَّفَةِ سَاقِطَانِ (قَالَ): وَيَسْقُطُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ لِأَنَّهُ تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمُ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَأَيُّ صِنْفٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَجِدْهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ حَقِّهِ مِنْهَا.[16]

Bab tersia-siakannya zakat fitrah sebelum membaginya. Ar-Rabi' mengabarkan kepada saya, beliau berkata: *"Asy-Syafi'i mengabarkan kepada saya: "Orang yang mengeluarkan zakat fitrah ketika sampai pada waktu mengeluarkannya, sebelumnya, atau setelahnya, untuk membaginya, lalu zakat tersia-sia darinya dan ia merupakan orang yang menemukan zakat fitrah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat hingga membagikannya atau menyerahkannya pada Wali. Begitu juga setiap hak yang wajib baginya maka tidak terbebaskan darinya kecuali menunaikannya, selama ia termasuk orang yang wajib menunaikan wak yang menjadi kewajibannya itu."* (Asy-Syafi'i berkata): *"Zakat fitrah dibagikan kepada orang juga mendapat bagian zakat mal. Selain itu tidak mencukupinya. Jika pemilik harta menguasai pembagiannya maka ia membaginya ke dalam enam bagian, karena bagian Amil dan Mu'allaf gugur."* (Beliau berkata): *"Bagian Amil gugur karena pemilik harta membagi sendiri zakatnya, sehingga ia tidak bisa mengambil upah darinya, dan ia harus membagikannya kepada Fuqara, Masakin, Riqab–budak mukatab–, orang yang berhutang, Sabilillah dan Ibn Sabil. Golongan manapun dari mereka yang tidak ditemukannya maka ia harus menanggung haknya."*

(مَسْأَلَةٌ): يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ زِيَادٍ عَنِ النَّوَوِيِّ وَاعْتَمَدَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي مَخْرَمَةَ تَرْجِيحُهُ وَاعْتَمَدَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ قَالَ: إِلَّا إِنِ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِمَحَلٍّ فَلِمَنْ سَافَرَ مِنْهُمُ التَّوْكِيلُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا حَقِيقَةً.[17]

---

[16] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, II/74.

[17] Ibn Ziyad, *Ghayah Talkhish al-Murad* pada *Bughyah al-Mustarsyidin*, 143.

(Masalah) boleh mewakilkan untuk menerima zakat sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Ziyad dari an-Nawawi dan yang dipedomani beliau. Lahiriah ungkapan Abu Makhramah mengunggulkannya. Ibn Hajar di dalam *Fatawa*nya memedomani ketidakabsahannya. Beliau berkata: *"Tidak boleh mewakilkan penerimaan zakat kecuali jika para mustahiq di suatu tempat terbatas jumlahnya, sehingga bagi sebagian orang yang bepergian dari mereka boleh mewakilkan penerimaan zakatnya, karena mereka memilikinya secara nyata."*

التَّاسِعَ عَشَرَ: تَجُوْزُ اسْتِنَابَةُ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ فِي قَبْضِهَا لَهُمْ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ زَوَائِدِهِ "[18]

(Ke Sembilan belas) Golongan penerima zakat boleh mencari pengganti untuk menerima zakat bagi mereka. Hal ini disebutkan oleh an-Nawawi dalam *Zawa'id ar-Raudhah*.

(وَلَوْ دَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ) أَوْ نَائِبِهِ كَالسَّاعِي (كَفَتِ النِّيَّةُ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ السُّلْطَانُ عِنْدَ الصَّرْفِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّيْنَ فَالدَّفْعُ إِلَيْهِ كَالدَّفْعِ إِلَيْهِمْ وَلِهَذَا أَجْزَأَتْ وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ التَّفْرِقَةِ أَيْضًا (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ) الْمَالِكُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ (لَمْ يُجْزِ عَلَى الصَّحِيْحِ وَإِنْ نَوَى السُّلْطَانُ) مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ لَهُ فِي النِّيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَالْمُقَابِلُ قَوِيٌّ جِدًّا فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيْرُوْنَ لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ ضَعِيْفٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) يُحْتَمَلُ أَنْ تُجْزِئَ نِيَّةُ الْمَالِكِ بَعْدَ الدَّفْعِ لَهُ وَقَبْلَ صَرْفِهِ أَوْ مَعَهُ كَالْوَكِيْلِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا لِلْمَالِكِ وَإِنْ قِيْلَ إِنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ... (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ لَهُ إِلَخْ) مَفْهُوْمُهُ الْإِجْزَاءُ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي النِّيَّةِ وَنَوَى وَحِيْنَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَكِيْلُ الْمَالِكِ فِي الدَّفْعِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ فَلَا يَبْرَأُ الْمَالِكُ قَبْلَ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّ إِذْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ كَوْنِهِ نَائِبَ الْمَالِكِ وَنَائِبَ الْمُسْتَحِقِّ أَيْضًا حَتَّى يَصِحَّ قَبْضُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ "[19]

(Jika pemilik harta menyerahkan zakatnya kepada Sultan) atau *Naib*nya seperti *Sa'i*, (maka cukup niat saat itu) maksudnya saat menyerahkan zakat padanya, meskipun Sultan tidak berniat ketika mentasarufkannya, karena Sultan adalah pengganti dari para *mustahiq* sehingga penyerahan kepadanya seperti menyerahkan kepada mereka. Karena alasan ini pula, peyerahan zakat tersebut telah cukup meski zakatnya rusak di tangan

---

[18] Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawa*, I/244.

[19] Ibn Hajar al-Haitami dan Ibn Qasim al-'Abbadi, *Tuhfah al-Muhtaj* dan *Hawasyi Ibn Qasim al-'Abbadi* (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra), III/350-351.

Sultan. Hal ini berbeda dengan menyerahkan zakat kepada wakil. Yang lebih utama bagi Imam ialah juga berniat ketika membagikannya. (Jika pemilik harta tidak berniat) ketika menyerahkan zakatnya kepada Sultan atau *Naib*nya (maka tidak boleh menurut *qaul shahih,* meskipun Sultan berniat) tanpa seizin pemilik harta dalam niatnya itu, karena alasan tadi yaitu ia adalah *Naib* mereka. Sedangkan pendapat *muqabil*nya adalah pendapat yang sangat kuat, bahkan asy-Syafi'i telah menjelaskannya secara terang-terangan dalam *al-Umm* dan banyak ulama yang memberi kepastian hukum dengannya, akan tetapi yang benar pendapat itu lemah dari sisi alasan, sehingga tidak perlu disanggah.

(Ungkapan Ibn Hajar: *"Saat menyerahkan zakat kepadanya"*) mungkin mencakup cukupnya niat dari pemilik harta setelah menyerahkan zakat padanya dan sebelum atau bersamaan dengan pentasarufannya, seperti Wakil. Terkadang pemahaman ini dikritik, bahwa Sultan bukan *Zaib* bagi pemilik harta meskipun dikatakan bahwa ia adalah *Zaib mustahiq,* maka angan-anganlah... (Ungkapan Ibn Hajar: *"Tanpa seizin pemilik harta dalam niatnya itu …"*) Pemahamannya, niat Sultan cukup bila pemilik harta mengizinkan niatnya. Dalam kondisi demikian maka mungkin saja Sultan merupakan Wakil pemilik harta dalam penyerahan zakat kepada *mustahiq,* dan sekaligus Wakil *Mustahiq* sehingga sah menerima zakatnya, dan dan mungkin juga tidak seperti itu.

V. Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif oleh Amil Zakat

Amil Zakat tidak diperkenankan mendayagunakan zakat untuk usaha produktif sebelum sampai kepada yang berhak.

وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِيْ وَلاَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا إِلَى أَهْلِهَا لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ.[20]

Tidak boleh bagi *Sa'i* dan Imam menasarufkan bagian-bagian zakat yang ada padanya sampai ia menyampaikan pada orang yang berhak, karena *Fuqara'* merupakan orang dewasa yang tidak bisa dikuasai, sehingga tidak boleh menasarufkan harta mereka tanpa seizinnya.

أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ لِلْجَمْعِيَّاتِ يَجِبُ إِيْصَالُهَا بِأَعْيَانِهَا لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ وَلَا يَجُوْزُ لِلْقَائِمِيْنَ عَلَى الْجَمْعِيَّاتِ أَنْ يَشْتَرُوْا بِأَمْوَالِ الزَّكَاةِ أَغْذِيَةً أَوْ أَلْبِسَةً وَنَحْوَهَا يُقَدِّمُوْنَهَا لِلْفُقَرَاءِ

[20] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (ttp.: al-Muniryah, tth.), VI/178.

لأنهم لم يوكلوهم في هذا كما لا يجوز لجمعيات المعاهد العلمية الشرعية شراء شيء كالكتب وغيرها من أموال الزكاة وعلى إدارة الجمعيات أن يحصلوا على تفويض أو توكيل من طلاب العلم بصرف أموال الزكاة على حوائجهم من طعام وشراب وكتب وأوراق ونحو ذلك لأن تمليك الزكاة للمستحقين شرط أساسي ثم يتصرف المستحق بما يحقق مصلحته ولا يجوز لجمعية أن تقوم بنفسها ببناء مبان أو معامل من أموال الزكاة لصرف ريعها على المستحقين إذ لا وكالة لدى الجمعية من المستحقين في هذا."[21]

Sungguh penyerahan zakat pada *jam'iyyah* wajib disampaikan dalam bentuknya pada para *mustahiq*; tidak boleh bagi para pimpinan jamiyyah membeli makanan, pakaian dan sebagainya dengan harta-harta zakat yang mereka sediakan kepada *fuqara'*. Karena sungguh mereka tidak memasrahkan terhadap mereka dalam hal ini sebagaimana tidak boleh bagi *jam'iyyah al-ma'ahid al-ilmiyah asy-Syar'iyyah* membeli sesuatu seperti kitab-kitab dan sebagainya dari harta-harta zakat dan bagi *idarah jam'iyyah* menghasilkan pada penyerahan atau perwakilan dari para penuntut ilmu dengan mengalokasikan harta zakat kepada orang yang membutuhkan di antara mereka dari makanan, minuman, kitab-kitab, kertas-kertas dan sebagainya; karena sungguh memberikan kepemilikan zakat pada para *mustahiq* adalah syarat dasar kemudian *mustahiq* mentasarufkan dengan perkara yang menyatakan *maslaha*nya dan tidak boleh bagi *jam'iyyah* berdiri sendiri dengan membangun bangunan atau perusahaan dari harta-harta zakat untuk mengalokasikan *ra'*nya pada para *mustahiq* karena tidak ada perwakilan di samping *jam'iyyah* dari *mustahiq* dalam hal ini.

قال الفقهاء: لا يجوز للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها إذا كان مفوضا للتفريق عليهم لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بدون إذنهم أو يوصلها إلى الإمام إذا لم يكن مفوضا للتفريق عليهم وإن باع بلا ضرورة ضمن فإن وقعت ضرورة البيع كأن خاف هلاك بعض الماشية أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو ما أشبه ذلك جاز البيع للضرورة."[22]

---

[21] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, III/184.
[22] *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al_Quwaitiyah*, XXIX/232.

Fuqaha' bekata: Tidak boleh bagi *Sa'i* menjual sedikit pun dari harta zakat tanpa alasan darurat, namun ia harus menyampaikannya kepada para *Mustahiq* sesuai bentuk/keadaannya, bila ia diserahi membagikannya kepada mereka, karena penerima zakat adalah orang dewasa yang tidak ada *wilayah*/penguasaan terhadap mereka, sehingga tidak boleh menjual harta mereka tanpa seizinnya, atau menyampaikannya kepada Imam bila ia tidak diserahi untuk membagikannya kepada mereka. Jika menjual zakat tanpa alasan darurat, maka ia harus menanggung. Jika ada alasan darurat harus menjual zakat, seperti khawatir matinya sebagian hewan zakat, ada kekhawatiran di jalan, butuh pengembalian tambalan, butuh biaya pemindahan, atau semisalnya, maka boleh menjualnya karena darurat.

Amil harus menyerahkan harta zakat kepada *Mustahiqin* sesuai aturan *syar'i*, sebagaimana berikut:

1. Fakir dan miskin yang mempunyai keahlian (pekerjaan) tertentu diberi bagian zakat untuk membeli peralatan sesuai keahliannya–atau dibelikan peralatannya secara langsung–; yang pandai berdagang diberi modal secukupnya; sedangkan yang tidak mempunyai keahlian tertentu dan tidak pandai berdagang diberi zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya sampai umur *ghalib* (60 th), yaitu diberi zakat yang kemudian dibelanjakannya untuk membeli lahan pertanian, hewan ternak dan semisalnya, sehingga dengannya mereka tidak bergantung pada zakat–dalam konteks ini imam (pemerintah) boleh memaksa mereka membeli lahan pertanian, hewan ternak dan semisalnya, dan melarang mengeluarkannya dari hak milik mereka.
2. *Mukatab* (budak yang telah berakad untuk mencicil tebusan bagi kemerdekannya) dan *gharim* (orang yang punya hutang), diberi bagian zakat yang dapat melunasi hutang yang belum mampu dilunasinya.
3. *Ibnu Sabil* (musafir), diberi bagian zakat yang bisa mengantarkannya ke tempat tujuan atau tempat hartanya.
4. *Ghazi* (orang yang berperang *fi sabilillah*), diberi bagian zakat yang mencukupi kebutuhannya selama pergi, bermukim dan pulang berperang.
5. *Mu'allaf* diberi bagian zakat sesuai kebijakan imam atau *muzaki*.
6. *Amil*, diberi bagian zakat sesuai umumnya upah kerjanya.

Dalam *Fath al-Wahhab* dan *Hasyiyah al-Jamal* dijelaskan:

(وَيُعْطَى فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ) إِذَا لَمْ يُحْسِنَا الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ) أَيْ بِمَا أُعْطِيَاهُ (عَقَارًا يَسْتَغِلَّانِهِ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ

وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذٰلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَاتِهَا أَوْ بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مِمَّا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مَا يَفِي رِبْحُهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا .. (وَ) يُعْطِيْ (مُكَاتَبًا وَغَارِمًا) لِغَيْرِ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ (مَا عَجَزَا عَنْهُ) مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِمَا (وَ) يُعْطَى (ابْنُ سَبِيلٍ مَا يُوصِلُهُ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ (أَوْ مَالَهُ) إِنْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ مَالٌ فَلَا يُعْطِي مُؤْنَةَ إِيَابِهِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مُؤْنَةَ إِقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ (وَ) يُعْطَى (غَازٍ حَاجَتَهُ) فِي غَزْوِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً لَهُ وَلِعِيَالِهِ وَقِيمَةَ سِلَاحٍ وَقِيمَةَ فَرَسٍ إِنْ كَانَ يُقَاتِلُ فَارِسًا (ذِهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً) وَإِنْ طَالَتْ لِأَنَّ اسْمَهُ لَا يَزُولُ بِذٰلِكَ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ (وَيَمْلِكُهُ) فَلَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إِلَّا مَا فَضَلَ عَلَى مَا مَرَّ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهُ السِّلَاحَ وَالْفَرَسَ وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ وَوَقَفَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا مِنْ هٰذَا السَّهْمِ وَيَقِفَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ (وَيُهَيَّأُ لَهُ مَرْكُوبًا) غَيْرَ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (إِنْ لَمْ يُطِقِ الْمَشْيَ أَوْ طَالَ سَفَرُهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصُرَ وَهُوَ قَوِيٌّ (وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إِنْ لَمْ يَعْتَدْ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا) بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوِ اعْتَادَ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا وَيَسْتَرِدُّ مَا هُيِّئَ لَهُ إِذَا رَجَعَ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِيُهَيَّأُ (كَابْنِ سَبِيلٍ) فَإِنَّهُ يُهَيَّأُ لَهُ مَا مَرَّ فِي الْغَازِي بِشَرْطِهِ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ إِذَا رَجَعَ وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ أَوِ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ وَالْعَامِلُ يُعْطَى أُجْرَةَ مِثْلِهِ فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ.

(قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ عَقَارًا) فَإِنِ اشْتَرَيَا بِهِ غَيْرَ عَقَارٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا كَابْنِ حَجَرٍ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا إِلَخْ هٰذَا الْحُكْمُ لَيْسَ فِي الشَّرْحَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِمَا حُكْمٌ آخَرُ هُوَ أَنَّ الْفَقِيرَ إِذَا اشْتَرَى الْعَقَارَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ وَمِثْلُهُ حج وَالْأَقْرَبُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِالشِّرَاءِ وَعَدَمِ إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ لِمَا فِي ذٰلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِمَا فِيهِ مِنْ إِجْبَارِ الرَّشِيدِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ فَلَا يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُلْزِمْهُ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ حَلَّ وَصَحَّ الْإِخْرَاجُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذٰلِكَ مِنْهُ اهـ م ر اهـ سم عَلَى حج وَصَرِيحُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ

بِالشِّرَاءِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنَ الْإِخْرَاجِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَيُقَالُ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْإِلْزَامِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ) أَيْ أَوْ نَحْوَ مَاشِيَةٍ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا اهـ حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الزَّكَاةَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِمَامَ نَائِبُهُ فِي قَبْضِهَا وَيَبْرَأُ الْمَالِكُ بِقَبْضِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ قَبْلَ إِقْبَاضِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ كَلَامًا لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ إِلَخْ) وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ تَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنًا أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ الْوَاحِدَةُ مِنْهَا أُعْطِيَ الْوَاحِدَةَ وَزِيدَ لَهُ بِشِرَاءِ عَقَارٍ يَتِمُّ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر.[23]

(Dan *fakir miskin*) apabila mereka tidak terampil bekerja dengan suatu keahlian dan berdagang, (diberi zakat yang mencukupi kebutuhannya selama usia umumnya, lalu mereka membeli dengannya), maksudnya dengan zakat yang diberikan padanya, (lahan yang dapat dikelolanya), dengan gambaran masing-masing dari mereka membeli lahan yang bisa mendatangkan hasil dan membuat mereka tidak membutuhkan zakat lagi. Telah jelas, bahwa Imam boleh membelikan lahan itu untuknya sebagaimana keterangan dalam *al-Ghazi*/orang yang berperang. Orang yang terampil bekerja dengan suatu keahlian, maka diberi zakat yang bisa digunakannya untuk membeli peralatan pekerjaannya; atau seseorang yang terampil bekerja dengan berdagang, maka diberi zakat yang dapat dipakainya untuk membeli barang dagangan yang dia mahir menjualnya, dan labanya secara umum bisa mencukupi kebutuhannya. (Dan) berilah (*Mukatab* dan *Gharim*) selain *Gharim* yang mendamaikan orang-orang yang bermusuhan dengan indikator yang telah lewat (zakat seukuran harta yang tidak dia mampui) untuk melunasi hutangnya, (dan) berilah (*Ibn Sabil* zakat seukuran harta yang dapat digunakannya untuk sampai ketujuannya), kata تَلِيقُهُ dengan dibaca kasrah huruf *shad*nya, (atau sampai ke tempat hartanya), jika di tengah jalan ia punya harta, sehingga ia tidak diberi zakat untuk biaya pulangnya bila ia tidak bermaksud pulang, dan ini telah jelas, dan tidak diberi zakat untuk biaya tinggalnya yang melebihi masa musafir. (Dan) diberilah (orang yang berperang sesuai kebutuhannya) dalam perang, yang meliputi nafkah dan pakaian

---

[23] Zakriya bin Muhammad al-Anshari dan Sulaiman al-Jamal, *Fath al-Wahhab* dan *Hasyiyah al-Jamal*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, tth.), IV/104-105.

untuk diri dan keluarganya, biaya/harga senjatanya, dan harga kudanya bila ia berkuda (selama pergi, pulang, dan tinggalnya), meskipun lama, karena status *Sabilillah*nya tidak hilang dengannya, berbeda dengan *Ibn Sabil.* (Sultan memberikan hak milik zakat itu kepadanya), sehingga ia tidak boleh menariknya kembali darinya, kecuali harta yang lebih dari pembelanjaan tadi. Imam boleh menyewakan senjata dan kuda untuknya, boleh meminjamkannya dibayar dengan harta yang digunakan untuk membelinya dan mewakafkannya, sebab Imam boleh membelikan kedua barang tersebut dari bagian zakat ini dan mewakafkannya *Fi Sabilillah.*

(Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Lalu mereka membeli lahan dengannya"*), Bila mereka berdua membeli selain lahan dengan zakat yang diberikan kepadanya maka tidak halal dan tidak sah. Demikian dinukil dari *Syarh Syaikhina*, sebagaimana Ibn Hajar. Sekian dari Ali bin Ibrahiam al-Halabi. Ungkapan al-Halabi: "Demikian dinukil dari *Syarh Syaikhina...*", hukum ini tidak ada dalam kedua *Syarh* yang telah disebutkan. Yang ada dalam keduanya justru hukum lain, yaitu orang Fakir bila membeli lahan/tanah dengan zakat yang diberikan kepadanya maka tidak halal baginya, dan tidak sah mengeluarkannya dari hak miliknya. Ungkapan Guru al-Halabi, dan ungkapan Ibn Hajar juga semisal dengannya: *"Yang lebih dekat dengan kebenaran, Ima boleh mewajibkan orang Fakir untuk membeli sesuatu tanah dengan zakat yang diberikan kepadanya, dan mewajibkan agar tidak mengeluarkannya dari kepemilikannya, sebab kemaslahatan umum yang ada di situ. Maka pemaksaan terhadap orang dewasa yang ada di situ tidak dipertimbangkan. Dalam kondisi seperti itu orang fakir tak boleh mengeluarkan zakat yang diberikan kepadanya dari hak miliknya, sehingga tidak halal dan tidak sah menurut pendapat yang kuat. Sekian."* Ungkapan Guru al-Halabi: *"Dalam kondisi seperti itu orang fakir tidak boleh mengelurkan zakat yang diberikan kepadanya"*, pemahamannya bila Imam tidak mewajibkannya untuk tidak mengeluarkannya dari kepemilikannya maka halal dan sah mengeluarkannya, meski dilakukannya berulang-ulang. Sekian dari Imam ar-Ramli. Sekian dari Ibn Qasim al-'Ababdi dalam catatannya atas Ibn Hajar. Secara terang-terangannya adalah perintah Imam untuk membeli sesuatu tidak menetapkan ketercegahannya untuk mengeluarkannya dari kepemilikan. Terkadang hal itu ditangguhkan sehingga dikatakan, bahwa perintah Sultan saja untuk membeli sesuatu sama halnya dengan mewajibkan. Sekian dari Ali Syibramallisi dalam catatannya atas ar-Ramli.

(Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Lahan yang dapat dikelolanya"*), artinya atau semisal hewan peliharaan apabila ia termasuk orang yang dapat memeliharanya. Demikian dari Ibn Hajar. Sekian dari Ali Syibaramalisi dalam catatannya atas ar-Ramli. (Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Telah*

jelas, bahwa Imam boleh membeli lahan itu untuknya sebagaimana keterangan dalam al-Ghazi/orang yang berperang"), lahiriahnya meski sebelum Imam menyerahkan zakat ke fakir miskin. Alasannya ialah Imam merupakan penggantinya untuk menerima zakat dan pemilik harta menjadi bebas tanggungan membayar dengan zakatnya telah diterima Imam. Lain halnya dengan pemilik harta, maka telah jelas bahwa ia tidak boleh membelikan sesuatu untuk fakir miskin sebelum menyerahkan zakatnya kepadanya. Kemudian aku melihat ungkapan Guruku dalam *Syarh al-Minhaj*, maka rujuklah dan renungkanlah. Sekian dari Ahmad ibn Qasim al-'Abbadi.

(Ungkapan Zakariya al-Anshari: *"Orang yang terampil bekerja dengan suatu keahlian ..."*). Andai ia terampil bekerja dengan lebih dari satu keahlian dan masing-masing keahliannya dapat mencukupinya, maka ia diberi harta untuk membayarnya atau untuk menjadi modal minimalnya. Bila sebagian keahliannya telah mencukupi, maka ia diberi zakat sejumlah harta yang cukup untuk membeli alat-alatnya. Bila satu keahliannya tidak mencukupi, maka ia diberi zakat untuk membeli alat satu keahliannya dan ditambah dibelikan lahan yang dapat menggenapi pemasukannya selama umur umumnya manusia menurut pendapat yang kuat. Sekian dari *Syarh ar-Ramli*.

Daftar Pustaka Ketentuan Amil Zakat

Al-Andalusi, Abdul Haq bin Ghalib. 1422 H/2001 M. *Al-Muharrar al-Wajiz fi at-Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. 1414 H/1993 M. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.*

Wazarah al-Auqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyah. 1414 H/1993 M. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah,* Kuwait: Dar ash-Shafwah.

Al-Ghazi, Ibn Qasim. Tth. *Fath al-Qarib* pada *Hasyiyah al-Bajuri,* Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

Al-Anshari, Zakariya. *Asna al-Mathalib.*

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Hawi al-Kabir.*

Asy-Syirbini, Muhamamd al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj.*

Ar-Ramli dan Syibramalisi, Ali. *Nihayah al-Muhtaj* dan *Hasyiyah Ali Syibramalisi.*

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Tth. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,* ttp.: al-Muniryah

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Hawi al-Kabir.*

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah.*

Al-Anshari, Zakariya bin Muhammad. 1418 H. *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab,* Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm.*

Ziyad, Ibn. *Ghayah Talkhish al-Murad* pada *Bughyah al-Mustarsyidin.*

Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad. *Bughyah al-Mustarsyidin.*

As-Suyuthi, Abdurrahman bin Abi Bakr. *Al-Hawi li al-Fatawa.*

Al-Haitami, Ibn Hajar, dan al-'Abbadi, Ibn Qasim. Tth. *Tuhfah al-Muhtaj* dan *Hawasyi Ibn Qasim al-'Abbadi,* Mesir: at-Tijariyah al-Kubra.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*

Al-Anshari, Zakriya bin Muhammad, dan al-Jamal, Sulaiman. Tth. *Fath al-Wahhab* dan *Hasyiyah al-Jamal,* Bairut: Dar Ihya` at-Turats al-'Arabi.

KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL
QANUNIYAH

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL KONFERENSI WILAYAH PWNU JAWA TIMUR 2013

di PP Bumi Shalawat Lebo Sidoarjo 31 Mei-02 Juni 2013

1. Wasiat *Wajibah*
2. Memperjelas Status *Dar* dan *Daulah* Indonesia
3. Penyitaan Aset sebagai Sanksi Tindak Pidana
4. Pakta Integritas Anti Poligami

KOMISI C
Qanuniyah

MUSHAHIH

KH. Hasyim Abbas, M.HI

PERUMUS

KH. Muhlis Dimyati
K. Anang Darunnaja

MODERATOR

KH. Azizi Hasbulloh

NOTULEN

KH. Achmad Shampton Masduqie

1. Wasiat *Wajibah*

Deskripsi Masalah

Pasal 209 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia membuka peluang terhadap orang tua angkat untuk diberikan "wasiat wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Pada ayat (2) membuka peluang wasiat *wajibah* terhadap anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Semangat pengaturan hukum tersebut mengadopsi penafsiran QS. al-Baqarah: 180 versi madzhab Zhahiri sekira ayah/ibu kandung terhalang untuk menerima hak waris atau sekira kerabat termasuk anak kandung terhalang karena berbeda agama (Islam) dengan pewaris sesuai pasal 171 ayat C, demikian pula cucu terhalang (*mahjub*) oleh anak kandung. Seperti diatur dalam *qonun al-wasiyah* negara Mesir pasal 71 tahun 1946. Wasiat *wajibah* versi *Qanun* Mesir tersebut mendasarkan diri pada madzhab Abu Hanifah.

Pengaturan wasiat *wajibah* dalam KHI tercermin merekayasa Hukum adad atau *Burgerlijk Wetboek* yang memperlakukan ayah/ibu angkat dan anak angkat sejajar dengan ayah ibu/kandung. Perlakuan hukum demikian mencitrakan perlawanan dengan QS. al-Ahzab: 4:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)."

Dan sebab turunnya QS. al-Ahzab: 4 terkait anak angkat Zahid bin Haritsah. Dalam QS. al-Ahzab: 40 disebutkan:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Pertanyaan

a. Agar landasan legitimasi *(istidlal)* hukumnya berakar pada pemahaman deduktif terhadap al-Quran dan *Madzahib al-Arba'ah* serta *i'tha'i kuli haqq haqqah* bagaimana rumusan untuk merevisi yang pas dan *manhaj*nya? Apakah perlu direvisi atau rumusan tersebut sudah valid?

b. Atau cukup menghimbau ahli waris agar berinisiatif menghibahkan sebagian *tirkah* Pewaris kepada orang tua angkat/anak angkat selaras

dorongan perintah QS. an-Nisa': 8 ? Solusi demikian dimaksud agar terhindar dari hukum dasar wasiat itu mubah (*karitatif*) dan agar proses alih pemilikan *tirkah* berlangsung secara kekeluargaan.

c. Adakah upaya hukum lain agar ahli waris tidak terjebak pada rekayasa menjurus pada sikap berat sebelah atau berbuat salah seperti disorot oleh QS. al-Baqarah: 182.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

"Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara'."

d. Tepatkah jika penetapan hukum waris tidak lebih dari sepertiga pada cucu (*ibnu bintin* atau *ibnu ibnin*) yang orang tuanya wafat sebelum *jad* atau *jaddah* sehingga *mahjub* dengan *a'mam* dengan mengadopsi pada *Qonun* Mesir atau Palestina, atau ada solusi lain?

Jawaban

Wasiat *wajibah* terhadap anak angkat tidak memiliki dasar hukum mengingat *Qanun* Mesir yang dinyatakan mengikuti madzhab Hanafi tidak menyentuh masalah anak angkat, dan karenanya pasal wasiat *wajibah* untuk atas nama anak angkat sebaiknya dihapus. Sedangkan wasiat terhadap orang tua angkat atau anak angkat harus dikembalikan hukum asal objek wasiat itu sendiri. Sedangkan QS. al-Baqarah ayat 182 tidak menyentuh permasalahan anak atau orang tua angkat.

Adapun penjelasan KHI tentang wasiat *wajibah* bagi orang tua atau kerabat yang tidak mendapat warisan dapat direvisi dengan adanya jawaban adalah sebagaimana berikut:

a. Ulama telah bersepakat bahwa kebolehan wasiat terhadap orang tua dan kerabat yang mendapat warisan telah di*mansukh* dengan adanya ayat *mawarits* yang dipertegas dengan hadits *masyhur*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّيْ لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَسِيْلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا. فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ. أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. (فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري).

Dari Anas bin Malik, beliau berkata: *"Sungguh aku berada di bawah*

onta Rasulullah ﷺ yang mengeluarkan air liur padaku. Kemudian aku mendengar beliau bersabda: "Sungguh Allah telah memberikan hak pada setiap orang yang berhak. Ingatlah tidak ada wasiat bagi ahli waris." (Dalam *az-Zawaid* sanadnya shahih. Muhammad bin Syuaib, Rahim dan Abu Dawud menilainya *tsiqah*. Para perawi lainnya menetapi syarat al-Bukhari).

b. Namun ulama masih berselisih pendapat dalam wajibnya wasiat terhadap kerabat yang tidak dapat warisan dengan dua pendapat. *Pertama,* ulama yang berpendapat *al-ashah* wasiat terhadap kerabat yang tidak dapat warisan tidak wajib tapi *mustahab*; *kedua,* pendapat *muqobil ashah* mengatakan wajibnya wasiat masih berlaku pada orang tua dan kerabat yang tidak dapat warisan dengan tidak lebih dari sepertiga.

Keputusan pemerintah sebagaimana tertuang dalam KHI yang memilih pendapat yang *muqobilul ashah* bahwa kerabat yang tidak mendapat warisan bisa mendapat wasiat *wajibah* dengan pertimbangan di atas dan dengan dasar *hukmul hakim yarfa'ul hilaf* dapat diterima dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 tetapi tidak kurang dari bagian dari ayahnya dengan pertimbangan:

a. Dalam *Qanun* Mesir dijelaskan bahwa wasiat terhadap kerabat hukumnya sunnah menurut *jumhurul ulama* di antaranya adalah *madzahibul arbaah*, dan wasiat terhadap kerabat yang tidak mendapat warisan disebabkan *mahjub* atau berbeda agama hukumnya wajib menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Hazm, Adz-Dzahiri, Tobari, Abi Akrin bin Abdil Aziz dari Hanabilah jika mayit belum melaksanakan wasiatnya maka bagi ahli waris atau orang yang diwasiati wajib mengeluarkan sebagian *tirkah* tanpa dibatasi tertentu kepada orang tua atau kerabat yang tidak dapat waris, dari perbedaan pendapat tersebut *qonun* Mesir memilih pendapat yang kedua sebagai dasar legalitas wasiat *wajibah* terhadap cucu yang orang tuanya meninggal ketika ayah atau ibu mereka masih hidup atau mati bersama seperti tenggelam, sementara aturan warisan Islami cucu tidak dapat warisan karena terhalang dengan *a'mam* dan *ammat* mereka yang masih hidup tanpa ada kesalahan yang diperbuat cucu tersebut pada hal kadang terjadi mereka dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan sementara *a'mam* dan *ammat* dalam kondisi serba cukup, *qonun* memandang pendapat tersebut adalah *al-mukhtar*.

b. *Ruhus syara'* yang mewajibkan orang yang punya harta lebih berkewajiban membantu pada orang yang membutuhkan tanpa ada ganti rugi sebagaimana dalam *Is'ad ar-Rafiq*, 105:

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ الْبَذْلُ لِلْمُحْتَاجِ بِلَا بَدَلٍ مِمَّا زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ سَنَةً وَلِلْمُضْطَرِّ مِمَّا لَمْ يَحْتَجْهُ حَالًا وَلَوْ فَقِيرًا لَكِنْ بِبَدَلٍ.

Kesimpulan sungguh wajib menyerahkan harta yang melebihi kecukupannya selama setahun kepada orang yang membutuhkan tanpa ganti; dan wajib menyerahkan harta yang tidak dibutuhkannya seketika kepada orang yang dalam kondisi darurat, meskipun pemiliknya fakir akan tetapi dengan ganti.

c. *Al-Akhdhu bil al-maslahah* (mengambil kemaslahatan).

d. Tidak ada dosa bagi cucu karena ditinggal wafat orang tuanya sebelum wafatnya *al-muwarrits (al-jad)* sehingga harus menanggung dua penderitaan hilangnya orang tua dan hidup dalam kekurangan. *Qanun al-Mesir* memberi alternatif jika tidak mendudukkan cucu sebagai ganti orang tuanya yang meninggal maka mewajibkan *jad* berwasiat tidak melebihi sepertiga dengan mengacu pada QS. al-Baqarah: 180.

Dalam *Qanun* Palestina wasiat *wajibah* terhadap cucu yang orang tuanya wafat sebelum *jad al-muwaris* sehingga *mahjub* dengan *'am*nya berlandaskan pendapat madzhab Hanafi dibatasi dengan sepertiga, dengan catatan mayat belum memberi sesuatu kepada cucu tersebut dengan cuma-cuma dengan ukuran yang diwajibkan kepadanya, jika kurang harus disempurnakan. Demikian pula jika wasiat kurang dari yang wajib maka harus disempurnakan. Jika lebih maka lebihnya tidak sah.

Pendapat *al-Ashah* yang didukung ulama dan *shahabat* menyatakan tidak ada wasiat yang wajib. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang di*mansukh* hanya wasiat kepada orang tua dan kerabat yang mendapat warisan sedangkan syariat wasiat kepada orang tua dan *qarib* yang *mahjub* masih tetap berlaku telah didukung dengan pendapat ulama dan *shahabat*.

Pendekatan Manhaj

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa wasiat kepada orang tua dan *qarib* yang tidak mendapat warisan tersebut tidak *mansukh* didasari *manhaj* sebagaimana berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. (النساء: ٨).

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa': 8)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة: ١٨٠)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Kewajiban memberi kepada kerabat yang bukan waris dalam QS. an-Nisa: 8 dan wajibnya wasiat terhadap selain waris dalam QS. al-Baqarah: 180 menurut pendapat ath-Thabari tidak *mansukh* dengan ayat *mawarits* karena:

a. Tidak adanya dalil dari al-Qur'an atau al-Hadits yang menjelaskan dengan tegas bahwa ayat tersebut *mansukh*,
b. Hukum Allah yang ditetapkan dalam al-Qur'an atau al-Hadits tidak boleh dikatakan sebagai *nasikh* hukum lain atau di*naskh* kecuali ada dua hukum yang saling menafikan kepada yang lain yang tidak dapat dipadukan dalam satu waktu dengan cara apapun kecuali jika benar-benar ada *hujjah* yang kuat, maka harus diterima adanya.

Jika kedua ayat tersebut tidak *mansukh* maka memungkinkan adanya *interpretasi* atau takwil sebagaimana berikut:

a. Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin ketika membagi warisan agar menyambung *rahim*nya dan anak-anak yatim dari wasiat; jika tidak ada maka dari harta warisan.
b. Ketika dalam waktu pembagian warisan telah hadir *qarabat*, *yatama* dan *masakin*, maka berwasiatlah kepada *qarabat* yang tidak mendapat warisan, dan berkatalah yang baik terhadap *yatama* dan *masakin*, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain: QS. al-Baqarah: 180.

Manhaj kedua yakni pendapat *al-Ashah*, bahwa wasiat terhadap orang tua dan *qarib* adalah sunah. Interpretasi pendapat yang mengatakan wasiat kepada orang tua dan *qarib* yang tidak dapat warisan tidak *mansukh* berpijak bahwa wasiat dalam awal Islam hukumnya wajib terhadap orang tua dan *qarib*, kemudian orang tua dan *qarib* yang dapat waris telah *mansukh*, dan tinggal wasiat kepada orang tua dan *qarib* hukumnya *mustahab*. Jika berbijak bahwa wasiat dalam awal Islam sunah maka ayat perintah wasiat pada waris telah *mansukh*, tinggal yang tidak dapat waris maka masih tetap sunah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Washiyah al-Wajibah 'ala Madzhab al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man*, 1 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

الْوَصِيَّةُ : اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ تُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الْمُوصَى بِهِ، وَاصْطِلَاحًا: تَمْلِيكُ مَالٍ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَعَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً.

Wasiat adalah bentuk kata *masdar* yang berarti pesan yang diucapkan pada sesuatu yang diwasiatkan. Menurut istilah wasiat ialah memberi kepemilikan sebuah harta yang disandarkan pada saat setelah kematian dan atas dasar sukarela karena Allah; baik harta tersebut berupa benda atau manfaat.

b. *Hasyiyah al-'Adawi*, II/290:

وَحَاصِلُ الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمَنْ لَهُ مَالٌ أَنْ يُوصِيَ إِذَا كَانَ بِقُرْبَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَقَدْ تَجِبُ إِذَا كَانَ يَخْشَى بِعَدَمِهَا ضَيَاعَ الْحَقِّ عَلَى أَرْبَابِهِ وَتَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا كَالْإِيصَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَتُكْرَهُ بِمَكْرُوهٍ أَوْ فِي مَالٍ فَقِيرٍ (وَتُبَاحُ) إِذَا كَانَتْ بِمُبَاحٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ وَإِنْفَاذُهَا يَنْقَسِمُ إِلَى تِلْكَ الْأَقْسَامِ أَيْ مِنَ الْمُوصِي نَفْسِهِ وَأَمَّا مُتَوَلِّي أَمْرِ التَّرِكَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَنْفِيذُهُ حَتَّى الْمُبَاحَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ كَالْإِيصَاءِ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى قَبْرِهِ قَوْلُهُ (يُوصِي فِيهِ) أَيْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ احْتَرَزَ عَنْ مَالٍ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دُيُونٌ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِمَا فِيهِ قُرْبَةٌ حِينَئِذٍ إِذْ قَضَاؤُهَا وَاجِبٌ لَا مُحْتَرَزُهُ مَا كَانَ قَلِيلًا مِمَّا يَأْتِي بَيَانُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الخ فَتَدَبَّرْهُ.

Kesimpulan: Maksud dari hal itu adalah sungguh orang yang memiliki harta disunahkan berwasiat bila dalam bentuk *qurbah* yang tidak wajib; dan terkadang wajib apabila khawatir tersia-sianya hak bagi pemiliknya jika tidak dilakukan. Wasiat diharamkan dengan perkara yang haram seperti ratapan dan semisalnya, seperti mewasiatkan dengan shalat dan puasa. Dimakruhkan dengan perkara yang dimakruhkan atau dalam harta fakir (dan mubah) apabila wasiat dengan perkara yang mubah seperti penjualan atau pembelian. Adapun pelaksanaan wasiat terbagi menjadi beberapa bagian; maksudnya dari *mushi* sendiri. Sedangkan orang yang menguasai urusan harta peninggalan setelah *mushi* meninggal maka wajib melaksanakannya hingga perkara mubah dan makruh seperti mewasiatkan bacaan di atas pemakaman. Ungkapan Abu al-Hasan al-Maliki (*berwasiat di dalamnya*) maksudnya boleh diwasiatkan. Menurut dhahir sungguh mengecualikan dari harta yang tidak boleh diwasiatkan,

seperti mayat mempunyai beberapa hutang; maka tidak boleh wasiat dengan perkara yang berbentuk *qurbah* ketika begitu. Karena membayar hutang itu wajib, tidak terkecuali perkara yang sedikit dari perkara yang penjelasannya akan datang dari Ali dan lainnya. Maka tidak menafikan ungkapannya yang akan datang. Menurut dhahir kalamnya ... Maka angan-anganlah!

c. *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh ath-Thalib*, III/29:

وَشَرْعًا تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِتَدْبِيرٍ وَلَا تَعْلِيقِ عِتْقٍ وَإِنْ الْتَحَقَا بِهَا حُكْمًا كَالتَّبَرُّعِ الْمُنَجَّزِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَوِ الْمُلْتَحَقِ بِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ أَيْ مَا الْحَزْمُ أَوْ مَا الْمَعْرُوفُ مِنَ الْأَخْلَاقِ إِلَّا هَذَا فَقَدْ يُفَاجِئُهُ الْمَوْتُ وَكَخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الْوَصِيَّةَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَتُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ وَكَانَتْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةً لِلْأَقَارِبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ الْآيَةَ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهَا بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ وَبَقِيَ اسْتِحْبَابُهَا فِي الثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ الْوَارِثِ لِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْآتِي الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَحَجٍّ أَوْ حَقٌّ لِآدَمِيِّينَ كَوَدِيعَةٍ وَمَغْصُوبٍ بِلَا شُهُودٍ بِالْحَقِّ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِهِ شُهُودٌ فَلَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُمْ كِتْمَانَهُ كَالْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ.

Menurut syara' wasiat adalah kebaikan terkait hak yang disandarkan meskipun secara kira-kira pada kejadian setelah meninggal, tidak dengan mengatur dan tidak menggantungkan kemerdekaan meskipun keduanya bertemu dengannya secara hukum seperti kebaikan yang dilaksanakan ketika sakit hendak meninggal atau yang disamakan dengannya. Hukum asal wasiat sebelum *ijma'* adalah firman Allah ﷻ: "*Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya.*" Dan beberapa *khabar* seperti *khabar shahihain*: "*Tidak ada hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang diwasiatkan selama dua malam kecuali wasiatnya di catat di sisinya.*" maksudnya tidak mantap atau tidak diketahui mengenai akhlak kecuali hal ini. Maka terkadang kematian datang secara tiba-tiba dan seperti *khabar* ibn Majah: "*Perkara yang diharamkan ialah orang yang mengharamkan wasiat; barangsiapa yang hendak meninggal seraya*

menetapi wasiat maka ia meninggal dalam kondisi menetapi jalan, sunnah, taqwa dan syahadah serta meninggal dalam kondisi diampuni." Pada awal Islam wasiat wajib bagi para kerabat, sebab firman Allah ﷻ: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat."* al-Ayat. Kemudian kewajibannya di*naskh* dengan ayat-ayat *mawarits* dan kesunahannya masih tetap dalam 1/3 atau kurang bagi ahli waris karena *khabar* Sa'd bin Abi Waqash yang akan datang: *"Wasiat itu wajib bagi orang yang memiliki hak Allah ﷻ seperti zakat dan haji atau hak Adami seperti titipan, ghashab tanpa saksi dengan hak dalam ini dan sebelumnya."* Lain dengan persoalan apabila ada saksi-saksi, maka tidak wasiat wajib dengannya. Al-Adzra'i berkata: *"Jika tidak dikhawatirkan menyembunyikannya di antara mereka seperti warisan dan perkara yang diwasiatkan."*

d. *Syarh Zad al-Mustaqni' li asy-Syanqithi*, VIII/77 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

أَمَّا الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَةُ: فَإِذَا كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ حُقُوقٌ، كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ يَكُونَ لِإِنْسَانٍ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ هَذِهِ الْحُقُوقَ كَامِلَةً لِأَصْحَابِهَا، وَيَأْمُرَ بِرَدِّهَا لِأَصْحَابِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَسَاهَلَ فِي هَذَا.

Adapun wasiat yang wajib adalah apabila ada hak pada insan seperti memiliki hutang atau ada orang lain yang memiliki hak atasnya, maka wajib mencatat hak-hak ini secara sempurna bagi pemilik-pemiliknya dan memerintahkan agar mengembalikan pada pemiliknya. Tidak boleh bagi manusia menganggap mudah dalam urusan ini.

e. *Tafsir at-Thabari*, II/71:

وقوله فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة ١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا وَهُوَ أَنْ يَمِيلَ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ خَطَأً مِنْهُ أَوْ يَتَعَمَّدَ إِثْمًا فِي وَصِيَّتِهِ بِأَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ بِهِ مِنْ مَالِهِ، وَغَيْرَ مَا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِهِ مِمَّا جَاوَزَ الثُّلُثَ، أَوْ بِالثُّلُثِ كُلِّهِ، وَفِي الْمَالِ قِلَّةٌ، وَفِي الْوَرَثَةِ كَثْرَةٌ، فَلَا بَأْسَ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الَّذِينَ يُوصَى لَهُمْ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ، بِأَنْ يَأْمُرَ الْمَيِّتَ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُعَرِّفَهُ مَا أَبَاحَ اللهُ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ، وَيَنْهَاهُ أَنْ يُجَاوِزَ فِي وَصِيَّتِهِ الْمَعْرُوفَ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِهِ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَذٰلِكَ هُوَ الْإِصْلَاحُ الَّذِيْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ لِمَنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ وَكَثْرَةٌ، وَفِي الْوَرَثَةِ قِلَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْصُرَ فِيْ وَصِيَّتِهِ لِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيْهِ عَنْ ثُلُثِهِ، فَأَصْلَحَ مَنْ حَضَرَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ وَبَيْنَ وَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيْهِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ لَهُمْ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمَرِيْضَ أَنْ يَزِيْدَ فِيْ وَصِيَّتِهِ لَهُمْ، وَيَبْلُغَ بِهَا مَا رَخَّصَ اللهُ فِيْهِ مِنَ الثُّلُثِ، فَذٰلِكَ أَيْضًا هُوَ مِنَ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ.

وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا هٰذَا الْقَوْلَ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَالَ: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا يَعْنِيْ بِذٰلِكَ: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ أَنْ يَجْنَفَ أَوْ يَأْثَمَ. فَخَوْفُ الْجَنَفِ وَالْإِثْمِ مِنَ الْمُوْصِيْ إِنَّمَا هُوَ كَائِنٌ قَبْلَ وُقُوْعِ الْجَنَفِ وَالْإِثْمِ، فَأَمَّا بَعْدَ وُجُوْدِهِ مِنْهُ فَلَا وَجْهَ لِلْخَوْفِ مِنْهُ بِأَنْ يَجْنَفَ أَوْ يَأْثَمَ، بَلْ تِلْكَ حَالُ مَنْ قَدْ جَنَفَ أَوْ أَثِمَ، وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ مَعْنَاهُ قِيْلَ: فَمَنْ تَبَيَّنَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، أَوْ أَيْقَنَ أَوْ عَلِمَهُ، وَلَمْ يَقُلْ فَمَنْ خَافَ مِنْهُ جَنَفًا. فَإِنْ أَشْكَلَ مَا قُلْنَا مِنْ ذٰلِكَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ فَقَالَ: فَمَا وَجْهُ الْإِصْلَاحِ حِيْنَئِذٍ وَالْإِصْلَاحُ إِنَّمَا يَكُوْنُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِيْنَ فِي الشَّيْءِ؟ قِيْلَ: إِنَّ ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَعَانِي الْإِصْلَاحِ، فَمِنَ الْإِصْلَاحِ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ فِيْمَا كَانَ مَخُوْفًا حُدُوْثُ الْاِخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِيْهِ بِمَا يُؤْمَنُ مَعَهُ حُدُوْثُ الْاِخْتِلَافِ لِأَنَّ الْإِصْلَاحَ إِنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ الَّذِيْ يَكُوْنُ مَعَهُ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَسَوَاءٌ كَانَ ذٰلِكَ الْفِعْلُ الَّذِيْ يَكُوْنُ مَعَهُ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ قَبْلَ وُقُوْعِ الْاِخْتِلَافِ أَوْ بَعْدَ وُقُوْعِهِ.

Firman Allah: *"(Akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. al-Baqarah: 182). Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa; yaitu condong pada selain hak yang salah darinya atau sengaja berdosa dalam wasiatnya; dengan gambaran berwasiat pada kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya yang tidak mewarisinya dengan lebih dari ketentuan yang dibolehkan berwasiat dari hartanya dan selain ketentuan yang diizinkan Allah dari kadar yang melebihi 1/3 atau 1/3 utuh. Dan dalam sedikitnya harta dan dalam banyaknya

warisan, maka tak ada masalah bagi orang yang dihadiri perdamaian di antara orang-orang yang diwasiati dan di antara ahli waris mayat dan di antara mayat. Dengan gambaran mayat memerintahkan hal itu dengan kebaikan, memberitahukan perkara yang diperbolehkan Allah dalam hal tersebut, mengizinkan padanya berwasiat dan mencegahnya melewati batas wasiat yang bagus sebagaimana difirmankan Allah ﷻ yang disebutkan dalam kitab-Nya: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf."* Hal itu adalah perdamaian, sebagaimana difirmankan Allah ﷻ yang menyebutkan: *"Lalu mendamaikan di antara mereka maka tidak ada dosa baginya."* Begitu juga bagi orang yang memiliki kelebihan dan banyak harta, dan sedikit dalam warisan, lalu menghendaki meringkas dalam wasiatnya pada kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya dari 1/3-nya, lalu mendamaikan orang yang dihadiri di antaranya dan di antara ahli warisnya, di antara kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya yang ia kehendaki berwasiat pada mereka; dengan gambaran memerintahkan orang sakit agar menambah wasiatnya pada mereka. Dan menyampaikan perkara yang dimurahkan Allah dari 1/3. Maka hal itu juga merupakan perdamaian di antara mereka dengan *ma'ruf.* Bahwasanya kita memilih *qaul* ini karena sungguh Allah ﷻ menuturkannya seraya berfirman: *"(Akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa."* Maksudnya: Barangsiapa khawatir kepada orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa. Maka khawatir berlaku berat sebelah dan berbuat dosa terhadap orang yang berwasiat itu terjadi sebelum berlaku berat sebelah atau berbuat dosa. Adapun setelah wujud berlaku berat sebelah atau berbuat dosa darinya maka tidak ada *wajah* khawatir darinya; dengan gambaran berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, bahkan itu ialah kondisi orang yang sungguh berlaku berat sebelah atau berbuat dosa. Jika maknanya demikian maka dikatakan: *"Barangsiapa memperjelas berlaku berat sebelah atau berbuat dosa terhadap orang yang berwasiat, meyakini atau mengetahui."* Tidak berkata: *"Barangsiapa khawatir berlaku berat sebelah terhadapnya. Jika memusykilkan perkara yang kita katakan mengenai hal itu pada sebagian manusia,"* lantas berkata: *"Apa bentuk perdamaian ketika demikian. Sementara perdamaian itu berada di antara dua orang yang berselisih dalam sesuatu?"* Maka dikatakan: Sungguh hal itu meski termasuk makna-makna perdamaian. Di antara makna perdamaian adalah perdamaian di antara dua golongan yang dikhawatirkan terjadinya perselisihan di antara mereka dengan perkara yang diamankan timbulnya perselisihan. Karena sungguh perdamaian itu adalah tindakan berupa perdamaian di antara orang yang berselisih.

Baik tindakan tersebut bersama perdamaian orang yang bersengketa sebelum terjadinya perselisihan atau setelah terjadi.

f. *Zad al-Masir*, I/164:

وَالْعُلَمَاءُ مُتَّفِقُوْنَ عَلَى نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ. وَالْأَقْرَبِيْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ وَهُمْ مُخْتَلِفُوْنَ فِي الْأَقْرَبِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَرِثُوْنَ: هَلْ تَجِبُ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ لِأَحَدٍ.

Ulama sepakat atas *naskh* wasiat pada kedua orang tua dan para kerabat yang mewarisi. Mereka berbeda pendapat mengenai kerabat yang tidak mewarisi. Apakah wajib wasiat pada mereka? Ada dua *qaul*. Menurut *ashah* sungguh wasiat itu tidak wajib bagi seseorang.

g. *Tafsir al-Mawardi an-Nukat wa al-'Uyun*, I/231-232 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

(قَوْلُهُ ﷻ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) ... وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ثُبُوْتِ حُكْمِ هٰذِهِ الْآيَةِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِهَا كَانَ وَاجِبًا قَبْلَ فَرْضِ الْمَوَارِيْثِ لِئَلَّا يَضَعَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْبُعَدَاءِ طَلَبًا لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيْثِ فِي تَعْيِيْنِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ، وَتَقْدِيْرِ مَا يَسْتَحِقُّوْنَ، نُسِخَ بِهَا وُجُوْبُ الْوَصِيَّةِ وَمَنَعَتِ السُّنَّةُ مِنْ جَوَازِهَا لِلْوَرَثَةِ. وَقَالَ آخَرُوْنَ: كَانَ حُكْمُهَا ثَابِتًا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ حَقٌّ وَاجِبٌ. فَلَمَّا نَزَلَتْ آيُ الْمَوَارِيْثِ وَفُرِضَ مِيْرَاثُ الْأَبَوَيْنِ نُسِخَ بِهَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَكُلِّ وَارِثٍ، وَبَقِيَ فَرْضُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَرِثُوْنَ عَلَى حَالِهِ، وَهٰذَا قَوْلُ الْحَسَنِ، وقتادة، وطاوس، وجابر بن زيد.

(Firman Allah ﷻ : *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian"*)... Ahli ilmu berbeda pendapat terkait tetapnya hukum yang ada di ayat ini (al-Baqarah: 180). *Jumhur Ulama* dari generasi *Tabi'in* dan *Fuqaha* menyatakan, bahwa mengamalkan wasiat hukumnya wajib sebelum membagi beberapa bagian ahli waris, agar orang tidak menasarufkan hartanya kepada orang-orang yang jauh karena berharap *sum'ah* dan *riya'*. Pada saat ayat *mawaris* turun dalam menentukan para *mustahiq* dan mengira-ngirakan perkara yang menjadi hak maka kewajiban wasiat di*naskh* dengannya dan kesunahan boleh wasiat pada ahli waris dicegah. Ulama lain berpendapat, hukum ayat tersebut tetap dalam wasiat pada kedua orang tua dan para kerabat hak yang wajib. Pada saat ayat-ayat *mawaris* turun dan warisan orang tua

difardhukan, maka wasiat di*naskh* bagi kedua orang tua dengannya, dan masih tetap kefardhuan wasiat bagi para kerabat yang mewarisi pada suatu kondisi. Menurut *qaul* Hasan, Qatadah, Thawus, Jabir bin Zaid.

h. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, X/264 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

الْمُسْتَنَدُ الْفِقْهِيُّ لِلْوَصِيَّةِ الْوَاجِبَةِ وَمُسَوِّغَاتِهَا: بَيَّنْتُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْأَقَارِبِ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ مِنْهُمْ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ إِلَّا بِحَقٍّ لِلهِ أَوْ لِلْعِبَادِ. وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَابْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ وَالطَّبَرِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَاجِبَةٌ دِيَانَةً وَقَضَاءً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَرِثُوْنَ، لِحَجْبِهِمْ عَنِ الْمِيْرَاثِ، أَوْ لِمَانِعٍ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْإِرْثِ كَاخْتِلَافِ الدِّيْنِ، فَإِذَا لَمْ يُوْصِ الْمَيِّتُ لِلْأَقَارِبِ بِشَيْءٍ وَجَبَ عَلَى وَرَثَتِهِ أَوْ عَلَى الْوَصِيِّ إِخْرَاجُ شَيْءٍ غَيْرِ مُحَدَّدِ الْمِقْدَارِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَإِعْطَاؤُهُ لِلْوَالِدَيْنِ غَيْرِ الْوَارِثَيْنِ.

أخذ القانون المصري (م٧٦-٧٩) والسوري (م ٢٥٧) بالرأي الثاني، فَأَوْجَبَ الْوَصِيَّةَ لِبَعْضِ الْمَحْرُوْمِيْنَ مِنَ الْإِرْثِ وَهُمُ الْأَحْفَادُ الَّذِيْنَ يَمُوْتُ آبَاؤُهُمْ فِي حَيَاةِ أَبِيْهِمْ أَوْ أُمِّهِمْ، أَوْ يَمُوْتُوْنَ مَعَهُمْ وَلَوْ حُكْمًا كَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى. فَفِي نِظَامِ الْإِرْثِ الْإِسْلَامِيِّ لَا يَسْتَحِقُّ هٰؤُلَاءِ الْحَفَدَةُ شَيْئًا مِنْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ، لِوُجُوْدِ أَعْمَامِهِمْ أَوْ عَمَّاتِهِمْ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ. لٰكِنْ قَدْ يَكُوْنُ هٰؤُلَاءِ الْحَفَدَةُ فِي فَقْرٍ وَحَاجَةٍ، وَيَكُوْنُ أَعْمَامُهُمْ أَوْ عَمَّاتُهُمْ فِي غِنًى وَثَرْوَةٍ. فَاسْتَحْدَثَ الْقَانُوْنُ نِظَامَ الْوَصِيَّةِ الْوَاجِبَةِ لِمُعَالَجَةِ هٰذِهِ الْمُشْكِلَةِ تَمَشِّيًا مَعَ رُوْحِ التَّشْرِيْعِ الْإِسْلَامِيِّ فِي تَوْزِيْعِ الثَّرْوَةِ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ الْعَدْلِ وَالْمَنْطِقِ، إِذْ مَا ذَنْبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى (ابْنِ الْمَحْرُوْمِ) فِي الْحِرْمَانِ مِنْ نَصِيْبِ وَالِدِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ مُبَكِّرًا قَبْلَ وَالِدِهِ وَيَكُوْنُ قَدْ سَاهَمَ فِي تَكْوِيْنِ ثَرْوَةِ الْجَدِّ بِنَصِيْبٍ مَلْحُوْظٍ، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِمُ الْحَاجَةُ وَفَقْدُ الْوَالِدِ. وَبِمَا أَنَّ الْأَحْفَادَ غَيْرُ وَرَثَةٍ فِي حَالِ مَوْتِ أَبِيْهِمْ، فَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ فَرْضُ صِفَةِ غَيْرِ الْوَارِثِ عَلَيْهِمْ لِلْمَصْلَحَةِ، وَلِأَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِمَالِ الْجَدِّ. فَإِذَا لَمْ يُوْصِ الْجَدُّ أَوِ الْجَدَّةُ لِهٰؤُلَاءِ الْحَفَدَةِ بِمِثْلِ نَصِيْبِ أَصْلِهِمْ، تَجِبُ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ بِإِيْجَابِ اللهِ تَعَالَى بِمِثْلِ هٰذَا النَّصِيْبِ عَلَى أَلَّا يَزِيْدَ عَلَى الثُّلُثِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ

بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة:١٨٠/٢)

Sandaran fikih untuk masalah wasiat yang wajib beserta hal-hal yang membolehkannya: Telah ditetapkan bahwa wasiat kepada *aqarib* itu disunahkan menurut *jumhur*, di antaranya adalah imam-imam *madzahib al-arba'ah*. Dan tidak wajib bagi seseorang kecuali dengan *haq* Allah atau *haq* hamba. Sebagian fuqaha seperti ibn Hazm, adh-Dhahiri, ath-Thabari, abu Bakar bin abd al-Aziz dari kalangan Hanabilah berpendapat: *"Sungguh wasiat merupakan kewajiban agama dan menunaikan bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak mewarisi untuk menghalangi mereka dari warisan atau karena mani' yang mencegah mereka dari warisan seperti perbedaan agama. Maka bila mayit tidak berwasiat pada kerabat dengan sesuatu, wajib bagi ahli warisnya atau bagi orang yang diwasiati agar mengeluarkan sesuatu yang tidak dibatasi dari harta mayit dan memberikannya pada kedua orang tua selain ahli waris."*

Qanun Mesir (m. 76-79) dan *Qanun* Suriyah (m. 257) mengambil pendapat kedua, sehingga menetapkan wasiat bagi sebagian orang yang terhalang dari warisan; mereka adalah cucu yang kakeknya meninggal ketika ayah atau ibu mereka masih hidup; atau mereka meninggal bersama mereka meskipun secara hukum seperti orang yang tenggelam dan terbakar. Maka dalam aturan waris Islam cucu tidak berhak mendapat sesuatu dari warisan kakek atau nenek, karena ada paman atau bibi mereka atas *qayyid* kehidupan. Akan tetapi terkadang cucu dalam kondisi fakir dan hajat. Sementara paman atau bibi mereka dalam kondisi kaya dan lapang. Sehingga ada pembaharuan peraturan undang-undang wasiat karena merespon kemusykilan ini, karena berjalan bersama ruh syariat Islam dalam membagi kelapangan atas dasar keadilan dan kecerdasan, karena tidak salah anak yang meninggal (anak yang terhalang) dalam halangan dari bagian orang tuanya yang meninggal cepat sebelum orang tuanya. Dan terkadang membagi dalam mewujudkan kelapangan kakek dengan bagian yang penting, maka menjadi terkumpul kebutuhan dan tidak ada orang tua pada mereka. Dan dengan perkara sungguh cucu tidak mewarisi dalam kondisi meninggalnya ayah mereka. Maka bagi *waliyul amri* boleh meringkas sifat selain ahli waris pada mereka karena maslahat. Dan karena sungguh mereka lebih utamanya manusia terkait harta kakek. Apabila kakek atau nenek tidak berwasiat pada cucu mereka dengan semisal bagian anaknya, Maka wajib bagi mereka berwasiat dengan memenuhi Allah ﷻ dengan semisal bagian ini, atas dasar tidak melebihi 1/3. Karena firman Allah: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."* (QS. al-Baqarah: 180).

i. *Al-Washiyah al-Wajibah 'ala Madzhab al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man,* 1 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

أَحْكَامُ الْوَصِيَّةِ قانون الوصية الفلسطيني رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ م بشأن الوصية الواجبة المأخوذ عن المذهب الحنفي. تَجِبُ الْوَصِيَّةُ لِلْفَرْعِ إِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ لِفَرْعِ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مَعَهُ وَلَوْ حُكْمًا. يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ. تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ أَيْ لِابْنِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الْبِنْتِ، وَلِأَوْلَادِ الْأَبْنَاءِ مِنْ أَوْلَادِ الظُّهُورِ وَإِنْ نَزَلُوا. لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. فَإِذَا كَانَ الْفَرْعُ يَرِثُ بِلَا وَصِيَّةٍ وَاجِبَةٍ مَهْمَا كَانَ نَصِيبُهُ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالتَّعْصِيبِ. فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ. يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ الْمَيِّتُ قَدْ أَعْطَى فَرْعَ وَلَدِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ مِنْ طَرِيقِ تَصَرُّفٍ آخَرَ قَدْرَ مَا يَجِبُ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَا أَعْطَاهُ أَقَلَّ مِنْهُ وَجَبَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ بِقَدْرِ مَا يُكَمِّلُهُ. إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ كَانَتِ الزِّيَادَةُ وَصِيَّةً اخْتِيَارِيَّةً. إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِأَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ وَجَبَ لَهُ مَا يُكَمِّلُ نَصِيبَهُ. إِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ لِبَعْضِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَجَبَ لِمَنْ لَمْ يُوصِ لَهُ قَدْرَ نَصِيبِهِ. كَيْفِيَّةُ حَلِّ مَسَائِلِ الْوَصِيَّةِ الْوَاجِبَةِ: نَنْظُرُ إِلَى الْفَرْعِ فَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِلَا وَصِيَّةٍ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ حَلًّا عَادِيًّا. نَفْتَرِضُ أَنَّ الْوَلَدَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى الَّذِي مَاتَ فِي حَيَاةِ مُوَرِّثِهِ، أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، حَيًّا وَنُقَدِّرُ نَصِيبَهُ مِنَ التَّرِكَةِ. نَنْظُرُ إِلَى نَصِيبِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ فَالْأَمْرُ لَا يَخْرُجُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ يُسَاوِي ثُلُثَ التَّرِكَةِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْفُذُ، أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْفُذُ. أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْفُذُ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ فَقَطْ.

Wasiat itu wajib pada anak apabila mayat tidak berwasiat pada anaknya anak yang meninggal ketika ia masih hidup atau bersamanya meskipun secara hukum. Kewajiban wasiat itu dibatasi 1/3. Tingkatan ahli pertama dalam wasiat adalah anak-anaknya anak-anak perempuan; maksudnya anak laki-lakinya anak kandung perempuan dan anak perempuannya anak perempuan, dan untuk anak-anaknya anak laki-laki dari anak-anaknya sampai ke bawah. Tidak ada wasiat bagi ahli waris; jika anak mewarisi tanpa wasiat *wajibah* ketika bagiannya dengan bagian pasti atau *ashabah*, maka tiada wasiat baginya. Diwajibkan agar mayat tidak memberikan

pada anaknya anak tanpa *iwadh* dari jalur *tasharruf* yang lain, kira-kira perkara yang wajib baginya. Apabila perkara yang diberikannya lebih sedikit darinya maka wasiat wajib baginya dengan kadar perkara yang menyempurnakannya. Apabila mayit berwasiat pada orang yang wajib diwasiati dengan melebihi bagiannya maka tambahan tersebut adalah wasiat pilihan. Jika mayit berwasiat kepada orang yang wajib diwasiati dengan lebih sedikit dari bagiannya maka wajib baginya memperoleh perkara yang menyempurnakan bagiannya. Jika mayit berwasiat pada sebagian orang yang wajib diwasiati bagi mereka bukan sebagian yang lain maka wajib bagi orang yang tidak diwasiati memperoleh kadar bagiannya. Penyelesaian (solusi) masalah wasiat *wajibah*: Kita melihat pada keturunan; jika ia mewarisi tanpa wasiat maka selesai (cukup) dengan penyelesaian normal dengan halal secara adat. Kita memastikan bahwa masalah (kasus) anak laki-laki dan perempuan yang meninggal ketika *muwarrats*nya masih hidup; maksudnya ayah atau ibunya masih hidup dan kita memastikan bagiannya dari harta peninggalan. Kita melihat pada bagian orang yang wajib diwasiati; maka masalah tidak lepas dari tiga hal: Bagiannya menyamai 1/3 harta peninggalan, karena sungguh wasiat itu terlaksana. Bagiannya lebih sedikit daripada 1/3 harta peninggalan, karena sungguh wasiat itu terlaksana. Bagiannya melebihi 1/3 harta peninggalan, karena sungguh wasiat tersebut terlaksana dalam batasan 1/3 saja.

j. *Tafsir ath-Thabari*, III/390 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَقَالَ آخَرُوْنَ: بَلْ نَسَخَ اللهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ وَالْمَوَارِيثَ، فَلاَ وَصِيَّةَ تَجِبُ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ قَرِيْبٍ وَلَا بَعِيْدٍ. وَقَالَ آخَرُوْنَ: بَلْ نَسَخَ اللهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ، وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ وَالْمَوَارِيْثَ، فَلَا وَصِيَّةَ تَجِبُ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ قَرِيْبٍ وَلَا بَعِيْدٍ. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذٰلِكَ: حَدَّثَنِي يُوْنُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ الآيَة، قَالَ: فَنَسَخَ اللهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَفَرَضَ الْفَرَائِضَ. حَدَّثَنِي يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هٰهُنَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مِنْهَا، فَأَتَى عَلَى هٰذِهِ الْآيَةِ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ قَالَ: نُسِخَتْ هٰذِهِ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ نَسَخَتِ الْفَرَائِضُ الَّتِي لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ الْوَصِيَّةَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ: نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ. قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَسَأَلْتُ جَهْضَمًا عَنْهُ فَلَمْ يَحْفَظْهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَا: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: زَعَمَ قَتَادَةُ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: زَعَمَ قَتَادَةُ أَنَّهُ نَسَخَتْ آيَتَا الْمَوَارِيثِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْآيَةَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي شَأْنِ الْوَصِيَّةِ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ: كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ أَمَّا الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ فَيَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَانَ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ مِيرَاثٌ مَعْلُومٌ، إِنَّمَا يُوصِي الرَّجُلُ لِوَالِدِهِ وَلِأَهْلِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ حَتَّى نَسَخَتْهَا النِّسَاءُ فَقَالَ: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ.

Yang lain berkata: *"Akan tetapi, Allah telah menaskh itu semua dan Allah menfardhukan beberapa kefardhuan (bagian pasti) dan mawarits, maka tidak ada wasiat yang wajib bagi seseorang terhadap orang lain yang dekat maupun jauh."* Menuturkan ulama yang berpendapat begitu: Yunus menceritakan padaku, ia berkata: Ibn Wahb mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibn Zaid berkata mengenai firman-Nya: *"Jika seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* (QS. al-Baqarah: 180). Al-Ayat. Lalu Allah

me*naskh* itu semua dan menfardhukan beberapa kefardhuan.

Ya'qub bin Ibrahim menceritakan padaku, beliau berkata: Ibn Ulaiah menceritakan padaku dari Yunus dari Ibn Sirin dari Ibn Abbas: Sungguh beliau berdiri, lalu mengkhutbahi manusia di sini, lalu membaca surat al-Baqarah di hadapan mereka untuk menjelaskan kepada mereka, lalu mendatangi ayat ini: *"Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Beliau berkata: *"Ayat ini telah dinaskh."*

Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, beliau berkata: Ayahku menceritakan padaku, beliau berkata, pamanku menceritakan padaku, beliau berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari ibn Abbas; firman-Nya: *"Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Dan bagian pasti bagi orang tua dan kerabat telah me*naskh* wasiat.

Muhammad bin Basyar menceritakan kepadaku, beliau berkata: Abd ar-Rahman bin Mahdi menceritakan kepadaku, beliau berkata: Sufyan menceritakan kepadaku dari Jahdham, dari Abdillah bin Badar, beliau berkata: Saya mendengar Ibn Umar berbicara mengenai firman-Nya: *"Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, apabila ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Beliau berkata: Ayat *mirats* telah me*naskh*nya. Ibn Basyar berkata: Abd ar-Rahman berkata: *"Saya bertanya pada Jahdham mengenai hal ini, tetapi ia tidak hafal."*

Ibn Hamid menceritakan kepadaku, beliau berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan padaku, beliau berkata: al-Husain bin Waqid menceritakan padaku dari Yazid an-Nahwi, dari Ikrimah dan Hasan al-Bashri, mereka berkata: *"Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, apabila ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Maka wasiat seperti itu hingga ayat *mirats* me*naskh*nya.

Ahmad bin al-Miqdam menceritakan padaku, beliau berkata: al-Mu'tamir menceritakan padaku, beliau berkata: Saya mendengar ayahku berkata: Qatadah menyangka dari Syuraih dalam ayat ini: *"Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Beliau berkata: laki-laki berwasiat dengan semua hartanya hingga turun ayat *mirats*.

Ahmad bin Miqdam menceritakan padaku, beliau berkata: al-Mu'tamir menceritakan padaku, beliau berkata, saya mendengar ayahku berkata: Qatadah menyangka sungguh itu telah di*naskh* (salin) oleh dua ayat *mirats* dalam surat an-Nisa' al-ayat dalam surat al-Baqarah mengenai persoalan wasiat.

Muhammad bin Amr menceritakan padaku, beliau berkata: Abu Ashim menceritakan padaku, beliau berkata: Isa menceritakan padaku dari ibn Abi Najih, dari Mujahid dalam firman Allah: *"Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Beliau berkata: Warisan untuk anak dan wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat, itu telah di*naskh*.

Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, beliau berkata, abu Hudzaifah menceritakan padaku, Syabl menceritakan padaku dari ibn abi Najih, dari Mujahid, beliau berkata: *Mirats* untuk anak, wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat, itu di*naskh* oleh ayat dalam surat an-Nisa': *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."*

Musa bin Harun menceritakan padaku, beliau berkata, Amr bin Hammad menceritakan padaku, beliau berkata: Asbath menceritakan padaku, dari Sady: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Adapun kedua orang tua dan kerabat, pada hari ayat ini turun maka manusia tidak memiliki warisan yang diketahui, bahwasanya laki-laki berwasiat kepada anaknya dan keluarganya lalu membagi di antara mereka hingga surat an-Nisa' me*naskh*nya, kemudian berkata: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."*

k. *Tafsir ath-Thabari*, VII/32-33 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ.

Muhammad bin Umar bercerita kepadaku, ia berkata: *"Abu 'Ashim bercerita padaku, dari Isa, dari Mujahid atau 'Atha', dari Ibn Abbas tentang Firman Allah: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu"*, beliau berkata: *"Harta untuk anak, dan wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat. Lalu Allah mensakh darinya hal yang disukai-Nya, lalu untuk laki-laki dijadikan seperti bagian dua wanita, dan untuk kedua orang tua, masing-masing di antara mereka dijadikan 1/6 bersama anak, dan bagi suami bagian dan 1/4 dan bagi istri 1/4 dan 1/8."*

1. *Tafsir ath-Thabari*, VII/7-33 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُحْكَمَةٌ، وَلَيْسَتْ مَنْسُوخَةً، يَعْنِي قَوْلَهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى. الآيَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: هِيَ مُحْكَمَةٌ. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ. حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ.حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا فَقَالَ سَعِيدٌ: هٰذِهِ الآيَةُ يَتَهَاوَنُ بِهَا النَّاسُ. قَالَ: وَهُمَا وَلِيَّانِ: أَحَدُهُمَا يَرِثُ وَالآخَرُ لَا يَرِثُ، وَالَّذِي يَرِثُ هُوَ الَّذِي أُمِرَ أَنْ يَرْزُقَهُمْ، قَالَ: يُعْطِيهِمْ؛ قَالَ: وَالَّذِي لَا يَرِثُ هُوَ الَّذِي أُمِرَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَهِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ.

Abu Karib menceritakan padaku, beliau berkata: Ibn Yaman menceritakan kepadaku dari Sufyan dari asy-Syaibani dari Ikrimah dari ibn Abbas, Muhkamah berkata: *"dan ayat itu tidak di naskh; yakni firman-Nya: "dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat."* Al-Ayat.

Abu Karib menceritakan kepadaku, ibn Yaman menceritakan padaku dari Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim dan asy-Sya'bi; mereka berdua berkata: *"Ayat itu muhkamah."*

Abu Karib menceritakan padaku, beliau berkata, al-Asyja'i menceritakan kepadaku, dari Sufyan dari Ibn Abi Najih dari Mujahid dalam firman-Nya: *"dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin."* Beliau berkata: *"Hal tersebut wajib bagi ahli waris selama hati mereka rela."*

Ibn Basyar menceritakan padaku, Yahya bin Abdurrahman menceritakan padaku dari Sufyan; dan al-Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, beliau berkata: Abd ar-Razaq mengkhabarkan padaku, beliau berkata,

ats-Tsauri meng*khabar*kan kepadaku, dari ibn abi Najih, dari Mujahid, beliau berkata: *"Hal itu wajib bagi ahli waris selama hati mereka rela."*

Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, beliau berkata: Hasyim menceritakan padaku, beliau berkata: Abu Bisyr mengabarkan padaku, dari Sa'id bin Jubair; sungguh beliau ditanya mengenai firman-Nya: *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik."* Sa'id berkata: *"Ayat ini diremehkan oleh orang-orang."* Beliau berkata: *"Keduanya adalah wali. Salah satunya mewarisi dan yang lain tidak mewarisi. Orang yang mewarisi ialah orang yang diperintah memberi pada mereka."* Beliau berkata: *"Ia memberi pada mereka."* Beliau berkata: *"Orang yang tidak mewarisi ialah orang yang diperintahkan berkata pada mereka dengan perkataan yang baik. Ayat ini adalah muhkamah dan tidak dinaskh."*

m. *Tafsir ath-Thabari,* III/388-390 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ آيَةٌ قَدْ كَانَ الْحُكْمُ بِهَا وَاجِبًا وَعُمِلَ بِهِ بُرْهَةً، ثُمَّ نَسَخَ اللهُ مِنْهَا بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ الْوَصِيَّةَ لِوَالِدَيِ الْمُوصِي وَأَقْرِبَائِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ، وَأَقَرَّ فَرْضَ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يَرِثُهُ. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَجُعِلَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَجُعِلَ لَهُمَا نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ، وَجُعِلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبٌ مَعْلُومٌ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ: نُسِخَ الْوَالِدَانِ مِنْهَا، وَتُرِكَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الْمِيرَاثِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ وَبَقِيَ مَنْ لَا يَرِثُ، فَمَنْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ.

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ: نَسَخَ الْوَالِدَيْنِ وَأَثْبَتَ الْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ يُحْرَمُونَ فَلَا يَرِثُونَ.

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَ: لِلْوَالِدَيْنِ مَنْسُوخَةٌ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَرَابَةِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَنَسَخَ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَأَثْبَتَ الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ.

حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَ: كَانَ هَذَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ النِّسَاءِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ نَسَخَ شَأْنَ الْوَالِدَيْنِ، فَأَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِ الْمِيرَاثِ وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ.

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، وَالْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ، عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قَالَا: فِي الْقَرَابَةِ.

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فِي الْقَرَابَةِ.

Ulama lain berkata, justru al-Baqarah: 180, merupakan ayat yang wajib berhukum dengannya dan hukum itu harus dilaksanakan, lalu dengan ayat *mawarits* Allah me*naskh* sebagiannya yaitu wasiat untuk kedua orang tua *Mushi* dan kerabat yang mewarisinya, dan menetapkan bagian *washiy* bagi kerabatnya yang tidak mewarisinya. Penyebutan ulama yang berpendapat demikian:

Bisyr bin Mu'adz menceritakan padaku, beliau berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan padaku, beliau berkata: Sa'id menceritakan padaku, dari Qatadah dalam firman-Nya: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang*

banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya." Wasiat dijadikan pada kedua orang tua dan kerabat kemudian hal itu di*naskh* setelah itu, maka dijadikan untuk keduanya bagian yang dipastikan. Maka wasiat menjadi pada kerabat yang tidak mewarisi. Dan dijadikan untuk kedua orang tua, bagian yang telah diketahui. Dan tidak boleh wasiat pada ahli waris.

Al-Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, beliau berkata: Abd ar-Razaq mengabarkan kepadaku, beliau berkata: Ma'mar mengabarkan padaku, dari Qatadah dalam firman-Nya: *"Jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Beliau berkata: Kedua orang tua dari ayat tersebut di*naskh*; dan kerabat dari orang yang tidak mewarisi ditinggalkan.

Yahya bin Nashr menyampaikan berita padaku, beliau berkata: Yahya bin Hassan mengabarkan padaku, beliau berkata, Sufyan mengabarkan padaku dari ibn Thawus dari ayahnya beliau berkata: *"Wasiat itu sebelum warisan pada kedua orang tua dan kerabat; tatkala ayat al-mirats turun maka mirats menaskh orang yang mewarisi dan masih menetapkan orang yang tidak mewarisi. Orang yang berwasiat pada kerabatnya maka wasiatnya tidak boleh."*

Al-Mutsanna menyampaikan berita padaku, beliau berkata, Suwaid bin Nashr menyampaikan berita padaku, beliau berkata; ibn al-Mubarak mengkhabarkan padaku dari Ismail al-Makki dari Hasan dalam firman-Nya: *"Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Beliau berkata: itu menaskh kedua orang tua dan menetapkan orang-orang yang menghalangi maka mereka tidak mewarisi.

Al-Mutsanna menyampaikan berita kepadaku, beliau berkata: Suwaid mengabarkan kepadaku, beliau berkata, ibn al-Mubarak mengabarkan kepadaku dari Mubarak bin Fadhalah dari al-Hasan di dalam ayat ini: *"Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Beliau berkata: *"Kedua orang tua itu dinaskh, dan wasiat untuk kerabat meskipun mereka kaya."*

Ali bin Dawud menyampaikan berita padaku, beliau berkata: Abdullah bin Shalih menyampaikan berita padaku, beliau berkata: Mu'awiyah bin Shalih menyampaikan berita padaku, dari Ali bin abi Thalhah, dari ibn Abbas mengenai firman-Nya: *"Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya."* Hal tersebut me*naskh* wasiat kepada kedua orang tua dan menetapkan wasiat pada kerabat yang tidak mewarisi.

Saya menyampaikan berita dari Ammar, beliau berkata, ibn abi Jakfar menyampaikan berita kepadaku, dari ayahnya dari ar-Rabi' mengenai firman-Nya: *"Diwajibkan atas kamu, jika seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf."* Beliau berkata: *"Ini terjadi sebelum*

surat an-Nisa' diturunkan. Saat ayat mirats turun maka kondisi kedua orang tua dinaskh, lalu menyamakan keduanya dengan ahli waris dan wasiat menjadi pada ahli kerabat yang tidak mewarisi."

Al-Mutsanna menyampaikan berita padaku, beliau berkata: al-Hujaj bin al-Minhal menyampaikan berita padaku, beliau berkata: Hammad bin Salamah menyampaikan berita padaku, beliau berkata: Atha' bin abi Maimunah menyampaikan berita padaku, beliau berkata: Saya bertanya ke Muslim bin Yasar, kata beliau, al-Hujaj bin al-Minhal mengabarkan padaku, beliau berkata; Hammad bin Salamah menyampaikan berita padaku, beliau berkata; Atha' bin Abi Maimunah mengabarkan padaku, beliau berkata: Saya bertanya pada Muslim bin Yasar dan al-Alla' bin Ziyad mengenai firman Allah–*tabaraka wa Ta'ala*–: *"Jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Mereka berdua berkata mengenai kerabat.

Al-Mutsanna menyampaikan berita kepadaku, beliau berkata: al-Hajjaj menyampaikan berita padaku, beliau berkata; Hammad mengabarkan padaku dari Iyas bin Mu'awiyah, beliau berkata mengenai kerabat.

n. *Tafsir ath-Thabari*, VII/ 12-13 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، وَإِنَّمَا عَنَى بِهَا: الْوَصِيَّةَ لِأُولِي قُرْبَى الْمُوصِي، وَعَنَى بِالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ.

وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَغَيْرِهِ، أَنَّ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّتِي أَثْبَتَهَا فِي كِتَابِهِ أَوْ بَيَّنَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ جَائِزٍ فِيهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ نَاسِخٌ لِحُكْمٍ آخَرَ، أَوْ مَنْسُوخٌ بِحُكْمٍ آخَرَ، إِلَّا وَالْحُكْمَانِ اللَّذَانِ قُضِيَ لِأَحَدِهِمَا بِأَنَّهُ نَاسِخٌ، وَالْآخَرِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ نَافٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، غَيْرُ جَائِزٍ اجْتِمَاعُ الْحُكْمِ بِهِمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا صَرْفُهُ إِلَى غَيْرِ النَّسْخِ، أَوْ يَقُومَ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ وَالْآخَرَ مَنْسُوخٌ، حُجَّةٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لِمَا قَدْ دَلَّلْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَكَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ: وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ مَالٍ، قَاسِمِ مَالَهُ بِوَصِيَّتِهِ، أُولُو قَرَابَتِهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، فَارْزُقُوهُمْ

مِنْهُ، يُرَادُ: فَأَوْصُوا لِأُولِي قَرَابَتِكُمُ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَكُمْ مِنْهُ، وَقُولُوا لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ قَوْلًا مَعْرُوفًا، كَمَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. وَلَا يَكُونُ مَنْسُوخًا بِآيَةِ الْمِيرَاثِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ صَرْفُهُ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ، إِذْ كَانَ لَا دِلَالَةَ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِهَا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ مِنَ التَّأْوِيلِ مَا بَيَّنَّا.

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، قِسْمَةَ الْمُوصِي مَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ، أُولُو قَرَابَتِهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، يَقُولُ: فَاقْسِمُوا لَهُمْ مِنْهُ بِالْوَصِيَّةِ، يَعْنِي: فَأَوْصُوا لِأُولِي الْقُرْبَى مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَقُولُوا لَهُمْ، يَعْنِي الْآخَرِينَ، وَهُمُ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، قَوْلًا مَعْرُوفًا، يَعْنِي: يُدْعَى لَهُمْ بِخَيْرٍ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَائِرُ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ قَبْلُ.

وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ، وَالَّذِينَ قَالُوا: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَالْمَأْمُورُ بِهَا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ، فَإِنَّهُمْ وَجَّهُوا قَوْلَهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، يَقُولُ: فَأَعْطُوهُمْ مِنْهُ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، وَسَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ نَذْكُرْهُ:

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ أَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِهِمْ أَنْ يَصِلُوا أَرْحَامَهُمْ وَيَتَامَاهُمْ مِنَ الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَ أَوْصَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ وَصَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَوَارِيثِهِمْ ...

Abu Jakfar berkata: *"Pendapat yang paling benar dalam masalah ternaskh tidaknya ayat 8 surat an-Nisa' adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat ini muhkamah dan tidak dinaskh, Dengan ayat tersebut Allah memaksudkan bahwa wasiat untuk kerabat Mushi, dan hendaklah berkata maksud dengan perkataan yang baik kepada Yatama dan Masakin."*

Bahwasanya kita berkata pendapat itu lebih benar daripada selainnya karena alasan yang kita jelaskan dalam tidak hanya satu tempat dari kitab kita ini dan lainnya, yaitu sungguh hukum-hukum Allah-*tabaraka wa ta'ala*-yang ditetapkan-Nya di dalam kitab-Nya atau dijelaskannya

melalui lisan Rasulullah ﷺ tidak boleh dikatakan bahwa ia me*naskh* hukum lain atau di*naskh* dengan hukum lain, kecuali dua hukum yang salah satu dari keduanya dihukumi me*naskh* hukum lain dan yang lain dihukumi di*naskh* oleh hukum lain, itu masing-masing menafikan pada selainnya, yang tidak boleh berkumpulnya hukum dengan keduanya pada satu waktu dengan salah satu alasan dari beberapa alasan. Bila hukumnya boleh mengarahkannya pada selain *naskh* atau hukumnya membuktikan bahwa salah satu dari keduanya me*naskh* dan yang lain di*naskh*, maka menjadi *hujjah* yang wajib diterima karenanya.

Apabila hal itu demikian karena alasan yang kita tunjukkan dalam tidak hanya satu tempat, dan firman Allah ﷻ: *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)"*, kemungkinan maksudnya adalah: *"Dan apabila sewaktu pembagian harta, pembagi hartanya dengan wasiat itu hadir kerabatnya, anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya),"* maka yang dimaksud adalah: *"Berwasiatlah kepada para kerabat kalian yang tidak mewarisi kalian darinya, dan katakanlah pada anak-anak yatim dan orang-orang miskin dengan perkataan yang baik"*, sebagaimana Allah berfirman di ayat lain: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, apabila ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."* Ayat 8 surat an-Nisa' tidak di*naskh* dengan ayat *mirats*; tidak boleh bagi seseorang mengarahkannya bahwa ayat tersebut di*naskh* dengan ayat *mirats*. Karena tiada *dilalah* bahwa ayat tersebut di*naskh* dengannya, baik al-Qur'an atau al-Hadits yang tetap; itu *ihtimal* dari takwil perkara yang kita jelaskan.

Apabila hal itu demikian, maka takwil firman-Nya: "*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir*", maksudnya ketika *Mushi* membagi hartanya dengan wasiat, hadir kerabatnya anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah rejeki mereka darinnya, seolah Allah berfirman: *"Bagilah untuk mereka dari harta itu dengan wasiat"*, maksudnya wasiatkanlah dari harta kalian kepada kerabat, dan berkatalah kepada yang lainnya, yaitu anak-anak yatim dan orang-orang miskin dengan ucapan baik, maksudnya doakan mereka dengan kebaikan sebagimana pernyataan Ibn Abbas dan selainnya yang pendapatnya telah kami sebutkan sebelumnya.

Adapun Ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut di*naskh* dengan ayat *mawarits* dan ulama yang mengatakan bahwa ayat itu *muhkamat* sementara yang diperintahkan untuk berwasiat adalah ahli waris mayit, maka mereka mengarahkan firman Allah: *"Ketika saat pembagian harta datang para kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka rejeki darinya"* seolah Allah berkata: *"Berilah mereka darinya, dan*

berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik."

Kami telah menyebutkan ulama yang berpendapat seperti itu, dan akan kami sebutkan ulama lainnnya yang berpendapat seperti itu yang belum kami sebutkan:

Al-Mutsanna menyampaikan berita padaku, beliau berkata: Abdullah bin shalih menyampaikan berita kepadaku, beliau berkata. Muawiyah bin shalih menyampaikan berita kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibn Abbas, firman-Nya: *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin."* Allah-*jalla tsanauhu*- memerintahkan kaum mukmin ketika pembagian warisan mereka agar menyambung sanak saudara mereka dan anak-anak yatim mereka dari wasiat jika ia berwasiat. Dan jika tidak berwasiat maka menyambung pada mereka dari warisan mereka.

o. *Tafsir Ibn Katsir*, I/360:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اشْتَمَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيْمَةُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ، وَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ وَاجِبًا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ قَبْلَ نُزُوْلِ آيَةِ الْمَوَارِيْثِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ نُسِخَتْ هٰذِهِ، وَصَارَتِ الْمَوَارِيْثُ الْمُقَدَّرَةُ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ يَأْخُذُهَا أَهْلُوْهَا حَتْمًا مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَا تَحَمُّلِ مِنَّةِ الْمُوْصِي، وَلِهٰذَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِيْ فِي السُّنَنِ وَغَيْرِهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: جَلَسَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى أَتَى هٰذِهِ الْآيَةَ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ فَقَالَ: نُسِخَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُوْنُسَ بِهِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ قَالَ: كَانَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرُهُمَا إِلَّا وَصِيَّةً لِلْأَقْرَبِيْنَ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْمِيْرَاثِ، فَبَيَّنَ مِيْرَاثَ الْوَالِدَيْنِ وَأَقَرَّ وَصِيَّةَ

الأقربين في ثلث مال الميت، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله الوصية للوالد يوصيكم الله في أولادكم قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء: قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. (قلت) وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى، وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية، فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، يرفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا.

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia

mendengarnya, Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikanantara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat yang mulia ini mencakup perintah dengan wasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat, dan sungguh hal itu wajib menurut *qaul ashah* sebelum turunnya ayat *mawarits*. Ketika ayat *faraidh* turun maka ayat ini di*naskh*, dan *mawarits* yang dipastikan menjadi *faridhah* dari Allah yang ahlinya wajib mengambilnya tanpa wasiat dan pengungkit-ungkit *mushi* tidak menanggung. Karena ini, maka datang dalam hadits yang terdapat dalam *as-Sunan* dan lainnya dari Amr bin Kharijah, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah; dan beliau berkata: *"Sungguh Allah memberikan setiap hak pada haknya maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."* Imam Ahmad berkata: Ismail bin Ibrahim bin Uliyah menyampaikan berita dari Yunus bin Ubaid dari Muhammad bin Sirin, beliau berkata: ibn Abbas duduk lalu membaca surat al-Baqarah hingga mendatangi ayat ini: *"Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Lalu berkata: Ayat ini di*naskh*. Begitu juga Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Hasyim dari Yunus dengannya. Al-Hakim meriwayatkannya dalam *Mustadrak*nya, dan ia berkata: *"Shahih menurut syarat Bukhari Muslim."* Ali bin abi Thalhah berkata: Dari ibn Abbas dalam firman-Nya: *"Berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya."* Beliau berkata: *"Bahwa tidak mewarisi bersama kedua orang tua selain keduanya kecuali wasiat pada kerabatnya."*

Lalu Allah menurunkan ayat warisan, lalu menjelaskan warisan kedua orang tua dan menetapkan wasiat pada kerabat dalam 1/3 harta mayit. Ibn abi Hatim berkata bahwa al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabah mengabarkan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad mengabarkan padaku, Ibn Juraij dan Utsman bin Atha' mengabarkan padaku dari Atha' dari ibn Abbas, dalam firman-Nya, wasiat untuk kedua orang tua: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki."* Beliau berkata: Itu adalah pendapat mayoritas *mufassirin* dan *mu'tabirin* dari *fuqaha'*, beliau berkata: Di antara mereka ada yang berkata: Ayat itu di*naskh* dalam orang yang mewarisi, tetap dalam orang yang tidak mewarisi, yaitu menurut madzhab ibn Abbas, Hasan, Masruq, Thawus, adh-Dhahak, Muslim bin Yasar dan al-Alla' bin Ziyad.

(Saya berkata) dan dengannya Sa'id bin Jubair, Rabi' bin Anas, Qatadah

dan Muqatil bin Hayyan juga berkata: Akan tetapi menurut pendapat mereka: ini tidak disebut dengan *naskh* dalam istilah kita yang akhir. Sebab sungguh ayat *mawarits* itu menghilangkan hukum sebagian perkara yang ditunjukkan keumuman ayat wasiat. Karena sungguh kerabat lebih umum daripada orang yang mewarisi dan tidak mewarisi. Maka hukum orang yang mewarisi dihilangkan dengan perkara yang menentukan padanya dan yang lain masih tetap pada perkara yang ditunjukkan ayat pertama. Dan ini asal mula menurut ungkapan sebagian ulama: *"Sungguh wasiat dalam permulaan Islam itu disunahkan hingga dinaskh."* Adapun orang yang berkata: *"Sungguh wasiat itu wajib; yaitu menurut dhahir dari runtutan ayat."* Maka menjadi tertentu di*naskh* dengan ayat warisan sebagaimana menurut pendapat mayoritas *mufassirin* dan *mu'tabirin* dari *fuqaha*.
Sungguh kewajiban wasiat pada orang tua dan kerabat yang mewarisi itu di*naskh* dengan ijma' bahkan dilarang sebab hadits terdahulu. *"Sungguh Allah memberikan hak pada setiap haknya maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."* Maka ayat warisan itu hukum yang sendiri dan kewajiban di sisi Allah bagi orang yang memiliki bagian pasti dan *ashabah*, menghilangkan hukum ini secara menyeluruh. Dan masih tetap kerabat yang tidak ada warisan bagi mereka; disunahkan baginya berwasiat pada mereka dari 1/3 dengan karena *isti'nas* dengan ayat wasiat dan cakupannya. Dan sebab tetap dalam *Shahihain* dari ibn Umar, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ia wasiatkan selama dua malam kecuali wasiatnya dicatat di sisi-Nya."* Ibn Umar berkata: *"Perkara yang lewat padaku semalam sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda demikian kecuali di sampingku ada wasiatku. Adapun ayat-ayat dan hadits-hadits dengan perintah berbuat baik dengan kerabat dan berbuat baik pada mereka itu banyak sekali."*

2. Memperjelas Status *Dar* dan *Daulah* Indonesia

Deskripsi Masalah

Indonesia sejak kemerdekaannya telah menganut sistem pemerintahan presidensial yang meliputi 3 lembaga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara.

NKRI (Negara Kesatuan Repuplik Indonesia) meskipun sebagian daerah di bawah kekuasaan NKRI dihukumi *Darul Islam* karena pernah dikuasai orang Islam seperti Demak, Betawi dan kebanyakan pulau Jawa, sebagaimana diungkapkan oleh *Mufti* Yaman Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Hadhrami dalam kitab *Bughyah al-Mustarsidin*, 254, tetapi di dalam kekuasaan NKRI ada beberapa daerah yang tidak dapat

dikategorikan sebagai *Dar Islam* karena tidak pernah dikuasai orang Islam. Bahkan orang Islam belum bebas menyiarkan agama dan menjalankan hukum Islam dengan leluasa seperti di pulau Bali.

Pertanyaan

a. Jika *Daulah* di negara Indonesia bukan *Daulah Islamiyah* lalu disebut *Daulah* apa?
b. Adakah dalam rumusan fikih sebuah negara yang *Dar*-nya dihukumi Islam namun *Daulah*-nya bukan *Islamiyah*?
c. Dasar apa negara dapat dihukumi *Dar al-Islam* atau *Dar al-Kufr*?
d. Ketika *Dar al-Islam* dan *Dar al-Kufr* dijadikan satu dalam Negara Kesatuan Republik, bisakah *Dar al-Kufr* dihukumi sebagai *Dar al-Islam* karena melihat penduduk Muslim lebih banyak setelah digabungkan? Atau masing-masing *Dar* memiliki hukum sendiri sendiri (yang *Dar al-Kufr* tetap *Dar al-Kufr* dan yang *Dar al-Islam* tetap *Dar al-Islam*)? Atau melihat hukum yang dijalankan dalam Negara Kesatuan Republik tersebut?
e. Dasar apa yang melegalkan penggabungan *Dar al-Kufr* dengan *Dar al-Islam* dalam Negara Kesatuan Republik?

Jawaban a

Daulah dalam NKRI tidak dapat disebut sebagai *Daulah Islamiyah* sebagaimana yang diputuskan Muktamar NU XI di Banjarmasin pada 19 Robi'ul awal 1355/9 Juni 1936, bahwa Indonesia adalah *Dar al-Islam*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, tapi bukan *Daulah Islamiyah* dengan merujuk pada kitab *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* dan *Bughyah al-Mustarsyidin*, namun juga tidak cukup kriteria untuk disebut sebagai *Dar al-Kufr* maupun *Dar at-Thaghut*.

Daulah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (hukum yang berlaku dalam NKRI) belum mampu menerapkan hukum Islam secara keseluruhan seperti *hudud, qishash jizyah*, zakat, *fiqh al-mawaris, amar ma'ruf nahi munkar* oleh pemerintah terhadap kemaksiatan seperti lokalisasi, membuka aurat, dan lain-lain. Hukum yang diterapkan dalam NKRI adalah hukum yang disepakati semua agama di Indonesia dengan musyawaroh mufakat berdasarkan Pancasila sebagai dasar NKRI sudah barang tentu undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang dapat mengakomodir semua agama di Indonesia. Dengan demikian, yang patut *Daulah* NKRI disebut sebagai *Daulah Sulhiyah* mengingat kekuasaan dalam menjalankan undang-undang dengan bersama. Penjelasan *Bughyah al-Mustarsyidin* belum dapat digunakan sebagai dasar acuan bahwa NKRI adalah *Dar al-Islam* karena yang diklaim sebagai *Dar al-Islam* sebatas

kebanyakan bumi Jawa yang memang dulu pernah dikuasai orang Islam. Sementara di dalam NKRI masih banyak daerah yang belum pernah dikuasai Islam.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa status *Dar* pada awalnya adalah *Dar al-Islam* dan tidak dapat menjadi *Dar al-Harbi* kecuali memenuhi 3 kriteria: *pertama*, antara *Dar* dan wilayah orang kafir tidak ditemukan *Dar al-Islam*; *kedua*, tidak ada muslim yang aman dengan imannya dan *dzimmi* yang aman dengan akad *aman*nya; *ketiga*, menggunakan dasar hukum syirik.

Walaupun NKRI belum mampu melaksanakan hukum Islam dengan keseluruhan, tapi tidak nampak pula hukum syirik karena secara umum penerapan hukum di NKRI masih mengacu pada syariat Islam.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, 10:

الْخَامِسَةُ الْهِجْرَةُ مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ الْإِقَامَةُ بِدَارِ الْكُفْرِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَإِنْ صَارَ لَهُ بِهَا أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ وَأَمْكَنَهُ إِظْهَارُ دِينِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُهَاجِرَ لِأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ قَدْ صَارَ دَارَ إِسْلَامٍ.

Kelima, hijrah dari negara kufur ke negara Islam. Maka tidak halal bagi muslim menetap di *Dar al-Kufr*. Al-Mawardi berkata: "*Jika seseorang memiliki keluarga atau kerabat di sana dan mungkin menampakkan agamanya maka tidak boleh pergi, karena sungguh tempat yang ditinggali menjadi Dar Islam.*"

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 254:

(مَسْأَلَةٌ: ي): كُلُّ مَحَلٍّ قَدَرَ مُسْلِمٌ سَاكِنٌ بِهِ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ، تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنِ انْقَطَعَ امْتِنَاعُ الْمُسْلِمِينَ بِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ دُخُولِهِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ، وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَتُهُ دَارَ حَرْبٍ صُورَةً لَا حُكْمًا، فَعُلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَتَاوِي بَلْ وَغَالِبُ أَرْضِ جَاوَةَ دَارُ إِسْلَامٍ لِاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا سَابِقًا قَبْلَ الْكُفَّارِ.

(Masalah Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhar al-Yamani) Setiap tempat dimana muslim yang tinggal di sana mampu mencegah dari kaum *harbi* pada suatu zaman dari zaman-zaman maka tempat tersebut menjadi *Dar Islam*; Berlaku hukum-hukumnya pada zaman itu dan setelahnya. Jika tercegahnya kaum muslimin menjadi terputus dengan penguasaan kaum kafir terhadap mereka dan mereka mencegah dari memasukinya

dan mengusir mereka darinya. Dengan demikian maka penyebutan *Dar Harbi* dalam bentuk, tidak secara hukum. Maka diketahui sungguh tanah Betawi bahkan pada umumnya tanah Jawa adalah *Dar Islam*. Karena penguasaan muslimin terhadapnya jauh sebelum *kuffar*.

c. *Al-Mabsuth*, X/114 [Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah; 1414H/1993M]:

والحاصل أن عند أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط: أحدها أن تكون متاخمة أرض الشرك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين، والثاني أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث أن يظهروا أحكام الشرك فيها، وعن أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين، ولكن أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ يعتبر تمام القهر والقوة، لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام محرزة للمسلمين، فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث، لأنها إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن، فذلك دليل عدم تمام القهر منهم، وهو نظير ما لو أخذوا مال المسلم في دار الإسلام لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم، لعدم تمام القهر ثم ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض، كالمحلة إذا بقي فيها واحد من أصحاب الخطة فالحكم له دون السكان والمشترين، وهذه الدار كانت دار إسلام في الأصل فإذا بقي فيها مسلم أو ذمي فقد بقي أثر من آثار الأصل، فيبقى ذلك الحكم، وهذا أصل لأبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ حتى قال إذا اشتد العصير ولم يقذف بالزبد لا يصير خمرا لبقاء صفة السكون. وكذلك حكم كل موضع معتبر بما حوله، فإذا كان ما حول هذه البلدة كله دار إسلام لا يعطى لها حكم دار الحرب كما لو لم يظهر حكم الشرك فيها.

Kesimpulan: Sungguh menurut Abu Hanifah-*rahimahu Allah ta'ala*-bahwasanya *Dar* mereka (orang-orang murtad) jadi *Dar al-Harbi* dengan

tiga syarat; pertama berbatasan dengan daerah syirik yang di antaranya dan tanah *Harbi* tidak terselai *Dar Muslim*. Kedua tidak terdapat seorang muslim yang aman dengan imannya dan tidak ada *dzimmi* yang aman dengan keamanannya. Ketiga, mereka menampakkan hukum-hukum syirik di dalamnya. Dari Abi Yusuf dan Muhammad-*rahima Allah ta'ala*-Bila orang-orang murtad menampakkan hukum-hukum syirik di sana maka *Dar* mereka menjadi *Dar al-Harbi*. Karena suatu wilayah dinisbatkan kepada kita atau kepada mereka sebatas dengan *i'tibar* kekuatan dan kemenangan. Setiap tempat yang di dalamnya tampak hukum syirik maka kekuatan di tempat itu milik kaum musyrik, maka menjadi *Dar Harbi*. Setiap tempat yang di dalamnya jelas hukum Islam maka kekuatan di dalamnya milik kaum muslim. Tapi Abu Hanifah-*rahimahullahu ta'ala*-memperhintungkan paksaan dan kekuatan yang sempurna. Karena negeri yang dihuni mereka ini termasuk *Dar Islam* dan dimiliki kaum muslimin, maka kepemilikan itu tidak batal kecuali dengan paksaan sempurna dari kaum musyrikin, dan hal itu dengan terkumpulnya tiga syarat tadi. Karena jika negeri tersebut tidak tidak berbatasan dengan negeri syirik maka penduduknya terpaksa dengan terkelilingi muslimin dari setiap arah. Begitu juga jika di dalamnya ada seorang muslim atau *dzimmi* yang tetap aman. Itu merupakan dalil atas tidak sempurnanya paksaan dari mereka. Kasus itu sepadan dengan kasus jika orang-orang murtad mengambil harta orang muslim di *Dar al-Islam* di mana mereka tidak bisa memilikinya sebelum menyimpannya di *Dar* mereka. Karena tidak ada paksaan yang sempurna. Lalu selama masih ada *atsar* suatu asal, maka hukum diperuntukkan baginya bukan bagi sesuatu yang baru, seperti suatu kampung ketika masih ada satu orang penduduk asli, maka hukum kampung itu adalah untuknya, bukan untuk para penghuni pendatang dan para pembeli. Negeri yang dihuni orang-orang murtad ini merupakan *Dar Islam* dalam hukum asalnya. Lalu bila masih ada seorang muslim atau *dzimmi*, maka satu dari sekian *atsar* asalnya masih ada, sehingga hukum asal tersebut tetap. Ini merupakan prinsip menurut bagi Abu Hanifah-*rahimahullahu taala*-hingga beliau berkata: "*Jika sari buah menjadi sangat dahsyat dan tidak mengeluarkan busa, maka tidak menjadi khamr karena tetapnya sifat tenang.*" Begitu juga hukum setiap tempat dipertimbangkan dengan daerah di sekitarnya. Bila daerah sekitar negeri ini semuanya adalah *Dar al-Islam* maka hukum *Dar al-Harbi* tidak diberikan padanya, seperti hukum syirik tidak mendominasi di situ.

Jawaban b

Ada, dengan mengacu pada pendapat yang mengatakan *Dar* yang aslinya Islam kemudian dikuasai orang kafir maka *Dar* tersebut dihukumi *Dar al-Islam*, tapi *Daulah*nya tidak Islam. Pendapat Abu Hanifah dalam

al-Mabsuth, X/114 juga mengatakan, *Dar al-Islam* tidak dapat berubah menjadi *Dar al-Kufr* selama orang kafir tidak memiliki kekuasaan mutlak dan memaksa.

Jawaban c

Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam menyikapi hal ini, sebagaimana penjelasan:

Pengertian *Dar* secara etimologi maupun terminologi adalah istilah bagi suatu tempat yang terdiri dari bangunan, perumahan tempat tinggal, pelataran tanpa atap dan perkampungan. Dalam *Kulliyah Abi al-Baqa'*, disebut *Dar* karena menjadi tempat berkelilingnya manusia. Karenanya, setiap tempat yang dihuni golongan manusia disebut dengan *Dar*. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, XX/198, dijelaskan:

دَارٌ التَّعْرِيْفُ. الدَّارُ لُغَةً اسْمٌ جَامِعٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَحَلَّةِ. وَفِيْ كُلِّيَّاتِ أَبِي الْبَقَاءِ: الدَّارُ اسْمٌ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى بُيُوْتٍ وَمَنَازِلَ وَصَحْنٍ غَيْرِ مَسْقُوْفٍ. وَهِيَ مِنْ دَارَ يَدُوْرُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ حَرَكَاتِ النَّاسِ فِيْهَا وَاعْتِبَارًا بِدَوَرَانِهَا الَّذِيْ لَهَا بِالْحَائِطِ، وَجَمْعُهَا أَدْوُرٌ، وَدُوْرٌ، وَالْكَثِيْرُ دِيَارٌ، وَهِيَ الْمَنَازِلُ الْمَسْكُوْنَةُ وَالْمَحَالُّ. وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَلَّ بِهِ قَوْمٌ فَهُوَ دَارُهُمْ، وَمِنْ هُنَا سُمِّيَتِ الْبَلْدَةُ دَارًا، وَالصُّقْعُ دَارًا. وَقَدْ تُطْلَقُ الدَّارُ عَلَى الْقَبَائِلِ مَجَازًا. وَمَعْنَاهَا الْاِصْطِلَاحِيُّ لَا يَخْتَلِفُ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ.

Definisi *Dar*. Menurut bahasa *dar* adalah nama yang mengumpulkan pada halaman gedung yang dikelilingi tembok, bangunan dan tempat. Menurut keseluruhan *abi al-Baqa*: *Dar* adalah nama bagi sesuatu yang mencakup rumah-rumah, tempat-tempat, lapangan yang tidak beratap. Yaitu dari دَارَ يَدُوْرُ. Disebut demikian karena banyak aktifitas manusia di dalamnya dan perputarannya dinilai sebagai tembok. Jamaknya ialah أَدْوُرٌ وَدُوْرٌ dan jamak kasrahnya دِيَارٌ. Yaitu tempat-tempat yang didiami dan dijadikan tempat tinggal. Setiap tempat dimana warga tinggal di sana maka tempat tersebut ialah *dar* mereka. Dari sini maka negara disebut dengan *dar* dan daerah menjadi *dar*. Terkadang *dar* dikatakan kepada kabilah-kabilah sebagai *majaz*. Artinya menurut istilah tidak berbeda dari maknanya menurut *lughawi*.

Adapun *Dar* dengan di*idhafah*kan pada Islam, *kufr*, *fasiq*, *baghyu*, atau *'ahd*, tidak ada penjelasan secara jelas dari dalil syari'at al-Qur'an atau al-Hadits, melainkan hasil *ijtihad al-Mujtahidin*. Al-Qur'an hanya memberikan indikator/ciri-ciri *Dar* dan penghuninya.

Di antara ciri-ciri *Dar* yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 55 adalah:

a. Tegaknya orang-orang mukmin di dalamnya, yakni orang-orang yang menyembah Allah dan tidak musyrik, di mana kekuasaan dan kekuatan ada pada mereka.
b. Kedua, tegaknya agama Islam di dalamnya, yaitu dengan tampaknya hukum-hukum Islam, penerapan syariatnya, dan terwujud syi'ar-syiarnya, dan di antara yang terpenting adalah pelaksanaan solat, pembayaran zakat, dan amar makruf nahi mungkar.
c. Ketiga terjaminnya keamanan bagi kaum muslimin di dalamnya.

Fuqaha' memberi barometer status *Dar* dengan berlakunya undang-undang (hukum) dan wujudnya kekuasaan. Ini pendapat mayoritas *Fuqaha'*. Jika yang berlaku kekuasaan dan hukum Islam, maka disebut *Dar al-Islam*, tandanya orang Islam merasa aman secara mutlak; dan jika kekuasaan dan hukum yang berlaku adalah hukum kufur, maka disebut *Dar al-Kufr*.

Dalam Mazhab Hanafi tidak ada perbedaan dalam peralihan *Dar al-Kufr* menjadi *Dar al-Islam* dengan sebab tampaknya hukum Islam. Imam al-Kasani mengatakan, bahwa *Dar al-Kufr* dapat *Dar al-Islam* ketika tampak hukum Islam di dalamnya. Al-Qadhi Abu Yusuf menetapkan, bahwa *Dar* dihukumi *Dar al-Islam* jika yang tampak hukum Islam. Sebaliknya *Dar* dihukumi *Dar al-Kufr* jika yang tampak adalah hukum kufur. Sementara Abu Hanifah memberi tiga syarat untuk peralihan *Dar al-Islam* menjadi *Dar al-Kufr*, yaitu:

a. Tampaknya hukum kafir.
b. Bertetangga dengan *Dar al-Kufr*.
c. Tidak ada orang Islam atau orang *dzimmi* yang pernah akad aman.

Abu Hanifah menyatakan, bahwa penetapan status *Dar* terkait dengan aman dan tidaknya daerah tersebut bagi umat Islam. Jika di suatu daerah seorang muslim merasa aman dan orang non Islam merasakan kekhawatiran, maka disebut *Dar Islam*. Begitu pula sebaliknya. Apabila orang muslim maupun non muslim sama-sama merasa aman dan tidak ada kekhawatiran sama sekali maka dikembalikan pada hukum asal, yakni *Dar al-Islam* tidak dapat menjadi *Dar al-Kufr* hanya karena keraguan, sedangkan *Dar al-Kufr* dapat dikategorikan sebagai *Dar al-Islam* walau masih diragukan. Artinya, dengan tampaknya hukum Islam, suatu *Dar* dapat dikategorikan *Dar al-Islam* karena Islam *ya'lu wala yu'la alaih*.

Ulama Malikiyah berpendapat, jika di daerah tersebut terdengar azan maka sebagai tanda *Dar al-Islam*.

Imam asy-Syafi'i mengatakan, ketika *Imam al-Muslimin* menguasai

daerah kufur dan mengusir penduduknya atau menguasai suatu daerah dan mampu memaksa penduduknya, maka akan jadi *Dar al-Islam*. Imam ar-Ramli mengatakan, setiap *Dar* yang ada dalam kekuasaan *Dar al-Islam* walau ditempati *kafir dzimmi* dan *mu'ahad* tetap disebut *dar Islam*.

Ibn al-Qayyim berpendapat, bahwa *Dar al-Islam* adalah *Dar* yang ditempati orang-orang Islam dan berlaku hukum Islam di dalamnya.

Dari nukilan di atas dapat dipahami, bahwa barometer *Fuqaha`* dalam menentukan *Dar al-Islam* ada dua pandangan: *pertama* melihat hukum yang tampak, dan *kedua* siapa yang menguasai sebenarnya. Kedua-duanya *talazum*, karena jika yang menguasi adalah orang Islam maka hukum yang nampak adalah hukum Islam.

Jawaban d

Dengan cara melihat hukum asal *Dar* tersebut sebagai *Dar al-Islam*.

Jawaban e

Berdasar kaidah fikih: *dar` al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-A'mal al-Fida`iyah Shuwaruha wa Ahkamuha*, 329:

أَمَّا دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَدْ جَاءَ وَصْفُهَا وَوَصْفُ أَحْوَالِ أَهْلِهَا فِي عِدَّةِ آيَاتٍ. مِنْهَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ الحج: ٤١]. وَهٰكَذَا حَالُ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا حَكَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ مُؤَسِّسِي الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْأُوْلَى وَذٰلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الحشر: ٩] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِي لَا يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ سورة النور: ٥٥]. فَمِنْ خِلَالِ مَعَانِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ نَفْهَمُ أَنَّ أَهَمَّ الْأَوْصَافِ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مَا يَلِي: أَوَّلًا: تَمْكِيْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهَا. وَهُمُ الَّذِيْنَ يَعْبُدُوْنَ اللهَ وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِهِ شَيْئًا. فَكَانَتِ السُّلْطَةُ وَالْمَنَعَةُ فِيْهَا بِيَدِهِمْ. ثَانِيًا: تَمْكِيْنُ دِيْنِ اللهِ فِيْهَا. وَذٰلِكَ بِظُهُوْرِ أَحْكَامِهِ وَتَطْبِيْقِ شَرِيْعَتِهِ وَإِقَامَةِ

شَعَائِرِهِ وَأَهَمُّهَا إِقَامَةُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.
ثَالِثًا: ظُهُوْرُ الْأَمْنِ فِيْهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ. (٤)

Adapun *Dar al-Islam*, telah ada kriterianya dan kriteria penghuninya dalam beberapa ayat al-Qur'an. Di antaranya: *"(Yaitu) orang-orang yang apabila Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."* (QS. al-Hajj: 41).

Begitu juga kondisi *Ahl Dar al-Islam* sebagaimana Allah ﷻ mengisahkan dari al-Anshar; mereka adalah *mu'assis Daulah Islamiyah* yang pertama. Hal itu dalam firman Allah ﷻ: *"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan ke mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung."* (QS. al-Hasyr: 9). Dan firman Allah ﷻ: *"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik."* (QS. an-Nur: 55).

Dari sela-sela makna-makna ayat tersebut kita memahami, sungguh sifat-sifat yang paling penting bagi *Dar al-Islam* adalah sebagaimana berikut: pertama: menetapkan mukminin di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Maka kuasa dan pencegahan di dalamnya dengan tangan (kuasa) mereka. Kedua: membolehkan agama Allah di dalamnya. Hal itu dengan kejelasan hukum-hukumnya, meningkatkan syariatnya, menegakkan syiar-syiarnya dan yang terpenting menegakkan shalat, menunaikan zakat dan amar makruf nahi mungkar. Ketiga: Kejelasan perlindungan di dalamnya bagi muslimin.

b. *Bada'i' ash-Shana'i'*, IX/518-520 [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M]:

فَصْلٌ: وَأَمَّا بَيَانُ الْأَحْكَامِ الَّتِيْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ فَنَقُوْلُ: لَا بُدَّ أَوَّلًا مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَى الدَّارَيْنِ، دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْكُفْرِ لِتُعْرَفَ الْأَحْكَامُ الَّتِيْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا، وَمَعْرِفَةُ ذٰلِكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا بِهِ تَصِيْرُ الدَّارُ دَارَ إِسْلَامٍ أَوْ دَارَ كُفْرٍ فَنَقُوْلُ: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِيْ أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيْرُ دَارَ إِسْلَامٍ بِظُهُوْرِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيْهَا. وَاخْتَلَفُوا في دَارِ الْإِسْلَامِ أنها بِمَاذَا تَصِيْرُ دَارَ الْكُفْرِ؟ قال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إِلَّا بِثَلَاثِ شَرَائِطَ أَحَدُهَا ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فيها، وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ، وَالثَّالِثُ أَنْ لَا يَبْقَى فيها مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ وهو أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ. وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا الله: إِنَّهَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فيها.

وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْلَنَا دَارُ الْإِسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ إِضَافَةُ دَارٍ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَى الْكُفْرِ وَإِنَّمَا تُضَافُ الدَّارُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوِ الْكُفْرِ فِيهَا، كَمَا تُسَمَّى الْجَنَّةُ دَارَ السَّلَامِ وَالنَّارُ دَارَ الْبَوَارِ، لِوُجُودِ السَّلَامَةِ في الْجَنَّةِ وَالْبَوَارِ في النَّارِ، وَظُهُورُ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِهِمَا. فإذا ظَهَرَتْ أَحْكَامُ الْكُفْرِ في دَارٍ فَقَدْ صَارَتْ دَارَ الْكُفْرِ فَصَحَّتِ الْإِضَافَةُ. وَلِهَذَا صَارَتِ الدَّارُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فيها مِنْ غَيْرِ شَرِيطَةٍ أُخْرَى. فَكَذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فيها.

وَجْهُ قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله أَنَّ الْمَقْصُودَ من إِضَافَةِ الدَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ لَيْسَ هو عَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هو الْأَمْنُ وَالْخَوْفُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَمَانَ إنْ كان لِلْمُسْلِمِينَ فيها على الْإِطْلَاقِ وَالْخَوْفُ لِلْكَفَرَةِ على الْإِطْلَاقِ فَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كان الْأَمَانُ فيها لِلْكَفَرَةِ على الْإِطْلَاقِ وَالْخَوْفُ لِلْمُسْلِمِينَ على الْإِطْلَاقِ فَهِيَ دَارُ الْكُفْرِ وَالْأَحْكَامُ مَبْنِيَّةٌ على الْأَمَانِ وَالْخَوْفِ لَا على الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ فَكَانَ اعْتِبَارُ الْأَمَانِ وَالْخَوْفِ أَوْلَى فما لم تَقَعْ الْحَاجَةُ لِلْمُسْلِمِينَ إلَى الِاسْتِئْمَانِ بَقِيَ الْأَمْنُ الثَّابِتُ فيها على الْإِطْلَاقِ فَلَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ . وَكَذَا الْأَمْنُ الثَّابِتُ على الْإِطْلَاقِ لَا يَزُولُ إلَّا بِالْمُتَاخَمَةِ لِدَارِ الْحَرْبِ. فَتَوَقَّفَ صَيْرُورَتُهَا دَارَ الْحَرْبِ على وُجُودِهِمَا مع ما أن إِضَافَةَ الدَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِمَا قُلْتُمْ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِمَا قُلْنَا، وهو ثُبُوتُ

الْأَمْنِ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْكَفَرَةِ بِعَارِضِ الذِّمَّةِ وَالْاِسْتِئْمَانِ. فَإِنْ كَانَتِ الْإِضَافَةُ لِمَا قُلْتُمْ تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِمَا قُلْتُمْ وَإِنْ كَانَتِ الْإِضَافَةُ لِمَا قُلْنَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إِلَّا بِمَا قُلْنَا. فَلَا تَصِيرُ مَا بِهِ دَارُ الْإِسْلَامِ بِيَقِينٍ دَارَ الْكُفْرِ بِالشَّكِّ وَالْاِحْتِمَالِ، عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَالْاِحْتِمَالِ. بِخِلَافِ دَارِ الْكُفْرِ حَيْثُ تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ لِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا، لِأَنَّ هُنَاكَ التَّرْجِيحَ لِجَانِبِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى. فَزَالَ الشَّكُّ عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ إِنْ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ الْأَحْكَامِ لَكِنْ لَا تَظْهَرُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، أَعْنِي الْمُتَاخَمَةَ وَزَوَالَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهَا لَا تَظْهَرُ إِلَّا بِالْمَنَعَةِ وَلَا مَنَعَةَ إِلَّا بِهِمَا وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقِيَاسُ هَذَا الْاِخْتِلَافِ فِي أَرْضٍ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُشْرِكُونَ وَأَظْهَرُوا فِيهَا أَحْكَامَ الْكُفْرِ أَوْ كَانَ أَهْلُهَا أَهْلَ ذِمَّةٍ فَنَقَضُوا الذِّمَّةَ وَأَظْهَرُوا أَحْكَامَ الشِّرْكِ هَلْ تَصِيرُ دَارَ الْحَرْبِ، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْاِخْتِلَافِ.

(Pasal) Adapun penjelasan berbagai hukum yang berbeda-beda sebab perbedaan dua *Dar*, maka kita berkata: Pertama harus mengetahui makna dua *Dar*, yaitu *Dar al-Islam* dan *Dar al-Kufr* agar diketahui berbagai hukum yang berbeda sebab perbedaan keduanya. Untuk mengetahuinya tergantung pada pengetahuan tentang sebab yang dengannya suatu *Dar* menjadi *Dar al-Islam* atau *Dar al-Kufr*, maka kita berkata: "Tidak ada *khilaf* di antara *Ashab* kita terkait bahwa *Dar al-Kufr* menjadi *Dar al-Islam* dengan tampaknya hukum-hukum Islam di dalamnya. Ulama berbeda pendapat tentang dengan sebab apa suatu *Dar al-Islam* menjadi *Dar al-Kufr?* Abu Hanifah berpendapat, *Dar al-Islam* tidak menjadi *Dar al-Kufr* kecuali dengan tiga syarat, yaitu: 1) Tampaknya berbagai hukum kufur di dalamnya, 2) Berdekatan dengan *Dar al-Kufr*, dan 3) Di sana tidak tinggal seorang muslim atau kafir *dzimmi* secara aman dengan keamanan utama, yaitu keamanan *Dar al-Islam*. Sementara Abu Yusuf dan Muhammad–*rahimahumallah*–berpendapat bahwa *Dar al-Islam* menjadi *Dar al-Kufr* sebab tampaknya berbagi hukum kufur di dalamnya.

Argumen mereka berdua ialah bahwa pendapat kami *Dar al-Islam* dan *Dar al-Kufr* merupakan *idhafah* (penyandaran) *Dar* pada kata *Islam* dan kata *Kufr*, dan *Dar* disandarkan pada Islam atau kufur karena tampaknya Islam atau kekufuran di dalamnya, sebagaimana surga dinamakan *Dar*

as-Salam dan neraka dinamakan *Dar al-Bawar*, sebab adanya keselamatan di surga dan celaka di neraka. Tampaknya Islam dan kekufuran sebab tampaknya berbagai hukum keduanya. Jika tampak berbagai hukum kufur dalam suatu *Dar* maka ia menjadi *Dar al-Kufr*, dan sah *idhafah*nya. Karena itu, suatu *Dar* menjadi suatu *Dar* sebab tampaknya hukum-hukum Islam di dalamnya tanpa syarat lain. Begitu juga suatu *Dar* menjadi *Dar al-Kufr* sebab tampaknya hukum-hukum kufur di dalamnya.

Sementara argumen pendapat Abu Hanifah–*rahimahullah*–ialah, maksud penyandaran kata *Dar* pada kata *Islam* dan *Kufr* bukan penyandaran pada hakikat *Islam* dan *Kufr*, tapi yang dimaksud adalah keamanan dan ketakutan. Artinya, apabila keamanan di dalamnya secara mutlak milik kaum muslimin, dan ketakutan secara mutlak milik orang-orang kafir, maka *Dar* tersebut adalah *Dar al-Islam*; dan apabila keamanan di dalamnya secara mutlak milik orang-orang kafir dan ketakutan secara mutlak milik kaum muslimin, maka *Dar* tersebut adalah *Dar al-Kufr*. Hukum-hukum itu didasarkan pada keamanan dan ketakutan, bukan pada Islam dan kekufuran, sehingga mempertimbangan keamanan dan ketakutan lebih utama. Maka selama kaum muslimin tidak memerlukan *isti`man* (akad *aman*), maka tetaplah keamanan secara mutlak yang telah ada, dan *Dar*nya tidak menjadi *Dar al-Kufr*. Begitu pula keamanan yang ada secara mutlak tidak akan hilang kecuali sebab berdekatan dengan *Dar al-Harb*. Sebab itu, jadi suatu *Dar* menjadi *Dar al-Harb* tergantung pada adanya kedua hal tersebut, padahal penyandaran kata *Dar* pada kata *Islam* bisa jadi sebab apa yang kalian katakan dan bisa jadi karena apa yang aku katakan, yaitu adanya keamanan secara mutlak bagi kaum muslimin, dan suatu *Dar* bisa menjadi milik orang-orang kafir hanya bila karena datangnya *dzimmah* dan *isti'man*. Bila penyandaran tersebut karena apa yang kalian katakan, maka *Dar* tersebut menjadi *Dar al-Kufr* sebab apa yang kalian katakan; dan bila penyandaran tersebut karena apa yang aku katakan, maka *Dar* tersebut tidak menjadi *Dar al-Kufr* kecuali sebab yang aku katakan. Sehingga suatu *Dar* yang merupakan *Dar al-Islam* secara yakin tidak menjadi *Dar al-Kufr* sebab suatu keraguan atau kemungkinan, berdasarkan kaidah yang telah diketahui bahwa sesuatu yang tetap dengan yakin tidak bisa hilang sebab suatu keraguan atau kemungkinan. Berbeda dengan *Dar al-Kufr*, dimana ia akan menjadi *Dar al-Islam* sebab tampaknya hukum-hukum Islam di dalamnya, karena dalam hal itu terdapat unsur mengunggulkan sisi Islam karena sabda Nabi ﷺ: *"Islam itu luhur dan tidak diluhuri."* Maka hilanglah keraguan bahwa penyandaran itu bila mempertimbangkan tampaknya berbagai hukum. Tapi berbagai hukum *Kufr* tidak akan tampak kecuali dengan dua syarat berikut ini, yaitu berdekatan dengan *Dar al-Kufr* dan hilangnya

keamanan yang utama, sebab berbagai hukum tak akan tampak kecuali dengan kekuasaan, dan tidak ada kekuasaan tanpa keduanya–*wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam*–.

Qiyas perbedaan pendapat ini ada dalam masalah bumi milik umat Islam yang orang-orang musyrik menampakkan diri dan berbagai hukum kufur di dalamnya, atau penduduknya merupakan ahli *dzimmah* yang lantas merusak akad *dzimmah* dan menampakkan berbagai hukum syirik, apa bumi tersebut menjadi *Dar al-Harb*? Masalah ini berdasar perbedaan pendapat yang telah aku sebutkan.

c. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, VI/225-226 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَحَكَى الطَّبَرِيُّ عَنْ مَالِكٍ قَالَ إِنْ تَرَكَ أَهْلُ مِصْرَ الْأَذَانَ عَامِدِينَ أَعَادُوا الصَّلَاةَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي وُجُوبِ الْأَذَانِ جُمْلَةً عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ لِأَنَّ الْأَذَانَ هُوَ الْعَلَامَةُ الدَّالَّةُ الْمُفَرِّقَةُ بَيْنَ دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْكُفْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ لَهُمْ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ فَأَمْسِكُوا وَكُفُّوا وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا الْأَذَانَ فَأَغِيرُوا أَوْ قَالَ فَشُنُّوا الْغَارَةَ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ، الْحَدِيثَ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَدَاوُدُ: الْأَذَانُ فَرْضٌ، وَلَمْ يَقُولُوا عَلَى الْكِفَايَةِ.

Karena sungguh azan merupakan tanda-tanda yang menunjukkan yang membedakan antara *Dar al-Islam* dan *Dar al-Kufr*. Apabila mengutus pasukan perang Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: *"Apabila kalian mendengar azan maka tahanlah dan cegahlah; jika kalian tidak mendengar azan maka serbulah,"* atau berkata: *"Maka berjuanglah melawan gangguan (musuh)."* Dalam *Shahih Muslim*, perawi berkata: *"Rasulullah ﷺ sering melakukan penyerangan ketika fajar terbit; tatkala beliau mendengar azan maka beliau menahan dan jika tidak maka beliau menyerbu..."* Atha', Mujahid, al-Auza'i, dan Dawud berpendapat, bahwa azan adalah *fardhu*, dan mereka tidak mengatakan *fardhu kifayah*.

d. *At-Taj wa al-Iklil*, I/451 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

عِيَاضٌ مُتَضَمِّنُ الْإِعْلَامِ فِي الْأَذَانِ دُخُولُ الْوَقْتِ وَالدُّعَاءُ لِلْجَمَاعَةِ وَمَكَانُ صَلَاتِهَا وَإِظْهَارُ شِعَارِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّ الدَّارَ دَارُ الْإِسْلَامِ انتهى

Menurut *'Iyadh*, yang terkandung dalam pemberitaan azan ialah masuknya waktu shalat, mengajak jamaah, tempat shalatnya, menampakkan syi'ar Islam, dan sungguh *Dar*nya adalah *Dar al-Islam*.

e. *At-Taj wa al-Iklil*, I/449 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلِقَوْلِ الْقَرَافِيِّ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ فَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، فَمِمَّا وَرَدَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ. وَلَهُ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: الْإِعْلَانُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمُوجِبُ لِمَشْرُوعِيَّتِهِ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ الْإِسْلَامِ وَيُؤْنِسُ الْجِيرَانَ وَيُسْتَجَابُ عِنْدَهُ الدُّعَاءُ.

Adapun ijma' maka karena ungkapan al-Qarafi: *"Umat Islam sepakat disyariatkannya azan maka sungguh terdapat hadits-hadits shahih mengenai keutamaannya."* Di antara perkara yang terdapat dalam *Shahihain* dari sabda nabi ﷺ: *"Bila kita dipanggil untuk shalat maka setan membelakangi se-dhirat, sehingga tidak mendengar azan."* Hal ini ada beberapa faidah; di antaranya menjelaskan masuknya waktu shalat, maksudnya perkara yang menetapkan disyariatkannya. Di antara faidahnya memberitakan bahwa *dar* adalah *dar Islam*, menaungi tetangga dan dipenuhi doa di sana.

f. *Al-Umm*, IV/181 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

قال الشَّافِعِيُّ: وإذا ظَهَرَ الْإِمَامُ على بِلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَنَفَى عنها أَهْلَهَا أو ظَهَرَ على بِلَادٍ وَقَهَرَ أَهْلَهَا ... قد صَارَتْ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ وَمِلْكًا لهم.

Asy-Syafi'i berkata: *"Bila Imam menguasai negara ahli harbi dan mengusir penduduknya darinya, menguasai suatu tempat dan memaksa penduduknya, ... tempat tersebut menjadi balad muslimin dan menjadi milik mereka."*

g. *Nihayah al-Muhtaj*, VIII/75 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَهِيَ مَا فِي قَبْضَتِنَا وَإِنْ سَكَنَهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ.

Dar al-Islam ialah tempat yang ada pada kekuasaan kita kaum muslimin, meskipun *Ahl Dzimmah* atau *Ahl 'Ahd* menempatinya.

h. *Ahkam Ahl adz-Dzimmah li Ibn al-Qayyim*, II/728 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

قَالَ الْجُمْهُورُ: دَارُ الْإِسْلَامِ هِيَ الَّتِي نَزَلَهَا الْمُسْلِمُونَ وَجَرَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَمَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَإِنْ لَاصَقَهَا. فَهَذِهِ الطَّائِفُ قَرِيبَةٌ إِلَى مَكَّةَ جِدًّا وَلَمْ تَصِرْ دَارَ إِسْلَامٍ بِفَتْحِ مَكَّةَ

Ibn Qayyim berkata: *Dar al-Islam* adalah tempat yang ditempati kaum muslimin dan berlaku hukum-hukum Islam di dalamnya; sementara tempat yang tidak berlaku hukum-hukum Islam padanya maka tidak menjadi *Dar al-Islam*, meskipun gandeng dengannya. Ini ada Tha'if yang

dekat sekali dengan Makkah dan tidak jadi *Dar Islam* sebab penaklukan Makkah.

i. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, I/267-269 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَأَمَّا الْأَرَضُونَ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَتَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ... وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تُقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ بِخَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْأَرْضِ لَنَا فَتَصِيرُ بِهَذَا الصُّلْحِ وَقْفًا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ... وَقَدْ صَارُوا بِهَذَا الصُّلْحِ أَهْلَ عَهْدٍ ... وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى أَنَّ الْأَرَضِينَ لَهُمْ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا ... وَلَا تَصِيرُ أَرْضُهُمْ دَارَ إِسْلَامٍ وَتَكُونُ دَارَ عَهْدٍ. ...

Adapun bumi yang dikuasai kaum muslimin maka ada tiga bagian... Bagian ketiga adalah Imam menguasainya dengan *shulh* (perdamaian) yang berisi bahwa bumi tersebut ditetapkan pada penguasaan mereka dengan ganti pajak yang dibayarkan mereka darinya. Bagian ini ada dua macam: 1) Imam berakad *shulh* pada mereka dengan janji bahwa kepemilikan tanah adalah untuk kaum muslimin, sehingga sebab *shulh* ini bumi tersebut menjadi wakaf dari *Dar al-Islam* ... dan penduduknya sebab *shulh* ini menjadi *Ahl al-'Ahd* ... 2) Penduduknya berakad *shulh* dengan janji bumi tetap menjadi milik mereka dan ditetapkan pajak padanya yang dibayarkan darinya ... bumi mereka tidak menjadi *Dar al-Islam* dan menjadi *Dar al-'Ahd.*

j. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, XX/201 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

دَارُ الْعَهْدِ: وَتُسَمَّى دَارَ الْمُوَادَعَةِ وَدَارَ الصُّلْحِ وَهِيَ: كُلُّ نَاحِيَةٍ صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَهَا بِتَرْكِ الْقِتَالِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَهْلِهَا.

Dar al-'Ahd, dan disebut *Dar al-Muwada'ah* dan *Dar ash-Shulh*, yaitu setiap tempat yang penduduknya diakadi *shulh* oleh kaum muslimin tanpa peperangan dengan janji bumi menjadi milik penduduknya.

k. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, XX/206 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

دَارُ الْحَرْبِ: هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً.

Dar al-Harb adalah setiap tempat yang hukum-hukum *kufr* terdapat di dalamnya secara dominan.

l. *Al-Inshaf*, IV/88 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَدَارُ الْحَرْبِ مَا يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْكُفْرِ.

Dar al-Harb adalah tempat yang hukum *kufr* mendominasi di dalamnya.

3. Penyitaan Aset sebagai Sanksi Tindak Pidana

Deskripsi Masalah

Hukum positif Indonesia menjadikan sita aset, pemblokiran rekening bank, pencekalan pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang untuk bepergian ke luar negeri sebagai sanksi hukum. Apabila merujuk pada *hadd sariqah* terjadi polemik di kalangan Fuqaha tentang ancaman pengembalian barang hasil curian atau setara pengganti kepada pemilik. Begitu pula terjadi *khilaf* sekitar sanksi *hadd al-hirabah* dan pembebanan *gharamah* (ganti rugi), manakala terpidana sudah menjalani *hadd*.

Pertanyaan

a. Perlukah pengusutan sumber dana terkait status *milku al-tamm* yang diduga dari hasil kejahatan serta ditindak-lanjuti dengan penyitaan menurut hukum Islam?

b. Tergolong pidana apakah perbuatan tindak pencucian uang dalam hazanah fikih Islam?

c. Barang bukti hasil tindak kejahatan, bolehkah digolongkan sebagai *mawarid al-daulah*?

Jawaban a

Pengusutan sumber dana diperlukan dalam rangka mengetahui apakah terbukti benar harta itu bersumber dari hasil kejahatan sehingga dapat disita untuk dikembalikan. Bila hasil pengusutan itu menunjukkan bahwa harta itu merupakan *milku at-tam* (hak milik yang sempurna) dan harta hasil kejahatannya telah habis, maka harta *milku at-tam* dapat disita sebagai pengganti harta hasil kejahatan yang telah habis.

Dasar Pengambilan Hukum

Bughyah al-Mustarsyidin, 613:

(مسألة) : حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره دينا، فإن كان المدين

مقرا باذلا طالبه به، ولا يحل له أخذ شيء، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفرا، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة، نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن، ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط، ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه، ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه، وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه، وإذا جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل، نعم يمتنع الكسر في غير متعد لنحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ، أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر، بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما، واشترى جنس حقه وملكه، وهو أعني المأخوذ من الجنس أو غيره، مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمته، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه، فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد، ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا، ويرد الزائد لمالكه، ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته، لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا، ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشي أن الغريم يأخذ منه ظلما، وله إقامة شهود بدين قد بريء منه ولم يعلموه على دين آخر، كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص، وإن لم توجد شروطه للضرورة، فإن نقص ماله جحد بقدر حقه، اهـ ملخصا من التحفة والنهاية.

Kesimpulan masalah memperoleh itu ketika ada barang atau hutang pada seseorang di samping orang lain. Jika berhak atas benda dengan kepemilikan atau dengan semisal menyewakan, wakaf atau wasiat dengan

manfaat atau wilayah, seperti benda yang di*ghashab* pada *muwalli*nya dan mampu mengambilnya maka dalam contoh ini dia boleh mengambil sendiri jika tidak khawatir *dharar* meskipun pada orang lain. Jika tidak ada kuasa pada orang yang terdapat kebiasaan di sampingnya seperti membeli barang yang di*ghashab* yang tidak diketahuinya. Dan dalam semisal persewaan yang berhubungan dengan benda di mana mengambil benda untuk memenuhi manfaat darinya. Dan yang berhubungan dengan tanggungan yaitu mengambil *qimah* manfaat, dan meringkas perkara yang diyakini sungguh itu adalah *qimah* manfaat tersebut. Maka jika khawatir kerusakan dari mengambil tersebut maka wajib melaporkan pada *qadhi* meskipun berhak hutang pada orang lain. Jika orang yang dihutangi mengakui dan menyerahkan maka dia menuntutnya. Tidak halal baginya mengambil sesuatu. Bahkan wajib mengembalikannya dan menanggungnya jika rusak. Selama syarat *taqash* (menyusut) tidak ditemukan, mengakui perkara yang tercegah atau yang diingkari dan tidak ada *bayyinah* pada orang yang mendapatkan. Begitu juga apabila memiliki *bayyinah* menurut *qaul ashah* maka mengambil jenis haknya dari hartanya dengan mengambil paksa. Begitu juga selain jenis haknya meskipun *amat* (budak wanita) apabila tidak ada jenis karena darurat.

Ya, mengambil *naqd* menjadi tertentu jika memungkinkan. Jika orang yang dihutangi itu dicegah tasarufnya karena melarat atau meninggal yang memiliki hutang maka tidak mengambil kecuali kadar haknya dengan mengalikan jika ia mengetahuinya; dan jika tidak maka berhati-hati. Tempat pengambilan harta tersebut jika orang yang berhutang membenarkan bahwa sungguh ia memilikinya. Sedangkan jika tidak maka tidak boleh mengambilnya. Jika mengakui perkara yang diambil darinya kepada orang yang memperoleh, sungguh ia mengambil dari hartanya, begitu juga ia boleh angkuh dan bersumpah kepadanya. Dan berniat sungguh ia tidak mengambil dari hartanya yang tidak berhak mengambilnya. Jika kita membolehkan mengambil dengan memperoleh maka boleh baginya dengan sendiri, tidak dengan wakilnya. Kecuali karena lemah memecahkan pintu dan melubangi tembok bagi orang yang dihutangi untuk mengantarkan kepada pengambilan. Tidak ada tanggungan seperti halnya orang yang membuat kesialan.

Ya dilarang memecahkan di selain orang yang ceroboh bagi semisal anak kecil dan dalam orang yang tidak hadir yang diudzuri meski boleh mengambil. Kemudian apabila yang diambil dari jenis hak dan sifatnya maka bisa memilikinya dengan sekedar mengambil. Atau dari selain jenisnya atau lebih tinggi darinya dari sifat maka menjualnya meski dengan perkara yang diizini, tidak karena dirinya dan *mahjur*nya dengan izin hakim jika mudah. Dengan gambaran hakim mengetahuinya

atau mungkin baginya menegakkan *bayyinah* tanpa kesulitan dan biaya pada keduanya. Dan membeli jenis haknya dan kepemilikannya; yaitu saya menghendaki barang yang diambil dari jenis atau lainnya, yang ditanggung pada orang yang mengambil dengan murni mengambilnya dengan ujung *qimah*. Dan tidak mengambil di atas haknya jika mungkin meringkas pada kadar haknya. Jika tidak mungkin maka boleh dan tidak menanggung kelebihannya. Dan mencukupkan pada penjualan kadar haknya jika mungkin juga. Dan mengembalikan kelebihan kepada pemiliknya. Dan apabila tidak mungkin mengambil harta orang yang berhutang maka boleh baginya mengambil harta orang yang berhutang dengan syarat tersebut. Yaitu angkuh, mencegahnya atau membuat alasan. Akan tetapi wajib baginya mengingatkan orang yang berhutang dengan menyita hingga tidak menyita kedua kali. Dan tidak wajib baginya memberitahu orang yang berhutang pada *gharim*, sibab tidak ada faidahnya kecuali jika khawatir sungguh orang yang berhutang itu mengambil darinya secara dhalim. Dan ia boleh menegakkan saksi-saksi dengan hutang yang mampu orang bebas darinya dan mereka tidak mengetahuinya atas hutang yang lain. Sebagaimana boleh angkuh terhadap orang yang mengangkuhinya apabila pada orang yang angkuh seperti perkara yang berguna baginya dan merugikan kepadanya atau lebih banyak maka hasillah *taqash* (menyusut). Dan jika tidak ditemukan syarat-syaratnya sebab darurat. Jika hartanya kurang maka angkuh dengan kadar haknya.

Jawaban b

Di khazanah fikih belum ditemukan istilah secara khusus tentang pencucian uang, namun bisa dimasukkan pada pidana umum seperti *tasharruf milk al-ghair* (membelanjakan harta milik orang lain), *khianat*, *ghurur* atau yang lain karena tindakan tersebut adalah lanjutan tindak kriminal untuk menyamarkan hasil korupsi atau tindak pemanfaatan harta yang bukan haknya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Az-Zawajir*, I/383:

الْكَبِيْرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّمَانُوْنَ بَعْدَ الْمِائَةِ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبُيُوْعَاتِ الْفَاسِدَةِ وَسَائِرِ وُجُوْهِ الْأَكْسَابِ الْمُحَرَّمَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. وَاخْتَلَفُوْا فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيْلَ الرِّبَا وَالْقِمَارُ وَالْغَصْبُ وَ السَّرِقَةُ وَالْخِيَانَةُ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَأَخْذُ الْمَالِ بِالْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَعَلَيْهِ قِيْلَ لَمَّا نَزَلَتْ ... وَقِيْلَ هُوَ الْعُقُوْدُ الْفَاسِدَةُ وَالْوَجْهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهَا

مُحْكَمَةٌ مَا نُسِخَتْ وَلَا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَكْلَ بِالْبَاطِلِ يَشْمَلُ كُلَّ مَأْخُوذٍ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءٌ عَلَى جِهَةِ الظُّلْمِ كَالْغَصْبِ وَالْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ ... أَوْ عَلَى جِهَةِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ كَالْمَأْخُوذِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ.

Dosa besar yang ke seratus delapan puluh tujuh (187) adalah makan harta dengan penjualan yang rusak dan macam-macam cara penghasilan yang diharamkan. Allah ﷻ berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.* Para ulama berbeda pendapat mengenai maksudnya; menurut satu pendapat: riba dan judi, *ghashab*, mencuri, khianat, persaksian dusta dan mengambil harta dengan sumpah palsu. Ibn abbas berkata: *"Hal itu adalah perkara yang di ambil dari manusia tanpa iwadh."* Dengan ini dikatakan: ketika ayat tersebut turun ... Menurut satu pendapat: Hal itu adalah akad yang rusak dan *wajah* menurut pendapat ibn Mas'ud sungguh ayat tersebut *muhkamah* perkara yang di*naskh* dan tidak di*naskh* sampai hari kiamat. Hal itu karena sungguh makan dengan cara batil mencakup setiap perkara yang diambil tanpa hak, baik itu pada arah kedzaliman seperti *ghashab*, khianat dan mencuri... atau atas arah makar (tipu muslihat) dan membujuk (menipu) seperti barang yang diambil dengan akad yang rusak. perkara yang saya sebutkan dikuatkan oleh ungkapan sebagian ulama.

b. *Al-Mabsuth li as-Sarkhasi*, XXVII/84:

اعْلَمْ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ حَلَّ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَلَكِنْ فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ يُرَادُ بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْجِنَايَةِ الْفِعْلُ فِي النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ.

Ketahuilah sungguh *jinayah* (kriminal) adalah nama perbuatan yang diharamkan menurut syara' baik menempati harta atau nyawa; akan tetapi dalam lisan fuqaha maksud *jinayah* adalah nama perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan anggota tubuh.

c. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, IX/245:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ لِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» وَلِأَنَّ مَالَا يَمْلِكُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَهُوَ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ أَوِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ.

الشَّرْحُ: حديث حكيم صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ «مِنْ

غَيْرِ إِذْنِهِ" يُرِيْدُ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ شَرْعِيٍّ، فَيَدْخُلُ فِيْهِ الْوَكِيْلُ وَالْوَصِيُّ وَقَيِّمُ الْقَاضِيْ فِيْ بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ وَالْقَاضِيْ وَنَائِبِهِ فِيْ بَيْعِ مَالِ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ أَدَاءُ دَيْنٍ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ بَيْعِ مَالِهِ فِيْ وَفَائِهِ، فَكُلُّ هٰذِهِ الصُّوَرِ يَصِحُّ فِيْهَا الْبَيْعُ لِوُجُوْدِ الْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ، "لَعَلَّ الصَّوَابَ مَالاَ يَمْلِكُهُ"

Al-Mushannif-*rahimahu Allah ta'ala*- berkata: Tidak boleh menjual perkara yang tidak dimiliki tanpa izin pemiliknya; sebab hadits yang diriwayatkan Hakim bin Hazm: Sungguh Nabi ﷺ bersabda: *Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu.* Dan karena sungguh barang yang tdak dimiliki itu tidak bisa diserahkan, maka ia seperti burung di awang-awang atau ikan di air. *Syarah*: Hadits Hakim itu shahih diriwayatkan oleh abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, ibn Majah dan lain-lain dengan sanad-sanad shahih. At-Tirmidzi berkata: *"Status hadits itu adalah hadits hasan."* Ungkapan *mushannif*: *Tanpa izin*. Maksudnya adalah tanpa izin syara', maka memasukkan wakil, *washi*, *qayyim al-qadhi* dalam penjualan harta *mahjur*, *qadhi* dan naibnya di dalam penjualan harta orang yang membayar hutang menghadap kepadanya jika mencegah dari menjual harta dalam memenuhinya. Maka semua contoh ini sah penjualannya karena ada izin syara'. Barangkali yang lebih tepat adalah ungkapan barang tidak dimilikinya.

d. *Tauzi' Mu`assasah al-Ittihad al-Wathani*, 1998 M:

إِنَّهَا مَجْمُوْعَةُ الْعَمَلِيَّاتِ الْمَالِيَّةِ الْمُتَدَاخِلَةِ لِإِخْفَاءِ الْمَصْدَرِ غَيْرِ الْمَشْرُوْعِ لِلْأَمْوَالِ (الْقَذِرَةِ) وَإِظْهَارِهَا فِيْ صُوْرَةِ أَمْوَالٍ مُتَحَصَّلَةٍ مِنْ مَصْدَرٍ مَشْرُوْعٍ. أَوِ الْإِسْهَامُ فِيْ تَوْظِيْفِ أَوْ إِخْفَاءِ أَوْ تَحْوِيْلِ الْعَائِدِ الْمُبَاشِرِ أَوْ غَيْرِ الْمُبَاشِرِ لِجِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٍ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ جَرِيْمَةَ غَسِيْلِ الْأَمْوَالِ هِيَ جَرِيْمَةٌ تَابِعَةٌ تَفْتَرِضُ ابْتِدَاءً سَبْقَ ارْتِكَابِ جَرِيْمَةٍ أَوَّلِيَّةٍ (أَصْلِيَّةٍ) يَنْتُجُ عَنْهَا أَمْوَالٌ غَيْرُ مَشْرُوْعَةٍ ثُمَّ تَأْتِيْ فِيْ مَرْحَلَةٍ تَالِيَةٍ عَمَلِيَّاتُ غَسِيْلِ هٰذِهِ الْأَمْوَالِ لِتَطْهِيْرِهَا فِيْ إِحْدَى صُوَرِ الْغَسِيْلِ. (د.هدى قشقوش: جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولى .دار النهضة ص ١٧٩)

Sungguh itu adalah kumpulan *amaliyah* harta yang dimasukkan untuk menyamarkan *masdar* yang tidak disyariatkan pada harta-harta yang (menjijikkan/kotor) dan menjelaskannya dalam bentuk harta-harta yang hasil dari *masdar masyru'*. Atau memberikan saham dalam penugasan, penyamaran atau pemindahan perkara yang kembali yang terbagi atau selain terbagi karena *jinayat*, kejahatan. Dari sini maka sungguh kriminal

mengalirkan harta merupakan kriminal yang mengikut yang fardhu di permulaan mendahului melakukan kriminal yang pertama (yang asli) dimana harta-harta membuahkan hasil darinya yang tidak disyariatkan. Lalu akan datang dalam *marhalah* selanjutnya mengalirkan harta-harta ini untuk menyucikannya dalam salah satu modus-modus pencucian uang.

Jawaban c
Barang bukti tidak dapat dijadikan *mawaridud dawlah* (sumber pendapatan negara), melainkan harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dasar Pengambilan Hukum

Al-Bahr ar-Ra'iq, V/31 [al-Marja' al-Akbar]:

رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّعْزِيرَ مِنَ السُّلْطَانِ بِأَخْذِ الْمَالِ جَائِزٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَفِي الْخُلَاصَةِ: سَمِعْتُ عَنْ ثِقَةٍ أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَالِ إِنْ رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ أَوِ الْوَالِي جَازَ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ رَجُلٌ لَا يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ يَجُوزُ تَعْزِيرُهُ بِأَخْذِ الْمَالِ اهـ وَأَفَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عِنْدَهُ مُدَّةً لِيَنْزَجِرَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الْحَاكِمُ إِلَيْهِ لَا أَنْ يَأْخُذَهُ الْحَاكِمُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إِذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ.

Diriwayatkan dari Abi Yusuf sungguh takzir dari sultan dengan menyita harta itu boleh. Begitu juga menurut Dhahiriyyah. Dalam *al-Khulashah*: Saya mendengar dari Tsiqah sungguh takzir dengan menyita harta jika *qadhi* atau wali melihat itu maka boleh. Di antara jumlah itu adalah seorang laki-laki yang tidak menghadiri jamaah maka boleh ditakzir dengan menyita harta. Dan memberikan faidah dalam *al-Bazaziyyah*: Sungguh makna takzir dengan menyita harta menurut satu qaul adalah menahan sesuatu dari hartanya ketika suatu masa untuk mencegah lalu hakim mengembalikan padanya, tidak boleh bagi hakim mengambilnya untuk dirinya sendiri atau untuk *baitul mal*; sebagaimana dipahami orang dhalim sebab tidak boleh bagi seorang muslimin mengambil harta orang lain tanpa sebab syar'i.

4. Pakta Integritas Anti Poligami

Deskripsi Masalah

Euforia tuntutan publik terhadap partai politik dan kader legislatif menjurus pada pakta integritas moral, semisal kontrak politik dan pakta integritas anti poligami. Untuk yang disebut terakhir merupakan inisiatif parpol, karena PP. No. 10/1983 dan PP. No. 45/1990 tidak menjangkau

pejabat negara, melainkan sebatas PNS dan pegawai negeri sipil perempuan untuk dijadikan isteri kedua dan seterusnya.

Pertanyaan

Dapatkah kontrak politik, pakta integritas anti poligami dan sejenisnya dijadikan dasar pemakzulan pejabat negara yang melanggarnya berdasar hukum Islam?

Jawaban

Pada prinsipnya tujuan diberlakukannya kontrak politik, pakta integritas dan sejenisnya bertujuan untuk kemaslahatan bersama, misalnya tentang anti korupsi. Namun jika syarat yang tertera dalam kontrak politik maupun pakta interitas tersebut mengandung pelarangan hal-hal yang *jawaz*/halal menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan dan menurut ulama yang lain diperkenankan.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Raudhah al-Muhadditsin*, IX/281:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Dari Amr bin Auf al-Muzanni ﷺ sungguh Rasulullah ﷺ bersabda: Perdamaian itu boleh di antara muslimin kecuali akad damai yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram dan kaum muslim menetapi pada syaratnya kecuali satu syarat yaitu mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram.

b. *Bulugh al-Maram*, IX/281:

صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَنْكَرُوْا عَلَيْهِ لِأَنَّ رَاوِيَةَ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيْفٌ وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه.

Al-Hafidh dalam *al-Bulugh* berkata: at-Tirmidzi menshahihkan dan mereka mengingkarinya karena sungguh riwayat Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf itu lemah dan seolah-olah sungguh ia menganggap banyak jalurnya. Ibn Hibban sungguh menshahihkannya dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

c. *'Aun al-Ma'bud*, VIII/93:

(حَرَّمَ حَلَالًا): كَمُصَالَحَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا (أَوْ

أَحَلَّ حَرَامًا كَالْمُصَالَحَةِ عَلَى وَطْءِ أَمَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا، أَوْ أَكْلِ مَالٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ أَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ): (الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ): أَيْ ثَابِتُوْنَ عَلَيْهَا لَا يَرْجِعُوْنَ عَنْهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هٰذَا فِي الشُّرُوْطِ الْجَائِزَةِ فِي حَقِّ الدِّيْنِ دُوْنَ الشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ وَهُوَ مِنْ بَابِ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْوَفَاءِ بِالْعُقُوْدِ.

Mengharamkan perkara halal seperti perdamaian istri pada suami atas ketentuan suami tidak menthalak istri atau tidak menikahinya (atau menghalalkan perkara yang haram seperti perdamaian atas ketentuan me*wathi amat* (budak) yang tidak halal di*wathi* atau memakan harta yang tidak halal dimakan atau semisalnya). (Kaum muslim menetapi pada syarat-syarat mereka) maksudnya menetapi padanya, tidak kembali darinya. Al-Khattabi berkata: *"Hal ini di dalam syarat-syarat yang boleh dalam hak hutang bukan syarat-syarat yang rusak; yaitu dari bab perkara yang diperintahkan Allah agar dipenuhi dengan akad."*

d. *Ihkam al-Ahkam Syar 'Umdah al-Ahkam*, I/393:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ". ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيْثِ وَأَلْزَمُوْا الْوَفَاءَ بِالشُّرُوْطِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى وَلَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ لِظَاهِرِ الْحَدِيْثِ وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ: إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِمِثْلِ هٰذِهِ الشُّرُوْطِ الَّتِيْ لَا يَقْتَضِيْهَا الْعَقْدُ فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْهَا فَالنِّكَاحُ صَحِيْحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَرُبَّمَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ الْحَدِيْثَ عَلَى شُرُوْطٍ يَقْتَضِيْهَا الْعَقْدُ مِثْلُ: أَنْ يَقْسِمَ لَهَا وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُحْسِنَ عِشْرَتَهَا وَمِثْلُ: أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ. وَفِيْ هٰذَا الْحَمْلِ ضُعْفٌ لِأَنَّ هٰذِهِ الْأُمُوْرَ لَا تُؤَثِّرُ الشُّرُوْطُ فِيْ إِيْجَابِهَا فَلَا تَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَى تَعْلِيْقِ الْحُكْمِ بِالْاِشْتِرَاطِ فِيْهَا. وَمُقْتَضَى الْحَدِيْثِ: أَنَّ لَفْظَةَ: "أَحَقُّ الشُّرُوْطِ" تَقْتَضِيْ: أَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ الشُّرُوْطِ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ.

Dari Uqbah bin Amir ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sungguh syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah perkara yang kamu anggap halal pada farji."* Kaum berpendapat bahwa dhahir hadits dan mereka menetapkan pemenuhan dengan syarat-syarat meski tidak dari tuntutan

akad, seperti tidak menikahinya, tidak menjadikannya selir dan tidak mengeluarkannya dari negaranya; karena dhahir hadits. Selain mereka berpendapat: Sungguh tidak wajib memenuhi dengan semisal syarat-syarat ini yang tidak dituntut oleh akad; apabila terjadi sesuatu darinya maka pernikahan itu sah, sedangkan syarat itu batal dan kewajiban ialah *mahar mitsil*. Terkadang sebagian ulama mengarahkan hadits pada syarat-syarat yang dituntut oleh akad, seperti: menggilir kepada istri, menafkahinya dan memenuhi haknya atau memperbaiki pergaulannya dan semisal: tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami dan semisalnya dari tuntuatan akad. Dalam pengarahan ini ada kelemahan, karena sungguh perkara ini tidak mempengaruhi syarat-syarat dalam penetapannya; maka tidak sangat hajat pada ketergantungan hukum dengan persyaratan di dalamnya. Dan tuntutan hadits sungguh lafal: "syarat-syarat yang lebih berhak": menuntut adanya sebagian syarat-syarat itu menuntut pemenuhan.

e. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, XXXIII/322 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْإِمَامِ دُونَ مُوجِبٍ لِأَنَّ عَقْدَهُ كَانَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ مَعَ سَدَادِ حَالِهِ، وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ لَهُ عَزْلُ الْقَاضِي مَا كَانَ مُقِيمًا عَلَى الشَّرَائِطِ لِأَنَّهُ بِالْوِلَايَةِ يَصِيرُ نَاظِرًا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى سَبِيلِ الْمَصْلَحَةِ لَا عَنِ الْإِمَامِ، وَيُفَارِقُ الْمُوَكِّلَ، فَإِنَّ لَهُ عَزْلَ وَكِيلِهِ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ خَاصَّةً. وَهَلْ يَنْعَزِلُ الْقَاضِي إِذَا كَثُرَتِ الشَّكْوَى عَلَيْهِ؟

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: الْأَوَّلُ: وُجُوبُ عَزْلِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُتَعَيِّنًا لِلْقَضَاءِ، وَهُوَ مَا قَالَ بِهِ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ. الثَّانِي: جَوَازُ عَزْلِهِ، فَإِذَا حَصَلَ ظَنٌّ غَالِبٌ لِلْإِمَامِ بِصِحَّةِ الشَّكْوَى جَازَ لَهُ عَزْلُهُ وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «عَزَلَ إِمَامًا يُصَلِّي بِقَوْمٍ بَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَقَالَ: لَا يُصَلِّي لَكُمْ». وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا جَازَ عَزْلُ إِمَامِ الصَّلَاةِ لِخَلَلٍ جَازَ عَزْلُ الْقَاضِي مِنْ بَابِ أَوْلَى. الثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ، وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ، إِنِ اشْتَهَرَ بِالْعَدَالَةِ، قَالَ مُطَرِّفٌ: لَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ عَزْلُهُ وَإِنْ وَجَدَ عِوَضًا مِنْهُ فَإِنَّ فِي عَزْلِهِ إِفْسَادًا لِلنَّاسِ عَلَى قُضَاتِهِمْ، وَقَالَ أَصْبَغُ: أُحِبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْزِلَهُ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ وَالرِّضَا إِذَا وَجَدَ مِنْهُ بَدَلًا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِصْلَاحًا لِلنَّاسِ، يَعْنِي لِمَا ظَهَرَ مِنْ

اسْتِيلَاءِ الْقُضَاةِ وَقَهْرِهِمْ فَفِي ذَلِكَ كَفٌّ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ فَلْيَعْزِلْهُ إِذَا وَجَدَ بَدَلًا مِنْهُ وَتَضَافَرَ عَلَيْهِ الشَّكِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَلًا مِنْهُ كَشَفَ عَنْ حَالِهِ وَصِحَّةِ الشَّكَاوَى عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ رِجَالٍ ثِقَاتٍ يَسْتَفْسِرُونَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِنْ صَدَقُوا ذَلِكَ عَزَلَهُ، وَإِنْ قَالَ أَهْلُ بَلَدِهِ: مَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا أَبْقَاهُ وَنَظَرَ فِي أَحْكَامِهِ الصَّادِرَةِ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ أَمْضَاهُ، وَمَا خَالَفَ رَدَّهُ وَأَوَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ صَدَرَ عَنْهُ خَطَأً لَا جَوْرًا.

Wajah kedua: menurut Hanabilah sungguh *qadhi* tidak termakzul dengan pemakzulan imam, tanpa penyebab yang mewajibkan hal itu. Sebab sungguh akadnya ada karena maslahat muslimin; maka imam tidak berhak memakzulkan *qadli* dengan *track record* yang bagus. Al-Qadhi abu Ya'la dari Hanabilah menukil pendapat bahwa sungguh imam tidak boleh memakzulkan qadhi selama qadhi menetapi pada syarat-syarat; karena sungguh ia dengan wilayah menjadi *nadhir* bagi muslimin atas jalan maslahat, tidak dari imam. Dan berbeda dengan *muwakkil*, Maka sungguh ia boleh memakzul wakilnya karena sungguh ia melihat dalam hak *muwakkil*nya secara khusus. Dan apakah *qadhi* menjadi termakzul apabila banyak pengaduan padanya?

Para ulama berbeda pendapatnya mengenai hal itu, pada tiga madzhab: pertama kewajiban memakzulnya, kecuali apabila menjadi tertentu pada *qadha'*. Ini adalah pendapat al-Izz bin abd as-Salam. Kedua: Boleh memakzulnya; Maka apabila wujud dugaaan kuat bagi imam dengan keabsahan keraguan maka boleh bagi imam memakzulnya. Ini menurut pendapat asy-Syafi'iyyah. Mereka mencari dalil atas perkara itu dengan hadits yang diriwayatkan: sungguh Nabi ﷺ: *"memakzul imam yang shalat bersama kaum yang meludah di arah kiblat dan bersabda: "Tidak sah shalat orang ini (menjadi imam) bagi kalian."* *Wajah istidlal* dengannya ialah jika boleh memakzul imam shalat karena cela, maka boleh memakzul *qadhi* dari *bab aula*. Ketiga diperinci; yaitu menurut pendapat Malikiyyah, jika masyhur dengan sifat adil. Al-Mutharraf berkata: *"Tidak wajib bagi imam memakzulnya meskipun menemukan iwadh darinya. Karena sungguh dalam memakzulnya ada kerusakan terhadap manusia atas qadha'nya."* Al-Asbagh berkata: *"lebih aku sukai memakzulnya meskipun dikenal bersifat adil dan rela apabila menemukan ganti darinya."* Karena sungguh dalam hal itu ada perbaikan manusia. Yakni karena perkara yang jelas dari penguasaan *qadhi* dan pemaksaan mereka, maka dalam hal itu ada pencegahan pada mereka. Sedangkan jika tidak masyhur maka makzullah *qadhi* apabila menemukan ganti darinya dan bersama keraguan padanya. Jika tidak menemukan gantinya maka membuka dari kondisinya dan keabsahan

keraguan padanya dengan lantaran lelaki yang terpercaya yang mencari penjelasan tentang hal tersebut dari warga negaranya. Apabila mereka membenarkan maka imam memakzulnya. Dan jika warga negaranya berkata: Kita tidak mengetahui darinya kecuali kebaikan maka imam menetapkannya dan melihat dalam hukum-hukum yang dikeluarkan *qadli*. Perkara yang sesuai sunnah maka diteruskannya dan perkara yang menyelisihi, maka ditolak. Dan hal tersebut ditakwil karena munculnya disebabkan kesalahan (yang tak sengaja), bukan karena menyeleweng.

f. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, XXII/226 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْخَصَّافُ، وَالطَّحَاوِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْعَزِلُ بِفِسْقِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَبُولُهُ الرِّشْوَةَ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا ارْتَشَى الْحَاكِمُ انْعَزَلَ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ يُعْزَلْ، وَبَطَلَ كُلُّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ. وَمَذْهَبُ الْآخَرِينَ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ، بَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الَّذِي وَلَّاهُ.

Syafi'iyyah berpendapat menurut *Mu'tamad*, Hanabilah, Abu Hanifah, al-Khashaf, ath-Thahawi dari al-Hanafiyyah dan ibn al-Qasshar dari Malikiyyah, hakim termakzul sebab fasik, di antaranya menerima suap. Kata Abu Hanifah: *"Bila seorang hakim menerima suap maka termakzul seketika itu meski tidak dimakzul. Dan batal tiap hukum yang dikerjakan setelah itu."* Menurut madzhab lain, ia tidak termakzul dengan hal itu, tapi termakzul dengan pemakzulan orang yang mengangkatnya.

g. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, XXXIII/324 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

طُرُوُّ مَا يُوجِبُ الْعَزْلَ. إِذَا طَرَأَ عَلَى الْقَاضِي مِنَ الْأَحْوَالِ مَا يُفْقِدُهُ صِفَةً مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي لَوْ كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ تَعْيِينِهِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَتَوَلَّى الْحُكْمَ - كَالْجُنُونِ وَالْخَرَسِ وَالْفِسْقِ - فَهَلْ تَبْطُلُ وِلَايَتُهُ؟ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ عَزْلِ الْإِمَامِ لَهُ؟. لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: قَوْلٌ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ طُرُوِّ مَا يُوجِبُ الْعَزْلَ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَوْلٌ آخَرُ: لَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يَعْزِلَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَا يَمْنَعُ التَّوْلِيَةَ ابْتِدَاءً كَالْجُنُونِ وَالْفِسْقِ يَمْنَعُهَا دَوَامًا.

Datangnya hal yang menetapkan pemakzulan. Jika *qadhi* kedatangan kondisi-kondisi perkara yang menghilangkan dari sifat yang mana jika ada sebelum menentukannya, maka ia tidak sah menguasai hukum; Seperti gila, tuli dan fasik. Lalu apakah batal wilayahnya? Atau harus menunggu pemakzulan imam terhadapnya. Bagi al-Hanafiyyah dan al-Malikiyyah atas hal itu ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan

pemakzulan dengan sebatas kedatangan perkara yang menetapkan *azl*; yaitu menurut *ashah* menurut asy-Syafi'iyyah. Pendapat lain mengatakan tidak termakzul hingga imam memakzulnya; yaitu menurut pendapat asy-Syafi'iyyah juga. Sedangkan al-Hanabilah berpendapat bahwa perkara yang mencegah penguasaan di permulaan seperti gila dan fasik; maka mencegahnya selamanya.

h. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, XXXIII/324 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

نفاذ العزل لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا عَزَلَ الْقَاضِيَ فَأَحْكَامُهُ نَافِذَةٌ، وَقَضَايَاهُ مَاضِيَةٌ حَتَّى يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ، فَعِلْمُهُ بِذَلِكَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ عَزْلِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ عَزْلِهِ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ قَضَايَا النَّاسِ وَأَحْكَامِهِ بِهِ وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ مِنْ وُجُوبِ نَفَاذِ أَحْكَامِهِ حَتَّى يَصِلَهُ عِلْمُ الْعَزْلِ، وَلِعِظَمِ الضَّرَرِ فِي نَقْضِ أَقْضِيَتِهِ.

Pelaksanaan pemakzulan. Tidak terdapat khilaf di antara fuqaha dalam sungguh imam jika memakzul *qadhi* maka hukum-hukumnya terlaksana. Dan tuntutannya terlewati hingga dia mengetahui pemakzulan. Maka pengetahuannya terhadap hal tersebut ialah syarat sah *azl*nya. Menurut ulama yang berpendapat boleh memakzulnya. Hal itu karena hubungan tuntutan manusia dan hukum-hukum terhadapnya dan perkara yang dituntut darurat dari kewajiban pelaksanaan hukum-hukumnya hingga pengetahuan *azl* sampai padanya, dan karena kebesaran *dharar* dalam pembatalan putusan-putusannya.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL QANUNIYAH SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR di PP Modern Hidayatul Hasan Blukon Lumajang 17-18 Januari 2014

5. Nikah Sirri Masuk Penjara
6. *Shighat Taukil* (Mewakilkan) Akad Nikah

KOMISI C
Qanuniyah

MUSHAHIH

KH. Muhibbul Aman Ali
KH. Mukhlis Dimyati

PERUMUS

KH. Ali Musthofa
KH. Murtadho Abdul Ghoni

MODERATOR

KH. MB. Firjaun Barlaman

NOTULEN

KH. Achmad Shampton Masduqie

5. Nikah Sirri Masuk Penjara

Deskripsi Masalah

Allah ﷻ menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia, berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan juga ada perempuan. Mereka diciptakan supaya saling mengenal dan saling melindungi antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing manusia bisa dipastikan akan membutuhkan kebahagian. Kebahagian dalam beribadah, berkarir, berpolitik dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Kebahagiaan yang terakhir ini, hanya bisa dirasakan setelah adanya perkawinan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan *Ilahi* atas segala makhluk.

Setiap manusia, secara naluri, senantiasa membutuhkan pendamping hidupnya yang dapat saling mengisi dan melindungi, dan ketika perasaan ini ada dan mereka menemukan pasangan yang cocok, maka tumbuhlah rasa cinta di antara mereka. Artinya, tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah supaya mereka saling mengenal, tumbuh perasaan cinta dan kasih sayang. Baru kemudian, mereka akan berpikir untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sesuai dengan aturan yang ada dalam *shari'at* Islam, sehingga terciptalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal itu senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21.

Perkawinan merupakan lembaga legislasi untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya oleh syari'at Islam diarahkan kepada sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Pada awalnya, kawin hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep *al-jam'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat serta rukun tertentu pula. Namun, akhirnya 'ulama' memberikan sebuah definisi baku tentang perkawinan, yaitu sebuah ikatan suci yang dilambangkan dengan adanya *ijab qabul* oleh seorang laki-laki di hadapan wali si perempuan.[1] Setelah itu, si laki-laki berstatus menjadi suami sedangkan di perempuan menjadi istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal (2) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Hal tersebut sesuai dengan

---

[1] Abu Bakar Muhammad Shatha, *I'anah al-Thalibin 'ala Fath al-Mu'in* (Surabaya: al-Hidayah, 2000), III/123.

[2] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992), 114.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan disebutkan:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 5 KHI ayat (1) dan (2) disebutkan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954.

Dalam pasal 6 KHI ayat (1) dan (2) disebutkan:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara normatif memang demikian, namun pada tataran praktis banyak orang yang masih melalukan perkawinan "malu-malu" kalau tidak mau disebut sembunyi-sembunyi. Perkawinan semacam ini lebih populer dengan istilah kawin *sirri*; yaitu perkawinan yang dihadiri oleh kedua mempelai putra-putri, wali nikah, dan 2 orang saksi, akan tetapi tidak dicatatkan di KUA. Pada beberapa kasus, perkawinan *sirri* semacam ini, banyak dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri. Hal itu terjadi, karena mereka menganggap lebih baik kawin *sirri* dari berzina. Namun seiring dengan perjalanan waktu—ibarat pepatah "sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, lama-lama akan tercium juga baunya"—akhirnya istri pertama mengetahui perihal perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh suami. Akhirnya, istri melaporkan suami pada pihak yang berwajib (polisi) dengan tuduhan perselingkuhan atau berzina dengan wanita lain. *Walhasil*, suami ditangkap dengan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan melanggar pasal 284 ayat (1), yang berbunyi:

Diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan:
Ke-satu:

a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui,

bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.

Pasal ini dibuat untuk menjerat para suami yang menikah lagi secara *sirri*, dengan tuduhan berzina. Dalam analisis fikih, tentu pasal ini akan menimbulkan problem yang rumit, sebab istri menuduh suaminya berzina, padahal suaminya tidak berzina. Hal ini, sekilas dalam konsep fikih, termasuk *qadhaf* yang konsekuensinya si istri akan dikenai *had qadhaf* dan seterusnya.

Di sisi lain, ada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menimbulkan masalah bagi kalangan umat Islam. Pasal itu berbunyi: *"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun"*.

Berdasarkan tafsiran dari pasal 285 KUHP tersebut di atas, disimpulkan bahwa persetubuhan atau hubungan intim yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, maka mereka tidak dikenai pidana.

Dari kandungan Pasal 284 dan Pasal 285 KUHP itu akan terlihat ketidakberpihakan dua pasal tersebut pada umat Islam. Sebab dengan adanya Pasal 284 KUHP, orang-orang menikah *sirri* bisa masuk penjara karena dianggap berzina. Namun pada Pasal 286 KUHP, orang yang melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka, tidak bisa dijerat hukum pidana.

Pertanyaan

a. Bagaimanakah padangan fikih terhadap kandungan Pasal 284 dan Pasal 285 KUHP tersebut? Sesuaikah dengan konsep fikih *qadha'*?

b. Apakah tuduhan zina pada suami yang melakukan kawin *sirri* termasuk *qadhaf*?

c. Bagaimanakah cara istri untuk membebaskan dirinya dari *had qadhaf*?

d. Pada praktiknya, suami tertuduh selalu kalah dalam persidangan. Hal itu dikarenakan dia tidak bisa membuktikan (dengan bukti autentik) perkawinannya. Akhirnya, hakim pun tetap memutuskan bahwa si suami dianggap berzina. Dalam keadaan seperti ini, menurut padangan fikih *qadha'*, siapakah yang pantas untuk dikenai *had qdhaf*? Apakah istri atau penegak hukum (penyidik/ JPU/Hakim); ataukah semuanya? *(PWNU)*

Jawaban a

Penggunaan KUHP Pasal 284 dan 285 untuk mempidanakan orang yang melakukan nikah *sirri* dengan tuduhan persetubuhan diluar

nikah tidak dapat dibenarkan karena pernikahan menurut perspektif fiqh sudah sah bila sesuai dengan syarat dan rukunnya meskipun tidak dicatatkan. Namun pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi kepada mereka yang menikah dan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama. Musyawirin mendorong mereka yang menikah tanpa dicatatkan untuk segera mencatatkan pernikahannya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 91 [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةٌ: ك): يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ وَهُوَ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْمَنْدُوبَةِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالْاِسْتِقْلَالُ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ مُبَاحاً أَوْ مَكْرُوهاً أَوْ حَرَاماً لَمْ يَجِبِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيهِ كَمَا قَالَهُ (م ر) وَتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التُّحْفَةِ، ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ مُحَرَّماً لَكِنْ ظَاهِراً فَقَطْ، وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِراً وَبَاطِناً وَإِلَّا فَظَاهِراً فَقَطْ أَيْضاً، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُورِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِراً أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِعَدَمِ الْاِمْتِثَالِ، وَمَعْنَى بَاطِناً أَنَّهُ يَأْثَمُ اهـ قُلْتُ: وَقَالَ ش ق: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِراً وَبَاطِناً مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ، وَالْمَنْدُوبُ يَجِبُ، وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ التُّنْبَاكِ إِذَا قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ خِسَّةً بِذَوِي الْهَيْئَاتِ، وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَمَرَ نَائِبَهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِعَدَمِ شُرْبِ النَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْقَهَاوِي، فَخَالَفُوهُ وَشَرِبُوا فَهُمُ الْعُصَاةُ، وَيَحْرُمُ شُرْبُهُ الْآنَ امْتِثَالاً لِأَمْرِهِ، وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ وَلَوْ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْوُجُوبُ اهـ

Permasalahan dari Al-Kurdi: wajib mentaati perintah dari imam yang memiliki otoritas hal itu, seperti menyerahkan zakat dari harta yang dhahir, lalu apabila pemimpin tersebut tidak memiliki kekuasaan atas apa yang dia perintahkan dan hal yang diperintahkan tersebut tergolong hak-hak yang wajib atau sunnah maka boleh menyerahkan padanya atau menyalurkan (mendistribusikan) ke mana saja yang semestinya dengan dirinya sendiri. Kemudian apabila sesuatu yang diperintahkan ialah hal-hal yang mubah atau makruh atau haram, maka tidak wajib hukumnya menaati perintah dari pemimpin tersebut, sebagaimana

dikatakan oleh al-Imam Muhammad ar-Ramli. Sedangkan Ibnu Hajar ragu-ragu mengenai hal ini di dalam kitab *Tuhfah*nya, lantas Beliau condong kepada hukum wajib untuk mentaati di dalam setiap sesuatu yang diperintahkan oleh pemimpin rakyat meski sesuatu itu sebenarnya adalah sesuatu yang haram akan tetapi sebatas ketaatan lahiriyah saja, adapun selain sesuatu yang haram dan terdapat kemaslahatan secara umum (menyeluruh) di dalamnya, maka wajib mentaatinya baik secara dhahir maupun batin, lalu jika tidak ada kemaslahatan secara umum, maka hanya wajib mentaati secara lahiriyah saja. Adapun yang menjadi pertimbangan di dalam ukuran sunnah maupun mubah ialah aqidah dari orang yang diperintahkan. Maka makna yang dikehendaki dari kata dhahir (lahiriyah saja) ialah: orang yang diperintahkan tidaklah berdosa apabila dia tidak melakukan, adapun makna bathin (wajib taat secara bathin) adalah: orang tersebut berdosa apabila tidak melakukannya. Aku (al-Kurdi) berkata: al-Imam asy-Syarqowi berkata: Kesimpulannya, wajib mentaati perintah dari pemimpin secara dhahir maupun bathin apabila hal yang diperintahkan bukanlah merupakan hal yang haram atau makruh, sehingga hal yang asalnya wajib menjadi semakin kuat kewajibannya dikarenakan perintah dari sang pemimpin dan hal yang asalnya sunnah menjadi wajib, begitupun yang asalnya mubah, tetapi dengan ketentuan apabila terdapat kemaslahatan di dalamnya, seperti: larangan merokok, apabila kita berperdapat bahwa menghisap rokok adalah makruh hukumnya dengan alasan terdapat kehinaan di dalam merokok bagi mereka yang memiliki kedudukan. Sesungguhnya pernah terjadi seorang sultan telah memerintahkan ajudannya untuk menyiarkan larangan menghisap rokok bagi siapapun di berbagai pasar dan kedai, kemudian mereka melanggarnya dan menghisap rokok-rokok tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Dan sekarang pun juga masih haram hukumnya untuk menghisap rokok karena mentaati kepada perintah sultan. Kemudian apabila terdapat pemimpin rakyat memerintahkan akan sesuatu, lalu dia mencabut kembali perintah itu maka kewajiban akan hal tersebut tidaklah gugur meskipun pencabutan itu terjadi sebelum pelaksanaan. Sekian.

b. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj*, II/225 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(تَنْبِيهٌ) اعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ فَيَجِبُ فِي نَحْوِ اضْطِرَارٍ وَمَالِ مُفْلِسٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَيُنْدَبُ فِي نَحْوِ زَمَنِ الْغَلَاءِ، وَفِي الْمُحَابَاةِ لِلْعَالِمِ بِهَا، وَيُكْرَهُ فِي نَحْوِ بَيْعِ مُصْحَفٍ وَدُورِ مَكَّةَ وَفِي سُوقٍ اخْتَلَطَ فِيهِ الْحَرَامُ بِغَيْرِهِ وَمِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَفِي خُرُوجٍ مِنْ حَرَامٍ بِحِيلَةٍ كَنَحْوِ رِبًا، وَيَحْرُمُ فِي بَيْعِ نَحْوِ الْعِنَبِ مِمَّا

مَرَّ وَيَجُوزُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمِمَّا يَجِبُ بَيْعُ مَا زَادَ عَلَى قُوتِهِ سَنَةً إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَا يُكْرَهُ إِمْسَاكُهُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَمِمَّا يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ عَلَى الْحَاكِمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ لِخَبَرِ «لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ» وَلَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ بِخِلَافِهِ لَكِنْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ خَالَفَ إِذَا بَلَغَهُ لِشَقِّ الْعَصَا أَيْ: اخْتِلَالِ النِّظَامِ فَهُوَ مِنَ التَّعْزِيرِ عَلَى الْجَائِزِ وَقِيلَ: يَحْرُمُ وَمِمَّا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ قُوتًا لَا غَيْرَهُ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ بِقَصْدِ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَغْلَى فَخَرَجَ بِالشِّرَاءِ مَا لَوْ أَمْسَكَ غَلَّةَ ضَيْعَتِهِ لِيَبِيعَهَا فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ وَبِالْقَصْدِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ مُطْلَقًا ثُمَّ طَرَأَ لَهُ إِمْسَاكُهُ لِذَلِكَ، وَبِزَمَنِ الْغَلَاءِ زَمَنُ الرُّخْصِ وَمَكَانُ الْغَلَاءِ كَأَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِيَنْقُلَهُ إِلَى مَكَّةَ لِيَبِيعَهُ بِأَغْلَى أَوْ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيِ الْبَلَدِ إِلَى طَرَفِهَا الْآخَرِ لِذَلِكَ فَلَا حُرْمَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

Ketahuilah bahwa berjualan itu bisa meliputi lima hukum, sehingga bisa menjadi wajib hukumnya: seperti menjual untuk orang yang ada dalam keadaan terpaksa dan menjual harta milik orang yang *muflis*[3] yang dicekal pentasarrufannya, dan bisa juga disunnahkan seperti menjual di dalam keadaan krisis, dan menjual dengan diskon bagi penjual yang tahu akan discount tersebut, dan penjualan bisa juga dihukumi makruh sebagaimana contoh menjual mushaf dan rumah-rumah di Mekkah serta berjualan di pasar, di situ yang haram dan halal sudah bercampur dan bertransaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah harta yang haram, hal ini berbeda dengan pendapat dari Imam al-Ghozali, dan berusaha keluar dari sesuatu yang haram dengan menggunakan rekayasa, contohnya seperti riba. Dan berjualan bisa haram seperti menjual semacam anggur dari contoh-contoh yang telah terdahulu. Dan berjualan dihukumi mubah dalam transaksi yang selain transaksi-transaksi di atas tadi. kemudian di antara penjualan yang wajib adalah: menjual sesuatu yang lebih dari makanan pokoknya dalam satu tahun, apabila para manusia membutuhkannya dan hakim boleh memaksa dia untuk melakukan penjualan tersebut, dan tidak makruh menyimpannya

---

[3] *Muflis* adalah orang yang memiliki tanggungan hutang kepada orang lain yang telah datang waktu pelunasannya sementara hutang itu lebih banyak daripada jumlah hartanya. *Fath al-Mu'in Hamisy I'anah ath-Thalibin*, III/79.

apabila tidak dibutuhkan oleh orang lain, dan di antara yang haram adalah penaksiran harga dari hakim meskipun pada selain makanan dikarenakan Hadits yang berupa: *"Janganlah kalian membuat penentuan harga, karena sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga"*, dan tidak haram melakukan penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan harga, tetapi hakim berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir* kepada orang yang menyimpang darinya ketika kabar itu sampai ke hakim, dengan alasan "membelah tongkat" yang maksudnya merusak/mengganggu keteraturan/ketertiban dan itu termasuk *ta'zir* yang diperbolehkan, dan ada yang mengatakan haram. Dan di antara yang diharamkan adalah menimbun: yaitu membeli makanan pada saat meningkatnya harga, begitupun selain makanan, dengan tujuan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Lalu yang dikecualikan dari kata "membeli" adalah apabila dia menahan penghasilan dari tanah dia dengan tujuan akan menjualnya di masa-masa kenaikan harga, dan dikecualikan pula dari kata "menyengaja": apabila dia membeli untuk tujuan dirinya sendiri ataupun secara mutlak, tetapi kemudian setelah itu tiba-tiba muncul dibenaknya untuk menahannya dengan tujuan akan menjualnya di masa-masa kenaikan harga, dan yang dikecualikan dari kata "masa tingginya harga" adalah membeli pada saat murahnya harga hanya saja tempat/daerahnya yang menyebabkan mahal, seperti contoh: dia membelinya dari mesir untuk kemudian dijual di mekkah dengan harga yang lebih tinggi, atau dari satu sisi negeri menuju sisi yang lain dari negeri itu untuk menaikkan harga, maka tidak ada sama sekali keharaman dalam satupun dari hal-hal tersebut, sesuai dengan pendapat yang *mu'tamad* menurut guru kami, al-Imam Muhammad ar-Ramli berbeda dengan pendapat dari al-Imam Ibnu Hajar untuk sebagian persoalan-persoalan di atas tadi. *Hasyiyah al-Imam Qalyubi 'ala al-Jalal.*

c. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj*, IV/209 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ فَيُقَالُ فِي تَعْرِيفِهِ شَرْعًا هُوَ إيلَاجُ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلَا شُبْهَةٍ كَمَا فَعَلَ الْأَصْلُ وَقَدْ اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ قُيُودٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَفْهُومَ بَعْضِهَا بِقَوْلِهِ لَا بِغَيْرِ إيلَاجٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَجِبُ الْحَدُّ) مَعْنَاهُ لُغَةً الْمَنْعُ لِمَنْعِهِ الْفَاحِشَةَ قَالَ ع ش وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ مَثَلًا حَيْثُ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ فَيَكْفِي حَدٌّ وَاحِدٌ اهـ

Ungkapan al-Imam Zakariya al-Anshori: *"Zina ialah apa yang disebutkan di dalam perkataanku, dan seterusnya"*: Artinya maka dikatakan di dalam definisi zina secara syari'at adalah memasukkan kepala dzakar atau

seukurannya di dalam kemaluan yang diharamkan karena bendanya, yang disukai secara tabi'atnya (naluriah), bukan merupakan *wathi syubhat*. Sebagaimana definisi yang dipakai oleh kitab asal dari Kitab *Manhaj ath-Tullab*. Perkataan dari Kitab Asal tersebut telah sungguh-sungguh mencakup akan delapan ketentuan, yang mana *Mushannif* menyebutkan *mafhum* dari sebagiannya melalui perkataan beliau *"tidak dengan selain memasukkan ..."* Ungkapan Imam Zakariya al-Anshori: *"Wajib adanya hadd"*. Arti dari *hadd* secara bahasa ialah pencegahan dikarenakan ia mencegah akan perbuatan buruk. Imam As-Sibromalisi mengatakan meski perzinahan itu berulang kali hingga sampai seratus kali misalkan maka cukuplah baginya satu *hadd*/hukuman saja, apabila kesemuanya itu dari satu macam.

d. *Al-Iqna'*, II/208 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ: صِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَهُمَا الْعَاقِدَانِ، وَشَاهِدَانِ وَعَلَى الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الْوَلِيُّ، وَالشَّاهِدَانِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ مُشِيرًا إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا بِوَلِيٍّ) أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ الْقَائِمِ مُقَامَهُ كَالْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إِحْرَامِهِ (وَ) حُضُورِ (شَاهِدَيْ عَدْلٍ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: [لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ] وَالْمَعْنَى فِي إِحْضَارِ الشَّاهِدَيْنِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ. وَيُسَنُّ إِحْضَارُ جَمْعٍ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ

Pasal: di dalam menjelaskan beberapa rukun dari Nikah. Rukun-rukun dari Nikah adalah lima: *Shighat*, istri (calon istri), suami dan wali nikah, yang mana keduanya merupakan dua orang yang melaksanakan aqad, kemudian kedua saksi. Dan *Mushannif* meringkas kepada kedua rukun yang terakhir yang berupa Wali nikah dan dua orang Saksi dengan mengisyaratkannya melalui perkataan beliau: *"Dan tidaklah sah sebuah aqad pernikahan terkecuali dengan adanya Wali Nikah"* atau orang yang dia izini atau orang yang menggantikan posisi dia seperti contoh wali hakim ketika tidak adanya Wali yang khusus atau ketidakhadiran dia secara penilaian syar'i atau ketika dia menolak untuk menikahkan ataupun dia dalam keadaan beribadah *ihram*. *"Serta tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi yang adil"* dikarenakan Hadits yang telah riwayat Ibnu Hibban di dalam Kitab Shahih beliau dari Sayyidah A'isyah-*Radliyallahu Ta'ala 'Anha*- yang berupa: *"Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan adanya*

wali dan dua saksi yang adil, adapun pernikahan yang dilaksanakan dengan cara selain itu maka hukumnya ialah bathil (tidak sah), lalu apabila mereka (para wali nikah) menolak untuk menikahkan, maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali" adapun makna dari pendatangan saksi adalah kehati-hatian akan berbagai kemaluan perempuan dan menjaga pernikahan-pernikahan agar tidak diingkari. Dan disunnahkan untuk mendatangkan sekelompok orang dari golongan orang-orang yang baik dan taat di dalam beragama sebagai tambahan bagi kedua orang saksi tersebut.

Jawaban b

Bila menggunakan kalimat yang *sharih* seperti kalimat: "*Engkau berzina"*, maka termasuk *qadzaf*. Apabila menggunakan bahasa *kinayah* atau sindiran maka masih dibutuhkan penegasan. Dalam kasus ini karena menggunakan bahasa yang *sharih* maka *musyawirin* menyepakati termasuk *qadzaf*.

Dasar Pengambilan Hukum

Al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibn Idris pada *Syarh*nya, III/202 [Dar al-Hawi]:

شُرُوْطُ وُجُوْبِ حَدِّ الْقَذْفِ أَحَدَ عَشَرَ: أَنْ يَكُوْنَ الْقَاذِفُ بَالِغًا وَأَنْ يَكُوْنَ عَاقِلًا وَأَنْ يَكُوْنَ مُخْتَارًا وَأَنْ يَكُوْنَ مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ وَأَنْ لَا يَكُوْنَ مَأْذُوْنًا لَهُ فِي الْقَذْفِ وَأَنْ لَا يَكُوْنَ وَالِدًا لِلْمَقْذُوْفِ وَأَنْ يَكُوْنَ الْمَقْذُوْفُ مُسْلِمًا وَأَنْ يَكُوْنَ بَالِغًا وَأَنْ يَكُوْنَ عَاقِلًا وَأَنْ يَكُوْنَ حُرًّا وَأَنْ يَكُوْنَ عَفِيْفًا.

Syarat-syarat yang mewajibkan adanya hukuman *qadzaf* ada sebelas: *qadzif* (orang yang menuduh berzina) harus baligh, berakal, tidak terpaksa, orang yang berketetapan hukum, tidak diizinkan di dalam tindakan menuduh zina itu, bukan orang tua dari orang yang dituduh berzina, kemudian orang yang dituduh berzina adalah orang Islam, baligh, dan berakal, serta bukan budak, dan terjaga dari zina.

Jawaban c

Cara isteri untuk membebaskan diri dari *had qadzaf* dalam kasus ini adalah dengan:

1) Meminta maaf kepada suami,
2) Isteri dapat mendatangkan saksi tentang terjadinya perzinaan.

Jawaban d

Yang mendapat sanksi *had qadzaf* adalah isteri. Sementara untuk

penegak hukum apabila ada kata-kata yang mengandung unsur tuduhan zina maka termasuk *qadzif*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Fath al-Wahhab Syarh al-Manhaj*, II/193 [al-Marja' al-Akbar]:

وَاعْلَمْ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَسْقُطُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِزِنَا الْمَقْذُوفِ وَبِإِقْرَارِهِ وَبِعَفْوِهِ وَبِاللِّعَانِ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ.

Ketahuilah bahwa sungguh hukuman yang disebabkan menuduh orang lain berbuat zina itu dapat menjadi gugur dengan cara menetapkan saksi-saksi akan perbuatan zina dari orang yang dituduh tersebut dan gugur pula dengan pengakuan dari orang yang dituduh itu, ampunannya dan bisa juga melalui sumpah *li'an* jika yang dituduh istrinya sendiri.

b. *Al-Iqna'*, II/529 [al-Maktabah asy-Syamilah]:

(وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ) عَنِ الْقَاذِفِ (بِثَلَاثَةِ) بَلْ بِخَمْسَةِ (أَشْيَاءَ) الْأَوَّلُ (إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ) عَلَى زِنَا الْمَقْذُوفِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَأَنَّهَا تَكُونُ مُفَصَّلَةً فَلَوْ شَهِدَ بِهِ دُونَ أَرْبَعَةٍ حُدُّوا، كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ ﷺ. وَالثَّانِي مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ عَفْوُ الْمَقْذُوفِ) عَنِ الْقَاذِفِ عَنْ جَمِيعِ الْحَدِّ فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشُّفْعَةِ وَأُلْحِقَ فِي الرَّوْضَةِ التَّعْزِيرُ بِالْحَدِّ فَقَالَ: إِنَّهُ يَسْقُطُ بِعَفْوِ أَيْضًا، وَلَوْ عَفَا وَارِثُ الْمَقْذُوفِ عَلَى مَالٍ سَقَطَ وَلَمْ يَجِبِ الْمَالُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْحَنَّاطِيِّ وَلَوْ قَذَفَهُ فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ قَذَفَهُ لَمْ يُحَدَّ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ يُعَزَّرُ، وَالثَّالِثُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (أَوِ اللِّعَانُ) أَيْ لِعَانُ الزَّوْجِ الْقَاذِفِ. (فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ) الْمَقْذُوفَةِ وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ فِي اللِّعَانِ. وَالرَّابِعُ إِقْرَارُ الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا. وَالْخَامِسُ مَا لَوْ وَرِثَ الْقَاذِفُ الْحَدَّ. تَتِمَّةٌ: يَرِثُ الْحَدَّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ الْخَاصِّينَ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لِلسُّلْطَانِ كَالْمَالِ وَالْقِصَاصِ.

Hukuman *qadzaf* bisa gugur dari *qadzif* (orang yang menuduh berzina) dengan tiga, bahkan lima perkara: yang pertama mendatangkan saksi-saksi atas perzinahan orang yang dituduh dan sudah pernah dijelaskan bahwa saksi-saksi itu adalah empat orang dan harus mendetail (rinci), apabila kurang dari empat orang, maka mereka semua justru terkena hukuman (*hadd*). Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ﷺ[4].

---

[4] Yaitu beliau telah menjatuhkan *had* kepada tiga orang yang telah bersaksi (menuduh) perzinahan kepada Sahabat Nabi, al-Mughirah bin Syu'bah, dan tidak

Dan yang kedua adalah apa yang diisyaratkan oleh *Mushannif* dengan perkataan beliau *"atau ampunan dari orang yang dituduh"* kepada orang yang menuduh dari segala *hadd*, jika mengampuninya dari sebagian *hadd* saja maka tiada hukuman yang gugur sama sekali sebagaimana dituturkan oleh Imam ar-Rofi'i dalam *bab Syuf'ah*. Kemudian Imam an-Nawawi di dalam kitab *ar-Raudlah* menyamakan *ta'zir* dengan *hadd*, sehingga beliau berkata: *"Sesungguhnya ta'zir itu bisa menjadi gugur juga dengan sebab adanya ampunan."* Kemudian apabila ahli waris dari orang yang dituduh mengampuninya dengan ganti rugi berupa harta, maka *hadd* menjadi gugur dan harta yang diinginkan tidak wajib diberikan sebagaimana yang ada dalam *Fatawa al-Hannaathi*. Lalu apabila sang penuduh menuduhnya berzina, dan dia mengampuni, lalu setelah itu si penuduh menuduhnya lagi, maka si penuduh tersebut tidak dijatuhi *hadd* sebagaimana hal itu telah dibahas oleh Imam az-Zarkasyi, hanya saja si penuduh tersebut berhak mendapatkan *ta'zir*. Yang ketiga ialah apa yang diisyaratkan oleh *Mushannif* melalui perkataan beliau: *"Atau sumpah li'an"* maksudnya adalah sumpah *li'an* dari seorang suami yang menuduh "dalam hak istri" yang dituduh berzina, meski sang suami mampu mendatangkan saksi-saksi, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab *li'an*. Dan yang keempat adalah pengakuan dari orang yang dituduh berzina atas perzinaan. Yang kelima ialah apabila sang penuduh telah mewarisi akan keseluruhan dari *hadd* tersebut.

Penyempurnaan: Seluruh ahli waris yang khusus, dapat mewarisi *hadd*, bahkan meskipun suami ataupun istri, kemudian setelah mereka semua tiada, maka Sultan yang akan mewarisi seperti halnya harta dan *qishas*.

6. *Shighat Taukil* (Mewakilkan) Akad Nikah

Deskripsi Masalah

Ijab dalam akad nikah termasuk suatu urusan yang boleh diserahkan/diwakilkan kepada pihak lain. Pada umumnya dikalangan masyarakat, pelaksanaan *ijab* ini diserahkan/diwakilkan kepada pihak ketiga, yaitu tokoh agama, guru mempelai wanita, petugas KUA atau yang lain. Tidak demikian dengan *qabul* nikah, sekalipun sebenarnya juga boleh diwakilkan, namun umumnya mempelai laki-laki melakukannya sendiri (tanpa diwakilkan).

Shighat/redaksi *ijab* pada umumnya "وَكَّلْتُكَ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِي فُلَانًا" *saya serahkan kepadamu dalam menikahkan putriku dengan Fulan*. Tetapi terkadang dijumpai

---

ada perselisihan atas keputusan ini, sehingga hal tersebut menjadi *ijma' sukuti*. *Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, 4/184.

pula "وَكَّلْتُكَ فِي تَزْوِيجِ فُلَانٍ بِنْتِي" *saya serahkan kepadamu dalam menikahkan Fulan dengan putriku*. Ada lagi redaksi bahasa Indonesia atau bahasa daerah: *"Pak Kyai, saya pasrah wali kepada pak kyai, supaya pak kyai menikahkan putri saya... Demikian pasrah wali saya pak kyai"*. Dari beragamnya *shighat taukil* ini, terkadang menimbulkan insiden di tengah-tengah kekhidmatan acara akad nikah, yaitu perselisihan di antara para yang hadir tentang keabsahan *shighat taukil* yang digunakan.

Pertanyaan

a. Dari deskripsi di atas, manakah *shighat taukil* yang dibenarkan?
b. Bagaimanakah batasan *taukil* yang telah dianggap mencukupi?
c. Apabila wali berada di luar batas *masafah al-qashri*, manakah yang lebih utama antara *taukil wali* via telpon ataukah wali hakim?
d. Bagaimana pendapat musyawirin, jika pada *dhamir khithab* yang maksudnya adalah wakil pengucapannya berbentuk *jama'*: وَكَّلْتُكُمْ فِي (تَزْوِيجِ بِنْتِي – عَلَى زَيْدٍ –)?
   (PCNU Kab. Blitar dan PCNU Kota Malang)

Jawaban a

Semua yang dicontohkan dalam deskripsi sama dan boleh karena sudah menunjukkan izin dari *muwakkil*.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Nihayah az-Zain*, 227 [al-Marja' al-Akbar]:

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ (بِإِيجَابٍ) وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى إِذْنِ الْمُوَكِّلِ فِي التَّصَرُّفِ مِنْ لَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٍ لِلْوَكِيلِ فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ كَانَتْ صَرِيحَةً سَوَاءٌ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ (كَوَكَّلْتُكَ) فِي كَذَا أَوْ أَنَبْتُكَ فِيهِ أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي فِيهِ أَوْ فَوَّضْتُهُ إِلَيْكَ (أَوْ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ: كَقَوْلِهِ (بِعْ) أَوْ طَلِّقْ أَوْ أَعْتِقْ أَوْ زَوِّجْ إِذْ لَا يَحْصُلُ الرِّضَا إِلَّا بِالْإِيجَابِ فَالْأَمْرُ قَائِمٌ مَقَامَ الْإِيجَابِ وَأَبْلَغُ مِنْهُ، وَلَا يَجِبُ الْقَبُولُ لَفْظًا بَلِ الشَّرْطُ عَدَمُ الرَّدِّ فَقَطْ، نَعَمْ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ قَبُولٍ لَفْظًا وَلَوْ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْبُوطًا وَعَمِلَ فَهُوَ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْفَسَادِ وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إِذَا لَمْ تَزُلِ الْيَدُ عَنِ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ إِلَّا بِهِ كَمَا مَرَّ.

Wakalah hanya bisa sah dengan adanya *ijab*. *Ijab* adalah sesuatu yang menunjukkan atas izin dari *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dalam

melakukan tasarruf, baik petunjuk itu berupa lafal atau tulisan ataupun isyarat dari orang yang bisu yang memahamkan bagi sang wakil, lalu jika isyarat dari orang yang bisu tersebut dapat dipahami oleh setiap orang, maka tergolong *shighat* yang *sharih*. Ijab itu bisa berupa *shighat* aqad seperti *"Aku mewakilkan kepadamu"* dalam hal demikian, atau aku menjadikanmu pengganti dalam hal itu, atau aku memposisikan kamu di posisiku dalam mengatur hal tersebut, atau aku menyerahkannya padamu, atau bisa juga berupa *Shighot Amar* (bentuk perintah): seperti ucapan *muwakkil* "juallah" atau: ceraikanlah atau bebaskanlah atau nikahkanlah, karena ridlo tidak akan sukses kecuali dengan adanya *ijab*, maka bentuk perintah menempati posisi dari *ijab* dan bahkan lebih *baligh* (mantap) ketimbang *ijab*, dan tidak wajib adanya *qabul* secara terucap, akan tetapi hanya disyaratkan tidak adanya penolakan saja. Hanya saja kalau menerima *wakalah* yang memakai upah, memang harus terdapat *qobul* secara terucap, meskipun *Ijab* dari *wakalah* dengan menggunakan upah itu memakai *shighot*/bentuk perintah. Perwakilan dengan upah tersebut bisa terjadi apabila pekerjaan dari wakil dapat dibatasi karena tergolong akad *ijarah*, lalu apabila tidak dapat dibatasi dan dia tetap melakukannya maka itu termasuk *ijaroh fasidah* sehingga wakil berhak mendapatkan *ujroh mitsil* (upah standart) dikarenakan ia melakukannya dalam keadaan mengharapkan bayaran, maksudnya bila dia tidak tahu dengan ketidak-absahan dari *ijarah* tersebut. Dan kadang disyaratkan adanya *qabul* secara lafal dalam *wakalah*, yaitu: pada waktu kekuasaan akan suatu benda yang ditanggung tidak dapat hilang kecuali dengan *qobul* secara lafal tersebut, sebagaimana yang telah berlalu.

b. *Mughni al-Muhtaj*, IV/263 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(وَلْيَقُلْ الْوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ زَوَّجْتُ بِنْتِي فُلَانًا) أَيْ مُوَكِّلَهُ (فَيَقُولُ وَكِيلُهُ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ).

Hendaknya wali nikah berkata kepada wakil dari calon suami: *"Aku nikahkan putriku kepada fulan"* maksud dari kata fulan ialah orang yang mewakilkan (orang yang mengangkat wakil), kemudian wakil berkata: *"Aku menerima nikahnya putrimu untuk orang yang mewakilkan kepadaku (muwakkilku)"*.

c. *Tuhfah al-Muhtaj*, VII/219-220 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

وَلَا يَضُرُّ مِنْ عَامِّيٍّ نَحْوُ فَتْحِ تَاءِ مُتَكَلِّمٍ وَإِبْدَالِ الزَّايِ جِيمًا وَعَكْسُهُ وَالْكَافِ هَمْزَةً وَفِي فَتَاوَى بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ يَصِحُّ أَنْكَحْتُكَ كَمَا هُوَ لُغَةُ قَوْمٍ مِنْ الْيَمَنِ وَالْعِرَاقِيِّ لَا يَضُرُّ

زَوَّجْتُ لَكَ أَوْ إِلَيْكَ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ إِذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْخَطَإِ فِي الْإِعْرَابِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذُكِرَ وَغَيْرِهِ مِنْ اغْتِفَارِ كُلِّ مَا لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ فِي نَحْوِ فَتْحِ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ هَذَا لَحْنٌ لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى فَلَا يَخْرُجُ بِهِ الصَّرِيحُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَعَنْ الشَّرَفِ بْنِ الْمُقْرِي أَنَّهُ أَفْتَى فِي فَتْحِ التَّاءِ بِأَنَّ عُرْفَ الْبَلَدِ إِذَا فُهِمَ بِهِ الْمُرَادُ صَحَّ حَتَّى مِنْ الْعَارِفِ اهـ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا قَيَّدَ بِعُرْفِ الْبَلَدِ ذَلِكَ لِأَجْلِ مَا بَعْدَ حَتَّى إِذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْتَ يُنَافِي ذَلِكَ عَدُّهُمْ كَمَا مَرَّ أَنْعَمْتُ بِضَمِّ التَّاءِ أَوْ كَسْرِهَا مُخِلًّا لِلْمَعْنَى وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ الْحَامِلُ لِبَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ فَتْحِ التَّاءِ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِي بَحْثِهِ بِفَتْحِ التَّاءِ قُلْتُ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّيَغِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مُحَاوَرَاتِ النَّاسِ وَلَا كَذَلِكَ الْقُرْآنُ فَتَأَمَّلْهُ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَيْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ وَالْعِتْقِ عَلَى أَنَّ فَتْحَ التَّاءِ يَضُرُّ وَغَفَلَ عَنْ أَنَّهُ إِذَا صَحَّ زَوَّجْتُكِ بِكَسْرِ الْكَافِ خِطَابًا لِلزَّوْجِ صَحَّ بِفَتْحِ التَّاءِ بِلَا فَارِقٍ.

Dan tidak berbahaya bagi orang awam ucapan yang semisal men*fathah ta' mutakallim* dan mengganti *za'* menjadi *jim* atau sebaliknya serta mengganti *kaf* menjadi hamzah, dan di dalam beberapa fatwa ulama' terdahulu terdapat fatwa, ialah sah perkataan anakku sebagaimana itu adalah logat dari sekelompok kaum dari Yaman dan fatwa al-Ghazali menyatakan tidak berbahaya kata *zawwajtu laka* atau *ilaika* dkarenakan kekeliruan di dalam *shighot* apabila tidak merusak akan makna maka sebaiknya dihukumi seperti kekeliruan yang terjadi di dalam *i'rob* dan *tadzkir* (membuatnya *mudzakkar*) serta *ta'nits*, sekian yang ada dari fatwa al-Ghazali. Dan apa yang ada dari fatwa sebagian *mutaqoddimin* serta pendapat al-Ghazali itu sangat jelas sekali pada yang telah disebutkan dan yang selainnya yang berupa ampunan bagi tiap sesuatu yang tidak merusak makna. Karena itulah Abu Syukail berkata dalam semisal *fathah ta' mutakallim*: ini adalah *lahn* (kekeliruan dalam *i'rab*) yang tidak merusakkan makna, sehingga lafal yang *sharih* tidak akan keluar dari tujuannya dikarenakan *lahn* tersebut. Dan diriwayatkan dari as-Syaraf Ibn al-Muqri. Beliau berfatwa mengenai *fathah ta'* bahwa: apabila *'urf* (kebiasaan) dari negeri tersebut bisa dibuat untuk memahami apa yang dikehendaki maka tetap sah, bahkan meskipun dari orang yang tahu. Sekian. Sepertinya beliau memberikan ketentuan yang berupa: "*Apabila*

'urf (kebiasaan) dari negeri tersebut bisa dibuat untuk memahami" ini karena kata-kata yang ada setelah "*hatta*/bahkan" (yang berupa perkataan: meskipun dari orang yang tahu), sebab sudah termasuk sesuatu yang jelas: apabila *lahn* itu dari orang yang awam, maka tidak disyaratkan adanya *qoyyid* itu. Lalu jika kamu berkata: Ini bertolak belakang dengan penilaian para ulama mengenai *An'amtu* dengan *dlommah*nya *ta'* atau *kasrah*nya *ta'* yang mereka anggap merusakkan makna dan inilah yang mendorong sebagian ulama untuk berpendapat, tidak sah aqadnya bila *ta*'nya di*fathah* secara mutlaq, dan sebagian ulama lain pun me*nuqil*nya dari al-Isnawi mengenai kata: *bi'taka* dengan *fathah ta*'nya", maka aku menjawab: ini dibedakan dikarenakan pedoman dari berbagai *shighot* adalah apa yang dapat diketahui/dikenali dalam percakapan antar para manusia, sedangkan pedoman dalam al-Quran tidak seperti itu, maka renungkanlah. Yang mengherankan adalah orang yang memakai dalil dari pendapat al-Ghazali yang berupa: *"Tidak berbahaya suatu kekeliruan dalam tadzkir dan ta'nits"* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam masalah thalaq, *qadzaf* dan pembebasan budak, kemudian menjadikannya dalil akan pendapat dirinya bahwasannya *fathah*nya *ta'* itu berbahaya dan dia lupa bahwa: apabila telah dinyatakan sah kata *zawwajtuki* dengan menggunakan *kasrah*nya *kaaf* dalam keadaan *khitob* (pembicaraan) itu ditujukan untuk calon suami, maka yang memakai *fathah*nya *ta'* pun juga sah, dengan tanpa ada perbedaan.

Jawaban b

Sudah tercukupi dengan contoh-contoh dalam diskripsi.

Jawaban c

Terkait perpindahan perwalian nikah saat *wali aqrab* pergi sejauh *masafatul qasr* atau ghaib, ada perbedaan pendapat ulama, antara berpindah perwalian kepada wali jauh *(ab'ad)* dan wali hakim. Meskipun di antara kedua pendapat itu perpindahan kepada wali hakim lebih kuat, dianjurkan kepada hakim untuk keluar dari perbedaan pendapat dengan meminta izin kepada wali jauh.

Jawaban d

Tidak masalah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Raudhah ath-Thalibin*, VI/64 [al-Marja' al-Akbar]:

إِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ الْغَيْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ، فَالْأَوْلَى لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ، أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ لِيُزَوِّجَ الْقَاضِي.

Apabila wali yang lebih dekat (secara jalur nasab atau *wala'*) itu pergi

dengan kepergian yang *mu'tabaroh* di dalam agama, maka yang lebih utama bagi *Qadli* (penghulu) adalah mengizinkan pada wali yang lebih jauh (secara jalur nasab atau *wala'*) untuk menikahkan, atau penghulu meminta izin darinya untuk menikahkan.

b. *Mughni al-Muhtaj*, IV/260-261 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(وَلَوْ غَابَ) الْوَلِيُّ (الْأَقْرَبُ) نَسَبًا أَوْ وَلَاءً (إِلَى مَرْحَلَتَيْنِ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ، أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (زَوَّجَ السُّلْطَانُ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ، وَقِيلَ: يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَالْأَوْلَى: لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ.

Apabila wali yang lebih dekat secara jalur nasab atau waris *wala'* pergi hingga sejauh dua *marhalah* dan dia tidak memiliki wakil yang hadir di kota tersebut, atau yang berada kurang dari jarak tempuh *qoshor*, maka penguasalah yang menikahkan, artinya pemimpin dari kota tersebut atau penggantinya, bukan pemimpin selain kota itu dan juga bukan wali yang lebih jauh (secara nasab atau *wala'*) menurut pendapat yang lebih shahih, ini dikarenakan wali yang bepergian adalah wali yang sebenarnya, dan perbuatan menikahkan adalah hak yang dia miliki, sehingga apabila terjadi kesulitan untuk memenuhi hak itu dari wali tersebut, maka hakim yang akan menggantikannya, dan ada pendapat yang menyatakan: *wali yang lebih jauh yang menikahkan sebagaimana apabila wali yang lebih dekat mengalami gila*. Ar-Rafi'i dan an-Nawawi Berkata: *"Yang lebih utama bagi qodli adalah memberikan izin kepada wali al-ab'ad (wali yang lebih jauh secara jalur nasab atau wala') supaya wali al-ab'ad yang menikahkan, atau bisa juga qadli yang meminta izin dari wali al-ab'ad, untuk kemudian qadli yang menikahkan, dan tujuan dari hal ini ialah keluar dari khilaf ulama."*

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MUSYKERWIL PWNU JAWA TIMUR di PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 25 - 27 Februari 2014

7. Tidak Tercatatnya Rujuk Nikah
8. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
9. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

KOMISI C
Qanuniyah

MUSHAHIH

KH. Sholeh Qosim
KH. Syafruddin Syarif
KH. Muhibbul Aman Aly
KH. Ali Mushthofa

PERUMUS

KH. Romdlon Khotib
KH. Firjaun Barlaman
KH. Abd Rozaq Sholeh
H. Zainul Alam

MODERATOR

Dr. M. Nashiri

NOTULEN

KH. Achmad Shampton Masduqie

7. Tidak Tercatatnya Rujuk Nikah

Deskripsi Masalah

Markonah dinikahi oleh Markuat, dalam perjalanan rumah tangganya timbul tidak adanya kecocokan yang akhirnya Markuat memilih mengajukan talak ke Pengadilan Agama, hingga kemudian keluar Akta Cerai untuk keduanya. Setelah akta cerai itu didapat, Markuat kemudian menyatakan merujuk Markonah, tetapi secara administratif Markuat tidak mengurus administrasi rujuknya ke Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, sehingga secara kenegaraan status mereka masih cerai. Markuat sengaja tidak mengurus administrasi rujuk ini, karena sengaja ingin menggantung (tidak memenuhkan kewajiban sebagai suami dan tidak menceraikan) isterinya, karena ada celah hukum dari kasus ini yaitu dipastikannya penolakan hakim menyidangkan gugatan cerai atas pernikahan/rujuk yang tidak dicatatkan resmi secara kenegaraan, disebabkan pihak pengadilan tidak akan menerima laporan kasus pernikahan yang tidak tercatatkan secara resmi.

Pertanyaan

a. Terhadap penolakan hakim pengadilan agama menyidangkan kasus dari pernikahan atau rujuk yang tidak dicatatkan secara kenegaraan, sejauh manakah kaidah حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ dapat diterapkan?

b. Adakah solusi secara fikih bagi Markonah saat hakim menolak gugatan cerainya karena secara hukum negara statusnya masih cerai?

Jawaban a

Dalam persoalan rujuk di atas, tidak ada khilaf ulama. Karena pendapat ulama bahwa rujuknya sah walaupun tidak dilakukan di hadapan KUA. Sehingga kaidah حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ tidak ada korelasinya dengan persoalan di atas. Karena kaedah tersebut berlaku pada masalah *ijtihadi* dan *khilafiyah*.

Dasar Pengambilan Hukum

Fatawa ar-Ramli, III/278:

وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

Dan Ashab asy-Syafi'i sungguh telah berkata sebagaimana dinukil oleh al-Imam az-Zarkasyi dan selainnya, sesungguhnya keputusan hukum dari seorang hakim di dalam persoalan-persoalan *khilafiyyah* dapat menghilangkan perkhilafan di dalam persoalan-persoalan tersebut dan

menjadikan hal yang ditetapkan itu menjadi *muttafaq 'alaih.*

Jawaban b

Karena suami tidak memberikan nafkah, maka Markonah bisa mengajukan *faskh* nikah kepada *muhakkam* (misal: ulama/kiai), dan jika suami memberi nafkah maka agar gugat cerainya diterima PA, markonah mengajukan *itsbat* rujuk dulu, kemudian baru mengajukan gugat cerai.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, V/242:

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا أَوْمُعْسِرًا .فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَعِنْدَهُمْ قَوْلَانِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ لَايُفْسَخُ النِّكَاحُ حَاضِراً كَانَ الزَّوْجُ أَوْغَائِبًا، لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُوجِبِ لِلْفَسْخِ، وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ. وَالثَّانِي: أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ لِتَضَرُّرِهَا بِالْمَنْعِ .

Adapun Madzhab Syafi'iyyah maka sesungguhnya menurut mereka, orang yang menolak untuk memberikan nafkah itu adakalanya orang yang *Musir* atau *Mu'sir*.[1] Lalu jika orang yang tidak mau memberikan nafkah tersebut adalah *Muusir*, maka menurut mereka terdapat dua pendapat mengenai hal ini, dan yang paling shahih dari keduanya ialah: Pernikahannya tidak dapat di-*faskh* (dirusak/dibubarkan) baik dalam keadaan sang suami tidak bepergian maupun sedang bepergian, karena tidak ada *i'saar* (kemelaratan) yang bisa menyebabkan *faskh*, sedangkan dalam keadaan seperti ini sang istri masih memiliki kemampuan untuk mengambil haknya dengan cara melaporkan kepada hakim. Pendapat yang kedua: Istri berhak untuk *faskh* karenak dia mendapat kesulitan sebab dicegah dari nafkahnya.

b. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XVIII/272:

إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا حَاضِرًا، فَطَالَبَتْهُ بِنَفَقَتِهَا فَمَنَعَهَا إِيَّاهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْفَسْخُ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهَا التَّوَصُّلُ إِلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهَا بِالْحُكْمِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ حَكَاهُ الْمَسْعُودِيُّ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا الْفَسْخُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُهَا بِمَنْعِهَا لِنَفَقَةٍ فَهُوَ كَالْمُعْسِرِ.

---

[1] *Muusir* di sini (Bab *Faskh*) adalah orang yang mampu memberikan nafkah meskipun dengan nafkah yang paling minim yang telah dijelaskan di dalam Bab *Nafaqah*, sedangkan *Mu'sir* di sini adalah orang yang tidak mampu (baik dari segi harta ataupun dari segi usaha) untuk memberikan nafkah meskipun dengan batasan minimal dari nafkah. Lihat *I'anah ath-Thalibin*, III/86 dan III/90.

Apabila sang suami adalah seorang yang *Muusir* dan tidak bepergian, kemudian sang istri meminta nafkahnya dari si suami, lalu si suami menolak untuk memberikannya kepada sang istri tersebut, maka tidak ada hak *faskh* bagi si istri, karena masih ada kemampuan bagi sang istri untuk mendapatkan haknya dengan cara melaporkan kepada hakim. dan dalam hal ini terdapat satu pendapat lainnya yang diceritakan oleh al-Imam al-Mas'udi yaitu: *"Boleh bagi si istri untuk faskh, dikarenakan terdapat dloror (kemelaratan) yang menimpa sang istri disebabkan si suami menolak untuk memberikan nafkah, sehingga suami dalam kondisi seperti ini sama dengan suami yang mu'sir (tidak mampu, baik secara harta maupun usaha, untuk memberikan nafkah minimum)."*

c. *Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah li ad-Duktur 'Abdul Karim Zaidan,* VIII /484 [Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1413 H/1993 M]:

٨٨٤٦ - توضيح ابن قدامة الحنبلي. وَقَدْ رَجَّحَ الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيُّ الْقَوْلَ بِحَقِّهَا فِي الْفَسْخِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الزَّوْجِ مُتَعَذِّرٌ، فَكَانَ لَهَا الْخِيَارُ كَمَا فِي حَالِ إِعْسَارِ الزَّوْجِ، بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالْفَسْخِ فَإِنَّهُ إِذَا جَازَ الْفَسْخُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ مَعْذُورٌ، فَعَلَى الْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ أَوْلَى. وَلِأَنَّ فِي إِلْزَامِ الزَّوْجَةِ بِالصَّبْرِ ضَرَرًا عَلَيْهَا يُمْكِنُ إِزَالَتُهُ بِالْفَسْخِ فَوَجَبَتْ إِزَالَتُهُ بِهِ، وَلِأَنَّ الْإِعْسَارَ جَوَّزَ الْفَسْخَ لِتَعَذُّرِ الْإِنْفَاقِ، وَهَذَا الْمَعْنَى - تَعَذُّرُ الْإِنْفَاقِ - حَاصِلٌ فِي الْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ، فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْفَسْخِ فِي حَقِّهِ أَيْضًا. وَقَوْلُ الْبَعْضِ بِأَنَّ الْمُوسِرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُنْفِقَ فِيمَا بَعْدُ، يَرِدُ عَلَيْهِ: وَكَذَلِكَ الْمُعْسِرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُغْنِيَهُ اللهُ تَعَالَى أَوْ يَقْتَرِضَ فَيُنْفِقَ، فَاسْتَوَيَا فِي هَذَا الْاِحْتِمَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْحُكْمِ وَهُوَ جَوَازُ الْفَسْخِ لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ.

8846. Penjelasan Ibn Qudamah: Dan al-Imam Ibn Qudamah sungguh telah mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa istri berhak untuk *faskh* dengan menggunakan *hujjah* (dalil) bahwasanya pemberian nafkah untuknya dari harta suami adalah hal yang sulit, sehingga dia berhak untuk memilih, sebagaimana ketika suami dalam kondisi melarat (tidak mampu memberikan nafkah meski nafkah yang paling minim), malah justru suami menolak untuk memberikan nafkah, ini lebih pantas untuk *faskh*, dikarenakan: apabila melakukan *faskh* atas suami yang tidak mampu menafkahi itu dibolehkan, padahal suami tersebut berada di dalam keadaan *ma'dzur* (yang memiliki alasan/dalih), maka melakukan *faskh* kepada seorang suami yang *musir* (kaya/mampu menafkahi tapi menolak untuk memberikan nafkah) ini lebih pantas untuk dibolehkan,

dan dikarenakan di dalam mengharuskan istri untuk bersabar di dalam menghadapi keadaan semacam ini terdapat *dlarar* (kesusahan/bahaya) bagi si istri, yang sebenarnya *dlarar* tersebut masih ada kemungkinan untuk dihilangkan dengan cara *faskh*, maka dari itu *dlarar* semacam ini wajib dihilangkan dengan cara membolehkan *faskh* tersebut, dan dengan satu lagi alasan, yaitu: dalam hal diperbolehkannya melakukan *faskh* saat melaratnya suami, landasannya ialah sulitnya memberikan nafkah, sedangkan makna ini (yang berupa: sulitnya menafkahi) itu terdapat pula di dalam suami yang *muusir* (yang mampu menafkahi) akan tetapi dia menolak untuk memberikan nafkah, sehingga wajib bagi kita untuk berpendapat: boleh untuk melakukan *faskh* di dalam kasus suami yang mampu menafkahi tetapi dia menolak untuk menafkahi, sama halnya dengan suami yang tidak mampu untuk menafkahi meskipun dengan nafkah yang terminim.

Adapun perkataan dari sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya *"Musir (suami yang mampu namun menolak untuk menafkahi) itu masih mempunyai kemungkinan untuk memberikan nafkah setelahnya penolakan/ pencekalan itu terjadi"*, Maka perkataan dari sebagian ulama ini dapat tertolak dengan sanggahan yang berupa: *"Begitupun mu'sir (orang yang tidak mampu menafkahi) juga memiliki kemungkinan setelahnya akan diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala atau menghutang sehingga dia bisa memberikan nafkah"*, walhasil antara suami yang mampu menafkahi tapi menolak untuk memberikan nafkah dengan suami yang tidak mampu untuk menafkahi, sama dalam hukumnya, yakni boleh untuk melakukan *faskh* dikarenakan tidak adanya nafkah.

8. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Pertanyaan

a. Hukuman apakah yang pantas diberikan untuk para koruptor?
b. Kiranya hukuman mati pantas diberlakukan bagi koruptor, mereka itu termasuk pelaku kejahatan macam apa menurut pandangan fikih?
c. Bagaimana dengan wacana pemiskinan koruptor yang belakangan santer diperbincangkan?
d. Bagaimanakah sikap pemerintah yang seharusnya diambil untuk mencegah terjadinya korupsi?
e. Apakah Pasal 2 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 Tipikor sudah cocok dengan spirit hukum *jinayah* dalam fikih Islam?
f. Bagaimanakah pandangan fikih Islam mengenai para penegak hukum (penyidik, JPU, Hakim, dan *lawyer*) yang setengah hati

dalam menerapkan pasal-pasal Undang-Undang Tipikor?
PCNU Kab. Trenggalek dan PWNU

Jawaban a

Hukuman yang pantas untuk koruptor adalah *ta'zir* yang bentuk hukumannya paling berat adalah hukuman mati. Penetapan hukuman mati dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1) Dampak *mafsadah* dan *madharat*nya merata di kalangan masyarakat luas.
2) Mengancam keamanan Negara.
3) Bentuk *ta'zir* selain hukuman mati sudah tidak efektif.
4) Pelaku telah terbukti melakukan kejahatan korupsi berulang kali.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VII/490:

الْعُقُوبَاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ بِحَسَبِ نَوْعِ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ وَهِيَ:

١- الْحُدُودُ: وَهِيَ الْعُقُوبَاتُ الْمُقَدَّرَةُ شَرْعاً الْوَاجِبَةُ حَقّاً لِلّٰهِ تَعَالَى فِي الشَّرِيعَةِ، أَيِ الَّتِي تَسْتَوْجِبُهَا الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ: وَهِيَ دَفْعُ الْفَسَادِ عَنِ النَّاسِ، وَتَحْقِيقُ الصِّيَانَةِ وَالسَّلَامَةِ لَهُمْ. وَتَنْطَبِقُ عَلَى جَرَائِمَ سَبْعَةٍ: الزِّنَا، الْقَذْفِ، شُرْبِ الْمُسْكِرَاتِ، السَّرِقَةِ، الْحِرَابَةِ، الرِّدَّةِ، الْبَغْيِ.

٢- الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ: أَمَّا الْقِصَاصُ فَهُوَ مُعَاقَبَةُ الْجَانِي عَلَى جَرِيمَةِ الْقَتْلِ أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الْجِرَاحِ عَمْداً بِمِثْلِهَا. وَأَمَّا الدِّيَةُ فَهِيَ الْعِوَضُ الْمَالِيُّ الْوَاجِبُ دَفْعُهُ بَدَلَ النَّفْسِ. وَقَدْ شُرِعَ الْقِصَاصُ مُرَاعَاةً لِلْحَقَّيْنِ: حَقِّ الْجَمَاعَةِ الْعَامِّ فِي أَصْلِ الْعِقَابِ، وَحَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْخَاصِّ فِي نَوْعِ الْعِقَابِ.

٣- التَّعَازِيرُ: وَهِيَ الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى حَقِّ اللهِ تَعَالَى، كَالْأَكْلِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَطَرْحِ الْأَقْذَارِ فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ عَلَى حَقٍّ شَخْصِيٍّ لِلْعِبَادِ كَأَنْوَاعِ السَّبِّ وَالضَّرْبِ وَالْإِيذَاءِ بِأَيِّ وَجْهٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُخْتَلِفِ أَنْوَاعِ جَرَائِمِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ الَّتِي لَا حَدَّ فِيهَا.

Hukuman-hukuman duniawi dengan meninjau berbagai kemaslahatan (kemanfaatan) yang diinginkan dari wujudnya hukuman-hukuman itu

terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1) Beberapa *had*: *had* ialah hukuman yang ditentukan oleh syariat yang diwajibkan sebagai hak bagi Allah dalam syari'atnya, yakni hukuman yang ditetapkan oleh kemaslahatan/kepentingan umum: kepentingan umum yang dimaksud adalah menghindari kerusakan yang dapat menimpa manusia, dan melahirkan secara nyata bentuk penjagaan serta keselamatan bagi mereka. *Had* ini meliputi 7 macam kejahatan: zina, *qadzaf*, minum minuman keras, mencuri, merampas, murtad dan perbuatan zalim (memberontak).
2) *Qishash* dan *diyat*: *Qishash* ialah hukuman bagi orang yang melukai dikarenakan kejahatan yang berupa pembunuhan atau pemotongan anggota tubuh atau melukai secara sengaja dengan balasan hukuman yang semisal dengan perbuatannya. Adapun *diyat* adalah ganti rugi yang berupa harta yang wajib diserahkan demi menggantikan nyawa. Dan *Qishash* telah disyari'atkan karena menjaga dua hak: yaitu hak bagi seluruh kelompok manusia secara umum yang ada di dalam prinsip hukuman tersebut, dan hak bagi orang yang dilukai secara khusus di dalam bentuk hukumannya.
3) Ta'zir: *Ta'zir* adalah hukuman yang disyariatkan atas suatu maksiat atau kejahatan yang tiada *had*-nya dan juga tidak ada tebusannya, baik kejahatan yang dilakukan kepada hak Allah, seperti makan di siang hari di bulan Ramadlan, meninggalkan sholat, membuang kotoran di jalanan yang dilewati manusia dan hal-hal semisalnya, atau kejahatan yang dilakukan terhadap hak seseorang sebagaimana kejahatan yang berupa umpatan, pemukulan, perbuatan menyakiti orang lain dengan berbagai macam cara, dan kejahatan lain yaitu berbagai macam kejahatan terhadap harta dan jiwa yang tidak ada *had*-nya .

b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VII/514:

وَمِنْ مُوجِبَاتِ التَّعْزِيرِ: الْجِنَايَةُ الَّتِي لَا قِصَاصَ فِيهَا، أَوْ وَطْءُ الزَّوْجَةِ فِي الدُّبُرِ، أَوْ أَثْنَاءَ الْحَيْضِ، أَوِ النَّهْبِ أَوِ الْغَصْبِ أَوِ الاخْتِلَاسِ.

Dan di antara kejahatan yang menyebabkan terkena *ta'zir* ialah: segala macam kejahatan yang tidak terdapat hukuman *had* di dalamnya, atau menyetubuhi istri lewat duburnya (anal seks), atau menyetubuhinya saat haid, atau merampas harta orang lain, atau meng*ghasab* ataupun menjambret.

c. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VII/517:

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَا عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ إِذَا سَبَّ

النَّبِيَّ ﷺ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا [الأحزاب: ٣٣]. وَقَالُوْا أَيْضًا: إِنَّ لِلْإِمَامِ قَتْلَ السَّارِقِ سِيَاسَةً إِذَا تَكَرَّرَتْ مِنْهُ جَرِيمَةُ السَّرِقَةِ، وَلَهُ قَتْلُ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْخَنْقُ فِي ضِمْنِ الْمِصْرِ، لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَمِثْلُهُ كُلُّ مَنْ لَا يَنْدَفِعُ شَرُّهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ يُقْتَلُ سِيَاسَةً.

Ulama telah bersepakat (Ijma') sebagaimana dikatakan oleh al-Qadli Iyadl di dalam *asy-Syifaa* akan wajibnya melakukan pembunuhan pada seorang muslim ketika dia mengumpati Nabi ﷺ, dikarenakan Firman Allah: *"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah (menyifati Allah dengan menggunakan sifat, yang mana Allah Ta'ala Maha Suci dari sifat tersebut) dan menyakiti Rasul-Nya, maka Allah melaknati mereka (artinya: mereka dijauhkan dari segala macam kebaikan) di dalam dunia dan akherat, dan Allah menyiapkan bagi mereka siksa yang menghinakan"* [QS. Al-Ahzab: 33] Ulama juga berkata: *"Boleh bagi Imam membunuh seorang pencuri karena pertimbangan siasat (kebijakan) jika pencurian itu berulang kali dilakukannya, dan boleh juga baginya membunuh orang yang berulang kali melakukan pencekikan di dalam suatu kota, dikarenakan ia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Semisal dengan orang tersebut adalah orang yang keburukannya tidak dapat dihindari kecuali dengan cara membunuhnya, maka orang semacam ini boleh untuk dibunuh karena pertimbangan siasat."*

d. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, V/404:

وَقَدْ عَزَّرَ كِبَارُ أَصْحَابِهِ ﷺ مِنْ بَعْدِهِ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ وَالْقَتْلِ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ ﵁ جَمَعَ كِبَارَ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ ﵃ وَاسْتَشَارَهُمْ فِي عُقُوبَةِ اللَّائِطِ فَأَفْتَوْا بِإِعْدَامِهِ حَرْقًا. وَهَذَا مِنْ أَشَدِّ مَا يُتَصَوَّرُ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ وَثَبَتَ أَنَّ عَلِيًّا وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَجَلَدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ

Para pemuka sahabat Nabi Muhammad ﷺ juga telah melakukan *ta'zir* setelah wafatnya beliau, dengan pemukulan, penahanan, dan pembunuhan, karena telah ditetapkan dalam suatu riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Umar ﵁ mengumpulkan ulama besar dari para sahabat ﵃ dan Sayyidina Umar mengajaknya bermusyawarah mengenai hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual, lalu mereka menfatwakan agar orang itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Ini adalah *ta'zir* terberat dari segala macam bentuk yang dapat digambarkan di dalam bab *ta'zir*. Kemudian Sayyidina Ali pernah menemukan lelaki sedang bermesraan dengan perempuan tanpa persetubuhan, maka beliau mencambuknya dengan seratus cambukan.

e. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 250:

وَنَقَلَ الْأَسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْقَادِرِ عَلَى قَتْلِ الظَّالِمِ كَالْمُكَّاسِ وَنَحْوِهِ مِنْ وُلَاةِ الظَّلَمَةِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِنَحْوِ سُمٍّ لِيَسْتَرِيْحَ النَّاسُ مِنْ ظُلْمِهِ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ دَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشَرْطِهِ فَأَوْلَى الظَّالِمُ الْمُتَعَدِّى.

Al-Imam al-Asnawi menukil dari al-Imam Ibn Abdissalam bahwa bagi orang yang mampu membunuh orang zalim, seperti penarik pungutan liar dan semisalnya yaitu penguasa-penguasa zalim, boleh membunuh orang zhalim itu dengan semisal racun, agar manusia dapat terhindar dari kejahatannya, sebab apabila melawan orang yang hendak berbuat buruk (berniat jahat) meskipun atas harta satu dirham saja dibolehkan, dan bahkan dengan cara membunuhnya sesuai dengan persyaratannya, apalagi kepada orang zhalim yang kelewat batas.

f. *Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah*, 58:

وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ كَالسَّاحِرِ وَقَاطِعِ الطَّرِيْقِ وَاللِّصِّ وَاللُّوَاطِ وَالْخَنَّاقِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ عَمَّ ضَرَرُهُ وَلَا يَنْزَجِرُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ يُبَاحُ الْقَتْلُ وَيُثَابُ قَاتِلُهُمْ.

Setiap orang yang termasuk pembuat kerusakan seperti tukang sihir, perampok, pencuri, homoseksual, pencekik, dan semisalnya yang tergolong orang yang membahayakan bagi masyarakat, serta tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka boleh dibunuh dan orang yang membunuhnya mendapatkan pahala.

Jawaban b

Menurut pandangan fikih, kejahatan yang dilakukan koruptor bisa termasuk *risywah*, khianat terhadap amanah, dan *ghasab*. Selain itu, ia wajib mengembalikan hasil korupsinya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Raudhah ath-Thalibin*, XI/144:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشْوَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَالْهَدِيَّةُ جَائِزَةٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ حَقِيْقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيْهِمَا، وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ: أَنَّ الرِّشْوَةَ هِيَ الَّتِي يُشْرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوِ الْإِمْتِنَاعُ عَنِ الْحُكْمِ بِحَقٍّ. وَالْهَدِيَّةُ: هِيَ الْعَطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ. وَالثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَهُوَ قُرْبَةٌ وَصَدَقَةٌ. وَإِمَّا لِعَاجِلٍ، وَهُوَ إِمَّا مَالٌ فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ ثَوَابٍ، أَوْ لِتَوَقُّعِ ثَوَابٍ،

وَإِمَّا عَمَلٌ، فَإِنْ كَانَ عَمَلًا مُحَرَّمًا أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا فَهُوَ رِشْوَةٌ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ، وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَى الْمَبْذُولِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ نَفْسِهِ فَهَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ لِيَتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ، فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوِ النَّسَبِ فَهُوَ هَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْعَمَلِ فَهُوَ رِشْوَةٌ.

Sungguh aku telah menuturkan bahwa suap itu haram secara mutlak, sedangkan hadiah adalah boleh dalam beberapa kondisi, sehingga perlu dicarikan perbedaan di antara keduanya dari segi hakikatnya saat orang yang memberi sama-sama rela memberikannya. Perbedaannya ada dari dua segi: *pertama*, perbedaan yang telah disampaikan Ibn Kajj, yakni suap ialah pemberian yang penerimanya disyaratkan memberi putusan hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau disyaratkan tidak memberi keputusan hukum yang benar. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang mutlak (tidak mengikat). Perbedaan *kedua*: al-Imam al-Ghazali berkata di dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din*: *"Harta itu adakalanya diberikan karena tujuan agar mendapatkan imbalan yang bersifat ukhrawi, maka yang semacam ini adalah qurbah (ibadah) dan sedekah. Adakalanya harta diberikan dengan tujuan mendapatkan imbalan yang bersifat duniawi, sedang imbalan duniawi adakalanya berupa harta, maka pemberian semacam ini disebut hibah dengan syarat ada imbalannya, atau hibah dengan harapan mendapat imbalan. Adakalanya imbalan duniawi berupa perbuatan, kemudian bila perbuatan yang menjadi imbalan itu adalah perbuatan yang diharamkan, atau perbuatan yang wajib 'ain bagi orang yang diberi hadiah, maka pemberian semacam ini disebut suap. Bila imbalan yang berupa perbuatan tersebut ialah perbuatan yang mubah maka pemberian tersebut disebut ijarah atau ju'ala. Adakalanya pemberian bertujuan agar dekat dengan orang yang diberi dan agar disukai olehnya, kemudian bila tujuannya hanya agar dekat dan disukai oleh orangnya saja tanpa ada pamrih lain maka pemberian ini disebut hadiah; dan bila dibalik itu ada tujuan agar dapat menggapai berbagai keinginan dan harapannya, maka diperinci: jika kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang diberi itu disebabkan ilmunya atau nasabnya maka ini juga disebut hadiah; dan bila kemuliaannya disebabkan kewenangan memutuskan hukum dan tindakan, maka ini disebut suap."*

b. *Is'ad ar-Rafiq*, 100:

(وَ) مِنْهَا (أَخْذُ الرِّشْوَةِ) وَلَوْ بِحَقٍّ (وَإِعْطَاؤُهَا) بِبَاطِلٍ. وَمِثْلُهُمَا السَّعْيُ فِيهِمَا بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. قَالَ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ الْآيَةَ. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: لَيْسَ الْمُرَادُ الْأَكْلَ خَاصَّةً، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنَ

الْأَمْوَالِ خَصَّهُ. وَالْمُرَادُ مِنَ الْإِدْلَاءِ فِي الْآيَةِ الْإِسْرَاعُ بِالْخُصُوصَةِ فِي الْأَمْوَالِ. وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ... فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْحَاكِمًا رِشْوَةً أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا لِنَيْلِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ أَوْ لِأَذِيَّةِ مُسْلِمٍ فَسَقَ الرَّاشِي وَالْمُهْدِي بِالْإِعْطَاءِ وَالْمُرْتَشِي وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّائِشُ بِالسَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ يَقَعْ حُكْمٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِحَقٍّ أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَسَقَ الْآخِذُ فَقَطْ وَلَمْ يَأْثَمِ الْمُعْطِي لِاضْطِرَارِهِ لِلتَّوَصُّلِ لِحَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ.

Di antara maksiat tangan adalah menerima suap meski untuk memberi keputusan dengan kebenaran dan memberikan suap dengan tujuan agar mendapat keputusan hukum yang batil (salah). Termasuk yang semisal dengan kedua hal tersebut adalah mengupayakan/menjadi perantara di antara orang yang menyuap dan orang yang disuap. Allah Ta'ala Berfirman: *"Dan janganlah sebagian dari kalian semua memakan harta-harta milik sebagian yang lain, dengan cara batil (yakni dengan cara haram secara syari'at seperti mencuri dan mengghasab), dan janganlah kalian semua memberikan harta-harta kalian (sebagai suap) kepada para Hakim ..."* [QS. al-Baqarah: 188]. Para *Mufassir* menyatakan, yang dikehendaki bukan sekedar memakan saja, hanya saja makan adalah tujuan terbesar dari berbagai harta maka Allah menuturkannya secara khusus. Adapun yang dikehendaki dengan *al-Idlaa'* dalam ayat di atas adalah bergegas secara khusus dalam persoalan harta. Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap, dan orang yang jadi perantara di antara keduanya... Sehingga barang siapa memberikan suap kepada *Qadhi* atau Hakim, atau menghadiahkan sesuatu kepada salah satunya, maka hukumnya ditafsil (diperinci): jika dengan tujuan supaya *Qadhi* atau Hakim tersebut memberikan keputusan yang salah, atau agar dia mendapatkan sesuatu hal yang bukan merupakan haknya, atau untuk menyakiti seorang muslim, maka orang yang menyuap itu dihukumi fasik, begitupun orang yang memberi hadiah serta orang yang menerima suap dan orang yang menerima hadiah dikarenakan telah mengambil harta suap tersebut, begitupun orang yang menjadi perantara di antara keduanya juga menjadi fasik dikarenakan membantu mereka, meskipun setelah kejadian suap-menyuap tersebut ternyata tidak ada keputusan hukum yang terjadi sama sekali. Atau bisa jadi pemberian suap itu bertujuan agar *Qadhi* atau Hakim memberi keputusan yang sebenarnya bagi si penyuap, atau untuk menolak penganiayaan atau agar si penyuap bisa memperoleh haknya, kalau memang ini yang terjadi, maka yang dihukumi fasik hanyalah orang yang menerima suap saja, sedangkan

si penyuap tidak dihukumi berdosa, sebab dia melakukannya terpaksa supaya bisa memperoleh haknya dengan segala cara.

c. *Nihayah az-Zain*, 370:

وَقَبُوْلُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لِلْقَاضِي لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَإِعْطَاؤُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَمَّا لَوْ رَشَى لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ جَازَ الدَّفْعُ وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي الْأَخْذُ عَلَى الْحُكْمِ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ أُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا. وَيَجُوْزُ لِلْقَاضِي أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْحُكْمِ لِأَنَّهُ شَغَلَهُ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ.

Hukum menerima suap adalah haram. Suap merupakan sesuatu yang diberikan kepada *Qadhi* agar memberi keputusan yang tidak benar, atau supaya tidak memberi keputusan yang benar, dan hukum memberi suap adalah sama sebagaimana hukum menerimanya (sama-sama haram), karena memberikan suap berarti membantu terjadinya kemaksiatan. Adapun apabila menyuap dengan tujuan agar diberikan keputusan yang benar, maka boleh menyerahkan suap itu, meskipun haram bagi *Qadhi* menerimanya atas keputusan hukum yang dibuatnya secara mutlak. Mutlak di sini artinya: baik *Qadhi* tersebut mendapatkan jatah gaji dari *bait al-mal* atau tidak. Diperbolehkan bagi *Qadhi* mengambil upah atas pekerjaannya menetapkan hukum, karena pekerjaan itu merepotkannya, sehingga dia meninggalkan kegiatan yang harus dia lakukan bagi dirinya.

d. *Hasyiyah al-Jamal 'ala Fath al-Wahhab*, III/469:

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ وَشَرْعًا اسْتِيلَاءٌ إِلَخْ ثُمَّ إِنْ كَانَ مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ خِفْيَةً سُمِّيَ سَرِقَةً أَوْ مُكَابَرَةً فِي صَحْرَاءَ سُمِّيَ مُحَارَبَةً أَوْ مُجَاهَرَةً، وَاعْتَمَدَ الْهَرَبَ سُمِّيَ اخْتِلَاسًا فَإِنْ جَحَدَ مَا ائْتُمِنَ عَلَيْهِ سُمِّيَ خِيَانَةً انْتَهَتْ.

Ibarah dari al-Imam al-Barmawi: (*Perkataan Mushannif: dan ghasab secara syari'at ialah menguasai...*) Kemudian jika barang yang dikuasai tersebut diambil dari tempat penyimpanan yang sesuai dengan benda-benda yang semisalnya dan diambil secara sembunyi-sembunyi maka hal itu disebut pencurian, atau dengan cara melakukan perlawanan di tempat terbuka maka disebut dengan perampasan, atau secara terang-terangan dan yang diandalkan adalah melarikan diri maka disebut *ikhtilas* (menjambret), kemudian apabila mengingkari sesuatu yang dipercayakan kepadanya maka disebut khianat. Sekian *ibarah* dari al-Imam al-Barmawi.

e. *Syarh an-Nawawi 'ala Muslim*, XII/217:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الْغُلُوْلِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَأَجْمَعُوْا أَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ مَا غَلَّهُ ـ

Ulama telah sepakat memperberat keharaman pengkhianatan terkait harta, dan penghianatan tersebut termasuk dosa besar, serta wajib bagi pelakunya mengembalikan harta yang diambilnya dari pengkhianatan tersebut.

f. *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh asy-Shalihin*, II/255:

عَنْ عَدِيّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ... وَعَلَى رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَفِيهِ أَنَّ مَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ غُلُولٌ وَالْغُلُولُ حَرَامٌ وَإِنْ قَلَّ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ بِالْإِجْمَاعِ،

Dari 'Adi Ibn 'Amirah al-Kindi ﷺ, beliau berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *"Siapapun yang kami angkat sebagai 'amil (pegawai pemerintah) dari kalian atas suatu pekerjaan, kemudian dia menggelapkan harta senilai jarum dan yang lebih sedikit darinya, maka barang tersebut akan membelenggunya di hari kiamat."*

(*Akan membelenggunya di hari kiamat*) ... berdasarkan riwayat Muslim, di dalamnya terdapat keterangan bahwa harta yang digelapkan oleh *'amil* merupakan *ghulul*–sedangkan *ghulul* hukumnya haram–meskipun sedikit, termasuk dosa besar, dan menurut *ijma'* ia wajib mengembalikannya.

Jawaban c

Upaya pemiskinan koruptor dalam arti menyita harta hasil korupsi dibenarkan, ketika ia menolak mengembalikannya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, VI/121:

(الثَّالِثُ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْ قُضَاتِهِ وَعُمَّالِهِ مَا وَجَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ زَائِدًا عَلَى مَا ارْتَزَقُوهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيُحْصِي مَا عِنْدَ الْقَاضِي حِينَ وِلَايَتِهِ وَيَأْخُذُ مَا اكْتَسَبَهُ زَائِدًا عَلَى رِزْقِهِ وَقَدَّرَ أَنَّ هَذَا الْمُكْتَسَبَ إِنَّمَا اكْتَسَبَهُ بِجَاهِ الْقَضَاءِ. وَتَأَوَّلَ أَنَّ مُقَاسَمَةَ عُمَرَ ﷺ وَمُشَاطَرَتَهُ لِعُمَّالِهِ كَأَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِقْدَارُ مَا اكْتَسَبُوهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْعِمَالَةِ، انْتَهَى

(*Yang ketiga*) Al-Imam Kholil berkata di dalam kitab *at-Taudlih*: Ibnu Habib Berkata: *"Dan pemimpin negara boleh mengambil harta yang didapat dari tangan para Qadli-nya serta para pegawainya yang melebihi upah mereka*

dari Baitul-maal, serta hendaknya pemimpin negara menghitung harta yang ada pada Qadli pada saat dia berkuasa (bertugas) dan mengambil harta yang didapatkan oleh Qadli yang melebihi upahnya, serta memperkirakan bahwa harta yang diperolehnya itu hanya didapatkannya melalui jabatan hakim." Ibu Habib menjelaskan bahwa pembagian secara rata oleh Sayyidina Umar ﷺ kepada para pegawainya seperti Abu Musa, Abu Hurairah, dan lainnya, itu di*ta'wil* bahwa beliau melakukannya pada waktu kesulitan menentukan kadar gaji untuk hakim dan pegawai.

Jawaban d

Sikap yang seharusnya diambil pemerintah adalah sebagaimana berikut:

1) Bertindak tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku korupsi.
2) Memperberat hukuman bagi pelaku korupsi.
3) Mengaudit kekayaan pejabat semenjak menjabat.
4) Memecat penegak hukum yang diduga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
5) Menggalakkan pendidikan anti korupsi.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, V/224 [Tunis: Dar at-Tunisiyah li an-Nasyr, 1984]:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. (النساء: ١٣٥)

اِنْتِقَالٌ مِنَ الْأَمْرِ بِالْعَدْلِ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مُعَامَلَاتِ الْيَتَامَى وَالنِّسَاءِ إِلَى الْأَمْرِ بِالْعَدْلِ الَّذِي يَعُمُّ الْأَحْوَالَ كُلَّهَا وَمَا يُقَارِنُهُ مِنَ الشَّهَادَةِ الصَّادِقَةِ. فَإِنَّ الْعَدْلَ فِي الْحُكْمِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِالْحَقِّ هُوَ قِوَامُ صَلَاحِ الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْإِنْحِرَافُ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ قِيدَ أَنْمُلَةٍ يَجُرُّ إِلَى فَسَادٍ مُتَسَلْسِلٍ.

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Apabila ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan apabila kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kamu kerjakan." (QS an-Nisa': 135)

Ayat ini merupakan perpindahan dari perintah berlaku adil di dalam beberapa kondisi tertentu, yaitu dalam hubungan dengan anak yatim dan istri, pada perintah berlaku adil yang mencakup segala kondisi dan kesaksian jujur yang menyertainya. Sebab keadilan dalam hukum dan melaksanakan persaksian dengan jujur merupakan penopang stabilitas masyarakat Islam, serta menyeleweng darinya meskipun seujung jari menjerumuskan pada kerusakan berantai.

b. *Shahih al-Bukhari*, nomor hadits 3965:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

Muhammad bin Muqatil telah bercerita kepadaku, Abdullah memberi kabar padaku, Yunus memberi kabar padaku dari az-Zuhri, az-Zuhri berkata: Urwah bin az-Zubair memberi kabar padaku, bahwasannya terdapat seorang perempuan yang mencuri di zaman Rasulullah ﷺ di dalam peperangan *Fathu Makkah*, kemudian perempuan tersebut datang kepada Sayyidina Usamah bin Zaid untuk memohon pertolongan dari beliau, Sayyidina Urwah berkata: Ketika Usamah bin Zaid menuturkan kepada Rasulullah mengenai wanita itu, maka berubahlah warna dari wajah Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: *"Apakah kamu mengajakku berdialog di dalam salah satu hadd (hukuman) dari bermacam-macam hadd milik Allah"*. Sayyidina Usamah berkata: *"Mohonkan ampunan bagiku wahai Rasulullah"*. Lalu setelah datang waktu sore, berdirilah Rasulullah dalam keadaan berkhutbah , lalu beliau memuji kepada Allah dengan segala hal yang mana Allah adalah ahlinya, lantas Rasulullah bersabda: *"Adapun setelah itu semua, maka sesungguhnya yang membinasakan para manusia sebelum kalian semua adalah ketika ada orang yang mulia mencuri, maka mereka membiarkannya dan saat ada orang lemah mencuri maka mereka*

tegakkan hukuman hadd. Demi Dzat yang nyawa Muhammad berada di kekuasaannya, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya" Lalu Rasulullah memerintahkan untuk memotong tangan wanita itu, sehingga kemudian tangan wanita tersebut dipotong, dan baguslah taubat dari wanita itu setelahnya serta dia juga menikah seusai itu. Sayyidah A'isyah berkata: *"Dan sungguh wanita itu pernah datang setelah kejadian tersebut, lalu aku pun melaporkan hajat (kebutuhan) dia kepada Rasulullah ﷺ."*

c. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VI/719:

الْمُسَاوَاةُ أَمَامَ الْقَانُوْنِ: الْعَدْلُ بِمَعْنَاهُ الشَّامِلِ يَشْمَلُ الْمَبْدَأَ الشَّائِعَ الْآنَ لِأَنَّ الْعَدْلَ كَمَا بَيَّنَّا يَتَطَلَّبُ التَّسْوِيَةَ فِي الْمُعَامَلَةِ وَفِي الْقَضَاءِ وَفِي الْحُقُوْقِ وَمِلْكِيَّاتِ الْأَمْوَالِ. عَبَّرَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: الضَّعِيْفُ فِيْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ، وَالْقَوِيُّ فِيْكُمْ ضَعِيْفٌ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ. وَفِي رِسَالَةِ عُمَرَ الْمَشْهُوْرَةِ لِأَبِي حَسَنٍ الْأَشْعَرِيِّ: آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيْفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيْفٌ مِنْ عَدْلِكَ وَلَقَدْ حَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَاوَلَاتِ التَّمْيِيْزِ بَيْنَ النَّاسِ أَمَامَ الْقَضَاءِ وَالشَّرِيْعَةِ. فَقَالَ فِيْمَا يَرْوِيْهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Kesetaraan di hadapan undang-undang. Keadilan dengan maknanya yang menyeluruh sekarang mencakup prinsip umum, sebab keadilan sebagaimana kami jelaskan, menuntut kesetaraan dalam *mu'amalah*, hukum, berbagai hak, dan kepemilikan harta. Abu Bakar ra mencelanya dengan ungkapan: *"Orang yang lemah menurut kalian merupakan orang yang kuat di sisiku sehingga aku mengambil hak untuknya, dan orang yang kuat menurut kalian merupakan orang lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak darinya, insyaallah."* Di dalam surat Umar kepada Abu Hasan al-Asy'ari yang masyhur terdapat redaksi: *"Jadikanlah masing-masing orang menjadi nyaman terhadap musuhnya di depanmu, dalam keadilanmu, dan dalam majelismu, sehingga orang yang mulia tidak mengharap kezalimanmu untuk membela mereka dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu."* Sungguh Rasulullah ﷺ telah mengkritik keras upaya membeda-bedakan orang di hadapan hukum dan syariat, sehingga beliau bersabda dalam

hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dari Sayyidah 'Aisyah–*radhiyallahu 'anha–: "Sungguh yang membinasakan manusia sebelum generasi kalian adalah biasanya ketika ada orang yang mulia mencuri maka mereka biarkan, dan ketika ada orang yang lemah mencuri maka mereka tegakkan hukuman had. Demi Dzat yang nyawa Muhammad ada dalam kekuasaannya, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya."*

d. *Al-Washith*, VII/295:

الثَّانِيَةُ فِي جَوَازِ الْعَزْلِ فَلِلْإِمَامِ عَزْلُ الْقَاضِي إِذَا رَابَهُ مِنْهُ أَمْرٌ وَيَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ. فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ سَبَبٌ فَعَزَلَهُ بِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ نَفَذَ وَإِنْ عَزَلَهُ بِمَنْ هُوَ دُونَهُ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِنْ عَزَلَهُ بِمِثْلِهِ فَوَجْهَانِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ نُفُوذَ عَزْلِهِ بِكُلِّ حَالٍ إِذْ رُبَّمَا يَرَى مَنْ هُوَ دُونَهُ أَصْلَحَ لَهُمْ مِنْهُ نَعَمْ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَعْزِلَ إِلَّا لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ خَالَفَ الْمَصْلَحَةَ عَصَى وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ عَزْلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُرُّ فَسَادًا فِي الْأَقْضِيَةِ

Yang kedua tentang kebolehan memecat. Boleh bagi Imam memecat *Qadli* apabila ada sesuatu yang membuatnya ragu, dan dugaan yang kuat pun sudah dianggap cukup di dalam hal ini. Kemudian apabila tidak ada penyebab yang tampak akan tetapi Imam memecatnya dan menggantinya dengan orang yang lebih berkompeten daripada *Qadli* tersebut, maka pemecatan itu dihukumi sah *(nufudz)*, dan apabila dia memecat dan mengganti dengan orang yang lebih rendah kompetensinya dari *Qadli* pertama, maka pemecatan itu hukumnya tidak sah menurut pendapat yang lebih unggul. Lalu apabila Imam memecat *Qadli* tersebut dan menggantinya dengan orang yang sepadan dengannya, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Imam al-Haramain memilih pendapat yang menyatakan bahwa pemecatan itu dihukumi sah dalam kondisi apapun, karena terkadang Imam berpandangan bahwa orang yang lebih rendah kompetensinya daripada *Qadli* yang dipecat lebih bagus (lebih maslahat) bagi masyarakat daripada *Qadli* yang dipecat tersebut, akan tetapi wajib bagi Imam dalam urusan antara dia dengan Allah untuk tidak memecat *Qadli* kecuali demi kemaslahatan kaum Muslimin. Jika ia menyimpang dari kemaslahatan, maka ia berdosa, tetapi semestinya tetap dihukumi sah pemecatannya. Sebab bisa menyebabkan kerusakan dalam berbagai keputusan hukum.

e. Referensi lain:
   1) *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, VI/121:

Jawaban e

Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 *jo* UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang menyatakan: *"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"*, sudah sesuai dengan spirit hukum *jinayah* dalam Fikih Islam, mengingat *jinayah* Fikih Islam juga mengenal penerapan hukuman mati bagi: (1) Pelaku tindak pidana korupsi yang berulang; dan (2) Pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi, terganggunya stabilitas negara, dan merugikan masyarakat luas.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 533:

فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ التَّفْقِيهِ: يَجُوزُ قَتْلُ عُمَّالِ الدَّوْلَةِ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى ظُلْمِ الْعِبَادِ إِلْحَاقًا لَهُمْ بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، إِذْ ضَرَرُهُمْ أَعْظَمُ مِنْهَا. وَنَقَلَ الْأَسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى قَتْلِ الظَّالِمِ كَالْمَكَّاسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِنَحْوِ سُمٍّ لِيَسْتَرِيحَ النَّاسُ مِنْ ظُلْمِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ دَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشَرْطِهِ، فَأَوْلَى الظَّالِمُ الْمُتَعَدِّي اهـ

(Faedah) Al-Muhib ath-Thabari berkata di dalam kitab beliau *at-Tafqih*: *"Boleh menghukum mati para pegawai pemerintahan yang bertindak dzalim terhadap rakyat, karena menyamakan mereka dengan al-fawasiq al-khamsi (lima hewan fasik[2]), sebab bahaya para pegawai tersebut lebih besar daripada bahaya al-fawasiq al-khomsi."* Al-Asnawi menukil dari al-Imam Ibn Abd as-Salam, bahwasannya boleh bagi orang yang mampu membunuh orang yang dzalim, seperti penarik pungutan liar dan semisalnya, yaitu para pemimpin yang dzalim, dibolehkan bagi orang yang mampu membunuh mereka untuk membunuhnya dengan racun atau semacamnya, supaya orang-orang dapat terhindar kedzaliman mereka, dikarenakan apabila memang mencegah orang yang hendak berbuat jahat meski atas satu dirham saja diperbolehkan, bahkan sampai dengan cara membunuhnya sesuai dengan syarat-syaratnya, apalagi terhadap orang dzalim yang melampaui batas.

b. *Bahr ar-Ra`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq*, II/45 [Dar al-Kutub al-Islami]:

---

[2] Hewan-hewan tersebut disebut hewan fasik dengan alasan *isti'arah* dan menghinanya, karena banyak sekali keburukannya dan sering menyakiti. *I'anah ath-Thalibin*, IV/121.

قَالَ فِي التَّبْيِينِ وَسُئِلَ الْهِنْدُوَانِيُّ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ أَيَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ قَالَ: إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْزَجِرُ بِالصِّيَاحِ وَالضَّرْبِ بِمَا دُونَ السِّلَاحِ لَا وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ إِلَّا بِالْقَتْلِ حَلَّ لَهُ الْقَتْلُ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ الْمَرْأَةُ حَلَّ لَهُ قَتْلُهَا أَيْضًا وَفِي الْمُنْيَةِ رَأَى رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يَزْنِي بِهَا أَوْ مَعَ مَحْرَمِهِ وَهُمَا مُطَاوِعَتَانِ قَتَلَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعًا. اهـ

فَقَدْ أَفَادَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَحْرَمِ فَفِي الْأَجْنَبِيَّةِ لَا يَحِلُّ الْقَتْلُ إِلَّا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مِنْ عَدَمِ الِانْزِجَارِ بِالصِّيَاحِ وَالضَّرْبِ وَفِي غَيْرِهَا يَحِلُّ مُطْلَقًا وَفِي الْمُجْتَبَى الْأَصْلُ فِي كُلِّ شَخْصٍ إِذَا رَأَى مُسْلِمًا يَزْنِي أَنْ يَحِلَّ لَهُ قَتْلُهُ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ خَوْفًا أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ زَنَى وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ الْمُكَابِرَةُ بِالظُّلْمِ وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ وَصَاحِبُ الْمَكْسِ وَجَمِيعُ الظَّلَمَةِ بِأَدْنَى شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ وَجَمِيعُ الْكَبَائِرِ وَالْأَعْوِنَةُ وَالظَّلَمَةُ وَالسُّعَاةُ فَيُبَاحُ قَتْلُ الْكُلِّ وَيُثَابُ قَاتِلُهُمْ. اهـ

Al-Imam Fakhruddin az-Zaila'i berkata di dalam *at-Tabyin*[3]: *"Dan Al-Imam al-Hinduwani ditanya mengenai seseorang yang menjumpai seorang laki-laki yang sedang bersama perempuan (yang tidak halal baginya), apakah halal bagi orang tersebut membunuh laki-laki itu? Beliau Menjawab: Apabila ia tahu bahwa lelaki tersebut bisa jera dengan cara diteriaki dan dipukul tanpa pedang, maka tidak boleh membunuhnya. Lalu apabila ia tahu bahwa lelaki itu tidak jera kecuali dengan dibunuh, maka halal baginya membunuhnya, kemudian apabila si perempuan juga mematuhi lelaki itu, maka halal baginya untuk membunuhnya juga."* Di dalam kitab *al-Munyah* disebutkan: *"Ada seseorang (laki-laki) melihat laki-laki lain berzina dengan istrinya atau wanita semahramnya, sedangkan mereka berdua sama-sama suka, maka pria yang melihat tadi boleh membunuh keduanya."* Sekian dari *al-Munyah*. Ungkapan tersebut memberikan kesimpulan bahwa ada perbedaan antara wanita *ajnabiyah*, istri, dan mahram, sehingga dalam masalah wanita *ajnabiyah* tidak halal membunuhnya kecuali dengan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan, yakni tidak menjadi jera apabila hanya diperingatkan dengan teriakan dan pukulan, sedangkan dalam persoalan perempuan yang bukan *ajnabiyah* halal membunuhnya secara mutlak. Dalam kitab *Al-Mujtaba* terdapat ungkapan sebagai berikut. Hukum asal bagi setiap orang jika dia melihat seorang muslim yang sedang berzina, maka halal bagi orang itu untuk membunuhnya, hanya saja tindakan membunuh itu tidak boleh dilakukan, sebab khawatir saat ia terlanjur membunuhnya,

---

[3] *Tabyin Al-Haqa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq*, III/208.

sementara lelaki itu tidak terbukti benar-benar zina. Berdasarkan *qiyas* ini, orang-orang yang arogan melakukan kedzaliman, pembegal, penarik pungutan liar, dan semua orang dzalim terhadap harta sekecil apapun harganya, semua pelaku dosa-dosa besar dan orang yang membantunya, orang-orang dzalim dan penebar fitnah, maka boleh menghukum mati mereka semua dan pembunuhnya mendapatkan pahala. Sekian dari *al-Mujtaba*.

c. Referensi lain
   Dasar pengambilan hukum sub a.

Jawaban f

Bagi para penegak hukum (penyidik, JPU, Hakim, dan *lawyer*) yang setengah hati dalam menerapkan pasal-pasal Undang-Undang Tipikor boleh dipecat atau dicabut legalitas izin prakteknya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Al-Washith*, VII/295:

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعَزْلِ وَحكمه ... أَمَّا الْقَاضِيْ إِذَا فَسَقَ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ عَزْلُهُ وَقَطَعَ الْفُقَهَاءُ الْمُعْتَبَرُوْنَ بِانْعِزَالِهِ وَقَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّيْنَ لَا يَنْعَزِلُ إِلَّا أَنْ يُعْزَلَ ... الثَّانِيَةُ فِي جَوَازِ الْعَزْلِ فَلِلْإِمَامِ عَزْلُ الْقَاضِيْ إِذَا رَابَهُ مِنْهُ أَمْرٌ وَيَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ. فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ سَبَبٌ فَعَزَلَهُ بِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ نَفَذَ وَإِنْ عَزَلَهُ بِمَنْ هُوَ دُوْنَهُ لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِنْ عَزَلَهُ بِمِثْلِهِ فَوَجْهَانِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ نُفُوْذَ عَزْلِهِ بِكُلِّ حَالٍ إِذْ رُبَّمَا يَرَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ أَصْلَحَ لَهُمْ مِنْهُ نَعَمْ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَعْزِلَ إِلَّا لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنْ خَالَفَ الْمَصْلَحَةَ عَصَى وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ عَزْلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُرُّ فَسَادًا فِي الْأَقْضِيَةِ

Pasal kedua tentang Pemecatan dan Hukumnya ... Adapun tentang *Qadli*, jika dia fasiq, maka wajib bagi Imam memecatnya. Para Ulama' Fiqh yang *mu'tabar* (diperhitungkan) dalam keilmuannya memastikan bahwa *Qadli* tersebut terpecat dengan sendirinya, sedangkan sebagian Ulama ahli Ushul mengatakan *Qadli* itu tidak akan terpecat dengan sendirinya kecuali bila dipecat... *Yang Kedua tentang Kebolehan Memecat*. Boleh bagi Imam memecat *Qadli* apabila ada sesuatu yang membuatnya ragu, dan persangkaan yang kuat pun sudah dianggap cukup di dalam hal ini. Kemudian apabila tidak ada penyebab yang tampak akan tetapi Imam memecatnya dan menggantinya dengan orang yang lebih kompeten daripada *Qadli* tersebut, maka pemecatan itu dihukumi sah *(nufadz)*, dan

apabila dia memecatnya dan menggantinya dengan orang yang lebih rendah kompetensinya daripada *Qadli* pertama, maka pemecatan itu hukumnya tidak sah menurut pendapat yang lebih unggul. Lalu apabila Imam memecat *Qadli* tersebut dan menggantinya dengan orang yang sepadan dengannya, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Imam al-Haramain memilih pendapat yang menyatakan: Pemecatan tersebut dihukumi sah pada kondisi apapun, sebab kadang Imam berpandangan bahwa orang yang lebih rendah kompetensinya daripada *Qadli* yang dipecat lebih bagus (lebih maslahat) bagi masyarakat daripada *Qadli* yang dipecat tersebut, akan tetapi wajib bagi Imam dalam urusan antara dia dengan Allah untuk tidak memecat *Qadli* kecuali demi kemaslahatan kaum Muslimin. Jika dia menyimpang dari kemaslahatan, maka dia berdosa, tetapi semestinya tetap dihukumi sah pemecatannya. Karena dapat menyebabkan kerusakan dalam berbagai keputusan hukum.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 272:

(مَسْأَلَةٌ: ي): إِذَا صَحَّتْ وِلَايَةُ الْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ عَزْلُهُ إِلَّا لِظُهُوْرِ خَلَلٍ، كَكَثْرَةِ الشَّكْوَى مِنْهُ، أَوْ ظَنِّ ضَعْفِهِ، أَوْ زَوَالِ هَيْبَتِهِ مِنَ الْقُلُوْبِ، أَوْ لِمَصْلَحَةٍ كَوُجُوْدِ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَكَذَا مُسَاوِيْهِ وَدُوْنَهُ، وَفِي تَوْلِيَتِهِ تَسْكِيْنُ فِتْنَةٍ أَوْ جَمْعُ كَلِمَةٍ، فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ لِلْإِمَامِ كَذِي الشَّوْكَةِ وَأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَزْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلَلٌ وَلَا مَصْلَحَةٌ حَرُمَ وَنَفَذَ مِنَ الْإِمَامِ وَذِي الشَّوْكَةِ لَا مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، لِأَنَّ مَا أُبِيْحَ لِضَرُوْرَةٍ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

(Persoalan dari as-Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya): Ketika kekuasaan dari hakim dihukumi sah, maka tidak boleh untuk dilengserkan (dipecat) kecuali karena cacat yang tampak, semisal adanya banyak keluhan tentang hakim itu, diduga tidak mampu, atau hilangnya kewibawaannya di hati rakyat, atau karena kemaslahatan semisal ada orang yang lebih kompeten daripada dirinya. Begitu pula ketika terdapat seseorang yang sepadan atau sebawahnya, akan tetapi pengangkatannya bisa meredam fitnah, atau mempersatukan umat. Dalam kondisi seperti itu Imam, orang yang memiliki kekuasaan, dan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*[4] boleh memecat Hakim pertama tadi. Namun apabila tidak ada cacat dan kemaslahatan sama sekali maka haram memecatnya, tetapi pemecatan tersebut tetap dihukumi sah apabila dilakukan Imam atau orang yang mempunyai kekuasaan, bukan oleh Ahl *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Sebab tindakan yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai ukurannya.

---

[4] *Ahl al-Halli Wa al-'Aqd*: Ulama, Ajengan, dan pemuka masyarakat. *Tuhfah al-Muhtaj* 9/76.

9. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Pertanyaan

a. Bagaimanakah sebenarnya menurut fikih prosedur penggunaan SDA (minyak, air, dan lain-lain)?
b. Apakah pasal 33 UUD 45 sudah sesuai dengan spirit *al-huquq al-musytarakah*?

Jawaban a

Menurut fikih, prosedur penggunaan sumber daya alam sebagaimana berikut:

1) Sumber daya alam berupa air sungai, air laut, air mata air, hasil hutan, garam, yang terdapat di tanah *mubahah* (tanah yang tidak dimiliki perorangan/milik pemerintah), tidak boleh dimonopoli oleh perorangan/individu karena semua orang memiliki hak yang sama. Sedangkan pemerintah tidak boleh memberikan hak kepemilikan dan atau hak kelola kepada individu tertentu.
2) Sumber daya alam berupa air dalam tanah, baik yang ada di tanah *mawat* (tanah tak bertuan), atau di tanah milik negara, atau di tanah milik perorangan, pengelolaannya harus memperhatikan keseimbangan kelestarian alam, sehingga tidak merugikan masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
3) Hasil tambang berupa emas, perak, gas, batubara, biji besi, timah, nikel, minyak bumi, bauksit, marmer, yodium, grafit, dan sejenisnya–yang terkandung dalam tanah milik negara ataupun tanah milik perseorangan–harus dikelola sepenuhnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat dengan memperhatikan keseimbangan alam dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan investor.
4) Jika timbul kerusakan dan kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah pihak investor.

Jawaban b

Pasal 33 UUD 45 atau lebih khusus ayat 3, yang menyatakan: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*, sebenarnya lebih sesuai dengan konsep penguasaan kekayaan alam *(ma'adin)* dalam madzhab Maliki, yang secara subtantif menegaskan, bahwa penguasaan (kepemilikan) kekayaan alam sepenuhnya merupakan hak negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Tuhfah al-Muhtaj* dan *Hasyiyah asy-Syirwani,* VI/227:

(وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ) بِأَنْ لَمْ تُمْلَكْ (مِنَ الْأَوْدِيَةِ) كَالنِّيلِ (وَالْعُيُونِ فِي الْجِبَالِ) وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَوَاتِ وَسُيُولِ الْأَمْطَارِ (يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهَا) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُدَ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ، وَصَحَّ: ثَلَاثَةٌ لَا يُمْنَعْنَ، الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ. فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَحَجُّرُهَا وَلَا لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهَا إِجْمَاعًا.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ إلخ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهِيَ أَيِ الْمِيَاهُ قِسْمَانِ مُخْتَصَّةٌ وَغَيْرُهَا فَغَيْرُ الْمُخْتَصَّةِ كَالْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ فَالنَّاسُ فِيهَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَالَ فَرْعٌ وَعِمَارَةُ هٰذِهِ الْأَنْهَارِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلِكُلٍّ أَيْ مِنَ النَّاسِ بِنَاءُ قَنْطَرَةٍ وَرَحًى عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ فِي مَوَاتٍ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعُمْرَانِ فَالْقَنْطَرَةُ كَحَفْرِ الْبِئْرِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الشَّارِعِ ، وَالرَّحَى يَجُوزُ بِنَاؤُهَا إِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمُلَّاكِ .. (قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَحَجُّرُهَا وَلَا لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهَا) بِالْإِجْمَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ : وَلَا لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهَا) أَيْ لَا إِقْطَاعَ تَمْلِيكٍ وَلَا إِرْفَاقٍ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ

(Air *mubah*), yaitu yang tidak dimiliki siapapun (yakni air yang ada di jurang), seperti sungai, (mata air di gunung) dan semisalnya, yaitu yang ada di tanah tak bertuan dan air aliran hujan, (orang-orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkannya), karena hadits Abu Dawud: *"Semua manusia mempunyai hak yang sama dalam tiga perkara, yaitu air, rerumputan, dan api"*, dan sah hadits: *"Tiga hal yang tidak dicegah untuk dimanfaatkan, yaitu air, rerumputan, dan api"*. Sebab itu, bagi siapa pun tidak boleh memonopolinya, dan Imam tidak boleh memberikannya kepada orang tertentu menurut *ijma'*.

(Ungkapan an-Nawawi di dalam *Matan Minhaj ath-Thalibin: "Air yang mubah, yaitu yang ada di jurang ..."*). Ungkapan *Raudh ath-Thullab*: *"Air ada dua bagian, yang terkhususkan bagi seseorang dan selainnya. Air yang tidak terkhususkan seperti air yang ada di jurang dan sungai, maka orang-orang haknya sama dalam memanfaatkannya."* Lantas Syaikh Zakariya al-Anshari mengatakan: *"Perawatan sungai-sungai ini diambilkan dari harta bait al-mal. Setiap orang boleh membangun bangunan dan penggilingan di situ bila sungai tersebut ada di tanah tak bertuan atau di tanah miliknya. Apabila sungai tersebut berada di pemukiman, maka hukum membangan bangunan sebagaimana menggali sumur di pinggir jalan bagi kaum muslimin, sedangkan penggilingan boleh membangunnya bila tidak membahayakan para pemilik lahan di sekitarnya."* Ungkapan Ibn Hajar: *"Sebab itu bagi siapa pun tidak boleh memonopolinya, dan Imam tidak boleh memberikannya kepada orang*

tertentu", menurut *ijma'*, ada di dalam *Nihayah al-Muhtaj* dan *Mughni al-Muhtaj*. Ungkapan Ibn Hajar: *dan Imam tidak boleh memberikannya"*, maksudnya tidak boleh memberikan hak kemilikan dan hak kelola saja sebagaimana keterangan yang telah lewat dalam *Syarh al-Minhaj*.

b. *Mathalib Uli an-Nuha*, III/337-358:

(فَصْلٌ) (وَحَرُمَ) عَلَى مَالِكٍ (أَنْ يُحْدِثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ) لِخَبَرِ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ. (كَحَمَّامٍ) يَتَأَذَّى جَارُهُ بِدُخَانِهِ أَوْ يَتَضَرَّرُ حَائِطُهُ بِمَائِهِ، وَمِثْلُهُ مَطْبَخُ سُكَّرٍ (وَكَنِيفٍ مُلَاصِقٍ لِحَائِطِ جَارِهِ) يَتَأَذَّى بِرِيحِهِ أَوْ يَصِلُ إِلَى بِئْرِهِ (وَرَحًى) يَهْتَزُّ بِهَا حِيطَانُهُ، (وَتَنُّورٍ) يَتَعَدَّى دُخَانُهُ إِلَيْهِ، (وَعَمَلِ دُكَّانٍ قِصَارَةٍ أَوْ حِدَادَةٍ يَتَأَذَّى بِكَثْرَةِ دَقٍّ وَبِهَزِّ الْحِيطَانِ) لِلْخَبَرِ. (وَ) يَحْرُمُ (غَرْسُ شَجَرٍ نَحْوِ تِينٍ) كَجُمَّيْزٍ (تَسْرِي عُرُوقُهُ) أَيْ أُصُولُهُ (فَتَشُقُّ مَصْنَعَ غَيْرِهِ) أَيْ جَارِهِ (وَحَفْرُ بِئْرٍ يَقْطَعُ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ وَسَقْيٍ وَإِشْعَالِ نَارٍ يَتَعَدَّيَانِ) إِلَى جَارِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ. (وَيَضْمَنُ) مَنْ أَحْدَثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ (مَا تَلِفَ بِذَلِكَ) بِسَبَبِ الْإِحْدَاثِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ، (وَلِجَارِهِ مَنْعُهُ إِنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ كَابْتِدَاءِ إِحْيَائِهِ) أَيْ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ إِحْيَاءِ مَا بِجِوَارِهِ لِتَعَلُّقِ مَصَالِحِهِ بِهِ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ مِنْ دَقٍّ وَسَقْيٍ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ.

(Pasal) (Haram) bagi pemilik suatu lahan (membuat sesuatu yang baru di tanah miliknya yang membahayakan tetangganya), karena hadits: *"Orang tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas tindakan orang lain yang membahayakannya dengan balasan yang membahayakan"*. Ahmad menggunakannya sebagai *hujjah*, (seperti kolam air hangat) yang asapnya mengganggu tetangganya, atau temboknya terganggu dengan airnya, begitupun tempat pemasakan gula, (dan jamban yang gandengan dengan tembok milik tetangganya) yang terganggu sebab baunya, atau mengalir ke sumurnya, (penggilingan) yang temboknya bergerak karenanya, (dapur) yang asapnya sampai kepadanya, (melakukan pekerjaan jasa setrika atau tukang besi yang tetangganya terganggu sebab banyaknya ketukan dan bergetarnya tembok), karena hadits itu. (Dan) haram (menanam pohon semacam Tin) seperti pohon *Jumaiz*, (yang akarnya merembet), yakni akarnya, (sehingga membelah tempat pekerjaan orang lain), maksudnya tetangganya, (menggali sumur yang memutus air sumur tetangganya, dan menyiram dan menghidupkan api yang merembet) ke tetangganya dan semisalnya yaitu setiap orang yang terganggu dengannya. (Dan ia menanggung), maksudnya orang yang membuat hal baru pada tanah

miliknya yang membahayakan tetangganga (apa yang rusak karenanya), sebab pembaruannya dikarenakan kecerobohannya. (Tetangganya boleh mencegahnya untuk melakukan pembaruan tersebut, seperti memulai menghidupkannya), maksudnya seperti ia boleh mencegah tetangganya menghidupkan sesuatu yang ada padanya, karena kemaslahatannya sebagaimana ia boleh mencegahnya melakukan ketukan dan siraman yang menjalar kepadanya.

c. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*, II/452:

(الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْأَعْيَانِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْأَرْضِ وَفِيهِ طَرَفَانِ) (الْأَوَّلُ فِي الْمَعَادِنِ) وَهِيَ الْبِقَاعُ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا مِنْ الْجَوَاهِرِ الْمَطْلُوبَةِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْجَوَاهِرِ الَّتِي فِيهَا وَمِنْهُ قَوْلُهُ (وَهِيَ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ) الْمَعَادِنُ (الظَّاهِرَةُ) وَهِيَ مَا خَرَجَ بِلَا عِلَاجٍ وَإِنَّمَا الْعِلَاجُ فِي تَحْصِيلِهِ (كَالنِّفْطِ) بِكَسْرِ النُّونِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَهُوَ مَا يُرْمَى بِهِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ دُهْنٌ (وَأَحْجَارِ الرَّحَى وَالْبِرَامِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ جَمْعُ بُرْمَةٍ وَهُوَ حَجَرٌ تُعْمَلُ مِنْهُ الْقُدُورُ (وَالْكِبْرِيتِ) وَهُوَ عَيْنٌ تَجْرِي مَاءً فَإِذَا جَمَدَ صَارَ كِبْرِيتًا (وَالْقَارِ) وَهُوَ الزِّفْتُ وَيُقَالُ لَهُ الْقِيرُ (وَالْمِلْحِ الْمَائِيِّ وَكَذَا الْجَبَلِيُّ إنْ لَمْ يُحْوِجْ إلَى حَفْرٍ وَتَعَبٍ) وَالْجِصِّ، وَالْمَدَرِ وَأَحْجَارِ النُّورَةِ (الثَّانِي) الْمَعَادِنُ (الْبَاطِنَةُ وَهِيَ الْمُثْبَتَةُ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ الْمُحْتَاجَةُ إلَى عِلَاجٍ كَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْفَيْرُوزَجِ وَالْيَاقُوتِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ، وَلِقِطْعَةِ ذَهَبٍ أَبْرَزَهَا السَّيْلُ، أَوْ أَتَى بِهَا حُكْمُ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ. وَلَا يُمْلَكَانِ بِالْإِحْيَاءِ) لَهُمَا.

(Bab Ketiga tentang barang-barang yang keluar dari tanah. Dalam bab ini ada dua arah. (Pertama terkait pertambangan), yaitu tempat yang di mana Allah Ta'ala meletakkan barang tambang berharga yang dicari. Terkadang kata *ma'adin* juga diucapkan untuk menunjukkan makna barang tambang yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah ungkapan penulis: (yaitu ada dua, pertama) adalah pertambangan (*zhahirah*), yaitu yang keluar ke permukaan tanpa usaha, yang perlu dilakukan hanyalah usaha untuk menghasilkannya, (seperti *petrolium*,) dengan *kasrah* huruf *nun*-nya lebih *fashih* daripada *fathah*nya, yaitu minyak yang dipakai melempar. Al-Ajhuri berkata: *"Yaitu minyak"*, (batu-batu penggilingan, *biram*), dengan kasrah huruf *ba'*nya, yaitu batu bahan mentah kendi, (belerang), yaitu sumber yang mengalirkan air kemudian ketika kering maka menjadi belerang, (dan *al-qar*), yaitu ter, dan dikatakan *qir* (dan garam air, begitu garam gunung bila tidak butuh pada penggalian dan

kesulitan), batu kapur, tanah liat, dan berbagai batu kapur. (Kedua) yaitu tambang (*bathinah*), yaitu tambang yang ada di dalam perut bumi yang butuh pengolahan, seperti emas, perak, permata piruz, yaqut, tembaga, timah, dan besi. Untuk potongan emas yang ditampakkan atau terbawa banjir diterapkan hukum tambang *zhahirah*, dan keduanya tidak dapat dimiliki dengan cara *ihya'*/membuka lahan keduanya.

d. *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hawasyai asy-Syirwani wa al-'Abbadi*, VI/226 [Jami' al-Fiqh al-Islami]:

(وَالْمَعْدِنُ الْبَاطِنُ وَهُوَ مَا لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِعِلَاجٍ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ) وَفَيْرُوزَجَ وَيَاقُوتٍ كَمَا قَالَاهُ (وَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ الْمَبْثُوثَةِ فِي الْأَرْضِ لَا يُمْلَكُ) مَحَلُّهُ (بِالْحَفْرِ وَالْعَمَلِ) مُطْلَقًا وَلَا بِالْإِحْيَاءِ فِي مَوَاتٍ عَلَى مَا يَأْتِي (فِي الْأَظْهَرِ) كَالظَّاهِرِ

(Tambang *bathin*, adalah tambang yang tidak tampak kecuali dengan pengolahan seperti emas, perak, besi, tembaga), batu piruz, batu yaqut, sebagaimana pendapat an-Nawawi dan ar-Rafi'i (dan seluruh tambang yang ada di perut bumi tidak dapat dimiliki) tempatnya sebab menggali dan bekerja di situ) secara mutlak, dan tidak bisa dimiliki dengan cara membuka lahan di tanah yang tak bertuan sesuai keterangan yang akan datang (menurut pendapat *al-Azhar*).

e. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV/428:

اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَمَلُّكِ الْمَعَادِنِ بِالْاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا ، وَفِي إِيجَابِ حَقٍّ فِيهَا لِلدَّوْلَةِ إِذَا وُجِدَتْ فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ مَمْلُوكَةً .أَمَّا تَمَلُّكُ الْمَعَادِنِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ رَأْيَانِ : قَالَ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَشْهَرِ أَقْوَالِهِمْ: جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْمَعَادِنِ لَا تُمْلَكُ بِالْاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا، كَمَا لَا تُمْلَكُ تَبَعاً لِمِلْكِيَّةِ الْأَرْضِ، بَلْ هِيَ لِلدَّوْلَةِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا الْحَاكِمُ حَسْبَمَا تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ بِالْفَتْحِ الْإِسْلَامِيِّ لِلدَّوْلَةِ، وَلِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مِمَّا تَدْعُو إِلَيْهِ الْمَصْلَحَةُ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَرْجَحِ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَهُمْ: الْمَعَادِنُ تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ إِذَا مُلِكَتْ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِشَخْصٍ كَانَتْ مِلْكاً لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي أَرْضٍ لِلدَّوْلَةِ فَهِيَ لِلدَّوْلَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ فَهِيَ لِلْوَاجِدِ؛ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ تَبَعاً لِلْأَرْضِ .

Fuqaha' berlainan pendapat tentang kepemilikan pertambangan sebab menguasainya dan tentang menetapkan hak bagi negara di dalamnya ketika tambang berada di tanah yang tidak berkepemilikan. Adapun kepemilikan tambang ada dua pendapat *Fuqaha'*. Ulama Malikiyah

dalam pendapat yang paling masyhurnya menyatakan, seluruh macam tambang tidak boleh dimiliki sebab menguasainya, sebagaimana berbagai tambang tidak dimiliki karena mengikuti kepemilikan tanahnya, namun tambang-tambang tersebut ialah milik negara yang dapat ditasarufkan oleh hakim sesuai kemaslahatan. Karena tanahnya dimiliki negara sebab penaklukan Islam, dan karena hukum seperti ini termasuk yang dituntut kemaslahatan. Sementara Ulama Hanfiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah di dalam salah satu pendapat mereka yang lebih unggul menyatakan, bahwa berbagai tambang dimiliki karena memiliki tanahnya, sebab saat suatu tanah dimiliki seluruh bagiannya, maka apabila dimiliki seseorang maka tambangnya menjadi miliknya; bila tambang berada di tanah milik negara maka tambang tersebut milik negara; dan jika ada di tanah yang tidak berkepemilikan maka tambang milik orang yang menemukannya, sebab tambang merupakan harta yang mubah yang mengikuti status tanahnya.

f. *Hasyiyah ad-Dusuqi*, I/487:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي انْجَلَى عَنْهَا أَصْحَابُهَا الْمُسْلِمُونَ مَا وُجِدَ فِيهَا مِنَ الْمَعَادِنِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ

Kesimpulan, yang benar bumi yang penduduk muslimnya telah kosong, berbagai tambang yang ditemukan di dalamnya merupakan milik Imam.

g. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, II/75:

(فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ الْوُلَاةِ وَنُوَّابِهِمْ) يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، وَلَا يَتَخَيَّرُونَ فِي التَّصَرُّفِ حَسَبَ تَخَيُّرِهِمْ فِي حُقُوقِ أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ أَنْ يَبِيعُوا دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ، أَوْ مَكِيلَةَ زَبِيبٍ بِمِثْلِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢] ، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي حُقُوقِ الْيَتَامَى فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ فِي حُقُوقِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنَ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنَ اعْتِنَائِهِ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَإِضَاعَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، وَإِضْرَارِ الْأَمْزِجَةِ لِغَيْرِ عَائِدَةٍ، وَالْأَكْلِ عَلَى الشِّبَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ الْأَمْوَالِ، وَإِفْسَادِ الْأَمْزِجَةِ، وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْأَرْوَاحِ، وَلَوْ وَقَعَتْ مِثْلُ قِصَّةِ الْخَضِرِ عليه السلام فِي زَمَانِنَا هَذَا لَجَازَ تَعْيِيبُ الْمَالِ

حِفْظًا لِأَصْلِهِ وَلَأَوْجَبَتْ الْوِلَايَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حِفْظًا لِلْأَكْثَرِ بِتَفْوِيتِ الْأَقَلِّ فَإِنَّ الشَّرْعَ يُحَصِّلُ الْأَصْلَحَ بِتَفْوِيتِ الْمَصَالِحِ، كَمَا يَدْرَأُ الْأَفْسَدَ بِارْتِكَابِ الْمَفَاسِدِ، وَمَا لَا فَسَادَ فِيهِ وَلَا صَلَاحَ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْوُلَاةُ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إِذَا أَمْكَنَ الِانْفِكَاكُ عَنْهُ.

(Pasal tentang Tasaruf Para Penguasa Pemerintahan dan Penggantinya). Para penguasa pemerintahan dan penggantinya boleh melakukan berbagai tasaruf yang telah aku sebutkan dengan tasaruf yang paling maslahat bagi rakyat yang dikuasainya karena menolak bahaya dan kerusakan dan menarik kemanfaatan dan kebaikan. Salah seorang mereka tidak boleh hanya melakukan kebijakan yang baik saja, padahal sebenarnya mampu melakukan yang lebih baik, kecuali bila hal itu mengantarkan kepada kesulitan yang sangat berat. Mereka juga tidak boleh memilih tasaruf sesuai pilihan untuk diri mereka sendiri, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham, setakar anggur dengan sesamanya, karena firman Allah Ta'ala: *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat"* [QS. al-An'am: 152]. Bila ketentuan ini berlaku bagi hak anak-anak yatim, tentu lebih utama berlaku bagi hak seluruh kaum muslimin terkait harta-karta publik yang ditasarufkan para penguasa, karena perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum lebih sempurna dan lebih banyak daripada kemaslahatan khusus, dan setiap tasaruf yang menarik pada kerusakan atau menolak kemaslahatan maka terlarang, seperti menyia-nyiakan harta tanpa faidah, membahayakan stabilitas tubuh bukan karena suatu kemanfaatan dan makan di atas ukuran kenyang ialah hal terlarang, karena menyia-nyiakan harta dan merusak stabilitas tubuh yang dikandungnya, dan terkadang hal itu bisa mengantarkan hilangnya nyawa. Andaikan terjadi suatu kisah seperti kisah Nabi Khidhir ﷺ di zaman kita ini, niscaya boleh merusak harta untuk menjaga asalnya, dan tentu kekuasaan mewajibkan hal itu untuk kepentingan orang yang dikuasainya, karena menjaga harta yang lebih banyak dengan mengorbankan harta yang lebih sedikit. Sebab syariat memperbolehkan menghasilkan sesuatu yang lebih maslahat dengan mengorbankan sesuatu yang maslahat, sebagaimana sesuatu yang paling merusak boleh ditolak dengan melakukan beberapa kerusakan, dan suatu yang tidak mengandung kerusakan dan kemaslahatan sekaligus maka para penguasa tidak boleh melakukan tasaruf bagi kepentingan rakyat yang dikuasainya ketika mampu menghindarinya.

h. *Hasyiyah asy-Syirwani*, I/471:

وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يَفْعَلُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَمَتَى فَعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ بِفِعْلِهِ.

Ulama telah menjelaskan secara terang-terangan bahwa Imam hanya boleh melakukan kebijakan yang mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin, dan bila ia melakukan tindakan yang bertentangan dengannya maka perbuatannya tidak dipertimbangkan.

i. *Talqih al-Afham al-'Aliyah bi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, III/17:

أَنَّ الشَّرِيْعَةَ جَاءَتْ بِتَقْرِيْرِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيْلِهَا وَتَعْطِيْلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيْلِهَا، فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْأُخْرَى فَلَنَا مَعَهَا حَالَتَانِ : الْأُوْلَى : أَنْ نُحَاوِلَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيْعًا وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ تَعْطِيْلٌ لِلْمَفَاسِدِ، وَإِذَا لَمْ نَسْتَطِعْ تَعْطِيْلَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّنَا نُحَاوِلُ تَقْلِيْلَهَا وَلَا يَكُوْنُ ذَلِكَ إِلَّا بِارْتِكَابِ الْمَفْسَدَةِ الصُّغْرَى، وَاجْتِنَابِ الْمَفْسَدَةِ الْكُبْرَى ، وَهَذَا مِنْ تَقْلِيْلِ الْمَفَاسِدِ

Sungguh syariat datang untuk menetapkan sebuah kemaslahatan dan menyempurnakannya, sekaligus menghilangkan berbagai kerusakan dan meminimalisirnya. Sehingga bila dua kerusakan bertentangan dan salah satunya lebih besar dari yang lain, maka kita mempunyai dua kondisi bersamanya: *pertama*, kita harus berupanya memutuskan hukum atas keduanya, dan ini wajib dilakukan ketika mampu, karena merupakan tindakan menghilangkan kerusakan; dan jika tidak mampu menghilangkan semuanya, maka kita mampu meminimalisirnya dan tidak mungkin melakukannya kecuali dengan melakukan kerusakan yang lebih kecil resikonya dan menghindari kerusakan yang lebih besar, dan hal ini merupakan upaya meminimalisir kerusakan.

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
PWNU JAWA TIMUR
di PP Tremas Pacitan
09-10 November 2014

10. Jual Beli Hak Pakai yang Dilarang Pemerintah
11. Retribusi Pemakaman
12. Batas Minimal Usia Wali Nikah

KOMISI C
Qanuniyah

MUSHAHIH

KH. Syafruddin Syarif
KH. Mukhlis Dimyati

PERUMUS

KH. Ali Musthofa
KH. Muhibbul Aman Aly

MODERATOR

KH. MB. Firjaun Barlaman

NOTULEN

KH. Achmad Shampton Masduqie

10. Jual Beli Hak Pakai yang Dilarang Pemerintah

Deskripsi Masalah

Tiap hari Ahad, sepanjang jalan Semeru di Kota Malang ditutup dari lalu lalang kendaraan bermotor, untuk digunakan sebagai tempat berjualan bagi para pedagang. Para penjual tersebut difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota Malang dengan mendapatkan hak pakai stan. Aktifitas mulai pagi hingga Zhuhur ini dikenal warga dengan istilah "Pasar Minggu". Tidak semua pedagang bisa berjualan di sana, peraturan dari Dinas Pariwisata Kota Malang tentang para penjual di Pasar Minggu, di antaranya adalah:

a. Penjual harus warga Kota Malang.
b. Stan tidak boleh diperjualbelikan.
c. Keanggotaan gugur bila penjual tidak berjualan tiga kali berturut-turut.
d. Tiap berjualan, penjual dikenai retribusi Rp 4.700 dan biaya kebersihan Rp 1.800.

Namun yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

a. Terjadi praktek jual beli stan. Harga stan yang diperjualbelikan itu berkisar antara 1,5 - 3 juta.
b. Dalam praktiknya, banyak orang dari luar kota Malang yang berjualan di Pasar Minggu, karena mendapatkan stan dari hasil pembelian dari "oknum" anggota penjual Pasar Minggu. Sebagai informasi, semua penjual yang ada di Pasar Minggu sudah didata dan nama-namanya ada di Dinas Pariwisata, sebagai orang yang memiliki hak pakai stan di pasar tersebut.

Pertanyaan

a. Dalam pandangan fikih, bagaimana hukum mematuhi peraturan dari Dinas Pariwisata tersebut?
b. Bagaimana hukum praktik jual beli stan yang hanya menjadi hak pakai, bukan hak milik pedagang di Pasar Minggu?
c. Bila seseorang berjualan, padahal menurut peraturan dia tidak berhak berjualan di situ, misalnya (a) Dia bukan warga Malang tapi berjualan di Pasar Minggu jalan Semeru, (b) Dia berjualan di tempat-tempat yang dilarang pemerintah. Apakah keuntungan yang didapatkan dari sana halal?

(PCNU Kota Malang)

Jawaban a

Peraturan pemerintah apabila mengacu pada kemaslahatan umum, mengedepankan urgensitas peraturan itu dalam menjaga kepentingan

masyarakat, manfaat yang ditimbulkan lebih besar dari kerugiannya akibat peraturan itu, dan tidak ada unsur pemanfaatan untuk kemaksiatan, maka peraturan pemerintah dapat dibenarkan.

Terkait dengan Perda penutupan jalan untuk pasar minggu dan aturan yang terkait dengannya sebagaimana dalam deskripsi masalah dapat dibenarkan jika memenuhi unsur-unsur tersebut dan wajib ditaati.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib*, IV/541:

وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ ذَكَرَا فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ لِإِقْطَاعِ الْإِمَامِ مَدْخَلًا فِي الشَّوَارِعِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقْطَعِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ وَيَتَمَلَّكَهُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ إِطْلَاقِهِمَا كَغَيْرِهِمَا الْمَنْعَ مِنْ بِنَاءِ الدَّكَّةِ. وَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا فِي الْجِنَايَاتِ عَلَى مَا زَادَ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لِلطُّرُوقِ، وَمَا هُنَا عَلَى بِنَاءِ الدَّكَّةِ فِي الْمَوْضِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ فِيمَا زَادَ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَوْ إِقْطَاعٍ مِنَ الْإِمَامِ، فَيَكُونُ إِقْطَاعُ الْإِمَامِ فِيمَا زَادَ رَافِعًا لِلْمَنْعِ فِيهِ أَبْ. قَالَ شَيْخُنَا: حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، أَنَّهُ إِنْ أَقْطَعَهُ لِلْارْتِفَاقِ وَبِلَا عِوَضٍ جَازَ أَوْ بِعِوَضٍ أَوْ لِلتَّمَلُّكِ امْتَنَعَ، وَإِنْ زَادَ عَلَى حَاجَةِ الطُّرُوقِ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا فِي الْجِنَايَاتِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ.

Ketahuilah, sungguh an-Nawawi dan ar-Rafi'i menuturkan dalam bab *al-Jinayat* bahwa menurut mayoritas ulama *iqtha'* (pemberian lahan) dari Imam bisa masuk pada berbagai jalan besar, dan bagi *Muqtha'* (orang yang diberi lahan) boleh membangun bangunan di situ dan memilikinya. Namun hal itu bertentangan dengan ungkapan keduanya terkait kasus membangun tempat duduk. Hendaknya keterangan dalam bab *al-Jinayat* diarahkan pada lahan jalan yang melebihi area yang digunakan untuk lewat/lalu lalang; dan keterangan yang terdapat di sini diarahkan pada membangun tempat duduk di area yang dibutuhkan untuk lewat, tidak pada lahan jalan yang melebihi area yang digunakan untuk lewat atau pada lahan jalan yang melebihi area yang digunakan untuk lewat namun tanpa seizin atau tanpa pemberian Imam, sehingga *iqtha'* Imam pada lahan jalan yang melebihi area untuk lewat/lalu lalang menghilangkan ketercegahannya, yang di situ terdapat kemusykilan. Guruku berkata: *"Kesimpulan keterangan yang disampaikan Ibn al-Muqri yang mengikuti Kitab Asalnya dalam bab Ihya' al-Mawat adalah bila Imam memberi lahan untuk dimanfaatkan dan tanpa ganti biaya maka boleh; atau dengan ganti biaya atau*

untuk dimiliki maka tercegah, meskipun lahan yang diberikan merupakan lahan yang melebihi area untuk lewatnya." Mungkin pula mengarahkan keterangan yang ada dalam bab *al-Jinayat* pada perincian hukum ini. Bila tidak, maka merupakan pendapat yang lemah.

b. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 91 [al-Marja' al-Akbar]:

(مَسْأَلَةٌ: ك): يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ وَهُوَ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْمَنْدُوبَةِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالِاسْتِقْلَالُ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ مُبَاحاً أَوْ مَكْرُوهاً أَوْ حَرَاماً لَمْ يَجِبِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيهِ كَمَا قَالَهُ (م ر) وَتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التُّحْفَةِ، ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ مُحَرَّماً لَكِنْ ظَاهِراً فَقَطْ، وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِراً وَبَاطِناً وَإِلَّا فَظَاهِراً فَقَطْ أَيْضاً، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُورِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِراً أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِعَدَمِ الِامْتِثَالِ، وَمَعْنَى بَاطِناً أَنَّهُ يَأْثَمُ اهـ قُلْتُ: وَقَالَ ش ق: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِراً وَبَاطِناً مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ، وَالْمَنْدُوبُ يَجِبُ، وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ التُّنْبَاكِ إِذَا قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ خِسَّةً بِذَوِي الْهَيْئَاتِ، وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَمَرَ نَائِبَهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِعَدَمِ شُرْبِ النَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْقَهَاوِي، فَخَالَفُوهُ وَشَرِبُوا فَهُمُ الْعُصَاةُ، وَيَحْرُمُ شُرْبُهُ الْآنَ امْتِثَالاً لِأَمْرِهِ، وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ وَلَوْ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْوُجُوبُ اهـ

Permasalahan dari al-Kurdi: wajib menaati perintah Imam dalam setiap sesuatu yang mana pemimpin tersebut memiliki otoritas akan hal itu, seperti menyerahkan zakat dari harta yang *zhahir*. Apabila Imam tidak memiliki kekuasaan atas apa yang diperintahkannya dan hal tersebut tergolong hak-hak yang wajib atau sunnah maka boleh menyerahkannya pada Imam atau menyalurkannya ke pos-posnya dengan dirinya sendiri. Bila sesuatu yang diperintahkannya adalah hal-hal mubah, makruh atau haram, maka tidak wajib menaatinya sebagaimana dikatakan ar-Ramli, sedangkan Ibn Hajar ragu-ragu mengenai hal ini dalam *at-Tuhfah*nya, kemudian beliau condong pada hukum wajib untuk menaatinya dalam setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Imam meski sebenarnya adalah sesuatu yang haram, tetapi sebatas ketaatan lahiriah. Adapun selain sesuatu yang haram dan terdapat kemaslahatan umum di dalamnya,

maka wajib menaatinya baik secara lahir maupun batin; dan bila tidak ada kemaslahatan umum, maka wajib menaatinya secara lahiriah. Yang menjadi pertimbangan dalam ukuran sunnah maupun mubah adalah keyakinan orang yang diperintahkan. Makna yang dikehendaki dari kata lahir (lahiriah) adalah: orang yang diperintahkan tidak berdosa bila tidak melakukannya, dan maksud makna batin (wajib taat secara batin) ialah: orang tersebut berdosa bila tidak melakukannya. Aku (al-Kurdi) berkata: *"Asy-Syarqawi berkata: "Kesimpulannya, wajib menaati perintah Imam secara lahir maupun batin, bila hal yang diperintahkan bukan merupakan hal yang haram atau makruh, sehingga hal yang asalnya wajib menjadi semakin kuat kewajibannya dikarenakan perintah dari Imam dan hal yang asalnya sunnah menjadi wajib. Begitupun yang asalnya mubah, tetapi dengan ketentuan bila terdapat kemaslahatan di dalamnya. Seperti: larangan merokok, apabila kita berperdapat bahwa hukum menghisap rokok adalah makruh dengan alasan terdapat kehinaan di dalam perbuatan merokok bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan. Sungguh benar-benar terjadi Sultan telah memerintahkan kepada ajudannya untuk menyiarkan larangan menghisap rokok bagi siapapun di pasar-pasar dan kedai-kedai, kemudian orang-orang melanggarnya dan tetap merokok, maka mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Sekarang pun juga masih haram hukumnya mreokok karena menaati perintah Sultan. Bila Imam memerintahkan sesuatu, lalu dia mencabut kembali perintahnya, maka kewajiban akan hal tersebut tidak gugur meskipun pencabutan terjadi sebelum pelaksanaan."* Sekian.

c. *Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain*, I/332:

قَالَ الشَّيْخُ التُّنْبُكْتِيُّ فِي تَكْمِيلِ الدِّيبَاجِ آخِرَ تَرْجَمَةِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّخْمِيِّ الْغَرْنَاطِيِّ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّهِيرِ بِالشَّاطِبِيِّ مَا نَصُّهُ: وَكَانَ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ ضَرْبِ الْخَرَاجِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ ضَعْفِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ لِضَعْفِ بَيْتِ الْمَالِ عَنِ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ النَّاسِ، كَمَا وَقَعَ لِلشَّيْخِ الْمَالِقِيِّ فِي كِتَابِ الْوَرَعِ. قَالَ: تَوْظِيفُ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ. وَلَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي جَوَازِهِ وَظُهُورِ مَصْلَحَتِهِ فِي بِلَادِ الْأَنْدَلُسِ فِي زَمَانِنَا الْآنَ لِكَثْرَةِ الْحَاجَةِ لِمَا يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سِوَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ، وَضَعْفِ بَيْتِ الْمَالِ الْآنَ عَنْهُ. فَهٰذَا يَقْطَعُ بِجَوَازِهِ الْآنَ فِي الْأَنْدَلُسِ. وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ وَذٰلِكَ مَوْكُولٌ إِلَى الْإِمَامِ.

Asy-Syaikh at-Tanbakti berkata di dalam *Takmilah ad-Dibaj* pada akhir biografi *al-Allamah asy-Syaikh* Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi Abu Ishaq yang dikenal sebagai asy-Syathibi, adapun *nash*nya adalah: *"Ibrahim bin Musa asy-Syathibi termasuk orang yang berpendapat boleh menetapkan pajak kepada masyarakat ketika mereka lemah dan membutuhkan, disebabkan lemahnya baitul mal untuk memenuhi kemaslahatan publik, sebagaimana pendapat asy-Syaikh al-Maliqi dalam kitab al-Wira'i. Beliau berkata: "Menarik pajak dari kaum muslimin merupakan maslahah mursalah. Tidak ada keraguan menurut kita atas kebolehannya dan jelas kemaslahatannya di negeri Andalusi pada zaman kita sekarang ini, sebab banyaknya kebutuhan karena upeti yang dipungut musuh dari muslimin-yang pajak itu diambilkan dari selain harta yang dibutuhkan kaum muslimin-, dan sebab lemahnya baitul mal sekarang ini berasal darinya. Alasan ini memastikan bolehnya menarik pajak sekarang di al-Andalusi. Yang perlu dipikirkan ialah mempertimbangkan besaran pajak yang dibutuhkan, dan hal itu diserahkan kepada Imam."*

Jawaban b

Praktik jual beli sebagaimana deskripsi tidak sah karena hanya yang bersangkutan (penjual stan) yang boleh berjualan ditempat tersebut.

Dasar Pengambilan Hukum

Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, VI/205:

فَقَالَ لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ أَرْضِ بَيْتِ الْمَالِ وَتَمْلِيكُهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ يُقَالُ لَهُ إِقْطَاعُهَا إِذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً وَلَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِقْطَاعِهِ ثُمَّ إِنْ أَقْطَعَ رَقَبَتَهَا مَلَكَهَا الْمُقْطَعُ كَمَا فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ مَنْفَعَتَهَا اسْتَحَقَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُدَّةَ الْإِقْطَاعِ خَاصَّةً اهـ

Kemudian an-Nawawi berkata: *"Imam boleh memberikan tanah baitul mal dan memberikan kepemilikannya." Dalam al-Jawahir dikatakan: "Imam boleh memberikannya bila melihat kemaslahatan padanya dan seseorang tidak bisa memilikinya kecuali dengan pemberian Imam. Lalu jika Imam memberikan bentuk fisik tanahnya, maka orang yang diberi memilikinya, sebagaimana pemberian dirham; atau Imam memberikan manfaatnya saja, maka ia berhak mengambil manfaatnya selama waktu pemberian manfaatnya secara khusus."*

Jawaban c

Pada dasarnya keuntungan yang diperoleh tersebut halal selama syarat dan rukun baik terpenuhi, akan tetapi keuntungan yang diperoleh tersebut menurut Imam al Ghazali mengandung unsur makruh yang mendekati haram, karena itu sepatutnya dihindari agar memperoleh rizki yang halal dan berkah.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Ihya' 'Ulum ad-Din*, II/88:

الْمَثَارُ الثَّالِثُ لِلشُّبْهَةِ: أَنْ يَتَّصِلَ بِالسَّبَبِ الْمُحَلِّلِ مَعْصِيَةٌ: إِمَّا فِيْ قَرَائِنِهِ وَإِمَّا فِيْ لَوَاحِقِهِ وَإِمَّا فِيْ سَوَابِقِهِ أَوْ فِيْ عِوَضِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْمَعَاصِيْ الَّتِيْ لَا تُوْجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ وَإِبْطَالَ السَّبَبِ الْمُحَلِّلِ. مِثَالُ الْمَعْصِيَةِ فِي الْقَرَائِنِ: الْبَيْعُ فِيْ وَقْتِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالذَّبْحُ بِالسِّكِّيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ، وَالِاحْتِطَابُ بِالْقَدُوْمِ الْمَغْصُوْبِ، وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْغَيْرِ، وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِهِ فَكُلُّ نَهْيٍ وَرَدَ فِي الْعُقُوْدِ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْاِمْتِنَاعَ مِنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ وَرَعٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُسْتَفَادُ بِهٰذِهِ الْأَسَالِيْبِ مَحْكُوْمًا بِتَحْرِيْمِهِ. وَتَسْمِيَةُ هٰذَا النَّمَطِ شُبْهَةً فِيْهِ تَسَامُحٌ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِيْ غَالِبِ الْأَمْرِ تُطْلَقُ لِإِرَادَةِ الْاِشْتِبَاهِ وَالْجَهْلِ وَلَا اشْتِبَاهَ هٰهُنَا، بَلِ الْعِصْيَانُ بِالذَّبْحِ بِسِكِّيْنِ الْغَيْرِ مَعْلُوْمٌ وَحِلُّ الذَّبِيْحَةِ أَيْضًا مَعْلُوْمٌ وَلٰكِنْ قَدْ تُشْتَقُّ الشُّبْهَةُ مِنَ الْمُشَابَهَةِ، وَتَنَاوُلُ الْحَاصِلِ مِنْ هٰذِهِ الْأُمُوْرِ مَكْرُوْهٌ وَالْكَرَاهَةُ تُشْبِهُ التَّحْرِيْمَ فَإِنْ أُرِيْدَ بِالشُّبْهَةِ هٰذَا فَتَسْمِيَةُ هٰذَا شُبْهَةً لَهُ وَجْهٌ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُسَمَّى هٰذَا كَرَاهَةً لَا شُبْهَةً، وَإِذَا عُرِفَ الْمَعْنَى فَلَا مُشَاحَةَ فِي الْأَسَامِيْ فَعَادَةُ الْفُقَهَاءِ التَّسَامُحُ فِي الْإِطْلَاقَاتِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هٰذِهِ الْكَرَاهَةَ لَهَا ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: الْأُوْلَى مِنْهَا تَقْرُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَالْوَرَعُ عَنْهُ مُهِمٌّ وَالْأَخِيْرَةُ تَنْتَهِيْ إِلَى نَوْعٍ مِنَ الْمُبَالَغَةِ تَكَادُ تَلْتَحِقُ بِوَرَعِ الْمُوَسْوَسِيْنَ وَبَيْنَهُمَا أَوْسَاطٌ نَازِعَةٌ إِلَى الطَّرَفَيْنِ، فَالْكَرَاهَةُ فِيْ صَيْدِ كَلْبٍ مَغْصُوْبٍ أَشَدُّ مِنْهَا فِي الذَّبِيْحَةِ بِسِكِّيْنٍ مَغْصُوْبٍ أَوِ الْمُقْتَنَصِ بِسَهْمٍ مَغْصُوْبٍ إِذِ الْكَلْبُ لَهُ اخْتِيَارٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيْ أَنَّ الْحَاصِلَ بِهِ لِمَالِكِ الْكَلْبِ أَوْ لِلصَّيَّادِ، وَيَلِيْهِ شُبْهَةُ الْبَذْرِ الْمَزْرُوْعِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ فَإِنَّ الزَّرْعَ لِمَالِكِ الْبَذْرِ وَلٰكِنْ فِيْهِ شُبْهَةٌ، وَلَوْ أَثْبَتْنَا حَقَّ الْحَبْسِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ فِي الزَّرْعِ لَكَانَ كَالثَّمَنِ الْحَرَامِ، وَلٰكِنِ الْأَقْيَسُ أَنْ لَا يَثْبُتَ حَقُّ حَبْسٍ كَمَا لَوْ طَحَنَ بِطَاحُوْنَةٍ مَغْصُوْبَةٍ وَاقْتَنَصَ بِشَبَكَةٍ مَغْصُوْبَةٍ إِذْ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ صَاحِبِ الشَّبَكَةِ فِيْ مَنْفَعَتِهَا بِالصَّيْدِ، وَيَلِيْهِ الْاِحْتِطَابُ بِالْقَدُوْمِ الْمَغْصُوْبِ ثُمَّ ذَبْحُهُ مِلْكَ نَفْسِهِ بِالسِّكِّيْنِ الْمَغْصُوْبِ إِذْ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَى تَحْرِيْمِ الذَّبِيْحَةِ، وَيَلِيْهِ الْبَيْعُ

فِي وَقْتِ النِّدَاءِ فَإِنَّهُ ضَعِيفُ التَّعَلُّقِ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ وَإِنْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى فَسَادِ الْعَقْدِ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ اشْتَغَلَ بِالْبَيْعِ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ كَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَفْسَدَ الْبَيْعَ بِمِثْلِهِ لَأَفْسَدَ بَيْعَ كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ دِرْهَمُ زَكَاةٍ أَوْ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ وُجُوبُهَا عَلَى الْفَوْرِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ مَظْلَمَةُ دَانِقٍ فَإِنَّ الْاِشْتِغَالَ بِالْبَيْعِ مَانِعٌ لَهُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ فَلَيْسَ لِلْجُمُعَةِ إِلَّا الْوُجُوبُ بَعْدَ النِّدَاءِ، وَيَنْجَرُّ ذَلِكَ إِلَى أَنْ لَا يَصِحَّ نِكَاحُ أَوْلَادِ الظَّلَمَةِ وَكُلِّ مَنْ فِي ذِمَّتِهِ دِرْهَمٌ لِأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِقَوْلِهِ عَنِ الْفِعْلِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، إِلَّا مِنْ حَيْثُ وَرَدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَهْيٌ عَلَى الْخُصُوصِ رُبَّمَا سَبَقَ إِلَى الْأَفْهَامِ خُصُوصِيَّةٌ فِيهِ فَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ أَشَدَّ وَلَا بَأْسَ بِالْحَذَرِ مِنْهُ وَلَكِنْ قَدْ يَنْجَرُّ إِلَى الْوَسْوَاسِ حَتَّى يَتَحَرَّجَ عَنْ نِكَاحِ بَنَاتِ أَرْبَابِ الْمَظَالِمِ وَسَائِرِ مُعَامَلَاتِهِمْ.

Penyebab syubhat ketiga: Sebab yang menghalalkan harta bertemu dengan maksiat: adakalanya dalam *qarinah-qarinah*nya, hal-hal setelahnya, dan hal-hal sebelumnya, atau *'iwadh*nya, sementara maksiat itu termasuk maksiat yang tidak menetapkan rusaknya akad dan membatalkan sebab yang menghalalkan harta. Contoh maksiat dalam *qarinah*: jual beli di waktu azan Shalat Jum'at, menyembelih dengan pisau yang di*ghashab*, mencari kayu bakar dengan kapak *ghashaban*, menjual atas penjualan orang lain, dan menawar atas tawarannya. Jadi, setiap larangan yang ada dalam berbagai akad yang tidak menunjukkan kerusakannya, maka semua larangan tersebut merupakan *wira'i*, meski hukum yang didapat dengan pola *uslub-uslub* semacam ini tidak dihukumi haram. Dalam penamaan cara *mu'amalah* seperti ini sebagai syubhat terdapat *tasamuh* (menganggap mudah), sebab pada umumnya syubhat diucapkan untuk menghendaki keserupaan dan ketidaktahuan, sementara di sini tidak ada keserupaan, bahkan maksiat menyembelih hewan dengan pisau orang lain tanpa seizinnya telah maklum keharamannya dan kehalalan sembelihannya juga telah maklum. Namun terkadang kata شُبْهَة berasal dari kata شَبِيهَة. Sementara memakan barang yang dihasilkan dari cara-cara *mu'amalah* seperti itu adalah makruh, dan makruh menyerupai haram. Sehingga bila yang dimaksud dengan syubhat adalah makna ini, maka penamaan cara *mu'amalah* tadi sebagai syubhat mempunyai alasan. Bila tidak demikian, maka hendaknya cara tersebut dinamakan *karahah*, bukan syubhat. Bila makna ini sudah diketahui, maka penamaannya tidak perlu ditentangkan, sebab kebiasaan *Fuqaha'* ialah mempermudah berbagai pengucapan.

Kemudian ketahuilah, bahwa *karahah* (kemakruhan) ini ada 3 tingkatan: *Pertama* makruh yang mendekati haram, dan menghindarinya sangat penting. *Yang terakhir*, makruh yang berujung pada semacam *mubalaghah* yang hampir mendekati dengan *wira'*inya orang-orang yang was-was. Di antara kemakruhan yang pertama dan terakhir ada kemakruhan yang tengah-tengah, yang condong pada keduanya. Kemakruhan hewan hasil buruan anjing *ghasaban* lebih makruh daripada kemakruhan sembelihan dengan pisau *ghasaban* atau yang dipanah dengan panah *ghasaban*. Sebab anjing mempunyai insting, dan diperselisihkan terkait hasil buruan yang diperoleh, apakah menjadi milik pemilik anjing atau pemburunya. Biji yang ditanam di tanah *ghasaban* berada pada tingkat sebawahnya, sebab tanaman itu merupakan milik pemilik bija, namun ada syubhat di situ. Andaikan kita tetapkan hak menahan tanaman menjadi milik pemilik lahan, maka hukumnya seperti pembayaran yang haram, namun yang paling mendekati *qiyas* ialah tidak tetapnya hak menahan, seperti halnya andaikata orang menusuk dengan penusuk *ghasaban*, dan menangkap binatang dengan jaring *ghasaban*, karena hak pemilik jaring di dalam manfaatnya tidak berkaitan dengan perburuan. Kemudian dilanjutkan kemakruhan mencari kayu dengan kapak *ghasaban*, menyembelih hewan milik sendiri dengan pisau *ghasaban*, karena tidak ada satu ulama pun yang mengharamkan sembelihan tersebut. Kemudian disusul jual beli saat azan Shalat Jum'at, karena hubungannya lemah dengan maksud akad, meskipun ada segolongan ulama yang berpendapat atas rusaknya akad, karena kasus yang di situ hanyalah seseorang sibuk berjual beli dan melalaikan dari kewajiban lain yang harus dijalankannya. Andaikan hal itu merusak akad jual beli, maka juga merusak akad jual beli setiap orang yang masih berkewajiban membayar zakat satu dirham, orang yang punya tanggungan shalat wajib yang terlepas dari waktunya yang harus segera dikerjakan, atau pun orang yang mempunyai tanggungan kezaliman satu *daniq*, karena kesibukannya melakukan akad jual beli mencegahnya untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga Shalat Jum'at hanya wajib setelah azannya. Hal tersebut nantinya akan merembet pada ketidakabsahan nikahnya anak orang-orang zalim dan setiap orang yang punya tanggungan satu dirham, karena ia menyibukkan diri dengan ucapannya yang melalaikan perbuatan yang wajib dilakukaknnya. Bila tidak demikian, dari sisi adanya larangan khusus berjual beli pada hari Jumat terkadang memberi pemahaman kekhusuan pada waktu tersebut, sehingga kemakruhannya kuat, dan tidak apa-apa mengkhawatirkannya, namun terkadang kekhawatiran tersebut akan menarik pada was-was sampai menganggap berat/dosa untuk menikahi anak-anak perempuan orang-orang zalim dan *mu'amalah* lainnya dengannya.

11. Retribusi Pemakaman

Deskripsi Masalah

Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam mengatur pemakaman yang berkenaan dengan retribusi untuk makamnya, proses perawatan jenazah, dan lainnya. Misalnya Perda Kota Surabaya, Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat menetapkan: *"Sewa tempat pemakaman dengan cara pemakaman tunggal/tumpangan di lokasi makam baru untuk setiap makam dikenakan retribusi sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap 3 (tiga) tahun."* Contoh lainnya adalah Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman, Bab X Retribusi Pasal 41; atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan, penggunaan sarana pelayanan pemakaman milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pertanyaan

a. Dapatkah dibenarkan peraturan daerah tentang retribusi makam sebagaimana di atas?
b. Apakah dalam pandangan Islam selama masa sewa makam dibenarkan membangun kuburan *(tajshish wa bina')*?
c. Siapa yang berhak atau mempunyai wewenang menolak dan memberi izin pemakaman jenazah di pemakaman umum?
(PCNU Kota Surabaya)

Jawaban a

Pengertian tanah pemakaman milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam deskripsi mengandung pengertian umum, yaitu tanah pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian riwayat tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah tersebut bisa bermacam-macam sebagaimana berikut:

1) Tanah wakaf,
2) Tanah aset desa atau negara yang difungsikan untuk pemakaman.
3) Tanah yang tidak diketahui riwayat kepemilikannya namun semenjak dahulu telah difungsikan masyarakat sebagai tempat pemakaman umum.

Adapun hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Jika model 1, maka pemerintah sama sekali tidak boleh menarik retribusi sebab tanah tersebut oleh pemiliknya diwakafkan untuk tempat pemakaman umum sehingga pemerintah tidak berwenang untuk mengambil pungutan.

2) Jika model 2, maka pemerintah dimungkinkan mengelola aset tanah desa atau negara dengan cara menyewakan untuk tempat pemakaman sepanjang kebijakan itu mempertimbangkan maslahah untuk kepentingan negara.
3) Adapun model 3, menurut Imam Ibn Hajar statusnya sama dengan tanah wakaf dan menurut Imam ar-Ramli berlaku sebagaimana tanah *mawat* (tanah tak bertuan). Dengan demikian, pemerintah tidak boleh menarik retribusi.

Dasar Pengambilan Hukum

'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti, I/187:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الطَّبَرِيُّ مُفْتِيْ مَكَّةَ: اعْلَمْ أَنَّ بِنَاءَ الْقُبَبِ وَغَيْرَهَا فِي الْمَقَابِرِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فِيْ أَرْضٍ مَمْلُوْكَةٍ رَضِيَ مَالِكُهَا بِوَضْعِ الْبِنَاءِ فِيْهَا. وَهٰذَا الْقِسْمُ لَا شَكَّ فِيْ جَوَازِهِ عَلَى سَبِيْلِ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِيَّةِ لِوُرُوْدِ النَّهْيِ عَنْ ذٰلِكَ وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ فِيْ حُرْمَةِ هَدْمِهِ ... وَإِنْ كَانَ فِيْ أَرْضٍ مَوْقُوْفَةٍ لِلدَّفْنِ أَوْ مُسَبَّلَةٍ عَلَيْهِ بِأَنِ اعْتَادَ النَّاسُ الدَّفْنَ فِيْهَا. فَهٰذَا الْقِسْمُ لَا شَكَّ فِيْ حُرْمَتِهِ وَجَوَازِ هَدْمِهِ ... وَقَالَ ابْنُ قَاسِمٍ: اعْتَمَدَ مُحَمَّدٌ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَبَّلَةِ الْمَوْقُوْفَةُ. وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يَحْرُمُ الْبِنَاءُ فِيْهَا. وَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ عَامَّةِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيْهَا. وَعَلَى هٰذَا لَا اشْكَالَ فِيْ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ هَدْمُ مَا يُوْجَدُ مِنَ الْأَبْنِيَةِ بِالْقَرَافَةِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ وَضْعُهُ عَلَى وَجْهٍ سَائِغٍ شَرْعًا. انتهى كلام الرملي ملخصا

Al-Allamah Abdul Wahhab ath-Thabari *Mufti* Makkah berkata: "*Ketahuilah sungguh membangun kubah dan selainnya di berbagai pemakaman, adakala berada di lahan pribadi yang pemiliknya merelakan membangun bangunan di situ, bagian ini tidak ada keraguan atas kebolehannya dengan status makruh tanzih karena adanya larangan terkait hal itu, dan tidak ada keraguan dan kebimbangan atas keharaman merobohkannya... Bila berada di tanah wakaf atau tanah yang disediakan untuk pemakaman, yakni bila masyarakat biasa memakamkan jenazah di situ, maka bagian ini tidak ada keraguan dalam keharaman membangun di situ dan dalam kebolehan untuk merobohkannya...*" Ibn Qasim berkata: "*Muhammad ar-Ramli berpedoman bahwa yang dimaksud dengan tanah yang disediakan ialah tanah yang diwakafkan. Adapun selainnya maka tidak haram membangun bangunan di dalamnya, meski adat mayoritas penduduk daerah tersebut memakamkan jenazah di situ. Dengan demikian maka tidak ada kemusykilan dalam hal ketidakbolehan merobohkan bangunan-bangunan yang ada di Qarafah sekira tidak diketahui pembangunnya berdasar alasan yang benar menurut syara.*" Sekian ringkasan pendapat ar-Ramli.

Jawaban b

Akad sewa sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan rukun dan syarat dalam akad sewa *(ijarah)*. Selain itu, ketentuan yang menyatakan masa pakai pemakaman dibatasi dengan waktu tertentu sehingga memungkinkan dari pihak pengelolanya menimpa makam (digunakan untuk menguburkan orang lain di atasnya) yang tidak membayar dalam jangka waktu tertentu adalah tidak dibenarkan.

Dasar Pengambilan Hukum

Hasyiyah Ali Syibramalisi 'ala Nihayah al-Muhtaj, V/290:

(قَوْلُهُ: وَلِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَدَفْنِهِ) قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِدَفْنِ مَيِّتٍ لِأَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ لَا يَجُوزُ قَبْلَ بَلَاءِ الْمَيِّتِ وَلَا يُعْرَفُ مَتَى يَكُونُ اهـ حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ. أَقُولُ: وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعَارِيَةِ مِنْ صِحَّتِهَا لَهُ وَتَتَأَبَّدُ لِلْحَاجَةِ الصِّحَّةُ هُنَا وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِالْمُدَّةِ لِلضَّرُورَةِ.

(Ungkapan ar-Ramli: *"Dan karena merawat dan mengubur mayit"*). Al-Baghawi berkata: *"Tidak boleh menyewa tanah untuk mengubur mayit, karena tidak boleh menggali kubur sebelum busuknya mayit, sementara tidak diketahui kapan mayit menjadi busuk."* Demikian keterangan di dalam *Hawasyi ar-Raudh* karya ar-Ramli al-Kabir. Aku berkata: *"Qiyas kasus yang telah lewat di dalam bab al-'Ariyah mengenai keabsahan meminjamkan tanah untuk mengubur mayit dan menjadi abadi karena hajat, adalah sahnya menyewa tanah untuk mengubur mayit di sini, dan ketidaktahuan atas jangka waktu sewa diketahui ditolelir karena darurat."*

Jawaban c

Yang dimaksud dengan pemakaman umum adalah tanah yang diwakafkan untuk pemakaman atau tanah yang oleh masyarakat difungsikan sebagai tempat pemakaman umum (*musabbalah*). Pemanfaatan tanah pemakaman umum sebagaimana dimaksud tidak dapat dibatasi sehingga pengurus makam (*nazhir*) tidak dapat menolak orang yang akan dimakamkan di area pemakaman tersebut kecuali jika pewakaf *(waqif)* menyatakan syarat membatasi pemanfaatan pemakaman tersebut, maka pengurus makam harus memperhatikan ketentuan darinya.

Dasar Pengambilan Hukum

a. *Bughyah al-Mustarsyidin*, 63:

(مَسْأَلَةٌ: ي) لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْعَامِّ وَهُوَ الْقَاضِي أَوِ الْوَالِي النَّظَرُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ مَعَ وُجُودِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ الْمُتَأَهِّلِ.

(Masalah dari Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhar al-Yamani) tidak terdapat kewenangan bagi *Nazhir Am* yakni *Qadhi* atau Wali di dalam mengatur urusan-urusan wakaf dan harta-harta masjid bila ada *Nazhir Khash* yang ahli.

b. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, II/523:

وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ شُرُوطَ الْوَاقِفِ مَرْعِيَّةٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُنَافِي الْوَقْفَ. فَإِذَا تَلَفَّظَ الْوَاقِفُ فِي صِيغَةِ وَقْفِهِ بِحَرْفِ عَطْفٍ يَقْتَضِي تَشْرِيكًا أَوْ تَرْتِيبًا عُمِلَ بِهِ كَمَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَيِ الشَّخْصِ (وَقَفْتُ) كَذَا (عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ) فِي أَصْلِ الْإِعْطَاءِ وَالْمِقْدَارِ، (بَيْنَ الْكُلِّ) وَهُوَ جَمِيعُ أَفْرَادِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَا لِلتَّرْتِيبِ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَنُقِلَ عَنْ إِجْمَاعِ النُّحَاةِ، وَمَنْ جَعَلَهَا لِلتَّرْتِيبِ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ الْوُضُوءِ عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، يَنْبَغِي كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَقْدِيمُ الْأَوْلَادِ. وَلَوْ جَمَعَهُمْ بِالْوَاوِ ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ اخْتَصَّ وَلَدُهُ بِنَصِيبِهِ وَشَارَكَ الْبَاقِينَ فِيمَا عَدَاهُ.

Prinsip dasar hukum-hukum wakaf adalah syarat-syarat *Waqif* harus dipenuhi selama di dalamnya tidak ada unsur yang menafikan wakaf. Apabila dalam *shighat* wakafnya *Waqif* mengucapkan huruf *athaf* yang berfaidah *tasyrik* atau *tartib*, maka harus diamalkan sebagaimana yang diisyaratkan oleh *Mushannif* dengan ucapan seseorang: (*"Saya wakafkan) barang ini (pada anak-anak saya dan anak-anaknya anak-anak saya"* yang menuntut kesamaan hak) di dalam asal pemberian dan ukurannya (di antara semua), yaitu semua anak dan anak-anak mereka; baik laki-laki maupun perempuan, karena huruf *wawu* berfaidah *mutlak al-jam'i* bukan *tartib* sebagaimana menurut pendapat *shahih* menurut *Ushuliyin* dan dinukil dari *ijma'* Ahli Nahwu. Ulama yang menjadikannya ber*faidah tartib* sebagaimana diceritakan oleh al-Mawardi dalam bab *Wudhu* dari mayoritas *Ashab*, sebaiknya sebagaimana kata Ibn ar-Rif'ah, mereka mendahulukan anak-anak *Waqif*. Apabila *Waqif* mengumpulkan mereka dengan *wawu* kemudian berkata: *"Dan orang yang meninggal di antara mereka maka bagiannya untuk anaknya"* kemudian salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka anaknya secara khusus mempunyai bagian dari orang tuanya dan bersekutu dengan orang lainnya dalam bagian selainnya.

12. Batas Minimal Usia Wali Nikah

Deskripsi Masalah

Sebut saja Soimah, saudara kandungnya, Soim, sebenarnya sudah baligh sehingga memenuhi syarat menjadi wali nikahnya. Namun dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, perwalian Soim terganjal dengan Peraturan Menteri Agama, Nomor 11, Tahun 2007 yang mensyaratkan wali sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sementara meskipun sudah baligh dia belum mencapai batas minimal usia tersebut dia tidak bisa menjadi wali.

Pertanyaan

a. Adakah pendapat dari madzhab empat yang melegalkan peraturan di atas?
b. Apa yang harus dilakukan penghulu, menetapkan wali perempuan tersebut harus *intiqal* (pindah) kepada wali urutan berikutnya, atau menetapkan walinya tetap saudaranya yang belum mencapai usia 19 tahun itu?
c. Apakah peraturan di atas harus direvisi? Kalau perlu bagaimana rumusannya yang benar?

(PCNU Kab. Blitar)

Jawaban a

Ulama dari empat madzhab berbeda pendapat mengenai masa baligh menggunakan perhitungan usia. Menurut madzhab Syafi'i masa baligh menggunakan perhitungan usia adalah genap usia 15 tahun Hijriyah. Madzhab Maliki dan Hanafi genap usia 18 tahun Hijriyah. Dengan demikian, menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, jika wali nikah tidak mengalami masa baligh dengan keluar sperma, maka syarat bisa menjadi wali nikah harus berusia genap 18 tahun masuk 19 tahun dalam kalender hijriyah dan tidak mengalami gangguan akal atau hal-hal lain yang dapat menghalangi hak wali nikah.

Dasar Pengambilan Hukum

Durar al-Hukkam Syarh Ghurar al-Hukkam, I/75:

(فَصْلٌ) (بُلُوْغُ الصَّبِيِّ بِالْاِحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ وَ) بُلُوْغُ (الصَّبِيَّةِ بِالْاِحْتِلَامِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ)، الْأَصْلُ أَنَّ الْبُلُوْغَ يَكُوْنُ بِالْإِنْزَالِ حَقِيْقَةً، وَلٰكِنْ غَيْرُهُ مِمَّا ذُكِرَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا مَعَ الْإِنْزَالِ فَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَامَةً عَلَى الْبُلُوْغِ. (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ شَيْءٌ مِنْهَا (فَحَتَّى) أَيْ لَا يُحْكَمُ بِالْبُلُوْغِ حَتَّى (يَتِمَّ لَهُ) أَيِ الصَّبِيِّ (ثَمَانِيْ عَشْرَ سَنَةً

وَلَهَا) أَيْ لِلصَّبِيَّةِ (سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَشُدُّ الصَّبِيِّ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَتَبِعَهُ الْقُتَيْبِيُّ ثَمَانِيَ عَشْرَ سَنَةً وَقِيلَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَقِيلَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ. وَأَقَلُّ مَا قَالُوا هُوَ الْأَوَّلُ فَوَجَبَ أَنْ يُدَارَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لِلاحْتِيَاطِ، إِلَّا أَنَّ الْجَارِيَةَ أَسْرَعُ إِدْرَاكًا مِنَ الْغُلَامِ، فَنَقَصَ سَنَةً مِنْهُنَّ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي تُوَافِقُ الْمِزَاجَ.

(وَقَالَا فِيهِمَا بِتَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ (وَبِهِ يُفْتَى) لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ، إِذِ الْعَلَامَاتُ تَظْهَرُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ غَالِبًا فَجَعَلُوا الْمُدَّةَ عَلَامَةً فِي حَقِّ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ الْعَلَامَةُ. (وَأَدْنَى مُدَّتِهِ) أَيِ الْبُلُوغِ (لَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ) إِذْ قَدْ يَحْصُلُ لَهُمَا فِي هَذَا السِّنِّ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ (فَإِنْ رَاهَقَا) أَيْ قَرُبَا إِلَى الْبُلُوغِ بِأَنْ يَبْلُغَا هَذَا السِّنَّ (وَأَقَرَّا بِالْبُلُوغِ كَانَا كَالْبَالِغِ حُكْمًا) لِأَنَّ الْبُلُوغَ لَمَّا كَانَ حَاصِلًا فِي هَذَا السِّنِّ وَلَوْ نَادِرًا فَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ مِنْهُمَا كَالْحَيْضِ قَبْلَ إِقْرَارِهِمَا بِهِ ضَرُورَةً.

(Pasal) (Balighnya anak laki-laki dengan mimpi basah, menghamili dan keluar mani), sedangkan balighnya (wanita dengan keluar mani, haidh dan hamil). Hukum asalnya adalah bahwa baligh disebabkan keluar mani secara nyata, akan tetapi standar baligh yang lain dari hal-hal yang telah disebutkan tidak terjadi kecuali bersama keluar mani, maka masing-masing dijadikan sebagai tanda baligh. (Jika tidak), maksudnya apabila tidak ditemukan sesuatu dari standar balighnya, (maka hingga) tidak dihukumi baligh sampai (sempurna baginya), maksudnya lelaki (berusia 18 tahun dan baginya), maksudnya wanita (berusia 14 tahun) menurut Abu Hanifah, karena firman Allah ﷻ: *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga sampai ia dewasa."* [QS. al-An'am: 152/al-Isra': 34]. Dewasanya laki-laki menurut pendapat Ibn Abbas dan diikuti al-Qutaibi ialah usia 18 tahun, menurut satu keterangan usia 22 tahun, dan menurut keterangan lain usia 25 tahun. Minimal pendapat yang mereka kemukakan ialah yang pertama, maka hukum wajib didasarkan padanya karena hati-hati, kecuali gadis lebih cepat dewasa daripada pemuda sehingga usia balighnya dikurangi setahun dari usia baligh pemuda, karena satu tahun mencakup empat musim yang sesuai struktur/komposisi tubuh.

(Abu Yusuf dan al-Hasan asy-Syaibani berpendapat mengenai balighnya gadis dan pemuda dengan sempurna usia 15 tahun). Ini juga merupakan suatu riwayat dari Imam Abu Hanifah, (dan inilah yang difatwakan),

karena keumuman adat, karena secara umum berbagai baligh tampak pada masa ini, sehingga ulama menjadikan masa tersebut sebagai tanda baligh bagi hak orang yang tidak tampak tanda balighnya. (Minimal masanya), maksudnya usia dewasa (bagi pemuda adalah 12 tahun dan bagi gadis adalah 9 tahun), karena terkadang tanda baligh bagi keduanya wujud pada usia ini. (Apabila mereka mendekati baligh), maksudnya mendekati usia baligh yakni mencapai usia ini (dan mereka mengakui baligh maka mereka berdua seperti orang baligh secara hukum), karena baligh ketika bisa hasil pada usia ini meskipun langka, maka termasuk perkara yang diketahui dari keduanya seperti haid, sebelum keduanya mengakui baligh secara pasti.

Jawaban b

Penghulu wajib mengabaikan peraturan menteri agama tersebut dengan menetapkan wali nikah yang sudah baligh meski belum berumur 19 tahun.

Dasar Pengambilan Hukum

Ghayah Talkhish al-Murad, 263:

(مسئلة) يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْوُقُوْفُ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ الَّتِيْ أُقِيْمَ لَهَا وَلَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى أَحْكَامِ السِّيَاسَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَى قَصْرِ مَنْ تَعَدَّى ذٰلِكَ وَزَجْرِهِ وَتَعْزِيْرِهِ وَتَعْرِيْفِهِ أَنَّ الْحَقَّ كَذَا.

(Masalah) Wajib bagi hakim berpedoman pada hukum-hukum syariat yang ditegakkan untuknya, dan tidak mengikuti hukum-hukum *siyasah*. Bahkan wajib meringkus orang yang mengikuti hal tersebut, mencegah, mempermalukan dan memberitahukan kepadanya bahwa yang benar adalah begini.

Jawaban c

Peraturan tersebut perlu direvisi dengan redaksi: "*Seseorang bisa menjadi wali nikah bila sudah baligh yang ditandai dengan ihtilam, inzal, atau usianya sudah mencapai genap 15 tahun, dan Rusyd, yaitu berakal dan memahami kemaslahatan pernikahan.*"

Daftar Pustaka

'Aun al-Ma'bud bi Syarh Abi Dawud

'Ibn Ushul al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf

'Umdah al-Mufti wa al-Mustafti li Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal

'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari

Adab al-Islam fi Nizham al-Usrah li Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani

Ad-Din wa as-Daulah wa Tathbiq asy-Syari'ah li Muhammad Abid al-Jabiri

Ad-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar

Ad-Durr al-Mukhtar, al-Maktabah asy-Syamilah

Ad-Durru an-Nadhid li Syaikh al-Harawi

Adhwa` al-Bayan

Adillatu ad-Din Wa al-Haj

Adz-Dzakhirah, Dar al-Gharbi al-Islami

Ahkam Ahl adz-Dzimmah li Ibn al-Qayyim, al-Maktabah asy-Syamilah

Ahkam al-Fuqaha

Ahkam al-Fuqaha, Khalista

Ahkam as-Sulthaniyah, Jami' al-Fiqh al-Islami

Ahkam Taghyir Qimah al-'Amlah an-Naqdiyah wa Asyriha fi Tasdid al-Qardh

Al-'Aziz

Al-A'lam; Qamus Tarajim li ar-Rijal wa an-Nisa` wa al-Musta'ribin wa al-Mustasyriqin, Bairut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002 M

Al-Adab an-Nabawi, Dar al-Fikr

Al-Adzkar an-Nawawi

Al-Ahkam as-Sulthaniyah

Al-Ahkam as-Sulthaniyah, al-Maktabah asy-Syamilah

Al-A'mal al-Fida`iyah Shuwaruha wa Ahkamuha

Al-Amradh al-Ijtima'iyah

Al-Amru bi at-Tiba'i wa Nahi 'ani al-Ibtida'i, Jalaluddin As-Suyuti, Dar Ibn Qayyim

Al-Anshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf 'ala Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal

Al-Anwar li A'mal al-Abrar, Dar adh-Dhiya`

Al-Asybah wa an-Nadha`ir, Jami' al-Fiqh al-Islami

Al-Asybah wa an-Nazha`ir li Ibn Najim

Al-Asybah wa an-Nazha`ir, Dar al-Kutub al-'Arabi

Al-Bahr al-Muhith

Al-Bahr ar-Ra`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah

Al-Bahr ar-Ra`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq, Dar al-Kutub al-Islami

Al-Bahr ar-Ra`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq, Jami' al-Fiqh al-Islami

Al-Bahr ar-Ra`iq, al-Marja' al-Akbar

Al-Bujairami 'ala Fath al-Wahhab

Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Dar al-Fikr

Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Jami' al-Fiqh al-Islami

Al-Fatawa al-Hindiyyah li Jama'ah min 'Ulama al-Hindi, Dar al-Fikr

Al-Fatawa al-Iqtishadiyah

Al-Fatawa asy-Syar'iyah al-Masirah li Syaikh Ahmad Hasan Muslim

Al-Fatawa asy-Syar'iyyah wa al-Buhuts al-'Ilmiyyah li al-Mufti Syaikh Hasanain Makhluf

Al-Faw`aid al-Madaniyah al-Kubra li Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi

Al-Fawa`id al-Janiyah, Dar al-Fikr

Al-Fawa`id al-Makiyah fi Sab'ah al-Kutub al-Mufidah li as-Sayyid Alawi Ahmad as-Saqqaf

Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Dar al-Fikr

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dar al-Fikr

Al-Furuq au Anwar al-Buruq ma'a al-Hawamisy, Bairut: 'Alam al-Kutub

Al-Fushul fi al-Ushul

Al-Futuhat al-Rabbaniyah 'ala al-Adzkar an-Nawawiyah, Dar Ihya` at-Turats al-'Arabi

Al-Fuyudhat al-Rabbaniyah

Al-Ghaits al-Hami' 'ala Syarh Jam' al-Jawami'

Al-Hawi al-Kubra fi Fiqh asy-Syafi'i

Al-Hawi al-Kubra, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah

Al-Hawi li al-Fatawa, Dar al-Fikr

Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi, Jami' al-Fiqh al-Islami

Al-Idhah li al-Imam an-Nawawi

Al-Inshaf li al-Muradi, Jami' al-Fiqh al-Islami

Al-Inshaf, al-Maktabah asy-Syamilah
Al-Iqna', al-Maktabah asy-Syamilah
Al-Iqna' fi Hall Alfadz Abi Syuja'
Al-Itqan
Al-Ittihaf
Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, al-Maktabah asy-Syamilah
Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1414 H/1993 M.
Al-Jami' ash-Shaghir, Dar al-Ma'rifah
Al-Jihad fi al-Islam
Al-Kalim ath-Thayib Fatawa 'Ushriyah li Ali Jum'ah Muhammad al-Hanafi
Al-Kawakib al-Azhar Syarh al-Fiqh al-Akbar
Al-Mabsuth, Bairut: Dar al-Ma'rifah
Al-Mabsuth, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah; 1414 H/1993 M
Al-Madkhal fi al-Fiqh al-'Amm, Beirut: Dar al-Fikr
Al-Madkhal, Kairo: Maktabah Dar at-Turats
Al-Mahalli Hamisy al-Qulyubi
Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, al-Muniriyah
Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Maktabah al-Irsyad
Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Maktabah Syamilah
Al-Manhal al-'Adzbu al-Maurud Syarah Sunan Abi Dawud
Al-Mantsur fi al-Qawa'id
Al-Mashdar as-Sabiq
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Dzat as-Salasil
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Dar ash-Shafwah, 1414 H/1993 M
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Dzat as-Salasil, 1404 H/ 1983 M
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, al-Maktabah asy-Syamilah
Al-Milal wa an-Nihal
Al-Minhaj al-Qawim
Al-Minhaj, al-Maktabah asy-Syamilah
Al-Mizan al-Kubra
Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah
Al-Mu'jam al-Ausath li ath-Thabrani
Al-Mubdi Syarh al-Muqni, al-Marja' al-Akbar

Al-Mubdi Syarh al-Muqni, Jami' al-Fiqh al-Islami

Al-Mudawwanah, Jami' al-Fiqh al-Islami

*Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar`ah li ad-Duktur 'Abdul Karim Zaidan*, Bairut: Mu`assasah ar-Risalah, 1413 H/1993 M

Al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Kharaqi

Al-Mughni li Ibn Qudamah

Al-Mughni, Jami' al-Fiqh al-Islami

Al-Muhadzdzab, al-Maktabah asy-Syamilah

Al-Muhadzdzab, al-Marji' al-Akbar

Al-Muharrar al-Wajiz fi at-Tafsir al-Kitab al-'Aziz, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H/2001 M.

Al-Muqararat al-Mu`tamar

Al-Mushannaf

Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh, Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Al-Muwafaqat

Al-Qawa`id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Dar Shadir

Al-Qur'an al-Karim

Al-Umm li asy-Syafi'i, Dar al-Wafa'

Al-Umm, al-Maktabah asy-Syamilah

Al-Washiyah al-Wajibah 'ala Madzhab al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man, al-Maktabah asy-Syamilah

Al-Wasith

Al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibn Idris pada *Syarh*nya, Dar al-Hawi

An-Nafa`is al-'Ulwiyah fi al-Masa`il ash-Shufiyah li Sayyid Abdullah Alawi al-Haddad

An-Nahdhah al-Islamiyah

An-Nasha`ih ad-Diniyah li Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad

An-Nihayah

Asna al-Mathalib Syarh Raudh ath-Thalib, Jami' al-Fiqh al-Islami

Asna al-Mathalib, Dar al-Kutb al-'Ilmiyah

As-Sa`il al-Jarar

As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'iy wa ar-Ra'iyah

As-Sunnah al-Muthahharah

Ath-Thabaqat asy-Syafi'iyah al-Kubra

Ats-Tsimar al-Yani'ah Syarh al-Riyadl al-Badi'ah

At-Taj al-Mazhab li Ahkam al-Mazhab

At-Tanbih

At-Tasyri' al-Jana-i al-Islami, Mu`ssasah ar-Risalah

At-Termasi, Matba'ah Al-'Amirah Asy-Syarqiyah

At-Tuhfah fi Syarh al-Bahjah

Az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba`ir

Bada`i' ash-Shana`i', Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M

Bahjah al-Wasail

Bariqah Mahmudiyah fi Syarh Thariqah Muhammadiyah wa Syari'ah Nabawiyah fi Sirah Ahmadiyah, CD Jami' al-Fiqh al-Islami, al-Ishdar aal-Awwal

Bughyah al-Mustarsyidin, al-Marja' al-Akbar

Bughyah al-Mustarsyidin, Dar al-Fikr

Bughyah al-Mustarsyidin, Maktabah Asy-Syamilah

Bulghah ath-Thulab

Bulugh al-Amniyah

Bulugh al-Maram

Busyra al-Karim bi Syarh Masa`il at-Ta'lim, Dar al-Minhaj

Dala`il al-'Aliyah; As`ilah wa Ajwibah fi at-Tashawwuf wa Thariqah as-Sadat an-Naqsyabandiyah, Dr. Najmuddin al-Kurdi

Dalil al-Falihin

Dalil al-Haj al-Mushawwaro, karya: Shaleh Muhammad bin Jamal

Durar al-Hukkam Syarh Ghurar al-Hukkam

Faidh al-Bari

Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' ash-Shaghir

Fatawa 'Ashriyah Fadhilah asy-Syaikh 'Ali Jum'ah

Fatawa al-Azhar

Fatawa ar-Ramli

Fatawa as-Subki

Fatawa asy-Syaikh Husain Ibrahim al-Maghrabi al-Maliki fiy Dhamman Kitab Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain

Fatawa Qadhi Khan li asy-Syaikh Nizham

Fatawi Haditsiyah li Ibn Hajar

Fath al-'Alam

Fath al-'Ali al-Malik fi Fatawa 'ala Madzhab al-Imam Malik

Fath al-Anam 'ala Syarh al-Mursyid al-Anam
Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Bairut: Dar al-Ma'rifah
Fath al-Ilah al-Manan Fatawa asy-Syaikh al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Fiqhiyah Salim Sa'id Bakir Baghitsan asy-Syafi'iy at-Tarimi al-Hadhrami
Fath al-Jawad 'ala Nazhm Ibn al-'Imad
Fath al-Mu'in pada *I'anah ath-Thalibin*, Maktabah Syamilah
Fath al-Qadir
Fath al-Qarib al-Mujib pada *at-Taqrib*
Fath al-Qarib pada *Hasyiyah al-Bajuri*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah
Fath al-Wahab, Toha Putera
Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H
Fath al-Wahhab dan *at-Tajrid li Naf' al-'Abid*, Dar al-Fikr al-'Arabi
Fath al-Wahhab Syarh al-Manhaj, al-Marja' al-Akbar
Fiqh al-Islami wa Adillatuh, al-Maktabah asy-Syamilah
Fiqh Taghyir al-Munkar. CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.
Ghamz 'Uyun al-Basha'ir fi Syarh al-Asyhbah wa an-Nazha'ir
Ghayah al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul
Ghayah at-Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad
Ghurar al-Bahiyah
Hamisy al-Bajuri
Hamisy Fath al-Wahab
Hamisy pada *I'anah ath-Thalibin*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
Hamisy Sab'ah Kutub Mufidah
Hasyiyah 'Umairah
Hasyiyah ad-Dusuqi
Hasyiyah al-'Athar
Hasyiyah al-'Adawi
Hasyiyah al-Bajuri
Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib, Dar al-Fikr
Hasyiyah al-Bujairami 'ala Fath al-Wahab, (at-Tajrid li Naf'i al-'Ibad)
Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj, Jami' al-Fiqh al-Islami
Hasyiyah Ali Syibramalisi 'ala Nihayah al-Muhtaj
Hasyiyah al-Idhah

Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj, Dar Ihya` at-Turats al-'Arabi
Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Umairah, al-Marja' al-Akbar
Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah
Hasyiyah al-'Ubbadi pada *Hawasyi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj,* Mesir: at-Tijariyah al-Kubra.
Hasyiyah asy-Syarqawi
Hasyiyah asy-Syirwani
Hasyiyah ath-Thahthawi 'ala ad-Dar al-Mukhtar
Hasyiyah Ibn 'Abidin
Hasyiyah Qulyubi 'ala al-Mahalli, Jami' al-Fiqh al-Islami
Hasyiyah Qulyubi pada *Hasyiyatan,* Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1375 H/1950 M
Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar
Hasyiyah Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj
Hawasyi al-Madaniyah, Musthafa al-Halabi
Hawasyi asy-Syirwani, Jami' al-Fiqh al-Islami
Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh, Dar al-Fikr
I'anah ath-Thalibin, al-Maimaniyah
I'anah ath-Thalibin, Dar al-Fikr
I'anah ath-Thalibin, Maktabah asy-Syamilah
I'lam as-Sajid bi Ahkam al-Masajid, Dar al-Kutb al-'Ilmiyah
Idhah al-Ahkam limaa Ya'khudzu al-'Ummal al-Hukkam li Ibn Hajar al-Haitami
Ihkam al-Ahkam Syar 'Umdah al-Ahkam
Ihya' 'Ulum ad-Din, Toha Putra
Iqadh al-Himam Syarh Matn al-Hikam
Irsyad al-Fuhul
Irsyad al-Huyara fi Tahdir al-Muslimin min Madaris an-Nashara, (Yusuf an-Nabhani)
Irsyad al-'Ibad
Is'ad ar-Rafiq, Maktabah Dar Ihya'
Is'ad ar-Rafiq, Surabaya: Maktabah al-Hidayah
Ithaf as-Sadah al-Muttaqin, Bairut: Mu`assasah at-Tarikh al-'Arabi, 1414 H/1994 M
Itsmid al-'Ainain pada *Bughyah al-Mustarsyidin,* al-Haramain

Ittikhaf al-Khalan

Jam' ar-Risalatain fi Ta'addud al-Jum'atain

Jawahir al-'Uqud wa Mu'in al-Qadhah wa al-Muqi'in wa asy-Syuhud, Maktabah asy-Syamilah

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Kanz ar-Raghibin pada *Hasyiyatan Qulyubi wa 'Umairah*, Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabi.

Kasyf al-Ghitha'

Kasyf al-Ghummah

Kasyf al-Qina' 'an Matn al-Iqna', Dar 'Alam al-Kutub

Kasyifah as-Saja

Kifayah al-Akhyar, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah

Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1409 H/1989 M

Mafahim Yajibu an Tushahhah

Majalah Nurul Islam, No. 6

Majmu' adh-Dhamanat

Majmu'ah Rasa'il Ibn Abidin

Makarim al-Akhlaq

Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid, Isa al-Halabi

Mathalib Ulin Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha

Mauhibah Dzi al-Fadhl, Al-Amirah asy-Syarafiyah

Mau'idat al-Mu'minin

Mawahib al-Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil

Mawahib as-Saniyah dan *al-Fawa'id al-Janiyah*

Minah al-Khalil Syarh Mukhtashar Khalil, Jami' al-Fiqh al-Islami

Minhaj al-'Abidin

Minhaj al-Muhaditsin Syarah Muslim

Mirqat as-Su'ud

Mu'annats Musyawarat wa Fatawa li Syaikh Ramadhan al-Buti

Mughni al-Muhtaj, al-Maktabah asy-Syamilah

Mughni al-Muhtaj, Dar al-Ma'rifat: 1418 H/1997 M

Mughni al-Muhtaj, Jami' al-Fiqh al-Islami

Muhadharat al-Udaba' wa Muhawarat asy-Syu'ara' wa al-Bulagha' li Abi al-

Faraj al-Ashfihani, al-Maktabah asy-Syamilah
Muqarrarat Muktamar Jamiyyah Ahli at-Thariqah an-Nahdliyyah, soal no. 107
Musnad al-Imam Ahmad
Nail al-Authar
Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Jami' al-Fiqh al-Islami
Nihayah al-Muhtaj, al-Maktabah asy-Syamilah
Nihayah al-Muhtaj, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
Nihayah ar-Rutbah azh-Zharifah fi Thalab al-Hisbah asy-Syarifah, CD Jami' al-Fiqh al-Islami, al-Ishdar ast-Tsani.
Nihayah az-Zain, al-Maktabah asy-Syamilah
Nihayah az-Zain, al-Marja' al-Akbar
Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Ma'ashir li ad-Duktur Wahbah az-Zuhaili
Qala'id al-Khara'id li al-Faqih Abdullah Muhammad Baa Qusyair al-Hadlrami asy-Syafi'i,
Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
Qawanin al-Ahkam asy-Syar'iyah
Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain
Qurrah al-'Ain Fatwa Syaikh Muhammad Ali al-Maliki
Radd al-Muhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar, Dar al-Fikr
Radd al-Muhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar, Jami' al-Fiqh al-Islami
Rahmah al-Ummah
Raudhah al-Muhadditsin
Raudhah ath-Thalibin, al-Marja' al-Akbar
Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam
Risalah fi Hukm Bai' al-Ahbas
Riyadh ash-Shalihin wa-Syarh Dala'il al-Falihin
Sab'ah Kutub Mufidah
Shafwat al-Tafasir
Shahih al-Bukhari
Shahih Ibn Hibban
Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, al-Mathba'ah al-Mishriyah bi al-Azhar. 1349 H/1930 M.
Siraj ath-Thalibin
Sullam at-Taufiq

Sunan Abi Dawud
Sunan al-Tirmidzi
Sunan Dar al-Quthni
Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah
Syarh al-Bahjah al-Wardiyah
Syarh al-Idhah, Dar al-Hadits
Syarh al-Kawakib al-Munir
Syarh al-Mahalli
Syarh al-Yaqut an-Nafis
Syarh an-Nawawi 'ala Muslim
Syarh ar-Raudh
Syarh as-Suyuthi li Sunan an-Nasa`i
Syarh Jauhar at-Tauhid
Syarh Kasyifah as-Saja 'ala Safinah an-Naja
Syarh Mukhtashar Khalil, Jami' al-Fiqh al-Islami
Syarh Shahih al-Bukhari, CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.
Syarh Sullam at-Taufiq
Syarh Zad al-Mustaqni' li asy-Syanqithi, al-Maktabah asy-Syamilah
Syu'b al-Iman li al-Baihaqi
Ta'liqat at-Tadzhib
Tabyin al-Haqa`iq Kanz ad-Daqa`iq
Tabyin al-Haqa`iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq, al-Maktabah asy-Syamilah
Tadzhib al-Furuq wa al-Qawa'id as-Saniyah fi al-Asrari al-Fiqh
Tafsir al-Alusi
Tafsir al-Baghawi
Tafsir al-Jalalain, Kairo: Dar al-Hadits.
Tafsir al-Khazin
Tafsir al-Mawardi an-Nukat wa al-'Uyun, al-Maktabah asy-Syamilah
Tafsir an-Nasafi
Tafsir ar-Razi
Tafsir ath-Thabari, al-Maktabah asy-Syamilah
Tafsir at-Tahrir wan at-Tanwir, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah, 1984
Tafsir Ayat al-Ahkam, CD al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdar ats-Tsani, 2.11.

Tafsir Haqi
Tafsir Ibn Katsir, al-Maktabah asy-Syamilah
Tafsir Ibn Katsir, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi
Tafsir Lubab at-Ta'wil fi Ma'alim at-Tanzil
Tafsir Munir
Tafsir Ruh al-Bayan
Tahdzib al-Mudawwanah, al-Maktabah asy-Syamilah
Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, al-Maktabah as-Salafiyah
Talqih al-Afham al-'Aliyah bi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah
Tanbih al-Anam
Tarsyih al-Mustarsyidin
Tauzi' Mu`assasah al-Ittihad al-Wathani, 1998 M
Thariq al-Hushul fi Ghayah al-Wushul
Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
Tuhfah al-Muhtaj dan *Hawasyi asy-Syirwani*, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra
Tuhfah al-Muhtaj pada *Hawasyai asy-Syirwani wa al-'Abbadi*, Jami' al-Fiqh al-Islami
Tuhfah al-Muhtaj pada *Hawasyai asy-Syirwani wa al-'Ubbadi*, Mesir: at-Tijariyah al-Kubra
Tuhfah al-Murid Syarah Jauhar at-Tauhid
Tuhfah ath-Thullab Hamisy dari kitab *Fath al-Wahab*
Umdah as-Salik
Ushul ad-Da'wah, karya Dr. Abdul Karim Zaidan
Ushul al-Fiqh al-Islami
Ushul al-Fiqh li Abi Zahra'
Yas-aluka 'an ad-Din wa al-Hayat
Zad al-Masir

Lampiran

Tim Pembukuan

Pengarah : H. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I
Ketua : H. Ali Maghfur Syadzili Isk, S.Pd.I
Sekretaris : Ahmad Muntaha AM
Penerjemah :

1. H. Ali Maghfur Syadzili Isk, S.Pd.I
2. M. Ma'ruf Khozin
3. Anang Darunnaja
4. Ahmad Fauzi Hamzah Syams
5. Ahmad Muntaha AM
6. Muhammad Afif As'ad Khudlori
7. Mas Ahmad Gholib Basyaiban

Pentashih :

1. Drs. KH. Syafruddin Syarif
2. KH. Yasin Asmuni
3. Drs. KH. Romadlon Khotib
4. KH. Muhibbul Aman Ali
5. KH. Ardani Ahmad
6. KH. Farihin Muhsan
7. H. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I
8. H. Athoillah Anwar
9. H. Azizi Hasbulloh
10. H. Achmad Shampton Masduqie
11. H. MB. Firjhaun Barlaman
12. H. Ali Maghfur Syadzili Isk, S.Pd.I
13. Ahmad Muntaha AM
14. M. Ma'ruf Khozin
15. H. Zainul Alam, M.HI
16. H. Muhammad Mughits
17. H. Aria Muhammad, Lc.
18. Anang Darunnaja
19. Ahmad Fauzi Hamzah Syams
20. H. Makmun Murad Mahfudh
21. Ali Romzi
22. Dr. Nasiri, M. HI
23. Faris Khoirul Anam, Lc., M.HI
24. Dr. Mujab Masyhudi
25. Ali Musthofa
26. H. Shihabuddin Sholeh, S.Pd.I

Daftar Isi Tematik

I. Akidah dan Fikih Mazhab

No Masalah **Hlm**

370. Penafsiran Analogi 4
378. Fatwa Yoga di Malaysia 38
393. Jasa Orang Pintar 113
434. *Takfir* dan Munafik 371
437. Validitas Data Kitab 400
1. Kriteria Faham Keagamaan Sempalan 543
5. Operasionalisasi *Maqashid asy-Syari'ah* 579
9. Dasar Memilih Alternatif Kebijakan 600

II. Fikih *Thaharah*

No Masalah **Hlm**

422. Air Sedikit di Toilet 270

III. Fikih Shalat

No Masalah **Hlm**

392. Pergesaran Arah Kiblat 107
398. Bekas Sujud di Jidat 139
399. *Qadha'* Shalat 152
408. Solat Pasien yang Memakai Kateter 207
416. Pengembangan *'Illat Ta'addud al-Jum'ah* 240
417. Aturan *Shaf* Jamaah Wanita 246
420. Dampak Perbedaan Idul Adha pada Ibadah Qurban 262
446. Kriteria *Balad al-Jum'ah* dan *Balad az-Zakah* 443
455. Penetapan Awal Dzul Hijjah 511

IV. Bacaan

No Masalah **Hlm**

443. Azan Saat Bencana 427

V. Fikih Jenazah

No Masalah **Hlm**

413. Problem Jenazah dalam Peti 226

VI. Fikih Zakat

No Masalah **Hlm**

397. Perbedaan Pemahaman tentang Makna *Sabilillah* dalam Zakat 133
402. Penjualan Zakat Fitrah 181
404. Utang Bagi Hasil dan Zakatnya 189
404. Belanja via Sales dan Zakatnya 231
423. Penggabungan Panen dalam Zakat 275

426. Zakat Tanaman Karet dan Kelapa Sawit 303
442. Mempertegas Perbedaan Amil dan Panitia Zakat 425
14. Ketentuan Amil Zakat 675

VII. Fikih Haji dan Umrah

No Masalah **Hlm**
395. Menghindari *Dam Tamattu'* 125
453. Antara Umrah dan Haji 487

VIII. Fikih *Mu'amalah* (Jual Beli dan Selainnya)

No Masalah **Hlm**
375. *Software* Windows 24
379. Penertiban PKL dan Pemanfaatan Barang Sitaan 41
389. Hak atas Bonus/Diskon Belanja 95
405. Pinjaman Bersyarat 197
418. *Murabahah* ala BMT 249
421. Mencari Untung Melalui Akad Gadai 267
427. Dana Talangan Haji 308
430. Harga Jual Barang Bersubsidi 338
436. HAKI (Hak Cipta Karya Ilmiah) dan Kitab Karya Ulama *Salaf*. 394
441. Jual Beli Galon Air Mineral 421
445. Menyebar Uang Saat Pembacaan Solawat 437
451. Hibah Ayah kepada Anaknya (1) 482
452. Hibah Ayah kepada Anaknya (2) 487

IX. Fikih Wakaf dan Fasilitas Umum

No Masalah **Hlm**
372. Menyewakan Menara Masjid 9
376. Memanfaatkan Lahan Wakaf 30
384. Memproses Qurban Menggunakan Fasilitas Masjid 74
386. Penggunaan Dana Masjid 82
403. Memperjelas Keputusan Pemasangan Tower di Menara Masjid 184
424. Madrasah di Atas Tanah Masjid 281
431. Galian Tanah Masjid untuk Perataan Jalan 343
432. Tasaruf Kekayaan Masjid yang Berkecukupan 350
448. Status Bangunan Masjid di Atas Lahan Pengairan 453
449. Hukum Renovasi Masjid yang Kondisinya Masih Baik 467
450. Tukar Guling Tanah Wakaf Aset Masjid dan Perluasan Masjid 472
454. Peralihan *Nazhir* Wakaf 501
456. Mushalla Seperti Masjid 516
457. Menghutangkan Kas Masjid dan Madrasah 527
10. Tukar Guling Tanah Wakaf (Komplit) 611
11. Legalitas Wirausaha DAUM (Dana Umum) Harta Wakaf (1). 631

12. Legalitas Wirausaha DAUM (Dana Umum) Harta Wakaf (2). 639
9. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) .. 807

X. Fikih *Munakahat* (Pernikahan dan Seputarnya)

No	Masalah	Hlm
373.	Dilema Wali Nikah Anak Zina	19
374.	Perpindahan Janin Secara Misterius	22
406.	Dilema Talak Tiga	201
428.	Penceraian oleh Hakim	319
429.	*Muhakkam* dalam Nikah dan *Fasakh*	333
433.	Nikah *Misyar*	352
447.	Calon Suami Pilihan Orang Tua	445
4.	Status Nasab Anak	573

XI. Akhlak dan Fikih *Tarbiyah* (Pendidikan)

No	Masalah	Hlm
394.	Berbakti Kepada Orang Tua, Guru dan Mertua	121
8.	Baiat dalam Pengamalan Agama	593
4.	Pakta Integritas Anti Poligami	760
5.	Nikah Sirri Masuk Penjara	769
6.	*Shighat Taukil* (Mewakilkan) Akad Nikah	779
7.	Tidak Tercatatnya Rujuk Nikah	787

XII. Fikih Makanan

No	Masalah	Hlm
387.	Pembagian Daging Qurban	87
407.	Membunuh Hewan untuk Umpan	204
440.	Perasa pada Makanan/Minuman	416

XIII. Fikih Medis

No	Masalah	Hlm
371.	Imunisasi dalam Pandangan Fikih	7
396.	Operasi Caesar Karena Ingin Menepatkan Tanggal Lahir	128
400.	Program Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah	171

XIV. Fikih Wasiat

No	Masalah	Hlm
1.	Wasiat *Wajibah*	711

XV. Fikih Sosial

No	Masalah	Hlm
385.	Anggapan Mengamen Lebih Baik daripada Meminta-minta	79
388.	Ibu Nyai Menjadi *Muballighah*	93
444.	Perilaku dan Tindakan Orang Gila	432

6. Prinsip Jam'iyah NU: الأخذ بالجديد الأصلح 583
7. Kekebalan Jurnalistik 584

XVI. Fikih Seni Budaya

No Masalah **Hlm**
409. Menggambar Berdasarkan Imajinasi 211
415. Perayaan Ulang Tahun 236

XVII. Fikih Yustisi (Peradilan)

No Masalah **Hlm**
377. Sistem Pengadilan Berjenjang 34
380. Kasus Salah Tangkap 46
383. SP3 dan Gradasi Penyidikan ke Penyelidikan 52
391. Pembuktian Terbalik Bagi Pejabat Negara 107
411. Membunuh Karena Mencari Selamat dan Kadar *Diyat* Uang 218
419. Pembunuhan Karakter 253
435. Jasa Pelayanan Lembaga Pengadilan 384
439. *Money Laundry* 411
3. Penyitaan Aset sebagai Sanksi Tindak Pidana 754

XVIII. Fikih *Siyasah* (Politik, Kenegaraan, dan Kebangsaan)

No Masalah **Hlm**
382. Legitimasi Pemerintahan 66
383. Sistem *Khilafah* dan Demokrasi 70
390. Nuklir 98
401. Alokasi Dana Pendidikan yang Tidak Merata 175
410. Konversi BBM Menjadi Gas Elpiji 215
412. Kebohongan Publik 223
425. Pemberian Calon Pejabat untuk Memilih 287
438. Demokrasi dan Pemilu Secara Langsung 403
3. Pemilukada Langsung 557
13. Penyadapan dalam Konteks Penegakan Hukum dan Hubungan Antarnegara Konteks Penegakan 661
2. Memperjelas Status *Dar* dan *Daulah* Indonesia 739
8. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam 790
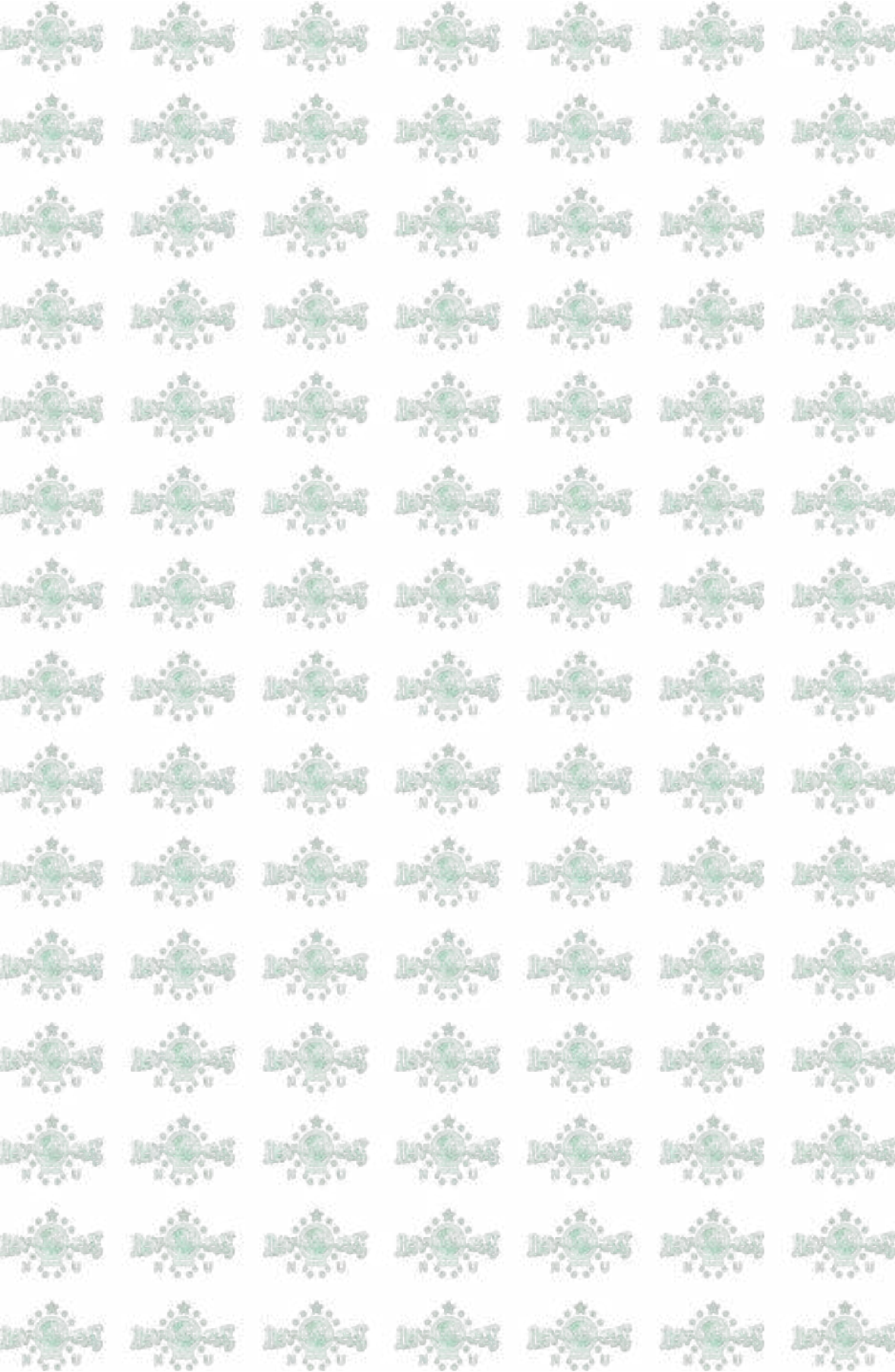
NU MENJAWAB
PROBLEMATIKA UMAT

Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (2009-2014)

Fikih merupakan petunjuk bagi seluruh perilaku dan penjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Fikih merupakan tuntunan praktis mempraktekkan agama dalam berbagai bidang kehidupan, dari soal beribadah hingga berpolitik. Namun demikian, fatwa-fatwa *fardiyah* (perorangan) pada masa yang akan datang akan banyak menimbulkan berbagai problema baru di tengah masyarakat dengan bebasnya arus globalisasi dan paham trans nasional, apalagi terdapat kelemahan dalam merespon kebutuhan masa kini dari sisi *tathawwur masalik illatnya*. Semoga amal jariyah berupa terbitnya buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** ini menjadi solusi mantap dan kokoh bagi seluruh kaum muslimin dan khususnya bagi warga *Nahdliyyin*. **[KH. Miftahul Achyar Abdul Ghoni]**

Buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** ini sekaligus menjadi bukti, Nahdlatul Ulama senantiasa berupaya memberikan panduan terkait masalah sosial-keagamaan yang dihadapi masyarakat sesuai kecenderungan zaman. Dokumentasi ini sekaligus menjadi saksi atas potret perjalanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia dan dinamika pemikiran keagamaan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. **[KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM]**

Buku **NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009 - 2014** memuat 111 masalah, serta dilengkapi harakat dan terjemah. Untuk memudahkan perujukan konten, dalam buku ini disajikan **Daftar Isi Kronologis** tahun per tahun, dan **Daftar Isi Tematik** yang terbagi dalam 18 tema: 1) Akidah dan Fikih Mazhab, 2) Fikih *Thaharah*, 3) Fikih Shalat, 4) Bacaan, 5) Fikih Jenazah, 6) Fikih Zakat, 7) Fikih Haji dan Umrah, 8) Fikih *Mu'amalah*, 9) Fikih Wakaf, 10) Fikih *Munakahat*, 11) Akhlak dan Fikih *Tarbiyah*, 12) Fikih Makanan, 13) Fikih Media, 14) Fikih Wasiat, 15) Fikih Sosial, 16) Fikih Seni Budaya, 17) Fikih Siyasah, dan 18) Fikih *Siyasah*. Selain memuat kategori Keputusan Bahtsul Masail *Waqi'iyah*-aktual faktual-, buku **Jilid 2** ini juga memuat kategori Keputusan Bahtsul Masail *Maudhu'iyah*-tematik komprehensif- dan Keputusan Bahtsul Masail *Qanuniyah*-terkait peraturan perundang-undangan-. Semoga menjadi dokumen rumusan Hukum Islam Aktual yang benar-benar akurat dan *mu'tamad* ala Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah, sehingga diketahui secara jelas bagaimana sebenarnya *manhaj* Nahdlatul Ulama dalam merumuskan persoalan hukum Islam sekaligus perbedaannya dengan *manhaj* perumusan hukum Islam di luarnya. **[KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I]**